

Peraturan Gubernur No. 071 Tahun 2023

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 071 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan Nomor 050/264A/SJ. tanggal 12 Januari 2007 bahwa Pemerintah Provinsi harus mempunyai Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan perencanaan kerja pemerintah sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.8.2/7391/Bangda tanggal 22 Juni 2023, perlu untuk ditindaklanjuti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
47. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
48. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398) ;
49. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ/ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
50. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Menteri Dalam Negeri;
51. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
52. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventrisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
53. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
54. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
55. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

56. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 12);
57. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
58. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
59. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 87);
60. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
61. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 020 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 20);
62. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 021 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 21);
63. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 022 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 22);
64. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 023 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
65. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 024 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 24);
66. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 25);
67. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 26);

68. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 027 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 27);
69. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 028 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 28);
70. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 29);
71. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 030 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 30);
72. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 31);
73. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 032 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 32);
74. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 033 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 33);
75. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 34) ;
76. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 035 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
77. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 36);
78. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 037 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 37);
79. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 38);

80. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 039 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 39);
81. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 040 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 40);
82. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 41);
83. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 42);
84. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 43);
85. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 044 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 44);
86. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 045 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 45);
87. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 046 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perdagangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 46);
88. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 047 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 47);
89. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 048 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 48);
90. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 49);
91. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 050 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 50);

92. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 051 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 51);
93. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 052 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Penghubung (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 52);
94. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 053 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 53);
95. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 054 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 54);
96. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 055 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 55);
97. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 056 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Daerah terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II  
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pasal 2

- (1) Program Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.
- (2) Rincian dari Program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024.

### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi dan misi Gubernur yang dituangkan dalam RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

### Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

Bab I Pendahuluan;

Bab II Gambaran umum kondisi Daerah;

Bab III Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

Bab IV Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

Bab V Arah Kebijakan pembangunan kabupaten/kota;

Bab VI Rencana kerja dan pendanaan Daerah;

Bab VII Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan

Bab VIII Penutup.

### Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Renja PD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 27 Juni 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2023 NOMOR 71

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 071 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024

**RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN TAHUN 2024**



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum .....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-10
1.4 Maksud Dan Tujuan.....	I-11
1.5 Sistematika Dokumen RKPD .....	I-12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-2
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi .....	II-2
2.1.1.2 Topografi .....	II-5
2.1.1.3 Geologi .....	II-7
2.1.1.4 Hidrologi .....	II-9
2.1.1.5 Meteorologi dan Klimatologi.....	II-11
2.1.1.6 Penggunaan Lahan .....	II-13
2.1.1.7 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-17
2.1.1.8 Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-20
2.1.1.9 Penduduk Menurut Pekerjaan.....	II-21
2.1.1.10 Penduduk Menurut Usia Sekolah.....	II-22
2.1.1.11 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-23
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-25
2.1.2.1 Wilayah Metropolitan Banjarmasin.....	II-27
2.1.2.2 Wilayah Banua Anam – Pusat: Tanjung Dan Sebagai Hub: Kandangan .....	II-28
2.1.2.3 Kawasan Industri & Pesisir – Pusat Ki Batulicin – Kotabaru – KEK Mekar Putih .....	II-28
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	II-29
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-32
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-32
2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II-32
2.2.1.2 Struktur Perekonomian Daerah.....	II-35
2.2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi .....	II-38
2.2.1.4 Perkembangan Inflasi .....	II-43
2.2.1.5 Gini Rasio .....	II-48
2.2.1.6 Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Wilayah) .....	II-49
2.2.1.7 Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-51
2.2.1.8 Angka Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan, dan Garis Kemiskinan.....	II-51
2.2.1.9 Indeks Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan.....	II-55
2.2.1.10 Indeks Pembangunan Manusia.....	II-56
2.2.1.11 Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS).....	II-58
2.2.1.12 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS).....	II-59
2.2.1.13 Angka Harapan Hidup (AHH).....	II-60
2.2.1.14 Angka Kematian Ibu (AKI) .....	II-62
2.2.1.15 Angka Kematian Bayi dan Balita.....	II-63
2.2.1.16 Tingkat Kesakitan .....	II-64
2.2.1.17 Status gizi Masyarakat.....	II-65
2.2.1.18 Rata rata Pengeluaran Perkapita.....	II-67
2.2.1.19 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-68
2.2.1.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	II-70





2.2.1.21	Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja .....	II-71
2.2.1.22	Jumlah Penduduk Bekerja .....	II-71
2.2.1.23	Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-72
2.3	Aspek Pelayanan Umum .....	II-73
2.3.1	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar.....	II-74
2.3.1.1	Pendidikan .....	II-74
2.3.1.2	Angka Partisipasi Sekolah .....	II-74
2.3.1.3	Angka Partisipasi Kasar .....	II-75
2.3.1.4	Angka Partisipasi Murni .....	II-75
2.3.1.5	Kesehatan .....	II-77
2.3.1.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II-80
A.	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan .....	II-81
B.	Sumber Daya Air .....	II-82
C.	Air Minum, Sanitasi dan Persampahan .....	II-85
D.	Penataan Bangunan dan Lingkungan .....	II-94
E.	Penataan Ruang.....	II-95
F.	Bina Konstruksi .....	II-96
2.3.1.7	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	II-100
2.3.1.8	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II-106
2.3.1.9	Sosial .....	II-106
2.3.2	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Non-Dasar .....	II-107
2.3.2.1	Tenaga Kerja.....	II-107
2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II-109
2.3.2.3	Pangan .....	II-109
2.3.2.4	Lingkungan Hidup.....	II-110
A.	Gas Rumah Kaca .....	II-117
B.	Ekosistem Gambut .....	II-118
C.	Kualitas Tutupan Lahan .....	II-124
D.	Isu Prioritas Lingkungan Hidup .....	II-127
E.	Pengelolaan Persampahan.....	II-127
F.	Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) .....	II-129
G.	Kualitas Air Sungai Yang Rendah .....	II-131
H.	Luas Lahan Kritis yang Berpotensi Terus Meningkat.....	II-135
2.3.2.5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-141
2.3.2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	II-143
2.3.2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II-143
2.3.2.8	Perhubungan.....	II-144
A.	Angkutan Sungai dan Laut.....	II-149
B.	Transportasi Angkutan Udara .....	II-150
2.3.2.9	Komunikasi dan Informatika.....	II-153
2.3.2.10	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.....	II-155
2.3.2.11	Penanaman Modal .....	II-159
2.3.2.12	Kepemudaan dan Olahraga .....	II-160
2.3.2.13	Statistik .....	II-160
2.3.2.14	Persandian .....	II-161
2.3.2.15	Kebudayaan .....	II-161
2.3.2.16	Perpustakaan dan Kearsipan.....	II-162
A.	Perpustakaan .....	II-162
B.	Kearsipan .....	II-162
2.3.3	Layanan Urusan Pilihan.....	II-163
2.3.3.1	Pertanian .....	II-163
A.	Sektor Pertanian.....	II-164
2.3.3.2	Perkebunan.....	II-167
2.3.3.3	Peternakan .....	II-169
2.3.3.4	Kelautan dan Perikanan.....	II-172
2.3.3.5	Kehutanan .....	II-174
2.3.3.6	Energi dan Sumber Daya Alam.....	II-182





2.3.3.7	Pariwisata .....	II-185
2.3.3.8	Perdagangan.....	II-187
2.3.3.9	Industri .....	II-188
2.3.3.10	Transmigrasi.....	II-189
2.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-190
2.4.1	Daya Saing Berdasarkan Pilar IDSD (BRIN) .....	II-190
2.4.2	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-197
2.4.2.1	Konsumsi Rumah Tangga .....	II-198
2.4.2.2	Pengeluaran Konsumsi Per Kapita.....	II-199
2.4.2.3	Nilai Tukar Petani .....	II-199
2.4.2.4	Perkembangan Impor .....	II-202
2.4.2.5	Perkembangan Sektor Energi.....	II-203
2.4.2.6	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel .....	II-203
2.4.3	Fokus Iklim Investasi dan Pelayanan Publik.....	II-204
2.4.3.1	Investasi .....	II-204
2.4.3.2	Kriminalitas .....	II-205
2.4.3.3	Pelayanan Publik.....	II-206
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-206
2.4.4.1	Ketenagakerjaan .....	II-206
2.4.5	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II-207
2.4.6	Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	II-210
2.4.6.1	Daya Dukung Permukiman .....	II-212
2.4.6.2	Daya Dukung Lahan Pertanian .....	II-213
2.4.6.3	Daya Dukung Air.....	II-216
2.5	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	II-224
2.5.1	Evaluasi Realisasi RKPD Tahun 2022 .....	II-224
2.5.2	Evaluasi Realisasi RPJMD Tahun 2021-2026 .....	II-299
2.5.3	Permasalahan Pembangunan Daerah Di Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-316
2.5.3.1	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Masih Rendah .....	II-316
2.5.3.2	Struktur Perekonomian Daerah masih belum kuat dan berkelanjutan.....	II-317
2.5.3.3	Pembangunan Infrastruktur belum optimal dan merata .....	II-318
2.5.3.4	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Berbasis Digital belum Optimal .....	II-319
2.5.3.5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Masih Belum Optimal .....	II-320
2.5.4	Permasalahan Pembangunan Yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah : .....	II-320
2.5.5	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-322

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ..... III-1**

3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.1.1	Kondisi Pembangunan Ekonomi Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	III-2
3.1.1.1	Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB).....	III-2
3.1.1.2	Pertumbuhan Ekonomi .....	III-4
3.1.1.3	Kontribusi PDRB Antar Wilayah.....	III-13
3.1.1.4	Kesenjangan Wilayah .....	III-16
3.1.1.5	Increment Capital Output Ration (ICOR) .....	III-17
3.1.1.6	Inflasi.....	III-18
3.1.1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	III-20
3.1.1.8	Tingkat Kemiskinan .....	III-21
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah .....	III-22
3.1.3	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2024.....	III-29
3.1.4	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi .....	





	Kalimantan Selatan Tahun 2024 .....	III-32
3.1.5	Sasaran Indikator Ekonomi Makro Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2024 .....	III-34
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-35
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III-38
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III-43
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-45
3.2.4	Arah Kebijakan Alternatif Pembiayaan Daerah .....	III-49

#### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024..... IV-1**

4.1	Isu Strategis Pembangunan .....	IV-2
4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-4
4.2.1	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional terhadap RKPD 2024 .....	IV-4
4.2.2	Telaahan Tujuan dan Sasaran SDGs Terhadap RKPD 2024 .....	IV-7
4.2.3	Telaahan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis terhadap RKPD Tahun 2024 .....	IV-8
4.2.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap RKPD Tahun 2024 ...	IV-9
4.2.5	Telaahan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 .....	IV-11
4.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalsel Tahun 2024 .....	IV-15
4.3.1	Prioritas dan Sasaran RKPD Tahun 2024 .....	IV-17
4.3.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan RKPD 2024 dan RKP 2024 .....	IV-23
4.3.3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 Berbasis Kewilayahan .....	IV-33
4.3.4	Penelaahan Terhadap Pokok - Pokok Pikiran DPRD .....	IV-35
4.4	Inovasi Pembangunan Daerah .....	IV-40

#### **BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA..... V-1**

5.1	Indikator Makro Kabupaten/Kota .....	V-1
5.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	V-2
5.1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) .....	V-5
5.1.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	V-7
5.1.4	Persentase Penduduk Miskin .....	V-10
5.1.5	Indeks Gini .....	V-15
5.1.6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) .....	V-18
5.1.7	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) .....	V-20
5.2	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan .....	V-23
5.2.1	Arah Kebijakan Kewilayahan .....	V-26
5.2.2	Arah Kebijakan Wilayah Banjarbakula .....	V-33
5.2.3	Arah Kebijakan Banua Anam .....	V-34
5.2.4	Arah Kebijakan Wilayah Pesisir dan Industri .....	V-36
5.3	Arah Kebijakan Kabupaten/Kota .....	V-37
5.3.1	Kota Banjarmasin .....	V-37
5.3.2	Kota Banjarbaru .....	V-37
5.3.3	Kabupaten Banjar .....	V-38
5.3.4	Kabupaten Tanah Laut .....	V-39
5.3.5	Kabupaten Tanah Bumbu .....	V-40
5.3.6	Kabupaten Kotabaru .....	V-41
5.3.7	Kabupaten Tapin .....	V-41
5.3.8	Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	V-42
5.3.9	Kabupaten Hulu Sungai Tengah .....	V-43
5.3.10	Kabupaten Hulu Sungai Utara .....	V-43
5.3.11	Kabupaten Balangan .....	V-44
5.3.12	Kabupaten Tabalong .....	V-45
5.3.13	Kabupaten Barito Kuala .....	V-46

#### **BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... VI-1**





6.1	Prioritas Dan Sub Prioritas RKPD Tahun 2024.....	VI-1
6.2	Rencana Kerja Perangkat Daerah Dan Pendanaan .....	VI-22
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>		<b>VII-1</b>
7.1.	Indikator Makro Kabupaten/ Kota.....	VII-2
7.2.	Indikator Kinerja Utama .....	VII-3
7.3.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah .....	VII-5
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>		<b>VIII-1</b>





## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Alur Proses Penyusunan RKPD Provinsi.....	I-3
<b>Gambar 2.1</b>	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-3
<b>Gambar 2.2</b>	Peta Wilayah KalSel terhadap wilayah sekitar, ALKI 1, dan ALKI 2 .....	II-5
<b>Gambar 2.3</b>	Peta Topografi Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-6
<b>Gambar 2.4</b>	Peta Geologi Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-9
<b>Gambar 2.5</b>	Peta Hidrologi Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-10
<b>Gambar 2.6</b>	Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-20
<b>Gambar 2.7</b>	Perbandingan Jumlah Penduduk berdasarkan Umur di Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	II-24
<b>Gambar 2.8</b>	ICOR Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2022 .....	II-26
<b>Gambar 2.9</b>	Peta Rawan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-30
<b>Gambar 2.10</b>	Data Share (Bagi Hasil) Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-37
<b>Gambar 2.11</b>	Gini Ratio Indonesia Per Provinsi per September Tahun 2022 .....	II-49
<b>Gambar 2.12</b>	Perkembangan Indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-51
<b>Gambar 2.13</b>	Angka Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022. Serta AHH Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....	II-60
<b>Gambar 2.14</b>	Kasus Kematian Ibu di Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-62
<b>Gambar 2.15</b>	Kasus Kematian Bayi di Kalimantan Selatan Tahun 2022 ...	II-63
<b>Gambar 2.16</b>	Pekembangan Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022 .....	II-66
<b>Gambar 2.17</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka paten/Kota Tahun 2022.....	II-68
<b>Gambar 2.18</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....	II-69
<b>Gambar 2.19</b>	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2022	II-79
<b>Gambar 2.20</b>	Jumlah Tenaga Dokter di Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	II-79
<b>Gambar 2.21</b>	Jumlah Tenaga Keperawatan dan Bidan di Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....	II-80
<b>Gambar 2.22</b>	Jumlah Kefarmasian Dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....	II-80
<b>Gambar 2.23</b>	Wilayah Sungai di Kalimantan Selatan, a) WS Barito, b) WS Cengal – Batulicin, c) WS Pulau Laut .....	II-82
<b>Gambar 2.24</b>	Capaian Air Minum Kalimantan Selatan 2016 – 2022.....	II-86
<b>Gambar 2.25</b>	Capaian Air Minum Akses Layak Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2020-2022 .....	II-88
<b>Gambar 2.26</b>	Capaian Air Minum Akses Aman Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2020-2022 .....	II-89
<b>Gambar 2.27</b>	Capaian Air Limbah Domestik Akses Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022s.....	II-90
<b>Gambar 2.28</b>	Capaian Air Limbah Domestik Akses Layak Kab/Kota se- Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	II-91
<b>Gambar 2.29</b>	Capaian Air Limbah Domestik Akses Aman Kab/Kota se- Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	II-91
<b>Gambar 2.30</b>	Data Luasan Kumuh yang Sudah di Tangani	



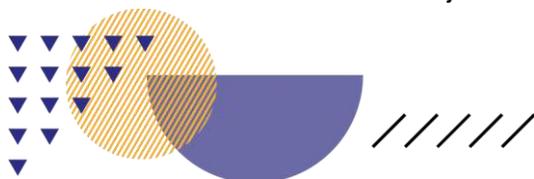


	Tahun (2018–2022) .....	II-103
<b>Gambar 2.31</b>	Persentase Penganganan Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018-2022 .....	II-103
<b>Gambar 2.32</b>	Jumlah angkatan kerja (Jiwa) Provinsi Kalimantan Selatan. 2018-2022.....	II-108
<b>Gambar 2.33</b>	Grafik Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 s.d Tahun 2022.....	II-112
<b>Gambar 2.34</b>	Grafik Target dan Capaian IKLH Prov Kalsel dan Kab/Kota Tahun 2022, Target Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2022 .....	II-113
<b>Gambar 2.35</b>	Grafik Target dan Capaian IKU Prov Kalsel dan Kab/Kota Tahun 2021 .....	II-114
<b>Gambar 2.36</b>	Peta Fungsi Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan	II-120
<b>Gambar 2.37</b>	Grafik Target dan Capaian IKL Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota Tahun 2021.....	II-126
<b>Gambar 2.38</b>	Bus AKAP Prov. Kalimantan Selatan.....	II-147
<b>Gambar 2.39</b>	Grafik Jumlah barang yang dibongkar melalui angkutan udara yang datang di Kalimantan Selatan s.d Maret Tahun 2023.....	II-152
<b>Gambar 2.40</b>	Kunjungan Wisata di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-186
<b>Gambar 2.41</b>	Perkembangan Rata-Rata Lama Menginap Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-187
<b>Gambar 2.42</b>	Kerangka pengukuran IDSD 2022 .....	II-192
<b>Gambar 2.43</b>	Skor IDSD Nasional Tahun 2022 .....	II-193
<b>Gambar 2.44</b>	Capaian Indikator Pilar IDSD untuk Tahun 2022.....	II-194
<b>Gambar 2.45</b>	Ringkasan Komponen EV-Digital Competitiveness Index 2022.....	II-196
<b>Gambar 2.46</b>	Ringkasan Komponen EV-Digital Competitiveness Index Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-197
<b>Gambar 2.47</b>	Perkembangan Nilai Tukar Petani Kalimantan Selatan s.d Mei Tahun 2023.....	II-200
<b>Gambar 2.48</b>	Grafik Perkembangan NTUP Provinsi Kalimantan Selatan s.d Mei Tahun 2023.....	II-201
<b>Gambar 2.49</b>	Peta Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan s.d Data Terakhir Tahun 2018 .....	II-210
<b>Gambar 2.50</b>	Peta Status Pangan Provinsi Kalimantan Selatan s.d Data Terakhir Tahun 2021 .....	II-215
<b>Gambar 2.51</b>	Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Kepmen LHK 2019 Secara Administrasi.....	II-218
<b>Gambar 2.52</b>	Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Hasil Analisis Secara Batas Administrasi Kabupaten.....	II-219
<b>Gambar 2.53</b>	Peta Status Air Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-222
<b>Gambar 2.54</b>	Status Air Analisis Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-223
<b>Gambar 3.1</b>	LPE Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha dan Komponen Pengeluaran pada Tahun 2022 .....	III-10
<b>Gambar 3.2</b>	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2022 .....	III-11
<b>Gambar 3.3</b>	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Regional Kalimantan Tahun 2022 .....	III-13





<b>Gambar 3.4</b>	Share Perekonomian (%) Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2022.....	III-15
<b>Gambar 3.5</b>	Tipologi Klassen PDRB ADHK Kabupaten/Kota pada tahun 2017-2022 di Kalimantan Selatan .....	III-16
<b>Gambar 3.6</b>	Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2024 .....	III-17
<b>Gambar 3.7</b>	ICOR Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2022 .....	III-18
<b>Gambar 3.8</b>	Laju Inflasi (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2022 .....	III-19
<b>Gambar 3.9</b>	Arah Kebijakan RKP Tahun 2024 .....	III-30
<b>Gambar 3.10</b>	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 .....	III-30
<b>Gambar 4.1</b>	Tiga Pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (Bappenas, 2018) .....	IV-5
<b>Gambar 4.2</b>	Penyelarasan Muatan RTRW dengan Muatan RPJPD dan RPJMD .....	IV-10
<b>Gambar 4.3</b>	Alur Langkah-Langkah Penyelarasan RTRW dengan RPJMD .....	IV-10
<b>Gambar 4.4</b>	Keterkaitan Aspek Daya Saing Daerah dengan Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	IV-17
<b>Gambar 4.5</b>	Konsep Pembagian Tiga Zona Kewilayahan Kalimantan Selatan Berdasarkan Administrasi dan Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis.....	IV-35
<b>Gambar 5.1</b>	Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/ Kota Tahun 2021-2022 .....	V-3
<b>Gambar 5.2</b>	Peta Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota .....	V-4
<b>Gambar 5.3</b>	Analisis Kuadran Capaian LPE dan Share Perekonomian Kabupaten/Kota .....	V-6
<b>Gambar 5.4</b>	Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan TPT Kabupaten/Kota .....	V-8
<b>Gambar 5.5</b>	Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota .....	V-10
<b>Gambar 5.6</b>	Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota ....	V-12
<b>Gambar 5.7</b>	Peta Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota .....	V-13
<b>Gambar 5.8</b>	Peta Analisa Geostatistik Resiko Stunting dari Analisa Data Pensasaran P3KE-Kemenko PMK.....	V-14
<b>Gambar 5.9</b>	Analisa Geostatistik Bayesian Jumlah KK Pensasaran Berisiko Stunting.....	V-15
<b>Gambar 5.10</b>	Analisis Kuadran Capaian Indeks Gini dan Laju Perubahan Indeks Gini Kabupaten/Kota .....	V-17
<b>Gambar 5.11</b>	Peta Indeks Gini Kabupaten/Kota .....	V-18
<b>Gambar 5.12</b>	Analisis Kuadran Capaian IKLH dan Laju Pertumbuhan IKLH Kabupaten/ Kota Tahun 2021-2022 .....	V-20
<b>Gambar 5.13</b>	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota .....	V-22
<b>Gambar 5.14</b>	Peta Potensi Pertanian dan Perkebunan Kalsel .....	V-23
<b>Gambar 5.15</b>	Peta Sebaran Destinasi Wisata dan Geosite.....	V-25
<b>Gambar 5.16</b>	Peta Zona Kewilayahan Kalimantan Selatan.....	V-28
<b>Gambar 5.17</b>	Diagram Pohon Sistem Perkotaan di Kalimantan Selatan .....	V-29
<b>Gambar 5.18</b>	Peta Konektifitas Kalimantan Selatan.....	V-30
<b>Gambar 5.19</b>	Model Kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan .....	V-31
<b>Gambar 5.20</b>	Peta Proyeksi Jalan Nasional dan Provinsi Tahun 2024 .....	V-32
<b>Gambar 5.21</b>	Peta Zona 1- Banjarbakula.....	V-33





**Gambar 5.22** Peta Pengebangan Kewilayahan Zona Banjarbakula.....V-34  
**Gambar 5.23** Peta Zona 2 - Wilayah Banua Anam .....V-35  
**Gambar 5.24** Peta Zona 3 - Wilayah Pesisir dan Industri.....V-36





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 ..... II-4
<b>Tabel 2.2</b>	Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Lereng/Kemiringan dan Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut Tahun 2022 ..... II-7
<b>Tabel 2.3</b>	Pembagian Luas DAS Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 ..... II-11
<b>Tabel 2.4</b>	Kondisi Iklim di Kalimantan Selatan Tahun 2022 ..... II-12
<b>Tabel 2.5</b>	Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 ..... II-13
<b>Tabel 2.6</b>	Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .... II-15
<b>Tabel 2.7</b>	Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota Tahun 2018-2022 ..... II-17
<b>Tabel 2.8</b>	Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan berdasarkan Kabupaten dan Kota Tahun 2022 ..... II-18
<b>Tabel 2.9</b>	Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 ..... II-18
<b>Tabel 2.10</b>	Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 ..... II-19
<b>Tabel 2.11</b>	Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten Kota Tahun 2018-2022 ..... II-21
<b>Tabel 2.12</b>	Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan menurut Jenis Pekerjaan/Lapangan Usaha Tahun 2021 dan 2022 ..... II-21
<b>Tabel 2.13</b>	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kalimantan Selatan Tahun 2022 ..... II-23
<b>Tabel 2.14</b>	Data Sebaran pekerjaan kepala keluarga di Kalimantan Selatan pada desil 1 menurut Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) ..... II-27
<b>Tabel 2.15</b>	Data Bencana Banjir di Kalimantan Selatan s.d Data Terakhir Tahun 2021 ..... II-31
<b>Tabel 2.16</b>	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 (Juta Rupiah) . II-33
<b>Tabel 2.17</b>	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 (Juta Rupiah) ..... II-34
<b>Tabel 2.18</b>	PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 (Triliun Rupiah) Menurut Pengeluaran ..... II-35
<b>Tabel 2.19</b>	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 - 2022 ..... II-36
<b>Tabel 2.20</b>	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan 2018 - 2022 ..... II-38
<b>Tabel 2.21</b>	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Kab/Kota Tahun 2018-2022 ..... II-38
<b>Tabel 2.22</b>	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan 2010 ..... II-39
<b>Tabel 2.23</b>	LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 Menurut Pengeluaran ..... II-42



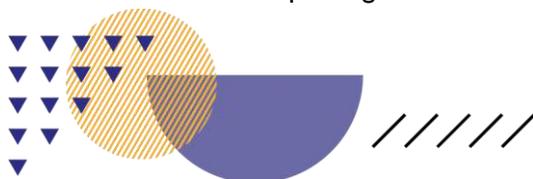


<b>Tabel 2.24</b>	Inflasi Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2022 .....	II-45
<b>Tabel 2.25</b>	Indeks Harga Konsumen Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022.....	II-46
<b>Tabel 2.26</b>	Gini Ratio Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-48
<b>Tabel 2.27</b>	Indeks Williamson Kalimantan Selatan (2017-2022) .....	II-50
<b>Tabel 2.28</b>	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-52
<b>Tabel 2.29</b>	Kondisi Kemiskinan Selatan Tahun 2018-2022.....	II-52
<b>Tabel 2.30</b>	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Semester I di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022 ...	II-53
<b>Tabel 2.31</b>	Garis Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2018 s.d. 2022 (Rupiah).....	II-54
<b>Tabel 2.32</b>	Garis Kemiskinan Menurut Tempat Tinggal Tahun 2018 s.d. 2022 (Rupiah).....	II-54
<b>Tabel 2.33</b>	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota 2018 s.d. 2022 (Rupiah).....	II-55
<b>Tabel 2.34</b>	Persentase Penduduk Miskin (P0). Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1). dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2022 .....	II-56
<b>Tabel 2.35</b>	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-57
<b>Tabel 2.36</b>	Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-58
<b>Tabel 2.37</b>	Angka Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. 2018-2022 .....	II-59
<b>Tabel 2.38</b>	Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022.....	II-60
<b>Tabel 2.39</b>	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan. 2018-2022.....	II-62
<b>Tabel 2.40</b>	Perkembangan Penyakit menular di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-64
<b>Tabel 2.41</b>	Penyakit Tidak Menular Tahun 2022.....	II-64
<b>Tabel 2.42</b>	Perkembangan Status Gizi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-65
<b>Tabel 2.43</b>	Jumlah Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-66
<b>Tabel 2.44</b>	Perkembangan penguluran perkapita di Provinsi Pulau Kalimantan Tahun 2018 - 2022.....	II-67
<b>Tabel 2.45</b>	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Selama Tahun 2019-2022	II-68
<b>Tabel 2.46</b>	Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-69
<b>Tabel 2.47</b>	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Selama Tahun 2018-2022	II-70
<b>Tabel 2.48</b>	Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (Jiwa) Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-71
<b>Tabel 2.49</b>	Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa) Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-72
<b>Tabel 2.50</b>	Berbagai Seni Budaya di Kalimantan Selatan.....	II-72



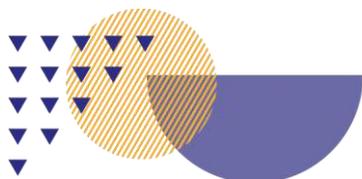


<b>Tabel 2.51</b>	Pencapaian APS pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022 .....	II-74
<b>Tabel 2.52</b>	Pencapaian APK ada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022.....	II-75
<b>Tabel 2.53</b>	Pencapaian APM ada Semua Jenjang Dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022.....	II-76
<b>Tabel 2.54</b>	Jumlah Sekolah. Murid. dan Guru. serta Indikatornya di Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 .....	II-76
<b>Tabel 2.55</b>	Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	II-78
<b>Tabel 2.56</b>	Data Terkait Rasio Konektivitas Provinsi.....	II-81
<b>Tabel 2.57</b>	Luasan Banjir/Genangan di DAS kewenangan Provinsi Tahun 2022 .....	II-83
<b>Tabel 2.58</b>	Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI di Kalimantan Selatan Tahun (Update) .....	II-84
<b>Tabel 2.59</b>	Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI/DIR di Kalimantan Selatan berdasarkan <i>One Map</i> Irigasi pada Tahun 2019 .....	II-84
<b>Tabel 2.60</b>	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022.....	II-85
<b>Tabel 2.61</b>	Tabel Capaian Air Minum Akses Layak Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-86
<b>Tabel 2.62</b>	Tabel Capaian Air Minum Akses Aman Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-88
<b>Tabel 2.63</b>	Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-90
<b>Tabel 2.64</b>	Kondisi Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Akses Layak Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2022.....	II-92
<b>Tabel 2.65</b>	Kondisi Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Akses Aman Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2022.....	II-92
<b>Tabel 2.66</b>	Realisasi Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	II-93
<b>Tabel 2.67</b>	Capaian Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-94
<b>Tabel 2.68</b>	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2018 sampai 2021 .....	II-95
<b>Tabel 2.69</b>	Status RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2022.....	II-96
<b>Tabel 2.70</b>	Jumlah Pekerjaan Konstruksi s.d Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-97
<b>Tabel 2.71</b>	Jumlah Pekerjaan Konstruksi Tahun 2019 – 2022 Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-97
<b>Tabel 2.72</b>	Tabel Data Jumlah ketersediaan tenaga ahli Pekerjaan Konstruksi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-99
<b>Tabel 2.73</b>	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 berdasarkan Kewenangan Penanganan .....	II-101
<b>Tabel 2.74</b>	Data Penanganan Permukiman Kumuh Dan Rencana Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-102
<b>Tabel 2.75</b>	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	II-104
<b>Tabel 2.76</b>	Data peningkatan kualitas RTLH dan Rehabilitasi Rumah	



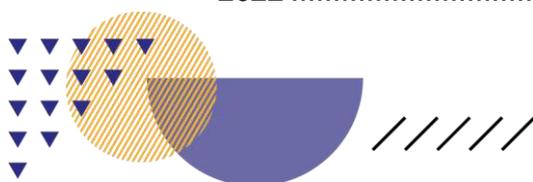


	Korban Bencana Tahun 2019-2023 .....	II-104
<b>Tabel 2.77</b>	Penangan PSU di Kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-105
<b>Tabel 2.78</b>	Kondisi Keamanan Provinsi Kalimantan Selatan s.d Tahun terakhir 2021 .....	II-106
<b>Tabel 2.79</b>	Capaian Kinerja Urusan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-106
<b>Tabel 2.80</b>	Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-107
<b>Tabel 2.81</b>	Perkembangan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022.....	II-109
<b>Tabel 2.82</b>	Produksi Pangan Utama di Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022 .....	II-110
<b>Tabel 2.83</b>	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun .....	II-111
<b>Tabel 2.84</b>	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2022 .....	II-112
<b>Tabel 2.85</b>	Tabel Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022.....	II-113
<b>Tabel 2.86</b>	Tabel Capaian IKU (Indeks Kualitas Udara) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 .....	II-114
<b>Tabel 2.87</b>	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 - 2021 .....	II-116
<b>Tabel 2.88</b>	Tabel target penurunan emisi GRK Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 .....	II-118
<b>Tabel 2.89</b>	Sebaran Indikatif Areal Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.....	II-121
<b>Tabel 2.90</b>	Sebaran Indikatif Areal Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut.....	II-122
<b>Tabel 2.91</b>	Sebaran Indikatif Areal Mitigasi Perubahan Iklim dari Ekosistem Gambut.....	II-123
<b>Tabel 2.92</b>	Sebaran Indikatif Areal Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut.....	II-124
<b>Tabel 2.93</b>	Nilai Indeks Kualitas Lahan Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021, Target 2022 dan Capaian Tahun 2022 .....	II-124
<b>Tabel 2.94</b>	Tabel capaian nilai IKLH Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan .....	II-126
<b>Tabel 2.95</b>	Tabel Status Mutu Air Sungai Provinsi Kalsel sampai dengan Tahun 2022 .....	II-132
<b>Tabel 2.96</b>	Parameter Indeks Kualitas Air (IKA).....	II-134
<b>Tabel 2.97</b>	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-141
<b>Tabel 2.98</b>	Inventarisasi Peraturan Perundangan terkait Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan .....	II-141
<b>Tabel 2.99</b>	Data Terminal Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-146
<b>Tabel 2.100</b>	Trayek dan Tarif Bus AKAP .....	II-147
<b>Tabel 2.101</b>	Koridor Pelayanan BRT Banjarbakula.....	II-149
<b>Tabel 2.102</b>	Data Eksisting Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan ...	II-150
<b>Tabel 2.103</b>	Persebaran Desa Bebas <i>Blank Spot</i> dan Desa <i>Blank Spot</i> ..	II-153





<b>Tabel 2.104</b>	Jumlah BTS di Provinsi Kalimantan Selatan s.d Tahun Terakhir 2021 .....	II-154
<b>Tabel 2.105</b>	Jumlah Unit Koperasi Menurut Jenis Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022.....	II-156
<b>Tabel 2.106</b>	Jumlah Jenis Usaha Mikro Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	II-157
<b>Tabel 2.107</b>	Jumlah Jenis Usaha Menengah Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	II-157
<b>Tabel 2.108</b>	Jumlah Jenis Usaha Kecil Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-158
<b>Tabel 2.109</b>	Rekap Data UMKM Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-158
<b>Tabel 2.110</b>	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-159
<b>Tabel 2.111</b>	Jumlah Proyek. Rencana. dan Realisasi Investasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2022 PMA dan PMDN .....	II-159
<b>Tabel 2.112</b>	Berikut disajikan data terkait Indek pembangunan literasi masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-162
<b>Tabel 2.113</b>	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-162
<b>Tabel 2.114</b>	Luas Panen, Produksi, serta Produktivitas Padi dan Palawija Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2020-2022 .....	II-164
<b>Tabel 2.115</b>	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan ....	II-165
<b>Tabel 2.116</b>	Skor Minimal Cadangan Pangan Pemerintah CPP Provinsi.	II-165
<b>Tabel 2.117</b>	Skor Pola Pangan Tingkat Konsumsi.....	II-165
<b>Tabel 2.118</b>	Produksi Delapan Komoditas Buah-buahan Utama di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2021 – 2022 .....	II-165
<b>Tabel 2.119</b>	Produksi Komoditas Sayuran Utama di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2021 - 2022.....	II-166
<b>Tabel 2.120</b>	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018 - 2022 Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-166
<b>Tabel 2.121</b>	Luas Perkebunan dan Produksi Perkebunan berdasarkan Jenis Perkebunan di Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022 .....	II-167
<b>Tabel 2.122</b>	Produksi Lima Komoditas Tertinggi Komoditas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2021 - 2022 .....	II-168
<b>Tabel 2.123</b>	Jumlah Ternak Besar. Ternak Kecil. dan Unggas (Ekor) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-170
<b>Tabel 2.124</b>	Jumlah Produksi Telur (Kg) di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2018-2022 .....	II-171
<b>Tabel 2.125</b>	Capaian Kinerja Urusan Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021-2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-171
<b>Tabel 2.126</b>	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga. Produksi. dan Nilai Produksi Sub Sektor Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2010-2022 .....	II-173
<b>Tabel 2.127</b>	Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-173
<b>Tabel 2.128</b>	Rekapitulasi Produksi Kayu Bulat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-176
<b>Tabel 2.129</b>	Daftar Rekapitulasi Laporan Bulanan Produksi IPHHK-IPHHK Di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	II-182
<b>Tabel 2.130</b>	Jumlah IUP di Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-183



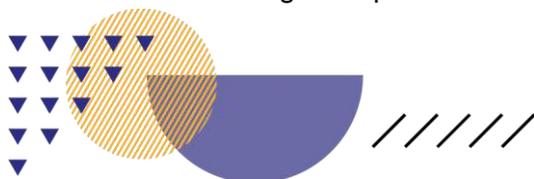


<b>Tabel 2.131</b>	Jumlah Peningkatan Pelanggan Listrik di Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022 .....	II-183
<b>Tabel 2.132</b>	Jumlah Pelanggan Listrik menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2018 - 2022 .....	II-184
<b>Tabel 2.133</b>	Rasio Elektrifikasi (RE) Kalimantan Selatan s.d Desember 2022 .....	II-184
<b>Tabel 2.134</b>	Capaian Kinerja Urusan ESDM Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-185
<b>Tabel 2.135</b>	Data Kunjungan Wisnus Wisman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2022 .....	II-186
<b>Tabel 2.136</b>	Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017-2022 Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-187
<b>Tabel 2.137</b>	Volume dan Nilai Realisasi Ekspor Menurut Komoditas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-188
<b>Tabel 2.138</b>	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-188
<b>Tabel 2.139</b>	Perkembangan Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022... II-	189
<b>Tabel 2.140</b>	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-189
<b>Tabel 2.141</b>	Capaian Indikator Pilar IDSD untuk Tahun 2022 .....	II-194
<b>Tabel 2.142</b>	Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi di Pulau Kalimantan dan Indonesia Tahun 2021-2022 .....	II-200
<b>Tabel 2.143</b>	Perkembangan impor 10 komoditi dengan volume tertinggi di Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022 .....	II-202
<b>Tabel 2.144</b>	Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan sd Tahun 2022 .....	II-214
<b>Tabel 2.145</b>	Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Kepmen LHK .....	II-216
<b>Tabel 2.146</b>	Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Analisis .....	II-218
<b>Tabel 2.147</b>	Perhitungan Daya Dukung Air Berdasarkan Batas Administrasi Kabupaten s.d Analisis Terakhir Tahun 2020 .....	II-221
<b>Tabel 2.148</b>	Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Semester II Tahun 2022 .....	II-225
<b>Tabel 2.149</b>	Evaluasi Capaian Kinerja Program - Kegiatan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-230
<b>Tabel 2.150</b>	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Program - Kegiatan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-299
<b>Tabel 2.151</b>	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Makro Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2022.....	II-299
<b>Tabel 2.152</b>	Evaluasi Kinerja RPJMD 2021 - 2026 s.d Tahun 2022.....	II-300
<b>Tabel 2.153</b>	Evaluasi Pelaksanaan Dan Realisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan s.d Tahun Berjalan .....	II-305
<b>Tabel 2.154</b>	Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan di SKPD Lingkup Pemprov Kalsel .....	II-322
<b>Tabel 3.1</b>	PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah).....	III-3
<b>Tabel 3.2</b>	PDRB Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah) .....	III-3
<b>Tabel 3.3</b>	PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2017 – 2022.....	III-4





<b>Tabel 3.4</b>	LPE Kalimantan Selatan Tahun 2017–2022 Menurut Pengeluaran Beserta Sumber Pertumbuhan.....	III-12
<b>Tabel 3.5</b>	LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2017–2022 Menurut Lapangan Usaha Beserta Sumber Pertumbuhan.....	III-12
<b>Tabel 3.6</b>	PDRB Kalimantan Selatan Menurut Wilayah (Milyar Rupiah)	III-14
<b>Tabel 3.7</b>	Proyeksi /Target Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Tahun 2023 - 2024 .....	III-18
<b>Tabel 3.8</b>	Proyeksi/Target Inflasi Tahun 2023 - 2024.....	III-20
<b>Tabel 3.9</b>	Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2018 - 2022 .....	III-20
<b>Tabel 3.10</b>	Proyeksi/Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023 - 2024 .....	III-21
<b>Tabel 3.11</b>	Kondisi Kemiskinan Tahun 2018 - 2022.....	III-21
<b>Tabel 3.12</b>	Proyeksi/ Target Tingkat Persentase Penduduk Miskin (P0) Tahun 2023 - 2024 .....	III-22
<b>Tabel 3.13</b>	Asumsi Asumsi Perekonomian Kalimantan Selatan Tahun 2023 - 2024 .....	III-25
<b>Tabel 3.14</b>	LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 Menurut Pengeluaran Beserta Sumber Pertumbuhan .....	III-27
<b>Tabel 3.15</b>	Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 Menurut Pengeluaran .....	III-27
<b>Tabel 3.16</b>	LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 -2024 Menurut Lapangan Usaha Beserta Sumber Pertumbuhan .....	III-28
<b>Tabel 3.17</b>	Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 menurut Lapangan Usaha	III-29
<b>Tabel 3.18</b>	Uraian Faktor Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional ...	III-32
<b>Tabel 3.19</b>	Fokus Pembangunan dan Prioritas Daerah pada RKPD 2024.....	III-34
<b>Tabel 3.20</b>	Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2024 .....	III-34
<b>Tabel 3.21</b>	Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Tahun 2022 - 2024 (Rp).....	III-42
<b>Tabel 3.22</b>	Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016 s.d 2022 (Dalam Miliar Rupiah) .....	III-44
<b>Tabel 3.23</b>	Proyeksi Anggaran Belanja Daerah TA 2023 dan TA 2024 (Rp) .....	III-44
<b>Tabel 3.24</b>	Anggaran Pembiayaan Daerah TA 2016-2022 (Dalam Juta Rupiah) .....	III-45
<b>Tabel 3.25</b>	Proyeksi Pembiayaan Daerah TA 2022 dan 2023 (Dalam Juta Rupiah) .....	III-46
<b>Tabel 3.26</b>	Proyeksi Target RAPBD TA 2023 dan 2024 (Rp).....	III-47
<b>Tabel 4.1</b>	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 - 2026 .....	IV-12
<b>Tabel 4.2</b>	Prioritas dan Sub-Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV-17
<b>Tabel 4.3</b>	Sasaran Prioritas dan Sub Prioritas RKPD tahun 2024 .....	IV-19
<b>Tabel 4.4</b>	Sandingan Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah /Program Prioritas Provinsi Tahun 2024 ....	IV-27
<b>Tabel 4.5</b>	Pokok Pikiran DPRD Kalimantan Selatan .....	IV-36
<b>Tabel 4.6</b>	Tabel Inovasi Daerah.....	IV-40
<b>Tabel 5.1.</b>	Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota .....	V-2





<b>Tabel 5.2.</b>	Capaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022.....	V-3
<b>Tabel 5.3.</b>	Kategori Capaian LPE Kabupaten/ Kota .....	V-5
<b>Tabel 5.4.</b>	Kategori Capaian TPT Kabupaten/ Kota .....	V-7
<b>Tabel 5.5.</b>	TPT Kabupaten/ Kota Tahun 2020 - 2022.....	V-9
<b>Tabel 5.6.</b>	Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota .....	V-11
<b>Tabel 5.7.</b>	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota Tahun 2020 - 2022 .....	V-13
<b>Tabel 5.8.</b>	Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota .....	V-16
<b>Tabel 5.9.</b>	Indeks Gini Kabupaten/ Kota Tahun 2020 - 2022.....	V-17
<b>Tabel 5.10.</b>	Kategori Capaian IKLH Kabupaten/ Kota .....	V-19
<b>Tabel 5.11.</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Tahun 2019 - 2021 .....	V-20
<b>Tabel 5.12.</b>	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/ Kota Tahun 2022 .....	V-22
<b>Tabel 5.13.</b>	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan.....	V-26
<b>Tabel 5.14.</b>	Kinerja Makro Kabupaten/Kota Tahun 2021 dan Target Kinerja Tahun 2022-2024 .....	V-47
<b>Tabel 7.1.</b>	Indikator Kinerja Makro Daerah .....	VII-3
<b>Tabel 7.2.</b>	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 .....	VII-4
<b>Tabel 7.3.</b>	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 .....	VII-10





# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun ke-tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Provinsi Kalimantan Selatan, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen ini juga merupakan instrumen dalam mengefektifkan muatan-muatan yang terkandung pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022, bahwasanya visi dan misi yang terkandung dalam dokumen RKPD ini berpedoman pada visi dan misi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu **“Kalimantan Selatan MAJU (Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara”**. dengan **5 (lima) misi pembangunan** meliputi: **1. Membangun sumber daya yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur; 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata; 3. Memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian; 4. Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik; 5. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan bencana**. Secara umum arah kebijakan RKPD Tahun 2024, difokuskan pada upaya **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**. Untuk dapat mencapai fokus peningkatan tersebut maka penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 ini dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Lebih dari pada itu dokumen RKPD Tahun 2024 yang dibuat ini juga tidak hanya berakhir dengan mempedomani terhadap dokumen yang disebutkan di awal saja, namun juga perlu mempertimbangkan terhadap kebijakan yang masih berlaku seperti





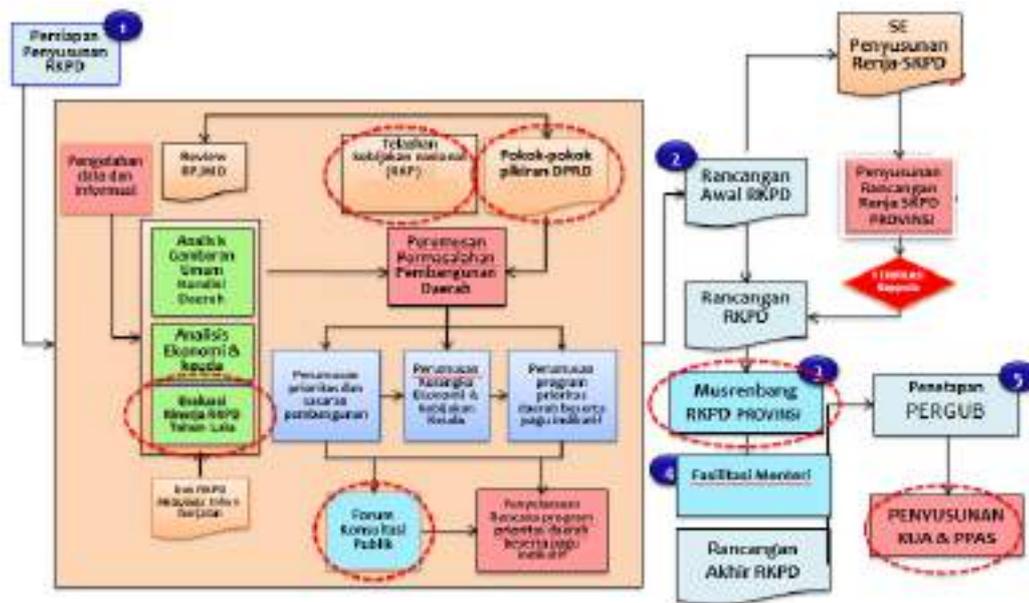
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta aturan-aturan lainnya yang masih berlaku.

Pada Tahun 2024, ada peristiwa besar berskala nasional yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, berupa Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, yaitu Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung pada **Rabu, 26 Juni 2024**, yang saat ini tahapannya sudah mulai berlangsung sesuai dengan amanat dari ketentuan pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sementara untuk Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota adalah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota yang tahapannya masih dalam proses. Kemudian kondisi akibat resesi ekonomi dunia sebagai konsekuensi global, serta akibat peperangan negara Ukraina dengan Rusia yang tentu belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir berdampak terhadap perkembangan ekonomi nasional yang juga perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Untuk penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 selain dalam rangka memenuhi ketentuan regulasi sekaligus juga menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024. Proses penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 yang berpedoman pada PERMENDAGRI 86 Tahun 2017 dan



akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam hal mekanisme proses penyusunan RKPD dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:

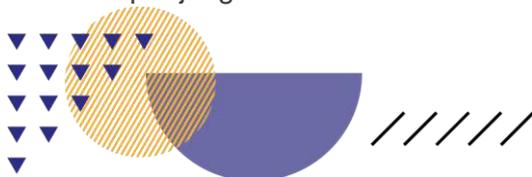


Gambar 1.1 Alur Proses Penyusunan RKPD Provinsi

## 1.2 Dasar Hukum

Peraturan dan perundangan yang terkait sebagai Dasar Hukum Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);





4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara





- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
  14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);





18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun





- 2021 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor .....);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015





- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);





42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ....);
45. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398) ;
46. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
47. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ/ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
48. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Menteri Dalam Negeri;
49. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventrisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
51. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;





- |  |  |
|--|--|
| <p>52. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 17);</p> <p>53. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015–2035;</p> <p>54. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);</p> <p>55. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan</p> | <p>Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;</p> <p>56. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;</p> <p>57. Peraturan Gubernur Nomor 020 s/d 056 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;</p> <p>58. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 057 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.</p> <p>59. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.</p> |
|--|--|

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, oleh karena itu RKPD Provinsi





Kalimantan Selatan Tahun 2023 merupakan bagian dari sistem Perencanaan Nasional dalam rangka untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional. Selanjutnya dokumen perencanaan pembangunan daerah harus sinkron dan saling terkait dengan dokumen nasional dan dokumen yang ada di masing-masing daerah.

Sinkronisasi dan saling keterkaitan antara RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

### **1. RKPD Kalimantan Selatan Tahun 2024 dengan RKP Nasional Tahun 2024**

Dalam Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga terjadi sinergisitas antar dokumen nasional dan daerah.

### **2. RKPD Kalimantan Selatan Tahun 2024 dengan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan**

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 khususnya dalam penetapan lokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

### **3. RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026**

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan dalam tahun berjalan dan sekaligus merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Tahun 2021 - 2026. Sebagai penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

## **1.4 Maksud Dan Tujuan**

Maksud dari disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 adalah secara substansial untuk memberi arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, dan secara normatif





dimaksudkan untuk menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sekaligus sebagai instrumen evaluasi untuk menilai pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

	Menyediakan satu acuan bagi seluruh Kepala SKPD Provinsi Kalimantan Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2022		Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
	Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan		Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Pusat.
	Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target penetapan kinerja		Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan
	Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan/Pengendalian		Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

## RKPD TAHUN 2024 KALIMANTAN SELATAN

### 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan Dokumen RKPD tahun 2024 terdiri dari 8 bab yang sistematikanya dengan mengacu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negetri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan inilah selanjutnya RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:





**BAB - 1. PENDAHULUAN,**

Memuat penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

**BAB - 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH,**

Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek pelayanan umum, Aspek daya saing daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

**BAB - 3. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH,**

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2024 akan datang.

**BAB - 4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH,**

Memuat isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas dan sasaran pembangunan, dan inovasi pembangunan Kalimantan Selatan.

**BAB - 5. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA,**

Memuat indikator makro Kabupaten/Kota, Kebijakan Pembangunan Kewilayahan, dan Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota yang secara terpadu dan komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan yang ada di wilayah kabupaten/kota.

**BAB - 6. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH,**

Mengemukakan secara eksplisit prioritas dan sub prioritas, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta pendanaan yang diperlukan

**BAB - 7. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,**

Berisi tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

**BAB - 8. PENUTUP**





## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



### 2.1 Kondisi Umum Daerah

Gambaran umum Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun hal ini memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.





## 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi pada bagian ini membahas lingkup geografi dari aspek fisik wilayah yang mencakup topografi, geologi, hidrologi, iklim, dan tutupan lahan. Aspek fisik wilayah tersebut mengkaji fenomena alam yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan dimana fenomena tersebut terjadi secara alamiah.

### 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1950 sebagai bagian administrasi resmi dari Pulau Kalimantan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956. Provinsi Kalimantan Selatan terbagi menjadi 13 kabupaten/kota yang terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota dengan Ibu Kota Provinsi berada di Kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus pusat pemerintahan semenjak tahun 2015 sebagian besar aktivitasnya berpindah ke Kota Banjarbaru.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati melimpah. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk asli maupun para perantau untuk mengembangkan wilayahnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah Pulau Kalimantan bagian selatan. Sebagai tindak lanjut dalam pengembangan wilayah administrasi, maka dibentuk Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Agustus 1950 sebagai bagian administrasi resmi dari Pulau Kalimantan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956.

- 114°19' 13" hingga 116° 33' 28" Bujur Timur
- 1°21' 49" hingga 4°10'14" Lintang Selatan

Adapun wilayah Provinsi Kalimantan Selatan secara administratif berbatasan dengan :

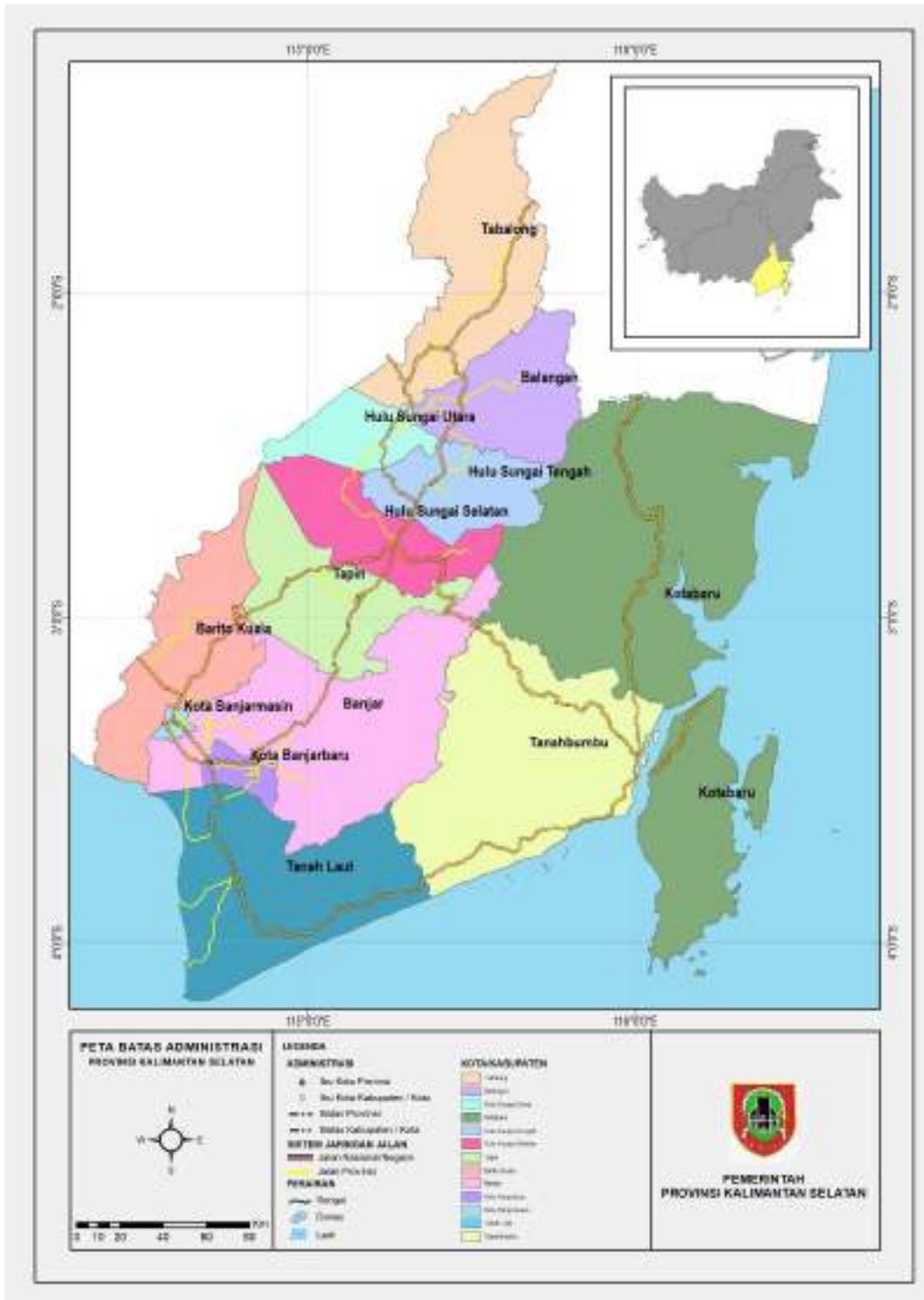
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 38.744,23 km<sup>2</sup> yang terbagi habis ke dalam 13 kabupaten/kota yang terdiri atas 11 Kabupaten dan 2 kota dengan pusat pemerintahan yang sekaligus merupakan ibu kota yakni





Kota Banjarbaruhs. Adapun Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 156 kecamatan dan 1.943 desa/kelurahan dengan rincian sebagaimana pada Tabel 2.1.



Gambar 2.1      Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2022





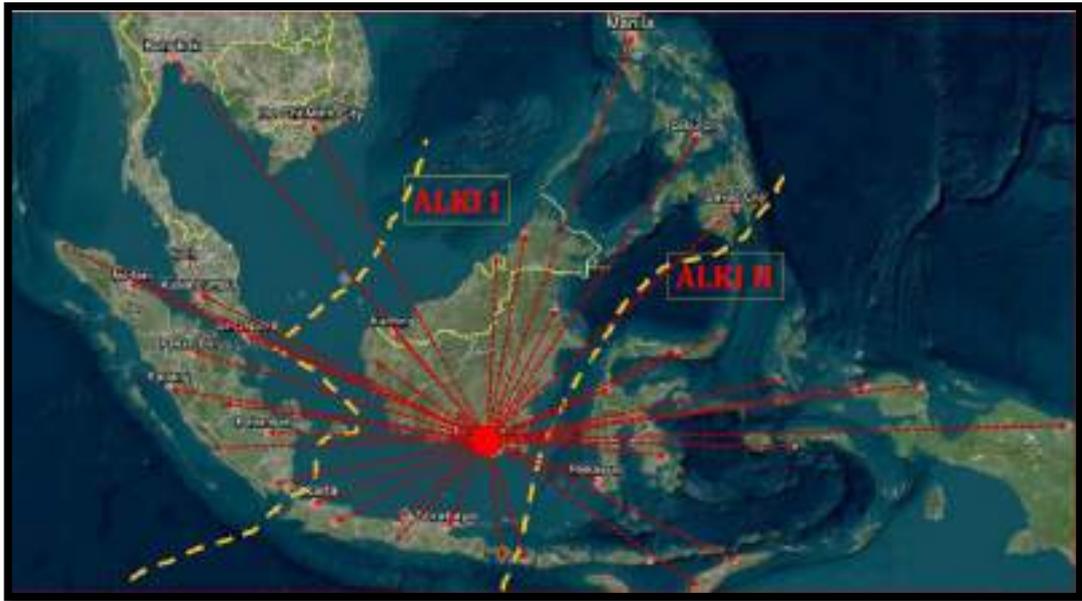
**Tabel 2.1** Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022

Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kecamatan	Desa	Kelurahan
Tanah Laut	3.840,20	11	135	5
Kotabaru	9.480,17	22	202	4
Banjar	4.588,42	20	290	13
Barito Kuala	2.430,62	17	201	6
Tapin	2.156,98	12	135	9
Hulu Sungai Selatan	1.691,62	11	148	4
Hulu Sungai Tengah	1.468,77	11	169	8
Hulu Sungai Utara	940,19	10	219	5
Tabalong	3.473,07	12	131	10
Tanah Bumbu	4.888,23	12	149	5
Balangan	1.828,51	8	156	3
Banjarmasin	98,37	5	-	52
Banjarbaru	305,15	5	-	20
Kalimantan Selatan	37.190,30	156	1.935	144

Sumber: BPS Prov Kalsel Tahun 2023

Berdasarkan letak wilayah, Provinsi Kalimantan Selatan berada pada posisi sentral atau di tengah-tengah Indonesia dan dilalui oleh ALKI II yang merupakan alur pelayaran internasional hal ini merupakan berpotensi besar terhadap perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan khususnya. Hal ini dapat terlihat pada gambar sebagai berikut;





**Gambar 2.2** Peta Wilayah KalSel terhadap wilayah sekitar, ALKI 1, dan ALKI 2

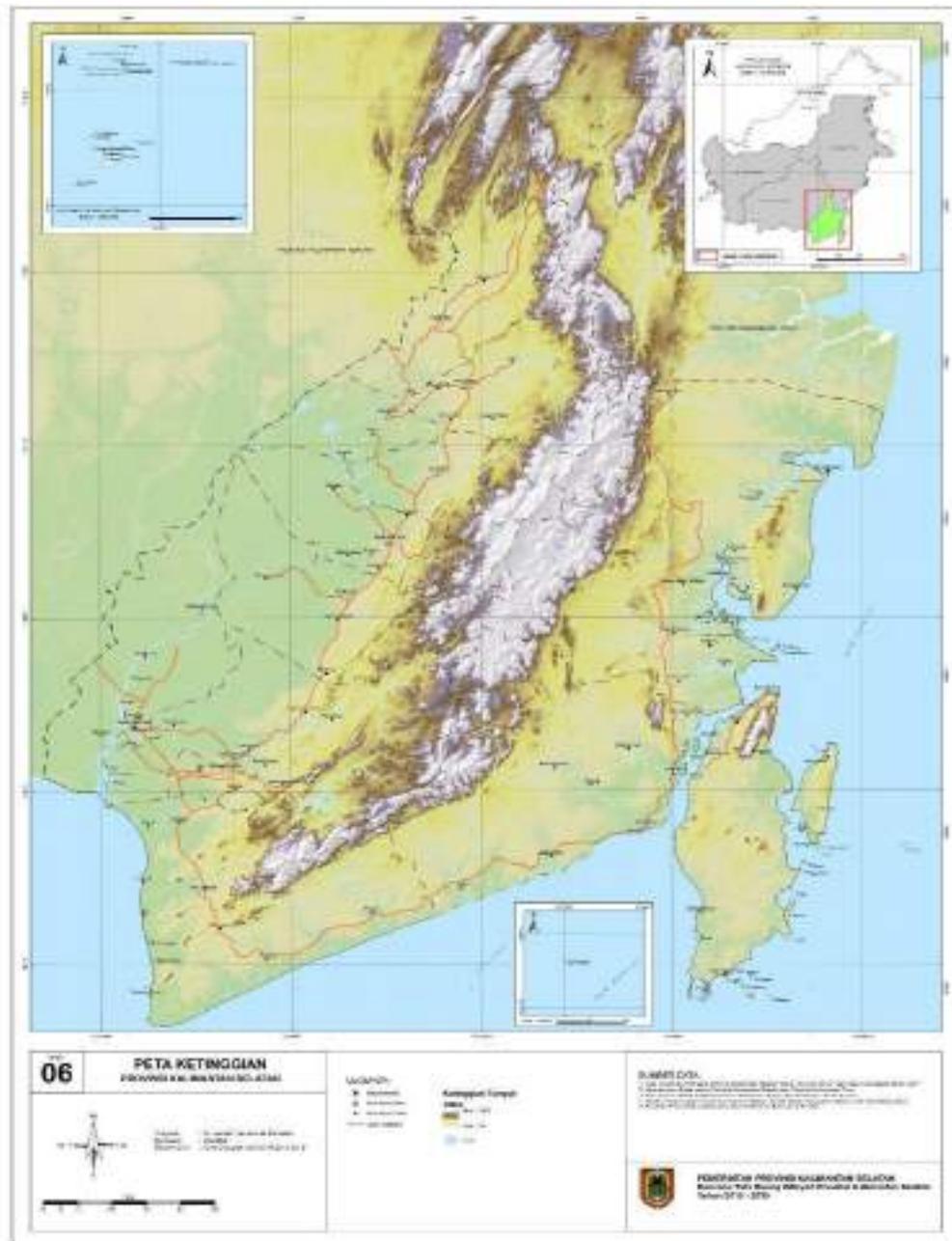
Sumber : Google Earth, diolah Tahun 2022

Dibandingkan dengan wilayah provinsi lain di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai luas wilayah yang paling kecil, yakni hanya 6,98% dari luas pulau Kalimantan. Hal ini memudahkan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sampai ke pelosok, sehingga memiliki peluang pengembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan.

#### 2.1.1.2 Topografi

Kondisi topografi Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh kemiringan lahan yang landai (2-8%) pada bagian barat dan timurnya. Sementara kemiringan lahan yang terjal umumnya berada pada bagian tengah, yaitu disekitar Pegunungan Meratus dimana kemiringan lahan bisa >40%. Sedangkan jika dilihat dari sisi ketinggian wilayah, 27,33% wilayah berada pada ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut dan 23,57% wilayah berada pada ketinggian >100 meter di atas permukaan laut. Lebih jelasnya mengenai Klasifikasi topografi ini dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Tabel 2.2.





**Gambar 2.3** Peta Topografi Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018





**Tabel 2.2** Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Lereng/Kemiringan dan Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut Tahun 2022

KELERENGAN/KETINGGIAN	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
Kelas Lereng (%)	3.753.052	100,00
2	1.497.096	39,89
2-8	1.010.881	26,93
8-15	300.198	8,00
15-25	378.628	10,09
25-40	335.054	8,93
>40	231.195	6,16
Kelas Ketinggian (m)	3.753.052	100,00
0-7 m	888.171	23,66
> 7-25 m	954.322	25,43
> 25-100 m	1.025.655	27,33
> 100-500 m	675.254	17,99
> 500-1.000 m	165.905	4,42
> 1.000 m	43.745	1,16

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Wilayah Kalimantan Selatan banyak dialiri sungai seperti Sungai Barito, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, Sungai Tapin, Sungai Kintap, Sungai Batulicin, Sungai Sampanahan, dan sebagainya. Umumnya sungai-sungai tersebut berpangkal pada Pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar.

Berdasarkan kondisi topografi yang relatif datar ini memberikan keuntungan dalam pengembangan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Kalimantan Selatan yang banyak dialiri sungai ini menjadikan potensi besar terhadap pengembangan pertanian, pariwisata, dan perdagangan.

### 2.1.1.3 Geologi

Bentang alam pegunungan di daratan Provinsi Kalimantan Selatan ini, didominasi oleh Pegunungan Meratus dengan puncak tertinggi dicapai oleh Gunung Batu Besar (1.892 mdpl), membentang dengan arah barat daya – timur laut mulai dari Pelaihari (Kabupaten Tanah Laut) di bagian barat daya hingga ke daerah Kabupaten Tabalong di bagian utara.



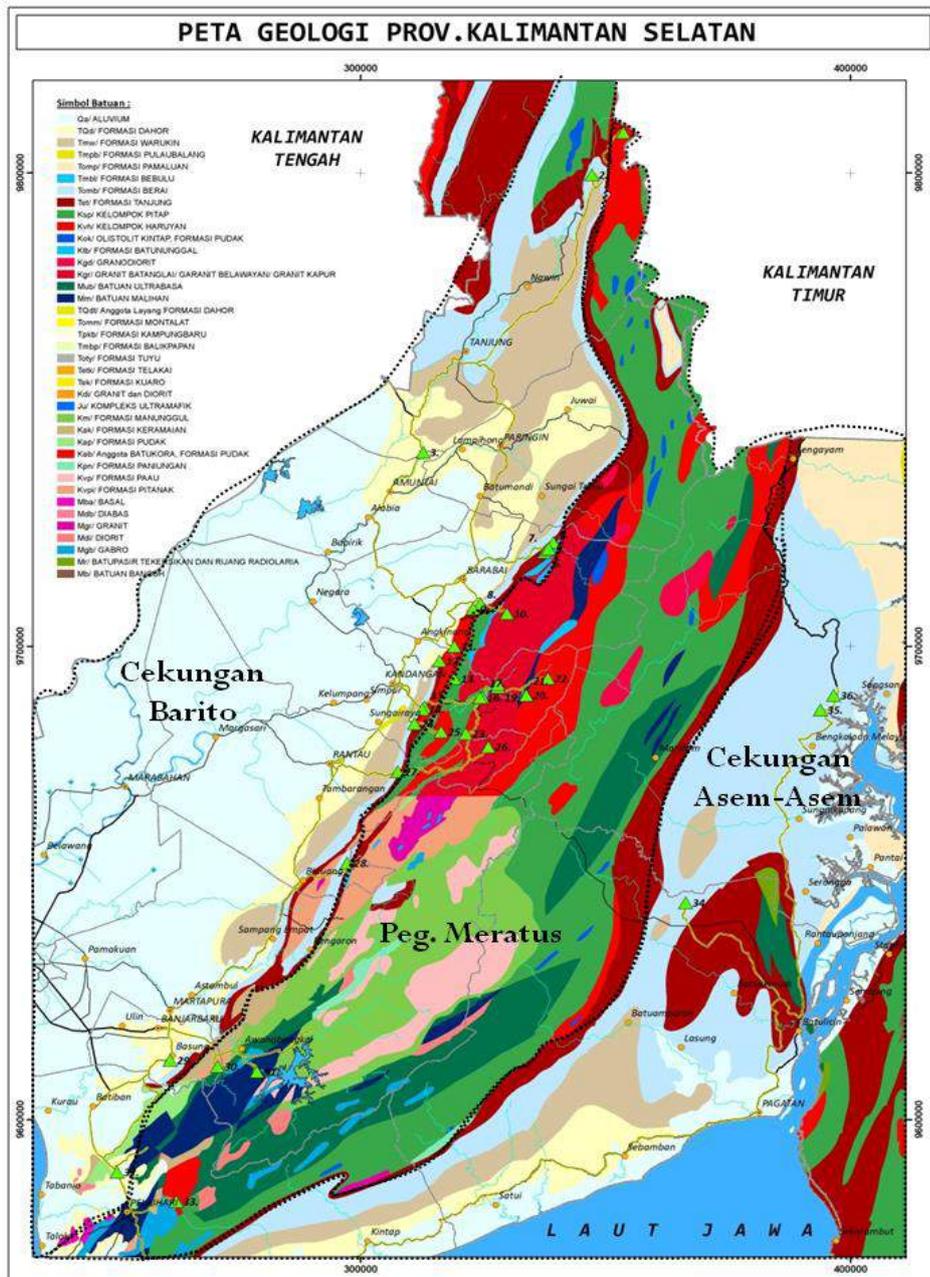


Selain itu, di Pulau Laut bentang alam pegunungan ini menempati Gunung Sebatung di Kotabaru yang mencapai ketinggian 676 mdpl. Sementara itu bentang alam dataran luas yang mendominasi Provinsi Kalimantan Selatan tersebar di bagian barat (Dataran S. Barito) dan di bagian timur (Dataran Pagatan-Batulicin). Dua dataran ini dipisahkan oleh jalur Pegunungan Meratus karena sungai-sungai beserta anak-anak sungai yang mengalir di kedua dataran tersebut berhulu di jalur Pegunungan Meratus.

Berdasarkan Peta Geologi Bersistem Indonesia berskala 1 : 250.000, yang disusun dan diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung, diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 4 (empat) Lembar Peta Geologi, yaitu Peta Geologi Lembar Banjarmasin, Peta Geologi Lembar Amuntai, Peta Geologi Lembar Sampanahan, dan Peta Geologi Lembar Kotabaru, dengan daerah pemetaan disusun oleh berbagai jenis batuan berumur muda (Kuarter) hingga berumur tua (Yura).

Secara geologi, Provinsi Kalimantan Selatan tidak dilalui jalur lempeng tektonik baik luar maupun dalam sehingga relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan bencana gunung berapi vulkanik, hal ini memberikan keamanan dalam berinvestasi di Kalimantan Selatan. Berdasarkan kondisi Geologi di Provinsi Kalimantan Selatan, daerah ini sebagian besar merupakan daerah subur dan sangat cocok untuk kegiatan bercocok tanam (pertanian dan perkebunan). Pada wilayah cekungan Barito dan cekungan asam-asam juga memiliki potensi kekayaan sumberdaya mineral sehingga bisa dijadikan wilayah eksplorasi seperti untuk pertambangan maupun penggalian. Fenomena geologi di Provinsi Kalimantan Selatan ini juga melahirkan batuan-batuan unik yang tersebar, sehingga memiliki potensi juga untuk dijadikan ekowisata atau geopark karena adanya keunikan akan batuan tersebut.





**Gambar 2.4**      Peta Geologi Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Geopark Meratus (2020)

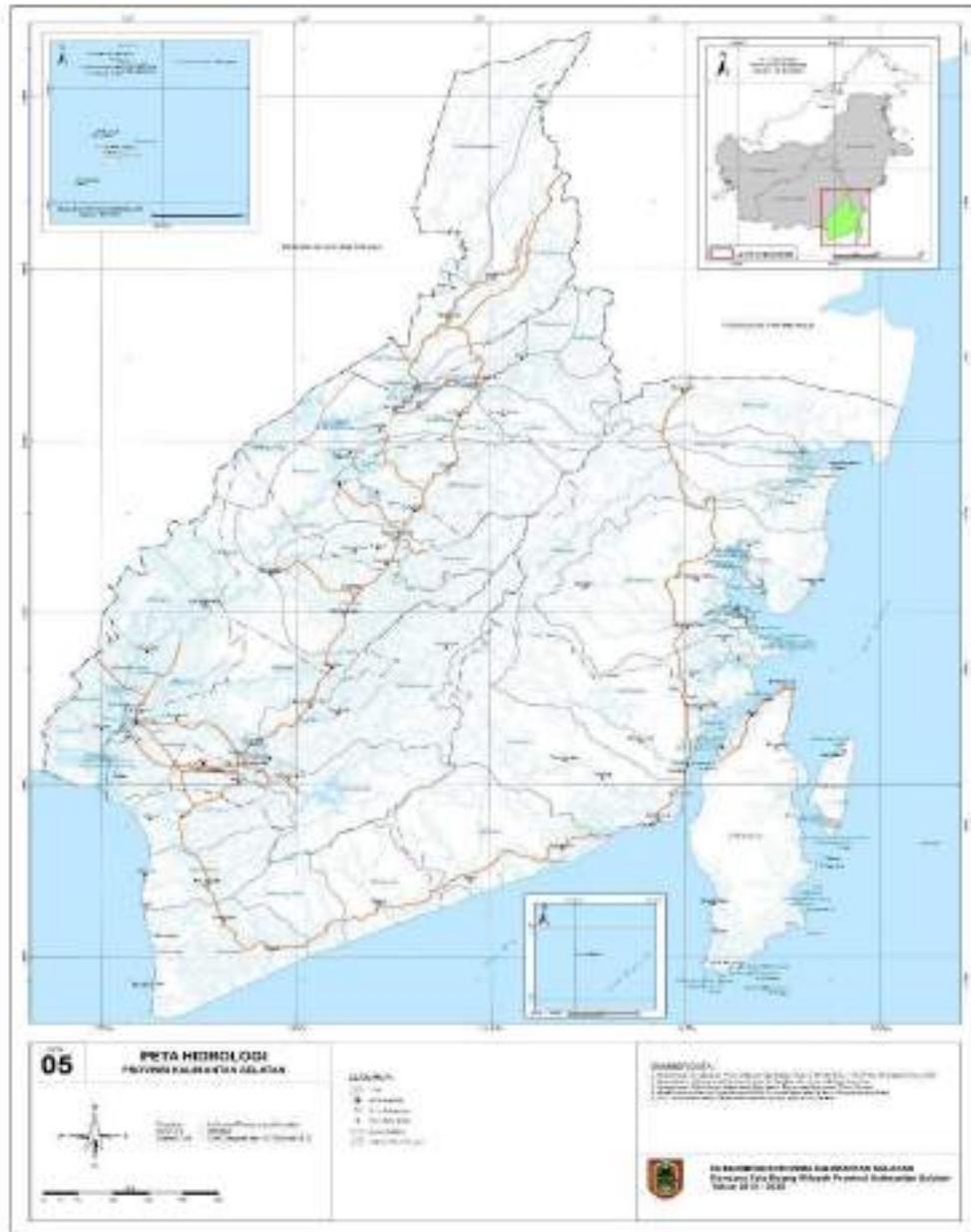
#### 2.1.1.4      Hidrologi

Wilayah Kalimantan Selatan terbagi dalam 13 wilayah Daerah, Luas DAS Barito adalah ± 363.357.868 ha yang mencakup beberapa kabupaten/kota dan DAS terpanjang ada di Kabupaten Kotabaru sebesar 92,738,847 ha dan di urutan kedua terpanjang adalah Kabupaten Tanah Bumbu 50,147,199 ha Tahun





2019 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan seluas  $\pm 3.753.052$  Ha. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.5.



Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018

**Gambar 2.5** Peta Hidrologi Provinsi Kalimantan Selatan





**Tabel 2.3** Pembagian Luas DAS Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
Tanah Laut	38.050.887
Kotabaru	92.738.847
Banjar	45.778.543
Barito Kuala	22.640.090
Tapin	21.662.117
Hulu Sungai Selatan	17.225.787
Hulu Sungai Tengah	14.169.582
Hulu Sungai Utara	8.622.199
Tabalong	29.515.527
Tanah Bumbu	50.147.199
Balangan	18.519.277
Banjarmasin	995.388
Banjarbaru	3.292.425
Kalimantan Selatan	363.357.868

Sumber: BP DAS Barito (2022)

#### 2.1.1.5 Meteorologi dan Klimatologi

Curah hujan tertinggi pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan (pada Stasiun Meteorologi Syamsuddin Noor Banjarbaru), terjadi pada bulan November dengan jumlah intensitas curah hujan 430 mm dan terendah pada bulan Agustus dengan jumlah intensitas curah hujan 80,5 mm dan temperatur udara sekitar 24,0°C hingga 33,9°C. Rincian lengkap terkait kondisi iklim di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Tabel 2.4.





**Tabel 2.4** Kondisi Iklim di Kalimantan Selatan Tahun 2022

Variabel Iklim/Cuaca/Tahun	Minimum	Maksimum	Rata-rata
<b>Temperatur (°C)</b>			
Tahun 2020	21	35,4	28,6
Tahun 2021	20,7	35	28,2
Tahun 2023	21,1	34,7	28,3
<b>Kelembaban (%)</b>			
Tahun 2020	44	100	78
Tahun 2021	44	100	78,6
Tahun 2023	47	100	78,7
<b>Kecepatan Angin (m/detik)</b>			
Tahun 2020	colm	13,36	1,59
Tahun 2021	colm	20	1,7
Tahun 2023	colm	11,8	2,7
<b>Tekanan Udara (mb)</b>			
Tahun 2020	998,1	1.023,0	1.003,9
Tahun 2021	997,9	1009,5	1.003,8
Tahun 2023	997,8	1008,5	1003,4
<b>Jumlah Curah Hujan (mm)</b>			
Tahun 2020			3.141,5
Tahun 2021			3.581,1
Tahun 2023			2.738,1
<b>Jumlah Hari Hujan (hari)</b>			
Tahun 2020			240
Tahun 2021			250
Tahun 2023			206
<b>Penyinaran Matahari (%)</b>			
Tahun 2020			58,75
Tahun 2021			52,50
Tahun 2023			50,4

Sumber: BMKG Prov. Kalsel 2023

Secara umum Provinsi Kalimantan Selatan di dominasi tipe iklim C2 (Schmidt & Ferguson) yang meliputi wilayah hampir seluruh Kabupaten/kota





kecuali Kabupaten Tabalong, sebagian Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Hal ini mengindikasikan bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh kelas tipe iklim yang agak basah, dipengaruhi oleh adanya vegetasi hutan rimba dan juga sedikit pengaruh dari angin laut. Menurut klasifikasi iklim oleh Oldeman, maka tipe iklim C lebih cocok untuk tanaman padi sekali dan tanaman palawija dua kali setahun.

#### 2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 12 jenis. Dengan jenis penggunaan lahan terluas adalah hutan seluas 1.109.500,41 ha (29,62 %), dan yang terkecil sungai/danau/waduk/telaga seluas 38.809,01 ha (1,04%). Persentase penggunaan lahan yang produktif pada tahun 2020 sekitar 60,26 % dari seluruh luas lahan, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 dengan luas lahan produktif sebesar 50,77%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar lahan di Kalimantan Selatan sudah dimanfaatkan, dengan demikian dibutuhkan optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendukung pengembangan wilayah. Luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5** Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Penggunaan Lahan	Toponim	Luas (Ha)	Percentage
Badan Air	A	31.203,81	0,8%
Belukar	B	373.931,59	10,1%
Bandara/Pelabuhan	Bdr	700,68	0,0%
Belukar Rawa	Br	209.897,59	5,7%
Hutan Mangrove Primer	Hmp	10.721,33	0,3%
Hutan Mangrove Sekunder	Hms	49.095,14	1,3%
Hutan Lahan Kering Primer	Hp	48.666,23	1,3%
Hutan Rawa Sekunder	Hrs	2.979,09	0,1%
Hutan Lahan Kering Sekunder	Hs	685.295,78	18,5%
Hutan Tanaman	Ht	128.056,76	3,4%
Pertambangan	Pb	103.825,92	2,8%
Pertanian Lahan Kering Campur	Pc	557.113,17	15,0%
Perkebunan	Pk	830.367,06	22,4%
Permukiman	Pm	73.988,85	2,0%
Pertanian Lahan Kering	Pt	121.070,31	3,3%





Penggunaan Lahan	Toponim	Luas (Ha)	Percentage
Rawa	Rw	38.060,00	1,0%
Sawah	Sw	378.326,41	10,2%
Tanah Terbuka	T	29.274,88	0,8%
Tambak	Tm	34.474,55	0,9%
Transmigrasi	Tr	5.338,37	0,1%
Total		3.712.387,52	100%

Sumber: KLHK Tahun 2022





**Tabel 2.6** Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Badan Air	Belukar	Bandara/Pelabuhan	Belukar Rawa	Hutan Mangrove Primer	Hutan Mangrove Sekunder	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Rawa Sekunder	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Tanaman	Pertambangan	Pertanian Lahan Kering Campur	Perkebunan	Permukiman	Pertanian Lahan Kering	Rawa	Sawah	Tanah Terbuka	Tambak	Transmigrasi	Total
Balangan	82	25.845		2.447			9.764		33.911	1.937	10.578	61.894	20.135	2.392	3.456		9.371	1.000			182.811
Banjar	8.528	38.691		12.128			5.280		83.929	40.553	8.024	78.123	78.497	7.257	27.047		64.702	6.166	893		459.819
Banjarbaru		513	107	2.609							1.888	2.774	1.802	10.322	2.580		7.625	313			30.533
Banjarmasin	675			360								103		5.186	485		3.039				9.847
Barito Kuala	8.343			23.873	84	1.172		230				5.994	67.661	3.555	13.053		113.555	102	4.124	924	242.670
Hulu Sungai Selatan	826	14.812		31.907			3.275		1.518	225	1.682	37.491	20.787	1.858	4.018	6.556	42.552	1.699			169.207
Hulu Sungai Tengah	70	15.709		9.594			12.256		19.964		190	52.073	585	4.307	6.228	4.361	31.800	204			157.340
Hulu Sungai Utara	723			38.407				63				2.818	5.476	2.904	655	25.185	14.076	400			90.707
Kotabaru	7.153	136.394	394	14.703	10.322	42.015	13.500	187	253.736	26.340	16.988	101.889	245.166	6.808	29.058	156	4.101	4.883	18.247	2.166	934.205
Tabalong	543	56.198	57	4.432			652	2.499	132.574	6.563	9.552	51.346	56.826	5.620	6.511	404	11.029	2.002	90	372	347.270
Tanah Bumbu	1.971	38.191	74	9.894	168	3.515			127.816	28.967	28.620	65.015	139.181	10.537	12.534	1.055	6.548	5.174	7.532	1.524	488.316





Kabupaten/ Kota	Badan Air	Belukar	Bandara/Pelabuhan	Belukar Rawa	Hutan Mangrove Primer	Hutan Mangrove Sekunder	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Rawa Sekunder	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Tanaman	Pertambangan	Pertanian Lahan Kering Campur	Perkebunan	Permukiman	Pertanian Lahan Kering	Rawa	Sawah	Tanah Terbuka	Tambak	Transmigrasi	Total
Tanah Laut	762	38.873	68	20.571	147	2.394	3.939		28.501	16.718	18.056	71.171	118.566	9.435	9.068	343	34.768	6.808	3.589	352	384.131
Tapin	1.528	8.707		38.972					3.347	6.753	8.247	26.424	75.685	3.808	6.376		35.162	525			215.534
<b>Total</b>	<b>31.204</b>	<b>373.932</b>	<b>701</b>	<b>209.898</b>	<b>10.721</b>	<b>49.095</b>	<b>48.666</b>	<b>2.979</b>	<b>685.296</b>	<b>128.057</b>	<b>103.826</b>	<b>557.113</b>	<b>830.367</b>	<b>73.989</b>	<b>121.070</b>	<b>38.060</b>	<b>378.326</b>	<b>29.275</b>	<b>34.475</b>	<b>5.338</b>	<b>3.712.388</b>

Sumber: KLHK, 2022

RKPD TAHUN 2024  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





### 2.1.1.7 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

Penduduk Kalimantan Selatan selama kurun waktu antara tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami perkembangan yang cukup variatif. Berdasarkan data BPS Hasil Sensus Penduduk tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022, penduduk Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 4.182.080 jiwa, sementara pada tahun 2021 berjumlah 4.122.576 jiwa yang diambil dari Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2035 BPS RI (2018-2022). Adapun rincian persebaran jumlah penduduk terdapat pada Tabel 2.7

**Tabel 2.7** Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota Tahun 2018-2022

Kabupaten /Kota	JUMLAH PENDUDUK				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	339.195	343.890	348.966	354.340	361.044
Kotabaru	336.719	342.217	325.622	329.483	334.158
Banjar	580.026	588.066	565.635	572.109	579.910
Barito kuala	310.016	313.595	313.021	316.963	321.769
Tapin	189.081	191.372	189.475	191.801	194.628
Hulu Sungai Selatan	235.217	237.702	228.006	229.960	232.212
Hulu Sungai Tengah	269.384	272.419	258.721	260.754	263.061
Hulu Sungai Utara	234.604	237.573	226.727	228.831	231.290
Tabalong	250.809	254.322	253.305	256.903	261.353
Tanah Bumbu	351.673	360.187	322.646	328.146	335.079
Balangan	129.505	131.428	130.355	132.213	134.512
Kota Banjarmasin	700.869	708.606	657.663	662.320	667.489
Kota Banjarbaru	255.597	262.719	253.442	258.753	265.575
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>4.182.695</b>	<b>4.244.096</b>	<b>4.073.584</b>	<b>4.122.576</b>	<b>4.182.080</b>

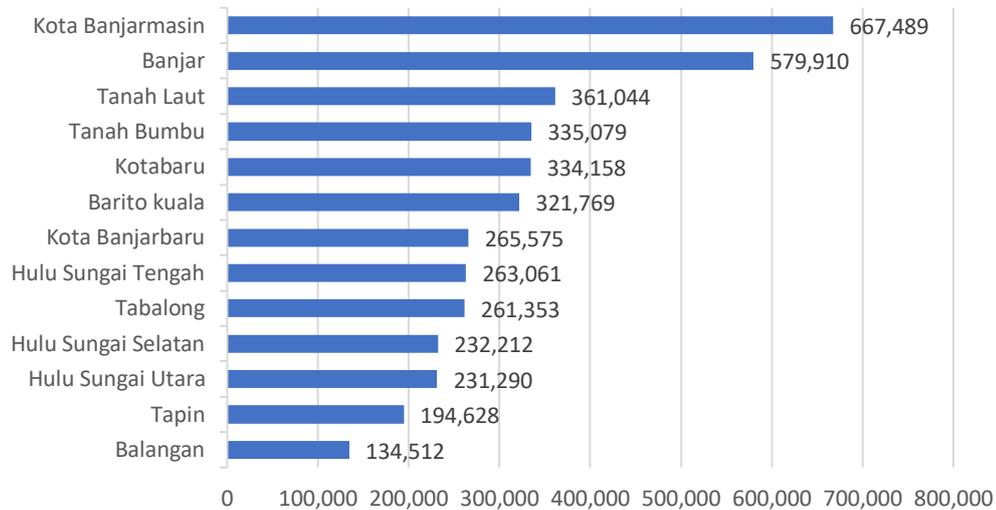
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Pada Tahun 2022 Kota Banjarmasin merupakan Kota / Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 667.489 Jiwa dan Kabupaten Balangan merupakan Kota/Kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebesar 134.512 Jiwa. Sebagaimana pada Tabel 2.7.



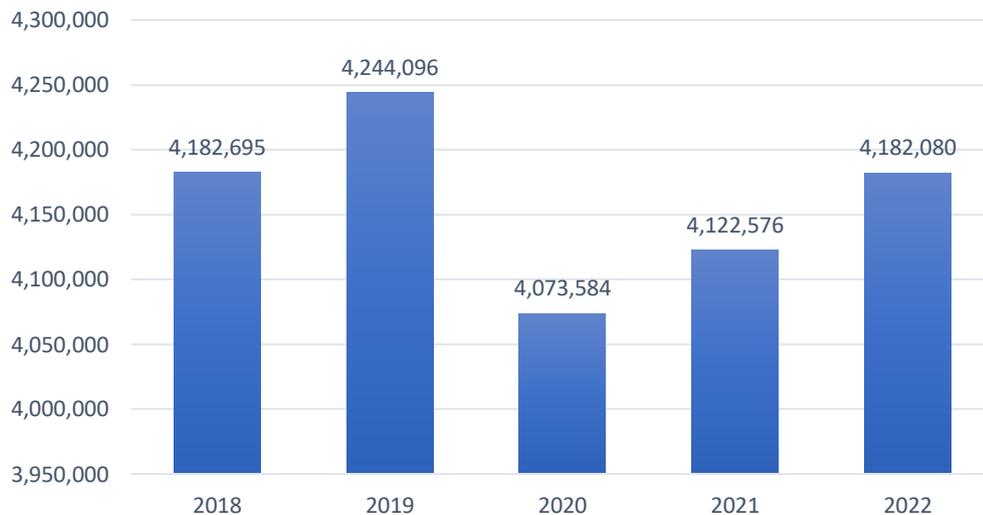


**Tabel 2.8** Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan berdasarkan Kabupaten dan Kota Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Tabel 2.9** Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Kepadatan penduduk di Kalimantan Selatan tahun 2022 mencapai 4.128.080 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2022 mengalami kenaikan terhitung dari tahun 2020. Dari segi Kepadatan Penduduk di 13 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Banjarmasin dengan kepadatan sebesar 9.134.21/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Kotabaru sebesar 34,34 jiwa/km<sup>2</sup>. Rincian jumlah penduduk menurut





wilayah, jenis kelamin dan kepadatan penduduk di Kalimantan Selatan seperti terlihat pada Tabel 2.10

**Tabel 2.10** Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
	Laki-Laki	Perempuan	Total			
Tanah Laut	185076	175968	361044	105,18	3.631,35	99,42
Kotabaru	172613	161545	334158	106,85	9.482,73	35,24
Banjar	292892	287018	579910	102,05	4.668,00	124,23
Barito Kuala	162909	158860	321769	102,55	2.996,46	107,38
Tapin	98346	96282	194628	102,14	2.700,82	72,06
Hulu Sungai Selatan	116453	115759	232212	100,60	1.804,94	128,65
Hulu Sungai Tengah	132155	130906	263061	100,95	1.472,00	178,71
Hulu Sungai Utara	115396	115894	231290	99,57	892,7	259,09
Tabalong	132537	128816	261353	102,89	3.766,97	69,38
Tanah Bumbu	171902	163177	335079	105,35	5.006,96	66,92
Balangan	67958	66554	134512	102,11	1.878,30	71,61
Kota Banjarmasin	334110	333379	667489	100,22	72	9270,68
Kota Banjarbaru	133558	132017	265575	101,17	371	715,84
Kalimantan Selatan	2115905	2066175	4182080	102,41	38.744,23	107,94

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2023)

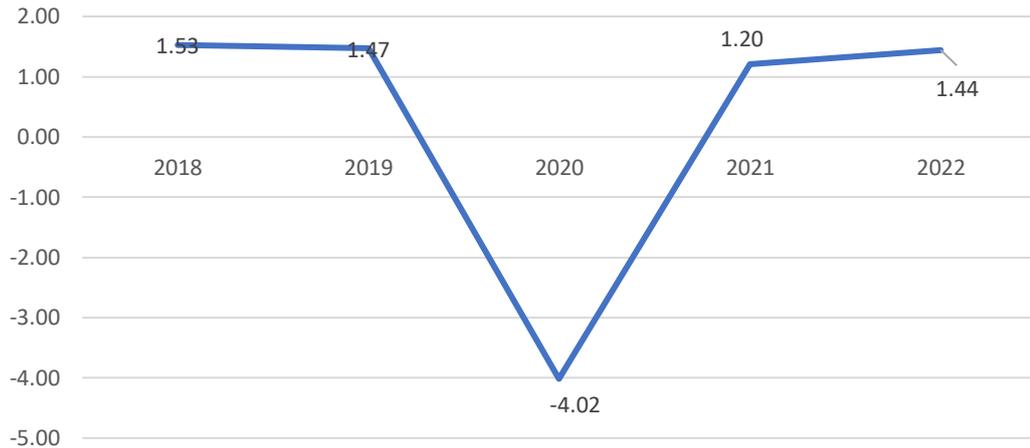
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2022 hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 2.115.905 jiwa, sedangkan perempuan sebesar 2.066.175 jiwa. Angka tersebut menjadikan *sex ratio* penduduk mencapai 102,41 yang mengindikasikan bahwa di antara 100 penduduk berjenis kelamin perempuan, terdapat 102-106 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Hal ini disajikan pada Tabel 2.10.





### 2.1.1.8 Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

Pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan selama periode Tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebesar 1,62% pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -4,02% jumlah penduduk Kalimantan selatan. Dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami kenaikan 2,65 % artinya dalam kurun waktu selama 5 tahun pertumbuhan penduduk mengalami penurunan sebesar 1,62%.



**Gambar 2.6** Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2023

Pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2018-2022 didominasi oleh Kota Banjarbaru 1.57% dan Kabupaten Tanah Bumbu 1.27%, disusul Tanah Laut 1.15, sementara yang terendah adalah Kota Banjarmasin 0.53% dan Hulu Sungai Tengah 0.59% dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 0.64%.





**Tabel 2.11** Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten Kota Tahun 2018-2022

Kabupaten /Kota	JUMLAH PENDUDUK (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	1,46	1,38	1,48	1,54	1,89
Kotabaru	1,63	1,63	-4,85	1,19	1,42
Banjar	1,48	1,39	-3,81	1,14	1,36
Barito kuala	1,25	1,15	-0,18	1,26	1,52
Tapin	1,29	1,21	-0,99	1,23	1,47
Hulu Sungai Selatan	1,13	1,06	-4,08	0,86	0,98
Hulu Sungai Tengah	1,08	1,13	-5,03	0,79	0,88
Hulu Sungai Utara	1,30	1,27	-4,57	0,93	1,07
Tabalong	1,50	1,40	-0,40	1,42	1,73
Tanah Bumbu	2,47	2,42	-10,42	1,70	2,11
Balangan	1,57	1,48	-0,82	1,43	1,74
Kota Banjarmasin	1,17	1,10	-7,19	0,71	0,78
Kota Banjarbaru	2,89	2,79	-3,53	2,10	2,64
Kalimantan Selatan	1,53	1,47	-4,02	1,20	1,44

Sumber: BPS Kalimantan Selatan (2023)

Pada tahun 2022 pertumbuhan penduduk selama periode 2018-2022 di Kabupaten/ Kota terkoreksi berdasarkan hasil sensus Penduduk pada tahun 2020.

### 2.1.1.9 Penduduk Menurut Pekerjaan

**Tabel 2.12** Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan menurut Jenis Pekerjaan/Lapangan Usaha Tahun 2021 dan 2022

No	Jenis Lapangan Usaha	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah	%	Jumlah	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	694.45	33,33	678.086	32,41
B	Pertambangan dan Penggalian	70.7	3,39	86.667	4,14
C	Industri Pengolahan	183.041	8,79	170.244	8,14
D	Pengadaan Listrik, Gas	3.474	0,17	6.687	0,30
E	Pengadaan Air	6.398	0,31	4.563	0,22
F	Konstruksi	109.031	5,23	113.680	1,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Dan Reparasi Mobil dan sepeda Motor	412.249	19,79	388.261	18,56
H	Transportasi dan Pergudangan	82.39	3,95	80.610	0,76





No	Jenis Lapangan Usaha	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah	%	Jumlah	%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minuman	142.985	6,86	152.999	7,31
J	Informasi dan Komunikasi	13.429	0,64	8.333	0,40
K	Jasa Keuangan	16.109	0,77	16.273	0,78
L	Real Estate	2.912	0,14	4.179	0,20
M.N	Jasa Perusahaan	20.15	0,97	31.306	1,50
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	81.334	3,90	95.825	4,58
P	Jasa Pendidikan	109.137	5,24	114.424	5,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32.014	1,54	35.162	1,68
R.S. T.U	Jasa lainnya	103.516	4,97	104.926	5,02
	<b>Jumlah Penduduk Bekerja</b>	<b>2.083.319</b>	<b>51,14</b>	<b>2.092.225</b>	<b>66,09</b>
	<b>Jumlah Penduduk Angkatan Kerja</b>	<b>2.186.967</b>	<b>53,69</b>	<b>2.196.250</b>	<b>69,38</b>
	<b>Jumlah Penduduk Pencari Kerja</b>	<b>103.648</b>	<b>4,74</b>	<b>104.025</b>	<b>4,74</b>
	<b>Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>1.886.617</b>	<b>46,31</b>	<b>1.055.086</b>	<b>33,33</b>
	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>4.073.584</b>	<b>100</b>	<b>4.182.080</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2023

#### 2.1.1.10 Penduduk Menurut Usia Sekolah

Penduduk usia sekolah yang menerima layanan pendidikan di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 mencapai 99,64% untuk usia 7-12 tahun, 92,43% untuk usia 13-15 tahun, 68,67% untuk usia 16-18 tahun, dan 23,82% untuk tingkat perguruan tinggi. Secara rinci Persentase penduduk menurut jenis kelamin yang menerima layanan pendidikan sebagaimana tabel berikut.





**Tabel 2.13** Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kalimantan Selatan Tahun 2022

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Tidak/ Belum Pernah Sekolah (%)	Masih Sekolah (%)	Tidak Sekolah lagi (%)
<b>Laki-laki</b>			
7-12	0,84	99,16	-
13-15	0,81	92,67	6,52
16-18	0,84	69,56	29,60
19-24	0,76	23,61	75,63
7-24	0,81	69,77	29,42
<b>Perempuan</b>			
7-12	0,39	99,61	-
13-15	0,46	94,40	5,14
16-18	0,37	69,03	30,60
19-24	0,28	25,81	73,91
7-24	0,36	70,34	29,30
<b>Laki-laki dan Perempuan</b>			
7-12	0,62	99,38	-
13-15	0,64	93,50	5,85
16-18	0,62	69,31	30,07
19-24	0,52	24,70	74,77
7-24	0,59	70,05	29,36

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tingkat sekolah dasar (7-12 tahun) hampir tidak terjadi perbedaan partisipasi baik laki-laki maupun perempuan demikian juga pada usia menengah pertama (13-15 tahun). Namun, pada usia sekolah menengah atas (16-18 tahun) terjadi disparitas antara laki-laki sebesar 69,56 dan perempuan sebesar 69,03, di mana persentase laki-laki yang sekolah lebih tinggi dari pada perempuan.

#### 2.1.1.11 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

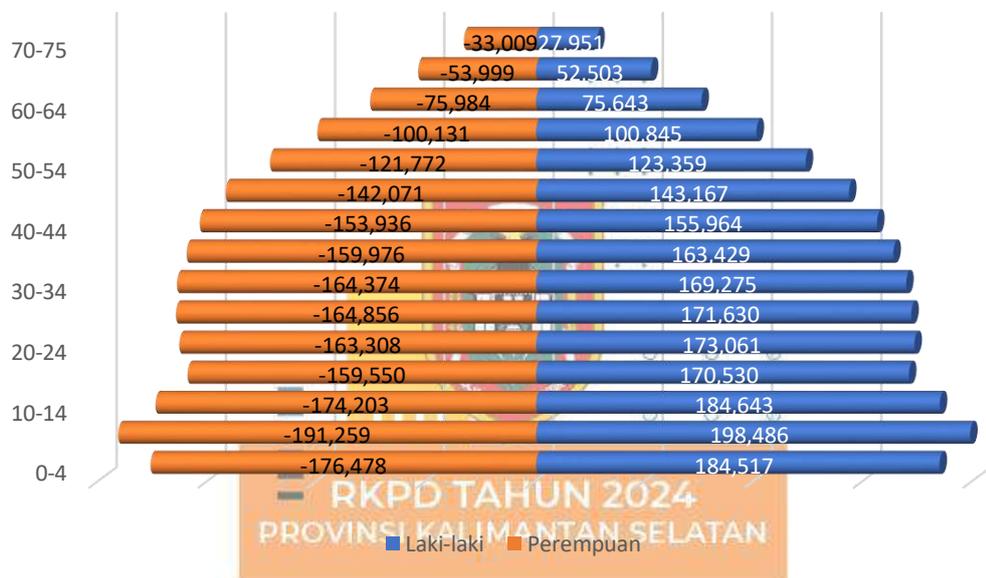
Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran umum struktur umur penduduk. Piramida penduduk ini diantaranya berguna untuk menganalisis produktivitas penduduk dan bonus demografi. Piramida penduduk Kalimantan Selatan tahun 2022 memperlihatkan sebagian besar penduduk Kalimantan





Selatan berada dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebesar 68,21%. sedangkan penduduk lanjut usia (65 ke atas) sebesar 5,25%. dan penduduk usia 0-14 tahun sebesar 26,53%. Kondisi Penduduk Kalimantan Selatan memperlihatkan bahwa sebenarnya Provinsi Kalimantan Selatan telah berada pada posisi bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara 15 hingga 64 tahun.

PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK KALIMANTAN SELATAN  
BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022



**Gambar 2.7** Perbandingan Jumlah Penduduk berdasarkan Umur di Kalimantan Selatan Tahun 2022

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2023)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa 1 orang usia non produktif ditanggung oleh 2 sampai 3 orang usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan akan mampu mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan jika bonus demografi ini dapat dimanfaatkan dengan baik. pada sisi lain jika tidak terkelola dengan baik akan menjadi beban.

Manfaat bagi perekonomian Kalimantan Selatan dengan usia produktif lebih banyak dari usia non produktif dalam bonus demografi yang dimanfaatkan dengan baik akan membuat jumlah tabungan dari penduduk produktif semakin





besar. sehingga perekonomian daerah semakin bertumbuh. Manfaat lainnya adalah terbentuknya generasi emas yang diartikan sebagai penerus yang kreatif dan mampu memikul tanggung jawab serta membangun daerah yang diperoleh melalui pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

### 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berbicara tentang konsep pengembangan potensi daerah Provinsi Kalimantan Selatan, secara konsep kewilayahan akan dibagi menjadi 3 wilayah besar yang terdiri atas 11 Kabupaten dan 2 Kota, pembagian ini dibuat berdasarkan identifikasi kesamaan karakteristik daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Adapun pembagian kewilayahan ini antarlain:

#### Kawasan Banjarbakula

- Banjar
- Banjarmasin
- Barito Kuala
- Tanah laut
- Banjarbaru

#### Kawasan Industri & Pesisir

- Tanah Laut
- Tanah Bumbu
- Kotabaru

#### Kawasan Banua Anam

- Tapin
- Hulu Sungai Selatan
- Hulu Sungai Utara
- Hulu Sungai Tengah
- Balangan
- Tabalong



Pengembangan potensi tersebut didasarkan pada kesamaan karakteristik daerah serta latar belakang yang sama baik dari segi sumber mata pencaharian, potensi lahan, ketersediaan tenaga kerja, serta factor lainnya.

Pada periode 2017-2022, kesenjangan wilayah Kalimantan Selatan semakin menurun. Hal ini terlihat dari hasil analisis kesenjangan wilayah menggunakan Indeks Williamson yang menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan indeks tersebut. Nilai Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan termasuk





dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Pada kurun waktu tahun 2018 – 2022, Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi yaitu dari 0,407 menjadi 0,509. Pertumbuhan rata-rata Indeks Williamson dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami kenaikan sebesar 0.102. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang semakin menurun. Kecenderungan penurunan Indeks Williamson diharapkan dapat menjadi indikator pemerataan wilayah yang semakin baik.

Pada Tahun 2020 ICOR Kalimantan Selatan turun sampai minus 12,44. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga minus atau pertumbuhan ekonomi yang negatif akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, ICOR kembali meningkat menjadi 6,66 dan semakin membaik pada 2022 dengan angka 4,61 dampak dari mulai puluhnya perekonomian Kalimantan Selatan pasca Pandemi Covid-19.



Sumber: KEMD Kalsel, diolah (2023)

**Gambar 2.8** ICOR Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2022





**Tabel 2.14** Data Sebaran pekerjaan kepala keluarga di Kalimantan Selatan pada desil 1 menurut Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bakerja	Petani	Nelayan	Pedagang	Pegawai Swasta	Wiraswasta	Pensiunan	Pekerja Lepas	Lainnya
	<b>Total</b>	<b>19.607</b>	<b>124.094</b>	<b>12.505</b>	<b>19.521</b>	<b>29.175</b>	<b>73.619</b>	<b>1.325</b>	<b>68.050</b>	<b>2.993</b>
1	Tanah Laut	1.850	15.097	2.710	2.240	5.355	5.137	139	7.035	416
2	Kotabaru	1.119	3.735	4.145	303	1.749	2.174	23	2.073	134
3	Banjari	1.525	15.425	463	2.118	1.603	5.156	100	6.433	181
4	Barito Kuala	1.187	20.069	359	1.036	1.596	5.502	44	3.496	162
5	Tapin	519	7.276	37	615	683	3.614	67	877	58
6	Hulu Sungai Selatan	1.862	9.598	1.107	2.054	669	4.669	89	8.437	187
7	Hulu Sungai Tengah	1.116	15.281	475	1.387	472	7.552	113	1.614	193
8	Hulu Sungai Utara	1.632	6.359	1.708	2.620	380	10.796	77	4.512	215
9	Tabalong	607	13.830	40	1.707	1.670	5.293	129	1.497	290
10	Tanah Bumbu	1.425	5.462	1.341	762	2.342	5.979	39	3.780	214
11	Balangan	403	9.843	25	551	469	1.545	19	850	98
12	Kota Banjarmasin	5.169	1.049	85	3.297	9.264	12.073	319	22.347	530
13	Kota Banjarbaru	1.193	1.070	10	831	2.923	4.129	167	5.099	315

### 2.1.2.1 Wilayah Metropolitan Banjarbakula

Pada tahun 2019 Pemerintah Pusat memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun peluang yang dapat menguntungkan adalah adanya potensi ekonomi yang akan saling membutuhkan antara IKN dengan kawasan Metropolitan di Banjarbakula. Konsep Perkotaan Wilayah Metropolitan Banjarbakula yang akan menjadi kawasan Metropolitan di Provinsi Kalimantan Selatan nantinya akan menjadi titik inti pusat aktifitas penduduk perkotaan. Dengan adanya tahapan dalam fase pengembangan IKN baru tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat merespon dan menyediakan kebutuhan untuk menghadapi lonjakan urbanisasi dan pengembangan wilayah tersebut.





#### 2.1.2.2 Wilayah Banua Anam – Pusat: Tanjung Dan Sebagai Hub: Kandangan

Di titik ini akan terdapat rencana pengembangan industri baru yaitu tepatnya KI Tabalong. Tanjung ini berpeluang menjadi pintu gerbang utama dari hubungan aglomerasi antara IKN di Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan selain itu juga karena posisinya yang berbatasan langsung dan sangat dekat yaitu hanya memiliki jarak tempuh  $\pm 4$  jam saja. Adapun kawasan industri pendukung IKN adalah berada di Desa Seradang Kecamatan Harui dan Kecamatan Jaro yang akan dijadikan kawasan penyangganya.

Dengan adanya 3 Kawasan Industri di Kawasan pesisir selatan Provinsi Kalimantan Selatan (KI Batulicin, KI Mantuil dan KI Tabalong), akan butuh titik pusat baru yang menjadi core ketiganya, peluang ini cocok diambil perannya oleh Kandangan yang menjadi titik perlintasan transportasi barang maupun penumpang. Secara ekonomi Banua Anam akan diarahkan pengembangannya sebagai pusat Pangan & Industri Hilirisasai dan Bahan jadi.

#### 2.1.2.3 Kawasan Industri & Pesisir – Pusat Ki Batulicin – Kotabaru – KEK Mekar Putih

Kawasan ini memiliki tiga kawasan inti dimana peran masing-masing adalah sebagai kawasan industri, Kawasan pelabuhan bongkar muat dan hankam serta Kawasan ekonomi khusus. Namun perlu juga diketahui bahwa terdapat Pulau Sebuku dan Pulau Laut yang daerahnya merupakan penghasil dari batubara dan binih beji yang biasanya menjadi komoditi penting ekspor bahan industri ke wilayah lain. Sebagai core dari kawasan paling selatan, maka memungkinkan menjadi Maritim Center yang akan menjadi gerbang masuk barang logistik yang akan di distribusikan ke wilayah IKN. KI Batulicin berperan sebagai titik kumpul barang dari Pelabuhan Kotabaru, Pulau Sebuku dan Pulau Laut dan Mekar Putih sebelum didistribusikan ke IKN. Pelabuhan Stagen di Kotabaru berperan sebagai titik bongkar muat barang yang akan dikirimkan ke IKN melewati KI Batulicin (maka akan dibutuhkan semacam warehouse) dan adanya hankam sebagai Langkah untuk mengantisipasi adanya barang illegal yang melalui jalur ALKI II. Sedangkan KEK Mekar Putih akan banyak berperan dalam kegiatan ekonomi wilayah yang menjadi Maritim Center di Provinsi Kalimantan Selatan. Keempat titik kawasan ini perlu dihubungkan dengan suatu jaringan jalan yang akan memudahkan proses distribusi baik itu dengan jalan baru atau jembatan. Secara ekonomi Kawasan Industri&Pesisir akan diarahkan pengembangannya sebagai Industri Ekstraksi dan Bahan Setengah Jadi Bahan baku industri besar.



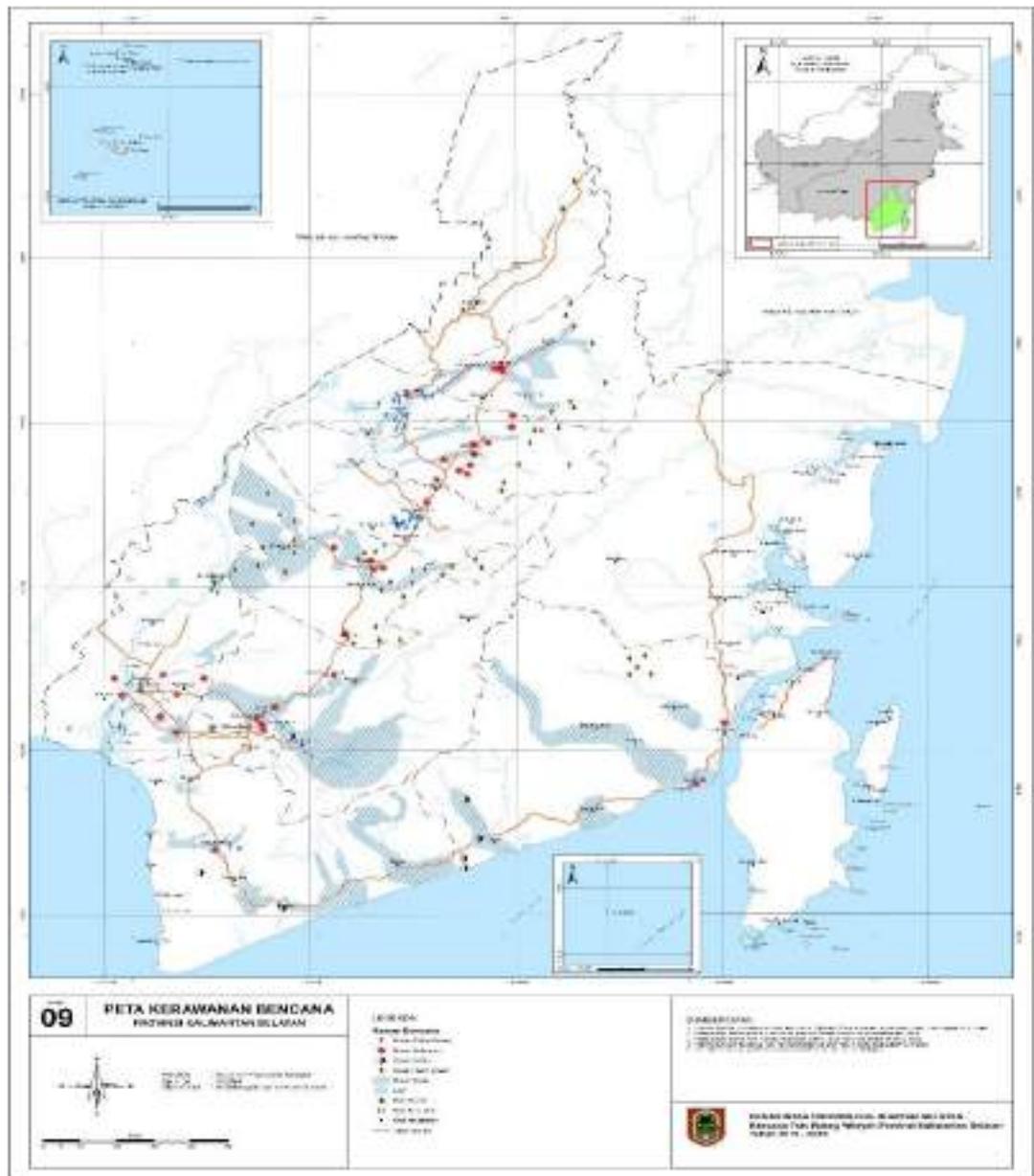


### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi di seluruh wilayah khususnya di daerah rawan dan berisiko. Bencana tersebut juga dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat, pemerintah ataupun swasta, bahkan tidak sedikit jiwa yang terancam. Dengan demikian, perlu adanya upaya pengurangan risiko bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Potensi bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat dari bencana yang pernah terjadi ataupun yang belum pernah terjadi. Berdasarkan DIBI tercatat 8 (delapan) jenis kejadian bencana yang pernah terjadi yaitu bencana banjir, banjir bandang, kekeringan, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit serta cuaca ekstrem.





Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018

**Gambar 2.9** Peta Rawan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan





**Tabel 2.15** Data Bencana Banjir di Kalimantan Selatan s.d Data Terakhir Tahun 2021

KAB/KOTA	2018				2019				2020				2021			
	Frekuensi Kejadian	TERDAMPAK		Rumah Terendam	Frekuensi Kejadian	TERDAMPAK		Rumah Terendam	Frekuensi Kejadian	TERDAMPAK		Rumah Terendam	Frekuensi Kejadian	TERDAMPAK		Rumah Terendam
		KK	JIWA			KK	JIWA			KK	JIWA			KK	JIWA	
		L	L			L	L			L	L			L	L	
BARITO KUALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1.835	671
BANJARMASIN	2	-	-	-	1	2	9	2	-	-	-	-	33	57.884	185.756	58.644
BANJARBARU	3	55	330	53	3	64	253	64	14	861	1.861	1.04	21	2.981	8.609	3.072
BANJAR	2	-	-	199	-	-	-	-	22	1.451	4.61	1.422	53	56.096	157.743	52.66
TAPIN	4	79	373	128	17	877	3.295	877	11	601	2.041	623	4	392	1.797	430
HULU SUNGAI SELATAN	-	-	-	-	4	38	132	38	2	10	56	10	11	5.063	67.583	4.938
HULU SUNGAI TENGAH	-	-	-	-	1	2	7	2	10	336	904	333	21	12.091	31.382	9.455
HULU SUNGAI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	32	1.843	6.118	1.838	12	11.155	33.576	10.085
BALANGAN	7	38	148	38	13	939	3.777	962	58	3.662	12.002	3.508	89	15.876	52.233	14.599
TABALONG	3	23	77	23	5	110	293	110	119	10.371	4.641	10.751	13	619	2.027	73
TANAH LAUT	3	26	90	163	2	253	839	207	44	4.2	3.614	3.652	37	14.578	45.687	3.984
TANAH BUMBU	5	2.151	575	470	19	6.419	23.284	6.52	34	5.516	18.72	5.538	33	6.643	22.229	6.562
KOTABARU	3	90	185	16	2	15	38	15	3	198	606	198	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>2.462</b>	<b>5.778</b>	<b>1.09</b>	<b>67</b>	<b>8.719</b>	<b>31.927</b>	<b>8.797</b>	<b>349</b>	<b>29.049</b>	<b>95.173</b>	<b>28.913</b>	<b>334</b>	<b>83.378</b>	<b>10.457</b>	<b>175.873</b>

Data disajikan hanya tiga tahun 2020 sd 2022





## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sub Bab Aspek Kesejahteraan Masyarakat memberikan gambaran perkembangan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Sub bab ini menjelaskan perkembangan kesejahteraan masyarakat dalam dua fokus, yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Sub bab fokus kesejahteraan dan pemerataan menyajikan data yang memuat indikator-indikator perekonomian. Tujuan sajian data tersebut adalah untuk menggambarkan secara makro kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta kondisi pemerataan-ketimpangan perekonomian daerah.

#### 2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya produksi atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah selama periode waktu tertentu, yang dalam hal ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam data PDRB dapat tergambar ukuran ekonomi dan pasar suatu wilayah serta potensi dan kesehatan ekonomi. Data PDRB kemudian dapat diturunkan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan pasar di suatu wilayah serta menggambarkan ukuran relatif dengan wilayah lain.

Memasuki triwulan kedua tahun 2022, pandemi Covid-19 mulai mereda. Subvarian baru memang kembali menyerang, namun dampaknya tidak semengerikan varian-varian sebelumnya. Namun, guncangan ekonomi belum usai. Tingginya permintaan seriring pelanggaran pembatasan, konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai, dan meningkatnya suku bunga acuan dolar AS memicu terjadinya peningkatan inflasi secara signifikan. Inflasi meroket di hampir seluruh dunia, bahkan sejumlah negara mengalami hiperinflasi. Meski demikian, hingga triwulan II-2022, Indonesia cenderung merasakan dampak guncangan tersebut secara signifikan, termasuk Kalimantan Selatan. Meroketnya harga komoditas di pasar global (seperti batubara dan CPO) justru menjadi berkah. Namun, inflasi yang meningkat pesat di seluruh dunia harus tetap menjadi sinyal agar pemerintah Indonesia pada umumnya, dan Kalimantan Selatan khususnya, lebih berhati-hati dalam mengelola perekonomian. Berkaca pada masifnya impor berbagai komoditas, cepat atau lambat inflasi tinggi akan mulai menyerang. Pemulihan





ekonomi pun pada akhirnya akan terhambat. Di tengah ancaman gejolak ekonomi pasca pemulihan ekonomi.

**Tabel 2.16** PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17.925.111,06	18.568.350,40	18.390.799,75	18.606.671,67	18.884.180
Pertambangan dan Penggalian	32.940.944,71	33.412.746,09	31.920.344,87	33.295.012,43	35.088.490
Industri Pengolahan	16.627.550,28	16.868.962,35	16.298.968,71	17.314.000,46	17.850.030
Pengadaan Listrik dan Gas	149.293,39	156.342,18	163.758,05	171.396,94	184.860,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	512.638,14	541.310,42	572.856,46	601.689,42	630.960,00
Konstruksi	9.621.524,89	10.206.761,40	10.075.347,02	10.364.042,16	10.812.570,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.534.598,52	12.390.882,70	11.972.118,93	12.235.516,97	13.202.320,00
Transportasi dan Pergudangan	7.751.309,67	8.210.077,15	7.773.286,96	7.913.714,05	9.298.000,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.497.506,12	2.682.547,57	2.628.485,40	2.688.918,48	2.966.300,00
Informasi dan Komunikasi	4.782.740,28	5.133.111,39	5.510.897,83	5.908.863,68	6.319.210,00
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.188.555,39	4.258.124,99	4.316.334,66	4.367.684,62	4.384.930,00
Real Estate	2.856.690,92	3.026.703,54	3.144.114,02	3.310.575,97	3.513.450,00
Jasa Perusahaan	766.722,50	822.583,45	806.228,01	835.413,13	898.300,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.553.664,37	6.989.221,96	7.045.528,54	7.138.270,02	7.182.470,00
Jasa Pendidikan	5.597.185,79	6.019.490,93	6.117.205,36	6.211.319,50	6.429.090,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.309.803,15	2.445.832,58	2.613.229,33	2.916.029,55	3.047.170,00
Jasa lainnya	1.436.738,77	1.538.502,49	1.516.091,10	1.533.732,06	1.646.940,00
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>128.052.577,95</b>	<b>133.271.551,61</b>	<b>130.865.594,99</b>	<b>135.412.851,11</b>	<b>142.339.280,00</b>

Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2023. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.





**Tabel 2.17** Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.458.195,87	25.837.804,20	25.786.221,51	26.827.758,81	28.635.330,00
Pertambangan dan Penggalian	35.461.568,39	34.453.278,87	32.759.686,03	42.459.250,00	80.520.100,00
Industri Pengolahan	24.081.103,07	24.635.649,84	24.215.498,24	26.862.852,21	28.615.170,00
Pengadaan Listrik dan Gas	237.105,73	255.041,40	274.729,38	294.965,21	320.960,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	709.004,04	754.901,68	805.799,91	855.212,11	912.800,00
Konstruksi	13.675.860,55	14.910.490,27	14.803.229,09	15.742.374,26	17.267.780,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.220.840,88	19.031.697,30	18.731.969,68	19.798.253,90	22.758.700,00
Transportasi dan Pergudangan	11.387.097,79	12.469.229,87	11.796.543,93	12.116.837,98	15.764.970,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.463.666,12	3.834.598,98	3.846.302,13	4.006.240,17	4.506.710,00
Informasi dan Komunikasi	6.065.457,61	6.570.311,90	7.032.160,26	7.586.349,56	8.298.940,00
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.207.185,67	6.450.604,51	6.569.432,47	6.933.859,50	7.461.550,00
Real Estate	3.795.365,92	4.118.667,03	4.352.929,63	4.676.170,96	5.072.210,00
Jasa Perusahaan	1.175.720,32	1.305.731,84	1.309.540,08	1.379.195,31	1.543.080,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.222.282,09	11.103.082,37	11.416.985,01	11.722.823,68	12.024.990,00
Jasa Pendidikan	8.008.698,52	8.816.478,94	9.093.591,09	9.464.282,02	9.932.270,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.364.770,60	3.628.089,76	3.959.497,72	4.543.250,64	4.864.990,00
Jasa lainnya	2.150.132,72	2.384.995,97	2.396.997,57	2.457.612,14	2.755.990,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	171.684.055,90	180.560.654,72	179.151.113,73	192.576.581,16	251.256.540,00

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2023. BPS Provinsi Kalimantan Selatan





**Tabel 2.18** PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2018–2022 (Triliun Rupiah)  
Menurut Pengeluaran

Komponen	ADHK Tahun 2018 - 2022					ADHB Tahun 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	62,07	61,91	62,40	61,91	65,96	86,96	87,61	90,01	87,61	103,373
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,28	1,25	1,26	1,25	1,32	1,96	1,94	2,01	1,94	2,19
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,74	13,38	13,87	13,38	13,81	22,16	21,95	23,14	21,95	24,62
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,5	30,07	30,30	30,07	31,91	44,99	44,86	46,34	44,86	51,62
5 Perubahan Inventori	0,49	0,05	0,07	0,05	-5,50	0,68	0,07	0,10	0,07	-8,59
6 Ekspor Barang dan Jasa	100,06	89,24	106,23	89,24	124,74	100,65	147,96	100,65		
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	74,87	65,04	78,72	65,04	29,87	100,95	77,94	116,98	77,94	70,29
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	128,05	133,27	130,87	135,41	142,33	171,68	180,56	179,15	192,58	251,25

Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2023. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

### 2.2.1.2 Struktur Perekonomian Daerah

Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan III-2022 masih didominasi oleh Pertambangan dan Penggalan sebesar 28,70 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,29 persen; Industri Pengolahan sebesar 11,50 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,37 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Selatan mencapai 62,87 persen. Sisanya sebesar 37,13 persen berbagi nilai pada 13 kategori. lapangan usaha lainnya.





**Tabel 2.19** Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 - 2022

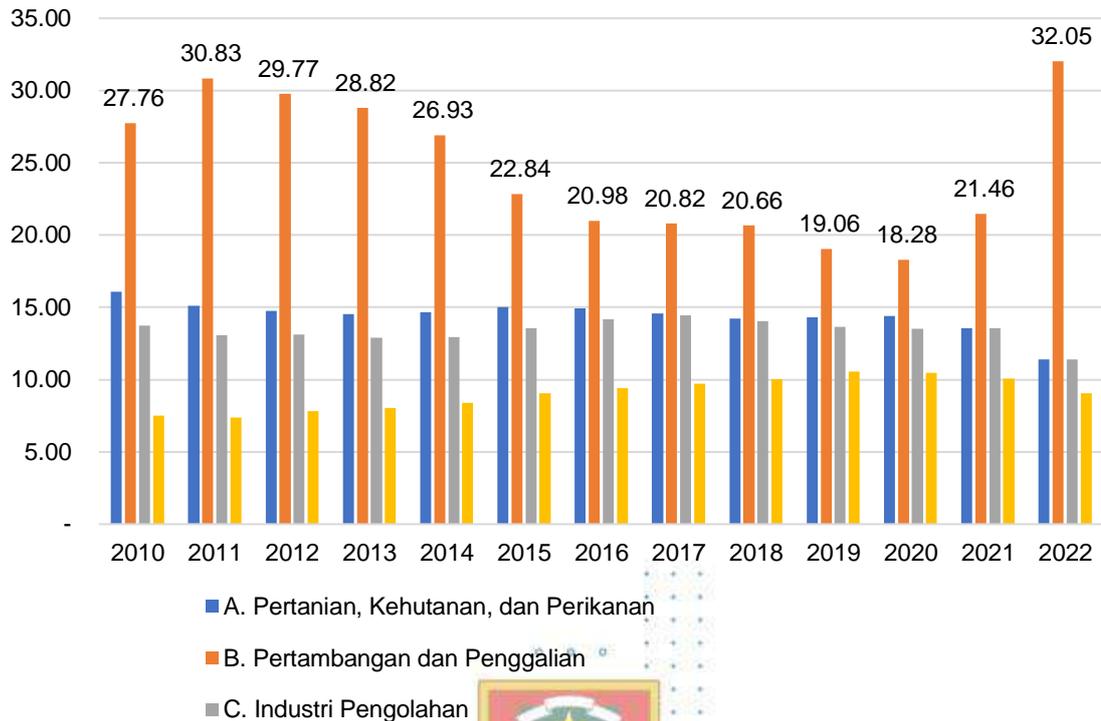
Lapangan Usaha	TAHUN (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,25	14,36	14,39	13,93	13,29
Pertambangan dan Penggalian	20,65	18,71	18,29	19,37	28,70
Industri Pengolahan	14,03	13,63	13,52	13,95	11,50
Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14	0,15	0,15	0,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,41	0,42	0,45	0,44	0,36
Konstruksi	7,97	8,25	8,26	8,17	7,16
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,03	10,60	10,46	10,28	9,37
Transportasi dan Pergudangan	6,63	6,92	6,58	6,29	6,78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,02	2,12	2,15	2,08	1,73
Informasi dan Komunikasi	3,53	3,68	3,93	3,94	3,33
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,62	3,57	3,67	3,60	2,95
Real Estate	2,21	2,28	2,43	2,43	2,02
Jasa Perusahaan	0,68	0,72	0,73	0,72	0,63
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,96	6,30	6,37	6,09	4,96
Jasa Pendidikan	4,66	4,92	5,08	4,91	4,05
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,96	2,06	2,21	2,36	1,95
Jasa lainnya	1,25	1,32	1,34	1,28	1,09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2023. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.





## SHARE PERTAMBANGAN KALSEL

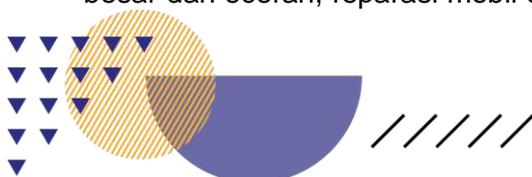


Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2023. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

**Gambar 2.10** Data Share (Bagi Hasil) Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan

Dari uraian sebelumnya, maka dapat diambil poin-poin penting mengenai deskripsi struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. Poin-poin tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Sektor dominan dengan nilai lebih dari Rp. 20 Triliun Atas Dasar Harga Berlaku adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor industri pengolahan.
2. Sektor yang mempunyai nilai lebih dari Rp. 10 Triliun Atas Dasar Harga Berlaku adalah sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta sektor transportasi dan pergudangan.
3. Tidak ada perubahan urutan kontribusi sektoral yang signifikan selama Tahun 2017-2022
4. Terjadi penurunan kontribusi pada tiga sektor dominan.
5. Terjadi kecenderungan peningkatan kontribusi pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, dan





sektor transportasi dan pergudangan. Sementara itu sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami fluktuasi kontribusi

Pada posisi data terakhir yaitu PDRB ADHB menurut lapangan usaha TW 1 sampai 4 Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan, struktur PDRB Kalimantan Selatan yang terbesar masih sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 28,85 % dan yang terendah adalah sektor Pengadaan Listrik, Gas sebesar 0,57 %.

### 2.2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan barang dan jasa (produk) yang dihasilkan pada suatu waktu tertentu di wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan peningkatan ukuran ekonomi. peningkatan ukuran pasar serta secara tidak langsung menggambarkan peningkatan kapasitas produksi.

Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan di bandingkan dengan pertumbuhan regional Kalimantan dan nasional yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.20** Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan 2018 - 2022

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kalimantan Barat	5.07	5.09	-1.82	4.78	5.07
Kalimantan Timur	2.64	4.70	-2.87	2.48	6.45
Kalimantan Selatan	5.13	4.08	-1.81	3.48	5.11
Kalimantan Tengah	5.61	6.12	-1.41	3.40	4.48
Kalimantan Utara	5.36	6.89	-1.09	3.98	5.34
<b>Nasional</b>	<b>5.43</b>	<b>4.98</b>	<b>-2.03</b>	<b>3.70</b>	<b>5.31</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

**Tabel 2.21** Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Kab/Kota Tahun 2018-2022

PROV. KAB/KOTA	TAHUN (PERSEN)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	4.65	3.76	-1.99	3.47	5,12
Kota Baru	4.88	4.19	-1.87	3.36	4.58





PROV. KAB/KOTA	TAHUN (PERSEN)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Banjar	5.01	4.54	-1.96	3.21	4.48
Barito Kuala	5.21	5.06	-1.04	3.17	3.59
Tapin	5.01	4.26	-1.50	3.41	4.91
HSS	6.14	5.32	-1.19	4.18	4.02
HST	5.15	4.80	-1.01	3.01	3.93
HSU	5.81	5.54	-0.67	3.23	4.09
Tabalong	3.78	3.69	-2.62	3.28	5.30
Tanah Bumbu	4.14	3.64	-1.46	4.23	5.45
Balangan	3.11	3.18	-2.47	3.26	5.24
Banjarmasin	6.40	6.13	-1.91	3.41	5.69
Banjar Baru	6.90	6.93	-1.88	3.32	7.93
<b>KALSEL</b>	<b>5.13</b>	<b>4.08</b>	<b>-1.81</b>	<b>3.48</b>	<b>5.11</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Pertumbuhan ekonomi lazimnya diikuti dengan beberapa manfaat pembangunan sebagai berikut.

1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi karena pada dasarnya terjadi peningkatan pendapatan per kapita.
2. Penurunan pengangguran karena terjadi peningkatan kapasitas produksi.
3. Peningkatan basis pendapatan asli daerah karena terjadi peningkatan pendapatan per kapita yang mengikuti peningkatan konsumsi.

Adapun data pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan disajikan dalam Tabel 2.22 berikut.

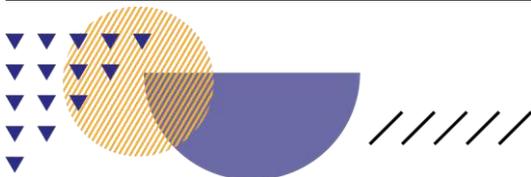
**Tabel 2.22** Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan 2010

[Seri 2010] Lapangan Usaha	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.76	3.59	-0.95	1.16	1.45
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.62	3.55	-1.68	0.97	1.05
a. Tanaman Pangan	2.08	5.85	-4.07	-2.56	-2.95
b. Tanaman Hortukultura	3.07	2.54	0.56	0.18	-1.56
c. Tanaman Perkebunan	2.69	0.65	-0.36	4.41	4.15
d. Peternakan	4.02	5.75	1.76	1.81	3.89
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	3.5	3.24	-1.02	-0.98	-1.69
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.19	0.32	-1.24	-1.69	-0.93





[Seri 2010] Lapangan Usaha	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2018	2019	2020	2021	2022
3. Perikanan	7.93	4.17	1.23	2.04	2.85
B. Pertambangan dan Penggalian	4.21	1.36	-4.44	4.35	5.60
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0.69	0.18	-4.16	-5.33	0.69
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	4.36	1.19	-4.65	4.98	6.06
3. Pertambangan Bijih Logam	-3.2	4.23	0.11	-9.97	-7.85
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	7.89	5.92	-1.3	2.65	3.42
C. Industri Pengolahan	4.34	1.45	-3.63	6.23	3.31
1. Industri Makanan dan Minuman	5.08	1.84	-5.68	5.89	4.42
2. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	8.62	6.21	-1.01	1.75	5.87
3. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	5.76	0.61	0.56	-0.67	-1.17
4. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	4.39	0.77	0.62	2.86	5.89
5. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.87	2.72	0.86	99.23	5.73
6. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.31	1.79	-0.27	1.01	-0.14
7. Industri Barang Galian bukan Logam	5.31	0.33	1.74	2.39	1.95
8. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0.28	2.95	-1.52	-0.58	2.42
9. Industri Mesin dan Perlengkapan k	2.76	3.11	1.66	2.15	1.18
10. Industri Alat Angkutan	1.78	6.92	1.87	-0.96	2.44
11. Industri Furnitur	5.39	3.48	-2.82	1.25	1.75
12. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1.98	4.58	0.46	1.12	3.13
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.58	4.72	4.74	4.66	7.85
1. Ketenagalistrikan	7.63	4.58	4.72	4.73	7.9
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	6.42	7.88	5.34	3.24	6.87
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.83	5.59	5.83	5.03	4.87
F. Konstruksi	5.89	6.08	-1.29	2.87	4.33
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.55	7.42	-3.38	2.2	7.15
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	3.23	3.82	-2.1	2.57	3.36
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	8.26	7.99	3.57	2.14	7.74
H. Transportasi dan Pergudangan	6.97	5.92	5.32	1.81	17.43
1. Angkutan Darat	7.48	6.66	-3.73	2.37	7.35
2. Angkutan Laut	7.23	6.13	3.59	1.99	25.38
3. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	3.06	1.6	-4.06	3.72	6.15





[Seri 2010] Lapangan Usaha	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2018	2019	2020	2021	2022
4. Angkutan Udara	6.73	5.35	13.52	-0.51	44.27
5. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	6.88	5.65	6.45	0.58	6.99
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.01	7.41	2.02	2.3	9.63
1. Penyediaan Akomodasi	7.17	7.09	3.67	2.25	14.13
2. Penyediaan Makan Minum	6.98	7.47	1.71	2.31	8.82
J. Informasi dan Komunikasi	6.89	7.33	7.36	7.22	6.94
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.24	1.66	1.37	1.19	0.39
1. Jasa Perantara Keuangan	3.53	0.39	0.6	0.09	-0.64
2. Asuransi dan Dana Pensiun	5.48	5.33	3.92	5.12	2.29
3. Jasa Keuangan Lainnya	6.15	6.82	1.62	1.07	2.38
4. Jasa Penunjang Keuangan	5.7	5.96	3.86	3.63	2.28
L. Real Estate	5.01	5.95	3.88	5.29	5.87
M,N. Jasa Perusahaan	7.67	7.29	1.99	3.62	7.53
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.84	6.54	0.73	1.49	0.53
P. Jasa Pendidikan	7.02	7.54	1.62	1.54	3.51
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.94	5.89	7.51	10.89	5.31
R,S,T,U. Jasa lainnya	7.38	7.08	1.46	1.16	6.78
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.12	4.09	1.82	3.48	5.11

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2023. BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Pada periode 2018-2022, perekonomian Kalimantan Selatan cenderung mengalami fluktuasi pertumbuhan. Pada tahun 2018 pertumbuhan LPE ekonomi ekonomi dapat tumbuh dengan nilai 5,12% kemudian bergerak menurun sd tahun 2021 menjadi 3,48% dan mulai meningkat lagi di tahun di 2022 menjadi 5,11%.

Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi bahkan menunjukkan nilai negatif sebesar -1,81%. Pertumbuhan negatif ini tidak lepas dari faktor hantaman Pandemi COVID-19 yang mempunyai dampak global. Salah satu dampak global ini membuat terbatasnya potensi pasar untuk komoditas ekspor Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga terjadi penurunan ekspor. Disamping itu, terjadi penurunan kapasitas produksi karena adanya pembatasan-pembatasan mobilitas masyarakat.





Tahun 2021 merupakan tahun dimana memperlihatkan terjadinya pemulihan perekonomian untuk Kalimantan Selatan. Hal terlihat dari Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan yang telah positif 3,48 % pada tahun 2021.

Adapun poin-poin penting yang didapat dari pembahasan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

- 1) Pertumbuhan ekonomi pada 2 (dua) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan tingkat pertumbuhan yang membaik.
- 2) Pada Tahun 2020. ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi ini tidak lepas dari faktor hantaman Pandemi COVID-19 yang mempunyai dampak secara global
- 3) Tiga sektor dominan. termasuk sektor pertambangan dan penggalian menjadi penopang peningkatan pertumbuhan.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 pada sisi pengeluaran dan lapangan usaha, bersumber dari sektor-sektor utama. Sebagaimana disajikan pada Tabel 2.23. Pada sisi pengeluaran sumber perbaikan pertumbuhan ekonomi didorong oleh komponen ekspor-impor. Sedangkan pertumbuhan pada konsumsi rumah tangga dapat didorong dengan kebijakan pemberian stimulus bantuan sosial kepada masyarakat akibat pandemi Covid-19 serta dilakukan kebijakan gas dan rem oleh pemerintah yang mana tetap membuat masyarakat waspada terhadap covid-19 tetapi perekonomian tetap dapat berjalan meskipun belum berjalan 100 % seperti sebelum pandemi.

**Tabel 2.23** LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2018–2022 Menurut Pengeluaran

Komponen pengeluaran		LPE (%) /				
		Growth (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Konsumsi Rumah tangga	5,03	4,01	-0,26	0,79	5,37
2	Konsumsi LNPRT	8,74	7,97	-2,4	1,1	5,02
3	Konsumsi Pemerintah	2,53	2,91	-2,63	3,56	-0,56
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	8,01	6,37	-1,42	0,83	5,16
5	Perubahan Inventori	215,36	-47,04	-89,3	30,16	-
6	Ekspor Barang dan Jasa	5,97	2,12	-10,81	19,02	-
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	7,84	1,52	-13,13	21,01	-
PDRB ADHK		5,08	4,08	-1,81	3,48	5,11

Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2023. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.





#### 2.2.1.4 Perkembangan Inflasi

Pada Desember 2022 terjadi inflasi year on year (yoy) 6,99 persen pada gabungan tiga kota IHK di Kalimantan Selatan, dengan IHK sebesar 117,15. Kota Banjarmasin mengalami inflasi yoy sebesar 6,98 persen dengan IHK sebesar 117,05; Tanjung mengalami inflasi yoy sebesar 5,01 persen dengan IHK sebesar 114,86; sedangkan Kotabaru mengalami inflasi yoy sebesar 8,65 persen dengan IHK sebesar 119,83. „ Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh sepuluh indeks kelompok pengeluaran secara signifikan, yaitu : kelompok transportasi sebesar 18,27 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 10,43 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,84 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 7,01 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 8,60 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,79 persen; kelompok pendidikan sebesar 5,49 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya sebesar 3,48 persen; kelompok penyediaan makanan dan restoran sebesar 2,09 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 1,48 persen. „

Secara Month to Month di Desember terjadi inflasi 0,69 persen, dengan penyumbang andil inflasi terbesar antara lain, beras, telur ayam ras, daging ayam ras, ikan gabus, dan emas perhiasan. Sedangkan yang menahan laju inflasi bulanan antara lain, angkutan udara, cabai merah, bahan bakar rumah tangga, pengharum cucian dan kacang panjang. „ Komoditas penyumbang andil inflasi yoy pada Desember 2022, antara lain beras, bensin, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, rokok kretek filter, telur ayam ras, tarif pam, daging ayam ras, mobil, dan bawang merah . Tingkat inflasi month to month (mtm) Desember 2022 tercatat inflasi sebesar 0,69 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) Desember sebesar 6,99 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2022 di tiga kota IHK Kalimantan Selatan secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS, pada Desember 2022 terjadi inflasi yoy sebesar 6,99 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,67 pada Desember 2021 menjadi 117,15 pada Desember 2022. Tingkat inflasi *motm* 0,69 persen dan tingkat inflasi *ytd* sebesar 6,99 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh sepuluh indeks kelompok pengeluaran, dengan kenaikan terbesar yoy pada kelompok transportasi sebesar





18,27 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 10,43 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,84 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 7,01 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau 8,60 persen; kelompok peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,49 persen; kelompok pendidikan sebesar 4,89 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya sebesar 3,48 persen, kelompok penyediaan makanan, minuman dan restoran sebesar 2,09 persen dan kelompok kesehatan sebesar 1,48 persen.

Komoditas yang memberi andil terbesar inflasi *yoy* Desember 2022, antara lain beras, bensin, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, rokok kretek filter, telur ayam ras, tarif pam, daging ayam ras, mobil dan bawang merah. Sementara komoditas yang memberikan andil deflasi *yoy* adalah minyak goreng, cabai rawit, pepaya, cabai merah, laptop, ikan saluang, ikan asin telang, ikan sepat siam, terong, dan ketimun. Pada Desember 2022 dari 11 kelompok pengeluaran, 10 kelompok memberikan andil/ sumbangan inflasi; dan 1 kelompok memberikan andil/sumbangan deflasi. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi terbesar, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,49 persen; kelompok transportasi sebesar 2,25 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya sebesar 0,62 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,58 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,43 persen; Sedangkan untuk andil penahan inflasi adalah kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen. Dari 90 Kota inflasi di Indonesia, tercatat seluruh kota mengalami inflasi *month to month*. Inflasi tertinggi terjadi di Bandung 2,04 persen dan inflasi terendah terjadi di Sorong sebesar 0,01 persen. Inflasi *yoy* tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 8,65 persen, dan terendah di Sorong sebesar 3,26 persen. Di wilayah Pulau Kalimantan, seluruh kota mengalami inflasi. Inflasi *motm* tertinggi terjadi di Banjarmasin sebesar 0,72 persen dan terendah terjadi di Tanjung Selor sebesar 0,19 persen. Inflasi *yoy* tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 8,65 persen dan terendah terjadi di Tarakan 3,93 persen.





**Tabel 2.24** Inflasi Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2022

Kota Inflasi	Inflasi				
	2018	2019	2020	2021	2022
	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan
Kalimantan Selatan	2.63	4.01	1.68	2.55	6.99
Kotabaru	-	-	1.44	2.68	8,65
Tanjung	2.60	2.15	2.05	2.43	5,01
Kota Banjarmasin	2.63	4.15	1.67	2.54	6.98

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022





**Tabel 2.25** Indeks Harga Konsumen Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022

Kota Inflasi	2018											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Kalimantan Selatan	131.46	131.27	131.73	131.88	132.09	133.33	133.27	133.31	133.24	133.37	133.59	134.52
Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung	131.04	130.83	131.92	132.73	133.2	133.66	134.91	133.44	133.06	133.32	133.02	133.92
Kota Banjarmasin	131.49	131.3	131.72	131.82	132.01	133.31	133.15	133.3	133.24	133.37	133.63	134.56

Kota Inflasi	2019											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Kalimantan Selatan	135.61	135.45	135.79	137.07	138.3	138.67	138.57	138.61	138.63	138.85	139.17	139.92
Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung	134.93	134.03	134.13	134.76	136.08	135.95	136.2	135.19	134.37	135.42	136.73	136.8
Kota Banjarmasin	135.66	135.56	135.92	137.24	138.47	138.87	138.75	138.87	138.95	139.11	139.35	140.15

Kota Inflasi	2020											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Kalimantan Selatan	104.62	105.41	105.12	104.81	104.94	105.33	105.04	105.3	104.98	105.21	105.94	106.77
Kotabaru	106.61	106.93	106.78	106.26	106.56	106.69	106.3	106.54	106.4	106.63	106.74	107.41
Tanjung	105.07	106.03	105.91	105.61	105.72	106.16	106.08	105.62	105.3	105.58	106.33	106.78
Kota Banjarmasin	105.21	105.19	104.87	104.58	104.7	105.11	104.82	105.14	104.8	105.03	105.82	106.7





Kota Inflasi	2021											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Kalimantan Selatan	106.59	107.15	107.24	107.05	108.01	107.63	107.82	107.22	107.67	108.04	108.67	109.67
Kotabaru	107.68	107.78	108.51	108.75	109.5	109.04	109.17	109.52	109.32	109.24	109.61	110.29
Tanjung	106.81	107.16	107.38	107.31	107.64	108.03	108.16	108.17	108.13	108.48	108.89	109.38
Kota Banjarmasin	106.45	107.08	107.09	106.85	107.88	107.44	107.64	107.49	107.45	107.87	108.54	109.41

Kota Inflasi	2022											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Kalimantan Selatan	110,57	110,13	111,16	112,43	113,16	114,04	114,45	113,97	115,58	115,87	116,34	117,15
Kotabaru	111,31	111,27	112,45	113,46	114,86	116,38	117,62	117,77	118,63	118,68	119,14	119,83
Tanjung	109,85	110,11	110,81	113,46	112,87	113,83	113,88	112,89	113,63	113,9	114,31	114,86
Kota Banjarmasin	110,55	110,01	111,04	112,4	113	113,8	114,15	113,65	115,42	115,74	116,21	117,05

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

RKPD TAHUN 2024  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





### 2.2.1.5 Gini Rasio

Koefisien Gini menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran. Semakin tinggi nilai koefisien, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan, dan semakin tidak merata tingkat pengeluaran antar penduduk di suatu wilayah pengamatan. Sebaliknya, semakin rendah nilai koefisien, maka semakin rendah tingkat ketimpangan dan semakin merata tingkat pengeluaran penduduk. Nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna, sementara nilai 0 menunjukkan pemerataan pengeluaran sempurna.

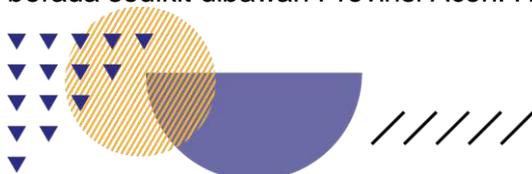
Perkembangan tingkat ketimpangan di Kalimantan Selatan periode Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.26 berikut.

**Tabel 2.26** Gini Ratio Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Gini Ratio				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	0,234	0,271	0,250	0.232	0.263
Kotabaru	0,337	0,335	0,287	0.306	0.331
Banjar	0,327	0,330	0,322	0.344	0.300
Barito Kuala	0,338	0,285	0,277	0.284	0.289
Tapin	0,281	0,268	0,274	0.289	0.291
Hulu Sungai Selatan	0,317	0,288	0,300	0.275	0.260
Hulu Sungai Tengah	0,320	0,288	0,285	0.331	0.228
Hulu Sungai Utara	0,325	0,327	0,319	0.378	0.301
Tabalong	0,305	0,306	0,346	0.288	0.337
Tanah Bumbu	0,332	0,346	0,300	0.281	0.292
Balangan	0,310	0,273	0,298	0.277	0.266
Kota Banjarmasin	0,377	0,326	0,342	0.350	0.330
Kota Banjarbaru	0,364	0,357	0,381	0.361	0.341
Kalimantan Selatan	0.344	0.334	0.332	0.325	0.309
Indonesia	0.389	0.380	0.385	0.381	0.381

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Tabel 2.26 ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan Provinsi Kalimantan Selatan lebih rendah daripada tingkat ketimpangan Indonesia. Dengan kata lain, fakta ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan cenderung lebih merata daripada pengeluaran penduduk secara nasional. Berdasarkan data terakhir per September tahun 2022, posisi Kalimantan selatan masih lebih baik di bandingkan Provinsi Sulawesi Tengah dan berada sedikit dibawah Provinsi Aceh. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 2.11.





Gambar 2.11 Gini Ratio Indonesia Per Provinsi per September Tahun 2022

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

RKPD TAHUN 2024  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nilai *gini ratio* di Provinsi Kalimantan Selatan yang cenderung stabil. titik tertinggi pada di tingkat 0,347 pada tahun 2017, *gini ratio* Provinsi Kalimantan Selatan pada tiga tahun selanjutnya ada di kisaran 0,332 di tahun 2020 dan 0,325 pada tahun 2021. *Gini Ratio* tidak mengalami naik turun dari tahun 2017 s/d 2021. Pada posisi *gini ratio* per September 2021 memperlihatkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Kalimantan Selatan dalam kategori Ketimpangan Rendah.

### 2.2.1.6 Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Wilayah)

Selain Gini Ratio, keadaan ketimpangan juga dapat ditunjukkan oleh Indeks Williamson. Jika Gini Ratio menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk, maka Indeks Williamson dapat menyajikan tingkat ketimpangan regional. Dalam hal ini, Indeks Williamson menyajikan ketimpangan tingkat produksi antar wilayah, sehingga Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan





menunjukkan ketimpangan PDRB antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk melihat tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, digunakan Indeks Williamson. Perhitungan Indeks Williamson Kalimantan Selatan didasarkan pada data PDRB per kapita dan jumlah penduduk di kabupaten/kota. Semakin Indeks Williamson mendekati angka 0, maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin kecil, sedangkan semakin mendekati angka 1 maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin besar. Hasil pengukuran dari Indeks Williamson dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu :

a.	Indeks Williamson < 0,4	=	tingkat ketimpangan rendah
b.	0,4 < Indeks Williamson < 0,5	=	tingkat ketimpangan sedang (moderat)
c.	Indeks Williamson > 0,5	=	tingkat ketimpangan tinggi

Nilai Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Pada kurun waktu tahun 2018 – 2022, Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi yaitu dari 0,407 menjadi 0,509. Pertumbuhan rata-rata Indeks Williamson dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami kenaikan sebesar 0,102. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang semakin menurun. Kecenderungan penurunan Indeks Williamson diharapkan dapat menjadi indikator pemerataan wilayah yang semakin baik.

**Tabel 2.27** Indeks Williamson Kalimantan Selatan (2017-2022)

Indikator	Indeks Williamson (%)					Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Indeks Williamson	0,407	0,399	0,395	0,409	0,509	0,102
Kategori Ketimpangan	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	

Sumber : BPS, Data diolah (2023)

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya-upaya tepat sasaran pada lokasi dengan ketimpangan ekonomi cukup tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena meskipun ada daerah-daerah di Kalimantan Selatan yang maju secara ekonomi tetapi masih terdapat daerah-daerah yang relative tertinggal yang





memerlukan pemberdayaan ekonomi dan dukungan sarana dan prasarana wilayah, sehingga ketimpangan antar wilayah tidak semakin tidak melebar. Grafik perkembangan indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 pada Gambar 2.12.



Sumber : BPS, Data diolah (2023)

**Gambar 2.12** Perkembangan Indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

### 2.2.1.7 Fokus Kesejahteraan Sosial

Sub Bab Fokus Kesejahteraan Sosial menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan ditinjau dari faktor-faktor kesejahteraan non-ekonomi. Salah satu indikator yang dapat mewakili kondisi kesejahteraan ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan seluruh komponen-komponen penyusunnya. Dalam pembahasan IPM akan tergambar kondisi pendidikan, kondisi kesehatan serta kondisi daya beli yang secara kumulatif dapat mewakili kualitas sumber daya manusia. Namun demikian sub bab ini akan lebih fokus menggambarkan kondisi pendidikan dan kondisi kesehatan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai tambahan, Sub Bab Fokus Kesejahteraan Sosial juga menguraikan kondisi ketenagakerjaan.

### 2.2.1.8 Angka Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan, dan Garis Kemiskinan

Jika dilihat dari Indikator kemiskinan, maka Kalimantan Selatan termasuk provinsi yang mempunyai indikator kemiskinan terendah jika dibandingkan provinsi lain di seluruh Indonesia. Secara kuantitas, penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada Semester II Tahun 2022 hanya berjumlah





195.702 jiwa atau setara dengan 4.49% dari seluruh penduduk Kalimantan Selatan. Persentase penduduk miskin nasional pada Tahun 2022 mencapai 9,54%.

Adapun jumlah dan persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.28** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

TAHUN	KALIMANTAN SELATAN		TAHUN	INDONESIA	
	Semester I			Semester I	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase		Jumlah (Jiwa)	Persentase
2022	195.702	4,49	2022	26.161,16	9,54
2021	208.110	4.83	2021	27.542.770	10.14
2020	187.870	4.38	2020	26.424.020	9.78
2019	192.480	4.55	2019	25.144.720	9.41
2018	189.030	4.54	2018	25.949.800	9.82
	Semester II			Semester II	
2022	195.702	4,49	2022	26.363,27	9,57
2021	197.760	4.56	2021	26.503.650	9.71
2020	206.920	4.83	2020	27.549.690	10.19
2019	190.290	4.47	2019	24.785.870	9.22
2018	195.010	4.65	2018	25.674.580	9.66

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Tabel 2.29** Kondisi Kemiskinan Selatan Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Miskin (P0)	4,54	4,55	4,38	4,83	4,49
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	189.033	192.480	187.874	208.118	195.702

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

Tabel 2.29 tersebut juga menunjukkan bahwa ada kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin. Walaupun Tahun 2022 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. namun ada penurunan jumlah penduduk miskin Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2018-2022.

Sementara itu. jumlah dan persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada Tahun 2022 berdasarkan Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel berikut.





**Tabel 2.30** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Semester I di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota	2021		2022	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase	Jumlah (Jiwa)	Persentase
Tanah Laut	15.860	4,57	13.541	3,86
Kotabaru	16.830	4,86	15.065	4,30
Banjar	18.070	3,04	16.711	2,79
Barito Kuala	16.100	5,11	15.055	4,75
Tapin	6.930	3,60	6.982	3,60
Hulu Sungai Selatan	11.470	4,84	10.804	4,54
Hulu Sungai Tengah	16.770	6,18	16.144	5,92
Hulu Sungai Utara	16.190	6,83	15.497	6,49
Tabalong	16.130	6,27	15.243	5,87
Tanah Bumbu	18.920	4,82	17.216	4,26
Balangan	8.060	6,07	7.825	5,83
Kota Banjarmasin	34.840	4,89	34.009	4,74
Kota Banjarbaru	11.950	4,40	11.610	4,17
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>208.110</b>	<b>4,83</b>	<b>195.702</b>	<b>4,49</b>

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin terbanyak ada di wilayah Kota Banjarmasin sebanyak 34.009 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk miskin paling sedikit ada di wilayah Kabupaten Tapin sebanyak 6.982 jiwa.

Walaupun jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin adalah yang paling banyak, namun secara persentase, Kota Banjarmasin bukan wilayah yang persentase penduduk miskinnya terbesar. Persentase penduduk miskin di Kota Banjarmasin hanya 4.74 persen, jauh lebih rendah dibanding Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang persentase penduduk miskinnya mencapai 5.92%. Adapun persentase penduduk miskin terkecil ada di Kabupaten Banjar dengan nilai 2.79%.

Jika membandingkan dengan persentase penduduk miskin secara provinsi yang mempunyai nilai 4.49 persen, maka hanya ada enam Kabupaten/Kota yang persentase penduduk miskinnya lebih kecil dari nilai Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten/Kota yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Kabupaten Tanah Laut (3.86%)
- 2) Kabupaten Kotabaru (4.30 %)
- 3) Kabupaten Banjar (2.79 %)
- 4) Kabupaten Tapin (3.60 %)
- 5) Kota Tanah Bumbu (4.26 %)





6) Kota Banjarbaru (4.17 %)

Berdasarkan Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSA) BPS. Garis Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Berdasarkan definisi tersebut, maka penduduk yang pengeluaran konsumsi per bulannya di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Adapun perkembangan Garis Kemiskinan di Kalimantan Selatan serta Garis Kemiskinan Berdasarkan Tempat Tinggal Penduduk dan Kabupaten/Kota disajikan pada tabel – tabel berikut.

**Tabel 2.31** Garis Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2018 s.d. 2022 (Rupiah)

Tahun	Kalimantan Selatan	
	Garis Kemiskinan	Perubahan
2018	447.212	22.060
2019	480.010	32.798
2020	522.845	42.835
2021	537.854	15.009
2022	575.061	37.207

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Tabel Dinamis)

**Tabel 2.32** Garis Kemiskinan Menurut Tempat Tinggal Tahun 2018 s.d. 2022 (Rupiah)

Tahun	Kalimantan Selatan		Indonesia	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
2018	441.218	414.494	415.614	383.908
2019	470.293	443.928	442.062	404.398
2020	490.254	503.748	471.822	433.281
2021	536.041	517.293	502.730	464.474
2022	588.472	572.917	464.474	513.170

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Tabel Dinamis)





**Tabel 2.33** Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota 2018 s.d. 2022  
(Rupiah)

Kabupaten	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
TANAH LAUT	447.212	480.010	522.845	537.854	575.061
KOTABARU	401.300	416.388	466.121	481.452	505.601
BANJAR	400.081	429.422	462.375	482.867	514.991
BARITO KUALA	297.199	318.995	340.526	355.160	375.707
TAPIN	405.591	406.367	446.577	459.160	484.113
HULU SUNGAI SELATAN	444.455	461.581	528.622	494.203	516.857
HULU SUNGAI TENGAH	354.214	365.008	417.778	425.438	444.331
HULU SUNGAI UTARA	420.783	436.997	488.237	501.994	526.919
TABALONG	446.765	463.980	531.180	542.800	573.018
TANAH BUMBU	451.714	475.763	513.803	530.568	557.500
BALANGAN	382.835	396.532	441.488	453.928	476.190
KOTA BANJARMASIN	477.210	509.773	543.546	606.330	651.383
KOTA BANJAR BARU	572.195	614.757	652.030	653.556	692.830
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>427.774</b>	<b>457.222</b>	<b>497.262</b>	<b>519.150</b>	<b>553.073</b>

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Tabel Dinamis)

Tabel terakhir menunjukkan bahwa garis kemiskinan kabupaten/kota yang lebih besar adalah tahun 2022 Kota Banjarbaru 692.830 sedangkan Garis Kemiskinan yang paling rendah yaitu Kabupaten Barito Kuala sebesar 375.707 pada tahun 2022.

#### 2.2.1.9 Indeks Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (Suhariyanto dalam Mediaindonesia.com. 2020).

Dengan kata lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan jarak pengeluaran penduduk untuk melepas kategorinya sebagai penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dan semakin jauh juga pengeluaran yang harus ditambah agar penduduk tersebut mampu melepas kategori penduduk miskin.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan terjadinya ketimpangan atau perbedaan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin timpang pengeluaran di antara penduduk miskin, dan semakin besar jurang perbedaan pengeluaran di antara penduduk miskin.





Data mengenai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan ditampilkan pada Tabel 2.31 berikut;

**Tabel 2.34** Persentase Penduduk Miskin (P0). Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1). dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2022

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)
2017	4,73	0,72	0,17
2018	4,54	0,69	0,18
2019	4,47	0,64	0,16
2020	4,83	0,76	0,18
2021	4,56	0,47	0,10
2022	4,49	0,64	0,14

Sumber: BPS Indonesia 2023 (Semester II)

Secara sederhana, Tabel 2.34 menggambarkan indikator kemiskinan di Kalimantan Selatan yang semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dari kecenderungan menurunnya tiga indikator kemiskinan dari Tahun 2017-2022. Persentase penduduk miskin di Tahun 2017 yang mencapai 4,73 persen dapat turun sampai menjadi 4,47 persen di Tahun 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 4,56 persen pada tahun 2021 dan turun lagi pada tahun 2022 menjadi 4,49%. Demikian pula Tingkat Kedalaman Kemiskinan yang pada Tahun 2015 tercatat mencapai 0,74 dapat turun sampai 0,47 di Tahun 2021. Hal yang sama juga tercatat di indikator Tingkat Keparahan Kemiskinan yang sebelumnya mencapai 0,30 di Tahun 2015. namun dapat turun menjadi 0,10 di Tahun 2021, dan pada tahun 2022 menurun menjadi 0,14%

#### 2.2.1.10 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator pembangunan yang mempunyai cakupan yang sangat luas dalam menunjukkan pencapaian pembangunan manusia serta kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, IPM menjadi salah satu indikator yang cukup mewakili kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.

IPM Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Nilai IPM selalu meningkat dari tahun 2018 yaitu 70,17 persen dan mencapai kategori tertinggi 71,84 persen di tahun 2022. saat nilai IPM





Nasional tahun 2022 yaitu 72,91 persen. Adapun perkembangan nilai IPM Kalimantan Selatan dan Indonesia disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.35** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2018-2022

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
Kalimantan Barat	66,98	67,65	67,66	67,90	68,63
Kalimantan Tengah	70,42	70,91	71,05	71,25	71,63
Kalimantan Selatan	70,17	70,72	70,91	71,28	71,84
Kalimantan Timur	75,83	76,61	76,24	76,88	77,44
Kalimantan Utara	70,56	71,15	70,63	71,19	71,83
<b>Indonesia</b>	<b>71,39</b>	<b>71,92</b>	<b>71,94</b>	<b>72,29</b>	<b>72,91</b>

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Meskipun sudah ada di kategori tinggi, nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan masih berada di bawah rata-rata nasional. Dengan kata lain, kondisi pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan masih di bawah rata-rata masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jika memperhatikan IPM berdasarkan wilayah, maka dapat dilihat bahwa di Tahun 2022 nilai IPM kedua kota di Provinsi Kalimantan Selatan lebih baik jika dibandingkan dengan nilai IPM kabupaten. Nilai IPM Kota Banjarbaru 79,68 dan Kota Banjarmasin adalah 77,97. Sementara itu, hanya tiga kabupaten yang memiliki nilai IPM kategori tinggi, yaitu Tapin (71,02), Tabalong (73,13) dan Tanah Bumbu (71,79) sedangkan delapan kabupaten lainnya masih di kategori sedang dan belum mencapai nilai 70. Adapun nilai IPM terendah ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 66,84. Adapun rincian nilai IPM berdasarkan wilayah disajikan pada Tabel 2.36 berikut.





**Tabel 2.36** Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
Tanah Laut	69,86	12,32	7,9	11703	70,35
Kotabaru	69,56	12,06	7,47	12191	69,74
Banjarnegara	67,73	13,02	7,71	12871	70,72
Barito Kuala	66,55	12,54	7,63	10230	67,37
Tapin	70,88	12,04	7,95	12247	71,02
Hulu Sungai Selatan	66,51	12,4	7,79	13157	69,76
Hulu Sungai Tengah	66,54	12,22	8,28	12448	69,7
Hulu Sungai Utara	64,53	12,93	7,76	10132	66,84
Tabalong	70,84	12,9	9,12	11914	73,13
Tanah Bumbu	70,7	12,49	8,25	12217	71,79
Balangan	68,13	12,61	7,85	11659	69,73
Kota Banjarmasin	71,59	13,95	10,21	14770	77,97
Kota Banjarbaru	72,36	14,83	10,98	14136	79,68
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>69,13</b>	<b>12,82</b>	<b>8,46</b>	<b>12469</b>	<b>71,84</b>

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

### 2.2.1.11 Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia adalah dimensi pendidikan. Ada berbagai indikator yang dapat mengukur kualitas sumber daya manusia dari segi dimensi pendidikan. salah satunya adalah Angka Rata-rata Lama Sekolah (Angka RLS). Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Adapun objek pengukuran indikator ini adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Maka dari itu. Angka RLS dapat menunjukkan rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.

Pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kualitas pendidikan. Seseorang dengan pendidikan tinggi akan memiliki peluang yang besar dalam hidupnya dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah, misalnya di bidang pekerjaan. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan mendorong perbaikan di bidang lain seperti tingkat kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan secara ekonomi. Mengingat begitu pentingnya pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, melalui berbagai program pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan, juga menyoar peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar. Dimensi





pengetahuan/pendidikan pada IPM dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2018 hingga 2022, HLS di Provinsi Kalimantan Selatan telah meningkat sebesar 0,35 tahun, sementara RLS meningkat juga sebesar 0,35 tahun. Selama periode 2018 hingga 2022, Meningkatnya HLS menunjukkan peningkatan tahun bersekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 (tujuh) tahun di masa mendatang.

Pada tahun 2022, HLS di Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai 12,82 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 (tujuh) tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau hingga menempuh jenjang D1. Data perkembangan Angka RLS dan HLS di Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.34 dan 2-34 berikut.

**Tabel 2.37** Angka Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	7,38	7,64	7,88	7,89	7,9
Kotabaru	7,19	7,42	7,43	7,46	7,47
Banjarnegara	7,29	7,34	7,35	7,52	7,71
Barito Kuala	7,32	7,33	7,34	7,55	7,63
Tapin	7,54	7,75	7,76	7,77	7,95
Hulu Sungai Selatan	7,72	7,74	7,75	7,76	7,79
Hulu Sungai Tengah	7,8	7,99	8	8,01	8,28
Hulu Sungai Utara	7,36	7,37	7,53	7,75	7,76
Tabalong	8,57	8,78	9,1	9,11	9,12
Tanah Bumbu	7,7	7,71	7,96	7,97	8,25
Balangan	7,04	7,27	7,55	7,69	7,85
Kota Banjarmasin	9,93	9,94	9,95	10,2	10,21
Kota Banjarbaru	10,93	10,94	10,95	10,96	10,98
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>8</b>	<b>8,2</b>	<b>8,29</b>	<b>8,34</b>	<b>8,46</b>

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

#### 2.2.1.12 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Berikut tersaji data Tabel 2.38 Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, sebagai berikut





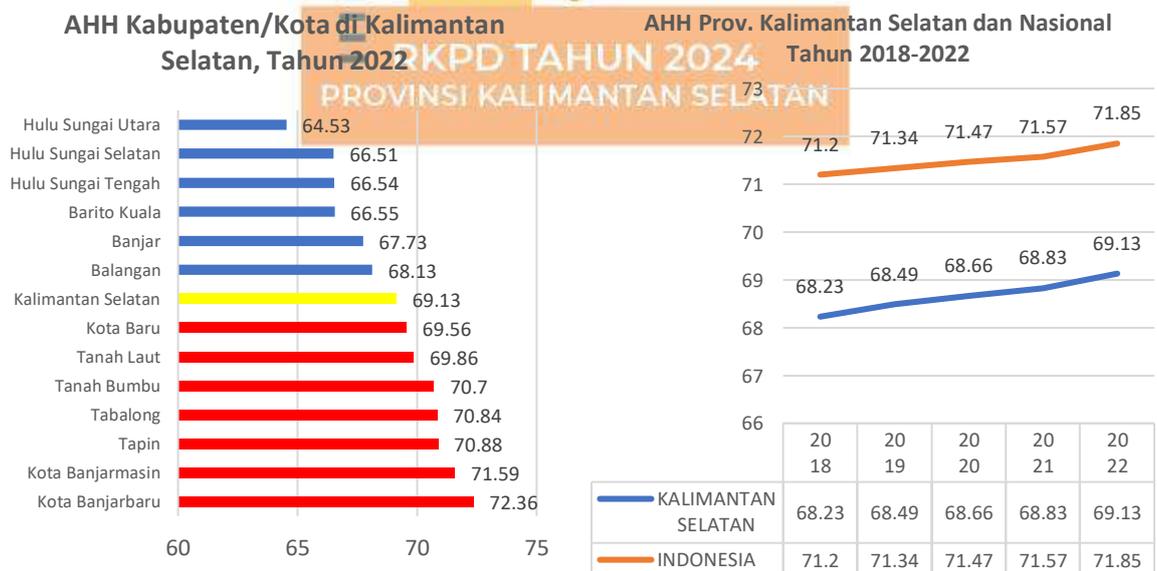
**Tabel 2.38** Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	11,95	11,96	12,01	12,31	12,32
Kotabaru	11,83	11,92	11,93	11,95	12,06
Banjar	11,99	12,28	12,44	12,73	13,02
Barito Kuala	12,37	12,38	12,39	12,40	12,54
Tapin	11,85	11,86	11,94	11,95	12,04
Hulu Sungai Selatan	12,07	12,10	12,17	12,38	12,4
Hulu Sungai Tengah	12,18	12,19	12,20	12,21	12,22
Hulu Sungai Utara	12,83	12,88	12,91	12,92	12,93
Tabalong	12,53	12,59	12,72	12,89	12,9
Tanah Bumbu	12,33	12,36	12,37	12,48	12,49
Balangan	12,36	12,37	12,46	12,47	12,61
Kota Banjarmasin	13,91	13,92	13,93	13,94	13,95
Kota Banjarbaru	14,79	14,80	14,81	14,82	14,83
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>12,50</b>	<b>12,52</b>	<b>12,52</b>	<b>12,81</b>	<b>12,82</b>

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

### 2.2.1.13 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH). SIRUSA BPS menyebutkan bahwa AHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. Adapun perkembangan AHH di Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Grafik II.27 berikut.



Sumber BPS Kalimantan Selatan 2022

**Gambar 2.13** Angka Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022. Serta AHH Kabupaten/Kota Tahun 2022





Gambar 2.13 menunjukkan bahwa AHH Kalimantan Selatan selalu mengalami peningkatan. Dengan kata lain, terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan selama periode Tahun 2018-2022. AHH Kalimantan Selatan dengan nilai 68,83 tahun ini menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada Tahun 2022 diharapkan dapat mempunyai peluang hidup hingga usia 71,85 tahun.

Namun demikian, Gambar 2.13 juga menunjukkan bahwa AHH Kalimantan Selatan masih berada di bawah AHH nasional. Dengan kata lain, derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan masih berada di bawah rata-rata seluruh penduduk Indonesia. Data AHH berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa masyarakat wilayah kota di Kalimantan Selatan memiliki derajat kesehatan yang lebih baik daripada masyarakat di kabupaten. Namun, perbedaan derajat kesehatan di wilayah kota dengan kabupaten tidak mencolok seperti perbedaan indikator pendidikan.

Kedua kota di Kalimantan Selatan memiliki nilai AHH lebih baik dibanding 11 kabupaten lain. Nilai AHH di Banjarbaru dan Banjarmasin adalah 72,36 tahun dan 71,59 tahun. Nilai tersebut tidak terlalu berjarak dibanding Kabupaten Tabalong dan Tapin yang memiliki AHH dengan nilai yang sama yaitu 70,84 dan 70,88. Adapun kabupaten yang memiliki nilai AHH paling rendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 64,53.

Adapun perkembangan nilai AHH menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel berikut.





**Tabel 2.39** Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan. 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	69,08	69,31	69,45	69,59	69,86
Kota Baru	68,89	69,10	69,21	69,32	69,56
Banjar	66,66	66,97	67,21	67,41	67,73
Barito Kuala	65,59	65,88	66,09	66,27	66,55
Tapin	69,98	70,23	70,40	70,57	70,88
Hulu Sungai Selatan	65,59	65,82	65,97	66,12	66,51
Hulu Sungai Tengah	65,54	65,82	66,01	66,20	66,54
Hulu Sungai Utara	63,24	63,58	63,83	64,10	64,53
Tabalong	70,12	70,33	70,44	70,57	70,84
Tanah Bumbu	69,74	70,08	70,34	70,45	70,7
Balangan	67,37	67,59	67,72	67,85	68,13
Kota Banjarmasin	70,75	70,98	71,13	71,29	71,59
Kota Banjarbaru	71,67	71,87	71,99	72,10	72,36
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>68,23</b>	<b>68,49</b>	<b>68,66</b>	<b>68,83</b>	<b>69,13</b>

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2023

#### 2.2.1.14 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan derajat kesehatan reproduksi masyarakat di suatu wilayah. Informasi yang didapat dari AKI dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi. Adapun data mengenai AKI di Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan. 2023

**Gambar 2.14** Kasus Kematian Ibu di Kalimantan Selatan Tahun 2022



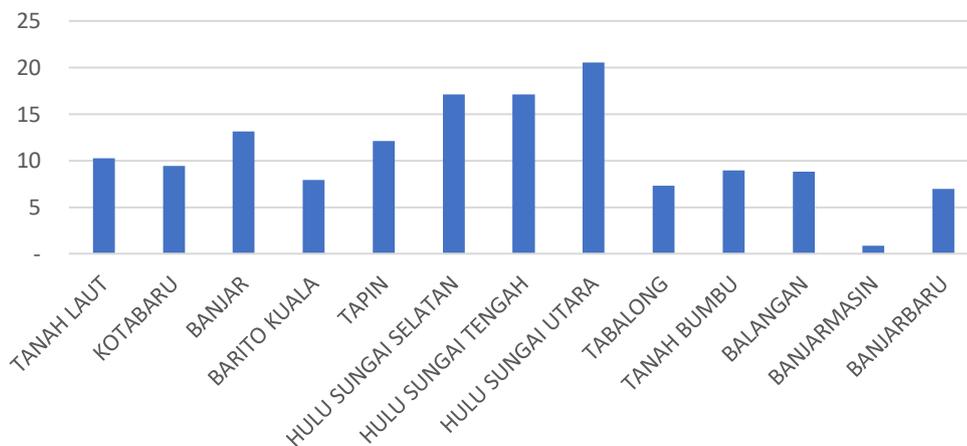


Gambar 2.14 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi AKI di Kalimantan Selatan. Kondisi menguatirkan dengan AKI tertinggi dialami pada Tahun 2018 dengan nilai 108. artinya terdapat 108 kematian ibu dalam 100.000 kelahiran. Kondisi sempat membaik pada Tahun 2019. karena nilai AKI menurun sampai di tingkat 92. Setelah itu. AKI kembali meningkat pada Tahun 2021 saat nilainya mencapai 205, Dan kondisi mulai turun di 2022 yaitu 137. Indikator derajat kesehatan reproduksi masyarakat juga dilengkapi dengan informasi mengenai kasus kematian ibu yang juga tergambar pada Gambar 2.14. Dari gambar tersebut terlihat bahwa kasus kematian ibu tertinggi pada Tahun 2021 yaitu kabupaten Hulu Sungai Utara yakni sebesar 326 Orang dan Kasus kematian paling rendah tercatat di Banjarmasin dan Hulu Sungai Selatan dengan nilai 100 dan 108.

### 2.2.1.15 Angka Kematian Bayi dan Balita

Perkembangan AKB di Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan tren menurun dari 10 per 1.000 kelahiran pada tahun 2017 menjadi 9 per 1.000 kelahiran pada tahun 2021. Akan tetapi mengalami kenaikan di tahun 2022 10 per 1.000 kelahiran. Beberapa penyebab kematian bayi di samping penyakit seperti ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), panas tinggi hingga diare antara lain disebabkan keracunan kehamilan, pendarahan saat persalinan, berat badan lahir rendah serta faktor lainnya. Pendampingan kelas ibu hamil di puskesmas dan rumah sakit, meningkatnya kunjungan pemeriksaan ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan serta optimalisasi peran Posyandu berkontribusi dalam penurunan kasus kematian bayi di Kalimantan Selatan.

Kasus Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran hidup



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan. 2023

**Gambar 2.15** Kasus Kematian Bayi di Kalimantan Selatan Tahun 2022





### 2.2.1.16 Tingkat Kesakitan

Tingkat kesakitan terdiri dari akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular adalah infeksi yang disebabkan mikroorganisme virus, bakteri, jamur, dan parasit. Ciri penyakit menular adalah dapat berpindah ke orang lain yang sehat sehingga menyebabkan orang yang tadinya sehat menjadi sakit. Sedangkan Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyakit bukan disebabkan oleh penularan vektor, virus atau bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Yang termasuk kategori PTM ini diantaranya adalah stroke, penyakit jantung koroner, kanker, diabetes melitus, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Berikut perkembangan penyakit menular di Kalimantan Selatan dari tahun 2018-2022.

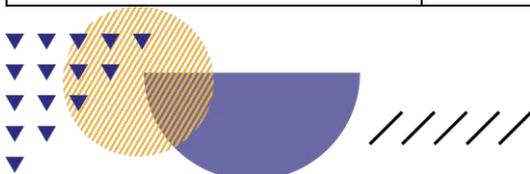
**Tabel 2.40** Perkembangan Penyakit menular di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Case Detection Rate (CDR) TB	%	50	42	17	23,7	49
2	Succes Rate TB	%	98,8	86,3	64	76,7	81,4
3	Prevalensi HIV-Aids Kelompok Resiko Tinggi	angka	<1	0,07	0,04	0,083	-
4	Annual Paracite Incidence (API) Malaria < 1	angka	0,15	0,19	0,13	0,09	0,12
5	Prevalensi Kusta	angka	0,4	0,44	0,3	0,22	0,3
6	Persentase Kab/Kota yang eliminasi Rabies	%	92	30,8	15,4	15,3	23,07
7	Persentase cakupan pengobatan massal Filariasis terhadap jumlah penduduk endemis	%	96,3	92,5	96,9	0/ selesai	96,9

Berbagai penyakit tidak menular (PTM) turut mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, termasuk masyarakat Kalimantan Selatan. Ada 16 penyakit tidak menular yang tercatat diidap oleh masyarakat dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat meningkatkan risiko kematian akibat PTM. Adapun rincian PTM yang diidap oleh masyarakat Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.41** Penyakit Tidak Menular Tahun 2022

KABUPATEN	JUMLAH PENYAKIT TIDAK MENULAR	
	HIPERTENSI	DIABETES
Tanah Laut	38.673	3.282
Kotabaru	14.503	3.765
Banjar	27.032	3.367
Barito Kuala	27.125	2.638
Tapin	11.298	2.240
HSS	53.752	4.962





HST	65.946	2.513
HSU	19.260	3.346
Tabalong	13.384	3.158
Tanah Bumbu	21.362	4.482
Balangan	6.750	1.484
Banjarmasin	59.136	17.599
Banjarbaru	7.557	2.613
Kalimantan Selatan	365.777	55.449

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2023

### 2.2.1.17 Status gizi Masyarakat

Status gizi masyarakat Kalimantan Selatan yang perlu mendapat perhatian mencapai 1,19 % dari jumlah penduduk Kalimantan Selatan. Angka ini terdistribusi dari anemia gizi, gizi kurang dan gizi buruk. Jika kondisi ini terjadi terus menerus dan terakumulasi maka akan meningkatkan prevalensi stunting. Anemia Gizi meskipun sudah mengalami penurunan namun masih menjadi masalah terbesar bagi perempuan khususnya remaja putri dan Ibu hamil. Sementara gizi kurang pada balita saja masih 7,20% pada tahun 2022, demikian juga gizi buruk pada balita masih 1,45% pada tahun 2021. Sementara gizi kurang dan buruk tidak hanya terjadi pada balita saja, tetapi juga terjadi pada anak dan usia di atas 5 tahun dan dewasa yang memiliki riwayat penyakit kronis. Tabel berikut menggambarkan status gizi masyarakat Kalimantan Selatan khususnya berkaitan dengan remaja putri, ibu hamil dan balita.

**Tabel 2.42** Perkembangan Status Gizi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Prevalensi anemia gizi	%	22,41	15,97	20,13	17,4	16,4
2	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	14,1	15,8	10,45	10,02	7,20
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	2,6	2,5	1,45	1,19	1,0
4	Prevalensi Stunting	%	29,24	19,8	12,6	15,3	9,60

Tumbuh kembang jasmani anak-anak dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu masalah yang berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang jasmani anak-anak adalah stunting, yaitu masalah nutrisi yang dialami sejak bayi.

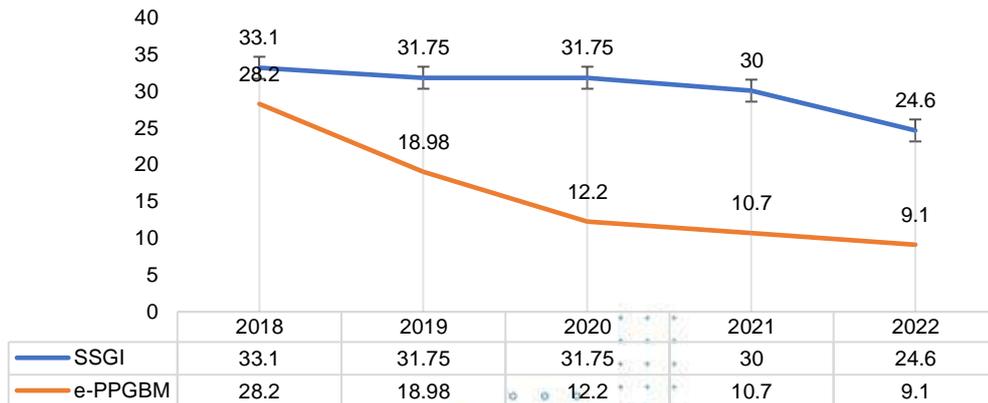
Permasalahan stunting juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan berbagai





program bidang kesehatan. prevalensi stunting di Kalimantan Selatan dapat menunjukkan grafik yang membaik. Ini tercermin dari tingkat prevalensi balita di Kalimantan Selatan yang nilainya menurun. bisa dilihat angka Stunting pada grafik berikut.

### Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022



Sumber data SSGI 2018-2022 dan (e-PPGBM) 2018-2022

**Gambar 2.16** Perkembangan Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022

Perkembangan nilai stunting berdasarkan Riskedas dan e-PPGBM serta rinciannya berdasarkan Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 2.43 berikut.

**Tabel 2.43** Jumlah Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Kabupaten / Kota	TB/U								Total	Stunting	%
	Sangat Pendek		Pendek		Normal		Tinggi				
	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln			
Kab Tanah Laut	162	386	447	1.124	5.890	14.431	124	147	16.088	1.510	9
Kab Kota Baru	194	500	426	1.257	3.226	9.144	70	188	11.089	1.757	16
Kab Banjar	719	1.509	1.241	3.296	7.178	18.815	119	186	23.806	4.805	20
Kab Barito Kuala	280	762	753	2.301	6.490	16.424	164	208	19.695	3.063	16
Kab Tapin	132	331	333	1.044	3.108	8.535	62	74	9.984	1.375	14
Kab Hulu Sungai Selatan	68	204	230	771	4.054	11.808	26	34	12.817	975	8
Kab Hulu Sungai Tengah	214	358	465	1.345	4.658	13.817	37	52	15.572	1.703	11
Kab Hulu Sungai Utara	262	656	776	2.529	4.662	11.725	29	37	14.947	3.185	21
Kab Tabalong	183	411	650	1.737	6.314	16.236	56	69	18.453	2.148	12





Kabupaten / Kota	TB/U										
	Sangat Pendek		Pendek		Normal		Tinggi		Total	Stunting	%
	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln			
Kab Tanah Bumbu	125	307	455	1.281	9.165	23.293	77	100	24.981	1.588	6
Kab Balangan	307	643	525	1.653	2.452	6.440	12	20	8.756	2.296	26
Kota Banjarmasin	228	570	600	1.914	15.020	40.228	83	170	42.882	2.484	6
Kota Banjarbaru	136	257	290	622	1.924	4.129	38	62	5.070	879	17
Kalimantan Selatan	3.010	6.894	7.191	20.874	74.141	195.025	897	1.347	224.140	27.768	12

### 2.2.1.18 Rata rata Pengeluaran Perkapita

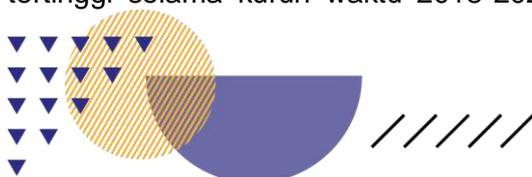
Pengeluaran perkapita masyarakat di suatu daerah menentukan tingkat/ kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada akhirnya akan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun pada dasarnya angka pengeluaran tersebut bukan satu-satunya variabel penentu kesejahteraan, masih ada variabel lain seperti tingkat inflasi, ketersediaan produksi lokal dan ketersediaan komponen produksi lokal. Selama periode 2017-2021 pengeluaran perkapita Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang meningkat dari Rp. 11.600.000 menjadi Rp. 12.143.000, mengalami peningkatan 4,47% atau sebesar Rp. 534.000. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.44** Perkembangan pengeluaran perkapita di Provinsi Pulau Kalimantan Tahun 2018 - 2022

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
Kalimantan Barat	8.860	9.055	8.930	8.974	9.355
Kalimantan Tengah	10.931	11.236	11.154	11.182	11.458
Kalimantan Selatan	12.062	12.253	12.032	12.143	12.469
Kalimantan Timur	11.917	12.359	11.728	12.116	12.641
Kalimantan Utara	8.943	9.343	8.756	9.075	9.350
Indonesia	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa rata-rata pengeluaran perkapita tertinggi selama kurun waktu 2018-2022 di Pulau Kalimantan adalah Provinsi





Kalimantan Selatan, masing-masing Rp.12.469.000 untuk tahun 2022 dan Kalimantan Timur Rp. 12.641.000 tahun 2022. Sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita terendah adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, dengan angka masing-masing adalah Rp. 9.355.000 dan Rp. 9.350.000. Meskipun angka ini menunjukkan disparitas wilayah, namun belum tentu tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara lebih rendah dari pada Kalimantan Selatan, atau sebaliknya.

### 2.2.1.19 Tingkat Pengangguran Terbuka

Angka TPT Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 adalah 4,74%, angka tersebut masih lebih rendah daripada TPT Indonesia sebesar 5,86%. Berdasarkan gambar 2.17 bahwa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dengan nilai TPT adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

**Gambar 2.17** Tingkat Pengangguran Terbuka paten/Kota Tahun 2022

**Tabel 2.45** Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Selama Tahun 2019-2022

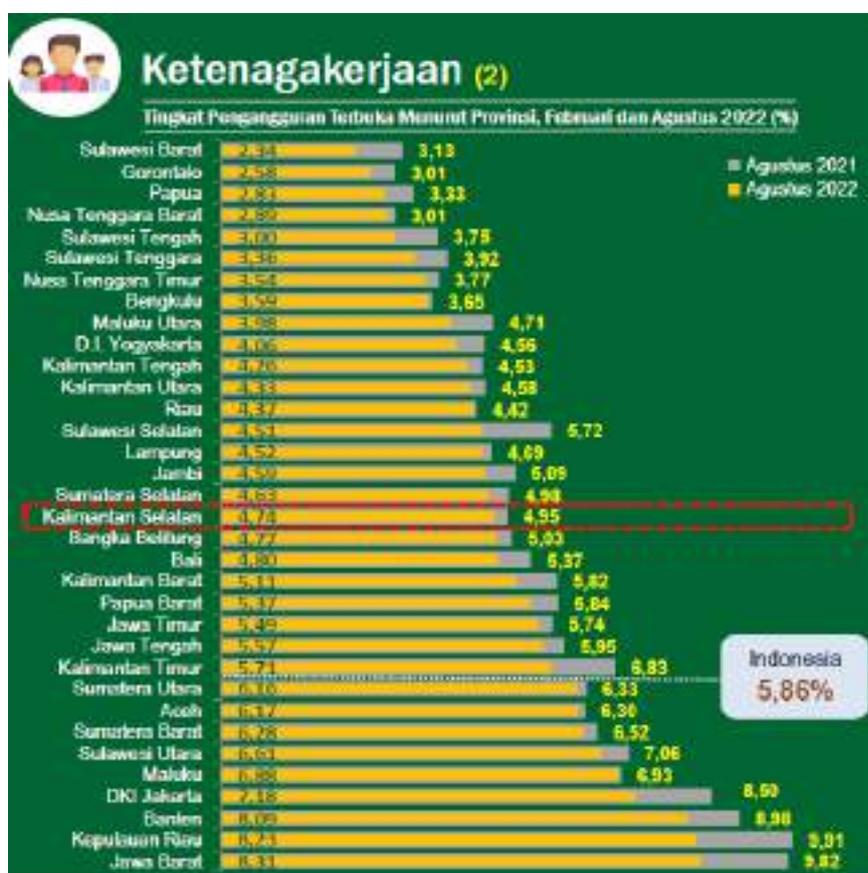
Kabupaten/Kota	TPT (%)			
	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	3,38	3,57	3,52	4,17
Kotabaru	4,78	4,96	5,57	6,70
Banjar	2,89	3,87	3,98	2,72
Barito Kuala	2,39	2,93	3,22	3,63
Tapin	3,65	3,73	4,96	4,15
HSS	2,43	2,24	2,44	2,29





Kabupaten/Kota	TPT (%)			
	2019	2020	2021	2022
HST	2,80	3,90	3,76	3,35
HSU	3,35	4,49	4,80	4,64
Tabalong	3,18	3,07	3,43	4,46
Tanah Bumbu	6,05	6,95	6,83	6,89
Balangan	2,28	2,46	2,44	3,98
Banjarmasin	7,49	8,32	8,47	6,96
Banjarbaru	4,93	5,54	5,70	5,47
Kalimantan Selatan				4,74
Nasional				5,86

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2023



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 2.18** Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2022

**Tabel 2.46** Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Tahun	2018		2019		2020		2021		2022	
	FEB	AGS								
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	3,72	4,35	3,5	4,18	3,67	4,74	4,33	4,95	4,2	4,74





Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	2.216.043	2.131.858	2.268.874	2.135.100	2.269.344	2.186.967	2.195.818	2.219.395	2.129.301	2.196.250
Jumlah Penduduk Pengangguran/ Mencari Kerja (Jiwa)	82.405	92.810	77.289	89.269	83.336	103.648	95.001	109.968	89.470	104.025

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

Salah satu isu yang mengemuka dalam ketenagakerjaan adalah pengangguran. Di satu sisi pengangguran dapat terkait dengan masalah kualitas sumber daya manusia. di sisi lain pengangguran juga dapat menggambarkan ketidakcocokan keterampilan dan kebutuhan industri. Selain itu, masalah pengangguran kemudian dapat mendorong ekspansi ekonomi. masalah ini menjadi krusial untuk dituntaskan karena berpotensi menimbulkan masalah sosial dan meningkatkan tingkat kriminalitas.

### 2.2.1.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Tingginya TPAK menunjukkan tingginya pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Adapun rincian TPAK Kalimantan Selatan berdasarkan Kabupaten/Kota pada periode 2018-2022 ditunjukkan pada Tabel 2.42 berikut.

**Tabel 2.47** Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Selama Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	67,08	69,68	72,03	72,27	70,92
Kotabaru	70,25	68,03	64,68	67,50	63,96
Banjar	71,79	72,55	72,55	70,84	69,91
Barito Kuala	79,34	74,75	74,61	75,48	70,74
Tapin	70,05	69,83	70,17	70,31	70,31
HSS	72,15	71,49	73,15	69,25	69,55
HST	74,85	70,47	71,15	70,20	67,63
HSU	70,55	68,94	70,08	71,41	69,35
Tabalong	75,63	71,02	69,27	71,49	72,32
Tanah Bumbu	66,62	67,31	70,16	68,29	64,75
Balangan	77,54	71,99	76,50	75,38	72,54
Banjarmasin	65,28	66,15	62,07	63,19	63,15
Banjarnbaru	63,51	63,46	66,82	65,95	62,46
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>70,27</b>	<b>69,41</b>	<b>69,33</b>	<b>69,26</b>	<b>67,55</b>

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2023





Rendahnya TPAK salah satunya disebabkan oleh ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja dunia usaha.

### 2.2.1.21 Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kalimantan Selatan. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 1.055,086 orang, naik sebanyak 69,962 orang dibanding Tahun 2021 sebanyak 985,124 orang. Untuk lebih detailnya dari tahun 2018 – 2022 bisa di lihat Tabel 2.48

**Tabel 2.48** Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (Jiwa) Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten	Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus
Tanah Laut	81,301	76,658	70,601	71,005	75,490
Kotabaru	70,769	77,835	85,915	80,329	90,468
Banjarnegara	121,350	121,022	120,461	129,838	135,093
Barito Kuala	46,853	58,356	58,546	57,371	69,236
Tapin	42,332	43,523	42,810	43,244	43,618
Hulu Sungai Selatan	49,058	51,337	47,609	55,062	55,056
Hulu Sungai Tengah	51,887	60,119	58,459	60,954	66,852
Hulu Sungai Utara	50,797	54,023	51,792	50,043	54,235
Tabalong	45,555	54,688	57,647	54,244	53,422
Tanah Bumbu	87,834	89,284	82,527	90,783	104,421
Balangan	20,771	26,871	22,341	23,676	26,929
Kota Banjarmasin	185,907	183,634	202,576	198,806	201,261
Kota Banjar Baru	70,501	72,297	66,148	69,769	79,005
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>924,915</b>	<b>969,647</b>	<b>967,432</b>	<b>985,124</b>	<b>1.055.086</b>

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2022

### 2.2.1.22 Jumlah Penduduk Bekerja

Setelah berakhirnya pandemi Covid-19 mengubah kondisi ketenagakerjaan menjadi era disrupsi terutama di wilayah Kalimantan Selatan, sebuah era dimana terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara baru. Pada Tahun 2022 Penduduk bekerja di Kalimantan Selatan yang tercatat bekerja ada 2.092.225 Orang, mengalami kenaikan di banding Tahun





2021 2.109.427 Orang. Lebih jelasnya bisa di lihat jumlah penduduk bekerja pada tahun 2018 sampai 2022 dilihat pada Tabel 2.49.

**Tabel 2.49** Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa) Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten	Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus
Tanah Laut	158.596	166.334	175.337	178.543	176.458
Kotabaru	157.107	153.867	149.553	157.532	149.780
Banjar	294.592	300.794	306.060	302.916	305.404
Barito Kuala	174.040	166.335	167.010	170.889	161.336
Tapin	93.739	94.660	96.936	97.354	99.027
Hulu Sungai Selatan	121.839	121.575	126.831	120.973	122.843
Hulu Sungai Tengah	141.582	136.525	138.546	138.204	134.982
Hulu Sungai Utara	113.926	113.165	115.837	118.972	117.012
Tabalong	132.994	126.057	125.937	131.366	133.323
Tanah Bumbu	159.614	167.067	180.538	182.149	178.618
Balangan	69.585	65.086	70.928	70.707	68.313
Banjarmasin	309.316	318.725	303.967	312.415	320.853
Banjar Baru	112.118	115.641	125.839	127.407	124.276
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>2.039.048</b>	<b>2.045.831</b>	<b>2.083.319</b>	<b>2.109.427</b>	<b>2.092.225</b>

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2022

### 2.2.1.23 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni dan budaya turut menghidupi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Dari seni dan budaya tersebut berkembang nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat ikut menangkal pengaruh buruk bebas dan pesatnya arus informasi serta globalisasi. Pelestarian seni dan budaya serta nilai-nilai luhur di dalam kandungannya diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia Kalimantan Selatan. Beberapa lembaga berperan dalam melestarikan nilai-nilai yang lahir dari seni dan budaya masyarakat Kalimantan Selatan. Jenis Seni Budaya Provinsi Kalimantan Selatan.

**Tabel 2.50** Berbagai Seni Budaya di Kalimantan Selatan

Jenis Seni Budaya	Seni Budaya di Kalimantan Selatan
Teater Tradisi/Teater Rakyat	Mamanda. Madihin. Wayang Gung. Abdul Mulik Loba. Kuda Gepang. Cerita Damarwulan. Tantayungan. Wayang Kulit. Teater Tuttur.
Seni Musik	Kuriding. Karung-karung. Panting. Kintunglit. Bumbung. Suling Bambu. Musik Tiup. Salung Ulin. Kateng Kupak





Sinoman Hadrah dan Rudat	Sinoman Hadrah dan Rudat bersumber dari budaya yang dibawa oleh pedagang dan penda'wah Islam dari Arab dan Persia dan berkembang campur menjadi kebudayaan pada masyarakat pantai pesisir Kalimantan Selatan hingga timur
Seni Tari	Tari Tradisi : Balian. Gantar. Bakanjar. Babangai Tari Klasik : Baksa Kambang. Topeng. Radap Rahayu Tari Rakyat : Japin Sisit. Tirik Lalan. Gambut. Kuda Gepang. Rudat dll
Seni Sastra	Kuriding. Karung-karung Panting. Kintunglit. Bumbung. Suling Bambu. Musik Tiup. Salung Ulin. Kateng Kupak. Syair : Hikayat. Sejarah. Keagamaan Pantun : Biasa. Kilat. Bakait
Seni Rupa	Ornamen. Topeng dan Patung
Keterampilan	Maayam dinding palupuh. maulah atap. wantilan. maulah gula habang. maulah dodol kandungan. maulah apam barabai. maulah sasapu ijuk. manggangan. maulah wadai. maulah urung katupat. maayam janur banjar. dll

Sumber: Dari Berbagai Sumber

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen yang disusun bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas dan BPS. IPK ini diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan ditingkat nasional dan daerah sesuai dengan amanat UU no 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2019 IPK Kalimantan Selatan dengan IPK 53,79 % berada di urutan 13 dari 34 Provinsi, melampaui target IPK nasional yaitu 53,74 %. Namun ada beberapa indikator ada yang masih rendah atau belum mencapai target.

Dimensi Ekonomi Budaya Nilai Dimensi Ekonomi Budaya Kalimantan Selatan adalah 22,24 pada urutan ke 22 dari 34 provinsi, masih di bawah target nasional sebesar 30,55. Dimensi Warisan Budaya Nilai Dimensi Warisan Budaya Kalimantan Selatan adalah 43,06 pada urutan ke 15 dari 34 provinsi di atas target nasional sebesar 41,11. Dimensi Ekspresi Budaya Nilai Dimensi Ekspresi Budaya Kalimantan Selatan adalah 32,16 pada urutan ke 19 dari 34 provinsi di bawah target nasional sebesar 36,57. Dimensi Budaya Literasi Nilai Dimensi Budaya Literasi Kalimantan Selatan adalah 60,28 pada urutan ke 7 dari 34 provinsi di atas target nasional sebesar 55,03.

### 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai aspek sesuai dengan klasifikasi urusan yang tertera dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

- **Layanan Urusan Wajib**





Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Provinsi Kalimantan Selatan memang sudah menunjukkan adanya perbaikan di setiap periodenya, namun masih perlu adanya peningkatan terutama sarana prasarana penunjang pendidikan. Sementara pelayanan non dasar sebagian besar belum menunjukkan kinerja yang membanggakan karena dalam beberapa urusan wajib non dasar ini belum memiliki NSPK.

### 2.3.1 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

#### 2.3.1.1 Pendidikan

Capaian keberhasilan pendidikan di Kalimantan Selatan yang diukur berdasarkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kalimantan Selatan diukur berdasarkan capaian sebagai berikut:

#### 2.3.1.2 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kalimantan Selatan secara umum menunjukkan perkembangan meningkat selama periode Tahun 2018-2022. APS untuk jenjang SD/MI/Paket A sudah hampir mencapai 100%, artinya hampir seluruh penduduk Kalimantan Selatan yang masuk dalam kelompok usia SD/MI/Paket A masih bersekolah atau tercatat sebagai peserta didik. Sementara APS untuk jenjang SMP/MTs/Paket B sudah lebih 90%. Yang paling rendah adalah APS jenjang SMA/SMK/MA/Paket C yang masih di bawah 70%.

APS pada jenjang SMP/MTs/Paket B dan jenjang SMA/SMK/MA/Paket C belum sebaik APS pada jenjang SD/MI/Paket A. Namun demikian, APS pada kedua jenjang tersebut mengalami peningkatan nilai secara terus menerus pada periode Tahun 2018-2022. Adapun data rinci mengenai APS di Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.51** Pencapaian APS pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI/Paket A	99,64	99,53	99,48	99,38	99,43
SMP/MTs/Paket B	92,43	92,83	93,04	93,50	94,01





SMU/SMK/MA/ Paket C	68,66	69,19	69,38	69,31	69,88
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Kalsel (Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalsel Tahun 2022)

### 2.3.1.3 Angka Partisipasi Kasar

Secara umum, Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kalimantan Selatan cukup baik dan terus mengalami peningkatan. Namun, nilai APK di jenjang SD/MI/Paket A yang menurun bukan mengindikasikan bahwa terjadi kemunduran kualitas sumber daya dan partisipasi penduduk usia SD/MI/Paket A. Penurunan nilai APK tersebut berpotensi terjadi karena semakin sesuainya usia penduduk saat menempuh pendidikan jenjang SD/MI/Paket A. Secara sederhana, bisa saja terjadi pengurangan anak-anak usia dini yang bersekolah di jenjang SD/MI/Paket A atau terjadi pengurangan anak-anak yang mengalami pengulangan kelas. Adapun data APK Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.52** Pencapaian APK ada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI/Paket A	104,25	104,29	107,28	107,14	107,18
SMP/MTs/Paket B	96,13	97,40	86,31	86,04	86,40
SMU/SMK/MA/Paket C	88,18	91,05	79,10	80,77	80,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2023 (Tabel Dinamis)

### 2.3.1.4 Angka Partisipasi Murni

Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistika (SIRUSA) BPS, Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan persentase penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Walaupun secara umum nilai APM Kalimantan Selatan berfluktuasi, namun nilai APM di jenjang SMU/SMK/MA/Paket C cukup menggembirakan karena selalu mengalami peningkatan cukup drastis. Adapun data APM Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2018 - 2022 disajikan pada Tabel 2.53 berikut.





**Tabel 2.53** Pencapaian APM ada Semua Jenjang Dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI/Paket A	91,96	92,42	98,75	98,94	99,12
SMP/MTs/Paket B	71,03	69,56	75,51	74,88	76,28
SMU/SMK/MA/Paket C	63,92	65,17	58,25	58,37	59,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Kalsel (Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalsel Tahun 2022)

Fasilitas dasar pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan lebih dari cukup dengan ketersediaan sekolah maupun kuantitas tenaga pengajar yang dapat dilihat pada Tabel 2.54.

**Tabel 2.54** Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru, serta Indikatornya di Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022

Taman Kanak Kanak			
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)
2018	2.447	105.717	9.749
2019	2.448	101.777	10.641
2020	2.435	96.206	10.525
2021	2.483	88.548	10.304
2022	2.509	93.661	10.396
Sekolah Dasar			
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)
2018	2.911	381.207	27.806
2019	2.914	377.968	27.391
2020	2.929	376.084	30.685
2021	2.938	365.957	29.872
2022	2.915	356.919	30.182
Sekolah Menengah Pertama			
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)
2018	598	120.803	8.859
2019	601	118.052	8.83
2020	615	112.479	9.724
2021	619	112.915	9.417
2022	625	111.622	9.359
Sekolah Menengah Atas			
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)
2018	186	65.819	4.439
2019	190	67.588	4.529
2020	195	67.723	4.833
2021	202	66.914	4.789





2022	205	66.465	5.033
Sekolah Menengah Kejuruan			
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)
2018	123	55.793	3.66
2019	122	57.485	3.706
2020	126	59.717	3.943
2021	127	61.515	4.039
2022	126	55.319	4.142

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2023

Jika melihat analisis berikutnya berupa rasio murid terhadap guru, maka angka ini akan menggambarkan tingkat perbandingan murid terhadap guru sebagai asumsi dasar kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang mengenyam pendidikan. Semakin tinggi rasio murid terhadap guru maka beban mengajar guru semakin berat, sehingga memungkinkan kualitas mengajar menurun, begitu juga sebaliknya. Namun analisis awal ini harus juga diperhatikan terkait distribusi penempatan hingga kualitas guru yang mengajar apakah sudah memenuhi standar kualifikasi atau belum.

Jika dilihat dari rasio murid terhadap guru secara umum, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tenaga pengajar yang lebih dari cukup seperti yang terlihat pada Tabel 2.54. Namun dalam penyebarannya perlu diperhatikan kualitas tenaga pendidik dan kependidikannya agar kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas dapat terealisasi.

Pada jenjang yang lebih tinggi, di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat perguruan tinggi negeri yakni Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Politeknik Kesehatan (Poltekkes Banjarmasin), dan Politeknik Negeri Banjarmasin. Selain itu, terdapat juga perguruan tinggi swasta sebanyak 23 unit dan akademi swasta sebanyak 22.

### 2.3.1.5 Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan sedang dalam masa pengembangan dimana tahun 2022 telah ada 53 unit rumah sakit (dengan tempat tidur sebanyak 3.820 tempat tidur), 6 rumah sakit bersalin, 241 puskesmas, 3.900 Posyandu, 55 klinik kesehatan, 595 Polindes, dan 900 Posbindu. Meskipun begitu, kendala infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pembangunan kesehatan tersebut masih belum maksimal, sehingga terjadi disparitas derajat kesehatan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun kondisi prasarana kesehatan sebagaimana pada Tabel 2.55.





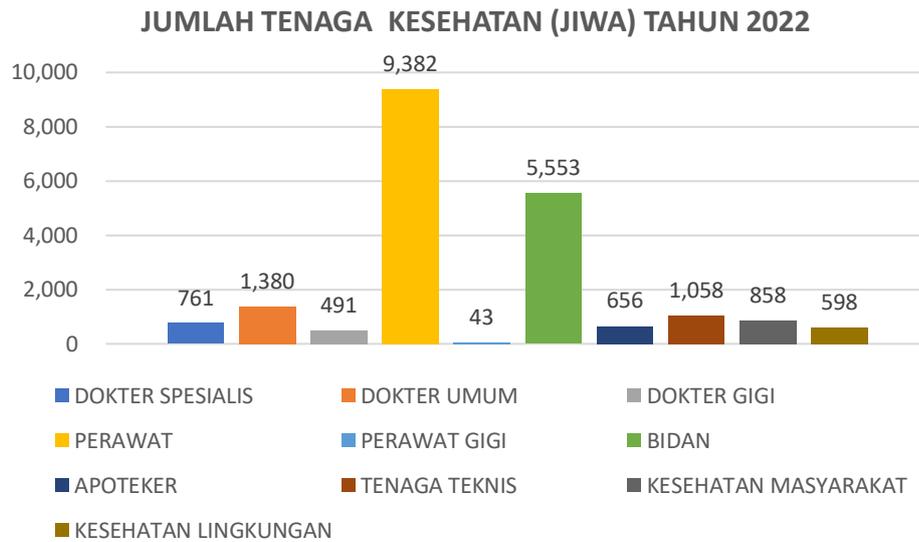
**Tabel 2.55** Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit	Tempat Tidur di RS	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik Kesehatan	Polindes	Posbindu
Tanah Laut	5	189	2	22	280	6	84	88
Kotabaru	2	111	0	28	293	1	46	150
Banjar	7	798	1	25	573	4	111	235
Barito Kuala	1	135	0	19	285	1	135	21
Tapin	2	146	0	13	223	2	66	51
Hulu Sungai Selatan	5	239	0	21	301	1	113	49
Hulu Sungai Tengah	1	150	0	19	365	3	113	48
Hulu Sungai Utara	2	238	0	13	286	2	32	45
Tabalong	2	126	0	18	332	1	71	67
Tanah Bumbu	3	208	1	14	205	8	56	132
Balangan	1	138	0	12	196	1	55	42
Banjarmasin	13	1.060	1	27	395	18	-	52
Banjarbaru	9	282	1	10	166	7	18	15
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>53</b>	<b>3.820</b>	<b>6</b>	<b>241</b>	<b>3.900</b>	<b>55</b>	<b>900</b>	<b>995</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalsel. 2023

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu adanya tenaga kesehatan yang mendukung sarana dan prasarana kesehatan yang dapat membantu pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 446 dokter spesialis, 792 dokter umum, 233 dokter gigi, 871 tenaga medis, 6.843 tenaga keperawatan, 4.535 tenaga kebidanan, 922 tenaga kefarmasian, dan 925 tenaga kesehatan lainnya yang sebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.19 sampai Gambar 2.22.





Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 2.19** Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2022



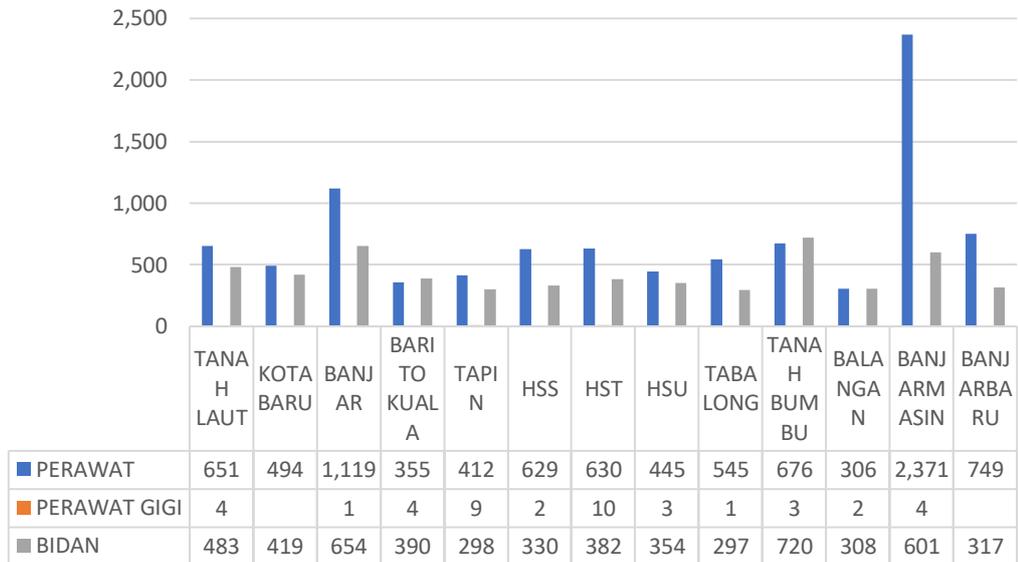
Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 2.20** Jumlah Tenaga Dokter di Kabupaten/Kota Tahun 2022





### TENAGA KEPERAWATAN DAN BIDAN TAHUN 2022



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 2.21** Jumlah Tenaga Keperawatan dan Bidan di Kabupaten/Kota Tahun 2022

### TENAGA KEFARMASIAN DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA TAHUN 2022



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 2.22** Jumlah Kefarmasian Dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2022

#### 2.3.1.6 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi pelaksanaan kegiatan pada bidang jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan





sumberdaya air, air minum, sanitasi, bangunan gedung, bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, pertanahan, dan jasa konstruksi.

#### A. Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Konektivitas merupakan hal penting yang mendukung daya tahan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Konektivitas mencakup pada beberapa elemen yang salah satunya merupakan aksesibilitas. Ketersediaan infrastruktur konektivitas yang memadai memberikan implikasi dalam peningkatan mobilitas manusia dan barang, dimana aktivitas ini berpengaruh besar terhadap kelancaran pergerakan logistik. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, pergerakan ini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mempersempit ketimpangan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

**Tabel 2.56** Data Terkait Rasio Konektivitas Provinsi

No	Kinerja Pendukung	Data
1	Jumlah Armada BRT Banjarbakula	11 Unit
2	jumlah Koridor BRT Sesuai SK Gubernur	10 Koridor
3	Jumlah Trayek Angkutan Umum Sesuai SK Gubernur	45 Trayek
4	Jumlah Lintas Penyeberangan	13 Lintasan
5	Jumlah Terminal Tipe B	5

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kalsel, 2023

Penyelenggaraan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Selatan mencakup kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer - 1 (JKP-1), jalan nasional di Kalimantan Selatan memiliki total sepanjang 1.204,18 Km dengan kondisi mantap sebesar 95,63% pada tahun 2021. Jalan nasional ini terdiri dari Jalan Arteri Primer (JAP) sepanjang 812,46 Km dan Jalan Kolektor Primer -1 (JKP-1) sepanjang 391,72 Km. (Kepmen. PUPR Tahun 2022)

Adapun panjang jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0150/KUM/2023 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan yang semula 756,12 km menjadi 927,41 km dengan kondisi mantap 64,3% pada

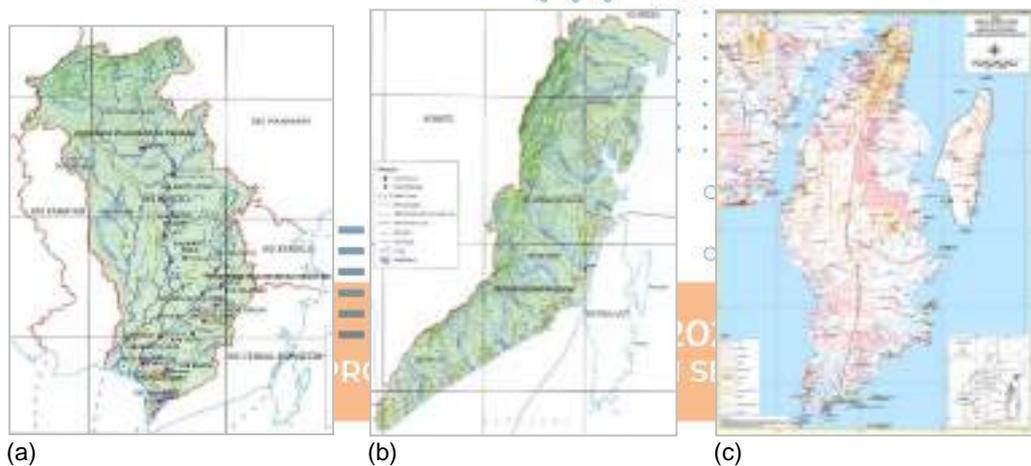


Tahun 2022. Adapun capaian ini masih berada di bawah kondisi mantap jalan nasional.

## B. Sumber Daya Air

Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2015, terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah sungai yaitu :

1. WS Barito, merupakan wilayah sungai kewenangan nasional yang dengan luas wilayah 80.370,98 Km<sup>2</sup>, terdiri dari DAS Kapuas, DAS Barito, DAS Maluka, dan DAS Tabanio.
2. WS Cengal – Batulicin, merupakan wilayah sungai kewenangan provinsi dengan luas wilayah 14.546,47 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 62 Sub DAS dengan luas DAS terbesar adalah DAS Sampanahan.
3. WS Pulau Laut, merupakan wilayah sungai kewenangan kabupaten, dengan luas wilayah 2.023,76 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 71 Sub DAS.



**Gambar 2.23** Wilayah Sungai di Kalimantan Selatan, a) WS Barito, b) WS Cengal – Batulicin, c) WS Pulau Laut

Pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Selatan dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas menjadi salah satu hal penting untuk menjaga kondisi kestabilan pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk memberikan optimalisasi dalam pemenuhan infrastruktur dasar. Salah satu upaya pengelolaan adalah melalui pembangunan infrastruktur ketahanan kebencanaan yaitu pengelolaan pengendali daya rusak air sebagai salah satu upaya meminimalkan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya bencana yang disebabkan oleh daya rusak air.





DAS Barito merupakan DAS terbesar di Kalimantan Selatan dengan luas sebesar 1.866.785 Ha atau 49,61% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. DAS ini terdiri dari 25 Sub DAS, dengan Sub DAS utama yaitu Sub DAS Barito Hilir Sub DAS Alalak Sub DAS Martapura Sub DAS Negara, Sub DAS Balangan Sub DAS Tabalong dan Sub DAS Batang Alai. Pada awal Tahun 2020, intensitas hujan yang tinggi sampai pada kategori ekstrim terjadi pada wilayah DAS Barito yang menyebabkan kenaikan genangan air dan kenaikan debit air sungai yang drastis, sehingga berdampak pada terjadinya banjir besar di 11 kabupaten/kota .

Pada DAS Cengal – Batulicin yang merupakan bagian dari WS kewenangan provinsi memiliki permasalahan dominan setiap tahunnya berupa kejadian banjir/genangan dengan ketinggian bervariasi pada wilayah hilir aliran sungai. Adapun pada tahun 2019 kondisi banjir terparah terjadi di daerah Kecamatan Kusan Hulu yang mengalami genangan seluas 10.097 Ha, seperti yang terlihat pada Tabel 2.57.

**Tabel 2.57** Luasan Banjir/Genangan di DAS kewenangan Provinsi Tahun 2022

Nama DAS	Luas DAS (Ha)	Genangan	
		Luas (Ha)	Kecamatan
DAS Swarangan	375,32	31,23	Jorong
DAS Asam-asam	512,83	1.371,08	Jorong, Batu Ampar
DAS Kintap	670,16	8.189,81	Jorong, Kintap
DAS Cuka	17,59	693,60	Satui
DAS Sebampan	337,96	3.760,37	Sungai Loban, Kuranji, Satui, Angsana
DAS Kusan	1.735,52	21.951,25	Sungai Loban, Kuranji, Kusan Hilir, Kusan Hulu, Batulicin
RTLHDAS Batulicin	1.381,42	0,00	Mentewe, Batulicin, Simpang Empat, Karang Bintang
DAS Cantung	1.465,45	0,00	Kelumpang Hulu
DAS Sampanahan	1.791,97	0,00	Sungai Durian
DAS Cengal	1.177,74	0,00	Pamukan Utara, Pamukan Selatan
<b>TOTAL</b>	<b>9.465,96</b>	<b>35.997,34</b>	

Sumber: Kementerian PUPR, 2023

Adapun bentuk pengelolaan sumber daya air lainnya adalah terkait dengan pengelolaan irigasi dan daerah irigasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria





dan Penetapan Status Daerah Irigasi, yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Sedangkan, daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jaringan irigasi dalam hal ini meliputi saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Adapun luas Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa (DI/DIR) di Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah 995 DI/DIR dan luas total  $\pm$  359.595 Ha, dengan persentase 18,53% merupakan kewenangan pusat, 15,85% kewenangan provinsi, dan 55,62% merupakan kewenangan kabupaten/kota.

**Tabel 2.58** Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI di Kalimantan Selatan Tahun (Update)

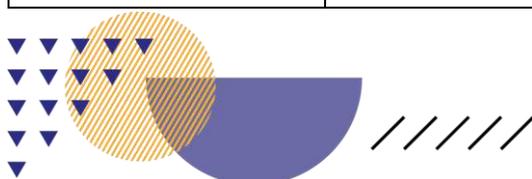
Kewenangan	Luas Area (Ha)	Persentase	Jumlah DI/DR
Pusat	102.598	28,53%	23
Provinsi	57.003	15,85%	40
Kabupaten/Kota	199.989	55,62%	932
<b>Total</b>	<b>359.595</b>	<b>100,00%</b>	<b>995</b>

Sumber: Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015

Pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III melaksanakan kegiatan *One Map* irigasi untuk mengidentifikasi kembali luas pengelolaan DI/DIR di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun luas DI/DIR berdasarkan hasil *One Map* irigasi sebesar  $\pm$  357.568 Ha. Adapun luas pembagian kewenangan DI/DIR disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.59** Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI/DIR di Kalimantan Selatan berdasarkan *One Map* Irigasi pada Tahun 2019

Kewenangan	Luas Area (Ha)	Persentase	Jumlah DI/DR
Pusat	106.039	29,65%	22
Provinsi	56.295	15,74%	24





Kewenangan	Luas Area (Ha)	Persentase	Jumlah DI/DR
Kabupaten/Kota	195.234	54,60%	633
Total	357.568	100,00%	679

Untuk melihat kinerja sistem irigasi masing-masing DI/DIR pada setiap kewenangan maka dilakukan penilaian kinerja jaringan irigasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan irigasi yang diterjemahkan kedalam Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). Berdasarkan IKSI dapat disimpulkan bahwa kondisi irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan rata-rata masih berada di bawah 50% yang menunjukkan bahwa kinerja sistem irigasi masih di bawah potensi yang dimilikinya karena adanya ssws. Kerusakan irigasi ini antara lain disebabkan oleh usia infrastruktur irigasi, gangguan alam, maupun pengelolaan irigasi yang kurang optimal. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus karena akan berdampak pada produksi pangan di Kalimantan Selatan.

**Tabel 2.60** Indeks Kinerja Sistem Irigasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022

Kewenangan	Utama	Tersier	Gabungan
Pusat	56,92	61,25	57,78
Provinsi	52,78	48,94	52,08

Sumber: ePAKSI, 2022

Sebagai upaya penyediaan sumber air baku di kabupaten/kota untuk menjaga keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan air bersih, diperlukan alternatif-alternatif penyediaan air baku, antara lain melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air antara lain bendungan/bendung, embung, dan tampungan-tampungan air lainnya.

### C. Air Minum, Sanitasi dan Persampahan

Penyediaan air minum, sanitasi, dan persampahan di Kalimantan Selatan mencakup pengelolaan pada skala provinsi dan skala kabupaten/kota. Adapun kondisi dan capaian pada masing-masing sektor ini adalah sebagai berikut:

- Pencapaian Akses Air Minum

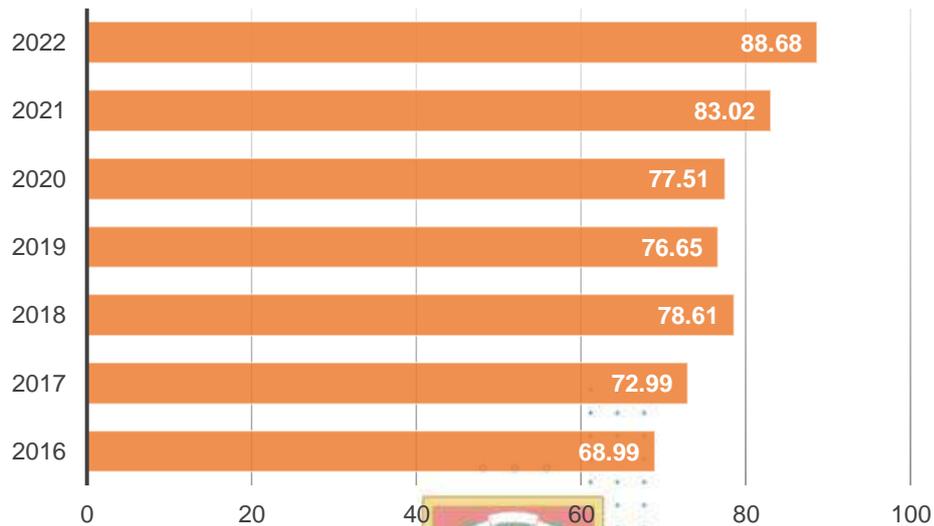
Dalam rangka pencapaian *universal access* air minum, pemerintah pusat melalui RPJMN Tahun 2020 – 2024 telah menargetkan pencapaian air





minum 100% pada Tahun 2024 untuk seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 2 target terkait dengan capaian air minum yaitu capaian air minum akses layak dan capaian air minum akses aman.

### GRAFIK CAPAIAN AKSES LAYAK AIR MINUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



**Gambar 2.24** Capaian Air Minum Kalimantan Selatan 2016 – 2022

Sumber Data: DPUR, 2023

Berdasarkan Gambar 2.24, capaian akses air minum Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 sebesar 83,02% dan tahun 2022 sebesar 88,68% , hal ini menunjukkan bahwa trend pencapaian air minum akses layak di Kalimantan Selatan mengalami perbaikan setiap tahunnya.

**Tabel 2.61** Tabel Capaian Air Minum Akses Layak Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

Kab/Kota	Capaian Akses Layak Air Minum 2020 – 2024 (%)		
	2020	2021	2022
Balangan	94,76	96,07	97,38
Banjar	74,33	80,75	87,17
Banjarbaru	92,9	94,68	96,45
Banjarmasin	99,9	99,93	99,95
Barito Kuala	62,35	71,76	81,18
Hulu Sungai Selatan	76,94	82,71	88,47



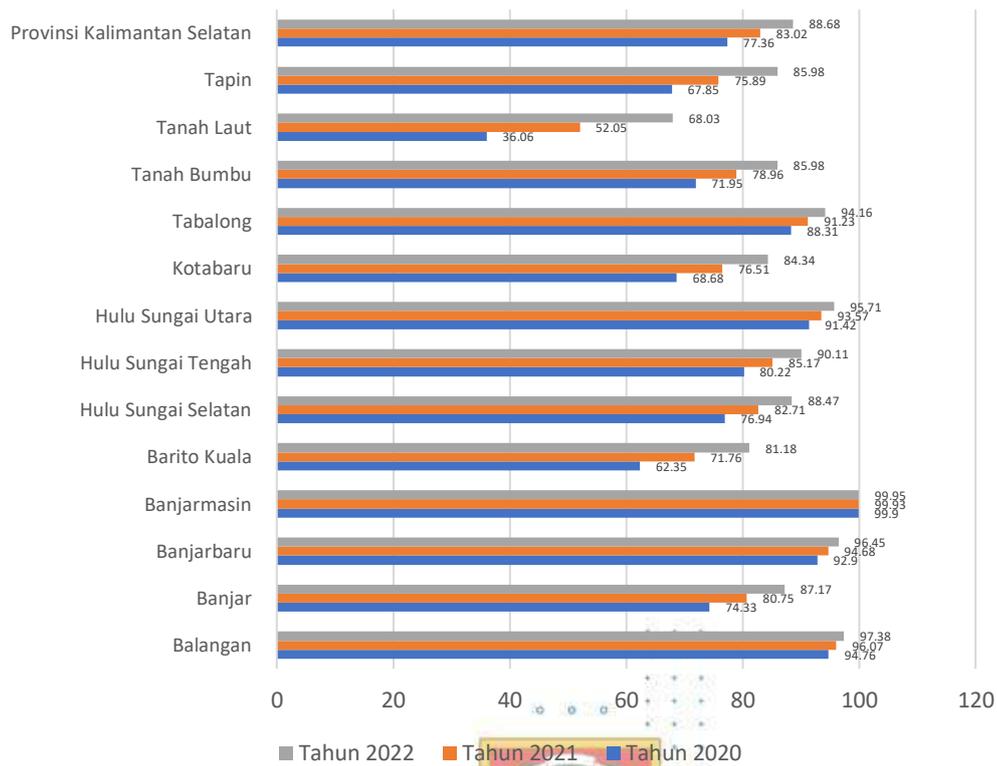


Kab/Kota	Capaian Akses Layak Air Minum 2020 – 2024 (%)		
	2020	2021	2022
Hulu Sungai Tengah	80,22	85,17	90,11
Hulu Sungai Utara	91,42	93,57	95,71
Kotabaru	68,68	76,51	84,34
Tabalong	88,31	91,23	94,16
Tanah Bumbu	71,95	78,96	85,98
Tanah Laut	36,06	52,05	68,03
Tapin	67,85	75,89	85,98
Provinsi Kalimantan Selatan	77,36	83,02	88,68

Sumber: DPUPR Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Capaian air minum akses layak kabupaten/kota pada tahun 2022 seperti disajikan pada Tabel 2.61 dan Gambar 2.25. Sebagian besar Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki capaian air minum dengan status akses layak di atas rata-rata Provinsi, bahkan untuk Kota Banjarmasin sejak tahun 2020 s.d 2022 memiliki capaian lebih dari 99%. Beberapa Kabupaten Kota yang masih harus mendapat perhatian lebih terkait pemenuhan target pemerintah daerah yang disesuaikan dengan target pemerintah pusat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengamanatkan terwujudnya 90% akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta penurunan angka BABS hingga 0% pada akhir tahun 2024, antarlain Kab Tanah Laut, Kab Barito Kuala dan Kabupaten Kotabaru dengan capaian ketiga Kabupaten ini yang masih berada di bawah angka rata-rata Provinsi.



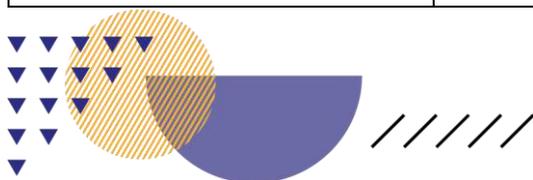


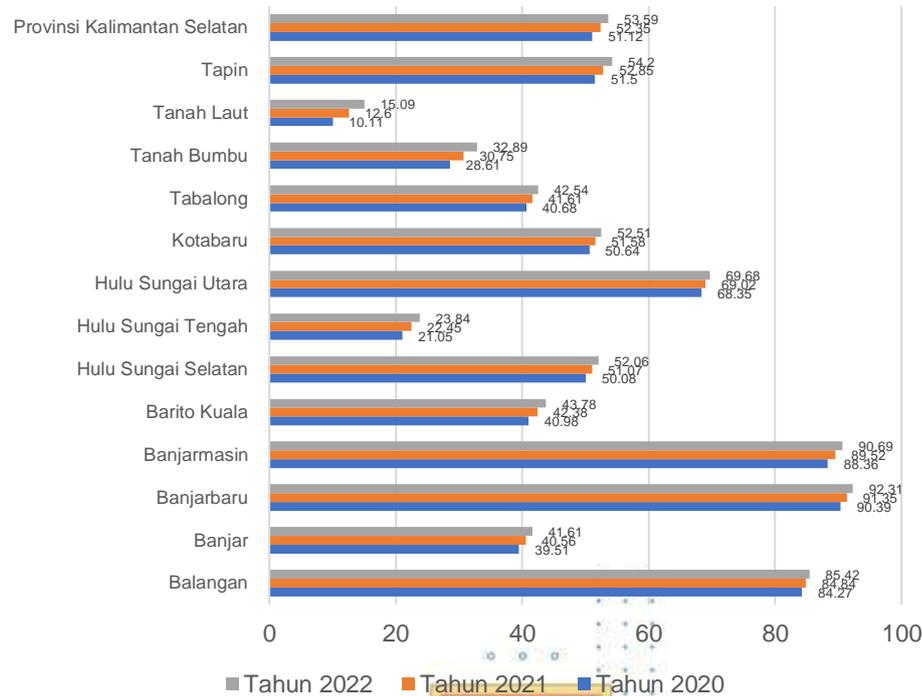
**Gambar 2.25** Capaian Air Minum Akses Layak Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2020-2022

Sumber Data : DPUPR Prov Kalsel, 2023

**Tabel 2.62** Tabel Capaian Air Minum Akses Aman Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

Kab/Kota	Capaian Akses Aman Air Minum 2020 – 2024 (%)		
	2020	2021	2022
Balangan	84,27	84,84	85,42
Banjar	39,51	40,56	41,61
Banjarbaru	90,39	91,35	92,31
Banjarmasin	88,36	89,52	90,69
Barito Kuala	40,98	42,38	43,78
Hulu Sungai Selatan	50,08	51,07	52,06
Hulu Sungai Tengah	21,05	22,45	23,84
Hulu Sungai Utara	68,35	69,02	69,68
Kotabaru	50,64	51,58	52,51
Tabalong	40,68	41,61	42,54
Tanah Bumbu	28,61	30,75	32,89
Tanah Laut	10,11	12,6	15,09
Tapin	51,5	52,85	54,2
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>51,12</b>	<b>52,35</b>	<b>53,59</b>





Sumber Data : DPUPR Prov Kalsel, 2023

**Gambar 2.26** Capaian Air Minum Akses Aman Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2020-2022

Adapun capaian air minum akses aman kabupaten/kota pada tahun 2022 seperti disajikan pada Tabel 2.62 dan Gambar 2.26. Dari 13 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, baru ada 4 Kabupaten yang memiliki capaian air minum akses aman diatas angka rata-rata capaian Provinsi yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan untuk Kab/Kota yang lain masih perlu melakukan upaya lebih sehingga dapat melampaui angka rata-rata tersebut.

Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengelola SPAM skala Regional pada kawasan metropolitan Banjarkakula. Dalam pelaksanaannya SPAM Banjarkakula telah membangun infrastruktur untuk kebutuhan air curah skala regional. Adapun infrastruktur yang terbangun sampai dengan saat ini dapat dilihat pada table berikut.





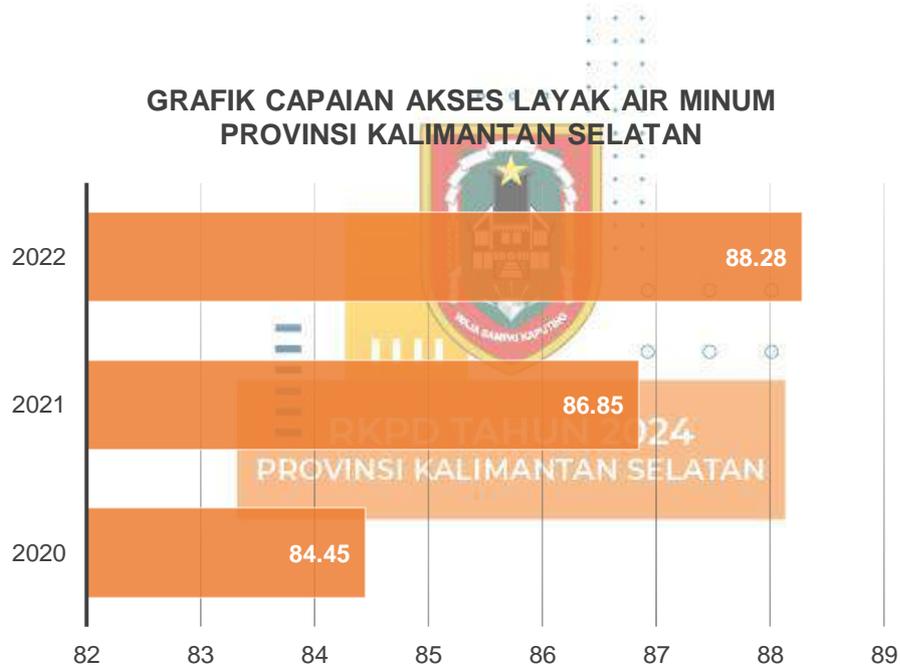
**Tabel 2.63** Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

No	INFRASTRUKTUR	KAPASITAS
1	Intake Bendung Karang Intan (4 unit Pompa Transmisi Submersible)	400 L/detik
2	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pembangunan Tahap I	250 L/detik
3	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pembangunan Tahap II	500 L/detik

Sumber: Balai SPAM Banjarbakula, 2023

▪ Pencapaian Akses Sanitasi

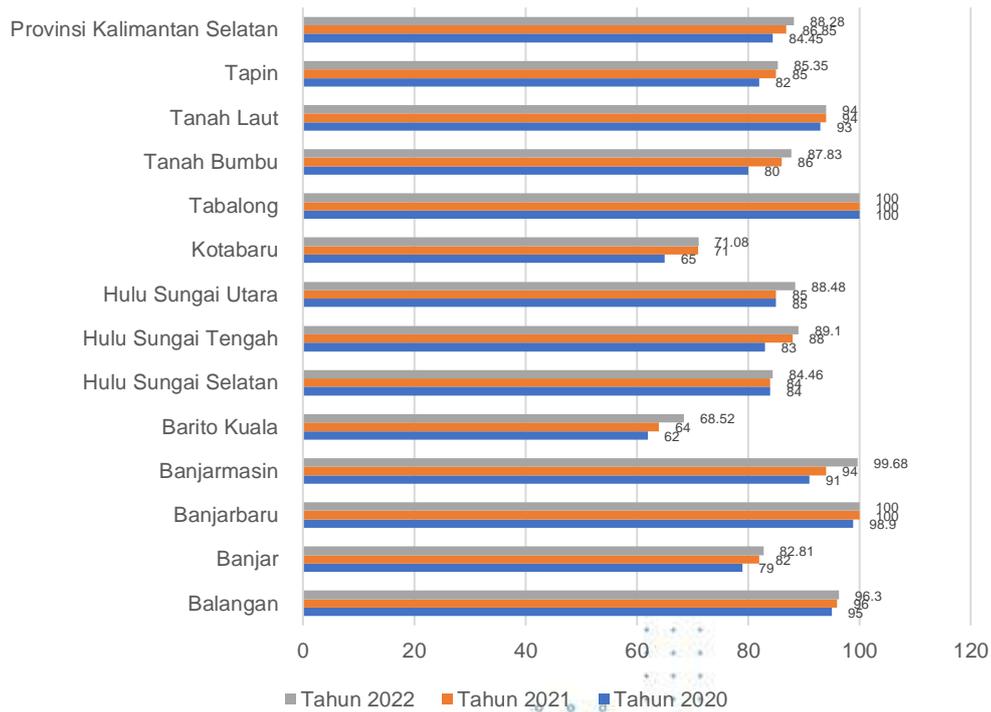
Ruang lingkup sanitasi pada sektor pekerjaan umum meliputi pengelolaan limbah rumah tangga, sistem jaringan pengelolaan IPAL komunal, dan seterusnya. Pada sisi lingkungan, sanitasi juga terkait dengan persampahan mulai dari rumah tangga hingga TPST, dan lain-lain.



Sumber Data : DPUPR Provinsi Kalsel, 2023

**Gambar 2.27** Capaian Air Limbah Domestik Akses Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022s





Sumber Data : DPUPR Provinsi Kalsel, 2023

**Gambar 2.28** Capaian Air Limbah Domestik Akses Layak Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2022



Sumber Data : DPUPR Provinsi Kalsel, 2023

**Gambar 2.29** Capaian Air Limbah Domestik Akses Aman Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2022





Berdasarkan Gambar, capaian akses air limbah Akses layak domestik Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sebesar 88,28% naik sebesar 1,63% dari capaian tahun 2021 sebesar 86,85%. Dari grafik dapat dilihat bahwa trend pencapaian akses air minum di Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Khusus pada pencapaian cakupan air limbah domestik yang aman Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan dengan mendekati pencapaian target dari Nasional pada tahun 2024 sebesar 13%. Adapun kondisi pencapaian Kabupaten/Kota sebagai berikut :

**Tabel 2.64** Kondisi Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Akses Layak Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2022

Kab/Kota	Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Akses Layak		
	2020	2021	2022
Balangan	95	96	96,3
Banjar	79	82	82,81
Banjarbaru	98,9	100	100
Banjarmasin	91	94	99,68
Barito Kuala	62	64	68,52
Hulu Sungai Selatan	84	84	84,46
Hulu Sungai Tengah	83	88	89,1
Hulu Sungai Utara	85	85	88,48
Kotabaru	65	71	71,08
Tabalong	100	100	100
Tanah Bumbu	80	86	87,83
Tanah Laut	93	94	94
Tapin	82	85	85,35
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>84,45</b>	<b>86,85</b>	<b>88,28</b>

Sumber: DPUPR Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

**Tabel 2.65** Kondisi Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Akses Aman Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2022

Kab/Kota	Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Akses Aman		
	2020	2021	2022
Balangan	1,23	2,17	3,12
Banjar	1	3,24	5,48
Banjarbaru	1	3,35	5,5
Banjarmasin	22,23	26,42	30,61
Barito Kuala	2,4	3,93	5,45
Hulu Sungai Selatan	1	2,06	3,11
Hulu Sungai Tengah	4	5,5	7





Kab/Kota	Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Akses Aman		
	2020	2021	2022
Hulu Sungai Utara	0	2,5	5
Kotabaru	0	0,5	1
Tabalong	0	2,5	5
Tanah Bumbu	5	6,25	7,5
Tanah Laut	1,23	1,42	1,62
Tapin	0	0,5	2
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>3,01</b>	<b>4,63</b>	<b>6,26</b>

▪ Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat. Sistem pengelolaan sampah yang dominan masih tradisional, antara lain adanya praktek pembuangan sampah secara sembarangan. Sehingga untuk melakukan pengelolaannya perlu didukung dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, seperti penyediaan TPA, TPS, TPST, atau TPS3R.

**Tabel 2.66** Realisasi Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2022\*

NO	KABUPATEN/ KOTA	CAPAIAN				SAMPAH TERKELO LA (%)	SAMPAH TIDAK TERKELO LA (%)	
		TIMBULAN SAMPAH (ton/tahun)	PENGURANGAN SAMPAH (ton/tahun)	%	PENANGANAN SAMPAH (ton/tahun)			%
1	Banjarmasin	186.872	48.571	25,99	136.417	73	98,99	0,01
2	Banjarbaru	67.080	16.105	24,01	50.897	75,88	99,89	0
3	Banjar	149.097	36.462	24,46	105.914	71,04	95,5	3,5
4	Tanah Laut	51.807	7.323	14,14	26.941	52	66,14	32,86
5	Barito Kuala	35.180	7.886	22,42	17.557	49,91	72,33	26,67
6	Tapin	29.967	5.120	17,09	16.383	54,67	71,76	27,24
7	Hulu Sungai Selatan	35.330	7.550	21,37	18.734	53,02	74,39	24,61
8	Hulu Sungai Tengah	38.070	8.118	21,32	20.825	54,7	76,02	22,98
9	Hulu Sungai Utara	33.768	9.332	27,64	23.306	69,02	96,66	2,34
10	Balangan	20.576	4.534	22,04	14.783	71,84	93,88	5,12
11	Tabalong	37.508	8.382	22,35	26.798	71,45	93,8	5,2
12	Tanah Bumbu	60.743	10.230	16,84	46.499	76,55	93,39	5,61
13	Kotabaru	66.144	5.649	8,54	12.968	19,61	28,15	70,85
	<b>PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>812.142</b>	<b>175.262</b>	<b>20,63</b>	<b>518.020</b>	<b>60,98</b>	<b>81,61</b>	<b>17,39</b>

Sumber : DLH Prov Kalsel, 2023





**Tabel 2.67** Capaian Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kinerja Utama	Indikator	Target & Capaian 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pengurangan dan penanganan sampah	Presentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	26%	20.19%	77.65%
		Presentase Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis Rumah Tangga	73%	59.5%	81.51%
Rata-Rata Capaian			99%	79.69%	79,58%

Sumber : DLH Prov Kalsel, 2023

Salah satu infrastruktur yang telah dibangun untuk mendukung akses persampahan adalah melalui pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula yang merupakan pelayanan persampahan dengan sistem Sanitary Landfill yang melayani 2 Kota dan 3 Kabupaten yang tercakup di dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Metropolitan Banjarbakula. TPA Regional Banjarbakula memiliki total luas area 32 Ha dan telah dikembangkan seluas 11 Ha. Kapasitas yang mampu ditampung oleh TPA ini sebesar 275 ton/hari. Untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan persampahan terutama pada kawasan perkotaan Banjarbakula, direncanakan pembangunan incinerator serta pengoperasian Fasilitas Limbah B3 (Oli Bekas).

#### **D. Penataan Bangunan dan Lingkungan**

Penataan bangunan dan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik di perkotaan maupun di perkampungan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya. Data yang tersedia sampai dengan tahun 2022 Jumlah bangunan gedung baik pemerintahan maupun yang non pemerintahan yang telah terbangun sampai saat ini berjumlah 36 bangunan. Dan untuk memepertahankan bangunan gedung termasuk sarana prasaranya dalam kondisi baik Dinas PUPR telah melaksanakan pemeliharaan , rehabilitasi serta peningkatan sebanyak 67 bangunan dan masih dalam tahap perencanaan ada sebanyak 78 proyek.





**Tabel 2.68** Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2018 sampai 2021

	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pembangunan Baru	11	11	7	3	4
Rehabilitasi	9	18	6	34	6
Perencanaan	6	8	11	53	15

Sumber : DPUPR Prov Kalsel, 2023

## E. Penataan Ruang

Sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kondisi ruang tersebut dapat dipenuhi melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar di dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayahnya dengan tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk di dalamnya mengenai penataan ruang. Wewenang pemerintah daerah dalam hal penataan ruang adalah menyelenggarakan penataan ruang daerahnya yang didalamnya terdapat unsur perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 telah dilegalisasi dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 tanggal 25 September 2015. Pada Tahun 2021, RTRWP Kalimantan Selatan memasuki masa revisi dan pada Tahun 2022 berada pada tahapan penetapan perda hasil revisi pada tahap proses pembahasan di Dewan dan akan disusun dengan Proses evaluasi provinsi sebelum dapat ditetapkan sebagai Perda. Proses yang Panjang harus ditempuh menyesuaikan dengan ketentuan tahapan sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya.

Pemerintah provinsi juga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota di wilayahnya, Sampai dengan tahun 2021 dari 13 Kabupaten/Kota yang telah menjadi Peraturan Daerah sebanyak 13 Kabupaten/kota dan pada tahun 2021 terdapat 2 Kabupaten/Kota yang telah melakukan Revisi RTRW Kabupaten Kota dan telah ditetapkan ke dalam Perda yaitu Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, untuk Kota





Banjarbaru sedang pada tahap yang sama dengan status RTRW Provinsi yaitu berada pada tahap proses pembahasan di Dewan dan akan disusul dengan Proses evaluasi provinsi sebelum dapat ditetapkan sebagai Perda, sedangkan 10 kabupaten lainnya saat ini sedang pada tahap revisi.

**Tabel 2.69** Status RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2022

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA	PERDA YANG MASIH BERLAKU	STATUS PERDA
1.	Provinsi Kalimantan Selatan	Perda Nomor 9 Tahun 2015	Proses Penetapan Perda Hasil Revisi
2.	Kota Banjarmasin	Perda Nomor 06 Tahun 2021	Perda
3.	Kota Banjarbaru	Perda Nomor 13 Tahun 2014	Proses Penetapan Perda Hasil Revisi
4.	Kabupaten Banjar	Perda Nomor 4 Tahun 2021	Perda
5.	Kabupaten Barito Kuala	Perda Nomor 6 Tahun 2012	Proses Revisi
6.	Kabupaten Tanah Laut	Perda Nomor 3 Tahun 2016	Proses Revisi
7.	Kabupaten Tanah Bumbu	Perda Nomor 5 Tahun 2017	Proses Revisi
8.	Kabupaten Kotabaru	Perda Nomor 11 Tahun 2011	Proses Revisi
9.	Kabupaten Tabalong	Perda Nomor 19 Tahun 2014	Proses Revisi
10.	Kabupaten Balangan	Perda Nomor 24 Tahun 2013	Proses Revisi
11.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Perda Nomor 12 Tahun 2012	Proses Revisi
12.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Perda Nomor 13 Tahun 2016	Proses Revisi
13.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Perda Nomor 3 Tahun 2014	Proses Revisi
14.	Kabupaten Tapin	Perda Nomor 10 Tahun 2014	Proses Revisi

## F. Bina Konstruksi

Jumlah rata-rata paket pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di pemerintahan Kalimantan Selatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 8829 paket kegiatan, jumlah ini mencakup pekerjaan konstruksi





yang dilaksanakan Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dibagi kedalam 4 urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sedangkan untuk pekerjaan konstruksi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 khusus untuk Provinsi adalah sebanyak 479 pekerjaan konstruksi, data diatas di jabarkan dalam dalam tabel berikut:

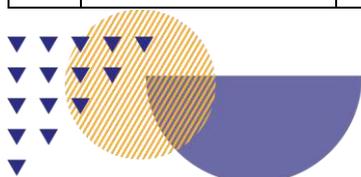
**Tabel 2.70** Jumlah Pekerjaan Konstruksi s.d Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan

Urusan	2019	2020	2021	2022
Cipta Karya	136	222	720	140
Tata Bangunan	515	813	2140	69
Bina Marga	307	471	1859	155
Sumber Daya Air	241	216	709	115

Sumber : DPUPR Prov Kalsel, 2023

**Tabel 2.71** Jumlah Pekerjaan Konstruksi Tahun 2019 – 2022 Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan

NO.	KABUPATEN/KOTA	BIDANG	JUMLAH PEKERJAAN				JUMLAH
			2019	2020	2021	2022	
1	BALANGAN	CK	0	0	66		66
		TB	0	0	157		157
		BM	0	0	90		90
		SDA	0	0	85		85
2	HSS	CK	0	0	83		83
		TB	0	0	153		153
		BM	0	0	75		75
		SDA	0	0	79		79
3	HST	CK	0	0	11		11
		TB	0	0	68		68
		BM	0	0	39		39
		SDA	0	0	24		24
4	HSU	CK	0	0	37		37
		TB	0	0	223		223
		BM	0	0	107		107
		SDA	0	0	22		22
5	KOTABARU	CK	0	0	38		38
		TB	0	0	96		96
		BM	0	0	104		104
		SDA	0	0	13		13
6	TABALONG	CK	0	0	67		67
		TB	0	0	116		116
		BM	0	0	143		143
		SDA	0	0	17		17
		JASKON	0	0	1		1
7	TANAH BUMBU	CK	0	0	61		61
		TB	0	0	395		395
		BM	0	0	399		399
		SDA	0	0	103		103





NO.	KABUPATEN/KOTA	BIDANG	JUMLAH PEKERJAAN				JUMLAH
			2019	2020	2021	2022	
8	TANAH LAUT	CK	0	0	84		84
		TB	0	0	288		288
		BM	0	0	266		266
		SDA	0	0	41		41
9	TAPIN	CK	0	0	80		80
		TB	0	0	151		151
		BM	0	0	199		199
		SDA	0	0	107		107
10	BANJARMASIN	CK	43	90	90		223
		TB	187	152	113		452
		BM	59	98	100		257
		SDA	30	14	71		115
11	BANJARBARU	CK	28	12	18		58
		TB	196	84	54		334
		BM	71	73	77		221
		SDA	98	77	62		237
12	BANJAR	CK	18	30	30		78
		TB	30	30	41		101
		BM	30	30	72		132
		SDA	30	30	23		83
13	BARITO KUALA	CK	17	34	4		55
		TB	72	100	33		205
		BM	117	187	117		421
		SDA	52	83	42		177
14	KALIMANTAN SELATAN	CK	30	56	51	140	277
		TB	30	447	252	69	798
		BM	30	83	71	155	339
		SDA	31	12	20	115	178
<b>Jumlah Pekerja Konstruksi</b>			<b>1199</b>	<b>1722</b>	<b>5429</b>	<b>479</b>	<b>8829</b>

Terkait dengan jumlah tenaga kerja pada bidang Bina Konstruksi bila diasumsikan 1 pekerjaan konstruksi memerlukan 3 orang tenaga dengan lama pekerjaan 6 bulan maka diasumsikan kebutuhan tenaga ahli sebanyak 1437 orang hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli untuk pekerjaan konstruksi di Provinsi. Berdasarkan data Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan (tahun 2022) jumlah tenaga ahli baik madya maupun muda yang terbagi dalam berbagai bidang keahlian di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebanyak 892 Orang, sedangkan tenaga terampil sebanyak 714 orang, jika dibandingkan dengan jumlah pekerjaan konstruksi pertahun di Provinsi Kalimantan Selatan yang rata-rata lebih dari 1000 paket, maka dapat diasumsikan bahwa jumlah ketersediaan tenaga ahli di bidang konstruksi masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan.





**Tabel 2.72** Tabel Data Jumlah ketersediaan tenaga ahli Pekerjaan Konstruksi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

NO	KETERSEDIAAN TENAGA AHLI			
	BIDANG / SUB-BIDANG	JUMLAH	KETERANGAN	Kualifikasi
<b>1</b>	<b>ARSITEKTUR</b>			
1,1	Arsitek (101)	23	INTAKINDO	muda (15) madya (8)
		3	aspeknas	
		33	IAI	muda (33)
		5	perkonindo	muda (4) madya (2)
1,2	Ahli Desain Interior(102)	5	INTAKINDO	muda (4) madya (1)
		1	aspeknas	
1,3	Ahli Arsitekur Lansekap(103)	13	INTAKINDO	muda (10) madya (3)
1,4	Ahli Iluminasi(104)	1	INTAKINDO	muda (1)
<b>2</b>	<b>SIPII</b>			
2,1	Ahli Teknik Bangunan Gedung(201)	1	asdamkindo	
		102	INTAKINDO	muda (75) madya (27)
		17	aspeknas	
		8	perkonindo	muda (6) madya (2)
		19	haki	muda (9) madya (7) utama (3)
2,2	Ahli Teknik Jalan(202)	3	asdamkindo	
		124	INTAKINDO	muda (122) madya (28) utama (1)
		20	aspeknas	
		4	perkonindo	muda (2) madya (1) Utama (1)
		3	haki	muda (2) madya (1)
2,3	Ahli Teknik Jembatan(203)	3	asdamkindo	
		53	INTAKINDO	muda (35) madya (17) utama (1)
		6	aspeknas	
		1	perkonindo	muda (1)
		1	haki	muda (1)
2,4	Ahli Keselamatan Jalan(204)			
2,5	Ahli Teknik Terowongan(205)			
2,6	Ahli Teknik Landasan Terbang(206)			
2,7	Ahli Teknik Jalan Rel (207)			
2,8	Ahli Teknik Dermaga (208)	3	aspeknas	
2,9	Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantasi (209)			
2,1	Ahli Teknik Bendungan Besar(210)			
2,11	Ahli Teknik Sungai dan Drainase(211)	3	INTAKINDO	muda (2) madya (1)
		6	aspeknas	
2,12	Ahli Teknik Irigasi (212)	17	INTAKINDO	muda (17)
2,13	Ahli Teknik Rawa dan Pantai(213)	2	INTAKINDO	muda (2)
2,14	Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan (214)			
2,15	Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan (215)	1	INTAKINDO	madya (1)
2,16	Ahli Geoteknik (216)	3	INTAKINDO	muda (2) madya (1)
2,17	Ahli Geodesi (217)	8	INTAKINDO	muda (6) madya (2)
<b>3</b>	<b>MEKANIKAL</b>			
3,1	Ahli Teknik Mekanikal (301)	2	INTAKINDO	madya (2)





NO	KETERSEDIAAN TENAGA AHLI			
	BIDANG / SUB-BIDANG	JUMLAH	KETERANGAN	Kualifikasi
3,2	Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refigerasi(302)			
3,3	Ahli Teknik Plumbing dan Pompa Mekanik (303)			
3,4	Ahli Teknik Proteksi Kebakaran(304)			
3,5	Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung(305)	1	INTAKINDO	
<b>4</b>	<b>ELEKTRIKAL</b>			
4,1	Ahli Teknik Tenaga Listrik(401)	31	INTAKINDO	muda (4) madya (11)
		6	aspeknas	
4,2	Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi dalam Gedung(405)	1	INTAKINDO	madya (1)
4,3	Ahli Teknik Sistem Sinyal Telekomunikasi Kereta Api(406)			
<b>5</b>	<b>TATA LINGKUNGAN</b>			
5,1	Ahli Teknik Lingkungan(501)	24	INTAKINDO	muda (12) madya (10) utama (1)
5,2	Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah (503)	1	INTAKINDO	muda (1)
5,3	Ahli Teknik Air Minum (504)	9	INTAKINDO	muda (8) madya (1)
		2	aspeknas	
5,4	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (502)	30	INTAKINDO	muda (23) madya (6) utama (1)
		2	perkonindo	muda (1) madya (1)
		44	IAP	muda (8) madya (13) utama (3)
<b>6</b>	<b>MANAJEMEN PELAKSANAAN</b>			
6,1	Ahli Manajemen Konstruksi (601)	40	INTAKINDO	muda (32) madya (8)
6,2	Ahli Manajemen Proyek (602)	10	INTAKINDO	muda (5) madya (4) utama (1)
		1	perkonindo	madya (1)
6,3	Ahli K3 Konstruksi (603)	129	PAKKI	muda
		47	INTAKINDO	muda (39) madya (8)
		1	aspeknas	
6,4	Ahli Sistem Manajemen Mutu (604)	2	INTAKINDO	muda (1) madya (1)
		17	ASTTI	muda (5) madya (12)
<b>TOTAL TENAGA KERJA</b>		<b>892</b>		

Sumber : DPUPR Prov Kalsel, 2023

### 2.3.1.7 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.





**Tabel 2.73** Luas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 berdasarkan Kewenangan Penanganan

NO	KABUPATEN / KOTA	LUAS KAWASAN PERMUKIMAN (Ha)*	SK KUMUH KAB / KOTA	PEMBAGIAN KEWENANGAN			TOTAL LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KALSEL
				LUAS KUMUH KEWENANGAN PROVINSI	LUAS KAWASAN KUMUH KEWENANGAN KAB/KOTA	LUAS KAWASAN KUMUH KEWENANGAN PUSAT	
1	Tanah Laut	37.062,48	BERITA ACARA NO.600/1084 - PKP/DISPERKIM VERIFIKASI LOKASI	33,93	120,35	1269,18	1423,46
2	Kotabaru	15.499,66	SK NO. 188.45 / 550 / KUM / 2020	35,54	118,35	33,02	186,91
3	Banjarnegara	41.852	SK NO. 188.45 / 221 / KUM / 2020	92,67	119,54	88,51	300,72
4	Barito Kuala	18.604	SK NO. 188.45 / 393 / KUM / 2017	60,77	251,13	22,28	334,18
5	Tapin	46.259	SK NO. 188.45 / 056 / KUM / 2016	23,11	117,47	0	140,58
6	Hulu Sungai Selatan	4.533	SK NO. 188.45 / 358 / KUM / 2019	64,50	171,95	122,36	358,81
7	Hulu Sungai Tengah	1.998,05	SK NO. 640 /284 / 648 / TAHUN 2020	80,28	67,34	120,01	267,63
8	Hulu Sungai Utara	2.677,00	SK NO. 188.45 / 92 / KUM / 2020	66,11	93,92	91,51	251,54
9	Tabalong	18.373,02	SK NO. 188.45 / 071 / KUM / 2021	148,69	109,54	34,25	292,48
10	Tanah Bumbu	37.259,52	SK NO. 188.46 / 22 / DPPP / 2022	94,16	289,89		384,05
11	Balangan	5.947	SK NO. 188.45 / 539 / KUM / 2020	14,85	12,36	-	27,21
12	Banjarmasin	5.058	SK NO. 215 / TAHUN 2022	41,46	508,48		549,94
13	Banjarnegara	3.642,35	SK NO. 215 / Tahun 2022	35,44	16,86	70,76	123,06
<b>TOTAL</b>		<b>238.765,08</b>		<b>791,51</b>	<b>1.997,18</b>	<b>1.851,88</b>	<b>4.640,57</b>

Sumber Data : SK Kumuh Kab./Kota dan Dinas PRKP Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2023

Dalam pelaksanaannya dilakukan review terhadap kondisi kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi seluas 10-15 Ha. Terjadi pengurangan luasan kumuh sampai dengan tahun 2022 sebagai baseline dalam pelaksanaan tahun – tahun berikutnya. Adapun data luasan kawasan permukiman dan permukiman kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :





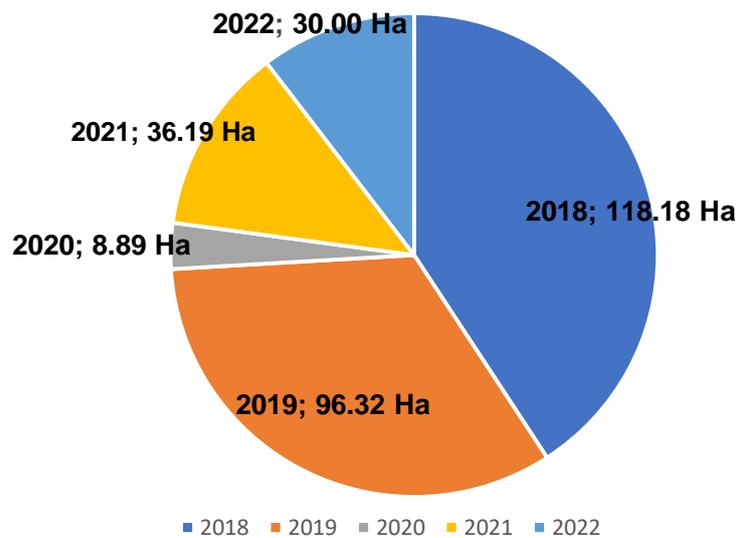
**Tabel 2.74** Data Penanganan Permukiman Kumuh Dan Rencana Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

NO.	KAB./ KOTA	LUASA KAWASAN PERMUKIMAN PROV. KALSEL	LUASAN KUMUH KEWENANGAN PROVINSI (UPDATE)	CAPAIAN KUMULATIF DARI TAHUN 2018-2022	LUASAN KUMUH TARGET TAHUN 2022 S/D 2026	SISA TARGET KUMUH
1	Tanah Laut	27.870,13	33,93	30,84	33,84	0,09
2	Kotabaru	15.499,66	35,54	14,64	22,64	12,90
3	Banjarnegara	5.369,45	92,67	34,52	35,25	57,42
4	Barito Kuala	6.529,42	60,77	34,48	34,48	26,29
5	Tapin	3.588,21	23,11	9,86	17,16	5,95
6	Hulu Sungai Selatan	4.316,51	64,50	28,14	35,14	29,36
7	Hulu Sungai Tengah	1.998,05	80,28	13,13	16,13	64,15
8	Hulu Sungai Utara	2.677,00	66,11	23,5	25,50	40,61
9	Tabalong	18.373,02	148,69	31,15	63,15	85,54
10	Tanah Bumbu	6.964,59	94,16	22,71	38,71	55,45
11	Balangan	5.310,77	14,85	19,11	10,60	4,25
12	Banjarmasin	4.006,27	41,46	20,1	40,50	0,96
13	Banjarbaru	3.642,35	35,44	7,4	7,40	28,04
	<b>TOTAL (HA)</b>	<b>106.145,43</b>	<b>791,51</b>	<b>289,58</b>	<b>380,50</b>	<b>411,01</b>

Sumber : Sumber Data : Renstra Dinas PRKP Prov. Kalimantan Selatan 2023

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha yang menjadi kewenangan Provinsi sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 289,58 Ha, yang masih perlu ditangani sebesar 380,50 Ha.





**Gambar 2.30** Data Luasan Kumuh yang Sudah di Tangani Tahun (2018–2022)

(Sumber Data: Dinas PRKP Prov. Kalsel tahun 2023)



**Gambar 2.31** Persentase Penganganan Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018-2022

Rumah tidak layak huni atau yang biasa disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni. Biasanya, RTLH memiliki konstruksi bangunannya tidak handal, luasnya tidak sesuai standar hunian per orang, serta tidak menyehatkan dan/atau membahayakan bagi penghuninya. Dari data TNP2K sebagai acuan dalam penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2021 telah





menangani sebanyak 32.102 unit dari total RTLH yang terdata sebanyak 76.023 unit. Data tersaji sebagai berikut :

**Tabel 2.75** Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

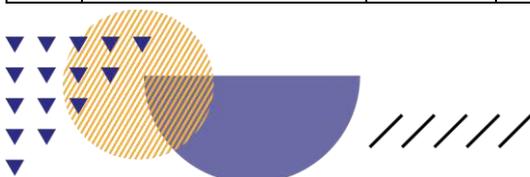
No	Kabupaten/Kota	Data Base	Jenis Penanganan					Jumlah 2015-2021	Sisa Penanganan
			BSPS	DAK	APBD I	APBD II	CSR		
1	Barito Kuala	12.035	1.467	1.127	94	519	-	3.207	8.828
2	Banjarmasin	6.352	1.504	147	18	-	6	1.675	4.677
3	Banjarbaru	1.212	200	250	72	179	-	701	511
4	Banjar	7.861	3.067	1.006	7	9	-	4.089	3.772
5	Tapin	1.725	998	65	59	9	-	1.131	594
6	Hulu Sungai Selatan	12.816	1.837	1.372	6	2.703	-	5.918	6.898
7	Hulu Sungai Tengah	9.523	2.544	1.48	250	1.115	2	5.391	4.132
8	Hulu Sungai Utara	3.621	485	345	40	109	-	979	2.642
9	Balangan	6.099	1.733	56	553	154	1	2.497	3.602
10	Tabalong	3.77	1.506	141	17	205	-	1.869	1.901
11	Tanah Laut	2.406	971	170	573	239	-	1.953	453
12	Tanah Bumbu	4.385	904	10	56	13	-	983	3.402
13	Kotabaru	4.218	927	561	17	204	-	1.709	2.509
	<b>KALSEL</b>	<b>76.023</b>	<b>18.143</b>	<b>6.73</b>	<b>1.762</b>	<b>5.458</b>	<b>9</b>	<b>32.102</b>	<b>43.921</b>

Sumber Data : Renstra Dinas PRKP Prov. Kalimantan Selatan 2022

Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) dan rehabilitasi rumah korban bencana dengan dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 -2023, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2.76** Data peningkatan kualitas RTLH dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Tahun 2019-2023

No.	Kabupaten/Kota	PK-RTLH				REHAB RUMAH KORBAN BENCANA	
		2019	2020	2022	2023	2022	2023
1	Banjarmasin		11		20		
2	Banjarbaru		11	10	10		
3	Banjar			10	80	30	125
4	Tapin	53		10	20		
5	HSS			10	20		
6	HST		11	10	20	45	25
7	HSU	23	11	10	20		





No.	Kabupaten/Kota	PK-RTLH				REHAB RUMAH KORBAN BENCANA	
		2019	2020	2022	2023	2022	2023
8	Balangan	30		10	10	11	5
9	Tabalong		11	10	20		
10	Barito Kuala	50	11	10	20	25	75
11	Tanah Laut	50		10	20	25	30
12	Tanah Bumbu	50		10	10		
13	Kotabaru		11	10	10		
	Jumlah	256	77	120	280	136	260

Sumber Data : Dinas PRKP Prov. Kalimantan Selatan 2023

Berdasarkan tabel di atas data peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2019 -2013 sebanyak 733 buah, sedangkan Rehab rumah korban bencana di tahun 2022 – 2023 sebanyak 396 buah.

Selain penanganan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh juga dilaksanakan penangan Prasarana Sarana Umum di Kawasan permukiman diluar Kawasan kumuh. Sampai dengan tahun 2022 telah dilaksanakan penanganan PSU yang rata-rata adalah penangan jalan lingkungan. Data pelaksanaan sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.77** Penangan PSU di Kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

No	KABUPATEN/KOTA	JENIS KOMPONEN	SATUAN (Meter)	JUMLAH PERMUKIMAN YANG DITANGANI (Unit)
1	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2018 s.d. 2019	Jalan	15.221,5	3.050
2	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2020	Jalan dan PSU	2.053,4	433
3	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2021	Jalan	3.908,52	867
4	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2022	Jalan	5.770,1	1.575
<b>TOTAL</b>			26.953,52	5.925

Sumber: Disperkim Prov. Kalimantan Selatan 2023





### 2.3.1.8 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, telah menunjukkan kemajuan, meskipun masih mengandung berbagai kelemahan. Berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban yang dihadapi saat ini sudah dapat diatasi secara cepat dan tepat oleh pemerintah, seperti yang terlihat pada Tabel 2.78.

**Tabel 2.78** Kondisi Keamanan Provinsi Kalimantan Selatan s.d Tahun terakhir 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah tindak pidana	7.336	8.036	7.021	6.275	5.870
Jumlah tindak pidana yang diselesaikan	6.011	6.350	5.250	5.511	4.780
Persentase tindak pidana diselesaikan	81,94	79,02	74,77	87,82	81,43
Jumlah resiko terkena tindak pidana	179	251	301		

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan Selatan 2022

**Tabel 2.79** Capaian Kinerja Urusan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100	100	100
2	Menurunnya ancaman kriminal di prov. Kalimantan Selatan	%	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya peran Satlinmas dan Damkar	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan jumlah desa/kelurahan rawan bencana yang memperoleh	%	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan Selatan 2022

### 2.3.1.9 Sosial

Pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial di Kalimantan Selatan telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kondisi ini dapat dilihat pada berbagai program yang dikembangkan seperti peningkatan kapasitas pelayanan sosial dalam panti maupun di luar panti, pengembangan program Pembangunan





Keluarga Harapan. pengembangan keberdayaan kesejahteraan sosial dan penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Perkembangan penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat baik itu terkait anak/orang tua terlantar hingga tunawisma dapat dilihat dari perkembangan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Selatan.

**Tabel 2.80** Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Fakir Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	30.39	29.40	6.36	3.64	8.27
2	Persentase Keluarga KAT yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial	%	6.23	1.99	0.00	0.00	0.00
3	Cakupan Program PKH	%	1.63	17.46	8.03	6.84	1.50
4	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial	%	73.12	102.88	744.88	3514.19	916.58
5	Persentase jumlah PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial	%	1.24	1.24	1.24	N/A	N/A
6	Persentase jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berfungsi sosial melalui LKS	%	1.01	1.01	1.01	N/A	N/A
7	Indeks Kepuasan pelayanan Panti Sosial	Indeks	81.78	81.63	83.66	85.04	82.15
8	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial	%	10.60	11.17	3.99	4.89	17.21
9	Jumlah Klien Lanjut Usia Terlantar yang ditangani	Orang	300	300	240	210	50
10	Jumlah Anak Terlantar yang ditangani	Orang	30	40	50	50	50
11	Persentase penyandang Cacat yang dibina	%	2.19	0.89	1.70	1.13	1.35
12	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang ditangani	%	2.25	2.89	0.00	2.59	3.40

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan 2023

## 2.3.2 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Non-Dasar

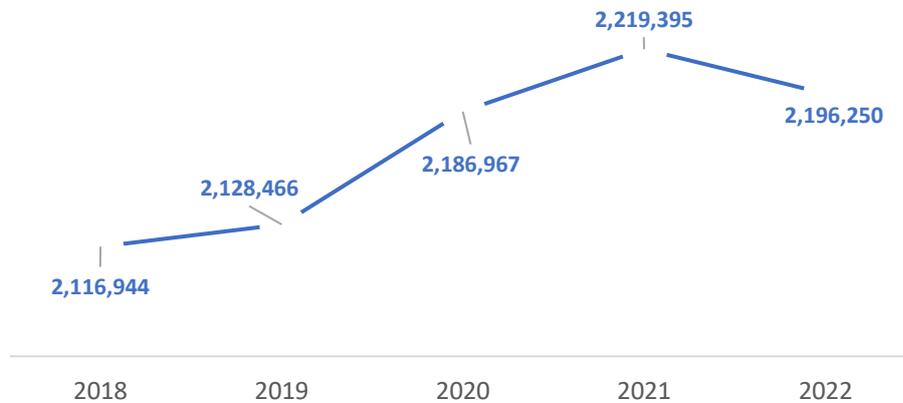
### 2.3.2.1 Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan fokus pada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja. Berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (PAK) dan menekan usia penduduk usia 15 tahun





hingga 24 tahun masuk dalam angkatan kerja. Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.32 dan Tabel 2.81.



**Gambar 2.32** Jumlah angkatan kerja (Jiwa) Provinsi Kalimantan Selatan. 2018-2022

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa secara konsisten dari tahun 2017-2021 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja sebanyak 2.074.117 jiwa meningkat pada tahun 2021 menjadi sebanyak 2.219.395 jiwa. Terjadi peningkatan sebanyak 145.278 jiwa selama kurun waktu tahun 2017-2021. atau tumbuh rata-rata sebesar 50 ribu jiwa per tahunnya. Meskipun demikian pada tahun 2021-2022 terjadi penurunan yang besar yaitu dari 2.219.395 jiwa menjadi 2.196.250 jiwa dan penurunan pertumbuhan lumayan besar yaitu 23.145 jiwa Periode Agustus dari tahun 2021-2022.

Jika dilihat perkembangan kabupaten/kota. maka angkatan kerja terbanyak ada di Kota Banjarmasin yang mencapai 344.840 jiwa pada tahun 2022; Kabupaten Banjar dengan 313.933 jiwa dan Kabupaten Tanah Bumbu dengan 191.835 jiwa. sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Balangan dengan 71.143 jiwa. kemudian Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan jumlah 122.700 jiwa. dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan 125.724 jiwa. Lebih lanjut Tabel 2.81 berikut ini adalah perkembangan angkatan kerja menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022.





**Tabel 2.81** Perkembangan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	162.348	171.565	181.827	185.049	184.133
Kota Baru	163.498	161.409	157.363	166.820	160.542
Banjar	301.194	309.609	318.377	315.484	313.933
Barito Kuala	177.257	169.540	172.056	176.573	167.411
Tapin	96.890	98.115	100.696	102.432	103.316
HSS	123.949	124.906	129.734	124.003	125.724
HST	146.855	140.332	144.168	143.604	139.658
HSU	118.105	117.284	121.288	124.971	122.700
Tabalong	136.373	129.924	129.928	136.032	139.542
Tanah Bumbu	164.725	170.814	194.029	195.502	191.835
Balangan	70.364	66.621	72.717	72.475	71.143
Banjarmasin	336.792	346.184	331.562	341.335	344.840
Banjarbaru	118.594	122.163	133.222	135.115	131.473
Kalimantan Selatan	2.116.944	2.128.466	2.186.967	2.219.395	2.196.250

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2022

### 2.3.2.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGNAN ANAK

Pembangunan pemberdayaan perempuan sangat terkait dengan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu penyetaraan gender merupakan bentuk kebijakan yang berupaya untuk diterapkan. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa permasalahan gender yang masih dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Selatan adalah terjadinya gap yang besar antara laki-laki dan perempuan dalam tingkat upah yang diukur dengan pengeluaran riil. di mana rata-rata penghasilan perempuan masih sekitar 50% nya dari rata-rata penghasilan laki-laki

### 2.3.2.3 Pangan

Berdasarkan data produksi tanaman pangan secara keseluruhan di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 218,660 jika dibandingkan pada tahun 2021. Produksi tanaman pangan menurun menjadi 1.079.563 ton berdasarkan





data semester I tahun 2022. Produksi daging mengalami penurunan dibanding 2021 sebanyak 3.410,87 ton; produksi telur mengalami kenaikan dibanding 2021 sebanyak 4.560,17 ton. Produksi susu mengalami kenaikan dibanding 2021 sebesar 20.321,49 ton. Lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 2.82

**Tabel 2.82** Produksi Pangan Utama di Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022

Peningkatan produksi	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022**
Tanaman Pangan	Ton	1.922.795	2.116.367	1.556.560	1.298.223	1.079.563
Daging	Ton/Th	98.931,80	84.422.01	145.219,64	117.146,62	113.735,75
Telur	Ton/Th	122.231,82	102.269.52	114.892,58	125.196,87	129.757,04
Susu	liter/Th	252.009,00	202.271.00	171.039,23	111.768,21	132.089,70
Ikan Lokal	Ton/Th	3.990,69	349.94	40.289,06	30.723,72	16.009,80
Ikan Nila	Ton/Th	24.489,60	407.24	26.530,02	19.358,83	15.211,70
Ikan Tangkap	Ton	262,15	212.649.43	166.648,17	168.684,84	76.918,00

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Prov. Kalimantan Selatan 2022

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan melalui program kemandirian pangan peningkatan ketahanan pangan dapat dilihat dari jumlah lumbung pangan yang tersebar di 11 Kabupaten di Kalimantan Selatan adalah sebanyak 129 lumbung pangan, desa yang sudah mandiri pangan di Kalimantan Selatan sebanyak 194 desa dan jumlah cadangan pangan sebanyak 173.190 kg.

#### 2.3.2.4 Lingkungan Hidup

Menurunnya kualitas lingkungan hidup provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu isu yang sangat penting sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan tekanan jumlah penduduk. Hal yang sering sulit untuk dijawab adalah apakah kualitas lingkungan hidup provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kondisi baik, sedang, atau buruk. Sejak tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan suatu indeks lingkungan berbasis provinsi yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks ini diterjemahkan dalam angka yang menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, atau sebaliknya. Berikut ini klasifikasi penjelasan kualitatif dari angka indeks lingkungan hidup.





**Tabel 2.83** Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	
Sangat baik	$90 \leq x < 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Kurang	$25 \leq x < 50$
Sangat kurang	$0 \leq x < 25$

Pembagian kategori penjelasan kualitatif ini didasarkan pada sebaran angka dalam perhitungan indeks. Kategori penjelasan kualitatif ini dijadikan dasar pembuatan kebijakan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami bagi publik. Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, indeks dapat membantu penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan hidup.

Indeks kualitas lingkungan hidup provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara lain dengan melakukan penanaman pohon melalui program revolusi hijau dan berbagai proyek strategis lainnya untuk memaksimalkan upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan termasuk berbagai parameter lingkungan penyusunnya. Misi gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang Kelima yaitu Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana yang kemudian diselaraskan dengan tema RKPD tahun 2024 yang mengandung makna focus pada pertumbuhan ekonomi inklusif yang tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup) mencoba menjawab isu strategis Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Masih terjadinya kerusakan lingkungan (pencemaran air, lubang tambang, dan deforestasi) dan belum optimalnya mitigasi bencana banjir dan kebakaran hutan lahan dengan melakukan berbagai program kegiatan guna menunjang perbaikan lingkungan.

Upaya yang telah dilakukan memberikan dampak positif terhadap perbaikan lingkungan hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai Indeks kualitas lingkungan hidup Kalimantan Selatan. Predikat IKLH Provinsi Kalimantan





Selatan Tahun 2022 berada pada predikat BAIK mengalami peningkatan sebesar 0,94 dan mencapai target, data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.84** Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2022

Jenis	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas LH	58,74	62,07	61,47	61,94	68,43	71,03	71,97
Tutupan Lahan	44	49,21	49,29	46,78	48,48	50,26	50,52
Kualitas Air	51,56	52,25	51,43	55,31	51,67	54,75	54,63
Kualitas Udara	85,6	89,02	87,75	88,78	88,93	89,15	89,52

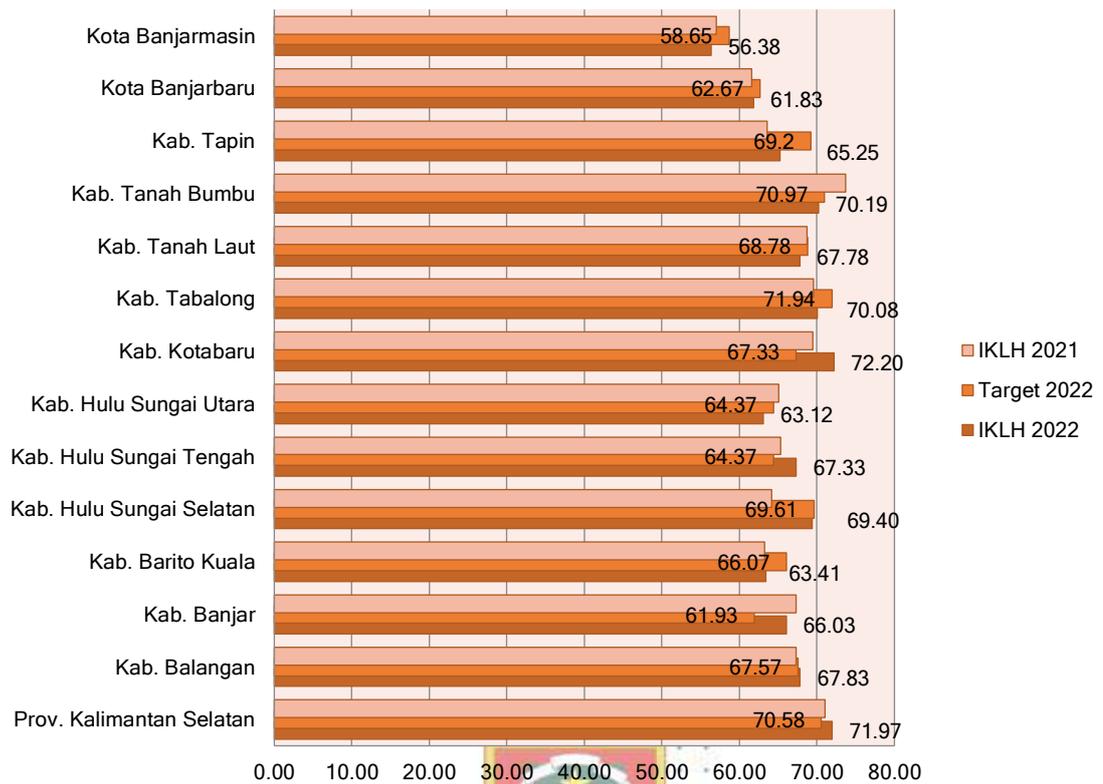
Sumber: DLH Kalimantan Selatan 2023



Sumber: DLH Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 2.33** Grafik Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 s.d Tahun 2022





Sumber: DLH Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 2.34** Grafik Target dan Capaian IKLH Prov Kalsel dan Kab/Kota Tahun 2022, Target Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2022

7 Kab/Kota dari 13 Kab/Kota Prov.Kalsel Mencapai Target IKLH Tahun 2022, dari 13 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan 3 kab memperoleh IKLH kategori BAIK.

**Tabel 2.85** Tabel Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022

Prov/Kab/Kota	IKLH 2022	Target 2022	IKLH 2021
Prov. Kalimantan Selatan	71,97	70,58	71,03
Kab. Balangan	67,83	67,57	67,35
Kab. Banjar	66,03	61,93	67,27
Kab. Barito Kuala	63,41	66,07	63,21
Kab. Hulu Sungai Selatan	69,40	69,61	64,19
Kab. Hulu Sungai Tengah	67,33	64,37	65,3
Kab. Hulu Sungai Utara	63,12	64,37	65,04
Kab. Kotabaru	72,20	67,33	69,5
Kab. Tabalong	70,08	71,94	69,52

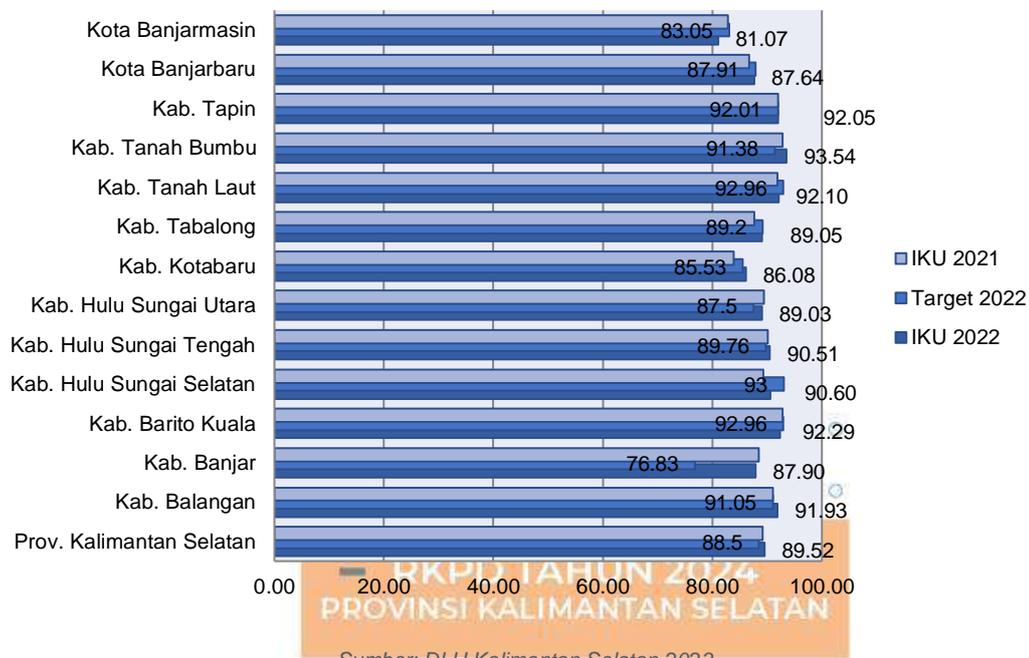




Prov/Kab/Kota	IKLH 2022	Target 2022	IKLH 2021
Kab. Tanah Laut	67,78	68,78	68,7
Kab. Tanah Bumbu	70,19	70,97	73,74
Kab. Tapin	65,25	69,2	63,58
Kota Banjarbaru	61,83	62,67	61,6
Kota Banjarmasin	56,38	58,65	57,06

Sumber: DLH Kalimantan Selatan 2023

Grafik Target dan Capaian IKU  
Prov Kalsel dan Kab/Kota Tahun 2021



Sumber: DLH Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 2.35** Grafik Target dan Capaian IKU Prov Kalsel dan Kab/Kota Tahun 2021

11 Kab/Kota dari 13 Kab/Kota Prov.Kalsel mencapai target IKU Tahun 2022.

**Tabel 2.86** Tabel Capaian IKU (Indeks Kualitas Udara) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022

Prov/Kab/Kota	IKU 2022	Target 2022	IKU 2021
Prov. Kalimantan Selatan	89,52	88,5	89,2
Kab. Balangan	91,93	91,05	91,1
Kab. Banjar	87,90	76,83	88,5
Kab. Barito Kuala	92,29	92,96	92,9
Kab. Hulu Sungai Selatan	90,60	93	89,3





Prov/Kab/Kota	IKU 2022	Target 2022	IKU 2021
Kab. Hulu Sungai Tengah	90,51	89,76	90,1
Kab. Hulu Sungai Utara	89,03	87,5	89,4
Kab. Kotabaru	86,08	85,53	83,9
Kab. Tabalong	89,05	89,2	87,7
Kab. Tanah Laut	92,10	92,96	91,9
Kab. Tanah Bumbu	93,54	91,38	92,8
Kab. Tapin	92,05	92,01	92
Kota Banjarbaru	87,64	87,91	86,7
Kota Banjarmasin	81,07	83,05	82,8

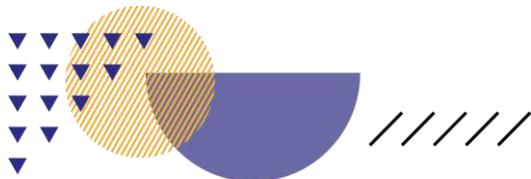
Sumber: DLH Kalimantan Selatan 2023





**Tabel 2.87** Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 - 2021

Prov/Kab/Kota	IKLH 2021	IKLH 2020	IKLH 2019	IKA 2021	IKA 2021	IKA 2019	IKU 2021	IKU 2020	IKU 2019	IKL 2021	IKL 2020	IKTL 2019
Prov. Kalimantan Selatan	71.03	68.43	61.94	54.75	51.67	55.31	89.15	88.93	88.78	50.26	48.48	46.78
Kab. Balangan	67.35	66.81	61.35	50.95	50.00	40.83	91.09	91.18	93.51	51.60	50.61	52.76
Kab. Banjar	67.27	59.25	56.07	53.56	47.33	40.67	88.51	79.80	75.82	51.51	52.53	52.80
Kab. Barito Kuala	63.21	54.13	57.98	54.14	52.61	51.21	92.87	92.19	92.26	23.94	23.71	26.75
Kab. Hulu Sungai Selatan	63.81	67.04	56.23	54.80	52.50	51.67	89.26	90.96	88.03	32.24	31.79	35.80
Kab. Hulu Sungai Tengah	65.30	67.65	61.46	54.00	60.83	61.00	90.13	89.75	92.06	38.78	38.5	38.85
Kab. Hulu Sungai Utara	65.04	66.71	59.74	55.00	60.00	47.08	89.40	89.11	89.77	37.23	36.81	37.51
Kab. Kotabaru	69.50	73.99	62.88	57.86	67.50	46.67	83.90	86.16	87.84	62.85	62.62	58.26
Kab. Tabalong	69.52	71.86	72.90	51.87	56.94	54.33	87.69	88.97	89.44	66.23	65.84	68.35
Kab. Tanah Bumbu	73.74	70.39	71.79	63.11	60.00	64.83	92.79	95.02	93.84	56.77	60.32	60.32
Kab. Tanah Laut	68.70	69.71	58.06	58.42	60.67	50.00	91.85	91.29	90.67	43.54	42.12	39.65
Kab. Tapin	63.58	69.09	63.00	52.80	57.78	54.67	92.02	91.89	93.32	29.50	46.36	46.52
Kota Banjarbaru	61.60	86.91	48.49	55.81	56.67	44.67	86.66	86.91	85.53	25.18	26.76	23.58
Kota Banjarmasin	57.06	57.93	62.34	49.49	47.01	57.93	82.84	82.29	82.05	22.38	33.16	31.79





## A. Gas Rumah Kaca

Permasalahan emisi GRK di Kalimantan Selatan bersumber dari kegiatan produksi dan penggunaan energi, kegiatan kehutanan dan perubahan tutupan lahan, kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan, dan kegiatan pengelolaan limbah domestik dan industri. Sebagai acuan dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (PEP), diperlukan proyeksi-ulang tingkat emisi rujukan (REL, *Reference Emission Level*) hingga tahun 2030.

Tingkat emisi rujukan agregat tahun 2030 mencapai 38.437 Gg CO<sub>2</sub>-eq. Pangsa emisi rujukan 2030 ini berasal dari bidang energi dan transportasi sebesar 24.341 Gg CO<sub>2</sub>-eq (63,3%), bidang kehutanan dan perubahan tutupan lahan 4.598 Gg CO<sub>2</sub>-eq (12,0%), bidang pertanian 7.759 Gg CO<sub>2</sub>-eq (20,2%), dan pengelolaan limbah domestik dan industri sebesar 1.739 Gg CO<sub>2</sub>-eq (4,5%).

Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) aksi mitigasi RAD-GRK terus dilakukan sejak penyusunan dokumen RAD GRK pada tahun 2012. Kegiatan PEP selama 2012 – 2018 masih terbatas pada program dan kegiatan sekoral pada dinas perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, belum termasuk yang dilaksanakan oleh dinas perangkat daerah kabupaten/ kota, swasta, masyarakat, dan pihak lainnya. Berdasarkan PEP dimaksud, realisasi penurunan emisi GRK agregat tahun 2018 mencapai 5,84%. Penurunan emisi GRK dari kegiatan kehutanan dan perubahan tutupan lahan mencapai 32,12%, dari kegiatan pengelolaan limbah domestik 5,87%, dari kegiatan pertanian 4,09%, dari kegiatan transportasi 1,52%, dan dari penggunaan energi lainnya 0,01%. x

Skenario Rencana Aksi Daerah untuk menurunkan emisi GRK dibuat berdasarkan dokumen RPJP 2005-2025 dan RPJMD 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan, dan Rencana Strategis SKPD terkait. Berdasarkan skenario dimaksud, target penurunan emisi GRK agregat tahun 2030 adalah 7.682 Gg CO<sub>2</sub>-eq atau 19,99% dari tingkat emisi rujukan tahun 2030 sebesar 38.437 Gg CO<sub>2</sub>-eq. Target ini masih di bawah target nasional 29,0%. Untuk mendongkrak target penurunan memenuhi atau bahkan melampaui target nasional tersebut, diperlukan upaya peningkatan rencana aksi melalui partisipasi para pihak pada setiap sektor atau bidang yang berkontribusi pada penurunan emisi GRK di Kalimantan Selatan.

Adapun target penurunan emisi GRK Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 pada misi





Kelima Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana dengan sasaran menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.88** Tabel target penurunan emisi GRK Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TAHUN					KONDISI AKHIR
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD
<b>Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana</b>										
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	16,5	18,0	21,0	22,2	24,6	26,6	28,9	28,9

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026

Peningkatan emisi GRK terutama dipicu oleh perubahan tutupan lahan. Perubahan tutupan lahan di masa mendatang berkontribusi sangat penting dalam hal penurunan emisi GRK agregat di Kalimantan Selatan.

#### B. Ekosistem Gambut

Ekosistem gambut menjadi isu penting dalam permasalahan Perubahan tutupan lahan, sehubungan nilai dan fungsi lingkungannya antara lain sebagai pengendali perubahan iklim global karena kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon. Gambut Indonesia menyimpan karbon sebesar 46 GT (atau  $46 \times 10^9$  ton), sehingga memiliki peran yang cukup besar sebagai penjaga iklim global. Ekosistem Gambut mampu mengatur tata air dan menyeimbangkan iklim (penyimpan karbon). Menurut Agus dkk (2013), dengan ketebalan gambut Kalimantan Selatan yang dominan sekitar  $<0,5 - >3$  meter, kerapatan karbon  $60 \text{ kg C/m}^3$  (kematangan gambut hemik), dan luasan gambut 238.609 hektar, perkiraan total karbon yang tersimpan pada tanah gambut di Kalimantan Selatan adalah sekitar 27-36 Gt.

Lahan gambut mampu menyimpan air dalam jumlah yang sangat besar. Kalimantan Selatan dengan luas lahan gambut sekitar 238.609 hektar, diperkirakan volumenya adalah sekitar 447,9 milyar  $\text{m}^3$  dan potensinya menyimpan air sekitar 14,9 juta hektar x 3 meter x (0,8 atau 0,9) = 358,3 – 403,1 milyar  $\text{m}^3$  (Dariah dan Maswar, 2014). Secara ekologis, peran pengatur tata air



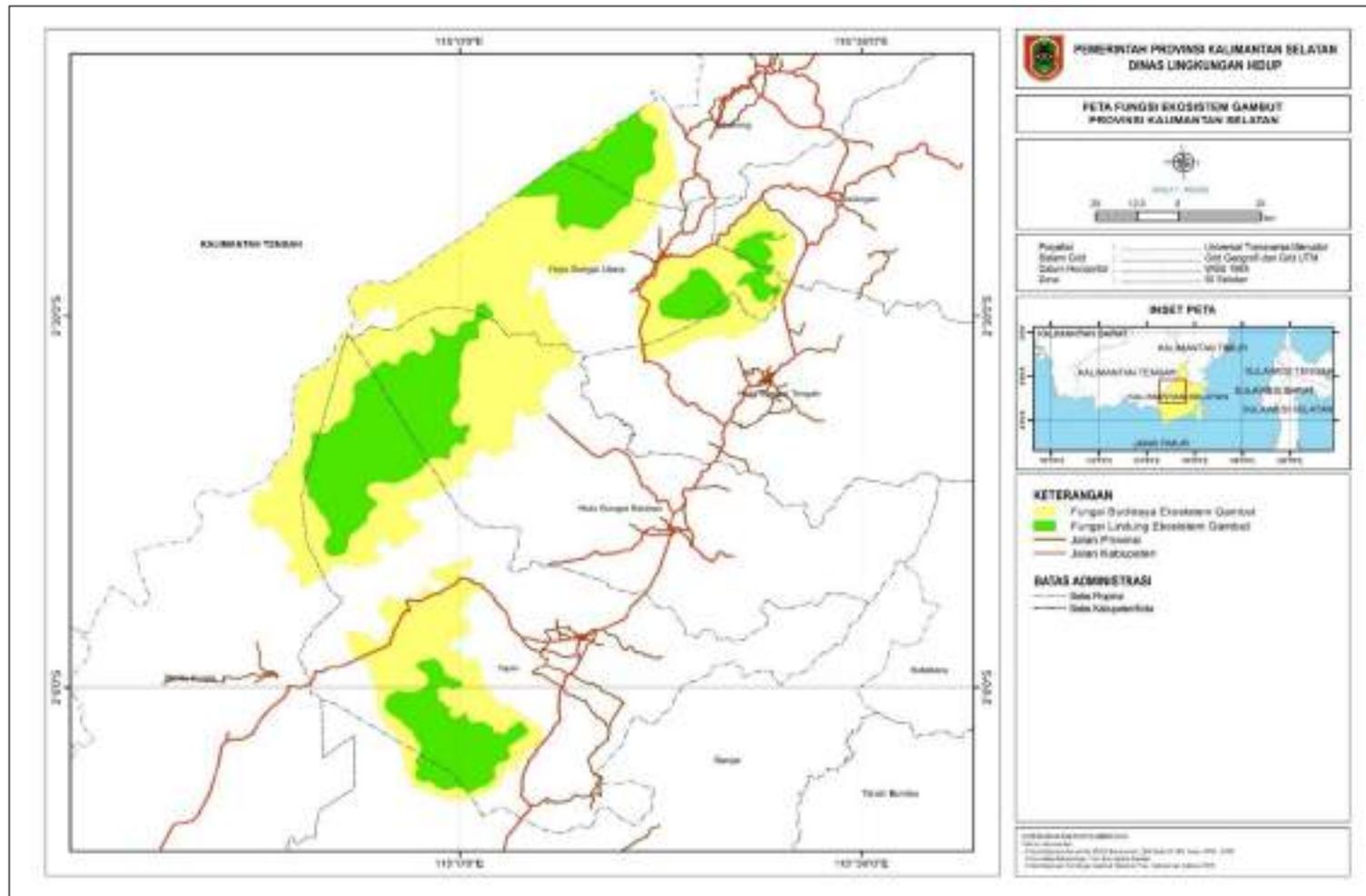


lahan menjadi penting baik pada saat musim kemarau maupun musim hujan. Selain itu, dengan adanya air yang tersimpan di dalamnya dapat berperan dalam menghambat oksidasi pirit ( $\text{FeS}_2$ ) yang berada pada lapisan tanah mineral di bawah lapisan gambut dalam upaya untuk mengurangi kemasaman tanah dan keracunan tanaman (Dariah dan Maswar, 2014).

Potensi jasa lingkungan lain yang penting yaitu jasa pengaturan populasi, baik flora dan fauna di Ekosistem Gambut. Gangguan atau ketidakseimbangan jumlah populasi flora dan fauna akan berimplikasi selain pada ekosistem gambut itu sendiri juga pada ekosistem lain di sekitarnya dan fungsi-fungsi sosial, ekonomi, dan fungsi lingkungan lainnya.

Secara spasial sebaran fungsi ekosistem gambut berdasarkan fungsi lindung dan fungsi budidaya di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.36.





Sumber: Dokumen RPPEG Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

**Gambar 2.36** Peta Fungsi Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan





Kawasan ekosistem gambut ditentukan berdasar pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129/MENLHK/ SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut. Kawasan ini memiliki fungsi lindung dan fungsi budidaya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut.

KHG di Provinsi Kalimantan Selatan meliputi luas 238.609 hektar. Keseluruhan KHG, yang masuk ke dalam fungsi lindung sekitar 80.691 hektar (34%) dan fungsi budidaya sekitar 157.918 hektar (66%). Dengan demikian, maka seluruh ekosistem gambut yang masuk ke dalam kawasan KHG selain berupa tanah gambut, bergambut, dan juga tanah mineral masuk dalam areal KHG.

**Tabel 2.89** Sebaran Indikatif Areal Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut

Nama KHG	Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan (Ha)	Pemanfaatan Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan (Ha)	Jumlah
KHG Sungai Balangan - Sungai Batangalai	1.924,69	6.887,37	8.812,07
KHG Sungai Barito - Sungai Alalak	767,48	16.326,58	17.094,07
KHG Sungai Barito - Sungai Tapin	12.547,14	25.817,70	38.364,84
KHG Sungai Maluka - Sungai Martapura	297,56		297,56
KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	16.193,27	2,06	16.195,33
Grand Total	31.730,15	49.033,72	80.763,87

Sumber: Dok RPPEG Prov Kalsel, 2023





**Tabel 2.90** Sebaran Indikatif Areal Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut

Nama KHG	Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (Ha)				Jumlah
	Kawasan Untuk Non Kehutanan	Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	Pemanfaatan Fungsi Budidaya Lainnya	
KHG Sungai Balangan - Sungai Batangalai				21.992,48	21.992,48
KHG Sungai Barito - Sungai Alalak				30.731,01	30.731,01
KHG Sungai Barito - Sungai Tapin	16.159,32		6.633,07	50.808,75	73.601,14
KHG Sungai Maluka - Sungai Martapura			2.148,58	88.300,93	90.449,51
KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	18.266,73	350,48	51,18	7.536,07	26.204,47
Grand Total	34.426,05	350,48	8.832,83	199.369,24	242.978,61

Sumber: Dok RPPEG Prov Kalsel, 2023





**Tabel 2.91** Sebaran Indikatif Areal Mitigasi Perubahan Iklim dari Ekosistem Gambut

Nama KHG	Fungsi Budidaya					Fungsi Lindung					Jumlah
	Mitigasi prioritas II	Peningkatan stok karbon prioritas I	Peningkatan stok karbon prioritas II	Peningkatan stok karbon prioritas III	Total	Mitigasi prioritas II	Peningkatan stok karbon prioritas I	Peningkatan stok karbon prioritas II	Peningkatan stok karbon prioritas III	Total	
KHG Sungai Balangan - Sungai Batangalai	16.586,73		527,32	4.878,43	21.992,48	1.572,37	1.025,80	5.861,58	352,32	8.812,07	30.804,54
KHG Sungai Barito - Sungai Alalak	4.805,96	38,23	2.103,40	23.783,42	30.731,01	1,31	5.609,31	10.717,28	766,18	17.094,07	47.825,08
KHG Sungai Barito - Sungai Tapin	44.020,79	30,35	8.286,86	21.263,14	73.601,14	7.671,39	8.812,95	17.004,75	4.875,75	38.364,84	111.965,99
KHG Sungai Maluka - Sungai Martapura	61.505,93		4.699,20	24.244,38	90.449,51	261,72			35,84	297,56	90.747,08
KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	27.779,62	2,31	176,39	1.726,97	29.685,28	13.859,44		2,06	2.333,83	16.195,33	45.880,61
Grand Total	154.699,03	70,89	15.793,17	75.896,34	246.459,42	23.366,23	15.448,05	33.585,67	8.363,92	80.763,87	327.223,29

Sumber: Dok RPPEG Prov Kalsel, 2023



Reduksi emisi karbon menjadi isu utama dalam pengendalian perubahan iklim, khususnya dalam bidang mitigasi yang memiliki target total reduksi emisi pada tahun 2030 sebesar 29%-41%. Ekosistem Gambut menjadi penting dalam mitigasi emisi gas rumah kaca, khususnya karbon karena diperkirakan lahan gambut dapat menyimpan 550 giga ton karbon, atau setara dengan dua kali jumlah simpanan karbon di berbagai jenis hutan non-gambut. Juga diperkirakan 25% karbon terestrial tersimpan di lahan gambut, dan jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan ekosistem hutan hujan tropis, bahkan untuk kondisi ekosistem yang masih berupa hutan alam.

Sebaran Indikatif Areal Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan, baik Tabel berikut.

**Tabel 2.92** Sebaran Indikatif Areal Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut

Nama KHG	Fungsi Budidaya (Ha)	Fungsi Lindung (Ha)	Jumlah
	Kategori II: pencegahan prioritas II	Kategori II: pencegahan prioritas II	
KHG Sungai Balangan - Sungai Batangalai	16.586,73	1.572,37	18.159,10
KHG Sungai Barito - Sungai Alalak	4.805,96	1,31	4.807,27
KHG Sungai Barito - Sungai Tapin	44.020,79	7.671,39	51.692,18
KHG Sungai Maluka - Sungai Martapura	61.505,93	261,72	61.767,65
KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	27.779,62	13859,44	41.639,05
Grand Total	154.699,03	23366,23	178.065,25

Sumber: Dok RPPEG Prov Kalsel, 2023

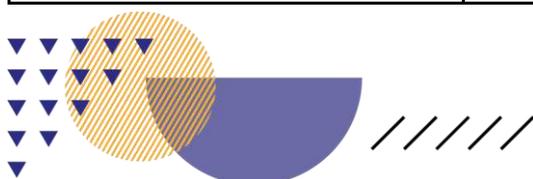
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

### C. Kualitas Tutupan Lahan

Kualitas tutupan lahan Provinsi Kalimantan Selatan pada kategori sedang, hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2022 dengan nilai 50,3 dimana 3 Kab/Kota dari 13 Kab/Kota Prov.Kalsel mencapai target IKL Tahun 2022, dengan trend nilai sebagai berikut.

**Tabel 2.93** Nilai Indeks Kualitas Lahan Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021, Target 2022 dan Capaian Tahun 2022

Prov/Kab/Kota	IKL 2022	Target 2022	IKL 2021
Prov. Kalimantan Selatan	50,52	51,24	50,3
Kab. Balangan	51,60	53,99	51,6
Kab. Banjar	51,51	54,51	51,5



Prov/Kab/Kota	IKL 2022	Target 2022	IKL 2021
Kab. Barito Kuala	23,55	26,76	23,9
Kab. Hulu Sungai Selatan	38,51	51,45	32,2
Kab. Hulu Sungai Tengah	38,78	41,64	38,8
Kab. Hulu Sungai Utara	37,73	39,20	37,2
Kab. Kotabaru	63,04	63,10	62,9
Kab. Tabalong	66,53	66,50	66,2
Kab. Tanah Laut	56,78	41,68	43,5
Kab. Tanah Bumbu	44,08	59,68	56,8
Kab. Tapin	30,09	46,38	29,5
Kota Banjarbaru	25,37	29,61	25,2
Kota Banjarmasin	23,70	33,18	22,4

Sumber:DLH Kalimantan Selatan 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 Tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, Luas lahan kritis wilayah kerja BPDAS Barito adalah sebesar 819,799 Ha, luas lahan kritis berdasarkan Provinsi Kalimantan Selatan adalah seluas 458.478 Ha. Jika dibandingkan dengan data lahan kritis berdasarkan data KLHK pada tahun 2018 seluas 511.495 Ha maka selama kurun waktu 4 tahun telah terjadi penurunan luas lahan kritis yang cukup besar yaitu 53.017 Ha. Hal ini sesuai dengan capaian nilai IKLH Provinsi Kalimantan Selatan yang terus meningkat dari tahun ketahun.

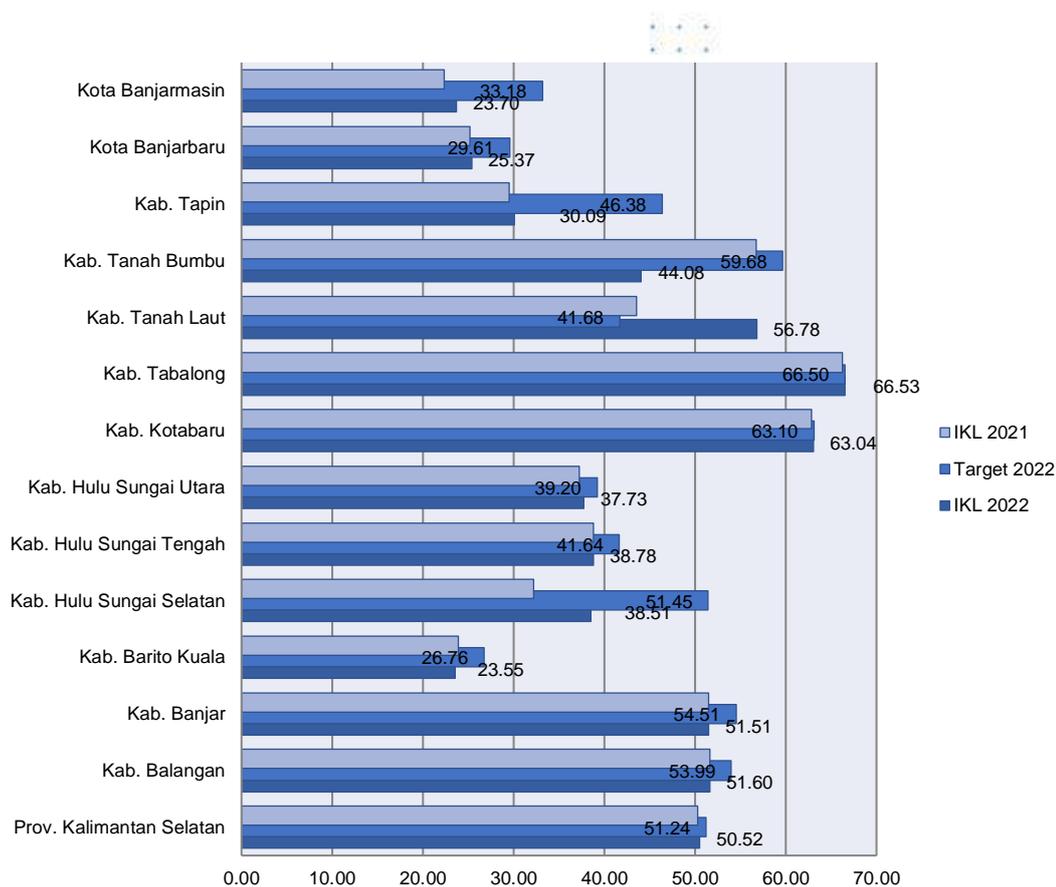
Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan fungsi dari IKTL dan IKEG. Kualitas Ekosistem Gambut sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kanal dan kejadian kebakaran. Terjadinya kebakaran dan pembangunan Kanal akan mengurangi luas Tutupan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Kondisi tersebut menjadi satu variabel yang harus dipertimbangkan dalam menghitung Tutupan Lahan. Memperhatikan hal tersebut, maka variable data dalam IKEG merupakan actor koreksi dalam menghitung nilai IKL. Faktor koreksi tersebut selanjutnya disebut dengan DKK yaitu luas tutupan hutan dan tutupan belukar yang terdampak kanal dan kebakaran di kesatuan hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Capaian IKLH Provinsi Kalimantan dapat dilihat pada table berikut:



**Tabel 2.94** Tabel capaian nilai IKLH Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Prov/Kab/Kota	IKL 2022	Target 2022	IKL 2021
Prov. Kalimantan Selatan	50,52	51,24	50,3
Kab. Balangan	51,60	53,99	51,6
Kab. Banjar	51,51	54,51	51,5
Kab. Barito Kuala	23,55	26,76	23,9
Kab. Hulu Sungai Selatan	38,51	51,45	32,2
Kab. Hulu Sungai Tengah	38,78	41,64	38,8
Kab. Hulu Sungai Utara	37,73	39,20	37,2
Kab. Kotabaru	63,04	63,10	62,9
Kab. Tabalong	66,53	66,50	66,2
Kab. Tanah Laut	56,78	41,68	43,5
Kab. Tanah Bumbu	44,08	59,68	56,8
Kab. Tapin	30,09	46,38	29,5
Kota Banjarbaru	25,37	29,61	25,2
Kota Banjarmasin	23,70	33,18	22,4

Sumber:DLH Kalimantan Selatan 2023



Sumber:DLH Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 2.37** Grafik Target dan Capaian IKL Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota Tahun 2021



Kalimantan Selatan menempati peringkat IKL ke-20 dari 34 provinsi secara nasional. Jika melihat dari tren IKL pada gambar di atas, maka terdapat peningkatan nilai IKL pada Tahun 2022 dari 50.26 menjadi 50.52, namun masih belum mencapai target IKL. Selaras dengan hal tersebut, capaian persentase luas tutupan lahan di tahun 2022 masih belum mencapai target yang ditetapkan. Adanya alih fungsi lahan akibat kegiatan permukiman, perkebunan, pertanian, industri, pertambangan dan lain-lain menyumbang penurunan luas tutupan lahan. Penurunan ini dipercepat dengan adanya illegal logging dan pertambangan ilegal di beberapa kabupaten/kota. Upaya-upaya revegetasi yang dilakukan stakeholder terkait memerlukan waktu hingga pertumbuhan vegetasi di suatu lahan dapat dianggap sebagai tutupan lahan berdasarkan analisis citra satelit.

Data tutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022, diketahui bahwa tutupan lahan pada Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh Perkebunan (830,367.064 Ha), disusul dengan Hutan Lahan Kering Sekunder (685,295.77Ha), Pertanian Lahan Kering Campur (557,113.17 Ha). Berdasarkan data tersebut terjadi perubahan jika dibandingkan dengan data tutupan lahan pada tahun 2020 dimana tutupan lahan Prov. Kalsel di dominasi oleh Hutan Lahan Kering Sekunder (700,718.60 Ha), Pertanian Lahan Kering Campuran (586,262.71 Ha), Perkebunan (791,118.57 Ha) dan Sawah (381,030.06 Ha). Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan lahan yang awalnya berpotensi besar terhadap pengembangan produktivitas pertanian dan perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan sedikit bergeser menjadi perkebunan.

#### **D. Isu Prioritas Lingkungan Hidup**

Berdasarkan hasil kajian KLHS dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 s.d Tahun 2026 didapatkan beberapa Isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan antara lain Pengelolaan persampahan, Kualitas Air Sungai yang Rendah, Luas Lahan Kritis yang berpotensi terus meningkat, potensi keanekaragaman hayati belum terkelola secara optimal, Potensi Kerusakan Ekosistem Mangrove dan terumbu karang diwilayah pesisir serta Perubahan Iklim

#### **E. Pengelolaan Persampahan**

Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah B3 antarlain disebabkan oleh beberapa hal yaitu:



1. Masih perlu pengembangan fasilitas pengelolaan sampah di TPA Regional Banjarbakula.
2. Beberapa kab/kota dinilai tidak layak dibangun TPA, karena seluruh wilayahnya berada di lahan basah (Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara).
3. Banyaknya ditemukan TPS liar
4. Masih banyak kegiatan usaha penghasil Limbah B3 yang belum mengintegrasikan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 kedalam Persetujuan Lingkungan.
5. Masih banyak ditemukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terutama Puskesmas atau Klinik Kesehatan yang belum memiliki Fasilitas TPS Limbah B3 yang sesuai dengan Permen LHK No. 56 Tahun 2015. Sedangkan untuk timbulan Limbah B3 infeksius wajib untuk dikelola 2 x 24 Jam apabila tidak disimpan di ruangan berpendingin dibawah 0 derajat.

Terkait dengan pengelolaan persampahan, masih kurangnya Sumber Daya Manusia untuk pengelolaan persampahan. circular economy dalam pengelolaan sampah masih belum berjalan dengan baik. Perlu banyak upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan sampah dilihat dari banyaknya ditemukan TPS liar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum taat hukum berkenaan dengan Perda yang berisikan larangan membuang sampah, serta kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah sendiri masih sangat kurang. Kurangnya partisipasi dari Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten selaku pemangku wilayah dalam hal pengelolaan lingkungan dimana memiliki kewajiban untuk mengelola lingkungannya.

Permasalahan sampah di provinsi kalimantan selatan sudah diperkuat dengan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kalimantan Selatan (JAKSTRADA) namun demikian upaya-upaya yang berkenaan dengan pengelolaan sampah yang terdiri dari pengurangan dan penanganan masih belum optimal, berdasarkan data LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terealisasi 61,99%.



## F. Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Permasalahan sampah di provinsi kalimantan selatan sudah dilaksanakan sesuai Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kalimantan Selatan (JAKSTRADA) namun demikian upaya -upaya yang berkenaan dengan pengelolaan sampah yang terdiri dari pengurangan dan penanganan masih belum optimal, berdasarkan data SIPSN pada tahun 2021 target pengelolaan sampah kalimantan selatan 97% dengan realisasi 78,31%.

Target Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tahun 2021 sebesar 24% dengan realisasi 14,57%. kondisi ini dapat terlihat di lapangan sampah masih berserakan pada wilayah tertentu yang ini memerlukan peran serta masyarakat didalam pengelolaan sampah. Sedangkan target Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis Rumah Tangga sebesar 74% dengan realisasi 63,74%, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah.

Sebagaimana data SIPSN Potensi timbulan sampah tahun 2021 di Provinsi Kalimantan selatan sebanyak 320.220,74Ton/Tahun,dengan Jumlah pengurangan sampah sebanyak 46.666,46 Ton/Tahun melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, sampah termanfaatkan di sumber sampah dan sampah didaur ulang di sumber.

Kegiatan Pengurangan dan penanganan sampah yaitu presentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terealisasi 14,57%, indikator ini baru dibuat kebijakannya berdasarkan peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Indikator kedua pada kinerja kedua mengembangkan program dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yaitu presentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terealisasi 63,74 %, indikator ini baru dibuat kebijakannya berdasarkan peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Masalah persampahan di Kalimantan Selatan setiap tahun selalu mendapat perhatian penting mengingat perkembangan pembangunan dan ekonomi Kalimantan Selatan yang cenderung meningkat sehingga memberikan



daya tarik bagi masyarakat untuk tinggal dan berusaha di Kalimantan Selatan. Adanya urbanisasi dan peningkatan penduduk pada akhirnya akan menimbulkan masalah sampah. Berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan selama Tahun 2020 meskipun kondisi pandemi Covid-19 menjadikan tekanan terhadap kinerja pengelolaan persampahan.

Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia. Limbah infeksius dari penanganan Covid-19 harus dikelola dan dilaporkan sesuai diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri LHK Tanggal 12 Maret 2021 revisi dari SE.2/MENLHK/PSLB3 /PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Covid-19. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah infeksius dari penanganan pasien dengan penyakit menular dikhawatirkan menjadi sumber penularan penyakit bagi pasien, petugas, dan masyarakat sekitar.

Menghadapi kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada permasalahan limbah B3 medis dan limbah infeksius seperti berupa masker, sarung tangan, perban, alat suntik, set infus bekas dan lainlain, tercatat timbulan limbah B3 medis pada tahun 2022 sejumlah 287.526,26 kg. Hal ini mengharuskan adanya penanganan khusus limbah B3 medis. Penanganan terhadap limbah infeksius telah dilakukan oleh berbagai rumah sakit, puskesmas, dan tempat karantina dibawah pengawasan dari DLH Provinsi Kalimantan Selatan untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan di insenerator dan sebagian dikirim kepada pihak ketiga yang telah memiliki izin mengelola LB3, yaitu PT Balikpapan Environmental Services (PT BES). Untuk penanganan limbah B3 covid-19 sendiri dikelola melalui fasyakes yang memiliki izin operasional insinerator yang ada pada RSUD Ulin, Ansyari Saleh, RSUD Balangan, RSUD Tanah Bumbu dan RS Ciputra.

Kalimantan Selatan belum memiliki usaha jasa pengolahan Limbah B3 yg memiliki perizinan berusaha untuk pengolahan Limbah B3, sehingga diluar dari keberadaan insenerator di RSUD maka untuk limbah B3 non medis dikelola dengan mengirim LB3 ke penyedia jasa yang ada di pulau Jawa dan Balikpapan. Kondisi ini tentu menyedot keuangan daerah, Selain itu tentu beresiko berdampak pencemaran lingkungan dari proses pengangkutan atau telatnya Limbah B3 utk di kelola. Dalam hal penanganan Limbah B3 medis, kab/ kota di Kalimantan Selatan belum memiliki sarana depo penyimpanan untuk menyimpan



Limbah B3 dari berbagai fasyankes, padahal depo ini sangat penting untuk bisa menekan biaya pengangkutan LB3

### **G. Kualitas Air Sungai Yang Rendah**

Hasil pemantauan kualitas air sungai provinsi Kalimantan Selatan tahap pertama sampai dengan Tahun 2022 pada 38 titik pantau, ditemukan parameter-parameter yang dominan tidak memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan pemerintah RI No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI untuk Kelas I antara lain BOD, Fecal coli, Total coliform, DO, COD, TSS, CI bebas, dan Besi (Fe). Parameter lain yang tidak memenuhi baku mutu antara lain : H<sub>2</sub>S, Fenol, Sianida (CN), pH, Mangan (Mn). Jika dibandingkan dengan baku mutu Kelas I, maka 63,16 % kualitas air sungai di Provinsi Kalimantan Selatan tergolong dalam cemar sedang dan 36, 84% dalam status cemar ringan.





**Tabel 2.95** Tabel Status Mutu Air Sungai Provinsi Kalsel sampai dengan Tahun 2022

No	Nama Sungai	Kab/Kota	Lokasi sampel	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Tahap I	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Tahap II	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Rata-rata
1	Martapura	Kab. Banjar	1. Desa Tambak Anyar Ilir	Cemar Ringan (4,62)	Cemar Ringan (4,15)	Cemar Ringan (4,39)
			2. Desa Sungai Rangas	Cemar Ringan (4,05)	Cemar Ringan (2,95)	Cemar Ringan (3,50)
			3. Desa Sungai Lulut	Cemar Ringan (4,18)	Cemar Ringan (2,09)	Cemar Ringan (3,14)
		Kota Banjarmasin	4. Desa Basirih	Cemar Ringan (4,58)	Cemar Ringan (3,67)	Cemar Ringan (4,13)
2	Irigasi	Kab. Banjar	1. Desa Sungai Landas	Cemar Ringan (4,54)	Cemar Ringan (2,06)	Cemar Ringan (3,30)
		Kota Banjarbaru	2. Intake PDAM	Cemar Ringan (4,57)	Cemar Ringan (3,39)	Cemar Ringan (3,98)
		Kab. Banjar	3. Desa Sungai Tabuk Keramat	Cemar Ringan (4,36)	Cemar Ringan (3,26)	Cemar Ringan (3,81)
3	Riam Kanan	Kab. Banjar	1. Desa Pingaran Ulu	Cemar Ringan (4,41)	Cemar Ringan (4,59)	Cemar Ringan (4,50)
4	Riam Kiwa	Kab. Banjar	1. Desa Astambul Kota	Cemar Ringan (4,56)	Cemar Ringan (3,15)	Cemar Ringan (3,86)
5	Negara	Kab. H.S. Utara	1. Desa Jarang Kuantan	Cemar Ringan (3,19)	Cemar Ringan (3,56)	Cemar Ringan (3,38)
			2. Desa Teluk Mesjid	Cemar Ringan (3,58)	Cemar Ringan (3,59)	Cemar Ringan (3,59)
		Kab. H. S. Selatan	1. Desa Hakurung	Cemar Ringan (3,18)	Cemar Ringan (2,92)	Cemar Ringan (3,05)
			2. Desa Tumbukan Banyu	Cemar Ringan (2,98)	Cemar Ringan (4,27)	Cemar Ringan (3,63)
			3. Desa Bajayau-Daha	Memenuhi (0,76)	Cemar Ringan (3,36)	Cemar Ringan (2,06)
		Kab. Tapin	1. Desa Margasari	Cemar Ringan (2,43)	Cemar Ringan (2,45)	Cemar Ringan (2,44)
			2. Desa Sei. Putting	Cemar Ringan (3,89)	Cemar Ringan (0,78)	Cemar Ringan (2,34)
3. Desa Keladan	Cemar Ringan (3,10)		Cemar Ringan (1,20)	Cemar Ringan (2,15)		
6	Tapin	Kab. Tapin	1. Desa Baringin A	Cemar Ringan (3,19)	Cemar Ringan (1,82)	Cemar Ringan (2,51)
7	Barabai	Kab. H.S. Tengah	1. Desa Bulayak	Cemar Ringan (4,82)	Cemar Ringan (4,67)	Cemar Ringan (4,75)
			2. Desa Pajukungan	Cemar Ringan (3,20)	Cemar Ringan (4,48)	Cemar Ringan (3,84)
			3. Desa Kasarangan	Cemar Ringan (3,29)	Cemar Ringan (4,36)	Cemar Ringan (3,83)





No	Nama Sungai	Kab/Kota	Lokasi sampel	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Tahap I	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Tahap II	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Rata-rata
			4.Desa Tabat	Cemar Ringan (2,70)	Cemar Ringan (4,00)	Cemar Ringan (3,35)
8	Amandit	Kab. H.S. Selatan	1. Desa Muning Baru	Cemar Ringan (3,65)	Cemar Ringan (3,18)	Cemar Ringan (3,42)
9	Tabanio	Kab. Tanah Laut	1.Intake PDAM Desa Bajuin	Cemar Ringan (4,84)	Cemar Ringan (4,57)	Cemar Ringan (4,71)
			2.Desda Angsau	Cemar Ringan (3,72)	Cemar Ringan (4,83)	Cemar Ringan (4,28)
			3.Desda Panjaratan	Cemar Ringan (4,87)	Cemar Ringan (3,79)	Cemar Ringan (4,33)
10	Balangan	Kab. Balangan	1.Desda Tabuan	Cemar Ringan (2,88)	Cemar Ringan (3,60)	Cemar Ringan (3,24)
			2.Desda Kapul	Cemar Ringan (4,00)	Cemar Ringan (4,02)	Cemar Ringan (4,01)
			3.Desda Paringin Kota	Cemar Ringan (3,48)	Cemar Ringan (3,67)	Cemar Ringan (3,58)
11	Tabalong	Kab. Tabalong	1.Desda Suput	Cemar Ringan (2,89)	Cemar Ringan (2,28)	Cemar Ringan (2,59)
			2.Desda Pamarangan Kiwa	Cemar Ringan (2,76)	Cemar Ringan (2,58)	Cemar Ringan (2,67)
			3.Desda Halangan	Cemar Ringan (2,25)	Cemar Ringan (3,62)	Cemar Ringan (2,94)
12	Batulicin	Kab. Tanah Bumbu	1.Desda Sela Selilau	Cemar Ringan (4,21)	Cemar Ringan (1,83)	Cemar Ringan (3,02)
			2. Desa Karang Bintang	Cemar Ringan (3,64)	Cemar Ringan (2,13)	Cemar Ringan (2,89)
			3. Desa Maju Makmur	Cemar Ringan (3,85)	Cemar Ringan (1,93)	Cemar Ringan (2,89)
13	Cantung	Kab. Kotabaru	1. Desa Banua Lawas	Cemar Ringan (3,51)	Cemar Ringan (3,69)	Cemar Ringan (3,60)
			2.Desda Sungai Kupang	Cemar Ringan (2,80)	Memenuhi (0,997)	Cemar Ringan (1,90)
			3. Desa Karang Payau	Cemar Ringan (3,00)	Cemar Ringan (3,72)	Cemar Ringan (3,36)

Berdasarkan tabel diatas, dapat disajikan gambaran persentase titik pantau yang tidak memenuhi baku mutu beserta indikasi sumber pencemarnya disajikan dalam tabel berikut ini :





**Tabel 2.96** Parameter Indeks Kualitas Air (IKA)

No.	Parameter	Peruntukan	Persentase (%)		Indikasi Sumber Pencemar
			Tahap I	Tahap II	
1	Fecal coli *	Kelas I	94,74	100	Bakteri yang berasal dari dari kotoran manusia dan kotoran hewan mamalia
		Kelas II	42,11	81,58	
2	Total coliform	Kelas I	94,74	100	Bakteri yang berasal dari dari kotoran manusia dan kotoran hewan mamalia, kotoran hewan ternak lainnya, jasad makhluk hidup seperti burung mati, serta bakteri dari limbah rumah tangga
		Kelas II	73,68	89,47	
3	BOD *	Kelas I	100	92,1	Limbah organik dari aktivitas rumah tangga seperti limbah makanan dan minuman, detergen (sabun), aplikasi pupuk pada kegiatan pertanian, limbah peternakan, sisa pakan ikan
		Kelas II	89,5	81,6	
4	DO *	Kelas I	89,47	76,32	BOD dan COD tinggi maka DO menjadi rendah
		Kelas II	31,6	23,7	
5	Cl Bebas	Kelas I	63,16	71,05	Klor dari proses klorinasi. Air bersih yang digunakan masyarakat melalui proses klorinasi oleh PDAM
		Kelas II	60,53	68,42	
6	COD *	Kelas I	68,42	60,53	Limbah organik baik dari aktivitas rumah tangga maupun industri, aplikasi pupuk pada kegiatan pertanian, limbah peternakan
		Kelas II	42,11	26,32	
7	H <sub>2</sub> S	Kelas I	36,84	57,89	Sampah, limbah cair domestik
		Kelas II	36,84	57,89	
8	TSS *	Kelas I	63,16	42,11	Kikisan atau erosi tanah dipengaruhi musim hujan, aktivitas galian C, pertambangan batubara, perkebunan sawit
		Kelas II	55,26	36,84	
9	Besi (Fe)	Kelas I	60,53	21,05	Karakteristik alami, Pertambangan galian C dan batubara
		Kelas II	-	-	
10	Mangan (Mn)	Kelas I	5,26	10,53	Pertambangan galian C dan batubara
		Kelas II			
11	Amoniak	Kelas I		10,53	Air seni dan tinja, oksidasi zat organik secara mikrobiologis serta dari air buangan industri dan aktivitas masyarakat, limbah domestik, industri, dan limpasan pupuk pertanian.
		Kelas II		2,63	
12	Detergen	Kelas I	5,26	5,26	Kegiatan mencuci menggunakan detergen
		Kelas II	5,26	5,26	
13	Fenol	Kelas I	13,16		Limbah cair industri tekstil (kayu), bisa juga dari limbah domestik
		Kelas II	7,89		
14	Sianida (CN)	Kelas I	7,89		Limbah pertambangan emas
		Kelas II	7,89		
15	pH *	Kelas I	5,26		Air hujan, limbah industri pertambangan batubara
		Kelas II	5,26		

Keterangan = (\*) parameter IKA - Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan



Dengan kompleksitas persoalan tersebut bahwa sumber pencemar yang terindikasi dari berbagai sector yakni dari sector pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, dan domestik, maka diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan serta pemulihan Sungai di Provinsi Kalimantan Selatan harus melalui pendekatan pengelolaan yang komprehensif dan terintegrasi dari hulu hingga hilir oleh seluruh pemangku kepentingan.

#### **H. Luas Lahan Kritis yang Berpotensi Terus Meningkat**

Secara teori banjir dan bencana akibat banjir dapat terjadi karena faktor alamiah maupun pengaruh aktivitas manusia terhadap alam dan lingkungannya. Faktor alamiah yang utama yaitu elemen meteorologi, topografi, hidrologi, perubahan penggunaan lahan dan areal konservasi juga dapat memperbesar peluang terjadinya aliran permukaan (Afdhalia & Oktariza, 2019). Banjir secara umum juga terbagi menjadi dua dari faktor penyebabnya, yaitu banjir fluvial yang disebabkan karena limpahan air dari sungai (kadang disebut juga dengan banjir bandang) dan banjir pluvial yang disebabkan karena tingginya run-off (aliran permukaan) dan curah hujan ekstrim pada suatu lokasi.

Identifikasi Faktor Penyebab:

##### **a. Anomali Curah Hujan**

Berdasarkan klasifikasi curah hujan bulanan, Bulan Januari di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu bulan paling basah pada bagian barat pegunungan Meratus, sehingga potensi air limpasan di daratan cukup tinggi.

##### **b. Morfologi Daratan**

Pada daratan landai genangannya akan lama surut tetapi daya rusaknya kecil, sedangkan daratan yang terjal daya rusak tinggi tetapi genangannya akan cepat surut dikarenakan mengikutialur gravitasi dari hulu.

##### **c. Pasang Laut**

Terjadi pasang laut maksimum yang menambah lamanya durasirendaman banjir di dataran karena air tidak bisa mengalir kelaut. Kondisi topografi di wilayah yang terendam banjir Januari 2021 ini umumnya berada di bagian hilir dengan ketinggian dibawah 12,5 mdpl. Wilayah pesisir di Kalimantan Selatan yang memiliki ketinggian 1 mdpl berpotensi mengalami banjir rob.

##### **d. Sedimentasi Sungai**

Dampak dari sedimentasi adalah kapasitas daya tampung sungai yang semakin menurun seiring dengan bertambahnya sedimen di dalam sungai,



sehingga ketika air limpasan (runoff) tinggi dan akan dibuang ke outlet berupa sungai akan tidak tertampung lagi. Hal inilah yang mengakibatkan meluapnya air sungai dan menggenangi kawasan permukiman, persawahan atau sekitarnya.

#### e. Alih Fungsi Lahan

Berdasarkan peta perubahan guna lahan antara 2011 dan 2020 terlihat jelas adanya perubahan guna lahan dari kawasan berhutan (hutan lindung, hutan produksi, hutan rawa/gambut) serta kawasan pertanian lahan kering menjadi kawasan perkebunan dan permukiman. Hal ini terjadi di DAS Barito, khususnya DTA pada Kajian ini. Alih fungsi lahan khususnya menjadi pertanian lahan kering, perkebunan sawit dan pertambangan yang berakibat infiltrasi rendah, sehingga air limpasan di permukaan semakin banyak berpotensi terjadi banjir.

Dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati, arah kebijakan konservasi kehati yaitu :

- Meningkatkan kepedulian upaya pelestarian Kehati sosialisasi/ pencerahan);
- Memperlambat, mengurangi/menghentikan laju kerusakan/degradasi dan kepunahan Kehati, diiringi upaya rehabilitasi serta implementasi prinsip pemanfaatan berkelanjutan;
- Meningkatkan keberdayaan pranata kelembagaan, kebijakan, dan penegakan hukum;
- Mengembangkan pemanfaatan berkelanjutan, IPTEK dan melestarikan kearifan lokal;
- Implementation of 3 Goals of the Convention on Biological Diversity (conservation, sustainable use, and benefit sharing). Indonesia has ratified CBD in 1994 (Act No. 5/1994);
- Implementation of Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plans (IBSAP), 2003 – 2020;
- Mewujudkan keadilan, keseimbangan peran/kepentingan dan memperkecil potensi konflik;.

Perencanaan Konservasi Kehati skala Provinsi

- Pengumpulan data flora dan fauna in-situ terkait konservasi sumber daya alam
- Pengumpulan data flora dan fauna ex-situ terkait konservasi sumber daya alam
- Pengumpulan data terkait lekat-lahan yaitu konservasi sumber daya alam yang ditanam dalam pekarangan Pengumpulan data ekosistem penopang



keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan terkait konservasi sumber daya alam.

Jasa lingkungan pada habitat bumi ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika faktor eksogen yang dicerminkan dengan dua komponen yaitu kondisi ekoregion dan penutup lahan (landcover/ landuse) sebagai penaksir atau proxy. Oleh karena itu diperlukan proses transformasi data dari ekoregion dan penutup lahan menjadi nilai jasa lingkungan.

Menurut sistem klasifikasi jasa lingkungan dari Millenium Ecosystem Assessment (2005), jasa lingkungan dikelompokkan menjadi empat fungsi layanan, yaitu jasa penyediaan (provisioning), jasa pendukung (supporting) dan jasa kultural (cultural) serta jasa pengaturan (regulating).

Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan dari Dinas Lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 terdapat 20 jasa lingkungan yang disajikan sebagai berikut:

- Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan
- Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih
- Jasa Lingkungan Penyedia Serat
- Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik
- Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara
- Jasa Lingkungan Pengatur Iklim
- Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Alam
- Jasa Lingkungan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah
- Jasa Lingkungan Pengaturan Aliran Air dan Banjir
- Jasa Lingkungan Penyerbukan Alami
- Jasa Lingkungan Pengendalian Hama
- Jasa Lingkungan Estetika
- Jasa Lingkungan rekreasi
- Jasa Lingkungan Warisan Budaya
- Jasa Lingkungan Warisan geologi
- Jasa Lingkungan Regenerasi Tanah dan Pemeliharaan
- Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara
- Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer
- Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman



Keanekaragaman hayati di Provinsi Kalimantan Selatan beragam jenis, dikarenakan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan banyak dijadikan cagar alam dan kawasan konservasi sehingga masih terjaga ekosistemnya. Flora Vegetasi yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan cukup banyak jenisnya, baik di kawasan taman nasional, wisata, hutan lindung maupun hutan produksi. diketahui bahwa setidaknya terdapat ratusan jenis tumbuhan, mulai dari pohon, liana, vegetasi bawah, dan lain-lain. Adapun beberapa contoh tanaman khas Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Durian, Tebu, Kasturi, Rambutan, Langsung dll. Selain itu Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki fauna khas yang dilindungi.

Fauna/satwa liar yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan tersebar di berbagai habitat di berbagai wilayah, hutan lindung di Pegunungan Meratus. Jenis fauna khas Kalimantan Selatan yang dapat dipetakan sebarannya yaitu Bekantan, Burung, Orang Utan.

Dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk dan intensifnya kegiatan pembangunan dari beragam sektor di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain pertambangan, industri, pelabuhan, perkebunan, pertanian, pemukiman, perikanan, pariwisata berkonsekuensi terhadap peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kompleksitas pembangunan di wilayah pesisir jika tidak diantisipasi secara hati-hati, dikhawatirkan mengganggu dan mengancam kelangsungan pemanfaatan sumber daya dan keberlanjutan ekosistem yang dapat menyangga kehidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa contoh ancaman nyata, misalnya perubahan ekosistem pesisir akibat reklamasi pantai, konversi lahan, penebangan hutan *mangrove*, tumpahan minyak (*oil spill*) dari pelabuhan, maupun pencemaran limbah dari berbagai kegiatan pembangunan dan rumah tanggapenduduk.

Terkait dengan jenis pemanfaatan lahan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Selatan dan pengaruhnya terhadap lingkungan pesisir dan perairan, maka isu dan permasalahan pokok yang teridentifikasi adalah terkait dengan ekologi, berupa potensi ancaman kerusakan ekosistem pesisir dan kehidupan biota laut yang hidup di sekitarnya.

Hal ini disebabkan karena secara ekologi laut merupakan tempat bermuaranya semua yang ada di darat baik melalui rembesan air hujan maupun mengalir melalui sungai-sungai yang cukup banyak bermuara di Selat Laut, Selat Sebuku maupun daratan Kalimantan. Akibatnya wilayah ini menjadi tempat



terakumulasinya segala sesuatu baik limbah industri dan domestik, penambangan, perkebunan, sedimen tersuspensi dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan kondisi perairan di lokasi studi yang memiliki tingkat kecerahan yang cukup rendah (dominan <50%) dan kekeruhan akibat sedimen tersuspensi sampai pada jarak 10-15 km dari garis pantai, baik di wilayah muara Sungai Barito (pesisir Kabupaten Banjar dan Barito Kuala) yang dampaknya sampai di wilayah Tanjung Selatan Kabupaten Tanah Laut, perairan Selat Laut (Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru), Selat Sebuku maupun wilayah utara Kabupaten Kotabaru (daratan utama Kalimantan).

Pertambangan batu bara yang dilakukan secara terbuka menyebabkan perubahan bentang lahan yang ekstrem. Penggalan lapisan batu bara yang terletak di bawah lapisan tanah dan lapisan lain menghasilkan lubang-lubang galian yang tidak dapat sepenuhnya ditutup kembali. Selain itu penimbunan lubang galian walaupun telah diupayakan menggunakan prinsip pengembalian lapisan tanah sebagai penutup terakhir pada waktu penataan lahan namun tetap saja menghasilkan kondisi lahan dengan material yang berbeda dibanding aslinya. Lapisan tanah yang dikembalikan sebagai lapisan penutup sudah tercampur aduk antara lapisan tanah atas dan bawah atau lapisan dari horizon A, B bahkan C, sehingga secara kimia terjadi pencampuran sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing horizon tersebut. Secara fisik jelas sangat berbeda dari kondisi awalnya karena terjadi perusakan struktur. Dengan kata lain tanah hasil penutupan kembali pada lokasi pertambangan batu bara memiliki Bobot Isi (BI) yang rendah. Dalam hal ini maka porositas lapisan tanah hasil penutupan kembali menjadi sangat kecil dengan akibat permeabilitas dan aerasi menjadi sangat buruk.

Potensi kerusakan lahan lain yang mungkin terjadi di areal pertambangan batu bara ialah terpotongnya drainase alamiah akibat perubahan bentang lahan. Dalam penataan kembali maka hal ini perlu dipertimbangkan. Kerusakan lahan lainnya ialah berupa erosi dan kemungkinan longsor. Untuk itu maka stabilisasi lereng dan recontouring merupakan bagian dari perencanaan penutupan tambang.

Sebagian besar masyarakat nelayan dan petambak menduga bahwa kegagalan usaha mereka tidak terlepas dari dampak kegiatan penambangan di wilayah hulu dan transportasi di sepanjang daerah aliran sungai maupun perubahan iklim global.



Dari kegiatan pertanian dan perkebunan di daratan, kelebihan unsur hara dari sisa-sisa pupuk bisa menyebabkan suburnya alga di lepas pantai dan mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir, pada gilirannya bisa menyebabkan kematian biota laut secara massal. Sedangkan buangan residu pestisida dari pertanian dan perkebunan melalui aliran sungai dapat menyebabkan keracunan dan kematian biota laut.

Badan Informasi Geospasial mencatat bahwa luas Hutan Mangrove di Indonesia adalah 3,2 juta hektar (Ha). Jumlah itu merupakan 19% (2005) dari seluruh ekosistem sejenis di dunia, dan diperkirakan pada tahun 2013 luas Hutan Mangrove di Indonesia sudah jauh berkurang. Namun walau bagaimanapun, luasan hutan mangrove Indonesia relatif masih dianggap yang paling luas di dunia, sehingga meletakkan Indonesia sebagai penyangga ekosistem mangrove terpenting di dunia.

Kerusakan mangrove di sebagian wilayah pesisir Kalimantan Selatan dominan diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan untuk industri, pelabuhan, perikanan, perkebunan, pertambangan. Selain itu diakibatkan oleh pengaruh alam terutama gelombang.

Hasil analisis terhadap tekanan ekosistem mangrove di pesisir Kalimantan Selatan menunjukkan dalam kategori tekanan sangat tinggi mencapai 6596,56 Ha atau 9,84%, kategori tinggi 137.34,87 Ha (20,50%), sedangkan kategori rendah masih yang terbesar yakni 24.692,24 Ha (36,85%). Secara wilayah kecamatan, Batulicin termasuk dalam kategori sangat tinggi, untuk semua kategori tinggi terdapat di Kecamatan Bumi Makmur, Pulau Laut Barat dan Pulau Laut Tanjung Selayar. Beberapa wilayah yang memiliki tekanan tinggi >50% terdapat di Kecamatan Takisung, Kurau, Satui dan Pulau Laut Kepulauan. Wilayah ini disebabkan karena semakin tingginya aktivitas konversi lahan di sekitarnya terutama, pelabuhan, perkebunan, perikanan tambak dan permukiman.

Berdasarkan data pada Tabel 2.94 kondisi lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan mengalami tingkat kenaikan yang rendah. Kondisi terakhir Kalimantan Selatan secara peringkat naik ke peringkat 26 dari 34 provinsi di Indonesia. Pengaruh terbesar pada masih rendahnya indeks tutupan lahan akibat dari eksploitasi usaha yang membuka kawasan hutan dan akibat bencana kebakaran hutan.



### 2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembinaan kependudukan dan catatan sipil yang dilaksanakan pada tingkat Provinsi Kalimantan Selatan adalah dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka menuju identitas tunggal. kegiatan yang dilakukan hanya terkait dengan upaya sosialisasi standarisasi pemenuhan hak-hak sipil masyarakat seperti KTP, KK, dan lain sebagainya. Upaya pembinaan ini diarahkan pada upaya percepatan bagi kabupaten/kota mencapai identitas tunggal tersebut. Dalam mendukung pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil. Kabupaten Kota juga menetapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Inventarisasi peraturan terkait penyelenggaraan urusan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

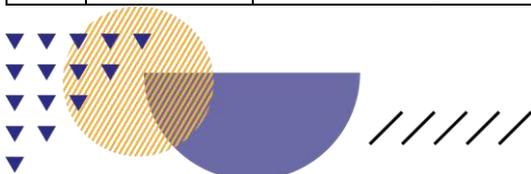
**Tabel 2.97** Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Usia ≥17 Tahun atau Sudah Kawin yang Mempunyai KTP	%	0.00	83.00	92.00	96.40	97.99
2	Persentase Ketersediaan Data Informasi Kependudukan Skala Provinsi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Persentase Kabupaten yang melaporkan data-data kependudukan	%	94.48	0.00	0.00	76.90	92.30
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.00	35.00	1.50	1.41	0.71
5	Usia Kawin Pertama	%	35.00	1.70	0.00	33.94	33.97
6	Persentase Kader GSI Aktif. (indikator kinerja yang dimaksud tidak ada)	%	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Persentase BKB Aktif	%	0.00	90.00	97.00	80.85	0.00
8	Perentase Sub PPKBD Aktif	%	0.00	80.00	75.00	69.75	0.00

Sumber: Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Prov. Kalimantan Selatan 2023

**Tabel 2.98** Inventarisasi Peraturan Perundangan terkait Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Nomor dan Judul Peraturan
1	Balangan	Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil
2	Banjar	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Perbup No. 17 tahun 2014 tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil
3	Batola	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	HSS	Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



No	Kabupaten/ Kota	Nomor dan Judul Peraturan
5	HST	Peraturan Daerah Nomor : Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten No 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil
6	HSU	Peraturan Daerah Nomor : 20-Tahun 2015 tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah 17 2011 ttg Retribusi KTP dan Akta Catatan Sipil
7	Kotabaru	Surat Perintah Bupati Kotabaru Nomor 180.1/143/Setda
8	Tabalong	Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tanggal 15 Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perbup Nomor 06 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2016
9	Tanah Bumbu	Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Penerbitan KTP
10	Tanah Laut	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
11	Tapn	Peraturan Daerah Kab. Tapin No. 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil Di Kab. Tapin
12	Kota Banjarbaru	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kota Banjarbaru
13	Kota Banjarmasin	Peraturan Daerah Nomor : 21 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Sumber : LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Pada tingkat kabupaten/kota telah dikembangkan sistem pelayanan terpusat pada kantor/lembaga yang menangani catatan sipil. sementara untuk beberapa kabupaten telah membagi kewenangannya kepada kantor kecamatan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan kewenangan ini hanya berlaku untuk pembuatan KTP. sedangkan untuk KK, akte kelahiran dan lain sebagainya masih di kantor catatan sipil.

Secara kelembagaan semua kabupaten/kota sudah memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Namun secara kualitas perlu adanya peningkatan dari berbagai sisi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang lebih memadai baik secara kuantitas dan secara kualitas. Hal ini mengingat tantangan yang masih cukup besar terutama terkait dengan upaya sosialisasi dan penyadaran masyarakat akan pentingnya identitas pada umumnya dan identitas tunggal pada khususnya.



### 2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu Upaya pembangunan Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah memberikan peran nyata untuk meningkatkan pendapatan keluarga yaitu dalam bentuk pelatihan kewirausahaan bagi kader-kader PKK.

Dalam rangka peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) telah dilaksanakan penguatan masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber Ekonomimelalui simpan pinjam kelompok perempuan. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa melalui pemberian bantuan stimulan dan pelatihan bagi pengurus. Jumlah kelompok simpan pinjam bagi perempuan dan Badan Usaha Milik Desa sudah dikembangkan di 11 kabupaten dengan hasil cukup baik

Di bidang pemerintahan desa telah pula dilaksanakan pembinaan pembangunan desa seperti perencanaan desa dalam rangka menyusun RPJM desa. peningkatan kapasitas pelayanan desa dan kualitas aparatur dan kepala desa. agar memiliki kemampuan dalam mengelola sistem manajemen desa baik pemerintahan maupun keuangan desa. Berkaitan dengan hal ini telah dibina seluruh desa dengan pola pembinaan melalui percontohan yang kemudian dikembangkan oleh kabupaten sesuai kondisi dan potensi yang ada pada desa yang bersangkutan.

### 2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dilihat dari cakupan kepesertaan KB di Kalimantan Selatan. masih memerlukan upaya keras. demi menuju masyarakat yang sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kepesertaannya sampai dengan tahun 2022 terus membaik.

Grand Design Pembangunan Kependudukan sebenarnya sudah terbentuk di hampir 13 kab/kota pada Prov. Kalimantan Selatan, namun alasan belum maksimalnya pelaksanaan penyusunan GDPK dikarenakan terkendala dengan regulasi dan perlu adanya penyesuaian dengan visi dan misi bupati terpilih dalam pilkada dan GDPK belum menjadi prioritas bagi kab/kota.



Berdasarkan data *Unmed Need* di Kalimantan Selatan sebesar 10,8% menunjukkan bahwa memang masih banyak PUS yang ingin berKB namun belum terlayani. Hal ini disebabkan oleh banyak factor, antara lain karakteristik demografi, social ekonomi, akses dan kualitas pelayanan. Hal ini diperparah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai informasi KB.

Berdasarkan hasil Laporan Indeks Kinerja Utama BKKBN tahun 2020, dapat dilihat bahwa capaian mCPR di Kalimantan Selatan sebesar 80,26%. Angka ini menunjukkan bahwa kesertaan berKB PUS di Kalimantan Selatan sudah cukup tinggi, hanya memang pilihan yang kontrasepsi yang digunakan masih yang non MKJP.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menjalin kerja sama dengan mitra kerja yaitu IBI dan TNI serta BKKBN juga menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi selalu ada.

Masih tinggi PUS yang putus ber KB disebabkan karena :

- a) Selama adanya Pandemi Covid 19 terdapat perubahan akses pelayanan KB. Akses pelayanan KB ada pembatasan pelayanan KB di Puskesmas maupun RS. Selain itu pada beberapa daerah masih terdapat kekurangan akses kesehatan.
- b) Masyarakat merasa takut untuk datang ke Puskesmas atau Klinik PMB maupun RS selama adanya Pandemi Covid-19
- c) Tingginya minat PUS untuk menggunakan KB Non MKJB. Capaian KB MKJP di Kalimantan Selatan masih rendah berkisar 11,02% berdasarkan data Laporan Statistik Rutin BKKBN, sampai dengan bulan September 2021
- d) Kurangnya KIE dari Pengelola Program KB
- e) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KB MKJP

### 2.3.2.8 Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), sasaran dalam sistranas yaitu terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif atau dapat diartikan memiliki aksesibilitas yang tinggi. Jaringan pelayanan transportasi dapat menjangkau seluas mungkin wilayah nasional dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Pelayanan umum pada urusan perhubungan meliputi perhubungan darat (angkutan darat dan ASDP), perhubungan laut, perhubungan udara, dan perkeretaapian. Pelayanan urusan perhubungan dapat



dilihat dari jumlah penumpang dan barang yang dapat terangkut oleh angkutan baik darat, laut, maupun udara.

Pemerintah dalam membuat peraturan yang mengatur tentang transportasi umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Suatu kebijakan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pemerintah membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan. Dinas Perhubungan sendiri mengatur tentang peraturan lalu lintas dan sistem transportasi, pemberian ijin trayek, uji kir angkutan yang layak jalan, pemberian marka jalan, penyediaan halte dan jaringan sarana dan prasarana lainnya. Ditemuinya di lapangan bahwa kualitas fasilitas angkutan umum yang tersedia masih rendah dikarenakan kurang tegasnya penegakan hukum terhadap penyelenggara jasa angkutan umum untuk melakukan peremajaan terhadap usia angkutan lebih dari 10 tahun. Hal ini lah yang menjadi salah satu pemicu banyaknya moda angkutan umum mengalami penurunan performance dan pada akhirnya penumpang beralih kepada penggunaan kendaraan pribadi.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 131.281 unit dan pertumbuhannya setara dengan 7,5% pertahun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan perhitungan rata-rata, maka pertumbuhan perbulan mencapai kurang lebih 11.000 unit. Hal ini menyebabkan kemacetan dan penundanaan arus lalu lintas yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan dan menambah kesemrawutan kota. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, gas buang kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara pada kota-kota besar juga mengalami peningkatan dimana kontribusinya telah mencapai 60-70%.

## 1. Terminal Penumpang

Terminal penumpang di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 2 tipe yaitu tipe A (kewenangan pusat) sebanyak 1 terminal dan tipe B (kewenangan provinsi) sebanyak 6 terminal. Berikut merupakan sejumlah terminal yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan.



**Tabel 2.99** Data Terminal Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Tipe Terminal	Nama Terminal	Lokasi	Aksesibilitas
1	Terminal Tipe A	Gambut Barakat	Kab. Banjar	Sebagai titik simpul transportasi keluar masuk Wilayah Regional Kalimantan yang berfungsi melayani kendaraan umum antar kota antar provinsi (AKAP)
2	Terminal Tipe B	Terminal Km 6 Kayuh Baimbai	Kota Banjarmasin	Sebagai titik simpul akses menuju Pelabuhan Trisakti, Bandara Syamsudin Noor serta menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
3	Terminal Tipe B	Terminal Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu	Sebagai titik simpul akses menuju Pelabuhan Laut Batulicin, Pelabuhan Penyeberangan ke Kotabaru menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
4	Terminal Tipe B	Terminal Kotabaru	Kabupaten Kotabaru	Sebagai titik simpul akses menuju Tanah Bumbu- Tanah Laut- Banjarmasin dan menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
5	Terminal Tipe B	Terminal Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sebagai titik simpul akses menuju Tanjung – Barabai-Kandangan – Rantau – Martapura-Banjarmasin dan menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
6	Terminal Tipe B	Terminal Tabalong	Kabupaten Tabalong	Sebagai titik simpul akses menuju Paringin- Barabai- Kandangan- Rantau- Martapura- Banjarmasin dan menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan

Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Selatan, Tahun 2022

## 2. Bus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) merupakan layanan bus antar kota yang menghubungkan dua kota pada provinsi yang berbeda dengan menggunakan kendaraan bus umum dan terikat dengan trayek angkutan. Bus AKAP memiliki jadwal yang tetap, pelayanan yang cepat, dilayani oleh bus umum, tersedia terminal tipe A pada awal pemberangkatan, persinggahan dan terminal tujuan.





Sumber: BPTD XV Kalimantan Selatan, 2023

**Gambar 2.38** Bus AKAP Prov. Kalimantan Selatan

Trayek yang dilalui Bus AKAP sebagaimana tercantum pada tabel berikut.



**Tabel 2.100** Trayek dan Tarif Bus AKAP

No.	Perusahaan Otobus	Trayek	Kelas	Tarif (Rp)	Jumlah Armada	Ket.
1.	PT. DAMRI (Persero)	Terminal KM.17 Gambut Barakat – Terminal Batu Ampar – Terminal Samarinda Seberang (Via Batulicin)	Business	300.000	4 Unit	
2.	PO. Pulau Indah Motor Jaya	Terminal KM.17 Gambut Barakat – Terminal Batu Ampar – Terminal Samarinda Seberangan (Via Tanjung)	Business	300.000	24 Unit	
3.	PO. Samarinda LestariTransport	Terminal KM.17 Gambut Barakat – Terminal Batu Ampar – Terminal Samarinda	Business	300.000	17 Unit	



No.	Perusahaan Otobus	Trayek	Kelas	Tarif (Rp)	Jumlah Armada	Ket.	
		Seberangan (Via Tanjung)					
4.	PO. Bintang Mas Lestari Bersaudara	Terminal KM.17 Gambut Barakat – Terminal Batu Ampar – Terminal Samarinda Seberangan (Via Tanjung)	Business	300.000	7 Unit		
5.	PO. Yesso Travel	Terminal KM. 17 Gambut Barakat – Terminal WA. Gara (Palangkaraya)	Hiace 12	150.000			
			Execelest	150.000			
		Terminal KM.17 GambutBarakat – Sampit (Via Palangkaraya)	Execelest	270.000			
		Terminal KM.17 GambutBarakat – Pangkalan Bun	Hiace 12	380.000			
			Execelest	360.000			
Terminal KM.17 GambutBarakat - Lamandau	Execelest	450.000					
6.	PO. Logos Trijaya Sentosa	Terminal KM. 17 Gambut Barakat – Terminal WA. Gara	Economy	100.000			
			Terminal KM.17 Gambut Barakat – Sampit (Via Palangkaraya)	Economy	200.000		
			Terminal KM.17 Gambut Barakat – Sampit – PangkalanBun	Economy	250.000		
7.	PO. Yuliana Bersaudara Makmur Jaya	Terminal KM.17 Gambut Barakat – Muara Teweh	Economy	120.000			
		Terminal KM.17 Gambut Barakat – Tamiang Layang	Economy	80.000			
		Terminal KM.17 Gambut Barakat – Ampah	Economy	90.000			
		Terminal KM.17 Gambut Barakat – Kandui	Economy	110.000			
		Terminal KM.17 Gambut Barakat – Patas	Economy	110.000			

Sumber: BPTD XV Kalimantan Selatan, 2023



### 3. Bus Rapid Transit Banjarbakula

Bus Rapid Transit (BRT) merupakan sistem transit massal berbasis bus yang memberikan mobilitas cepat, nyaman dan berbiaya rendah dalam pelayanannya sebagai angkutan dalam perkotaan. BRT menggunakan jalur khusus dan pelayanan prima terhadap pengguna yang pada dasarnya adalah mengadaptasi karakteristik kinerja dan keandalan pelayanan dari sistem transit modern berbasis dengan biaya yang lebih rendah.

**Tabel 2.101** Koridor Pelayanan BRT Banjarbakula

No.	Koridor	Rute Koridor
1.	Koridor I	Km.0 Banjarmasin – Lambung Mangkurat – Jl. A. Yani – Terminal Km 6 Banjarmasin – Terminal Km 17 Gambut Barakat (Pulang Pergi)
2.	Koridor II	Terminal Km 17 Gambut Barakat – Jl. A. Yani – Terminal Banjarbaru (Pulang Pergi)
3.	Koridor III	Terminal Km 17 Gambut Barakat – Liang Anggang – Simpang 3 Trikora/A. Yani – Jl. Trikora – Simpang 3 Cempaka – Jl. Cempaka – Terminal Banjarbaru – Martapura (Pulang Pergi)
4.	Koridor IV	Handil Bakti Barito Kuala – Jl. Hasan Basri – Jl. Sultan Adam – Jl. Syarif Hidayatullah – Jl. Veteran – Jl. Pramuka – Terminal Km 6 Banjarmasin (Pulang Pergi)
5.	Koridor V	Terminal Km 17 Gambut Barakat – Liang Anggang – Jl. Gubernur Soebarjo – Pelabuhan Trisakti (Pulang Pergi)
6.	Koridor VI	Handil Bakti – Jl. Trans Kalimantan – Jl. (Banjarmasin – Marabahan) – Terminal Marabahan (Pulang Pergi)
7.	Koridor VII	Terminal Km. 17 Gambut Barakat – Liang Anggang – Jl. A. Yani – Bentok (Pulang Pergi)
8.	Koridor VIII	Bentok – Bati-Bati – Tambang Ulang – Pelaihari (Pulang Pergi)
9.	Koridor IX	Terminal Km. 17 Gambut Barakat – Bandara Syamsudin Noor (Pulang Pergi)

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Selatan, 2022

#### A. Angkutan Sungai dan Laut

Provinsi Kalimantan Selatan yang terkenal sebagai provinsi yang memiliki jumlah sungai yang banyak dan digunakan sebagai jalur transportasi sejak zaman dahulu hingga sekarang akan sangat memiliki kerawanan akan terjadinya kecelakaan di sungai. Pengawasan lalu lintas sungai dilakukan dalam rangka menciptakan kenyamanan dan kelancaran pengguna lalu transportasi sungai. Sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi : keselamatan kapal, pengawakan kapal, manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal; pemuatan, dan



status hukum kapal. Tetapi pada kenyataannya penegakan hukum terhadap pengawasan dan pengendalian lalulintas perairan sungai belum secara maksimal dilaksanakan, karena luasnya cakupan wilayah pengawasan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 7 pelabuhan yang beroperasi dengan 2 jenis pelabuhan yaitu pelabuhan sungai dan danau serta pelabuhan penyeberangan yang memiliki hirarki pelabuhan yaitu pengumpan. Lokasi pelabuhan tersebar di beberapa kabupaten/kota diantaranya Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berikut merupakan data eksisting pelabuhan yang status kepemilikan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

**Tabel 2.102** Data Eksisting Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Nama Pelabuhan	Lokasi Pelabuhan	Status Aset/ Kepemilikan	Operator	Kondisi Pelabuhan	Aktivitas di Pelabuhan
1	Negara	Kab. HSS	Kab. HSS	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
2	Dermaga Sungai di Lok Baintan	Kab. Banjar	Kab. Banjar	-	NA	NA
3	Dermaga Alalak	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
4	Dermaga Jelapat	Kab. Batola	Kab. Batola	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
5	Dermaga Banjarraya	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
6	Dermaga Saka Kajang	Kab. Batola	Kab. Batola	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
7	Pasar Baru	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	-	Baik	Penumpang&Barang

Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov/Kab/Kota, Tahun 2022

## B. Transportasi Angkutan Udara

Jumlah penumpang yang berangkat melalui bandara di Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2023 sebanyak 114.054 orang atau mengalami kenaikan sebesar 8,94 persen dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat bulan Februari 2023 yang berjumlah 104.691 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat pada bulan Maret 2022 yang mengangkut 95.129 orang, terjadi kenaikan sebesar 19,89 persen. Penumpang yang berangkat melalui Bandara Udara Syamsudin Noor pada bulan Maret 2023 sebanyak 110.710 orang, naik sebesar 9,09 persen dibandingkan



dengan jumlah penumpang bulan Februari 2023 yang mengangkut 101.482 orang. Pada Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru terdapat 1.878 orang penumpang yang berangkat, sedangkan di bulan sebelumnya sebanyak 1.686 orang. Pada Bandara Bersujud Batulicin jumlah penumpang yang berangkat sebanyak 1.466 orang, sedangkan jumlah penumpang pada bulan sebelumnya adalah sebanyak 1.523 orang. Bila dibandingkan dengan bulan Maret 2022, jumlah penumpang yang berangkat melalui Bandara Syamsudin Noor naik sebesar 21,85 persen, Bandara Gusti Syamsir Alam naik sebesar 53,68 persen, dan Bandara Bersujud Batulicin turun sebesar 51,97 persen

Jumlah penumpang yang datang melalui bandara di Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2023 terjadi kenaikan sebesar 6,52 persen, dimana jumlah penumpang yang datang pada bulan Maret 2023 sebanyak 111.308 orang sedangkan penumpang yang datang pada bulan Februari 2023 sebanyak 104.496 orang. Bila dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penumpang yang datang naik sebesar 19,30 persen, yang mana pada bulan tersebut penumpang yang datang sebanyak 93.299 orang. Penumpang yang datang di Bandara Udara Syamsudin Noor pada bulan Maret 2023 sebanyak 108.001 orang atau naik sebesar 6,53 persen dibandingkan dengan jumlah penumpang yang datang pada bulan Februari 2023 sebanyak 101.379 orang. Pada Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru, jumlah penumpang yang datang pada bulan Maret 2023 adalah sebanyak 1.748 orang, sedangkan pada bulan sebelumnya penumpang datang sebanyak 1.658 orang. Penumpang yang datang di Bandara Bersujud Batulicin, bulan Maret 2023 sebanyak 1.559 orang, sedangkan jumlah penumpang datang pada bulan Februari 2023 adalah sebanyak 1.459 orang. Bila dibandingkan dengan bulan Maret 2022, jumlah penumpang yang datang di Bandara Syamsudin Noor naik sebesar 21,46 persen, Bandara Gusti Syamsir Alam naik sebesar 36,78 persen, dan Bandara Bersujud turun sebesar 49,79 persen.

Jumlah barang yang dimuat melalui angkutan udara yang berangkat dari Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2023 sebanyak 504.776 kilogram. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 31,80 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 382.998 kilogram. Jika dibandingkan dengan bulan Maret 2022, jumlah barang yang dimuat melalui angkutan udara yang berangkat dari Kalimantan Selatan sebesar 418.999 kilogram, mengalami kenaikan sebesar 20,47 persen.



Jumlah barang yang dibongkar melalui angkutan udara yang datang di Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2023 sebanyak 1.841.268 kilogram. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 18,01 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebanyak 1.560.251 kilogram. Jika dibandingkan dengan bulan Maret 2022, jumlah barang yang dibongkar melalui angkutan udara yang datang di Kalimantan Selatan mengalami penurunan sebesar 3,75 persen.



**Gambar 2.39** Grafik Jumlah barang yang dibongkar melalui angkutan udara yang datang di Kalimantan Selatan s.d Maret Tahun 2023

Perkembangan Transportasi Angkutan Laut Jumlah penumpang angkutan laut antarpulau dalam negeri yang berangkat melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada bulan Maret 2023 sebanyak 12.460 orang, terjadi kenaikan sebesar 61,63 persen dibandingkan dengan penumpang yang berangkat pada bulan Februari 2023 yang berjumlah 7.709 orang. Pada bulan Maret 2023, penumpang yang datang melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.536 orang, naik sebesar 9,41 persen dibanding dengan penumpang yang datang pada bulan Februari 2023 yang berjumlah 7.802 orang. Jumlah barang yang dimuat di Pelabuhan Trisakti pada bulan Maret 2023 sebesar 5.253.964 ton atau naik sebesar 0,43 persen dibanding barang yang dimuat bulan Februari 2023 sebanyak 5.231.222 ton. Jumlah barang yang dimuat pada bulan Maret 2023 naik sebesar 13,87 persen jika dibandingkan dengan bulan Maret 2022 yang berjumlah 4.613.881 ton. Untuk barang yang dibongkar, pada bulan Maret 2023 terjadi kenaikan sebesar 13,76 persen, dimana jumlah barang yang dibongkar sebanyak



9.776.307 ton, sedang pada bulan Februari 2023 jumlah barang yang dibongkar sebanyak 8.594.008 ton. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu Maret 2022, terjadi kenaikan sebesar 13,41 persen, dimana pada bulan tersebut jumlah barang yang dibongkar sebanyak 8.620.256 ton.

### 2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

*Blank spot* merupakan kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tidak terlingkupi oleh sinyal komunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Bila suatu tempat terjadi *blank spot*, maka komunikasi dua arah menjadi terhambat.

Berdasarkan data sampai dengan tahun 2022 sebaran desa bebas *blank spot* dan desa *blank spot* sebagaimana tercantum pada Tabel 2.103, ada 10 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang masih memiliki desa *blank spot*. Area *blank spot* terbesar berada di Kabupaten Barito Kuala dengan jumlah desa *blank spot* mencapai 60 desa. Untuk Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tabalong secara keseluruhan sudah bebas *blank spot*.

**Tabel 2.103** Persebaran Desa Bebas *Blank Spot* dan Desa *Blank Spot*

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Desa Bebas Blankspot sd 2022	Desa Blankspot sd 2022
1	Kabupaten Tanah Laut	135	115	20
2	Kabupaten Hulu Sungai Utara	219	210	9
3	Kabupaten Tapin	126	120	6
4	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	144	128	16
5	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	161	140	21
6	Kabupaten Barito Kuala	201	141	60
7	Kabupaten Kotabaru	197	180	17
8	Kabupaten Tabalong	131	131	0
9	Kabupaten Tanah Bumbu	144	139	5
10	Kabupaten Banjar	277	251	26
11	Kabupaten Balangan	153	137	16
12	Kota Banjarmasin	52	52	0
13	Kota Banjarbaru	20	20	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.960</b>	<b>1.764</b>	<b>196</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

Dari data tersebut di atas untuk Kabupaten Tabalong, dari 131 Desa sudah terlayani jaringan Telekomunikasi, namun ada 7 desa yang masih tidak



terlayani Jaringan Internet (4G) yang artinya desa tersebut masih menggunakan jaringan 2G.

Peningkatan teknologi sistem telekomunikasi seluler melalui penempatan *Base Transceiver Station* (BTS) merupakan upaya dalam mengurangi *blank spot area* dan memaksimalkan cakupan area terlayani pada suatu wilayah. Jumlah BTS di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.104, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 1.675 unit BTS, meningkat pada tahun 2020 menjadi 1.716 unit BTS, dan pada tahun 2021 menjadi 1.853 unit BTS. Pada Tahun 2021 dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, jumlah unit BTS terbanyak tersebar di Kota Banjarmasin sebanyak 296 unit, sedangkan jumlah yang terkecil berada di Kabupaten Balangan dengan jumlah BTS sebanyak 55 unit.

**Tabel 2.104** Jumlah BTS di Provinsi Kalimantan Selatan s.d Tahun Terakhir 2021

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	2019	2020	2021
1	Kota Banjarmasin	114	179	296
2	Kota Banjarbaru	105	105	132
3	Kabupaten Barito Kuala	106	95	123
4	Kabupaten Banjar	254	254	254
5	Kabupaten Tapin	85	85	85
6	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	89	89	78
7	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	76	78	76
8	Kabupaten Hulu Sungai Utara	52	52	65
9	Kabupaten Balangan	52	52	55
10	Kabupaten Tabalong	244	244	244
11	Kabupaten Tanah Laut	202	187	204
12	Kabupaten Tanah Bumbu	163	163	158
13	Kabupaten Kotabaru	133	133	83
<b>TOTAL</b>		<b>1.675</b>	<b>1.716</b>	<b>1.853</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

Berdasarkan data kepemilikan akses internet di masyarakat, jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas internet dan pelanggan telepon kabel semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini merupakan dampak dari tingginya jumlah pengguna internet di masa sekarang dengan banyaknya usaha yang menggunakan jasa online.



Dalam hal penyediaan informasi penyelenggaraan daerah telah dilakukan monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah. Khusus untuk monitoring Opini telah dilakukan pengelolaan aduan masyarakat melalui sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat ( SP4N-LAPOR ) yang di Kalimantan Selatan lebih dikenal dengan istilah LAPORPAMAN.

Sedangkan dalam hal penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan melalui media komunikasi publik dan media layanan informasi publik yang tersedia antara lain: melalui Radio LPPL Abdi Persada FM , portal berita Media Center dan layanan PPID serta melalui media komunikasi luar ruang Videotron sebanyak 2 (dua) unit.

Informasi yang disebarluaskan terdiri dari informasi pembangunan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten/kota yang terkait dengan pemerintah provinsi, baik itu menyangkut pendidikan, sosial dan budaya, hukum, kriminalitas, ekonomi, pariwisata, olahraga dan kesehatan. Khusus untuk layanan PPID Informasi yang dikecualikan, informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat. Layanan PPID baru beroperasi pada tahun 2019 dikarenakan sebelumnya PPID melekat pada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga data informasi yang dihimpun dimulai sejak tahun 2019. Adapun media informasi Videotron baru dioperasikan dari tahun 2019 sedangkan tahun sebelumnya masih dalam tahap pemasangan dan penyesuaian, sehingga data informasi yang dihimpun dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat di akses.

### **2.3.2.10 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah**

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam mengembangkan dan memberdayakan perekonomian rakyat. Pada tahun 2022 jumlah koperasi di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2.943 unit yang sebagian besar merupakan jenis koperasi pegawai negeri (435 unit); koperasi serba usaha (507 unit); dan koperasi unit desa (300 unit). Jumlah koperasi mengalami peningkatan dari tahun 2018 – 2022 sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2.105.



**Tabel 2.105** Jumlah Unit Koperasi Menurut Jenis Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Jenis Koperasi	2018	2019	2020	2021	2022
Koperasi Unit Desa	385	385	384	385	300
Koperasi Pegawai Negeri	444	451	437	418	435
Koperasi Karyawan	214	212	207	202	230
Koperasi Industri Kerajinan	14	13	13	57	15
Koperasi Angkutan/ Darat/ Laut/Sungai	23	24	23	21	26
Koperasi Serba Usaha	489	497	503	526	507
Koperasi Generasi Muda/ Mahasiswa	27	30	28	2	29
Koperasi Veteran	11	10	10	8	9
Koperasi Wredatama	13	15	14	6	11
Koperasi Wanita	88	88	88	89	84
Koperasi Simpan Pinjam	70	73	75	73	88
Koperasi Jasa/Profesi	28	33	46	34	27
Koperasi Pasar	33	32	31	30	39
Koperasi Pondok Pesantren	68	68	67	64	66
Koperasi Pertanian	145	139	140	132	149
Koperasi Perikanan/Nelayan	15	19	21	17	29
Koperasi Perkebunan	58	62	62	64	79
Koperasi Peternakan	9	11	11	9	12
Koperasi Kehutanan	3	3	3	4	4
Koperasi Angkutan Darat	28	25	26	28	28
Koperasi Angkutan Laut	1	3	3	3	3
Koperasi Angkutan Udara	1	1	1	1	1
Koperasi Kepolisian	18	18	18	19	19
Koperasi Jamu Gendong	1	1	1	1	1
Koperasi PEPABRI	10	7	6	9	9
Koperasi Pertambangan	3	3	3	1	1
KJKS	59	58	62	61	61
Koperasi Produsen	28	29	30	-	-
Koperasi Konsumen	1	2	2	-	-
Koperasi Sekunder	25	25	25	13	13
Koperasi Lain-Lain	276	284	267	604	657
Koperasi Wisata	-	-	-	-	1
Koperasi Perumahan	-	-	-	-	1
Koperasi Pedagang Kaki Lima	-	-	-	-	3
Kop. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)	-	-	-	-	6
<b>Jumlah</b>	<b>2.587</b>	<b>2.620</b>	<b>2.606</b>	<b>2.892</b>	<b>2.943</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2023



Usaha mikro dan menengah di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yang tersebar di kabupaten/kota se Kalimantan Selatan meliputi Usaha Mikro sebanyak 328.567 Unit. Usaha Menengah sebanyak 2.839 Unit. dan Usaha Kecil sebanyak 33.222 Unit. Lebih lengkapnya diuraikan pada tabel dibawah Berikut:

**Tabel 2.106** Jumlah Jenis Usaha Mikro Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

NO	KABU- PATEN	KULINE R	FA- SION	PEN- DIDIKAN	OTO- MOTIF	AGRI- BISNIS	TEKNIK	BIDANG	JUMLAH
	KOTA						INTERN ET	LAINYA	
1	Tanah Laut	7.984	1.682	-	808	2.022	-	22.372	34.868
2	Kotabaru	625	586	15	118	1.305	-	5.543	8.192
3	Banjar	35.105	342	-	304	26.980	-	4.527	67.258
4	Barito Kuala	414	33	-	85	33.868	-	1.090	35.490
5	Tapin	3.551	400	-	45	200	5	4.805	9.006
6	H.S. Selatan	31.925	485	-	345	7.144	-	1.140	41.039
7	H.S. Tengah	6.759	1.139	-	527	7.699	-	9.829	25.953
8	H.S Utara	4.200	1.701	134	326	2.933	15	25.068	34.377
9	Tabalong	4.866	657	-	383	454	-	12.410	18.770
10	Tanah Bumbu	716	10	-	40	193	-	3.165	4.124
11	Balangan	2.292	-	-	178	677	-	5.062	8.209
12	Banjar- masin	7.984	2.985	1.099	1.884	3.456	1.885	11.938	31.231
13	Banjarbaru	3.127	1.743	133	1.513	714	97	2.723	10.050
	<b>Jumlah</b>	<b>109.548</b>	<b>11.763</b>	<b>1.381</b>	<b>6.556</b>	<b>87.645</b>	<b>2.002</b>	<b>109.672</b>	<b>328.567</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Tabel 2.107** Jumlah Jenis Usaha Menengah Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

No	Kabupaten Kota	Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	Teknik Internet	Bidang Lainya	Jumlah
1	Tanah Laut	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Barito Kuala	1	2	-	7	10	-	50	70
5	Tapin	-	-	-	-	-	-	-	-
6	H.S. Selatan	-	-	-	-	-	-	60	60
7	H.S. Tengah	-	104	-	-	-	-	44	148
8	H.S Utara	-	63	-	112	-	-	725	900
9	Tabalong	-	-	-	-	-	-	-	-



No	Kabupaten Kota	Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	Teknik Internet	Bidang Lainnya	Jumlah
10	Tanah Bumbu	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Balangan	-	-	-	-	10	-	8	18
12	Banjarmasin	98	148	49	99	279	48	922	1.643
13	Banjarbaru	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>317</b>	<b>49</b>	<b>218</b>	<b>299</b>	<b>48</b>	<b>1.809</b>	<b>2.839</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Tabel 2.108** Jumlah Jenis Usaha Kecil Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	Teknik Internet	Bidang Lainnya	Jumlah
1	Tanah Laut	-	-	-	30	-	-	1.000	1.030
2	Kotabaru	2	-	-	4	-	-	110	116
3	Banjar	10	5	-	3	69	1	160	248
4	Barito Kuala	15	20	-	35	200	-	222	492
5	Tapin	-	-	-	5	-	-	150	155
6	H.S. Selatan	118	45	2	70	-	-	17.926	18.161
7	H.S. Tengah	54	885	-	109	373	-	1.052	2.473
8	H.S Utara	452	576	-	385	-	-	3.030	4.443
9	Tabalong	300	-	-	50	-	-	421	771
10	Tanah Bumbu	13	30	2	32	10	2	160	249
11	Balangan	60	6	-	-	12	3	30	130
12	Banjarmasin	819	260	74	409	373	223	2.008	4.166
13	Banjarbaru	70	21	27	83	85	18	484	788
	<b>Jumlah</b>	<b>1.913</b>	<b>1.848</b>	<b>107</b>	<b>1.232</b>	<b>1.122</b>	<b>247</b>	<b>26.753</b>	<b>33.222</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Tabel 2.109** Rekap Data UMKM Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Klasifikasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Usaha Mikro	320.557	333.919	376.233	326.786	328.567
2	Usaha Kecil	13.524	20.090	32.533	33.222	33.222
3	Usaha Menengah	2.994	3.308	3.140	2.839	2.839
	<b>Total</b>	<b>337.075</b>	<b>357.317</b>	<b>411.906</b>	<b>364.868</b>	<b>366.650</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2023



**Tabel 2.110** Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2018-2022  
Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Koperasi Aktif Per Tahun		66	66,81	57,81	58,21	59,7
2	Persentase Koperasi yang menyelenggarakan RAT		84	34,85	37,84	51,35	54,05
3	Persentase Penumbuhan Koperasi Baru		3	3,28	10,81	10,85	11,18
4	Persentase Peningkatan Nilai Bisnis Koperasi dan UK		6,93	3,56	4,91	1,20	1,22
5	Persentase Peningkatan Kemandirian (struktur) Permodalan Koperasi dan UK		93,63	72,97	88,74	0,25	0,30
6	Jumlah Koperasi dan UK yang memiliki Legalitas Usahanya	Unit	30	35	35	40	40
7	Jumlah Nilai Transaksi Promosi	Juta	360	750	0	0	650
8	Jumlah Usaha Kecil yang mampu mengakses Pasar Modern	Unit	20	25	20	20	25
9	Jumlah Jenis Produk Unggulan Koperasi dan UK yang mampu masuk ke Pasar Luar Daerah	Item	3	3	5	3	3

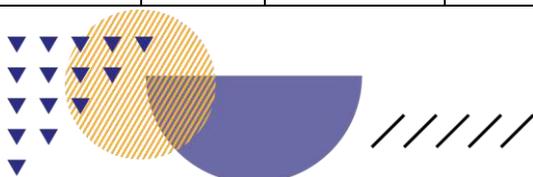
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2023

### 2.3.2.11 Penanaman Modal

Investasi dalam pengembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan masih sangat dibutuhkan dalam memberdayakan setiap sumber daya baik manusia maupun alam. Investasi berupa penanaman modal usaha di Provinsi Kalimantan Selatan sudah mulai merata di setiap kabupaten/kota meskipun masih terdapat beberapa kabupaten yang belum diminati investor secara umum. Berikut ini adalah data investasi daerah menurut kabupaten dan kota tahun 2022.

**Tabel 2.111** Jumlah Proyek, Rencana, dan Realisasi Investasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2022 PMA dan PMDN

Kab/Kota	PMA			PMDN		Total	
	Proyek	S\$ Ribu	Juta	Proyek	Juta	Proyek	Juta
Kab. Tabalong	57	551 446,16	38428,3	153	149686,7	210	188115,00
Kab. Balangan	38	553 228,10	38587,3	180	1683025,6	218	1721612,90
Kab. Barito Kuala	23	132 228,10	17694,4	428	306682,2	451	324376,60
Kab. Banjar	30	142 393,64	9922,9	78	457921,4	108	467844,30



Kab/Kota	PMA			PMDN		Total	
	Proyek	S\$ Ribu	Juta	Proyek	Juta	Proyek	Juta
Kab.Tanah Laut	10	87 005,50	6063,1	108	692282,4	118	698345,50
Kab.Hulu Sungai Selatan	-	-	-	28	198101,8	28	198101,80
Kota Banjarmasin	4	232,48	16,2	112	48873,9	116	48890,10
Kab.Tanah Bumbu	-	-	-	57	3666,5	57	3666,50
Kab. Tapin	22	207 086,31	14431,1	291	2997098,5	313	3011529,60
Kota Banjarbaru	51	808 487,68	56340,6	301	2222906,4	352	2279247,00
Kab.Kotabaru	17	253 914,66	17694,4	163	149686,7	180	167381,10
Kab.Hulu Sungai Tengah	35	70 530,28	4915	577	2040513,1	612	2045428,10
Kab. Hulu Sungai Utara	42	178 667,58	12450,7	301	467263	343	479713,70
TOTAL	329	2 985 720,20	208064,1	2777	12310392	3106	12518456,10

Sumber: BPS. Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka. 2023

### 2.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Kalimantan Selatan Terus Mantapkan Persiapan Atlet Menuju PON Papua Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat terus memantapkan persiapan para atlet yang akan dikirim untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua.

Selain terus menggenjot latihan para atlet dari berbagai cabang olahraga. Pemprov Kalimantan Selatan juga tengah menyiapkan alat-alat pertandingan yang akan digunakan atlet saat melakoni ajang olahraga bergengsi nasional tersebut. dan diharapkan agar Kalimantan Selatan Bisa meraih banyak gelar untuk mengharumkan nama baik Kalimantan Selatan di kanca level Nasional nantinya.

### 2.3.2.13 Statistik

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. menggambarkan bahwa peran statistik sangat penting dalam perencanaan. pelaksanaan. pemantauan dan evaluasi pembangunan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Data yang tepat akan sangat membantu dalam proses perencanaan pembangunan. Pada undang-undang ini juga dijelaskan bahwa tugas penyelenggaraan statistic dilakukan oleh Badan Pusat Statistik khususnya terkait dengan data dasar pembangunan.



Sementara dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 mendelegasikan data statistik kepada Pemerintah daerah. khususnya data Sektoral. Yang dimaksud dengan data sektoral adalah data yang diproduksi oleh pengampu urusan dan akan dimanfaatkan secara sektoral pula. sedangkan data dasar selain bersifat sektoral juga bersifat non sektoral. sehingga dengan demikian pemerintah daerah berkewajiban membangun data sectoral sesuai dengan kewenangan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014.

#### **2.3.2.14 Persandian**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. urusan persandian merupakan urusan pemerintah daerah wajib non pelayanan dasar. Artinya pemerintah provinsi memiliki kewajiban menyelenggarakan urusan ini sesuai dengan kewenangan. Salah satu kewenangan adalah pengamanan informasi pemerintah daerah. terlebih pada saat ini sistem informasi pemerintah daerah sudah bersifat paperless atau digital dan online yang dengan mudah diakses oleh siapa saja yang menguasai teknologi informasi.

Berdasarkan arahan Kepala Lembaga Sandi Negara (LSN) yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017. bahwa penyelenggaraan persandian merupakan penjabaran atas pelaksanaan kebijakan. program dan kegiatan di bidang persandian yang meliputi perencanaan. pelaksanaan. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. pembiayaan dan pembinaan serta pengawasan. Kalimantan Selatan dalam melaksanakan urusan persandian dikaitkan dengan penyelenggaraan komunikasi dan informasi daerah yang berkaitan dengan aplikasi informasi yang dikembangkan.

#### **2.3.2.15 Kebudayaan**

Dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kebudayaan harus dikembangkan kelembagaan kebudayaan sebagai pilar kebudayaan. Kelembagaan ini terkait dengan keberadaan unsur budaya yang ingin dikembangkan di Kalimantan Selatan melalui pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan kebudayaan lokal. Tujuan dari pembinaan ini adalah dalam rangka mengawal kebudayaan lokal dalam konstelasi kebudayaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah. Seni dan budaya turut menghiasi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Dari seni dan budaya tersebut berkembang nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat menangkal pengaruh buruk dari kebebasan yang pesat arus informasi yang global. Oleh karena itu pelestarian budaya serta nilai-



nilai luhur yang tercantum di dalamnya dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia Kalimantan Selatan.

### 2.3.2.16 Perpustakaan dan Kearsipan

#### A. Perpustakaan

Masih rendahnya minat baca masyarakat Kalimantan Selatan memerlukan upaya keras agar masyarakat memiliki daya saing sebagai tenaga kerja. Untuk mendorong minat baca diperlukan berbagai fasilitasi baik secara persuasif maupun atraktif kepada semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menginisiasi pembuatan aplikasi iKalsel pada tahun 2018 yang bertujuan untuk mendukung transformasi digital perpustakaan.

**Tabel 2.112** Berikut disajikan data terkait Indeks pembangunan literasi masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022	
	KALSEL	NASIONAL	KALSEL	NASIONAL
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	60,85	59,52	64,95	63,9

#### B. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di Kalimantan Selatan dikembangkan berdasarkan klasifikasi arsip. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan pengelolaan kearsipan, baik dari segi tenaga maupun teknologi peralatannya. Cakupan pelayanan kearsipan di lingkup instansi pemerintah dari tahun 2018 ke 2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Berikut merupakan capaian cakupan pelayanan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2016-2020.

**Tabel 2.113** Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Peningkatan Buku yang dipinjam	%	50,10	51,49	48,04	60.85	64.95
2	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan	%	24,81	29,51	10,25	58.13	75.71
3	Persentase SKPD yang mengelola Arsip berbasisi TIK	%	50	63,46	80,77	74,40	75.65
4	Jumlah Inovasi yang dicanangkan					1	1

Sumber: Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan. 2023



## 2.3.3 Layanan Urusan Pilihan

### 2.3.3.1 Pertanian

- A. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi pertanian yang sangat besar sebagai modal dasar pergerakan roda perekonomian daerah. Potensi inilah yang menjadikan pertanian menjadi salah satu sektor dominan dalam pembentukan struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan dengan kontribusi PDRB 13,93% terhadap perekonomian daerah.
- B. Perlu digaris bawahi bahwa sektor pertanian memiliki keunggulan dalam mewujudkan sustainability development karena sektor tersebut merupakan sektor yang menggali potensi sumber daya alam terbarukan. Meskipun sekarang pertambangan dan penggalian mendominasi struktur perekonomian. namun sektor pertanian juga memiliki kekuatan yang tidak kalah besarnya dengan sektor pertambangan dan penggalian sehingga pergeseran sektor ekonomi dapat dilaksanakan dengan berkelanjutan.
- C. Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi terus meningkat seiring waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bidang pertanian mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor Pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar kedua yaitu 11,40% untuk Tahun 2022 setelah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 32,05% dan penyumbangan ketiga yaitu industri pengolahan yaitu 11,39% terhadap PDRB Kalimantan Selatan. Namun kondisi ini bebanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan petani.
- D. Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Luas Baku Sawah untuk Tahun 2019 seluas 291.145 hektar. Namun dalam pengelolaannya, petani memiliki tantangan dan hambatan tersendiri. Hal ini menjadi fokus utama dan terminologi melalui bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan kelembagaan ekonomi petani, efesensi usaha dan meningkatkan posisi tawar petani dari sub sektor hulu ke hilir.
- E. Salah satu konsep dan model pengembangan sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pengembangan *Food Estate* berbasis korporasi petani yang merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi melalui kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum baik itu berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. *Food Estate* sendiri menjadi salah satu program strategis pembangunan



pertanian nasional yang merupakan solusi atau upaya menuju kedaulatan dan kemandirian pangan, hal tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan impor sehingga ekonomi dapat tumbuh berkualitas dan masyarakat pertanian meningkat kesejahteraannya. Sejalan hal tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai provinsi penyangga pangan dan pertanian Ibu Kota Negara baru melalui pengembangan *food estate* berbasis korporasi petani sesuai model karakteristik daerahnya dengan mengangkat potensi sumber daya lokal dan unggul dalam rangka transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor pertanian.

## A. Sektor Pertanian

### i. Sub sektor Tanaman Pangan

Pertanian tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh tanaman padi baik ladang maupun sawah yang memiliki produksi mencapai 873.130 ton dengan produktivitas 38,72 kuintal/ha namun jika dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah produktivitasnya menurun sebesar 1,25 kuintal/ha. Rata-rata pertanian tanaman pangan ditahun 2022 mengalami jumlah penurunan produktivitasnya. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Tabel di bawah:

**Tabel 2.114** Luas Panen, Produksi, serta Produktivitas Padi dan Palawija Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2020-2022

Jenis Tanaman	2020			2021			2022		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)
Padi (sawah & ladang)	289.836	1.150.307	39,69	254.264	1.016.314	39,97	216.022	833.931	38,60
Jagung	61.474	337.493	54,90	44.868	264.168	58,88	25.123	149.432	58,88
Kedelai	1.763	2.285	13,02	487	852	17,5	6.963	11.902	17,50
Kacang Tanah	3.006	3.512	11,68	2.556	3.258	12,74	1.570	1.974	12,74
Kacang hijau	303	324	10,69	125	147	11,77	65	80	11,77
Ubi kayu	1.686	53.642	318,20	1.351	45.506	336,96	1.102	37.010	336,96
Ubi jalar	575	8.987	156,22	608	12.532	206,16	354	6.035	206,16

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalimantan Selatan. 2022



**Tabel 2.115** Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan

No	Uraian	Target (Jlh)	Capaian Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	PPH Tingkat Ketersediaan (Skor)	84,5	81,28	86,03	77,54	72,19	79,68	67,56

**Tabel 2.116** Skor Minimal Cadangan Pangan Pemerintah CPP Provinsi

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Stok CPP Provinsi						
	Beras (ton)	89,54	206,54	220,76	435,3	386,8	667,12

**Tabel 2.117** Skor Pola Pangan Tingkat Konsumsi

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	PPH Konsumsi	82,6	86,5	85,1	86,3	85,9	87,8

## ii. Sub Sektor Hortikultura

Pada sub sektor hortikultura, terdapat dua komoditas besar yakni komoditas buah-buahan dan sayuran. Pada komoditas buah-buahan prioritas adalah tanaman jeruk siam dengan produksi 177.716 ton; pisang dengan produksi sebanyak 109.558 ton; durian dengan produksi sebanyak 18.708 ton; dan nanas sebanyak 14.914 ton untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Tabel di bawah:

**Tabel 2.118** Produksi Delapan Komoditas Buah-buahan Utama di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2021 – 2022

Jenis Tanaman	2021			2022		
	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Jeruk siam	3.688	113.194	30,69	10.616	177.716	16,74
Pisang	1.198	65.500	13,58	3.909	109.558	28,03
Durian	2.122	28.825	13,58	2.937	18.708	6,37
Nanas	119,87	14.307	119,36	218,00	14.914	68,41

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalimantan Selatan 2022



Pada komoditas sayuran utama pada tahun 2022 yaitu bawang merah dengan produksi sebanyak 194 ton; Cabe Besar tahun 2022 dengan produksi 8.021 ton dan Cabe Rawit dengan Produksi 10.203 ton. dan petai dengan produksi 3.529 ton, untuk 4 (empat) komoditas tersebut diatas ada 3 (tiga) komoditas yang mengalami penurunan produksi jika dibandingkan dengan hasil produksi ditahun 2021 yakni komoditas bawang merah, cabe besar, dan cabe rawit. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut;

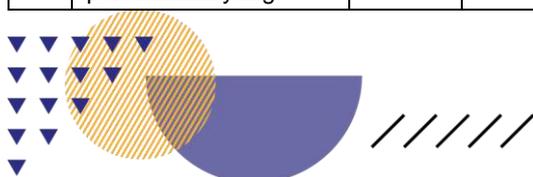
**Tabel 2.119** Produksi Komoditas Sayuran Utama di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2021 - 2022

Jenis Tanaman	2021			2022		
	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Bawang Merah	73	389	5,33	38	194	5,13
Cabe Besar	1.199	8.977	7,49	1.155	8.021	6,94
Cabe Rawit	2.070	11.758	5,68	2.219	10.203	4,60
Petai	592,94	3.294	5,56	921,62	3.529	3,83

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan 2022

**Tabel 2.120** Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018 - 2022 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022 (data Tw. III)
1	Beras (SIMTP)	Ton	1.597.646	1.454.026	1.372.639	1.224.454	1.081.885
2	Beras (KSA)	Ton	781358	790555	677105	601.330	516.612
3	LPE Pertanian Tanaman Pangan		2,08	5,99	3,25	-2,56	-2,11
4	Persentase Peningkatan Produksi Produktivitas Tanaman Pangan					0,68	5,13
5	Padi		-4,96	-6,39	-0,32	0,88	0,86
6	Jagung		-11,44	27,88	-14,49	0,78	0,57
7	Kedelai		-2,86	-5,09	-1,29	0,93	0,61
8	Persentase Peningkatan Produksi Produktivitas Hortikultura					0,37	13,97
9	Bawang Merah		-22,18	17,12	-14,65	-6,58	-19,10
10	Cabe		6,67	10,18	42,54	2,24	-3,75
11	Jeruk		12,07	-3,98	6,69	-14,63	-14,86
12	Persentase luasan pertanaman yang	%	N/A	N/A	N/A	2,5	2,17



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022 (data Tw. III)
	dapat dikendalikan akibat bencana alam						
13	Persentase Kelembagaan Penyuluhan yang Naik Kelas	%	N/A	N/A	N/A	3,48	3,6
14	Persentase SDM Pertanian yang berkualitas	%	N/A	N/A	N/A	1,36	1,38
15	Persentase Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian yang Diterapkan Oleh Petani	%	N/A	N/A	N/A	18,92	20,02

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Prov. Kalimantan Selatan 2022

### 2.3.3.2 Perkebunan

Perkebunan di Kalimantan Selatan meliputi perkebunan rakyat, perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta dengan luas seluruhnya meningkat dari 757.081 pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2022 dengan luas 756.827 hektar dengan rincian sebagaimana Tabel 2.121.

**Tabel 2.121** Luas Perkebunan dan Produksi Perkebunan berdasarkan Jenis Perkebunan di Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022

Jenis Perkebunan	Luas Tanaman Perkebunan		Produksi Tanaman Perkebunan Ton	
	2021	2022	2021	2022
Perkebunan Rakyat	410.423	410.169	478.918	476.366
Perkebunan Besar Negara (PTP)	19.270	19.270	26.670	26.670
Perkebunan Besar Swasta (PBS)	327.388	327.388	886.857	886.857
<b>JUMLAH</b>	<b>757.081</b>	<b>756.827</b>	<b>1.392.445</b>	<b>1.389.893</b>

Sumber: Dinas Perkebunan Dan Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2022

Pada sub sektor perkebunan dominasi tanaman kelapa sawit pada tahun 2022 masih tinggi yakni sebesar 1.148.790 ton mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2021 sebesar 1.145.590 ton; tanaman karet untuk tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 4.978 ton jika dibandingkan dengan tahun 2021; tanaman kelapa untuk tahun 2022 mengalami penurunan produksi sebanyak 631 ton jika dibandingkan dengan tahun 2021, dapat dilihat lebih jelasnya pada Tabel berikut.



**Tabel 2.122** Produksi Lima Komoditas Tertinggi Komoditas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2021 - 2022

Jenis Tanaman	2021			2022		
	Luas Tanam	Produksi	Produktivitas	Luas Tanam	Produksi	Produktivitas
	Ha	Ton	Ton/Ha	Ha	Ton	Ton/Ha
Kelapa Sawit	427.616	1.145.590	3.04	429.183	1.148.790	3.03
Karet	271.969	212.956	1.05	270.897	207.978	1.07
Kelapa	38.234	23.448	0.84	37.862	22.817	0.82
Kopi	2.685	1.021	0.58	2.521	1.043	0.62
Lada	487	147	0.49	436	137	0.50
Kemiri	3.430	1.607	0.54	3.448	1.653	0.56
Kayu Manis	2.802	2.804	1.44	2.816	2.856	1.45
Aren	2.333	1.678	1.18	2.301	1.613	1.14
Sagu/Rumbia	4.607	2.548	1.33	4.506	2.339	1.25
Purun	1.599	382	0.55	1.599	382	0.55
Kakao	422	58	0.45	363	65	0.49
Cengkeh	363	86	0.34	362	101	0.40

Sumber: Dinas Perkebunan Dan Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2022

Kebijakan nasional pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tanggal 22 Nopember 2019 berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2019-2024. Peraturan itu dimandatkan kepada 14 kementerian/lembaga (K/L) dan 26 provinsi penghasil sawit di seluruh Indonesia. Lima sasaran RAN KSB yakni: 1) peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, 2) penyelesaian status dan legalisasi lahan, 3) pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, 4) meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, dan 5) mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Inpres ini menjadi momentum penting untuk perbaikan tata kelola sawit oleh semua pihak. Inpres ini memberikan mandat di antaranya: penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa, serta percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Pemprov Kalsel telah menyusun RAD-KSB dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang RAD-KSB Provinsi Kalimantan Selatan 2022-2024 pada tahun ini sebagai upaya mewujudkan visi dan misi menjadikan Kalsel MAJU (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan misi nomor



dua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. penyusunan RAD-KSB Provinsi Kalsel menjadi prioritas Pemprov Kalsel sebagai salah satu provinsi penghasil sawit dengan luasan sebesar 497.261 hektare.

“Dengan luas tersebut, saat ini diusahakan oleh 89 perusahaan perkebunan besar swasta/negara serta perkebunan rakyat dengan luasan mencapai 106.000 hektare, di Kalsel terdapat 45 pabrik kelapa sawit dengan produksi CPO mencapai 1.561.147 ton per tahun, industri hilir berupa dua pabrik minyak goreng dengan kapasitas produksi 5.500 ton per hari dan dua pabrik biodisel dengan kapasitas produksi 2.500 ton per hari,” Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalsel dilakukan dengan mengimplementasikan regulasi serta menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan melakukan peningkatan industri hilir kelapa sawit agar tidak terbatas pada produk CPO.

Salah satunya memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha disektor perkelapa sawitan dengan meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan, dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan badan usaha dan meningkatkan kemitraan lainnya melalui integrasi ternak sapi potong dengan kelapa sawit guna mendukung swasembada sapi potong melalui SISKA dan SISKA KU INTIP

Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini telah menjadi penyokong PDRB utama dan diharapkan berkelanjutan. Aspek ekonomi yang telah dibangun perlu diarahkan untuk ikut serta dalam membangun perekonomian di Kalimantan Selatan. Sesuai amanat Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2019-2024 dan diturunkan melalui Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan atas Perda No.2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan akan menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Tahun 2022-2024.

### 2.3.3.3 **Peternakan**

Sub sektor peternakan masih menjadi sektor penting dalam peningkatan perekonomian daerah. Peran strategis sub sektor peternakan baik secara ekonomis maupun ekologis ini digambarkan melalui kontribusinya dalam



penyumbang PDRB yang termasuk dalam rumpun pertanian. Untuk sub sektor peternakan berdasarkan undang-undang No 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang semua undang-undang tersebut juga berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat peternak yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak. Pelaksanaan Program peternakan dilakukan dengan pendekatan ekonomis, pendekatan agribisnis dan pendekatan teknis. Dengan pendekatan ekonomis yaitu perbaikan tataniaga ternak dan produk ternak, mendorong insentif peternakan dan pemberdayaan peternak.

Belum optimalnya peningkatan produksi dan pengembangan hilirisasi potensi unggulan sub sektor Peternakan, yang memiliki potensi yang begitu besar sebagai salah satu leading sektor yang menjadi penggerak utama perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, perlunya upaya sejalan dengan arahan daerah yakni menitikberatkan pembangunan industri berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas (termasuk sub sektor peternakan).

Dalam rangka mewujudkan agenda besar tersebut, maka Provinsi Kalimantan Selatan perlu menyusun pola/rancangan bangun sebagai haluan dalam pembangunan sub sektor peternakan dari hulu sampai hilir dengan komoditas ternak yang diunggulkan adalah kerbau, itik alabio dan sapi. Dalam hal ini dikembangkan Food Estate untuk komoditas ternak berbasis korporasi peternak yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam rangka sebagai daerah penyangga pangan untuk ibu kota negara yang baru melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Jenis ternak yang dominan, baik yang dipelihara, dipotong, maupun diproduksi daging adalah sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, dan itik. Informasi perkembangan jumlah populasi ternak besar dan kecil di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.123** Jumlah Ternak Besar, Ternak Kecil, dan Unggas (Ekor) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Ternak Besar	Jumlah Ternak Kecil	Jumlah Unggas
2018	197.456	89.170	119.247.723
2019	206.732	85.555	126.334.793
2020	167.801	85.796	127.703.306



Tahun	Jumlah Ternak Besar	Jumlah Ternak Kecil	Jumlah Unggas
2021	185.480	87.710	102.931.355
2022	187.181	75.024	126.515.989

Sumber: Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2022

**Tabel 2.124** Jumlah Produksi Telur (Kg) di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2018-2022

Tahun	Telur Itik	Telur Ayam Buras	Telur Ayam Ras
2018	29.245.681	7.924.743	85.061.393
2019	33.128.070	8.230.455	60.910.991
2020	34.941.465	9.257.095	69.719.607
2021	32.772.575	9.782.952	81.556.413
2022	31.581.744	7.969.190	26.850.963

Sumber: Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2022

**Tabel 2.125** Capaian Kinerja Urusan Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Nilai Tukar Pekebun	%	135.82	109.14
2	Angka Produksi Karet	%	101.29	101.2
3	Angka Produksi Karet	Ton Sheet	204,263.61	198.338,40 (**)
4	Angka Produksi Kelapa Sawit	Ton CPO	1,119,408.52	1.117.675,35 (**)
5	Angka Produksi Daging	Ton	124,466.22	127.958,48 (**)
6	Produktivitas Tanaman Perkebunan per Hektar Per Tahun (Karet)	Kg/Ha	65.48	72.86
7	Luas Areal Pengendalian Penanggulangan Bencana	Ha	0	224
8	Prosentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan	%	100	100
9	Prosentase Peningkatan Produksi Daging	%	7	2.8
10	Prosentase Penurunan Kejadian Jumlah KAsus Penyakit Hewan Menular	%	70	80
11	Prosentase Unit Usaha yang Menghasilkan Produk ASUH	%	100	100
12	Prosentase Peningkatan Penguatan Kelembagaan Perkebunan dan Peternakan	%	8	10.83



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
13	Prosentase Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perkebunan dan Peternakan	%	90.85	100
14	Prosentase Penambahan Kemitraan Pemasaran Tanaman Perkebunan (Kelompok)	%	17.76	27.93
15	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	%	0	15
16	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan	%	0	49.42

Sumber : Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2022

### 2.3.3.4 Kelautan dan Perikanan

Secara umum sumber perikanan bisa dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat bisa dibedakan menjadi dua yaitu budidaya perikanan dan perairan umum. Perikanan darat tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan selatan. Untuk volume produksi perairan umum daratan di Kalimantan selatan tahun 2022 sebanyak 61,87 ribu ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 2,08 triliun. Pada tahun 2022, perikanan laut di Kalimantan selatan hanya terdapat 6 kabupaten/kota yaitu daerah yang berada di sepanjang pesisir pantai kabupaten/kota tersebut adalah Tanah Laut, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Banjarmasin. Tahun 2022 produksi perikanan laut tercatat sebanyak 140,72 ribu ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 4,68 Triliun.

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) tahun 2022 mengalami defisit, yaitu berada pada angka 98,27. Nilai ekspor perikanan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 25,90% dibanding capaian tahun 2019. Jika dilihat dari produksinya, baik jumlah rumah tangga perikanan, produksi maupun nilainya juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Capaian tertinggi berada pada tahun 2022 dimana jumlah rumah tangga perikanan mencapai 163.316 rumah tangga dengan produksi sebesar 358.261,39\*) ton dan nilai produksinya mencapai Rp 5.319.832.257.750



**Tabel 2.126** Perkembangan Jumlah Rumah Tangga. Produksi. dan Nilai Produksi Sub Sektor Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2010-2022

Tahun	Jumlah Ruta Unit	Produksi (Ton)	Nilai produksi (Rp)
2010	56.744	242.126,30	4.038.067.330
2011	60.919	247.741,10	4.581.337.731
2012	67.095	284.300,70	5.578.497.765
2013	67.191	339.437,28	6.376.406.906
2014	67.487	364.794,07	6.972.197.094
2015	67.980	368.451,70	7.954.889.861
2016	60.273	408.444,50	5.544.738.736
2017	66.435	412.326,10	5.571.503.232
2018	66.318	437.278,10	5.719.062.120
2019	66.532	434.765,00	5.870.300.000
2020 *)	127,799	451.598,51	6.856.223.371
2021	78,769	344.522,82	6.538.189.173
2022	163.316	358.261,39*)	5.319.832.257.750

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kalimantan Selatan 2022

**Tabel 2.127** Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Indek	7.93	5.01	4.30	3,48	5,59**)
2	Ikan (ton)	Ton	428.618.00	434.765.48	451.598.51	344522,82	358261,39*)
3	LPE Perikanan	Indek	7.93	5.01	4.30	2,04	0,11**)
4	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Ton	177852.20	178277.36	185179.81	148814,63	157009,39*)



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
5	Angka konsumsi Ikan masyarakat	Kg/Kapita/Thn	51.65	57.99	60.24	63,74	64,11*)
6	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Ton	250765.80	256488.12	266418.70	195708,19	201252*)
7	Persentase Pelaku Usaha yang Patuh		95.00	96.00	100.00	100	100
8	Jumlah Kasus Ilegal Fishing yang terjadi (usulan JFP tertangani)	Kasus	11.00	10.00	9.00	18	9

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kalimantan Selatan 2022

### 2.3.3.5 Kehutanan

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dimulai pada tahun 1967 yang didorong dengan diterbitkannya undang-undang tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), telah menempatkan sektor kehutanan di Kalimantan Selatan sebagai penggerak ekonomi nasional dan daerah. Pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut lebih banyak melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti IUPHHK HA atau lebih familiar dengan istilah HPH dan IUPHHK HT atau lebih familiar dengan HTI, hal ini sudah berlangsung sejak lama dimana masyarakat sekitar hutan hanya menjadi penonton saja. Sampai Tahun 2021 pengelolaan hutan oleh masyarakat sebagai salah satu potensi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, hanya seluas 58,021 ha melalui 144 pengelolaan/izin Perhutanan Sosial (PS) dari luas kawasan hutan Kalimantan Selatan 1.714.944,40 Ha Pemanfaatan hutan yang kurang mengikutsertakan peran serta masyarakat sekitar hutan sebagai pengelola berdampak pada banyaknya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan para pengusaha dan antara masyarakat dengan pemerintah yang bertanggung jawab mengelola kawasan hutan yakni instansi kehutanan baik pusat maupun daerah yang disebabkan oleh kecemburuan sosial. Kedepannya hal ini dapat diperbaiki dengan melalui pola Perhutanan Sosial baik itu dalam bentuk HKM, HR, HTR dan HD, dimana masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan pemanfaatan kawasan hutan untuk kesejahteraan mereka namun fungsi kawasan hutan masih



tetap terjaga dengan menghindari kerusakan yang dapat berdampak pada turunnya kualitas lingkungan kawasan hutan. Akar masalah yang menyebabkan masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, antara lain karena terbatasnya sumber daya manusia dan modal masyarakat dalam memanfaatkan dan mengembangkan usaha di sektor kehutanan secara lestari dan berkelanjutan.

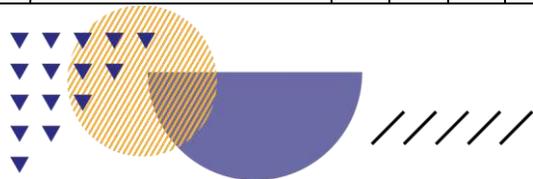


**Tabel 2.128** Rekapitulasi Produksi Kayu Bulat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

NO.	NAMA PERUSAHAAN	BULAN												TOTAL		K U M U L A T I F										
		JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL			AGUS		SEPT		OKT		NOP		DES	
		Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam		Tanaman	Alam								
(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	
I	IUPHHK-HA (HPH)																									
A.	Kabupaten Tabalong																									
1	PT. Aya Yayang Indonesia	-	5.511,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT. Hasnur Jaya Utama	-	238,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Kabupaten Kotabaru																									
1	PT. Inhutani II - HA (Pulau Laut)	-	-	-	-	-	-	-	20,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Kabupaten Tanah Bumbu																									
1	PT. Hutan Rindang Banua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	IUPHHK-TANAMAN (HTI/HTR)																									



NO.	NAMA PERUSAHAAN	BULAN																								TOTAL			K U M U L A S I
		JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGUS		SEPT		OKT		NOP		DES		Tanaman	Alam	Jumlah	
		Tanaman	Alam																										
<b>A.</b>	<b>Kabupaten Tabalong</b>																												
1	PT. Aya Yayang Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT. Elbana Abadi Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PT. Hasnur Jaya Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Kabupaten Kotabaru</b>																												
1	PT. Inhutani II (Pulau Laut)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT. Inhutani II Unit Senakin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C.</b>	<b>Kabupaten Tanah Bumbu</b>																												
1	PT. Inni Joa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT. Kirana Chatulistiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PT. Batulicin Bumi Bersujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PT. Jhonlin Agro Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PT. Hutan Rindang Banua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kelompok Tani Kepayang Karya Yaqin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Koperasi Produsen Kusan Raya Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D.</b>	<b>Kabupaten Tanah Laut</b>																												
1	PT. Inhutani III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>E.</b>	<b>Kabupaten Tapin</b>																												
1	PT. Dwima Intiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F.</b>	<b>Kabupaten Banjar</b>																												
1	PT. Prima Multibuana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



NO.	NAMA PERUSAHAAN	BULAN																				TOTAL		K U M U L A S I					
		JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGUS		SEPT		OKT		NOP			DES		Tanaman	Alam	Jumlah
		Tanaman	Alam		(m3)	(m3)																							
2	Koperasi Hutan Masyarakat Sejahtera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>IPK/IPPKH/HGU/PERORANGAN</b>																												
<b>A.</b>	<b>Kabupaten Tabalong</b>																												
1	PT. Adaro Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT. Adaro SK.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PT. Eternal Ricwhay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Kabupaten Kotabaru</b>																												
1	PT. Kalimantan Energi Lestari	-	-	-	-	111,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,02	111,02	-
2	PT. Banjar Asri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	UD. Sarah Mulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PHAT Abdul Basid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PHAT BAIHAQI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PT. Perkasa Bumi Sakti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PT. Perkasa Bumi Sakti (HGU 242)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,99	-	-	-	-	-	-	-	-	172,99	172,99	-



NO.	NAMA PERUSAHAAN	BULAN																TOTAL		K U M U L A S I										
		JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGUS		SEPT			OKT		NOP		DES		Tanaman	Alam	Jumlah	
		Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam		Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	(m3)	(m3)				(m3)
8	PT. SILO (SK.652/2013)															183,78											183,78	183,78		
9	PT. SILO (SK.626/2018)															404,43												404,43	404,43	
10	PT. Sumber Daya Energi	-	-	-	261,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527,07	527,07	
11	PT. Pelsart Tambang Kencana (Eksplorasi SK. 146/21)																	98,19									98,19	98,19		
<b>C.</b>	<b>Kabupaten Tanah Bumbu</b>																													
1	CV. Hidup Hidayah Ilahi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	PT. Tunas Inti Abadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	PT. Borneo Indobara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	PT. Mitra Setia Tanah Bumbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	IPPKH PT. Borneo Indobara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	IPPKH PT. Borneo Indobara (SK No. 38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	IPPKH PT. Borneo Indobara (SK No. 64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



NO.	NAMA PERUSAHAAN	BULAN																TOTAL		K U M U L A T I V										
		JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGUS		SEPT			OKT		NOP		DES					
		Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam		Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Jumlah		
(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)					
8	PPKH PT. Borneo Indobara (SK No. 346)						516,87									832,15											2.869,14	2.869,14		
9	PPKH PT. Borneo Indobara (SK No. 345)																113,10		156,89			159,92				186,51		616,42	616,42	
<b>D.</b>	<b>Kabupaten Tanah Laut</b>																													
1	CV. Faris Motor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	PT. Anugerah Lumbang Energi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	PT. Wira Bara Sakti (SK.573-2018)																										135,79	135,79		
<b>E.</b>	<b>Kabupaten Tapin</b>																													
1	PT. Binuang Mitra Bersama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	PT. Bhumi Rantau Energi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,74	-	-	-	-	-	-	-	-	11,74	11,74		
3	IPPKH PT. Bhumi Rantau Energi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,91	304,91		







**Tabel 2.129** Daftar Rekapitulasi Laporan Bulanan Produksi IPHHK-IPHHK Di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

No	Jenis Produksi Kayu Olahan	Industri dengan Kapasitas Produksi > 6.000 m3/thn	Industri dengan Kapasitas Produksi < 6.000 m3/thn	Jumlah
1	Kayu Lapis dan atau Laminated Veneer Lumber	317.124,78	2.485,00	319.609,78
2	Veneer	50.171,31	139,63	50.310,94
3	Kayu Gergajian	1.461,96	66.169,12	67.631,08
4	Serpih Kayu	0,00	0,00	0,00
5	Pulp	0,00	0,00	0,00
6	Bare Core /Board	301,17	0,00	301,17
7	Lumber Core	0,00	0,00	0,00
8	Block Board	0,00	0,00	0,00
9	MDF	0,00	0,00	0,00
10	Moulding	1.674,29	0,00	1.674,29
11	Wood Working	0,00	0,00	0,00
12	Flooring / Parquet Flooring	0,00	0,00	0,00
13	Mebel	0,00	0,00	0,00
14	Particle Board	25.091,45	0,00	25.091,45
15	Secondary Process Plywood (Kayu Lapis)	3.940,87	0,00	3.940,87
16	Produk Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>399.765,83</b>	<b>68.793,75</b>	<b>468.559,58</b>

Sumber: Dinas Kehutanan Prov Kalsel, 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

### 2.3.3.6 Energi dan Sumber Daya Alam

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi pertambangan yang didominasi oleh komoditas batubara, dimana sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi PDRB yang signifikan. Perkembangan produksi batubara PKP2B pada tahun 2020 sebesar 84,688,476.23 ton, sedangkan produksi batubara untuk IUP 63,186,892.03 ton.





**Tabel 2.130** Jumlah IUP di Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

No.	Kabupaten	IZIN USAHA PERTAMBANGAN						
		Batubara	Logam	Mineral Bukan Logam	Batuan	IUP PMA/Terbitan Pusat	Jumlah IUP PMDN	Total IUP/Kabupaten
1	Tabalong	17	0	1	9	2	27	29
2	Balangan	10	2	1	4	3	17	20
3	Hulu Sungai Selatan	2	0	0	3	0	5	5
4	Hulu Sungai Tengah	0	0	0	3	0	3	3
5	Tapin	14	1	0	6	0	21	21
6	Banjar	29	0	4	37	1	70	71
7	Barito Kuala	0	0	0	1	0	1	1
8	Tanah Laut	46	6	0	31	0	83	83
9	Tanah Bumbu	57	3	0	9	3	69	72
10	Kotabaru	25	4	9	16	3	54	57
JUMLAH			200	16	15	119	12	350

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2023

Perkembangan fasilitas listrik di Provinsi Kalimantan Selatan cukup signifikan dimana terlihat pada banyaknya pelanggan listrik yang terus mengalami peningkatan. Baik pelanggan rumah tangga, usaha, dan industri, maupun umum terjadi kenaikan yang cukup menjanjikan dimana jumlah pelanggan tahun 2018 sebanyak 1.183.771 pelanggan, dimana pada tahun 2022 jumlah pelanggan menjadi sebanyak 1.337.541 pelanggan. Perkembangan Jumlah Pelanggan listrik Kalimantan Selatan tahun 2018 - 2022 bisa dilihat di tabel di bawah.

**Tabel 2.131** Jumlah Peningkatan Pelanggan Listrik di Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022

Jenis Pelanggan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Tangga [R]	1.086.302	1.142.557	1.192.400	-	1.294.105
Industri [I]	632	651	679	-	779
Bisnis [B]	55.840	57.433	59.733	-	68.688
Umum	-	-	47.298	-	52.940
Sosial [S]	32.617	35.520	-	-	-
Gedung dan kantor	5.439	5.696	-	-	-
Jalan umum	2.941	3.310	-	-	-
Jumlah	1.183.771	1.245.167	1.300.110	-	1.416.062

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2023





Listrik telah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap rumah tangga. Sampai saat ini pasokan listrik didapat dari perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan PLN terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah pelanggan PLN sebanyak 1.416.063 atau naik 3,26 persen dibanding tahun 2021.

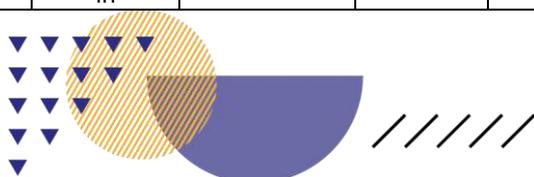
**Tabel 2.132** Jumlah Pelanggan Listrik menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2018 - 2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	73.478	77.326	80.788	85.016	88.727
Kotabaru	50.737	54.867	59.373	63.873	67.521
Banjar	119.522	129.321	132.370	147.198	144.500
Barito Kuala	91.570	97.060	101.210	106.879	110.715
Tapin	69.696	73.146	76.381	80.546	83.893
Hulu Sungai Selatan	65.731	69.145	72.022	74.714	77.124
Hulu Sungai Utara	80.949	84.504	87.482	91.459	93.915
Hulu Sungai Tengah	78.301	82.090	84.467	89.018	91.317
Tabalong	64.938	67.999	71.043	74.115	76.407
Tanah Bumbu	123.173	131.817	139.463	147.271	155.706
Balangan	30.485	32.138	33.995	35.739	37.095
Banjarmasin	208.444	215.125	221.301	228.792	235.527
Banjarbaru	126.747	133.762	140.215	146.710	153.615
Kalimantan Selatan	1.183.771	1.248.336	1.300.110	1.371.330	1.416.062

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan dalam Angka 2023

**Tabel 2.133** Rasio Elektrifikasi (RE) Kalimantan Selatan s.d Desember 2022

No	Kab/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah RT	RT Berlistrik PLN	RT Berlistrik Non PLN	Jumlah RT Berlistrik
1	Kotabaru	21	202	90.720	89.522	3.480	93.002
2	Tanah Laut	11	135	102.672	102.672	1.253	103.925
3	Banjar	20	290	170.126	170.126	1.438	171.564
4	Barito Kuala	17	201	103.954	103.954	309	104.263
5	Tapin	12	135	60.138	60.138	454	60.138
6	HSS	11	148	68.224	68.224	154	68.378
7	HST	11	169	85.058	85.058	973	86.031
8	HSU	10	219	79.371	65.488	610	66.098
9	Tabalong	12	131	86.926	86.926	493	87.419
10	Tanah Bumbu	10	149	96.777	96.777	699	97.476
11	Balangan	8	157	36.710	34.618	501	35.119
12	Banjarmasin	5	52	200.413	200.413	-	200.413





No	Kab/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah RT	RT Berlistrik PLN	RT Berlistrik Non PLN	Jumlah RT Berlistrik
13	Banjarbaru	5	20	130.742	130.742	-	130.742
	JUMLAH			1.311.831	1.294.658	10.364	1.304.568
	RE						99,45%

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan 2023

**Tabel 2.134** Capaian Kinerja Urusan ESDM Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

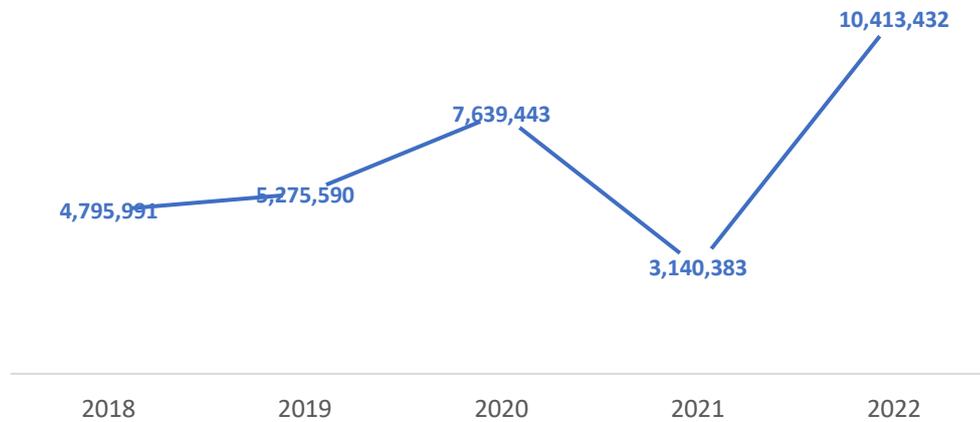
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Elektrifikasi	%	97,36	99,27	99,25	99,35	99,45
2	Rasio Desa Berlistrik	%	97,61	97,4	98,31	98,5	99,00
3	Persentase penurunan muka air tanah dan kualitas air tanah	%	3,32	7,74	16,48	0	0
4	Persentase potensi energi baru terbarukan yang dapat dimanfaatkan	%	83,33	71,4	71,4	0,97	0,97
5	Persentase luas lahan terganggu yang telah direklamasi (IUP)	%	100	44,21	77,11	0,96	0,96
6	Persentase luas lahan terganggu yang telah direvegetasi (IUP)	%	0	20,2	26,76	0	0

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan 2023

### 2.3.3.7 Pariwisata

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi obyek wisata yang layak untuk diperhitungkan sebagai daya tarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Kalimantan Selatan baik domestik maupun mancanegara mencapai 4.795.991 wisatawan dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 10.413.432.





**Gambar 2.40** Kunjungan Wisata di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. Kalimantan Selatan. 2022

**Tabel 2.135** Data Kunjungan Wisnus Wisman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	WISATAWAN NUSANTARA			WISATAWAN MANCANEGARA		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	KOTA BANJARMASIN	299.946	347.222	1.178.056	971	683	2.487
2	KOTA BANJARBARU	32.683	601.727	2.217.478	5.513	2.618	1.666
3	KABUPATEN BANJAR	5.494.048	559.071	2.104.383	260	-	1.063
4	KABUPATEN TAPIN	595.478	508.836	1.727.420	-	-	19
5	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	253.753	69.697	293.234	5	-	613
6	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	76.629	28.451	219.597	4	1	33
7	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	43.821	158.037	103.400	-	-	-
8	KABUPATEN BALANGAN	21.466	64.814	40.127	8	-	20
9	KABUPATEN TABALONG	60.765	-	3.092.902	131	-	44.754
10	KABUPATEN TANAH LAUT	330.241	23.752	567.506	4	-	8
11	KABUPATEN TANAH BUMBU	77.086	157.647	857.429	2	-	289
12	KABUPATEN KOTABARU	421.971	600.708	763.385	83	41	67
13	KABUPATEN BARITO KUALA	5.355	17.079	178.004	21	-	78
	<b>TOTAL</b>	<b>7.713.242</b>	<b>3.137.041</b>	<b>13.342.921</b>	<b>7.002</b>	<b>3.343</b>	<b>51.097</b>

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. Kalimantan Selatan. 2022





**Tabel 2.136** Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan Kunjungan Wisatawan (orang)	Orang	4.795.991	5.275.590	7.639.443	3140.383	10.413.432
2	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	Hari	4	4	3	3	3

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. Kalimantan Selatan. 2023



**Gambar 2.41** Perkembangan Rata-Rata Lama Menginap Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan

### 2.3.3.8 Perdagangan

Nilai ekspor menjadi salah satu pilihan menarik dalam menumbuhkan kembangkan perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus perekonomian nasional. Pada perkembangannya, komoditas produk tambang mendominasi ekspor di Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada tahun 2022 sebesar 11.792.755.235 ton dimana angka tersebut memiliki nilai ekspor sebesar US\$ 1.173.694.168. dan di sektor Kelapa Sawit juga berkontribusi sebesar 170.195.602 ton dimana angka tersebut memiliki nilai US\$ 126.301.388 untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel dibawah;





**Tabel 2.137** Volume dan Nilai Realisasi Ekspor Menurut Komoditas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Komoditas	Volume (Ton)	Nilai (000 US\$)
PRODUK TAMBANG	11.792.755.235	1.173.694.168
PRODUK KELAPA SAWIT	170.195.602	126.301.388
PRODUK KAYU	13.654.408	12.816.388
PRODUK LAINNYA	21.361.116	30.730.106
PRODUK KARET ALAM	6.400.738	8.793.605
PRODUK PERIKANAN	112.130	838.823
PRODUK ROTAN	233	5.604
<b>JUMLAH</b>	<b>12.004.479.462</b>	<b>1.353.180.082</b>

Sumber: BPS. Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka. 2022

**Tabel 2.138** Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	LPE Perdagangan	%	8,26	7,48	7,33	-3,38	7,15
2	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	10,21	10,01	10,60	10,52	9,06
3	Laju Inflasi Harga	%				2,55	6,99
4	Persentase Barang Beredar Yang Sesuai Dengan Ketentuan	%	80	65	81,01	106,00	100,00
5	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%				54,38	81,37

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan 2023

### 2.3.3.9 Industri

Perindustrian di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami perkembangan yang menunjukkan sisi positif dalam membentuk struktur perekonomian wilayah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian makro di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 cukup dominan dimana besarnya mencapai 6,23. Perkembangan sektor dikarenakan sejumlah potensi ekonomi yang berada di wilayah Kalimantan Selatan seperti sumber daya alam yang melimpah. sumber daya manusia. hingga investor yang menanamkan modalnya untuk kepentingan bersama.

Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan di dalam PDRB Kalimantan Selatan dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami fase naik turun dari





4.23 (2018) menjadi 6.23 (2021) dan menurun menjadi 2.56 (2022). untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.139** Perkembangan Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan	4,34	1,45	-3,63	6,23	3,31
Kontribusi terhadap PDRB (ADHB)	14.00	13.64	13.52	13.95	11.39

Sumber: BPS Kalimantan Selatan. 2022

**Tabel 2.140** Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5.12	4.08	-1.81	3.48	5.59
2	LPE Industri	%	4.34	1.45	-3.38	6.23	2,31
3	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	5.71	5.05	5.30	5.30	4.07
4	Persentase Pertumbuhan Sentra-Sentra industri	%	5	5	5	5	5
5	Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri	%	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Perindustrian Prov. Kalimantan Selatan 2023

### 2.3.3.10 Transmigrasi

Melalui program transmigrasi dapat mendukung tujuan pembangunan nasional dan daerah yakni pemerataan jumlah penduduk, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, program transmigrasi berperan dalam mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka melalui pembukaan lapangan kerja baru, yang umumnya pada sektor informal. Kalimantan Selatan memiliki lokasi transmigrasi yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten, yaitu Barito Kuala, Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Tapin, Balangan, dan Tabalong. Sedangkan lokus Prioritas Kawasan Transmigrasi Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan adalah di Kabupaten Barito Kuala, (Nama Kawasan: Cahaya Baru), dan Lokus Kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian, yaitu Kawasan Transmigrasi Gula Habang





(Kabupaten Balangan) dan Kawasan Transmigrasi Sebamban (Kabupaten Tanah Bumbu).

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1 Daya Saing Berdasarkan Pilar IDSD (BRIN)

Setiap wilayah di Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya yang menjadikan setiap daerah dapat berbeda dalam merencanakan pembangunannya. Terlebih lagi dalam hal daya saing daerah, dimana daya saing tersebut merupakan optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah terutama sumber daya baik alam maupun manusianya. Hal tersebut akan menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan tujuan pembangunan daerah sehingga akan tercapai tujuan pembangunan daerah yang hakiki. Terkait dengan aspek daya saing daerah diuraikan tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

Kerangka pengukuran IDSD 2022 mengacu kepada global Competitiveness index (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing seperti pada gambar di bawah ini. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasifikasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai kerangka konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Perincian dimensi dan indikator pembentuk daya saing diuraikan pada penjelasan pilar.

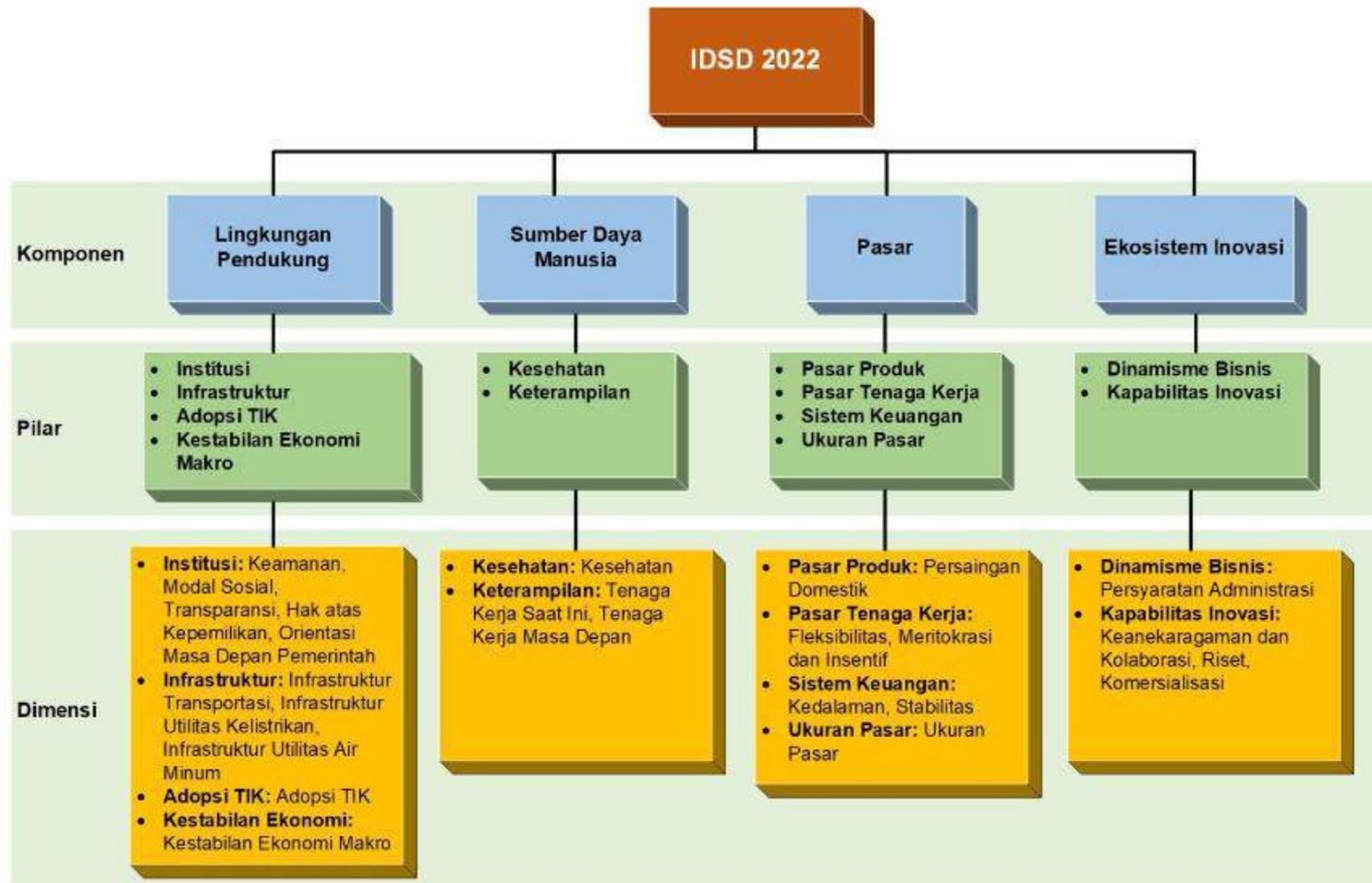
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD 2022 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran global competitiveness index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF), yang disesuaikan dengan





konteks daerah di Indonesia. Dengan kerangka ini, IDSD 2022 selaras dengan GCI sehingga bisa digunakan stakeholder global untuk mengukur GCI bagi Indonesia. Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2022 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.





Sumber: diadopsi dari *Global Competitiveness Index* (WEF, 2019)

Keterangan: Komponen dan dimensi tidak masuk dalam penghitungan indeks dan hanya merupakan pengelompokan yang digunakan untuk tujuan analisis.

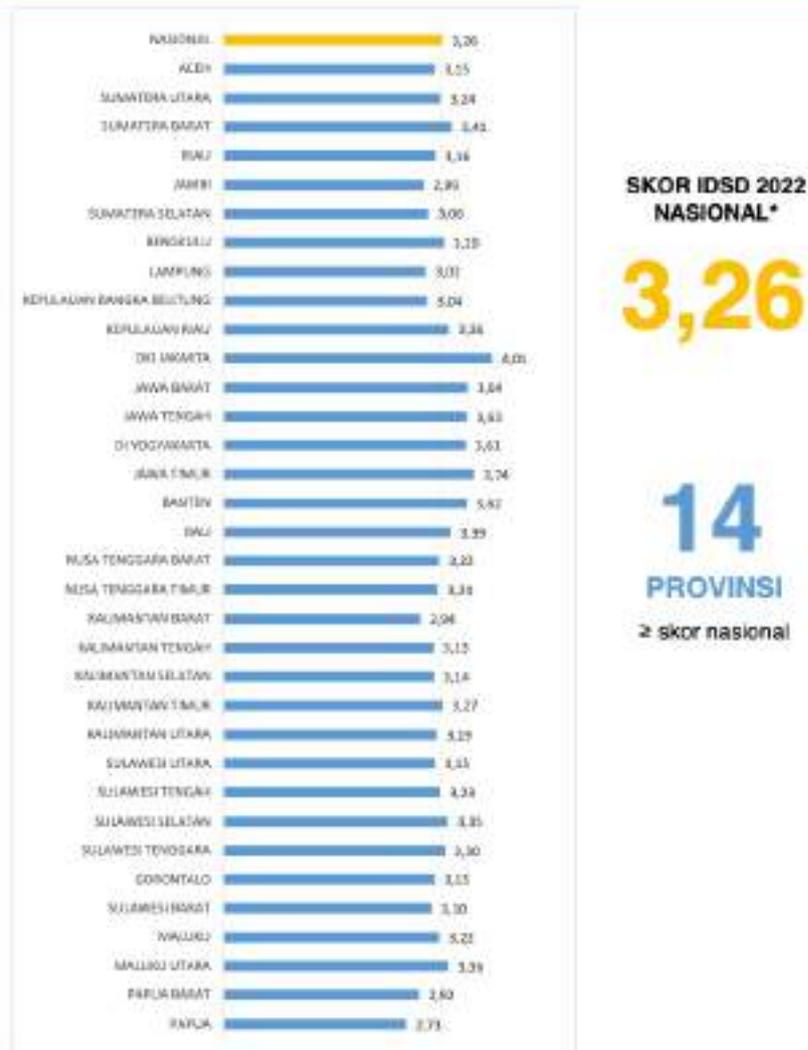
**Gambar 2.42** Kerangka pengukuran IDSD 2022





Skor IDSD > 3,51 masih terpusat di Pulau Jawa. Beberapa provinsi dengan skor 3,00–3,51 tersebar di berbagai pulau.

### SKOR IDSD 2022-PROVINSI



\*J) Skor nasional adalah rata-rata skor IDSD provinsi

Gambar 4.43 SKOR IDSD Nasional Tahun 2022





Sampai dengan tahun 2022 Skor IDSD Nasional adalah sebesar 3,26 dengan posisi skor Provinsi Kalimantan selatan berada dibawah capaian Rata-rata nasional yaitu sebesar 3,14

**Tabel 2.141** Capaian Indikator Pilar IDSD untuk Tahun 2022

NO	PILAR	KALIMANTAN SELATAN	NASIONAL	CAPAIAN
1	Institusi	4,40	4,14	Diatas Nasional
2	Infrastruktur	2,47	2,91	Dibawah Nasional
3	Adopsi TIK	3,97	3,57	Diatas Nasional
4	Stabilitas Ekonomi Makro	3,09	3,05	Diatas Nasional
5	Kesehatan	3,67	3,76	Dibawah Nasional
6	Keterampilan	3,66	3,73	Dibawah Nasional
7	Pasar Produk	2,68	2,68	Sama Dengan Nasional
8	Pasar Tenaga k Kerja	3,38	3,73	Dibawah Nasional
9	Sistem Keuangan	2,44	2,66	Dibawah Nasional
10	Ukuran Pasar	0,73	1,31	Dibawah Nasional
11	Dinamisme Bisnis	5,00	5,00	Sama Dengan Nasional
12	Kapabilitas Inovasi	2,19	2,62	Dibawah Nasional

Sumber: BRIN, 2022



**Gambar 2.44** Capaian Indikator Pilar IDSD untuk Tahun 2022

Berdasarkan data table dan grafik di atas terdapat beberapa komponen atau pilar IDSD yang capaiannya belum berada di atas rata-rata nasional, komponen itu antaralain:





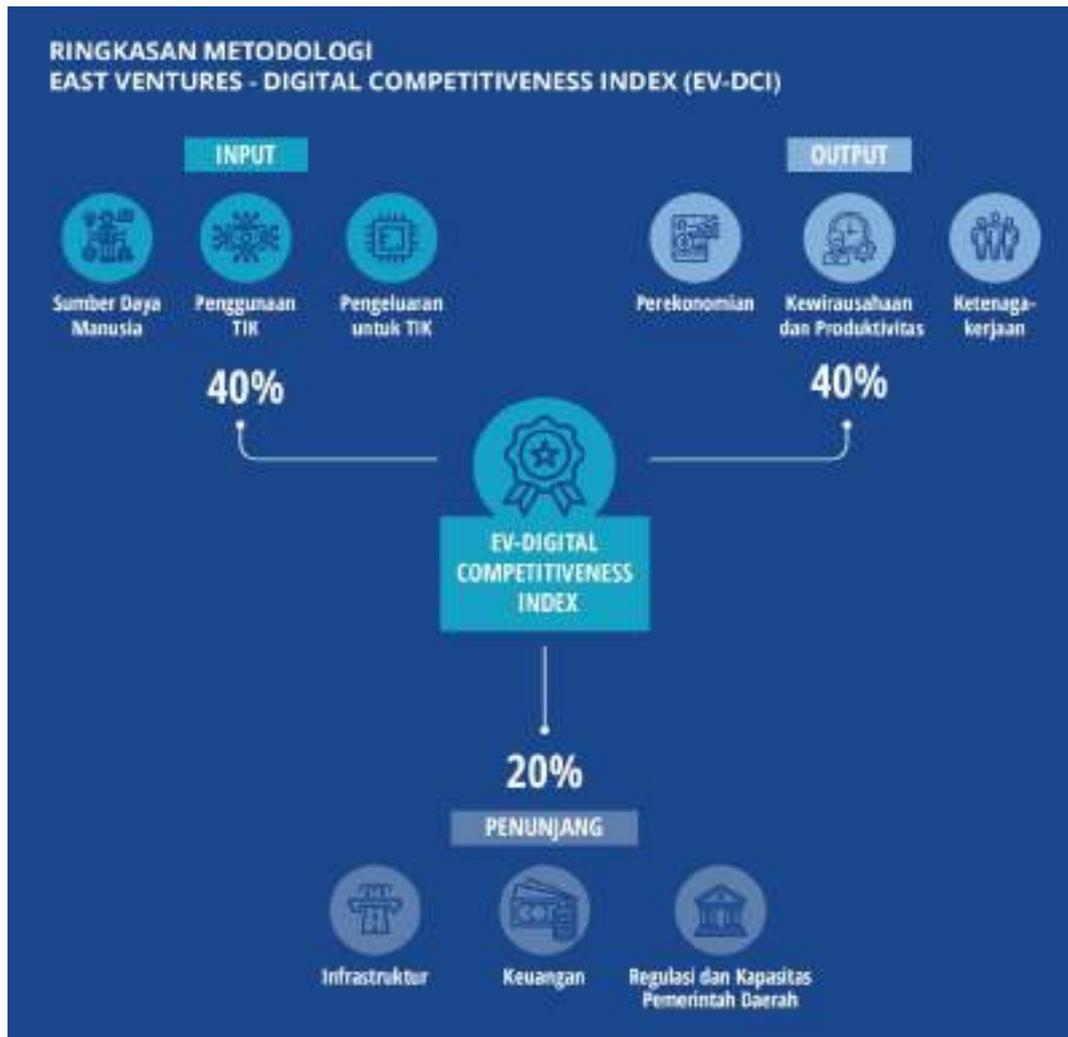
1. Infrastruktur
2. Kesehatan
3. Keterampilan
4. Pasar Tenaga Kerja
5. Sistem Keuangan
6. Ukuran Pasar
7. Kapabilitas Inovasi

Daya saing digital provinsi Indonesia dapat dilihat secara lebih detail melalui sub-indeks Input, Output, dan Penunjang. Secara umum sebaran skor lebih landai dan merata dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat dari nilai tengahnya, nilai tengah skor Input tidak mengalami perubahan (36,9), namun sebaran skor lebih merata akibat kesenjangan antar daerah semakin berkurang. Sementara nilai tengah skor Output dan Penunjang mengalami peningkatan masing-masing menjadi dari 26,9 menjadi 30,9 dan 39,1 menjadi 46,1.

Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat ke 15 pada tahun 2021 dan 2022 dengan nilai sub-indeks Input, Output, dan Penunjang sebagai berikut:

1. Input dengan komponen:
  - a. Sumber Daya Manusia
  - b. Penggunaan TIK
  - c. Pengeluaran untuk TIK
2. Output dengan komponen:
  - a. Perekonomian
  - b. Kewirausahaan dan Produktivitas
  - c. Ketenagakerjaan
3. Output dengan komponen:
  - a. Infrastruktur
  - b. Keuangan
  - c. Regulasi dan Kapasitas Pemda

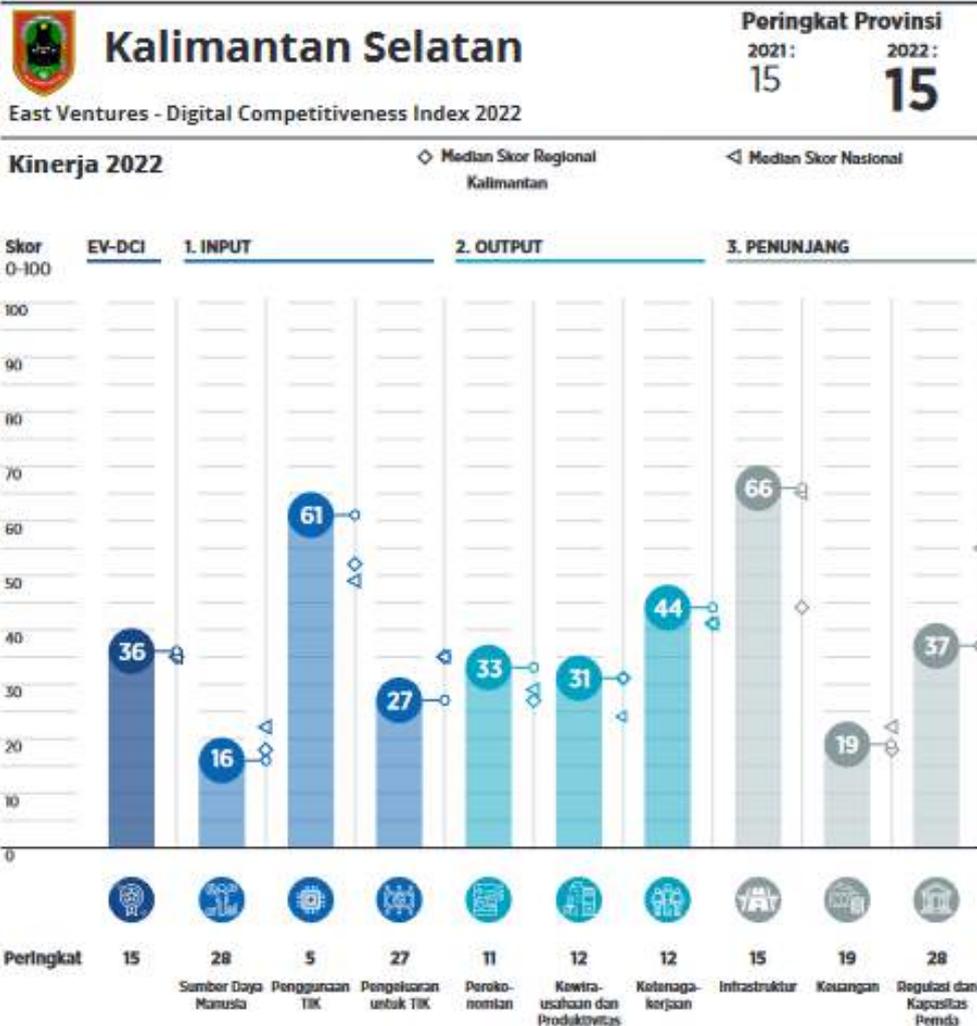




**RKPD TAHUN 2024**

**Gambar 2.45** Ringkasan Komponen EV-Digital Competitiveness Index 2022  
Sumber: East Ventures - Digital Competitiveness Index 2022





**Gambar 2.46** Ringkasan Komponen EV-Digital Competitiveness Index Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Sumber: East Ventures - Digital Competitiveness Index 2022

## 2.4.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah terkait dengan kapasitas ekonomi daerah dimana daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya tinjauan terhadap kemampuan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengetahui kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dimana semakin baik kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi pula daya saing daerah tersebut dengan daerah lain.





#### 2.4.2.1 Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

Di Provinsi Kalimantan Selatan pasca pandemi, pengeluaran konsumsi rumah tangga secara kontribusi tetap memberikan pengaruh yang besar dalam permintaan akhir di Kabupaten/Kota. Jika dilihat dari sisi nominal, nilai permintaan paling besar ada di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin merupakan wilayah administrasi tingkat II dengan jumlah penduduk terbanyak se-Kalimantan Selatan. Dari 4,18 juta jiwa penduduk Kalimantan Selatan, sekitar 15,96 persen atau 667 ribu lebih ada di Kota Banjarmasin. Pada tahun 2022 dengan penduduk berjumlah 667 ribu orang lebih tersebut, Kota Banjarmasin memerlukan barang dan jasa yang dikonsumsi untuk rumah tangga senilai hampir 23,37 triliun rupiah. Besaran konsumsi Kota Banjarmasin mengambil porsi sekitar 22 persen dari seluruh konsumsi Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Hal ini sangat beralasan karena hampir 16 persen penduduk Kalimantan Selatan berada di Kota Banjarmasin. Selanjutnya, nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga terbesar kedua adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Banjar yang mencapai 13,32 triliun rupiah. Seperti halnya di Banjarmasin, penduduk di Kabupaten Banjar juga sangat besar dan merupakan terbesar kedua di Kalimantan Selatan (13,87% penduduk Kalimantan Selatan ada di Kabupaten Banjar). Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga terkecil ada di Kabupaten Balangan yaitu sekitar 2,95 triliun rupiah. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga di kabupaten Balangan yang terkecil ini sejalan dengan jumlah penduduk Balangan yang juga terkecil se-Kalimantan Selatan.

Secara rata-rata pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,79 persen. Kabupaten Tabalong mengalami pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi se-Kalimantan Selatan. Dengan kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 21,1 persen terhadap PDRB Kabupaten Tabalong, komponen ini tumbuh sekitar 5,91 persen pada tahun 2022. Adapun pertumbuhan terendah adalah pada kabupaten Barito Kuala sebesar 3,76 persen dengan kontribusinya pada PDRB sebesar 68,5 persen.





#### 2.4.2.2 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Pada aspek kemampuan ekonomi daerah, salah satu indikator adalah pengeluaran rata-rata per kapita selama sebulan. Pengeluaran penduduk akan merepresentasikan pendapatan yang diterima dalam sebulan sehingga akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Pengeluaran rata-rata per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum mengalami kenaikan di setiap periodenya yang dikarenakan adanya berbagai hal seperti laju inflasi, peningkatan arus komoditas barang, hingga perubahan gaya hidup masyarakat.

#### 2.4.2.3 Nilai Tukar Petani

Nilai NTP gabungan di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 NTP gabungan adalah sebesar 107,27%, yang berarti bahwa petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi dan biaya produksi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Nilai ini lebih besar dari target nilai NTP RPJMD sebesar 102,23%. Hal tersebut karena nilai NTP tanaman perkebunan rakyat yang memberikan peningkatan nilai yang tinggi.

Peningkatan nilai NTP perkebunan ini disebabkan tingginya harga komoditas perkebunan terutama komoditas yang bernilai ekspor. Namun yang





menjadi permasalahan adalah NTP tanaman pangan yang semakin mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Susenas tahun 2013, hampir 72% rumah tangga tani Kalimantan Selatan, merupakan petani padi. Sementara sisanya, tersebar pada usaha perkebunan (45,4%), peternakan (28,52%), dan holtikultura (24,75%). Sehingga sub sektor tanaman pangan perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan NTP ini.



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan, 2023

**Gambar 2.47** Perkembangan Nilai Tukar Petani Kalimantan Selatan s.d Mei Tahun 2023

**Tabel 2.142** Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi di Pulau Kalimantan dan Indonesia Tahun 2021-2022

No.	Provinsi	NTP (%)	
		2021	2022
1.	Kalimantan Barat	128,68	141,34
2.	Kalimantan Tengah	118,53	121,60
3.	Kalimantan Selatan	107,59	107,33
4.	Kalimantan Timur	120,94	126,03
5.	Kalimantan Utara	105,85	109,00
	Indonesia	104,64	107,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023





Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) digunakan untuk melihat tingkat keekonomian usaha pertanian di perdesaan pada bulan dan tahun tertentu dibandingkan dengan tahun dasarnya. NTUP adalah perbandingan atau rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), yang dinyatakan dalam persentase, dimana pada penghitungan NTUP hanya menggunakan Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebagai komponen Ib.

Secara konseptual NTUP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. NTUP diharapkan lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksi dan penambahan barang modalnya. Nilai NTUP gabungan di Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Pada bulan April 2023 NTUP subsector Kalimantan Selatan adalah sebesar 108,28 sedangkan pada bulan Mei 2023 NTUP subsector Kalimantan Selatan adalah sebesar 107,35 .



**Gambar 2.48** Grafik Perkembangan NTUP Provinsi Kalimantan Selatan s.d Mei Tahun 2023

NTP Kalimantan Selatan sampai dengan Bulan Mei 2023 sebesar 107,27, angka ini menunjukkan petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika tingkat rata-rata harga yang diterima mengalami kenaikan





yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayar untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi terhadap tahun dasar atau NTP di atas 100.

Pada Mei 2023, nilai Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan sebesar 0,85 persen yang disebabkan oleh kenaikan indeks pada beberapa kelompok pengeluaran khususnya kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Kalimantan Selatan Mei 2023 sebesar 107,35. Nilai ini dapat diartikan bahwa untuk kegiatan usaha pertanian yang dilakukan petani mengalami kenaikan ketika rata-rata harga yang diterima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayar untuk biaya produksi, berarti kegiatan usaha yang dilakukan petani memberikan keuntungan.

#### 2.4.2.4 Perkembangan Impor

Komoditi impor dengan volume dan nilai tertinggi pada tahun 2022 adalah bahan bakar mineral dalam hal ini bahan bakar minyak (BBM), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 46,81%. Peningkatan volume impor yang tinggi juga pada komoditi pupuk sebesar 316,66%.

**Tabel 2.143** Perkembangan impor 10 komoditi dengan volume tertinggi di Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022

No	Komoditi	Volume (Ton)	
		2021	2022
1.	Bahan bakar mineral	723.789.958	1.360.973.391
2.	Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya	4.384.624	12.847.388
3.	Pupuk	7.920.000	33.000.000
4.	Mesin dan peralatan elektris serta bagiannya	471.392	3.686.163
5.	Kapal, perahu dan struktur terapung	1.354.000	2.812.490
6.	Bahan kimia organik	17.116.625	10.200.689
7.	Plastik dan barang dari plastik	205.995	496.479
8.	Berbagai produk kimia	4.839.434	4.581.950
9.	Garam, belerang, batu dan semen	79.680.000	57.547.668
10.	Kendaraan dan bagiannya	906.420	1.228.526

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023





#### 2.4.2.5 Perkembangan Sektor Energi

Sampai dengan Tahun 2022 Rasio elektrifikasi wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mencapai 85,95 persen dengan rasio desa berlistrik yang mencapai 100 persen. Pencapaian elektrifikasi di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah cukup tinggi, tetapi kami terus berupaya persentasenya semakin meningkat dan masyarakat terlayani listrik.

Rasio elektrifikasi di Kalimantan Selatan mencapai 93,86 persen dengan rasio desa berlistrik telah mencapai 96,67 persen dan sebanyak 1.942 desa sudah berlistrik PLN dari 2.009 desa di Kalimantan Selatan. Sementara itu, rasio elektrifikasi di provinsi Kalimantan Tengah mencapai 83,11 persen dengan rasio desa berlistrik sebesar 60,69 persen dan sebanyak 953 desa sudah berlistrik PLN.

Jumlah desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.572 desa dan 953 desa sudah berlistrik PLN, sedangkan 619 desa lain berlistrik Non-PLN. Perlu terus diupayakan mewujudkan ketersediaan listrik untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

#### 2.4.2.6 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang bulan Maret 2023 terjadi penurunan dari bulan sebelumnya. TPK bulan Maret 2023 sebesar 51,43 persen atau turun 0,43 poin dibanding TPK bulan Februari 2023 yang sebesar 51,86 persen. Apabila dibandingkan dengan TPK pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Maret 2022 yang sebesar 46,85 persen, terjadi kenaikan sebesar 4,58 poin. Berdasarkan klasifikasi hotel bintang, pada bulan Maret 2023, TPK tertinggi dicapai oleh kelompok hotel bintang 4, yaitu sebesar 60,32 persen, sedangkan TPK terendah terjadi pada hotel bintang 1 sebesar 23,54 persen. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, klasifikasi hotel bintang 4 naik sebesar 6,41 poin, klasifikasi hotel bintang 3 naik sebesar 3,31 poin, klasifikasi hotel bintang 2 naik sebesar 15,13 poin, dan klasifikasi bintang 1 turun sebesar 5,30 poin.

TPK hotel non bintang pada bulan Maret 2023 juga turun jika dibandingkan dengan bulan Februari 2023. TPK hotel non bintang pada bulan Maret 2023 sebesar 22,92 persen atau turun 1,64 poin dibandingkan TPK bulan Februari 2023 yang sebesar 24,56 persen. Dibandingkan dengan TPK pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu bulan Maret 2022 yang sebesar 22,59





persen, TPK bulan Maret 2023 naik sebesar 0,33 poin (lihat Tabel 2). TPK tertinggi pada hotel non bintang bulan Maret 2023 dicapai oleh kelompok hotel dengan jumlah kamar 25 - 40 yaitu sebesar 26,19 persen, sedangkan TPK terendah terjadi pada kelompok jumlah kamar < 10 sebesar 19,90 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya pada bulan yang sama, TPK kelompok hotel dengan jumlah kamar 41 - 100 turun 11,96 poin, kelompok dengan jumlah kamar 25 - 40 naik 4,12 poin, kelompok dengan jumlah kamar 10 - 24 naik 0,25 poin, dan kelompok dengan jumlah kamar < 10 turun sebesar 3,06 poin.

Rata-Rata Lama Menginap (RLM) tamu asing dan dalam negeri hotel berbintang di Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2023 adalah sebesar 1,61 malam, yang mengalami kenaikan sebesar 0,08 poin jika dibandingkan bulan Februari 2023 yang sebesar 1,53 malam. Dilihat dari klasifikasi hotel, RLM tertinggi terjadi pada hotel berbintang 4 selama 1,83 malam, dan terendah terjadi pada hotel berbintang 1 selama 1,06 malam. Dilihat dari jenis tamu yang menginap, rata-rata lama menginap tamu asing di hotel berbintang pada bulan Maret 2023 lebih tinggi dibanding tamu dalam negeri, masing-masing selama 2,08 malam untuk tamu asing dan 1,61 malam untuk tamu dalam negeri (domestik).

Rata-Rata Lama Menginap (RLM) tamu asing dan dalam negeri pada hotel non bintang untuk bulan Maret 2023 adalah 1,15 malam, atau naik 0,01 poin dibandingkan keadaan bulan Februari 2023 yang sebesar 1,14 malam. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu (Maret 2022) RLM bulan Maret 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin, dimana pada periode tersebut RLM sebesar 1,10 malam. Dilihat dari kelompok kamar, RLM tertinggi pada hotel non bintang terjadi pada kelompok hotel dengan jumlah kamar 25 - 40 selama 1,26 malam dan yang terendah terjadi pada kelompok jumlah kamar < 10 selama 1,02 malam. Berdasarkan jenis tamu yang menginap, pada bulan Maret 2023, rata-rata lama menginap tamu dalam negeri sebesar 1,15 malam dan rata-rata lama menginap tamu asing sebesar 1,00 malam.

## 2.4.3 Fokus Iklim Investasi dan Pelayanan Publik

### 2.4.3.1 Investasi

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi suatu wilayah. Dalam kaitan ini, investasi yang dimaksud terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam





konteks PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada besaran nilai komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

Komponen pembentukan modal tetap bruto terdiri dari PMTB bangunan dan nonbangunan. Subkomponen bangunan mendominasi PMTB pada tiap Kabupaten/ Kota. Komponen penyumbang pembentukan modal tetap bruto bangunan adalah output kategori konstruksi pada PDRB Lapangan usaha. Sekitar 80 persen nilai PMTB berupa output dari konstruksi. Output kategori konstruksi bisa dihasilkan oleh pemerintah, rumah tangga maupun swasta. Output yang berasal dari pemerintah dapat dilihat pada pos belanja modal di APBD maupun APBN.

Dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin merupakan wilayah yang memiliki nilai PMTB terbesar dengan nominal 11,21 triliun rupiah. Hal ini wajar, jika dihubungkan dengan status Banjarmasin sebagai ibukota. Kegiatan pembangunan yang ada tidak hanya bersumber dari pemerintah, namun termasuk pula dari swasta. Di sisi lain, Banjarmasin juga memiliki jumlah penduduk paling besar, pastinya juga memerlukan bangunan perumahan yang paling banyak (rumah tinggal). Rumah tinggal merupakan komponen pembentuk PMTB bangunan dari sektor rumah tangga. Pertumbuhan Komponen di Banjarmasin ini mencapai 4,84 persen.

Selain berupa bangunan, PMTB juga memuat barang-barang modal yang bukan bangunan. Beberapa yang tercakup dalam barang modal non bangunan yaitu mesin perlengkapan, hewan dan tanaman yang menghasilkan berulang. Serupa dengan subkomponen bangunan, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan juga mengalami peningkatan pada tahun 2022 untuk subkomponen non bangunan.

#### 2.4.3.2 **Kriminalitas**

Data kriminal akan menjadi tolok ukur dan acuan publik dalam menilai tingkat keamanan suatu wilayah. Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan





papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

#### 2.4.3.3 Pelayanan Publik

hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 ada Lima pemerintah daerah di Kalsel yang masuk zona hijau dengan kategori kualitas tinggi (nilai 78,00 sampai 87,99), yaitu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (86,61), Pemerintah Kota Banjarbaru (84,74), Pemkab Tanah Bumbu (84,57), Pemkab Balangan (80,78), dan Pemkab Tabalong (79,36).

Adapun kategori pelayanan publik berkualitas sedang (54,00-77,99) atau berzona kuning, yakni Pemprov Kalsel, Pemkot Banjarmasin, Pemkab Banjar, Pemkab Barito Kuala, Pemkab Tapin, Pemkab Hulu Sungai Selatan, Pemkab Hulu Sungai Tengah, Pemkab Hulu Sungai Utara, dan Pemkab Kotabaru.

#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

##### 2.4.4.1 Ketenagakerjaan

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian (30,13 persen); Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi (27,52 persen); dan Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan (17,37 persen). Pola distribusi lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Februari 2022. Ada tiga lapangan pekerjaan utama yang mengalami peningkatan terbesar yaitu Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi (1,72 persen poin), Sektor Pertambangan (0,53 persen poin), dan Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan (0,31 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar adalah Sektor Industri (-1,77 persen poin); Konstruksi (-0,93 persen poin) serta sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (-0,23 persen poin).

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada





Februari 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,18 juta orang (56,80 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 0,90 juta orang (43,20 persen). Dibandingkan Februari 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,45 persen poin.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 43,99 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 12,42 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Februari 2021 dan Februari 2022. Dibandingkan dengan Februari 2022, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah mengalami peningkatan sebesar 2,53 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMA sederajat, SMP sederajat dan Diploma/Universitas mengalami penurunan persentase yakni masing-masing sebesar 1,59 persen poin, 0,59 persen poin dan 0,36 persen poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2023 sebesar 3,95 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada Februari 2023 TPT mengalami penurunan sebesar 0,25 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022. Pada Februari 2023, TPT laki-laki sebesar 4,16 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,62 persen. TPT laki-laki dan TPT perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,31 persen poin dan 0,16 persen poin jika dibandingkan Februari 2022. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (4,35 persen) lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (3,60 persen). TPT menurut daerah tempat tinggal dibandingkan kondisi Februari 2022, untuk perkotaan turun 0,27 persen poin dan perdesaan turun 0,23 persen poin.

#### 2.4.5 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Salah satu fokus yang juga memiliki peran besar terhadap aspek daya saing Provinsi Kalimantan Selatan selain dilihat dari beberapa komponen di atas,





yang terakhir adalah mengenai Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur. Data-data yang tersedia terkait focus fasilitas wilayah/infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu antara lain adalah panjang jalan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022, jalan nasional di Kalimantan Selatan memiliki total sepanjang 1.204,18 Km dengan kondisi mantap sebesar 95,63% berdasarkan data terakhir pada tahun 2021, Adapun panjang jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0150/KUM/2023 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan yang semula 756,12 km menjadi 927,41 km dengan kondisi mantap 64,3% pada Tahun 2022. Adapun capaian ini masih berada di bawah kondisi mantap jalan nasional. Rasio konektivitas Provinsi untuk tahun 2022 adalah sebesar 0,603%.

Komponen pendukung lainnya adalah ketersediaan bandara, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki jumlah total 5 bandara yang tersebar pada 5 Kab/Kota, antarlain:

1. Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor – Banjarbaru
2. Bandar Udara Bersujud – Batulicin
3. Bandar Udara Warukin – Warukin
4. Bandar Udara Gusti Syamsir Alam – Kotabaru
5. Bandar Udara Mekar Putih – Kota Baru

Salah Satu Dari Semua Bandar Udara Tersebut Bahkan Merupakan Bandara Internasional Yang Menjadi Gerbang Bagi Penumpang Penerbangan Luar Negeri. Hal Tersebut Memang Diperlukan, Untuk Dapat Membuat Roda Ekonomi Dan Pariwisata Kalimantan Selatan Tetap Berputar.

Terkait dengan angkutan sungai dan laut Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 7 pelabuhan yang beroperasi dengan 2 jenis pelabuhan yaitu pelabuhan sungai dan danau serta pelabuhan penyeberangan yang memiliki hirarki pelabuhan yaitu pengumpan. Lokasi pelabuhan tersebar di beberapa kabupaten/kota diantaranya Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Seluruhnya memiliki status kepemilikan dan pengelolaannya dibawah kewenangan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam rangka menunjang perekonomian sektor pertanian dan pangan, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Upaya dalam pengelolaan sumber daya air terkait dengan pengelolaan irigasi dan daerah irigasi. Adapun luas Daerah Irigasi





dan Daerah Irigasi Rawa (DI/DIR) di Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah 995 DI/DIR dan luas total  $\pm$  359.595 Ha, dengan persentase 18,53% merupakan kewenangan pusat, 15,85% kewenangan provinsi, dan 55,62% merupakan kewenangan kabupaten/kota. Untuk melihat kinerja sistem irigasi masing-masing DI/DIR pada setiap kewenangan maka dilakukan penilaian kinerja jaringan irigasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan irigasi yang diterjemahkan kedalam Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). Berdasarkan IKSI dapat disimpulkan bahwa kondisi irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan rata-rata masih berada di bawah 50% yang menunjukkan bahwa kinerja sistem irigasi masih di bawah potensi yang dimilikinya karena adanya kerusakan

Komponen pendukung aspek daya saing Provinsi Kalimantan Selatan lainnya adalah pembangunan aspek kesejahteraan masyarakat. Upaya dalam meningkatkan pembangunan manusia adalah melalui pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar salah satunya melalui penyediaan air minum, sanitasi dan persampahan. Capaian air minum akses layak Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 sebesar 83,02% dan tahun 2022 sebesar 88,68% , hal ini menunjukkan bahwa trend pencapaian air minum akses layak di Kalimantan Selatan mengalami perbaikan setiap tahunnya. Sebagian besar Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki capaian air minum dengan status akses layak di atas rata-rata Provinsi, dan hanya ada beberapa yang perlu masih mendapat perhatian antaralain Kab Tanah Laut, Kab Barito Kuala dan Kabupaten Kotabaru dengan capaian ketiga Kabupaten ini yang masih berada di bawah angka rata-rata Provinsi. Capaian akses air limbah Akses layak domestik Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sebesar 88,28% naik sebesar 1,63% dari capaian tahun 2021 sebesar 86,85%. Sistem pengelolaan sampah yang dominan masih tradisional, antara lain adanya praktek pembuangan sampah secara sembarangan. Sehingga untuk melakukan pengelolaannya Provinsi Kalimantan Selatan masih terus berupaya untuk menambah dan memaksimalkan penyediaan sarana prasarana yang memadai, seperti penyediaan TPA, TPS, TPST, atau TPS3R.

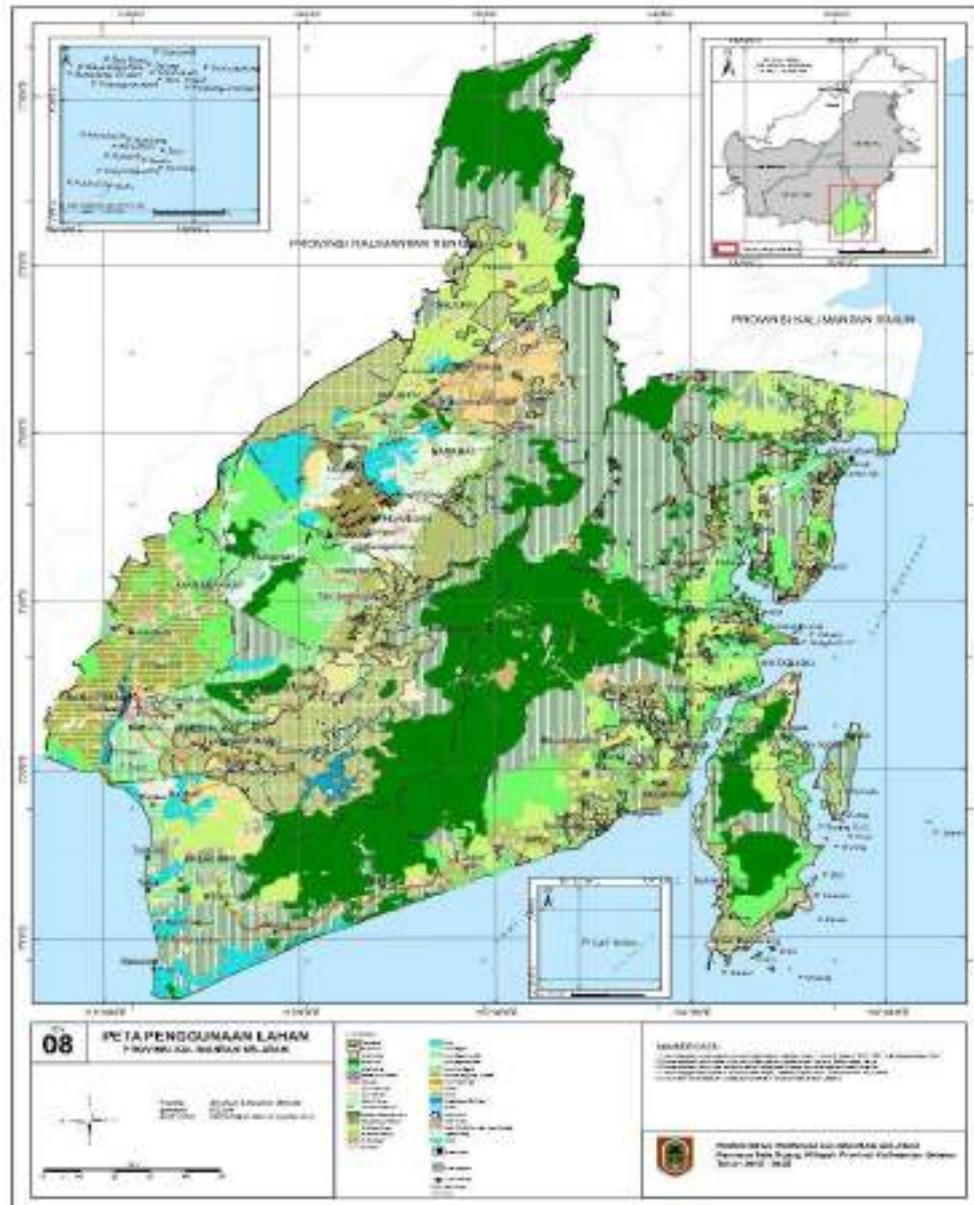
Terkait ketersediaan listrik, sampai saat ini pasokan listrik didapat dari perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan PLN terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah pelanggan PLN sebanyak 1.416.063 atau naik 3,26 persen dibanding tahun 2021 dengan angka rasio Elektrifikasi (RE)





Kalimantan Selatan s.d Desember 2022 baik Jumlah RT Berlistrik bersumber dari PLN dan Non PLN adalah sebesar 99.45%

#### 2.4.6 Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup



Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018

**Gambar 2.49** Peta Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan s.d Data Terakhir Tahun 2018





Berdasarkan data tutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022, diketahui bahwa tutupan lahan pada Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh Perkebunan (830,367.064 Ha), disusul dengan Hutan Lahan Kering Sekunder (685,295.77Ha), Pertanian Lahan Kering Campur (557,113.17 Ha). Berdasarkan data tersebut terjadi perubahan jika dibandingkan dengan data tutupan lahan pada tahun 2020 dimana tutupan lahan Prov. Kalsel di dominasi oleh Hutan Lahan Kering Sekunder (700,718.60 Ha), Pertanian Lahan Kering Campuran (586,262.71 Ha), Perkebunan (791,118.57 Ha) dan Sawah (381,030.06 Ha). Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan lahan yang awalnya berpotensi besar terhadap pengembangan produktivitas pertanian dan perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan sedikit bergeser menjadi perkebunan

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Terdapat banyak pendekatan dalam menentukan daya dukung suatu wilayah. Beberapa konsep dalam pengukuran daya dukung lingkungan diantaranya adalah pendekatan Carrying Capacity Ratio (CCR), konsep daya dukung wilayah untuk permukiman (DDPm), daya dukung lingkungan untuk lahan pertanian, konsep daya dukung lingkungan untuk fungsi lindung, daya dukung sumber daya lahan, daya dukung sumber daya air, dan sebagainya (Muta'ali, 2012).

Kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dilakukan berdasarkan pendekatan yang telah disebutkan di atas. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan.

Konsep daya tampung lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau





komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam menetapkan status pencemaran diperlukan baku mutu lingkungan hidup (KLHK, 2014). Baku mutu lingkungan hidup digunakan sebagai batas/kadar zat, energi atau komponen sebagai unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Dengan kata lain baku mutu lingkungan hidup sebagai ambang batas (threshold) terjadinya indikasi pencemaran lingkungan. Dalam UU PPLH diatur mengenai baku mutu lingkungan hidup yang terdiri atas baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, buku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### 2.4.6.1 Daya Dukung Permukiman

Daya dukung lahan bangunan (pendekatan permukiman) dihitung untuk mengetahui daya dukung lahan untuk kawasan permukiman agar pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak huni dapat tercapai. Daya dukung lahan permukiman dihitung dengan formula yang menggunakan data luas lahan bangunan (permukiman), luas lahan infrastruktur (jalan, drainase, dll), koefisien lahan terbangun (terbagi menjadi perkotaan dan pedesaan), serta jumlah penduduk. Berdasarkan Pedoman Penentuan DDDTLH (KLHK, 2014), penentuan daya dukung permukiman berdasarkan luas lahan permukiman terhadap jumlah penduduk dan koefisien luas kebutuhan ruang. Jika  $DDP > 1$ , mampu menampung penduduk untuk bermukim,  $DDP = 1$ , terjadikeseimbangan antara penduduk yang bermukim dengan luas wilayah yang ada dan  $DDP < 1$ , tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim dalam wilayah tersebut.

Dari hasil analisis berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan daya dukung permukiman sebesar 1,6 atau dalam kategori mampu menampung penduduk untuk bermukim. Akan tetapi jika dilihat dari wilayah administrasi menunjukkan bahwa Kota Banjarmasin statusnya tidakseimbang/tidak mampu menampung karena nilai DDP sebesar 0,7. Hasil analisis ini memperlihatkan persebaran konsentrasi permukiman yang belum merata di Kalimantan Selatan atau masih terpusat di perkotaan Banjarmasin, sehingga perlu adanya pusat-pusat konsentrasi penduduk di wilayah lain agar pemenuhan tempat tinggal yang layak di Banjarmasin masih dapat terjaga. (Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kaimantan Selatan 2021 – 2026)





#### 2.4.6.2 Daya Dukung Lahan Pertanian

Daya dukung lahan pertanian dihitung dengan maksud untuk mengetahui ketersediaan lahan yang ada pada saat ini dan kebutuhan akan lahan pertanian pada akhir tahun perencanaan di suatu wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang. Hasil dari perhitungan analisis daya dukung lahan pertanian adalah untuk mengetahui apakah daya dukung lahan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Kondisi daya dukung lahan yang defisit menunjukkan bahwa ketersediaan lahan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan produksi pangan di wilayah tersebut sedangkan kondisi daya dukung lahan pertanian surplus menunjukkan bahwa ketersediaan lahan di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi pangan.

Jumlah produksi padi dan jumlah penduduk dengan mengacu data dari BPS Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota dalam Angka 2020), untuk konversi gabah kering giling ke beras sebesar 58,86% (Kalimantan Selatan dalam angka 2020). Konsumsi beras mulai tahun 2017 berdasarkan hasil prognosa terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 124 kg/orang/tahun. Asumsi konsumsi beras ini akan dipergunakan untuk perhitungan indeks daya dukung lahan pertanian yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019.

Daya dukung lahan pertanian secara keseluruhan di provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 adalah 2,86 atau surplus sebesar 936.428 ton. Dari surplus beras ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar mampu bertahan atau memiliki stok selama 1,85 tahun. Akan tetapi berdasarkan administrasi terdapat dua wilayah yang telah mengalami defisit yakni Kota Banjarmasin (-78.992 ton) dan Kota Banjarbaru (-25.954 ton). Rendahnya stok pangan di wilayah ini karena secara eksisting wilayah ini merupakan daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang cukup besar dibandingkan dengan luas pertaniannya (lahan sawah). Selain itu untuk Kabupaten Kotabaru juga menunjukkan surplus pangan hanya 6.558 ton.

Beberapa Kabupaten yang memiliki produksi/surplus pangan terbesar seperti Barito Kuala (150.762 ton), Hulu Sungai Tengah (131.098 ton) dan Hulu Sungai Selatan (116.477 ton).





**Tabel 2.144** Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan sd Tahun 2022

Kabupaten	Jumlah Produksi Padi (ton)	Konversi Gabah Kering Giling/GKG ke Beras	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Konsumsi Beras(kg/ perkapita /pertahun)	Jumlah Beras Di Konsumsi (ton)	DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	Surplus Beras (ton)
Balangan	170.233	100.204	131.234	124	16.273	6,16	83.931
Banjar	218.266	128.478	550.264	124	68.233	1,88	60.245
Banjarmasin	5.927	3.489	237.445	124	29.443	0,12	-25.954
Banjarmasin	6.949	4.090	670.015	124	83.082	0,05	-78.992
Barito Kuala	322.185	189.648	313.595	124	38.886	4,88	150.762
HSS	247.952	145.952	237.702	124	29.475	4,95	116.477
HST	280.104	164.878	272.419	124	33.780	4,88	131.098
HSU	143.403	84.411	230.410	124	28.571	2,95	55.841
Kotabaru	79.395	46.734	323.999	124	40.176	1,16	6.558
Tabalong	180.836	106.446	243.763	124	30.227	3,52	76.219
Tanah Bumbu	101.130	59.528	320.452	124	39.736	1,5	19.792
Tanah Laut	271.943	160.074	350.007	124	43.401	3,69	116.673
Tapin	419.823	247.121	188.262	124	23.344	10,59	223.776
Provinsi Kalimantan Selatan	2.448.146	1.441.054	4.069.567	124	504.626	2,86	936.428

Sumber: Hasil Analisis (2022)

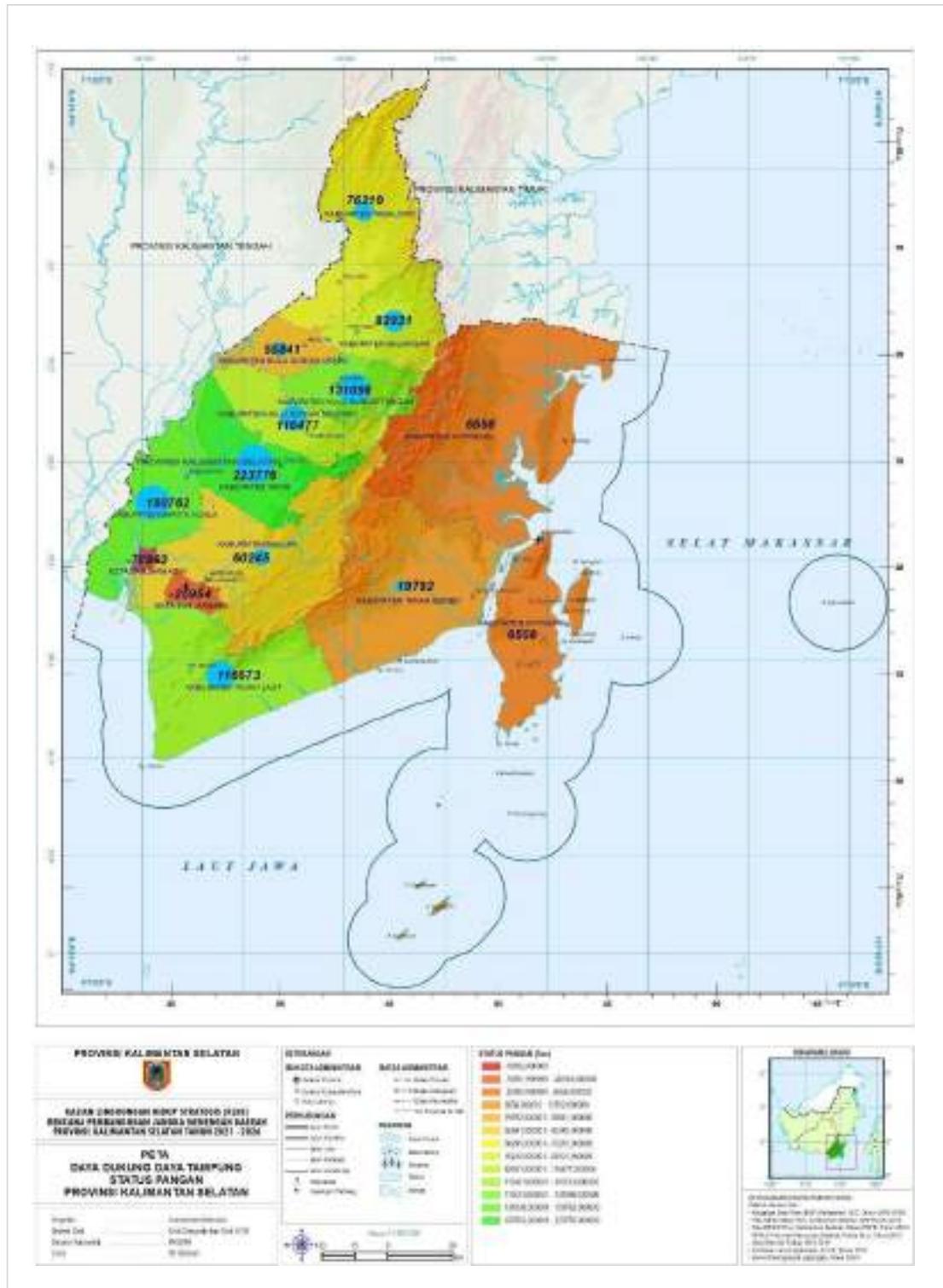
Dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal ini OPD terkait harus menyediakan dan meningkatkan melalui pencetakan sawah baru, serta mengurangi konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Ini juga bisa menjadi konsentrasi perencanaan dalam perencanaan tata ruang maupun penyusunan RKPD untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan, dengan cara membuat lahan sawah baru serta meningkatkan produktivitas sawah yang sudah ada berdasarkan hasil daya dukung ini.

Ini juga bisa menjadi konsentrasi perencanaan dalam perencanaan tata ruang maupun penyusunan RKPD untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan, dengan cara membuat lahan sawah baru





serta meningkatkan produktivitas sawah yang sudah ada. (Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 – 2026)



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026

**Gambar 2.50** Peta Status Pangan Provinsi Kalimantan Selatan s.d Data Terakhir Tahun 2021





### 2.4.6.3 Daya Dukung Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang, perhitungan daya dukung air bertujuan untuk mengetahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Hasil perhitungan daya dukung air dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan RKPD atau revisi rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (water supply) dan kebutuhan air (water demand) terdapat perhitungan melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestik.

Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA) (Permen LH No. 17/2009).

Bila  $SA > DA$ , daya dukung air dinyatakan surplus.

Bila  $SA < DA$ , daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui.

Sedangkan menurut Dr. Ing. Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc (2016), membagi menjadi:

$DDA < 1$  : Daya dukung air terlampaui atau buruk

$DDA 1-3$  : Daya dukung air bersyarat atau sedang

$DDA > 3$  : Daya dukung air aman atau baik

Jika mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan masih dominan belum terlampaui yakni sebesar 3.316.423,81 Ha atau 88,73% dibandingkan yang terlampaui hanya sebesar 421.277,86 Ha atau 11,27%, sebagaimana disajikan pada di bawah:

**Tabel 2.145** Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Kepmen LHK

Kabupaten/Kota	Status Air (Ha)	
	Belum Melampaui	Melampaui
Balangan	170.402,98	19.768,37
Banjar	387.831,60	81.757,61



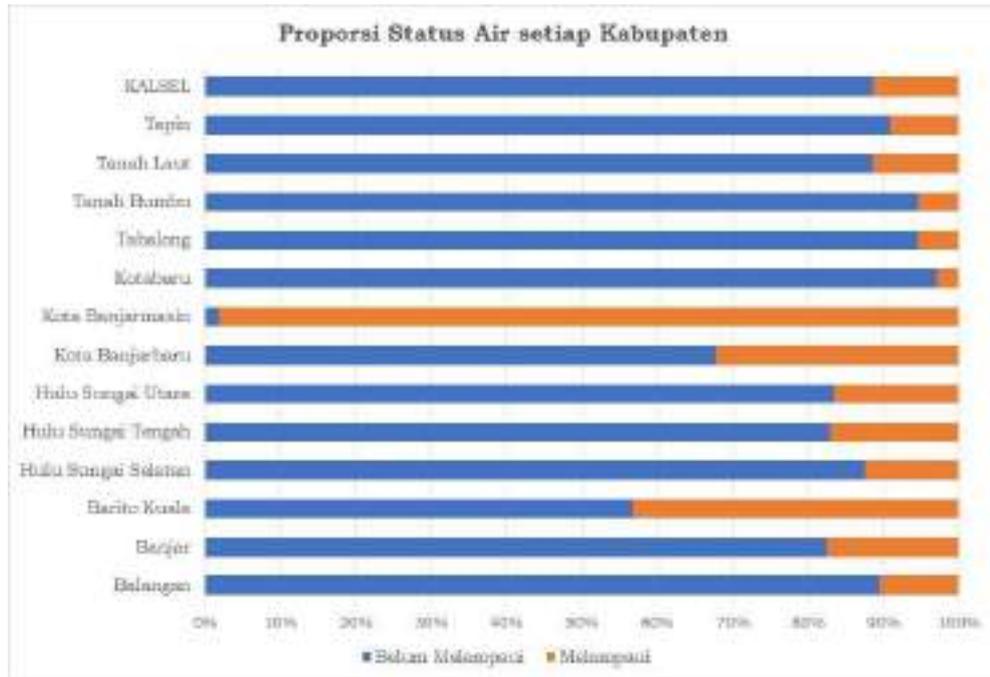


Kabupaten/Kota	Status Air (Ha)	
	Belum Melampaui	Melampaui
Barito Kuala	131.316,56	99.944,77
Hulu Sungai Selatan	148.814,78	21.047,17
Hulu Sungai Tengah	138.878,15	28.592,42
Hulu Sungai Utara	77.445,08	15.320,22
Kota Banjarbaru	22.004,96	10.449,64
Kota Banjarmasin	171,93	9.270,02
Kotabaru	896.465,56	26.324,66
Tabalong	350.399,74	19.762,32
Tanah Bumbu	450.442,59	25.546,36
Tanah Laut	342.468,64	43.630,44
Tapin	199.781,25	19.863,86
KALSEL	3.316.423,81	421.277,86
<b>Persentase (%)</b>	<b>88,73</b>	<b>11,27</b>

Jika melihat distribusi secara administrasi menunjukkan bahwa terdapat dua wilayah yang melampaui cukup besar yakni Kota Banjarmasin (98,18%), selanjutnya Kabupaten Barito Kuala (43,22%) dan Kota Banjarbaru (32,20%). Untuk wilayah yang memiliki persentase terbesar yang belum melampaui adalah Kabupaten Kotabaru (97,15%), selanjutnya Kabupaten Tabalong (94,66%) dan Kabupaten Tanah Bumbu (94,63%), sebagaimana disajikan pada Gambar di Bawah.

Selain berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 juga dilakukan analisis berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan air dari data curah hujan Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) tahun 1998-2017 dan koefisien limpasan masing-masing tutupan lahan di Kalimantan Selatan mengacu peta RBI 2018-2019. Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa yang melampaui sebesar 26,37% dan yang Belum Melampaui sebesar 73,67%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.146 dan Gambar 2.51.





(Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 – 2026)

**Gambar 2.51** Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Kepmen LHK 2019 Secara Administrasi

**Tabel 2.146** Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Analisis

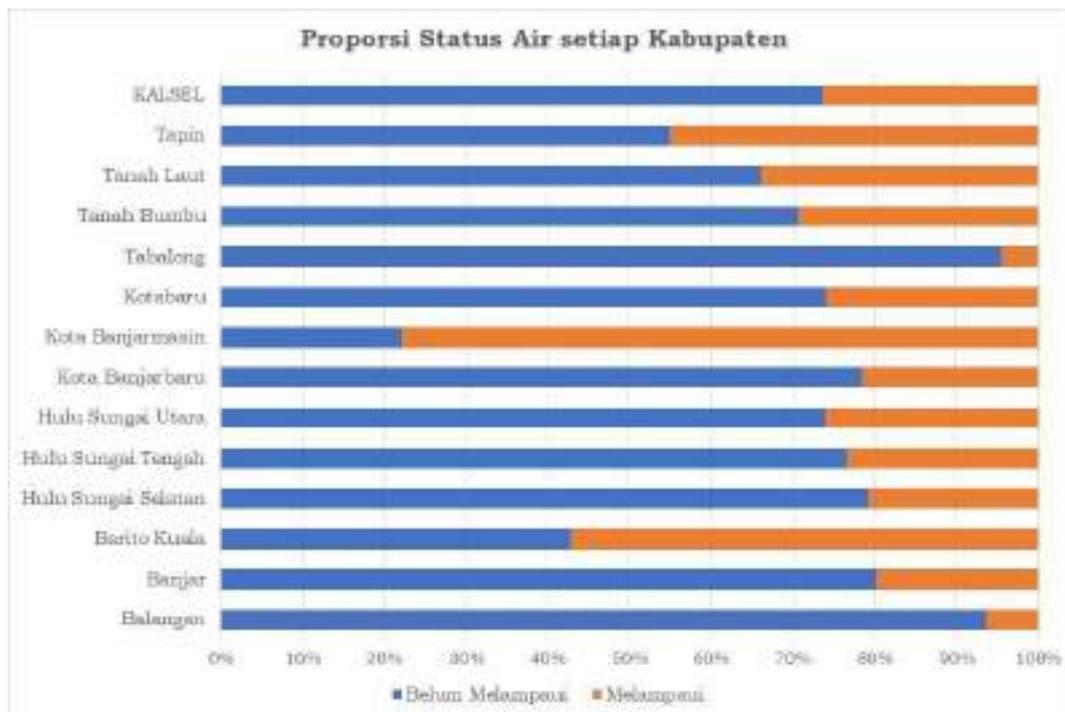
Kabupaten/Kota	Status Air (Ha)	
	Belum Melampaui	Melampaui
Balangan	171.132,47	11.706,31
Banjari	367.262,34	90.692,07
Barito Kuala	108.218,73	144.510,57
Hulu Sungai Selatan	136.706,67	35.634,33
Hulu Sungai Tengah	111.604,87	34.027,10
Hulu Sungai Utara	68.305,81	24.045,24
Kota Banjarbaru	25.828,65	7.095,60
Kota Banjarmasin	2.176,57	7.671,06
Kotabaru	703.900,93	246.401,37
Tabalong	331.881,88	15.852,60
Tanah Bumbu	343.142,10	142.368,38
Tanah Laut	251.420,34	129.175,79
Tapin	118.979,71	97.637,31
<b>KALSEL</b>	<b>2.744.452,71</b>	<b>982.926,09</b>
Percentase (%)	73,67	26,37

Sumber: Hasil Analisis 2020.





Jika melihat distribusi secara administrasi menunjukkan bahwa terdapat dua wilayah yang melampaui cukup besar yakni Kota Banjarmasin (77,90%), selanjutnya Kabupaten Barito Kuala (57,18%) dan Kabupaten Tapin (45,07%). Untuk wilayah yang memiliki persentase terbesar yang belum melampaui adalah Kabupaten Tabalong (95,44%), selanjutnya Kabupaten Balangan (93,60%) dan Kabupaten Banjar (80,20%), sebagaimana disajikan pada Gambar 2.52.



**Gambar 2.52** Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Hasil Analisis Secara Batas Administrasi Kabupaten

Untuk mengetahui tingkat ketersediaan dan kebutuhan berdasarkan volume air, maka hasil tersebut disajikan dalam bentuk tabulasi dan grafik. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan air di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 57.054.478.190 m<sup>3</sup>/tahun. Kebutuhan air total sebesar 21.850.342.888 m<sup>3</sup>/tahun yang terdiri atas domestik sebesar 118.831.356 m<sup>3</sup>/tahun dan 21.731.511.531 m<sup>3</sup>/tahun, sehingga diperoleh selisih 35.204.135.302 m<sup>3</sup>/tahun.

Dengan membandingkan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA) menunjukkan bahwa masih dalam posisi surplus, akan tetapi jika mengacu pendapat Dr. Ing. Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc (2016), menunjukkan bahwa





status air di Kalimantan Selatan hanya sebesar 2,61 atau berada pada interval DDA 1-3 atau termasuk daya dukung air bersyarat atau sedang.

Secara administrasi 3 wilayah yang telah melewati daya dukung atau status defisit Kabupaten Barito Kuala (-2.032.973.657 m<sup>3</sup>/tahun), Kabupaten Tapin (- 452.872.271 m<sup>3</sup>/tahun) dan Kota Banjarmasin (-16.497.858 m<sup>3</sup>/tahun), sebagaimana disajikan pada Tabel 3.37. Dari tabel tersebut juga, menunjukkan bahwa terdapat 6 kabupaten/kota dalam kategori bersyarat atau sedang dan 4 kabupaten dalam kategori aman atau baik. Jika dikaitkan dengan kejadian bencana banjir tahun 2021 di DAS Barito dimana limpasan air sangat tinggi dan tidak dapat dimanfaatkan, maka kedepan perlu penambahan area resapan untuk me-recharge (mengisi kembali) air tanah dangkal dan penyediaan infrastuktur air untuk menampung limpasan air dan dimanfaatkan sebagai sumber air baku baru sekaligus mengurangi risiko bencana banjir. Hal tersebut dapat dilihat terutama pada beberapa kabupaten (tujuh kabupaten/kota) yang berada di bagian tengah dan hilir DAS Barito yang memiliki status daya dukung air bersyarat dan terlampaui.

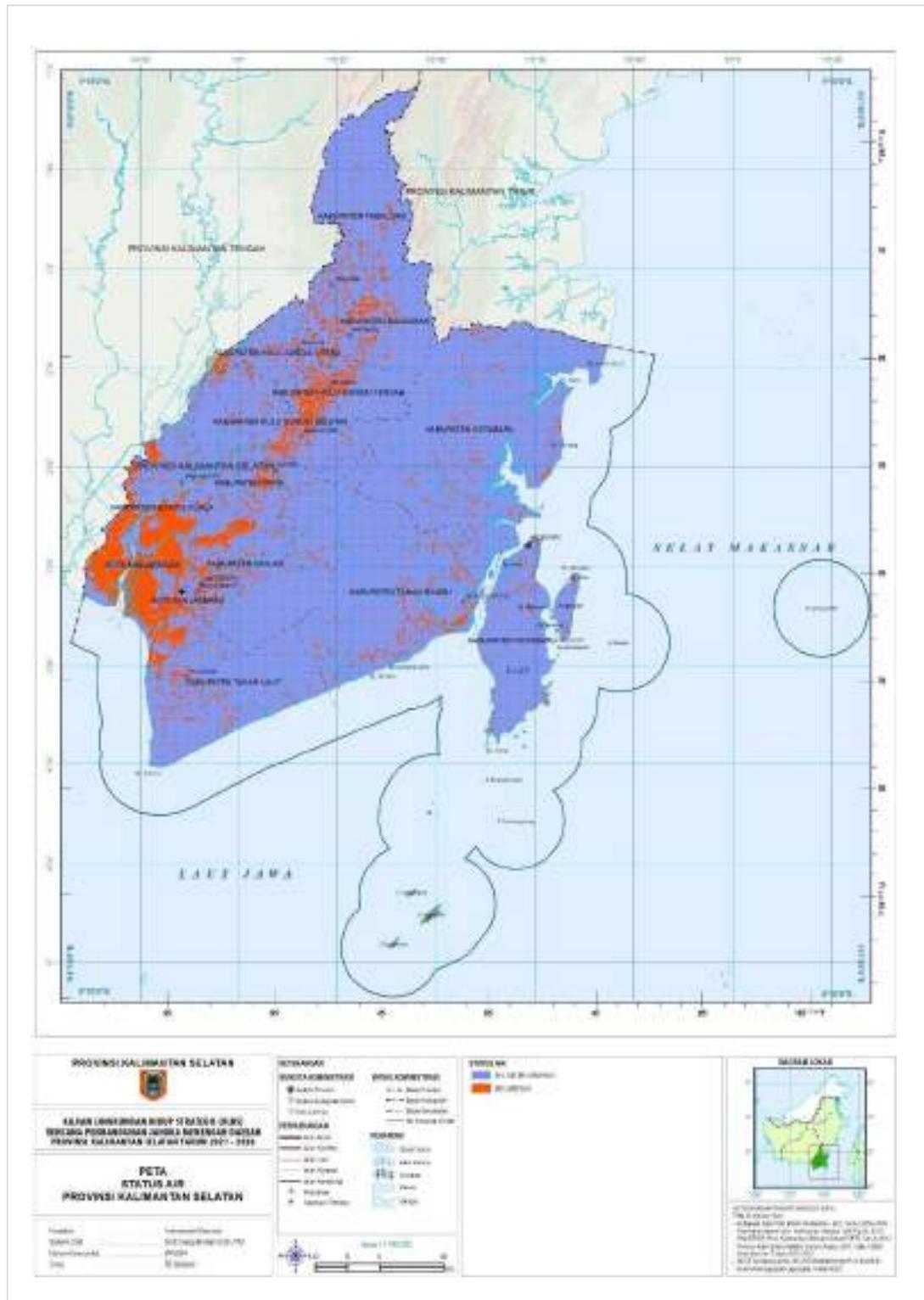


**Tabel 2.147** Perhitungan Daya Dukung Air Berdasarkan Batas Administrasi Kabupaten s.d Analisis Terakhir Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Ketersediaan Air (m <sup>3</sup> /tahun)	Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> /tahun)		Total	Selisih (m <sup>3</sup> /tahun)	DDA	Status
		Domestik	Non Domestik				
Balangan	2.488.622.632	3.832.033	201.110.663	204.942.696	2.283.679.936	12,14	Aman atau Baik
Banjar	6.403.353.583	16.067.709	2.618.607.329	2.634.675.038	3.768.678.545	2,43	Bersyarat atau Sedang
Banjarbaru	267.034.708	6.933.394	122.034.057	128.967.451	138.067.257	2,07	Bersyarat atau Sedang
Banjarmasin	62.984.689	19.564.438	59.918.108	79.482.546	-16.497.858	0,79	Terlampau atau Buruk
Barito Kuala	2.254.090.692	9.156.974	4.277.907.375	4.287.064.349	-2.032.973.657	0,53	Terlampau atau Buruk
Hulu Sungai Selatan	1.838.948.146	6.940.898	812.337.904	819.278.803	1.019.669.343	2,24	Bersyarat atau Sedang
Hulu Sungai Tengah	2.321.514.402	7.954.635	408.652.369	416.607.004	1.904.907.398	5,57	Aman atau Baik
Hulu Sungai Utara	781.135.157	6.727.972	443.209.116	449.937.088	331.198.069	1,74	Bersyarat atau Sedang
Kotabaru	24.281.980.291	9.460.771	4.793.274.889	4.802.735.660	19.479.244.631	5,06	Aman atau Baik
Tabalong	4.608.696.906	7.117.880	440.811.834	447.929.713	4.160.767.192	10,29	Aman atau Baik
Tanah Bumbu	6.118.251.680	9.357.198	2.671.111.647	2.680.468.845	3.437.782.835	2,28	Bersyarat atau Sedang
Tanah Laut	3.904.895.902	10.220.204	2.712.191.816	2.722.412.020	1.182.483.882	1,43	Bersyarat atau Sedang
Tapin	1.722.969.404	5.497.250	2.170.344.425	2.175.841.675	-452.872.271	0,79	Terlampau atau Buruk
KALSEL	57.054.478.190	118.831.356	21.731.511.531	21.850.342.888	35.204.135.302	2,61	Bersyarat atau Sedang

Sumber: Hasil Analisis 2020 KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 – 2026.

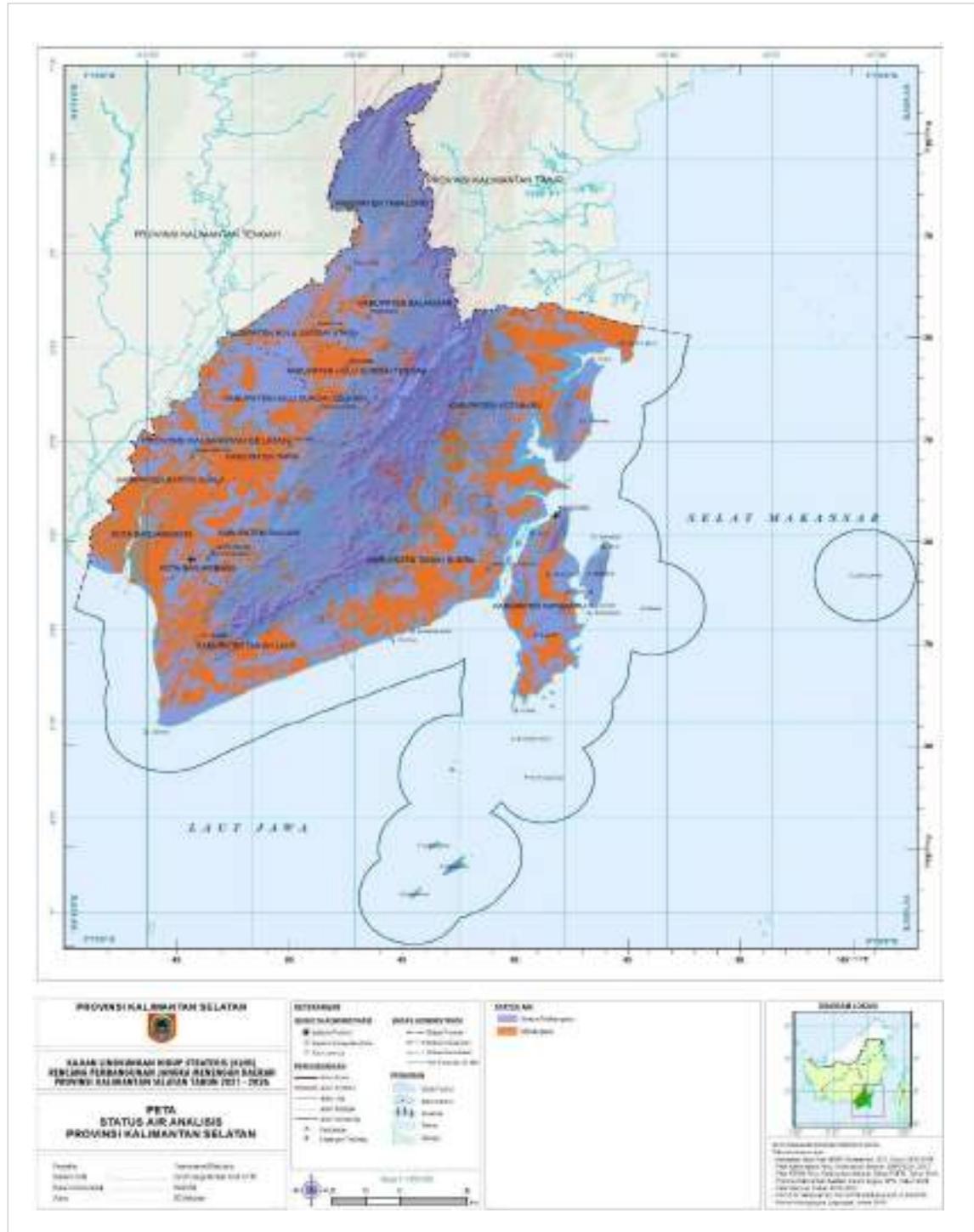




Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 – 2026

**Gambar 2.53** Peta Status Air Provinsi Kalimantan Selatan





Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 – 2026

**Gambar 2.54** Status Air Analisis Provinsi Kalimantan Selatan





## 2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

### 2.5.1 Evaluasi Realisasi RKPD Tahun 2022

Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. mengamanatkan bahwa Evaluasi dan pengendalian RKPD perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi RKPD dengan RPJMD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen pendukung dalam pengambilan kebijakan bagi semua stakeholder.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai OPD yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, Dokumen ini akan memberi gambaran mengenai efektifitas pelaksanaan perencanaan hingga tahap pelaksanaan yang pada akhirnya memberi nilai strategis bagi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan usulan kegiatan dari masyarakat.

Hasil evaluasi dan pengendalian RKPD untuk Semester II Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan diperoleh bahwa total 49 SKPD eselon II lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selaku pengelola anggaran berkewajiban untuk memasukkan laporan capaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2022 per triwulan dan menyampaikan pelaporan pelaksanaan DPA SKPD masing-masing sebagai bahan evaluasi.

Total anggaran Belanja Seluruh SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 adalah sebesar Rp 8.724.879.726.514 sedangkan realisasi anggaran sampai dengan Semester II Tahun 2022 sebesar 89.46% atau Rp 7.797.145.468.521 dan untuk realisasi fisik sebesar 98.08%.

Dalam mengukur pencapaian hasil rencana kerja SKPD. dilakukan evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan 4 Tahun 2021 mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selengkapny jumlah SKPD dengan kriteria kinerja dan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.





**Tabel 2.148** Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Semester II Tahun 2022

No	SKPD / Program	Realisasi Keuangan dan Fisik				Evaluasi Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tw 4 Tahun 2021) (%)	
		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d Triwulan 4	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Kinerja (K)	Anggaran (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.465.641.779.367	1.403.540.025.211	95,76	99,93	1387,85	95,76
2	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	15.886.277.752	14.383.718.124	90,54	100	90,54	90,54
3	TAMAN BUDAYA	5.446.225.100	4.472.219.800	82,12	100	100	82,12
4	MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT	4.289.831.601	4.190.614.361	97,69	98,64	97,69	97,69
5	PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI	4.356.774.577	3.780.426.742	86,77	80,78	100	86,77
6	DINAS KESEHATAN	101.081.607.065	95.891.230.311	94,87	99,92	219,72	94,87
7	BALAI PELATIHAN KESEHATAN	8.778.395.528	7.617.727.084	86,78	98,81	122,99	8.778.395.528
8	LABORATORIUM KESEHATAN	22.940.877.813	15.242.745.191	66,44	68,98	118,16	22.940.877.813
9	BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT	3.164.153.405	2.980.082.210	94,18	97,7	110,42	3.164.153.405
10	INSTALASI FARMASI	4.858.412.800	4.219.554.998	86,85	100	177,88	4.858.412.800
11	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN	699.550.625.818	584.660.489.112	83,58	99,53	142,99	699.550.625.818
12	BLUD RSUD ULIN	536.736.634.499	432.100.754.088	80,51	100	90	536.736.634.499
13	RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM	56.304.752.276	51.505.679.879	91,48	100	106,39	56.304.752.276
14	BLUD RSJ SAMBANG LIHUM	36.467.739.083	31.961.943.327	87,64	100	90,55	36.467.739.083
15	RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH	79.107.573.118	77.160.227.867	97,54	99,53	137,24	79.107.573.118
16	BLUD RS ANSARI SALEH	261.711.519.887	160.295.585.782	61,25	100	92	261.711.519.887
17	RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN	19.950.311.403	17.140.375.078	85,92	99,45	103,16	19.950.311.403
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	973.701.669.371	770.807.755.244	79,16	92,27	105,65	973.701.669.371
19	LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	2.800.000.000	1.999.615.677	71,41	76,79	71,4	2.800.000.000
20	BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA	20.938.119.489	17.011.383.534	81,25	100	100	20.938.119.489
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	43.314.705.785	41.807.963.769	96,52	100	100,32	43.314.705.785
22	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH	16.628.507.755	13.356.367.347	80,32	92,67	250	16.628.507.755
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	31.204.862.543	28.905.658.702	92,63	99,14	99,49	31.204.862.543
24	DINAS SOSIAL	47.375.735.383	44.532.319.555	94,00	98,74	206,48	47.375.735.383
25	PANTI SOSIAL BINA NETRA FAJAR HARAPAN	5.267.089.604	4.787.091.289	90,89	100	0	5.267.089.604
26	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BUDI MULIA	1.701.851.547	1.498.803.511	88,07	100	33,37	1.701.851.547



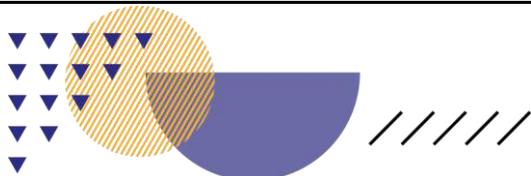


No	SKPD / Program	Realisasi Keuangan dan Fisik				Evaluasi Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tw 4 Tahun 2021) (%)	
		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d Triwulan 4	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Kinerja (K)	Anggaran (Rp)
27	PANTI SOSIAL BINA REMAJA BUDI SATRIA	15.654.354.285	13.756.598.854	87,88	100	316.1	15.654.354.285
28	PANTI SOSIAL BINA WANITA MELATI	8.144.871.876	7.072.578.090	86,83	98,69	112.8	8.144.871.876
29	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI SEJAHTERA	8.350.181.643	8.003.335.123	95,85	100	91.28	8.350.181.643
30	DINAS TENAGA KERJA DAN a	37.555.215.425	33.616.756.328	89,51	100	106.29	37.555.215.425
31	LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	5.147.334.700	4.793.541.115	93,13	94,32	63.93	5.147.334.700
32	BALAI LATIHAN KERJA	5.159.549.000	4.558.538.868	88,35	100	98.89	5.159.549.000
33	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I	908.774.600	807.968.572	88,91	98,04	93.96	908.774.600
34	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II	975.190.700	899.328.843	92,22	100	62.5	975.190.700
35	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III	845.840.300	738.204.992	87,27	96,47	100	845.840.300
36	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH IV	951.671.286	928.144.005	97,53	100	100	951.671.286
37	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.378.516.646	13.448.804.980	87,45	95,94	256.53	15.378.516.646
38	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	864.005.200	611.064.929	70,72	96,36	267.23	864.005.200
39	DINAS KETAHANAN PANGAN	12.601.243.629	11.536.456.992	91,55	100	148.07	12.601.243.629
40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.088.176.810	23.050.645.540	82,07	99,96	229.55	28.088.176.810
41	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN	2.424.364.800	2.419.342.523	99,79	99,99	437.8	2.424.364.800
42	UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA	7.680.590.800	6.994.595.658	91,07	95,3	123.57	7.680.590.800
43	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	9.689.762.954	8.631.418.877	89,08	100	291.14	9.689.762.954
44	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	55.899.050.892	52.946.409.791	94,72	100	177.61	55.899.050.892
45	DINAS PERHUBUNGAN	45.170.966.118	42.435.664.898	93,94	100	100	45.170.966.118
46	UPTD TERMINAL TYPE B	4.284.679.510	3.846.682.527	89,78	99,13	100	4.284.679.510
47	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27.920.515.768	25.533.891.922	91,45	99,44	99.69	27.920.515.768
48	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	19.970.741.408	16.636.683.942	83,31	100	100	19.970.741.408
49	BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL	6.293.244.700	5.354.052.409	85,08	100	133.33	6.293.244.700
50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.552.201.092	12.527.647.309	80,55	100	133.67	15.552.201.092





No	SKPD / Program	Realisasi Keuangan dan Fisik				Evaluasi Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tw 4 Tahun 2021) (%)	
		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d Triwulan 4	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Kinerja (K)	Anggaran (Rp)
51	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	191.597.759.939	180.862.842.816	94,40	96.92	123.33	191.597.759.939
52	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	34.191.971.583	29.381.756.411	85,93	99.04	100	34.191.971.583
53	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	31.797.255.507	27.424.897.931	86,25	99.72	96.02	31.797.255.507
54	BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	1.919.150.400	1.831.867.554	95,45	100	100	1.919.150.400
55	PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KARANG INTAN	5.580.390.008	5.099.778.924	91,39	100	100	5.580.390.008
56	PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN	4.977.190.168	4.898.731.084	98,42	100	76.09	4.977.190.168
57	PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP	11.331.211.269	9.655.169.730	85,21	100	90.26	11.331.211.269
58	PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU	2.172.963.000	2.143.292.636	98,63	100	100	2.172.963.000
59	PELABUHAN PERIKANAN KOTABARU	1.308.584.450	1.280.082.954	97,82	100	88.05	1.308.584.450
60	PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN	1.965.074.690	1.928.862.180	98,16	99.93	88.05	1.965.074.690
61	DINAS PARIWISATA	26.086.478.400	22.350.820.075	85,68	94.42	4816.26	26.086.478.400
62	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	99.517.243.957	87.531.971.357	87,96	99.9	695.14	99.517.243.957
63	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	3.399.111.005	3.163.434.271	93,07	100	99.6	3.399.111.005
64	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	3.006.427.888	2.878.707.586	95,75	98.54	83.01	3.006.427.888
65	BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	4.994.331.850	4.138.144.420	82,86	93.53	7916.75	4.994.331.850
66	BALAI PELATIHAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN	3.262.230.350	3.022.927.947	92,66	94.66	66.67	3.262.230.350
67	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	34.487.438.801	27.983.979.913	81,14	96.48	101.76	34.487.438.801
68	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	2.304.995.700	1.775.306.906	77,02	100	100	2.304.995.700
69	BALAI INSEMINASI BUATAN	3.101.538.689	2.788.586.618	89,91	98.99	100	3.101.538.689
70	DINAS KEHUTANAN	75.754.918.006	63.125.550.398	83,33	99.49	488.3	75.754.918.006
71	TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM	9.147.607.100	8.859.900.205	96,85	100	100	9.147.607.100
72	BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	4.331.893.930	4.135.069.419	95,46	99.65	192.8	4.331.893.930
73	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI	2.921.068.900	2.552.635.925	87,39	100	225	2.921.068.900
74	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN CANTUNG	2.126.784.000	2.070.350.768	97,35	100	100	2.126.784.000
75	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU	2.122.413.950	1.911.056.605	90,04	100	100	2.122.413.950
76	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG	2.128.764.770	2.001.673.224	94,03	100	100	2.128.764.770
77	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN	2.103.986.100	2.061.932.295	98,00	100	100	2.103.986.100
78	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT	2.158.354.750	2.031.767.054	94,13	100	100	2.158.354.750





No	SKPD / Program	Realisasi Keuangan dan Fisik				Evaluasi Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tw 4 Tahun 2021) (%)	
		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d Triwulan 4	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Kinerja (K)	Anggaran (Rp)
79	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN	1.702.640.200	1.624.125.719	95,39	100	100	1.702.640.200
80	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI	2.781.665.650	2.699.898.785	97,06	100	100	2.781.665.650
81	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM	2.106.528.500	2.009.506.259	95,39	100	100	2.106.528.500
82	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	22.951.357.392	18.651.792.251	81,27	100	83.78	22.951.357.392
83	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	22.951.357.392	18.651.792.251	81,27	100	83.78	22.951.357.392
84	LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.744.337.300	1.616.586.663	92,68	100	83.24	1.744.337.300
85	LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.744.337.300	1.616.586.663	92,68	100	83.24	1.744.337.300
86	DINAS PERDAGANGAN	13.956.682.731	12.830.779.535	91,93	99,35	238.04	13.956.682.731
87	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	2.203.424.300	2.115.177.432	96,00	99,54	100	2.203.424.300
88	DINAS PERINDUSTRIAN	17.754.351.158	14.872.372.380	83,77	100	252.33	17.754.351.158
89	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM	1.918.584.595	1.735.414.045	90,45	100	100	1.918.584.595
90	SEKRETARIAT DAERAH	128.733.829.411	120.140.244.042	93,32	98,61	59,33	128.733.829.411
91	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.299.030.430	2.020.325.210	87,88	100	75	2.299.030.430
92	BIRO HUKUM	4.794.585.500	3.844.935.006	80,19	99,42	37,5	4.794.585.500
93	BIRO ORGANISASI	3.392.627.500	3.182.268.329	93,80	100	100	3.392.627.500
94	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	3.387.243.100	3.181.408.430	93,92	100	100	3.387.243.100
95	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	134.709.893.700	122.537.167.048	90,96	97,02	198,34	134.709.893.700
96	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	13.490.224.900	13.029.614.912	96,59	99,82	0	13.490.224.900
97	BIRO UMUM	27.134.704.300	24.078.151.547	88,74	99,88	97,83	27.134.704.300
98	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.483.467.500	3.941.239.796	87,91	100	222,96	4.483.467.500
99	BIRO PEREKONOMIAN	2.235.996.400	1.998.679.472	89,39	100	481,5	2.235.996.400
100	SEKRETARIAT DPRD	234.309.474.791	182.121.335.837	77,73	91,15	151,04	234.309.474.791
101	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	30.285.668.372	26.346.643.879	86,99	100	100	30.285.668.372
102	BADAN KEUANGAN DAERAH	2.434.614.445.782	2.386.189.302.243	98,01	99,99	17120,71	2.434.614.445.782
103	UPPD BANJARBARU	3.200.830.065	3.027.658.027	94,59	99,99	2352,24	3.200.830.065
104	UPPD PELAIHARI	2.943.683.950	2.590.881.890	88,01	100	564,79	2.943.683.950
105	UPPD KOTABARU	2.183.709.433	2.037.621.426	93,31	100	1973,08	2.183.709.433
106	UPPD MARTAPURA	2.789.506.500	2.523.654.413	90,47	99,95	0	2.789.506.500





No	SKPD / Program	Realisasi Keuangan dan Fisik				Evaluasi Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tw 4 Tahun 2021) (%)	
		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d Triwulan 4	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Kinerja (K)	Anggaran (Rp)
107	UPPD MARABAHAN	2.285.602.860	2.217.442.096	97,02	97.02	0	2.285.602.860
108	UPPD RANTAU	2.071.662.044	2.002.042.932	96,64	100	364.5	2.071.662.044
109	UPPD KANDANGAN	2.253.955.311	2.178.380.807	96,65	96.65	97.53	2.253.955.311
110	UPPD BARABAI	2.078.683.600	2.032.242.396	97,77	97.77	2999.39	2.078.683.600
111	UPPD AMUNTAI	2.000.558.167	1.904.484.709	95,20	99.32	603.41	2.000.558.167
112	UPPD TANJUNG	1.806.668.800	1.764.951.164	97,69	100	518.64	1.806.668.800
113	UPPD BATULICIN	2.727.203.000	2.542.924.418	93,24	99.16	76.09	2.727.203.000
114	UPPD PARINGIN	1.807.563.104	1.721.541.173	95,24	98.08	100	1.807.563.104
115	UPPD BANJARMASIN I	4.254.908.354	4.067.456.964	95,59	100	25	4.254.908.354
116	UPPD BANJARMASIN II	4.374.393.100	4.225.109.042	96,59	100	2978.15	4.374.393.100
117	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	24.957.963.055	20.948.191.421	83,93	98.95	182.4	24.957.963.055
118	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	39.780.447.596	34.025.079.399	85,53	97.94	143.17	39.780.447.596
119	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	12.742.987.000	11.509.694.075	90,32	91.32	97.67	12.742.987.000
120	KEBUN RAYA BANUA	3.882.460.300	3.345.598.703	86,17	86.17	150	3.882.460.300
121	BADAN PENGHUBUNG	9.868.128.669	9.239.292.661	93,63	100	100	9.868.128.669
122	INSPEKTORAT DAERAH	26.477.972.684	21.852.930.057	82,53	99.92	102.07	26.477.972.684
123	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	34.710.825.498	33.008.717.392	95,10	99.99	47.85	34.710.825.498

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sumber : Emonev Bappeda Kalsel, Tahun 2022





**Tabel 2.149** Evaluasi Capaian Kinerja Program - Kegiatan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKENAAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SM sederajat dan Pendidikan Khusus	persen	94.24	93.92 persen	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas	persen	33.98	28.05 persen	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah kejuruan	persen	33.98	26.65 persen	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	persen	85.79	29.47 persen	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Guru Pendidikan SMA/SMK/Diksus yang profesional	persen	75.64	78.31	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi	persen	55.7	42.22	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Pendidikan SMA/SMK/Diksus yang profesional	persen	75.64	0	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



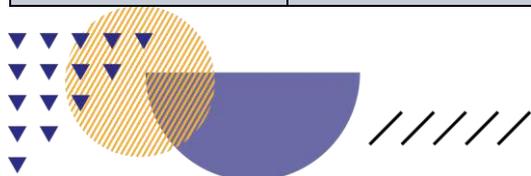


Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Ratio Pemerataan Guru	persen	15.01	12	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	112	137	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi	per 1000 Kelahiran Hidup	9	10	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting	%	29	9.60%	Tercapai	Dinas Kesehatan
	Angka Kesakitan	%	13	11.67%	Tercapai	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasyankes dengan Pemenuhan SDM Sesuai Standar	%	58	69%	Tercapai	Dinas Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Puskesmas dengan sembilan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	63	75%	Tercapai	Dinas Kesehatan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat registrasi	Nakes	6200	7331 Nakes	Tercapai	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	%	77	100%	Tercapai	Dinas Kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Posyandu Aktif	%	60	65.10%	Tercapai	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten Kota yang memiliki kebijakan PHBS	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kesehatan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten kota melaksanakan pembinaan dana desa untuk kesehatan dan UKBM	%	62	100%	Tercapai	Dinas Kesehatan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	%	64.9	54.00%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
SUMBER DAYA AIR (SDA)						
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendali daya rusak air dalam kondisi baik	%	28.77	31.58%	Tercapai	Dinas PUPR
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	%	64.9	18.10%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Pelayanan Air Minum	%	88.68	89%	Tercapai	Dinas PUPR
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Air Minum	%	88.68	89%	Tercapai	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Pelayanan Air Limbah	%	84.97	88%	Tercapai	Dinas PUPR
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Cakupan Pelayanan Air Limbah	%	84.97	88%	Tercapai	Dinas PUPR





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	%	100	100%	Tercapai	Dinas PUPR
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	%	100	100%	Tercapai	Dinas PUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	%	100	100%	Tercapai	Dinas PUPR
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	%	100	100%	Tercapai	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	%	81	82%	Tercapai	Dinas PUPR
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Tingkat Kemantapan Jalan	%	81	82%	Tercapai	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan bersertifikat	%	18	21%	Tercapai	Dinas PUPR
	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang terintegrasi melalui 3 layanan dasar (SIPJAKI)	%	100	65%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
	Persentase Meningkatnya Tertib Jasa Konstruksi	%	23	15%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	86	86%	Tercapai	Dinas PUPR
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	86	86%	Tercapai	Dinas PUPR
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	86	86%	Tercapai	Dinas PUPR
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	86	86%	Tercapai	Dinas PUPR
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	86	86%	Tercapai	Dinas PUPR
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	43.35	43.35%	Tercapai	Dinas Perkim
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	43.35	43.35%	Tercapai	Dinas Perkim





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	39.47	43.35%	Tercapai	Dinas Perkim
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	43.35	43.35%	Tercapai	Dinas Perkim
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	30.93	30.93%	Tercapai	Dinas Perkim
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	30.93	30.93%	Tercapai	Dinas Perkim
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	30.93	30.93%	Tercapai	Dinas Perkim
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase meningkatnya kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum	%	45.16	45.73%	Tercapai	Dinas Perkim





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase meningkatnya kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum Permukiman	%	45.16	45.73%	Tercapai	Dinas Perkim
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	%	100	100%	Tercapai	BPBD
	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100%	Tercapai	BPBD
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100%	Tercapai	BPBD
	Persentase peningkatan upaya penanganan darurat bencana	%	100	100%	Tercapai	BPBD
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	%	100	98.47%	Tidak Tercapai	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Permasalahan Trantibum yang berhasil ditindak lanjuti	%	100	98.66%	Tidak Tercapai	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Masyarakat dan Aparatur yang Memahami dan Mematuhi Tentang Produk Hukum Daerah	%	100	100%	Tercapai	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran



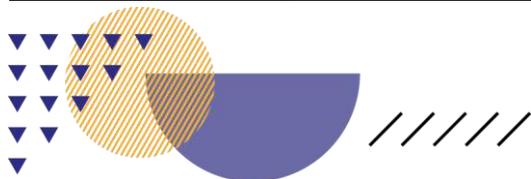


Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Petugas PPNS/Sekr Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Pertahun	%	100	73.33%	Tidak Tercapai	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatkan Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	%	100	100%	Tercapai	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Tingkat Responsibilitas Aparatur Satlinmas dan Damkar Kab/Kota yang Sigap dan Terampil	%	100	100%	Tercapai	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>						
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	10.6	10.75%	Tercapai	Dinas Sosial
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase dokumen izin pengumpulan sumbangan lintas kabupaten/kota yang diterbitkan	%	75	34.71%	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase PSKS Yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	10.6	10.75%	Tercapai	Dinas Sosial





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mandiri	%	18.79	14.62%	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	2.27	0%	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	2.26	0%	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase anak terlantar/jalanan yang terampil dan lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	0.27	0%	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase peningkatan pendapatan penduduk miskin	%	6.48	8.27%	Tercapai	Dinas Sosial
	Persentase PPKS yang mandiri	%	18.79	14.62%	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	729.25%	Tercapai	Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase peningkatan pendapatan miskin	%	6.48	8.27%	Tercapai	Dinas Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100	100%	Tercapai	Dinas Sosial



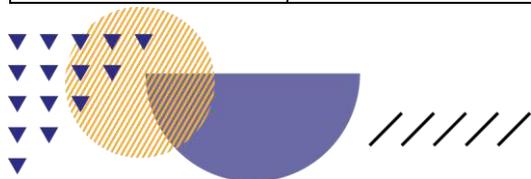


Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah makam yang dipelihara	Makam	6	6 Makam	Tercapai	Dinas Sosial
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKENAAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>						
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	100	100%	Tercapai	Disnakertrans
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah data yang disusun	Data	4	4 Data	Tercapai	Disnakertrans
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0.17	0.06%	Tidak Tercapai	Disnakertrans
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	%	100	83%	Tidak Tercapai	Disnakertrans
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penganggur yang dilatih	%	0.03	4.51%	Tercapai	Disnakertrans
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga Kerja yang ditempatkan	%	30	25.93%	Tidak Tercapai	Disnakertrans
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wirausaha baru yang dilatih	%	100	100%	Tercapai	Disnakertrans
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase angkatan kerja yang bekerja	%	95.26	95.26%	Tercapai	Disnakertrans





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang terlayani	%	100	100%	Tercapai	Disnakertrans
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	10	10.30%	Tercapai	Disnakertrans
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Yang Memiliki PP dan PKB	%	30	16.07%	Tidak Tercapai	Disnakertrans
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%	60	100%	Tercapai	Disnakertrans
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah	Persentase Kenaikan UMP dan UMK	%	8	8%	Tercapai	Disnakertrans





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)						
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	100	27.85%	Tidak Tercapai	Disnakertrans
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase peningkatan perusahaan yang taat aturan ketenagakerjaan	%	10	93%	Tercapai	Disnakertrans
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	20	30.85%	Tercapai	DPPPA
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah tingkat daerah Provinsi yang telah dilatih PUG	Lembaga	50	48 Lembaga	Tidak Tercapai	DPPPA





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	umlah Kelompok usaha Perempuan binaan DP3A Provinsi Kalimantan Selatan yang berhasil mandiri	Kelompok	1	1 Kelompok	Tercapai	DPPPA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	Lembaga	50	48 Lembaga	Tidak Tercapai	DPPPA
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Kebijakan	1	1 Kebijakan	Tercapai	DPPPA
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100%	Tercapai	DPPPA
	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPPo (per 100.000)penduduk perempuan	%	9.5	23.32%	Tercapai	DPPPA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun	%	15	15.30%	Tercapai	DPPPA
	Indeks Ketahanan Keluarga	%	82	82%	Tercapai	DPPPA





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Anggaran Responsif Gender	%	20	30.85%	Tercapai	DPPPA
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender	Dokumen	1	1 Dokumen	Tercapai	DPPPA
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	75	92.30%	Tercapai	DPPPA
	Rasio Anak korban Kekerasan	%	1.2	2.50%	Tercapai	DPPPA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Anak korban Kekerasan	%	1.2	2.50%	Tercapai	DPPPA
	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100%	Tercapai	DPPPA
	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	100%	Tercapai	DPPPA
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Yang Memenuhi Stok Pangan Minimal (%)	%	74.18	75.82%	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya Stok Penyimpanan Cadangan Pangan dan Tersedianya Infrastruktur dan Sarana Pendukung Lainnya	Ton	4.5	4.5 Ton	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koefisien Variasi (CV) harga beras di tingkat konsumen (%)	%	7.2	6.84%	Tidak Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
	Konsumsi beras per kapita per tahun (Kg/Kap/Th)	Kg/Kap/Th	93.6	93.6 Kg/Kap/Th	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
	Konsumsi pangan lokal per kapita per tahun (Kg/Kap/Th)	Kg/Kap/Th	20.94	23.35 Kg/Kap/Th	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Desa Rawan Pangan (%)	%	16.09	13.39%	Tidak Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Tersediannya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi	Peta	1	1 Peta	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Informasi Situasi Kerentanan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen	1	1 Dokumen	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Komoditas Pangan Yang Aman Dikonsumsi (%)	%	80	91.18%	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Teregistrasi dan Tersertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sertifikat	5	13 Sertifikat	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>						
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	108%	Tercapai	Dinas PUPR
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	108%	Tercapai	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	20%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	20%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	40%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD Penanggungjawab
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	40%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	93%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	93%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Jasa Lingkungan yang ditingkatkan/dipertahankan	%	35.94	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase luasan yang dijamin pengamanannya lingkungannya	%	62	62%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Presentase Luasan lahan terganggu yang terkendali	%	58	58%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter Indeks Kualitas Air	%	13.46	14.84%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase kualitas udara dengan kategori baik dan sangat baik	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase air laut dengan kualitas kategori baik	%	21.74	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Angka Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Gg CO2-eq	7406	16002 Gg CO2-eq	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Ekosistem Lahan Gambut	indeks	54.15	49.63 indeks	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan keanekaragaman hayati	%	7.2	12.97%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penambahan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	0.031	0.04%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan/kegiatan yang menerapkan pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan komitmen aturan pengumpulan Limbah B3	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase ketaatan penghasil, pengangkut, pemanfaat dan pengolah limbah B3	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase dunia usaha yang taat terhadap pengelolaan lingkungan	%	100	98%	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase dunia usaha yang menerapkan dokumen lingkungan	%	100	98%	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	%	50	33%	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase luas kawasan MHA yang diusulkan untuk mendapatkan pengakuan	%	18	17%	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang berbudaya lingkungan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase kampung atau desa yang melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase partisipasi komunitas yang melakukan kegiatan pelestarian lingkungan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase peningkatan pelestari lingkungan sesuai kriteria	%	64.71	64.71%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapat penghargaan di bidang Lingkungan Hidup sesuai kriteria	%	100	0%	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase dunia usaha yang mendapat kategori taat dibidang lingkungan hidup	%	100	0%	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD Penanggungjawab
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus LH yang diselesaikan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase penyelesaian kasus LH yang dilimpahkan pada pihak berwenang	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di Kalsel	%	99	79.24%	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Pengurangan emisi dari Limbah Padat domestik di TPA (Pembuangan akhir sampah padat)	%	30.05	0%	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan	%	40	52.49%	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kalimantan Selatan	%	99.2	97.99%	Tidak Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran di Kalimantan Selatan	%	95	94.54%	Tidak Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
	Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pasangan dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan	%	92.30	92.30%	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
	Tingkat Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) Tahun	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan	%	92.30	92.30%	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
Penyediaan Profil Kependudukan	Tersedianya data profil kependudukan skala provinsi per tahun	Dokumen	1	1 Dokumen	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	%	14	0%	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Indeks Ketahanan Sosial	Poin	0.76	0 Poin	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	%	14	0%	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
	Indeks Ketahanan Lingkungan	Poin	0.69	0 Poin	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	%	14	0%	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Poin	0.6	0 Poin	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Indeks Ketahanan Sosial	Poin	0.76	0 Poin	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Indeks Ketahanan Sosial	Poin	0.76	0 Poin	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Poin	0.6	0 Poin	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Indeks Ketahanan Lingkungan	Poin	0.69	0 Poin	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan	%	7.96	92.30%	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.5	0.71%	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penurunan Unmidneed	%	9	0%	Tidak Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terwujudnya Penguatan Kerjasama dengan Stakeholders dan MitraKerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	%	81.3	78.9 %	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan
	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicadangkan	Buah	4	4 Buah	Tercapai	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	One Time Performance Layanan Transportasi (Darat)	%	29.25	75.5 %	Tercapai	Dinas Perhubungan
	Rasio Konektivitas Provinsi	%	0.59	0.603 %	Tercapai	Dinas Perhubungan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian Per 100.000 Keberangkatan	kejadian	0	3.075 kejadian	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian Per 100.000 Keberangkatan	kejadian	0	0.603 kejadian	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan
	One Time Performance Layanan Transportasi (Air)	%	29.25	75.5 %	Tercapai	Dinas Perhubungan
	Rasio Konektivitas Provinsi	%	0.59	0.603 %	Tercapai	Dinas Perhubungan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	% Peningkatan Visitor Website dan Sosmed (Akses) Informasi Publik Yang Valid	%	11	11%	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indek domain pelayanan publik	Indeks	2.9	3.75 Indeks	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SKPD yang menerapkan e-Government	%	100	84%	Tidak Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase SKPD Esselon II dengan Sub Domain Resmi	%	100	93%	Tidak Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase SKPD Menerapkan Indikator SPBE	%	100	84%	Tidak Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM</b>						
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	35	35%	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentasi Koperasi yang Patuh pada Peraturan Perundang-undangan	%	35	37%	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase KSP/USP yang patuh pada peraturan perundang-undangan	%	30	32%	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM



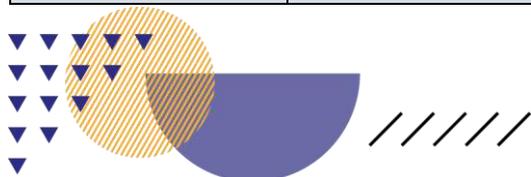


Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	33	33%	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase KSP/USP yang sehat	%	33	35%	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	25	25%	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	16	0%	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM

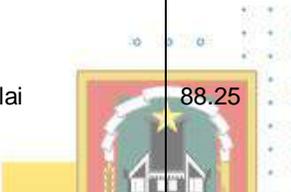




Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	%	1.8	1.8 %	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Peningkatan Permodalan UMKM	%	0.52	0%	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	1.8	1.8 %	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Presentase peningkatan omzet UMKM	%	5	0%	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>						
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kemitraan	Persen	100	100 Persen	Tercapai	DPMPSTP
	Persentase Potensi Investasi Berbasis Lingkungan	Persen	20	20 Persen	Tercapai	DPMPSTP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Calon Investor yang Berminat Investasi	Persen	30	30 Persen	Tercapai	DPMPSTP





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan promosi investasi	Kali	5	5 Kali	Tercapai	DPMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM Penanganan (Pelayanan) pengaduan	Nilai	88.25	88.25 Nilai	Tercapai	DPMPTSP
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai IKM Penanganan (Pelayanan) pengaduan	Nilai 	88.25	88.25 Nilai	Tercapai	DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang aktif Dalam Investasinya	Persen	35	35.7 Persen	Tercapai	DPMPTSP
	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	Persen	100	100 Persen	Tercapai	DPMPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi	Persen	100	100 Persen	Tercapai	DPMPTSP
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi	Persen	100	100 Persen	Tercapai	DPMPTSP





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>						
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	%	78	78%	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	orang	1193	1193 orang	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	OKP	25	25 OKP	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet Binaan PPLP Yang Berprestasi	%	25	25%	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Atlet Olahraga Berprestasi	%	20	20%	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Tenaga Keolahragaan Berprestasi	%	15	14%	Tidak Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepramukaan	%	30	30%	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	organisasi	1	1 organisasi	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>						
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Lengkap Dan Valid	%	85	85%	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Peningkatan Jenis Data Statistik Sektoral Yang Lengkap dan Valid	Jenis	30	30 Jenis	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Prov. Kalsel	Poin	325	346 Poin	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Nilai Indeks KAMI	%	12	18.75 %	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>						
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	persen	3.76	70.57 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase ragam seni budaya daerah yang diaktualisasikan	persen	1.88	75 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	persen	3.76	4.39 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	persen	3.76	4.39 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ragam seni budaya daerah yang diaktualisasikan	persen	1.88	75 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	persen	3.76	4.39 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase Nilai sejarah yang dilestarikan	persen	0.94	14 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	persen	3.76	4.39 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	2.8	32 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	2.8	14 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	persen	3.76	4.39 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD Penanggung Jawab
Pengelolaan Museum Provinsi	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	2.8	32 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>						
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	45	45%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Buku yang Dipinjam, Persentase Peningkatan Perpustakaan Sekolah yang Pengelolaannya Sesuai Standar, Persentase Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka sesuai Kebutuhan Pemustaka, Persentase Koleksi Bahan Pustaka yang diolah dan diotomasi	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Buku yang Dipinjam, Jumlah Pengunjung Perpustakaan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Koleksi Deposit yang di Olah, dialih mediakan dan dilestarikan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Persentase Peningkatan Koleksi Deposit yang di Olah, dialih mediakan dan dilestarikan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>						





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase SKPD yang Mengelola Arsip Sesuai NSPK	%	36	36%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pada pasal 40 dan pasal 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pada pasal 40 dan pasal 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan negara,pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase SKPD yang Mengelola Arsip Sesuai NSPK	%	36	36%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD Penanggungjawab
Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pada pasal 40 dan pasal 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pada pasal 40 dan pasal 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pada pasal 40 dan pasal 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase SKPD yang Mengelola Arsip Sesuai NSPK	%	36	36%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan negara,pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentasi Berkurangnya Luas Kawasan Kritis Ekosistem Pesisir	%	0.72	0.86 %	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di	Persentasi Berkurangnya Luas Kawasan Kritis Ekosistem Pesisir	%	0.72	0.86 %	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Luar Minyak dan Gas Bumi						
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentasi Berkurangnya Luas Kawasan Kritis Ekosistem Pesisir	%	0.72	0.86 %	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi	Ton	264476.48	201252 Ton	Tidak Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Laut dan PUD	%	100	76.09 %	Tidak Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Laut dan PUD	%	100	76.09 %	Tidak Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Laut dan PUD	%	100	76.09 %	Tidak Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	Ton	157000	157009.39 Ton	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut yang dapat dibina	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut yang dapat dibina	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD Penanggungjawab
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaat ruang laut, pelaku usaha di bidang perikanan tangkap dan pelaku usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan dilaut sampai dengan 12 mil	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap, bidang pembudidayaan ikan dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya dilintas kabupaten	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi Ikan masyarakat	Kg/Kapita/Tahun	62.06	62.06 Kg/Kapita/Tahun	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Padi	%	1	1%	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Jagung	%	1	1%	Tercapai	Dinas TPH





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kacang Tanah	%	0.5	0.5 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kedelai	%	0.18	0.18 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kacang Hijau	%	0.25	0.25 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Ubi Kayu	%	0.15	0.15 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Ubi Jalar	%	0.15	0.15 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Porang	%	3	3%	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Bawang merah	%	1	1.2 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Cabai Besar	%	2.5	3.5 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Cabai Rawit	%	2.5	2.5 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Jeruk	%	1	2.91 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Pisang	%	2	2.6 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Durian	%	2	2.29 %	Tercapai	Dinas TPH
	Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet)	Kg/Ha	75.33	72 Kg/Ha	Tidak Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	5	5%	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Luas Tanam Padi	%	2	1.75 %	Tidak Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Luas Tanam Jagung	%	3	2.25 %	Tidak Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Luas Tanam Bawang Merah	%	2	3.7 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Luas Tanam Cabe Besar	%	2	13.07 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Luas Tanam Cabe Rawit	%	2	5.6 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase ketersediaan prasarana perkebunan dan peternakan yang sesuai untuk peningkatan produksi	%	15	15%	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Perkebunan dan Peternakan	%	13.7	13.7 %	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Bibit Ternak Sapi Sesuai SNI pada wilayah sumber bibit	%	20	20%	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian jumlah kasus penyakit hewan menular	%	80	85%	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	8	8%	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Prosentase unit usaha yang diaudit NKV	%	3	3%	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luasan pertanaman yang dapat dikendalikan akibat bencana alam	%	2.5	2.16 %	Tidak Tercapai	Dinas TPH
	Luas areal pengendalian penanggulangan bencana	Ha	6300	659 Ha	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Peningkatan Tanaman Pangan yang Aman dari DPI, Kebakaran Lahan dan Bencana Alam	%	97.5	99.41 %	Tercapai	Dinas TPH





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
	Persentase Peningkatan Tanaman Hortikultura yang Aman dari DPI, Kebakaran Lahan dan Bencana Alam	%	97.5	91.07 %	Tidak Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Tanaman Pangan yang Aman dari OPT	%	97.5	99.98 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Tanaman Hortikultura yang Aman dari OPT	%	97.5	94.41 %	Tidak Tercapai	Dinas TPH
	Persentase luas areal pengendalian bencana perkebunan dan peternakan	%	15	15%	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi teknis usaha perkebunan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pekebun rakyat yang memiliki STDB	%	16	16%	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Naik Kelas	%	3.6	3.6 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase SDM Pertanian yang berkualitas	%	1.38	1.38 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan metode dan informasi penyuluhan pertanian	%	20.02	20.02 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Penguatan Kelembagaan Perkebunan dan Peternakan	%	10.83	10.83 %	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan SDM Perkebunan dan Peternakan	%	1.2	1.2 %	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi pekebun dan peternak	Korporasi	1	1 Korporasi	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>						
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggulan yang Sesuai Sapta Pesona	%	20	19.38 %	Tidak Tercapai	Dinas Pariwisata
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Perancangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	%	100	100%	Tercapai	Dinas Pariwisata
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Peningkatan Objek Wisata Sesuai Sapta Pesona dan Pokdarwis yang aktif	%	100	100%	Tercapai	Dinas Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	10	227%	Tercapai	Dinas Pariwisata
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	5	1069%	Tercapai	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK	Persentase Kenaikan Hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif	%	20	19.38 %	Tidak Tercapai	Dinas Pariwisata





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
KEKAYAAN INTELEKTUAL						
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Peningkatan Kelengkapan Fasilitas dan Keterampilan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	100	100%	Tercapai	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tingkat hunian akomodasi	%	40	59%	Tercapai	Dinas Pariwisata
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Pariwisata
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha bidang kehutanan terhadap pemenuhan pembayaran PNBPN dan Retribusi Daerah	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kehutanan
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan Retribusi dan PNBPN	%	25	100%	Tercapai	Dinas Kehutanan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pelayanan pemberian dokumen Pertek RKT bagi IUPHHK HA dan IUPHHK HT	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kehutanan
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kehutanan
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase penanganan gangguan kemanan hutan dan hasil hutan serta kebakaran hutan dan lahan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kehutanan
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persentase peningkatan pendapatan Kelompok Tani Hutan (KTH) pada Izin Perhutanan Sosia	%	5	27.83 %	Tidak Tercapai	Dinas Kehutanan
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Persentase industri hasil hutan yang patuh dalam menerapkan SI RPBBI	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kehutanan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esesial yang aman dari ancaman kepunahan	%	100	119%	Tercapai	Dinas Kehutanan
	Tutupan Hutan dan Lahan	%	36.91	35.36 %	Tercapai	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional	%	25	23.53 %	Tercapai	Dinas Kehutanan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD Penanggung Jawab
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pemenuhan pelayanan perhutanan sosial dan penyuluhan kehutanan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Rehabilitasi DAS	%	5	86.13 %	Tercapai	Dinas Kehutanan
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penanaman Rehab DAS oleh IPPKH	%	100	72.86 %	Tidak Tercapai	Dinas Kehutanan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMEBR DAYA MINERAL</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase zona pemanfaatan air tanah yang dikonservasi	%	34.33	34.33 %	Tercapai	Dinas ESDM
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase luas wilayah air tanah yang dikonservasi	%	4.29	4.29 %	Tercapai	Dinas ESDM
Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air	Persentase rekomendasi teknis perizinan air tanah yang diterbitkan	%	20	20%	Tercapai	Dinas ESDM





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Tanah dalam Daerah Provinsi						
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan kewajiban terkait NPA	%	84.61	100%	Tercapai	Dinas ESDM
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase luas lahan terganggu akibat usaha pertambangan yang direklamasi (IUP)	%	5	4.78 %	Tidak Tercapai	Dinas ESDM
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase perusahaan yang memenuhi kaidah pertambangan yang baik	%	20	15.45 %	Tidak Tercapai	Dinas ESDM
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase perusahaan yang mempunyai IUJP	%	100	100%	Tercapai	Dinas ESDM





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Persentase peraturan yang diterbitkan terkait harga patokan mineral bukan logam dan batuan	%	20	20%	Tercapai	Dinas ESDM
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase penghematan pemakaian energi	%	20	12.66 %	Tidak Tercapai	Dinas ESDM
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Persentase institusi pemerintah daerah yang melaksanakan penghematan energi	%	57.14	100%	Tercapai	Dinas ESDM
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase rumah tangga tidak mampu berlistrik	%	3.54	0%	Tidak Tercapai	Dinas ESDM
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase perusahaan yang memiliki izin operasi yang taat aturan	%	30	100%	Tercapai	Dinas ESDM
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase perusahaan yang memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang taat aturan	%	80	100%	Tercapai	Dinas ESDM
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah	Persentase rumah tangga yang menerima bantuan listrik gratis	%	24	0%	Tidak Tercapai	Dinas ESDM





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Terpencil dan Perdesaan						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tertib Usaha	Persen	5.08	5.08 Persen	Tercapai	Dinas Perdagangan
Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Tertib Usaha	Persen	5.8	5.8 Persen	Tercapai	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	10.5	9.37 Persen	Tidak Tercapai	Dinas Perdagangan
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	10.5	9.37 Persen	Tidak Tercapai	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	0.1	0.0015 Persen	Tidak Tercapai	Dinas Perdagangan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Stabilitas dan Jumlah ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	0.1	0.0015 Persen	Tidak Tercapai	Dinas Perdagangan
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi	Persen	90	90 Persen	Tercapai	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Persen	5.96	65.94 Persen	Tercapai	Dinas Perdagangan
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Persen	5.96	65.94 Persen	Tercapai	Dinas Perdagangan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	Persen	65	65 Persen	Tercapai	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa konsumen yang ditindak lanjuti	Persen	100	105 Persen	Tercapai	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Beredar Yang Sesuai Standar	Persen	100	143 Persen	Tercapai	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	10.5	9.37 Persen	Tidak Tercapai	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	10.5	9.37 Persen	Tidak Tercapai	Dinas Perdagangan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri	%	5.75	5.75 %	Tercapai	Dinas Perindustrian
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Kenaikan Nilai Produksi Industri	%	4.9	68.3 %	Tercapai	Dinas Perindustrian





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	18.75	133%	Tercapai	Dinas Perindustrian
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	61.53	53.33 %	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perindustrian
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Mampu Mengakses SIINas	%	82.71	59%	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>						
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Sisa Areal HPL yang dapat dikembangkan oleh Pemda	%	100	193%	Tercapai	Disnakertrans
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Luas Sisa Lahan Pencadangan di Dalam HPL	Hektar	2000	3850 Hektar	Tercapai	Disnakertrans





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang Mandiri	%	100	100%	Tercapai	Disnakertrans
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan pembinaannya	Satuan Permukiman	3	3 Satuan Permukiman	Tercapai	Disnakertrans
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH</b>						
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan tingkat capaian hasil (Outcome) 100%	%	100	100	Tercapai	Biro Pemerintahan
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Rekomendasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	%	100	100	Tercapai	Biro Pemerintahan
Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	%	100	100	Tercapai	Biro Pemerintahan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Kerjasama di Kalimantan Selatan yang ditindaklanjuti	%	100	100	Tercapai	Biro Pemerintahan
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum Daerah Berkualitas Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Dimanfaatkan Oleh Pemerintah Daerah (Pemda)	%	100	25%	Tidak Tercapai	Biro Hukum
	Persentase Bantuan Hukum, Layanan Hukum, Dan Layanan Informasi Produk Hukum Daerah Yang Baik	%	100	25%	Tidak Tercapai	Biro Hukum
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase perangkat daerah prov kalsel dengan kelembagaan yang ideal	%	100	100%	Tercapai	Biro Organisasi
	Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan reformasi birokrasi dengan baik	%	100	100%	Tercapai	Biro Organisasi
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Permasalahan Pembangunan Daerah yang dapat Diselesaikan	%	100	100%	Tercapai	Biro Administrasi Pembangunan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi masalah pelaksanaan pembangunan daerah sumber dana APBD, APBN dan Wilayah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	%	100	100%	Tercapai	Biro Administrasi Pembangunan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Permasalahan Pembangunan daerah yang dianalisa dan dirumuskan sebagai bahan kebijakan pembangunan daerah	%	100	100%	Tercapai	Biro Administrasi Pembangunan
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan	%	100	96.67 %	Tidak Tercapai	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Persentase Implementasi Regulasi Bidang Kesra Non Pelayanan Dasar	%	100	100%	Tercapai	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Persentase Koordinas dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Pelayanan Dasar Yang Difasilitasi	%	100	100%	Tercapai	Biro Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Pengadaan Barang dan Jasa	Inovasi Pelayanan	7	9 Inovasi Pelayanan	Tercapai	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Level	3	3 Level	Tercapai	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Point	85	99.7 Point	Tercapai	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BLUD yang Baik	%	100	100%	Tercapai	Biro Perekonomian
	Persentase BUMD yang Sehat	%	100	100%	Tercapai	Biro Perekonomian





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
	Prosentase Regulasi Lingkup Perekonomian yang Diimplementasikan	%	100	100%	Tercapai	Biro Perekonomian
	Tingkat Inflasi yang Stabil	%	3	6.9 %	Tercapai	Biro Perekonomian
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	IKM DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pelayanan Set. DPRD	%	82.5	84.21 %	Tercapai	Sekretariat DPRD
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Raperda Yang Diusulkan Tepat Waktu Ke Kemendagri	%	100	41.18 %	Tidak Tercapai	Sekretariat DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD	Nilai Komponen IKM Layanan Layanan Persidangan	Poin	40	84.67 Poin	Tercapai	Sekretariat DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir	%	100	133%	Tercapai	Sekretariat DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Jadwal Rapat Yang Tepat Waktu	%	100	80.2 %	Tidak Tercapai	Sekretariat DPRD
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>						
<b>PERENCANAAN</b>						
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Prov / Kab / Kota dengan nilai baik	%	100	100%	Tercapai	Bappeda





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen RPJMD / RKPD Yang Tepat Waktu dan Tepat Aturan	%	100	100%	Tercapai	Bappeda
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Data dan informasi pembangunan daerah yang update, relevan, dan time series	%	100	100%	Tercapai	Bappeda
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rekomendasi hasil pengendalian evaluasi daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100%	Tercapai	Bappeda
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) SKPD Provinsi dengan nilai baik	%	100	100%	Tercapai	Bappeda
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan (Renstra/Renja) SKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia dengan nilai baik	%	100	100%	Tercapai	Bappeda
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan (Renstra/Renja) SKPD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan nilai baik	%	100	100%	Tercapai	Bappeda
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase dokumen perencanaan (Renstra/Renja) SKPD bidang Infrastruktur dan Wilayah dengan nilai baik	%	100	100%	Tercapai	Bappeda





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
<b>KEUANGAN</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	%	100	100%	Tercapai	Bakueda
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terwujudnya perencanaan dan dokumen keuangan daerah yang berkualitas dan tepat waktu	%	100	100%	Tercapai	Bakueda
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan keuangan daerah kab/kota	%	100	100%	Tercapai	Bakueda
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tertib penatausahaan perbendaharaan keuangan daerah	%	100	100%	Tercapai	Bakueda
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terwujudnya tata kelola pelaksanaan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tepat waktu dan akuntabel	%	100	100%	Tercapai	Bakueda
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan keuangan kab/kota	%	100	100%	Tercapai	Bakueda
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terwujudnya perencanaan dan dokumen keuangan daerah yang berkualitas dan tepat waktu	%	100	100%	Tercapai	Bakueda
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	%	100	100%	Tercapai	Bakueda





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	%	100	100%	Tercapai	Bakueda
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pendapatan daerah	%	1.69	1126.75 %	Tercapai	Bakueda
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	%	100	82.41 %	Tidak Tercapai	Bakueda
<b>KEPEGAWAIAN</b>						
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase SKPD dengan IP ASN Kategori Sedang	%	75	51.02 %	Tidak Tercapai	BKD
	Persentase SKPD melaksanakan pemetaan talenta sumber daya manusia aparatur	%	85	95.92 %	Tercapai	BKD
	Indeks Kepuasan PNS Terhadap Pelayanan Bidang Kepegawaian	Indek	85	85.07 Indek	Tercapai	BKD
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>						
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Alumni Pelatihan yang Menerapkan Kompetensi Teknis, Manajerial, Latihan Dasar, Fungsional dan Pemerintahan Sesuai Tujuan Diklat	Persen	70	72.22 Persen	Tercapai	BPSDM
	Indeks Kepuasan Pelayanan BPSDM	persen	100	83.17 persen	Tidak Tercapai	BPSDM
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD Penanggungjawab
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan	%	90	95.54 %	Tercapai	BALITBANGDA
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti oleh stake holder bidang sosial dan pemerintahan yang sesuai standar dan dikembangkan	%	100	94.68 %	Tidak Tercapai	BALITBANGDA
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti oleh stake holder bidang sosial dan pemerintahan yang sesuai standar dan dikembangkan	%	100	99.59 %	Tidak Tercapai	BALITBANGDA
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti oleh stake holder bidang ekonomi dan pembangunan yang sesuai standar dan dikembangkan	%	100	86.24 %	Tidak Tercapai	BALITBANGDA
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti oleh stake holder bidang inovasi dan teknologi yang sesuai standar dan dikembangkan	%	100	98.36 %	Tidak Tercapai	BALITBANGDA
<b>PENGELOLAAN PENGHUBUNG</b>						
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Badan Penghubung	persen	82	82 persen	Tercapai	BADANG PENGHUBUNG





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Pejabat Daerah/SKPD/Komunitas/Masyarakat yang terfasilitasi oleh Badan Penghubung	kegiatan	18	100 kegiatan	Tercapai	BADANG PENGHBUNG
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH</b>						
<b>INSPEKTUR</b>						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OBRİK Tanpa Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah	%	100	100%	Tercapai	INSPEKTORAT DAERAH
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Menurunnya Perangkat daerah dengan temuan Material	%	100	100%	Tercapai	INSPEKTORAT DAERAH
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Presentase Kasus Pengaduan /Pemeriksaan Khusus yang di tindaklanjuti	%	100	100%	Tercapai	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	%	3.7	3.93 %	Tercapai	INSPEKTORAT DAERAH
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan	Dokumen	1	1 Dokumen	Tercapai	INSPEKTORAT DAERAH
Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Jumlah Unit Pelayanan Publik Yang lulus administrasi WBK	Unit	20	20 Unit	Tercapai	INSPEKTORAT DAERAH
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>						
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Capaian Revolusi Mental	point	69.28	70.47 point	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental aktif	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	%	70	70%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada dan Persentase Penurunan Jumlah Konflik Berlatar Belakang Politik	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	point	80	0 point	Tidak Tercapai	BADAN KESBANGPOL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang terbina dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Ketahanan Nasional	point	80	0 point	Tidak Tercapai	BADAN KESBANGPOL





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD Penanggung Jawab
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Ormas/LSM yang terbina dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks Kewaspadaan Nasional	point	70	0 point	Tidak Tercapai	BADAN KESBANGPOL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan potensi konflik dan Persentase penyelesaian konflik sosial	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Capaian Revolusi Mental	point	69.28	70.47 point	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental aktif	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/pilkada	%	70	70%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada dan Persentase Penurunan Jumlah Konflik Berlatar Belakang Politik	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	point	80	0 point	Tidak Tercapai	BADAN KESBANGPOL





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Ormas/LSM yang terbina dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Ketahanan Nasional	point	80	0 point	Tidak Tercapai	BADAN KESBANGPOL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Ormas/LSM yang terbina dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks Kewaspadaan Nasional	point	70	0 point	Tidak Tercapai	BADAN KESBANGPOL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan	Persentase penurunan potensi konflik dan Persentase penyelesaian konflik sosial	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Penanganan Konflik Sosial						

Sumber : Emonev Bappeda Provinsi Kalsel 2022 dan RPJMD 2021-2026 prov kalsel





**Tabel 2.150** Rekapitulasi Hasil Evaluasi Program - Kegiatan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

URAIAN	JUMLAH YANG DIEVALUASI	JUMLAH INDIKATOR YANG DIEVALUASI	KRETERIA			
			TERCAPAI	%	TIDAK TERCAPAI	%
PROGRAM	152	235	171	72.8	64	27.2
KEGIATAN	185	202	148	73.3	54	26.7

## 2.5.2 Evaluasi Realisasi RPJMD Tahun 2021-2026

Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, mengamanatkan bahwa Evaluasi dan pengendalian RKPD perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi RKPD dengan RPJMD.

Indikator kinerja makro merupakan tolok ukur kemajuan yang akan dicapai oleh perangkat pemerintah daerah dan seluruh masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mewujudkan visi dan prioritas dalam RPJMD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan. Penetapan indikator kinerja makro pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.

RKPD TAHUN 2024  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**Tabel 2.151** Realisasi Capaian Indikator Kinerja Makro Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2021	Target RPJMD 2022	Target P-RKPD 2022	Realisasi Tahun 2022	Keterangan Capaian Tahun 2022		
						Capaian Dari Target RPJMD	Capaian Dari Target P-RKPD 2022	Capaian Dari Tahun Sebelumnya
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,28	71.7	73,44 - 73,48	71,84	Tercapai	Belum Tercapai	Naik
2	Usia Harapan Hidup	68,83	70.64	70,64	69.13	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Naik
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,81	12.94	12,94	12,82	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Naik





No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2021	Target RPJMD 2022	Target P-RKPD 2022	Realisasi Tahun 2022	Keterangan Capaian Tahun 2022		
						Capaian Dari Target RPJMD	Capaian Dari Target P-RKPD 2022	Capaian Dari Tahun Sebelumnya
4	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,34	8.47	8,7	8.46	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Naik
6	Angka Pengangguran	4,95	4.39	5,5 - 6,2	4,74	Belum Tercapai	Tercapai	Turun
5	Pertumbuhan Ekonomi	3,48	4,0 - 4,5	5,4 - 6,0	5,11	Tercapai	Tercapai	Naik
6	Angka Kemiskinan	4,56	4,8 - 4,6	8,5 - 9,0	4,61	Tercapai	Tercapai	Naik
7	Indeks Gini	0,33	0.328	0,376 - 0,378	0,309	Tercapai	Tercapai	Turun
8	IKLH	61,94	70.58	62,63	71,97	Tercapai	Tercapai	Naik

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel 2021-2026. P-RKPD 2020, BPS Kalsel 2023

**Tabel 2.152** Evaluasi Kinerja RPJMD 2021 - 2026 s.d Tahun 2022

MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ RPJMD	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022			
					Target	Capaian	Status	
<b>KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA</b>								
Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur								
Meningkatnya Toleransi dan Nilai-nilai Keagamaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	-	69.1	72.71	69,68 *	Tidak Tercapai	
Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama	Jumlah Konflik antar dan inter umat beragama	Kasus	0	0	0	0	Tercapai	
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Angka	70.91	71.28	72.46	71.84	Tidak Tercapai	
Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.29	8.34	8.47	8.46	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.68	12.81	12.94	12.82	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68.66	68.83	70.64	69.13	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan





MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ RPJMD	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022			
					Target	Capaian	Status	
Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88.86	88.91	88.97	88.86*	Tidak Tercapai	Dinas P3A
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74.48	74.44	75.39	74,58*	Tidak Tercapai	Dinas P3A
Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	50.67	51.08	52	50.67*	Tidak Tercapai	Dispora
Menurunnya Pernikahan Anak	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	%	16.24	16.26	15.01	17*	Tidak Tercapai	Discapil & KB
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65,11	69,87	69,89	61,23*	Tidak Tercapai	Dinas P3A
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	0	58,64*	60.15	61*	Tercapai	Dinas P3A
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga	%	0	0	35	35*	Tercapai	Dispora
	Jumlah Medali Emas	Buah	0	45	30	35*	Tercapai	Dispora
<b>Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata</b>								
Meningkatnya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-1.81	3.48	4,0 - 4,5	5.11	Tercapai	
Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	-0.96	1.16	0,65 - 2,5	0.74*	Tercapai	Dinas TPH, Disbunak, DisK&P, Dishut
	LPE Sektor Industri Pengolahan	%	-3.38	6.23	1,9 - 2,57	5.4*	Tercapai	Dinas Perindustrian
	LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	%	-3.38	2.2	6,95 - 7,2	7.15	Tercapai	Dinas Perdagangan
	LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	%	-2.02	2.3	6,18 - 6,61	9.63	Tercapai	Dinas Pariwisata





MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ RPJMD	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022			
					Target	Capaian	Status	
Meningkatkan Investasi yang berdampak ke daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun Rupiah	7.76	12.72	11.66	6,66 T	Tidak Tercapai	Dinas PMPTSP
Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan	Persentase Penduduk Miskin	%	4.38	4.83	4,80 - 4,60	4.61	Tercapai	Dinas Sosial
	Indeks Gini	Indeks	0.332	0.33	0.328	0.309	Tercapai	
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Mandiri	%	18.79	19,00*	19.29	23.60	Tercapai	Dinas Sosial
Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Rupiah per Orang per Tahun	12,032,000	12,143,000	12,146,875	12,469	Tercapai	
	Nilai Tukar Petani	%	99.18	101,58*	102.23	105.88	Tercapai	
Menurunnya tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.74	4.95	4.39	4.74	Tidak Tercapai	Disnakertrans
Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69.33	69.26	69.74	67.55	Tidak Tercapai	Disnakertrans
Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian								
Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan	Indeks Williamson	Indeks	0.391	0,383*	0.375	0,383*	Tidak Tercapai	
Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	Indeks	67.56	76.57	79.33	81.75	Tercapai	Dinas PUPR, Dinas Perkim
Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Rasio Konektivitas	Rasio	0.55	0.57	0.59	0.60	Tercapai	Dishub
Terwujudnya pembangunan kawasan-kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	%	85	83.5	84	84.00	Tercapai	Dinas PUPR





MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ RPJMD	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022			
					Target	Capaian	Status	
Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik								
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68.47	70,85*	72.05	68.47*	Tidak Tercapai	
Terwujudnya Pemerintahan yg Bebas KKN	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks	3.7	3,8*	3.85		Tercapai	Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	WTP	WTP	Tercapai	Bakeuda
	Predikat Sakip	Predikat	BB	A*	A	A	Tercapai	Biro Organisasi
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.03	2.6	3.1		Tidak Tercapai	Diskominfo
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	71.17*	72	63.88	Tercapai	BKD
Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Sangat Baik (4,41)	Sangat Baik (4,42)*	Sangat Baik (4,44)	Sangat Baik (4,25)	Tercapai	BPSDM
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	74.05	79,48*	79.49	N/A		Kesbangpol
Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana								
Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68.43	70,26*	70.58	71,92*	Tercapai	
Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	48.48	49,84*	51.24	50.52	Tidak Tercapai	Dinas LH, Dinas ESDM, Dishut
	Indeks Kualitas Air	Indeks	51.67	55,90*	55.97	54.63	Tidak Tercapai	Dinas LH
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88.93	88,38*	88.5	89.52	Tercapai	Dinas LH
	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	64.19	68,69*	69.27	84.42	Tercapai	Dinas LH
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	16.5	18	21	51.12%	Tercapai	Dinas LH, Dinas ESDM, Dishut





MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ RPJMD	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022			
					Target	Capaian	Status	
Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	144.81	138*	138	128,81*	Tercapai	
Meningkatnya Kapasitas Penanggulan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.47	0,51*	0.54	0.44	Tidak Tercapai	BPBD





**Tabel 2.153** Evaluasi Pelaksanaan Dan Realisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan s.d Tahun Berjalan

PERIODE SASI: 2020-2025 (RPJMD Tahun 2021-2026)		
Tujuan/Sasaran	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target
Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbaginya kewenangan urusan pemerintah khususnya pembinaan PAUD, SD dan SMP yang berada di level Pemerintah Kab/Kota, sehingga Pemerintah Provinsi tidak dapat melakukan intervensi secara langsung;</li> <li>2. Angka pernikahan dini masih tinggi di beberapa daerah;</li> <li>3. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dataran rawa, perbukitan / pegunungan, dan laut (kepulauan);</li> <li>4. Kurang pedulinya masyarakat akan pendidikan, sehingga masih ada anak usia sekolah (lulusan SMP) bekerja membantu orang tua;</li> <li>5. Masih banyak Penduduk Usia Sekolah yang mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Salafiah, Dimana keberadaan mereka tidak ikut pendidikan kesetaraan sehingga ijazahnya tidak diakui;</li> <li>6. Kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya nilai budaya daerah, baik tentang pelestarian maupun makna dari budaya tersebut;</li> <li>7. Tidak adanya data dukung akademis di daerah untuk memperkuat budaya yang ada di daerah;</li> <li>8. Masih kurangnya perhatian pemerintah daerah kabupaten / kota dalam memajukan budaya</li> </ol>	Keberhasilan dalam menurunkan proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun mengalami realisasi penurunan yang baik dari realisasi tahun 2019 sebesar 21.18 menjadi 15.3 pada tahun 2022, hal ini tidak terlepas dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Komitmen dan kerja sama dengan pihak lain sangat membantu untuk mencapai kinerja tersebut. Beberapa MOU dan kesepakatan telah dilaksanakan dengan Lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan instansi pemerintah dan nonpemerintah. Kerja sama tersebut dimulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan desa.
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbaginya kewenangan urusan pemerintah khususnya pembinaan PAUD, SD dan SMP yang berada di level Pemerintah Kab/Kota, sehingga Pemerintah Provinsi tidak dapat melakukan intervensi secara langsung;</li> </ol>	





2. Angka pernikahan dini masih tinggi di beberapa daerah;
3. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari dataran rendah, perbukitan / pegunungan, dan laut (kepulauan);
4. Kurang pedulinya masyarakat akan pendidikan, sehingga masih ada anak usia sekolah (lulusan SMP) bekerja membantu orang tua;
5. Masih banyak Penduduk Usia Sekolah yang mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Salafiah, Dimana keberadaan mereka tidak ikut pendidikan kesetaraan sehingga ijazahnya tidak diakui;
6. Kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya nilai budaya daerah, baik tentang pelestarian maupun makna dari budaya tersebut;
7. Tidak adanya data dukung akademis di daerah untuk memperkuat budaya yang ada di daerah;
8. Masih kurangnya perhatian pemerintah daerah kabupaten / kota dalam memajukan budaya

1. Kurangnya kualitas tenaga kesehatan dan distribusi sumber daya manusia kesehatan yang kurang merata, meskipun telah ditempatkan Tenaga Kesehatan melalui Program Nakes Strategis. Hal ini disebabkan beberapa tenaga mengalami pemindahan lokasi kerja;
2. Kualitas Sarana dan prasarana kesehatan yang kurang baik di fasilitas pelayanan Kesehatan;
3. Beban penyakit menular dan tidak menular yang timbul dan meresahkan masyarakat dan dunia.

1. Kurangnya inovasi dan kreatifitas pemuda dalam menciptakan jenis usaha baru;
2. Modal usaha yang terbatas bagi kelompok usaha pemuda produktif yang baru merintis usaha;





3. Kurangnya pengalaman dalam berwirausaha dan juga kesiapan mental dalam menghadapi kemungkinan terburuk dalam berwirausaha khususnya bagi kelompok usaha baru;
4. Fasilitasi pemberdayaan pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan masih kurang;
5. Belum maksimalnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan khususnya perihal pengkaderan pemuda dalam berorganisasi;
6. Pengembangan karakteristik kepemimpinan pemuda belum maksimal. Pelaksanaan crosscutting belum dapat berjalan dengan baik;
7. Tidak adanya pendataan secara mandiri, sehingga penilaian hanya bergantung terhadap hasil dari penilaian IPP oleh Pemerintah Pusat;
8. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memiliki standar yang dapat menunjang program Latihan atlet, terlebih sarana dan prasarana olahraga yang ramah bagi atlet penyandang disabilitas.

1. Terbaginya kewenangan urusan pemerintah khususnya pembinaan PAUD, SD dan SMP yang berada di level Pemerintah Kab/Kota, sehingga Pemerintah Provinsi tidak dapat melakukan intervensi secara langsung (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1);
2. Angka pernikahan dini masih tinggi di beberapa daerah (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1);
3. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dataran rawa, perbukitan / pegunungan, dan laut (kepulauan) (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1);
4. Kurang pedulinya masyarakat akan pendidikan, sehingga masih ada anak usia sekolah (lulusan SMP) bekerja membantu orang tua (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1);
5. Kesejahteraan Keluarga/faktor ekonomi masyarakat masih relatif rendah (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1);
6. Masih banyak Penduduk Usia Sekolah yang mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Salafiah, Dimana keberadaan mereka tidak ikut pendidikan kesetaraan



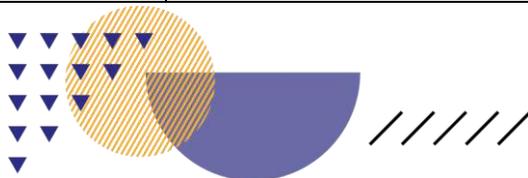


	<p>sehingga ijazahnya tidak diakui (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1).</p>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemampuan pendanaan bagi pemerintah kab/kota dalam penyediaan sarpras olahraga masyarakat berbeda – beda dan bergantung terhadap program prioritas masing – masing kepala daerah;</li><li>2. Kurangnya fasilitasi kegiatan olahraga yang dilaksanakan di wilayah perdesaan;</li><li>3. Pelaksanaan crosscutting belum dapat berjalan dengan baik;</li><li>4. Tidak adanya pendataan secara mandiri, sehingga penilaian hanya bergantung terhadap hasil dari penilaian oleh Pemerintah Pusat dan data BPS.</li></ol>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih kurangnya maksimalnya pembinaan terhadap atlet;</li><li>2. Kurang optimalnya pelaksanaan seleksi atlet pada Kejurnas Olahraga;</li><li>3. Kurang optimalnya pelaksanaan seleksi yang profesional terhadap pembinaan atlet usia dini melalui PPLP dan PPLPD.</li></ol>	
<p>Misi 2: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum tercapainya target pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB), sehingga harga ditingkat petani masih rendah. Solusi yang dilakukan dengan meningkatkan fasilitasi pembentukan UPPB yang teregister. Belum optimalnya kemitraan pekebun swadaya dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), sehingga pemasaran masih melalui pengumpul. Solusi yang dilakukan dengan mendorong pekebun swadaya agar bermitra dengan PKS;</li><li>2. Belum terjangkaunya pembeku lateks yang direkomendasi pemerintah di tingkat petani pekebun, sehingga mutu karet yang dihasilkan masih rendah. Solusi yang dilakukan dengan memberikan bantuan pembeku lateks melalui UPPB;</li><li>3. Petani pekebun dalam melakukan pasca panen karet masih belum sesuai dengan teknis penyadapan, sehingga produktivitasnya rendah. Solusi yang dilakukan salah satunya dengan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengolahan hasil perkebunan;</li></ol>	<p>Pemerintah daerah mampu dalam mendorong peningkatan jenjang pendidikan dan kualitas calon tenaga kerja</p>





4. Belum adanya jaminan harga yang wajar, ketika dipasarkan langsung ke pabrik (crumb rubber). Solusi yang dilakukan dengan mendorong UPPB untuk mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR);
5. Terbatasnya petugas/fasilitator yang mensosialisasi sertifikat ISPO dan STDB di Kabupaten dan Provinsi;
6. Terbatasnya biaya untuk melakukan sosialisasi Pendaftaran Usaha Perkebunan Rakyat untuk Budidaya (STD-B);
7. Pekebun pada umumnya belum mengetahui pentingnya STD-B bagi keberlanjutan usaha dibidang perkebunan;
8. Terbatasnya lahan yang dimiliki pekebun dengan luas lebih dari 4 (empat) ha dalam 1 (satu) hamparan apabila menggunakan Perda Nomor 2 Tahun 2013;
9. Belum tertibnya perusahaan besar swasta/Negara mengirimkan LKUP secara rutin dan tepat waktu;
10. Belum tertibnya Koperasi yang mendapatkn IUP melaporkan hasil kegiatannya per semester;
11. Tingkat penyerapan benih tanaman perkebunan khususnya tanaman karet sangat kecil, sementara ketersediaan benih karet sangat banyak (mencapai 2.100.000 ) batang yang siap tanam, sementara yang dimanfaatkan masyarakat sangat kecil;
12. Untuk tanaman kelapa sawit ketersediaan benih cukup untuk mendukung kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PRS), namun lambatnya proses rekomtek proposal kelompok tani yang diusulkan sangat mempengaruhi kepastian penangkar dalam hal penyediaan benih;
13. Kualitas benih masih cukup diragukan, hal ini disebabkan integritas dari para penangkar masih kurang, serta asal benih tanaman yang cukup jauh, terutama untuk jenis tanaman tertentu;
14. Disamping itu kualitas dan keterbatasan SDM yang terkait dengan legalitas benih masih belum cukup;
15. Jarak dan prasarana angkutan cukup mempengaruhi kualitas benih yang diterima oleh petani;

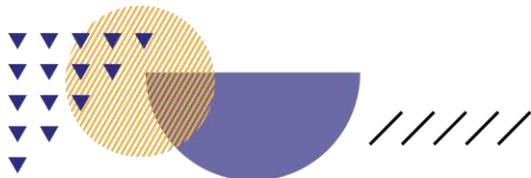




16. Dalam pengembangan ternak sapi khususnya peningkatan kelahiran salah satu kendala adalah masalah gangguan reproduksi dan masih banyaknya sapi yang dipelihara secara ekstensif dilepas di kebun tanpa dikelola dengan baik, sehingga pelaksanaan Inseminasi Buatan kurang optimal. Adapun peningkatan populasi yang tidak seiring dengan tingkat kelahiran disebabkan antara lain banyak penjualan anak sapi dan penjualan sapi betina bunting keluar provinsi dan data populasi masih merupakan angka sementara sedangkan angka kelahiran merupakan dari laporan kabupaten setiap hari;
17. Kegiatan Pengendalian pemotongan ternak betina produktif telah dilaksanakan secara fisik sebanyak 100 %, dengan efisiensi penggunaan anggaran sebanyak 12 % sehingga serapan anggaran sebanyak 88%;
18. Terdapat penurunan pemotongan ternak betina produktif dari tahun 2020 ke 2021. Walaupun sudah mengalami penurunan pemotongan ternak betina produktif namun masih terdapat adanya pemotongan ternak ruminansia betina produktif hal ini disebabkan karena adanya terbatasnya sarana dan prasarana dan SDM di Rumah Potong Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan oleh karena itu kami mengusulkan ada penambahan SDM /tenaga kontrak/THL yang akan di tempatkan di RPH/TPH yang bertugas dalam pengawasan pemotongan ternak betina produktif

1. Masih belum sepenuhnya pelaku usaha industri (terutama industri kecil) mampu menghadapi kondisi pandemi yang terjadi;
2. Masih kurangnya fleksibilitas pola penganggaran terutama dalam melakukan revisi kegiatan.

1. Masih terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina serta perang dagang antara Amerika dan Cina, ini masih menjadi ancaman bagi ekspor Indonesia pada umumnya dan ekspor Kalimantan Selatan pada khususnya;
2. Adanya pemotongan anggaran (Refocusing) anggaran, sehingga menyebabkan capaian kinerja yang telah ditetapkan tidak dapat terealisasi secara maksimal.





1. Kondisi pandemi yang membatasi kunjungan wisatawan dan wadah pelaku ekonomi kreatif;
  2. Masih lemahnya sinkronisasi data-data kepariwisataan sebagai bahan pengambil kebijakan;
  3. Keterlambatan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota dalam menyampaikan data-data kunjungan wisatawan;
  4. Konten-konten terkait pelaksanaan kegiatan atau program belum maksimal dalam pemasaran ke masyarakat atau publik;
  5. Belum ada penerbangan secara langsung dari daerah wisata seperti Bali, Lombok, dll ke Banjarmasin;
  6. Masih banyak sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum bersertifikasi CHSE;
  7. Masih kurang rendahnya partisipasi pemilik usaha pariwisata;
  8. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memajukan sektor pariwisata
  9. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM kreatif;
  10. Kurangnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
  11. Infrastruktur teknologi informasi yang belum kompetitif;
  12. Kurangnya apresiasi terhadap sebuah karya.
- 
1. Belum maksimalnya penggunaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga penanganan PPKS masih belum merata;
  2. Dalam pemenuhan SPM Bidang Sosial, masih memerlukan Panti Multi Layanan untuk dapat meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental (ODGJ);
  3. Kelembagaan Sosial di Kabupaten/Kota masih bergabung dengan urusan lainnya sehingga penanganan masalah- masalah kesejahteraan sosial belum berjalan secara maksimal





	<p>Pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari sektor komoditas memberikan dampak terhadap peningkatan pengeluaran perkapita</p>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Banjir yang melanda hampir di seluruh kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Selatan memberikan dampak dan kerugian lanjutan yang besar;</li><li>2. Dampak perubahan iklim;</li><li>3. Refocusing anggaran;</li><li>4. Fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak;</li><li>5. Perbedaan Luas Lahan Baku Sawah.</li></ol>	
Misi 3: Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Percepatan Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Updating Data dan Informasi yang Memiliki relevansi dengan kondisi eksisting pemanfaatan ruang;</li><li>2. Sinkronisasi Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan dengan RZWP3K Updating Data dan Informasi kondisi garis pantai;</li><li>3. Sosialisasi NSPK Penataan Ruang Dinamika perubahan kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat;</li><li>4. Pendampingan Penyusunan RDTR dan RTRW di Kabupaten dan Kota Proses penyusunan dan persetujuan substansi dengan Pemerintah Pusat yang menyita waktu yang relative lebih lama.</li></ol>	
	<p>Jumlah daerah yang di layani oleh sarana transportasi. terdapat 35 Trayek, sedangkan trayek yang dilayani sebanyak 21 Trayek. Jumlah tratek Bus Rapid Transit sebanyak 6 Koridor (Trayek) sedangkan yang terlayani yaitu 1 Koridor (trayek)</p>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingginya ego sektoral dan konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan tata ruang dan pembangunan;</li></ol>	





	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Keterbatasan Alokasi anggaran daerah yang berimplikasi terhadap pengurangan jumlah program kegiatan RTRW yang dapat dilaksanakan. Sehingga pelaksanaan program Kegiatan RTRW kadang tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan RPJMD</li></ol>	
Misi 4: Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum tersusunnya strategi untuk pemenuhan indikator baru terutama pada Domain Manajemen SPBE;</li><li>2. Belum tersedianya seluruh dokumen Perencanaan Strategis (Probis terintegrasi, Arsitektur dan Peta Rencana SPBE);</li><li>3. Masih perlunya harmonisasi dengan seluruh Tim Koordinasi SPBE Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;</li><li>4. Masih perlunya kerjasama dengan K/L/D dan Tim Koordinasi SPBE Nasional.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks persepsi ini turun 0,03 poin menjadi 3,8 pada 2022, di banding tahun sebelumnya yang sebesar 3,83</li><li>2. Indeks pengalaman ini naik 0,09 menjadi 3,99 pada 2022, dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 3,9.</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumber data dalam pengukuran IP ASN yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) belum sepenuhnya mutakhir sehingga diperlukan pemutakhiran data sebelum dilakukan pengambilan data sebagai dasar penghitungan IP ASN;</li><li>2. Data yang di Unggah dalam SIMPEG BKD tidak disertai dengan data dukung yang sesuai dengan ketentuan, sehingga data tersebut tidak bisa di verifikasi sebagai komponen penghitungan pengukuran IP ASN;</li><li>3. Dalam rangka pencapaian nilai dimensi kompetensi ASN pada peningkatan kompetensi pejabat fungsional terkendala terhadap keterbatasan pelaksanaan diklat fungsional bagi pejabat fungsional utamanya bagi tenaga kesehatan;</li><li>4. Penilaian kompetensi Pejabat Struktural masih relatif rendah dikarenakan banyak pejabat struktural yang belum mengikuti Diklatpim sesuai dengan jenjang jabatannya;</li><li>5. Kesadaran dan Motivasi Individu ASN dalam peningkatan IP ASN secara individu masih dirasa rendah.</li></ol>	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah 8 (delapan) kali berturut-turut mendapat opini WTP dari BPK, yaitu sejak tahun 2014 s.d 2022.
	Dari faktor leadership (Kepemimpinan) yang tidak berkomitmen dalam melaksanakan Perundang-undangan tentang Pelayanan Publik . Sebagian SDM yang masih kurang bermutu	Tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan





Misi 5: Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana	dan berkualitas sehingga mempengaruhi terhadap proses pelayanan public 3. Sarana Prasarana yang masih belum memenuhi standar	orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Provinsi Kalimantan Selatan sudah sangat baik, namun masih memerlukan penyempurnaan
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah sasaran masih banyak yang tidak terakomodir;</li><li>2. Tim belum maksimal bekerja dengan baik, dan perlu lebih banyak melibatkan mahasiswa dan akademisi agar bisa mengawasi IDI.</li></ol>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya alih fungsi lahan akibat kegiatan permukiman, perkebunan, pertanian, industri, pertambangan dan lain-lain menyumbang penurunan luas tutupan lahan;</li><li>2. Adanya illegal logging dan pertambangan ilegal di beberapa kabupaten/kota.</li></ol>	Tingginya capaian persentase kualitas air laut (IKL) kategori baik dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang menyebabkan berkurangnya aktivitas pariwisata di pesisir dan laut yang berkorelasi dengan berkurangnya sumber pencemar air laut.
	Tahun 2018 terdapat perubahan perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA). Jumlah parameter yang digunakan bertambah menjadi 10 parameter, yaitu DO, Fecal coliform, COD,pH,BOD, NH3-N, TP, TSS, NO3-N, dan TDS dengan metode Indeks Nasional Sanitation Foundation Water Quality Index (NSF-WQI). Hal ini menyebabkan perubahan range nilai IKA yaitu 0-100.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Beberapa indikator tahun sebelumnya tetap dapat dilaksanakan dan dipertahankan, beberapa program kegiatan yang dilaksanakan BPBD menambah poin di beberapa indikator terutama dengan bobot yang cukup tinggi contohnya penyusunan Rencana Kontingensi Banjir dan Kebakaran Hutan Lahan serta Pemasangan Alat EWS. Termasuk penambahan poin dari kegiatan Dinas Instansi terkait kebencanaan yang tahun sebelumnya</li></ol>





		<p>belum dikumpulkan dan direkapitulasi laporannya melalui kegiatan FGD perhitungan mandiri Indeks Ketahanan Daerah yang berpengaruh terhadap penurunan Indek Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Selatan;</p> <p>2. Fasilitasi dan dukungan pemerintah pusat dalam hal ini BNPB dalam penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana yang memberi poin cukup signifikan dalam perhitungan IKD.</p>
	<p>Penyediaan baseline data dan informasi yang sama belum terjadi sehingga tujuan untuk mencapai integrasi data, kebijakan, dan perencanaan belum tercapai secara optimal. Di samping itu perlu ada upaya bagaimana menjadikan perencanaan tingkat makro tersambung ke tingkat mikro</p>	





## 2.5.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Di Kalimantan Selatan Tahun 2022

### 2.5.3.1 Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Masih Rendah

Sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, kualitas sumber daya manusia harus diperhatikan semenjak perencanaan pembangunan hingga realisasi perencanaan yang telah dirumuskan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus memberikan perhatian khusus dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga akselerasi pembangunan dapat terlaksana.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga secara otomatis akan memberikan dampak positif kepada pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga kehidupan setiap penduduk Kalimantan Selatan menjadi lebih baik. Selain itu, sumber daya manusia yang berdaya saing akan menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan siap dalam menghadapi segala permasalahan yang akan muncul selama pelaksanaan pembangunan dan mampu memanfaatkan peluang maupun potensi yang ada untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Saat ini, sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Selatan masih butuh pembenahan terutama terkait kualitasnya.

Kualitas sumberdaya manusia Kalimantan Selatan jika di ukur dengan IPM, masih peringkat 4 di regional pulau Kalimantan. kondisi ini menunjukkan bahwa daya saing SDM Kalimantan selatan rendah, belum Link dan matchnya pendidikan dengan dunia kerja, pengembangan sekolah vokasi melalui kurikulum berbasis potensi local, pengembangan system pelayanan kesehatan yang berorientasi pad penyakit regenaratif dan mendorong investasi padat karya pada sector pengolahan bahan-bahan primer perlu terus di kembangkan.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam rangka melaksanakan perbaikan kualitas dan daya saing SDM Kalimantan selatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan yang kompeten dan sesuai potensi yang dimiliki daerah belum maksimal.
- b. Peran Kabupaten/kota dalam meningkatkan partipasi sekolah pada pendidikan dasar guna meningkatkan ARLS belum optimal.
- c. Aksesibilitas pelayanan pendidikan yang dapat diakses anak usia sekolah guna meningkatkan Rata-rata harapan lama sekolah masih kurang.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai gejala umum penyakit tidak menular masih kurang.





- e. Sistem pelayanan kesehatan pada layanan kesehatan tingkat pertama belum baik.
- f. Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan melalui berbagai gerakan bersama lintas sektor dan pemangku kepentingan non pemerintah lainnya masih rendah.
- g. Fasilitas literasi digital dan talenta digital dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang berdaya saing pada industri 4.0. belum optimal.

### 2.5.3.2 Struktur Perekonomian Daerah masih belum kuat dan berkelanjutan

**Dominannya sektor pertambangan dan penggalian** dalam struktur perekonomian daerah menjadi salah satu yang membuat struktur ekonomi berkelanjutan masih belum kuat. Pada struktur perekonomian wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB atas dasar harga berlaku naik dari 18.71% di tahun 2019 menjadi 18.29%. Masih tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian harus menjadi perhatian mengingat sektor tersebut merupakan sektor yang tidak dapat diperbaharui sumber dayanya. sehingga perlu kebijakan riil terkait transformasi struktur ekonomi ke sektor lain seperti Industri, Pertanian dan Pariwisata dalam rangka mempertahankan kinerja perekonomian daerah untuk kedepannya. berdasarkan PDRB Provinsi Kalsel Tahun 2020. kontribusi sektor pertanian sebesar 14.39%. Industri 13.52% dan Perdagangan sebesar 10.46%.

**Pengeluaran konsumsi masyarakat yang cukup rendah** juga membuat perkembangan perekonomian mikro tidak tumbuh signifikan. Pengeluaran konsumsi masyarakat menunjukkan daya beli masyarakat di suatu wilayah yang mengindikasikan tinggi rendahnya perekonomian mikro dalam pembangunan daerah. Dalam kajian analisisnya. pengeluaran penduduk akan merepresentasikan pendapatan yang diterima dalam sebulan sehingga akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan secara menyeluruh.

**Pengeluaran rata-rata per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan** secara umum mengalami kenaikan di setiap periodenya yang dikarenakan adanya berbagai hal seperti laju inflasi. peningkatan arus komoditas barang. hingga perubahan gaya hidup masyarakat. Pada tahun 2020. pengeluaran per kapita masyarakat Kalimantan Selatan mencapai Rp.12.032 juta per tahun. Dalam sepuluh tahun terakhir. pengeluaran per kapita masyarakat rata-rata meningkat sebesar 1.68% per tahun. Covid-19 selama tahun 2020 memberikan dampak terhadap turunnya pengeluaran perkapita masyarakat Kalimantan Selatan dibandingkan tahun sebelumnya.





Selain itu, upaya transformasi ekonomi dengan menggeser kontribusi sektor pertambangan ke arah sektor-sektor antara lain: sektor Pertanian (dalam arti luas), Industri pengolahan, dan Perdagangan, sudah mulai terlihat meskipun belum optimal.

Sektor-sektor di bidang perekonomian seperti pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan, yang sampai saat ini masih memiliki potensi dan berperan penting dalam perekonomian Kalimantan Selatan. Sektor pertanian dan industri pengolahan tersebut cukup memiliki kontribusi dominan terhadap struktur perekonomian Kalimantan Selatan selain sektor pertambangan. Diharapkan, prospek sektor pertanian dan industri pengolahan akan memberikan *multiplayer effect* terhadap sektor dominan lainnya seperti perdagangan dan transportasi. Masih ketergantungan dengan komoditas bahan mentah/setengah jadi. Komoditas utama Kalimantan Selatan seperti batubara, sawit, karet dan kayu lapis kebanyakan langsung dijual tanpa pengolahan sehingga Ketika harga menurun sangat berpengaruh terhadap perekonomian Kalimantan Selatan. Dalam mendongkrak perekonomian tentunya diperlukan pemanfaatan adopsi teknologi digital dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian khususnya di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif yang mengarah pada hilirisasi produk-produk nya.

Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh adanya tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih mengalami perlambatan.

**Peningkatan investasi** pasca implementasi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan diproyeksikan akan tumbuh semakin efektif dan efisien dalam rangka menggerakkan semua sektor perekonomian. Dari sisi lapangan usaha, perlu perbaikan dari sisi industri manufaktur. Industri manufaktur harus didorong, salah satunya melalui strategi hilirisasi sumber daya alam. Selain industri manufaktur, peluang lain berasal dari sektor pariwisata.

### 2.5.3.3 Pembangunan Infrastruktur belum optimal dan merata

Pembangunan infrastruktur berkualitas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Keuntungan dalam peningkatan aksesibilitas wilayah tersebut adalah terbentuknya jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Hingga





saat ini, di Provinsi Kalimantan Selatan belum terpenuhi pemerataan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan di setiap lapisan masyarakat sehingga hasil pembangunan belum dinikmati secara maksimal.

Konsep membangun sejatinya perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang merupakan konsep pembangunan atas dasar penambahan nilai sumber daya. Energi alternatif merupakan sumber energi pengganti dari sumber energi yang pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. Saat ini peningkatan kebutuhan energi didominasi oleh energi fosil yang tak terbarukan tentunya tak ramah lingkungan. Energi terbarukan pada dasawarsa sekarang lebih dikenal dengan energi alternatif, seperti; tenaga air, panas bumi, mini/mikro hidro, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, bahan bakar nabati, biogas, dan sampah kota.

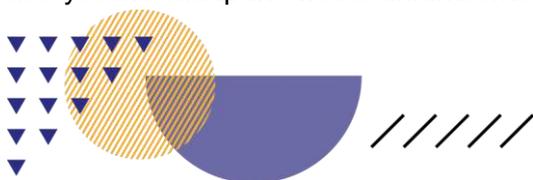
#### **2.5.3.4 Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Berbasis Digital belum Optimal**

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan tentunya juga berkaitan dengan upaya membangun daya saing daerah. Salah satu indikator pada daya saing adalah permasalahan konflik, salah satunya diukur dengan Indeks kerukunan umat beragama dimana keadaan ini dipengaruhi oleh pendidikan keluarga, peran pemerintah dan implementasi kebijakan lokal yang adil pada berbagai tatanan masyarakat.

Pembangunan daerah yang optimal akan terealisasi jika tiga unsur pembangunan daerah yakni pemerintah (government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan. Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berlandaskan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan asas transparansi, profesionalitas, dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur, merata, dan berkesinambungan.

Good governance merupakan tata laksana pemerintahan yang baik dalam artian seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi pemerintahan untuk menuju suatu tujuan yang baik. Good governance juga didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik secara umum. Dalam good governance mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas dalam melayani masyarakat maupun swasta untuk berkembang dari sisi kuantitas maupun kualitasnya di





segala bidang. Oleh karenanya, peran ini harus dijalankan dengan rasa amanah dan tanggungjawab yang tinggi agar tugas, pokok, dan fungsi pemerintah daerah berjalan sesuai dengan amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tantangan dalam perbaikan kinerja pemerintah daerah yaitu peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Pemda dalam mendukung akselerasi transformasi digital di Pemerintah Daerah.

### **2.5.3.5 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Masih Belum Optimal**

Proses pemanfaatan Sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat serta makhluk hidup lain.

\Namun Tidak dapat dipungkiri, penambahan penduduk, peningkatan urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi berdampak pada kualitas lingkungan. Permasalahan utama lingkungan di Kalimantan Selatan adalah masih belum optimalnya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)s. IKLH terdiri dari beberapa unsur yang menyumbang, antara lain Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Oleh karena itu, pencapaian target IKLH perlu didukung oleh peningkatan 4 (empat) unsur tersebut. Permasalahan lingkungan yang juga terkait dengan IKLH adalah meningkatnya potensi bencana daerah di Kalimantan Selatan yaitu banjir dan kabut asap yang harus mendapatkan penanganan yang lebih baik di masa depan karena berdampak pada kesehatan masyarakat.

Permasalahan lingkungan lain yaitu terkait penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Gas rumah kaca merupakan penyumbang terbesar pada perubahan iklim dunia. Gas rumah kaca terjadi karena adanya aktivitas yang menghasilkan karbon dengan sumber utama yang berasal dari aktivitas ekonomi. Kebijakan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon penting untuk diadaptasi dan diterapkan pada rencana pembangunan daerah.

### **2.5.4 Permasalahan Pembangunan Yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah :**

#### **1. Pertumbuhan Ekonomi Yang Fluktuatif**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat dengan





indikator seperti Pertumbuhan PDRB Riil Perkapita, Share Manufaktur (Industri Pengolahan) terhadap PDRB dan Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal

## 2. Kesempatan Kerja belum merata

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi dengan indikator Tingkat Kesempatan Kerja, Persentase penduduk bekerja penuh, Persentase tenaga kerja dengan tingkat Pendidikan Menengah Keatas.

## 3. Infrastruktur ekonomi belum kuat

Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi, dengan indikator Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik/PLN, Persentase Penduduk yang Memiliki Telepon Genggam, Persentase Jalan dengan Kondisi Baik dan Sedang

## 4. Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan dengan indikator Rasio Pendapatan, Sumbangan Pendapatan Perempuan, Rasio rata2 pengeluaran Rumah Tangga. Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan, dengan indikator Persentase Penduduk Miskin, Rata2 konsumsi protein perkapita perhari

## 5. Perluasan Akses dan Kesempatan

Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif, dengan indikator seperti Angka





Harapan Lama Sekolah, Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap, Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan

**Infrastruktur Dasar** yaitu akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan, dengan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak, Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Sendiri

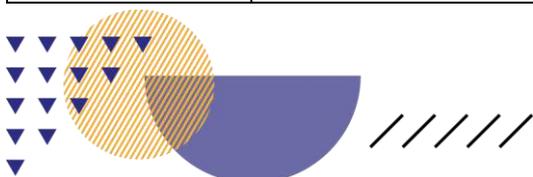
**Institusi keuangan** memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan ukuran Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap Penduduk Usia Produktif, Rasio Kredit Perbankan UMKM

## 2.5.5 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan pada urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel sebagai berikut :

**Tabel 2.154** Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan di SKPD Lingkup Pemprov Kalsel

URUSAN	PERMASALAHAN
<b>Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaian APK terendah di Kalimantan dan di bawah rata-rata Nasional;</li> <li>▪ Capaian APM dan APS berada di peringkat 3 Kalimantan, namun masih di bawah rata-rata Kalimantan dan Nasional.</li> <li>▪ Belum optimalnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;</li> <li>▪ Belum adanya pemetaan link and match antara sekolah dengan dunia usaha dan industri;</li> <li>▪ Belum meratanya penyebaran sekolah sesuai dengan penyebaran penduduk.</li> </ul>
<b>Kesehatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capaian Angka Harapan Hidup masih di bawah rata-rata nasional.</li> <li>▪ Angka Kematian Ibu masih relatif tinggi</li> </ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih terjadinya kematian bayi dan balita.</li><li>▪ Masih tingginya prevalensi penyakit menular</li><li>▪ Masih tingginya kasus penyakit tidak menular</li><li>▪ Angka Gizi buruk dan prevalensi stunting masih di atas rata-rata nasional.</li><li>▪ Pemenuhan SPM pada pelayanan krisis kesehatan dan penanganan KLB belum berjalan optimal</li><li>▪ Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap dan vaksinasi covid 19 belum optimal.</li><li>▪ Sumber daya manusia kesehatan yang sesuai standar masih rendah.</li></ul>
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih adanya jalan dan jembatan kewenangan Provinsi yang belum dalam kondisi mantap dan memenuhi standar (lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton)</li><li>▪ Jaringan jalan belum merata, konektivitas antar kawasan terutama daerah-daerah yang terisolir belum terhubung dengan baik, selain itu aksesibilitas pada kawasan-kawasan yang dianggap strategis daerah belum layak dan terhubung. Sehingga hal ini mengakibatkan tingkat mobilitas antar wilayah terbatas</li><li>▪ Masih rendahnya penyediaan air baku di Kabupaten/Kota karena adanya ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan air bersih.</li><li>▪ Belum optimalnya pembangunan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi sehingga berpengaruh terhadap belum terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi</li><li>▪ Masih rendahnya pembangunan infrastruktur dalam penanganan potensi abrasi pantai dan bencana banjir yang disebabkan daerah pengaliran sungai yang cukup luas dengan debit yang cukup besar</li><li>▪ Belum terpenuhinya akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman ke seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan</li><li>▪ Belum optimalnya pelayanan sistem air minum dan persampahan regional di Kalimantan Selatan sebagai pendukung akses pelayanan infrastruktur daerah secara regional.</li><li>▪ Masih kurangnya penataan bangunan gedung dan lingkungan di kawasan perkotaan dan kawasan strategis daerah Provinsi Kalimantan Selatan</li></ul>



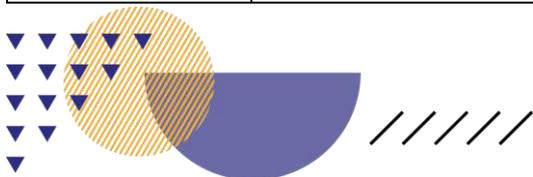


URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi yang ditandai masih rendahnya SDM bersertifikat secara professional.</li><li>▪ Belum optimalnya keselarasan perencanaan penataan ruang antar stakeholder yang diakibatkan kurangnya koordinasi, sinkronisasi serta system pendataan dan informasi.</li><li>▪ Masih diperlukan penyusunan rencana kawasan strategis provinsi yang aplikatif didukung dengan pemanfaatan dan pengendalian untuk mendukung kesesuaian dan keselarasan penataan ruang.</li></ul>
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah (Backlog Rumah) yang masih tinggi</li><li>▪ Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penanganan rumah di daerah rawan bencana dan program pemerintah yang belum optimal</li><li>▪ Masih luasnya kawasan permukiman kumuh di Kalimantan Selatan sehingga perlunya penanganan kawasan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru.</li><li>▪ Pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang tidak memenuhi standar, berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman</li><li>▪ Kurangnya kolaborasi antar SKPD terkait dalam penanganan masalah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan di permukiman yang layak</li><li>▪ Rendahnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak.</li></ul>
<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih tingginya pelanggaran K3;</li><li>▪ Lambatnya pelayanan tindak lanjut (respon time rate) dari pengaduan masyarakat;</li><li>▪ Masih tingginya indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) di Kalimantan Selatan;</li><li>▪ Masih rendahnya kapasitas penanganan risiko bencana;</li><li>▪ Rendahnya literasi masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;</li></ul>
<b>Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kurangnya sinergitas dan koordinasi dari berbagai pihak untuk menangani kompleksitas permasalahan PPKS.</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana baik dalam penampungan maupun perawatan dan rehabilitasi medik, untuk SPM pelayanan PPKS dalam panti.</li><li>▪ Penanganan rehabilitasi sosial belum maksimal;</li><li>▪ Peningkatan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum maksimal.</li><li>▪ Penanganan bencana masih belum optimal</li><li>▪ Updating Data Kemiskinan belum optimal</li></ul>
<b>Tenaga Kerja</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ketidakseimbangan antara penyediaan lapangan pekerjaan dengan kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja sehingga jumlah penganggur relatif besar;</li><li>▪ Lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keahlian sumber daya manusia yang ada;</li><li>▪ Wirausaha baru kurang berkembang dan belum adanya tempat atau wadah sebagai sarana penampung hasil produk kewirausahaan;</li><li>▪ Rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai oleh tingkat pendidikan formal angkatan kerja provinsi kalimantan selatan didominasi oleh tamatan (maksimal) sekolah dasar, termasuk di dalamnya mereka yang belum tamat dan tidak pernah sekolah;</li><li>▪ Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang hingga saat ini pada umumnya dirasakan masih jauh dari memadai;</li><li>▪ Sarana dan prasarana belum mendukung untuk melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan jaman maupun teknologi;</li><li>▪ Dengan adanya revolusi industri 4.0 maka dapat tercipta pengangguran yang dipengaruhi oleh melebarnya ketimpangan ekonomi karena peran digitalisasi dapat menggeser peran konvensional dalam pasar;</li></ul>
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengarusutamaan Gender belum berjalan optimal;</li><li>▪ Belum optimalnya pelayanan perlindungan perempuan;</li><li>▪ Belum optimalnya upaya perlindungan anak;</li><li>▪ Masih tingginya kasus perkawinan anak;</li></ul>
<b>Pangan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan dengan laju kemampuan produksinya;</li><li>▪ Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan. khususnya di wilayah-wilayah terpencil;</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Terbatasnya kemampuan dalam mengantisipasi dinamika permasalahan ketahanan pangan;</li></ul>
<b>Pertanahan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih rendahnya jumlah lahan bersertifikat, sehingga penanganan masalah pertanahan membutuhkan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).</li><li>▪ Masih minimnya data layanan untuk urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi</li><li>▪ Masih lambatnya proses penyelesaian pembebasan dan kasus pertanahan;</li></ul>
<b>Lingkungan Hidup</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kualitas Air Sungai yang Rendah</li><li>▪ Pengelolaan persampahan dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3);</li><li>▪ Luas Lahan Kritis yang berpotensi terus meningkat</li><li>▪ Potensi keanekaragaman hayati belum terkelola secara optimal</li><li>▪ Potensi kerusakan ekosistem gambut, mangrove dan terumbu karang di wilayah pesisir</li><li>▪ Perubahan Iklim</li></ul>
<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ belum maksimalnya cakupan akta kematian;</li><li>▪ belum maksimalnya cakupan akta perkawinan.</li><li>▪ belum maksimalnya cakupan akta kelahiran;</li><li>▪ Masih terdapat penduduk usia dewasa yang belum memiliki KTP;</li><li>▪ Masih tingginya pasangan pernikahan yang tidak memiliki akte nikah;</li></ul>
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum optimalnya pengelolaan lembaga ekonomi pedesaan (Manajemen Usaha);</li><li>▪ Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan;</li><li>▪ Masih terdapat desa dengan status desa tertinggal dan sangat tertinggal;</li><li>▪ Rendahnya indeks desa membangun.</li><li>▪ Masih lemahnya kualitas SDM masyarakat di pedesaan dalam pengelolaan Bumdes</li><li>▪ Masih kurangnya pembinaan terhadap Bumdes yang ada terutama untuk pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha di pedesaan</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
<b>Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum maksimalnya Penerapan Grand Desain Pembangunan Kependudukan;</li><li>▪ Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang belum ber KB;</li><li>▪ Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang putus ber KB;</li><li>▪ Masih banyak ditemukan usia kawin pertama di bawah rata-rata usia ideal (usia <math>\leq 21</math> tahun) pada Pasangan Usia Subur (PUS), sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.</li><li>▪ Kurangnya pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program kependudukan keluarga berencana yang ditujukan pada program pembangunan keluarga (KKBPK) untuk disesuaikan dengan program lini bawah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.</li></ul>
<b>Perhubungan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan jalan; belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antar kota, perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut juga dikarenakan masih kurang optimalnya penerapan peraturan sistem transportasi dan manajemen lalu lintas.</li><li>▪ Belum optimalnya sarana dan prasarana angkutan masal (bus rapat transit) untuk mengurangi kepadatan lalu lintas angkutan jalan dan pelayanan jasa transportasi daerah perkotaan.</li><li>▪ Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi.</li><li>▪ Masih tingginya jumlah fatalitas kecelakaan akibat dari kurangnya disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelayakan armada, ketiadaan rambu dan fasilitas keselamatan di jalan, serta rendahnya law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.</li><li>▪ Belum berkembangnya transportasi laut dan sungai yang representatif yang digunakan untuk perlintasan regional, nasional maupun internasional yang dapat digunakan untuk pengembangan transportasi orang maupun barang. Diperlukan dukungan investasi baik dari pemerintah maupun swasta untuk pengembangan serta sarana dan prasarana transportasi laut dan sungai baik regional maupun internasional</li><li>▪ Belum adanya Pembangunan transportasi perkeretaapian di Kalimantan Selatan sebagai pendukung perekonomian sebagai Pintu gerbang Ibu Kota Negara</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum optimalnya pelayanan jaringan penerbangan Bandar Udara Syamsudin Noor dan bandara lainnya di Kalimantan Selatan dalam melayani penerbangan komersial dari dan ke Kalimantan Selatan.</li><li>▪ Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan kebisingan) akibat dominannya pengguna lalu lintas kendaraan pribadi di jalan</li></ul>
<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi;</li><li>▪ Belum maksimalnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).</li><li>▪ Belum maksimalnya penyediaan informasi dan komunikasi public oleh pemerintah daerah.</li><li>▪ Terbatasnya infrastruktur akses internet dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar SKPD.</li><li>▪ Penerapan berbagi pakai data di SKPD belum maksimal</li><li>▪ Masih terdapat area blankspot di Kalimantan Selatan</li></ul>
<b>Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih rendah kualitas kinerja kelembagaan Koperasi;</li><li>▪ Masih banyaknya koperasi tidak aktif;</li><li>▪ Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat dari aparatur Koperasi;</li><li>▪ Lemahnya akses bagi KUKM pada sumber daya produktif (pembiayaan dan penjaminan);</li><li>▪ Lemahnya daya saing sumber daya manusia pada KUKM;</li><li>▪ Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi pasar domestik dan global;</li><li>▪ UMKM menurun dikarena dampak pandemi covid-19 yang melanda dunia, terkhusus di Indonesia;</li></ul>
<b>Penanaman Modal</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kinerja realisasi investasi PMA/PMDN tidak tercapai terkendala akibat covid 19 sehingga banyak perusahaan yang menunda realisasi investasinya</li><li>▪ Kurangnya Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA &amp; PMDN;</li><li>▪ Belum optimalnya Promosi Investasi yang berkelanjutan;</li><li>▪ Belum adanya Matchmaking dalam rangka kemitraan dunia usaha;</li></ul>
<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki masih jauh dari ketentuan yang seharusnya;</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi masih belum bisa dilakukan secara maksimal;</li><li>▪ SDM dengan kompetensi dan pengalaman profesional bidang kepemudaan masih sangat terbatas;</li><li>▪ Masih banyak organisasi pemuda yang pasif;</li><li>▪ Masih sedikitnya Wirausaha muda;</li><li>▪ Masih kurangnya kegiatan – kegiatan olahraga yang melibatkan peran serta masyarakat secara massal guna membudayakan olahraga di Kalimantan selatan.</li><li>▪ Masih kurangnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.</li></ul>
<b>Statistik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih rendahnya SDM Perstatistikan;</li><li>▪ Masih kurangnya sarana dan prasarana urusan statistik;</li><li>▪ Belum Optimalnya pengelolaan statistik sectoral;</li></ul>
<b>Persandian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih rendahnya SDM Perstatistikan;</li><li>▪ Masih kurangnya sarana dan prasarana urusan statistik;</li><li>▪ Belum Optimalnya pengelolaan statistik sectoral;</li></ul>
<b>Kebudayaan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum optimalnya penggalian potensi unsur budaya;</li><li>▪ Belum optimalnya pengembangan unsur budaya;</li><li>▪ Belum optimalnya aktualisasi unsur budaya;</li><li>▪ Sarana dan prasarana seni budaya masih kurang;</li><li>▪ Kurang produktifnya pelaku seni budaya daerah dalam berkarya</li><li>▪ Belum maksimalnya publikasi dan promosi Kebudayaan;</li><li>▪ Kurang optimalnya pembinaan terhadap lembaga budaya daerah</li></ul>
<b>Perpustakaan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum optimalnya perpustakaan digital;</li><li>▪ Rendahnya minat masyarakat Kalimantan Selatan untuk melakukan aktivitas membaca</li><li>▪ Masih Kurangnya Koleksi Bahan Pustaka yang terbaru untuk Layanan Umum, Referensi, Deposit, Layanan Anak, Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS).</li><li>▪ Belum optimalnya kegiatan pembinaan perpustakaan dan promosi perpustakaan.</li><li>▪ Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Perpustakaan</li></ul>
<b>Kearsipan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Depo arsip belum berjalan optimal;</li><li>▪ Kurangnya pemahaman ASN terhadap kearsipan;</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum lengkapnya regulasi daerah tentang pengelolaan arsip.</li><li>▪ Belum terlaksananya pengelolaan kearsipan secara handal dan komprehensif berbasis TIK</li><li>▪ Rendahnya komitmen pencipta Kearsipan skala Provinsi dalam menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Ke Kearsipan.</li></ul>
<b>Pariwisata</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mapping destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana prasarana dimiliki) yang hasil akhirnya adalah penyusunan pola perjalanan dengan berbagai pilihan: wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata</li><li>▪ Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum menyatu. Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait.</li><li>▪ Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dunia pariwisata dan dibandingkan kecepatan pemilik modal menginvestasikan modal dalam industri pariwisata</li><li>▪ Keterbatasan dana dan fokus kabupaten/kota dalam mengembangkan objek-objek wisatanya menjadi objek.</li><li>▪ Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata yang berkualitas masih belum memadai</li></ul>
<b>Kelautan Dan Perikanan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum optimalnya Pengembangan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya</li><li>▪ Belum dimanfaatkan secara optimal potensi sumber daya ikan di laut di wilayah &gt; 5 mil laut.</li><li>▪ Terbatasnya pembangunan dan pengembangan prasarana perikanan tangkap di titik sentra penangkapan ikan nelayan, khususnya dalam rangka mendukung penerapan sistem rantai dingin terhadap hasil tangkapan nelayan</li><li>▪ Belum berkembangnya kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan yang mandiri dan berbadan hukum</li><li>▪ Masih terbatasnya upaya pelestarian terhadap stock sumber daya ikan lokal, sehingga perlu adanya upaya pelepasliaran (restocking) di perairan umum</li><li>▪ Pada umumnya usaha pembudidaya ikan masih menerapkan sistem tradisional dan/atau sistem semi-intensif</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih besarnya ketergantungan pembudidaya ikan terhadap pakan ikan pabrikan yang menyebabkan tingginya biaya produksi budidaya ikan hingga 60 % khusus untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan</li><li>▪ Belum berkembangnya pengembangan usaha budidaya ikan lokal sebagai komoditas perikanan khas daerah</li><li>▪ Pada umumnya para pembudidaya ikan masih belum memahami tentang ketentuan dan penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)</li><li>▪ Masih terjadinya serangan hama dan penyakit ikan/udang di kawasan sentra pembudidayaan ikan</li><li>▪ Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</li><li>▪ Kesulitan pada akses permodalan usaha merupakan salah satu faktor yang membuat UMKM sektor kelautan dan perikanan terbatas pengembangannya dalam upaya peningkatan produktifitas dan kesejahteraannya</li><li>▪ Masih terbatasnya penyebaran informasi tentang potensi, peluang usaha, dan pengembangan investasi sektor kelautan dan perikanan.</li><li>▪ Masih terbatasnya penyebaran informasi dan penguatan edukasi kepada masyarakat tentang ikan dan manfaatnya bagi kesehatan, kekuatan, dan kecerdasan</li><li>▪ Masih terjadinya kegiatan illegal fishing di perairan umum maupun perairan laut di Kalimantan Selatan</li><li>▪ Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki POKMASWAS dan aparat pengawas dalam mendukung pelaksanaan operasional pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan di lapangan</li></ul>
<b>Pertanian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum optimalnya produksi tanaman pangan dan hortikultura</li><li>▪ Belum optimalnya kelembagaan penyuluhan dan petani</li><li>▪ Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air, serta Dampak Perubahan Iklim</li><li>▪ Belum optimalnya prasarana dan sarana pertanian</li><li>▪ Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian</li><li>▪ Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi pasar</li><li>▪ Masih rendahnya perlindungan terhadap petani dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani yang berbasis korporasi petani</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura masih belum tertata dengan baik</li><li>▪ Pembangunan Perkebunan Ramah Lingkungan masih kurang efektif</li><li>▪ Belum optimalnya Integrasi Sawit – Sapi</li><li>▪ Belum optimalnya pengembangan Kawasan perkebunan/peternakan berbasis korporasi pekebun/peternak</li><li>▪ Pemotongan ternak sapi betina produktif cukup tinggi</li><li>▪ Pengeluaran Ternak dan Hasil Ternak Keluar Kalimantan Selatan Cukup Banyak namun belum memberikan kontribusi yang memadai terhadap PAD.</li><li>▪ Penyakit Hewan yang mempengaruhi pembangunan peternakan</li><li>▪ Harga Pakan dan Bahan Pakan Ternak Unggas Cenderung Meningkat</li><li>▪ Jaminan Keamanan Pangan yang ASUH masih rendah</li><li>▪</li></ul>
<b>Kehutanan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih luasnya lahan kritis</li><li>▪ Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan berbasis Perhutanan Sosial;</li><li>▪ Masih rendahnya produksi dan pemasaran hasil KUPS yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kelola Perhutanan Sosial;</li><li>▪ Belum maksimalnya penerimaan Retribusi dan PNBK sektor kehutanan karena sedikitnya izin usaha pemanfaatan dan belum digalinya sumber-sumber pendapatan baru</li></ul>
<b>Energi Dan Sumber Daya Mineral</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menurunnya cadangan air tanah akibat pengembalian air tanah yang berlebihan atau tidak sesuai kemampuan daya dukung air tanah serta pemanfaatan tata ruang pada zona imbuhan air tanah.</li><li>▪ Kurangnya pengelolaan terhadap bukaan lahan tambang sehingga meninggalkan lubang bekas tambang (void) yang tidak/belum direklamasi. Salah satunya akibat pertimbangan tanpa izin yang masih marak sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan.</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam hal peningkatan bauran energi untuk pemenuhan kebutuhan energi.</li><li>▪ Kurangnya pembangunan infrastruktur ketegalistrikan di daerah terpencil yang lokasinya sulit terjangkau dan masih banyaknya rumah tangga miskin yang belum mendapatkan sambungan listrik.</li></ul>
<b>Perdagangan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Berlaku peraturan tentang larangan ekspor produk tambang menuntut adanya pergerakan investasi secara cepat dalam rangka hilirisasi produk – produk hasil tambang ;</li><li>▪ Maraknya barang beredar di pasaran yang belum memenuhi ketentuan standar dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen terutama produk elektronik dan mainan anak;</li><li>▪ Peningkatan penggunaan dan cinta produk dalam negeri dalam rangka memanfaatkan jumlah penduduk Indonesia sebagai potensi pasar yang besar ;</li><li>▪ Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia khususnya Kalimantan Selatan yang berdampak signifikan terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi yang belum ada kepastian kapan akan berakhirnya ;</li><li>▪ Masih terjadinya perang dagang antara Amerika dan Cina yang mengakibatkan penurunan produk ekspor Indonesia dan ini sudah barang tentu pasti berimbas kepada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan ;</li><li>▪ Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai 31 Desember 2015 menyebabkan terjadinya beberapa deregulasi perdagangan luar negeri terutama menyangkut pembebasan bea masuk untuk barang – barang dari ASEAN selain itu di dalam 2015 terjadi deregulasi beberapa barang ekspor yang merupakan produk unggulan ekspor Kalimantan Selatan seperti batu bara, produk hasil hutan dan produk minyak sawit (CPO);</li></ul>
<b>Perindustrian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pemasaran yang terbatas.</li><li>▪ Lemahnya struktur industri.</li><li>▪ Terbatasnya IKM yang memiliki izin usaha industri.</li><li>▪ Masih rendahnya kualitas SDM industri.</li><li>▪ Belum tersedianya lahan clear dan clean untuk sentra IKM dan kawasan industri yang mendukung penumbuhan dan pengembangan industri.</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum tersedianya data dan informasi industri yang memadai (valid dan up to date) untuk menarik investasi dan pengembangan industri.</li><li>▪ Lambatnya investasi di sektor hilir industri.</li><li>▪ Belum optimalnya pemanfaatan SDA lokal menjadi produk unggulan.</li><li>▪ Masih rendahnya produktivitas industri.</li><li>▪ Kurangnya jumlah wirausaha industri.</li></ul>
<b>Transmigrasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Terbatasnya lahan yang memenuhi kriteria 2 C dan 3</li><li>▪ Terbatasnya lahan yang memenuhi kriteria clean dan clear</li><li>▪ Rendahnya aspek legalitas dalam status kepemilikan lahan transmigrasi</li><li>▪ Kurang optimalnya kerjasama dengan daerah penerima peserta transmigrasi</li><li>▪ Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi Kurangnya koordinasi dengan skpd lain dalam hal peningkatan pemberdayaan transmigrasi.</li></ul>





## BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah menjelaskan tentang kondisi perekonomian dan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kerangka Ekonomi Daerah memuat tentang kondisi ekonomi tahun lalu, serta perkiraan/proyeksi tahun berjalan dan yang akan datang yaitu tahun 2023 dan 2024. Kerangka ekonomi ini, antara lain mencakup indikator – indikator yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah beserta arah kebijakan pemerintah daerah untuk pembangunan perekonomiannya.

Kerangka Keuangan Daerah memuat kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian meliputi sumber – sumber pendapatan, belanja, dan pembiayaan.



RKPD TAHUN 2024  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 dirumuskan tidak lepas dari melihat pencapaian pembangunan ekonomi dan evaluasi capaian target tahun-tahun sebelumnya serta prospek dan tantangan perekonomian di masa yang akan datang. Pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 membuat kondisi ekonomi di seluruh belahan dunia memburuk yang memberikan dampak juga terhadap perekonomian Nasional dan Kalimantan Selatan. Hal ini karena setiap negara terhubung untuk melakukan perdagangan global di mana antara satu negara dan negara lain saling terhubung yang biasa disebut merupakan rantai pasok. Rantai pasok ini dimana satu negara mendapat pasokan perekonomian dari negara lain dan negara tersebut memberikan pasokan





ke negara lain. Ketika ada satu negara bermasalah, maka jaringan pasokan tersebut terganggu dan membuat dampak ke negara lain yang saling terhubung.

Pada tahun 2024 efek Covid-19 terus berangsur berkurang di mana pembatasan sosial terus dilonggarkan sehingga aktivitas masyarakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan untuk pemulihan perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2024. Perbaikan ekonomi ini tidak begitu saja berjalan dengan mudah karena di tengah perbaikan ekonomi pasca pandemi, perekonomian di seluruh dunia dihadapkan pada tantangan akibat dampak perang Rusia – Ukraina, inflasi yang tinggi, perubahan iklim yang ekstrem, krisis pangan, serta tuntutan era digitalisasi yang tumbuh sangat cepat. Hal – hal tersebut menjadi dasar arah kebijakan pertimbangan dalam merumuskan prioritas pembangunan perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2024.

### **3.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2022**

Kondisi pembangunan ekonomi daerah Kalimantan Selatan membahas gambaran mengenai capaian kerangka ekonomi makro daerah tahun – tahun sebelumnya beserta proyeksinya untuk tahun 2023 dan 2024. Gambaran kerangka ekonomi makro daerah ini terdiri atas Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Kemiskinan diuraikan sebagai berikut.

#### **3.1.1.1 Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pada Sub Bab ini disampaikan PDRB pada Tahun 2022 selama tiga tahun yaitu Tahun 2020, 2021, dan 2022. PDRB tersebut antara lain berdasarkan harga konstan, harga berlaku, lapangan usaha, dan pengeluaran.

Secara umum, PDRB Kalimantan Selatan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp. 142,33 Triliun atas dasar harga konstan (ADHK) dan senilai Rp. 251,25 Triliun atas dasar harga berlaku (ADHK). Pada PDRB ini, ada beberapa hal yang dapat disoroti sebagai berikut.

1. Berdasarkan harga berlaku, maka tiga lapangan usaha dengan share terbesar dari PDRB Kalimantan Selatan secara berurutan adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta sektor Industri Pengolahan.





2. Berdasarkan harga berlaku tersebut, dapat juga disoroti bahwa nilai produk sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh sangat signifikan, demikian juga dengan share-nya.
3. Berdasarkan harga berlaku, maka tiga jenis komponen pengeluaran dengan share terbesar dari PDRB Kalimantan Selatan secara berurutan adalah sektor Ekspor, sektor Konsumsi Rumah Tangga, dan sektor Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto).
4. Tingginya nilai share ekspor sangat berkaitan dengan lapangan usaha sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Rincian PDRB menurut lapangan usaha disampaikan pada Tabel 3.1, dan Tabel 3.2, berikut.

**Tabel 3.1** PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)

Keterangan Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.786,22	26.827,76	28.635,33	18.390,80	18.606,67	18.884,18
Pertambangan dan Penggalian	32.759,69	37.308,54	80.520,10	31.920,34	33.295,01	35.088,49
Industri Pengolahan	24.215,50	26.862,85	28.615,17	16.298,97	17.314,00	17.850,03
Pengadaan Listrik dan Gas	274,73	294,97	320,96	163,76	171,4	184,86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	805,8	855,21	912,80	572,86	601,69	630,96
Konstruksi	14.803,23	15.742,37	17.267,78	10.075,35	10.364,04	10.812,57
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.731,97	19.798,25	22.758,70	11.972,12	12.235,52	13.202,32
Transportasi dan Pergudangan	11.796,54	12.116,84	15.764,97	7.773,29	7.913,71	9.298,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.846,30	4.006,24	4.506,71	2.628,49	2.688,92	2.966,30
Informasi dan Komunikasi	7.032,16	7.586,35	8.298,94	5.510,90	5.908,86	6.319,21
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.569,43	6.933,86	7.461,55	4.316,33	4.367,68	4.384,93
Real Estate	4.352,93	4.676,17	5.072,21	3.144,11	3.310,58	3.513,45
Jasa Perusahaan	1.309,54	1.379,20	1.543,08	806,23	835,41	898,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.416,99	11.722,82	12.024,99	7.045,53	7.138,27	7.182,47
Jasa Pendidikan	9.093,59	9.464,28	9.932,27	6.117,21	6.211,32	6.429,09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.959,50	4.543,25	4.864,99	2.613,23	2.916,03	3.047,17
Jasa Lainnya	2.396,99	2.457,61	2.755,99	1.516,07	1.533,73	1.646,94
<b>Total</b>	<b>179.151,11</b>	<b>192.576,58</b>	<b>251.256,54</b>	<b>130.865,59</b>	<b>135.412,85</b>	<b>142.339,28</b>

Sumber: BPS Kalsel (2023)

**Tabel 3.2** PDRB Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)





Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	87.613,07	90.009,58	103.373,70	61.910,60	62.402,19	65.961,81
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.938,95	2.007,59	2.193,86	1.247,68	1.261,41	1.324,75
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21.958,26	23.142,89	24.626,55	13.390,26	13.867,35	13.819,54
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	44.894,25	46.338,64	51.624,13	30.050,30	30.299,67	31.912,83
Perubahan Inventori	70,57	95,34	-859,82	52,35	68,14	-550,67
Ekspor Barang dan Jasa	100.277,35	147.958,03	225.887,72	89.258,23	106.230,89	119.484,26
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	77.658,35	116.975,49	155.589,61	65.052,06	78.716,79	89.613,25
<b>Total</b>	<b>179.151,11</b>	<b>192.576,58</b>	<b>251.256,54</b>	<b>130.865,59</b>	<b>135.412,85</b>	<b>142.339,28</b>

Sumber: BPS Kalsel (2023)

Sama halnya dengan PDRB, selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2022, PDRB ADHK Perkapita terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 ke 2022, PDRB ADHK Perkapita yakni dari Rp. 32,85 juta menjadi Rp. 34,03 juta. Hal ini memperlihatkan bahwa tahun 2022 terjadi peningkatan Rp. 1,18 Juta dari tahun sebelumnya.

**Tabel 3.3** PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2017 – 2022

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHB (Rp. milyar)	159.104,55	171.684,06	180.560,65	179.151,11	192.576,58	251.256,54
PDRB ADHK (Rp. milyar)	121.858,52	128.052,58	133.271,55	130.865,59	135.412,85	142.339,28
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28	5,08	4,08	-1,81	3,47	5,11
Jumlah Penduduk (orang)	4.119.794	4.182.695	4.244.096	4.073.584	4.122.576	4.182.080
PDRB ADHK Perkapita (Rp. juta)	29,58	30,61	31,4	32,13	32,85	34,03
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Perkapita (%)	3,64	3,48	2,58	2,32	2,24	3,59

### 3.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian daerah juga dapat dijelaskan melalui Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. LPE dapat digunakan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik untuk mengukur





pertumbuhan ekonomi secara tahunan maupun secara rinci dengan melihat kondisi per sektor maupun spasial. Indikator ini dapat menggambarkan sektor-sektor potensial di suatu daerah.

Pada kondisi perekonomian terbaru tahun 2022, perekonomian Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berasal dari berbagai sumber. Ada yang berasal dari internal yang terjadi secara lokal di Kalimantan Selatan, maupun dari sumber eksternal yaitu nasional dan global. Dinamika perekonomian Kalimantan Selatan ini biasanya dideskripsikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan melalui Perkembangan Perekonomian Kalimantan Selatan yang dipublikasikan setiap triwulan. Adapun deskripsi singkat perkembangan setiap triwulan tersebut disampaikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

#### A. Triwulan I pada Tahun 2022

Fenomena perekonomian global secara tidak langsung memiliki peran pada perkembangan perekonomian Kalimantan Selatan. Awal tahun 2022, pemulihan ekonomi global diproyeksikan menguat karena dampak kemunculan varian Omicron pada Covid-19 hanya bersifat pendek. Namun, konflik Rusia-Ukraina pada Februari 2022 menghambat pemulihan tersebut. Konflik tersebut antara lain mempengaruhi harga bahan bakar sehingga berdampak juga dengan tidak stabilnya harga komoditas lain, termasuk komoditas ekspor Kalimantan Selatan.

Sedangkan secara lokal catatan peristiwa yang terjadi di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

- Realisasi pengadaan semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mengalami peningkatan sebesar 10,23 persen secara y-on-y.
- Penumpang angkutan udara yang berangkat mengalami peningkatan sebesar 10,10 persen secara q-to-q dan 40,20 persen secara y-on-y. Sementara penumpang angkutan laut sebesar 309,33 persen secara q-to-q dan 94,02 persen secara y-on-y.
- Impor barang modal Kalimantan Selatan mengalami kenaikan dibanding Triwulan I-2021.





- Tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk pegawai pemerintah daerah kabupaten/kota belum dibayarkan di Triwulan I tahun 2022 sehingga belanja pegawai tumbuh negatif dibandingkan Triwulan I tahun 2021.
- Pelaksanaan kegiatan Isra Mi'raj di berbagai tempat membuat kegiatan pada lembaga keagamaan meningkat menjadi faktor peningkatan pengeluaran konsumsi LPNRT.

## B. Triwulan II pada Tahun 2022

Kondisi perekonomian global sangat bergejolak pada Triwulan II tahun 2022 akibat terjadinya konflik Rusia-Ukraina sejak akhir Februari 2022. Hal ini memperburuk rantai pasokan global dengan menyebabkan kenaikan harga beberapa komoditas energi secara signifikan, serta mempercepat kenaikan inflasi di seluruh dunia. Akibatnya pemulihan ekonomi global melambat sempat terhambat.

Adapun secara lokal catatan peristiwa yang terjadi di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

- Memasuki periode puncak panen padi di Kalsel pada *subround 2* (Mei - Agustus).
- Penumpang berangkat angkutan udara Triwulan II tahun 2022 meningkat 31,16 persen (q-to-q) dan 34,83 persen (y-on-y). Sementara penumpang berangkat angkutan laut meningkat 43,90 persen (q-to-q) dan 88,91 persen (y-on-y).
- Rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang Bulan April-Juni 2022 sebesar 34,85, 52,72, dan 53,05 persen. Sementara hotel non-bintang sebesar 19,11, 23,95, dan 23,35 persen. Meningkat dari April-Juni 2021 sebesar 34,20, 31,78, dan 41,45 persen untuk hotel berbintang dan 17,91, 17,71, dan 22,73 persen untuk hotel non-bintang.
- Momen Idul Fitri tahun 2022 dan libur tahun ajaran sekolah meningkatkan pergerakan penumpang transportasi umum dan aktivitas wisata di tempat rekreasi.





- Peningkatan pendapatan agen dan biro perjalanan wisata seiring dengan meningkatnya animo masyarakat untuk beribadah umroh selama bulan Ramadhan. Relaksasi kebijakan terkait perjalanan domestik dan internasional juga turut berperan positif dalam peningkatan pendapatan ini
- Peningkatan permintaan dan konsumsi masyarakat selama Bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2022 yang didorong oleh pembayaran THR.
- Realisasi belanja pemerintah mengalami kontraksi dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2021, salah satunya karena pergeseran jadwal pencairan Gaji ke-13 yang pada Tahun 2021 dibayarkan di Triwulan II, sementara Tahun 2022 dibayarkan pada Triwulan III. Meskipun demikian, kebijakan belanja pemerintah untuk menyerap barang/jasa dengan Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) 40 persen sudah efektif.

### C. Triwulan III pada Tahun 2022

Tercatat ada beberapa peristiwa lokal yang terjadi di Kalimantan Selatan yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian. Peristiwa-peristiwa yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- Siklus panen padi di Kalimantan Selatan berada dalam periode puncak panen pada *subround 2* (Mei-Agustus).
- Penumpang berangkat dengan angkutan udara dan angkutan laut dari Kalimantan Selatan meningkat signifikan secara y-on-y.
- Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang Bulan Juli-September 2022 sebesar 52,54, 49,75, dan 53,14 persen, lebih tinggi dibanding periode Juli-September 2021 sebesar 34,28, 32,88, dan 41,88 persen. Sementara hotel non-bintang Bulan Juli-September 2022 sebesar 26,98, 20,74, dan 23,37 persen, lebih tinggi dari Juli-September 2021 sebesar 16,35, 19,54, dan 21,18 persen.
- Antusiasme masyarakat untuk beribadah umroh masih tinggi meskipun harga tiket penerbangan meningkat.





- Pencairan Gaji ke-13 bagi ASN, TNI, dan Polri pada awal Triwulan III tahun 2022.
- Realisasi belanja APBN dan APBD Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan positif dibanding Triwulan II tahun 2022.
- Inflasi Kalimantan Selatan tahun ke tahun pada bulan September 2022 sebesar 7,35 persen.
- Ekspor Kalimantan Selatan di Triwulan III tahun 2022 mengalami peningkatan, baik secara q-to-q maupun secara y-on-y.

#### D. Triwulan IV pada Tahun 2022

Tercatat ada beberapa peristiwa yang terjadi di Kalimantan Selatan yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian. Peristiwa adalah sebagai berikut:

- Jumlah penumpang di moda transportasi udara dan laut hampir seluruhnya mengalami peningkatan pada Triwulan IV tahun 2022:
  - Penumpang berangkat melalui angkutan udara tumbuh 13,17 persen (q-to-q) dan 53,43 persen (y-on-y).
  - Penumpang berangkat melalui angkutan laut tumbuh -1,26 persen (q-to-q) dan 346,74 persen (y-on-y).
- Selama periode Pandemi Covid-19, mobilitas masyarakat di Kalimantan Selatan mencapai puncaknya pada Triwulan IV tahun 2022 (dibandingkan dengan *baseline date*, 3 Januari s.d. 6 Februari 2020).
- Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang Bulan Oktober-Desember 2022 sebesar 60,51, 56,77, dan 63,68 persen, lebih tinggi dibandingkan Bulan Oktober-Desember 2021 sebesar 50,67, 53,44, dan 57,63 persen. Sementara hotel non-bintang Bulan Oktober-Desember 2022 sebesar 25,32, 24,19, dan 28,92 persen, lebih tinggi dibandingkan Bulan Oktober-Desember 2021 sebesar 23,34, 24,34, dan 26,68 persen





- Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional XXIX Tahun 2022 di Kalimantan Selatan diselenggarakan pada tanggal 10-19 Oktober 2022.
- Inflasi Kalimantan Selatan tahun ke tahun Bulan Desember 2022 sebesar 6,99 persen.
- Nilai ekspor luar negeri Kalimantan Selatan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 55,14 persen. Sementara impor luar negeri mengalami kenaikan sebesar 67,64 persen dibandingkan dengan tahun 2021.
- Realisasi Belanja Pemerintah APBD Tahun 2022 mengalami kenaikan untuk jenis belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Sebaliknya, realisasi Belanja Pemerintah APBN turun untuk jenis belanja tersebut dibandingkan dengan tahun 2021.
- Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tercatat di BKPM Tahun 2022 sebesar Rp. 12,31 Triliun meningkat 11,87 persen dibandingkan dengan Tahun 2021. Demikian pula dengan Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2022 sebesar US\$ 208,1 Juta, meningkat 77,56 persen dibandingkan dengan Tahun 2021.

Bila diambil kesimpulan, terdapat 5 sektor lapangan usaha yang pertumbuhannya dapat disorot. Sektor lapangan usaha tersebut adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh di tingkat 7,15 persen, Pertambangan dan Penggalan (5,60 persen), Konstruksi (4,33 persen), Industri Pengolahan (3,31 persen), dan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (1,45 persen). Sementara itu, laju pertumbuhan per komponen pada sisi pengeluaran tertinggi dicatatkan oleh ekspor sebesar 13,32 persen pada tahun 2022. Adapun uraian singkat mengenai laju pertumbuhan menurut lapangan usaha dan sisi pengeluarannya tahun 2022 disajikan pada Gambar III.2 berikut.





Sumber: BPS Kalsel (2023)

**Gambar 3.1** LPE Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha dan Komponen Pengeluaran pada Tahun 2022

Pada jangka panjang, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan terus tumbuh positif. Pertumbuhan positif ini juga warnai adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi ketika terjadi pandemi Covid-19, Laju Pertumbuhan Ekonomi ini sempat berkontraksi hingga minus bila dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan juga mengalami fluktuasi meskipun cenderung mengalami perlambatan selama periode tahun 2013 – 2022. Pada Tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 5,33 persen. Laju pertumbuhan tersebut terus melambat hingga pada Tahun 2015 dengan catatan yang hanya sebesar 3,82 persen.

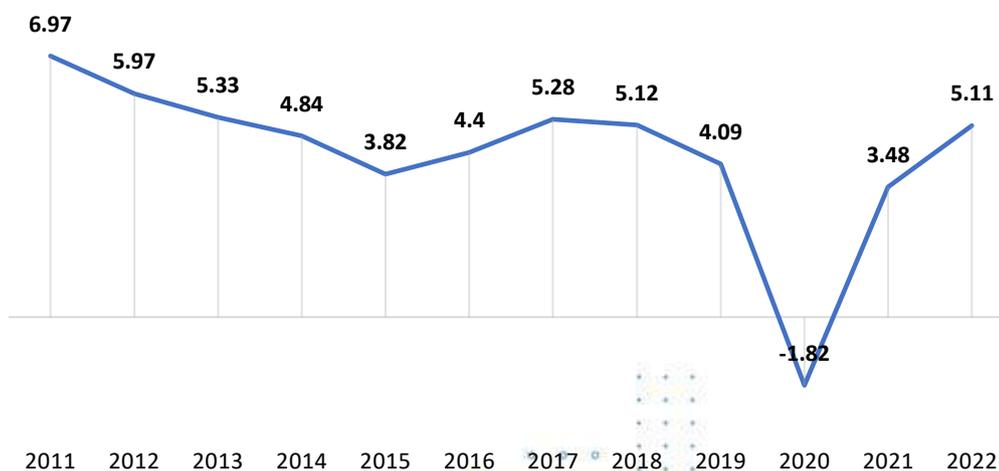
Pada Tahun 2016 dan 2017 LPE Kalimantan Selatan mulai menunjukkan angka yang membaik. Di Tahun 2016 LPE tercatat tumbuh lebih cepat di angka 4,40 persen. Kemudian terus mengalami kenaikan di Tahun 2017 sebesar 5,28 persen. Salah satu faktor utama membaiknya indikator LPE adalah fenomena commodities boom. Akan tetapi, perlambatan kembali tercatat pada Tahun 2018 dan 2019. Pada periode tersebut LPE tercatat tumbuh melambat di angka 5,13 persen dan 4,01 persen. Pada Tahun 2020 perekonomian Kalimantan Selatan tercatat mengalami pertumbuhan negatif di angka -1,81 persen. Kontraksi pada LPE ini terjadi akibat imbas Pandemi Covid-19 yang menghantam sisi permintaan maupun sisi pasokan, baik secara nasional, global, maupun di tingkat lokal daerah. Kebangkitan ekonomi terlihat pada Tahun 2021 di saat LPE Kalimantan Selatan tercatat tumbuh sebesar 3,48 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perekonomian di Kalimantan Selatan sudah mulai bangkit pasca Pandemi Covid-





19. Hal ini pun tergambar pada Tahun 2022 saat LPE mampu menyentuh angka 5,11 persen.

Adapun fluktuasi LPE di Kalimantan Selatan pada periode 2011 – 2022 dijelaskan pada Gambar 3.2 berikut.



**Gambar 3.2** Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2022

Berdasarkan rilis data BPS Kalimantan Selatan, Perekonomian Kalimantan Selatan 2022 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 142,34 Triliun.

Ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2022 tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,48 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha sektor Transportasi dan Pergudangan 17,43 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen sektor Ekspor Barang dan Jasa sebesar 13,32 persen.

LPE Kalimantan Selatan Tahun 2022 pada sisi pengeluaran dan lapangan usaha bersumber dari sektor-sektor utama. Tabel III.4 menjelaskan bahwa sumber pertumbuhan tertinggi di sisi pengeluaran adalah pada komponen sektor ekspor, konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto. Fenomena pertumbuhan sektor konsumsi rumah tangga pada Tahun 2022 ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat sudah menunjukkan perbaikan setelah sempat





menurun selama pandemi Covid-19. Tabel 3.4. Pada Tabel 3.5 menunjukkan bahwa sumber pertumbuhan terbesar di sisi lapangan usaha adalah pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

**Tabel 3.4** LPE Kalimantan Selatan Tahun 2017–2022 Menurut Pengeluaran Beserta Sumber Pertumbuhan

Komponen pengeluaran	LPE (%)						Sumber Pertumbuhan (%)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah tangga	4,82	5,03	4,01	-0,26	0,79	5,37	2,26	2,35	1,87	-0,12	0,38	2,48
Konsumsi LNPRT	5,58	8,74	7,97	-2,4	1,1	5,02	0,05	0,07	0,08	-0,02	0,01	0,05
Konsumsi Pemerintah	1,02	2,53	2,91	-2,57	3,56	-0,56	0,11	0,27	0,3	-0,27	0,37	-0,06
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4,3	8,01	6,37	-1,49	0,83	5,16	0,95	1,75	1,42	-0,32	0,18	1,16
Perubahan Inventori	-145,4	215	-47	-89,3	-	-908,12	0,81	0,52	-0,34	-0,33	0,01	-0,46
Ekspor Barang dan Jasa	8,96	5,97	2,12	-10,83	19,02	13,32	6,57	4,53	1,63	-8,16	12,98	10,37
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	10,18	7,84	1,52	-13,15	21,01	14,60	5,46	4,41	0,88	-7,41	10,45	8,43
<b>Laju Pertumbuhan</b>	<b>5,28</b>	<b>5,08</b>	<b>4,08</b>	<b>-1,82</b>	<b>3,48</b>	<b>5,11</b>	<b>5,28</b>	<b>5,08</b>	<b>4,08</b>	<b>-1,81</b>	<b>3,48</b>	<b>5,11</b>

Sumber: BPS (2023) diolah

**Tabel 3.5** LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2017–2022 Menurut Lapangan Usaha Beserta Sumber Pertumbuhan

Komponen Lapangan Usaha	LPE (%)						Sumber Pertumbuhan (%)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,09	3,73	3,59	-0,95	1,16	1,45	0,59	0,53	0,5	-0,13	0,16	0,20
Pertambangan dan Penggalian	4,09	4,11	1,43	-4,44	4,35	5,6	1,08	1,07	0,37	-1,12	1,05	1,38
Industri Pengolahan	5,69	4,34	1,45	-3,63	6,23	3,31	0,74	0,57	0,19	-0,43	0,78	0,42
Pengadaan Listrik, Gas	3,6	7,58	4,72	4,74	4,66	7,85	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,74	6,83	5,59	5,83	5,03	4,87	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	5,78	5,89	6,08	-1,29	2,87	4,33	0,43	0,44	0,46	-0,1	0,22	0,33
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi	7,8	7,54	7,42	-3,38	2,2	7,15	0,67	0,66	0,67	-0,32	0,2	0,65





Komponen Lapangan Usaha	LPE (%)						Sumber Pertumbuhan (%)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mobil dan Sepeda Motor												
Transportasi dan Pergudangan	6,86	6,97	5,92	-5,32	1,81	17,43	0,4	0,41	0,36	-0,33	0,11	1,02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,84	7,01	7,41	-2,02	2,3	9,63	0,13	0,13	0,14	-0,04	0,05	0,19
Informasi dan Komunikasi	7,94	6,89	7,33	7,36	7,22	6,94	0,28	0,25	0,27	0,28	0,3	0,30
Jasa Keuangan	6	4,24	1,66	1,37	1,19	0,39	0,2	0,14	0,05	0,04	0,04	0,01
Real Estate	5,14	5,01	5,95	3,88	5,29	5,87	0,11	0,11	0,13	0,09	0,13	0,14
Jasa Perusahaan	7,14	7,67	7,29	-1,99	3,62	7,53	0,04	0,04	0,04	-0,01	0,02	0,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,39	3,77	6,65	0,73	1,49	0,53	0,13	0,2	0,34	0,04	0,07	0,03
Jasa Pendidikan	6,61	7,02	7,54	1,62	1,54	3,51	0,28	0,3	0,33	0,07	0,07	0,16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,56	5,94	5,89	7,51	10,89	5,31	0,1	0,11	0,11	0,13	0,23	0,11
Jasa lainnya	6,59	7,38	7,08	-1,46	1,16	6,78	0,07	0,08	0,08	-0,02	0,01	0,08
<b>Laju Pertumbuhan</b>	<b>5,3</b>	<b>5,1</b>	<b>4,1</b>	<b>-1,82</b>	<b>3,48</b>	<b>5,11</b>	<b>5,3</b>	<b>5,08</b>	<b>4,08</b>	<b>-1,81</b>	<b>3,48</b>	<b>5,11</b>

Sumber: BPS (2022) diolah

### 3.1.1.3 Kontribusi PDRB Antar Wilayah

Secara Regional Kalimantan, LPE Kalimantan Selatan untuk Tahun 2022 berada di posisi ke tiga di antara lima provinsi yang berada di Pulau Kalimantan. LPE Kalimantan Selatan di angka 5,11 persen lebih tinggi jika dibandingkan Kalimantan Timur (4,48 persen) dan Kalimantan Barat (5,07 persen). Namun, LPE Kalimantan Selatan ini lebih rendah jika dibandingkan Kalimantan Utara (5,34 persen) dan Kalimantan Tengah (6,45 persen). Perbandingan LPE secara regional Kalimantan diuraikan pada Gambar 3.3 berikut.



Sumber: BPS Kalsel (2023)

**Gambar 3.3** Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Regional Kalimantan Tahun 2022

Berdasarkan kewilayahan kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Selatan. Maka ada tiga wilayah dengan share PDRB terbesar di Kalimantan Selatan. Wilayah tersebut secara berurutan adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu.





**Tabel 3.6** PDRB Kalimantan Selatan Menurut Wilayah (Milyar Rupiah)

Keterangan Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Tanah laut	13.902,30	13.786,69	19.019,18	10.366,65	10.164,06	11.053,37
Kotabaru	24.113,35	23.959,56	33.313,30	17.637,05	17.306,37	18.703,45
Banjar	16.626,08	16.528,58	21.071,72	11.967,13	11.732,65	12.651,28
Barito Kuala	8.696,33	8.710,47	9.871,87	5.822,27	5.760,37	6.155,85
Tapin	8.438,25	8.393,89	12.770,26	6.454,99	6.358,49	6.898,88
Hulu Sungai Selatan	6.555,48	6.564,02	8.349,10	4.706,46	4.650,22	5.039,67
Hulu Sungai Tengah	7.039,39	7.052,35	7.947,82	4.882,21	4.832,75	5.174,08
Hulu Sungai Utara	4.940,27	4.968,42	5.671,78	3.325,25	3.303,08	3.549,11
Tabalong	18.175,41	17.744,39	29.172,84	14.853,25	14.482,84	15.746,27
Tanah bumbu	20.036,05	19.899,65	31.058,59	15.613,39	15.395,66	16.920,76
Balangan	11.027,66	10.722,30	19.540,39	9.409,83	9.177,87	9.974,65
Kota Banjarmasin	33.012,59	32.720,17	38.498,36	22.348,71	21.925,24	23.966,97
Kota Banjarbaru	9.701,10	9.539,05	11.788,18	6.232,67	6.118,39	6.823,28
<b>Total</b>	<b>179.151,11</b>	<b>192.576,58</b>	<b>248.073,39</b>	<b>130.865,59</b>	<b>135.412,85</b>	<b>142.339,28</b>

Sumber: BPS Kalimantan Selatan (2023)

Secara kewilayahan kabupaten dan kota, lima kabupaten/kota yang memiliki share PDRB terbesar di Kalimantan Selatan pada Tahun 2022. Wilayah tersebut adalah Kota Banjarmasin (15,52 persen), Kabupaten Kotabaru (13,43 persen), Kabupaten Tanah Bumbu (12,52 persen), Kabupaten Tabalong (11,76 persen), dan Kabupaten Banjar (8,49 persen). Apabila dilihat dari kontribusi per lapangan usaha untuk ke-lima kabupaten/kota tersebut, maka lapangan usaha sektor pertambangan dan penggalian masih merupakan lapangan usaha yang paling besar kontribusinya, disusul lapangan usaha sektor industri pengolahan, dan lapangan usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Share PDRB yang dimaksud diuraikan pada Gambar 3.4 berikut.





Sumber: BPS (2023) diolah

**Gambar 3.4** Share Perekonomian (%) Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2022

Secara spasial, Bab Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah ini mengidentifikasi kabupaten/kota yang menjadi wilayah pertumbuhan di Kalimantan Selatan dengan menggunakan Analisis Tipologi Klassen. Berdasarkan analisis tipologi tersebut terdapat empat kuadran wilayah yang disajikan pada Gambar 3.5 dan dideskripsikan sebagai berikut.

- Kuadran I merupakan wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan kontribusi yang besar selama lima tahun terakhir (2017-2022). Daerah yang berada di Kuadran I adalah Banjarmasin, yang ditopang oleh kegiatan-kegiatan ekonomi primer (pertanian, perikanan, dan kehutanan), sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan, dan jasa);
- Kuadran II merupakan wilayah daerah berkembang, yang memiliki rata-rata pertumbuhan relatif tinggi namun rata-rata kontribusi PDRB-nya masih relatif rendah. Daerah yang berada pada wilayah ini yakni Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tapin, dan Banjarbaru;
- Kuadran III merupakan daerah yang relatif tertinggal di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB yang relatif rendah. Daerah yang berada di wilayah ini adalah Tapin, Tanah Laut dan Balangan;
- Kuadran IV merupakan daerah maju namun tertekan, di mana kontribusi PDRB yang relatif tinggi namun pertumbuhannya relatif rendah.





Adapun daerah yang masuk pada klasifikasi ini adalah Kotabaru, Banjar, Tabalong, dan Tanah Bumbu.



**Gambar 3.5** Tipologi Klassen PDRB ADHK Kabupaten/Kota pada tahun 2017-2022 di Kalimantan Selatan

### 3.1.1.4 Kesenjangan Wilayah

Pada periode 2015-2022, Kalimantan Selatan menunjukkan kesenjangan wilayah yang mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari hasil analisis kesenjangan wilayah menggunakan Indeks Williamson yang menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pada tahun terakhir indeks tersebut. Indeks Williamson menganalisis kesenjangan menggunakan koefisien variasi dari PDRB per kapita kabupaten/kota.

Pada Tahun 2022, Indeks Williamson tercatat pada nilai 0,509. Nilai ini naik sebanyak 0,061 poin dari nilai indeks pada Tahun 2015. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa daerah yang sangat bergantung pada sektor pertambangan dan penggalan yang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi dan beberapa daerah yang bergantung pada sektor pertanian tumbuh lebih lambat. Perubahan nilai Indeks Williamson pada periode 2015-2022 ini tergambar pada Gambar 3.6 berikut.





### Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2022



Sumber: BPS Kalsel 2023

Ket: \* Angka Sementara dan \*\*Angka Sangat Sementara

**Gambar 3.6** Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2024

#### 3.1.1.5 Increment Capital Output Ration (ICOR)

Nilai ICOR didapat dengan membandingkan nilai investasi yang ditanamkan terhadap tambahan output yang terjadi sepanjang periode investasi. Besaran ICOR adalah proxy efisiensi sebuah perekonomian dimana semakin rendah nilai ICOR berarti menunjukkan efisiensi relatif suatu perekonomian. Nilai *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan dengan tren yang fluktuatif pada periode 2011 - 2019. Pada Tahun 2020 ICOR Kalimantan Selatan turun sampai minus 12,44. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga minus atau pertumbuhan ekonomi yang negatif akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, ICOR kembali meningkat menjadi 6,66 dan semakin membaik pada 2022 dengan angka 4,61 dampak dari mulai pulihnya perekonomian Kalimantan Selatan pasca Pandemi Covid-19.





Sumber: KEMD Kalsel, diolah (2023)

**Gambar 3.7** ICOR Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2022

Dengan melihat terus membaiknya pertumbuhan ekonomi serta realisasi investasi di Kalimantan Selatan tetapi masih adanya dinamika pada perekonomian global sehingga banyak investor yang sangat selektif dalam menempatkan dananya untuk berinvestasi serta belum adanya gambaran proyeksi investasi besar yang masuk di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 maka proyeksi atau target ICOR Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.7** Proyeksi /Target Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Tahun 2023 - 2024

Proyeksi/Target	2023	2024
Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	4,78	4,97 - 4,59

Sumber: KEMD Kalsel (2023)

### 3.1.1.6 Inflasi

Laju inflasi dalam kegiatan perekonomian daerah di Provinsi Kalimantan Selatan cukup fluktuatif. Pada periode 2015 – 2018, tingkat inflasi di Kalimantan Selatan dilaporkan menurun, dari 5,14 persen di Tahun 2015 turun sampai hanya sebesar 2,63 persen di Tahun 2018. Namun demikian, inflasi di Tahun 2019 tercatat meningkat di angka 4,01 persen yang antara lain disebabkan oleh lonjakan



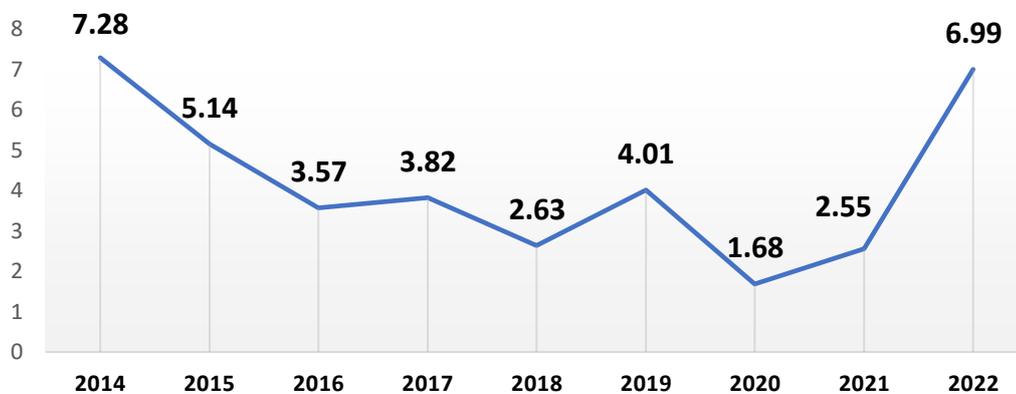


permintaan Ikan Gabus yang tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan pasokan serta lonjakan harga tiket pesawat.

Pada Tahun 2021, tingkat inflasi cukup rendah di tingkat 2,55 persen dengan dorongan inflasi yang hanya berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, serta kelompok pakaian dan alas kaki.

Pada Tahun 2022, tingkat inflasi kembali meningkat di angka 6,99 persen. Salah satu sebab utama meningkatnya inflasi adalah naiknya harga bahan bakar subsidi sebagai dampak krisis energi dunia akibat konflik Rusia – Ukraina. Kenaikan harga bahan bakar subsidi tersebut juga berpengaruh terhadap biaya angkut dan transportasi. Faktor perubahan iklim yang menyebabkan seringnya terjadi cuaca buruk juga berperan dalam tingginya inflasi di Tahun 2022. Cuaca buruk ini membuat menurunnya tingkat produksi bahan pangan yang berpengaruh terhadap kelangkaan pasokan dan kemudian berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan pangan.

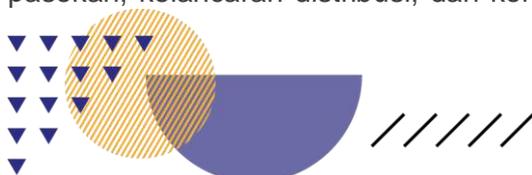
Fluktuasi angka inflasi di Kalimantan Selatan periode Tahun 2014 sampai 2022 dijelaskan pada gambar 3.8 berikut.



Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

**Gambar 3.8** Laju Inflasi (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2022

Untuk mengendalikan masalah inflasi ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Selatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Langkah strategis pengendalian inflasi daerah dijalankan melalui kerangka 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Adapun langkah konkret





yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan antara lain dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan beberapa program lapangan seperti pasar murah, kampanye penanaman komoditas penyumbang inflasi, peningkatan produksi, dan Turun Desa oleh Kepala Daerah dalam rangka Pengendalian Inflasi.

Melihat kondisi yang ada, pemerintah terus berusaha dan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk menjaga inflasi yang ada terjaga sesuai dengan yang diharapkan. Mempertimbangkan kondisi yang ada maka proyeksi atau target Inflasi Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.8** Proyeksi/Target Inflasi Tahun 2023 - 2024

Proyeksi/Target	2023	2024
Inflasi	3,75	2,00 - 4,00

### 3.1.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kondisi Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan tahun 2018 – 2021 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja menurun di tahun 2022. Jumlah pengangguran terbuka menunjukkan tren meningkat selama tahun 2018 – 2021 namun sempat pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali.

**Tabel 3.9** Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2018 - 2022

Tahun	2018		2019		2020		2021		2022	
	Februari	Agustus								
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	3,72	4,35	3,5	4,18	3,67	4,74	4,33	4,95	4,20	4,74
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	2.216.043	2.131.858	2.268.874	2.135.100	2.269.344	2.186.967	2.195.818	2.219.395	2.129.301	2.196.250
Jumlah Penduduk Pengangguran/ Mencari Kerja (Jiwa)	82.405	92.810	77.289	89.269	83.336	103.648	95.001	109.968	89.470	104.025

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

Angkatan kerja di tahun 2022 berjumlah 2.129.301 pada bulan februari dan 2.196.250 pada bulan agustus. Penurunan jumlah angkatan kerja ini diiringan juga





dengan penurunan jumlah penduduk pengangguran/mencari kerja dan tingkat pengangguran terbuka.

Melihat kondisi kedepan, diharapkan pemulihan ekonomi memberikan dampak positif kepada seluruh sektor termasuk peningkatan perekonomian sehingga kebutuhan tenaga kerja meningkat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menurunkan pengangguran di Kalimantan Selatan. Mempertimbangkan hal tersebut maka proyeksi atau target Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.10** Proyeksi/Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023 - 2024

Proyeksi/Target	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	4,22	4,05 – 4,59

Sumber: KEMD Kalsel (2023)

### 3.1.1.8 Tingkat Kemiskinan

Periode tahun 2018 – 2021 jumlah penduduk miskin Kalimantan Selatan menunjukkan tren menurun lalu di 2021 mengalami peningkatan pada 2021 akibat pandemi covid-19 menjadi 208.118 jiwa. Sementara pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin Kalimantan Selatan mengalami penurunan lagi menjadi 195.702.

**Tabel 3.11** Kondisi Kemiskinan Tahun 2018 - 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Miskin (PO)	4,54	4,55	4,38	4,83	4,49
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	189.033	192.480	187.874	208.118	195.702

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

Persentase penduduk miskin mengalami tren menurun dari tahun 2018 – 2020. Efek pandemi covid-19 mendorong peningkatan persentase penduduk miskin dari 4,38 persen pada tahun 2020 menjadi 4,83 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin Kalimantan Selatan mengalami penurunan menjadi 4,49 persen, hal ini beriringan dengan mulai terjadinya pemulihan ekonomi Kalimantan Selatan pasca pandemi. Dengan semakin dilonggarkannya pembatasan sosial, pergerakan masyarakat semakin meningkat





dan mendorong geliat ekonomi di masyarakat. Kondisi ini memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang secara tidak langsung menurunkan kemiskinan. Mempertimbangkan hal tersebut maka proyeksi atau target Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.12** Proyeksi/ Target Tingkat Persentase Penduduk Miskin (P0) Tahun 2023 - 2024

Proyeksi/Target	2023	2024
Persentase Penduduk Miskin (P0)	4,40	4,40

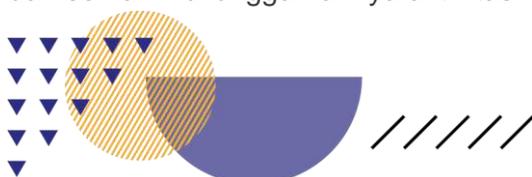
Sumber: Bappeda Kalsel (2023)

### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pada Tahun 2022, perbaikan ekonomi pasca pandemi di tingkat domestik, nasional dan global berdampak positif terhadap perekonomian Kalimantan Selatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di level 5,11 persen menjadi bukti nyata dampak positif tersebut.

Jika dirinci, perbaikan ekonomi di tingkat global menjadi faktor pendorong utama membaiknya perekonomian Kalimantan Selatan. Hal tersebut terlihat dari tingginya tingkat pertumbuhan komponen ekspor pada PDRB yang mencapai 13,32 persen. Perbaikan ekonomi di tingkat global juga dapat dilihat dari tingginya kontribusi komponen ekspor yang mencapai. Hal ini dikonfirmasi dengan tingginya pertumbuhan dan share lapangan usaha utama Kalimantan Selatan yang berorientasi ekspor seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan komoditas utama ekspor batubara, dan lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan komoditas utama ekspor kelapa sawit dan karet.

Di tingkat domestik, perbaikan ekonomi Kalimantan Selatan ditandai dengan membaiknya konsumsi rumah tangga. Setelah pada Tahun 2021 hanya mampu tumbuh di tingkat 0,79 persen, komponen konsumsi rumah tangga pada PDRB mampu tumbuh sebesar 5,37 persen di Tahun 2022. salah satu faktor peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah cakupan vaksinasi yang meningkat dan semakin dilonggarkannya aktivitas masyarakat pasca pandemi.





Perbaikan konsumsi rumah tangga disinyalir juga meningkatkan permintaan perjalanan umroh yang menjadi salah satu sumber dari pertumbuhan luar biasa pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Sebelum pandemi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan hanya mampu tumbuh di bawah 7 persen. Namun di Tahun 2022, pertumbuhan lapangan usaha ini meningkat di level 17,43 persen, paling tinggi dibanding 16 lapangan usaha lainnya. Secara nominal, pertumbuhan lapangan usaha ini mencapai Rp. 1,4 Triliun.

Perbaikan konsumsi rumah tangga juga terlihat dari bertumbuhnya 2 sektor lain. 2 sektor yang dimaksud adalah sektor perdagangan serta sektor akomodasi.

Fenomena lain yang perlu menjadi sorotan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai berikut.

- Selarasnya pertumbuhan investasi dengan pelaksanaan Perppu Ciptaker serta berakhirnya pembatasan proyek-proyek konstruksi pemerintah.
- Selarasnya pertumbuhan LPNRT dengan masa kampanye untuk pemilihan legislatif, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah.
- Selarasnya kontraksi pengeluaran pemerintah dengan perubahan pola belanja pemerintah yang sebelumnya fokus terhadap pengeluaran di bidang kesehatan.

Di tingkat global, bayangan resesi ekonomi di Tahun 2024 semakin jelas dengan kemungkinan belum berakhirnya konflik Rusia – Ukraina. Konflik tersebut berpengaruh terhadap beberapa hal sebagai berikut.

- Kenaikan harga minyak dan komoditas energi pada umumnya.
- Merosotnya beberapa pasokan komoditas pangan asal Ukraina
- Lonjakan inflasi global akibat 2 hal di atas.
- Krisis energi di Eropa yang disusul dengan memburuknya perekonomian. Data menyebutkan bahwa inflasi telah mencapai 10 persen yang membuat Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris menaikkan suku bunga sampai pada level 2,5 persen dan 3,5 persen secara berturut-turut. Bayang-bayang resesi ekonomi di Eropa tercermin dari memburuknya perekonomian Jerman dan Inggris.





- Keadaan di Eropa tersebut kemudian berpengaruh terhadap pasar ekspor Amerika Serikat dan Tiongkok yang juga berpotensi buruk terhadap perekonomian mereka.

Selain karena konflik Rusia – Ukraina, bayangan resesi ekonomi di Tahun 2024 juga disinyalir akan terjadi karena adanya pengetatan likuiditas di Amerika Serikat. Selain itu, ada fenomena transformasi ekonomi di Tiongkok yaitu transformasi menuju ekonomi berbasis digital dan ekonomi hijau yang ramah lingkungan serta transformasi menuju produksi yang berorientasi pasar domestik.

Di tingkat nasional beberapa fenomena yang diproyeksikan terjadi adalah sebagai berikut.

- Implementasi peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Cipta Kerja, Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Transformasi ekonomi dalam bentuk hilirisasi komoditas sumber daya alam, transisi energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
- Pelonggaran pandemi akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang akan berdampak positif pada tingkat konsumsi rumah tangga.
- Insentif kendaraan listrik
- Kebijakan B35
- Pemerintah Pusat akan menjaga tingkat konsumsi

Fenomena-fenomena penting yang disampaikan di atas diproyeksikan akan berpengaruh terhadap perekonomian Kalimantan Selatan dan kapasitas keuangan daerah. Pengaruh tersebut terjadi dalam dua sisi, yaitu sisi positif sebagai prospek dan sisi negatif sebagai tantangan.

Prospek yang nyata yang dapat berpengaruh positif pada perekonomian Kalimantan Selatan adalah pelonggaran aktivitas masyarakat pasca pandemi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pelonggaran ini diproyeksikan akan





meningkatkan tingkat konsumsi dan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan di Kalimantan Selatan secara keseluruhan.

Peningkatan aktivitas masyarakat secara global, akan meningkatkan tingkat produksi di negara-negara produsen. sejalan dengan peningkatan tingkat produksi tersebut, maka kebutuhan energi juga akan meningkat sehingga akan berpengaruh positif terhadap permintaan batubara Kalimantan Selatan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian secara umum.

Peningkatan aktivitas masyarakat secara global, juga diproyeksikan akan berpengaruh positif terhadap ekspor komoditas pertanian seperti kelapa sawit dan karet. Hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif secara umum pada lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Namun, peningkatan aktivitas ini akan terkoreksi dengan bayangan resesi dunia beserta fenomena-fenomena dampaknya. Oleh karena hal tersebut, peningkatan permintaan produk di lapangan usaha tersebut di Tahun 2024 diproyeksikan tidak akan setinggi peningkatan di Tahun 2022. Sehingga potensi perlambatan pada pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Selatan cukup besar.

Beberapa hal yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian Kalimantan Selatan dapat disimpulkan menjadi asumsi – asumsi perekonomian sebagai berikut.

**Tabel 3.13** Asumsi Asumsi Perekonomian Kalimantan Selatan Tahun 2023 - 2024

KETERANGAN	ASUMSI - ASUMSI	
	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Pertanian	Pertumbuhan produksi TBS lebih rendah sejalan dengan pemupukan tidak optimal pada tahun 2022 dan replanting kebun sawit.	Produksi padi diperkirakan lebih baik pascaserangan hama tungro. Panen TBS yang meningkat, didorong pemupukan yang lebih baik di tahun 2023.
Pertambangan	Perlambatan produksi batubara seiring dengan perkiraan pertumbuhan produksi yang melambat dan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama yang termoderasi.	Produksi batubara diperkirakan meningkat sejalan dengan membaiknya permintaan negara mitra dagang utama dan penyerapan domestik yang lebih tinggi pascapendirian BLU Batubara.





KETERANGAN	ASUMSI - ASUMSI	
	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Industri Pengolahan	Pasokan TBS diperkirakan lebih rendah berdampak pada produksi CPO dan Biodiesel, meski terdapat potensi peningkatan penyerapan domestik.	Produksi CPO dan turunannya seperti minyak goreng dan B35 lebih tinggi sejalan dengan pasokan TBS yang meningkat serta produksi nilai dari pabrik di Kab. Tanah Bumbu yang akan beroperasi pada awal tahun 2024.
Konstruksi	erlanjutnya proyek konstruksi pemerintah untuk mendukung Kalsel sebagai gerbang menuju IKN dan proyek smelter nikel di Tanah Bumbu.	Berlanjutnya proyek konstruksi Pemerintah seperti jalan dan bendungan serta fasilitas umum.
Hotel dan Reklame	Dampak kenaikan BBM, tekanan inflasi, dan motif berjaga-jaga di tengah ketidakpastian global	Aktivitas perdagangan lebih kuat seiring dengan perkiraan membaiknya perekonomian global dan domestik setelah ketidakpastian global di tahun 2023.
kondumsi Rumah Tangga	Daya beli masyarakat berpotensi tertahan di tengah potensi peningkatan harga barang dan jasa.	Peningkatan daya beli masyarakat sejalan dengan membaiknya perekonomian global dan domestik serta penurunan risiko dari ketidakpastian global
Konsumsi Pemerintah	Peningkatan pagu APBN dan APBD terutama anggaran perlintas untuk menopang daya beli masyarakat	Peningkatan belanja operasional Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Investasi	Proyek baru seperti smelter nikel, pembangunan jalan alternatif ke makam Syech M. Arsyad AlBanjari, pembangunan Jalan Gunung Batu – Sungai Luar, dan infrastruktur irigasi.	Alokasi belanja modal yang meningkat untuk mendukung proyek konstruksi Pemerintah. Selain itu, investasi swasta diperkirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya kinerja LU Utama dan membaiknya risiko investasi.
Ekspor	Penurunan disebabkan melemahnya permintaan global akibat moderasi pertumbuhan ekonomiglobal.	Kinerja ekspor diperkirakan membaik sejalan dengan perekonomian global yang diperkirakan kembali pulih serta meingkatnya kinerja ekspor batubara dan CPO
Impor	Melambatnya kinerja konsumsi RT dan LU Tambang pada 2023 diperkirakan berdampak pada menurunnya impor barang konsumsi & modal serta bahan baku industri untuk mendorong LU Utama.	Kinerja impor diperkirakan lebih kuat sejalan dengan membaiknya konsumsi RT dan dan kinerja LU Utama yang berpotensi mendorong impor barang konsumsi, bahan baku industri, dan barang modal.





Sumber: Bank Indonesia KPw Kalsel dan Bappeda Kalsel

Berdasarkan asumsi – asumsi tersebut maka proyeksi untuk perekonomian Kalimantan Selatan adalah sebesar 4,85 % tahun 2023 dan 4,61 – 5,01 % Tahun 2024. Hal ini dapat terlihat dari tabel – tabel berikutnya untuk penjabaran proyeksi Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara detail beserta angka per sektor – sektor untuk mendukung pertumbuhan Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) tersebut.

**Tabel 3.14** LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 Menurut Pengeluaran Beserta Sumber Pertumbuhan

Komponen pengeluaran	LPE (%) / Growth (%)							Sumber Pertumbuhan (%) / Source of Growth (SOG) (%)						
	2021	2022	2023				2024		2021	2022	2023			
			Out-look	Base-line	Mode-rate	High	Out-look	Base-line			Mode-rate	High		
													2023	2024
1 Konsumsi Rumah tangga	0,79	5,37	6,75	2,71	2,91	3,11	1,61	2,37	2,29	2,13	2,23	2,32		
2 Konsumsi LNPRT	1,10	5,02	6,54	2,63	2,83	3,03	0,03	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05		
3 Konsumsi Pemerintah	3,56	(0,56)	3,37	2,93	3,13	3,33	0,36	0,50	0,46	0,43	0,45	0,47		
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	0,83	5,16	3,30	3,67	3,87	4,07	0,78	1,15	1,07	1,01	1,05	1,10		
5 Perubahan Inventori	30,16	(908,12)	1,12	1,25	1,45	1,65	0,00	0,02	0,02	-0,02	-0,02	0,02		
6 Ekspor Barang dan Jasa	19,02	13,32	37,02	9,47	9,67	9,87	2,71	4,29	5,32	5,29	5,52	5,75		
6 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	21,01	14,60	48,41	9,17	9,37	9,57	2,01	3,22	4,32	4,28	4,47	4,66		
<b>PDRB ADHK 2010</b>	<b>3,48</b>	<b>5,11</b>	<b>4,85</b>	<b>4,61</b>	<b>4,81</b>	<b>5,01</b>	<b>3,48</b>	<b>5,11</b>	<b>4,85</b>	<b>4,61</b>	<b>4,81</b>	<b>5,01</b>		

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah, KEMD 2023

**Tabel 3.15** Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 Menurut Pengeluaran

Komponen pengeluaran	Share (%)						
	2021	2022	2023				
			Out-look	Base-line	Mode-rate	High	
1 Konsumsi Rumah tangga	46,74	41,14	39,41	45,89	46,26	47,05	
2 Konsumsi LNPRT	1,04	0,87	0,83	1,14	1,18	1,21	
3 Konsumsi Pemerintah	12,02	9,80	8,66	11,23	11,72	12,21	
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	24,06	20,55	18,68	24,60	25,04	25,34	
5 Perubahan Inventori	0,05	-0,34	0,05	0,05	0,12	0,12	
6 Ekspor Barang dan Jasa	76,83	89,90	105,28	74,70	75,94	85,94	





7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	60,74	61,92	72,90	57,61	60,26	71,87
<b>PDRB ADHB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah, KEMD 2023

**Tabel 3.16** LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 -2024 Menurut Lapangan Usaha Beserta Sumber Pertumbuhan

Komponen Lapangan Usaha	LPE (%)						Sumber Pertumbuhan (%)					
	Growth (%)						Source of Growth (SOG) (%)					
	2021	2022	2023	2024	2024	2024	2021	2022	2023	2024	2024	2024
			Out-look	Base-line	Moderate	High			Out-look	Base-line	Moderate	High
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,17	1,45	3,55	1,32	1,52	1,72	0,48	0,68	0,64	0,58	0,61	0,64
2. Pertambangan dan penggalian	4,31	5,60	5,22	4,31	4,51	4,71	0,85	1,26	1,20	1,14	1,19	1,23
3. Industri pengolahan	6,23	3,31	4,01	5,03	5,23	5,43	0,44	0,64	0,60	0,58	0,60	0,63
4. Pengadaan listrik, gas	6,66	7,85	11,21	6,53	6,73	6,93	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,03	4,87	4,39	4,36	4,56	4,76	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6. Konstruksi	2,87	4,33	3,14	4,04	4,24	4,44	0,27	0,39	0,36	0,34	0,36	0,37
7. Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	2,20	7,15	4,03	7,13	7,33	7,53	0,32	0,47	0,45	0,43	0,45	0,47
8. Transportasi dan pergudangan	1,81	17,43	13,36	9,68	9,88	10,08	0,20	0,33	0,34	0,34	0,36	0,37
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum	2,30	9,63	10,33	8,33	8,53	8,73	0,07	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11
10. Informasi dan komunikasi	7,22	6,94	6,07	6,59	6,79	6,99	0,15	0,23	0,22	0,21	0,22	0,23
11. Jasa keuangan	1,19	0,39	3,46	1,45	1,65	1,85	0,11	0,16	0,15	0,14	0,14	0,15
12. Real estate	5,29	5,87	5,88	5,36	5,56	5,76	0,09	0,13	0,12	0,12	0,12	0,13
13. Jasa perusahaan	3,62	7,53	6,89	6,65	6,85	7,05	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,32	0,53	1,81	1,85	2,05	2,25	0,18	0,26	0,24	0,22	0,23	0,24
15. Jasa pendidikan	1,54	3,51	0,58	3,18	3,38	3,58	0,16	0,23	0,21	0,20	0,21	0,21
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	11,59	5,31	4,59	4,33	4,53	4,73	0,07	0,11	0,10	0,10	0,10	0,11
17. Jasa lainnya	1,16	6,78	6,82	4,31	4,51	4,71	0,04	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
<b>PDRB ADHK 2010</b>	<b>3,48</b>	<b>5,11</b>	<b>4,85</b>	<b>4,61</b>	<b>4,81</b>	<b>5,01</b>	<b>3,48</b>	<b>5,11</b>	<b>4,85</b>	<b>4,61</b>	<b>4,81</b>	<b>5,01</b>

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah, KEMD 2023





**Tabel 3.17** Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 menurut Lapangan Usaha

Komponen Lapangan Usaha		Share (%)					
		2021	2022	2023	2024	2024	2024
				Out-look	Base-line	Mode-rate	High
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,93	11,40	9,91	9,96	10,06	10,17
2	Pertambangan dan Penggalian	19,37	32,05	31,87	30,38	29,65	28,88
3	Industri Pengolahan	13,95	11,39	11,19	11,27	11,35	11,49
4	Pengadaan Listrik. Gas	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,44	0,36	0,37	0,36	0,38	0,38
6	Konstruksi	8,17	6,87	6,71	6,58	6,71	6,80
7	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,28	9,06	9,72	10,11	10,20	10,31
8	Transportasi dan Pergudangan	6,29	6,27	6,85	8,13	8,22	8,26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,08	1,79	1,91	2,01	2,03	2,12
10	Informasi dan Komunikasi	3,94	3,30	3,42	3,35	3,37	3,43
11	Jasa Keuangan	3,60	2,97	3,29	3,30	3,35	3,37
12	Real Estate	2,43	2,02	2,08	2,06	2,10	2,14
13	Jasa Perusahaan	0,72	0,61	0,64	0,67	0,69	0,70
14	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,09	4,79	4,83	4,71	4,76	4,77
15	Jasa Pendidikan	4,91	3,95	3,98	3,87	3,86	3,86
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,36	1,94	1,95	1,94	1,96	1,99
17	Jasa lainnya	1,28	1,10	1,15	1,17	1,19	1,20
<b>PDRB ADHB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah, KEMD 2023

### 3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2024

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (RKP Tahun 2024). Adapun RKP Tahun 2024 mengusung tema **“MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”** dengan didukung 8 arah kebijakan. Adapun arah kebijakan yang dimaksud dijelaskan pada Gambar III.9. berikut.





### ARAH KEBIJAKAN RKP Tahun 2024

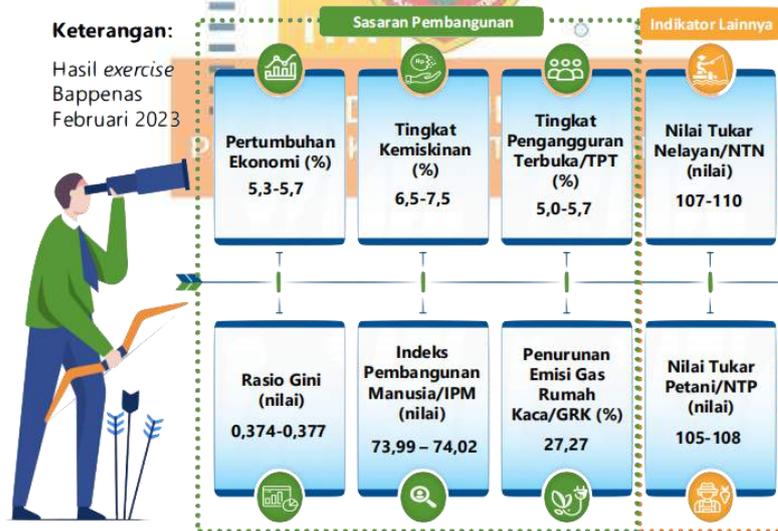


Sumber: Rancangan RKP 2024, Bappenas

**Gambar 3.9** Arah Kebijakan RKP Tahun 2024

RKP Tahun 2024 juga dilengkapi dengan sasaran pembangunan. Adapun sasaran pembangunan yang dimaksud diuraikan pada Gambar III.10. berikut.

### SASARAN PEMBANGUNAN RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024, Bappenas

**Gambar 3.10** Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Berdasarkan Outlook, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Tahun 2023 diperkirakan senilai 5,3 – 5,5 persen. Beberapa kebijakan dan fenomena yang





terjadi di Tahun 2024 dan dimulai di Tahun 2023 dapat mendukung pencapaian pertumbuhan tersebut.

Pada Tahun 2023, Pemerintah meneruskan kebijakan hilirisasi industri pengolahan komoditas untuk meningkatkan nilai tambah produk. Salah satunya adalah restriksi pada ekspor bauksit mentah untuk mendorong industri turunan dari komoditas tersebut. Kebijakan ini diharapkan didukung oleh dunia usaha dan asosiasi dan memiliki dampak berkelanjutan sampai Tahun 2024. Selain itu, Pemerintah juga mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui berbagai insentif dan kebijakan salah satunya subsidi dan insentif pendukung Kendaran Bermotor Listrik.

Kebijakan lain yang dikeluarkan Pemerintah adalah yang terkait peningkatan iklim investasi. Kebijakan yang dimaksud adalah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Perppu 2/2022) tentang Cipta Kerja. Perppu tersebut diberlakukan untuk menggantikan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang harus diperbaiki menurut putusan Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, salah satu fenomena yang perlu disorot adalah peningkatan pengeluaran Lembaga Non Pemerintah dan Rumah Tangga (LNPR) di Tahun 2024. Pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran oleh Partai Politik serta tim sukses pada masa kampanye dan masa Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2024.

Di sisi lain, keberlanjutan kebijakan moneter dan kebijakan pengendalian inflasi diharapkan semakin memudahkan pengendalian inflasi domestik. Pada Tahun 2022, rata-rata inflasi tercatat pada tingkat 4,2 persen. Berdasarkan data tersebut dengan ditambah usaha pengendalian yang semakin intensif, maka diharapkan laju inflasi akan berkurang di tingkat 3,1 persen. Kebijakan-kebijakan lain di bidang moneter juga diharapkan dapat berdampak pada pengurangan *imported inflation*.

Sementara itu, ada tiga faktor penopang pertumbuhan ekonomi secara nasional. Faktor tersebut adalah berlanjutnya program hilirisasi industri, pemulihan sektor pariwisata serta dukungan infrastruktur untuk Kawasan Prioritas. Uraian faktor penopang tersebut disampaikan pada Tabel 3.18 berikut.





**Tabel 3.18** Uraian Faktor Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional

No.	Faktor Penopang	Rincian
1.	Berlanjutnya Program-program hilirisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>37 smelter nikel sedang beroperasi, 39 smelter saat ini sedang dalam tahap pembangunan, dan 35 smelter dalam tahap perencanaan</li> <li>2 Perusahaan Smelter tembaga mulai berproduksi pada tahun 2024 (PT Amman dan PT Freeport), dan 2 Perusahaan sudah berproduksi pada tahun 2023.</li> <li>Peningkatan kapasitas input Smelter Bauksit sebesar 1 juta ton pada tahun 2024</li> </ul>
2.	Pemulihan Sektor Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Target kunjungan wisatawan mancanegara pada Tahun 2023 sebesar 8,9 juta</li> <li>Target kunjungan wisatawan mancanegara pada Tahun 2024 sebesar 9,5 – 14,3 juta</li> <li>Tumbuh pada kisaran 6,74 – 60,67 persen.</li> </ul>
3.	Dukungan infrastruktur untuk 21 Kawasan Prioritas pada tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>DPP Danau Toba (2 Kegiatan)</li> <li>Pulau Nias (5 Kegiatan)</li> <li>Kepulauan Mentawai (1 Kegiatan)</li> <li>Pulau Enggano (4 Kegiatan)</li> <li>PKN Bengkulu (2 Kegiatan)</li> <li>Wilayah Batam-Bintan (4 Kegiatan)</li> <li>Rebana (3 Kegiatan)</li> <li>Kedungsepur (2 Kegiatan)</li> <li>KSPN Dieng (5 Kegiatan)</li> <li>Food Estate Keeram (4 Kegiatan)</li> <li>Gerbangkertosusila Plus (5 Kegiatan)</li> <li>KSPN Ijen-Baluran (5 Kegiatan)</li> <li>Selingkar Wilis (5 Kegiatan)</li> <li>KSPN Nusa Penida (3 Kegiatan)</li> <li>KSPN Ubud/Ulapan (2 Kegiatan)</li> <li>DPP Sambas-Singkawang (1 Kegiatan)</li> <li>Food Estate Sumba Tengah (4 Kegiatan)</li> <li>KI Morowali (1 Kegiatan)</li> <li>KI Konawe (2 Program, 2 Kegiatan)</li> <li>KI Pulau Obi (2 Kegiatan)</li> <li>KI Teluk Weda (5 Kegiatan)</li> </ul>

Sumber: Rancangan Kerangka Ekonomi Makro RKP Tahun 2024, Bappenas

### 3.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Kalimantan Selatan perekonomiannya masih didominasi oleh sektor pertambangan atau komoditas bahan mentah serta setengah jadi. Komoditas tersebut antara lain Batubara, Kelapa Sawit (CPO), Karet, dan Kayu. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan yang sudah ada serta mendorong sektor – sektor lain yang lebih berkelanjutan untuk tumbuh lebih tinggi mengurangi kontribusi sektor yang ada melalui hilirisasi industrialisasi agar nilai tambah sektor – sektor yang





ada meningkat lebih tinggi bila dibandingkan diperdagangkan hanya berupa bahan mentah atau setengah jadi.

Arah Kebijakan ini sudah tercantum pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD setiap tahunnya yang merupakan tema besar pembangunan perekonomian Kalimantan Selatan yaitu transformasi perekonomian Kalimantan Selatan ke arah perekonomian yang lebih memberikan nilai tambah dan berkelanjutan pada sektor Pertanian, Pariwisata, Hilirisasi, serta Industrialisasi. Adapun beberapa langkah – langkah yang dirumuskan untuk mencapai hal tersebut antara lain:

- a. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan
- b. berkelanjutan
- c. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
- d. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark
- e. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
- f. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah
- g. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN

Pembangunan yang dipilih untuk menjadi Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 adalah **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**. Tema ini dibangun berdasarkan dengan kebijakan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 sebagai tahapan mencapai Visi Kalimantan Selatan yang MAJU (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara serta untuk membangun Kalimantan Selatan yang berdaya saing melalui upaya transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi yang dimaksud adalah dengan upaya menggeser kontribusi sektor pertambangan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui untuk meningkatkan kontribusi sektor dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain sektor pertanian, pariwisata, perdagangan serta meningkatkan peran UMKM dan hilirisasi industri. Kebijakan perekonomian daerah di tahun 2024 ini tetap diambil dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Tema pembangunan pada tahun 2024 adalah **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”** memiliki





empat fokus pembangunan dan tiga prioritas daerah. Fokus pembangunan dan prioritas daerah yang dimaksud diuraikan pada Tabel 3.19 berikut.

**Tabel 3.19** Fokus Pembangunan dan Prioritas Daerah pada RKPD 2024

Fokus Pembangunan	Prioritas Daerah
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sektor Pendidikan, Kesehatan Dasar, Kemiskinan dan Kesempatan Kerja</li> <li>Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas</li> <li>Struktur Perekonomian untuk Mendukung Pengembangan Digitalisasi UMKM</li> <li>Hilirisasi Industri, Pertanian, Pariwisata menuju Investasi Ekonomi Hijau</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian, dan Pariwisata</li> <li>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing</li> <li>Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah.</li> </ol>

Sumber: Rancangan RKPD Tahun 2024 Kalimantan Selatan



### 3.1.5 Sasaran Indikator Ekonomi Makro Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2024

Secara ringkas, sasaran Indikator Ekonomi Makro Daerah Kalimantan Selatan tahun 2024 disajikan sebagaimana pada tabel III.20.

**Tabel 3.20** Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2024

Indikator		Kalsel 2022	Outlook 2023	Sasaran Kalsel 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11	4,85	4,61 - 5,01
2	PDRB ADHK 2010 Perkapita (Juta rupiah/orang)	34,04	35,35	36,53 - 36,67
	PDRB ADHB Perkapita (Juta rupiah/orang)	60,08	71,27	75,47 – 76,50
3	Asumsi:			
	- Jumlah Penduduk (orang) (Sumber Proyeksi Proyeksi Penduduk Indonesia 2020 – 2050 Hasil Sensus Penduduk 2020)	4.182.080	4.222.330	4.273.400
	- Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,44	1,22	1,19
4	Angka Inflasi (%)	6,99	3,75	2,00 - 4,00
5	Share Sektor Pertambangan terhadap PDRB ADHB (%)	32,05	31,87	30,38 – 28,88





	Indikator	Kalsel 2022	Outlook 2023	Sasaran Kalsel 2024
8	Share Sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB ADHB (%)	11,40	9,91	9,96 - 10,17
7	Share Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB (%)	11,39	11,19	11,27 – 11,49
8	ICOR (Rasio PMTB terhadap Perubahan PDRB ADHB 2010)	4,61	4,78	4,97 - 4,59
9	Indeks Williamson	0,434	0,421	0,417
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,20 - 4,74	4,22	4,05 – 4,59
11	Persentase Penduduk Miskin (P0) (%)	4,49	4,40	4,40

Sumber: KEMD Bappeda 2023

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan daerah; dan
  - b. Penerimaan pembiayaan daerah.
2. Pengeluaran daerah pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas:
  - a. Belanja daerah; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan daerah.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan





pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Selanjutnya, APBD sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- 1) Pendapatan daerah;
- 2) Belanja daerah; dan
- 3) Pembiayaan daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dimaksud, sebagai berikut:

#### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

#### **2. Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan





pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.

Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya.

Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya paling sedikit meliputi:

- a. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
- b. Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. Dukungan pelaksanaan program vaksinasi Corona Virus Disease 2019;
- d. Dukungan kelurahan dalam penanganan dan pengendalian pandemi Corona Virus Disease 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;
- e. Insentif tenaga kesehatan untuk penanganan dan pengendalian pandemi Corona Virus Disease 2019;
- f. Dukungan penanganan dan pengendalian pandemi Corona Virus Disease 2019 skala desa; dan
- g. Belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.





Belanja Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf g difokuskan penggunaannya paling sedikit meliputi:

- a. Optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test, tracing, dan tracking, system surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
- b. Optimalisasi fasilitas kesehatan dan Farmasi dan Alat Kesehatan (farmalkes) dengan memenuhi alat pelindung diri, ruang isolasi dan alat tes, ruang rawat, ruang intensive care unit, ruang isolasi mandiri dan manajemen kasus/tatalaksana yang jelas;
- c. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
- d. Efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan;
- e. Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional untuk memastikan tercapainya cakupan semesta/universal health coverage di setiap Pemerintah Daerah, provinsi dan kabupaten/kota; dan
- f. Penganggaran dan pembayaran iuran jaminan Kesehatan nasional sesuai dengan peraturan perundangan secara tepat waktu dan tepat jumlah.

### 3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya.

Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

#### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Asumsi kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada RKPD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah secara terukur, rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum.
  - a. Optimalisasi pendapatan pajak daerah melalui program kegiatan intensifikasi seperti penyesuaian tarif pajak daerah, pemutakhiran





- database* potensi, serta upaya penagihan, kemudian mengintensifkan kerja sama kemitraan dengan pemerintah Kabupaten/Kota juga *stakeholder*.
- b. Optimalisasi pendapatan retribusi daerah melalui pengembangan pengelolaan pungutan berbasis elektronifikasi/digitalisasi.
2. Identifikasi dan ekstensifikasi pendapatan di luar pajak daerah.
    - a. Mendorong upaya optimalisasi pendapatan pada sektor Sumbangan Pihak Ketiga (SP 3) kepada pemerintah daerah yang terdiri dari dealer, Jasa Raharja, kelapa sawit, dan karet melalui sosialisasi, FGD dan penyesuaian *updating* regulasi (UU Ciptaker) bersama instansi terkait.
    - b. Rasionalisasi estimasi target penerimaan pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Penghasil berdasarkan potensi.
  3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan.
    - a. Mendorong pengembangan kualitas produk pelayanan pengelolaan pendapatan daerah pada semua Unit Kerja Penghasil secara bertahap dan berkesinambungan.
    - b. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Zona Integritas (ZI) pelayanan dengan melengkapi dan atau penyesuaian terhadap Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang konvensional maupun berbasis digitalisasi, serta melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), khususnya pada Kantor Bersama SAMSAT se Kalimantan Selatan.
  4. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah
    - a. Percepatan penyampaian dan ketepatan penyajian pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi tepat guna dan berhasil guna.
    - b. Peningkatan kapasitas pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah berbasis teknologi informatika.





- c. Pengukuran kinerja capaian pendapatan berdasarkan anggaran kas pendapatan berdasarkan cashflow (aliran kas) pada APBD tahun berjalan.

Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 8.154.985.573.922,29 melampaui dari target 2023 murni sebesar Rp. 6.278.838.931.960,00, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan batu bara yang diuntungkan oleh situasi geopolitik (perang Rusia dan Ukraina) yang mendorong tingginya permintaan komoditas ini. Pertumbuhan ekonomi yang positif telah mendorong penerimaan daerah dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan menjadi meningkat.

Rencana pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 7.826.314.817.323,00, sedangkan komposisi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 diproyeksikan menjadi Rp 10.083.514.068.796,00 atau meningkat sebesar 28,84% dari tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa semakin meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat pasca pemulihan ekonomi akibat pandemi covid 19 yang membuat pemasukkan pajak meningkat. Peningkatan ini nilainya lebih tinggi bila dibandingkan kepada RPJMD tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 bahwa pertumbuhan pendapatan untuk tahun 2023 ke tahun 2024 diperkirakan sebesar 1,69%.

Proyeksi pertumbuhan target Pendapatan tahun 2024 juga dengan asumsi optimisme pergerakan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan batu bara, perkebunan (CPO), serta melalui optimalisasi program kegiatan pemerintah beserta stakeholder yang dapat mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sektor Kepariwisata Kalimantan Selatan tahun 2024 juga diperkirakan akan tumbuh, hal ini terlihat di tahun 2022 Penumpang berangkat dengan angkutan udara dan angkutan laut dari Kalimantan Selatan kembali meningkat, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang bulan Juli-September 2022 sebesar 52,54; 49,75; dan 53,14 persen, lebih tinggi dibanding periode Juli-September 2021 sebesar 34,28; 32,88; dan 41,88 persen. Sementara hotel non-bintang bulan Juli-September 2022 sebesar 26,98; 20,74; dan 23,37 persen, lebih tinggi dari Juli-September 2021 sebesar 16,35; 19,54; dan 21,18 persen.





Antusiasme masyarakat untuk beribadah umrah pun kembali tinggi meskipun harga tiket penerbangan meningkat.

Hal-hal tersebut di atas diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin menguat dengan tumbuh positif berdampak kepada peningkatan pendapatan daerah dalam tahun berkenaan





**Tabel 3.21** Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Tahun 2022 - 2024 (Rp)

wNo	Uraian	2022		Murni 2023	Proyeksi 2024	Selisih Murni 2023 – Proyeksi 2024	
		Realisasi	Murni				Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01.01</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>4.557.431.377.166,29</b>	<b>3.712.293.569.960,00</b>	<b>4.283.778.245.861,00</b>	<b>4.045.819.428.033,00</b>	<b>4.569.492.933.228,00</b>	<b>523.673.505.195,00</b>
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	3.821.005.641.027,15	2.935.210.000.000,00	3.543.611.876.638,00	3.183.010.336.573,00	3.625.000.000.000,00	441.989.663.427,00
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	25.277.127.946,00	29.061.817.000,00	27.401.487.360,00	19.857.233.256,00	34.021.447.400,00	14.164.214.144,00
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah yang Dipisahkan	44.068.503.537,00	42.854.009.600,00	46.234.712.203,00	66.598.836.058,00	102.300.000.000,00	35.701.163.942,00
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	667.080.104.656,14	705.167.743.360,00	666.530.169.660,00	776.353.022.146,00	808.171.485.828,00	31.818.463.682,00
<b>01.02</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.526.413.444.092,00</b>	<b>2.502.089.562.000,00</b>	<b>3.514.059.682.172,00</b>	<b>3.762.727.405.290,00</b>	<b>5.495.927.436.068,00</b>	<b>1.733.200.030.778,00</b>
<b>01.02.01</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - DTU</b>	<b>2.890.807.314.149,00</b>	<b>1.996.305.451.000,00</b>	<b>2.849.473.365.121,00</b>	<b>3.315.577.985.290,00</b>	<b>5.038.698.346.068,00</b>	<b>930.111.988.539,00</b>
1	Bagi Hasil Pajak	1.802.476.519.411,00	171.614.157.000,00	198.371.453.253,00	211.890.678.000,00	211.890.678.000,00	0,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	-	731.335.680.000,00	1.557.754.482.868,00	1.972.062.611.290,00	3.695.182.972.068,00	1.723.120.360.778,00
3	Cukai Hasil Tembakau	-	11.871.000,00	3.686.000,00	13.922.000,00	13.922.000,00	0,00
4	Dana Alokasi Umum	1.088.330.794.738,00	1.093.343.743.000,00	1.093.343.743.000,00	1.131.610.774.000,00	1.131.610.774.000,00	0,00
<b>01.02.02</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - DTK</b>	<b>609.621.122.943,00</b>	<b>500.949.763.000,00</b>	<b>650.469.619.051,00</b>	<b>407.229.090.000,00</b>	<b>407.229.090.000,00</b>	<b>0</b>
1	Dana Alokasi Khusus	609.621.122.943,00	500.949.763.000,00	650.469.619.051,00	407.229.090.000,00	407.229.090.000,00	11
<b>01.02.03</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian</b>	<b>25.985.007.000,00</b>	<b>4.834.348.000,00</b>	<b>14.116.698.000,00</b>	<b>39.920.330.000,00</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>10.079.670.000,00</b>
1	Dana Insentif Daerah (DID)	25.985.007.000,00	4.834.348.000,00	14.116.698.000,00	39.920.330.000,00	50.000.000.000,00	10.079.670.000,00
<b>01.03</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>71.140.752.664,00</b>	<b>64.455.800.000,00</b>	<b>57.149.663.248,00</b>	<b>17.767.984.000,00</b>	<b>18.093.699.500,00</b>	<b>325.715.500,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>8.154.985.573.922,29</b>	<b>6.278.838.931.960,00</b>	<b>7.854.987.591.281,00</b>	<b>7.826.314.817.323,00</b>	<b>10.083.514.068.796,00</b>	<b>2.257.199.251.473,00</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2023





### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan terkait pemenuhan belanja prioritas:
  - a. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
  - b. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana diamanatkan pada RPJMN serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan;
  - c. Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat;
  - d. Mengakomodir program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
  - e. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD;
2. Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)
3. Kebijakan terkait belanja hibah, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri





Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011). Selain untuk pemberian uang/barang atau jasa, belanja hibah dialokasikan untuk Belanja Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta dan SMA Swasta. Untuk BOS SMA Negeri dan Pendidikan Khusus dialokasikan pada belanja langsung dalam bentuk program kegiatan pada SOPD Dinas Pendidikan. BOS ini pengalokasiannya merupakan yang terbesar dalam belanja hibah.

**Tabel 3.22** Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016 s.d 2022 (Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Bertambah (kurang)	Pertumbuhan (%)
Belanja daerah	6.083	7.006	6.631	6,727	7,854	1,127	16,75

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

**Tabel 3.23** Proyeksi Anggaran Belanja Daerah TA 2023 dan TA 2024 (Rp)

NO	URAIAN	APBD 2023 PENETAPAN	PROYEKSI 2024	BERTAMBAH / BERKURANG
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.727.797.817.323,00</b>	<b>10.334.937.034.226,00</b>	<b>2.607.139.216.903,00</b>
<b>02.01</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.718.350.085.624,00</b>	<b>5.178.019.158.572,00</b>	<b>459.669.072.948,00</b>
02.01.01	Belanja Pegawai	2.294.874.332.960,00	2.413.661.171.584	118.786.838.624,00
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.221.609.660.164,00	2.444.098.160.164	222.488.500.000,00
02.01.03	Belanja Hibah	189.286.092.500,00	307.679.826.824	118.393.734.324,00
02.01.04	Belanja Bantuan Sosial	12.580.000.000,00	12.580.000.000	0,00
<b>02.02</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.391.673.864.415,00</b>	<b>3.102.417.875.654,00</b>	<b>1.710.744.011.239,00</b>
02.02.01	Belanja Tanah	183.464.305.327,00	308.464.305.327	125.000.000.000,00
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	241.243.916.976,00	291.266.916.976	50.023.000.000,00
02.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung	384.011.662.390,00	785.035.343.735	401.023.681.345,00
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	516.813.066.822,00	1.651.510.396.716	1.134.697.329.894,00
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	66.140.912.900,00	66.140.912.900	0,00
<b>02.03</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	Belanja Tak Terduga	100.000.000.000,00	100.000.000.000	0,00
<b>02.04</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.517.773.867.284,00</b>	<b>1.954.500.000.000,00</b>	<b>436.726.132.716,00</b>
02.04.01	Belanja Bagi Hasil	1.517.773.867.284,00	1.954.500.000.000	436.726.132.716,00
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan			





NO	URAIAN	APBD 2023 PENETAPAN	PROYEKSI 2024	BERTAMBAH / BERKURANG
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>7.727.797.817.323,00</b>	<b>10.334.937.034.226,00</b>	<b>2.607.139.216.903,00</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, terdapat juga pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, yang mana penerimaan pembiayaan daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.

**Tabel 3.24** Anggaran Pembiayaan Daerah TA 2016-2022 (Dalam Juta Rupiah)

No.	Uraian	APBD TA.2016	APBD TA.2017	APBD TA.2018	APBD TA.2019	APBD TA.2020	APBD TA.2021	APBD TA.2022
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>357.370</b>	<b>366.088</b>	<b>130.244</b>	<b>490.020</b>	<b>391.307</b>	<b>260.339</b>	<b>269.251</b>
03.01	Penerimaan Pembiayaan Daerah	382.370	397.588	130.244	640.300	241.043	248.339	424.812
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	382.370	397.257	129.951	640.300	150.000	248.339	424.812
03.01.02	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	Penerimaan kembali dana talangan	-	331	293	21	26	-	-
03.01.04	Penerimaan kembali investasi daerah	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>382.370</b>	<b>397.588</b>	<b>130.244</b>	<b>640.300</b>	<b>391.307</b>	<b>-</b>	<b>424.812</b>
<b>03.02</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>25.000</b>	<b>31.500</b>	<b>-</b>	<b>150.300</b>	<b>-</b>	<b>12.000</b>	<b>155.561</b>
03.02.01	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000	31.500	-	300	-	12.000	55.561
03.02.02	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	150.000	-	-	100.000
03.02.02	Dana Talangan	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>25.000</b>	<b>31.500</b>	<b>-</b>	<b>150.300</b>	<b>-</b>	<b>12.000</b>	<b>155.561</b>





No.	Uraian	APBD TA.2016	APBD TA.2017	APBD TA.2018	APBD TA.2019	APBD TA.2020	APBD TA.2021	APBD TA.2022
	Pembiayaan netto	357.370	366.088	130.244	490.020	391.307	236.339	269.251
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>382.370</b>	<b>397.257</b>	<b>129.951</b>	<b>640.300</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>269.251</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

**Tabel 3.25** Proyeksi Pembiayaan Daerah TA 2022 dan 2023 (Dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi APBD Murni 2023	Proyeksi APBD Murni 2024	Tambah (Kurang)
1	2	3	4	5
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>-98.517.000.000</b>	<b>251.422.965.430</b>	<b>349.939.965.430</b>
<b>03.01</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>64.320.000.000</b>	<b>308.911.465.430</b>	<b>244.591.465.430</b>
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	64.320.000.000	108.911.465.430,00	44.591.465.430
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan		200.000.000.000	200.000.000.000
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>64.320.000.000</b>	<b>308.911.465.430</b>	<b>244.591.465.430</b>
<b>03.02</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>162.837.000.000</b>	<b>57.488.500.000</b>	<b>-105.348.500.000</b>
03.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000		-100.000.000.000
03.02.02	Penyertaan Modal	62.837.000.000	57.488.500.000	-5.348.500.000
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>162.837.000.000</b>	<b>57.488.500.000</b>	<b>-105.348.500.000</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>-98.517.000.000</b>	<b>251.422.965.430</b>	<b>349.939.965.430</b>
06.03	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)			

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, pembiayaan daerah memegang peranan penting dalam penyusunan APBD di Kalimantan Selatan salah satunya untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus dari selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka untuk menutupinya digunakan dana yang bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah dan jumlah pembiayaan netto

Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan yang komprehensif dengan memperhatikan potensi pendapatan dan alokasi belanja. Terdapat beberapa komponen yang merupakan sumber dari penerimaan pembiayaan. Beberapa komponen dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA);





2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan pinjaman daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
6. Penerimaan piutang daerah;
7. Penerimaan kembali dana talangan;
8. Penerimaan kembali penyertaan modal.

Pada APBD TA 2024 direncanakan sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Pencairan dana cadangan untuk Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Pengeluaran pembiayaan dilokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja, seperti pembayaran utang pokok, pembentukan dana cadangan, dan lain-lain.

1. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
2. Pembentukan dana cadangan;
3. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
4. Pembayaran utang pokok;
5. Pemberian pinjaman daerah;
6. Dana talangan.

Kebijakan untuk tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 dikarenakan Pemerintah Provinsi Kalimantan fokus kepada pemenuhan kepada belanja/urusan wajib.

**Tabel 3.26** Proyeksi Target RAPBD TA 2023 dan 2024 (Rp)

NO	URAIAN	APBD 2023 PENETAPAN	PROYEKSI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	7.826.314.817.323,00	10.083.514.068.796,00	2.257.199.251.473,00	28,84
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.045.819.428.033,00	4.569.492.933.228,00	523.673.505.195,00	12,94
01.01.01	Pajak Daerah	3.183.010.336.573,00	3.625.000.000.000,00	441.989.663.427,00	13,89
01.01.02	Retribusi Daerah	19.857.233.256	34.021.447.400,00	14.164.214.144,00	71,33
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah yang Dipisahkan	66.598.836.058	102.300.000.000,00	35.701.163.942,00	53,61
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	776.353.022.146	808.171.485.828,00	31.818.463.682,00	4,10





NO	URAIAN	APBD 2023 PENETAPAN	PROYEKSI 2024	Tambah/Kurang	%
01.02	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.762.727.405.290,00</b>	<b>5.495.927.436.068,00</b>	<b>1.733.200.030.778,00</b>	<b>46,06</b>
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - DTU	3.315.577.985.290,00	5.038.698.346.068,00	1.723.120.360.778,00	51,97
01.02.02	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - DTK	407.229.090.000	407.229.090.000,00	0,00	-
01.02.03	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian	39.920.330.000	50.000.000.000,00	10.079.670.000,00	25,25
01.02	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>17.767.984.000,00</b>	<b>18.093.699.500,00</b>	<b>325.715.500,00</b>	<b>1,83</b>
04.03.01	Pendapatan Hibah	17.767.984.000	18.093.699.500	325.715.500,00	1,83
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>7.826.314.817.323,00</b>	<b>10.083.514.068.796,00</b>	<b>2.257.199.251.473,00</b>	<b>28,84</b>
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.727.797.817.323,00</b>	<b>10.334.937.034.226,00</b>	<b>2.607.139.216.903,00</b>	<b>5,52</b>
02.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.718.350.085.624,00</b>	<b>5.178.019.158.572,00</b>	<b>459.669.072.948,00</b>	<b>9,74</b>
02.01.01	Belanja Pegawai	2.294.874.332.960	2.413.661.171.584,00	118.786.838.624,00	5,18
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.221.609.660.164	2.444.098.160.164,00	222.488.500.000,00	10,01
02.01.03	Belanja Hibah	189.286.092.500	307.679.826.824,00	118.393.734.324,00	62,55
02.01.04	Belanja Bantuan Sosial	12.580.000.000	12.580.000.000,00	0,00	-
02.02	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.391.673.864.415,00</b>	<b>3.102.417.875.654,00</b>	<b>1.710.744.011.239,00</b>	<b>122,93</b>
02.02.01	Belanja Modal Tanah	183.464.305.327,00	308.464.305.327,00	125.000.000.000,00	68,13
02.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	241.243.916.976,00	291.266.916.976,00	50.023.000.000,00	20,74
02.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	384.011.662.390,00	785.035.343.735,00	401.023.681.345,00	104,43
02.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	516.813.066.822,00	1.651.510.396.716,00	1.134.697.329.894,00	219,56
02.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	66.140.912.900,00	66.140.912.900,00	0,00	-
02.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya				
02.03	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
02.03.01	Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000,00	100.000.000.000	0,00	-
02.04	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.517.773.867.284,00</b>	<b>1.954.500.000.000,00</b>	<b>436.726.132.716,00</b>	<b>28,77</b>
02.04.01	Belanja Bagi Hasil	1.517.773.867.284,00	1.954.500.000.000,00	436.726.132.716,00	28,77
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan				
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.727.797.817.323,00</b>	<b>10.334.937.034.226,00</b>	<b>2.607.139.216.903,00</b>	<b>33,74</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>98.517.000.000,00</b>	<b>-251.422.965.430,00</b>	<b>-349.939.965.430,00</b>	<b>(355,21)</b>
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>-98.517.000.000</b>	<b>251.422.965.430</b>	<b>349.939.965.430,00</b>	<b>(355,21)</b>
03.01	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>64.320.000.000</b>	<b>308.911.465.430</b>	<b>244.591.465.430,00</b>	<b>380,27</b>
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	64.320.000.000	108.911.465.430	44.591.465.430,00	69,33
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan		200.000.000.000	200.000.000.000,00	100,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>64.320.000.000</b>	<b>308.911.465.430</b>	<b>244.591.465.430,00</b>	<b>380,27</b>
03.02	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>162.837.000.000</b>	<b>57.488.500.000</b>	<b>-105.348.500.000,00</b>	<b>(64,70)</b>
03.02.02	Penyertaan Modal	62.837.000.000	57.488.500.000	-5.348.500.000,00	(8,51)





NO	URAIAN	APBD 2023 PENETAPAN	PROYEKSI 2024	Tambah/Kurang	%
.02.03	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000		-100.000.000.000,00	(100,00)
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>162.837.000.000</b>	<b>57.488.500.000</b>	<b>-105.348.500.000,00</b>	<b>(64,70)</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>-98.517.000.000</b>	<b>251.422.965.430</b>	<b>349.939.965.430,00</b>	<b>(355,21)</b>
06.03	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

### 3.2.4 Arah Kebijakan Alternatif Pembiayaan Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan dana yang besar untuk pembangunan daerah. Terbatasnya APBD Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya bersumber pada sumber-sumber penerimaan konvensional, mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kalimantan Selatan. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain:

#### 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan selain bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

#### 2. APBD Kabupaten/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama





didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

### 3. Dana Masyarakat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah melalui dana masyarakat, mengingat jumlah penduduk Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi jumlah penduduk terbanyak kedua di pulau Kalimantan, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana masyarakat cukup besar. Potensi ini pun belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana masyarakat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat. Dari berbagai jenis dana masyarakat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

### 4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR)

Dinamika lingkungan bisnis dan liberalisasi menuntut Perubahan pola usaha yang berorientasi lebih holistik, berbasis nilai-nilai Good Corporate Governance karena Perusahaan dalam eksistensinya ditengah-tengah masyarakat memerlukan citra yang positif. Untuk itu diperlukan adanya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang baik didalam Perusahaan. Dari Segi Pemerintah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) bisa jadi merupakan salah satu solusi yang menguntungkan dan tidak terlalu berisiko sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan dibandingkan alternatif sumber pembiayaan lain sebab tidak dapat dipungkiri bahwa Pembiayaan pembangunan semakin lama menjadi kebutuhan yang mendesak dan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang terbatas serta masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan suatu tanggung jawab





perusahaan untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan (sustainability), mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Perusahaan yang telah mengalami keuntungan atas bisnisnya, sudah pada tempatnya jika sebagian keuntungannya digunakan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## 5. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”. Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

## 6. Hibah

Hibah dimaksud adalah Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mendukung





pembangunan diberbagai sektor. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) diperlukan karena adanya kebutuhan investasi untuk membangun ekonomi dan adanya keterbatasan sumber dana pemerintah untuk investasi. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Peraturan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), diantaranya Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengusulan kegiatan yang dibiayai dengan PHLN dapat dilakukan oleh Kementerian Negara (departemen dan non-departemen), lembaga pemerintahan non-departemen (selanjutnya disebut lembaga), Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

## 7. Pinjaman Daerah

Konsep dasar pinjaman daerah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

## 8. Obligasi Pemerintah Daerah

Obligasi daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat, penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestic dan dalam mata uang Rupiah, namun efek yang diterbitkan tidak dijamin oleh Pemerintah. Revenue Bond adalah salah satu jenis obligasi pendapatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan digunakan hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.





## 9. Kemitraan dengan Lembaga Internasional/NGO

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri. Kerja sama daerah ini merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, dan promosi potensi daerah, serta objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Internasional disebut juga dengan 'NGO' (Non Governmental Organization) merupakan organisasi/lembaga internasional kegiatannya bertujuan memberikan bantuan atau pelayanan pada masyarakat secara sukarela. Keterlibatan Lembaga Internasional dalam proses pembangunan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah, yaitu ketersediaan anggaran dalam menyediakan layanan publik serta bentuk partisipasi mitra pembangunan dalam kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan manfaat dari mitra kerja sama ini diantaranya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daerah yang sulit dan belum terjangkau oleh program pemerintah daerah, Transfer of knowledge, inovasi pemberdayaan masyarakat, dan hasil baik dapat direplikasikan ke daerah lain.

## 10. PINA

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) adalah skema pembiayaan proyek infrastruktur tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penggalangan sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek – proyek strategis yang membutuhkan modal besar, tetapi dinilai baik secara ekonomi dan menguntungkan secara finansial. PINA merupakan alternatif pendanaan yang difasilitasi oleh Pemerintah guna mengatasi kendala pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur. Pengembangan skema investasi ini, murni tidak melibatkan Dana dari Pemerintah melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), namun dapat berkolaborasi dengan proyek KPBU dalam pembangunan infrastruktur.





## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang pelaksanaannya disusun melalui penetapan program-program prioritas. Program prioritas ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi permasalahan pembangunan daerah yang kemudian disinkronisasikan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah pada tahun rencana. Dalam hal ini tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah karena adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Untuk itu, perumusan prioritas pembangunan daerah sebagai kerangka dalam menyusun strategi pembangunan harus dilakukan secara cermat.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan sebagai tahapan perencanaan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun RPJMD 2021 – 2026. Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023 akan diarahkan dalam upaya pencapaian sasaran yang tertuang dalam misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026. Dimana upaya pencapaian target sasaran pembangunan ini diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja sasaran pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara rutin dan berkesinambungan melakukan kegiatan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan pembangunan beserta isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan arah dan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.





#### 4.1 Isu Strategis Pembangunan

Berdasarkan data hasil capaian dan target pada Tahun 2022 maka dilakukan inventarisasi permasalahan per urusan sebagai upaya identifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Dari hasil identifikasi tersebut, secara garis besar dapat diangkat beberapa isu-isu strategis daerah sebagai berikut.

##### 1. Struktur Perekonomian Daerah Berkelanjutan yang masih belum kuat

Ada beberapa hal utama yang menjadi tantangan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

- 1) Perkuatan hilirisasi industri untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas bahan mentah/setengah (batubara, sawit, karet dan kayu lapis) yang masih tinggi.
- 2) Upaya meningkatkan struktur perekonomian daerah dari sektor-sektor yang berkelanjutan seperti pertanian dalam arti umum, perdagangan dan jasa, serta pengembangan pariwisata.
- 3) Belum maksimalnya potensi investasi yang masuk ke Kalimantan Selatan.
- 4) Pengembangan UMKM pada berbagai sektor perekonomian.

##### 2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Rendah

Salah satu isu strategis yang menjadi fokus pemerintah daerah adalah terkait dengan penyediaan sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kalimantan Selatan masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada capaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih dibawah rata-rata nasional. Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain:

- 1) Belum optimalnya kualitas pendidikan
- 2) Belum optimalnya kualitas kesehatan
- 3) Belum optimalnya keterampilan dan kompetensi yang dimiliki SDM serta produktivitasnya yang masih rendah.
- 4) Masih adanya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial

Di samping itu, dengan berkembangnya Ibukota Nusantara dan bonus demografi yang diperkirakan pada Tahun 2025 – 2035 akan menjadi tantangan pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas SDM di Kalimantan Selatan agar dapat berdaya saing dan memiliki kompetensi.





### 3. Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan yang Belum Merata

Pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu isu strategis Kalimantan Selatan. Saat ini pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian masih belum merata. Hal ini cenderung disebabkan karena pembangunan masih berfokus pada daerah perkotaannya dan menyebabkan ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Selain hal tersebut di atas, ada beberapa faktor yang menjadi kendala utama dalam pemenuhan infrastruktur yakni :

- 1) Adanya pembatasan kewenangan, sehingga ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah provinsi dan memerlukan kolaborasi yang intens antara pemerintah pusat dan daerah.
- 2) Keterbatasan penganggaran oleh pemerintah daerah, sehingga perlu dilakukan alternatif pembiayaan lainnya.

### 4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Kebencanaan yang belum optimal.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian IKLH Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2022 meningkat, namun terdapat penurunan capaian pada beberapa komponen IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dari sisi kebencanaan, indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) di Kalimantan Selatan cenderung masih tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk fokus penanganan terhadap beberapa hal sebagai berikut.

- Faktor pencemaran sungai yang mempengaruhi penurunan indeks kualitas air (IKA);
- Peningkatan luas lahan kritis pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan;
- Masih terjadinya banjir serta kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan;
- Konsep mitigasi bencana yang belum optimal.
- Peningkatan pelayanan SPM Bencana secara lintas sektor





## 5. Belum Efektifnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai personil yang memeberikan layanan publik, khususnya di daerah dari sisi kualitas dan kuantitas masih terbilang minim. Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 berdasarkan hasil pencatatan BKD sebesar 63,68 dapat dikategorikan rendah. Sehingga perlu dilaksanakan peningkatan kompetensi ASN agar tata Kelola pemerintahan dapat meningkat.

Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan Pemerintahan menjadi poin utama agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selalu berbenah dalam upaya menjadikan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel disertai dengan modernisasi pemerintahan melalui perkuatan digitalisasi. Maka diperlukan peningkatan pengelolaan informasi publik serta pemanfaatan dan pengembangan media publik.

Di samping itu, kebutuhan akan penyediaan data-data yang berkualitas juga menjadikan hal ini sebagai sebuah isu yang penting. Ketersediaan data yang berkualitas akan menentukan kualitas sebuah perencanaan pembangunan. Untuk itu, kinerja Satu Data di Kalimantan Selatan juga harus ditingkatkan.

### 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD ini mengacu pada dokumen RPJMD 2021-2026 yang tertuang pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RKPD ini juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan RKP 2024

#### 4.2.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional terhadap RKPD 2024

Untuk memastikan tujuan pada RPJMN 2020 – 2024 dan TPB/SDGs dapat berjalan secara efektif, maka perlu dilakukan upaya pendekatan pembangunan yang memuat perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan, perkuatan integrasi sumber pendanaan, dan pengembangan bersifat inklusif dan dengan pendekatan pengarusutamaan gender melalui Pendekatan Perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integrated dan Spasial (THIS). Selain itu untuk menjamin pemerataan,





maka pendekatan pembangunan ekonomi secara inklusif dinilai mampu meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat secara terintegrasi dan komprehensif. Pembangunan ekonomi inklusif dinilai berdasarkan beberapa pengukuran indeks pembangunan ekonomi inklusif untuk mengukur dan memantau inklusivitas pembangunan di Kalimantan Selatan. Aspek untuk mengukur inklusivitas pembangunan ini mencakup 3 pilar, yaitu:



**Gambar 4.1** Tiga Pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (Bappenas, 2018)

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
  - b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, , yang ditandai dengan pencapaian :





- a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
- b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
- c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
- d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
- e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian :

- a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
- b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

4. Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
- b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
- b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
- MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian :





- a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
  - b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
  - c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
  - d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
  - e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
  - f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara , yang ditandai dengan pencapaian luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP
8. Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.
- Dukungan terhadap *Major Project (MP)*, antara lain:
- Didukung oleh proyek-proyek prioritas.
- Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:
1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% - 5,7%;
  2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
  3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
  4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
  5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
  6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.
  7. Serta indikator lainnya yaitu terkait Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110 dan Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

#### 4.2.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran SDGs Terhadap RKP 2024

Pengintegrasian SDGs/TPB dengan Dokumen RKP 2024 Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 juga telah dilakukan melalui pengintegrasian 17 goal SDGs kedalam 5 Prioritas Daerah RKP 2024 Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Selain pengintegrasian 17 Goal SDGs kedalam prioritas daerah, menjadikan isu SDGs/TPB sebagai isu





pembangunan Bersama juga menjadi salah satu bentuk tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi capaian TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dilakukan. Seperti pada data pada tahun 2018 – 2020, di dalam isu SDGs/TPB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 yang menjadi focus perhatian ada pada 2 pilar, tujuan TPB dengan status capaian tidak tercapai terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan masih terus ada pada tujuan 4 Pendidikan yang berkualitas serta pada tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dua isu tersebut akan coba dijawab dengan penyusunan RKPD Tahun 2024 yang memiliki tema Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, melalui beberapa prioritas daerah antarlain:

- A. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata
- B. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing
- C. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah
- D. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana
- E. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik

#### **4.2.3 Telaahan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis terhadap RKPD Tahun 2024**

Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen yang mengandung unsur kebijakan, rencana, dan program wajib. KLHS merupakan salah satu instrumen yang memiliki rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan dan salah satu syarat penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026 sebagai salah satu instrumen

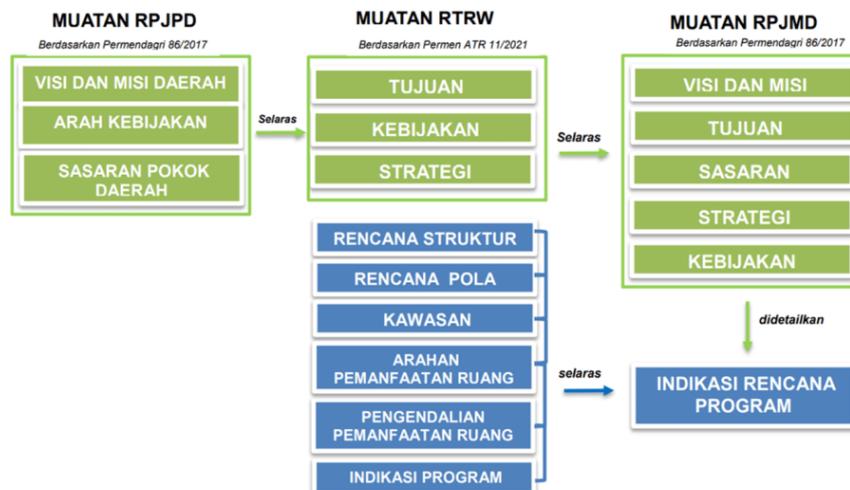




yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. Penyusunan KLHS dalam setiap penyusunan RPJMD baik baru maupun perubahan menggunakan pendekatan penilaian pencapaian TPB daerah untuk mendukung capaian TPB nasional. KLHS yang bertujuan untuk memastikan bahwa aspek pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana, dan Program dalam RPJMD, menggunakan pendekatan capaian TPB daerah yang dibandingkan dengan target TPB nasional. Dengan pendekatan tersebut maka diharapkan pencapaian TPB yang belum mencapai target dapat dilakukan percepatan melalui upaya tambahan dalam RPJMD. Arah kebijakan dan program yang ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

#### 4.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap RKPD Tahun 2024

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang bersifat spasial dan berimplikasi pada konsep keruangan. Dokumen RTRWP dapat menunjukkan dan memberikan arahan mengenai lokasi dari kegiatan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD yang tertuang pada indikasi program pemanfaatan ruang wilayah dengan pendetailan terkait program, arahan pembiayaan, serta lokasi program.



**Gambar 4.2** Penyeragaman Muatan RTRW dengan Muatan RPJPD dan RPJMD

(Direktorat PEIPD Ditjen Bina Bangda, 2022)

Pelaksanaan RTRWP dan RPJPD sama-sama memiliki periode selama 20 tahun, sedangkan RPJMD memiliki periode selama 5 tahun. Pada tahap penyusunan RPJPD maupun RPJMD telah dilakukan penyeragaman muatan dengan RTRWP seperti yang disajikan pada Gambar IV.4. Strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RTRWP menjadi acuan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD. Dimana pelaksanaan RPJMD kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan diterjemahkan ke dalam dokumen RKPD.



**Gambar 4.3** Alur Langkah-Langkah Penyeragaman RTRW dengan RPJMD

(Direktorat PEIPD Ditjen Bina Bangda, 2022)

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 yang mempedomani RTRWP Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 melalui pencermatan dan sinkronisasi terhadap indikasi program utama RTRWP yang terbagi menjadi program pelaksanaan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis. Sinkronisasi ini dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya dan sesuai dengan tujuan penataan ruang dalam RTRWP.





#### 4.2.5 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Visi yang diusung dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 yaitu :

**“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”.**

Makna mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu lima tahun ke depan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, aman dan sentosa dengan upaya untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan ekonomi yang merata dengan memperhatikan keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan, memperkuat sarana prasarana dasar perekonomian untuk kemakmuran masyarakat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, penguatan terhadap ketahanan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup

Dalam rangka perwujudan visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.

Misi 1 dalam penjabaran visi Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pada peningkatan nilai-nilai masyarakat melalui keagamaan, pendidikan dan sosial budaya, kesehatan, keterampilan, kepemudaan dan olah raga.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.

Misi 2 mengarahkan pembangunan yang merata melalui peningkatan nilai-nilai ekonomi melalui transformasi struktur ekonomi dari komoditas bahan mentah industri turunannya (hilirisasi).

3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.

Misi 3 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan aksesibilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan melalui pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar dan ekonomi dengan berbasiskan kewilayahan yang mengintegrasikan wilayah daratan dan lautan Kalimantan Selatan.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.





Misi 4 dimaksudkan untuk menjamin kinerja birokrasi dapat berjalan secara transparan, efisien dan handal. Reformasi birokrasi pelayanan publik perlu ditingkatkan kualitasnya karena akan berpengaruh besar terhadap iklim investasi. Untuk itu, tata kelola pemerintah yang baik harus diimplementasikan pada berbagai skala ruang maupun fungsi.

5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

Dalam upaya menciptakan lingkungan dan hunian masyarakat yang nyaman dan aman dari bencana, maka diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi persoalan terkait sektor kebencanaan melalui bentuk-bentuk pengendalian untuk bencana banjir, pencemaran, maupun perusakan lingkungan, serta memperkuat ketahanan iklim dan pembangunan rendah karbon dan penanganan kebakaran hutan lahan berbasis teknologi.

Sesuai dengan rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021-2026, adapun tahapan pembangunan pada Tahun 2024 memiliki arah kebijakan dengan fokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan prasarana wilayah untuk mendukung sektor-sektor unggulan. Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target sebagaimana dalam dokumen RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

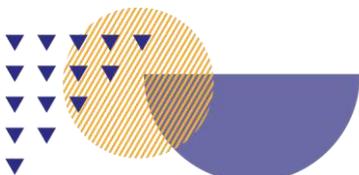
**Tabel 4.1** Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 - 2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Baseline	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>VISI</b>									
<b>KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA</b>									
<b>MISI 1</b>									
<b>Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur</b>									
Meningkatnya Toleransi dan Nilai-nilai Keagamaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	N/A	69,1	72,71	73,32	73,85	74,3	74,7	74,7
Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama	Jumlah Konflik antar dan inter umat beragama (Kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	70,91	71,28	72,46 71,70	72,95 72,20	73,44 72,65	73,98 73,05	74,41 73,50	74,41 73,50
Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,29	8,34	8,47	8,56	8,65	8,74	8,83	8,83
	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,68	12,81	12,94	13,07	13,2	13,33	13,46	13,46





Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Baseline	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	68,66	68,83	70,64	71,05	71,46	71,99	72,3	72,3
Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,86	88,91	88,97	89,04	89,1	89,16	89,23	89,23
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,48	74,44	75,39	76,33	77,27	78,21	79,15	79,15
Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	50,67	51,08	52	52,665	53,33	53,995	54,66	54,66
Menurunnya Pernikahan Anak	Angka Perkawinan Anak (%)	16,24	16,26	15,01	13,77	12,53	11,29	10,04	10,04
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,11	69,87	69,89	69,91	69,93	69,95	69,97	69,97
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	N/A	58,64*	60,15	61,67	63,2	64,74	66,29	66,29
Meningkatnya Prestasi dan Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga (%)	N/A	N/A	35	37	39	41	43	43
	Jumlah Medali Emas (Buah)	N/A	45	30	40	50	35	45	200
<b>MISI 2</b>	<b>Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata</b>								
Meningkatnya perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-1,81	2,1 - 2,6*	4,0 - 4,5	4,5 - 5,2	5,2 - 6,0	6,0 - 6,24	6,24 - 6,5	6,24 - 6,5
Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Perikanan dan Pariwisata	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	-0,96	(-0,05) - 0,65*	0,65 - 2,5	1,5 - 3,45	3,15 - 3,95	3,5 - 4,2	3,75 - 4,75	3,75 - 4,75
	LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	-3,38	1,81 - 2,15*	1,9 - 2,57	2,5 - 3,65	3,65 - 4,65	4,5 - 5,25	5,25 - 6,5	5,25 - 6,5
	LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor (%)	-3,38	0,76 - 0,9*	6,95 - 7,2	7,2 - 7,85	7,85 - 8,2	8,2 - 9,1	9,1 - 10	9,1 - 10
	LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum (%)	-2,02	3,1 - 3,68*	6,18 - 6,61	6,61 - 7,1	7,1 - 7,8	7,8 - 8,25	8,25 - 9,1	8,25 - 9,1
Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	7,76	10,83*	11,66	12,55	13,52	14,55	15,67	15,67





Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Baseline	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan	Persentase penduduk miskin (%)	4,38	4,83	4,80 - 4,60	4,60 - 4,40	4,40 - 4,22	4,22 - 4,05	4,05 - 3,77	4,05 - 3,77
	Indeks Gini	0,332	0,33	0,328	0,326	0,324	0,322	0,31	0,31
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Mandiri (%)	18,79	19,00*	19,29	19,79	20,29	20,79	21,29	21,29
Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah per Orang per Tahun)	12.032	12.143	12.146, 875	12.208, 904	12.266, 652	12.320, 671	12.371, 414	12.371, 414
	Nilai Tukar Petani (%)	99,18	101,58*	102,23	102,7	103,18	103,69	103,8	103,8
Menurunnya tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,74	4,95	4,39	4,22	4,05	3,88	3,71	3,71
Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,33	69,26	69,74	69,94	70,16	70,38	70,6	70,6
<b>MISI 3</b>	<b>Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian</b>								
Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan	Indeks Williamson	0,391	0,383*	0,375	0,367	0,359	0,351	0,343	0,343
Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	67,56	76,57	79,33	81,21	85,21	87,04	88,26	88,26
Meningkatnya Konektivitas antar kawasan	Rasio Konektivitas	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,67
Terwujudnya pembangunan kawasan-kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan	Persentase kesesuaian tata ruang (%)	85	86	87	88	89	90	91	91
<b>MISI 4</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik</b>								
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	68,47	70,85*	72,05	73,24	74,44	75,64	76,84	76,84





Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Baseline	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,7	3,8*	3,85	3,95	4,05	4,15	4,2	4,2
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP*	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Predikat SAKIP	BB	A*	A	A	A	A	A	A
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,03	2,85	3,1	3,25	3,4	3,55	3,65	3,65
	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	71,17	72	75	78	80	82	82
Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Sangat Baik (4,41)	Sangat Baik (4,42)*	Sangat Baik (4,44)	Prima (4,51)	Prima (4,52)	Prima (4,53)	Prima (4,54)	Prima (4,54)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	74,05	79,48*	79,49	79,5	79,51	79,52	79,53	79,53
<b>MISI 5</b>	<b>Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana</b>								
<b>Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>68,43</b>	<b>70,26*</b>	<b>70,58</b>	<b>70,9</b>	<b>71,22</b>	<b>71,54</b>	<b>71,86</b>	<b>71,86</b>
Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Indeks Tutupan Lahan	48,48	49,84*	51,24	52,64	54,04	55,44	56,84	56,84
	Indeks Kualitas Air	51,67	55,90*	55,97	56,04	56,12	56,19	56,26	56,26
	Indeks Kualitas Udara	88,93	88,38*	88,5	88,63	88,73	88,85	88,97	88,97
	Indeks Kualitas Air Laut	64,19	68,69*	69,27	69,86	70,44	71,02	71,6	71,6
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	16,5	18	21	22,2	24,6	26,6	28,9	28,9
<b>Meningkatnya Ketahanan Bencana</b>	<b>Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)</b>	<b>144,81</b>	<b>138*</b>	<b>138</b>	<b>135</b>	<b>132</b>	<b>129</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,47	0,51*	0,54	0,57	0,6	0,63	0,66	0,66

### 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalsel Tahun 2024





Sesuai dengan rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021-2026 sebagaimana disampaikan pada bahasan sebelumnya yaitu **“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”** dimana tema pembangunan yang diusung adalah **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendukung Sektor-Sektor Utama yang Sinergi dengan Kebijakan Nasional”** dengan beberapa pertimbangan yang dihasilkan dari analisis dokumen-dokumen perencanaan serta isu-isu strategis yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya. Untuk menjamin terlenggaranya pembangunan periode tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan arah kebijakan **“Peningkatan Kualitas SDM dan Prasarana wilayah mendukung sektor-sektor unggulan Daerah dan Kebijakan Nasional yang dilaksanakan di Kalsel”**. Pada Tahun 2024 telah dilakukan penyesuaian tema pembangunan pada penyusunan RKPD Tahun 2024 ini menjadi:

**“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong  
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**

Tema Pembangunan tahun 2024 terdapat 2 kata kunci (*key words*). Dari kedua kata kunci tersebut mengandung makna sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah**. Secara pengertian Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Maka diharapkan dengan mengusung tema tahun 2024 akan diupayakan fokus pembangunan yang akan diarahkan pada komponen-komponen. Daya Saing Daerah dengan target tumbuhnya ekonomi inklusif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. **Pertumbuhan Ekonomi Inklusif** merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.





Berdasarkan empat poin tersebut maka tema Tahun 2024 tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan aspek lokal Provinsi Kalimantan Selatan dengan target pembangunan ekonomi yang mengalami pertumbuhan secara inklusif. Begitu juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi inklusif juga tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, infrastruktur dan kualitas lingkungan) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Kalsel MAJU” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat keseluruhan.



**Gambar 4.4** Keterkaitan Aspek Daya Saing Daerah dengan Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif

### 4.3.1 Prioritas dan Sasaran RKPD Tahun 2024

Berdasarkan hal tersebut, maka dibuat Prioritas Pembangunan pada Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2** Prioritas dan Sub-Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No.	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas
1.	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja</li> <li>3. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Geopark</li> </ol>





No.	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas
		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Peningkatan Jumlah dan Kelas Wirausaha Baru Berbasis Digital</li><li>5. Peningkatan Realisasi Investasi yang Berdampak ke Daerah</li><li>6. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN</li></ol>
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah</li><li>2. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda</li><li>3. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif</li><li>4. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS</li><li>5. Pengendalian Prevalensi Stunting</li><li>6. Penurunan Angka Pernikahan Anak</li><li>7. Peningkatan Prestasi Olahraga</li><li>8. Pengembangan Budaya Daerah</li></ol>
3.	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar</li><li>2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Menunjang Konektivitas antar Wilayah</li><li>3. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan yang Terintegrasi dengan Infrastruktur sebagai Pendukung Pintu Gerbang IKN</li></ol>
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan Reformasi Birokrasi</li><li>2. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)</li><li>3. Pelaksanaan Pilkada Serentak</li><li>4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</li><li>5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik</li><li>6. Pengembangan Satu Data Kalsel</li></ol>
5.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup</li><li>2. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana</li></ol>

Berbagai macam metode dan pendekatan perencanaan dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Capaian pembangunan harus berkontribusi terhadap indikator makro daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah.





Oleh karena itu, pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkembang dan fokus terhadap sasaran prioritas. Kelima rumusan prioritas pembangunan Kalimantan Selatan sebagaimana Tabel IV.2 kemudian diselaraskan dengan sasaran pembangunan pada Tahun 2024 sebagaimana ditampilkan pada Tabel IV.3.

**Tabel 4.3** Sasaran Prioritas dan Sub Prioritas RKPd tahun 2024

No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
1	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3,15 - 3,95	%
			LPE Sektor Industri Pengolahan	3,65 - 4,65	%
			LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	7,85 - 8,2	%
		Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,16	%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,05	%
		Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Geopark	LPE Sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,10 - 7,80	%
			Kenaikan Jumlah Wisnus	10	%
			Kenaikan Jumlah Wisman	5	%
			Tingkat Hunian Akomodasi	48	%
		Peningkatan Jumlah dan Kelas Wirausaha Baru Berbasis Digital	Pengeluaran perkapita	12.266,652	Ribu Rupiah per Orang
			Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru	19,67	%
			Persentase pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan	27,21	%
		Peningkatan Realisasi Investasi yang Berdampak ke Daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	13,52	Triliun Rupiah
		Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:	1,39	%
			Padi	1.256.971	Ton
			Bawang	525	Ton
			Cabe Rawit	18.077	Ton
Cabe Besar	14.649		Ton		
Jeruk	121.265		Ton		
Produksi Daging	132.895	Ton			





No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
			Produksi Ikan Tangkap	212.500	Ton
			Produksi Ikan Budidaya	177.272	Ton
			Skor Pola Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	82	Skor
			Stok Minimal Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi	399	Ton
			Persentase Peningkatan Lumbung Pangan yang Memenuhi Stok Pangan Minimal	78,57	%
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,65	Tahun
		Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	53,33	Indeks
		Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,1	Indeks
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,27	Indeks
		Penurunan Penyakit Melalui GERMAS	Usia Harapan Hidup	71,46	Tahun
		Pengendalian Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	14	%
		Penurunan Angka Pernikahan Anak	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 19 tahun	10,53	%
		Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang Berolahraga	39	%
			Jumlah Medali Emas	50	Buah
Pengembangan Budaya Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	63,2	Indeks		
3	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah	Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	85,21	%
			Cakupan Pelayanan Air Minum yang layak	100	%
			Cakupan Pelayanan Air Limbah yang Layak	97	%
			Cakupan Pelayanan Persampahan	52,27	%
			Luas Genangan yang Tertangani	15,9	%
			RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni	48,02	%





No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
			Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	39,19	%
			Kapasitas Penyediaan Air Baku	28,84	%
			Meningkatnya cakupan masyarakat yang dapat menikmati listrik	99,61	%
			Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Tidak Mampu	89,04	%
			Wilayah Bebas Blankspot	92	%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan	0,63	
			Tingkat Kemantapan Jalan	82	%
			Tingkat Aksesibilitas Jalan	51,78	%
			Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	100	%
			Sarana dan Prasarana Bangunan dan Lingkungannya dalam kondisi baik	100	%
			Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa	60	%
			Terangkutnya Penumpang dan Barang	77,5	%
			Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalsel	2	%
		Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	54,83	%	
		Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN	Terwujudnya Pembangunan Kawasan - Kawasan Strategis Berdasarkan Keseimbangan Keuangan	85	%
			Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	60	%
			Persentase Luas Sisa Areal HPL yang Dapat Dikembangkan oleh Pemda	60	%
		4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada	Penguatan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
Opini BPK	WTP				
SAKIP	A				
Indeks Profesionalitas ASN	78				Indeks





No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
	Pelayanan Publik	Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	Minimal 25	%
		Pelaksanaan Pilkada Serentak	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	78,82	%
		Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100	%
		Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,4	Indeks
		Pengembangan Satu Data Kalsel	Jumlah Jenis Data Statistik Sektorial yang Akurat	245	
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	93	%
5	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,9	Indeks
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,04	Indeks
			Indeks Kualitas Air	56,12	Indeks
			Indeks Kualitas Udara	88,73	Indeks
			Indeks Kualitas Air Laut	70,44	Indeks
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	24,6	
		Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,6	
			Peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	100	%
			penanganan pra bencana dan penanganan tanggap darurat bencana	100	%
			Pengendali Daya Rusak Air dalam Kondisi Baik	37,58	%





No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
			Kawasan hutan yang bebas kebakaran hutan	99,2	%

#### 4.3.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan RKP 2024 dan RKP 2024

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Sebagai arahan bagi pembangunan nasional pada Tahun 2024, maka pemerintah pusat telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Tema tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional (PN) sebagai berikut:

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
  - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;





- 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
  - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
  - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
  - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
  - 3) penyediaan air untuk pertanian;
  - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
  - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
  - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
  - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
  - 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
  - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
  - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
  - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
  - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
  - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan





- 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
  - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
  - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
  - 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
  - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
  - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
  - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
  - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
  - 6) pengembangan industri halal.
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
  - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
  - 3) pengelolaan impor;
  - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
  - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
  - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan





- 7) peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
  - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
  - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
  - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
  - 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. PN 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, maka telah dirumuskan program/kegiatan prioritas tahun 2024. Program prioritas tersebut dilandaskan pada permasalahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yang berusaha untuk diselesaikan.

Program Prioritas tersebut juga tidak lepas dari program prioritas Nasional yang pada Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari 5 Prioritas Daerah. Penjabaran Program prioritas disusun dengan harapan dapat menunjukkan kesungguhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung prioritas





pembangunan Nasional Tahun 2024. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalsel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4** Sandingan Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah /Program Prioritas Provinsi Tahun 2024

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
1	<b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>	1	<b>Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata</b>
		2	<b>Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah</b>
1.1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)		- Program Pengelolaan Energi Terbarukan
1.2	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi		- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.3	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan		- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan. - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Pengawasan Keamanan Pangan
1.4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan		- Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan





No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
1.5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).</li><li>- Pengembangan UMKM.</li><li>- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.</li><li>- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</li><li>- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</li><li>- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</li><li>- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.</li><li>- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</li></ul>
1.6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrilisasi		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.</li><li>- Program Pengendalian Izin Usaha Industri.</li><li>- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</li><li>- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</li><li>- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.</li><li>- Program Promosi Penanaman Modal.</li><li>- Program Pelayanan Penanaman Modal.</li><li>- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.</li><li>- Program Pemasaran Pariwisata.</li><li>- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li></ul>
1.7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengembangan Ekspor.</li><li>- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</li></ul>
1.8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Perekonomian dan Pembangunan</li></ul>
2	<b>Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</b>	2	<b>Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah</b>





No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
2.1	Pembangunan Wilayah Kalimantan		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.</li><li>- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya.</li><li>- Program Penataan Bangunan Gedung.</li><li>- Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.</li><li>- Program Penataan Desa.</li><li>- Program Peningkatan Kerjasama Desa.</li><li>- Pengembangan Kalsel Sebagai Gerbang Food Estate Dan Ibukota Negara Baru</li><li>- Program Penyelenggaraan Jalan</li><li>- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</li><li>- Program Pengelolaan Pelayaran</li><li>- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li><li>- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li></ul>
2.2	Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter)		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengelolaan Pendidikan</li><li>- Program Pengembangan Kurikulum</li><li>- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li><li>- Program Pengendalian Perizinan Pendidikan</li><li>- Program Pengembangan Bahasa dan Sastra</li><li>- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li><li>- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</li></ul>
<b>3</b>		<b>3</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing</b>
3.1	Pengendalian Penduduk dan Penguatan tata Kelola Kependudukan		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pendaftaran Penduduk.</li><li>- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li></ul>
3.2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pemberdayaan Sosial.</li><li>- Program Rehabilitasi Sosial.</li><li>- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li></ul>





No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
3.3	peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.</li><li>- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.</li><li>- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.</li><li>- Program Peningkatan Kualitas Keluarga.</li><li>- Program Perlindungan Khusus Anak.</li><li>- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.</li><li>- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.</li><li>- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.</li><li>- Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.</li><li>- Program Pengelolaan Persampahan</li></ul>
3.4	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengelolaan Pendidikan</li><li>- Program Pembinaan Perpustakaan</li><li>- Program Pengembangan Kurikulum</li></ul>
3.5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li><li>- Program pengelolaan Pendidikan.</li><li>- Program Peningkatan Kualitas Keluarga.</li><li>- Program Perlindungan Khusus Anak.</li><li>- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.</li><li>- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</li></ul>
3.6	Pengentasan Kemiskinan		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pemberdayaan Sosial.</li><li>- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</li><li>- Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan</li></ul>
3.7	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.</li><li>- Program Perencanaan Tenaga Kerja.</li><li>- Program Pengelolaan Pendidikan.</li><li>- Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan</li></ul>
4	<b>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>	4	<b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing</b>
4.1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila	4.1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</li><li>- Program Pengembangan Kurikulum</li></ul>





No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
4.2	Meningkatkan Kemajuan dan Pelestarian Kebudayaan		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengembangan Kebudayaan</li><li>- Program Pembinaan Sejarah</li><li>- Program Pengembangan Kesenian Tradisional.</li><li>- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.</li><li>- Program Pengelolaan Permuseuman</li></ul>
4.3	Memperkuat Moderasi Beragama		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.</li><li>- Program Kesejahteraan Rakyat</li></ul>
4.4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pembinaan Perpustakaan.</li></ul>
<b>5</b>	<b>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>	<b>5</b>	<b>Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah</b>
		<b>6</b>	<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik</b>
5.1	Infrastruktur Pelayanan Dasar		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.</li><li>- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.</li><li>- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</li><li>- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li><li>- Program Kawasan Permukiman.</li><li>- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).</li><li>- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</li><li>- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).</li></ul>
5.2	Infrastruktur Ekonomi		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Penyelenggaraan Jalan.</li><li>- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).</li><li>- Program Pengelolaan Pelayaran.</li><li>- Program Pengelolaan Perkeretaapian.</li><li>- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.</li></ul>
5.3	Infrastruktur Perkotaan		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li></ul>
5.4	Energi dan Ketenagalistrikan		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.</li></ul>
5.5	Transformasi Digital		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li><li>- Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik.</li></ul>





No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana
6.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li><li>- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</li><li>- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li><li>- Program Pengelolaan Aspek Kegeologian</li><li>- Program Pengelolaan Hutan</li><li>- Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</li><li>- Program Pengelolan Persampahan</li><li>- Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.</li><li>- Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li><li>- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</li><li>- Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li></ul>
6.2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengurangan Bencana</li><li>- Program Penanganan Bencana</li><li>- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.</li><li>- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li><li>- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li></ul>
6.3	Pembangunan Rendah Karbon		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li><li>- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li></ul>
7	Memperkuat Stabilitas Polkhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik
7.1	Konsolidasi Demokrasi	7.1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.</li></ul>





No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
			- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
7.2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri		- Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
7.3	Reformasi Birokrasi dan tata Kelola		- Program Kepegawaian Daerah. - Program Penyelenggaraan Pengawasan. - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Penataan Organisasi. - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. - Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. - Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
7.5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional		- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

#### 4.3.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 Berbasis Kewilayahan

Kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 yang melingkupi kebijakan pengembangan wilayah, struktur dan pola ruang. Penyusunan RKPD Tahun 2024 ini terintegrasi dengan pelaksanaan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan periode kedua (Tahun 2020 – 2024). Pada periode kedua ini, berdasarkan hasil peninjauan kembali pada Tahun 2020 dan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dilakukan proses revisi dan integrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Selatan.

Agar pembangunan dengan basis kewilayahan berjalan efektif maka diperlukan kebijakan perencanaan pengembangan wilayah yang memiliki sistem yang saling terintegrasi antar wilayah kabupaten/kota. Melalui konsep ini, dapat



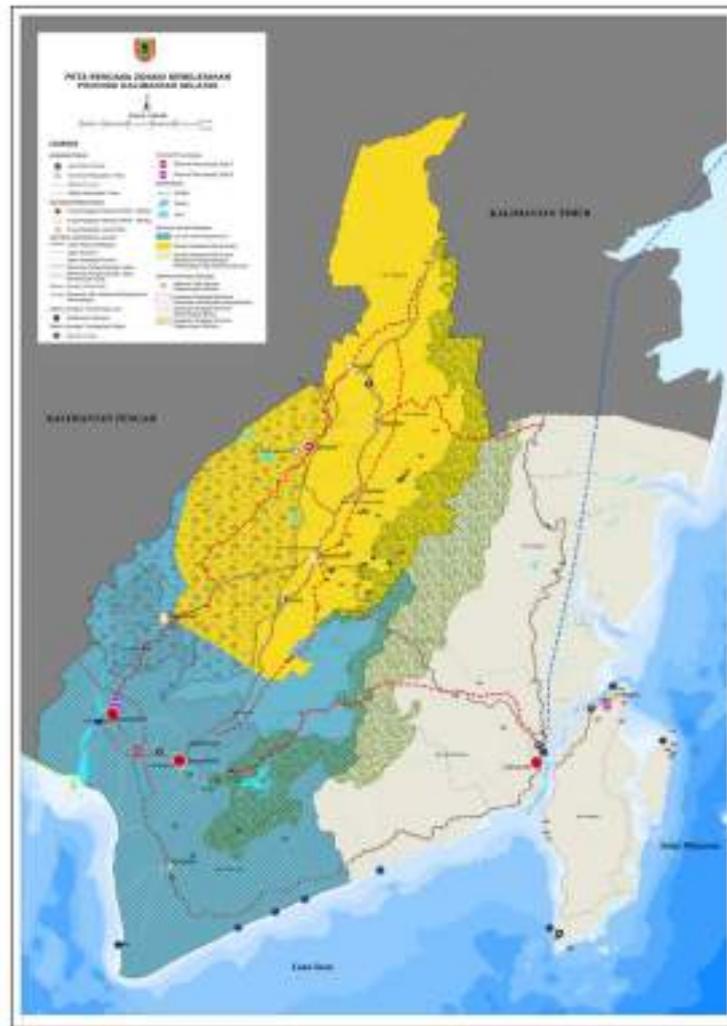


dilakukan pembagian 3 (tiga) zona pengembangan wilayah. Pembagian zona tersebut didasarkan pada beberapa hal yaitu adanya aglomerasi pusat-pusat kegiatan, keterkaitan fungsional dan potensi pengembangan wilayah antar kabupaten/kota yang didelineasi berdasarkan batas administrasi wilayah serta sinkronisasi arah pengembangannya dengan konsep pengembangan kawasan-kawasan strategis di Provinsi Kalimantan Selatan. Pembagian wilayah pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan terintegrasi antar wilayah kabupaten/kota yang disesuaikan dengan sektor-sektor unggulan maupun potensi daerah masing-masing.

Adapun 3 (tiga) wilayah pengembangan tersebut seperti yang ditampilkan pada di bawah terbagi menjadi:

1. Wilayah Pengembangan Zona Perkotaan Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya.
2. Wilayah Pengembangan Zona Benua Anam..
3. Wilayah Pengembangan Zona Pengembangan Kawasan Pesisir, Kawasan Industri, dan Kawasan Ekonomi Khusus.





**Gambar 4.5** Konsep Pembagian Tiga Zona Kewilayahan Kalimantan Selatan Berdasarkan Administrasi dan Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis

#### 4.3.4 Penelaan Terhadap Pokok - Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan dimaksud diperoleh dari hasil pelaksanaan proses perencanaan yaitu pada tahapan Pembukaan dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Forum SKPD, Musrenbang Provinsi dan Dialog Interaktif Rancangan Akhir RKPD serta hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Kalimantan





Selatan Tahun 2024, masukan yang telah masuk dalam SIPD kemudian di seleksi berdasarkan kewenangan Provinsi yang kemudian akan dipilah berdasarkan prioritas.

Pada tahap Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 ini, usulan pikir yang diusulkan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui aplikasi SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri mencapai 1.345 usulan. Usulan pikir tersebut dipilah berdasarkan prioritas dan kesesuaian kewenangan pemerintah provinsi. Adapun rekapitulasi daftar pikir yang diusulkan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.5** Pokok Pikiran DPRD Kalimantan Selatan

No	Urusan	Jumlah Usulan	Penjabaran Usulan
1	Pendidikan Dan Kebudayaan	57	Peningkatan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan seperti pembangunan ruang kelas, renovasi bangunan sekolah, dan halaman sekolah. Selain itu usulan juga diarahkan pada upaya pembangunan SMA dan Sekolah Kejuruan pada daerah – daerah tertentu seperti di Desa Mulyoharjo, Desa Salino, Desa Mayangsari, Kelurahan Palambuan. Digitalisasi sistem pengajaran menjadi salah satu usulan yang disampaikan.
2	Kesehatan	30	Usulan berupa hibah provinsi dalam bentuk mobil ambulans, penyediaan dan distribusi alat kesehatan, peningkatan pelayanan rumah sakit untuk penyandang disabilitas fisik sedang dan berat, serta usulan pembangunan posyandu di Sungai Andai





No	Urusan	Jumlah Usulan	Penjabaran Usulan
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	300	Pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan serta perbaikan drainase jalan. Pada sektor sumber daya air usulan berfokus pada normalisasi sungai, rehabilitasi jaringan irigasi, perkuatan tebing/tanggul, pembangunan embung, dan pengaman pantai. Untuk mendorong pemenuhan infrastruktur dasar maka diusulkan pembangunan sarpras air bersih dan pemasangan pipa PDAM, bantuan pengelolaan persampahan dan pengadaan bank sampah,
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	90	Usulan didominasi dalam rangka penanganan rumah tidak layak huni berupa kegiatan perbaikan/bedah rumah tidak layak huni. Untuk mendukung peningkatan kawasan kumuh dan pengembangan permukiman maka usulan berfokus pada perbaikan dan peningkatan jalan permukiman, rehabilitasi kantor desa, dan pemasangan pavingisasi halaman kantor desa. Selain itu terdapat beberapa usulan untuk pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni korban bencana
5	Perhubungan	90	Usulan didominasi dalam upaya penerangan jalan yang disesuaikan dengan kewenangan Provinsi. Selain itu usulan juga berupa rehabilitasi fasilitas keselamatan jalan, bantuan jukung pengawasan dan mesin penggerak, serta pembangunan dan perbaikan dermaga
6	Kehutanan	7	Usulan berupa pengadaan bibit tanaman. Selain itu terdapat usulan izin pemanfaatan hutan bagi masyarakat adat





No	Urusan	Jumlah Usulan	Penjabaran Usulan
7	Energi Dan Sumber Daya Mineral	30	Usulan berupa pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bantuan tiang listrik untuk penerangan jalan. Dari sisi kegiatan pertambangan, terdapat usulan untuk monitoring dan pengawasan terhadap limbah kegiatan,
8	Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan dan Peternakan) dan Ketahanan Pangan	237	Pengusulan berupa pembangunan lumbung padi dan pengadaan sarana prasarana pertanian (hand tractor, traktor boat, pupuk, benih padi, bibit sawit, rondup) . Selain itu terdapat usulan perbaikan jalan usaha tani, jalan tani poros, dan jalan kebun. Untuk mendukung kegiatan peternakan diperlukan bantuan ternak sapi dan itik jawa
10	Kelautan Dan Perikanan	84	Usulan berupa bantuan alat tangkap ikan, mesin perahu dromping, dan bibit ikan
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Pelatihan untuk anak remaja di Kota Banjarmasin
12	Kepemudaan dan Olahraga	21	Berupa Bantuan peralatan olahraga dan bantuan pengadaan sarana prasarana olahraga seperti seragam, net, bola pada cabang-cabang olah raga (Bola voli, Futsal, Sepak bola). Selain itu terdapat usulan pembangunan stadion dan gedung olahraga
13	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	Berupa hibah kepada LSM, yayasan, dan DPD Persatuan Alumni Gerakan mahasiswa Nasional Indonesia Kalimantan Selatan
14	Kebencanaan	4	Usulan bantuan pengadaan sarana prasarana kebencanaan berupa perahu karet
15	Perdagangan	2	Kebutuhan operasi pasar untuk kebutuhan pangan di kawasan terpencil dan





No	Urusan	Jumlah Usulan	Penjabaran Usulan
16	Tenaga Kerja	9	Bantuan yang diusulkan berupa program pelatihan kerja untuk pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi serta pelatihan bagi para pemuda putus sekolah dan masyarakat UMKM
17	Sekretariat Daerah	277	Bantuan pembangunan/rehabilitasi mesjid, mushola, TPA/TPQ dan panti asuhan. Untuk mendukung kegiatan ibadah masyarakat, maka terdapat usulan hibah untuk tempat ibadah
18	Komunikasi dan Infomatika	3	Usulan penguatan tata kelola komisi informasi publik
19	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10	Usulan pengadaan pasar murah di Wilayah Kemiri Sungai Andai serta pembinaan UMKM di desa, dan bantuan pengadaan bahan produksi kain sasirangan. Diperlukan juga diklat/pelatihan keterampilan wirausaha khususnya untuk remaja dan wanita untuk mendukung UMKM
20	Lingkungan Hidup	5	Usulan yang disampaikan sebagai upaya penanganan sampah berupa pengadaan TPA/TPS. Selain itu, diusulkan pembuatan saluran pembuangan limbah batubara di Desa Jelatang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
21	Pariwisata	13	Perlu penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan usaha untuk para ibu rumah tangga, remaja, kelompok desa. Serta dibutuhkan bantuan berupa mesin jahit dan dinamo. Untuk meningkatkan pemberdayaan kesenian masyarakat, maka dibutuhkan fasilitas kesenian kuda lumping
22	PMD	5	Usulan penyusunan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tanah Laut
23	Pertanahan	2	Dukungan legalitas tanah di pedesaan dan sertifikasi lahan transmigrasi Angkatan Laut di Desa Abumbun Jaya





No	Urusan	Jumlah Usulan	Penjabaran Usulan
24	Sosial	47	Usulan bantuan usaha ekonomi produktif
25	Perindustrian	3	Usulan berupa hibah alat produksi (mesin pencetak bakso, mesin pemisah tulang, mesin pencetak sosis, mesin pengemasan plastik, mesin vakum, dan freezer box)
26	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	12	Usulan berupa bantuan sarpras pemadam kebakaran (mobil pemadam, mobil unit pick-up, mesin pompa air, alat pemadam kebakaran, baju pemadam kebakaran) dan rehabilitasi posko BPK

#### 4.4 Inovasi Pembangunan Daerah

Selain program/kegiatan yang diuraikan pada subbab sebelumnya, dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan prioritas yang telah diuraikan, dikembangkan pula program-program inovasi. Beberapa program inovasi yang dikembangkan di Kalimantan Selatan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.6 Tabel Inovasi Daerah

No	Urusan/Unit Kerja	Bentuk Inovasi dan Penjabaran Inovasi
1.	Dinas Perkebunan dan Perternakan Provinsi Kalimantan Selatan	<p><b>Bentuk Inovasi</b></p> <p>Integrasi Sawit - Sapi berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (SISKA KU INTIP)</p> <p>Merupakan Program Integrasi Sawit - Sapi berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (SISKA KU INTIP). Adapun penjabaran dari inovasi ini sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam upaya percepatan swasembada pangan khususnya sapi potong. Dinas Perkebunan dan Perternakan Kalimantan Selatan melakukan program Integrasi Sawit-Sapi berbasis Kemistraan Usaha Ternah Inti Plasma (SISKA KU INTIP), telah mampu meningkatkan produksi anak sapi (padet) di Kalsel.</li><li>• Dari populasi sapi di Kalsel sekitar 148 ribu ekor, selama ini menghasilkan anak sapi setiap tahun 22 ribu ekor. Tetapi setelah program SISKA KU INTIP tahun 2020 meningkat menjadi 27 ribu ekor, dan tahun 2021 naik lagi menjadi 30.500 ekor.</li><li>• Program SISKA KU INTIP telah melakukan kajian sejak tahun 2016, dan hingga tahun 2024 mendapat support dari Australia serta mendorong peternak dan</li></ul>



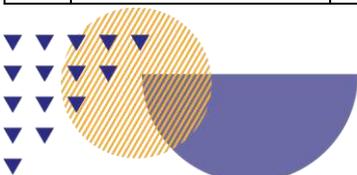


		<p>pekebun di Kalsel untuk melakukan integrasi sawit-sapi tersebut, karena terbukti mampu meningkatkan produksi anak sapi. Agar dapat mempercepat swasembada sapi potong 2026, dan menjadi pemasok sapi di wilayah Kalimantan, Program SISKU INTIP, dapat mendorong perkebunan kelapa sawit di Kalsel. Karena sektor perkebunan telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meraih devisa nomor dua di Kalsel setelah batubara.</p>
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Bentuk Inovasi</p> <p>Pemberian Penghargaan Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan - Geospasial Banua Award</p> <p>Penjabaran Inovasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Merupakan program pemberian penghargaan pertama pada tingkat provinsi di Indonesia untuk pengembangan simpul jaringan informasi geospasial pada tingkat SKPD provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan</li><li>• Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya SKPD provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dalam mengembangkan simpul jaringan informasi geospasial daerah dan mendukung percepatan satu data di Kalimantan Selatan</li><li>• Ajang pemberian penghargaan ini dilaksanakan perdana pada Tahun 2022 dengan mengadopsi sistem penilaian Bhumandala Award.</li><li>• Dengan adanya penghargaan ini, kinerja maupun komitmen SKPD provinsi sebagai unit produksi dan simpul jaringan kabupaten/kota meningkat secara drastis.</li></ul>
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Bentuk Inovasi</p> <p>Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Melalui Sistem Informasi Bebrbasis Geospasial Terintegrasi (Sinbastertaskrim) Provinsi Kalimantan Selatan – SI PALUI EKSIS</p> <p>Penjabaran Inovasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Merupakan program tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dimana Provinsi Kalimantan Selatan</li><li>• Pelaksanaan pencapaian Kinerja Pengentasan Kemiskinan Ekstrem agar lebih efektif dan efisien</li></ul>





		<p>diperlukan Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang Terpadu dan Berkelanjutan melalui Sistem Informasi berbasis Geospasial Terintegrasi secara Vertikal dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta secara horizontal antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Stakeholder lainnya. (Perbankan, Perusahaan Baznas, dan BPJS)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dengan adanya program ini mampu mengintegrasikan (link) data geospasial dan program/kegiatan baik secara<ul style="list-style-type: none"><li>○ Vertikal: pusat, provinsi, kabupaten/kota,</li><li>○ Horizontal: SKPD dan Stakeholders lain (Perbankan, Perusahaan, Baznas, dan BPJS)</li><li>○ Data program/kegiatan dan data kelompok sasaran dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem</li><li>○ Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kalsel diatur melalui PERGUB No 076 Tahun 2022 Tanggal 30 November Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem</li></ul></li></ul>
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan	<p>PAMAN MAHAGA STUNTING</p> 
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan	<p>Bentuk Inovasi</p> <p>SIAP TPB (Sistem Aplikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penjabaran Inovasi</li><li>• Sistem pelaporan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tepat</li><li>• Menyediakan baseline data sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah</li><li>• Menyediakan data perkembangan tujuan pembangunan berkelanjutan daerah dengan Kemudahan updating secara timeseries dan terstruktur</li><li>• Penyandingan data numerik dengan data geospasial untuk kemudahan analisa</li><li>• Mendukung program ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas untuk pelaporan</li></ul>





6.	Rumah Sakit Gigi dan Mulut Hasan Aman	SI KEPO (Aplikasi Kepuasan Pasien Online)
7.	Rumah Sakit Gigi dan Mulut Hasan Aman	KTP SI BOS (Kendali dan Tatalaksana Pencegahan Karies dengan Boneka Sappy)
8.	Dinas Kesehatan	Monalisa (Mobil Analisa dan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat)
9.	Dinas Lingkungan Hidup	<p>Bentuk Inovasi</p> <p>Program Sungai Martapura Asri (Aman, berSih, Ramah, Indah)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aman: memberikan rasa aman sebagai tempat berkehidupan (pengembangan transportasi dan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan serta mampu untuk mereduksi banjir yang terjadi di kawasan sub DAS Martapura)</li><li>• Bersih: bersih dari sampah dan sumber pencemar lainnya</li></ul> <p>Penjabaran Inovasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Merupakan program yang dimaksudkan untuk mengembalikan kejayaan Sungai Martapura sebagai pusaka peradaban Banua dan bertujuan menjadikan Sungai Martapura yang aman, bersih, rapi, dan indah.</li></ul>
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<p>PAMAN MUDIK (Pembangunan Manunggal Menuju Desa Mandiri Berkelanjutan)</p> <p><b>RKPD TAHUN 2024</b> PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p>
11.	RSUD ULIN	SI PARAS (Sistem Pelayanan Apik, Ramah, Aman, dan Salam/Senyum)
12.	RSUD ULIN	SI SUSAN RAKAT (Sistem Survei Kepuasan Masyarakat)
13.	RSUD ULIN	SI LURAH MANDAM (Sistem Kelistrikan Rumah Sakit Yang Handal Tanpa Padam)
14.	RSUD ULIN	SI ICU (Sistem Informasi Intensive Care Unit)
15.	RSUD ULIN	WASEMO (Drainase Pleura dengan Water Sealed Drainage Modification)
16.	RSUD Ulin	SI WALUD (Sistem Informasi Kepegawaian Non ASN/BLUD)
17.	RSUD Ulin	SICAKEB (Sistem Catatan Asuhan Kebidanan)
18.	RSUD Ulin	APOTEKER PIAN (Aplikasi Penggunaan Obat bagi Tenaga Kefarmasian dan Pasien yang Informatif, Akuntabel dan Nyaman)





19.	RSUD Ulin	SI KAKA (Sistem Pelayanan Kecelakaan Kerja)
20.	Dinas Kehutanan	Bentuk Inovasi Gerakan Revolusi Hijau Penjabaran Inovasi <ul style="list-style-type: none"><li>Merupakan kegiatan penanaman dengan target 30.000 hektar per tahun yang dilaksanakan dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan tutupan lahan bervegetasi, menurunkan tingkat kekritisian lahan, meningkatkan produktivitas lahan</li></ul>
21.	Dinas Kehutanan	Bentuk Inovasi Siforestka (Sistem Informasi Kehutanan Kalimantan Selatan) Penjabaran Inovasi <ul style="list-style-type: none"><li>Merupakan aplikasi yang menyajikan informasi dan data potensi sumber daya hutan dalam satu kesatuan sistem yang mampu memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kehutanan secara akurat baik data potensi sumber data hutan, peluang bisnis, perizinan, dan informasi kehutanan lainnya.</li></ul>
22.	RSJ Sambang Lihum	Bentuk Inovasi SI PAMAN JUARA (Strategi Peningkatan Kemandirian Orang Dengan Gangguan Jiwa Melalui Usaha dan Kerja Nyata)
23.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sistem Informasi Air Tanah Kalimantan Selatan SIATA KALSEL
24.	UPT Kebun Raya Banua	Interest Kebun Raya Banua (Integrated Ticketing and Reservation Sistem)





# BAB V

## ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se- Kalimantan Selatan. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi panduan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota di Tahun 2024. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota berdasarkan pada arah kebijakan pembangunan daerah Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 yang tercantum dalam Bab IV.

### 5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota pada dasarnya merupakan fokus kebijakan pembangunan yang memberi panduan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan provinsi. Dalam kerangka rencana pembangunan tahunan, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada pencapaian target sasaran prioritas pembangunan Tahun 2024. Indikator makro pembangunan terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Arah kebijakan pembangunan seluruh kabupaten dan kota di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat mendukung pencapaian 6 (enam) indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.





### 5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian IPM kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.** Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM <b>LEBIH RENDAH</b> dan Laju Pertumbuhan IPM <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
II	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
III	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi
IV	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM <b>LEBIH TINGGI</b> dan Laju Pertumbuhan IPM <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi

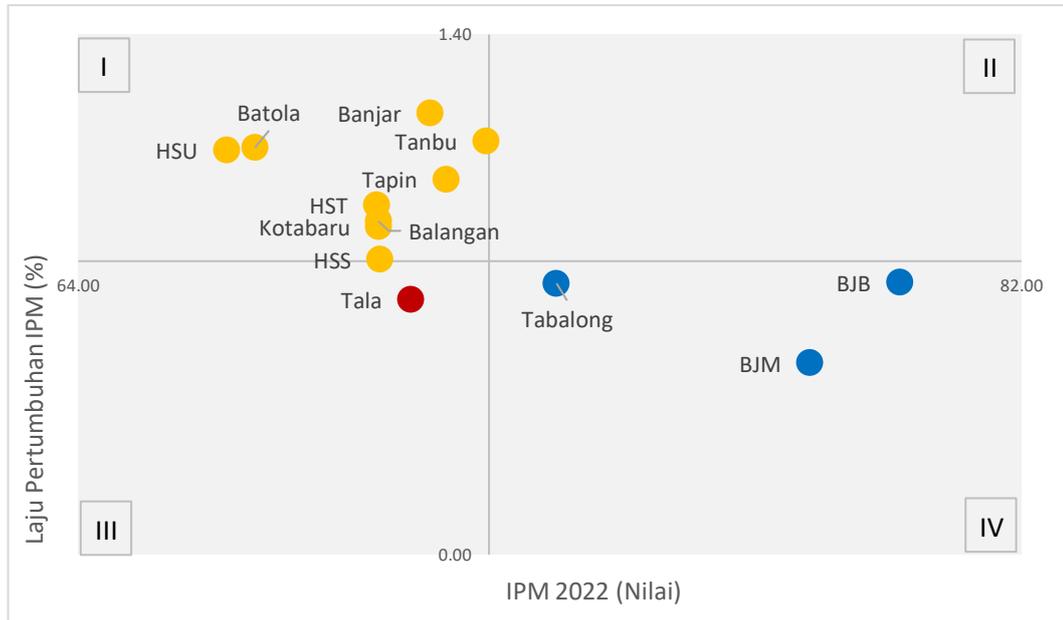
Sumber: Ditjah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

- Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih rendah dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, dan Hulu Sungai Selatan.
- Kuadran II.** Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi.
- Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Tanah Laut.
- Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding





capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru.



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 5.1** Analis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/ Kota Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Capaian IPM kabupaten/kota berkisar antara 66,84 (Kabupaten Hulu Sungai Utara) hingga 79,68 (Kota Banjarbaru). Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan status capaian pembangunan manusia kabupaten/kota satu dan lainnya. Berdasarkan statusnya, terdapat 7 (tujuh) kabupaen/kota dengan status IPM “Tinggi”, dan 6 (enam) kabupaten dengan status IPM “Rendah”.

**Tabel 5.2.** Capaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022

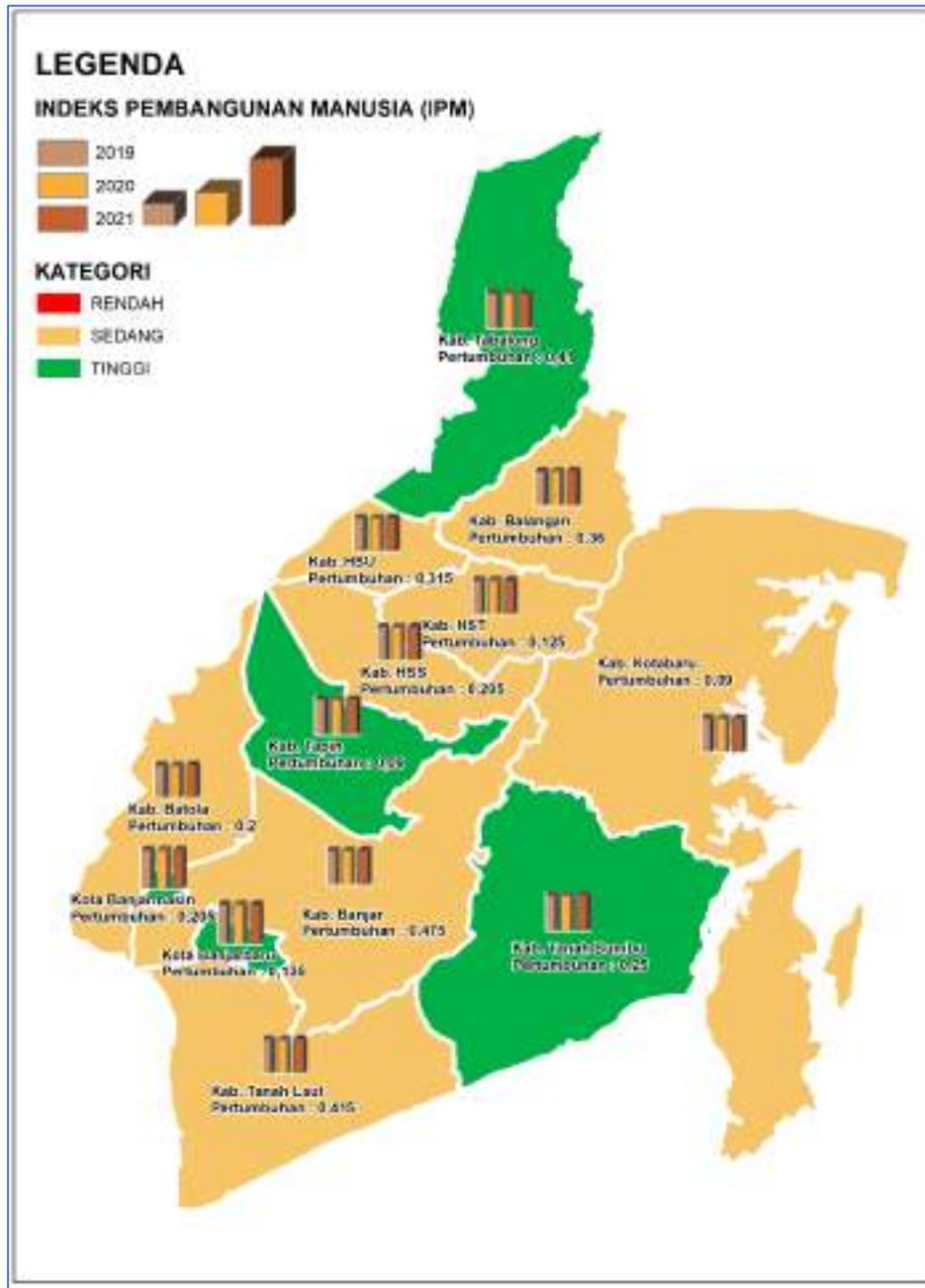
NO.	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)			
		2021	2022	PERTUMBUHAN (%)	KATEGORI
1	KALIMANTAN SELATAN	71,28	71,84	0,79	Tinggi
2	KAB. TANAH LAUT	69,87	70,35	0,69	Tinggi
3	KAB. KOTABARU	69,13	69,74	0,88	Sedang
4	KAB. BANJAR	69,89	70,72	1,19	Tinggi
5	KAB. BARITO KUALA	66,64	67,37	1,10	Sedang
6	KAB. TAPIN	70,31	71,02	1,01	Tinggi
7	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	69,21	69,76	0,79	Sedang
8	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	69,05	69,70	0,94	Sedang
9	KAB. HULU SUNGAI UTARA	66,12	66,84	1,09	Sedang





NO.	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)			
		2021	2022	PERTUMBUHAN (%)	KATEGORI
10	KAB. TABALONG	72,6	73,13	0,73	Tinggi
11	KAB. TANAH BUMBU	71	71,79	1,11	Tinggi
12	KAB. BALANGAN	69,11	69,73	0,90	Sedang
13	KOTA BANJARMASIN	77,10	77,97	0,52	Tinggi
14	KOTA BANJARBARU	79,22	<b>79,68</b>	<b>0,73</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023



Gambar 5.2   Peta Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota





Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, upaya akselerasi dilaksanakan pada daerah dengan IPM Status “Sedang”, antara lain melalui kejar paket guna mengejar mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah.

### 5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE dan Share Perekonomian kabupaten/kota tahun 2021, maka capaian LPE kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.3. Kategori Capaian LPE Kabupaten/ Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE <b>LEBIH RENDAH</b> dan Share Perekonomian <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
II	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
III	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi
IV	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE <b>LEBIH TINGGI</b> dan Share Perekonomian <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

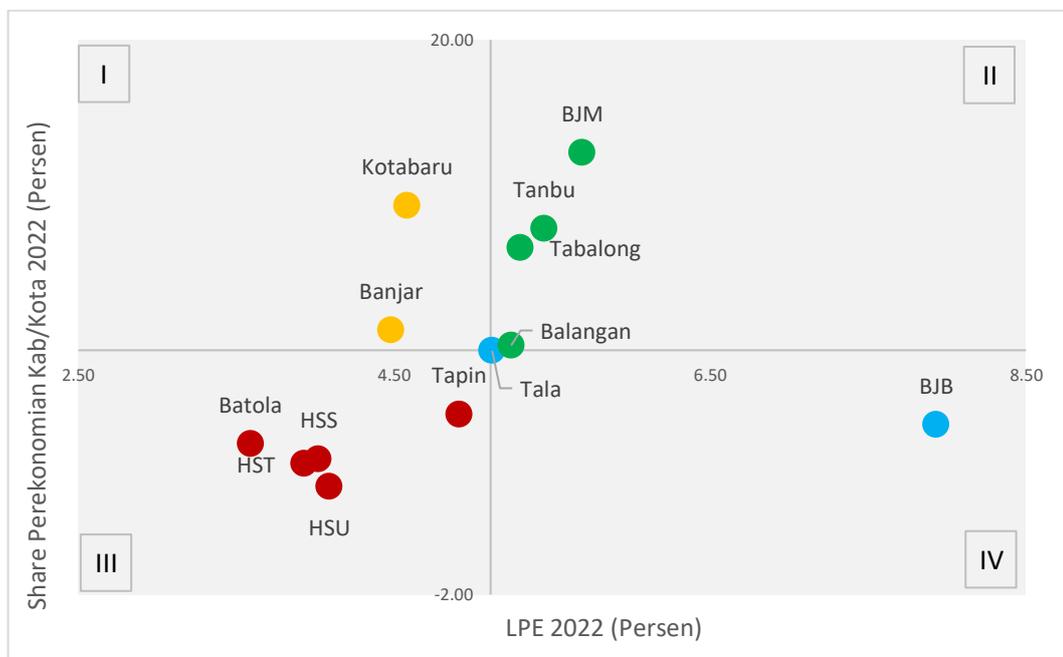
1. **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih rendah dan Share Perekonomian lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Banjar.
2. **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian lebih tinggi dibanding capaian provinsi,





yaitu Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kota Banjarmasin.

- Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tanah Laut, dan Kota Banjarbaru.
- Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian capaian LPE lebih tinggi dan Share Perekonomian lebih rendah dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tapin.



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 5.3** Analis Kuadran Capaian LPE dan Share Perekonomian Kabupaten/Kota

Perkembangan perekonomian Kalimantan Selatan secara regional dilihat dengan menganalisis share dan pertumbuhan PDRB dari 13 kabupaten/kota dengan membagi daerah ke dalam empat kuadran berdasarkan nilai share dan pertumbuhan PDRB masing-masing. Perpotongan sumbu vertikal dan sumbu horizontal merupakan nilai share dan pertumbuhan rata-rata. Artinya kabupaten/kota yang berada di sebelah kanan sumbu vertikal (Kuadran II dan IV) merupakan kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas capaian Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan kabupaten/kota yang berada di sebelah





atas sumbu horizontal adalah kabupaten/kota yang memiliki share perekonomian terhadap Provinsi di atas share rata-rata seluruh kabupaten/kota (kuadran I dan II).

Kabupaten/kota yang berada pada kuadran 1 dan 2 merupakan daerah penting bagi Provinsi Kalimantan Selatan, sharenya bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan cukup besar. Oleh karena itu, pertumbuhannya harus tetap dijaga karena wilayah-wilayah ini menjadi tulang punggung perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Daerah-daerah yang harus menjadi prioritas untuk didorong adalah wilayah yang berada pada kuadran 1. Pada kuadran 1 tingkat pertumbuhan dan share belum optimal namun masih memiliki potensi untuk dapat dikembangkan.

### 5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.** Kategori Capaian TPT Kabupaten/ Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT dan Besar Perubahan <b>LEBIH BAIK</b> dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT <b>DI ATAS</b> capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT <b>LEBIH BAIK DARI</b> dari capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT <b>LEBIH BAIK</b> dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT <b>DI BAWAH</b> capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT <b>DI ATAS</b> dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT <b>LEBIH BAIK</b> dari capaian provinsi

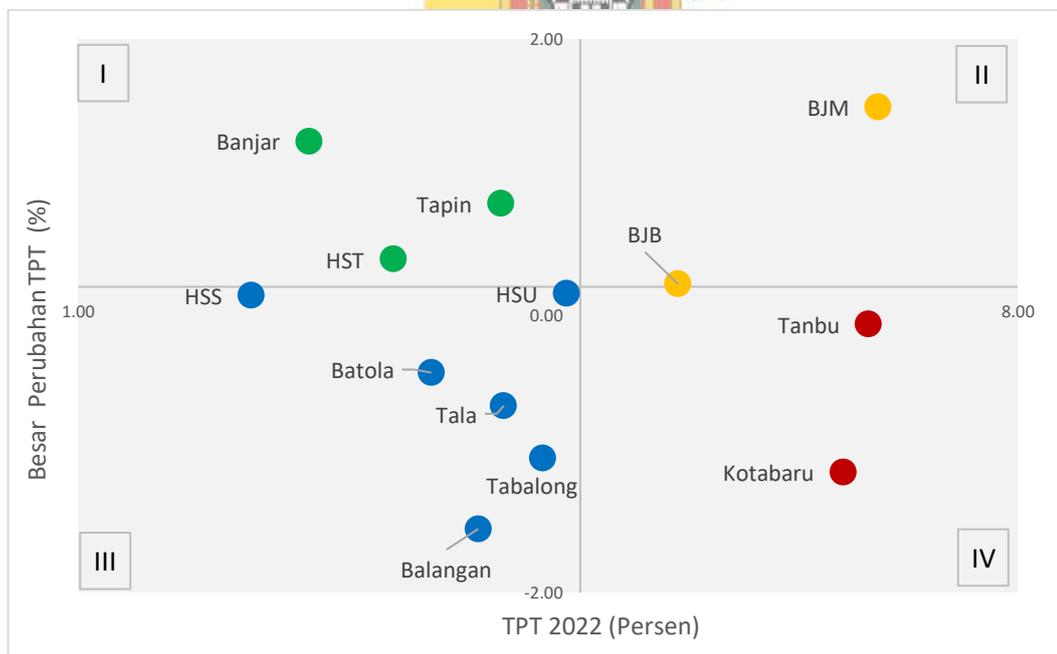
Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

1. **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan





- TPT diatas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tapin
- Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT diatas capaian provinsi. Kelompok Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.
  - Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT dibawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan.
  - Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT di bawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 5.4** Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan TPT Kabupaten/Kota

Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan menunjukkan perbedaan di setiap kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan





Kerja (TPAK) di 13 kabupaten/kota yang berada pada kisaran 62,56 persen hingga 72,54 persen. Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada.

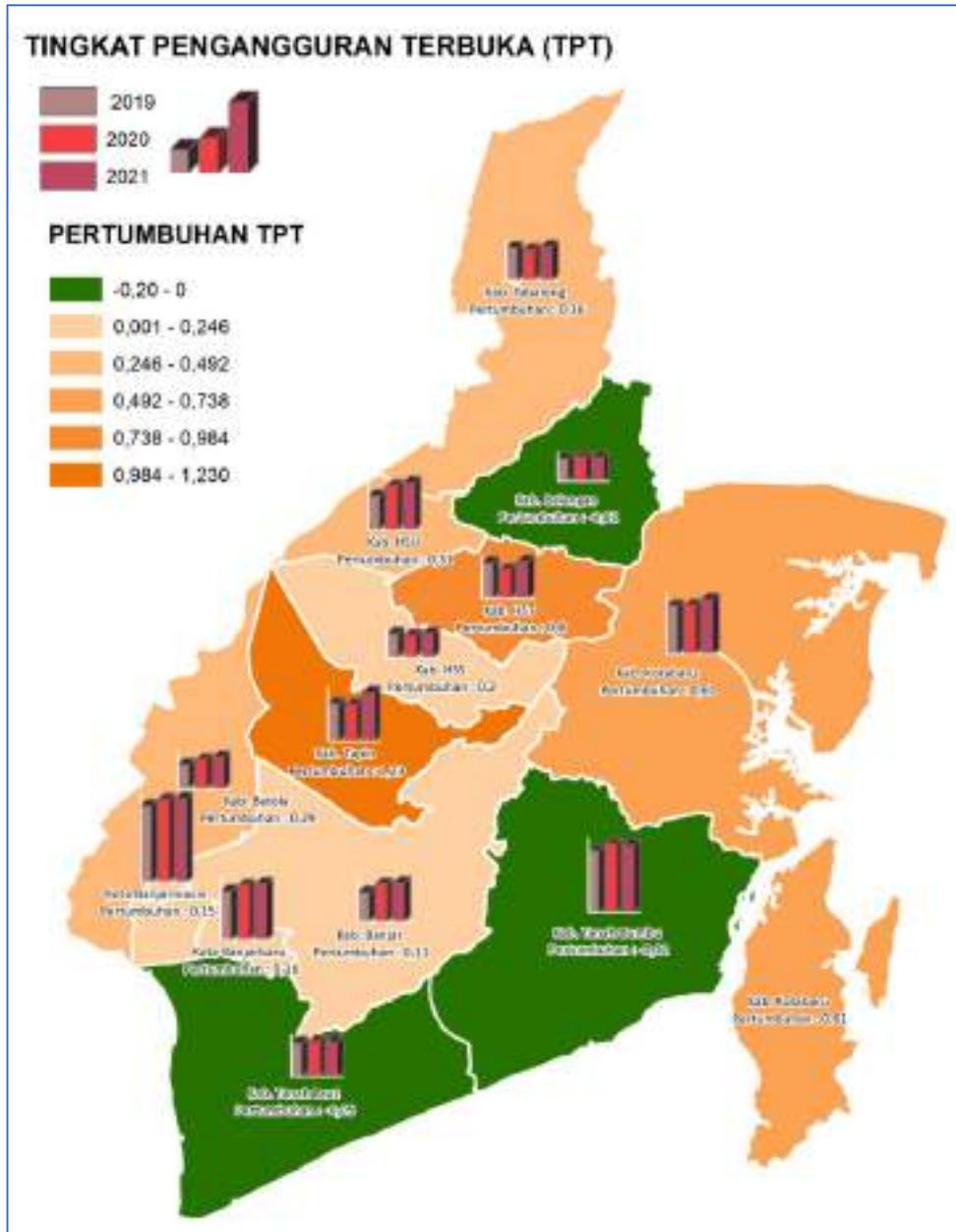
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi.

**Tabel 5.5.** TPT Kabupaten/ Kota Tahun 2020 - 2022

NO.	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)			BESAR PERUBAHAN
		2020	2021	2022	
1	KALIMANTAN SELATAN	4,74	4,95	4,74	0,21
2	KAB. TANAH LAUT	3,57	3,52	4,17	-0,65
3	KAB. KOTABARU	4,96	5,57	6,70	-1,13
4	KAB. BANJAR	3,87	3,98	2,72	1,26
5	KAB. BARITO KUALA	2,93	3,22	3,63	-0,41
6	KAB. TAPIN	3,73	4,96	4,15	0,81
7	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	2,24	2,44	2,29	0,15
8	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	2,96	3,76	3,35	0,41
9	KAB. HULU SUNGAI UTARA	4,49	4,8	4,64	0,16
10	KAB. TABALONG	3,07	3,43	4,46	-1,03
11	KAB. TANAH BUMBU	6,95	6,83	6,89	-0,06
12	KAB. BALANGAN	2,46	2,44	3,98	-1,54
13	KOTA BANJARMASIN	8,32	8,47	6,96	1,51
14	KOTA BANJARBARU	5,54	5,7	5,47	0,23

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023





**Gambar 5.5** Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota

#### **5.1.4 Persentase Penduduk Miskin**

Persentase penduduk miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.





Tabel 5.6. Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota

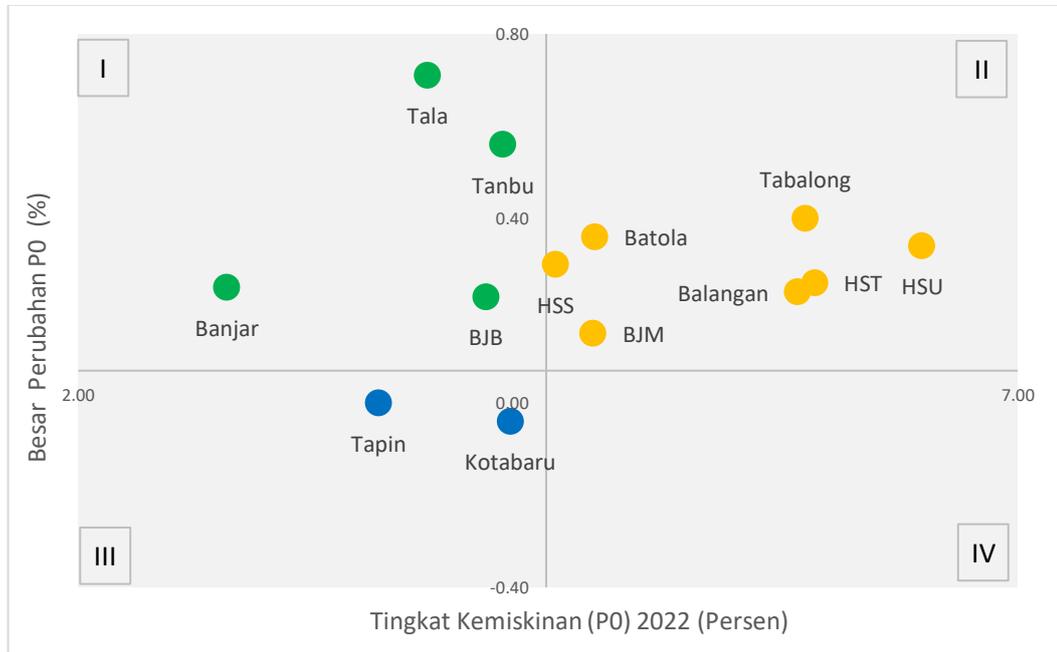
Kuadran	Simbol	Interpretasi
I	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Besar Perubahan <b>LEBIH BAIK</b> dibanding capaian provinsi
II	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin <b>DI ATAS</b> capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin <b>LEBIH BAIK DARI</b> dari capaian provinsi
III	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin <b>LEBIH BAIK</b> dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin <b>DI BAWAH</b> capaian provinsi
IV	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin <b>DI ATAS</b> dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin <b>LEBIH BAIK</b> dari capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

1. **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di atas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru.
2. **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di atas capaian provinsi. Kelompok Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kota Banjarmasin.
3. **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di bawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tapin dan Kabupaten Kotabaru.



4. **Kuadran IV.** Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di bawah capaian provinsi.



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 5.6** Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren konsisten menurun. Namun demikian permasalahan kemiskinan masih dialami oleh sejumlah kabupaten/kota dimana tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dan laju penurunan kemiskinan yang lebih rendah dibanding provinsi.

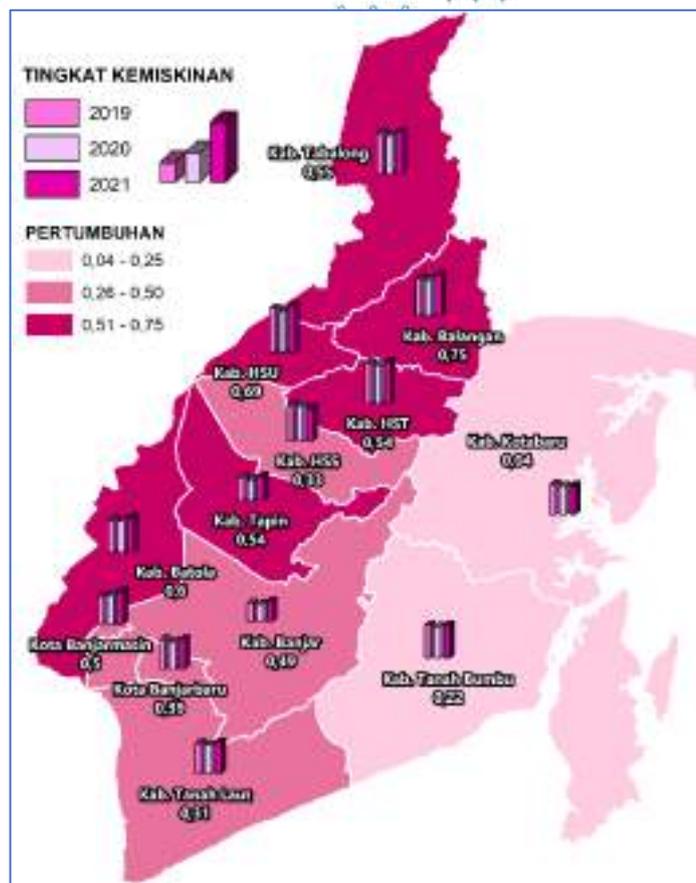
Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan dan wilayah yang padat penduduknya. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengoptimalkan pemutakhiran kualitas data yang digunakan sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan.



**Tabel 5.7.** Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota Tahun 2020 - 2022

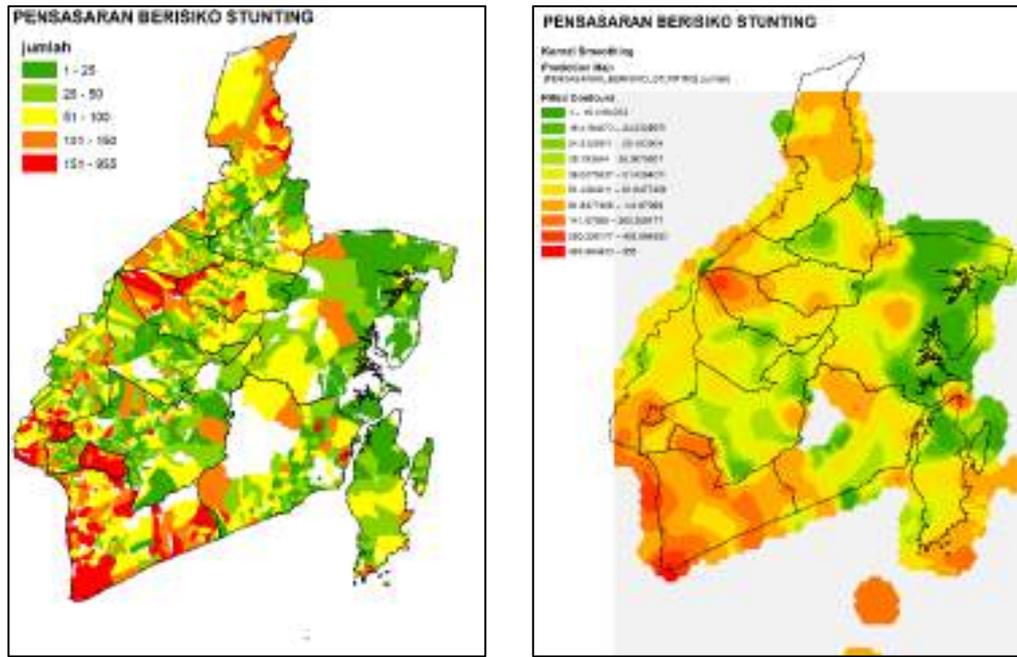
NO.	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	% PENDUDUK MISKIN			BESAR PERUBAHAN
		2020	2021	2022	
1	KALIMANTAN SELATAN	4,83	4,56	4,49	0,07
2	KAB. BANJAR	4,26	4,57	3,86	0,71
3	KAB. TAPIN	4,22	4,26	4,30	-0,04
4	KAB. KOTABARU	2,55	3,04	2,79	0,25
5	KOTA BANJARBARU	4,51	5,11	4,75	0,36
6	KAB. TANAH LAUT	3,06	3,60	3,60	0,00
7	KAB. TANAH BUMBU	5,17	4,84	4,54	0,30
8	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	5,64	6,18	5,92	0,26
9	KOTA BANJARMASIN	6,14	6,83	6,49	0,34
10	KAB. BARITO KUALA	5,72	6,27	5,87	0,40
11	KAB. BALANGAN	4,6	4,82	4,26	0,56
12	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	5,32	6,07	5,83	0,24
13	KAB. TABALONG	4,39	4,89	4,74	0,15
14	KAB. HULU SUNGAI UTARA	4,01	4,4	4,17	0,23

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023



**Gambar 5.7** Peta Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota





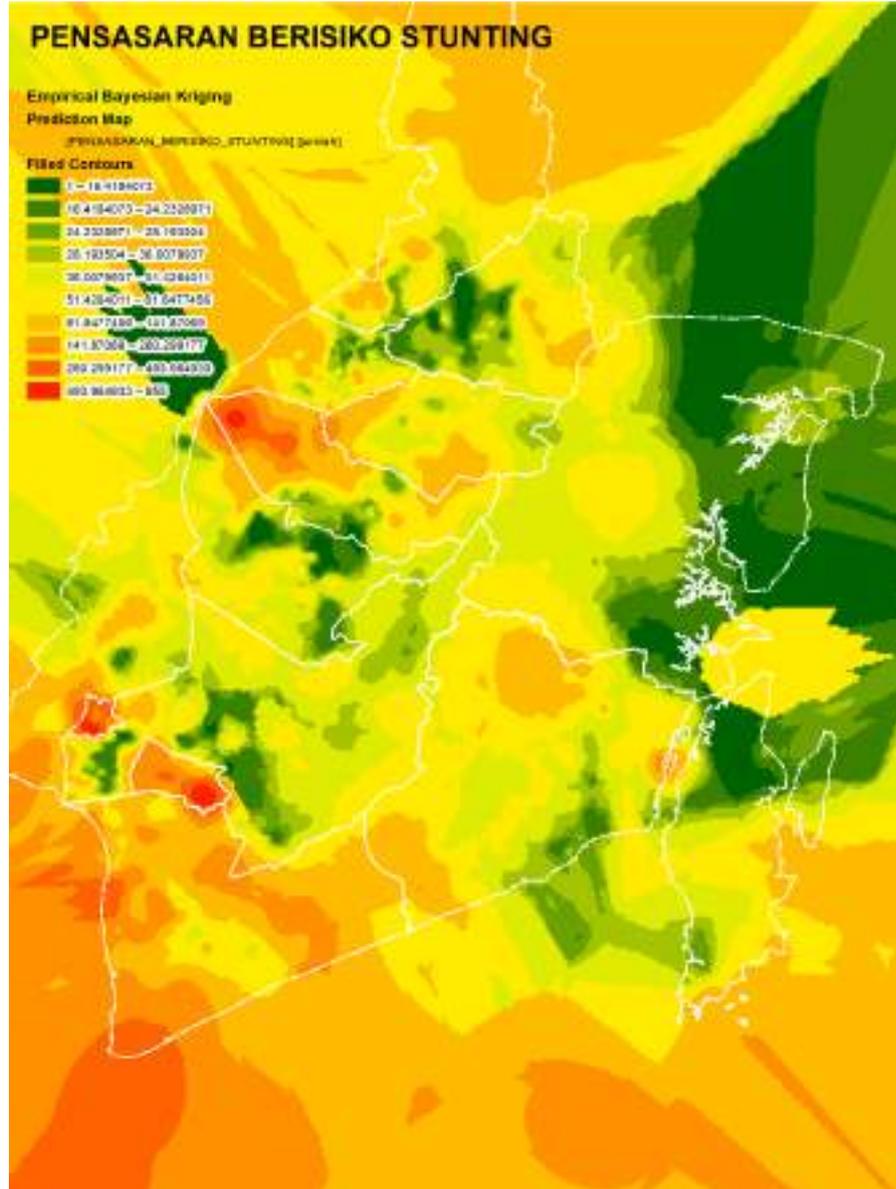
(a). Analisa Jumlah KK (P3KE) Berisko Stunting

(b). Geostatistikan Kernal Smoothing Jumlah KK (P3KE) Berisko Stunting

**Gambar 5.8** Peta Analisa Geostatistik Resiko Stunting dari Analisa Data Pensasaran P3KE-Kemenko PMK

Berdasarkan analisa Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dapat dilihat bahwa sebaran berada pada wilayah pedalaman, pesisir dan wilayah pinggiran kota seperti wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru yang memiliki potensi stunting tinggi dikarenakan jumlah penduduk di wilayah tersebut lebih banyak. Sehingga dapat diprioritaskan penanganan kemiskinan ekstrim pada wilayah berwarna merah pada peta yang mencirikan dampak ganda antara kemiskinan ekstrem dan keluarga berisiko stunting.





**Gambar 5.9** Analisa Geostatistik Bayesian Jumlah KK Pensasaran Berisiko Stunting

### 5.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Secara umum, ketimpangan pengeluaran penduduk kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 dalam kategori rendah sampai moderat. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian indeks gini kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian





tahun 2021, maka capaian Persentase indeks gini kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 5.8.** Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian indeks gini dan Besar Perubahan <b>LEBIH BAIK</b> dibanding capaian provinsi
II	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian indeks gini <b>DI ATAS</b> capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini <b>LEBIH BAIK DARI</b> dari capaian provinsi
III	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian indeks gini <b>LEBIH BAIK</b> dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini <b>DI BAWAH</b> capaian provinsi
IV	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian indeks gini <b>DI ATAS</b> dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini <b>LEBIH BAIK</b> dari capaian provinsi

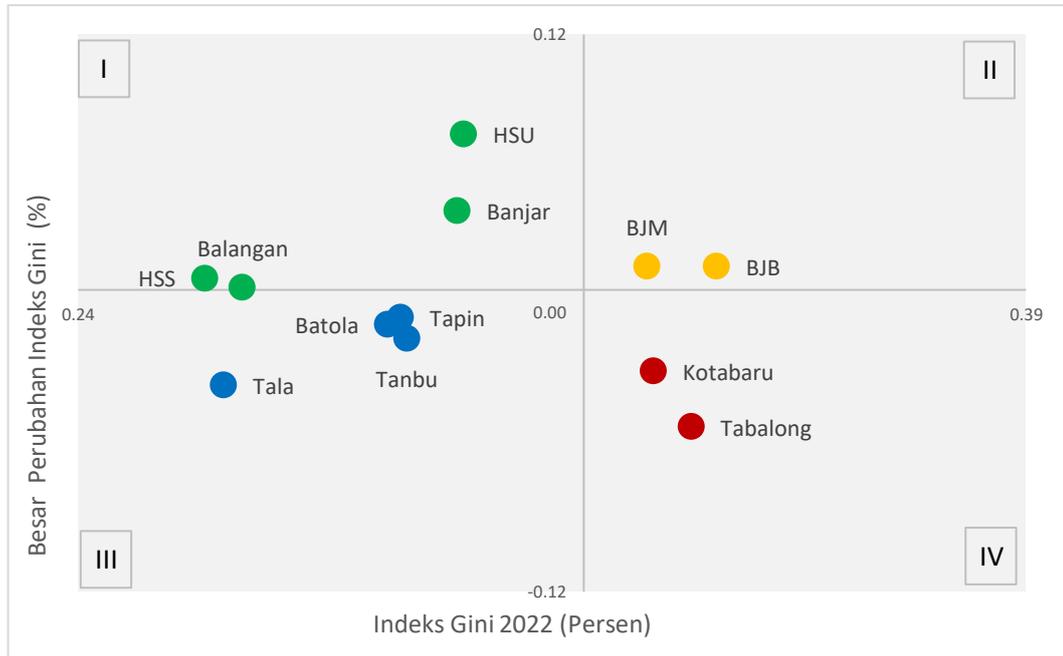
Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

1. **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini diatas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Banjar.
2. **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini diatas capaian provinsi. Kelompok Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.
3. **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini dibawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Tapin.
4. **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar





Perubahan indeks gini di bawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tabalong.



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

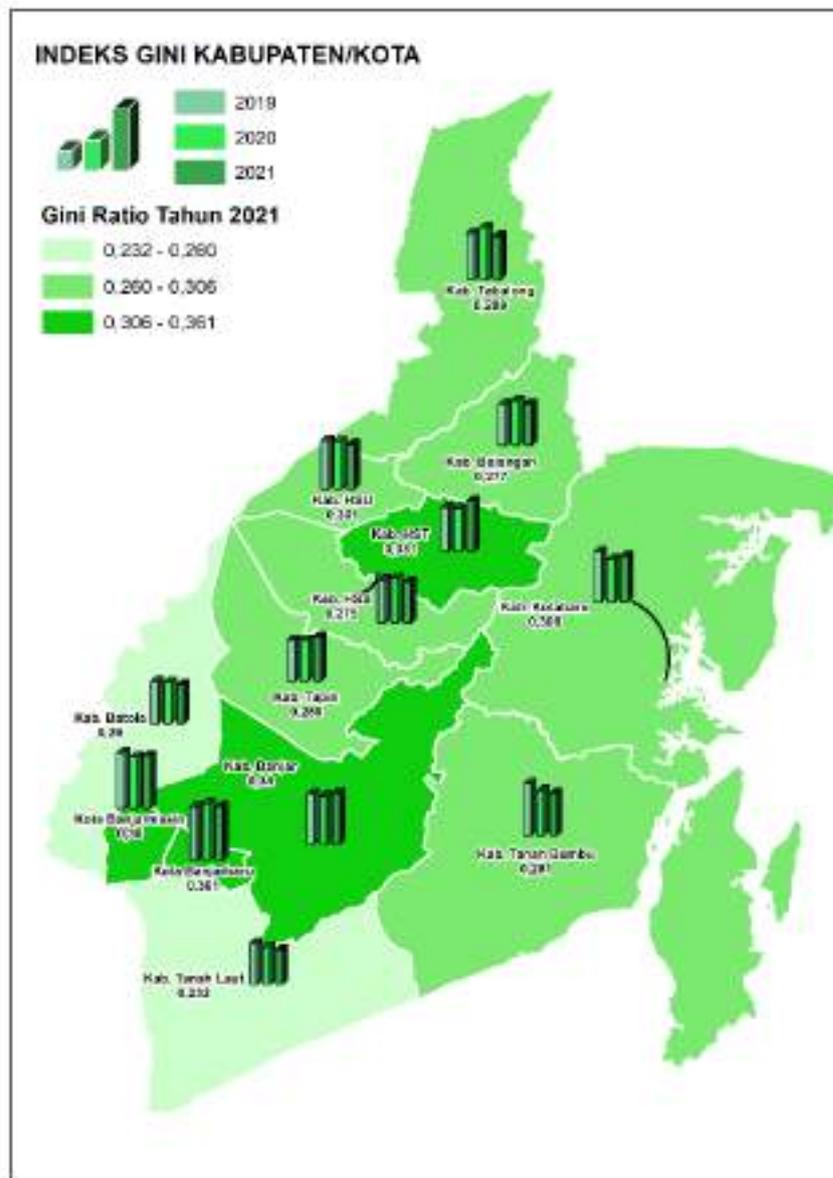
**Gambar 5.10** Analisis Kuadran Capaian Indeks Gini dan Laju Perubahan Indeks Gini Kabupaten/Kota

**Tabel 5.9.** Indeks Gini Kabupaten/ Kota Tahun 2020 - 2022

NO.	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	INDEKS GINI			BESAR PERUBAHAN
		2020	2021	2022	
1	KALIMANTAN SELATAN	0,332	0,330	0,317	0,01
2	KAB. BANJAR	0,250	0,232	0,263	-0,03
3	KAB. TAPIN	0,287	0,306	0,331	-0,03
4	KAB. KOTABARU	0,322	0,344	0,300	0,04
5	KOTA BANJARBARU	0,277	0,284	0,289	-0,01
6	KAB. TANAH LAUT	0,274	0,289	0,291	0,00
7	KAB. TANAH BUMBU	0,300	0,275	0,260	0,02
8	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	0,285	0,331	0,228	0,10
9	KOTA BANJARMASIN	0,319	0,378	0,301	0,08
10	KAB. BARITO KUALA	0,346	0,288	0,337	-0,05
11	KAB. BALANGAN	0,300	0,281	0,292	-0,01
12	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	0,298	0,277	0,266	0,01
13	KAB. TABALONG	0,342	0,350	0,330	0,02
14	KAB. HULU SUNGAI UTARA	0,381	0,361	0,341	0,02

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023





Gambar 5.11 Peta Indeks Gini Kabupaten/Kota

### 5.1.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten/kota tahun 2021 dibandingkan capaian tahun 2020, maka capaian IPM kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.





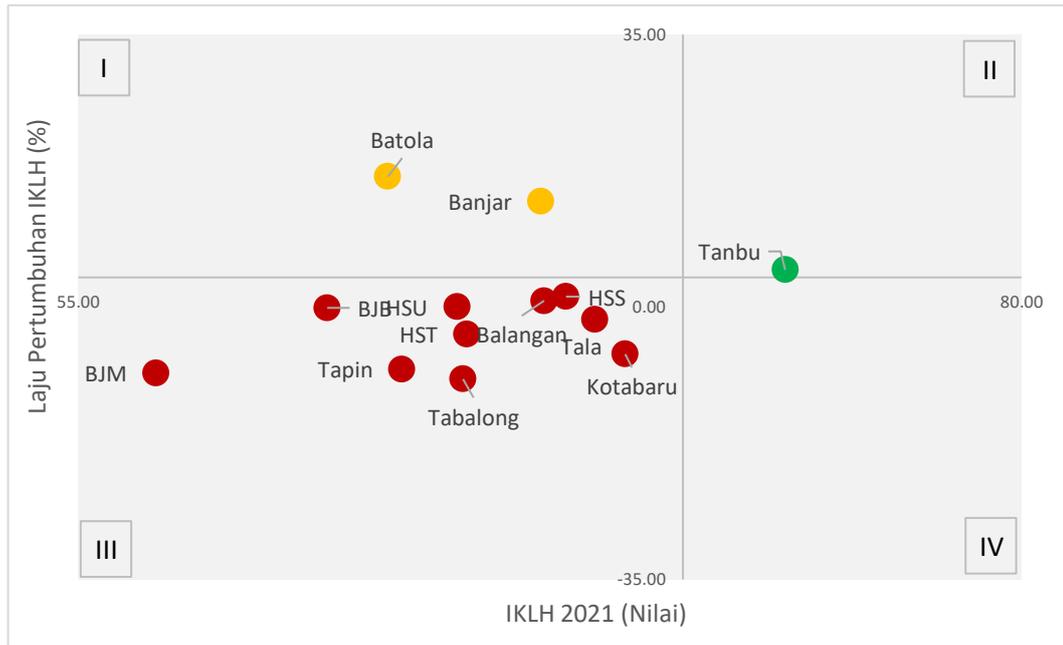
Tabel 5.10. Kategori Capaian IKLH Kabupaten/ Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IKLH <b>LEBIH RENDAH</b> dan Laju Pertumbuhan IKLH <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
II	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IKLH dan Laju Pertumbuhan IKLH <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
III	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IKLH dan Laju Pertumbuhan IKLH <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi
IV	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IKLH <b>LEBIH TINGGI</b> dan Laju Pertumbuhan IKLH <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan-Selatan 2023

1. **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian IKLH lebih rendah dan laju pertumbuhan IKLH lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar.
2. **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian IKLH dan laju pertumbuhan IKLH lebih tinggi dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu
3. **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan capaian IKLH dan laju pertumbuhan IKLH lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Kotabaru.
4. **Kuadran IV.** Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian IKLH lebih tinggi dan laju pertumbuhan IKLH lebih rendah dibanding capaian provinsi.





Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan, Selatan 2023

**Gambar 5.12** Analis Kuadran Capaian IKLH dan Laju Pertumbuhan IKLH Kabupaten/ Kota Tahun 2021-2022

**Tabel 5.11.** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Tahun 2019 - 2021

NO.	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	IKLH			PERTUMBUHAN
		2019	2020	2021	
1	KALIMANTAN SELATAN	61,94	68,43	71,03	3,80
2	KAB. BANJAR	58,06	69,82	68,7	-1,60
3	KAB. TAPIN	80,93	73,99	69,5	-6,07
4	KAB. KOTABARU	72,36	59,25	67,27	13,54
5	KOTA BANJARBARU	57,98	54,14	63,21	16,75
6	KAB. TANAH LAUT	63	69,09	63,58	-7,98
7	KAB. TANAH BUMBU	56,23	67,04	67,93	1,33
8	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	61,46	67,65	65,3	-3,47
9	KOTA BANJARMASIN	n/a	n/a	65,04	n/a
10	KAB. BARITO KUALA	71,1	71,86	65,2	-9,27
11	KAB. BALANGAN	71,79	70,39	73,74	4,76
12	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	61,35	66,81	67,35	0,81
13	KAB. TABALONG	62,87	62,34	57,06	-8,47
14	KAB. HULU SUNGAI UTARA	53,39	61,67	61,6	-0,11

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

### 5.1.7 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada daerah yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).





Pengukuran IDSD Ini bertujuan untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran mengacu kepada *global competitiveness index (GCI) 2019* (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing.

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan keamanan; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian; adopsi TIK yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan Industri 4.0; dan stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, serta tingkat biaya hidup.

Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; pasar tenaga kerja yang mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya iptek.

Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Indeks Daya Saing Daerah diarahkan menjadi data dasar yang dapat digunakan dalam menyusun kebijakan peningkatan daya saing daerah. Tabel berikut merupakan kondisi daya saing daerah berdasarkan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

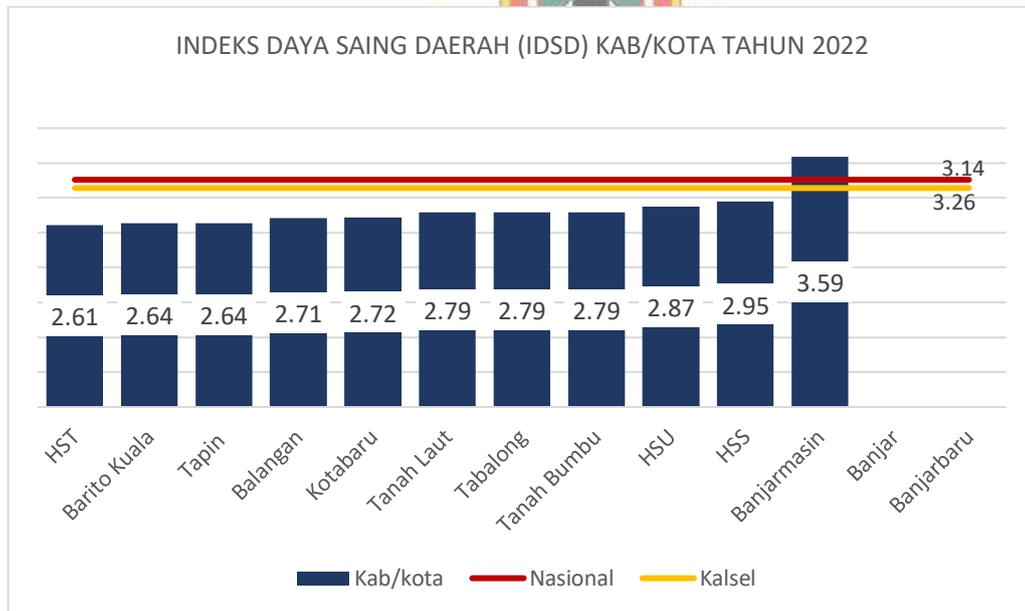




**Tabel 5.12.** Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/ Kota Tahun 2022

KAB/KOTA	Lingkungan Pendukung				Sumber Daya Manusia		Pasar				Ekosistem Inovasi		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
	Institusi	Infrastruktur	Adopsi TIK	Stabilitas Ekonomi Makro	Kesehatan	Keterampilan TK	Pasar Produk	Pasar TK	Sistem Keuangan	Ukuran Pasar	Dinamisme Bisnis	Kapabilitas Inovasi	
Nasional	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,37	2,66	1,31	5,00	2,62	3,26
Kalsel	4,40	2,47	3,09	3,09	3,67	3,66	2,68	3,38	2,44	0,73	5,00	2,19	3,14
Tanah Laut	4,37	1,95	2,83	2,83	3,85	2,98	2,29	2,65	2,65	0,69	5,00	0,97	2,79
Kotabaru	4,10	2,80	2,96	2,96	3,77	2,75	1,37	2,41	2,41	1,17	5,00	0,72	2,72
Banjar		1,70	2,66	2,66	3,62	2,95	3,12			0,79	5,00	1,23	
Barito Kuala	4,49	1,73	3,19	2,51	3,54	2,85	2,78	1,84	1,84	0,39	5,00	0,70	2,64
Tapin	4,20	1,70	3,05	2,67	3,92	2,98	2,27	2,51	2,51	0,43	5,00	0,62	2,64
HSS	4,75	1,82	3,14	2,89	3,54	2,96	5,00	2,04	2,04	0,32	5,00	0,64	2,95
HST	4,14	1,84	2,54	2,36	3,54	3,16	3,32	1,90	1,90	0,33	5,00	0,62	2,61
HSU	4,03	1,54	3,02	2,38	3,38	3,32	4,07	2,25	2,25	0,22	5,00	1,43	2,87
Tabalong	4,52	2,46	2,66	3,18	3,92	3,32	1,78	2,68	2,68	0,98	5,00	0,53	2,79
Tanah Bumbu	4,43	2,47	3,12	3,09	3,85	2,81	1,91	3,11	3,11	1,05	5,00	0,54	2,79
Balangan	4,31	1,82	2,94	3,07	3,69	3,20	1,06	3,22	3,22	0,62	5,00	0,74	2,71
Banjarmasin	4,37	2,25	5,00	2,86	3,92	3,64	4,46	2,38	2,38	1,49	5,00	4,22	3,59
Banjarbaru		2,78	3,76	2,63	4,00	3,85	5,00	2,33	2,33	0,41	5,00	1,65	

Sumber: BRIN. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023



Sumber: BRIN. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 5.13** Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di atas ditunjukkan bahwa Kota Banjarmasin memiliki daya saing daerah tertinggi dari kabupaten lainnya dan lebih baik dari rata-rata Provinsi dan Nasional. Kondisi ini merefleksikan bahwa Pembangunan di perkotaan masih lebih unggul dari daerah



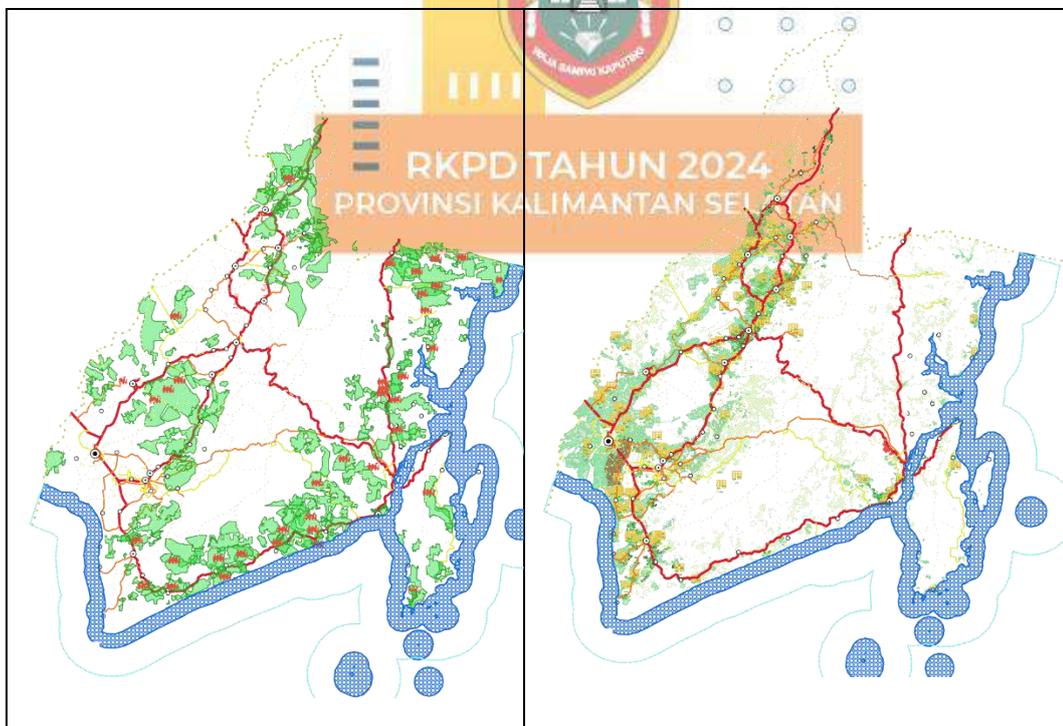


kabupaten, sehingga perlu percepatan pembangunan di kabupaten untuk mewujudkan kesetaraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

## 5.2 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Posisi Kalimantan Selatan yang dilewati oleh jalur ALKI II, serta ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kalimantan Tengah sebagai kawasan *food estate*, sehingga memberikan peluang dan potensi untuk mewujudkan ruang wilayah yang efisien dan berkelanjutan guna mendukung visi Kalimantan Selatan sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN).

Meskipun terbatas, lahan di wilayah Kalimantan Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai areal pertanian, khususnya tanaman pangan dan perkebunan. Wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tabalong merupakan wilayah yang memiliki potensi besar bagi pengembangan pertanian tanaman pangan. Kedepannya Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengembangan sektor pertanian memfokuskan kepada lembaga pengelola, peningkatan kualitas SDM, progres Kawasan, perkuatan teknologi, regulasi dan perijinan serta konektivitas Kawasan.



(a). Peta Perkebunan Sawit & Kayu

(b). Peta Pertanian dan Lumbung Padi

**Gambar 5.14** Peta Potensi Pertanian dan Perkebunan Kalsel

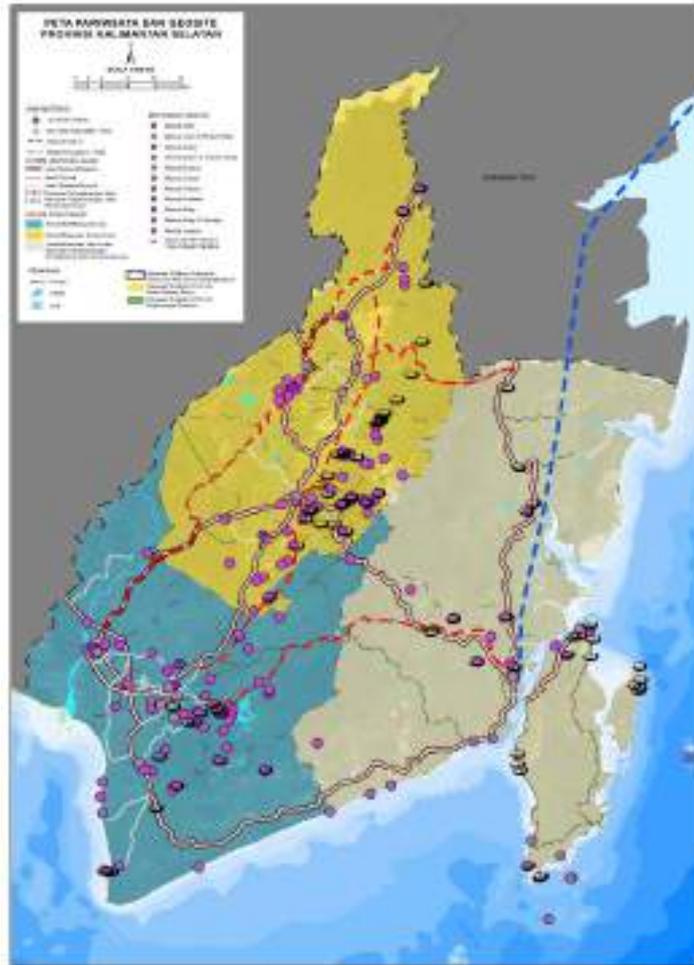




Di sektor industri, Kalimantan Selatan memiliki potensi industri baik yang berbasis sumber daya alam, khususnya industri pengolahan hasil hutan dan hasil pertanian, maupun yang memanfaatkan dan mengandalkan teknologi seperti industri mesin serta industri kimia dasar yang potensial untuk dikembangkan. Pembangunan industri diarahkan terutama untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehubungan dengan itu, pembangunan industri dikembangkan secara bertahap melalui peningkatan keterkaitan industri dengan pertanian dan jasa, sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

Pariwisata juga merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Kalimantan Selatan memiliki potensi wisata yang beragam, baik wisata alam maupun budaya yang dapat dikembangkan secara lebih optimal dengan mempertimbangkan kekayaan alam provinsi yang terdiri atas sungai, hutan, serta latar belakang sejarah dan keanekaragaman seni dan budaya. Pengembangan sektor pariwisata akan mendorong industri ekonomi kreatif dan menarik sektor-sektor lainnya seperti transportasi, akomodasi, dan rumah makan. Pengembangan sektor ini juga dapat mengungkit ekonomi rakyat.





**Gambar 5.15** — Peta Sebaran Destinasi Wisata dan Geosite

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Arah pengembangan infrastruktur Kalimantan Selatan difokuskan kepada optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia, pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota, pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai primer over seperti Bandar Udara, Pelabuhan, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer dan pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri baja dan industri semen.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sangat penting untuk menyelaraskan pembangunan di daerah. Kualitas sumber daya





manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin, sehingga rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Arah pengembangan SDM Kalimantan Selatan difokuskan kepada SDM yang mendukung dalam sektor prioritas dalam pengembangan ekonomi daerah Kalimantan Selatan yaitu industri, pertanian dan pangan, pariwisata, dan digital.

### 5.2.1 Arah Kebijakan Kewilayahan

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, pemerintah daerah mengembangkan dan memperkuat infrastruktur ekonomi pada enam Kawasan pusat pertumbuhan ekonomi provinsi. Keenam kawasan tersebut terbagi menjadi:

Tabel 5.13. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Tema Kawasan	Kab/ Kota (Lokasi)	Arah Kebijakan Kewilayahan	Arah Pengembangan
1	Kawasan pendukung sekitar Ibu Kota Nusantara	Kawasan Anam (Kab. Tabalong, Kab. Balangan, Kab. HSU, Kab. HST, Kab. HSS, Kab. Tapin), dan Sebagian Kab. Kotabaru (Cantung Sengayam)  Kawasan Industri Batulicin dan  Kawasan Industri Jorong		1. Melengkapi fasilitas pendukung 2. Mengembangkan infrastruktur strategis 3. Mengembangkan perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata 4. Investasi pada modal
2	Kawasan pusat perdagangan	Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Tanah Laut (Banjarbakula)	<b>Kota Banjarmasin</b> sbg kawasan pusat perdagangan dan jasa;  <b>Kabupaten Barito Kuala</b> dan <b>Kabupaten Banjar</b> sebagai kawasan unggulan pangan.	





No	Tema Kawasan	Kab/ Kota (Lokasi)	Arah Kebijakan Kewilayah	Arah Pengembangan
3	Kawasan penyangga pangan (Kawasan Rawa Batang Banyu)	Kabupaten Barito Kuala, sebagian Kab. Banjar, sebagian Kab. Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagian Kabupaten Tabalong	Peningkatan produksi pangan daerah dimana daerah	
4	Kawasan strategis lingkungan dan pariwisata	Geopark Meratus dan Loksado		
5	Kawasan ekonomi khusus (KEK) Mekar Putih	Kabupaten Kotabaru	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, terutama dalam menunjang percepatan pembangunan ekonomi Ibukota Nusantara	
6	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Wilayah pesisir Kalsel	mendorong Kalimantan Selatan menjadi sentra kelautan dan perikanan terpadu.	

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

RKPD TAHUN 2024  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





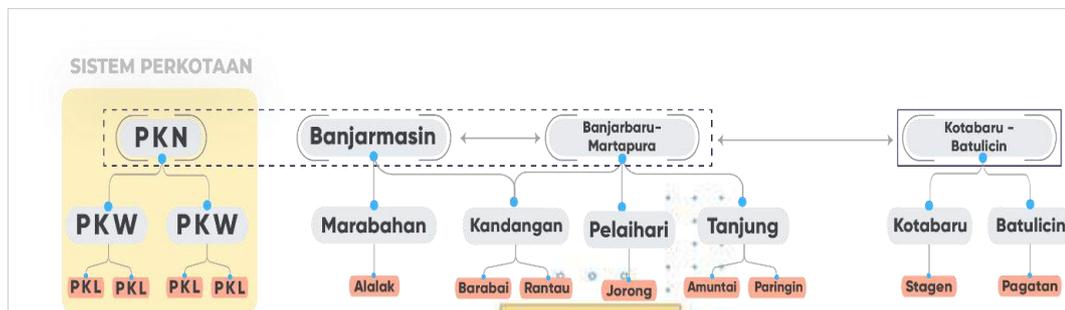
**Gambar 5.16** Peta Zona Kewilayahan Kalimantan Selatan

Dengan memperhatikan distribusi penduduk pada masing-masing wilayah kabupaten/kota, peran kawasan perkotaan yang terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) dibagi menjadi :





1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah provinsi merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah provinsi merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

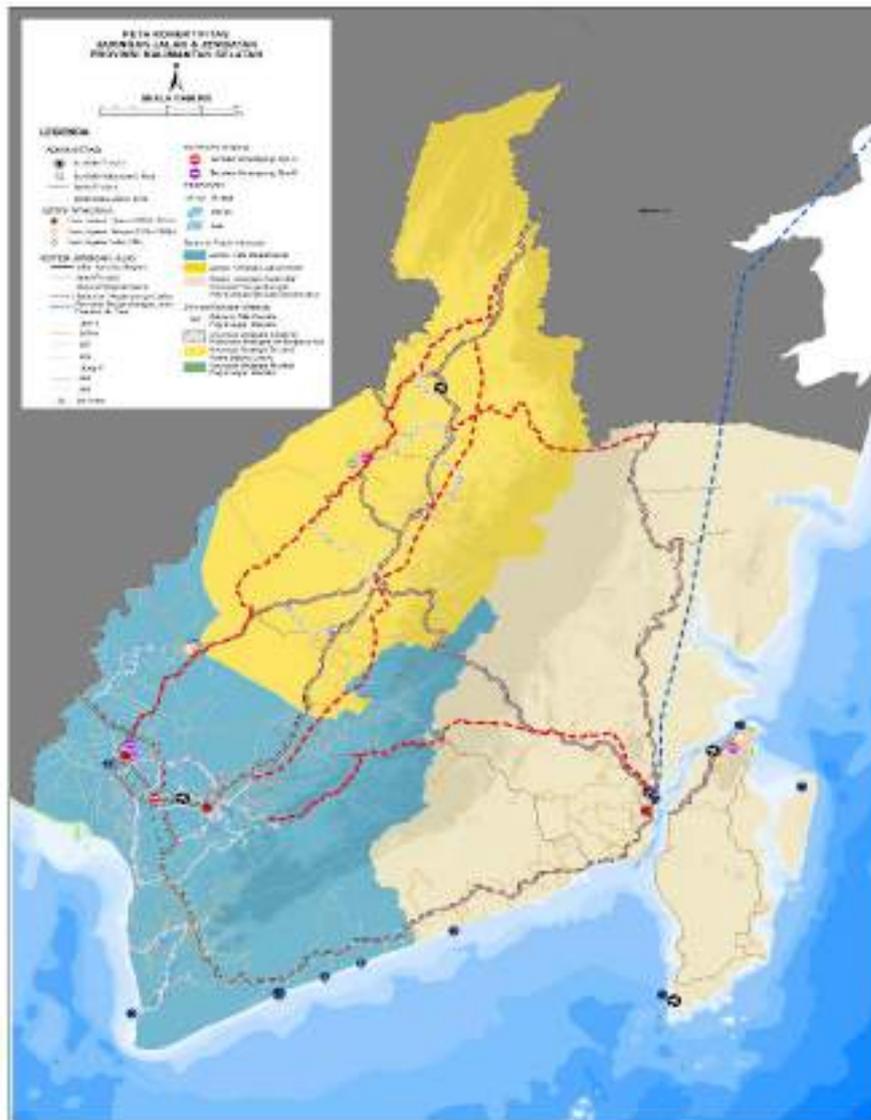


**Gambar 5.17** Diagram Pohon Sistem Perkotaan di Kalimantan Selatan

Kawasan Metropolitan Banjarmasin (Banjarbakula) berperan sebagai pusat di barat daya Kalimantan Selatan, yang fungsinya lebih menjadi gerbang dari aktifitas nasional. Lalu, akan ada jaringan jalan yang ditingkatkan dan juga dibangun sebagai koneksi antar pusat baru antara Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Masing-masing jalur ini dibentuk agar ada konektivitas untuk distribusi barang logistik bagi IKN dan Food Estate. Dengan koneksi antara Banjarbakula, Kandangan dan Batulicin, maka jaringan jalannya akan berbentuk seperti kupu-kupu yang akan menyatukan semua wilayah di Kalimantan Selatan.

Kandangan yang berdekatan dengan Tanjung, Amuntai, Rantau dan Marabahan fungsinya akan ditingkatkan lagi menjadi titik pusat bergerak jaringan jalan yang nantinya akan terkoneksi menuju Food Estate dan IKN. Wilayah ini nantinya akan menjadi pusat baru yang lebih berkonsep pada alam karena posisinya yang berada pada jalur sungai dan rawa sehingga tidak memungkinkan untuk direncanakan sebagai kawasan yang padat bangunan dan penduduk dan berperan sebagai pusat di utara Kalimantan Selatan bergabung dengan Tanjung.





**Gambar 5.18** Peta Konektifitas Kalimantan Selatan

Pelabuhan di Kotabaru akan difungsikan untuk menangkap arus barang masuk maupun keluar Kalsel berupa barangbarang dari pasar global sedangkan yang di Banjarmasin hanya akan difokuskan sebagai tempat menangkap arus barang nasional. Lalu dengan adanya KEK Mekar Putih, maka wilayah ini berpotensi untuk menjadi kawasan baru yang difungsikan menjadi maritime center dan gerbang masuk menuju Pulau Kalimantan maupun yang ingin ke IKN. Mekar Putih, Kotabaru dan Batulicin akan dikonsepskan menjadi Kota Sedang karena dari sistem perkotaan dan jumlah penduduknya sudah memenuhi kriteria. Kedua wilayah ini jika di gabungkan akan lebih fokus pada fungsinya sebagai pusat aktifitas ekonomi dan logistik karena posisi geografisnya yang berada di dekat ALKI II yang berbasis kemaritiman. Selain itu kawasan ini juga bisa menangkap





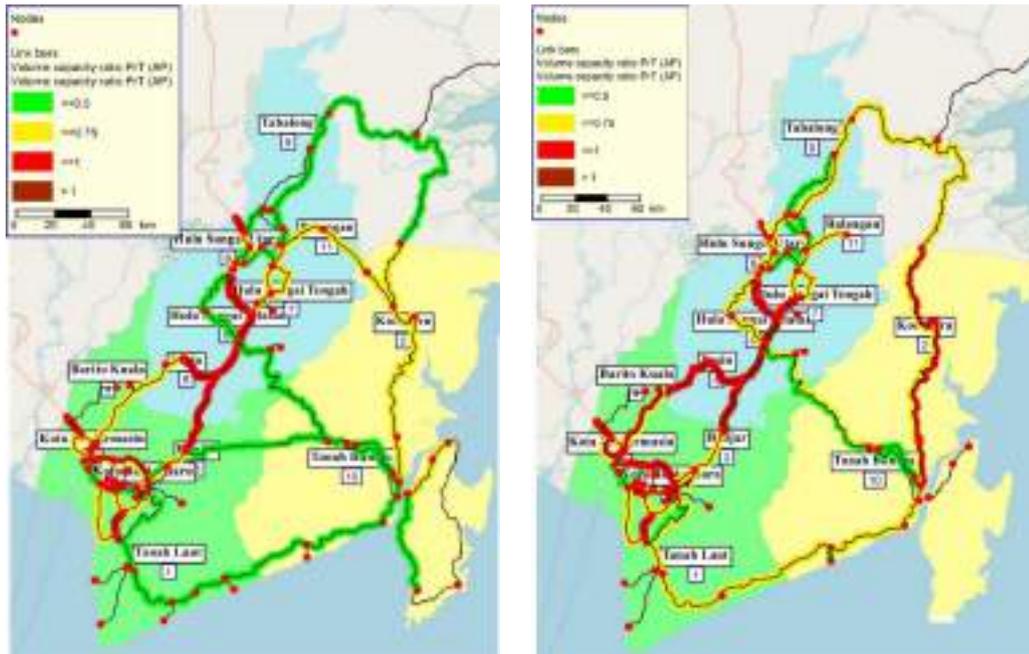
arus barang baik masuk-keluar dari jalur internasional. Maka perannya nanti akan berbeda dengan Banjarmasin (nasional) sedangkan Kotabaru (internasional). Tapi dikarenakan posisi geografisnya yang memiliki cagar alam yaitu Terumbu Karang dan bukan berada di laut dalam, maka harus ada cara agar kapal-kapal besar tidak harus berlabuh di Kotabaru maupun Batulicin. Agar distribusi barang dari Kotabaru ini masuk dan terkoneksi dengan jaringan jalan di Kalimantan Selatan, memungkinkan dibangun jembatan untuk membuat aktifitas di kedua wilayah ini menjadi satu kesatuan.



**Gambar 5.19** Model Kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan

Pengembangan wilayah dengan saling melengkapi kebutuhan antar wilayah dari keunggulan potensi masing-masing wilayah, hasil industri pada Batulicin dan Kotabaru tidak hanya diarahkan pada Ibu Kota Nusantara tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Banjarbakula dan Banua Anam. Begitupun pada Zona Banjarbakula yang merupakan Kota Pusat Perdagangan dan Jasa diharapkan menjadi pasar bagi industri kecil dan menengah dari Wilayah Banua Anam. Wilayah Banua Anam merupakan penopang pangan untuk wilayah Banjarbakula dan Wilayah Industri Batulicin /Kotabaru.





(a). V/C Ratio Jalan Tahun 2024

(b) V/C Ratio Jalan Tahun 2029

**Gambar 5.20** Peta Proyeksi Jalan Nasional dan Provinsi Tahun 2024

Peningkatan jumlah kendaraan yang tentu berdampak dapat mengurangi waktu tempuh dikarenakan perbandingan volume dengan kapasitas meningkat terutama jaringan jalan di Kawasan Strategis Metropolitan Banjarbakula dan lintas penghubung Banjarmasin-Martapura-Rantau-Kandangan-Barabai-Amuntai. berdasarkan hasil kajian pengembangan jaringan jalan provinsi kalimantan selatan, di estimasikan perbandingan volume dengan kapasitas jaringan jalan nasional A.Yani akan meningkat, sehingga arus lalu lintas Jaringan Jalan Lintas Barat menjadi meningkat, dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara akan memicu peningkatan perbandingan volume dengan kapasitas di zona Kawasan Industri dan Pesisir.

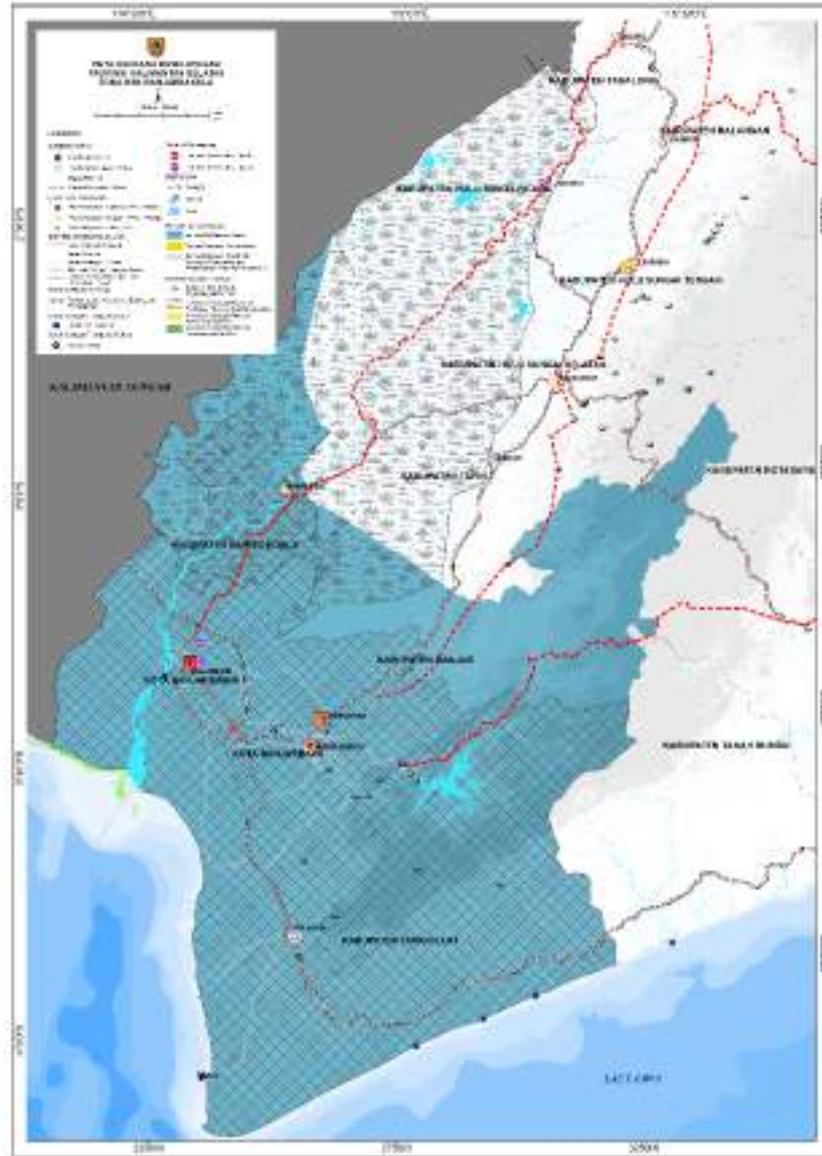
Hasil analisa proyeksi pengembangan ruas jalan nasional dan provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan (2024 : Do-Something). Pengembangan jaringan jalan baru dan pelebaran jalan serta perubahan status jalan di tahun 2024 akan berdampak menurunkan perbandingan volume dengan kapasitas  $VCR = 17,92\%$  (tidak melakukan apapun) menjadi  $VCR = 5,66\%$  (melakukan sesuai), mengalami penurunan sangat signifikan (-68,42%). Pengembangan jaringan jalan baru dan pelebaran jalan serta perubahan status yang di kerjakan sampai tahun 2029 akan berdampak menurunkan  $VCR = 22,64\%$  (do-nothing) menjadi  $VCR = 3,77\%$  (do-something), mengalami penurunan sangat signifikan (-83,34%).





### 5.2.2 Arah Kebijakan Wilayah Banjarbakula

Zona Banjarbakula yang merupakan pusat perdagangan dan jasa, dimana wilayah inti adalah Banjarbaru dan Banjarmasin, sedangkan Kawasan penyangga terdiri dari Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 5.21 Peta Zona 1- Banjarbakula

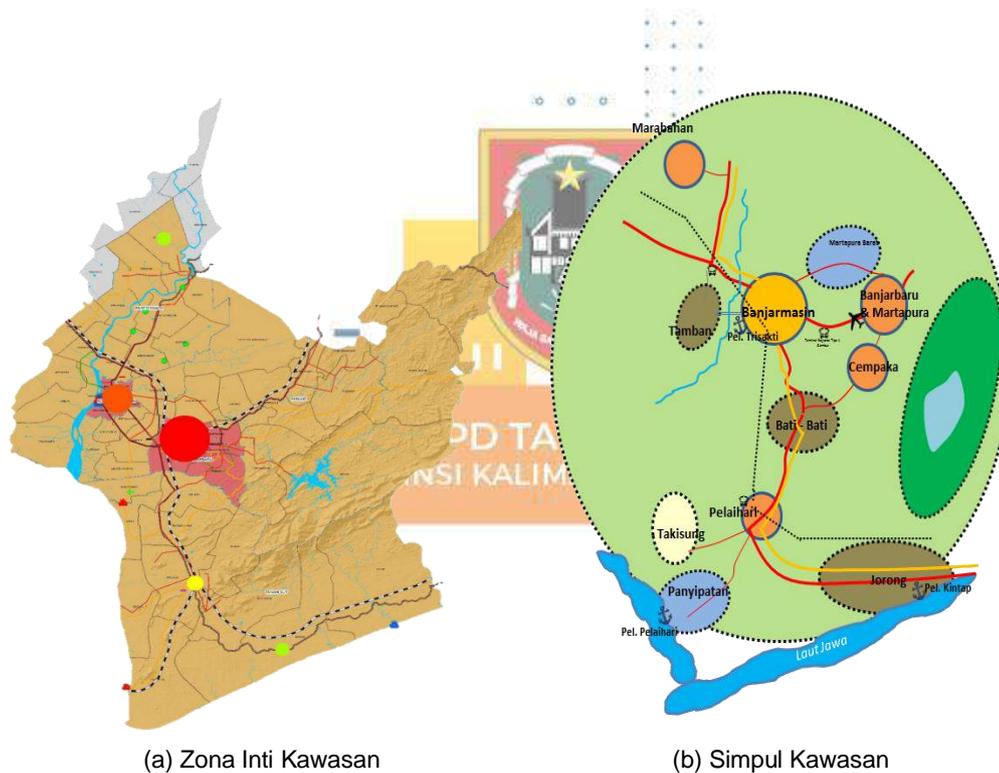
Kota Banjarmasin yang dijadikan sebagai pusat perbankan, perdagangan dan jasa, pusat pendidikan tinggi, pusat kesehatan, wisata budaya (pasar terapung) dan Kawasan Industri Mantuil yang simpul konektivitasnya pelabuhan Trisakti. Kota Banjarbaru yang merupakan ibu kota provinsi merupakan wilayah pusat pemerintahan, pusat perdagangandan jasa, perhotelan, persampahan,





Ekowisata & Wisata Geopark, Aero City, Sport City, dan sebagai pintu gerbang Kalimantan Selatan melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Kawasan penyangga banjarbakula Kabupaten Barito Kuala diperuntukan sebagai pusat kegiatan pertanian dan perkebunan, kawasan pendukung ketahanan pangan kabupaten ini merupakan kawasan produksi beras terbesar di Kalimantan Selatan, dan juga pusat pendidikan tinggi untuk wilayah (hinterland) wilayah Barito Kuala di sekitar kawasan inti. Kabupaten Banjar dengan potensi kawasan produksi beras terbesar kedua di Kalimantan Selatan yang pusat kegiatan pertanian dan perikanan dan juga Ekowisata & Wisata Geopark. Kabupaten Tanah Laut sebagai pusat pertanian, perikanan, peternakan, agribisnis, dan kawasan industri jorong yang didukung simpul konektifitas pelabuhan Swarangan.



**Gambar 5.22** Peta Pengebangan Kewilayahan Zona Banjarbakula

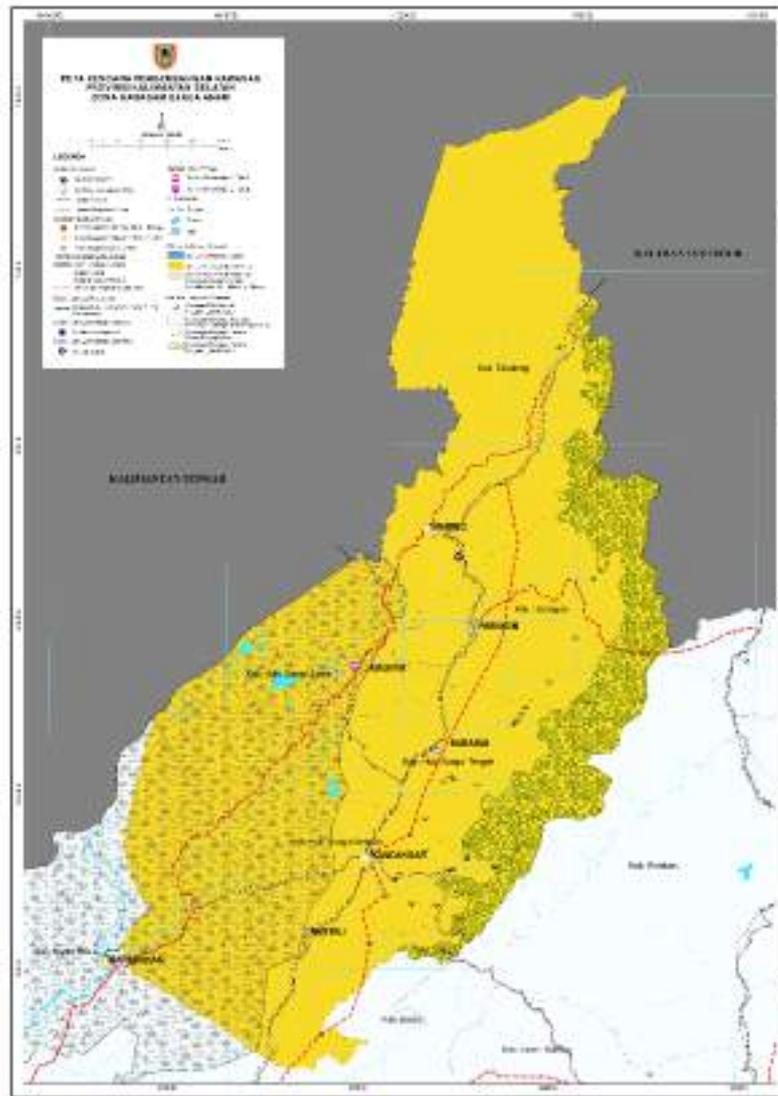
### 5.2.3 Arah Kebijakan Banua Anam

Wilayah Banua Anam merupakan wilayah ketahanan pangan dan kerajinan dengan potensi perkebunan terutama sayuran dan buah - buahan yang dapat menopang wilayah banjarbakukan dan ibukota nusantara, potensi perikanan air tawar yang besar yang perlu dikembangkan kedalam ikan kemasan dan albumin





ikan gabus agar mampu bersaing masuk ke pasar Ibu Kota Nusantara dan masuk ke pasar Internasional. Industri Perkebunan Karet yang dihasilkan wilayah ini diharapkan mampu menyediakan kebutuhan di zona industri Batulicin dan Kotabaru, intuk itu perlu adanya jalur konektifitas yang menghubungkan wilayah gerbang ibukota seperti Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balanga memiliki jalur distribusi ke wilayah Industri dan Pesisir.



**Gambar 5.23** Peta Zona 2 - Wilayah Banua Anam



#### 5.2.4 Arah Kebijakan Wilayah Pesisir dan Industri

Wilayah industry dan pesisir merupakan Kawasan hilirisasi hasil tambang dan perkebunan, pusat pengembangan perikanan air laut, geosite dan wisata pantai dan laut. Wilayah ini dengan potensi pelabuhan internasional dan laut dalam setara berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) potnesi ini , diharapkan menjadikan wilayah ini penyedia bahan baku industry besar dan menengah,



**Gambar 5.24** Peta Zona 3 - Wilayah Pesisir dan Industri

Dengan potensi mangrove dan terumbu karang serta ikan laut yang kaya diharapkan menjadi wilayah perikanan terpadu yang terkoneksi dengan wisata pesisir dan pulau-pulau kecil. Agar dapat menjadikan potensi alam berkelanjutan dan ramah lingkungan. Peningkatan dan pelestarian mangrove merupakan kegiatan strategis dalam pencegahan erosi dan penrusakan pantai agar dapat menjaga ekosistem air dan perikanan di pesisir.





### 5.3 Arah Kebijakan Kabupaten/Kota

#### 5.3.1 Kota Banjarmasin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kota Banjarmasin tahun 2023, antara lain:

- A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia
  1. Program-program penanggulangan kemiskinan
  2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
- B. Aspek Pembangunan Ekonomi
  1. Sebagai Kota yang berfokus pada kegiatan penduduknya (Program kegiatan diarahkan ke penataan permukiman, sarana dan prasarana transportasi, perdagangan dan jasa dan pusat ekonomi).
  2. Pengembangan industri pengolahan.
  3. Pengembangan dan pembinaan destinasi wisata;
  4. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi UKM dan pembinaan wirausaha baru;
  5. Dukungan terhadap pembangunan pusat distribusi regional dan pasar rakyat.
- C. Aspek Pengembangan Infrastruktur
  1. Pengembangan pasar induk dan pusat-pusat distribusi regional;
  2. Pengembangan kawasan industri dan pelabuhan utama;
- D. Aspek Pengembangan Investasi

Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada

#### 5.3.2 Kota Banjarbaru

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kota Banjarbaru tahun 2024, antara lain:

- A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia
  1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pembangunan dan rehabilitasi SMK pendukung pariwisata dan penerbangan
  2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.





B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pengembangan wisata budaya Banjar, pendulangan intan, wisata buatan dan pelaksanaan festival budaya.
2. Pada bidang koperasi, UMKM dengan pembinaan dan pelatihan menjadi wirausaha baru.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Sebagai bagian dari Metropolitan Banjarbakula dan ibukota provinsi, fungsi dari kota berfokus pada kegiatan permukiman, sarana dan prasarana, transportasi, perdagangan dan jasa dan perkantoran pemerintah.
2. Untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan melanjutkan program/kegiatan SPAM regional dan TPA regional Banjarbakula

D. Aspek Pengembangan Investasi

Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.

### 5.3.3 Kabupaten Banjar

Arah kebijakan provinsi untuk perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Banjar tahun 2024, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pariwisata; dan program kejar paket B-C.
2. Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan program/kegiatan pembangunan masyarakat desa; dan pemberdayaan kelompok tani.
3. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang koperasi UMKM dan perindustrian dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil hasil hutan.
2. Pada bidang pertanian dengan pengembangan kawasan lahan basah komoditas unggulan padi dan hortikultura, pengembangan kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tadah hujan, sentra produksi pangan dan sentra agribisnis hortikultura.





3. Pada bidang kehutanan dengan program/kegiatan penyediaan bibit pohon, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya hutan; dan pelaksanaan perhutanan sosial.
  4. Pengembangan sentra industri dan perdagangan batu permata
- C. Aspek Pengembangan Infrastruktur
1. Pada bidang pekerjaan umum dan pertanahan dengan program/kegiatan penyelesaian TORA; dan sertifikasi lahan hutan.
  2. Pengembangan daerah irigasi untuk mendukung ketahanan pangan Provinsi dan Nasional dan peningkatan produksi beras lokal berkualitas
- D. Aspek Pengembangan Investasi
- Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.

#### 5.3.4 Kabupaten Tanah Laut

Arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kab. Tanah Laut Tahun 2024, sebagai berikut :

- A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia
1. Bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian.
  2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
- B. Aspek Pembangunan Ekonomi
1. Industri pengolahan, dengan dukungan pada KI Jorong yang telah ditetapkan sebagai proyek prioritas pemerintah;
  2. Pengadaan listrik dan gas, dengan dukungan pembangunan PLTU asam-asam unit 5, 6 dan 7; dan dukungan pembangunan PLT Bayu.
  3. Bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
  4. Bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan jumlah ternak bibit; pemantapan pelaksanaan IB; dan pengendalian pemotongan ternak produktif.
  5. Bidang kelautan dan perikanan dengan program/kegiatan peningkatan perikanan tangkap; dan pembangunan unit pengolahan ikan.





- C. Aspek Pengembangan Infrastruktur
  - 1. Pengembangan Infrastruktur Energi Terbarukan/Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
  - 2. Pengembangan Destinasi wisata pesisir dan Mengrove, serta infrastruktur pengaman pantai;
- D. Aspek Pengembangan Investasi
  - Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada

### 5.3.5 Kabupaten Tanah Bumbu

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kab. Tanah Bumbu tahun 2024, antara lain:

- A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia
  - 1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi (SMK dan politeknik).
  - 2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
- B. Aspek Pembangunan Ekonomi
  - 1. Pada bidang perindustrian dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri batulicin.
  - 2. Pengembangan kawasan budidaya pertanian dan perkebunan.
  - 3. Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan kelautan.
- C. Aspek Pengembangan Infrastruktur
  - 1. Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan program/kegiatan pembangunan jalan bebas hambatan Batulicin – Banjarbaru;
  - 2. Pembangunan jembatan penghubung pulau Kalimantan dengan pulau laut; dan pembangunan bendungan kusan;
  - 3. Untuk bidang perhubungan dengan dukungan pengembangan bandara bersujud; dan dukungan pengembangan pelabuhan
  - 4. Pengembangan Destinasi wisata pesisir dan Mengrove, serta infrastruktur pengaman pantai.
- D. Aspek Pengembangan Investasi
  - Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.





### 5.3.6 Kabupaten Kotabaru

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kab. Kotabaru Tahun 2024 sebagai berikut:

- A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia
  - Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
- B. Aspek Pembangunan Ekonomi
  1. Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan mengembangkan Sentra Kelautan Terpadu sebagai upaya peningkatan pendapatan nelayan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian secara luas;
  2. Bidang industri pengolahan, dengan mendukung pengembangan KEK Mekar Putih;
- C. Aspek Pengembangan Infrastruktur
  1. Pengembangan Industri di dalam Kawasan Ekonomi khusus dan Pelabuhan Utama untuk mendukung distribusi hasil industry;
  2. Peningkatan Jalan akses menuju KEK Mekarputih, Destiniasi Wisata Teluk Tamiang dan Pusat Perikanan Terpadu serta infrastruktur pengamanan pantai.
- D. Aspek Pengembangan Investasi
  - Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.

### 5.3.7 Kabupaten Tapin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Tapin tahun 2024, antara lain:

- A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia
  1. Pendidikan vokasi/SMK pertanian
  2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
- B. Aspek Pembangunan Ekonomi
  1. Pada bidang kelautan dan perikanan dengan penyediaan paket budidaya, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya; dan pengembangan budidaya ikan lokal.
  2. Pengembangan kawasan industri kecil pengolahan pertanian untuk bidang koperasi UKM dan perindustrian.





3. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
  4. Pengembangan pada kawasan budidaya perkebunan kelapa sawit, kopi, lada dan karet serta mengembangkan kawasan budidaya peternakan unggas, kambing dan sapi.
- C. Aspek Pengembangan Infrastruktur
- Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan dukungan Pengembangan daerah irigasi bendungan tapin; dan pembangunan jalan lingkaran barat Kalsel.
- D. Aspek Pengembangan Investasi
- Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.

### 5.3.8 Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024, antara lain:

- A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia
- Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
- B. Aspek Pembangunan Ekonomi
1. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pelaksanaan festival bamboo rafting; pengembangan akomodasi pendukung pariwisata; penyiapan daya Tarik wisata; dan pengusulan taman nasional loksado.
  2. Pada bidang koperasi UKM dan perdagangan dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pendukung pariwisata.
  3. Pada bidang kehutanan dengan pengembangan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, sentra penghasil hutan kayu, sentra penghasil hutan non kayu dan kawasan hutan penunjang industri pariwisata.
- C. Aspek Pengembangan Infrastruktur
- Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan jalan lingkaran barat; dan peningkatan jalan kandang-lumpang-batulicin.
- D. Aspek Pengembangan Investasi
- Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.





### 5.3.9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tahun 2024, antara lain:

- A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia
  1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian.
  2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
- B. Aspek Pembangunan Ekonomi
  1. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
  2. Pada bidang koperasi UKM dan perindustrian yaitu dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pengolahan pertanian.
  3. Pada bidang kehutanan dengan pengembangan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, sentra penghasil hutan kayu dan kawasan hutan penunjang industri pariwisata
- C. Aspek Pengembangan Infrastruktur
  1. Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan bendungan batang alai; dan pembangunan pengendali banjir.
  2. Pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan program/kegiatan perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan konservasi cadangan SDA dan LH.
- D. Aspek Pengembangan Investasi

Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.

### 5.3.10 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Arah Kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun 2024, antara lain:

- A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia
  1. Pada bidang kesehatan dengan program/kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; penyuluhan masyarakat pola hidup sehat; pelayanan





kesehatan inklusi, peningkatan fasilitas kesehatan dasar, penurunan angka stunting dan pencegahan pernikahan usia dini.

2. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian; dan program kejar paket b-c.
3. Pada bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program/kegiatan pengentasan kemiskinan dan darah tertinggal.
4. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan jumlah ternak bibit; peningkatan produksi daging unggas dan petelur; serta pengendalian pemotongan ternak produktif.
2. Pada bidang kelautan dan perikanan dengan program/kegiatan penyediaan paket budidaya, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya; pengembangan budidaya ikan lokal papuyu dan haruan.
3. Pada bidang koperasi UKM dan perindustrian yaitu dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pengolahan peternakan dan perikanan.
4. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
5. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pengembangan ecotourism swimming buffalo dan orang utan.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

Pada bidang Pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan jalan lingkar barat Kalsel.

D. Aspek Pengembangan Investasi

Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.

### 5.3.11 Kabupaten Balangan

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi di Kabupaten Balangan pada tahun 2024, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia





1. Bidang pendidikan dan tenaga kerja dengan pendidikan vokasi/SMK pertanian dan program kejar paket B-C.
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.
2. Pada bidang pertanian dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan rehabilitasi jalan dan jembatan Pada bidang Pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan jalan lingkar barat Kalsel.

D. Aspek Pengembangan Investasi

Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.

### 5.3.12 Kabupaten Tabalong

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Tabalong pada tahun 2024, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Bidang pendidikan dan kebudayaan melalui peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi (SMK dan politeknik).
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada Bidang perindustrian dengan mengembangkan kawasan industri Tabalong.
2. Pengembangan kawasan budidaya perkebunan, pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.
3. Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan peternakan.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur





1. Bidang perhubungan dengan dukungan pembangunan jalur kereta api dan dukungan pengembangan bandara Warukin;
2. Bidang Pekerjaan Umum dengan pembangunan jalan lingkaran barat, jalan akses Kalsel - Kalteng dan jalur distribusi pusat perikanan ke IKN;
3. Pengembangan industri pengolahan hasil tambangan dan perkebunan.

D. Aspek Pengembangan Investasi

Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.

**5.3.13 Kabupaten Barito Kuala**

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kab. Barito Kuala tahun 2024, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian/perkebunan.
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman; dan pembinaan pengembangan mekanisasi pertanian.
2. Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, industri pengolahan hasil hutan, perabot dan kayu.
3. Pada bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan program/kegiatan dukungan pengembangan jalan lingkaran barat kalsel; dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
2. Peningkatan Infrastruktur Daerah Irigasi Rawa dan Irigasi Permukaan;
3. Peningkatan industri pengolahan hasil pertanian;

D. Aspek Pengembangan Investasi

Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.





Tabel 5.14. Kinerja Makro Kabupaten/Kota Tahun 2021 Dan Target Kinerja Tahun 2022-2024

NO.	PROVINSI / KAB/ KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)				TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)					PERTUMBUHAN EKONOMI				
		CAP. 2021	CAP. 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	CAP. 2021	CAP. 2022	TARGET 2023	TARGET 2024 (LOW)	TARGET 2024 (HIGH)	CAP. 2021	CAP. 2022	TARGET 2023	TARGET 2024 (LOW)	TARGET 2024 (HIGH)
1	KALIMANTAN SELATAN	71,28	71,84	72,95	72,65	4,95	4,74	4,22		4,59	3,48	5,11	4,50–5,20	4,61	5,01
2	KAB. TANAH LAUT	69,87	70,35	70,4 - 70,72	70,80	3,52	4,17	3,55	3,25	3,45	3,47	5,12	4,50 - 5,00	4,60	5,00
3	KAB. KOTABARU	69,13	69,74	69,82	71,14	5,57	6,70	4,84	4,45	4,65	3,36	4,58	4,70-5,10	4,80	5,20
4	KAB. BANJAR	69,89	70,72	71,18	71,63	3,98	2,72	2,69	2,46	2,66	3,21	4,48	4,29 - 5,73	4,92	6,05
5	KAB. BARITO KUALA	66,64	67,37	71,34	72,42	3,22	3,63	3,26 - 3,51	3,01	3,26	1,79	3,59	5,00 - 5,50	5,25	5,75
6	KAB. TAPIN	70,31	71,02	71,2 - 72,53	71,40	4,96	4,15	4,00 - 3,35	3,94	4,05	3,41	4,91	4,50	4,76	4,96
7	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	69,21	69,76	69,90-70,10	70,96	2,44	2,29	2,15 - 2,10	2,00	2,10	4,19	4,02	4,75-5,50	4,75	5,50
8	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	69,05	69,70	70,60-70,93	71,20	3,76	3,35	3,60	3,10	3,30	3,01	5,30*	4,50 - 5,00	4,50	5,00
9	KAB. HULU SUNGAI UTARA	66,12	66,84	67,56	68,20	4,80	4,64	4,50	4,00	4,20	3,23	4,09	4,05	4,90	5,05
10	KAB. TABALONG	72,60	73,13	74,33	75,07	3,43	4,46	3,0-3,4	2,85	3,05	3,28	5,30	4,00	4,00	4,50
11	KAB. TANAH BUMBU	71,00	71,79	72,21-72,57	72,58	6,83	6,89	5,87–5,66	5,54	5,68	4,23	5,45	4,51–5,00	5,86	6,32
12	KAB. BALANGAN	69,11	69,73	70,16	70,61	2,44	3,98	2,40	2,17	2,37	3,26	5,24	3,30	5,40	6,00
13	KOTA BANJARMASIN	77,57	77,97	78,10-78,70	78,40	8,47	6,96	6,21-8,44	5,64	7,36	3,41	5,69	4,50-5,00	5,00	5,75
14	KOTA BANJARBARU	79,10	79,68	79,50	79,79 - 80,05	5,70	5,47	5,09	5,20	5,40	3,32	7,93	4,50	5,35	6,20





Lanjutan Tabel 5.14 Kinerja Makro Kabupaten/Kota Tahun 2021 Dan Target Kinerja Tahun 2022-2024

NO.	PROVINSI / KAB/ KOTA	TINGKAT KEMISKINAN				INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				GINI RASIO			
		CAP. 2021	CAP. 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	CAP. 2021	CAP. 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	CAP. 2021	CAP. 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
1	KALIMANTAN SELATAN	4,56	4,61	4,60 -4,40	4,40	71,03	71,92	70,90	71,22	0,325	0,310	0,320	0,320
2	KAB. TANAH LAUT	4,57	3,86	3,55	3,45	68,70	67,78	68,47	68,57	0,232	0,263	0,230	0,229
3	KAB. KOTABARU	4,26	4,30	4,15	4,09	69,50	72,20	74,00	67,60	0,306	0,330	0,290	0,281
4	KAB. BANJAR	3,04	2,79	2,72	2,70	67,27	66,03	66,50	62,58	0,340	0,300	0,299	0,298
5	KAB. BARITO KUALA	5,11	4,75	4,68	4,45	63,21	63,41	62,66	63,05	0,260	0,289	0,270	0,220-0,250
6	KAB. TAPIN	3,60	3,60	3,0 - 3,20	3,60	63,58	65,25	64,92	65,04	0,289	0,291	0,280	0,287
7	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	4,84	4,54	4,50-4,25	3,96	67,93	69,23	69,50-70,50	71,49	0,275	0,260	0,258-0,256	0,257-0,255
8	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	6,18	5,92	5,60 - 6,00	5,30	65,30	67,33	64,78	65,16	0,331	0,228	0,298	0,228
9	KAB. HULU SUNGAI UTARA	6,83	6,49	6,15	5,90	65,04	63,12	65,46	63,54	0,378	0,301	0,301	0,300
10	KAB. TABALONG	6,27	5,87	5,4-5,6	5,55	65,20	70,07	71,98	72,00	0,288	0,340	0,288-0,280	0,300
11	KAB. TANAH BUMBU	4,82	4,26	4,18-4,04	4,01-3,86	73,74	70,39	71,46-71,54	72,03	0,281	0,292	0,280	0,280
12	KAB. BALANGAN	6,07	5,83	5,30 - 5,00	5,10	67,35	67,83	68,02	68,48	0,277	0,266	0,287	0,266
13	KOTA BANJARMASIN	4,89	4,74	4,35	4,32	57,06	56,38	58,22	58,46	0,350	0,330	0,310	0,310
14	KOTA BANJARBARU	4,40	4,17	4,20	4,10	61,60	61,83	63,17	59,87	0,361	0,341	0,321	0,301





## BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah berpedoman pada RPJPD Provinsi 2005-2025, memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2024 serta RPJMD 2021-2026. Selain hal tersebut Penyusunan RKP 2024 memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang saat ini dan mempertimbangkan aspek-aspek teknokratik (Holistik, Tematik, Integrasi dan Spasial) dan politis yang antara lain memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, hasil masukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Pemerintah Pusat, masyarakat, dan masukan dari hasil proses perencanaan secara keseluruhan maka direncanakan program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut.

### 6.1 Prioritas Dan Sub Prioritas RKP 2024

Bab Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah ini mencakup program prioritas dan kegiatan prioritas, indikator kinerja serta pagu pendanaan indikatif Tahun 2024. Sesuai tema RKP 2024 **“PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING DAERAH UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF”** maka pada Tahun 2024 ditetapkan 5 Prioritas RKP 2024 dibagi menjadi 25 sub prioritas. Prioritas dan sub prioritas tersebut antara lain:

1. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata  
Dengan Sub Prioritas pada RKP 2024 yaitu:
  - a. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan
  - b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
  - c. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark
  - d. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
  - e. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah
  - f. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing





Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2024 yaitu:

- a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
- b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
- c. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
- d. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
- e. Pengendalian Prevalensi Stunting
- f. Penurunan Angka Pernikahan Anak
- g. Peningkatan Prestasi Olahraga
- h. Pengembangan Budaya Daerah

3. MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2024 yaitu:

- a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
- c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN

4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG FOKUS PADA PELAYANAN PUBLIK

Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2024 yaitu:

- a. Penguatan Reformasi Birokrasi
- b. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
- c. Pelaksanaan Pilkada Serentak
- d. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- e. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
- f. Pengembangan Satu Data Kalsel

5. MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN BENCANA

Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2024 yaitu:

- a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- b. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

Berdasarkan tema, sub tema, prioritas, dan sub prioritas di atas maka ditetapkan program-program prioritas sebagai berikut:





## **PRIORITAS #1 Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata**

1. Sub Prioritas Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan dengan program prioritas sebagai berikut:
  - a. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
  - b. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
  - c. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
  - d. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
  - e. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
  - f. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
  - g. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
  - h. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
  - i. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
  - j. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
  - k. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
  - l. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
  - m. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
  - n. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
  - o. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
  - p. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
  - q. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
  - r. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
  - s. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
  - t. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
  - u. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
  - v. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN





- w. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
  - x. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
  - y. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
  - z. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
  - aa. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
2. Sub Prioritas Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
  - b. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
  - c. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
  - d. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
  - e. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
  - f. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
  - g. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
3. Sub Prioritas Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
  - b. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
  - c. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
  - d. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
  - e. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
  - f. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
  - g. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
  - h. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
  - i. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
4. Sub Prioritas Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI





- b. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
  - c. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
  - d. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
  - e. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
  - f. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
  - g. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
  - h. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
  - i. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
5. Sub Prioritas Peningkatan Realisasi Investasi Yang Berdampak Ke Daerah dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
  - b. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
  - c. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
  - d. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
  - e. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
6. Sub Prioritas Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
  - b. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
  - c. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
  - d. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
  - e. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
  - f. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
  - g. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

**PRIORITAS #2 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA  
YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING**





1. Sub Prioritas Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah dengan program prioritas sebagai berikut:
  - a. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
  - b. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2. Sub Prioritas Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda dengan program prioritas sebagai berikut:
  - a. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
  - b. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
3. Sub Prioritas Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif dengan program prioritas sebagai berikut:
  - a. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
4. Sub Prioritas Penurunan Penyakit Melalui GERMAS dengan program prioritas sebagai berikut:
  - a. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
  - b. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
  - c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
5. Sub Prioritas Pengendalian Prevalensi Stunting dengan program prioritas sebagai berikut:
  - a. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
  - b. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
  - c. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
  - d. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
  - e. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
  - f. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
  - g. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
  - h. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM





- i. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
  - j. PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
  - k. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
  - l. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
  - m. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
  - n. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
  - o. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
6. Sub Prioritas Penurunan Angka Pernikahan Anak dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
  - b. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
  - c. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
  - d. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
7. Sub Prioritas Peningkatan Prestasi Olahraga dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
8. Sub Prioritas Pengembangan Budaya Daerah dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
  - b. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
  - c. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
  - d. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
  - e. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
  - f. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
  - g. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
  - h. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

**PRIORITAS #3 MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH**





1. Sub Prioritas Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar dengan program prioritas sebagai berikut:
  - a. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
  - b. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
  - c. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
  - d. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
  - e. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
  - f. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
  - g. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)
  - h. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
  - i. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
2. Sub Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah dengan program prioritas sebagai berikut:
  - a. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
  - b. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
  - c. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
  - d. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
  - e. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
3. Sub Prioritas Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu gerbang IKN dengan program prioritas sebagai berikut:
  - a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
  - b. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
  - c. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
  - d. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
  - e. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  - f. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
  - g. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN





- h. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
- i. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
- j. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,  
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

**PRIORITAS #4 MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG  
FOKUS PADA PELAYANAN PUBLIK**

1. Sub Prioritas Penguatan Reformasi Birokrasi dengan program prioritas sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- b. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
- c. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
- d. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
- e. PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
- f. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
- g. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
- h. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
- i. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
- j. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
- k. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- l. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- m. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
- n. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
- o. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
- p. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
- q. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- r. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BLUD)
- s. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

2. Sub Prioritas Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) dengan program prioritas sebagai berikut:





- a. PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
  - b. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
  - c. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
  - d. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
  - e. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3. Sub Prioritas Pelaksanaan Pilkada Serentak dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
  - b. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
  - c. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4. Sub Prioritas Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. Sub Prioritas Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
  - b. PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
6. Sub Prioritas Pengembangan Satu Data Kalsel dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
  - b. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

**PRIORITAS #5 MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN BENCANA**

1. Sub Prioritas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dengan program prioritas sebagai berikut:





- a. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
  - b. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN
  - c. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
  - d. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
  - e. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
  - f. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
  - g. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
  - h. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
  - i. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
  - j. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
  - k. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
  - l. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
  - m. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
  - n. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
  - o. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
  - p. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
  - q. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
  - r. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
2. Sub Prioritas Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)





- b. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
- c. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
- d. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
- e. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- f. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
- g. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
<b>TEMA : Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif</b>				
<b>#01</b>	<b>Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata</b>			<b>2.739.413.814.439</b>
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	3.380.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	8.268.560.004
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.800.000.000
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3.000.000.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	81.690.251.487
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	34.206.120.008
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	4.615.310.625
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	9.205.032.900
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	997.252.900
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	135.349.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.622.906.200
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6.759.728.800
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.712.028.100
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.265.417.800





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU		
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	836.765.600		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	680.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3.685.078.400		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.712.139.500		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.608.022.700		
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	637.728.080		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	375.000.000		
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	216.351.900		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	9.811.633.370		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	148.218.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	670.119.600		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.153.471.600		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	603.761.000		
			01.02	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	354.315.000
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.521.122.700
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.492.854.500					
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.555.220.200					
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	5.148.898.926					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	685.361.060.035					
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2.100.000.000					
01.03	Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	10.283.078.400			
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.424.616.400			
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.920.371.000			





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.282.295.700
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	3.024.458.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28.202.355.699
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.522.720.044.733
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	53.357.613.206
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.090.000.000
	01.04	Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3.685.078.400
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.712.139.500
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.608.022.700
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	680.000.000
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	887.585.300
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.492.854.500
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.712.028.100
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	5.780.337.792
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	19.655.225.475		
	01.05	Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3.685.078.400
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.712.139.500
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.608.022.700
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	680.000.000
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	887.585.300
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.163.635.100
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			763.166.600	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			456.375.900	





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
	01.06	Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	184.980.700
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	3.380.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	8.268.560.004
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	81.690.251.487
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	34.206.120.008
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	9.205.032.900
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.622.906.200
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6.759.728.800
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.292.407.000
#02	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing			2.181.886.339.255
02.01	Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	685.361.060.035	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.169.962.340	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	752.950.400	
02.02	Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	685.361.060.035	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	19.655.225.475	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	6.262.841.200	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	560.210.000	





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
02	02.03	Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	522.978.800
	02.04	Penurunan Penyakit Melalui GERMAS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	129.612.843.577
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	34.083.291.062
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.261.513.200
	02.05	Pengendalian Prevalensi Stunting	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	8.268.560.004
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3.000.000.000
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.712.028.100
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	12.078.522.800
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	35.082.008.801
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.828.127.660
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.928.445.600
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.349.861.246
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	67.635.173.004
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.525.444.800
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	77.030.000.000
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.169.962.340
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	129.612.843.577
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	34.083.291.062
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	789.813.300		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.202.409.300		





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	669.837.400
02.06	Penurunan Angka Pernikahan Anak		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	611.271.800
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.169.962.340
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	772.760.900
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	773.464.200
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	71.814.000
		02.07	Peningkatan Prestasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
02.08	Pengembangan Budaya Daerah		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.803.765.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	9.385.114.800
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	833.948.000
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	5.757.505.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	6.321.310.380
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	8.163.777.092
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	3.050.631.300
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	775.744.900
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	617.223.800
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.547.012.900
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.627.349.200
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	3.500.000.000
#03	<b>Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah</b>			<b>2.468.894.413.439</b>
03.01	Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	67.635.173.004
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	7.852.540.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.349.861.246





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.739.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.928.445.600
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	22.892.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	19.275.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.355.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	5.616.139.000
	03.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	5.616.139.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.522.720.044.733
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	6.155.089.200
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28.202.355.699
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.498.515.700
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	350.000.000
	03.03	Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	10.700.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	100.000.000.000
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	397.374.828.430
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	53.357.613.206
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1.274.929.300
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	3.069.191.300
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	174.861.721.600
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	992.149.500
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			3.951.418.929	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			5.780.337.792	
PROGRAM PENATAAN DESA			168.655.600	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,			4.525.444.800	





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
			LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	802.819.800
			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	350.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	3.500.000.000
<b>#04</b>	<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada pelayanan publik</b>			<b>6.520.644.845.573</b>
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	28.614.608.050
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	3.453.323.500
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.322.277.200
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	6.612.868.800
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.529.886.700
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.522.493.200
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	15.611.867.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	13.362.125.966
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.855.621.000
	04.01	Penguatan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.089.706.692
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.626.231.622
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.996.904.322.236
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	32.000.191.450
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.419.821.900
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	106.959.795.200
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	582.282.800
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.532.660.600
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.796.633.274.256





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	129.612.843.577
04.02	Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.157.585.119
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	9.811.633.370
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.712.139.500
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.608.022.700
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	603.761.000
04.03	Pelaksanaan Pilkada Serentak		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	147.412.264.324
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	11.206.721.700
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.522.493.200
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.909.986.650
04.04	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.909.986.650
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.173.535.700
04.05	Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	10.269.250.000
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.157.585.119
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	384.473.100
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	212.545.800
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	758.348.150
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	136.095.450
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	162.509.600
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.600.000.000





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
	04.06	Pengembangan Satu Data Kalsel	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	600.000.000
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.089.706.692
#05	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana			379.370.977.377
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	4.951.967.000
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	3.024.458.000
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.477.901.000
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.309.826.200
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.660.657.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.787.407.750
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	181.987.000
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	221.197.600
	05.01	Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	961.043.000
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.233.473.500
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.928.445.600
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	278.480.500
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	957.762.100
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.525.444.800
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	27.523.590.725
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	8.016.837.200





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
05.02	Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	500.000.000	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.572.074.200	
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	390.000.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	100.000.000.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	22.275.000.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	27.523.590.725	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	13.390.720.100	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	129.612.843.577	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	7.033.689.200	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.507.135.800	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.525.444.800			

## 6.2

### Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2024 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang berdampak pada perubahan susunan organisasi, tupoksi dan anggaran menjadi beberapa SKPD. Hal ini berakibat pada Perubahan Rencana Strategis Daerah (Renstra) pada Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada Perangkat Daerah. Adapun Perangkat Daerah yang terjadi Perubahan yaitu:





1. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. BIRO HUKUM
3. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4. BIRO ORGANISASI
5. BIRO UMUM
6. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
7. SEKRETARIAT DEWAN
8. INSPEKTORAT DAERAH
9. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10. DINAS KESEHATAN
11. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
12. DINAS SOSIAL
13. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
14. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
15. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
16. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
17. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
18. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
19. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20. DINAS PARIWISATA
21. DINAS KEHUTANAN
22. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
23. BADAN PENDAPATAN DAERAH
24. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
25. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
26. BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selain itu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0124 tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2022 adanya perubahan nama dan penambahan pada Unit pelayanan teknis perangkat daerah yaitu:





1. UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN
2. PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Sehingga dari hal – hal diatas, terjadinya perubahan dan penambahan pada perangkat daerah yang menyebabkan adanya perbedaan antara rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana pada tabel Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan pada Buku II RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Untuk pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan direncanakan pada tahun 2024 selain bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan dapat juga dibiayai dari CSR, KPBU, dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Sesuai Pemutakhiran Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 bahwa jumlah ada 159 Program, 342 Kegiatan dan 1149 Sub Kegiatan yang tertuang di dalam RKPD tahun 2024. Secara terinci dapat dilihat pada buku II RKPD tahun 2024.





## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Dalam dokumen tersebut, termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan ke dalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah ke dalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) di mana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena





“hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah direncanakan. Berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

### 7.1. Indikator Makro Kabupaten/ Kota

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Memperhatikan dampak Pandemi COVID 19

Secara rinci, penetapan indikator kinerja makro pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 - 2024 dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.





**Tabel 7.1.** Indikator Kinerja Makro Daerah

No	Indikator Kinerja Makro Daerah	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Thn 2022)	Target Thn 2023 (RPJMD 2021-2026)	RKPD Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2024
<b>1</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>				
	Kalimantan Selatan	71,84	72,20	72,95	72,65
	Nasional (RKP)				73,99 – 74,02
<b>2</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>				
	Kalimantan Selatan	4,74	4,22	4,22	4,05
	Nasional (RKP)				5,00 – 5,7
<b>3</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>				
	Kalimantan Selatan	5,11	4,5 – 5,2	4,5– 5,2	4,6 – 5,0
	Nasional (RKP)				5,3 – 5,7
<b>4</b>	<b>Tingkat Kemiskinan (%)</b>				
	Kalimantan Selatan	4,49	4,60 -4,40	4,60 -4,40	4,40 -4,22
	Nasional (RKP)				6,50 -7,50
<b>5</b>	<b>Indeks Gini</b>				
	Kalimantan Selatan	0,309	0,326	0,324	0,324
	Nasional (RKP)				0,374 - 0,377
<b>6</b>	<b>Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)</b>				
	Kalimantan Selatan	N/A	22,20	22,20	24,6
	Nasional (RKP)				27,02
<b>7</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>				
	Kalimantan Selatan	71,92	70,9	70,9	71,22
	Nasional (RKP)				69,48

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2021 – 2026

## 7.2. Indikator Kinerja Utama

Selanjutnya disajikan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 35 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026. Target IKU dan IKD pada tahun 2023 menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada tahun 2024. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) RKPD 2023 sebagai berikut:





Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.2.** Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Thn 2022)	Target Capaian Thn 2024	SKPD
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	69,68	73,85	Biro Kesra, Bakesbangpol
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,84	72,65	Disdikbud, Dinkes, RSUD Ulin, RSUD MAS, RSJ Sambang Lihum, RSGM GHA
3	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	51,33*	53,96	DP3A, Dispora, Disdikbud, Dinkes, Disdukcapil KB, Disnakertrans, Diskop & UMKM
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,11	4,6-5,0	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas TPH, Disbunnak, Dislutkan, Dinas Perindustrian, Disdag, Dispar, Dishut, DPMPSTSP, Biro Perekonomian
5	Tingkat Kemiskinan	%	4,49	4,40 -4,22	Dinas Sosial, Dinkop & UKM, DPMD, Biro Kesra, Biro Perekonomian, Disdag, Dinas TPH, Disbunnak, Dislutkan, Dishut





No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Thn 2022)	Target Capaian Thn 2024	SKPD
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,74	4,05	Disnakertrans, Dinas PUPR
7	Indeks Williamson	Indeks	0,383*	0,359	Dinas PUPR, Disperkim, Diskominfo, Disnakertrans, DESDM, DLH, Dishub
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,45	74,44	Biro Organisasi, Inspektorat, BPSDM, Diskominfo, Bappeda, Bakeuda, BKD, Satpol PP Damkar, Disdukcapil KB, DPMD, Dispersip, Biro Pem & Otda, Biro Kesra, Biro Hukum, Biro PBJ, Biro Adpem, Sekrt DPRD, Balitbang, Badan Penghubung, Bakesbangpol.
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,92	71,22	DLH, Dishut, Dinas ESDM, Dislutkan
10	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	128,81	132	Dinkes, DPUPR, Disperkim, BPBD, Dinsos, Dishut
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	51,12	24,6	DLH, DPMD, Dinas ESDM, Dislutkan

### 7.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penyajian indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolak ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan





gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk indikator kinerja tahun 2023 menyesuaikan dengan indikator kinerja nasional akibat dampak Pandemi COVID 19, indikator makro ditetapkan berdasarkan hasil analisis Kebijakan Ekonomi Makro Daerah (KEMD) Tahun 2022. Selain itu indikator kinerja daerah yang ditetapkan disusun berdasarkan rencana prioritas pembangunan di mana 6 (enam) prioritas tersebut dilaksanakan secara terintegrasi.

**PRIORITAS I** – Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata. Sub prioritas terdiri atas : Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Hasil Industri, UMKM, Pertanian dan Kelautan, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Geopark, Peningkatan Jumlah dan Kelas Wirausaha Baru Berbasis Digital, Peningkatan Realisasi Investasi yang Berdampak ke Daerah, Peningkatan Produktivitas Pertanian Sebagai Lumbung Pangan IKN. Program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada.

1. Seluruh Aspek kesejahteraan masyarakat
2. Aspek Pelayanan Umum
  - a. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
    - i. Tenaga Kerja
    - ii. Pangan
    - iii. Koperasi dan UKM
    - iv. Penanaman Modal
  - b. Pelayanan Urusan Pilihan
    - i. Kelautan dan Perikanan
    - ii. Pertanian
    - iii. Pariwisata
    - iv. Perdagangan
    - v. Perindustrian
    - vi. Energi dan Sumber Daya Mineral

**PRIORITAS II** – Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing. Sub prioritas terdiri atas : Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda, Perencanaan





Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif, Penurunan Penyakit Melalui GERMAS, Pengendalian Prevalensi Stunting, Penurunan Angka Pernikahan Anak, Peningkatan Prestasi Olahraga, Pengembangan Budaya Daerah. Program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - a. Indeks Pembangunan Manusia
  - b. Indeks Gini
  - c. Tingkat Kemiskinan
2. Aspek Pelayanan Umum
  - a. Pelayanan Urusan Wajib Dasar
    - i. Pendidikan
    - ii. Kesehatan
    - iii. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - iv. Sosial
    - v. Ketentraman Umum, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat
  - b. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
    - i. Tenaga Kerja
    - ii. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    - iii. Pangan
    - iv. Lingkungan Hidup
    - v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - vi. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    - vii. Kebudayaan
    - viii. Perpustakaan
    - ix. Kepemudaan dan Olahraga
  - c. Pelayanan Urusan Pilihan
    - i. Kelautan dan Perikanan
    - ii. Pertanian

**PRIORITAS III** - Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah. Sub prioritas terdiri atas : Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar, Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah, Pengembangan Kawasan Prioritas dan Perdesaan yang Terintegrasi dengan Infrastruktur sebagai





pendukung pintu Gerbang IKN, dengan program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - a. Pertumbuhan Ekonomi
  - b. Indeks Gini
  - c. Tingkat Kemiskinan
  - d. Inflasi
2. Aspek Pelayanan Umum
  - a. Pelayanan Urusan Wajib Dasar
    - i. Kesehatan
    - ii. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - iii. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
    - iv. Sosial
  - b. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
    - i. Lingkungan Hidup
    - ii. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - iii. Perhubungan
    - iv. Komunikasi dan Informatika
  - c. Pelayanan Urusan Pilihan
    - i. Perindustrian
    - ii. Energi dan Sumber Daya Mineral

**PRIORITAS IV** - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik. Sub prioritas terdiri atas : Penguatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN), Pelaksanaan Pilkada Serentak, Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - a. Pertumbuhan Ekonomi
  - b. Indeks Gini
2. Aspek Pelayanan Umum
  - a. Pelayanan Urusan Wajib Dasar
    - i. Ketentraman Umum, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat





- b. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
  - i. Komunikasi dan Informatika
  - ii. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  - iii. Statistik
  - iv. Persandian

**PRIORITAS V** - Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana. Sub prioritas terdiri atas : Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana, dengan program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada:

1. Aspek Pelayanan Umum

- a. Pelayanan Urusan Wajib Dasar
  - i. Kesehatan
  - ii. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - iii. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - iv. Ketentraman Umum, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat
  - v. Sosial
- b. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
  - i. Lingkungan Hidup
- c. Pelayanan Urusan Pilihan
  - i. Kelautan dan Perikanan
  - ii. Kehutanan
  - iii. Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada Tabel di bawah ini



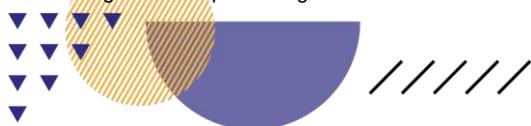


**Tabel 7.3.** Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
<b>1</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>					
<b>01.01</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>					
01.01.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3 – 5,7	5,11	4,5-5,2	4,6, – 5,0
01.01.02	Laju Inflasi	%	2,7	6,99	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0
01.01.03	PDRB Perkapita (ADHB)	(Juta rupiah/org)	N/A*	60,08	49,61 - 51,60	51,60 - 53,66
01.01.04	PDRB Perkapita ADHK	(Juta rupiah/org)	N/A*	34,04	34,16 - 35,70	35,70 - 37,56
01.01.05	Indeks gini	Indeks	0,374 - 0,377	0,309	0,326	0,324
01.01.06	Tingkat Kemiskinan	%	6,50 -7,50	4,49	4,60-4,40	4,40-4,22
01.01.07	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	18,34 juta-19,75 juta	201.950	195.068*	194.437*
01.01.08	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah/Orang/Tahun	N/A*	12.469.000	12.208.904	12.266.652
<b>01.02</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>					
01.02.01	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,99-74,02	71,84	72,95	72,65
01.02.02	Harapan Lama Sekolah	Tahun	9,16	13,1	13,07	13,2
01.02.03	Rata-Rata lama sekolah	Tahun	14,16	8,46	8,56	8,65
01.02.04	Angka Harapan Hidup	Tahun	N/A*	69,13	71,05	71,46
01.02.05	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	7	eppbgm : 6,6 SSGI : 9,8	8	7
01.02.06	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,00-5,7	4,74	4,22	4,05
01.02.07	Jumlah Pengangguran	Orang	NA*	89.470 - 104.025	89.896 - 104.464	86.275 - 100.733

\* Keterangan : 01.02.04 (Angka Harapan Hidup) N/A\* pada Target Nasional Tahun 2024 : Target tidak ditemukan pada dokumen perencanaan nasional

▼ Keterangan : N/A\* pada Target Nasional Tahun 2024 : Target tidak ditemukan pada dokumen perencanaan nasional





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
<b>2</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
	<b>Pelayanan Urusan Wajib Dasar</b>					
<b>02.01</b>	<b>Pendidikan</b>					
02.01.01	Jumlah Warga Negara Usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	%	100	69,87	69,43	100
02.01.02	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	%	100	33,53	35,02	100
02.01.03	Rata – rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64,83	65,88	2	71,99
02.01.04	Rata – rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	54,56	54,06	1,9	57,97
02.01.05	Rata – rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64,18	62,72	2	68,49
02.01.06	Rata – rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	54	52,60	1,9	56,43
02.01.07	Rata – rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69,70	62,09	1,9	68,25
02.01.08	Rata – rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61,79	58,65	1,8	68,25
02.01.09	Rata – rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,84	55,69	2	61,28





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.01.10	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	56,31	52,48	1,9	56,37
02.01.11	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65,96	57,61	1,9	63,52
02.01.12	Rata – rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53,61	44,98	1,8	48,71
02.01.13	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK *(Persentas Lulusan SMK yang bekerja)	%	90	80,14	50,38	84,1
02.01.14	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79	N/A*	70	68,5
02.01.15	Iklm keamanan SMA	Nilai	84,78	81,29	2,47	88,07
02.01.16	Iklm keamanan SMK	Nilai	85,31	79,58	2,54	86,4
02.01.17	Iklm keamanan SDLB	Nilai	87,88	80,22	83,73	87,24
02.01.18	Iklm keamanan SMPLB	Nilai	85,73	78,5	81,93	85,36
02.01.19	Iklm keamanan SMALB	Nilai	84,25	75,8	79,17	82,54
02.01.20	Iklm kebinekaan SMA	Nilai	85,33	91,68	2,37	96,42
02.01.21	Iklm kebinekaan SMK	Nilai	86,67	90,29	2,42	95,09
02.01.22	Iklm kebinekaan SDLB	Nilai	92,39	85,96	88,52	91,08
02.01.23	Iklm kebinekaan SMPLB	Nilai	80,36	69,85	72,08	74,31
02.01.24	Iklm kebinekaan SMALB	Nilai	78,51	73,95	79,17	78,31
02.01.25	Iklm Inklusivitas SMA	Nilai	81,55	78,05	1,97	84,41
02.01.26	Iklm Inklusivitas SMK	Nilai	80,82	76,06	26,06	82,38
02.01.27	Iklm Inklusivitas SDLB	Nilai	83,58	77,2	80,46	83,72
02.01.28	Iklm inklusivitas SMPLB	Nilai	86,48	74,35	77,73	81,11

\* Keterangan : 02.01.14 (Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK) N/A\* pada Capaian Tahun 2022 : Tidak terdapat capaian karena hasil unduh rapor pendidikan belum menyertakan capaian pada indikator tersebut (terdapat kesepakatan bersama kementerian bahwa capaian-capaian indikator diprioritaskan mengambil di rapor pendidikan)





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.01.29	Iklm inklusivitas SMALB	Nilai	85.98	69,6	72,96	76.32
<b>02.02</b>	<b>Kesehatan</b>					
02.02.01	Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	%	100	100	100	100
02.02.02	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	%	90	47,5	90	90
02.02.03	Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu	%	27,5	15,4	16,5	22
02.02.04	Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	95	80	76	79
02.02.05	Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita (persen)	%	7	7,22	8	7
02.02.06	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan KTR	Kab/Kota *Angka	474	6	6	7
	Persentase FKTP terakreditasi	%	100	14,76	14,76	15,18
02.02.07	Jumlah Kab/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Kab/Kota *Angka	405	10	11	11
02.02.8	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%	100	100	100	100
02.02.9	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	96	98,8	98,6	98,7
02.02.10	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak dan	%	100	100	100	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
	Beresiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)					
02.02.11	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	%	14	24,6	20	16
02.02.12	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	83	75	73	85
02.02.13	Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	90	85,7	94	94,5
02.02.14	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Kab/kota *Angka	405	10	11	11
02.02.15	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 penduduk *Angka	183	137	111	110
02.02.16	Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu	%	27,5	15,4	16,5	22
02.02.17	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	Per 1.000	16	88,89% (10)	8	8
02.02.18	Kab/Kota yang mencapai eliminasi kusta	Kab/Kota *Angka	514	13	13	13
02.02.19	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	%	21,8	14,5	14	13
02.02.20	Persentase Kab/Kota yang mencapai target Imunisasi rutin	%	75	92	69,2	76,9
02.02.21	Persentase Puskesmas tersedia obat esensial	%	96	98,8	98,6	98,7
02.02.22	Persentase FKTP terakreditasi	%	100	14,76	14,76	15,18
02.02.23	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	100	100	100	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
<b>02.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
02.03.01	Panjang infrastruktur pengendalian banjir/abrasi di wilayah sungai (WS) kewenangan provinsi	Km	35	6,6	1,295	1,7
02.03.02	Jumlah tenaga kerja konstruksi ahli bersertifikat di wilayah provinsi	Orang	50	133	255	335
02.03.03	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persentase	90	88,28	95.66	87
02.03.04	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	Ha	34125	78,43	104,77	136,84
02.03.05	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	Ha	143826	104,77	425	801,38
02.03.06	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	Persentase	100	83,34	94.26	80
02.03.07	Pelaksanaan Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kasus	9	1	2	2
02.03.08	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	%	75	82	81	82
02.03.09	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Persentase	100	88,68	94,34	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.03.10	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	Persentase	15	50,00	63,81	56,5
02.03.11	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase	30,45	65,3	67,77	69,97
02.03.12	Tambahan Debit Air Baku	Liter/Detik	11,43	0,9	0,9	0,9
02.03.13	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	102	N/A	N/A	N/A
02.03.14	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	96	N/A	N/A	N/A
02.03.15	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	60	1	1	NA
02.03.16	Penetapan RTRW	Perda/Perkada	58	N/A	1	2
02.03.17	Tersedianya data dan informasi jasa konstruksi cakupan wilayah provinsi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan	1	1	6	6
02.03.18	Persentase Kabupaten/Kota dengan bangunan gedung yang sudah memenuhi PBG dan SLF	Persentase	100	N/A	N/A	N/A
02.03.19	Tambahan Debit Air Baku	Liter/Detik	11,43	0,9	0,9	0,9
<b>02.04</b>	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>					
02.04.01	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100	45,73	46,41	47,66
02.04.02	Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas	Rumah Tangga	220.000	N/A	13.750	N/A





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
	Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)					
02.04.03	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan	Rumah Tangga	161.540	26.118	20.770	30.000
02.04.04	Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS)	Persil	10.000	N/A	N/A	N/A
02.04.05	Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Peran Masyarakat dan Dunia Usaha	Unit	355.387	N/A	N/A	N/A
02.04.06	Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitas Pemerintah	Unit	261.566	N/A	N/A	N/A
02.04.07	Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar	Unit	75.000	1.100	850	850
02.04.08	Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota	Kawasan	10	N/A	N/A	33,40
02.04.09	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	Ha	1.520,70	122,17	183,72	176,18
02.04.10	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas	Unit	250.910	21.475	28.808	28.808
02.04.11	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100
02.04.12	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang	%	100	100	100	100





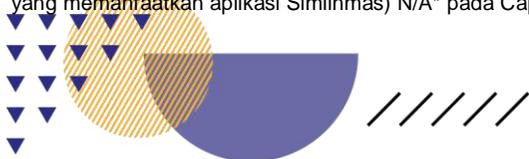
No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
	memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni					
02.04.13	Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	%	70	N/A	43.75	N/A
02.04.14	Luas kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Ha	1.000	30,93	32	33,40
<b>02.05</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>					
02.05.01	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	Perda/Perkada	10	8	2	10
02.05.02	Jumlah daerah yang dilakukan pendampingan penyusunan dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah	%	100	100	100	100
02.05.03	Persentase pendampingan pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kabupaten/kota	%	100	100	100	100
02.05.04	Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur	Satgas Linmas	1	1	1	1
02.05.05	Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.05.06	Persentase daerah yang telah menyusun dokumen pemetaan rawan gangguan linmas tingkat kabupaten/kota	%	20	N/A*	20	20
02.05.07	Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	%	50	80	85	90
02.05.08	Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	%	100	100	100	100
02.05.09	Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota	%	20	14	14	14
02.05.10	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	Orang	5	7	8	9
02.05.11	Persentase pemberkasan penyidikan oleh PPNS terhadap pelanggaran Perda yang bersanksi pidana	%	30	100	100	100
02.05.12	Persentase daerah yang memanfaatkan aplikasi Simlinmas (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat	%	50	N/A*	50	50
02.05.13	Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	%	100	100	100	100
02.05.14	Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	100	100	100	100
02.05.15	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	25	0	25	25
02.05.16	Persentase pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional	%	40	0	7 orang	2 orang

\* Keterangan : 02.05.06 dan 02.05.12 (Persentase Daerah yang telah menyusun dokumen pemetaan rawan gangguan linmas tingkat kabupaten/kota dan Persentase daerah yang memanfaatkan aplikasi Simlinmas) N/A\* pada Capaian Tahun 2022 : Merupakan indikator baru sehingga belum ada capaian di Tahun 2022



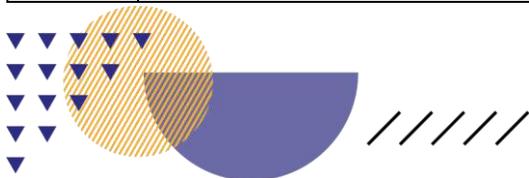


No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.05.17	Persentase daerah yang telah memanfaatkan aplikasi pemetaan SDM Satpol PP	%	30	50	50	40
02.05.18	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	100	100	100	100
02.05.19	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani	%	100	91,07	100	100
02.05.20	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100
02.05.21	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100
02.05.22	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100
02.05.23	Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	%	100	100	100	100
02.05.24	Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	100	100	100	100
02.05.25	Jumlah aparaturnya terkait kebencanaan di prov/kab/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan	%	25	100	100	100
02.05.26	Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial	%	25	100	100	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.05.27	Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota	orang	30	50	50	40
02.05.28	Jumlah daerah yang telah membentuk struktur organisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat	Jumlah Daerah	50	50	50	50
<b>02.06</b>	<b>Sosial</b>					
02.06.01	Jumlah lembaga di bidang Kesos yang mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan	Lembaga	850	60	65	65
02.06.02	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100
02.06.03	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100
02.06.04	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100
02.06.05	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100
02.06.06	Persentase SDM PKH yang melaksanakan P2K2	%	100	445 keluarga	445 keluarga	445 keluarga
02.06.07	Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Provinsi	38	6	6	6
02.06.08	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan pendampingan kewirausahaan sosial	KPM	7500	52	60	60





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.09	Jumlah KPM yang dirujuk untuk mendapatkan pendampingan usaha	KPM	7500	39	55	60
02.06.10	Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	Provinsi	38	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota
02.06.11	Jumlah TJSLBU (tanggungjawab sosial dan lingkungan badan usaha) yang mendapatkan penguatan	Badan Usaha	200	30	30	30
02.06.12	Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB)	Provinsi	38	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota
02.06.13	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan tempat penampungan	Orang	135000	140444	14000	15000
02.06.14	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Paket	135000	200	250	250
02.06.15	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket permakanan	Orang	135000	142070	14000	15000
02.06.16	Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar	Orang	10230	141	200	200
02.06.17	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	orang	5000	133461	15000	15000
02.06.18	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	70	100	100	100
02.06.19	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Orang	7230	154	154	154





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.20	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Unit	514	2	2	2
02.06.21	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat	KPM	10000000	1350	13000	2000
02.06.22	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (PKH)	KPM	10000000	1350	13000	2000
02.06.23	Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan	Lembaga	850	60	65	65
02.06.24	Jumlah sdm kesos yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan professional	Orang	2000	406	406	406
02.06.25	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	Jiwa	204330	140444	14000	14000
02.06.26	Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan terorisme	Kelompok Masyarakat	250	200	200	550
02.06.27	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan	Orang	1000	100	100	100
02.06.28	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Unit	136	23	23	23
02.06.29	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi command center	Kabupaten/Kota	514	13	13	13





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.30	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi command center	Kabupaten/Kota	864	637	650	655
02.06.31	Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako	KPM	18800000	5000	5500	5500
02.06.32	Jumlah lanjut usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	31	20	30
02.06.33	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam pant	Orang	100	180	180	180
02.06.34	Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100	210	210	220
02.06.35	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	100	100	100	100
02.06.36	Jumlah lanjut usia terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	Orang	3400	47	180	180
02.06.37	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di dalam panti	Orang	50	17	20	20
02.06.38	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	Orang	100	50	10	20





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.39	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1360	54	54	60
02.06.40	Jumlah pekerja social profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	2	11	5	11
02.06.41	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial	Orang	50000	1626	600	500
02.06.42	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100	333	511	511
02.06.43	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2720	9	10	10
02.06.44	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	25	0	40	40
02.06.45	Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	680	330	511	511
02.06.46	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100	100	100	100
02.06.47	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	100	40	40	40





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.48	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	3400	180	180	180
02.06.49	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	Orang	2	39	50	40
02.06.50	Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100	40	100	40
02.06.51	Jumlah gelandangan dan pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	25	0	40	40
02.06.52	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	Orang	100	40	40	40
02.06.53	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Paket	1	61	62	62
02.06.54	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	3400	333	511	511
02.06.55	Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100	110	120	120
02.06.56	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	Paket	68	70	60	70
02.06.57	Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di dalam panti	Orang	50	31	47	47





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.58	Jumlah anak terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1700	114	160	160
02.06.59	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	Jiwa	204330	140444	14000	14000
02.06.60	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	Paket	136	445	450	450
02.06.61	Jumlah anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	340	239	511	511
02.06.62	Jumlah anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulsuran keluarga	Orang	680	330	511	511
02.06.63	Jumlah lanjut usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulsuran keluarga	Orang	25	32	20	32
02.06.64	Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100	50	100	100
02.06.65	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, KTP, akta kelahiran, surat nikah dan/atau KIA di dalam panti	Orang	100	0	40	40
02.06.66	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	N/A	136	50	50	50
02.06.67	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100	40	40	40





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.68	Jumlah gelandangan dan pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	340	0	40	40
02.06.69	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100	100	100	100
02.06.70	Jumlah Tagana yang meningkat kompetensinya	Orang	26188	400	350	350
02.06.71	Jumlah korban bencana kelompok rentan	Orang	6750	550	550	550
	<b>Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar</b>					
<b>02.07</b>	<b>Tenaga Kerja</b>					
02.07.01	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	50000	5990	107.968	5700
02.07.02	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	75	33.33	23,73	75
02.07.03	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	Orang	325000	351	576	532
02.07.04	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	11.289.510	172.086	283.714	111.000





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.07.05	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	11.289.510	172.086	283.714	223.944
02.07.06	Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Orang	2.164.920	10	10	40
<b>02.08</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
02.08.01	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD	%	8,76	31,23	30	40
02.08.02	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100
02.08.03	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	79,16	74,58	76,33	77,27
02.08.04	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	64,34	61,23	68	65
02.08.05	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100
02.08.06	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	91,30	88,86	89,04	89,1
<b>02.09</b>	<b>Pangan</b>					
02.09.01	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90	91,18	82	84
02.09.02	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	30971	667,12	394	399





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.09.03	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	12	13.39	15.99	15.89
02.09.04	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	95.2	87.8	88.15	88.26
<b>02.10</b>	<b>Pertanahan</b>					
02.10.01	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah	300614	6.164	6600	6600
02.10.02	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	130700	3000	4.400	4.500
<b>02.11</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>					
02.11.01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	69.74	71.97	70.90	71.22
02.11.02	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	70	98	100	100
02.11.03	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	75	100	100	100
02.11.04	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen	76	N/A	1	1
<b>02.12</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>					
02.12.01	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	%	100	100	100	100
02.12.02	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	99	94,54	98	99





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.12.03	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100	100
02.12.04	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100	100
02.12.05	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	%	100	100	100	100
02.12.06	Pemanfaatan data kependudukan	%	100	19	30	80
<b>02.13</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
02.13.01	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	Orang	13.494	1723	1829	1863
02.13.02	Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	Desa	7.500	115	133	352
02.13.03	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Desa	7.500	115	133	352
02.13.04	Jumlah Desa Mandiri.	Desa	6.444	100	130	180
02.13.05	Jumlah Desa Berkembang	Desa	59.291	892	655	562
02.13.06	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	9.152	34	9	0
02.13.07	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Bumdes	10.000	107	20	450
02.13.08	Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) berkembang	Bumdes Bersama	300	0	10	28
02.13.09	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju	Bumdes	1.800	20	5	41





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.13.10	Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) Maju	Bumdes bersama	200	0	1	3
02.13.11	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Nilai	58,7	67,51	68,84	70,71
<b>02.14</b>	<b>Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana</b>					
02.14.01	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61	54,19	61	64,55
02.14.02	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	18	33,97	36	24
02.14.03	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,1	2,45	2,40	2,3
02.14.04	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	63,41	71,65	72	74
02.14.05	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,4	8,79	7,4	8,28
<b>02.15</b>	<b>Perhubungan</b>					
02.15.01	On Time Performance Layanan Transportasi	%	82,08	75,5	58,5	59
02.15.02	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	88,5	78,9	81,5	81,7
02.15.03	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio	0.763	0,59	0,61	0,63





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.15.04	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Rasio	23.71	3,075	2,6	1,6
<b>02.16</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>					
02.16.03	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	2	N/A	3	N/A
02.16.04	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional,(tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	%	85	80	85	85
02.16.05	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	%	74	70	74	74
02.16.06	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	100	100	100	100
02.16.07	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	%	85	97	97	97





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.16.08	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	%	100	14	100	100
02.16.09	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	%	85	75	76	77
02.16.10	Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda termasuk ASN di Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Orang	100	72	140	160
02.16.11	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase	90	22	40	57
02.16.12	Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase	50	N/A	3	5
02.16.13	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Persentase	100	22	40	57
02.16.14	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Persentase	60	25	33	35
02.16.15	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	Persentase	100	14	100	100
<b>02.17</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>					
02.17.01	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	10	26.87	30	7





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.17.02	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	20	11.57	15	7
02.17.03	Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	4	0.46	0.65	4
02.17.04	Terfasilitasinya UKM yang Berpotensi Masuk ke dalam Rantai Pasok dan Ekspor	%	75	15.32	16.22	18.02
02.17.05	Pertumbuhan Wirausaha	%	4	17,78	18,17	4
02.17.06	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	%	75	15,32	16,22	4
<b>02.18</b>	<b>Penanaman Modal</b>					
02.18.01	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp	1.293 T	15.295.807.78 0.000	12,550,000,0 00,000	16,210,000,00 0,000
<b>02.19</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>					
02.19.01	Persentase penduduk 10 tahun ke atas di provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir	%	40	23,33	37	36,93
02.19.02	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan di tingkat Provinsi	Dokumen	1	0	1	1
02.19.03	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	57,67	51,33	52,66	53,96
02.19.04	Tersusunnya DOD Tingkat Provinsi	Dokumen	1	N/A*	N/A*	1
02.19.05	Terbentuknya Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Tingkat Provinsi	Dokumen	1	N/A*	N/A*	1
<b>02.20</b>	<b>Statistik</b>					
02.20.01	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan	%	100	87.50	92	92

\*Keterangan : 02.19.04 dan 02.19.05 (Tersusunnya DOD Tingkat Provinsi dan Terbentuknya Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Tingkat Provinsi) N/A\* pada Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 : Merupakan indikator baru sehingga belum ada capaian di Tahun 2022 dan Target Tahun 2023



No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
	data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
02.20.02	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	%	100	16.67	15	15
02.20.03	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	%	100	16.67	50	50
02.20.04	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	87.50	92	92
<b>02.21</b>	<b>Persandian</b>					
02.21.01	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	Daerah	32	N/A	N/A	1
02.21.02	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang	80	N/A	4	4
02.21.03	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Orang	50	N/A	4	4
02.21.04	Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	%	100	N/A	64	65
02.21.05	Jumlah Lulusan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIV	Orang	500	N/A	N/A	15





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
<b>02.22</b>	<b>Kebudayaan</b>					
02.22.01	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	2,04	1,80	1,90	2,98
02.22.02	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	61,62	21,06	24,00	30,7
02.22.03	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	50,00	39,00	40,00	42,00
02.22.04	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	15,00	8,35	6,93	11,99
02.22.05	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	23,06	21,68	15,63	21,83
02.22.06	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,50	1,00	2,00	0,5
02.22.07	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	0,56	11,06	12,36	30
<b>02.23</b>	<b>Perpustakaan</b>					
02.23.01	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	71	64,95	46	68,00
02.23.02	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Index	15	75,71	61	77,00
<b>02.24</b>	<b>Kearsipan</b>					
02.24.01	Jumlah Pemerintah Daerah Povinsi yang menerapkan e-arsip terintegrasi	Provinsi/Kab/Kota	158	62	62	70





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.24.02	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas	Provinsi/Kab/Kota	32	8	5	5
02.24.03	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Provinsi	Rekomendasi	32	23	25	20
02.24.04	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Pengguna	452.194	400	4050	4100
02.24.05	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	738.836	1.350	1.501	1.651
<b>Pelayanan Urusan Pilihan</b>						
<b>02.25 Kelautan dan Perikanan</b>						
02.25.01	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota diwilayah provinsi	ton	21.430.000	130.355,18	167419	250.000
02.25.03	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Ha	17.800.000	179.659,89	179.659,89	179.659,89
02.25.04	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8.350.000	201.252	211.000	220.000
02.25.05	Konsumsi ikan	Kg/KAP/TH	58.76	64,11	63.00	68.31
02.25.07	POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan	Kelompok	1110	179	200	207
02.25.08	Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	2870	130	130	130
02.25.09	Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Provinsi	Forum	1	1	1	1





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
<b>02.26</b>	<b>Pariwisata</b>					
02.26.01	Kontribusi PDB Pariwisata	%	4,5	2,1	2,27	2,29
02.26.02	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	300.000.000-3 15.000.000	2.924.434	3.300.000	3.630.000
02.26.03	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	1500000000	13.342.961	10.000.000	11.000.000
<b>02.27</b>	<b>Pertanian</b>					
02.27.01	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura	%	1.96	0.86	1.0	1.0
02.27.02	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan jenis jagung	%	1,64	0,99	1,0	1,0
02.27.03	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura jenis bawang merah	%	1.82	1.02	1.0	1.0
02.27.04	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura jenis cabai	%	3,89	2,50	2,50	2,50
02.27.05	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan jenis kedelai	%	0.87	0.53	0.18	0.18
02.27.06	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis Cengkeh	%	1,77	18,66	3,75	4,0
02.27.07	persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis lada	%	0,62	0,80	1,6	1,6



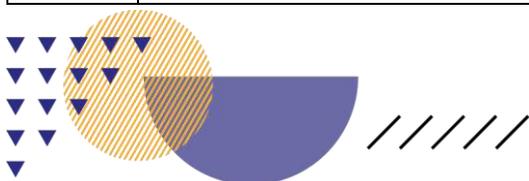


No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.27.08	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis karet	%	1,62	-2,78	1,0	1,0
02.27.09	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kakao	%	0,29	10,22	3,75	3,75
02.27.10	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kelapa	%	5,51	-2,73	1,0	1,0
02.27.11	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kopi	%	0,24	6,74	3,90	3,90
02.27.12	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	4.710.620	83.223,07	128.749	132.895
02.27.13	Jumlah Produksi Susu	Ton	815.390	130	89	89
02.27.14	Jumlah Produksi Telur	Ton	6.465.230	58.952	61.945	62.118
02.27.15	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	45	0,55	2,46	2,46
02.27.16	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	75,80	99,98	97,50	97,50
02.27.17	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	95	94,41	97,50	97,50
02.27.18	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan	%	40	22,4	97,5	97,5





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.27.19	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	%	60,80	99,41	97,50	97,50
02.27.20	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	%	50	91.07	97.50	97.50
02.27.21	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80.5	83.90	80.5	80.5
<b>02.28</b>	<b>Kehutanan</b>					
02.28.01	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	30000	15186.46	20000	20000
02.28.02	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Ha	1500670.98	10275	3000	5000
<b>02.29</b>	<b>Energi Sumber Daya Mineral</b>					
02.29.01	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	%	100	99	98.46	98.51
02.29.02	Rasio elektrifikasi	%	100	99.45	99.52	99.61
02.29.03	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	%	19.5	15.79	19.56	19.58
<b>02.30</b>	<b>Perdagangan</b>					
02.30.01	Tertib Usaha	%	90	100	100	100
02.30.02	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90	99.20	100	100
02.30.03	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	7.86	65.94	6.2	10
02.30.04	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	75	102.12	100	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.30.05	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	55	142.25	100	100
02.30.06	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	5.9	0.015	0.10	0.11
02.30.07	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	92	105	100	100
<b>02.31</b>	<b>Perindustrian</b>					
02.31.01	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	8.40	3.31	5.21	5.67
02.31.02	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	18.90	11.39	13.45	13.62
02.31.03	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	181.59	15.90	10.78	11.24
02.31.04	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	21.94	199,118	307,496	320,820
02.31.05	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	613.85	2.58	1.19	1.28
<b>02.32</b>	<b>Transmigrasi</b>					
02.32.01	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Index	46.10	73,15	54,27	55,48
02.32.02	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisas	Index	57.50	75,66	71,54	75,03
<b>3</b>	<b>ASPEK DAYA SAING</b>					





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
03.01.01	Nilai Tukar Petani	%	108	104,58	102.7	103.18
03.01.02	Nilai Tukar Nelayan	%	107-110	83,74	102,03	102,95
03.01.03	Keterbukaan Ekonomi (Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB ADHK)	Rasio	N/A*	0.194	0.195	0.196
03.01.04	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	N/A*	48,29	50.28	50.55
03.01.05	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR	Rasio	N/A*	1,21	1.24	1.27
03.01.06	Rasio Elektrifikasi	%	100	99.45	99.52	99.61
03.01.07	Rasio Konektivitas	Rasio	N/A	N/A	0.61	0.63
03.01.08	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	Indeks	N/A	N/A	81.21	85.21
03.01.09	Konflik antar dan inter umat beragama yg ditangani	Kasus	0	0	0	0

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2021 – 2026, Rakortekrenbang Prov. Kalsel thn 2022 dan Permendagri No. 59 thn 2021

\* Keterangan : N/A\* pada Target Nasional Tahun 2024 : Target tidak ditemukan pada dokumen perencanaan nasional

RKPD TAHUN 2024  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





## BAB VIII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlaku dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember 2024. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya. RKPD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Untuk pelaksanaan dokumen RKPD 2024, baik berupa prioritas maupun sasaran-sasaran pembangunan yang wajib dilaksanakan secara professional dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Sehingga diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Selanjutnya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wujud pelaksanaan Tahun Keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005- 2025 Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen ini sebagai instrumen dalam mengejawantahkan muatan-muatan yang terkandung pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, selain itu untuk dapat menjamin konsistensi dan menjaga kesinambungan perencanaan yang termuat dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 telah dipadukan juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, penelaahan terhadap prioritas RPJPD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah dan program strategis nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, maka dalam rangka mencapai target kinerja pada





Tahap ke-5 RPJPD sebagai tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, mengusung tema pembangunan Tahun 2024 berupa **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 diarahkan pada: **Penguatan sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata; Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing; Memperkuat infra struktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah; Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik; Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.**

Prioritas pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas untuk Tahun 2024 dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kebijakan money follow program yang dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi **Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)**. Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 ini menjadi bahan penyempurnaan perangkat daerah dalam perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dirumuskan dengan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan memperhatikan waktu yang ada. Sementara itu dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup daerah provinsi dan antar daerah kabupaten/kota, rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2024 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat menyelaraskan dengan sasaran, prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan provinsi pada Tahun 2024.

Dalam pelaksanaannya, RKPD 2024 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di provinsi Kalimantan Selatan. Kaidah dan prinsip tersebut adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan





- (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
  3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
  4. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD untuk itu RKPD perlu dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Provinsi Kalimantan Selatan.
  5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
  6. Seluruh perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dengan demikian diharapkan juga tujuan inti pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud secara efisien dan efektif.

Akhir kata, implementasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan pelaksanaan arah kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen ini agar dapat mencapai visi "**Kalimantan Selatan**





**MAJU (Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara”.**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**ttd.**

**SAHBIRIN NOOR**





# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-10
1.4 Maksud Dan Tujuan.....	I-11
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-2
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	II-2
2.1.1.2 Topografi.....	II-5
2.1.1.3 Geologi.....	II-7
2.1.1.4 Hidrologi.....	II-9
2.1.1.5 Meteorologi dan Klimatologi.....	II-11
2.1.1.6 Penggunaan Lahan.....	II-13
2.1.1.7 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-17
2.1.1.8 Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-20
2.1.1.9 Penduduk Menurut Pekerjaan.....	II-21
2.1.1.10 Penduduk Menurut Usia Sekolah.....	II-22
2.1.1.11 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-23
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-25
2.1.2.1 Wilayah Metropolitan Banjarmasin.....	II-27
2.1.2.2 Wilayah Banua Anam – Pusat: Tanjung Dan Sebagai Hub: Kandangan.....	II-28
2.1.2.3 Kawasan Industri & Pesisir – Pusat Ki Batulicin – Kotabaru – KEK Mekar Putih.....	II-28
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	II-29
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-32
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-32
2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II-32
2.2.1.2 Struktur Perekonomian Daerah.....	II-35
2.2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	II-38
2.2.1.4 Perkembangan Inflasi.....	II-43
2.2.1.5 Gini Rasio.....	II-48
2.2.1.6 Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Wilayah).....	II-49
2.2.1.7 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-51
2.2.1.8 Angka Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan, dan Garis Kemiskinan.....	II-51
2.2.1.9 Indeks Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan.....	II-55
2.2.1.10 Indeks Pembangunan Manusia.....	II-56
2.2.1.11 Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS).....	II-58
2.2.1.12 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS).....	II-59
2.2.1.13 Angka Harapan Hidup (AHH).....	II-60
2.2.1.14 Angka Kematian Ibu (AKI).....	II-62
2.2.1.15 Angka Kematian Bayi dan Balita.....	II-63
2.2.1.16 Tingkat Kesakitan.....	II-64
2.2.1.17 Status gizi Masyarakat.....	II-65
2.2.1.18 Rata rata Pengeluaran Perkapita.....	II-67
2.2.1.19 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-68
2.2.1.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	II-70





2.2.1.21	Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja .....	II-71
2.2.1.22	Jumlah Penduduk Bekerja .....	II-71
2.2.1.23	Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	II-72
2.3	Aspek Pelayanan Umum .....	II-73
2.3.1	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar .....	II-74
2.3.1.1	Pendidikan .....	II-74
2.3.1.2	Angka Partisipasi Sekolah .....	II-74
2.3.1.3	Angka Partisipasi Kasar .....	II-75
2.3.1.4	Angka Partisipasi Murni .....	II-75
2.3.1.5	Kesehatan .....	II-77
2.3.1.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II-80
A.	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan .....	II-81
B.	Sumber Daya Air .....	II-82
C.	Air Minum, Sanitasi dan Persampahan .....	II-85
D.	Penataan Bangunan dan Lingkungan .....	II-94
E.	Penataan Ruang .....	II-95
F.	Bina Konstruksi .....	II-96
2.3.1.7	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	II-100
2.3.1.8	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat .....	II-106
2.3.1.9	Sosial .....	II-106
2.3.2	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Non-Dasar .....	II-107
2.3.2.1	Tenaga Kerja .....	II-107
2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II-109
2.3.2.3	Pangan .....	II-109
2.3.2.4	Lingkungan Hidup .....	II-110
A.	Gas Rumah Kaca .....	II-117
B.	Ekosistem Gambut .....	II-118
C.	Kualitas Tutupan Lahan .....	II-124
D.	Isu Prioritas Lingkungan Hidup .....	II-127
E.	Pengelolaan Persampahan .....	II-127
F.	Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) .....	II-129
G.	Kualitas Air Sungai Yang Rendah .....	II-131
H.	Luas Lahan Kritis yang Berpotensi Terus Meningkat .....	II-135
2.3.2.5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	II-141
2.3.2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	II-143
2.3.2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II-143
2.3.2.8	Perhubungan .....	II-144
A.	Angkutan Sungai dan Laut .....	II-149
B.	Transportasi Angkutan Udara .....	II-150
2.3.2.9	Komunikasi dan Informatika .....	II-153
2.3.2.10	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah .....	II-155
2.3.2.11	Penanaman Modal .....	II-159
2.3.2.12	Kepemudaan dan Olahraga .....	II-160
2.3.2.13	Statistik .....	II-160
2.3.2.14	Persandian .....	II-161
2.3.2.15	Kebudayaan .....	II-161
2.3.2.16	Perpustakaan dan Kearsipan .....	II-162
A.	Perpustakaan .....	II-162
B.	Kearsipan .....	II-162
2.3.3	Layanan Urusan Pilihan .....	II-163
2.3.3.1	Pertanian .....	II-163
A.	Sektor Pertanian .....	II-164
2.3.3.2	Perkebunan .....	II-167
2.3.3.3	Peternakan .....	II-169
2.3.3.4	Kelautan dan Perikanan .....	II-172
2.3.3.5	Kehutanan .....	II-174
2.3.3.6	Energi dan Sumber Daya Alam .....	II-182





2.3.3.7	Pariwisata .....	II-185
2.3.3.8	Perdagangan .....	II-187
2.3.3.9	Industri .....	II-188
2.3.3.10	Transmigrasi .....	II-189
2.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-190
2.4.1	Daya Saing Berdasarkan Pilar IDSD (BRIN) .....	II-190
2.4.2	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II-197
2.4.2.1	Konsumsi Rumah Tangga .....	II-198
2.4.2.2	Pengeluaran Konsumsi Per Kapita .....	II-199
2.4.2.3	Nilai Tukar Petani.....	II-199
2.4.2.4	Perkembangan Impor .....	II-202
2.4.2.5	Perkembangan Sektor Energi.....	II-203
2.4.2.6	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel.....	II-203
2.4.3	Fokus Iklim Investasi dan Pelayanan Publik.....	II-204
2.4.3.1	Investasi .....	II-204
2.4.3.2	Kriminalitas .....	II-205
2.4.3.3	Pelayanan Publik .....	II-206
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-206
2.4.4.1	Ketenagakerjaan.....	II-206
2.4.5	Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur .....	II-207
2.4.6	Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	II-210
2.4.6.1	Daya Dukung Permukiman .....	II-212
2.4.6.2	Daya Dukung Lahan Pertanian .....	II-213
2.4.6.3	Daya Dukung Air .....	II-216
2.5	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	II-224
2.5.1	Evaluasi Realisasi RKPD Tahun 2022.....	II-224
2.5.2	Evaluasi Realisasi RPJMD Tahun 2021-2026 .....	II-299
2.5.3	Permasalahan Pembangunan Daerah Di Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	II-316
2.5.3.1	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Masih Rendah .....	II-316
2.5.3.2	Struktur Perekonomian Daerah masih belum kuat dan berkelanjutan .....	II-317
2.5.3.3	Pembangunan Infrastruktur belum optimal dan merata.....	II-318
2.5.3.4	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Berbasis Digital belum Optimal.....	II-319
2.5.3.5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Masih Belum Optimal .....	II-320
2.5.4	Permasalahan Pembangunan Yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah : .....	II-320
2.5.5	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-322

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH..... III-1**

3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1	Kondisi Pembangunan Ekonomi Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	III-2
3.1.1.1	Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB).....	III-2
3.1.1.2	Pertumbuhan Ekonomi .....	III-4
3.1.1.3	Kontribusi PDRB Antar Wilayah.....	III-13
3.1.1.4	Kesenjangan Wilayah .....	III-16
3.1.1.5	Increment Capital Output Ration (ICOR) .....	III-17
3.1.1.6	Inflasi.....	III-18
3.1.1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	III-20
3.1.1.8	Tingkat Kemiskinan.....	III-21
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	III-22
3.1.3	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2024 .....	III-29
3.1.4	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi	





	Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	III-32
3.1.5	Sasaran Indikator Ekonomi Makro Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	III-34
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-35
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III-38
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-43
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-45
3.2.4	Arah Kebijakan Alternatif Pembiayaan Daerah.....	III-49

#### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 ..... IV-1**

4.1	Isu Strategis Pembangunan.....	IV-2
4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-4
4.2.1	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional terhadap RKPD 2024 .....	IV-4
4.2.2	Telaahan Tujuan dan Sasaran SDGs Terhadap RKPD 2024.....	IV-7
4.2.3	Telaahan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis terhadap RKPD Tahun 2024 .....	IV-8
4.2.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap RKPD Tahun 2024...	IV-9
4.2.5	Telaahan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	IV-11
4.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalsel Tahun 2024 .....	IV-15
4.3.1	Prioritas dan Sasaran RKPD Tahun 2024 .....	IV-17
4.3.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan RKPD 2024 dan RKP 2024.....	IV-23
4.3.3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 Berbasis Kewilayahan.....	IV-33
4.3.4	Penelaahan Terhadap Pokok - Pokok Pikiran DPRD .....	IV-35
4.4	Inovasi Pembangunan Daerah.....	IV-40

#### **BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA ..... V-1**

5.1	Indikator Makro Kabupaten/Kota.....	V-1
5.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	V-2
5.1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).....	V-5
5.1.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	V-7
5.1.4	Persentase Penduduk Miskin.....	V-10
5.1.5	Indeks Gini .....	V-15
5.1.6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) .....	V-18
5.1.7	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).....	V-20
5.2	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan.....	V-23
5.2.1	Arah Kebijakan Kewilayahan .....	V-26
5.2.2	Arah Kebijakan Wilayah Banjarbakula.....	V-33
5.2.3	Arah Kebijakan Banua Anam.....	V-34
5.2.4	Arah Kebijakan Wilayah Pesisir dan Industri .....	V-36
5.3	Arah Kebijakan Kabupaten/Kota .....	V-37
5.3.1	Kota Banjarmasin.....	V-37
5.3.2	Kota Banjarbaru .....	V-37
5.3.3	Kabupaten Banjar .....	V-38
5.3.4	Kabupaten Tanah Laut.....	V-39
5.3.5	Kabupaten Tanah Bumbu .....	V-40
5.3.6	Kabupaten Kotabaru .....	V-41
5.3.7	Kabupaten Tapin.....	V-41
5.3.8	Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	V-42
5.3.9	Kabupaten Hulu Sungai Tengah .....	V-43
5.3.10	Kabupaten Hulu Sungai Utara .....	V-43
5.3.11	Kabupaten Balangan.....	V-44
5.3.12	Kabupaten Tabalong.....	V-45
5.3.13	Kabupaten Barito Kuala .....	V-46

#### **BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... VI-1**





6.1	Prioritas Dan Sub Prioritas RKPD Tahun 2024.....	VI-1
6.2	Rencana Kerja Perangkat Daerah Dan Pendanaan .....	VI-22
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>		<b>VII-1</b>
7.1.	Indikator Makro Kabupaten/ Kota.....	VII-2
7.2.	Indikator Kinerja Utama.....	VII-3
7.3.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah .....	VII-5
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>		<b>VIII-1</b>





## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Alur Proses Penyusunan RKPD Provinsi.....	I-3
<b>Gambar 2.1</b>	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-3
<b>Gambar 2.2</b>	Peta Wilayah KalSel terhadap wilayah sekitar, ALKI 1, dan ALKI 2.....	II-5
<b>Gambar 2.3</b>	Peta Topografi Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-6
<b>Gambar 2.4</b>	Peta Geologi Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-9
<b>Gambar 2.5</b>	Peta Hidrologi Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-10
<b>Gambar 2.6</b>	Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022.....	II-20
<b>Gambar 2.7</b>	Perbandingan Jumlah Penduduk berdasarkan Umur di Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	II-24
<b>Gambar 2.8</b>	ICOR Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2022.....	II-26
<b>Gambar 2.9</b>	Peta Rawan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-30
<b>Gambar 2.10</b>	Data Share (Bagi Hasil) Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-37
<b>Gambar 2.11</b>	Gini Ratio Indonesia Per Provinsi per September Tahun 2022.....	II-49
<b>Gambar 2.12</b>	Perkembangan Indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022.....	II-51
<b>Gambar 2.13</b>	Angka Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022. Serta AHH Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....	II-60
<b>Gambar 2.14</b>	Kasus Kematian Ibu di Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	II-62
<b>Gambar 2.15</b>	Kasus Kematian Bayi di Kalimantan Selatan Tahun 2022....	II-63
<b>Gambar 2.16</b>	Pekembangan Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022.....	II-66
<b>Gambar 2.17</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka paten/Kota Tahun 2022 .....	II-68
<b>Gambar 2.18</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....	II-69
<b>Gambar 2.19</b>	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2022	II-79
<b>Gambar 2.20</b>	Jumlah Tenaga Dokter di Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....	II-79
<b>Gambar 2.21</b>	Jumlah Tenaga Keperawatan dan Bidan di Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....	II-80
<b>Gambar 2.22</b>	Jumlah Kefarmasian Dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....	II-80
<b>Gambar 2.23</b>	Wilayah Sungai di Kalimantan Selatan, a) WS Barito, b) WS Cengal – Batulicin, c) WS Pulau Laut .....	II-82
<b>Gambar 2.24</b>	Capaian Air Minum Kalimantan Selatan 2016 – 2022 .....	II-86
<b>Gambar 2.25</b>	Capaian Air Minum Akses Layak Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2020-2022.....	II-88
<b>Gambar 2.26</b>	Capaian Air Minum Akses Aman Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2020-2022.....	II-89
<b>Gambar 2.27</b>	Capaian Air Limbah Domestik Akses Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022s .....	II-90
<b>Gambar 2.28</b>	Capaian Air Limbah Domestik Akses Layak Kab/Kota se- Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	II-91
<b>Gambar 2.29</b>	Capaian Air Limbah Domestik Akses Aman Kab/Kota se- Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	II-91
<b>Gambar 2.30</b>	Data Luasan Kumuh yang Sudah di Tangani	





	Tahun (2018–2022).....	II-103
<b>Gambar 2.31</b>	Persentase Penganganan Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018-2022 .....	II-103
<b>Gambar 2.32</b>	Jumlah angkatan kerja (Jiwa) Provinsi Kalimantan Selatan. 2018-2022.....	II-108
<b>Gambar 2.33</b>	Grafik Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 s.d Tahun 2022 .....	II-112
<b>Gambar 2.34</b>	Grafik Target dan Capaian IKLH Prov Kalsel dan Kab/Kota Tahun 2022, Target Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2022.....	II-113
<b>Gambar 2.35</b>	Grafik Target dan Capaian IKU Prov Kalsel dan Kab/Kota Tahun 2021 .....	II-114
<b>Gambar 2.36</b>	Peta Fungsi Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan	II-120
<b>Gambar 2.37</b>	Grafik Target dan Capaian IKL Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 .....	II-126
<b>Gambar 2.38</b>	Bus AKAP Prov. Kalimantan Selatan.....	II-147
<b>Gambar 2.39</b>	Grafik Jumlah barang yang dibongkar melalui angkutan udara yang datang di Kalimantan Selatan s.d Maret Tahun 2023 .....	II-152
<b>Gambar 2.40</b>	Kunjungan Wisata di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022.....	II-186
<b>Gambar 2.41</b>	Perkembangan Rata-Rata Lama Menginap Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-187
<b>Gambar 2.42</b>	Kerangka pengukuran IDSD 2022 .....	II-192
<b>Gambar 2.43</b>	Skor IDSD Nasional Tahun 2022 .....	II-193
<b>Gambar 2.44</b>	Capaian Indikator Pilar IDSD untuk Tahun 2022 .....	II-194
<b>Gambar 2.45</b>	Ringkasan Komponen EV-Digital Competitiveness Index 2022 .....	II-196
<b>Gambar 2.46</b>	Ringkasan Komponen EV-Digital Competitiveness Index Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-197
<b>Gambar 2.47</b>	Perkembangan Nilai Tukar Petani Kalimantan Selatan s.d Mei Tahun 2023 .....	II-200
<b>Gambar 2.48</b>	Grafik Perkembangan NTUP Provinsi Kalimantan Selatan s.d Mei Tahun 2023 .....	II-201
<b>Gambar 2.49</b>	Peta Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan s.d Data Terakhir Tahun 2018 .....	II-210
<b>Gambar 2.50</b>	Peta Status Pangan Provinsi Kalimantan Selatan s.d Data Terakhir Tahun 2021 .....	II-215
<b>Gambar 2.51</b>	Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Kepmen LHK 2019 Secara Administrasi.....	II-218
<b>Gambar 2.52</b>	Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Hasil Analisis Secara Batas Administrasi Kabupaten .....	II-219
<b>Gambar 2.53</b>	Peta Status Air Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-222
<b>Gambar 2.54</b>	Status Air Analisis Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-223
<b>Gambar 3.1</b>	LPE Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha dan Komponen Pengeluaran pada Tahun 2022 .....	III-10
<b>Gambar 3.2</b>	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2022.....	III-11
<b>Gambar 3.3</b>	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Regional Kalimantan Tahun 2022 .....	III-13





<b>Gambar 3.4</b>	Share Perekonomian (%) Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2022 .....	III-15
<b>Gambar 3.5</b>	Tipologi Klassen PDRB ADHK Kabupaten/Kota pada tahun 2017-2022 di Kalimantan Selatan .....	III-16
<b>Gambar 3.6</b>	Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2024 .....	III-17
<b>Gambar 3.7</b>	ICOR Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2022 .....	III-18
<b>Gambar 3.8</b>	Laju Inflasi (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2022 .....	III-19
<b>Gambar 3.9</b>	Arah Kebijakan RKP Tahun 2024 .....	III-30
<b>Gambar 3.10</b>	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 ....	III-30
<b>Gambar 4.1</b>	Tiga Pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (Bappenas, 2018).....	IV-5
<b>Gambar 4.2</b>	Penyelarasan Muatan RTRW dengan Muatan RPJPD dan RPJMD .....	IV-10
<b>Gambar 4.3</b>	Alur Langkah-Langkah Penyelarasan RTRW dengan RPJMD .....	IV-10
<b>Gambar 4.4</b>	Keterkaitan Aspek Daya Saing Daerah dengan Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	IV-17
<b>Gambar 4.5</b>	Konsep Pembagian Tiga Zona Kewilayahan Kalimantan Selatan Berdasarkan Administrasi dan Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis .....	IV-35
<b>Gambar 5.1</b>	Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/ Kota Tahun 2021-2022 .....	V-3
<b>Gambar 5.2</b>	Peta Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota .....	V-4
<b>Gambar 5.3</b>	Analisis Kuadran Capaian LPE dan Share Perekonomian Kabupaten/Kota .....	V-6
<b>Gambar 5.4</b>	Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan TPT Kabupaten/Kota .....	V-8
<b>Gambar 5.5</b>	Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota .....	V-10
<b>Gambar 5.6</b>	Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota....	V-12
<b>Gambar 5.7</b>	Peta Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota .....	V-13
<b>Gambar 5.8</b>	Peta Analisa Geostatistik Resiko Stunting dari Analisa Data Pensasaran P3KE-Kemenko PMK .....	V-14
<b>Gambar 5.9</b>	Analisa Geostatistik Bayesian Jumlah KK Pensasaran Berisiko Stunting.....	V-15
<b>Gambar 5.10</b>	Analisis Kuadran Capaian Indeks Gini dan Laju Perubahan Indeks Gini Kabupaten/Kota.....	V-17
<b>Gambar 5.11</b>	Peta Indeks Gini Kabupaten/Kota.....	V-18
<b>Gambar 5.12</b>	Analisis Kuadran Capaian IKLH dan Laju Pertumbuhan IKLH Kabupaten/ Kota Tahun 2021-2022.....	V-20
<b>Gambar 5.13</b>	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota .....	V-22
<b>Gambar 5.14</b>	Peta Potensi Pertanian dan Perkebunan Kalsel.....	V-23
<b>Gambar 5.15</b>	Peta Sebaran Destinasi Wisata dan Geosite.....	V-25
<b>Gambar 5.16</b>	Peta Zona Kewilayahan Kalimantan Selatan.....	V-28
<b>Gambar 5.17</b>	Diagram Pohon Sistem Perkotaan di Kalimantan Selatan ....	V-29
<b>Gambar 5.18</b>	Peta Konektifitas Kalimantan Selatan.....	V-30
<b>Gambar 5.19</b>	Model Kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan.....	V-31
<b>Gambar 5.20</b>	Peta Proyeksi Jalan Nasional dan Provinsi Tahun 2024 .....	V-32
<b>Gambar 5.21</b>	Peta Zona 1- Banjarkakula .....	V-33





**Gambar 5.22** Peta Pengebangan Kewilayahan Zona Banjarbakula ..... V-34  
**Gambar 5.23** Peta Zona 2 - Wilayah Banua Anam ..... V-35  
**Gambar 5.24** Peta Zona 3 - Wilayah Pesisir dan Industri..... V-36





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 .....II-4
<b>Tabel 2.2</b>	Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Lereng/Kemiringan dan Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut Tahun 2022.....II-7
<b>Tabel 2.3</b>	Pembagian Luas DAS Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....II-11
<b>Tabel 2.4</b>	Kondisi Iklim di Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....II-12
<b>Tabel 2.5</b>	Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....II-13
<b>Tabel 2.6</b>	Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 ....II-15
<b>Tabel 2.7</b>	Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota Tahun 2018-2022 .....II-17
<b>Tabel 2.8</b>	Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan berdasarkan Kabupaten dan Kota Tahun 2022.....II-18
<b>Tabel 2.9</b>	Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....II-18
<b>Tabel 2.10</b>	Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....II-19
<b>Tabel 2.11</b>	Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten Kota Tahun 2018-2022 .....II-21
<b>Tabel 2.12</b>	Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan menurut Jenis Pekerjaan/Lapangan Usaha Tahun 2021 dan 2022.....II-21
<b>Tabel 2.13</b>	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....II-23
<b>Tabel 2.14</b>	Data Sebaran pekerjaan kepala keluarga di Kalimantan Selatan pada desil 1 menurut Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).....II-27
<b>Tabel 2.15</b>	Data Bencana Banjir di Kalimantan Selatan s.d Data Terakhir Tahun 2021 .....II-31
<b>Tabel 2.16</b>	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 (Juta Rupiah)..II-33
<b>Tabel 2.17</b>	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 (Juta Rupiah).....II-34
<b>Tabel 2.18</b>	PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 (Triliun Rupiah) Menurut Pengeluaran.....II-35
<b>Tabel 2.19</b>	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 - 2022 .....II-36
<b>Tabel 2.20</b>	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan 2018 - 2022 .....II-38
<b>Tabel 2.21</b>	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Kab/Kota Tahun 2018-2022 .....II-38
<b>Tabel 2.22</b>	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan 2010.....II-39
<b>Tabel 2.23</b>	LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 Menurut Pengeluaran .....II-42





<b>Tabel 2.24</b>	Inflasi Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2022 .....	II-45
<b>Tabel 2.25</b>	Indeks Harga Konsumen Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022 .....	II-46
<b>Tabel 2.26</b>	Gini Ratio Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 .....	II-48
<b>Tabel 2.27</b>	Indeks Williamson Kalimantan Selatan (2017-2022).....	II-50
<b>Tabel 2.28</b>	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-52
<b>Tabel 2.29</b>	Kondisi Kemiskinan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-52
<b>Tabel 2.30</b>	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Semester I di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022.....	II-53
<b>Tabel 2.31</b>	Garis Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2018 s.d. 2022 (Rupiah).....	II-54
<b>Tabel 2.32</b>	Garis Kemiskinan Menurut Tempat Tinggal Tahun 2018 s.d. 2022 (Rupiah).....	II-54
<b>Tabel 2.33</b>	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota 2018 s.d. 2022 (Rupiah).....	II-55
<b>Tabel 2.34</b>	Persentase Penduduk Miskin (P0). Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1). dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2022 .....	II-56
<b>Tabel 2.35</b>	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2018-2022 .....	II-57
<b>Tabel 2.36</b>	Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-58
<b>Tabel 2.37</b>	Angka Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. 2018-2022 .....	II-59
<b>Tabel 2.38</b>	Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-60
<b>Tabel 2.39</b>	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan. 2018-2022 .....	II-62
<b>Tabel 2.40</b>	Perkembangan Penyakit menular di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-64
<b>Tabel 2.41</b>	Penyakit Tidak Menular Tahun 2022.....	II-64
<b>Tabel 2.42</b>	Perkembangan Status Gizi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-65
<b>Tabel 2.43</b>	Jumlah Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-66
<b>Tabel 2.44</b>	Perkembangan pengularan perkapita di Provinsi Pulau Kalimantan Tahun 2018 - 2022 .....	II-67
<b>Tabel 2.45</b>	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Selama Tahun 2019-2022.....	II-68
<b>Tabel 2.46</b>	Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-69
<b>Tabel 2.47</b>	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Selama Tahun 2018-2022.....	II-70
<b>Tabel 2.48</b>	Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (Jiwa) Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-71
<b>Tabel 2.49</b>	Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa) Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-72
<b>Tabel 2.50</b>	Berbagai Seni Budaya di Kalimantan Selatan.....	II-72





<b>Tabel 2.51</b>	Pencapaian APS pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022.....	II-74
<b>Tabel 2.52</b>	Pencapaian APK ada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022.....	II-75
<b>Tabel 2.53</b>	Pencapaian APM ada Semua Jenjang Dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022.....	II-76
<b>Tabel 2.54</b>	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru, serta Indikatornya di Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 .....	II-76
<b>Tabel 2.55</b>	Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-78
<b>Tabel 2.56</b>	Data Terkait Rasio Konektivitas Provinsi .....	II-81
<b>Tabel 2.57</b>	Luasan Banjir/Genangan di DAS kewenangan Provinsi Tahun 2022 .....	II-83
<b>Tabel 2.58</b>	Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI di Kalimantan Selatan Tahun (Update) .....	II-84
<b>Tabel 2.59</b>	Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI/DIR di Kalimantan Selatan berdasarkan <i>One Map</i> Irigasi pada Tahun 2019.....	II-84
<b>Tabel 2.60</b>	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 .....	II-85
<b>Tabel 2.61</b>	Tabel Capaian Air Minum Akses Layak Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-86
<b>Tabel 2.62</b>	Tabel Capaian Air Minum Akses Aman Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-88
<b>Tabel 2.63</b>	Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-90
<b>Tabel 2.64</b>	Kondisi Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Akses Layak Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2022 .....	II-92
<b>Tabel 2.65</b>	Kondisi Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Akses Aman Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2022 .....	II-92
<b>Tabel 2.66</b>	Realisasi Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-93
<b>Tabel 2.67</b>	Capaian Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-94
<b>Tabel 2.68</b>	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2018 sampai 2021 .....	II-95
<b>Tabel 2.69</b>	Status RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2022.....	II-96
<b>Tabel 2.70</b>	Jumlah Pekerjaan Konstruksi s.d Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-97
<b>Tabel 2.71</b>	Jumlah Pekerjaan Konstruksi Tahun 2019 – 2022 Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-97
<b>Tabel 2.72</b>	Tabel Data Jumlah ketersediaan tenaga ahli Pekerjaan Konstruksi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	II-99
<b>Tabel 2.73</b>	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 berdasarkan Kewenangan Penanganan.....	II-101
<b>Tabel 2.74</b>	Data Penanganan Permukiman Kumuh Dan Rencana Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-102
<b>Tabel 2.75</b>	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-104
<b>Tabel 2.76</b>	Data peningkatan kualitas RTLH dan Rehabilitasi Rumah	





	Korban Bencana Tahun 2019-2023 .....	II-104
<b>Tabel 2.77</b>	Penangan PSU di Kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-105
<b>Tabel 2.78</b>	Kondisi Keamanan Provinsi Kalimantan Selatan s.d Tahun terakhir 2021 .....	II-106
<b>Tabel 2.79</b>	Capaian Kinerja Urusan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-106
<b>Tabel 2.80</b>	Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-107
<b>Tabel 2.81</b>	Perkembangan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-109
<b>Tabel 2.82</b>	Produksi Pangan Utama di Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022 .....	II-110
<b>Tabel 2.83</b>	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun .....	II-111
<b>Tabel 2.84</b>	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2022 .....	II-112
<b>Tabel 2.85</b>	Tabel Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 .....	II-113
<b>Tabel 2.86</b>	Tabel Capaian IKU (Indeks Kualitas Udara) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 .....	II-114
<b>Tabel 2.87</b>	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 - 2021 .....	II-116
<b>Tabel 2.88</b>	Tabel target penurunan emisi GRK Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 .....	II-118
<b>Tabel 2.89</b>	Sebaran Indikatif Areal Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut .....	II-121
<b>Tabel 2.90</b>	Sebaran Indikatif Areal Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut .....	II-122
<b>Tabel 2.91</b>	Sebaran Indikatif Areal Mitigasi Perubahan Iklim dari Ekosistem Gambut .....	II-123
<b>Tabel 2.92</b>	Sebaran Indikatif Areal Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut .....	II-124
<b>Tabel 2.93</b>	Nilai Indeks Kualitas Lahan Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021, Target 2022 dan Capaian Tahun 2022 .....	II-124
<b>Tabel 2.94</b>	Tabel capaian nilai IKLH Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan .....	II-126
<b>Tabel 2.95</b>	Tabel Status Mutu Air Sungai Provinsi Kalsel sampai dengan Tahun 2022 .....	II-132
<b>Tabel 2.96</b>	Parameter Indeks Kualitas Air (IKA) .....	II-134
<b>Tabel 2.97</b>	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-141
<b>Tabel 2.98</b>	Inventarisasi Peraturan Perundangan terkait Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan .....	II-141
<b>Tabel 2.99</b>	Data Terminal Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-146
<b>Tabel 2.100</b>	Trayek dan Tarif Bus AKAP .....	II-147
<b>Tabel 2.101</b>	Koridor Pelayanan BRT Banjarbakula .....	II-149
<b>Tabel 2.102</b>	Data Eksisting Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan ...	II-150
<b>Tabel 2.103</b>	Persebaran Desa Bebas <i>Blank Spot</i> dan Desa <i>Blank Spot</i> ..	II-153





<b>Tabel 2.104</b>	Jumlah BTS di Provinsi Kalimantan Selatan s.d Tahun Terakhir 2021 .....	II-154
<b>Tabel 2.105</b>	Jumlah Unit Koperasi Menurut Jenis Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-156
<b>Tabel 2.106</b>	Jumlah Jenis Usaha Mikro Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-157
<b>Tabel 2.107</b>	Jumlah Jenis Usaha Menengah Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-157
<b>Tabel 2.108</b>	Jumlah Jenis Usaha Kecil Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-158
<b>Tabel 2.109</b>	Rekap Data UMKM Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-158
<b>Tabel 2.110</b>	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-159
<b>Tabel 2.111</b>	Jumlah Proyek. Rencana. dan Realisasi Investasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2022 PMA dan PMDN .....	II-159
<b>Tabel 2.112</b>	Berikut disajikan data terkait Indek pembangunan literasi masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-162
<b>Tabel 2.113</b>	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-162
<b>Tabel 2.114</b>	Luas Panen, Produksi, serta Produktivitas Padi dan Palawija Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2020-2022 .....	II-164
<b>Tabel 2.115</b>	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan .....	II-165
<b>Tabel 2.116</b>	Skor Minimal Cadangan Pangan Pemerintah CPP Provinsi .....	II-165
<b>Tabel 2.117</b>	Skor Pola Pangan Tingkat Konsumsi .....	II-165
<b>Tabel 2.118</b>	Produksi Delapan Komoditas Buah-buahan Utama di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2021 – 2022 .....	II-165
<b>Tabel 2.119</b>	Produksi Komoditas Sayuran Utama di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2021 - 2022 .....	II-166
<b>Tabel 2.120</b>	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018 - 2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-166
<b>Tabel 2.121</b>	Luas Perkebunan dan Produksi Perkebunan berdasarkan Jenis Perkebunan di Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022 .....	II-167
<b>Tabel 2.122</b>	Produksi Lima Komoditas Tertinggi Komoditas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2021 - 2022 .....	II-168
<b>Tabel 2.123</b>	Jumlah Ternak Besar. Ternak Kecil. dan Unggas (Ekor) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 .....	II-170
<b>Tabel 2.124</b>	Jumlah Produksi Telur (Kg) di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2018-2022 .....	II-171
<b>Tabel 2.125</b>	Capaian Kinerja Urusan Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021-2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-171
<b>Tabel 2.126</b>	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga. Produksi. dan Nilai Produksi Sub Sektor Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2010-2022 .....	II-173
<b>Tabel 2.127</b>	Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-173
<b>Tabel 2.128</b>	Rekapitulasi Produksi Kayu Bulat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-176
<b>Tabel 2.129</b>	Daftar Rekapitulasi Laporan Bulanan Produksi IPHHK-IPHHK Di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-182
<b>Tabel 2.130</b>	Jumlah IUP di Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-183





<b>Tabel 2.131</b>	Jumlah Peningkatan Pelanggan Listrik di Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022 .....	II-183
<b>Tabel 2.132</b>	Jumlah Pelanggan Listrik menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2018 - 2022 .....	II-184
<b>Tabel 2.133</b>	Rasio Elektrifikasi (RE) Kalimantan Selatan s.d Desember 2022 .....	II-184
<b>Tabel 2.134</b>	Capaian Kinerja Urusan ESDM Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-185
<b>Tabel 2.135</b>	Data Kunjungan Wisnus Wisman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2022 .....	II-186
<b>Tabel 2.136</b>	Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017-2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-187
<b>Tabel 2.137</b>	Volume dan Nilai Realisasi Ekspor Menurut Komoditas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-188
<b>Tabel 2.138</b>	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-188
<b>Tabel 2.139</b>	Perkembangan Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 ...	II-189
<b>Tabel 2.140</b>	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan .....	II-189
<b>Tabel 2.141</b>	Capaian Indikator Pilar IDSD untuk Tahun 2022 .....	II-194
<b>Tabel 2.142</b>	Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi di Pulau Kalimantan dan Indonesia Tahun 2021-2022 .....	II-200
<b>Tabel 2.143</b>	Perkembangan impor 10 komoditi dengan volume tertinggi di Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022 .....	II-202
<b>Tabel 2.144</b>	Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan sd Tahun 2022 .....	II-214
<b>Tabel 2.145</b>	Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Kepmen LHK.....	II-216
<b>Tabel 2.146</b>	Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Analisis .....	II-218
<b>Tabel 2.147</b>	Perhitungan Daya Dukung Air Berdasarkan Batas Administrasi Kabupaten s.d Analisis Terakhir Tahun 2020 .....	II-221
<b>Tabel 2.148</b>	Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Semester II Tahun 2022 .....	II-225
<b>Tabel 2.149</b>	Evaluasi Capaian Kinerja Program - Kegiatan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-230
<b>Tabel 2.150</b>	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Program - Kegiatan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	II-299
<b>Tabel 2.151</b>	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Makro Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2022 .....	II-299
<b>Tabel 2.152</b>	Evaluasi Kinerja RPJMD 2021 - 2026 s.d Tahun 2022 .....	II-300
<b>Tabel 2.153</b>	Evaluasi Pelaksanaan Dan Realisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan s.d Tahun Berjalan .....	II-305
<b>Tabel 2.154</b>	Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan di SKPD Lingkup Pemprov Kalsel.....	II-322
<b>Tabel 3.1</b>	PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah).....	III-3
<b>Tabel 3.2</b>	PDRB Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah) .....	III-3
<b>Tabel 3.3</b>	PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2017 – 2022 .....	III-4





<b>Tabel 3.4</b>	LPE Kalimantan Selatan Tahun 2017–2022 Menurut Pengeluaran Beserta Sumber Pertumbuhan .....	III-12
<b>Tabel 3.5</b>	LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2017–2022 Menurut Lapangan Usaha Beserta Sumber Pertumbuhan .....	III-12
<b>Tabel 3.6</b>	PDRB Kalimantan Selatan Menurut Wilayah (Milyar Rupiah)	III-14
<b>Tabel 3.7</b>	Proyeksi /Target Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Tahun 2023 - 2024 .....	III-18
<b>Tabel 3.8</b>	Proyeksi/Target Inflasi Tahun 2023 - 2024 .....	III-20
<b>Tabel 3.9</b>	Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2018 - 2022 .....	III-20
<b>Tabel 3.10</b>	Proyeksi/Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023 - 2024 .....	III-21
<b>Tabel 3.11</b>	Kondisi Kemiskinan Tahun 2018 - 2022.....	III-21
<b>Tabel 3.12</b>	Proyeksi/ Target Tingkat Persentase Penduduk Miskin (P0) Tahun 2023 - 2024 .....	III-22
<b>Tabel 3.13</b>	Asumsi Asumsi Perekonomian Kalimantan Selatan Tahun 2023 - 2024 .....	III-25
<b>Tabel 3.14</b>	LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 Menurut Pengeluaran Beserta Sumber Pertumbuhan .....	III-27
<b>Tabel 3.15</b>	Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 Menurut Pengeluaran.....	III-27
<b>Tabel 3.16</b>	LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 -2024 Menurut Lapangan Usaha Beserta Sumber Pertumbuhan.....	III-28
<b>Tabel 3.17</b>	Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 menurut Lapangan Usaha	III-29
<b>Tabel 3.18</b>	Uraian Faktor Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional...	III-32
<b>Tabel 3.19</b>	Fokus Pembangunan dan Prioritas Daerah pada RKPD 2024 .....	III-34
<b>Tabel 3.20</b>	Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2024.....	III-34
<b>Tabel 3.21</b>	Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Tahun 2022 - 2024 (Rp) .....	III-42
<b>Tabel 3.22</b>	Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016 s.d 2022 (Dalam Miliar Rupiah).....	III-44
<b>Tabel 3.23</b>	Proyeksi Anggaran Belanja Daerah TA 2023 dan TA 2024 (Rp).....	III-44
<b>Tabel 3.24</b>	Anggaran Pembiayaan Daerah TA 2016-2022 (Dalam Juta Rupiah) .....	III-45
<b>Tabel 3.25</b>	Proyeksi Pembiayaan Daerah TA 2022 dan 2023 (Dalam Juta Rupiah) .....	III-46
<b>Tabel 3.26</b>	Proyeksi Target RAPBD TA 2023 dan 2024 (Rp) .....	III-47
<b>Tabel 4.1</b>	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 - 2026 .....	IV-12
<b>Tabel 4.2</b>	Prioritas dan Sub-Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV-17
<b>Tabel 4.3</b>	Sasaran Prioritas dan Sub Prioritas RKPD tahun 2024 .....	IV-19
<b>Tabel 4.4</b>	Sandingan Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah /Program Prioritas Provinsi Tahun 2024 ....	IV-27
<b>Tabel 4.5</b>	Pokok Pikiran DPRD Kalimantan Selatan .....	IV-36
<b>Tabel 4.6</b>	Tabel Inovasi Daerah .....	IV-40
<b>Tabel 5.1.</b>	Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota .....	V-2





<b>Tabel 5.2.</b>	Capaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022 .....	V-3
<b>Tabel 5.3.</b>	Kategori Capaian LPE Kabupaten/ Kota .....	V-5
<b>Tabel 5.4.</b>	Kategori Capaian TPT Kabupaten/ Kota .....	V-7
<b>Tabel 5.5.</b>	TPT Kabupaten/ Kota Tahun 2020 - 2022 .....	V-9
<b>Tabel 5.6.</b>	Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota.....	V-11
<b>Tabel 5.7.</b>	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota Tahun 2020 - 2022 .....	V-13
<b>Tabel 5.8.</b>	Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota.....	V-16
<b>Tabel 5.9.</b>	Indeks Gini Kabupaten/ Kota Tahun 2020 - 2022 .....	V-17
<b>Tabel 5.10.</b>	Kategori Capaian IKLH Kabupaten/ Kota .....	V-19
<b>Tabel 5.11.</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Tahun 2019 - 2021 .....	V-20
<b>Tabel 5.12.</b>	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/ Kota Tahun 2022 .....	V-22
<b>Tabel 5.13.</b>	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan .....	V-26
<b>Tabel 5.14.</b>	Kinerja Makro Kabupaten/Kota Tahun 2021 dan Target Kinerja Tahun 2022-2024 .....	V-47
<b>Tabel 7.1.</b>	Indikator Kinerja Makro Daerah.....	VII-3
<b>Tabel 7.2.</b>	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 .....	VII-4
<b>Tabel 7.3.</b>	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 .....	VII-10



# BAB I

# PENDAHULUAN





# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun ke-tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Provinsi Kalimantan Selatan, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen ini juga merupakan instrumen dalam mengefektifkan muatan-muatan yang terkandung pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022, bahwasanya visi dan misi yang terkandung dalam dokumen RKPD ini berpedoman pada visi dan misi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu **“Kalimantan Selatan MAJU (Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara”**. dengan **5 (lima) misi pembangunan** meliputi: **1. Membangun sumber daya yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur; 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata; 3. Memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian; 4. Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik; 5. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan bencana**. Secara umum arah kebijakan RKPD Tahun 2024, difokuskan pada upaya **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**. Untuk dapat mencapai fokus peningkatan tersebut maka penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 ini dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Lebih dari pada itu dokumen RKPD Tahun 2024 yang dibuat ini juga tidak hanya berakhir dengan mempedomani terhadap dokumen yang disebutkan di awal saja, namun juga perlu mempertimbangkan terhadap kebijakan yang masih berlaku seperti





Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta aturan-aturan lainnya yang masih berlaku.

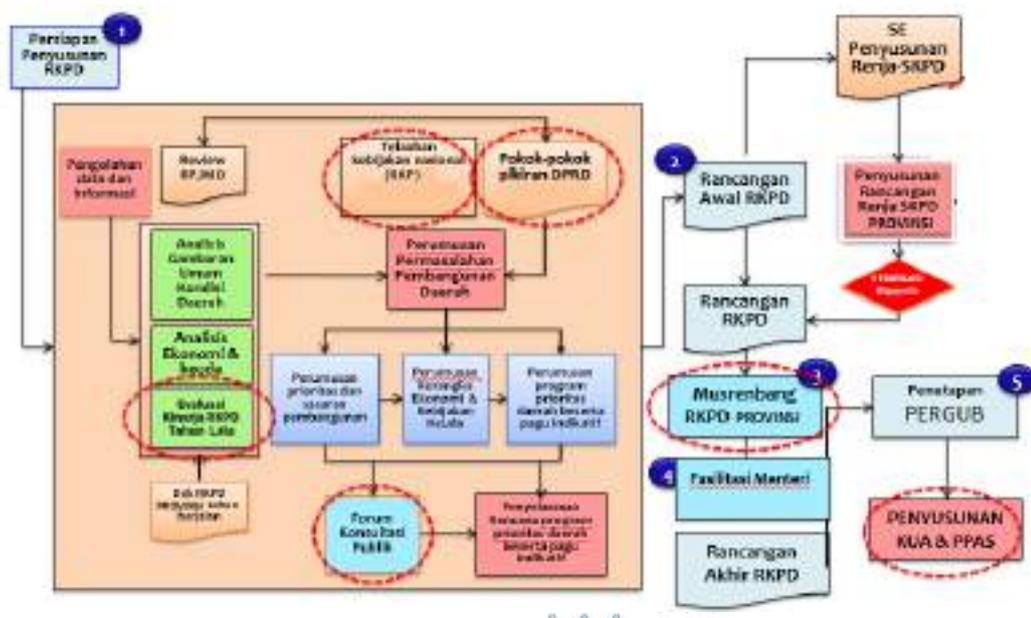
Pada Tahun 2024, ada peristiwa besar berskala nasional yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, berupa Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, yaitu Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung pada **Rabu, 26 Juni 2024**, yang saat ini tahapannya sudah mulai berlangsung sesuai dengan amanat dari ketentuan pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sementara untuk Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota adalah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota yang tahapannya masih dalam proses. Kemudian kondisi akibat resesi ekonomi dunia sebagai konsekuensi global, serta akibat peperangan negara Ukraina dengan Rusia yang tentu belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir berdampak terhadap perkembangan ekonomi nasional yang juga perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Untuk penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 selain dalam rangka memenuhi ketentuan regulasi sekaligus juga menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024. Proses penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 yang berpedoman pada PERMENDAGRI 86 Tahun 2017 dan





akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam hal mekanisme proses penyusunan RKPD dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:

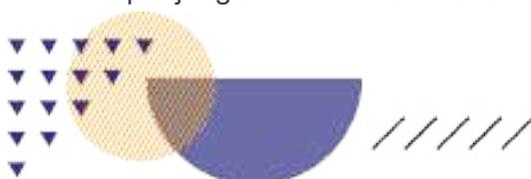


Gambar 1.1 Alur Proses Penyusunan RKPD Provinsi

## 1.2 Dasar Hukum

Peraturan dan perundangan yang terkait sebagai Dasar Hukum Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);





4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara





- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779)
  13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
  14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);





18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun



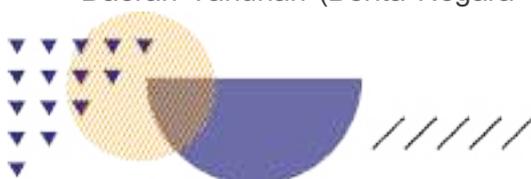


- 2021 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor .....);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015





- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);





42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor .....);
45. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398) ;
46. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
47. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ/ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
48. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Menteri Dalam Negeri;
49. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventrisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;





51. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
52. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
53. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035;
54. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
55. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
56. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
57. Peraturan Gubernur Nomor 020 s/d 056 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
58. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 057 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.
59. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.





### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, oleh karena itu RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 merupakan bagian dari sistem Perencanaan Nasional dalam rangka untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional. Selanjutnya dokumen perencanaan pembangunan daerah harus sinkron dan saling terkait dengan dokumen nasional dan dokumen yang ada di masing-masing daerah.

Sinkronisasi dan saling keterkaitan antara RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

#### 1. RKPD Kalimantan Selatan Tahun 2024 dengan RKP Nasional Tahun 2024

Dalam Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga terjadi sinergisitas antar dokumen nasional dan daerah.

#### 2. RKPD Kalimantan Selatan Tahun 2024 dengan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 khususnya dalam penetapan lokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

#### 3. RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan dalam tahun berjalan dan sekaligus merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Tahun 2021 - 2026. Sebagai penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.





## 1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 adalah secara substansial untuk memberi arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, dan secara normatif dimaksudkan untuk menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sekaligus sebagai instrumen evaluasi untuk menilai pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:



Menyediakan satu acuan bagi seluruh Kepala SKPD Provinsi Kalimantan Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2022



Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022



Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan



Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Pusat.



Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target penetapan kinerja



Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan



Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan/Pengendalian



Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

## 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan Dokumen RKPD tahun 2024 terdiri dari 8 bab yang sistematikanya dengan mengacu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negetri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan





Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan inilah selanjutnya RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

**BAB - 1. PENDAHULUAN,**

Memuat penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

**BAB - 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH,**

Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek pelayanan umum, Aspek daya saing daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

**BAB - 3. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH,**

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2024 akan datang.

**BAB - 4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH,**

Memuat isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas dan sasaran pembangunan, dan inovasi pembangunan Kalimantan Selatan.

**BAB - 5. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA,**

Memuat indikator makro Kabupaten/Kota, Kebijakan Pembangunan Kewilayahan, dan Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota yang secara terpadu dan komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan yang ada di wilayah kabupaten/kota.

**BAB - 6. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH,**

Mengemukakan secara eksplisit prioritas dan sub prioritas, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta pendanaan yang diperlukan

**BAB - 7. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,**





Berisi tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

## BAB - 8. PENUTUP



# **BAB II**

# **GAMBARAN**

# **UMUM**

# **KONDISI**

# **DAERAH**



**RKPD TAHUN 2024**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



### 2.1 Kondisi Umum Daerah

Gambaran umum Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun hal ini memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.





## 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi pada bagian ini membahas lingkup geografi dari aspek fisik wilayah yang mencakup topografi, geologi, hidrologi, iklim, dan tutupan lahan. Aspek fisik wilayah tersebut mengkaji fenomena alam yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan dimana fenomena tersebut terjadi secara alamiah.

### 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1950 sebagai bagian administrasi resmi dari Pulau Kalimantan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956. Provinsi Kalimantan Selatan terbagi menjadi 13 kabupaten/kota yang terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota dengan Ibu Kota Provinsi berada di Kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus pusat pemerintahan semenjak tahun 2015 sebagian besar aktivitasnya berpindah ke Kota Banjarbaru.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati melimpah. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk asli maupun para perantau untuk mengembangkan wilayahnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah Pulau Kalimantan bagian selatan. Sebagai tindak lanjut dalam pengembangan wilayah administrasi, maka dibentuk Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Agustus 1950 sebagai bagian administrasi resmi dari Pulau Kalimantan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956.

- 114°19' 13" hingga 116° 33' 28" Bujur Timur
- 1°21' 49" hingga 4°10'14" Lintang Selatan

Adapun wilayah Provinsi Kalimantan Selatan secara administratif berbatasan dengan :

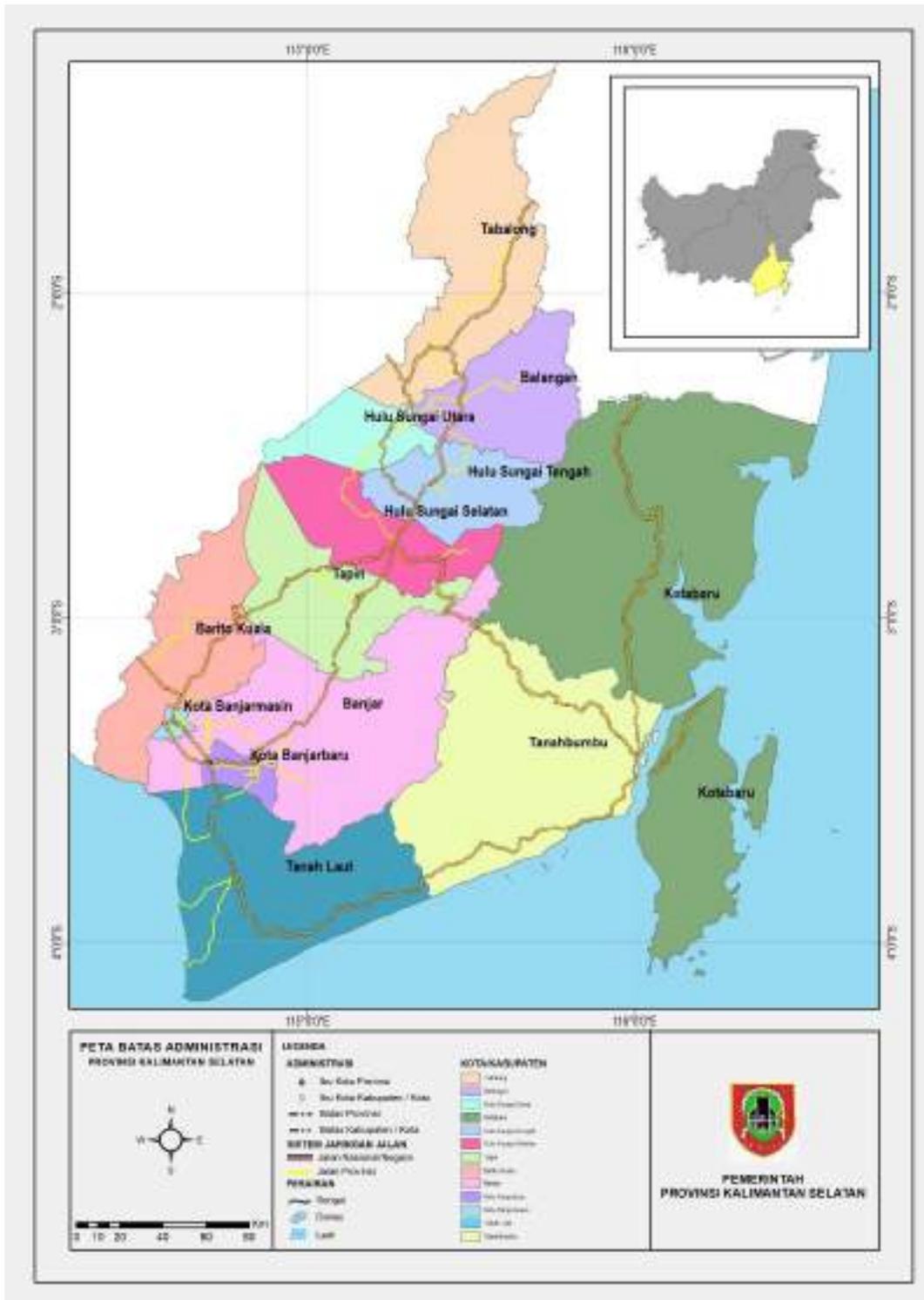
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 38.744,23 km<sup>2</sup> yang terbagi habis ke dalam 13 kabupaten/kota yang terdiri atas 11 Kabupaten dan 2 kota dengan pusat pemerintahan yang sekaligus merupakan ibu kota yakni





Kota Banjarbaruhs. Adapun Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 156 kecamatan dan 1.943 desa/kelurahan dengan rincian sebagaimana pada Tabel 2.1.



**Gambar 2.1**      **Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Selatan**

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2022





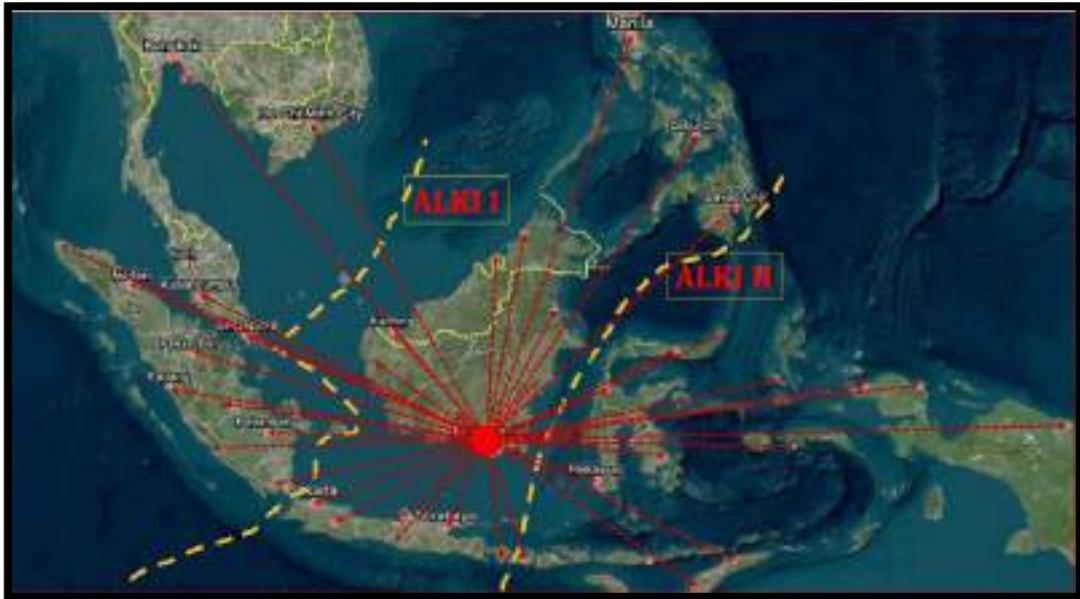
**Tabel 2.1** Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022

Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kecamatan	Desa	Kelurahan
Tanah Laut	3.840,20	11	135	5
Kotabaru	9.480,17	22	202	4
Banjar	4.588,42	20	290	13
Barito Kuala	2.430,62	17	201	6
Tapin	2.156,98	12	135	9
Hulu Sungai Selatan	1.691,62	11	148	4
Hulu Sungai Tengah	1.468,77	11	169	8
Hulu Sungai Utara	940,19	10	219	5
Tabalong	3.473,07	12	131	10
Tanah Bumbu	4.888,23	12	149	5
Balangan	1.828,51	8	156	3
Banjarmasin	98,37	5	-	52
Banjarbaru	305,15	5	-	20
Kalimantan Selatan	37.190,30	156	1.935	144

Sumber: BPS Prov Kalsel Tahun 2023

Berdasarkan letak wilayah, Provinsi Kalimantan Selatan berada pada posisi sentral atau di tengah-tengah Indonesia dan dilalui oleh ALKI II yang merupakan alur pelayaran internasional hal ini merupakan berpotensi besar terhadap perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan khususnya. Hal ini dapat terlihat pada gambar sebagai berikut;





**Gambar 2.2** Peta Wilayah KalSel terhadap wilayah sekitar, ALKI 1, dan ALKI 2

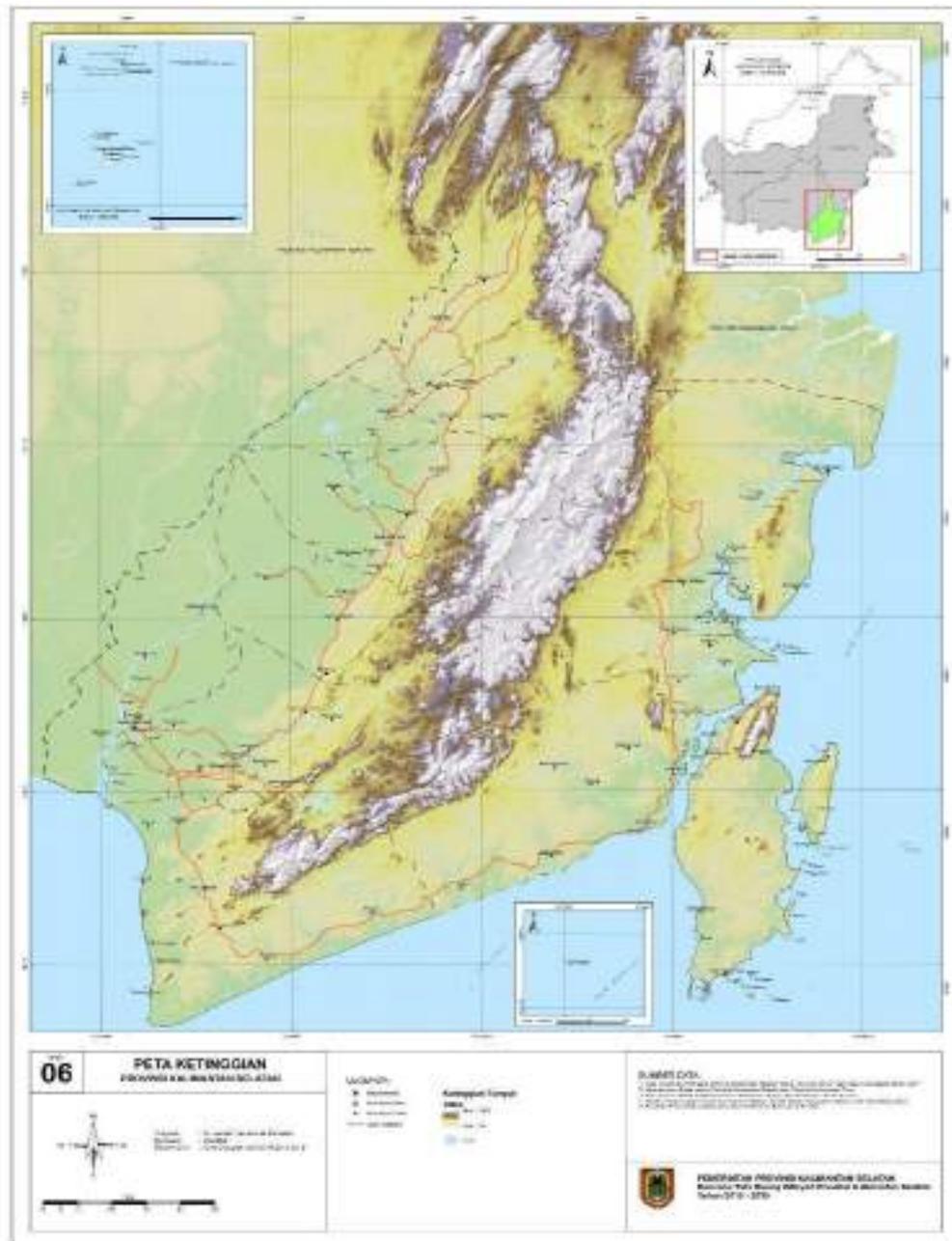
Sumber : Google Earth, diolah Tahun.2022

Dibandingkan dengan wilayah provinsi lain di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai luas wilayah yang paling kecil, yakni hanya 6,98% dari luas pulau Kalimantan. Hal ini memudahkan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sampai ke pelosok, sehingga memiliki peluang pengembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan.

#### 2.1.1.2 Topografi

Kondisi topografi Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh kemiringan lahan yang landai (2-8%) pada bagian barat dan timurnya. Sementara kemiringan lahan yang terjal umumnya berada pada bagian tengah, yaitu disekitar Pegunungan Meratus dimana kemiringan lahan bisa >40%. Sedangkan jika dilihat dari sisi ketinggian wilayah, 27,33% wilayah berada pada ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut dan 23,57% wilayah berada pada ketinggian >100 meter di atas permukaan laut. Lebih jelasnya mengenai Klasifikasi topografi ini dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Tabel 2.2.





**Gambar 2.3** Peta Topografi Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018





**Tabel 2.2** Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Lereng/Kemiringan dan Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut Tahun 2022

KELERENGAN/KETINGGIAN	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
Kelas Lereng (%)	3.753.052	100,00
2	1.497.096	39,89
2-8	1.010.881	26,93
8-15	300.198	8,00
15-25	378.628	10,09
25-40	335.054	8,93
>40	231.195	6,16
Kelas Ketinggian (m)	3.753.052	100,00
0-7 m	888.171	23,66
> 7-25 m	954.322	25,43
> 25-100 m	1.025.655	27,33
> 100-500 m	675.254	17,99
> 500-1.000 m	165.905	4,42
> 1.000 m	43.745	1,16

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Wilayah Kalimantan Selatan banyak dialiri sungai seperti Sungai Barito, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, Sungai Tapin, Sungai Kintap, Sungai Batulicin, Sungai Sampanahan, dan sebagainya. Umumnya sungai-sungai tersebut berpangkal pada Pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar.

Berdasarkan kondisi topografi yang relatif datar ini memberikan keuntungan dalam pengembangan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Kalimantan Selatan yang banyak dialiri sungai ini menjadikan potensi besar terhadap pengembangan pertanian, pariwisata, dan perdagangan.

### 2.1.1.3 Geologi

Bentang alam pegunungan di daratan Provinsi Kalimantan Selatan ini, didominasi oleh Pegunungan Meratus dengan puncak tertinggi dicapai oleh Gunung Batu Besar (1.892 mdpl), membentang dengan arah barat daya – timur laut mulai dari Pelaihari (Kabupaten Tanah Laut) di bagian barat daya hingga ke daerah Kabupaten Tabalong di bagian utara.



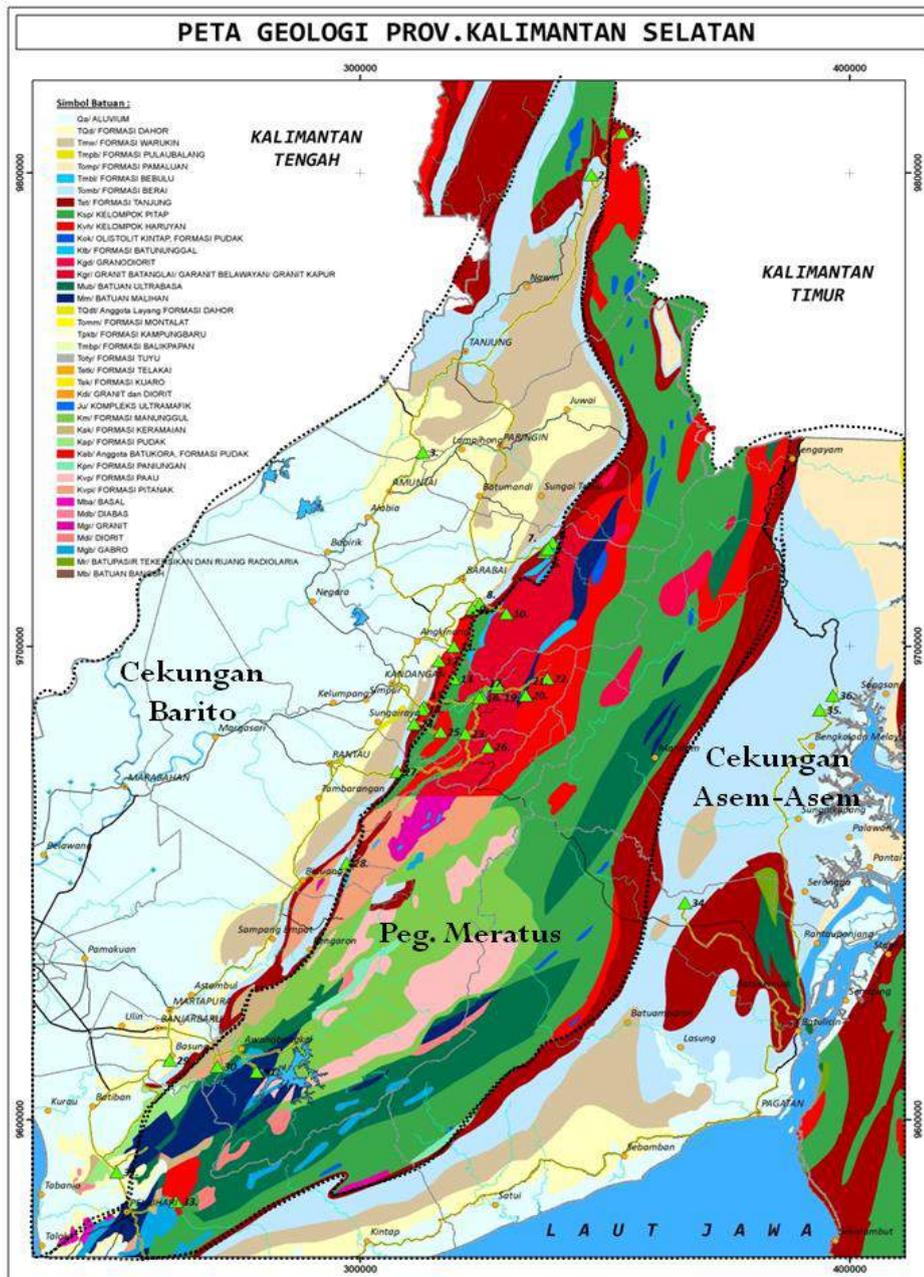


Selain itu, di Pulau Laut bentang alam pegunungan ini menempati Gunung Sebatung di Kotabaru yang mencapai ketinggian 676 mdpl. Sementara itu bentang alam dataran luas yang mendominasi Provinsi Kalimantan Selatan tersebar di bagian barat (Dataran S. Barito) dan di bagian timur (Dataran Pagatan-Batulicin). Dua dataran ini dipisahkan oleh jalur Pegunungan Meratus karena sungai-sungai beserta anak-anak sungai yang mengalir di kedua dataran tersebut berhulu di jalur Pegunungan Meratus.

Berdasarkan Peta Geologi Bersistem Indonesia berskala 1 : 250.000, yang disusun dan diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung, diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 4 (empat) Lembar Peta Geologi, yaitu Peta Geologi Lembar Banjarmasin, Peta Geologi Lembar Amuntai, Peta Geologi Lembar Sampanahan, dan Peta Geologi Lembar Kotabaru, dengan daerah pemetaan disusun oleh berbagai jenis batuan berumur muda (Kuarter) hingga berumur tua (Yura).

Secara geologi, Provinsi Kalimantan Selatan tidak dilalui jalur lempeng tektonik baik luar maupun dalam sehingga relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan bencana gunung berapi vulkanik, hal ini memberikan keamanan dalam berinvestasi di Kalimantan Selatan. Berdasarkan kondisi Geologi di Provinsi Kalimantan Selatan, daerah ini sebagian besar merupakan daerah subur dan sangat cocok untuk kegiatan bercocok tanam (pertanian dan perkebunan). Pada wilayah cekungan Barito dan cekungan asam-asam juga memiliki potensi kekayaan sumberdaya mineral sehingga bisa dijadikan wilayah eksplorasi seperti untuk pertambangan maupun penggalian. Fenomena geologi di Provinsi Kalimantan Selatan ini juga melahirkan batuan-batuan unik yang tersebar, sehingga memiliki potensi juga untuk dijadikan ekowisata atau geopark karena adanya keunikan akan batuan tersebut.





**Gambar 2.4**      Peta Geologi Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Geopark Meratus (2020)

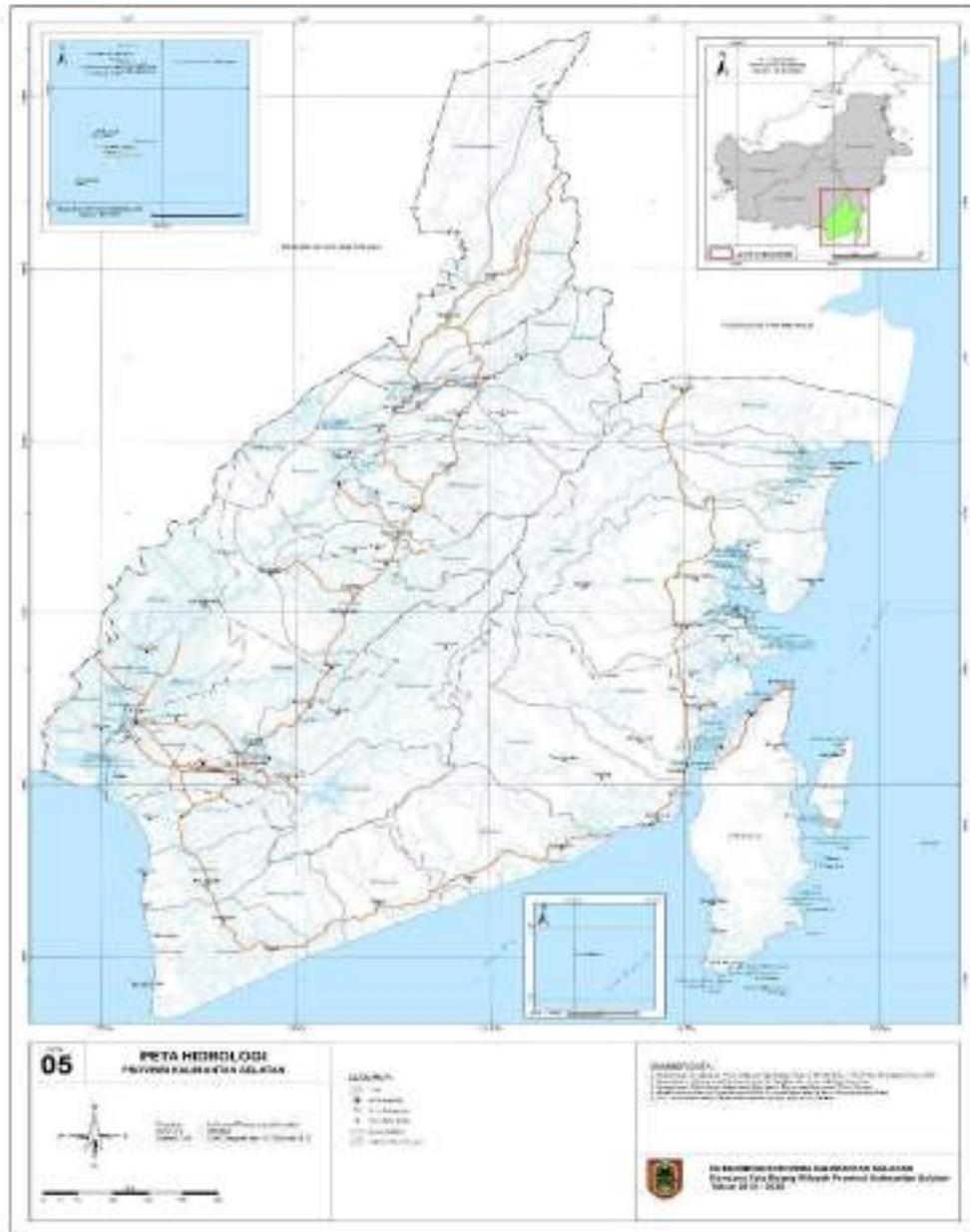
#### 2.1.1.4      Hidrologi

Wilayah Kalimantan Selatan terbagi dalam 13 wilayah Daerah, Luas DAS Barito adalah ± 363.357.868 ha yang mencakup beberapa kabupaten/kota dan DAS terpanjang ada di Kabupaten Kotabaru sebesar 92,738,847 ha dan di urutan kedua terpanjang adalah Kabupaten Tanah Bumbu 50,147,199 ha Tahun





2019 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan seluas ± 3.753.052 Ha. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.5.



Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018

**Gambar 2.5** Peta Hidrologi Provinsi Kalimantan Selatan





**Tabel 2.3** Pembagian Luas DAS Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
Tanah Laut	38.050.887
Kotabaru	92.738.847
Banjar	45.778.543
Barito Kuala	22.640.090
Tapin	21.662.117
Hulu Sungai Selatan	17.225.787
Hulu Sungai Tengah	14.169.582
Hulu Sungai Utara	8.622.199
Tabalong	29.515.527
Tanah Bumbu	50.147.199
Balangan	18.519.277
Banjarmasin	995.388
Banjarbaru	3.292.425
Kalimantan Selatan	363.357.868

Sumber: BP DAS Barito (2022)

#### 2.1.1.5 Meteorologi dan Klimatologi

Curah hujan tertinggi pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan (pada Stasiun Meteorologi Syamsuddin Noor Banjarbaru), terjadi pada bulan November dengan jumlah intensitas curah hujan 430 mm dan terendah pada bulan Agustus dengan jumlah intensitas curah hujan 80,5 mm dan temperatur udara sekitar 24,0°C hingga 33,9°C. Rincian lengkap terkait kondisi iklim di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Tabel 2.4.





**Tabel 2.4** Kondisi Iklim di Kalimantan Selatan Tahun 2022

Variabel Iklim/Cuaca/Tahun	Minimum	Maksimum	Rata-rata
<b>Temperatur (°C)</b>			
Tahun 2020	21	35,4	28,6
Tahun 2021	20,7	35	28,2
Tahun 2023	21,1	34,7	28,3
<b>Kelembaban (%)</b>			
Tahun 2020	44	100	78
Tahun 2021	44	100	78,6
Tahun 2023	47	100	78,7
<b>Kecepatan Angin (m/detik)</b>			
Tahun 2020	colm	13,36	1,59
Tahun 2021	colm	20	1,7
Tahun 2023	colm	11,8	2,7
<b>Tekanan Udara (mb)</b>			
Tahun 2020	998,1	1.023,0	1.003,9
Tahun 2021	997,9	1009,5	1.003,8
Tahun 2023	997,8	1008,5	1003,4
<b>Jumlah Curah Hujan (mm)</b>			
Tahun 2020			3.141,5
Tahun 2021			3.581,1
Tahun 2023			2.738,1
<b>Jumlah Hari Hujan (hari)</b>			
Tahun 2020			240
Tahun 2021			250
Tahun 2023			206
<b>Penyinaran Matahari (%)</b>			
Tahun 2020			58,75
Tahun 2021			52,50
Tahun 2023			50,4

Sumber: BMKG Prov. Kalsel 2023

Secara umum Provinsi Kalimantan Selatan di dominasi tipe iklim C2 (Schmidt & Ferguson) yang meliputi wilayah hampir seluruh Kabupaten/kota





kecuali Kabupaten Tabalong, sebagian Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Hal ini mengindikasikan bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh kelas tipe iklim yang agak basah, dipengaruhi oleh adanya vegetasi hutan rimba dan juga sedikit pengaruh dari angin laut. Menurut klasifikasi iklim oleh Oldeman, maka tipe iklim C lebih cocok untuk tanaman padi sekali dan tanaman palawija dua kali setahun.

#### 2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 12 jenis. Dengan jenis penggunaan lahan terluas adalah hutan seluas 1.109.500,41 ha (29,62 %), dan yang terkecil sungai/danau/waduk/telaga seluas 38.809,01 ha (1,04%). Persentase penggunaan lahan yang produktif pada tahun 2020 sekitar 60,26 % dari seluruh luas lahan, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 dengan luas lahan produktif sebesar 50,77%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar lahan di Kalimantan Selatan sudah dimanfaatkan, dengan demikian dibutuhkan optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendukung pengembangan wilayah. Luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5** Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Penggunaan Lahan	Toponim	Luas (Ha)	Percentage
Badan Air	A	31.203,81	0,8%
Belukar	B	373.931,59	10,1%
Bandara/Pelabuhan	Bdr	700,68	0,0%
Belukar Rawa	Br	209.897,59	5,7%
Hutan Mangrove Primer	Hmp	10.721,33	0,3%
Hutan Mangrove Sekunder	Hms	49.095,14	1,3%
Hutan Lahan Kering Primer	Hp	48.666,23	1,3%
Hutan Rawa Sekunder	Hrs	2.979,09	0,1%
Hutan Lahan Kering Sekunder	Hs	685.295,78	18,5%
Hutan Tanaman	Ht	128.056,76	3,4%
Pertambangan	Pb	103.825,92	2,8%
Pertanian Lahan Kering Campur	Pc	557.113,17	15,0%
Perkebunan	Pk	830.367,06	22,4%
Permukiman	Pm	73.988,85	2,0%
Pertanian Lahan Kering	Pt	121.070,31	3,3%





Penggunaan Lahan	Toponim	Luas (Ha)	Percentage
Rawa	Rw	38.060,00	1,0%
Sawah	Sw	378.326,41	10,2%
Tanah Terbuka	T	29.274,88	0,8%
Tambak	Tm	34.474,55	0,9%
Transmigrasi	Tr	5.338,37	0,1%
Total		3.712.387,52	100%

Sumber: KLHK Tahun 2022





**Tabel 2.6** Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Badan Air	Belukar	Bandara/Pelabuhan	Belukar Rawa	Hutan Mangrove Primer	Hutan Mangrove Sekunder	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Rawa Sekunder	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Tanaman	Pertambangan	Pertanian Lahan Kering Campur	Perkebunan	Permukiman	Pertanian Lahan Kering	Rawa	Sawah	Tanah Terbuka	Tambak	Transmigrasi	Total
Balangan	82	25.845		2.447			9.764		33.911	1.937	10.578	61.894	20.135	2.392	3.456		9.371	1.000			182.811
Banjar	8.528	38.691		12.128			5.280		83.929	40.553	8.024	78.123	78.497	7.257	27.047		64.702	6.166	893		459.819
Banjarbaru		513	107	2.609							1.888	2.774	1.802	10.322	2.580		7.625	313			30.533
Banjarmasin	675			360								103		5.186	485		3.039				9.847
Barito Kuala	8.343			23.873	84	1.172		230				5.994	67.661	3.555	13.053		113.555	102	4.124	924	242.670
Hulu Sungai Selatan	826	14.812		31.907			3.275		1.518	225	1.682	37.491	20.787	1.858	4.018	6.556	42.552	1.699			169.207
Hulu Sungai Tengah	70	15.709		9.594			12.256		19.964		190	52.073	585	4.307	6.228	4.361	31.800	204			157.340
Hulu Sungai Utara	723			38.407				63				2.818	5.476	2.904	655	25.185	14.076	400			90.707
Kotabaru	7.153	136.394	394	14.703	10.322	42.015	13.500	187	253.736	26.340	16.988	101.889	245.166	6.808	29.058	156	4.101	4.883	18.247	2.166	934.205
Tabalong	543	56.198	57	4.432			652	2.499	132.574	6.563	9.552	51.346	56.826	5.620	6.511	404	11.029	2.002	90	372	347.270
Tanah Bumbu	1.971	38.191	74	9.894	168	3.515			127.816	28.967	28.620	65.015	139.181	10.537	12.534	1.055	6.548	5.174	7.532	1.524	488.316





Kabupaten/ Kota	Badan Air	Belukar	Bandara/Pelabuhan	Belukar Rawa	Hutan Mangrove Primer	Hutan Mangrove Sekunder	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Rawa Sekunder	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Tanaman	Pertambangan	Pertanian Lahan Kering Campur	Perkebunan	Permukiman	Pertanian Lahan Kering	Rawa	Sawah	Tanah Terbuka	Tambak	Transmigrasi	Total
Tanah Laut	762	38.873	68	20.571	147	2.394	3.939		28.501	16.718	18.056	71.171	118.566	9.435	9.068	343	34.768	6.808	3.589	352	384.131
Tapin	1.528	8.707		38.972					3.347	6.753	8.247	26.424	75.685	3.808	6.376		35.162	525			215.534
<b>Total</b>	<b>31.204</b>	<b>373.932</b>	<b>701</b>	<b>209.898</b>	<b>10.721</b>	<b>49.095</b>	<b>48.666</b>	<b>2.979</b>	<b>685.296</b>	<b>128.057</b>	<b>103.826</b>	<b>557.113</b>	<b>830.367</b>	<b>73.989</b>	<b>121.070</b>	<b>38.060</b>	<b>378.326</b>	<b>29.275</b>	<b>34.475</b>	<b>5.338</b>	<b>3.712.388</b>

Sumber: KLHK, 2022

RKPD TAHUN 2024  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





### 2.1.1.7 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

Penduduk Kalimantan Selatan selama kurun waktu antara tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami perkembangan yang cukup variatif. Berdasarkan data BPS Hasil Sensus Penduduk tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022, penduduk Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 4.182.080 jiwa, sementara pada tahun 2021 berjumlah 4.122.576 jiwa yang diambil dari Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2035 BPS RI (2018-2022). Adapun rincian persebaran jumlah penduduk terdapat pada Tabel 2.7

**Tabel 2.7** Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota Tahun 2018-2022

Kabupaten /Kota	JUMLAH PENDUDUK				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	339.195	343.890	348.966	354.340	361.044
Kotabaru	336.719	342.217	325.622	329.483	334.158
Banjar	580.026	588.066	565.635	572.109	579.910
Barito kuala	310.016	313.595	313.021	316.963	321.769
Tapin	189.081	191.372	189.475	191.801	194.628
Hulu Sungai Selatan	235.217	237.702	228.006	229.960	232.212
Hulu Sungai Tengah	269.384	272.419	258.721	260.754	263.061
Hulu Sungai Utara	234.604	237.573	226.727	228.831	231.290
Tabalong	250.809	254.322	253.305	256.903	261.353
Tanah Bumbu	351.673	360.187	322.646	328.146	335.079
Balangan	129.505	131.428	130.355	132.213	134.512
Kota Banjarmasin	700.869	708.606	657.663	662.320	667.489
Kota Banjarbaru	255.597	262.719	253.442	258.753	265.575
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>4.182.695</b>	<b>4.244.096</b>	<b>4.073.584</b>	<b>4.122.576</b>	<b>4.182.080</b>

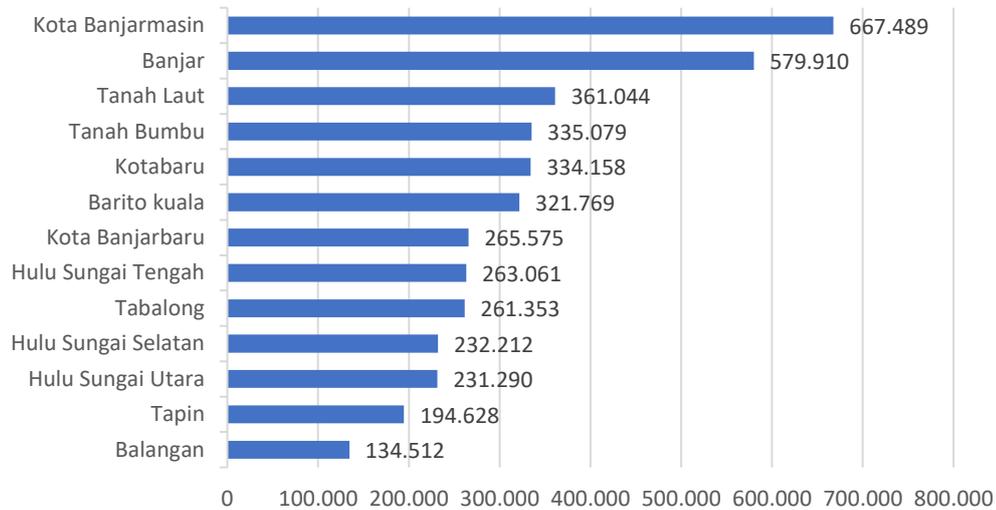
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Pada Tahun 2022 Kota Banjarmasin merupakan Kota / Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 667.489 Jiwa dan Kabupaten Balangan merupakan Kota/Kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebesar 134.512 Jiwa. Sebagaimana pada Tabel 2.7.



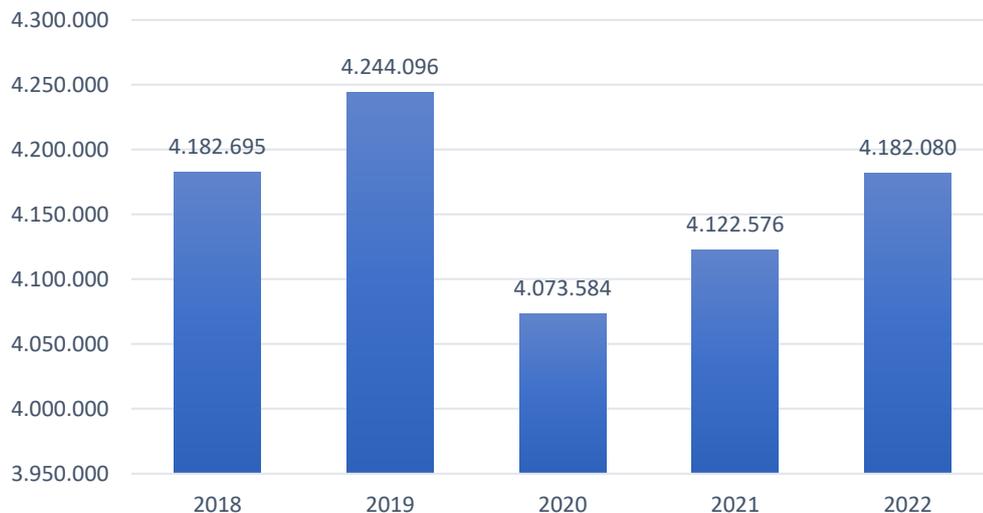


**Tabel 2.8** Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan berdasarkan Kabupaten dan Kota Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Tabel 2.9** Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Kepadatan penduduk di Kalimantan Selatan tahun 2022 mencapai 4.128.080 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2022 mengalami kenaikan terhitung dari tahun 2020. Dari segi Kepadatan Penduduk di 13 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Banjarmasin dengan kepadatan sebesar 9.134.21/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Kotabaru sebesar 34,34 jiwa/km<sup>2</sup>. Rincian jumlah penduduk menurut





wilayah, jenis kelamin dan kepadatan penduduk di Kalimantan Selatan seperti terlihat pada Tabel 2.10

**Tabel 2.10** Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
	Laki-Laki	Perempuan	Total			
Tanah Laut	185076	175968	361044	105,18	3.631,35	99,42
Kotabaru	172613	161545	334158	106,85	9.482,73	35,24
Banjar	292892	287018	579910	102,05	4.668,00	124,23
Barito Kuala	162909	158860	321769	102,55	2.996,46	107,38
Tapin	98346	96282	194628	102,14	2.700,82	72,06
Hulu Sungai Selatan	116453	115759	232212	100,60	1.804,94	128,65
Hulu Sungai Tengah	132155	130906	263061	100,95	1.472,00	178,71
Hulu Sungai Utara	115396	115894	231290	99,57	892,7	259,09
Tabalong	132537	128816	261353	102,89	3.766,97	69,38
Tanah Bumbu	171902	163177	335079	105,35	5.006,96	66,92
Balangan	67958	66554	134512	102,11	1.878,30	71,61
Kota Banjarmasin	334110	333379	667489	100,22	72	9270,68
Kota Banjarbaru	133558	132017	265575	101,17	371	715,84
Kalimantan Selatan	2115905	2066175	4182080	102,41	38.744,23	107,94

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2023)

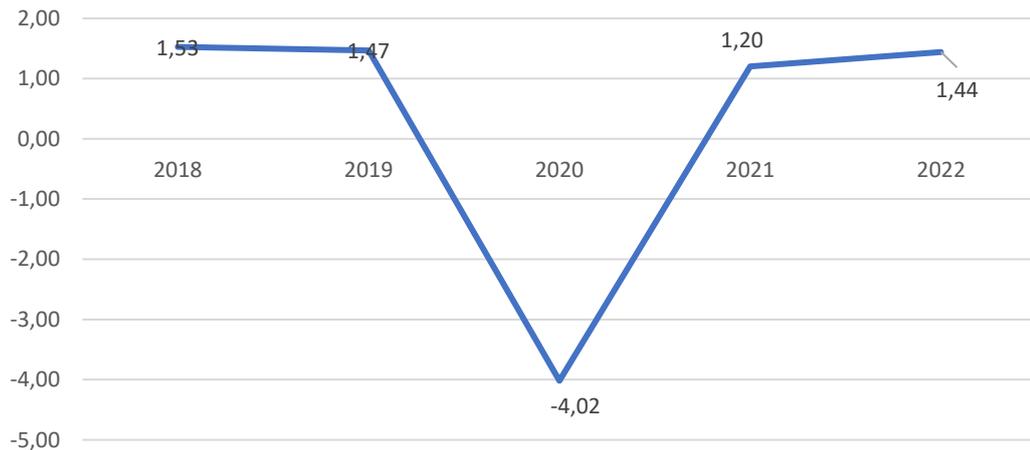
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2022 hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 2.115.905 jiwa, sedangkan perempuan sebesar 2.066.175 jiwa. Angka tersebut menjadikan *sex ratio* penduduk mencapai 102,41 yang mengindikasikan bahwa di antara 100 penduduk berjenis kelamin perempuan, terdapat 102-106 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Hal ini disajikan pada Tabel 2.10.





### 2.1.1.8 Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

Pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan selama periode Tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebesar 1,62% pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -4,02% jumlah penduduk Kalimantan selatan. Dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami kenaikan 2,65 % artinya dalam kurun waktu selama 5 tahun pertumbuhan penduduk mengalami penurunan sebesar 1,62%.



**Gambar 2.6** Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2023

Pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2018-2022 didominasi oleh Kota Banjarbaru 1.57% dan Kabupaten Tanah Bumbu 1.27%, disusul Tanah Laut 1.15, sementara yang terendah adalah Kota Banjarmasin 0.53% dan Hulu Sungai Tengah 0.59% dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 0.64%.





**Tabel 2.11** Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten Kota Tahun 2018-2022

Kabupaten /Kota	JUMLAH PENDUDUK (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	1,46	1,38	1,48	1,54	1,89
Kotabaru	1,63	1,63	-4,85	1,19	1,42
Banjar	1,48	1,39	-3,81	1,14	1,36
Barito kuala	1,25	1,15	-0,18	1,26	1,52
Tapin	1,29	1,21	-0,99	1,23	1,47
Hulu Sungai Selatan	1,13	1,06	-4,08	0,86	0,98
Hulu Sungai Tengah	1,08	1,13	-5,03	0,79	0,88
Hulu Sungai Utara	1,30	1,27	-4,57	0,93	1,07
Tabalong	1,50	1,40	-0,40	1,42	1,73
Tanah Bumbu	2,47	2,42	-10,42	1,70	2,11
Balangan	1,57	1,48	-0,82	1,43	1,74
Kota Banjarmasin	1,17	1,10	-7,19	0,71	0,78
Kota Banjarbaru	2,89	2,79	-3,53	2,10	2,64
Kalimantan Selatan	1,53	1,47	-4,02	1,20	1,44

Sumber: BPS Kalimantan Selatan (2023)

Pada tahun 2022 pertumbuhan penduduk selama periode 2018-2022 di Kabupaten/ Kota terkoreksi berdasarkan hasil sensus Penduduk pada tahun 2020.

### 2.1.1.9 Penduduk Menurut Pekerjaan

**Tabel 2.12** Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan menurut Jenis Pekerjaan/Lapangan Usaha Tahun 2021 dan 2022

No	Jenis Lapangan Usaha	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah	%	Jumlah	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	694.45	33,33	678.086	32,41
B	Pertambangan dan Penggalan	70.7	3,39	86.667	4,14
C	Industri Pengolahan	183.041	8,79	170.244	8,14
D	Pengadaan Listrik, Gas	3.474	0,17	6.687	0,30
E	Pengadaan Air	6.398	0,31	4.563	0,22
F	Konstruksi	109.031	5,23	113.680	1,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Dan Reparasi Mobil dan sepeda Motor	412.249	19,79	388.261	18,56
H	Transportasi dan Pergudangan	82.39	3,95	80.610	0,76





No	Jenis Lapangan Usaha	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah	%	Jumlah	%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minuman	142.985	6,86	152.999	7,31
J	Informasi dan Komunikasi	13.429	0,64	8.333	0,40
K	Jasa Keuangan	16.109	0,77	16.273	0,78
L	Real Estate	2.912	0,14	4.179	0,20
M.N	Jasa Perusahaan	20.15	0,97	31.306	1,50
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	81.334	3,90	95.825	4,58
P	Jasa Pendidikan	109.137	5,24	114.424	5,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32.014	1,54	35.162	1,68
R.S. T.U	Jasa lainnya	103.516	4,97	104.926	5,02
	<b>Jumlah Penduduk Bekerja</b>	<b>2.083.319</b>	<b>51,14</b>	<b>2.092.225</b>	<b>66,09</b>
	<b>Jumlah Penduduk Angkatan Kerja</b>	<b>2.186.967</b>	<b>53,69</b>	<b>2.196.250</b>	<b>69,38</b>
	<b>Jumlah Penduduk Pencari Kerja</b>	<b>103.648</b>	<b>4,74</b>	<b>104.025</b>	<b>4,74</b>
	<b>Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>1.886.617</b>	<b>46,31</b>	<b>1.055.086</b>	<b>33,33</b>
	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>4.073.584</b>	<b>100</b>	<b>4.182.080</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2023

#### 2.1.1.10 Penduduk Menurut Usia Sekolah

Penduduk usia sekolah yang menerima layanan pendidikan di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 mencapai 99,64% untuk usia 7-12 tahun , 92,43% untuk usia 13-15 tahun, 68,67% untuk usia 16-18 tahun, dan 23,82% untuk tingkat perguruan tinggi. Secara rinci Persentase penduduk menurut jenis kelamin yang menerima layanan pendidikan sebagaimana tabel berikut.





**Tabel 2.13** Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kalimantan Selatan Tahun 2022

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Tidak/ Belum Pernah Sekolah (%)	Masih Sekolah (%)	Tidak Sekolah lagi (%)
<b>Laki-laki</b>			
7-12	0,84	99,16	-
13-15	0,81	92,67	6,52
16-18	0,84	69,56	29,60
19-24	0,76	23,61	75,63
7-24	0,81	69,77	29,42
<b>Perempuan</b>			
7-12	0,39	99,61	-
13-15	0,46	94,40	5,14
16-18	0,37	69,03	30,60
19-24	0,28	25,81	73,91
7-24	0,36	70,34	29,30
<b>Laki-laki dan Perempuan</b>			
7-12	0,62	99,38	-
13-15	0,64	93,50	5,85
16-18	0,62	69,31	30,07
19-24	0,52	24,70	74,77
7-24	0,59	70,05	29,36

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tingkat sekolah dasar (7-12 tahun) hampir tidak terjadi perbedaan partisipasi baik laki-laki maupun perempuan demikian juga pada usia menengah pertama (13-15 tahun). Namun, pada usia sekolah menengah atas (16-18 tahun) terjadi disparitas antara laki-laki sebesar 69,56 dan perempuan sebesar 69,03, di mana persentase laki-laki yang sekolah lebih tinggi dari pada perempuan.

#### 2.1.1.11 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

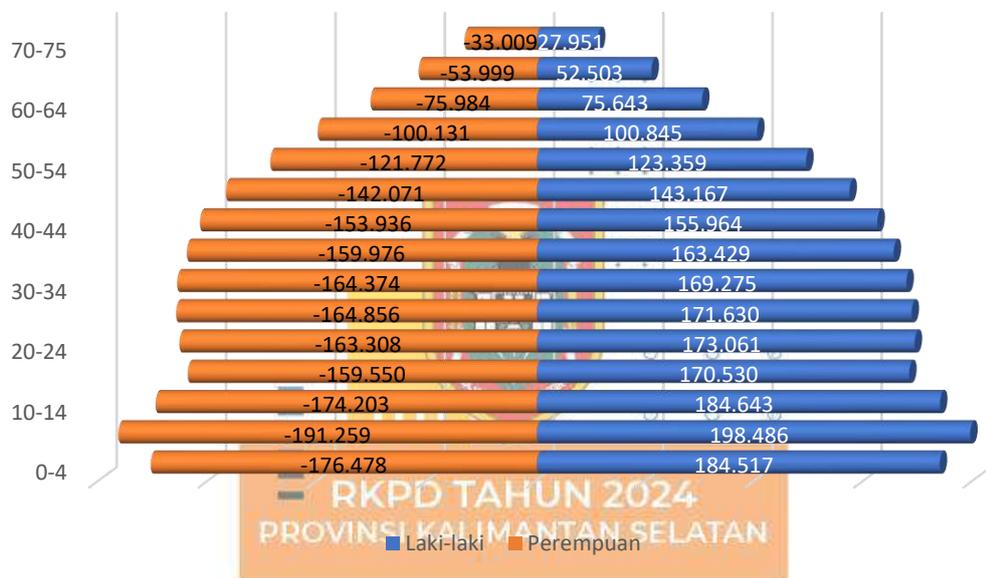
Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran umum struktur umur penduduk. Piramida penduduk ini diantaranya berguna untuk menganalisis produktivitas penduduk dan bonus demografi. Piramida penduduk Kalimantan Selatan tahun 2022 memperlihatkan sebagian besar penduduk Kalimantan





Selatan berada dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebesar 68,21%. sedangkan penduduk lanjut usia (65 ke atas) sebesar 5,25%. dan penduduk usia 0-14 tahun sebesar 26,53%. Kondisi Penduduk Kalimantan Selatan memperlihatkan bahwa sebenarnya Provinsi Kalimantan Selatan telah berada pada posisi bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara 15 hingga 64 tahun.

PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK KALIMANTAN SELATAN  
BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022



**Gambar 2.7** Perbandingan Jumlah Penduduk berdasarkan Umur di Kalimantan Selatan Tahun 2022

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2023)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa 1 orang usia non produktif ditanggung oleh 2 sampai 3 orang usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan akan mampu mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan jika bonus demografi ini dapat dimanfaatkan dengan baik. pada sisi lain jika tidak terkelola dengan baik akan menjadi beban.

Manfaat bagi perekonomian Kalimantan Selatan dengan usia produktif lebih banyak dari usia non produktif dalam bonus demografi yang dimanfaatkan dengan baik akan membuat jumlah tabungan dari penduduk produktif semakin





besar. sehingga perekonomian daerah semakin bertumbuh. Manfaat lainnya adalah terbentuknya generasi emas yang diartikan sebagai penerus yang kreatif dan mampu memikul tanggung jawab serta membangun daerah yang diperoleh melalui pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

## 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berbicara tentang konsep pengembangan potensi daerah Provinsi Kalimantan Selatan, secara konsep kewilayahan akan dibagi menjadi 3 wilayah besar yang terdiri atas 11 Kabupaten dan 2 Kota, pembagian ini dibuat berdasarkan identifikasi kesamaan karakteristik daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Adapun pembagian kewilayahan ini antarlain:

### Kawasan Banjarbakula

- Banjar
- Banjarmasin
- Barito Kuala
- Tanah laut
- Banjarbaru

### Kawasan Industri & Pesisir

- Tanah Laut
- Tanah Bumbu
- Kotabaru

### Kawasan Banua Anam

- Tapin
- Hulu Sungai Selatan
- Hulu Sungai Utara
- Hulu Sungai Tengah
- Balangan
- Tabalong



Pengembangan potensi tersebut didasarkan pada kesamaan karakteristik daerah serta latar belakang yang sama baik dari segi sumber mata pencaharian, potensi lahan, ketersediaan tenaga kerja, serta factor lainnya.

Pada periode 2017-2022, kesenjangan wilayah Kalimantan Selatan semakin menurun. Hal ini terlihat dari hasil analisis kesenjangan wilayah menggunakan Indeks Williamson yang menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan indeks tersebut. Nilai Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan termasuk





dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Pada kurun waktu tahun 2018 – 2022, Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi yaitu dari 0,407 menjadi 0,509. Pertumbuhan rata-rata Indeks Williamson dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami kenaikan sebesar 0.102. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang semakin menurun. Kecenderungan penurunan Indeks Williamson diharapkan dapat menjadi indikator pemerataan wilayah yang semakin baik.

Pada Tahun 2020 ICOR Kalimantan Selatan turun sampai minus 12,44. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga minus atau pertumbuhan ekonomi yang negatif akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, ICOR kembali meningkat menjadi 6,66 dan semakin membaik pada 2022 dengan angka 4,61 dampak dari mulai pulihnya perekonomian Kalimantan Selatan pasca Pandemi Covid-19.



Sumber: KEMD Kalsel, diolah (2023)

**Gambar 2.8** ICOR Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2022





**Tabel 2.14** Data Sebaran pekerjaan kepala keluarga di Kalimantan Selatan pada desil 1 menurut Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)

No	Kabupaten/Kota	Tidak Bakerja	Petani	Nelayan	Pedagang	Pegawai Swasta	Wiraswasta	Pensiunan	Pekerja Lepas	Lainnya
	<b>Total</b>	<b>19.607</b>	<b>124.094</b>	<b>12.505</b>	<b>19.521</b>	<b>29.175</b>	<b>73.619</b>	<b>1.325</b>	<b>68.050</b>	<b>2.993</b>
1	Tanah Laut	1.850	15.097	2.710	2.240	5.355	5.137	139	7.035	416
2	Kotabaru	1.119	3.735	4.145	303	1.749	2.174	23	2.073	134
3	Banjar	1.525	15.425	463	2.118	1.603	5.156	100	6.433	181
4	Barito Kuala	1.187	20.069	359	1.036	1.596	5.502	44	3.496	162
5	Tapin	519	7.276	37	615	683	3.614	67	877	58
6	Hulu Sungai Selatan	1.862	9.598	1.107	2.054	669	4.669	89	8.437	187
7	Hulu Sungai Tengah	1.116	15.281	475	1.387	472	7.552	113	1.614	193
8	Hulu Sungai Utara	1.632	6.359	1.708	2.620	380	10.796	77	4.512	215
9	Tabalong	607	13.830	40	1.707	1.670	5.293	129	1.497	290
10	Tanah Bumbu	1.425	5.462	1.341	762	2.342	5.979	39	3.780	214
11	Balangan	403	9.843	25	551	469	1.545	19	850	98
12	Kota Banjarmasin	5.169	1.049	85	3.297	9.264	12.073	319	22.347	530
13	Kota Banjarbaru	1.193	1.070	10	831	2.923	4.129	167	5.099	315

#### 2.1.2.1 Wilayah Metropolitan Banjarbakula

Pada tahun 2019 Pemerintah Pusat memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun peluang yang dapat menguntungkan adalah adanya potensi ekonomi yang akan saling membutuhkan antara IKN dengan kawasan Metropolitan di Banjarbakula. Konsep Perkotaan Wilayah Metropolitan Banjarbakula yang akan menjadi kawasan Metropolitan di Provinsi Kalimantan Selatan nantinya akan menjadi titik inti pusat aktifitas penduduk perkotaan. Dengan adanya tahapan dalam fase pengembangan IKN baru tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat merespon dan menyediakan kebutuhan untuk menghadapi lonjakan urbanisasi dan pengembangan wilayah tersebut.





### 2.1.2.2 Wilayah Banua Anam – Pusat: Tanjung Dan Sebagai Hub: Kandangan

Di titik ini akan terdapat rencana pengembangan industri baru yaitu tepatnya KI Tabalong. Tanjung ini berpeluang menjadi pintu gerbang utama dari hubungan aglomerasi antara IKN di Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan selain itu juga karena posisinya yang berbatasan langsung dan sangat dekat yaitu hanya memiliki jarak tempuh  $\pm 4$  jam saja. Adapun kawasan industri pendukung IKN adalah berada di Desa Seradang Kecamatan Harui dan Kecamatan Jaro yang akan dijadikan kawasan penyangganya.

Dengan adanya 3 Kawasan Industri di Kawasan pesisir selatan Provinsi Kalimantan Selatan (KI Batulicin, KI Mantuil dan KI Tabalong), akan butuh titik pusat baru yang menjadi core ketiganya, peluang ini cocok diambil perannya oleh Kandangan yang menjadi titik perlintasan transportasi barang maupun penumpang. Secara ekonomi Banua Anam akan diarahkan pengembangannya sebagai pusat Pangan & Industri Hilirisasai dan Bahan jadi.

### 2.1.2.3 Kawasan Industri & Pesisir – Pusat Ki Batulicin – Kotabaru – KEK Mekar Putih

Kawasan ini memiliki tiga kawasan inti dimana peran masing-masing adalah sebagai kawasan industri, Kawasan pelabuhan bongkar muat dan hankam serta Kawasan ekonomi khusus. Namun perlu juga diketahui bahwa terdapat Pulau Sebuku dan Pulau Laut yang daerahnya merupakan penghasil dari batubara dan binih beji yang biasanya menjadi komoditi penting ekspor bahan industri ke wilayah lain. Sebagai core dari kawasan paling selatan, maka memungkinkan menjadi Maritim Center yang akan menjadi gerbang masuk barang logistik yang akan di distribusikan ke wilayah IKN. KI Batulicin berperan sebagai titik kumpul barang dari Pelabuhan Kotabaru, Pulau Sebuku dan Pulau Laut dan Mekar Putih sebelum didistribusikan ke IKN. Pelabuhan Stagen di Kotabaru berperan sebagai titik bongkar muat barang yang akan dikirimkan ke IKN melewati KI Batulicin (maka akan dibutuhkan semacam warehouse) dan adanya hankam sebagai Langkah untuk mengantisipasi adanya barang illegal yang melalui jalur ALKI II. Sedangkan KEK Mekar Putih akan banyak berperan dalam kegiatan ekonomi wilayah yang menjadi Maritim Center di Provinsi Kalimantan Selatan. Keempat titik kawasan ini perlu dihubungkan dengan suatu jaringan jalan yang akan memudahkan proses distribusi baik itu dengan jalan baru atau jembatan. Secara ekonomi Kawasan Industri&Pesisir akan diarahkan pengembangannya sebagai Industri Ekstraksi dan Bahan Setengah Jadi Bahan baku industri besar.



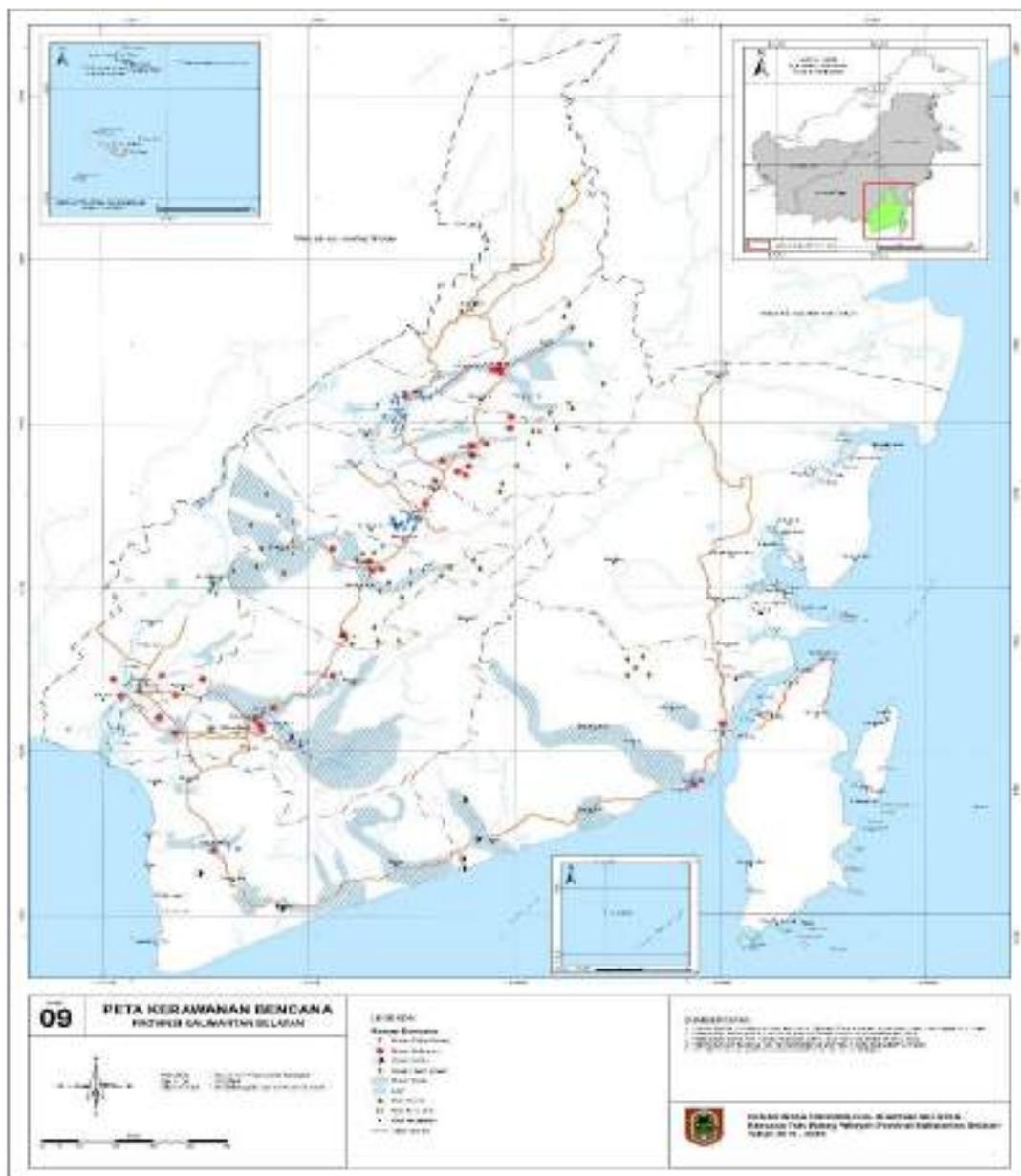


### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi di seluruh wilayah khususnya di daerah rawan dan berisiko. Bencana tersebut juga dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat, pemerintah ataupun swasta, bahkan tidak sedikit jiwa yang terancam. Dengan demikian, perlu adanya upaya pengurangan risiko bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Potensi bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat dari bencana yang pernah terjadi ataupun yang belum pernah terjadi. Berdasarkan DIBI tercatat 8 (delapan) jenis kejadian bencana yang pernah terjadi yaitu bencana banjir, banjir bandang, kekeringan, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit serta cuaca ekstrem.





Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018

**Gambar 2.9** Peta Rawan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan





**Tabel 2.15** Data Bencana Banjir di Kalimantan Selatan s.d Data Terakhir Tahun 2021

KAB/KOTA	2018				2019				2020				2021			
	Frekuensi Kejadian	TERDAMPAK		Rumah Terendam	Frekuensi Kejadian	TERDAMPAK		Rumah Terendam	Frekuensi Kejadian	TERDAMPAK		Rumah Terendam	Frekuensi Kejadian	TERDAMPAK		Rumah Terendam
		KK	JIWA			KK	JIWA			KK	JIWA			KK	JIWA	
		L	L			L	L			L	L			L	L	
BARITO KUALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1.835	671
BANJARMASIN	2	-	-	-	1	2	9	2	-	-	-	-	33	57.884	185.756	58.644
BANJARBARU	3	55	330	53	3	64	253	64	14	861	1.861	1.04	21	2.981	8.609	3.072
BANJAR	2	-	-	199	-	-	-	-	22	1.451	4.61	1.422	53	56.096	157.743	52.66
TAPIN	4	79	373	128	17	877	3.295	877	11	601	2.041	623	4	392	1.797	430
HULU SUNGAI SELATAN	-	-	-	-	4	38	132	38	2	10	56	10	11	5.063	67.583	4.938
HULU SUNGAI TENGAH	-	-	-	-	1	2	7	2	10	336	904	333	21	12.091	31.382	9.455
HULU SUNGAI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	32	1.843	6.118	1.838	12	11.155	33.576	10.085
BALANGAN	7	38	148	38	13	939	3.777	962	58	3.662	12.002	3.508	89	15.876	52.233	14.599
TABALONG	3	23	77	23	5	110	293	110	119	10.371	4.641	10.751	13	619	2.027	73
TANAH LAUT	3	26	90	163	2	253	839	207	44	4.2	3.614	3.652	37	14.578	45.687	3.984
TANAH BUMBU	5	2.151	575	470	19	6.419	23.284	6.52	34	5.516	18.72	5.538	33	6.643	22.229	6.562
KOTABARU	3	90	185	16	2	15	38	15	3	198	606	198	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>2.462</b>	<b>5.778</b>	<b>1.09</b>	<b>67</b>	<b>8.719</b>	<b>31.927</b>	<b>8.797</b>	<b>349</b>	<b>29.049</b>	<b>95.173</b>	<b>28.913</b>	<b>334</b>	<b>83.378</b>	<b>10.457</b>	<b>175.873</b>

Data disajikan hanya tiga tahun 2020 sd 2022





## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sub Bab Aspek Kesejahteraan Masyarakat memberikan gambaran perkembangan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Sub bab ini menjelaskan perkembangan kesejahteraan masyarakat dalam dua fokus, yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Sub bab fokus kesejahteraan dan pemerataan menyajikan data yang memuat indikator-indikator perekonomian. Tujuan sajian data tersebut adalah untuk menggambarkan secara makro kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta kondisi pemerataan-ketimpangan perekonomian daerah.

#### 2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya produksi atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah selama periode waktu tertentu, yang dalam hal ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam data PDRB dapat tergambar ukuran ekonomi dan pasar suatu wilayah serta potensi dan kesehatan ekonomi. Data PDRB kemudian dapat diturunkan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan pasar di suatu wilayah serta menggambarkan ukuran relatif dengan wilayah lain.

Memasuki triwulan kedua tahun 2022, pandemi Covid-19 mulai mereda. Subvarian baru memang kembali menyerang, namun dampaknya tidak semengerikan varian-varian sebelumnya. Namun, guncangan ekonomi belum usai. Tingginya permintaan seriring pelanggaran pembatasan, konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai, dan meningkatnya suku bunga acuan dolar AS memicu terjadinya peningkatan inflasi secara signifikan. Inflasi meroket di hampir seluruh dunia, bahkan sejumlah negara mengalami hiperinflasi. Meski demikian, hingga triwulan II-2022, Indonesia cenderung merasakan dampak guncangan tersebut secara signifikan, termasuk Kalimantan Selatan. Meroketnya harga komoditas di pasar global (seperti batubara dan CPO) justru menjadi berkah. Namun, inflasi yang meningkat pesat di seluruh dunia harus tetap menjadi sinyal agar pemerintah Indonesia pada umumnya, dan Kalimantan Selatan khususnya, lebih berhati-hati dalam mengelola perekonomian. Berkaca pada masifnya impor berbagai komoditas, cepat atau lambat inflasi tinggi akan mulai menyerang. Pemulihan





ekonomi pun pada akhirnya akan terhambat. Di tengah ancaman gejolak ekonomi pasca pemulihan ekonomi.

**Tabel 2.16** PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17.925.111,06	18.568.350,40	18.390.799,75	18.606.671,67	18.884.180
Pertambangan dan Penggalian	32.940.944,71	33.412.746,09	31.920.344,87	33.295.012,43	35.088.490
Industri Pengolahan	16.627.550,28	16.868.962,35	16.298.968,71	17.314.000,46	17.850.030
Pengadaan Listrik dan Gas	149.293,39	156.342,18	163.758,05	171.396,94	184.860,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	512.638,14	541.310,42	572.856,46	601.689,42	630.960,00
Konstruksi	9.621.524,89	10.206.761,40	10.075.347,02	10.364.042,16	10.812.570,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.534.598,52	12.390.882,70	11.972.118,93	12.235.516,97	13.202.320,00
Transportasi dan Pergudangan	7.751.309,67	8.210.077,15	7.773.286,96	7.913.714,05	9.298.000,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.497.506,12	2.682.547,57	2.628.485,40	2.688.918,48	2.966.300,00
Informasi dan Komunikasi	4.782.740,28	5.133.111,39	5.510.897,83	5.908.863,68	6.319.210,00
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.188.555,39	4.258.124,99	4.316.334,66	4.367.684,62	4.384.930,00
Real Estate	2.856.690,92	3.026.703,54	3.144.114,02	3.310.575,97	3.513.450,00
Jasa Perusahaan	766.722,50	822.583,45	806.228,01	835.413,13	898.300,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.553.664,37	6.989.221,96	7.045.528,54	7.138.270,02	7.182.470,00
Jasa Pendidikan	5.597.185,79	6.019.490,93	6.117.205,36	6.211.319,50	6.429.090,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.309.803,15	2.445.832,58	2.613.229,33	2.916.029,55	3.047.170,00
Jasa lainnya	1.436.738,77	1.538.502,49	1.516.091,10	1.533.732,06	1.646.940,00
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>128.052.577,95</b>	<b>133.271.551,61</b>	<b>130.865.594,99</b>	<b>135.412.851,11</b>	<b>142.339.280,00</b>

Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2023. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.





**Tabel 2.17** Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.458.195,87	25.837.804,20	25.786.221,51	26.827.758,81	28.635.330,00
Pertambangan dan Penggalian	35.461.568,39	34.453.278,87	32.759.686,03	42.459.250,00	80.520.100,00
Industri Pengolahan	24.081.103,07	24.635.649,84	24.215.498,24	26.862.852,21	28.615.170,00
Pengadaan Listrik dan Gas	237.105,73	255.041,40	274.729,38	294.965,21	320.960,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	709.004,04	754.901,68	805.799,91	855.212,11	912.800,00
Konstruksi	13.675.860,55	14.910.490,27	14.803.229,09	15.742.374,26	17.267.780,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.220.840,88	19.031.697,30	18.731.969,68	19.798.253,90	22.758.700,00
Transportasi dan Pergudangan	11.387.097,79	12.469.229,87	11.796.543,93	12.116.837,98	15.764.970,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.463.666,12	3.834.598,98	3.846.302,13	4.006.240,17	4.506.710,00
Informasi dan Komunikasi	6.065.457,61	6.570.311,90	7.032.160,26	7.586.349,56	8.298.940,00
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.207.185,67	6.450.604,51	6.569.432,47	6.933.859,50	7.461.550,00
Real Estate	3.795.365,92	4.118.667,03	4.352.929,63	4.676.170,96	5.072.210,00
Jasa Perusahaan	1.175.720,32	1.305.731,84	1.309.540,08	1.379.195,31	1.543.080,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.222.282,09	11.103.082,37	11.416.985,01	11.722.823,68	12.024.990,00
Jasa Pendidikan	8.008.698,52	8.816.478,94	9.093.591,09	9.464.282,02	9.932.270,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.364.770,60	3.628.089,76	3.959.497,72	4.543.250,64	4.864.990,00
Jasa lainnya	2.150.132,72	2.384.995,97	2.396.997,57	2.457.612,14	2.755.990,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	171.684.055,90	180.560.654,72	179.151.113,73	192.576.581,16	251.256.540,00

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2023. BPS Provinsi Kalimantan Selatan





**Tabel 2.18** PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2018–2022 (Triliun Rupiah)  
Menurut Pengeluaran

Komponen	ADHK Tahun 2018 - 2022					ADHB Tahun 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	62,07	61,91	62,40	61,91	65,96	86,96	87,61	90,01	87,61	103,373
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,28	1,25	1,26	1,25	1,32	1,96	1,94	2,01	1,94	2,19
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,74	13,38	13,87	13,38	13,81	22,16	21,95	23,14	21,95	24,62
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,5	30,07	30,30	30,07	31,91	44,99	44,86	46,34	44,86	51,62
5 Perubahan Inventori	0,49	0,05	0,07	0,05	-5,50	0,68	0,07	0,10	0,07	-8,59
6 Ekspor Barang dan Jasa	100,06	89,24	106,23	89,24	124,74	100,65	147,96	100,65		
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	74,87	65,04	78,72	65,04	29,87	100,95	77,94	116,98	77,94	70,29
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>128,05</b>	<b>133,27</b>	<b>130,87</b>	<b>135,41</b>	<b>142,33</b>	<b>171,68</b>	<b>180,56</b>	<b>179,15</b>	<b>192,58</b>	<b>251,25</b>

Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2023. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

### 2.2.1.2 Struktur Perekonomian Daerah

Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan III-2022 masih didominasi oleh Pertambangan dan Pengalihan sebesar 28,70 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,29 persen; Industri Pengolahan sebesar 11,50 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,37 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Selatan mencapai 62,87 persen. Sisanya sebesar 37,13 persen berbagi nilai pada 13 kategori. lapangan usaha lainnya.





**Tabel 2.19** Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 - 2022

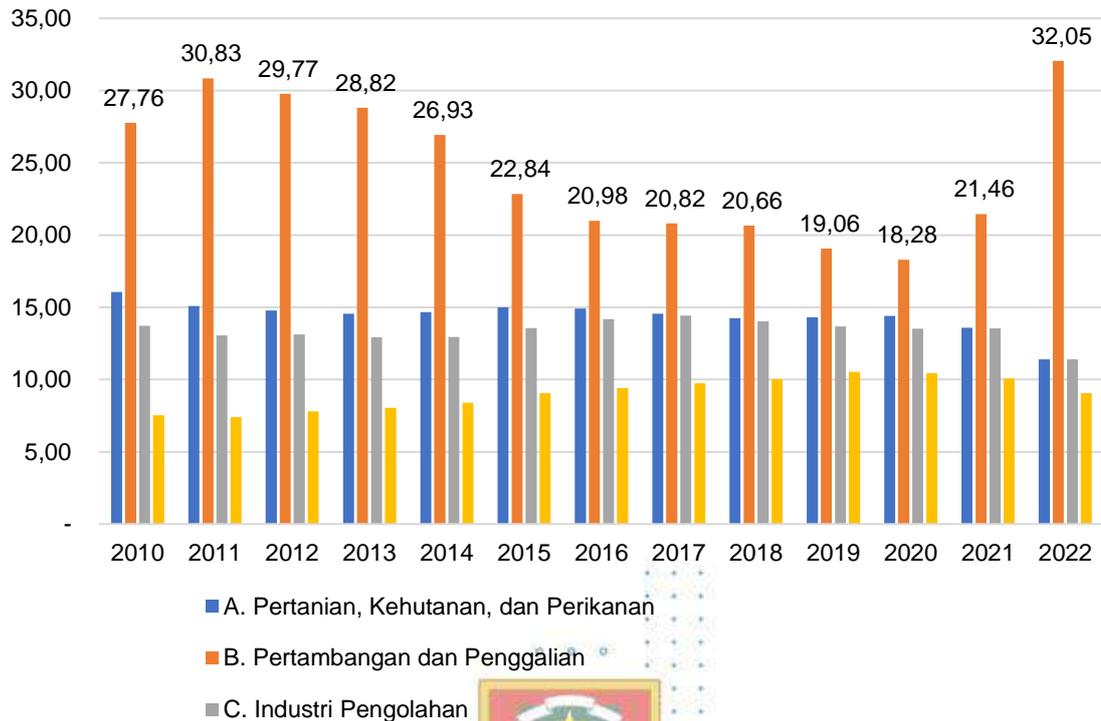
Lapangan Usaha	TAHUN (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,25	14,36	14,39	13,93	13,29
Pertambangan dan Penggalian	20,65	18,71	18,29	19,37	28,70
Industri Pengolahan	14,03	13,63	13,52	13,95	11,50
Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14	0,15	0,15	0,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,41	0,42	0,45	0,44	0,36
Konstruksi	7,97	8,25	8,26	8,17	7,16
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,03	10,60	10,46	10,28	9,37
Transportasi dan Pergudangan	6,63	6,92	6,58	6,29	6,78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,02	2,12	2,15	2,08	1,73
Informasi dan Komunikasi	3,53	3,68	3,93	3,94	3,33
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,62	3,57	3,67	3,60	2,95
Real Estate	2,21	2,28	2,43	2,43	2,02
Jasa Perusahaan	0,68	0,72	0,73	0,72	0,63
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,96	6,30	6,37	6,09	4,96
Jasa Pendidikan	4,66	4,92	5,08	4,91	4,05
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,96	2,06	2,21	2,36	1,95
Jasa lainnya	1,25	1,32	1,34	1,28	1,09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2023. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.





## SHARE PERTAMBANGAN KALSEL

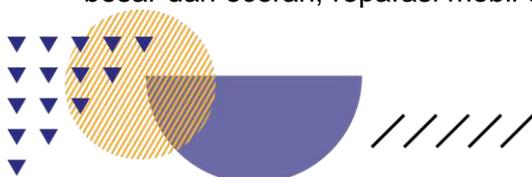


Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2023. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

**Gambar 2.10** Data Share (Bagi Hasil) Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan

Dari uraian sebelumnya, maka dapat diambil poin-poin penting mengenai deskripsi struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. Poin-poin tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Sektor dominan dengan nilai lebih dari Rp. 20 Triliun Atas Dasar Harga Berlaku adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor industri pengolahan.
2. Sektor yang mempunyai nilai lebih dari Rp. 10 Triliun Atas Dasar Harga Berlaku adalah sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta sektor transportasi dan pergudangan.
3. Tidak ada perubahan urutan kontribusi sektoral yang signifikan selama Tahun 2017-2022
4. Terjadi penurunan kontribusi pada tiga sektor dominan.
5. Terjadi kecenderungan peningkatan kontribusi pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, dan





sektor transportasi dan perdagangan. Sementara itu sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami fluktuasi kontribusi

Pada posisi data terakhir yaitu PDRB ADHB menurut lapangan usaha TW 1 sampai 4 Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan, struktur PDRB Kalimantan Selatan yang terbesar masih sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 28,85 % dan yang terendah adalah sektor Pengadaan Listrik, Gas sebesar 0,57 %.

### 2.2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan barang dan jasa (produk) yang dihasilkan pada suatu waktu tertentu di wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan peningkatan ukuran ekonomi. peningkatan ukuran pasar serta secara tidak langsung menggambarkan peningkatan kapasitas produksi.

Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan di bandingkan dengan pertumbuhan regional Kalimantan dan nasional yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.20** Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan 2018 - 2022

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kalimantan Barat	5.07	5.09	-1.82	4.78	5.07
Kalimantan Timur	2.64	4.70	-2.87	2.48	6.45
Kalimantan Selatan	5.13	4.08	-1.81	3.48	5.11
Kalimantan Tengah	5.61	6.12	-1.41	3.40	4.48
Kalimantan Utara	5.36	6.89	-1.09	3.98	5.34
<b>Nasional</b>	<b>5.43</b>	<b>4.98</b>	<b>-2.03</b>	<b>3.70</b>	<b>5.31</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

**Tabel 2.21** Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Kab/Kota Tahun 2018-2022

PROV. KAB/KOTA	TAHUN (PERSEN)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	4.65	3.76	-1.99	3.47	5,12
Kota Baru	4.88	4.19	-1.87	3.36	4.58





PROV. KAB/KOTA	TAHUN (PERSEN)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Banjar	5.01	4.54	-1.96	3.21	4.48
Barito Kuala	5.21	5.06	-1.04	3.17	3.59
Tapin	5.01	4.26	-1.50	3.41	4.91
HSS	6.14	5.32	-1.19	4.18	4.02
HST	5.15	4.80	-1.01	3.01	3.93
HSU	5.81	5.54	-0.67	3.23	4.09
Tabalong	3.78	3.69	-2.62	3.28	5.30
Tanah Bumbu	4.14	3.64	-1.46	4.23	5.45
Balangan	3.11	3.18	-2.47	3.26	5.24
Banjarmasin	6.40	6.13	-1.91	3.41	5.69
Banjar Baru	6.90	6.93	-1.88	3.32	7.93
<b>KALSEL</b>	<b>5.13</b>	<b>4.08</b>	<b>-1.81</b>	<b>3.48</b>	<b>5.11</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Pertumbuhan ekonomi lazimnya diikuti dengan beberapa manfaat pembangunan sebagai berikut.

1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi karena pada dasarnya terjadi peningkatan pendapatan per kapita.
2. Penurunan pengangguran karena terjadi peningkatan kapasitas produksi.
3. Peningkatan basis pendapatan asli daerah karena terjadi peningkatan pendapatan per kapita yang mengikuti peningkatan konsumsi.

Adapun data pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan disajikan dalam Tabel 2.22 berikut.

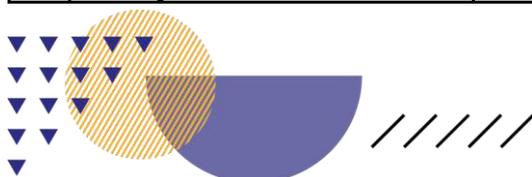
**Tabel 2.22** Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan 2010

[Seri 2010] Lapangan Usaha	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.76	3.59	-0.95	1.16	1.45
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.62	3.55	-1.68	0.97	1.05
a. Tanaman Pangan	2.08	5.85	-4.07	-2.56	-2.95
b. Tanaman Hortukultura	3.07	2.54	0.56	0.18	-1.56
c. Tanaman Perkebunan	2.69	0.65	-0.36	4.41	4.15
d. Peternakan	4.02	5.75	1.76	1.81	3.89
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	3.5	3.24	-1.02	-0.98	-1.69
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.19	0.32	-1.24	-1.69	-0.93





[Seri 2010] Lapangan Usaha	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2018	2019	2020	2021	2022
3. Perikanan	7.93	4.17	1.23	2.04	2.85
B. Pertambangan dan Penggalian	4.21	1.36	-4.44	4.35	5.60
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0.69	0.18	-4.16	-5.33	0.69
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	4.36	1.19	-4.65	4.98	6.06
3. Pertambangan Bijih Logam	-3.2	4.23	0.11	-9.97	-7.85
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	7.89	5.92	-1.3	2.65	3.42
C. Industri Pengolahan	4.34	1.45	-3.63	6.23	3.31
1. Industri Makanan dan Minuman	5.08	1.84	-5.68	5.89	4.42
2. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	8.62	6.21	-1.01	1.75	5.87
3. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	5.76	0.61	0.56	-0.67	-1.17
4. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	4.39	0.77	0.62	2.86	5.89
5. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.87	2.72	0.86	99.23	5.73
6. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.31	1.79	-0.27	1.01	-0.14
7. Industri Barang Galian bukan Logam	5.31	0.33	1.74	2.39	1.95
8. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0.28	2.95	-1.52	-0.58	2.42
9. Industri Mesin dan Perlengkapan k	2.76	3.11	1.66	2.15	1.18
10. Industri Alat Angkutan	1.78	6.92	1.87	-0.96	2.44
11. Industri Furnitur	5.39	3.48	-2.82	1.25	1.75
12. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1.98	4.58	0.46	1.12	3.13
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.58	4.72	4.74	4.66	7.85
1. Ketenagalistrikan	7.63	4.58	4.72	4.73	7.9
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	6.42	7.88	5.34	3.24	6.87
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.83	5.59	5.83	5.03	4.87
F. Konstruksi	5.89	6.08	-1.29	2.87	4.33
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.55	7.42	-3.38	2.2	7.15
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	3.23	3.82	-2.1	2.57	3.36
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	8.26	7.99	3.57	2.14	7.74
H. Transportasi dan Pergudangan	6.97	5.92	5.32	1.81	17.43
1. Angkutan Darat	7.48	6.66	-3.73	2.37	7.35
2. Angkutan Laut	7.23	6.13	3.59	1.99	25.38
3. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	3.06	1.6	-4.06	3.72	6.15





[Seri 2010] Lapangan Usaha	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2018	2019	2020	2021	2022
4. Angkutan Udara	6.73	5.35	13.52	-0.51	44.27
5. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	6.88	5.65	6.45	0.58	6.99
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.01	7.41	2.02	2.3	9.63
1. Penyediaan Akomodasi	7.17	7.09	3.67	2.25	14.13
2. Penyediaan Makan Minum	6.98	7.47	1.71	2.31	8.82
J. Informasi dan Komunikasi	6.89	7.33	7.36	7.22	6.94
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.24	1.66	1.37	1.19	0.39
1. Jasa Perantara Keuangan	3.53	0.39	0.6	0.09	-0.64
2. Asuransi dan Dana Pensiun	5.48	5.33	3.92	5.12	2.29
3. Jasa Keuangan Lainnya	6.15	6.82	1.62	1.07	2.38
4. Jasa Penunjang Keuangan	5.7	5.96	3.86	3.63	2.28
L. Real Estate	5.01	5.95	3.88	5.29	5.87
M,N. Jasa Perusahaan	7.67	7.29	1.99	3.62	7.53
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.84	6.54	0.73	1.49	0.53
P. Jasa Pendidikan	7.02	7.54	1.62	1.54	3.51
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.94	5.89	7.51	10.89	5.31
R,S,T,U. Jasa lainnya	7.38	7.08	1.46	1.16	6.78
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.12	4.09	1.82	3.48	5.11

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2023. BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Pada periode 2018-2022, perekonomian Kalimantan Selatan cenderung mengalami fluktuasi pertumbuhan. Pada tahun 2018 pertumbuhan LPE ekonomi ekonomi dapat tumbuh dengan nilai 5,12% kemudian bergerak menurun sd tahun 2021 menjadi 3,48% dan mulai meningkat lagi di tahun di 2022 menjadi 5,11%.

Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi bahkan menunjukkan nilai negatif sebesar -1,81%. Pertumbuhan negatif ini tidak lepas dari faktor hantaman Pandemi COVID-19 yang mempunyai dampak global. Salah satu dampak global ini membuat terbatasnya potensi pasar untuk komoditas ekspor Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga terjadi penurunan ekspor. Disamping itu, terjadi penurunan kapasitas produksi karena adanya pembatasan-pembatasan mobilitas masyarakat.





Tahun 2021 merupakan tahun dimana memperlihatkan terjadinya pemulihan perekonomian untuk Kalimantan Selatan. Hal terlihat dari Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan yang telah positif 3,48 % pada tahun 2021.

Adapun poin-poin penting yang didapat dari pembahasan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

- 1) Pertumbuhan ekonomi pada 2 (dua) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan tingkat pertumbuhan yang membaik.
- 2) Pada Tahun 2020. ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi ini tidak lepas dari faktor hantaman Pandemi COVID-19 yang mempunyai dampak secara global
- 3) Tiga sektor dominan. termasuk sektor pertambangan dan penggalian menjadi penopang peningkatan pertumbuhan.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 pada sisi pengeluaran dan lapangan usaha, bersumber dari sektor-sektor utama. Sebagaimana disajikan pada Tabel 2.23. Pada sisi pengeluaran sumber perbaikan pertumbuhan ekonomi didorong oleh komponen ekspor-impor. Sedangkan pertumbuhan pada konsumsi rumah tangga dapat didorong dengan kebijakan pemberian stimulus bantuan sosial kepada masyarakat akibat pandemi Covid-19 serta dilakukan kebijakan gas dan rem oleh pemerintah yang mana tetap membuat masyarakat waspada terhadap covid-19 tetapi perekonomian tetap dapat berjalan meskipun belum berjalan 100 % seperti sebelum pandemi.

**Tabel 2.23** LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2018–2022 Menurut Pengeluaran

Komponen pengeluaran		LPE (%) /				
		Growth (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Konsumsi Rumah tangga	5,03	4,01	-0,26	0,79	5,37
2	Konsumsi LNPRT	8,74	7,97	-2,4	1,1	5,02
3	Konsumsi Pemerintah	2,53	2,91	-2,63	3,56	-0,56
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	8,01	6,37	-1,42	0,83	5,16
5	Perubahan Inventori	215,36	-47,04	-89,3	30,16	-
6	Ekspor Barang dan Jasa	5,97	2,12	-10,81	19,02	-
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	7,84	1,52	-13,13	21,01	-
PDRB ADHK		5,08	4,08	-1,81	3,48	5,11

Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2023. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.





#### 2.2.1.4 Perkembangan Inflasi

Pada Desember 2022 terjadi inflasi year on year (yoy) 6,99 persen pada gabungan tiga kota IHK di Kalimantan Selatan, dengan IHK sebesar 117,15. Kota Banjarmasin mengalami inflasi yoy sebesar 6,98 persen dengan IHK sebesar 117,05; Tanjung mengalami inflasi yoy sebesar 5,01 persen dengan IHK sebesar 114,86; sedangkan Kotabaru mengalami inflasi yoy sebesar 8,65 persen dengan IHK sebesar 119,83. „ Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh sepuluh indeks kelompok pengeluaran secara signifikan, yaitu : kelompok transportasi sebesar 18,27 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 10,43 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,84 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 7,01 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 8,60 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,79 persen; kelompok pendidikan sebesar 5,49 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya sebesar 3,48 persen; kelompok penyediaan makanan dan restoran sebesar 2,09 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 1,48 persen. „

Secara Month to Month di Desember terjadi inflasi 0,69 persen, dengan penyumbang andil inflasi terbesar antara lain, beras, telur ayam ras, daging ayam ras, ikan gabus, dan emas perhiasan. Sedangkan yang menahan laju inflasi bulanan antara lain, angkutan udara, cabai merah, bahan bakar rumah tangga, pengharum cucian dan kacang panjang. „ Komoditas penyumbang andil inflasi yoy pada Desember 2022, antara lain beras, bensin, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, rokok kretek filter, telur ayam ras, tarif pam, daging ayam ras, mobil, dan bawang merah . Tingkat inflasi month to month (mtm) Desember 2022 tercatat inflasi sebesar 0,69 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) Desember sebesar 6,99 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2022 di tiga kota IHK Kalimantan Selatan secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS, pada Desember 2022 terjadi inflasi yoy sebesar 6,99 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,67 pada Desember 2021 menjadi 117,15 pada Desember 2022. Tingkat inflasi *motm* 0,69 persen dan tingkat inflasi *ytd* sebesar 6,99 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh sepuluh indeks kelompok pengeluaran, dengan kenaikan terbesar yoy pada kelompok transportasi sebesar





18,27 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 10,43 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,84 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 7,01 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau 8,60 persen; kelompok peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,49 persen; kelompok pendidikan sebesar 4,89 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya sebesar 3,48 persen, kelompok penyediaan makanan, minuman dan restoran sebesar 2,09 persen dan kelompok kesehatan sebesar 1,48 persen.

Komoditas yang memberi andil terbesar inflasi *yoy* Desember 2022, antara lain beras, bensin, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, rokok kretek filter, telur ayam ras, tarif pam, daging ayam ras, mobil dan bawang merah. Sementara komoditas yang memberikan andil deflasi *yoy* adalah minyak goreng, cabai rawit, pepaya, cabai merah, laptop, ikan saluang, ikan asin telang, ikan sepat siam, terong, dan ketimun. Pada Desember 2022 dari 11 kelompok pengeluaran, 10 kelompok memberikan andil/ sumbangan inflasi; dan 1 kelompok memberikan andil/sumbangan deflasi. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi terbesar, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,49 persen; kelompok transportasi sebesar 2,25 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya sebesar 0,62 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,58 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,43 persen; Sedangkan untuk andil penahan inflasi adalah kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen. Dari 90 Kota inflasi di Indonesia, tercatat seluruh kota mengalami inflasi *month to month*. Inflasi tertinggi terjadi di Bandung 2,04 persen dan inflasi terendah terjadi di Sorong sebesar 0,01 persen. Inflasi *yoy* tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 8,65 persen, dan terendah di Sorong sebesar 3,26 persen. Di wilayah Pulau Kalimantan, seluruh kota mengalami inflasi. Inflasi *motm* tertinggi terjadi di Banjarmasin sebesar 0,72 persen dan terendah terjadi di Tanjung Selor sebesar 0,19 persen. Inflasi *yoy* tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 8,65 persen dan terendah terjadi di Tarakan 3,93 persen.





**Tabel 2.24** Inflasi Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2022

Kota Inflasi	Inflasi				
	2018	2019	2020	2021	2022
	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan
Kalimantan Selatan	2.63	4.01	1.68	2.55	6.99
Kotabaru	-	-	1.44	2.68	8,65
Tanjung	2.60	2.15	2.05	2.43	5,01
Kota Banjarmasin	2.63	4.15	1.67	2.54	6.98

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022





**Tabel 2.25** Indeks Harga Konsumen Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022

Kota Inflasi	2018											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Kalimantan Selatan	131.46	131.27	131.73	131.88	132.09	133.33	133.27	133.31	133.24	133.37	133.59	134.52
Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung	131.04	130.83	131.92	132.73	133.2	133.66	134.91	133.44	133.06	133.32	133.02	133.92
Kota Banjarmasin	131.49	131.3	131.72	131.82	132.01	133.31	133.15	133.3	133.24	133.37	133.63	134.56

Kota Inflasi	2019											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Kalimantan Selatan	135.61	135.45	135.79	137.07	138.3	138.67	138.57	138.61	138.63	138.85	139.17	139.92
Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung	134.93	134.03	134.13	134.76	136.08	135.95	136.2	135.19	134.37	135.42	136.73	136.8
Kota Banjarmasin	135.66	135.56	135.92	137.24	138.47	138.87	138.75	138.87	138.95	139.11	139.35	140.15

Kota Inflasi	2020											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Kalimantan Selatan	104.62	105.41	105.12	104.81	104.94	105.33	105.04	105.3	104.98	105.21	105.94	106.77
Kotabaru	106.61	106.93	106.78	106.26	106.56	106.69	106.3	106.54	106.4	106.63	106.74	107.41
Tanjung	105.07	106.03	105.91	105.61	105.72	106.16	106.08	105.62	105.3	105.58	106.33	106.78
Kota Banjarmasin	105.21	105.19	104.87	104.58	104.7	105.11	104.82	105.14	104.8	105.03	105.82	106.7





Kota Inflasi	2021											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Kalimantan Selatan	106.59	107.15	107.24	107.05	108.01	107.63	107.82	107.22	107.67	108.04	108.67	109.67
Kotabaru	107.68	107.78	108.51	108.75	109.5	109.04	109.17	109.52	109.32	109.24	109.61	110.29
Tanjung	106.81	107.16	107.38	107.31	107.64	108.03	108.16	108.17	108.13	108.48	108.89	109.38
Kota Banjarmasin	106.45	107.08	107.09	106.85	107.88	107.44	107.64	107.49	107.45	107.87	108.54	109.41

Kota Inflasi	2022											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Kalimantan Selatan	110,57	110,13	111,16	112,43	113,16	114,04	114,45	113,97	115,58	115,87	116,34	117,15
Kotabaru	111,31	111,27	112,45	113,46	114,86	116,38	117,62	117,77	118,63	118,68	119,14	119,83
Tanjung	109,85	110,11	110,81	113,46	112,87	113,83	113,88	112,89	113,63	113,9	114,31	114,86
Kota Banjarmasin	110,55	110,01	111,04	112,4	113	113,8	114,15	113,65	115,42	115,74	116,21	117,05

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

RKPD TAHUN 2024  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





### 2.2.1.5 Gini Rasio

Koefisien Gini menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran. Semakin tinggi nilai koefisien, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan, dan semakin tidak merata tingkat pengeluaran antar penduduk di suatu wilayah pengamatan. Sebaliknya, semakin rendah nilai koefisien, maka semakin rendah tingkat ketimpangan dan semakin merata tingkat pengeluaran penduduk. Nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna, sementara nilai 0 menunjukkan pemerataan pengeluaran sempurna.

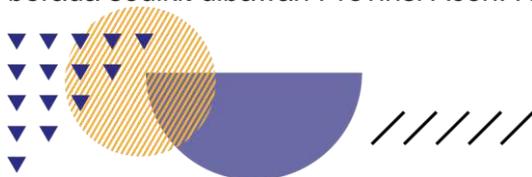
Perkembangan tingkat ketimpangan di Kalimantan Selatan periode Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.26 berikut.

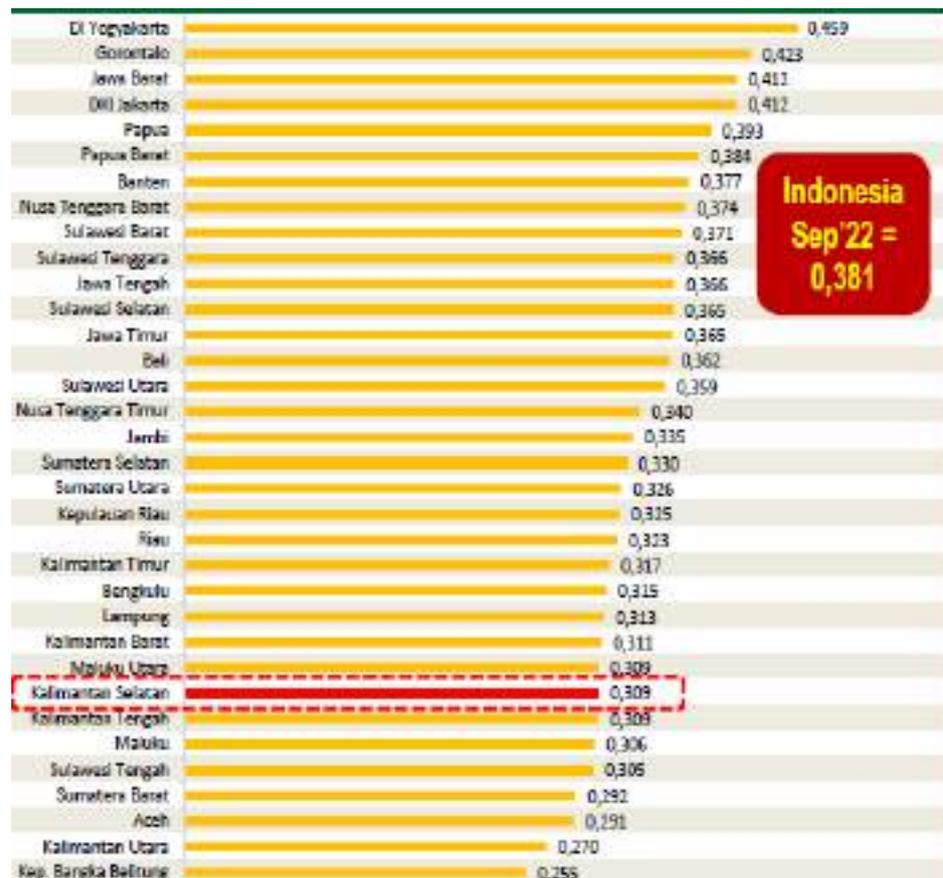
**Tabel 2.26** Gini Ratio Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Gini Ratio				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	0,234	0,271	0,250	0.232	0.263
Kotabaru	0,337	0,335	0,287	0.306	0.331
Banjarnegara	0,327	0,330	0,322	0.344	0.300
Barito Kuala	0,338	0,285	0,277	0.284	0.289
Tapin	0,281	0,268	0,274	0.289	0.291
Hulu Sungai Selatan	0,317	0,288	0,300	0.275	0.260
Hulu Sungai Tengah	0,320	0,288	0,285	0.331	0.228
Hulu Sungai Utara	0,325	0,327	0,319	0.378	0.301
Tabalong	0,305	0,306	0,346	0.288	0.337
Tanah Bumbu	0,332	0,346	0,300	0.281	0.292
Balangan	0,310	0,273	0,298	0.277	0.266
Kota Banjarmasin	0,377	0,326	0,342	0.350	0.330
Kota Banjarbaru	0,364	0,357	0,381	0.361	0.341
Kalimantan Selatan	0.344	0.334	0.332	0.325	0.309
Indonesia	0.389	0.380	0.385	0.381	0.381

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Tabel 2.26 ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan Provinsi Kalimantan Selatan lebih rendah daripada tingkat ketimpangan Indonesia. Dengan kata lain, fakta ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan cenderung lebih merata daripada pengeluaran penduduk secara nasional. Berdasarkan data terakhir per September tahun 2022, posisi Kalimantan selatan masih lebih baik di bandingkan Provinsi Sulawesi Tengah dan berada sedikit dibawah Provinsi Aceh. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 2.11.





Gambar 2.11 Gini Ratio Indonesia Per Provinsi per September Tahun 2022

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

RKPD TAHUN 2024  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nilai *gini ratio* di Provinsi Kalimantan Selatan yang cenderung stabil. titik tertinggi pada di tingkat 0,347 pada tahun 2017, *gini ratio* Provinsi Kalimantan Selatan pada tiga tahun selanjutnya ada di kisaran 0,332 di tahun 2020 dan 0,325 pada tahun 2021. *Gini Ratio* tidak mengalami naik turun dari tahun 2017 s/d 2021. Pada posisi *gini ratio* per September 2021 memperlihatkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Kalimantan Selatan dalam kategori Ketimpangan Rendah.

### 2.2.1.6 Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Wilayah)

Selain Gini Ratio, keadaan ketimpangan juga dapat ditunjukkan oleh Indeks Williamson. Jika Gini Ratio menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk, maka Indeks Williamson dapat menyajikan tingkat ketimpangan regional. Dalam hal ini, Indeks Williamson menyajikan ketimpangan tingkat produksi antar wilayah, sehingga Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan





menunjukkan ketimpangan PDRB antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk melihat tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, digunakan Indeks Williamson. Perhitungan Indeks Williamson Kalimantan Selatan didasarkan pada data PDRB per kapita dan jumlah penduduk di kabupaten/kota. Semakin Indeks Williamson mendekati angka 0, maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin kecil, sedangkan semakin mendekati angka 1 maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin besar. Hasil pengukuran dari Indeks Williamson dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu :

a.	Indeks Williamson < 0,4	=	tingkat ketimpangan rendah
b.	0,4 < Indeks Williamson < 0,5	=	tingkat ketimpangan sedang (moderat)
c.	Indeks Williamson > 0,5	=	tingkat ketimpangan tinggi

Nilai Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Pada kurun waktu tahun 2018 – 2022, Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi yaitu dari 0,407 menjadi 0,509. Pertumbuhan rata-rata Indeks Williamson dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami kenaikan sebesar 0.102. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang semakin menurun. Kecenderungan penurunan Indeks Williamson diharapkan dapat menjadi indikator pemerataan wilayah yang semakin baik.

**Tabel 2.27** Indeks Williamson Kalimantan Selatan (2017-2022)

Indikator	Indeks Williamson (%)					Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Indeks Williamson	0,407	0,399	0,395	0,409	0,509	0,102
Kategori Ketimpangan	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	

Sumber : BPS, Data diolah (2023)

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya-upaya tepat sasaran pada lokasi dengan ketimpangan ekonomi cukup tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena meskipun ada daerah-daerah di Kalimantan Selatan yang maju secara ekonomi tetapi masih terdapat daerah-daerah yang relative tertinggal yang





memerlukan pemberdayaan ekonomi dan dukungan sarana dan prasarana wilayah, sehingga ketimpangan antar wilayah tidak semakin tidak melebar. Grafik perkembangan indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022 pada Gambar 2.12.



Sumber : BPS, Data diolah (2023)

**Gambar 2.12** Perkembangan Indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

### 2.2.1.7 Fokus Kesejahteraan Sosial

Sub Bab Fokus Kesejahteraan Sosial menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan ditinjau dari faktor-faktor kesejahteraan non-ekonomi. Salah satu indikator yang dapat mewakili kondisi kesejahteraan ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan seluruh komponen-komponen penyusunnya. Dalam pembahasan IPM akan tergambar kondisi pendidikan, kondisi kesehatan serta kondisi daya beli yang secara kumulatif dapat mewakili kualitas sumber daya manusia. Namun demikian sub bab ini akan lebih fokus menggambarkan kondisi pendidikan dan kondisi kesehatan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai tambahan, Sub Bab Fokus Kesejahteraan Sosial juga menguraikan kondisi ketenagakerjaan.

### 2.2.1.8 Angka Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan, dan Garis Kemiskinan

Jika dilihat dari Indikator kemiskinan, maka Kalimantan Selatan termasuk provinsi yang mempunyai indikator kemiskinan terendah jika dibandingkan provinsi lain di seluruh Indonesia. Secara kuantitas, penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada Semester II Tahun 2022 hanya berjumlah





195.702 jiwa atau setara dengan 4.49% dari seluruh penduduk Kalimantan Selatan. Persentase penduduk miskin nasional pada Tahun 2022 mencapai 9,54%.

Adapun jumlah dan persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.28** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

TAHUN	KALIMANTAN SELATAN		TAHUN	INDONESIA	
	Semester I			Semester I	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase		Jumlah (Jiwa)	Persentase
2022	195.702	4,49	2022	26.161,16	9,54
2021	208.110	4.83	2021	27.542.770	10.14
2020	187.870	4.38	2020	26.424.020	9.78
2019	192.480	4.55	2019	25.144.720	9.41
2018	189.030	4.54	2018	25.949.800	9.82
	Semester II			Semester II	
2022	195.702	4,49	2022	26.363,27	9,57
2021	197.760	4.56	2021	26.503.650	9.71
2020	206.920	4.83	2020	27.549.690	10.19
2019	190.290	4.47	2019	24.785.870	9.22
2018	195.010	4.65	2018	25.674.580	9.66

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Tabel 2.29** Kondisi Kemiskinan Selatan Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Miskin (P0)	4,54	4,55	4,38	4,83	4,49
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	189.033	192.480	187.874	208.118	195.702

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

Tabel 2.29 tersebut juga menunjukkan bahwa ada kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin. Walaupun Tahun 2022 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. namun ada penurunan jumlah penduduk miskin Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2018-2022.

Sementara itu. jumlah dan persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada Tahun 2022 berdasarkan Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel berikut.





**Tabel 2.30** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Semester I di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota	2021		2022	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase	Jumlah (Jiwa)	Persentase
Tanah Laut	15.860	4,57	13.541	3,86
Kotabaru	16.830	4,86	15.065	4,30
Banjar	18.070	3,04	16.711	2,79
Barito Kuala	16.100	5,11	15.055	4,75
Tapin	6.930	3,60	6.982	3,60
Hulu Sungai Selatan	11.470	4,84	10.804	4,54
Hulu Sungai Tengah	16.770	6,18	16.144	5,92
Hulu Sungai Utara	16.190	6,83	15.497	6,49
Tabalong	16.130	6,27	15.243	5,87
Tanah Bumbu	18.920	4,82	17.216	4,26
Balangan	8.060	6,07	7.825	5,83
Kota Banjarmasin	34.840	4,89	34.009	4,74
Kota Banjarbaru	11.950	4,40	11.610	4,17
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>208.110</b>	<b>4,83</b>	<b>195.702</b>	<b>4,49</b>

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin terbanyak ada di wilayah Kota Banjarmasin sebanyak 34.009 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk miskin paling sedikit ada di wilayah Kabupaten Tapin sebanyak 6.982 jiwa.

Walaupun jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin adalah yang paling banyak, namun secara persentase, Kota Banjarmasin bukan wilayah yang persentase penduduk miskinnya terbesar. Persentase penduduk miskin di Kota Banjarmasin hanya 4.74 persen, jauh lebih rendah dibanding Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang persentase penduduk miskinnya mencapai 5.92%. Adapun persentase penduduk miskin terkecil ada di Kabupaten Banjar dengan nilai 2.79%.

Jika membandingkan dengan persentase penduduk miskin secara provinsi yang mempunyai nilai 4.49 persen, maka hanya ada enam Kabupaten/Kota yang persentase penduduk miskinnya lebih kecil dari nilai Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten/Kota yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Kabupaten Tanah Laut (3.86%)
- 2) Kabupaten Kotabaru (4.30 %)
- 3) Kabupaten Banjar (2.79 %)
- 4) Kabupaten Tapin (3.60 %)
- 5) Kota Tanah Bumbu (4.26 %)





6) Kota Banjarbaru (4.17 %)

Berdasarkan Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSA) BPS. Garis Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Berdasarkan definisi tersebut, maka penduduk yang pengeluaran konsumsi per bulannya di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Adapun perkembangan Garis Kemiskinan di Kalimantan Selatan serta Garis Kemiskinan Berdasarkan Tempat Tinggal Penduduk dan Kabupaten/Kota disajikan pada tabel – tabel berikut.

**Tabel 2.31** Garis Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2018 s.d. 2022 (Rupiah)

Tahun	Kalimantan Selatan	
	Garis Kemiskinan	Perubahan
2018	447.212	22.060
2019	480.010	32.798
2020	522.845	42.835
2021	537.854	15.009
2022	575.061	37.207

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Tabel Dinamis)

**Tabel 2.32** Garis Kemiskinan Menurut Tempat Tinggal Tahun 2018 s.d. 2022 (Rupiah)

Tahun	Kalimantan Selatan		Indonesia	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
2018	441.218	414.494	415.614	383.908
2019	470.293	443.928	442.062	404.398
2020	490.254	503.748	471.822	433.281
2021	536.041	517.293	502.730	464.474
2022	588.472	572.917	464.474	513.170

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Tabel Dinamis)





**Tabel 2.33** Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota 2018 s.d. 2022 (Rupiah)

Kabupaten	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
TANAH LAUT	447.212	480.010	522.845	537.854	575.061
KOTABARU	401.300	416.388	466.121	481.452	505.601
BANJAR	400.081	429.422	462.375	482.867	514.991
BARITO KUALA	297.199	318.995	340.526	355.160	375.707
TAPIN	405.591	406.367	446.577	459.160	484.113
HULU SUNGAI SELATAN	444.455	461.581	528.622	494.203	516.857
HULU SUNGAI TENGAH	354.214	365.008	417.778	425.438	444.331
HULU SUNGAI UTARA	420.783	436.997	488.237	501.994	526.919
TABALONG	446.765	463.980	531.180	542.800	573.018
TANAH BUMBU	451.714	475.763	513.803	530.568	557.500
BALANGAN	382.835	396.532	441.488	453.928	476.190
KOTA BANJARMASIN	477.210	509.773	543.546	606.330	651.383
KOTA BANJAR BARU	572.195	614.757	652.030	653.556	692.830
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>427.774</b>	<b>457.222</b>	<b>497.262</b>	<b>519.150</b>	<b>553.073</b>

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Tabel Dinamis)

Tabel terakhir menunjukkan bahwa garis kemiskinan kabupaten/kota yang lebih besar adalah tahun 2022 Kota Banjarbaru 692.830 sedangkan Garis Kemiskinan yang paling rendah yaitu Kabupaten Barito Kuala sebesar 375.707 pada tahun 2022.

#### 2.2.1.9 Indeks Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (Suhariyanto dalam Mediaindonesia.com. 2020).

Dengan kata lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan jarak pengeluaran penduduk untuk melepas kategorinya sebagai penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dan semakin jauh juga pengeluaran yang harus ditambah agar penduduk tersebut mampu melepas kategori penduduk miskin.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan terjadinya ketimpangan atau perbedaan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin timpang pengeluaran di antara penduduk miskin, dan semakin besar jurang perbedaan pengeluaran di antara penduduk miskin.





Data mengenai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan ditampilkan pada Tabel 2.31 berikut;

**Tabel 2.34** Persentase Penduduk Miskin (P0). Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1). dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2022

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)
2017	4,73	0,72	0,17
2018	4,54	0,69	0,18
2019	4,47	0,64	0,16
2020	4,83	0,76	0,18
2021	4,56	0,47	0,10
2022	4,49	0,64	0,14

Sumber: BPS Indonesia 2023 (Semester II)

Secara sederhana, Tabel 2.34 menggambarkan indikator kemiskinan di Kalimantan Selatan yang semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dari kecenderungan menurunnya tiga indikator kemiskinan dari Tahun 2017-2022. Persentase penduduk miskin di Tahun 2017 yang mencapai 4,73 persen dapat turun sampai menjadi 4,47 persen di Tahun 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 4,56 persen pada tahun 2021 dan turun lagi pada tahun 2022 menjadi 4,49%. Demikian pula Tingkat Kedalaman Kemiskinan yang pada Tahun 2015 tercatat mencapai 0,74 dapat turun sampai 0,47 di Tahun 2021. Hal yang sama juga tercatat di indikator Tingkat Keparahan Kemiskinan yang sebelumnya mencapai 0,30 di Tahun 2015. namun dapat turun menjadi 0,10 di Tahun 2021, dan pada tahun 2022 menurun menjadi 0,14%

#### 2.2.1.10 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator pembangunan yang mempunyai cakupan yang sangat luas dalam menunjukkan pencapaian pembangunan manusia serta kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, IPM menjadi salah satu indikator yang cukup mewakili kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.

IPM Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Nilai IPM selalu meningkat dari tahun 2018 yaitu 70,17 persen dan mencapai kategori tertinggi 71,84 persen di tahun 2022. saat nilai IPM





Nasional tahun 2022 yaitu 72,91 persen. Adapun perkembangan nilai IPM Kalimantan Selatan dan Indonesia disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.35** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2018-2022

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
Kalimantan Barat	66,98	67,65	67,66	67,90	68,63
Kalimantan Tengah	70,42	70,91	71,05	71,25	71,63
Kalimantan Selatan	70,17	70,72	70,91	71,28	71,84
Kalimantan Timur	75,83	76,61	76,24	76,88	77,44
Kalimantan Utara	70,56	71,15	70,63	71,19	71,83
<b>Indonesia</b>	<b>71,39</b>	<b>71,92</b>	<b>71,94</b>	<b>72,29</b>	<b>72,91</b>

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Meskipun sudah ada di kategori tinggi, nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan masih berada di bawah rata-rata nasional. Dengan kata lain, kondisi pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan masih di bawah rata-rata masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jika memperhatikan IPM berdasarkan wilayah, maka dapat dilihat bahwa di Tahun 2022 nilai IPM kedua kota di Provinsi Kalimantan Selatan lebih baik jika dibandingkan dengan nilai IPM kabupaten. Nilai IPM Kota Banjarbaru 79,68 dan Kota Banjarmasin adalah 77,97. Sementara itu, hanya tiga kabupaten yang memiliki nilai IPM kategori tinggi, yaitu Tapin (71,02), Tabalong (73,13) dan Tanah Bumbu (71,79) sedangkan delapan kabupaten lainnya masih di kategori sedang dan belum mencapai nilai 70. Adapun nilai IPM terendah ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 66,84. Adapun rincian nilai IPM berdasarkan wilayah disajikan pada Tabel 2.36 berikut.





**Tabel 2.36** Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
Tanah Laut	69,86	12,32	7,9	11703	70,35
Kotabaru	69,56	12,06	7,47	12191	69,74
Banjarnegara	67,73	13,02	7,71	12871	70,72
Barito Kuala	66,55	12,54	7,63	10230	67,37
Tapin	70,88	12,04	7,95	12247	71,02
Hulu Sungai Selatan	66,51	12,4	7,79	13157	69,76
Hulu Sungai Tengah	66,54	12,22	8,28	12448	69,7
Hulu Sungai Utara	64,53	12,93	7,76	10132	66,84
Tabalong	70,84	12,9	9,12	11914	73,13
Tanah Bumbu	70,7	12,49	8,25	12217	71,79
Balangan	68,13	12,61	7,85	11659	69,73
Kota Banjarmasin	71,59	13,95	10,21	14770	77,97
Kota Banjarbaru	72,36	14,83	10,98	14136	79,68
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>69,13</b>	<b>12,82</b>	<b>8,46</b>	<b>12469</b>	<b>71,84</b>

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

### 2.2.1.11 Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia adalah dimensi pendidikan. Ada berbagai indikator yang dapat mengukur kualitas sumber daya manusia dari segi dimensi pendidikan. salah satunya adalah Angka Rata-rata Lama Sekolah (Angka RLS). Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Adapun objek pengukuran indikator ini adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Maka dari itu. Angka RLS dapat menunjukkan rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.

Pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kualitas pendidikan. Seseorang dengan pendidikan tinggi akan memiliki peluang yang besar dalam hidupnya dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah, misalnya di bidang pekerjaan. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan mendorong perbaikan di bidang lain seperti tingkat kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan secara ekonomi. Mengingat begitu pentingnya pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, melalui berbagai program pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan, juga menyoar peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar. Dimensi





pengetahuan/pendidikan pada IPM dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2018 hingga 2022, HLS di Provinsi Kalimantan Selatan telah meningkat sebesar 0,35 tahun, sementara RLS meningkat juga sebesar 0,35 tahun. Selama periode 2018 hingga 2022, Meningkatnya HLS menunjukkan peningkatan tahun bersekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 (tujuh) tahun di masa mendatang.

Pada tahun 2022, HLS di Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai 12,82 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 (tujuh) tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau hingga menempuh jenjang D1. Data perkembangan Angka RLS dan HLS di Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.34 dan 2-34 berikut.

**Tabel 2.37** Angka Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	7,38	7,64	7,88	7,89	7,9
Kotabaru	7,19	7,42	7,43	7,46	7,47
Banjarnegara	7,29	7,34	7,35	7,52	7,71
Barito Kuala	7,32	7,33	7,34	7,55	7,63
Tapin	7,54	7,75	7,76	7,77	7,95
Hulu Sungai Selatan	7,72	7,74	7,75	7,76	7,79
Hulu Sungai Tengah	7,8	7,99	8	8,01	8,28
Hulu Sungai Utara	7,36	7,37	7,53	7,75	7,76
Tabalong	8,57	8,78	9,1	9,11	9,12
Tanah Bumbu	7,7	7,71	7,96	7,97	8,25
Balangan	7,04	7,27	7,55	7,69	7,85
Kota Banjarmasin	9,93	9,94	9,95	10,2	10,21
Kota Banjarbaru	10,93	10,94	10,95	10,96	10,98
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>8</b>	<b>8,2</b>	<b>8,29</b>	<b>8,34</b>	<b>8,46</b>

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

#### 2.2.1.12 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Berikut tersaji data Tabel 2.38 Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, sebagai berikut





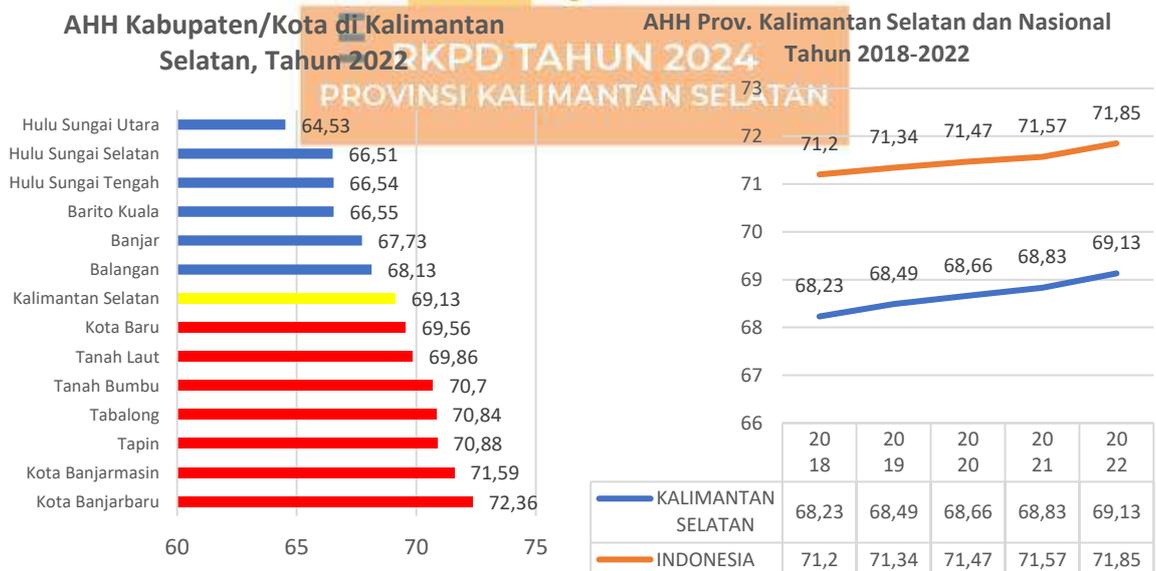
**Tabel 2.38** Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	11,95	11,96	12,01	12,31	12,32
Kotabaru	11,83	11,92	11,93	11,95	12,06
Banjar	11,99	12,28	12,44	12,73	13,02
Barito Kuala	12,37	12,38	12,39	12,40	12,54
Tapin	11,85	11,86	11,94	11,95	12,04
Hulu Sungai Selatan	12,07	12,10	12,17	12,38	12,4
Hulu Sungai Tengah	12,18	12,19	12,20	12,21	12,22
Hulu Sungai Utara	12,83	12,88	12,91	12,92	12,93
Tabalong	12,53	12,59	12,72	12,89	12,9
Tanah Bumbu	12,33	12,36	12,37	12,48	12,49
Balangan	12,36	12,37	12,46	12,47	12,61
Kota Banjarmasin	13,91	13,92	13,93	13,94	13,95
Kota Banjarbaru	14,79	14,80	14,81	14,82	14,83
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>12,50</b>	<b>12,52</b>	<b>12,52</b>	<b>12,81</b>	<b>12,82</b>

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2023

### 2.2.1.13 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH). SIRUSA BPS menyebutkan bahwa AHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. Adapun perkembangan AHH di Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Grafik II.27 berikut.



Sumber BPS Kalimantan Selatan 2022

**Gambar 2.13** Angka Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022. Serta AHH Kabupaten/Kota Tahun 2022





Gambar 2.13 menunjukkan bahwa AHH Kalimantan Selatan selalu mengalami peningkatan. Dengan kata lain, terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan selama periode Tahun 2018-2022. AHH Kalimantan Selatan dengan nilai 68,83 tahun ini menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada Tahun 2022 diharapkan dapat mempunyai peluang hidup hingga usia 71,85 tahun.

Namun demikian, Gambar 2.13 juga menunjukkan bahwa AHH Kalimantan Selatan masih berada di bawah AHH nasional. Dengan kata lain, derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan masih berada di bawah rata-rata seluruh penduduk Indonesia. Data AHH berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa masyarakat wilayah kota di Kalimantan Selatan memiliki derajat kesehatan yang lebih baik daripada masyarakat di kabupaten. Namun, perbedaan derajat kesehatan di wilayah kota dengan kabupaten tidak mencolok seperti perbedaan indikator pendidikan.

Kedua kota di Kalimantan Selatan memiliki nilai AHH lebih baik dibanding 11 kabupaten lain. Nilai AHH di Banjarbaru dan Banjarmasin adalah 72,36 tahun dan 71,59 tahun. Nilai tersebut tidak terlalu berjarak dibanding Kabupaten Tabalong dan Tapin yang memiliki AHH dengan nilai yang sama yaitu 70,84 dan 70,88. Adapun kabupaten yang memiliki nilai AHH paling rendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 64,53.

Adapun perkembangan nilai AHH menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel berikut.





**Tabel 2.39** Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan. 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	69,08	69,31	69,45	69,59	69,86
Kota Baru	68,89	69,10	69,21	69,32	69,56
Banjar	66,66	66,97	67,21	67,41	67,73
Barito Kuala	65,59	65,88	66,09	66,27	66,55
Tapin	69,98	70,23	70,40	70,57	70,88
Hulu Sungai Selatan	65,59	65,82	65,97	66,12	66,51
Hulu Sungai Tengah	65,54	65,82	66,01	66,20	66,54
Hulu Sungai Utara	63,24	63,58	63,83	64,10	64,53
Tabalong	70,12	70,33	70,44	70,57	70,84
Tanah Bumbu	69,74	70,08	70,34	70,45	70,7
Balangan	67,37	67,59	67,72	67,85	68,13
Kota Banjarmasin	70,75	70,98	71,13	71,29	71,59
Kota Banjarbaru	71,67	71,87	71,99	72,10	72,36
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>68,23</b>	<b>68,49</b>	<b>68,66</b>	<b>68,83</b>	<b>69,13</b>

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2023

#### 2.2.1.14 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan derajat kesehatan reproduksi masyarakat di suatu wilayah. Informasi yang didapat dari AKI dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi. Adapun data mengenai AKI di Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan. 2023

**Gambar 2.14** Kasus Kematian Ibu di Kalimantan Selatan Tahun 2022



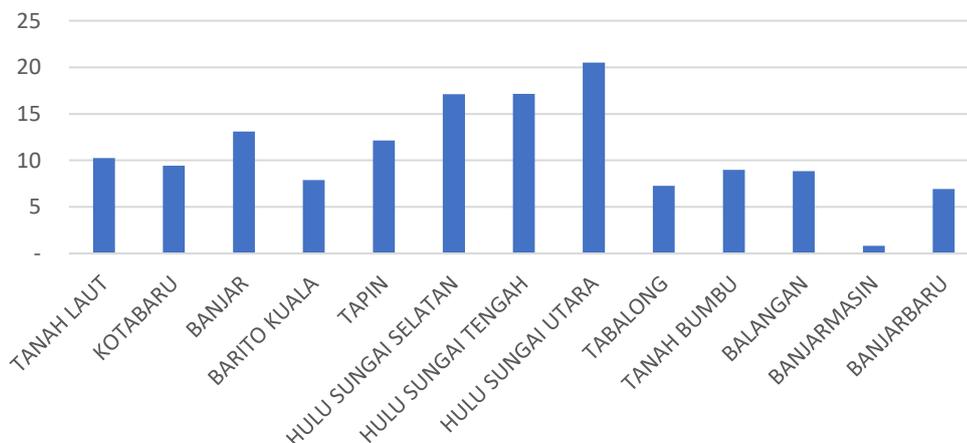


Gambar 2.14 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi AKI di Kalimantan Selatan. Kondisi menguatirkan dengan AKI tertinggi dialami pada Tahun 2018 dengan nilai 108. artinya terdapat 108 kematian ibu dalam 100.000 kelahiran. Kondisi sempat membaik pada Tahun 2019. karena nilai AKI menurun sampai di tingkat 92. Setelah itu. AKI kembali meningkat pada Tahun 2021 saat nilainya mencapai 205, Dan kondisi mulai turun di 2022 yaitu 137. Indikator derajat kesehatan reproduksi masyarakat juga dilengkapi dengan informasi mengenai kasus kematian ibu yang juga tergambar pada Gambar 2.14. Dari gambar tersebut terlihat bahwa kasus kematian ibu tertinggi pada Tahun 2021 yaitu kabupaten Hulu Sungai Utara yakni sebesar 326 Orang dan Kasus kematian paling rendah tercatat di Banjarmasin dan Hulu Sungai Selatan dengan nilai 100 dan 108.

### 2.2.1.15 Angka Kematian Bayi dan Balita

Perkembangan AKB di Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan tren menurun dari 10 per 1.000 kelahiran pada tahun 2017 menjadi 9 per 1.000 kelahiran pada tahun 2021. Akan tetapi mengalami kenaikan di tahun 2022 10 per 1.000 kelahiran. Beberapa penyebab kematian bayi di samping penyakit seperti ISPA (infeksi saluran pernapasan akut). panas tinggi hingga diare antara lain disebabkan keracunan kehamilan. pendarahan saat persalinan. berat badan lahir rendah serta faktor lainnya. Pendampingan kelas ibu hamil di puskesmas dan rumah sakit. meningkatnya kunjungan pemeriksaan ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan serta optimalisasi peran Posyandu berkontribusi dalam penurunan kasus kematian bayi di Kalimantan Selatan.

Kasus Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran hidup



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan. 2023

**Gambar 2.15** Kasus Kematian Bayi di Kalimantan Selatan Tahun 2022





### 2.2.1.16 Tingkat Kesakitan

Tingkat kesakitan terdiri dari akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular adalah infeksi yang disebabkan mikroorganisme virus, bakteri, jamur, dan parasit. Ciri penyakit menular adalah dapat berpindah ke orang lain yang sehat sehingga menyebabkan orang yang tadinya sehat menjadi sakit. Sedangkan Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyakit bukan disebabkan oleh penularan vektor, virus atau bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Yang termasuk kategori PTM ini diantaranya adalah stroke, penyakit jantung koroner, kanker, diabetes melitus, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Berikut perkembangan penyakit menular di Kalimantan Selatan dari tahun 2018-2022.

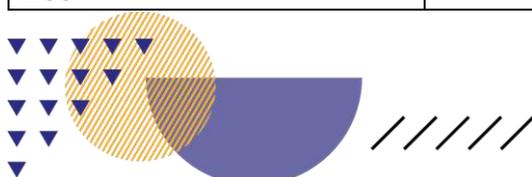
**Tabel 2.40** Perkembangan Penyakit menular di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Case Detection Rate (CDR) TB	%	50	42	17	23,7	49
2	Succes Rate TB	%	98,8	86,3	64	76,7	81,4
3	Prevalensi HIV-Aids Kelompok Resiko Tinggi	angka	<1	0,07	0,04	0,083	-
4	Annual Paracite Incidence (API) Malaria < 1	angka	0,15	0,19	0,13	0,09	0,12
5	Prevalensi Kusta	angka	0,4	0,44	0,3	0,22	0,3
6	Persentase Kab/Kota yang eliminasi Rabies	%	92	30,8	15,4	15,3	23,07
7	Persentase cakupan pengobatan massal Filariasis terhadap jumlah penduduk endemis	%	96,3	92,5	96,9	0/ selesai	96,9

Berbagai penyakit tidak menular (PTM) turut mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat termasuk masyarakat Kalimantan Selatan. Ada 16 penyakit tidak menular yang tercatat diidap oleh masyarakat dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat meningkatkan risiko kematian akibat PTM. Adapun rincian PTM yang diidap oleh masyarakat Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.41** Penyakit Tidak Menular Tahun 2022

KABUPATEN	JUMLAH PENYAKIT TIDAK MENULAR	
	HIPERTENSI	DIABETES
Tanah Laut	38.673	3.282
Kotabaru	14.503	3.765
Banjar	27.032	3.367
Barito Kuala	27.125	2.638
Tapin	11.298	2.240
HSS	53.752	4.962





HST	65.946	2.513
HSU	19.260	3.346
Tabalong	13.384	3.158
Tanah Bumbu	21.362	4.482
Balangan	6.750	1.484
Banjarmasin	59.136	17.599
Banjarbaru	7.557	2.613
Kalimantan Selatan	365.777	55.449

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2023

### 2.2.1.17 Status gizi Masyarakat

Status gizi masyarakat Kalimantan Selatan yang perlu mendapat perhatian mencapai 1,19 % dari jumlah penduduk Kalimantan Selatan. Angka ini terdistribusi dari anemia gizi, gizi kurang dan gizi buruk. Jika kondisi ini terjadi terus menerus dan terakumulasi maka akan meningkatkan prevalensi stunting. Anemia Gizi meskipun sudah mengalami penurunan namun masih menjadi masalah terbesar bagi perempuan khususnya remaja putri dan Ibu hamil. Sementara gizi kurang pada balita saja masih 7,20% pada tahun 2022, demikian juga gizi buruk pada balita masih 1,45% pada tahun 2021. Sementara gizi kurang dan buruk tidak hanya terjadi pada balita saja, tetapi juga terjadi pada anak dan usia di atas 5 tahun dan dewasa yang memiliki riwayat penyakit kronis. Tabel berikut menggambarkan status gizi masyarakat Kalimantan Selatan khususnya berkaitan dengan remaja putri, ibu hamil dan balita.

**Tabel 2.42** Perkembangan Status Gizi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Prevalensi anemia gizi	%	22,41	15,97	20,13	17,4	16,4
2	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	14,1	15,8	10,45	10,02	7,20
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	2,6	2,5	1,45	1,19	1,0
4	Prevalensi Stunting	%	29,24	19,8	12,6	15,3	9,60

Tumbuh kembang jasmani anak-anak dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu masalah yang berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang jasmani anak-anak adalah stunting, yaitu masalah nutrisi yang dialami sejak bayi.

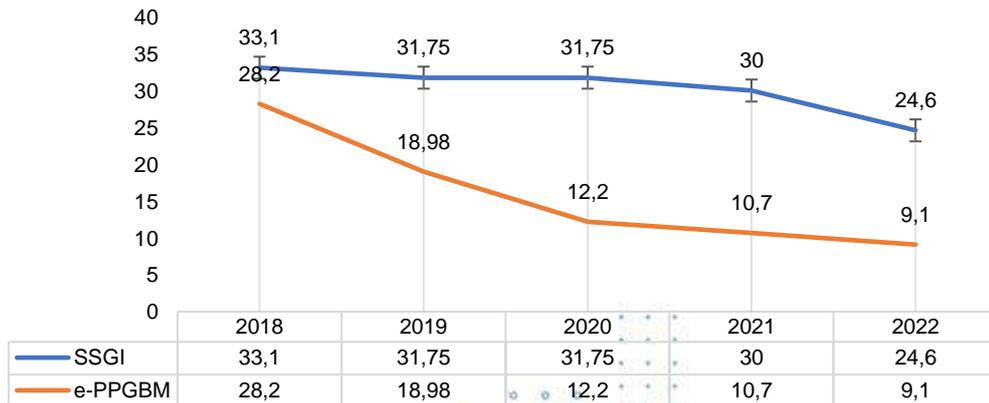
Permasalahan stunting juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan berbagai





program bidang kesehatan. prevalensi stunting di Kalimantan Selatan dapat menunjukkan grafik yang membaik. Ini tercermin dari tingkat prevalensi balita di Kalimantan Selatan yang nilainya menurun. bisa dilihat angka Stunting pada grafik berikut.

### Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022



Sumber data SSGI 2018-2022 dan (e-PPGBM) 2018-2022

**Gambar 2.16** Perkembangan Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022

Perkembangan nilai stunting berdasarkan Riskesdas dan e-PPGBM serta rinciannya berdasarkan Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 2.43 berikut.

**Tabel 2.43** Jumlah Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Kabupaten / Kota	TB/U								Total	Stunting	%
	Sangat Pendek		Pendek		Normal		Tinggi				
	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln			
Kab Tanah Laut	162	386	447	1.124	5.890	14.431	124	147	16.088	1.510	9
Kab Kota Baru	194	500	426	1.257	3.226	9.144	70	188	11.089	1.757	16
Kab Banjar	719	1.509	1.241	3.296	7.178	18.815	119	186	23.806	4.805	20
Kab Barito Kuala	280	762	753	2.301	6.490	16.424	164	208	19.695	3.063	16
Kab Tapin	132	331	333	1.044	3.108	8.535	62	74	9.984	1.375	14
Kab Hulu Sungai Selatan	68	204	230	771	4.054	11.808	26	34	12.817	975	8
Kab Hulu Sungai Tengah	214	358	465	1.345	4.658	13.817	37	52	15.572	1.703	11
Kab Hulu Sungai Utara	262	656	776	2.529	4.662	11.725	29	37	14.947	3.185	21
Kab Tabalong	183	411	650	1.737	6.314	16.236	56	69	18.453	2.148	12





Kabupaten / Kota	TB/U										
	Sangat Pendek		Pendek		Normal		Tinggi		Total	Stunting	%
	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln			
Kab Tanah Bumbu	125	307	455	1.281	9.165	23.293	77	100	24.981	1.588	6
Kab Balangan	307	643	525	1.653	2.452	6.440	12	20	8.756	2.296	26
Kota Banjarmasin	228	570	600	1.914	15.020	40.228	83	170	42.882	2.484	6
Kota Banjarbaru	136	257	290	622	1.924	4.129	38	62	5.070	879	17
Kalimantan Selatan	3.010	6.894	7.191	20.874	74.141	195.025	897	1.347	224.140	27.768	12

### 2.2.1.18 Rata rata Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita masyarakat di suatu daerah menentukan tingkat/ kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada akhirnya akan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun pada dasarnya angka pengeluaran tersebut bukan satu-satunya variabel penentu kesejahteraan, masih ada variabel lain seperti tingkat inflasi, ketersediaan produksi lokal dan ketersediaan komponen produksi lokal. Selama periode 2017-2021 pengeluaran perkapita Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang meningkat dari Rp. 11.600.000 menjadi Rp. 12.143.000, mengalami peningkatan 4,47% atau sebesar Rp. 534.000. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.44** Perkembangan pengeluaran perkapita di Provinsi Pulau Kalimantan Tahun 2018 – 2022

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
Kalimantan Barat	8.860	9.055	8.930	8.974	9.355
Kalimantan Tengah	10.931	11.236	11.154	11.182	11.458
Kalimantan Selatan	12.062	12.253	12.032	12.143	12.469
Kalimantan Timur	11.917	12.359	11.728	12.116	12.641
Kalimantan Utara	8.943	9.343	8.756	9.075	9.350
Indonesia	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa rata-rata pengeluaran perkapita tertinggi selama kurun waktu 2018-2022 di Pulau Kalimantan adalah Provinsi





Kalimantan Selatan, masing-masing Rp.12.469.000 untuk tahun 2022 dan Kalimantan Timur Rp. 12.641.000 tahun 2022. Sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita terendah adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, dengan angka masing-masing adalah Rp. 9.355.000 dan Rp. 9.350.000. Meskipun angka ini menunjukkan disparitas wilayah, namun belum tentu tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara lebih rendah dari pada Kalimantan Selatan, atau sebaliknya.

### 2.2.1.19 Tingkat Pengangguran Terbuka

Angka TPT Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 adalah 4,74%, angka tersebut masih lebih rendah daripada TPT Indonesia sebesar 5,86%. Berdasarkan gambar 2.17 bahwa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dengan nilai TPT adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

**Gambar 2.17** Tingkat Pengangguran Terbuka paten/Kota Tahun 2022

**Tabel 2.45** Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Selama Tahun 2019-2022

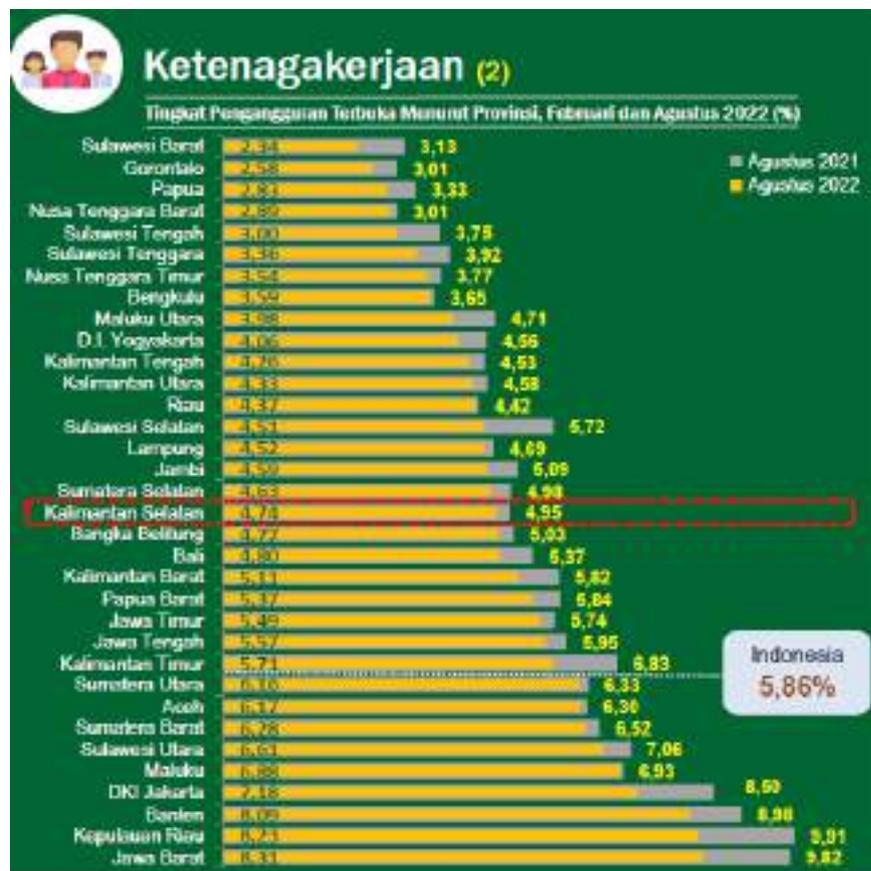
Kabupaten/Kota	TPT (%)			
	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	3,38	3,57	3,52	4,17
Kotabaru	4,78	4,96	5,57	6,70
Banjar	2,89	3,87	3,98	2,72
Barito Kuala	2,39	2,93	3,22	3,63
Tapin	3,65	3,73	4,96	4,15
HSS	2,43	2,24	2,44	2,29





Kabupaten/Kota	TPT (%)			
	2019	2020	2021	2022
HST	2,80	3,90	3,76	3,35
HSU	3,35	4,49	4,80	4,64
Tabalong	3,18	3,07	3,43	4,46
Tanah Bumbu	6,05	6,95	6,83	6,89
Balangan	2,28	2,46	2,44	3,98
Banjarmasin	7,49	8,32	8,47	6,96
Banjarbaru	4,93	5,54	5,70	5,47
Kalimantan Selatan				4,74
Nasional				5,86

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2023



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 2.18** Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2022

**Tabel 2.46** Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Tahun	2018		2019		2020		2021		2022	
	FEB	AGS								
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	3,72	4,35	3,5	4,18	3,67	4,74	4,33	4,95	4,2	4,74





Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	2.216.043	2.131.858	2.268.874	2.135.100	2.269.344	2.186.967	2.195.818	2.219.395	2.129.301	2.196.250
Jumlah Penduduk Pengangguran/ Mencari Kerja (Jiwa)	82.405	92.810	77.289	89.269	83.336	103.648	95.001	109.968	89.470	104.025

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

Salah satu isu yang mengemuka dalam ketenagakerjaan adalah pengangguran. Di satu sisi pengangguran dapat terkait dengan masalah kualitas sumber daya manusia. di sisi lain pengangguran juga dapat menggambarkan ketidakcocokan keterampilan dan kebutuhan industri. Selain itu, masalah pengangguran kemudian dapat mendorong ekspansi ekonomi. masalah ini menjadi krusial untuk dituntaskan karena berpotensi menimbulkan masalah sosial dan meningkatkan tingkat kriminalitas.

### 2.2.1.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Tingginya TPAK menunjukkan tingginya pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Adapun rincian TPAK Kalimantan Selatan berdasarkan Kabupaten/Kota pada periode 2018-2022 ditunjukkan pada Tabel 2.42 berikut.

**Tabel 2.47** Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Selama Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	67,08	69,68	72,03	72,27	70,92
Kotabaru	70,25	68,03	64,68	67,50	63,96
Banjar	71,79	72,55	72,55	70,84	69,91
Barito Kuala	79,34	74,75	74,61	75,48	70,74
Tapin	70,05	69,83	70,17	70,31	70,31
HSS	72,15	71,49	73,15	69,25	69,55
HST	74,85	70,47	71,15	70,20	67,63
HSU	70,55	68,94	70,08	71,41	69,35
Tabalong	75,63	71,02	69,27	71,49	72,32
Tanah Bumbu	66,62	67,31	70,16	68,29	64,75
Balangan	77,54	71,99	76,50	75,38	72,54
Banjarmasin	65,28	66,15	62,07	63,19	63,15
Banjarbaru	63,51	63,46	66,82	65,95	62,46
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>70,27</b>	<b>69,41</b>	<b>69,33</b>	<b>69,26</b>	<b>67,55</b>

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2023





Rendahnya TPAK salah satunya disebabkan oleh ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja dunia usaha.

### 2.2.1.21 Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kalimantan Selatan. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 1.055,086 orang, naik sebanyak 69,962 orang dibanding Tahun 2021 sebanyak 985,124 orang. Untuk lebih detailnya dari tahun 2018 – 2022 bisa di lihat Tabel 2.48

**Tabel 2.48** Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (Jiwa) Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten	Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus
Tanah Laut	81,301	76,658	70,601	71,005	75,490
Kotabaru	70,769	77,835	85,915	80,329	90,468
Banjar	121,350	121,022	120,461	129,838	135,093
Barito Kuala	46,853	58,356	58,546	57,371	69,236
Tapin	42,332	43,523	42,810	43,244	43,618
Hulu Sungai Selatan	49,058	51,337	47,609	55,062	55,056
Hulu Sungai Tengah	51,887	60,119	58,459	60,954	66,852
Hulu Sungai Utara	50,797	54,023	51,792	50,043	54,235
Tabalong	45,555	54,688	57,647	54,244	53,422
Tanah Bumbu	87,834	89,284	82,527	90,783	104,421
Balangan	20,771	26,871	22,341	23,676	26,929
Kota Banjarmasin	185,907	183,634	202,576	198,806	201,261
Kota Banjar Baru	70,501	72,297	66,148	69,769	79,005
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>924,915</b>	<b>969,647</b>	<b>967,432</b>	<b>985,124</b>	<b>1.055.086</b>

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2022

### 2.2.1.22 Jumlah Penduduk Bekerja

Setelah berakhirnya pandemi Covid-19 mengubah kondisi ketenagakerjaan menjadi era disrupsi terutama di wilayah Kalimantan Selatan, sebuah era dimana terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara baru. Pada Tahun 2022 Penduduk bekerja di Kalimantan Selatan yang tercatat bekerja ada 2.092.225 Orang, mengalami kenaikan di banding Tahun





2021 2.109.427 Orang. Lebih jelasnya bisa di lihat jumlah penduduk bekerja pada tahun 2018 sampai 2022 dilihat pada Tabel 2.49.

**Tabel 2.49** Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa) Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten	Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus
Tanah Laut	158.596	166.334	175.337	178.543	176.458
Kotabaru	157.107	153.867	149.553	157.532	149.780
Banjar	294.592	300.794	306.060	302.916	305.404
Barito Kuala	174.040	166.335	167.010	170.889	161.336
Tapin	93.739	94.660	96.936	97.354	99.027
Hulu Sungai Selatan	121.839	121.575	126.831	120.973	122.843
Hulu Sungai Tengah	141.582	136.525	138.546	138.204	134.982
Hulu Sungai Utara	113.926	113.165	115.837	118.972	117.012
Tabalong	132.994	126.057	125.937	131.366	133.323
Tanah Bumbu	159.614	167.067	180.538	182.149	178.618
Balangan	69.585	65.086	70.928	70.707	68.313
Banjarmasin	309.316	318.725	303.967	312.415	320.853
Banjar Baru	112.118	115.641	125.839	127.407	124.276
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>2.039.048</b>	<b>2.045.831</b>	<b>2.083.319</b>	<b>2.109.427</b>	<b>2.092.225</b>

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2022

### 2.2.1.23 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni dan budaya turut menghidupi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Dari seni dan budaya tersebut berkembang nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat ikut menangkal pengaruh buruk bebas dan pesatnya arus informasi serta globalisasi. Pelestarian seni dan budaya serta nilai-nilai luhur di dalam kandungannya diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia Kalimantan Selatan. Beberapa lembaga berperan dalam melestarikan nilai-nilai yang lahir dari seni dan budaya masyarakat Kalimantan Selatan. Jenis Seni Budaya Provinsi Kalimantan Selatan.

**Tabel 2.50** Berbagai Seni Budaya di Kalimantan Selatan

Jenis Seni Budaya	Seni Budaya di Kalimantan Selatan
Teater Tradisi/Teater Rakyat	Mamanda. Madihin. Wayang Gung. Abdul Mulik Loba. Kuda Gepang. Cerita Damarwulan. Tantayungan. Wayang Kulit. Teater Tutur.
Seni Musik	Kuriding. Karung-karung. Panting. Kintunglit. Bumbung. Suling Bambu. Musik Tiup. Salung Ulin. Kateng Kupak





Sinoman Hadrah dan Rudat	Sinoman Hadrah dan Rudat bersumber dari budaya yang dibawa oleh pedagang dan penda'wah Islam dari Arab dan Persia dan berkembang campur menjadi kebudayaan pada masyarakat pantai pesisir Kalimantan Selatan hingga timur
Seni Tari	Tari Tradisi : Balian. Gantar. Bakanjar. Babangai Tari Klasik : Baksa Kambang. Topeng. Radap Rahayu Tari Rakyat : Japin Sisit. Tirik Lalan. Gambut. Kuda Gepang. Rudat dll
Seni Sastra	Kuriding. Karung-karung Panting. Kintunglit. Bumbung. Suling Bambu. Musik Tiup. Salung Ulin. Kateng Kupak. Syair : Hikayat. Sejarah. Keagamaan Pantun : Biasa. Kilat. Bakait
Seni Rupa	Ornamen. Topeng dan Patung
Keterampilan	Maayam dinding palupuh. maulah atap. wantilan. maulah gula habang. maulah dodol kandungan. maulah apam barabai. maulah sasapu ijuk. manggangan. maulah wadai. maulah urung katupat. maayam janur banjar. dll

Sumber: Dari Berbagai Sumber

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen yang disusun bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas dan BPS. IPK ini diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan ditingkat nasional dan daerah sesuai dengan amanat UU no 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2019 IPK Kalimantan Selatan dengan IPK 53,79 % berada di urutan 13 dari 34 Provinsi, melampaui target IPK nasional yaitu 53,74 %. Namun ada beberapa indikator ada yang masih rendah atau belum mencapai target.

Dimensi Ekonomi Budaya Nilai Dimensi Ekonomi Budaya Kalimantan Selatan adalah 22,24 pada urutan ke 22 dari 34 provinsi, masih di bawah target nasional sebesar 30,55. Dimensi Warisan Budaya Nilai Dimensi Warisan Budaya Kalimantan Selatan adalah 43,06 pada urutan ke 15 dari 34 provinsi di atas target nasional sebesar 41,11. Dimensi Ekspresi Budaya Nilai Dimensi Ekspresi Budaya Kalimantan Selatan adalah 32,16 pada urutan ke 19 dari 34 provinsi di bawah target nasional sebesar 36,57. Dimensi Budaya Literasi Nilai Dimensi Budaya Literasi Kalimantan Selatan adalah 60,28 pada urutan ke 7 dari 34 provinsi di atas target nasional sebesar 55,03.

### 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai aspek sesuai dengan klasifikasi urusan yang tertera dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

- **Layanan Urusan Wajib**





Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Provinsi Kalimantan Selatan memang sudah menunjukkan adanya perbaikan di setiap periodenya, namun masih perlu adanya peningkatan terutama sarana prasarana penunjang pendidikan. Sementara pelayanan non dasar sebagian besar belum menunjukkan kinerja yang membanggakan karena dalam beberapa urusan wajib non dasar ini belum memiliki NSPK.

### 2.3.1 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

#### 2.3.1.1 Pendidikan

Capaian keberhasilan pendidikan di Kalimantan Selatan yang diukur berdasarkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lamasekolah Kalimantan Selatan diukur berdasarkan capaian sebagai berikut:

#### 2.3.1.2 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kalimantan Selatan secara umum menunjukkan perkembangan meningkat selama periode Tahun 2018-2022. APS untuk jenjang SD/MI/Paket A sudah hampir mencapai 100%, artinya hampir seluruh penduduk Kalimantan Selatan yang masuk dalam kelompok usia SD/MI/Paket A masih bersekolah atau tercatat sebagai peserta didik. Sementara APS untuk jenjang SMP/MTs/Paket B sudah lebih 90%. Yang paling rendah adalah APS jenjang SMA/SMK/MA/Paket C yang masih di bawah 70%.

APS pada jenjang SMP/MTs/Paket B dan jenjang SMA/SMK/MA/Paket C belum sebaik APS pada jenjang SD/MI/Paket A. Namun demikian, APS pada kedua jenjang tersebut mengalami peningkatan nilai secara terus menerus pada periode Tahun 2018-2022. Adapun data rinci mengenai APS di Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.51** Pencapaian APS pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI/Paket A	99,64	99,53	99,48	99,38	99,43
SMP/MTs/Paket B	92,43	92,83	93,04	93,50	94,01





SMU/SMK/MA/ Paket C	68,66	69,19	69,38	69,31	69,88
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Kalsel (Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalsel Tahun 2022)

### 2.3.1.3 Angka Partisipasi Kasar

Secara umum, Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kalimantan Selatan cukup baik dan terus mengalami peningkatan. Namun, nilai APK di jenjang SD/MI/Paket A yang menurun bukan mengindikasikan bahwa terjadi kemunduran kualitas sumber daya dan partisipasi penduduk usia SD/MI/Paket A. Penurunan nilai APK tersebut berpotensi terjadi karena semakin sesuai usia penduduk saat menempuh pendidikan jenjang SD/MI/Paket A. Secara sederhana, bisa saja terjadi pengurangan anak-anak usia dini yang bersekolah di jenjang SD/MI/Paket A atau terjadi pengurangan anak-anak yang mengalami pengulangan kelas. Adapun data APK Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.52** Pencapaian APK ada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI/Paket A	104,25	104,29	107,28	107,14	107,18
SMP/MTs/Paket B	96,13	97,40	86,31	86,04	86,40
SMU/SMK/MA/Paket C	88,18	91,05	79,10	80,77	80,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2023 (Tabel Dinamis)

### 2.3.1.4 Angka Partisipasi Murni

Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistika (SIRUSA) BPS, Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan persentase penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Walaupun secara umum nilai APM Kalimantan Selatan berfluktuasi, namun nilai APM di jenjang SMU/SMK/MA/Paket C cukup mengembirakan karena selalu mengalami peningkatan cukup drastis. Adapun data APM Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2018 - 2022 disajikan pada Tabel 2.53 berikut.





**Tabel 2.53** Pencapaian APM ada Semua Jenjang Dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI/Paket A	91,96	92,42	98,75	98,94	99,12
SMP/MTs/Paket B	71,03	69,56	75,51	74,88	76,28
SMU/SMK/MA/Paket C	63,92	65,17	58,25	58,37	59,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Kalsel (Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalsel Tahun 2022)

Fasilitas dasar pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan lebih dari cukup dengan ketersediaan sekolah maupun kuantitas tenaga pengajar yang dapat dilihat pada Tabel 2.54.

**Tabel 2.54** Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru, serta Indikatornya di Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022

Taman Kanak Kanak			
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)
2018	2.447	105.717	9.749
2019	2.448	101.777	10.641
2020	2.435	96.206	10.525
2021	2.483	88.548	10.304
2022	2.509	93.661	10.396
Sekolah Dasar			
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)
2018	2.911	381.207	27.806
2019	2.914	377.968	27.391
2020	2.929	376.084	30.685
2021	2.938	365.957	29.872
2022	2.915	356.919	30.182
Sekolah Menengah Pertama			
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)
2018	598	120.803	8.859
2019	601	118.052	8.83
2020	615	112.479	9.724
2021	619	112.915	9.417
2022	625	111.622	9.359
Sekolah Menengah Atas			
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)
2018	186	65.819	4.439
2019	190	67.588	4.529
2020	195	67.723	4.833
2021	202	66.914	4.789





2022	205	66.465	5.033
Sekolah Menengah Kejuruan			
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)
2018	123	55.793	3.66
2019	122	57.485	3.706
2020	126	59.717	3.943
2021	127	61.515	4.039
2022	126	55.319	4.142

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2023

Jika melihat analisis berikutnya berupa rasio murid terhadap guru, maka angka ini akan menggambarkan tingkat perbandingan murid terhadap guru sebagai asumsi dasar kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang mengenyam pendidikan. Semakin tinggi rasio murid terhadap guru maka beban mengajar guru semakin berat, sehingga memungkinkan kualitas mengajar menurun, begitu juga sebaliknya. Namun analisis awal ini harus juga diperhatikan terkait distribusi penempatan hingga kualitas guru yang mengajar apakah sudah memenuhi standar kualifikasi atau belum.

Jika dilihat dari rasio murid terhadap guru secara umum, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tenaga pengajar yang lebih dari cukup seperti yang terlihat pada Tabel 2.54. Namun dalam penyebarannya perlu diperhatikan kualitas tenaga pendidik dan kependidikannya agar kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas dapat terealisasi.

Pada jenjang yang lebih tinggi, di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat perguruan tinggi negeri yakni Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Politeknik Kesehatan (Poltekkes Banjarmasin), dan Politeknik Negeri Banjarmasin. Selain itu, terdapat juga perguruan tinggi swasta sebanyak 23 unit dan akademi swasta sebanyak 22.

### 2.3.1.5 Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan sedang dalam masa pengembangan dimana tahun 2022 telah ada 53 unit rumah sakit (dengan tempat tidur sebanyak 3.820 tempat tidur), 6 rumah sakit bersalin, 241 puskesmas, 3.900 Posyandu, 55 klinik kesehatan, 595 Polindes, dan 900 Posbindu. Meskipun begitu, kendala infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pembangunan kesehatan tersebut masih belum maksimal, sehingga terjadi disparitas derajat kesehatan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun kondisi prasarana kesehatan sebagaimana pada Tabel 2.55.





**Tabel 2.55** Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit	Tempat Tidur di RS	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik Kesehatan	Polindes	Posbindu
Tanah Laut	5	189	2	22	280	6	84	88
Kotabaru	2	111	0	28	293	1	46	150
Banjar	7	798	1	25	573	4	111	235
Barito Kuala	1	135	0	19	285	1	135	21
Tapin	2	146	0	13	223	2	66	51
Hulu Sungai Selatan	5	239	0	21	301	1	113	49
Hulu Sungai Tengah	1	150	0	19	365	3	113	48
Hulu Sungai Utara	2	238	0	13	286	2	32	45
Tabalong	2	126	0	18	332	1	71	67
Tanah Bumbu	3	208	1	14	205	8	56	132
Balangan	1	138	0	12	196	1	55	42
Banjarmasin	13	1.060	1	27	395	18	-	52
Banjarbaru	9	282	1	10	166	7	18	15
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>53</b>	<b>3.820</b>	<b>6</b>	<b>241</b>	<b>3.900</b>	<b>55</b>	<b>900</b>	<b>995</b>

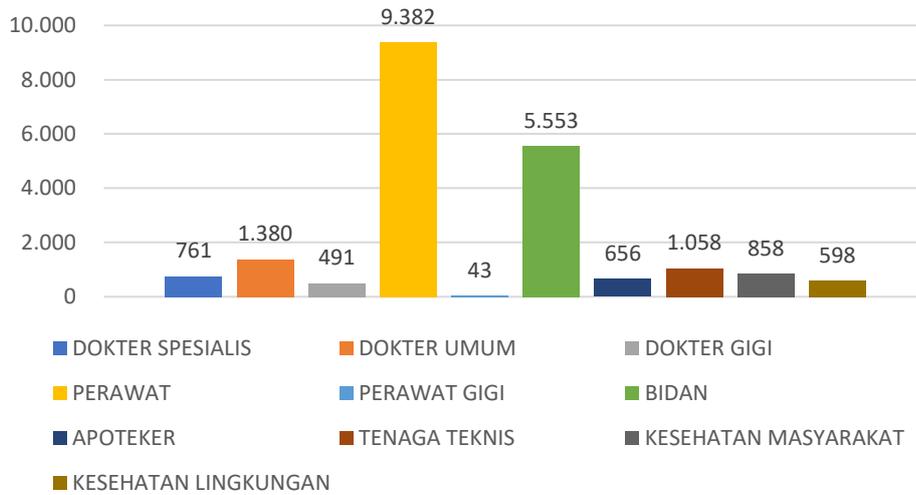
Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalsel. 2023

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu adanya tenaga kesehatan yang mendukung sarana dan prasarana kesehatan yang dapat membantu pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 446 dokter spesialis, 792 dokter umum, 233 dokter gigi, 871 tenaga medis, 6.843 tenaga keperawatan, 4.535 tenaga kebidanan, 922 tenaga kefarmasian, dan 925 tenaga kesehatan lainnya yang sebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.19 sampai Gambar 2.22.





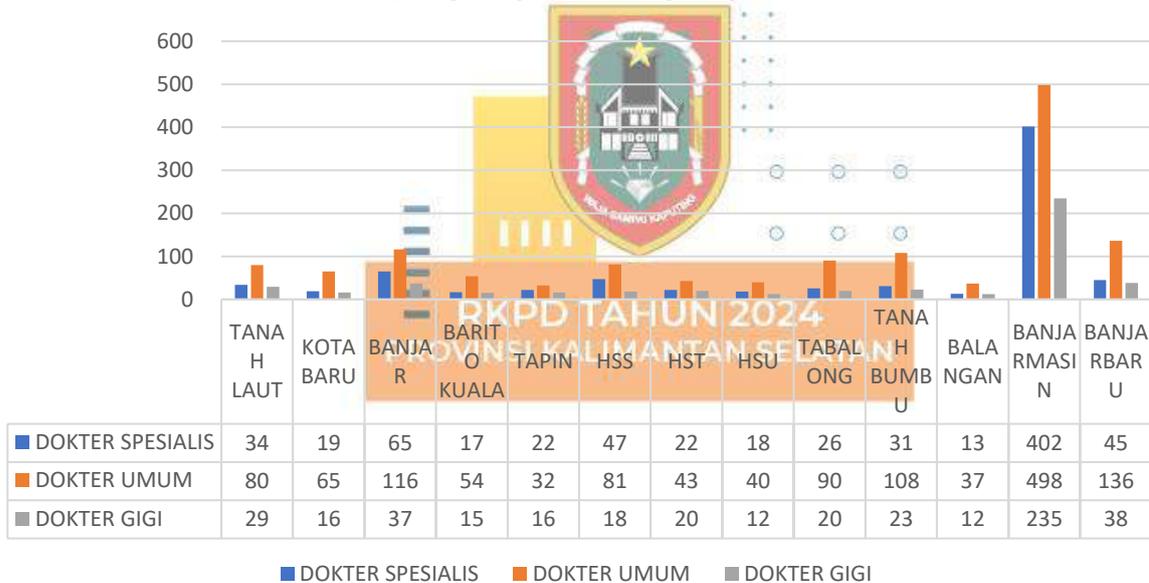
### JUMLAH TENAGA KESEHATAN (JIWA) TAHUN 2022



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 2.19** Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2022

### TENAGA DOKTER TAHUN 2022



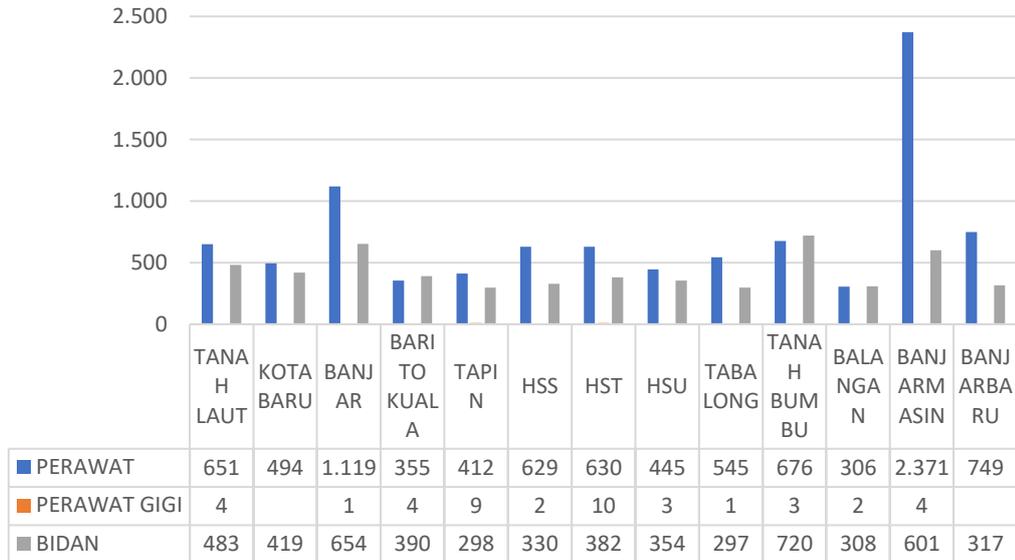
Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 2.20** Jumlah Tenaga Dokter di Kabupaten/Kota Tahun 2022





### TENAGA KEPERAWATAN DAN BIDAN TAHUN 2022



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 2.21** Jumlah Tenaga Keperawatan dan Bidan di Kabupaten/Kota Tahun 2022

### TENAGA KEFARMASIAN DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA TAHUN 2022



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 2.22** Jumlah Kefarmasian Dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2022

#### 2.3.1.6 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi pelaksanaan kegiatan pada bidang jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan





sumberdaya air, air minum, sanitasi, bangunan gedung, bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, pertanahan, dan jasa konstruksi.

#### A. Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Konektivitas merupakan hal penting yang mendukung daya tahan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Konektivitas mencakup pada beberapa elemen yang salah satunya merupakan aksesibilitas. Ketersediaan infrastruktur konektivitas yang memadai memberikan implikasi dalam peningkatan mobilitas manusia dan barang, dimana aktivitas ini berpengaruh besar terhadap kelancaran pergerakan logistik. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, pergerakan ini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mempersempit ketimpangan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

**Tabel 2.56** Data Terkait Rasio Konektivitas Provinsi

No	Kinerja Pendukung	Data
1	Jumlah Armada BRT Banjarbakula	11 Unit
2	jumlah Koridor BRT Sesuai SK Gubernur	10 Koridor
3	Jumlah Trayek Angkutan Umum Sesuai SK Gubernur	45 Trayek
4	Jumlah Lintas Penyeberangan	13 Lintasan
5	Jumlah Terminal Tipe B	5

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kalsel, 2023

Penyelenggaraan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Selatan mencakup kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer - 1 (JKP-1), jalan nasional di Kalimantan Selatan memiliki total sepanjang 1.204,18 Km dengan kondisi mantap sebesar 95,63% pada tahun 2021. Jalan nasional ini terdiri dari Jalan Arteri Primer (JAP) sepanjang 812,46 Km dan Jalan Kolektor Primer -1 (JKP-1) sepanjang 391,72 Km. (Kepmen. PUPR Tahun 2022)

Adapun panjang jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0150/KUM/2023 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan yang semula 756,12 km menjadi 927,41 km dengan kondisi mantap 64,3% pada

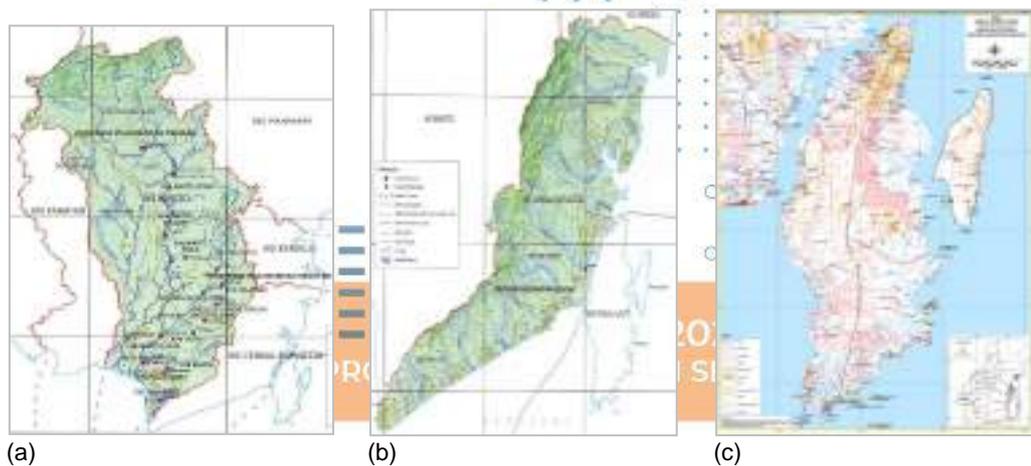


Tahun 2022. Adapun capaian ini masih berada di bawah kondisi mantap jalan nasional.

## B. Sumber Daya Air

Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2015, terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah sungai yaitu :

1. WS Barito, merupakan wilayah sungai kewenangan nasional yang dengan luas wilayah 80.370,98 Km<sup>2</sup>, terdiri dari DAS Kapuas, DAS Barito, DAS Maluka, dan DAS Tabanio.
2. WS Cengal – Batulicin, merupakan wilayah sungai kewenangan provinsi dengan luas wilayah 14.546,47 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 62 Sub DAS dengan luas DAS terbesar adalah DAS Sampanahan.
3. WS Pulau Laut, merupakan wilayah sungai kewenangan kabupaten, dengan luas wilayah 2.023,76 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 71 Sub DAS.



**Gambar 2.23** Wilayah Sungai di Kalimantan Selatan, a) WS Barito, b) WS Cengal – Batulicin, c) WS Pulau Laut

Pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Selatan dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas menjadi salah satu hal penting untuk menjaga kondisi kestabilan pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk memberikan optimalisasi dalam pemenuhan infrastruktur dasar. Salah satu upaya pengelolaan adalah melalui pembangunan infrastruktur ketahanan kebencanaan yaitu pengelolaan pengendali daya rusak air sebagai salah satu upaya meminimalkan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya bencana yang disebabkan oleh daya rusak air.





DAS Barito merupakan DAS terbesar di Kalimantan Selatan dengan luas sebesar 1.866.785 Ha atau 49,61% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. DAS ini terdiri dari 25 Sub DAS, dengan Sub DAS utama yaitu Sub DAS Barito Hilir Sub DAS Alalak Sub DAS Martapura Sub DAS Negara, Sub DAS Balangan Sub DAS Tabalong dan Sub DAS Batang Alai. Pada awal Tahun 2020, intensitas hujan yang tinggi sampai pada kategori ekstrim terjadi pada wilayah DAS Barito yang menyebabkan kenaikan genangan air dan kenaikan debit air sungai yang drastis, sehingga berdampak pada terjadinya banjir besar di 11 kabupaten/kota .

Pada DAS Cengal – Batulicin yang merupakan bagian dari WS kewenangan provinsi memiliki permasalahan dominan setiap tahunnya berupa kejadian banjir/genangan dengan ketinggian bervariasi pada wilayah hilir aliran sungai. Adapun pada tahun 2019 kondisi banjir terparah terjadi di daerah Kecamatan Kusan Hulu yang mengalami genangan seluas 10.097 Ha, seperti yang terlihat pada Tabel 2.57.

**Tabel 2.57** Luasan Banjir/Genangan di DAS kewenangan Provinsi Tahun 2022

Nama DAS	Luas DAS (Ha)	Genangan	
		Luas (Ha)	Kecamatan
DAS Swarangan	375,32	31,23	Jorong
DAS Asam-asam	512,83	1.371,08	Jorong, Batu Ampar
DAS Kintap	670,16	8.189,81	Jorong, Kintap
DAS Cuka	17,59	693,60	Satui
DAS Sebampan	337,96	3.760,37	Sungai Loban, Kuranji, Satui, Angsana
DAS Kusan	1.735,52	21.951,25	Sungai Loban, Kuranji, Kusan Hilir, Kusan Hulu, Batulicin
RTLHDAS Batulicin	1.381,42	0,00	Mentewe, Batulicin, Simpang Empat, Karang Bintang
DAS Cantung	1.465,45	0,00	Kelumpang Hulu
DAS Sampanahan	1.791,97	0,00	Sungai Durian
DAS Cengal	1.177,74	0,00	Pamukan Utara, Pamukan Selatan
<b>TOTAL</b>	<b>9.465,96</b>	<b>35.997,34</b>	

Sumber: Kementerian PUPR, 2023

Adapun bentuk pengelolaan sumber daya air lainnya adalah terkait dengan pengelolaan irigasi dan daerah irigasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria





dan Penetapan Status Daerah Irigasi, yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Sedangkan, daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jaringan irigasi dalam hal ini meliputi saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Adapun luas Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa (DI/DIR) di Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah 995 DI/DIR dan luas total  $\pm$  359.595 Ha, dengan persentase 18,53% merupakan kewenangan pusat, 15,85% kewenangan provinsi, dan 55,62% merupakan kewenangan kabupaten/kota.

**Tabel 2.58** Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI di Kalimantan Selatan Tahun (Update)

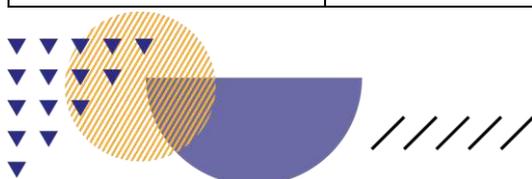
Kewenangan	Luas Area (Ha)	Persentase	Jumlah DI/DR
Pusat	102.598	28,53%	23
Provinsi	57.003	15,85%	40
Kabupaten/Kota	199.989	55,62%	932
<b>Total</b>	<b>359.595</b>	<b>100,00%</b>	<b>995</b>

Sumber: Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015

Pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III melaksanakan kegiatan *One Map* irigasi untuk mengidentifikasi kembali luas pengelolaan DI/DIR di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun luas DI/DIR berdasarkan hasil *One Map* irigasi sebesar  $\pm$  357.568 Ha. Adapun luas pembagian kewenangan DI/DIR disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.59** Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI/DIR di Kalimantan Selatan berdasarkan *One Map* Irigasi pada Tahun 2019

Kewenangan	Luas Area (Ha)	Persentase	Jumlah DI/DR
Pusat	106.039	29,65%	22
Provinsi	56.295	15,74%	24





Kewenangan	Luas Area (Ha)	Persentase	Jumlah DI/DR
Kabupaten/Kota	195.234	54,60%	633
Total	357.568	100,00%	679

Untuk melihat kinerja sistem irigasi masing-masing DI/DIR pada setiap kewenangan maka dilakukan penilaian kinerja jaringan irigasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan irigasi yang diterjemahkan kedalam Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). Berdasarkan IKSI dapat disimpulkan bahwa kondisi irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan rata-rata masih berada di bawah 50% yang menunjukkan bahwa kinerja sistem irigasi masih di bawah potensi yang dimilikinya karena adanya ssws. Kerusakan irigasi ini antara lain disebabkan oleh usia infrastruktur irigasi, gangguan alam, maupun pengelolaan irigasi yang kurang optimal. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus karena akan berdampak pada produksi pangan di Kalimantan Selatan.

**Tabel 2.60** Indeks Kinerja Sistem Irigasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022

Kewenangan	Utama	Tersier	Gabungan
Pusat	56,92	61,25	57,78
Provinsi	52,78	48,94	52,08

Sumber: ePAKSI, 2022

Sebagai upaya penyediaan sumber air baku di kabupaten/kota untuk menjaga keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan air bersih, diperlukan alternatif-alternatif penyediaan air baku, antara lain melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air antara lain bendungan/bendung, embung, dan tampungan-tampungan air lainnya.

### C. Air Minum, Sanitasi dan Persampahan

Penyediaan air minum, sanitasi, dan persampahan di Kalimantan Selatan mencakup pengelolaan pada skala provinsi dan skala kabupaten/kota. Adapun kondisi dan capaian pada masing-masing sektor ini adalah sebagai berikut:

- Pencapaian Akses Air Minum

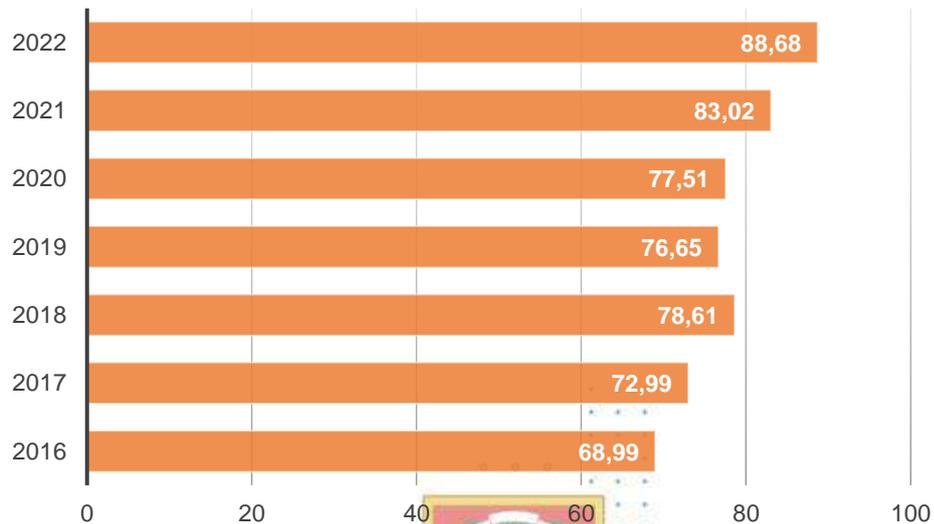
Dalam rangka pencapaian *universal access* air minum, pemerintah pusat melalui RPJMN Tahun 2020 – 2024 telah menargetkan pencapaian air





minum 100% pada Tahun 2024 untuk seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 2 target terkait dengan capaian air minum yaitu capaian air minum akses layak dan capaian air minum akses aman.

### GRAFIK CAPAIAN AKSES LAYAK AIR MINUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



**Gambar 2.24** Capaian Air Minum Kalimantan Selatan 2016 – 2022

Sumber Data: DPUR, 2023

Berdasarkan Gambar 2.24, capaian akses air minum Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 sebesar 83,02% dan tahun 2022 sebesar 88,68% , hal ini menunjukkan bahwa trend pencapaian air minum akses layak di Kalimantan Selatan mengalami perbaikan setiap tahunnya.

**Tabel 2.61** Tabel Capaian Air Minum Akses Layak Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

Kab/Kota	Capaian Akses Layak Air Minum 2020 – 2024 (%)		
	2020	2021	2022
Balangan	94,76	96,07	97,38
Banjar	74,33	80,75	87,17
Banjarbaru	92,9	94,68	96,45
Banjarmasin	99,9	99,93	99,95
Barito Kuala	62,35	71,76	81,18
Hulu Sungai Selatan	76,94	82,71	88,47



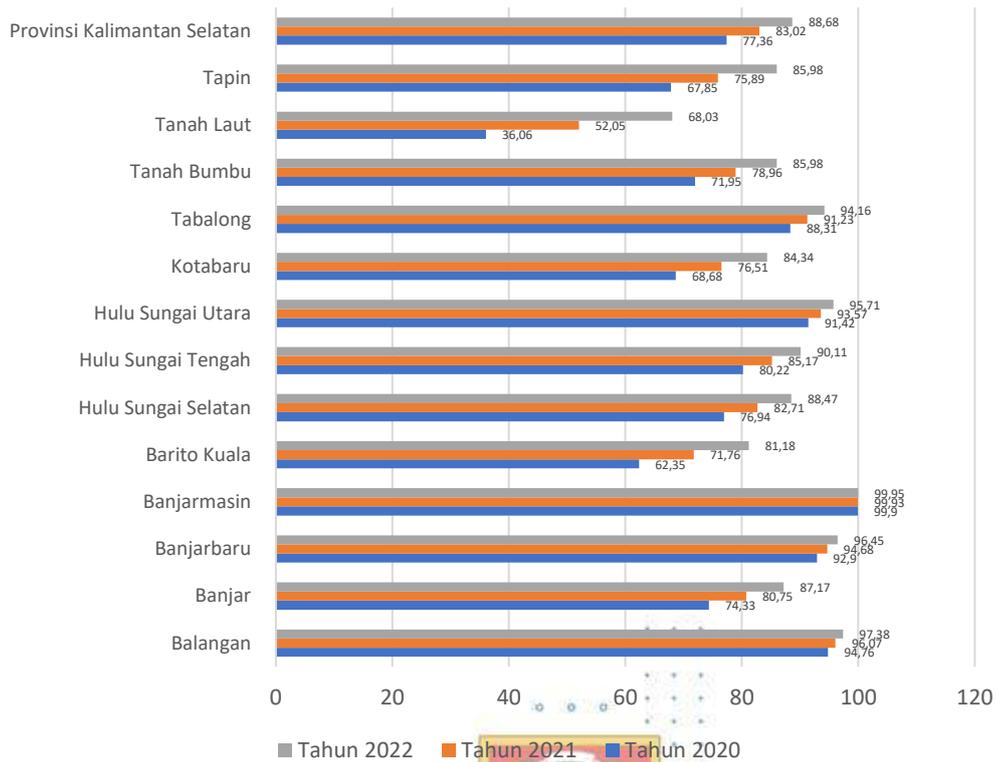


Kab/Kota	Capaian Akses Layak Air Minum 2020 – 2024 (%)		
	2020	2021	2022
Hulu Sungai Tengah	80,22	85,17	90,11
Hulu Sungai Utara	91,42	93,57	95,71
Kotabaru	68,68	76,51	84,34
Tabalong	88,31	91,23	94,16
Tanah Bumbu	71,95	78,96	85,98
Tanah Laut	36,06	52,05	68,03
Tapin	67,85	75,89	85,98
Provinsi Kalimantan Selatan	77,36	83,02	88,68

Sumber: DPUPR Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Capaian air minum akses layak kabupaten/kota pada tahun 2022 seperti disajikan pada Tabel 2.61 dan Gambar 2.25. Sebagian besar Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki capaian air minum dengan status akses layak di atas rata-rata Provinsi, bahkan untuk Kota Banjarmasin sejak tahun 2020 s.d 2022 memiliki capaian lebih dari 99%. Beberapa Kabupaten Kota yang masih harus mendapat perhatian lebih terkait pemenuhan target pemerintah daerah yang disesuaikan dengan target pemerintah pusat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengamanatkan terwujudnya 90% akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta penurunan angka BABS hingga 0% pada akhir tahun 2024, antarlain Kab Tanah Laut, Kab Barito Kuala dan Kabupaten Kotabaru dengan capaian ketiga Kabupaten ini yang masih berada di bawah angka rata-rata Provinsi.



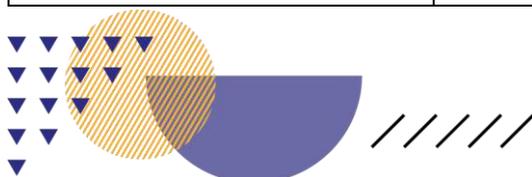


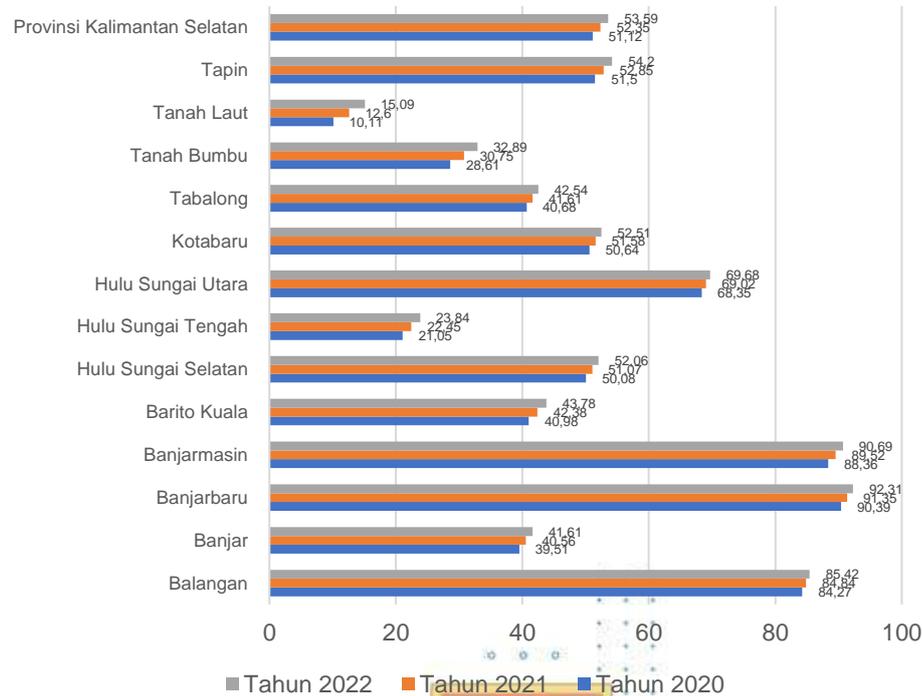
**Gambar 2.25** Capaian Air Minum Akses Layak Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2020-2022

Sumber Data : DPUPR Prov Kalsel, 2023

**Tabel 2.62** Tabel Capaian Air Minum Akses Aman Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

Kab/Kota	Capaian Akses Aman Air Minum 2020 – 2024 (%)		
	2020	2021	2022
Balangan	84,27	84,84	85,42
Banjar	39,51	40,56	41,61
Banjarbaru	90,39	91,35	92,31
Banjarmasin	88,36	89,52	90,69
Barito Kuala	40,98	42,38	43,78
Hulu Sungai Selatan	50,08	51,07	52,06
Hulu Sungai Tengah	21,05	22,45	23,84
Hulu Sungai Utara	68,35	69,02	69,68
Kotabaru	50,64	51,58	52,51
Tabalong	40,68	41,61	42,54
Tanah Bumbu	28,61	30,75	32,89
Tanah Laut	10,11	12,6	15,09
Tapin	51,5	52,85	54,2
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>51,12</b>	<b>52,35</b>	<b>53,59</b>





Sumber Data : DPUPR, Proy Kalsel, 2023

**Gambar 2.26** Capaian Air Minum Akses Aman Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2020-2022

Adapun capaian air minum akses aman kabupaten/kota pada tahun 2022 seperti disajikan pada Tabel 2.62 dan Gambar 2.26. Dari 13 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, baru ada 4 Kabupaten yang memiliki capaian air minum akses aman diatas angka rata-rata capaian Provinsi yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan untuk Kab/Kota yang lain masih perlu melakukan upaya lebih sehingga dapat melampaui angka rata-rata tersebut.

Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengelola SPAM skala Regional pada kawasan metropolitan Banjarkakula. Dalam pelaksanaannya SPAM Banjarkakula telah membangun infrastruktur untuk kebutuhan air curah skala regional. Adapun infrastruktur yang terbangun sampai dengan saat ini dapat dilihat pada table berikut.





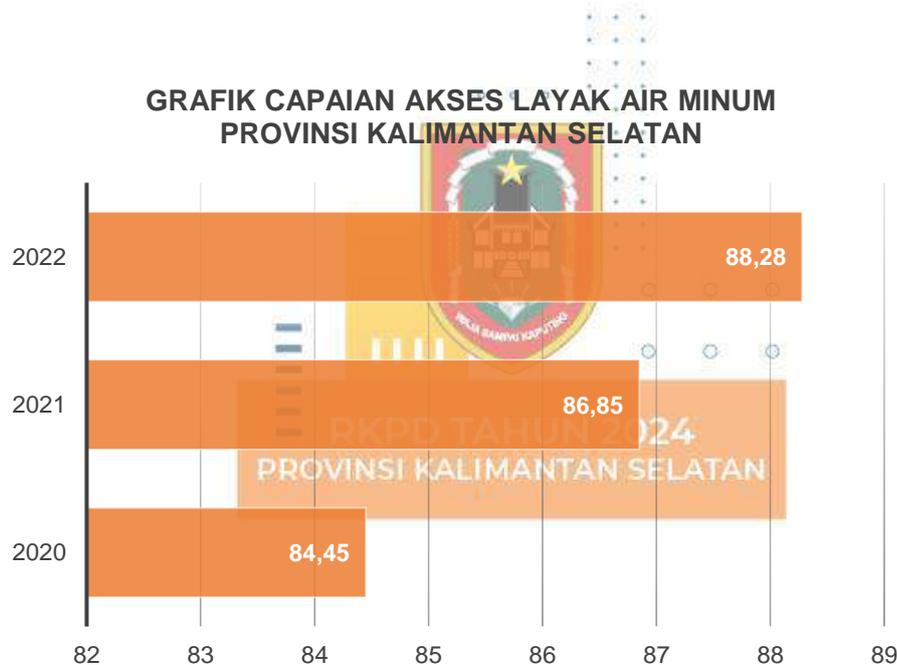
**Tabel 2.63** Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

No	INFRASTRUKTUR	KAPASITAS
1	Intake Bendung Karang Intan (4 unit Pompa Transmisi Submersible)	400 L/detik
2	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pembangunan Tahap I	250 L/detik
3	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pembangunan Tahap II	500 L/detik

Sumber: Balai SPAM Banjarbakula, 2023

▪ Pencapaian Akses Sanitasi

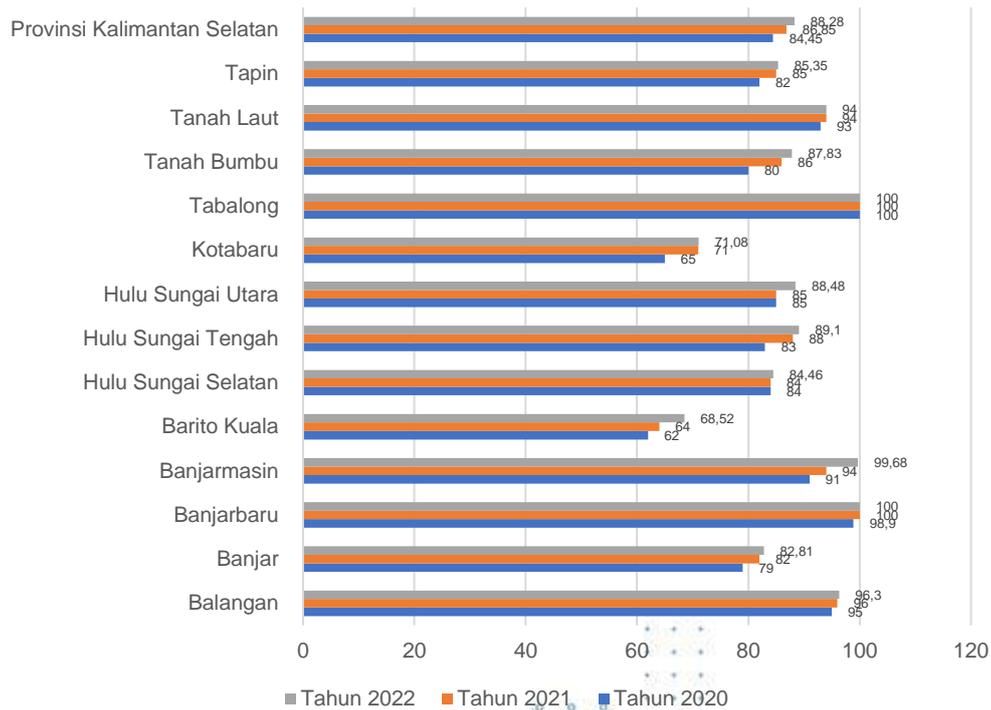
Ruang lingkup sanitasi pada sektor pekerjaan umum meliputi pengelolaan limbah rumah tangga, sistem jaringan pengelolaan IPAL komunal, dan seterusnya. Pada sisi lingkungan, sanitasi juga terkait dengan persampahan mulai dari rumah tangga hingga TPST, dan lain-lain.



Sumber Data : DPUPR Provinsi Kalsel, 2023

**Gambar 2.27** Capaian Air Limbah Domestik Akses Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022s





Sumber Data : DPUPR Provinsi Kalsel, 2023

**Gambar 2.28** Capaian Air Limbah Domestik Akses Layak Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2022



Sumber Data : DPUPR Provinsi Kalsel, 2023

**Gambar 2.29** Capaian Air Limbah Domestik Akses Aman Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2022





Berdasarkan Gambar, capaian akses air limbah Akses layak domestik Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sebesar 88,28% naik sebesar 1,63% dari capaian tahun 2021 sebesar 86,85%. Dari grafik dapat dilihat bahwa trend pencapaian akses air minum di Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Khusus pada pencapaian cakupan air limbah domestik yang aman Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan dengan mendekati pencapaian target dari Nasional pada tahun 2024 sebesar 13%. Adapun kondisi pencapaian Kabupaten/Kota sebagai berikut :

**Tabel 2.64** Kondisi Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Akses Layak Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2022

Kab/Kota	Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Akses Layak		
	2020	2021	2022
Balangan	95	96	96,3
Banjar	79	82	82,81
Banjarbaru	98,9	100	100
Banjarmasin	91	94	99,68
Barito Kuala	62	64	68,52
Hulu Sungai Selatan	84	84	84,46
Hulu Sungai Tengah	83	88	89,1
Hulu Sungai Utara	85	85	88,48
Kotabaru	65	71	71,08
Tabalong	100	100	100
Tanah Bumbu	80	86	87,83
Tanah Laut	93	94	94
Tapin	82	85	85,35
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>84,45</b>	<b>86,85</b>	<b>88,28</b>

Sumber: DPUPR Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

**Tabel 2.65** Kondisi Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Akses Aman Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2022

Kab/Kota	Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Akses Aman		
	2020	2021	2022
Balangan	1,23	2,17	3,12
Banjar	1	3,24	5,48
Banjarbaru	1	3,35	5,5
Banjarmasin	22,23	26,42	30,61
Barito Kuala	2,4	3,93	5,45
Hulu Sungai Selatan	1	2,06	3,11
Hulu Sungai Tengah	4	5,5	7





Kab/Kota	Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Akses Aman		
	2020	2021	2022
Hulu Sungai Utara	0	2,5	5
Kotabaru	0	0,5	1
Tabalong	0	2,5	5
Tanah Bumbu	5	6,25	7,5
Tanah Laut	1,23	1,42	1,62
Tapin	0	0,5	2
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>3,01</b>	<b>4,63</b>	<b>6,26</b>

▪ Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat. Sistem pengelolaan sampah yang dominan masih tradisional, antara lain adanya praktek pembuangan sampah secara sembarangan. Sehingga untuk melakukan pengelolaannya perlu didukung dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, seperti penyediaan TPA, TPS, TPST, atau TPS3R.

**Tabel 2.66** Realisasi Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2022\*

NO	KABUPATEN/ KOTA	CAPAIAN				SAMPAH TERKELO LA (%)	SAMPAH TIDAK TERKELO LA (%)	
		TIMBULAN SAMPAH (ton/tahun)	PENGURANGAN SAMPAH (ton/tahun)	%	PENANGANAN SAMPAH (ton/tahun)			%
1	Banjarmasin	186.872	48.571	25,99	136.417	73	98,99	0,01
2	Banjarbaru	67.080	16.105	24,01	50.897	75,88	99,89	0
3	Banjar	149.097	36.462	24,46	105.914	71,04	95,5	3,5
4	Tanah Laut	51.807	7.323	14,14	26.941	52	66,14	32,86
5	Barito Kuala	35.180	7.886	22,42	17.557	49,91	72,33	26,67
6	Tapin	29.967	5.120	17,09	16.383	54,67	71,76	27,24
7	Hulu Sungai Selatan	35.330	7.550	21,37	18.734	53,02	74,39	24,61
8	Hulu Sungai Tengah	38.070	8.118	21,32	20.825	54,7	76,02	22,98
9	Hulu Sungai Utara	33.768	9.332	27,64	23.306	69,02	96,66	2,34
10	Balangan	20.576	4.534	22,04	14.783	71,84	93,88	5,12
11	Tabalong	37.508	8.382	22,35	26.798	71,45	93,8	5,2
12	Tanah Bumbu	60.743	10.230	16,84	46.499	76,55	93,39	5,61
13	Kotabaru	66.144	5.649	8,54	12.968	19,61	28,15	70,85
	<b>PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>812.142</b>	<b>175.262</b>	<b>20,63</b>	<b>518.020</b>	<b>60,98</b>	<b>81,61</b>	<b>17,39</b>

Sumber : DLH Prov Kalsel, 2023





**Tabel 2.67** Capaian Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kinerja Utama	Indikator	Target & Capaian 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pengurangan dan penanganan sampah	Presentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	26%	20.19%	77.65%
		Presentase Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis Rumah Tangga	73%	59.5%	81.51%
Rata-Rata Capaian			99%	79.69%	79,58%

Sumber : DLH Prov Kalsel, 2023

Salah satu infrastruktur yang telah dibangun untuk mendukung akses persampahan adalah melalui pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula yang merupakan pelayanan persampahan dengan sistem Sanitary Landfill yang melayani 2 Kota dan 3 Kabupaten yang tercakup di dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Metropolitan Banjarbakula. TPA Regional Banjarbakula memiliki total luas area 32 Ha dan telah dikembangkan seluas 11 Ha. Kapasitas yang mampu ditampung oleh TPA ini sebesar 275 ton/hari. Untuk lebih mengoptimalisasikan pengelolaan persampahan terutama pada kawasan perkotaan Banjarbakula, direncanakan pembangunan incinerator serta pengoperasian Fasilitas Limbah B3 (Oli Bekas).

#### D. Penataan Bangunan dan Lingkungan

Penataan bangunan dan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik di perkotaan maupun di perkampungan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya. Data yang tersedia sampai dengan tahun 2022 Jumlah bangunan gedung baik pemerintahan maupun yang non pemerintahan yang telah terbangun sampai saat ini berjumlah 36 bangunan. Dan untuk memepertahankan bangunan gedung termasuk sarana prasaranya dalam kondisi baik Dinas PUPR telah melaksanakan pemeriharaan , rehabilitasi serta peningkatan sebanyak 67 bangunan dan masih dalam tahap perencanaan ada sebanyak 78 proyek.





**Tabel 2.68** Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2018 sampai 2021

	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pembangunan Baru	11	11	7	3	4
Rehabilitasi	9	18	6	34	6
Perencanaan	6	8	11	53	15

Sumber : DPUPR Prov Kalsel, 2023

## E. Penataan Ruang

Sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kondisi ruang tersebut dapat dipenuhi melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar di dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayahnya dengan tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk di dalamnya mengenai penataan ruang. Wewenang pemerintah daerah dalam hal penataan ruang adalah menyelenggarakan penataan ruang daerahnya yang didalamnya terdapat unsur perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 telah dilegalisasi dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 tanggal 25 September 2015. Pada Tahun 2021, RTRWP Kalimantan Selatan memasuki masa revisi dan pada Tahun 2022 berada pada tahapan penetapan perda hasil revisi pada tahap proses pembahasan di Dewan dan akan disusul dengan Proses evaluasi provinsi sebelum dapat ditetapkan sebagai Perda. Proses yang Panjang harus ditempuh menyesuaikan dengan ketentuan tahapan sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya.

Pemerintah provinsi juga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota di wilayahnya, Sampai dengan tahun 2021 dari 13 Kabupaten/Kota yang telah menjadi Peraturan Daerah sebanyak 13 Kabupaten/kota dan pada tahun 2021 terdapat 2 Kabupaten/Kota yang telah melakukan Revisi RTRW Kabupaten Kota dan telah ditetapkan ke dalam Perda yaitu Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, untuk Kota





Banjarbaru sedang pada tahap yang sama dengan status RTRW Provinsi yaitu berada pada tahap proses pembahasan di Dewan dan akan disusul dengan Proses evaluasi provinsi sebelum dapat ditetapkan sebagai Perda, sedangkan 10 kabupaten lainnya saat ini sedang pada tahap revisi.

**Tabel 2.69** Status RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2022

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA	PERDA YANG MASIH BERLAKU	STATUS PERDA
1.	Provinsi Kalimantan Selatan	Perda Nomor 9 Tahun 2015	Proses Penetapan Perda Hasil Revisi
2.	Kota Banjarmasin	Perda Nomor 06 Tahun 2021	Perda
3.	Kota Banjarbaru	Perda Nomor 13 Tahun 2014	Proses Penetapan Perda Hasil Revisi
4.	Kabupaten Banjar	Perda Nomor 4 Tahun 2021	Perda
5.	Kabupaten Barito Kuala	Perda Nomor 6 Tahun 2012	Proses Revisi
6.	Kabupaten Tanah Laut	Perda Nomor 3 Tahun 2016	Proses Revisi
7.	Kabupaten Tanah Bumbu	Perda Nomor 5 Tahun 2017	Proses Revisi
8.	Kabupaten Kotabaru	Perda Nomor 11 Tahun 2011	Proses Revisi
9.	Kabupaten Tabalong	Perda Nomor 19 Tahun 2014	Proses Revisi
10.	Kabupaten Balangan	Perda Nomor 24 Tahun 2013	Proses Revisi
11.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Perda Nomor 12 Tahun 2012	Proses Revisi
12.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Perda Nomor 13 Tahun 2016	Proses Revisi
13.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Perda Nomor 3 Tahun 2014	Proses Revisi
14.	Kabupaten Tapin	Perda Nomor 10 Tahun 2014	Proses Revisi

## F. Bina Konstruksi

Jumlah rata-rata paket pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di pemerintahan Kalimantan Selatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 8829 paket kegiatan, jumlah ini mencakup pekerjaan konstruksi





yang dilaksanakan Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dibagi kedalam 4 urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sedangkan untuk pekerjaan konstruksi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 khusus untuk Provinsi adalah sebanyak 479 pekerjaan konstruksi, data diatas di jabarkan dalam dalam tabel berikut:

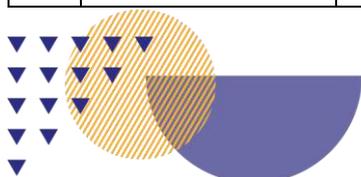
**Tabel 2.70** Jumlah Pekerjaan Konstruksi s.d Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan

Urusan	2019	2020	2021	2022
Cipta Karya	136	222	720	140
Tata Bangunan	515	813	2140	69
Bina Marga	307	471	1859	155
Sumber Daya Air	241	216	709	115

Sumber : DPUPR Prov Kalsel, 2023

**Tabel 2.71** Jumlah Pekerjaan Konstruksi Tahun 2019 – 2022 Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan

NO.	KABUPATEN/KOTA	BIDANG	JUMLAH PEKERJAAN				JUMLAH
			2019	2020	2021	2022	
1	BALANGAN	CK	0	0	66		66
		TB	0	0	157		157
		BM	0	0	90		90
		SDA	0	0	85		85
2	HSS	CK	0	0	83		83
		TB	0	0	153		153
		BM	0	0	75		75
		SDA	0	0	79		79
3	HST	CK	0	0	11		11
		TB	0	0	68		68
		BM	0	0	39		39
		SDA	0	0	24		24
4	HSU	CK	0	0	37		37
		TB	0	0	223		223
		BM	0	0	107		107
		SDA	0	0	22		22
5	KOTABARU	CK	0	0	38		38
		TB	0	0	96		96
		BM	0	0	104		104
		SDA	0	0	13		13
6	TABALONG	CK	0	0	67		67
		TB	0	0	116		116
		BM	0	0	143		143
		SDA	0	0	17		17
		JASKON	0	0	1		1
7	TANAH BUMBU	CK	0	0	61		61
		TB	0	0	395		395
		BM	0	0	399		399
		SDA	0	0	103		103





NO.	KABUPATEN/KOTA	BIDANG	JUMLAH PEKERJAAN				JUMLAH
			2019	2020	2021	2022	
8	TANAH LAUT	CK	0	0	84		84
		TB	0	0	288		288
		BM	0	0	266		266
		SDA	0	0	41		41
9	TAPIN	CK	0	0	80		80
		TB	0	0	151		151
		BM	0	0	199		199
		SDA	0	0	107		107
10	BANJARMASIN	CK	43	90	90		223
		TB	187	152	113		452
		BM	59	98	100		257
		SDA	30	14	71		115
11	BANJARBARU	CK	28	12	18		58
		TB	196	84	54		334
		BM	71	73	77		221
		SDA	98	77	62		237
12	BANJAR	CK	18	30	30		78
		TB	30	30	41		101
		BM	30	30	72		132
		SDA	30	30	23		83
13	BARITO KUALA	CK	17	34	4		55
		TB	72	100	33		205
		BM	117	187	117		421
		SDA	52	83	42		177
14	KALIMANTAN SELATAN	CK	30	56	51	140	277
		TB	30	447	252	69	798
		BM	30	83	71	155	339
		SDA	31	12	20	115	178
<b>Jumlah Pekerjaan Konstruksi</b>			<b>1199</b>	<b>1722</b>	<b>5429</b>	<b>479</b>	<b>8829</b>

Terkait dengan jumlah tenaga kerja pada bidang Bina Konstruksi bila diasumsikan 1 pekerjaan konstruksi memerlukan 3 orang tenaga dengan lama pekerjaan 6 bulan maka diasumsikan kebutuhan tenaga ahli sebanyak 1437 orang hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli untuk pekerjaan konstruksi di Provinsi. Berdasarkan data Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan (tahun 2022) jumlah tenaga ahli baik madya maupun muda yang terbagi dalam berbagai bidang keahlian di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebanyak 892 Orang, sedangkan tenaga terampil sebanyak 714 orang, jika dibandingkan dengan jumlah pekerjaan konstruksi pertahun di Provinsi Kalimantan Selatan yang rata-rata lebih dari 1000 paket, maka dapat diasumsikan bahwa jumlah ketersediaan tenaga ahli di bidang konstruksi masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan.





**Tabel 2.72** Tabel Data Jumlah ketersediaan tenaga ahli Pekerjaan Konstruksi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

NO	KETERSEDIAAN TENAGA AHLI			
	BIDANG / SUB-BIDANG	JUMLAH	KETERANGAN	Kualifikasi
<b>1</b>	<b>ARSITEKTUR</b>			
1,1	Arsitek (101)	23	INTAKINDO	muda (15) madya (8)
		3	aspeknas	
		33	IAI	muda (33)
		5	perkonindo	muda (4) madya (2)
1,2	Ahli Desain Interior(102)	5	INTAKINDO	muda (4) madya (1)
		1	aspeknas	
1,3	Ahli Arsitekur Lansekap(103)	13	INTAKINDO	muda (10) madya (3)
1,4	Ahli Iluminasi(104)	1	INTAKINDO	muda (1)
<b>2</b>	<b>SIPIL</b>			
2,1	Ahli Teknik Bangunan Gedung(201)	1	asdamkindo	
		102	INTAKINDO	muda (75) madya (27)
		17	aspeknas	
		8	perkonindo	muda (6) madya (2)
		19	haki	muda (9) madya (7) utama (3)
2,2	Ahli Teknik Jalan(202)	3	asdamkindo	
		124	INTAKINDO	muda (122) madya (28) utama (1)
		20	aspeknas	
		4	perkonindo	muda (2) madya (1) Utama (1)
		3	haki	muda (2) madya (1)
2,3	Ahli Teknik Jembatan(203)	3	asdamkindo	
		53	INTAKINDO	muda (35) madya (17) utama (1)
		6	aspeknas	
		1	perkonindo	muda (1)
		1	haki	muda (1)
2,4	Ahli Keselamatan Jalan(204)			
2,5	Ahli Teknik Terowongan(205)			
2,6	Ahli Teknik Landasan Terbang(206)			
2,7	Ahli Teknik Jalan Rel (207)			
2,8	Ahli Teknik Dermaga (208)	3	aspeknas	
2,9	Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantasi (209)			
2,1	Ahli Teknik Bendungan Besar(210)			
2,11	Ahli Teknik Sungai dan Drainase(211)	3	INTAKINDO	muda (2) madya (1)
		6	aspeknas	
2,12	Ahli Teknik Irigasi (212)	17	INTAKINDO	muda (17)
2,13	Ahli Teknik Rawa dan Pantai(213)	2	INTAKINDO	muda (2)
2,14	Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan (214)			
2,15	Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan (215)	1	INTAKINDO	madya (1)
2,16	Ahli Geoteknik (216)	3	INTAKINDO	muda (2) madya (1)
2,17	Ahli Geodesi (217)	8	INTAKINDO	muda (6) madya (2)
<b>3</b>	<b>MEKANIKAL</b>			
3,1	Ahli Teknik Mekanikal (301)	2	INTAKINDO	madya (2)





NO	KETERSEDIAAN TENAGA AHLI			
	BIDANG / SUB-BIDANG	JUMLAH	KETERANGAN	Kualifikasi
3,2	Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refigerasi(302)			
3,3	Ahli Teknik Plumbing dan Pompa Mekanik (303)			
3,4	Ahli Teknik Proteksi Kebakaran(304)			
3,5	Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung(305)	1	INTAKINDO	
<b>4</b>	<b>ELEKTRIKAL</b>			
4,1	Ahli Teknik Tenaga Listrik(401)	31	INTAKINDO	muda (4) madya (11)
		6	aspeknas	
4,2	Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi dalam Gedung(405)	1	INTAKINDO	madya (1)
4,3	Ahli Teknik Sistem Sinyal Telekomunikasi Kereta Api(406)			
<b>5</b>	<b>TATA LINGKUNGAN</b>			
5,1	Ahli Teknik Lingkungan(501)	24	INTAKINDO	muda (12) madya (10) utama (1)
5,2	Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah (503)	1	INTAKINDO	muda (1)
5,3	Ahli Teknik Air Minum (504)	9	INTAKINDO	muda (8) madya (1)
		2	aspeknas	
5,4	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (502)	30	INTAKINDO	muda (23) madya (6) utama (1)
		2	perkonindo	muda (1) madya (1)
		44	IAP	muda (8) madya (13) utama (3)
<b>6</b>	<b>MANAJEMEN PELAKSANAAN</b>			
6,1	Ahli Manajemen Konstruksi (601)	40	INTAKINDO	muda (32) madya (8)
6,2	Ahli Manajemen Proyek (602)	10	INTAKINDO	muda (5) madya (4) utama (1)
		1	perkonindo	madya (1)
6,3	Ahli K3 Konstruksi (603)	129	PAKKI 2024	muda
		47	INTAKINDO	muda (39) madya (8)
		1	aspeknas	
6,4	Ahli Sistem Manajemen Mutu (604)	2	INTAKINDO	muda (1) madya (1)
		17	ASTTI	muda (5) madya (12)
<b>TOTAL TENAGA KERJA</b>		<b>892</b>		

Sumber : DPUPR Prov Kalsel, 2023

### 2.3.1.7 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.





**Tabel 2.73** Luas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 berdasarkan Kewenangan Penanganan

NO	KABUPATEN / KOTA	LUAS KAWASAN PERMUKIMAN (Ha)*	SK KUMUH KAB / KOTA	PEMBAGIAN KEWENANGAN			TOTAL LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KALSEL
				LUAS KUMUH KEWENANGAN PROVINSI	LUAS KAWASAN KUMUH KEWENANGAN KAB/KOTA	LUAS KAWASAN KUMUH KEWENANGAN PUSAT	
1	Tanah Laut	37.062,48	BERITA ACARA NO.600/1084 - PKP/DISPERKIM VERIFIKASI LOKASI	33,93	120,35	1269,18	1423,46
2	Kotabaru	15.499,66	SK NO. 188.45 / 550 / KUM / 2020	35,54	118,35	33,02	186,91
3	Banjarnegara	41.852	SK NO. 188.45 / 221 / KUM / 2020	92,67	119,54	88,51	300,72
4	Barito Kuala	18.604	SK NO. 188.45 / 393 / KUM / 2017	60,77	251,13	22,28	334,18
5	Tapin	46.259	SK NO. 188.45 / 056 / KUM / 2016	23,11	117,47	0	140,58
6	Hulu Sungai Selatan	4.533	SK NO. 188.45 / 358 / KUM / 2019	64,50	171,95	122,36	358,81
7	Hulu Sungai Tengah	1.998,05	SK NO. 640 / 284 / 648 / TAHUN 2020	80,28	67,34	120,01	267,63
8	Hulu Sungai Utara	2.677,00	SK NO. 188.45 / 92 / KUM / 2020	66,11	93,92	91,51	251,54
9	Tabalong	18.373,02	SK NO. 188.45 / 071 / KUM / 2021	148,69	109,54	34,25	292,48
10	Tanah Bumbu	37.259,52	SK NO. 188.46 / 22 / DPPP / 2022	94,16	289,89		384,05
11	Balangan	5.947	SK NO. 188.45 / 539 / KUM / 2020	14,85	12,36	-	27,21
12	Banjarmasin	5.058	SK NO. 215 / TAHUN 2022	41,46	508,48		549,94
13	Banjarnegara	3.642,35	SK NO. 215 / Tahun 2022	35,44	16,86	70,76	123,06
<b>TOTAL</b>		<b>238.765,08</b>		<b>791,51</b>	<b>1.997,18</b>	<b>1.851,88</b>	<b>4.640,57</b>

Sumber Data : SK Kumuh Kab./Kota dan Dinas PRKP Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2023

Dalam pelaksanaannya dilakukan review terhadap kondisi kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi seluas 10-15 Ha. Terjadi pengurangan luasan kumuh sampai dengan tahun 2022 sebagai baseline dalam pelaksanaan tahun – tahun berikutnya. Adapun data luasan kawasan permukiman dan permukiman kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :





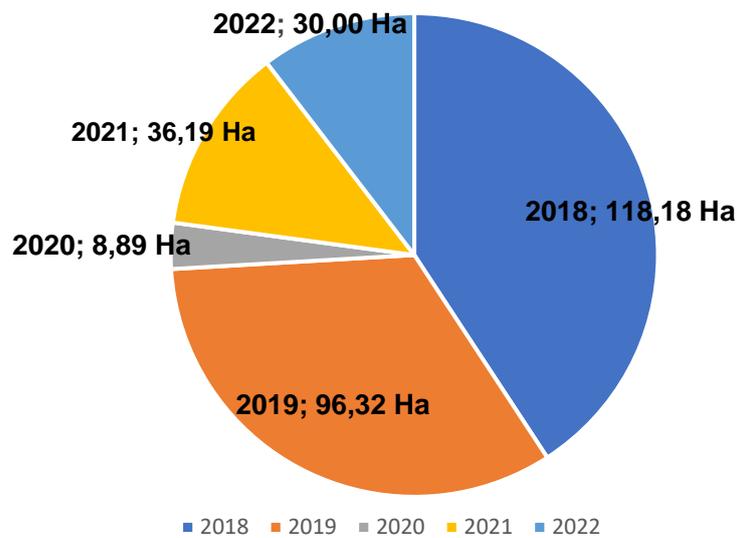
**Tabel 2.74** Data Penanganan Permukiman Kumuh Dan Rencana Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

NO.	KAB./ KOTA	LUASA KAWASAN PERMUKIMAN PROV. KALSEL	LUASAN KUMUH KEWENANGAN PROVINSI (UPDATE)	CAPAIAN KUMULATIF DARI TAHUN 2018-2022	LUASAN KUMUH TARGET TAHUN 2022 S/D 2026	SISA TARGET KUMUH
1	Tanah Laut	27.870,13	33,93	30,84	33,84	0,09
2	Kotabaru	15.499,66	35,54	14,64	22,64	12,90
3	Banjar	5.369,45	92,67	34,52	35,25	57,42
4	Barito Kuala	6.529,42	60,77	34,48	34,48	26,29
5	Tapin	3.588,21	23,11	9,86	17,16	5,95
6	Hulu Sungai Selatan	4.316,51	64,50	28,14	35,14	29,36
7	Hulu Sungai Tengah	1.998,05	80,28	13,13	16,13	64,15
8	Hulu Sungai Utara	2.677,00	66,11	23,5	25,50	40,61
9	Tabalong	18.373,02	148,69	31,15	63,15	85,54
10	Tanah Bumbu	6.964,59	94,16	22,71	38,71	55,45
11	Balangan	5.310,77	14,85	19,11	10,60	4,25
12	Banjarmasin	4.006,27	41,46	20,1	40,50	0,96
13	Banjarbaru	3.642,35	35,44	7,4	7,40	28,04
	<b>TOTAL (HA)</b>	<b>106.145,43</b>	<b>791,51</b>	<b>289,58</b>	<b>380,50</b>	<b>411,01</b>

Sumber : Sumber Data : Renstra Dinas PRKP Prov. Kalimantan Selatan 2023

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha yang menjadi kewenangan Provinsi sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 289,58 Ha, yang masih perlu ditangani sebesar 380,50 Ha.





**Gambar 2.30** Data Luasan Kumuh yang Sudah di Tangani Tahun (2018–2022)

(Sumber Data: Dinas PRKP Prov. Kalsel tahun 2023)



**Gambar 2.31** Persentase Penganganan Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018-2022

Rumah tidak layak huni atau yang biasa disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni. Biasanya, RTLH memiliki konstruksi bangunannya tidak handal, luasnya tidak sesuai standar hunian per orang, serta tidak menyehatkan dan/atau membahayakan bagi penghuninya. Dari data TNP2K sebagai acuan dalam penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2021 telah





menangani sebanyak 32.102 unit dari total RTLH yang terdata sebanyak 76.023 unit. Data tersaji sebagai berikut :

**Tabel 2.75** Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

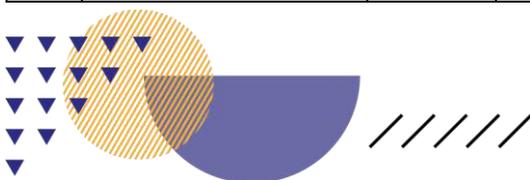
No	Kabupaten/Kota	Data Base	Jenis Penanganan					Jumlah 2015-2021	Sisa Penanganan
			BSPS	DAK	APBD I	APBD II	CSR		
1	Barito Kuala	12.035	1.467	1.127	94	519	-	3.207	8.828
2	Banjarmasin	6.352	1.504	147	18	-	6	1.675	4.677
3	Banjarbaru	1.212	200	250	72	179	-	701	511
4	Banjar	7.861	3.067	1.006	7	9	-	4.089	3.772
5	Tapin	1.725	998	65	59	9	-	1.131	594
6	Hulu Sungai Selatan	12.816	1.837	1.372	6	2.703	-	5.918	6.898
7	Hulu Sungai Tengah	9.523	2.544	1.48	250	1.115	2	5.391	4.132
8	Hulu Sungai Utara	3.621	485	345	40	109	-	979	2.642
9	Balangan	6.099	1.733	56	553	154	1	2.497	3.602
10	Tabalong	3.77	1.506	141	17	205	-	1.869	1.901
11	Tanah Laut	2.406	971	170	573	239	-	1.953	453
12	Tanah Bumbu	4.385	904	10	56	13	-	983	3.402
13	Kotabaru	4.218	927	561	17	204	-	1.709	2.509
	<b>KALSEL</b>	<b>76.023</b>	<b>18.143</b>	<b>6.73</b>	<b>1.762</b>	<b>5.458</b>	<b>9</b>	<b>32.102</b>	<b>43.921</b>

Sumber Data : Renstra Dinas PRKP Prov. Kalimantan Selatan 2022

Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) dan rehabilitasi rumah korban bencana dengan dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 -2023, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2.76** Data peningkatan kualitas RTLH dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Tahun 2019-2023

No.	Kabupaten/Kota	PK-RTLH				REHAB RUMAH KORBAN BENCANA	
		2019	2020	2022	2023	2022	2023
1	Banjarmasin		11		20		
2	Banjarbaru		11	10	10		
3	Banjar			10	80	30	125
4	Tapin	53		10	20		
5	HSS			10	20		
6	HST		11	10	20	45	25
7	HSU	23	11	10	20		





No.	Kabupaten/Kota	PK-RTLH				REHAB RUMAH KORBAN BENCANA	
		2019	2020	2022	2023	2022	2023
8	Balangan	30		10	10	11	5
9	Tabalong		11	10	20		
10	Barito Kuala	50	11	10	20	25	75
11	Tanah Laut	50		10	20	25	30
12	Tanah Bumbu	50		10	10		
13	Kotabaru		11	10	10		
	Jumlah	256	77	120	280	136	260

Sumber Data : Dinas PRKP Prov. Kalimantan Selatan 2023

Berdasarkan tabel di atas data peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2019 -2013 sebanyak 733 buah, sedangkan Rehab rumah korban bencana di tahun 2022 – 2023 sebanyak 396 buah.

Selain penanganan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh juga dilaksanakan penangan Prasarana Sarana Umum di Kawasan permukiman diluar Kawasan kumuh. Sampai dengan tahun 2022 telah dilaksanakan penanganan PSU yang rata-rata adalah penangan jalan lingkungan. Data pelaksanaan sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.77** Penangan PSU di Kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

No	KABUPATEN/KOTA	JENIS KOMPONEN	SATUAN (Meter)	JUMLAH PERMUKIMAN YANG DITANGANI (Unit)
1	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2018 s.d. 2019	Jalan	15.221,5	3.050
2	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2020	Jalan dan PSU	2.053,4	433
3	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2021	Jalan	3.908,52	867
4	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2022	Jalan	5.770,1	1.575
<b>TOTAL</b>			26.953,52	5.925

Sumber: Disperkim Prov. Kalimantan Selatan 2023





### 2.3.1.8 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. telah menunjukkan kemajuan. meskipun masih mengandung berbagai kelemahan. Berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban yang dihadapi saat ini sudah dapat diatasi secara cepat dan tepat oleh pemerintah. seperti yang terlihat pada Tabel 2.78.

**Tabel 2.78** Kondisi Keamanan Provinsi Kalimantan Selatan s.d Tahun terakhir 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah tindak pidana	7.336	8.036	7.021	6.275	5.870
Jumlah tindak pidana yang diselesaikan	6.011	6.350	5.250	5.511	4.780
Persentase tindak pidana diselesaikan	81,94	79,02	74,77	87,82	81,43
Jumlah resiko terkena tindak pidana	179	251	301		

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan Selatan 2022

**Tabel 2.79** Capaian Kinerja Urusan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100	100	100
2	Menurunnya ancaman kriminal di prov. Kalimantan Selatan	%	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya peran Satlinmas dan Damkar	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan jumlah desa/kelurahan rawan bencana yang memperoleh	%	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan Selatan 2022

### 2.3.1.9 Sosial

Pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial di Kalimantan Selatan telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kondisi ini dapat dilihat pada berbagai program yang dikembangkan seperti peningkatan kapasitas pelayanan sosial dalam panti maupun di luar panti. pengembangan program Pembangunan





Keluarga Harapan. pengembangan keberdayaan kesejahteraan sosial dan penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Perkembangan penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat baik itu terkait anak/orang tua terlantar hingga tunawisma dapat dilihat dari perkembangan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Selatan.

**Tabel 2.80** Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Fakir Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	30.39	29.40	6.36	3.64	8.27
2	Persentase Keluarga KAT yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial	%	6.23	1.99	0.00	0.00	0.00
3	Cakupan Program PKH	%	1.63	17.46	8.03	6.84	1.50
4	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial	%	73.12	102.88	744.88	3514.19	916.58
5	Persentase jumlah PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial	%	1.24	1.24	1.24	N/A	N/A
6	Persentase jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berfungsi sosial melalui LKS	%	1.01	1.01	1.01	N/A	N/A
7	Indeks Kepuasan pelayanan Panti Sosial	Indeks	81.78	81.63	83.66	85.04	82.15
8	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial	%	10.60	11.17	3.99	4.89	17.21
9	Jumlah Klien Lanjut Usia Terlantar yang ditangani	Orang	300	300	240	210	50
10	Jumlah Anak Terlantar yang ditangani	Orang	30	40	50	50	50
11	Persentase penyandang Cacat yang dibina	%	2.19	0.89	1.70	1.13	1.35
12	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang ditangani	%	2.25	2.89	0.00	2.59	3.40

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan 2023

## 2.3.2 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Non-Dasar

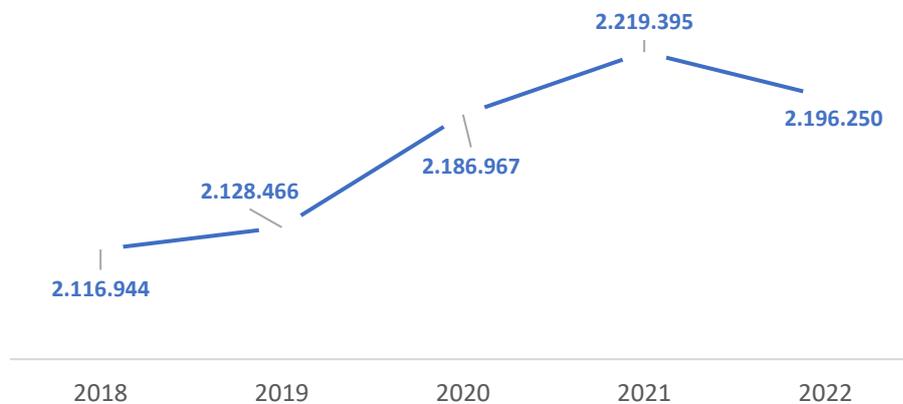
### 2.3.2.1 Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan fokus pada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja. Berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (PAK) dan menekan usia penduduk usia 15 tahun





hingga 24 tahun masuk dalam angkatan kerja. Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.32 dan Tabel 2.81.



**Gambar 2.32** Jumlah angkatan kerja (Jiwa) Provinsi Kalimantan Selatan, 2018-2022

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa secara konsisten dari tahun 2017-2021 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja sebanyak 2.074.117 jiwa meningkat pada tahun 2021 menjadi sebanyak 2.219.395 jiwa. Terjadi peningkatan sebanyak 145.278 jiwa selama kurun waktu tahun 2017-2021, atau tumbuh rata-rata sebesar 50 ribu jiwa per tahunnya. Meskipun demikian pada tahun 2021-2022 terjadi penurunan yang besar yaitu dari 2.219.395 jiwa menjadi 2.196.250 jiwa dan penurunan pertumbuhan lumayan besar yaitu 23.145 jiwa Periode Agustus dari tahun 2021-2022.

Jika dilihat perkembangan kabupaten/kota, maka angkatan kerja terbanyak ada di Kota Banjarmasin yang mencapai 344.840 jiwa pada tahun 2022; Kabupaten Banjar dengan 313.933 jiwa dan Kabupaten Tanah Bumbu dengan 191.835 jiwa, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Balangan dengan 71.143 jiwa, kemudian Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan jumlah 122.700 jiwa, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan 125.724 jiwa. Lebih lanjut Tabel 2.81 berikut ini adalah perkembangan angkatan kerja menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022.





**Tabel 2.81** Perkembangan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	162.348	171.565	181.827	185.049	184.133
Kota Baru	163.498	161.409	157.363	166.820	160.542
Banjar	301.194	309.609	318.377	315.484	313.933
Barito Kuala	177.257	169.540	172.056	176.573	167.411
Tapin	96.890	98.115	100.696	102.432	103.316
HSS	123.949	124.906	129.734	124.003	125.724
HST	146.855	140.332	144.168	143.604	139.658
HSU	118.105	117.284	121.288	124.971	122.700
Tabalong	136.373	129.924	129.928	136.032	139.542
Tanah Bumbu	164.725	170.814	194.029	195.502	191.835
Balangan	70.364	66.621	72.717	72.475	71.143
Banjarmasin	336.792	346.184	331.562	341.335	344.840
Banjarbaru	118.594	122.163	133.222	135.115	131.473
Kalimantan Selatan	2.116.944	2.128.466	2.186.967	2.219.395	2.196.250

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2022

### 2.3.2.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGNAN ANAK

Pembangunan pemberdayaan perempuan sangat terkait dengan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu penyeteraan gender merupakan bentuk kebijakan yang berupaya untuk diterapkan. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa permasalahan gender yang masih dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Selatan adalah terjadinya gap yang besar antara laki-laki dan perempuan dalam tingkat upah yang diukur dengan pengeluaran riil. di mana rata-rata penghasilan perempuan masih sekitar 50% nya dari rata-rata penghasilan laki-laki

### 2.3.2.3 Pangan

Berdasarkan data produksi tanaman pangan secara keseluruhan di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 218,660 jika dibandingkan pada tahun 2021. Produksi tanaman pangan menurun menjadi 1.079.563 ton berdasarkan





data semester I tahun 2022. Produksi daging mengalami penurunan dibanding 2021 sebanyak 3.410,87 ton; produksi telur mengalami kenaikan dibanding 2021 sebanyak 4.560,17 ton. Produksi susu mengalami kenaikan dibanding 2021 sebesar 20.321,49 ton. Lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 2.82

**Tabel 2.82** Produksi Pangan Utama di Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022

Peningkatan produksi	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022**
Tanaman Pangan	Ton	1.922.795	2.116.367	1.556.560	1.298.223	1.079.563
Daging	Ton/Th	98.931,80	84.422.01	145.219,64	117.146,62	113.735,75
Telur	Ton/Th	122.231,82	102.269.52	114.892,58	125.196,87	129.757,04
Susu	liter/Th	252.009,00	202.271.00	171.039,23	111.768,21	132.089,70
Ikan Lokal	Ton/Th	3.990,69	349.94	40.289,06	30.723,72	16.009,80
Ikan Nila	Ton/Th	24.489,60	407.24	26.530,02	19.358,83	15.211,70
Ikan Tangkap	Ton	262,15	212.649.43	166.648,17	168.684,84	76.918,00

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Prov. Kalimantan Selatan 2022

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan melalui program kemandirian pangan peningkatan ketahanan pangan dapat dilihat dari jumlah lumbung pangan yang tersebar di 11 Kabupaten di Kalimantan Selatan adalah sebanyak 129 lumbung pangan, desa yang sudah mandiri pangan di Kalimantan Selatan sebanyak 194 desa dan jumlah cadangan pangan sebanyak 173.190 kg.

#### 2.3.2.4 Lingkungan Hidup

Menurunnya kualitas lingkungan hidup provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu isu yang sangat penting sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan tekanan jumlah penduduk. Hal yang sering sulit untuk dijawab adalah apakah kualitas lingkungan hidup provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kondisi baik, sedang, atau buruk. Sejak tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan suatu indeks lingkungan berbasis provinsi yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeksi ini diterjemahkan dalam angka yang menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, atau sebaliknya. Berikut ini klasifikasi penjelasan kualitatif dari angka indeks lingkungan hidup.





**Tabel 2.83** Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	
Sangat baik	$90 \leq x < 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Kurang	$25 \leq x < 50$
Sangat kurang	$0 \leq x < 25$

Pembagian kategori penjelasan kualitatif ini didasarkan pada sebaran angka dalam perhitungan indeks. Kategori penjelasan kualitatif ini dijadikan dasar pembuatan kebijakan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami bagi publik. Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, indeks dapat membantu penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan hidup.

Indeks kualitas lingkungan hidup provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara lain dengan melakukan penanaman pohon melalui program revolusi hijau dan berbagai proyek strategis lainnya untuk memaksimalkan upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan termasuk berbagai parameter lingkungan penyusunnya. Misi gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang Kelima yaitu Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana yang kemudian diselaraskan dengan tema RKPD tahun 2024 yang mengandung makna focus pada pertumbuhan ekonomi inklusif yang tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup) mencoba menjawab isu strategis Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Masih terjadinya kerusakan lingkungan (pencemaran air, lubang tambang, dan deforestasi) dan belum optimalnya mitigasi bencana banjir dan kebakaran hutan lahan dengan melakukan berbagai program kegiatan guna menunjang perbaikan lingkungan.

Upaya yang telah dilakukan memberikan dampak positif terhadap perbaikan lingkungan hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai Indeks kualitas lingkungan hidup Kalimantan Selatan. Predikat IKLH Provinsi Kalimantan





Selatan Tahun 2022 berada pada predikat BAIK mengalami peningkatan sebesar 0,94 dan mencapai target, data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.84** Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2022

Jenis	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas LH	58,74	62,07	61,47	61,94	68,43	71,03	71,97
Tutupan Lahan	44	49,21	49,29	46,78	48,48	50,26	50,52
Kualitas Air	51,56	52,25	51,43	55,31	51,67	54,75	54,63
Kualitas Udara	85,6	89,02	87,75	88,78	88,93	89,15	89,52

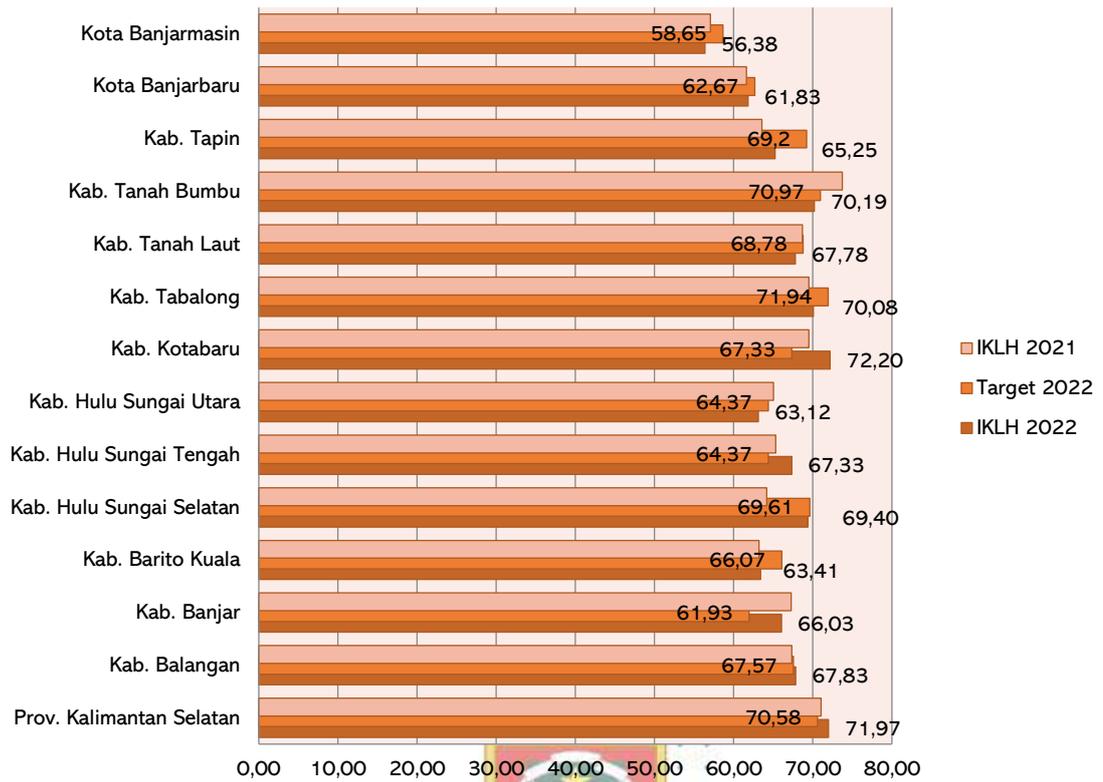
Sumber: DLH Kalimantan Selatan 2023



Sumber: DLH Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 2.33** Grafik Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 s.d Tahun 2022





Sumber: DLH Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 2.34** Grafik Target dan Capaian IKLH Prov Kalsel dan Kab/Kota Tahun 2022, Target Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2022

7 Kab/Kota dari 13 Kab/Kota Prov.Kalsel Mencapai Target IKLH Tahun 2022, dari 13 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan 3 kab memperoleh IKLH kategori BAIK.

**Tabel 2.85** Tabel Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022

Prov/Kab/Kota	IKLH 2022	Target 2022	IKLH 2021
Prov. Kalimantan Selatan	71,97	70,58	71,03
Kab. Balangan	67,83	67,57	67,35
Kab. Banjar	66,03	61,93	67,27
Kab. Barito Kuala	63,41	66,07	63,21
Kab. Hulu Sungai Selatan	69,40	69,61	64,19
Kab. Hulu Sungai Tengah	67,33	64,37	65,3
Kab. Hulu Sungai Utara	63,12	64,37	65,04
Kab. Kotabaru	72,20	67,33	69,5
Kab. Tabalong	70,08	71,94	69,52

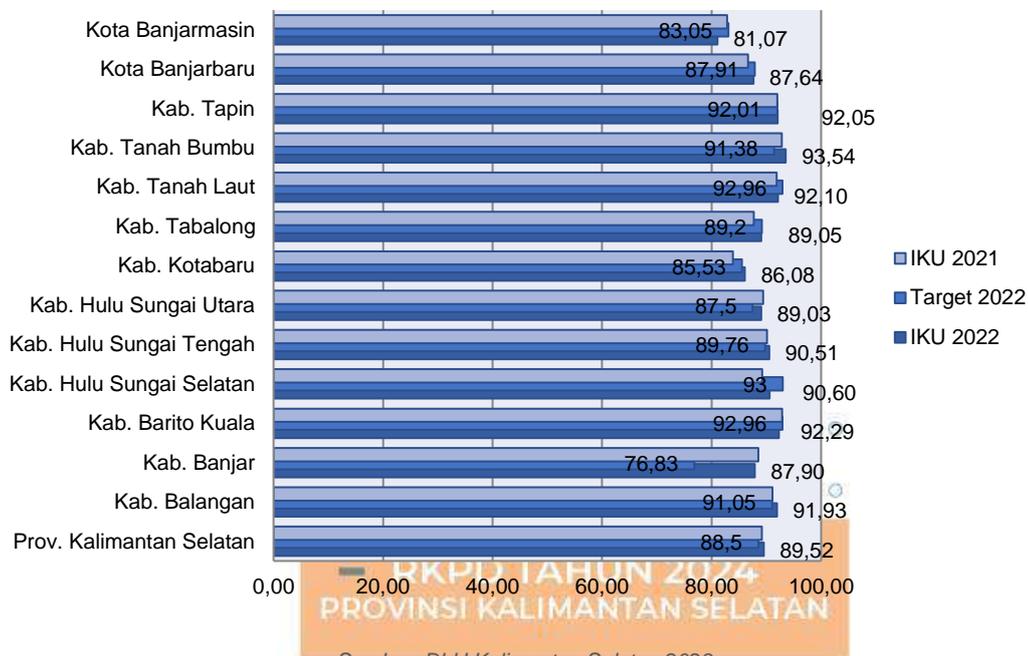




Prov/Kab/Kota	IKLH 2022	Target 2022	IKLH 2021
Kab. Tanah Laut	67,78	68,78	68,7
Kab. Tanah Bumbu	70,19	70,97	73,74
Kab. Tapin	65,25	69,2	63,58
Kota Banjarbaru	61,83	62,67	61,6
Kota Banjarmasin	56,38	58,65	57,06

Sumber: DLH Kalimantan Selatan 2023

Grafik Target dan Capaian IKU  
Prov Kalsel dan Kab/Kota Tahun 2021



Sumber: DLH Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 2.35** Grafik Target dan Capaian IKU Prov Kalsel dan Kab/Kota Tahun 2021

11 Kab/Kota dari 13 Kab/Kota Prov.Kalsel mencapai target IKU Tahun 2022.

**Tabel 2.86** Tabel Capaian IKU (Indeks Kualitas Udara) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022

Prov/Kab/Kota	IKU 2022	Target 2022	IKU 2021
Prov. Kalimantan Selatan	89,52	88,5	89,2
Kab. Balangan	91,93	91,05	91,1
Kab. Banjar	87,90	76,83	88,5
Kab. Barito Kuala	92,29	92,96	92,9
Kab. Hulu Sungai Selatan	90,60	93	89,3





Prov/Kab/Kota	IKU 2022	Target 2022	IKU 2021
Kab. Hulu Sungai Tengah	90,51	89,76	90,1
Kab. Hulu Sungai Utara	89,03	87,5	89,4
Kab. Kotabaru	86,08	85,53	83,9
Kab. Tabalong	89,05	89,2	87,7
Kab. Tanah Laut	92,10	92,96	91,9
Kab. Tanah Bumbu	93,54	91,38	92,8
Kab. Tapin	92,05	92,01	92
Kota Banjarbaru	87,64	87,91	86,7
Kota Banjarmasin	81,07	83,05	82,8

Sumber: DLH Kalimantan Selatan 2023





**Tabel 2.87** Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 - 2021

Prov/Kab/Kota	IKLH 2021	IKLH 2020	IKLH 2019	IKA 2021	IKA 2021	IKA 2019	IKU 2021	IKU 2020	IKU 2019	IKL 2021	IKL 2020	IKTL 2019
Prov. Kalimantan Selatan	71.03	68.43	61.94	54.75	51.67	55.31	89.15	88.93	88.78	50.26	48.48	46.78
Kab. Balangan	67.35	66.81	61.35	50.95	50.00	40.83	91.09	91.18	93.51	51.60	50.61	52.76
Kab. Banjar	67.27	59.25	56.07	53.56	47.33	40.67	88.51	79.80	75.82	51.51	52.53	52.80
Kab. Barito Kuala	63.21	54.13	57.98	54.14	52.61	51.21	92.87	92.19	92.26	23.94	23.71	26.75
Kab. Hulu Sungai Selatan	63.81	67.04	56.23	54.80	52.50	51.67	89.26	90.96	88.03	32.24	31.79	35.80
Kab. Hulu Sungai Tengah	65.30	67.65	61.46	54.00	60.83	61.00	90.13	89.75	92.06	38.78	38.5	38.85
Kab. Hulu Sungai Utara	65.04	66.71	59.74	55.00	60.00	47.08	89.40	89.11	89.77	37.23	36.81	37.51
Kab. Kotabaru	69.50	73.99	62.88	57.86	67.50	46.67	83.90	86.16	87.84	62.85	62.62	58.26
Kab. Tabalong	69.52	71.86	72.90	51.87	56.94	54.33	87.69	88.97	89.44	66.23	65.84	68.35
Kab. Tanah Bumbu	73.74	70.39	71.79	63.11	60.00	64.83	92.79	95.02	93.84	56.77	60.32	60.32
Kab. Tanah Laut	68.70	69.71	58.06	58.42	60.67	50.00	91.85	91.29	90.67	43.54	42.12	39.65
Kab. Tapin	63.58	69.09	63.00	52.80	57.78	54.67	92.02	91.89	93.32	29.50	46.36	46.52
Kota Banjarbaru	61.60	86.91	48.49	55.81	56.67	44.67	86.66	86.91	85.53	25.18	26.76	23.58
Kota Banjarmasin	57.06	57.93	62.34	49.49	47.01	57.93	82.84	82.29	82.05	22.38	33.16	31.79





## A. Gas Rumah Kaca

Permasalahan emisi GRK di Kalimantan Selatan bersumber dari kegiatan produksi dan penggunaan energi, kegiatan kehutanan dan perubahan tutupan lahan, kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan, dan kegiatan pengelolaan limbah domestik dan industri. Sebagai acuan dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (PEP), diperlukan proyeksi-ulang tingkat emisi rujukan (REL, *Reference Emission Level*) hingga tahun 2030.

Tingkat emisi rujukan agregat tahun 2030 mencapai 38.437 Gg CO<sub>2</sub>-eq. Pangsa emisi rujukan 2030 ini berasal dari bidang energi dan transportasi sebesar 24.341 Gg CO<sub>2</sub>-eq (63,3%), bidang kehutanan dan perubahan tutupan lahan 4.598 Gg CO<sub>2</sub>-eq (12,0%), bidang pertanian 7.759 Gg CO<sub>2</sub>-eq (20,2%), dan pengelolaan limbah domestik dan industri sebesar 1.739 Gg CO<sub>2</sub>-eq (4,5%).

Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) aksi mitigasi RAD-GRK terus dilakukan sejak penyusunan dokumen RAD GRK pada tahun 2012. Kegiatan PEP selama 2012 – 2018 masih terbatas pada program dan kegiatan sekoral pada dinas perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, belum termasuk yang dilaksanakan oleh dinas perangkat daerah kabupaten/ kota, swasta, masyarakat, dan pihak lainnya. Berdasarkan PEP dimaksud, realisasi penurunan emisi GRK agregat tahun 2018 mencapai 5,84%. Penurunan emisi GRK dari kegiatan kehutanan dan perubahan tutupan lahan mencapai 32,12%, dari kegiatan pengelolaan limbah domestik 5,87%, dari kegiatan pertanian 4,09%, dari kegiatan transportasi 1,52%, dan dari penggunaan energi lainnya 0,01%. x

Skenario Rencana Aksi Daerah untuk menurunkan emisi GRK dibuat berdasarkan dokumen RPJP 2005-2025 dan RPJMD 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan, dan Rencana Strategis SKPD terkait. Berdasarkan skenario dimaksud, target penurunan emisi GRK agregat tahun 2030 adalah 7.682 Gg CO<sub>2</sub>-eq atau 19,99% dari tingkat emisi rujukan tahun 2030 sebesar 38.437 Gg CO<sub>2</sub>-eq. Target ini masih di bawah target nasional 29,0%. Untuk mendongkrak target penurunan memenuhi atau bahkan melampaui target nasional tersebut, diperlukan upaya peningkatan rencana aksi melalui partisipasi para pihak pada setiap sektor atau bidang yang berkontribusi pada penurunan emisi GRK di Kalimantan Selatan.

Adapun target penurunan emisi GRK Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 pada misi





Kelima Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana dengan sasaran menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.88** Tabel target penurunan emisi GRK Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TAHUN					KONDISI AKHIR
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD
<b>Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana</b>										
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	16,5	18,0	21,0	22,2	24,6	26,6	28,9	28,9

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026

Peningkatan emisi GRK terutama dipicu oleh perubahan tutupan lahan. Perubahan tutupan lahan di masa mendatang berkontribusi sangat penting dalam hal penurunan emisi GRK agregat di Kalimantan Selatan.

### B. Ekosistem Gambut

Ekosistem gambut menjadi isu penting dalam permasalahan Perubahan tutupan lahan, sehubungan nilai dan fungsi lingkungannya antara lain sebagai pengendali perubahan iklim global karena kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon. Gambut Indonesia menyimpan karbon sebesar 46 GT (atau  $46 \times 10^9$  ton), sehingga memiliki peran yang cukup besar sebagai penjaga iklim global. Ekosistem Gambut mampu mengatur tata air dan menyeimbangkan iklim (penyimpan karbon). Menurut Agus dkk (2013), dengan ketebalan gambut Kalimantan Selatan yang dominan sekitar  $<0,5 - >3$  meter, kerapatan karbon  $60 \text{ kg C/m}^3$  (kematangan gambut hemik), dan luasan gambut 238.609 hektar, perkiraan total karbon yang tersimpan pada tanah gambut di Kalimantan Selatan adalah sekitar 27-36 Gt.

Lahan gambut mampu menyimpan air dalam jumlah yang sangat besar. Kalimantan Selatan dengan luas lahan gambut sekitar 238.609 hektar, diperkirakan volumenya adalah sekitar 447,9 milyar  $\text{m}^3$  dan potensinya menyimpan air sekitar  $14,9 \text{ juta hektar} \times 3 \text{ meter} \times (0,8 \text{ atau } 0,9) = 358,3 - 403,1$  milyar  $\text{m}^3$  (Dariah dan Maswar, 2014). Secara ekologis, peran pengatur tata air



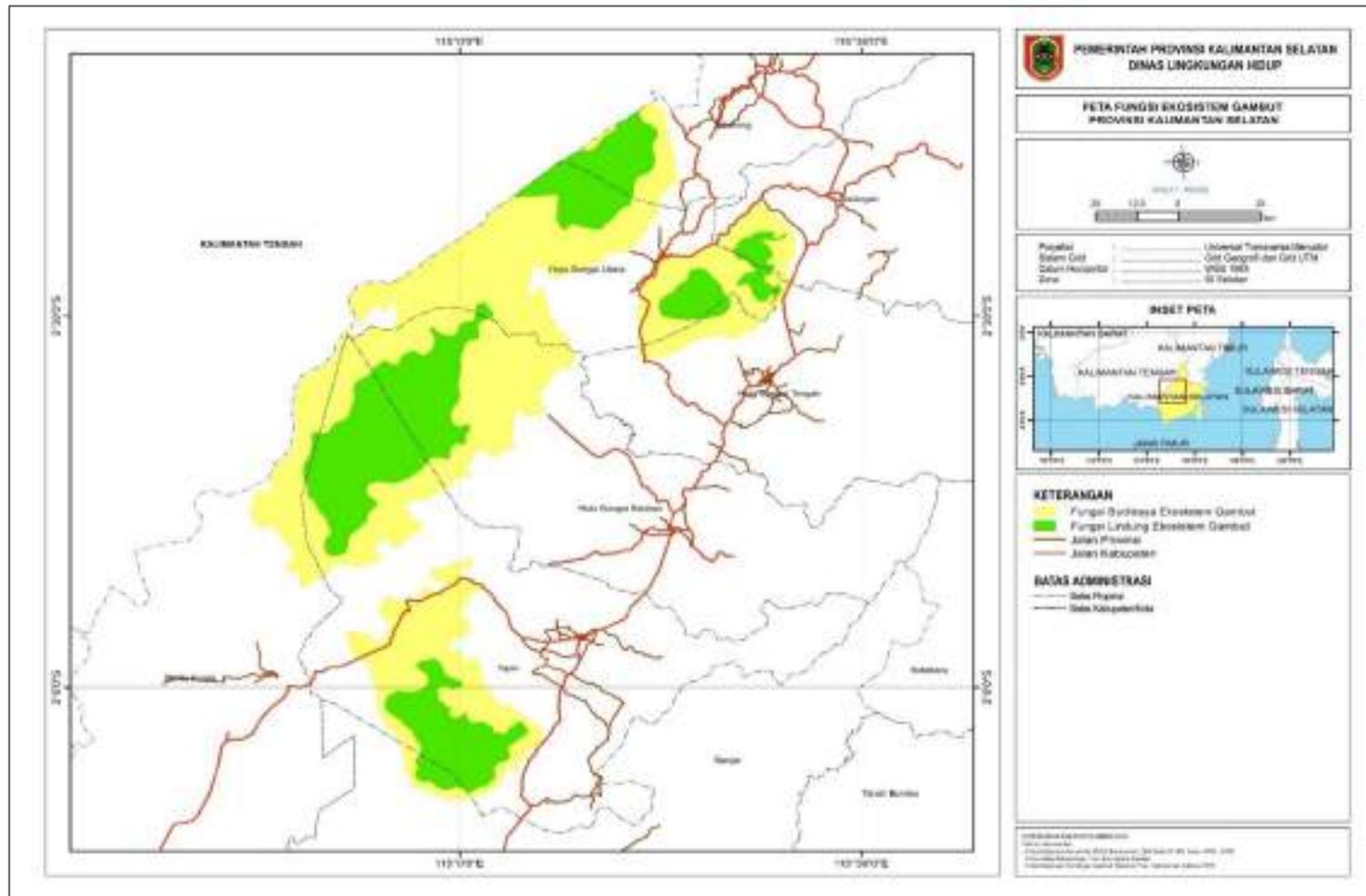


lahan menjadi penting baik pada saat musim kemarau maupun musim hujan. Selain itu, dengan adanya air yang tersimpan di dalamnya dapat berperan dalam menghambat oksidasi pirit ( $\text{FeS}_2$ ) yang berada pada lapisan tanah mineral di bawah lapisan gambut dalam upaya untuk mengurangi kemasaman tanah dan keracunan tanaman (Dariah dan Maswar, 2014).

Potensi jasa lingkungan lain yang penting yaitu jasa pengaturan populasi, baik flora dan fauna di Ekosistem Gambut. Gangguan atau ketidakseimbangan jumlah populasi flora dan fauna akan berimplikasi selain pada ekosistem gambut itu sendiri juga pada ekosistem lain di sekitarnya dan fungsi-fungsi sosial, ekonomi, dan fungsi lingkungan lainnya.

Secara spasial sebaran fungsi ekosistem gambut berdasarkan fungsi lindung dan fungsi budidaya di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.36.





Sumber: Dokumen RPPEG Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

**Gambar 2.36** Peta Fungsi Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan





Kawasan ekosistem gambut ditentukan berdasar pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129/MENLHK/ SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut. Kawasan ini memiliki fungsi lindung dan fungsi budidaya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut.

KHG di Provinsi Kalimantan Selatan meliputi luas 238.609 hektar. Keseluruhan KHG, yang masuk ke dalam fungsi lindung sekitar 80.691 hektar (34%) dan fungsi budidaya sekitar 157.918 hektar (66%). Dengan demikian, maka seluruh ekosistem gambut yang masuk ke dalam kawasan KHG selain berupa tanah gambut, bergambut, dan juga tanah mineral masuk dalam areal KHG.

**Tabel 2.89** Sebaran Indikatif Areal Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut

Nama KHG	Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan (Ha)	Pemanfaatan Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan (Ha)	Jumlah
KHG Sungai Balangan - Sungai Batangalai	1.924,69	6.887,37	8.812,07
KHG Sungai Barito - Sungai Alalak	767,48	16.326,58	17.094,07
KHG Sungai Barito - Sungai Tapin	12.547,14	25.817,70	38.364,84
KHG Sungai Maluka - Sungai Martapura	297,56		297,56
KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	16.193,27	2,06	16.195,33
Grand Total	31.730,15	49.033,72	80.763,87

Sumber: Dok RPPEG Prov Kalsel, 2023





**Tabel 2.90** Sebaran Indikatif Areal Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut

Nama KHG	Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (Ha)				Jumlah
	Kawasan Untuk Non Kehutanan	Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	Pemanfaatan Fungsi Budidaya Lainnya	
KHG Sungai Balangan - Sungai Batangalai				21.992,48	21.992,48
KHG Sungai Barito - Sungai Alalak				30.731,01	30.731,01
KHG Sungai Barito - Sungai Tapin	16.159,32		6.633,07	50.808,75	73.601,14
KHG Sungai Maluka - Sungai Martapura			2.148,58	88.300,93	90.449,51
KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	18.266,73	350,48	51,18	7.536,07	26.204,47
Grand Total	34.426,05	350,48	8.832,83	199.369,24	242.978,61

Sumber: Dok RPPEG Prov Kalsel, 2023





**Tabel 2.91** Sebaran Indikatif Areal Mitigasi Perubahan Iklim dari Ekosistem Gambut

Nama KHG	Fungsi Budidaya					Fungsi Lindung					Jumlah
	Mitigasi prioritas II	Peningkatan stok karbon prioritas I	Peningkatan stok karbon prioritas II	Peningkatan stok karbon prioritas III	Total	Mitigasi prioritas II	Peningkatan stok karbon prioritas I	Peningkatan stok karbon prioritas II	Peningkatan stok karbon prioritas III	Total	
KHG Sungai Balangan - Sungai Batangalai	16.586,73		527,32	4.878,43	21.992,48	1.572,37	1.025,80	5.861,58	352,32	8.812,07	30.804,54
KHG Sungai Barito - Sungai Alalak	4.805,96	38,23	2.103,40	23.783,42	30.731,01	1,31	5.609,31	10.717,28	766,18	17.094,07	47.825,08
KHG Sungai Barito - Sungai Tapin	44.020,79	30,35	8.286,86	21.263,14	73.601,14	7.671,39	8.812,95	17.004,75	4.875,75	38.364,84	111.965,99
KHG Sungai Maluka - Sungai Martapura	61.505,93		4.699,20	24.244,38	90.449,51	261,72			35,84	297,56	90.747,08
KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	27.779,62	2,31	176,39	1.726,97	29.685,28	13.859,44		2,06	2.333,83	16.195,33	45.880,61
Grand Total	154.699,03	70,89	15.793,17	75.896,34	246.459,42	23.366,23	15.448,05	33.585,67	8.363,92	80.763,87	327.223,29

Sumber: Dok RPPEG Prov Kalsel, 2023



Reduksi emisi karbon menjadi isu utama dalam pengendalian perubahan iklim, khususnya dalam bidang mitigasi yang memiliki target total reduksi emisi pada tahun 2030 sebesar 29%-41%. Ekosistem Gambut menjadi penting dalam mitigasi emisi gas rumah kaca, khususnya karbon karena diperkirakan lahan gambut dapat menyimpan 550 giga ton karbon, atau setara dengan dua kali jumlah simpanan karbon di berbagai jenis hutan non-gambut. Juga diperkirakan 25% karbon terestrial tersimpan di lahan gambut, dan jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan ekosistem hutan hujan tropis, bahkan untuk kondisi ekosistem yang masih berupa hutan alam.

Sebaran Indikatif Areal Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan, baik Tabel berikut.

**Tabel 2.92** Sebaran Indikatif Areal Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut

Nama KHG	Fungsi Budidaya (Ha)	Fungsi Lindung (Ha)	Jumlah
	Kategori II: pencegahan prioritas II	Kategori II: pencegahan prioritas II	
KHG Sungai Balangan - Sungai Batangalai	16.586,73	1.572,37	18.159,10
KHG Sungai Barito - Sungai Alalak	4.805,96	1,31	4.807,27
KHG Sungai Barito - Sungai Tapin	44.020,79	7.671,39	51.692,18
KHG Sungai Maluka - Sungai Martapura	61.505,93	261,72	61.767,65
KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	27.779,62	13859,44	41.639,05
Grand Total	154.699,03	23366,23	178.065,25

Sumber: Dok RPPEG Prov Kalsel, 2023

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

### C. Kualitas Tutupan Lahan

Kualitas tutupan lahan Provinsi Kalimantan Selatan pada kategori sedang, hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2022 dengan nilai 50,3 dimana 3 Kab/Kota dari 13 Kab/Kota Prov.Kalsel mencapai target IKL Tahun 2022, dengan trend nilai sebagai berikut.

**Tabel 2.93** Nilai Indeks Kualitas Lahan Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021, Target 2022 dan Capaian Tahun 2022

Prov/Kab/Kota	IKL 2022	Target 2022	IKL 2021
Prov. Kalimantan Selatan	50,52	51,24	50,3
Kab. Balangan	51,60	53,99	51,6
Kab. Banjar	51,51	54,51	51,5



Prov/Kab/Kota	IKL 2022	Target 2022	IKL 2021
Kab. Barito Kuala	23,55	26,76	23,9
Kab. Hulu Sungai Selatan	38,51	51,45	32,2
Kab. Hulu Sungai Tengah	38,78	41,64	38,8
Kab. Hulu Sungai Utara	37,73	39,20	37,2
Kab. Kotabaru	63,04	63,10	62,9
Kab. Tabalong	66,53	66,50	66,2
Kab. Tanah Laut	56,78	41,68	43,5
Kab. Tanah Bumbu	44,08	59,68	56,8
Kab. Tapin	30,09	46,38	29,5
Kota Banjarbaru	25,37	29,61	25,2
Kota Banjarmasin	23,70	33,18	22,4

Sumber:DLH Kalimantan Selatan 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 Tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, Luas lahan kritis wilayah kerja BPDAS Barito adalah sebesar 819,799 Ha, luas lahan kritis berdasarkan Provinsi Kalimantan Selatan adalah seluas 458.478 Ha. Jika dibandingkan dengan data lahan kritis berdasarkan data KLHK pada tahun 2018 seluas 511.495 Ha maka selama kurun waktu 4 tahun telah terjadi penurunan luas lahan kritis yang cukup besar yaitu 53.017 Ha. Hal ini sesuai dengan capaian nilai IKLH Provinsi Kalimantan Selatan yang terus meningkat dari tahun ketahun.

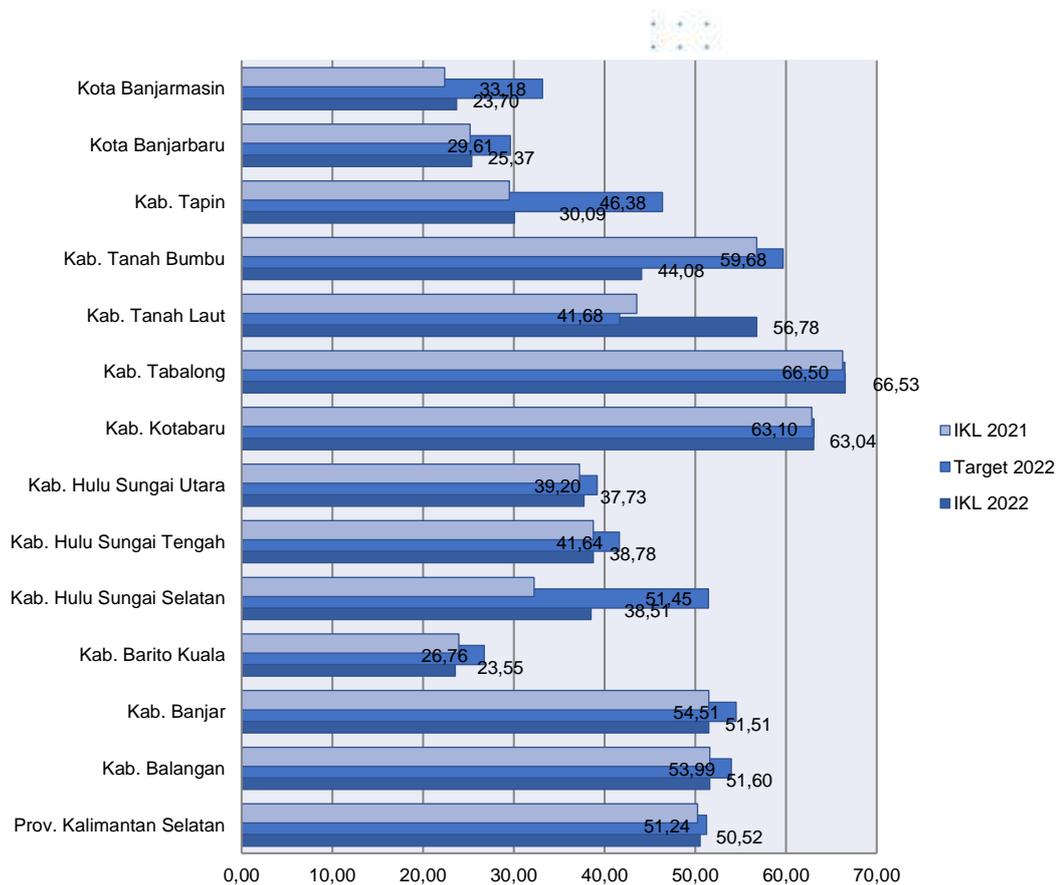
Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan fungsi dari IKTL dan IKEG. Kualitas Ekosistem Gambut sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kanal dan kejadian kebakaran. Terjadinya kebakaran dan pembangunan Kanal akan mengurangi luas Tutupan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Kondisi tersebut menjadi satu variabel yang harus dipertimbangkan dalam menghitung Tutupan Lahan. Memperhatikan hal tersebut, maka variable data dalam IKEG merupakan actor koreksi dalam menghitung nilai IKL. Faktor koreksi tersebut selanjutnya disebut dengan DKK yaitu luas tutupan hutan dan tutupan belukar yang terdampak kanal dan kebakaran di kesatuan hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Capaian IKLH Provinsi Kalimantan dapat dilihat pada table berikut:



**Tabel 2.94** Tabel capaian nilai IKLH Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Prov/Kab/Kota	IKL 2022	Target 2022	IKL 2021
Prov. Kalimantan Selatan	50,52	51,24	50,3
Kab. Balangan	51,60	53,99	51,6
Kab. Banjar	51,51	54,51	51,5
Kab. Barito Kuala	23,55	26,76	23,9
Kab. Hulu Sungai Selatan	38,51	51,45	32,2
Kab. Hulu Sungai Tengah	38,78	41,64	38,8
Kab. Hulu Sungai Utara	37,73	39,20	37,2
Kab. Kotabaru	63,04	63,10	62,9
Kab. Tabalong	66,53	66,50	66,2
Kab. Tanah Laut	56,78	41,68	43,5
Kab. Tanah Bumbu	44,08	59,68	56,8
Kab. Tapin	30,09	46,38	29,5
Kota Banjarbaru	25,37	29,61	25,2
Kota Banjarmasin	23,70	33,18	22,4

Sumber:DLH Kalimantan Selatan 2023



Sumber:DLH Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 2.37** Grafik Target dan Capaian IKL Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota Tahun 2021



Kalimantan Selatan menempati peringkat IKL ke-20 dari 34 provinsi secara nasional. Jika melihat dari tren IKL pada gambar di atas, maka terdapat peningkatan nilai IKL pada Tahun 2022 dari 50.26 menjadi 50.52, namun masih belum mencapai target IKL. Selaras dengan hal tersebut, capaian persentase luas tutupan lahan di tahun 2022 masih belum mencapai target yang ditetapkan. Adanya alih fungsi lahan akibat kegiatan permukiman, perkebunan, pertanian, industri, pertambangan dan lain-lain menyumbang penurunan luas tutupan lahan. Penurunan ini dipercepat dengan adanya illegal logging dan pertambangan ilegal di beberapa kabupaten/kota. Upaya-upaya revegetasi yang dilakukan stakeholder terkait memerlukan waktu hingga pertumbuhan vegetasi di suatu lahan dapat dianggap sebagai tutupan lahan berdasarkan analisis citra satelit.

Data tutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022, diketahui bahwa tutupan lahan pada Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh Perkebunan (830,367.064 Ha), disusul dengan Hutan Lahan Kering Sekunder (685,295.77Ha), Pertanian Lahan Kering Campur (557,113.17 Ha). Berdasarkan data tersebut terjadi perubahan jika dibandingkan dengan data tutupan lahan pada tahun 2020 dimana tutupan lahan Prov. Kalsel di dominasi oleh Hutan Lahan Kering Sekunder (700,718.60 Ha), Pertanian Lahan Kering Campuran (586,262.71 Ha), Perkebunan (791,118.57 Ha) dan Sawah (381,030.06 Ha). Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan lahan yang awalnya berpotensi besar terhadap pengembangan produktivitas pertanian dan perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan sedikit bergeser menjadi perkebunan.

#### **D. Isu Prioritas Lingkungan Hidup**

Berdasarkan hasil kajian KLHS dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 s.d Tahun 2026 didapatkan beberapa Isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan antara lain Pengelolaan persampahan, Kualitas Air Sungai yang Rendah, Luas Lahan Kritis yang berpotensi terus meningkat, potensi keanekaragaman hayati belum terkelola secara optimal, Potensi Kerusakan Ekosistem Mangrove dan terumbu karang diwilayah pesisir serta Perubahan Iklim

#### **E. Pengelolaan Persampahan**

Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah B3 antarlain disebabkan oleh beberapa hal yaitu:



1. Masih perlu pengembangan fasilitas pengelolaan sampah di TPA Regional Banjarbakula.
2. Beberapa kab/kota dinilai tidak layak dibangun TPA, karena seluruh wilayahnya berada di lahan basah (Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara).
3. Banyaknya ditemukan TPS liar
4. Masih banyak kegiatan usaha penghasil Limbah B3 yang belum mengintegrasikan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 kedalam Persetujuan Lingkungan.
5. Masih banyak ditemukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terutama Puskesmas atau Klinik Kesehatan yang belum memiliki Fasilitas TPS Limbah B3 yang sesuai dengan Permen LHK No. 56 Tahun 2015. Sedangkan untuk timbulan Limbah B3 infeksius wajib untuk dikelola 2 x 24 Jam apabila tidak disimpan di ruangan berpendingin dibawah 0 derajat.

Terkait dengan pengelolaan persampahan, masih kurangnya Sumber Daya Manusia untuk pengelolaan persampahan. circular economy dalam pengelolaan sampah masih belum berjalan dengan baik. Perlu banyak upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan sampah dilihat dari banyaknya ditemukan TPS liar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum taat hukum berkenaan dengan Perda yang berisikan larangan membuang sampah, serta kesadaran dan peran serta masyarakat untuk mengelola sampahnya sendiri masih sangat kurang. Kurangnya partisipasi dari Desa/Kelurahan/Kecamatan/ Kabupaten selaku pemangku wilayah dalam hal pengelolaan lingkungan dimana memiliki kewajiban untuk mengelola lingkungannya.

Permasalahan sampah di provinsi kalimantan selatan sudah diperkuat dengan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kalimantan Selatan (JAKSTRADA) namun demikian upaya-upaya yang berkenaan dengan pengelolaan sampah yang terdiri dari pengurangan dan penanganan masih belum optimal, berdasarkan data LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terealisasi 61,99%.



## F. Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Permasalahan sampah di provinsi Kalimantan selatan sudah dilaksanakan sesuai Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kalimantan Selatan (JAKSTRADA) namun demikian upaya -upaya yang berkenaan dengan pengelolaan sampah yang terdiri dari pengurangan dan penanganan masih belum optimal, berdasarkan data SIPSN pada tahun 2021 target pengelolaan sampah Kalimantan selatan 97% dengan realisasi 78,31%.

Target Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tahun 2021 sebesar 24% dengan realisasi 14,57%. kondisi ini dapat terlihat di lapangan sampah masih berserakan pada wilayah tertentu yang ini memerlukan peran serta masyarakat didalam pengelolaan sampah. Sedangkan target Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis Rumah Tangga sebesar 74% dengan realisasi 63,74%, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah.

Sebagaimana data SIPSN Potensi timbulan sampah tahun 2021 di Provinsi Kalimantan selatan sebanyak 320.220,74Ton/Tahun, dengan Jumlah pengurangan sampah sebanyak 46.666,46 Ton/Tahun melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, sampah termanfaatkan di sumber sampah dan sampah didaur ulang di sumber.

Kegiatan Pengurangan dan Penanganan sampah yaitu presentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terealisasi 14,57%, indikator ini baru dibuat kebijakannya berdasarkan peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Indikator kedua pada kinerja kedua mengembangkan program dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yaitu presentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terealisasi 63,74 %, indikator ini baru dibuat kebijakannya berdasarkan peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Masalah persampahan di Kalimantan Selatan setiap tahun selalu mendapat perhatian penting mengingat perkembangan pembangunan dan ekonomi Kalimantan Selatan yang cenderung meningkat sehingga memberikan



daya tarik bagi masyarakat untuk tinggal dan berusaha di Kalimantan Selatan. Adanya urbanisasi dan peningkatan penduduk pada akhirnya akan menimbulkan masalah sampah. Berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan selama Tahun 2020 meskipun kondisi pandemi Covid-19 menjadikan tekanan terhadap kinerja pengelolaan persampahan.

Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia. Limbah infeksius dari penanganan Covid-19 harus dikelola dan dilaporkan sesuai diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri LHK Tanggal 12 Maret 2021 revisi dari SE.2/MENLHK/PSLB3 /PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Covid-19. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah infeksius dari penanganan pasien dengan penyakit menular dikhawatirkan menjadi sumber penularan penyakit bagi pasien, petugas, dan masyarakat sekitar.

Menghadapi kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada permasalahan limbah B3 medis dan limbah infeksius seperti berupa masker, sarung tangan, perban, alat suntik, set infus bekas dan lainlain, tercatat timbulan limbah B3 medis pada tahun 2022 sejumlah 287.526,26 kg. Hal ini mengharuskan adanya penanganan khusus limbah B3 medis. Penanganan terhadap limbah infeksius telah dilakukan oleh berbagai rumah sakit, puskesmas, dan tempat karantina dibawah pengawasan dari DLH Provinsi Kalimantan Selatan untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan di insenerator dan sebagian dikirim kepada pihak ketiga yang telah memiliki izin mengelola LB3, yaitu PT Balikpapan Environmental Services (PT BES). Untuk penanganan limbah B3 covid-19 sendiri dikelola melalui fasyakes yang memiliki izin operasional insinerator yang ada pada RSUD Ulin, Ansyari Saleh, RSUD Balangan, RSUD Tanah Bumbu dan RS Ciputra.

Kalimantan Selatan belum memiliki usaha jasa pengolahan Limbah B3 yg memiliki perizinan berusaha untuk pengolahan Limbah B3, sehingga diluar dari keberadaan insenerator di RSUD maka untuk limbah B3 non medis dikelola dengan mengirim LB3 ke penyedia jasa yang ada di pulau Jawa dan Balikpapan. Kondisi ini tentu menyedot keuangan daerah, Selain itu tentu beresiko berdampak pencemaran lingkungan dari proses pengangkutan atau telatnya Limbah B3 utk di kelola. Dalam hal penanganan Limbah B3 medis, kab/ kota di Kalimantan Selatan belum memiliki sarana depo penyimpanan untuk menyimpan



Limbah B3 dari berbagai fasyankes, padahal depo ini sangat penting untuk bisa menekan biaya pengangkutan LB3

### **G. Kualitas Air Sungai Yang Rendah**

Hasil pemantauan kualitas air sungai provinsi Kalimantan Selatan tahap pertama sampai dengan Tahun 2022 pada 38 titik pantau, ditemukan parameter-parameter yang dominan tidak memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan pemerintah RI No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI untuk Kelas I antara lain BOD, Fecal coli, Total coliform, DO, COD, TSS, CI bebas, dan Besi (Fe). Parameter lain yang tidak memenuhi baku mutu antara lain : H<sub>2</sub>S, Fenol, Sianida (CN), pH, Mangan (Mn). Jika dibandingkan dengan baku mutu Kelas I, maka 63,16 % kualitas air sungai di Provinsi Kalimantan Selatan tergolong dalam cemar sedang dan 36, 84% dalam status cemar ringan.





**Tabel 2.95** Tabel Status Mutu Air Sungai Provinsi Kalsel sampai dengan Tahun 2022

No	Nama Sungai	Kab/Kota	Lokasi sampel	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Tahap I	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Tahap II	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Rata-rata
1	Martapura	Kab. Banjar	1. Desa Tambak Anyar Ilir	Cemar Ringan (4,62)	Cemar Ringan (4,15)	Cemar Ringan (4,39)
			2. Desa Sungai Rangas	Cemar Ringan (4,05)	Cemar Ringan (2,95)	Cemar Ringan (3,50)
			3. Desa Sungai Lulut	Cemar Ringan (4,18)	Cemar Ringan (2,09)	Cemar Ringan (3,14)
		Kota Banjarmasin	4. Desa Basirih	Cemar Ringan (4,58)	Cemar Ringan (3,67)	Cemar Ringan (4,13)
2	Irigasi	Kab. Banjar	1. Desa Sungai Landas	Cemar Ringan (4,54)	Cemar Ringan (2,06)	Cemar Ringan (3,30)
		Kota Banjarbaru	2. Intake PDAM	Cemar Ringan (4,57)	Cemar Ringan (3,39)	Cemar Ringan (3,98)
		Kab. Banjar	3. Desa Sungai Tabuk Keramat	Cemar Ringan (4,36)	Cemar Ringan (3,26)	Cemar Ringan (3,81)
3	Riam Kanan	Kab. Banjar	1. Desa Pingaran Ulu	Cemar Ringan (4,41)	Cemar Ringan (4,59)	Cemar Ringan (4,50)
4	Riam Kiwa	Kab. Banjar	1. Desa Astambul Kota	Cemar Ringan (4,56)	Cemar Ringan (3,15)	Cemar Ringan (3,86)
5	Negara	Kab. H.S. Utara	1. Desa Jarang Kuantan	Cemar Ringan (3,19)	Cemar Ringan (3,56)	Cemar Ringan (3,38)
			2. Desa Teluk Mesjid	Cemar Ringan (3,58)	Cemar Ringan (3,59)	Cemar Ringan (3,59)
		Kab. H. S. Selatan	1. Desa Hakurung	Cemar Ringan (3,18)	Cemar Ringan (2,92)	Cemar Ringan (3,05)
			2. Desa Tumbukan Banyu	Cemar Ringan (2,98)	Cemar Ringan (4,27)	Cemar Ringan (3,63)
			3. Desa Bajayau-Daha	Memenuhi (0,76)	Cemar Ringan (3,36)	Cemar Ringan (2,06)
		Kab. Tapin	1. Desa Margasari	Cemar Ringan (2,43)	Cemar Ringan (2,45)	Cemar Ringan (2,44)
			2. Desa Sei. Puting	Cemar Ringan (3,89)	Cemar Ringan (0,78)	Cemar Ringan (2,34)
3. Desa Keladan	Cemar Ringan (3,10)		Cemar Ringan (1,20)	Cemar Ringan (2,15)		
6	Tapin	Kab. Tapin	1. Desa Baringin A	Cemar Ringan (3,19)	Cemar Ringan (1,82)	Cemar Ringan (2,51)
7	Barabai	Kab. H.S. Tengah	1. Desa Bulayak	Cemar Ringan (4,82)	Cemar Ringan (4,67)	Cemar Ringan (4,75)
			2. Desa Pajukungan	Cemar Ringan (3,20)	Cemar Ringan (4,48)	Cemar Ringan (3,84)
			3. Desa Kasarangan	Cemar Ringan (3,29)	Cemar Ringan (4,36)	Cemar Ringan (3,83)





No	Nama Sungai	Kab/Kota	Lokasi sampel	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Tahap I	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Tahap II	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Rata-rata
			4.Desa Tabat	Cemar Ringan (2,70)	Cemar Ringan (4,00)	Cemar Ringan (3,35)
8	Amandit	Kab. H.S. Selatan	1. Desa Muning Baru	Cemar Ringan (3,65)	Cemar Ringan (3,18)	Cemar Ringan (3,42)
9	Tabanio	Kab. Tanah Laut	1.Intake PDAM Desa Bajuin	Cemar Ringan (4,84)	Cemar Ringan (4,57)	Cemar Ringan (4,71)
			2.Desas Angsau	Cemar Ringan (3,72)	Cemar Ringan (4,83)	Cemar Ringan (4,28)
			3.Desas Panjaratan	Cemar Ringan (4,87)	Cemar Ringan (3,79)	Cemar Ringan (4,33)
10	Balangan	Kab. Balangan	1.Desas Tabuan	Cemar Ringan (2,88)	Cemar Ringan (3,60)	Cemar Ringan (3,24)
			2.Desas Kapul	Cemar Ringan (4,00)	Cemar Ringan (4,02)	Cemar Ringan (4,01)
			3.Desas Paringin Kota	Cemar Ringan (3,48)	Cemar Ringan (3,67)	Cemar Ringan (3,58)
11	Tabalong	Kab. Tabalong	1.Desas Suput	Cemar Ringan (2,89)	Cemar Ringan (2,28)	Cemar Ringan (2,59)
			2.Desas Pamarangan Kiwa	Cemar Ringan (2,76)	Cemar Ringan (2,58)	Cemar Ringan (2,67)
			3.Desas Halangan	Cemar Ringan (2,25)	Cemar Ringan (3,62)	Cemar Ringan (2,94)
12	Batulicin	Kab. Tanah Bumbu	1.Desas Sela Selilau	Cemar Ringan (4,21)	Cemar Ringan (1,83)	Cemar Ringan (3,02)
			2. Desas Karang Bintang	Cemar Ringan (3,64)	Cemar Ringan (2,13)	Cemar Ringan (2,89)
			3. Desas Maju Makmur	Cemar Ringan (3,85)	Cemar Ringan (1,93)	Cemar Ringan (2,89)
13	Cantung	Kab. Kotabaru	1. Desas Banua Lawas	Cemar Ringan (3,51)	Cemar Ringan (3,69)	Cemar Ringan (3,60)
			2.Desas Sungai Kupang	Cemar Ringan (2,80)	Memenuhi (0,997)	Cemar Ringan (1,90)
			3. Desas Karang Payau	Cemar Ringan (3,00)	Cemar Ringan (3,72)	Cemar Ringan (3,36)

Berdasarkan tabel diatas, dapat disajikan gambaran persentase titik pantau yang tidak memenuhi baku mutu beserta indikasi sumber pencemarnya disajikan dalam tabel berikut ini :





**Tabel 2.96** Parameter Indeks Kualitas Air (IKA)

No.	Parameter	Peruntukan	Persentase (%)		Indikasi Sumber Pencemar
			Tahap I	Tahap II	
1	Fecal coli *	Kelas I	94,74	100	Bakteri yang berasal dari dari kotoran manusia dan kotoran hewan mamalia
		Kelas II	42,11	81,58	
2	Total coliform	Kelas I	94,74	100	Bakteri yang berasal dari dari kotoran manusia dan kotoran hewan mamalia, kotoran hewan ternak lainnya, jasad makhluk hidup seperti burung mati, serta bakteri dari limbah rumah tangga
		Kelas II	73,68	89,47	
3	BOD *	Kelas I	100	92,1	Limbah organik dari aktivitas rumah tangga seperti limbah makanan dan minuman, detergen (sabun), aplikasi pupuk pada kegiatan pertanian, limbah peternakan, sisa pakan ikan
		Kelas II	89,5	81,6	
4	DO *	Kelas I	89,47	76,32	BOD dan COD tinggi maka DO menjadi rendah
		Kelas II	31,6	23,7	
5	Cl Bebas	Kelas I	63,16	71,05	Klor dari proses klorinasi. Air bersih yang digunakan masyarakat melalui proses klorinasi oleh PDAM
		Kelas II	60,53	68,42	
6	COD *	Kelas I	68,42	60,53	Limbah organik baik dari aktivitas rumah tangga maupun industri, aplikasi pupuk pada kegiatan pertanian, limbah peternakan
		Kelas II	42,11	26,32	
7	H <sub>2</sub> S	Kelas I	36,84	57,89	Sampah, limbah cair domestik
		Kelas II	36,84	57,89	
8	TSS *	Kelas I	63,16	42,11	Kikisan atau erosi tanah dipengaruhi musim hujan, aktivitas galian C, pertambangan batubara, perkebunan sawit
		Kelas II	55,26	36,84	
9	Besi (Fe)	Kelas I	60,53	21,05	Karakteristik alami, Pertambangan galian C dan batubara
		Kelas II	-	-	
10	Mangan (Mn)	Kelas I	5,26	10,53	Pertambangan galian C dan batubara
		Kelas II			
11	Amoniak	Kelas I		10,53	Air seni dan tinja, oksidasi zat organik secara mikrobiologis serta dari air buangan industri dan aktivitas masyarakat, limbah domestik, industri, dan limpasan pupuk pertanian.
		Kelas II		2,63	
12	Detergen	Kelas I	5,26	5,26	Kegiatan mencuci menggunakan detergen
		Kelas II	5,26	5,26	
13	Fenol	Kelas I	13,16		Limbah cair industri tekstil (kayu), bisa juga dari limbah domestik
		Kelas II	7,89		
14	Sianida (CN)	Kelas I	7,89		Limbah pertambangan emas
		Kelas II	7,89		
15	pH *	Kelas I	5,26		Air hujan, limbah industri pertambangan batubara
		Kelas II	5,26		

Keterangan = (\*) parameter IKA - Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan



Dengan kompleksitas persoalan tersebut bahwa sumber pencemar yang terindikasi dari berbagai sector yakni dari sector pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, dan domestik, maka diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan serta pemulihan Sungai di Provinsi Kalimantan Selatan harus melalui pendekatan pengelolaan yang komprehensif dan terintegrasi dari hulu hingga hilir oleh seluruh pemangku kepentingan.

#### **H. Luas Lahan Kritis yang Berpotensi Terus Meningkat**

Secara teori banjir dan bencana akibat banjir dapat terjadi karena faktor alamiah maupun pengaruh aktivitas manusia terhadap alam dan lingkungannya. Faktor alamiah yang utama yaitu elemen meteorologi, topografi, hidrologi, perubahan penggunaan lahan dan areal konservasi juga dapat memperbesar peluang terjadinya aliran permukaan (Afdhalia & Oktariza, 2019). Banjir secara umum juga terbagi menjadi dua dari faktor penyebabnya, yaitu banjir fluvial yang disebabkan karena limpahan air dari sungai (kadang disebut juga dengan banjir bandang) dan banjir pluvial yang disebabkan karena tingginya run-off (aliran permukaan) dan curah hujan ekstrim pada suatu lokasi.

Identifikasi Faktor Penyebab:

##### **a. Anomali Curah Hujan**

Berdasarkan klasifikasi curah hujan bulanan, Bulan Januari di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu bulan paling basah pada bagian barat pegunungan Meratus, sehingga potensi air limpasan di daratan cukup tinggi.

##### **b. Morfologi Daratan**

Pada daratan landai genangannya akan lama surut tetapi daya rusaknya kecil, sedangkan daratan yang terjal daya rusak tinggi tetapi genangannya akan cepat surut dikarenakan mengikutialur gravitasi dari hulu.

##### **c. Pasang Laut**

Terjadi pasang laut maksimum yang menambah lamanya durasirendaman banjir di dataran karena air tidak bisa mengalir kelaut. Kondisi topografi di wilayah yang terendam banjir Januari 2021 ini umumnya berada di bagian hilir dengan ketinggian dibawah 12,5 mdpl. Wilayah pesisir di Kalimantan Selatan yang memiliki ketinggian 1 mdpl berpotensi mengalami banjir rob.

##### **d. Sedimentasi Sungai**

Dampak dari sedimentasi adalah kapasitas daya tampung sungai yang semakin menurun seiring dengan bertambahnya sedimen di dalam sungai,



sehingga ketika air limpasan (runoff) tinggi dan akan dibuang ke outlet berupa sungai akan tidak tertampung lagi. Hal inilah yang mengakibatkan meluapnya air sungai dan menggenangi kawasan permukiman, persawahan atau sekitarnya.

#### e. Alih Fungsi Lahan

Berdasarkan peta perubahan guna lahan antara 2011 dan 2020 terlihat jelas adanya perubahan guna lahan dari kawasan berhutan (hutan lindung, hutan produksi, hutan rawa/gambut) serta kawasan pertanian lahan kering menjadi kawasan perkebunan dan permukiman. Hal ini terjadi di DAS Barito, khususnya DTA pada Kajian ini. Alih fungsi lahan khususnya menjadi pertanian lahan kering, perkebunan sawit dan pertambangan yang berakibat infiltrasi rendah, sehingga air limpasan di permukaan semakin banyak berpotensi terjadi banjir.

Dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati, arah kebijakan konservasi kehati yaitu :

- Meningkatkan kepedulian upaya pelestarian Kehati sosialisasi/ pencerahan);
- Memperlambat, mengurangi/menghentikan laju kerusakan/degradasi dan kepunahan Kehati, diiringi upaya rehabilitasi serta implementasi prinsip pemanfaatan berkelanjutan;
- Meningkatkan keberdayaan pranata kelembagaan, kebijakan, dan penegakan hukum;
- Mengembangkan pemanfaatan berkelanjutan, IPTEK dan melestarikan kearifan lokal;
- Implementation of 3 Goals of the Convention on Biological Diversity (conservation, sustainable use, and benefit sharing). Indonesia has ratified CBD in 1994 (Act No. 5/1994);
- Implementation of Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plans (IBSAP), 2003 – 2020;
- Mewujudkan keadilan, keseimbangan peran/kepentingan dan memperkecil potensi konflik;.

Perencanaan Konservasi Kehati skala Provinsi

- Pengumpulan data flora dan fauna in-situ terkait konservasi sumber daya alam
- Pengumpulan data flora dan fauna ex-situ terkait konservasi sumber daya alam
- Pengumpulan data terkait lekat-lahan yaitu konservasi sumber daya alam yang ditanam dalam pekarangan Pengumpulan data ekosistem penopang



keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan terkait konservasi sumber daya alam.

Jasa lingkungan pada habitat bumi ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika faktor eksogen yang dicerminkan dengan dua komponen yaitu kondisi ekoregion dan penutup lahan (landcover/ landuse) sebagai penaksir atau proxy. Oleh karena itu diperlukan proses transformasi data dari ekoregion dan penutup lahan menjadi nilai jasa lingkungan.

Menurut sistem klasifikasi jasa lingkungan dari Millenium Ecosystem Assessment (2005), jasa lingkungan dikelompokkan menjadi empat fungsi layanan, yaitu jasa penyediaan (provisioning), jasa pendukung (supporting) dan jasa kultural (cultural) serta jasa pengaturan (regulating).

Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan dari Dinas Lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 terdapat 20 jasa lingkungan yang disajikan sebagai berikut:

- Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan
- Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih
- Jasa Lingkungan Penyedia Serat
- Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik
- Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara
- Jasa Lingkungan Pengatur Iklim
- Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Alam
- Jasa Lingkungan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah
- Jasa Lingkungan Pengaturan Aliran Air dan Banjir
- Jasa Lingkungan Penyerbukan Alami
- Jasa Lingkungan Pengendalian Hama
- Jasa Lingkungan Estetika
- Jasa Lingkungan rekreasi
- Jasa Lingkungan Warisan Budaya
- Jasa Lingkungan Warisan geologi
- Jasa Lingkungan Regenerasi Tanah dan Pemeliharaan
- Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara
- Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer
- Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman



Keaneekaragaman hayati di Provinsi Kalimantan Selatan beragam jenis, dikarenakan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan banyak dijadikan cagar alam dan kawasan konservasi sehingga masih terjaga ekosistemnya. Flora Vegetasi yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan cukup banyak jenisnya, baik di kawasan taman nasional, wisata, hutan lindung maupun hutan produksi. diketahui bahwa setidaknya terdapat ratusan jenis tumbuhan, mulai dari pohon, liana, vegetasi bawah, dan lain-lain. Adapun beberapa contoh tanaman khas Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Durian, Tebu, Kasturi, Rambutan, Langsung dll. Selain itu Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki fauna khas yang dilindungi.

Fauna/satwa liar yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan tersebar di berbagai habitat di berbagai wilayah, hutan lindung di Pegunungan Meratus. Jenis fauna khas Kalimantan Selatan yang dapat dipetakan sebarannya yaitu Bekantan, Burung, Orang Utan.

Dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk dan intensifnya kegiatan pembangunan dari beragam sektor di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain pertambangan, industri, pelabuhan, perkebunan, pertanian, pemukiman, perikanan, pariwisata berkonsekuensi terhadap peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kompleksitas pembangunan di wilayah pesisir jika tidak diantisipasi secara hati-hati, dikhawatirkan mengganggu dan mengancam kelangsungan pemanfaatan sumber daya dan keberlanjutan ekosistem yang dapat menyangga kehidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa contoh ancaman nyata, misalnya perubahan ekosistem pesisir akibat reklamasi pantai, konversi lahan, penebangan hutan *mangrove*, tumpahan minyak (*oil spill*) dari pelabuhan, maupun pencemaran limbah dari berbagai kegiatan pembangunan dan rumah tangga penduduk.

Terkait dengan jenis pemanfaatan lahan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Selatan dan pengaruhnya terhadap lingkungan pesisir dan perairan, maka isu dan permasalahan pokok yang teridentifikasi adalah terkait dengan ekologi, berupa potensi ancaman kerusakan ekosistem pesisir dan kehidupan biota laut yang hidup di sekitarnya.

Hal ini disebabkan karena secara ekologi laut merupakan tempat bermuaranya semua yang ada di darat baik melalui rembesan air hujan maupun mengalir melalui sungai-sungai yang cukup banyak bermuara di Selat Laut, Selat Sebuku maupun daratan Kalimantan. Akibatnya wilayah ini menjadi tempat



terakumulasinya segala sesuatu baik limbah industri dan domestik, penambangan, perkebunan, sedimen tersuspensi dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan kondisi perairan di lokasi studi yang memiliki tingkat kecerahan yang cukup rendah (dominan <50%) dan kekeruhan akibat sedimen tersuspensi sampai pada jarak 10-15 km dari garis pantai, baik di wilayah muara Sungai Barito (pesisir Kabupaten Banjar dan Barito Kuala) yang dampaknya sampai di wilayah Tanjung Selatan Kabupaten Tanah Laut, perairan Selat Laut (Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru), Selat Sebuku maupun wilayah utara Kabupaten Kotabaru (daratan utama Kalimantan).

Pertambangan batu bara yang dilakukan secara terbuka menyebabkan perubahan bentang lahan yang ekstrem. Penggalian lapisan batu bara yang terletak di bawah lapisan tanah dan lapisan lain menghasilkan lubang-lubang galian yang tidak dapat sepenuhnya ditutup kembali. Selain itu penimbunan lubang galian walaupun telah diupayakan menggunakan prinsip pengembalian lapisan tanah sebagai penutup terakhir pada waktu penataan lahan namun tetap saja menghasilkan kondisi lahan dengan material yang berbeda dibanding aslinya. Lapisan tanah yang dikembalikan sebagai lapisan penutup sudah tercampur aduk antara lapisan tanah atas dan bawah atau lapisan dari horizon A, B bahkan C, sehingga secara kimia terjadi pencampuran sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing horizon tersebut. Secara fisik jelas sangat berbeda dari kondisi awalnya karena terjadi perusakan struktur. Dengan kata lain tanah hasil penutupan kembali pada lokasi pertambangan batu bara memiliki Bobot Isi (BI) yang rendah. Dalam hal ini maka porositas lapisan tanah hasil penutupan kembali menjadi sangat kecil dengan akibat permeabilitas dan aerasi menjadi sangat buruk.

Potensi kerusakan lahan lain yang mungkin terjadi di areal pertambangan batu bara ialah terpotongnya drainase alamiah akibat perubahan bentang lahan. Dalam penataan kembali maka hal ini perlu dipertimbangkan. Kerusakan lahan lainnya ialah berupa erosi dan kemungkinan longsor. Untuk itu maka stabilisasi lereng dan recontouring merupakan bagian dari perencanaan penutupan tambang.

Sebagian besar masyarakat nelayan dan petambak menduga bahwa kegagalan usaha mereka tidak terlepas dari dampak kegiatan penambangan di wilayah hulu dan transportasi di sepanjang daerah aliran sungai maupun perubahan iklim global.



Dari kegiatan pertanian dan perkebunan di daratan, kelebihan unsur hara dari sisa-sisa pupuk bisa menyebabkan suburnya alga di lepas pantai dan mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir, pada gilirannya bisa menyebabkan kematian biota laut secara massal. Sedangkan buangan residu pestisida dari pertanian dan perkebunan melalui aliran sungai dapat menyebabkan keracunan dan kematian biota laut.

Badan Informasi Geospasial mencatat bahwa luas Hutan Mangrove di Indonesia adalah 3,2 juta hektar (Ha). Jumlah itu merupakan 19% (2005) dari seluruh ekosistem sejenis di dunia, dan diperkirakan pada tahun 2013 luas Hutan Mangrove di Indonesia sudah jauh berkurang. Namun walau bagaimanapun, luasan hutan mangrove Indonesia relatif masih dianggap yang paling luas di dunia, sehingga meletakkan Indonesia sebagai penyangga ekosistem mangrove terpenting di dunia.

Kerusakan mangrove di sebagian wilayah pesisir Kalimantan Selatan dominan diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan untuk industri, pelabuhan, perikanan, perkebunan, pertambangan. Selain itu diakibatkan oleh pengaruh alam terutama gelombang.

Hasil analisis terhadap tekanan ekosistem mangrove di pesisir Kalimantan Selatan menunjukkan dalam kategori tekanan sangat tinggi mencapai 6596,56 Ha atau 9,84%, kategori tinggi 137.34,87 Ha (20,50%), sedangkan kategori rendah masih yang terbesar yakni 24.692,24 Ha (36,85%). Secara wilayah kecamatan, Batulicin semua dalam kategori sangat tinggi, untuk semua kategori tinggi terdapat di Kecamatan Bumi Makmur, Pulau Laut Barat dan Pulau Laut Tanjung Selayar. Beberapa wilayah yang memiliki tekanan tinggi >50% terdapat di Kecamatan Takisung, Kurau, Satui dan Pulau Laut Kepulauan. Wilayah ini disebabkan karena semakin tingginya aktivitas konversi lahan di sekitarnya terutama, pelabuhan, perkebunan, perikanan tambak dan permukiman.

Berdasarkan data pada Tabel 2.94 kondisi lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan mengalami tingkat kenaikan yang rendah. Kondisi terakhir Kalimantan Selatan secara peringkat naik ke peringkat 26 dari 34 provinsi di Indonesia. Pengaruh terbesar pada masih rendahnya indeks tutupan lahan akibat dari eksploitasi usaha yang membuka kawasan hutan dan akibat bencana kebakaran hutan.



### 2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembinaan kependudukan dan catatan sipil yang dilaksanakan pada tingkat Provinsi Kalimantan Selatan adalah dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka menuju identitas tunggal. kegiatan yang dilakukan hanya terkait dengan upaya sosialisasi standarisasi pemenuhan hak-hak sipil masyarakat seperti KTP. KK. dan lain sebagainya. Upaya pembinaan ini diarahkan pada upaya percepatan bagi kabupaten/kota mencapai identitas tunggal tersebut. Dalam mendukung pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil. Kabupaten Kota juga menetapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Inventarisasi peraturan terkait penyelenggaraan urusan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

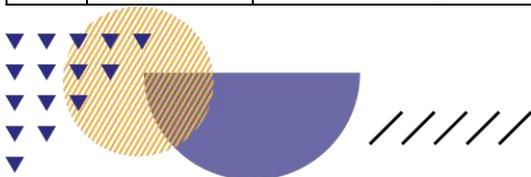
**Tabel 2.97** Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Usia ≥17 Tahun atau Sudah Kawin yang Mempunyai KTP	%	0.00	83.00	92.00	96.40	97.99
2	Persentase Ketersediaan Data Informasi Kependudukan Skala Provinsi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Persentase Kabupaten yang melaporkan data-data kependudukan	%	94.48	0.00	0.00	76.90	92.30
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.00	35.00	1.50	1.41	0.71
5	Usia Kawin Pertama	%	35.00	1.70	0.00	33.94	33.97
6	Persentase Kader GSI Aktif. (indikator kinerja yang dimaksud tidak ada)	%	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Persentase BKB Aktif	%	0.00	90.00	97.00	80.85	0.00
8	Perentase Sub PPKBD Aktif	%	0.00	80.00	75.00	69.75	0.00

Sumber: Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Prov. Kalimantan Selatan 2023

**Tabel 2.98** Inventarisasi Peraturan Perundangan terkait Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Nomor dan Judul Peraturan
1	Balangan	Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil
2	Banjar	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Perbup No. 17 tahun 2014 tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil
3	Batola	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	HSS	Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



No	Kabupaten/ Kota	Nomor dan Judul Peraturan
5	HST	Peraturan Daerah Nomor : Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten No 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil
6	HSU	Peraturan Daerah Nomor : 20-Tahun 2015 tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah 17 2011 ttg Retribusi KTP dan Akta Catatan Sipil
7	Kotabaru	Surat Perintah Bupati Kotabaru Nomor 180.1/143/Setda
8	Tabalong	Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tanggal 15 Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perbup Nomor 06 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2016
9	Tanah Bumbu	Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Penerbitan KTP
10	Tanah Laut	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
11	Tapn	Peraturan Daerah Kab. Tapin No. 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil Di Kab. Tapin
12	Kota Banjarbaru	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kota Banjarbaru
13	Kota Banjarmasin	Peraturan Daerah Nomor : 21 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Sumber : LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Pada tingkat kabupaten/kota telah dikembangkan sistem pelayanan terpusat pada kantor/lembaga yang menangani catatan sipil. sementara untuk beberapa kabupaten telah membagi kewenangannya kepada kantor kecamatan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan kewenangan ini hanya berlaku untuk pembuatan KTP. sedangkan untuk KK, akte kelahiran dan lain sebagainya masih di kantor catatan sipil.

Secara kelembagaan semua kabupaten/kota sudah memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Namun secara kualitas perlu adanya peningkatan dari berbagai sisi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang lebih memadai baik secara kuantitas dan secara kualitas. Hal ini mengingat tantangan yang masih cukup besar terutama terkait dengan upaya sosialisasi dan penyadaran masyarakat akan pentingnya identitas pada umumnya dan identitas tunggal pada khususnya.



### 2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu Upaya pembangunan Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah memberikan peran nyata untuk meningkatkan pendapatan keluarga yaitu dalam bentuk pelatihan kewirausahaan bagi kader-kader PKK.

Dalam rangka peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) telah dilaksanakan penguatan masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber Ekonomimelalui simpan pinjam kelompok perempuan. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa melalui pemberian bantuan stimulan dan pelatihan bagi pengurus. Jumlah kelompok simpan pinjam bagi perempuan dan Badan Usaha Milik Desa sudah dikembangkan di 11 kabupaten dengan hasil cukup baik

Di bidang pemerintahan desa telah pula dilaksanakan pembinaan pembangunan desa seperti perencanaan desa dalam rangka menyusun RPJM desa. peningkatan kapasitas pelayanan desa dan kualitas aparatur dan kepala desa. agar memiliki kemampuan dalam mengelola sistem manajemen desa baik pemerintahan maupun keuangan desa. Berkaitan dengan hal ini telah dibina seluruh desa dengan pola pembinaan melalui percontohan yang kemudian dikembangkan oleh kabupaten sesuai kondisi dan potensi yang ada pada desa yang bersangkutan.

### 2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dilihat dari cakupan kepesertaan KB di Kalimantan Selatan. masih memerlukan upaya keras. demi menuju masyarakat yang sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kepesertaannya sampai dengan tahun 2022 terus membaik.

Grand Design Pembangunan Kependudukan sebenarnya sudah terbentuk di hampir 13 kab/kota pada Prov. Kalimantan Selatan, namun alasan belum maksimalnya pelaksanaan penyusunan GDPK dikarenakan terkendala dengan regulasi dan perlu adanya penyesuaian dengan visi dan misi bupati terpilih dalam pilkada dan GDPK belum menjadi prioritas bagi kab/kota.



Berdasarkan data *Unmed Need* di Kalimantan Selatan sebesar 10,8% menunjukkan bahwa memang masih banyak PUS yang ingin berKB namun belum terlayani. Hal ini disebabkan oleh banyak factor, antara lain karakteristik demografi, social ekonomi, akses dan kualitas pelayanan. Hal ini diperparah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai informasi KB.

Berdasarkan hasil Laporan Indeks Kinerja Utama BKKBN tahun 2020, dapat dilihat bahwa capaian mCPR di Kalimantan Selatan sebesar 80,26%. Angka ini menunjukkan bahwa kesertaan berKB PUS di Kalimantan Selatan sudah cukup tinggi, hanya memang pilihan yang kontrasepsi yang digunakan masih yang non MKJP.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menjalin kerja sama dengan mitra kerja yaitu IBI dan TNI serta BKKBN juga menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi selalu ada.

Masih tinggi PUS yang putus ber KB disebabkan karena :

- a) Selama adanya Pandemi Covid 19 terdapat perubahan akses pelayanan KB. Akses pelayanan KB ada pembatasan pelayanan KB di Puskesmas maupun RS. Selain itu pada beberapa daerah masih terdapat kekurangan akses kesehatan.
- b) Masyarakat merasa takut untuk datang ke Puskesmas atau Klinik PMB maupun RS selama adanya Pandemi Covid-19
- c) Tingginya minat PUS untuk menggunakan KB Non MKJB. Capaian KB MKJP di Kalimantan Selatan masih rendah berkisar 11,02% berdasarkan data Laporan Statistik Rutin BKKBN, sampai dengan bulan September 2021
- d) Kurangnya KIE dari Pengelola Program KB
- e) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KB MKJP

### **2.3.2.8 Perhubungan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), sasaran dalam sistranas yaitu terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif atau dapat diartikan memiliki aksesibilitas yang tinggi. Jaringan pelayanan transportasi dapat menjangkau seluas mungkin wilayah nasional dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Pelayanan umum pada urusan perhubungan meliputi perhubungan darat (angkutan darat dan ASDP), perhubungan laut, perhubungan udara, dan perkeretaapian. Pelayanan urusan perhubungan dapat



dilihat dari jumlah penumpang dan barang yang dapat terangkut oleh angkutan baik darat, laut, maupun udara.

Pemerintah dalam membuat peraturan yang mengatur tentang transportasi umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Suatu kebijakan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pemerintah membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan. Dinas Perhubungan sendiri mengatur tentang peraturan lalu lintas dan sistem transportasi, pemberian ijin trayek, uji kir angkutan yang layak jalan, pemberian marka jalan, penyediaan halte dan jaringan sarana dan prasarana lainnya. Ditemuinya di lapangan bahwa kualitas fasilitas angkutan umum yang tersedia masih rendah dikarenakan kurang tegasnya penegakan hukum terhadap penyelenggara jasa angkutan umum untuk melakukan peremajaan terhadap usia angkutan lebih dari 10 tahun. Hal ini lah yang menjadi salah satu pemicu banyaknya moda angkutan umum mengalami penurunan performance dan pada akhirnya penumpang beralih kepada penggunaan kendaraan pribadi.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 131.281 unit dan pertumbuhannya setara dengan 7,5% pertahun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan perhitungan rata-rata, maka pertumbuhan perbulan mencapai kurang lebih 11.000 unit. Hal ini menyebabkan kemacetan dan penundanaan arus lalu lintas yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan dan menambah kesemrawutan kota. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, gas buang kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara pada kota-kota besar juga mengalami peningkatan dimana kontribusinya telah mencapai 60-70%.

## 1. Terminal Penumpang

Terminal penumpang di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 2 tipe yaitu tipe A (kewenangan pusat) sebanyak 1 terminal dan tipe B (kewenangan provinsi) sebanyak 6 terminal. Berikut merupakan sejumlah terminal yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan.



**Tabel 2.99** Data Terminal Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Tipe Terminal	Nama Terminal	Lokasi	Aksesibilitas
1	Terminal Tipe A	Gambut Barakat	Kab. Banjar	Sebagai titik simpul transportasi keluar masuk Wilayah Regional Kalimantan yang berfungsi melayani kendaraan umum antar kota antar provinsi (AKAP)
2	Terminal Tipe B	Terminal Km 6 Kayuh Baimbai	Kota Banjarmasin	Sebagai titik simpul akses menuju Pelabuhan Trisakti, Bandara Syamsudin Noor serta menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
3	Terminal Tipe B	Terminal Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu	Sebagai titik simpul akses menuju Pelabuhan Laut Batulicin, Pelabuhan Penyeberangan ke Kotabaru menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
4	Terminal Tipe B	Terminal Kotabaru	Kabupaten Kotabaru	Sebagai titik simpul akses menuju Tanah Bumbu- Tanah Laut- Banjarmasin dan menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
5	Terminal Tipe B	Terminal Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sebagai titik simpul akses menuju Tanjung – Barabai-Kandangan – Rantau – Martapura-Banjarmasin dan menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
6	Terminal Tipe B	Terminal Tabalong	Kabupaten Tabalong	Sebagai titik simpul akses menuju Paringin- Barabai- Kandangan- Rantau- Martapura- Banjarmasin dan menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan

Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Selatan, Tahun 2022

## 2. Bus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) merupakan layanan bus antar kota yang menghubungkan dua kota pada provinsi yang berbeda dengan menggunakan kendaraan bus umum dan terikat dengan trayek angkutan. Bus AKAP memiliki jadwal yang tetap, pelayanan yang cepat, dilayani oleh bus umum, tersedia terminal tipe A pada awal pemberangkatan, persinggahan dan terminal tujuan.





Sumber: BPTD XV Kalimantan Selatan, 2023

**Gambar 2.38** Bus AKAP Prov. Kalimantan Selatan

Trayek yang dilalui Bus AKAP sebagaimana tercantum pada tabel berikut.



**Tabel 2.100** Trayek dan Tarif Bus AKAP

No.	Perusahaan Otobus	Trayek	Kelas	Tarif (Rp)	Jumlah Armada	Ket.
1.	PT. DAMRI (Persero)	Terminal KM.17 Gambut Barakat – Terminal Batu Ampar – Terminal Samarinda Seberang (Via Batulicin)	Business	300.000	4 Unit	
2.	PO. Pulau Indah Motor Jaya	Terminal KM.17 Gambut Barakat – Terminal Batu Ampar – Terminal Samarinda Seberangan (Via Tanjung)	Business	300.000	24 Unit	
3.	PO. Samarinda LestariTransport	Terminal KM.17 Gambut Barakat – Terminal Batu Ampar – Terminal Samarinda	Business	300.000	17 Unit	



No.	Perusahaan Otobus	Trayek	Kelas	Tarif (Rp)	Jumlah Armada	Ket.	
		Seberangan (Via Tanjung)					
4.	PO. Bintang Mas Lestari Bersaudara	Terminal KM.17 Gambut Barakat – Terminal Batu Ampar – Terminal Samarinda Seberangan (Via Tanjung)	Business	300.000	7 Unit		
5.	PO. Yesso Travel	Terminal KM. 17 Gambut Barakat – Terminal WA. Gara (Palangkaraya)	Hiace 12	150.000			
			Execlent	150.000			
		Terminal KM.17 GambutBarakat – Sampit (Via Palangkaraya)	Execlent	270.000			
		Terminal KM.17 GambutBarakat – Pangkalan Bun	Hiace 12	380.000			
			Execlent	360.000			
Terminal KM.17 GambutBarakat - Lamandau	Execlent	450.000					
6.	PO. Logos Trijaya Sentosa	Terminal KM. 17 Gambut Barakat – Terminal WA. Gara	Economy	100.000			
			Terminal KM.17 Gambut Barakat – Sampit (Via Palangkaraya)	Economy	200.000		
			Terminal KM.17 Gambut Barakat – Sampit – PangkalanBun	Economy	250.000		
7.	PO. Yuliana Bersaudara Makmur Jaya	Terminal KM.17 Gambut Barakat – Muara Teweh	Economy	120.000			
		Terminal KM.17 Gambut Barakat – Tamiang Layang	Economy	80.000			
		Terminal KM.17 Gambut Barakat – Ampah	Economy	90.000			
		Terminal KM.17 Gambut Barakat – Kandui	Economy	110.000			
		Terminal KM.17 Gambut Barakat – Patas	Economy	110.000			

Sumber: BPTD XV Kalimantan Selatan, 2023



### 3. Bus Rapid Transit Banjarbakula

Bus Rapid Transit (BRT) merupakan sistem transit massal berbasis bus yang memberikan mobilitas cepat, nyaman dan berbiaya rendah dalam pelayanannya sebagai angkutan dalam perkotaan. BRT menggunakan jalur khusus dan pelayanan prima terhadap pengguna yang pada dasarnya adalah mengadaptasi karakteristik kinerja dan keandalan pelayanan dari sistem transit modern berbasis dengan biaya yang lebih rendah.

**Tabel 2.101** Koridor Pelayanan BRT Banjarbakula

No.	Koridor	Rute Koridor
1.	Koridor I	Km.0 Banjarmasin – Lambung Mangkurat – Jl. A. Yani – Terminal Km 6 Banjarmasin – Terminal Km 17 Gambut Barakat (Pulang Pergi)
2.	Koridor II	Terminal Km 17 Gambut Barakat – Jl. A. Yani – Terminal Banjarbaru (Pulang Pergi)
3.	Koridor III	Terminal Km 17 Gambut Barakat – Liang Anggang – Simpang 3 Trikora/A. Yani – Jl. Trikora – Simpang 3 Cempaka – Jl. Cempaka – Terminal Banjarbaru – Martapura (Pulang Pergi)
4.	Koridor IV	Handil Bakti Barito Kuala – Jl. Hasan Basri – Jl. Sultan Adam – Jl. Syarif Hidayatullah – Jl. Veteran – Jl. Pramuka – Terminal Km 6 Banjarmasin (Pulang Pergi)
5.	Koridor V	Terminal Km 17 Gambut Barakat – Liang Anggang – Jl. Gubernur Soebarjo – Pelabuhan Trisakti (Pulang Pergi)
6.	Koridor VI	Handil Bakti – Jl. Trans Kalimantan – Jl. (Banjarmasin – Marabahan) – Terminal Marabahan (Pulang Pergi)
7.	Koridor VII	Terminal Km. 17 Gambut Barakat – Liang Anggang – Jl. A. Yani – Bentok (Pulang Pergi)
8.	Koridor VIII	Bentok – Bati-Bati – Tambang Ulang – Pelaihari (Pulang Pergi)
9.	Koridor IX	Terminal Km. 17 Gambut Barakat – Bandara Syamsudin Noor (Pulang Pergi)

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Selatan, 2022

#### A. Angkutan Sungai dan Laut

Provinsi Kalimantan Selatan yang terkenal sebagai provinsi yang memiliki jumlah sungai yang banyak dan digunakan sebagai jalur transportasi sejak zaman dahulu hingga sekarang akan sangat memiliki kerawanan akan terjadinya kecelakaan di sungai. Pengawasan lalu lintas sungai dilakukan dalam rangka menciptakan kenyamanan dan kelancaran pengguna lalu transportasi sungai. Sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi : keselamatan kapal, pengawakan kapal, manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal; pemuatan, dan



status hukum kapal. Tetapi pada kenyataannya penegakan hukum terhadap pengawasan dan pengendalian lalulintas perairan sungai belum secara maksimal dilaksanakan, karena luasnya cakupan wilayah pengawasan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 7 pelabuhan yang beroperasi dengan 2 jenis pelabuhan yaitu pelabuhan sungai dan danau serta pelabuhan penyeberangan yang memiliki hirarki pelabuhan yaitu pengumpan. Lokasi pelabuhan tersebar di beberapa kabupaten/kota diantaranya Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berikut merupakan data eksisting pelabuhan yang status kepemilikan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

**Tabel 2.102** Data Eksisting Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Nama Pelabuhan	Lokasi Pelabuhan	Status Aset/ Kepemilikan	Operator	Kondisi Pelabuhan	Aktivitas di Pelabuhan
1	Negara	Kab. HSS	Kab. HSS	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
2	Dermaga Sungai di Lok Baintan	Kab. Banjar	Kab. Banjar	-	NA	NA
3	Dermaga Alalak	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
4	Dermaga Jelapat	Kab. Batola	Kab. Batola	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
5	Dermaga Banjarraya	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
6	Dermaga Saka Kajang	Kab. Batola	Kab. Batola	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
7	Pasar Baru	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	-	Baik	Penumpang&Barang

Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov/Kab/Kota, Tahun 2022

## B. Transportasi Angkutan Udara

Jumlah penumpang yang berangkat melalui bandara di Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2023 sebanyak 114.054 orang atau mengalami kenaikan sebesar 8,94 persen dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat bulan Februari 2023 yang berjumlah 104.691 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat pada bulan Maret 2022 yang mengangkut 95.129 orang, terjadi kenaikan sebesar 19,89 persen. Penumpang yang berangkat melalui Bandara Udara Syamsudin Noor pada bulan Maret 2023 sebanyak 110.710 orang, naik sebesar 9,09 persen dibandingkan



dengan jumlah penumpang bulan Februari 2023 yang mengangkut 101.482 orang. Pada Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru terdapat 1.878 orang penumpang yang berangkat, sedangkan di bulan sebelumnya sebanyak 1.686 orang. Pada Bandara Bersujud Batulicin jumlah penumpang yang berangkat sebanyak 1.466 orang, sedangkan jumlah penumpang pada bulan sebelumnya adalah sebanyak 1.523 orang. Bila dibandingkan dengan bulan Maret 2022, jumlah penumpang yang berangkat melalui Bandara Syamsudin Noor naik sebesar 21,85 persen, Bandara Gusti Syamsir Alam naik sebesar 53,68 persen, dan Bandara Bersujud Batulicin turun sebesar 51,97 persen

Jumlah penumpang yang datang melalui bandara di Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2023 terjadi kenaikan sebesar 6,52 persen, dimana jumlah penumpang yang datang pada bulan Maret 2023 sebanyak 111.308 orang sedangkan penumpang yang datang pada bulan Februari 2023 sebanyak 104.496 orang. Bila dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penumpang yang datang naik sebesar 19,30 persen, yang mana pada bulan tersebut penumpang yang datang sebanyak 93.299 orang. Penumpang yang datang di Bandara Udara Syamsudin Noor pada bulan Maret 2023 sebanyak 108.001 orang atau naik sebesar 6,53 persen dibandingkan dengan jumlah penumpang yang datang pada bulan Februari 2023 sebanyak 101.379 orang. Pada Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru, jumlah penumpang yang datang pada bulan Maret 2023 adalah sebanyak 1.748 orang, sedangkan pada bulan sebelumnya penumpang datang sebanyak 1.658 orang. Penumpang yang datang di Bandara Bersujud Batulicin, bulan Maret 2023 sebanyak 1.559 orang, sedangkan jumlah penumpang datang pada bulan Februari 2023 adalah sebanyak 1.459 orang. Bila dibandingkan dengan bulan Maret 2022, jumlah penumpang yang datang di Bandara Syamsudin Noor naik sebesar 21,46 persen, Bandara Gusti Syamsir Alam naik sebesar 36,78 persen, dan Bandara Bersujud turun sebesar 49,79 persen.

Jumlah barang yang dimuat melalui angkutan udara yang berangkat dari Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2023 sebanyak 504.776 kilogram. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 31,80 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 382.998 kilogram. Jika dibandingkan dengan bulan Maret 2022, jumlah barang yang dimuat melalui angkutan udara yang berangkat dari Kalimantan Selatan sebesar 418.999 kilogram, mengalami kenaikan sebesar 20,47 persen.



Jumlah barang yang dibongkar melalui angkutan udara yang datang di Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2023 sebanyak 1.841.268 kilogram. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 18,01 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebanyak 1.560.251 kilogram. Jika dibandingkan dengan bulan Maret 2022, jumlah barang yang dibongkar melalui angkutan udara yang datang di Kalimantan Selatan mengalami penurunan sebesar 3,75 persen.



**Gambar 2.39** Grafik Jumlah barang yang dibongkar melalui angkutan udara yang datang di Kalimantan Selatan s.d Maret Tahun 2023

Perkembangan R Transportasi | Angkutan Laut Jumlah penumpang angkutan laut antarpulau dalam negeri yang berangkat melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada bulan Maret 2023 sebanyak 12.460 orang, terjadi kenaikan sebesar 61,63 persen dibandingkan dengan penumpang yang berangkat pada bulan Februari 2023 yang berjumlah 7.709 orang. Pada bulan Maret 2023, penumpang yang datang melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebanyak 8.536 orang, naik sebesar 9,41 persen dibanding dengan penumpang yang datang pada bulan Februari 2023 yang berjumlah 7.802 orang. Jumlah barang yang dimuat di Pelabuhan Trisakti pada bulan Maret 2023 sebesar 5.253.964 ton atau naik sebesar 0,43 persen dibanding barang yang dimuat bulan Februari 2023 sebanyak 5.231.222 ton. Jumlah barang yang dimuat pada bulan Maret 2023 naik sebesar 13,87 persen jika dibandingkan dengan bulan Maret 2022 yang berjumlah 4.613.881 ton. Untuk barang yang dibongkar, pada bulan Maret 2023 terjadi kenaikan sebesar 13,76 persen, dimana jumlah barang yang dibongkar sebanyak



9.776.307 ton, sedang pada bulan Februari 2023 jumlah barang yang dibongkar sebanyak 8.594.008 ton. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu Maret 2022, terjadi kenaikan sebesar 13,41 persen, dimana pada bulan tersebut jumlah barang yang dibongkar sebanyak 8.620.256 ton.

### 2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

*Blank spot* merupakan kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tidak terlingkupi oleh sinyal komunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Bila suatu tempat terjadi *blank spot*, maka komunikasi dua arah menjadi terhambat.

Berdasarkan data sampai dengan tahun 2022 sebaran desa bebas *blank spot* dan desa *blank spot* sebagaimana tercantum pada Tabel 2.103, ada 10 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang masih memiliki desa *blank spot*. Area *blank spot* terbesar berada di Kabupaten Barito Kuala dengan jumlah desa *blank spot* mencapai 60 desa. Untuk Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tabalong secara keseluruhan sudah bebas *blank spot*.

**Tabel 2.103** Persebaran Desa Bebas *Blank Spot* dan Desa *Blank Spot*

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Desa Bebas Blankspot sd 2022	Desa Blankspot sd 2022
1	Kabupaten Tanah Laut	135	115	20
2	Kabupaten Hulu Sungai Utara	219	210	9
3	Kabupaten Tapin	126	120	6
4	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	144	128	16
5	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	161	140	21
6	Kabupaten Barito Kuala	201	141	60
7	Kabupaten Kotabaru	197	180	17
8	Kabupaten Tabalong	131	131	0
9	Kabupaten Tanah Bumbu	144	139	5
10	Kabupaten Banjar	277	251	26
11	Kabupaten Balangan	153	137	16
12	Kota Banjarmasin	52	52	0
13	Kota Banjarbaru	20	20	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.960</b>	<b>1.764</b>	<b>196</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

Dari data tersebut di atas untuk Kabupaten Tabalong, dari 131 Desa sudah terlayani jaringan Telekomunikasi, namun ada 7 desa yang masih tidak



terlayani Jaringan Internet (4G) yang artinya desa tersebut masih menggunakan jaringan 2G.

Peningkatan teknologi sistem telekomunikasi seluler melalui penempatan *Base Transceiver Station* (BTS) merupakan upaya dalam mengurangi *blank spot area* dan memaksimalkan cakupan area terlayani pada suatu wilayah. Jumlah BTS di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.104, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 1.675 unit BTS, meningkat pada tahun 2020 menjadi 1.716 unit BTS, dan pada tahun 2021 menjadi 1.853 unit BTS. Pada Tahun 2021 dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, jumlah unit BTS terbanyak tersebar di Kota Banjarmasin sebanyak 296 unit, sedangkan jumlah yang terkecil berada di Kabupaten Balangan dengan jumlah BTS sebanyak 55 unit.

**Tabel 2.104** Jumlah BTS di Provinsi Kalimantan Selatan s.d Tahun Terakhir 2021

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	2019	2020	2021
1	Kota Banjarmasin	114	179	296
2	Kota Banjarbaru	105	105	132
3	Kabupaten Barito Kuala	106	95	123
4	Kabupaten Banjar	254	254	254
5	Kabupaten Tapin	85	85	85
6	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	89	89	78
7	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	76	78	76
8	Kabupaten Hulu Sungai Utara	52	52	65
9	Kabupaten Balangan	52	52	55
10	Kabupaten Tabalong	244	244	244
11	Kabupaten Tanah Laut	202	187	204
12	Kabupaten Tanah Bumbu	163	163	158
13	Kabupaten Kotabaru	133	133	83
<b>TOTAL</b>		<b>1.675</b>	<b>1.716</b>	<b>1.853</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

Berdasarkan data kepemilikan akses internet di masyarakat, jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas internet dan pelanggan telepon kabel semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini merupakan dampak dari tingginya jumlah pengguna internet di masa sekarang dengan banyaknya usaha yang menggunakan jasa online.



Dalam hal penyediaan informasi penyelenggaraan daerah telah dilakukan monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah. Khusus untuk monitoring Opini telah dilakukan pengelolaan aduan masyarakat melalui sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat ( SP4N-LAPOR ) yang di Kalimantan Selatan lebih dikenal dengan istilah LAPORPAMAN.

Sedangkan dalam hal penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan melalui media komunikasi publik dan media layanan informasi publik yang tersedia antara lain: melalui Radio LPPL Abdi Persada FM , portal berita Media Center dan layanan PPID serta melalui media komunikasi luar ruang Videotron sebanyak 2 (dua) unit.

Informasi yang disebarluaskan terdiri dari informasi pembangunan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten/kota yang terkait dengan pemerintah provinsi, baik itu menyangkut pendidikan, sosial dan budaya, hukum, kriminalitas, ekonomi, pariwisata, olahraga dan kesehatan. Khusus untuk layanan PPID Informasi yang dikecualikan, informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat. Layanan PPID baru beroperasi pada tahun 2019 dikarenakan sebelumnya PPID melekat pada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga data informasi yang dihimpun dimulai sejak tahun 2019. Adapun media informasi Videotron baru dioperasikan dari tahun 2019 sedangkan tahun sebelumnya masih dalam tahap pemasangan dan penyesuaian, sehingga data informasi yang dihimpun dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat di akses.

### **2.3.2.10 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah**

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam mengembangkan dan memberdayakan perekonomian rakyat. Pada tahun 2022 jumlah koperasi di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2.943 unit yang sebagian besar merupakan jenis koperasi pegawai negeri (435 unit); koperasi serba usaha (507 unit); dan koperasi unit desa (300 unit). Jumlah koperasi mengalami peningkatan dari tahun 2018 – 2022 sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2.105.



**Tabel 2.105** Jumlah Unit Koperasi Menurut Jenis Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Jenis Koperasi	2018	2019	2020	2021	2022
Koperasi Unit Desa	385	385	384	385	300
Koperasi Pegawai Negeri	444	451	437	418	435
Koperasi Karyawan	214	212	207	202	230
Koperasi Industri Kerajinan	14	13	13	57	15
Koperasi Angkutan/ Darat/ Laut/Sungai	23	24	23	21	26
Koperasi Serba Usaha	489	497	503	526	507
Koperasi Generasi Muda/ Mahasiswa	27	30	28	2	29
Koperasi Veteran	11	10	10	8	9
Koperasi Wredatama	13	15	14	6	11
Koperasi Wanita	88	88	88	89	84
Koperasi Simpan Pinjam	70	73	75	73	88
Koperasi Jasa/Profesi	28	33	46	34	27
Koperasi Pasar	33	32	31	30	39
Koperasi Pondok Pesantren	68	68	67	64	66
Koperasi Pertanian	145	139	140	132	149
Koperasi Perikanan/Nelayan	15	19	21	17	29
Koperasi Perkebunan	58	62	62	64	79
Koperasi Peternakan	9	11	11	9	12
Koperasi Kehutanan	3	3	3	4	4
Koperasi Angkutan Darat	28	25	26	28	28
Koperasi Angkutan Laut	1	3	3	3	3
Koperasi Angkutan Udara	1	1	1	1	1
Koperasi Kepolisian	18	18	18	19	19
Koperasi Jamu Gendong				1	1
Koperasi PEPABRI	10	7	6	9	9
Koperasi Pertambangan	3	3	3	1	1
KJKS	59	58	62	61	61
Koperasi Produsen	28	29	30	-	-
Koperasi Konsumen	1	2	2	-	-
Koperasi Sekunder	25	25	25	13	13
Koperasi Lain-Lain	276	284	267	604	657
Koperasi Wisata	-	-	-	-	1
Koperasi Perumahan	-	-	-	-	1
Koperasi Pedagang Kaki Lima	-	-	-	-	3
Kop. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)	-	-	-	-	6
<b>Jumlah</b>	<b>2.587</b>	<b>2.620</b>	<b>2.606</b>	<b>2.892</b>	<b>2.943</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2023



Usaha mikro dan menengah di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yang tersebar di kabupaten/kota se Kalimantan Selatan meliputi Usaha Mikro sebanyak 328.567 Unit. Usaha Menengah sebanyak 2.839 Unit. dan Usaha Kecil sebanyak 33.222 Unit. Lebih lengkapnya diuraikan pada tabel dibawah Berikut:

**Tabel 2.106** Jumlah Jenis Usaha Mikro Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

NO	KABU- PATEN	KULINE R	FA- SION	PEN- DIDIKAN	OTO- MOTIF	AGRI- BISNIS	TEKNIK	BIDANG	JUMLAH
	KOTA						INTERN ET	LAINYA	
1	Tanah Laut	7.984	1.682	-	808	2.022	-	22.372	34.868
2	Kotabaru	625	586	15	118	1.305	-	5.543	8.192
3	Banjar	35.105	342	-	304	26.980	-	4.527	67.258
4	Barito Kuala	414	33	-	85	33.868	-	1.090	35.490
5	Tapin	3.551	400	-	45	200	5	4.805	9.006
6	H.S. Selatan	31.925	485	-	345	7.144	-	1.140	41.039
7	H.S. Tengah	6.759	1.139	-	527	7.699	-	9.829	25.953
8	H.S Utara	4.200	1.701	134	326	2.933	15	25.068	34.377
9	Tabalong	4.866	657	-	383	454	-	12.410	18.770
10	Tanah Bumbu	716	10	-	40	193	-	3.165	4.124
11	Balangan	2.292	-	-	178	677	-	5.062	8.209
12	Banjar- masin	7.984	2.985	1.099	1.884	3.456	1.885	11.938	31.231
13	Banjarbaru	3.127	1.743	133	1.513	714	97	2.723	10.050
	<b>Jumlah</b>	<b>109.548</b>	<b>11.763</b>	<b>1.381</b>	<b>6.556</b>	<b>87.645</b>	<b>2.002</b>	<b>109.672</b>	<b>328.567</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Tabel 2.107** Jumlah Jenis Usaha Menengah Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

No	Kabupaten Kota	Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	Teknik Internet	Bidang Lainya	Jumlah
1	Tanah Laut	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Barito Kuala	1	2	-	7	10	-	50	70
5	Tapin	-	-	-	-	-	-	-	-
6	H.S. Selatan	-	-	-	-	-	-	60	60
7	H.S. Tengah	-	104	-	-	-	-	44	148
8	H.S Utara	-	63	-	112	-	-	725	900
9	Tabalong	-	-	-	-	-	-	-	-



No	Kabupaten Kota	Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	Teknik Internet	Bidang Lainnya	Jumlah
10	Tanah Bumbu	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Balangan	-	-	-	-	10	-	8	18
12	Banjarmasin	98	148	49	99	279	48	922	1.643
13	Banjarbaru	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>317</b>	<b>49</b>	<b>218</b>	<b>299</b>	<b>48</b>	<b>1.809</b>	<b>2.839</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Tabel 2.108** Jumlah Jenis Usaha Kecil Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	Teknik Internet	Bidang Lainnya	Jumlah
1	Tanah Laut	-	-	-	30	-	-	1.000	1.030
2	Kotabaru	2	-	-	4	-	-	110	116
3	Banjar	10	5	-	3	69	1	160	248
4	Barito Kuala	15	20	-	35	200	-	222	492
5	Tapin	-	-	-	5	-	-	150	155
6	H.S. Selatan	118	45	2	70	-	-	17.926	18.161
7	H.S. Tengah	54	885	-	109	373	-	1.052	2.473
8	H.S. Utara	452	576	-	385	-	-	3.030	4.443
9	Tabalong	300	-	-	50	-	-	421	771
10	Tanah Bumbu	13	30	2	32	10	2	160	249
11	Balangan	60	6	-	17	12	3	30	130
12	Banjarmasin	819	260	74	409	373	223	2.008	4.166
13	Banjarbaru	70	21	27	83	85	18	484	788
	<b>Jumlah</b>	<b>1.913</b>	<b>1.848</b>	<b>107</b>	<b>1.232</b>	<b>1.122</b>	<b>247</b>	<b>26.753</b>	<b>33.222</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Tabel 2.109** Rekap Data UMKM Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Klasifikasi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Usaha Mikro	320.557	333.919	376.233	326.786	328.567
2	Usaha Kecil	13.524	20.090	32.533	33.222	33.222
3	Usaha Menengah	2.994	3.308	3.140	2.839	2.839
	<b>Total</b>	<b>337.075</b>	<b>357.317</b>	<b>411.906</b>	<b>364.868</b>	<b>366.650</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2023



**Tabel 2.110** Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Koperasi Aktif Per Tahun		66	66,81	57,81	58,21	59,7
2	Persentase Koperasi yang menyelenggarakan RAT		84	34,85	37,84	51,35	54,05
3	Persentase Penumbuhan Koperasi Baru		3	3,28	10,81	10,85	11,18
4	Persentase Peningkatan Nilai Bisnis Koperasi dan UK		6,93	3,56	4,91	1,20	1,22
5	Persentase Peningkatan Kemandirian (struktur) Permodalan Koperasi dan UK		93,63	72,97	88,74	0,25	0,30
6	Jumlah Koperasi dan UK yang memiliki Legalitas Usahanya	Unit	30	35	35	40	40
7	Jumlah Nilai Transaksi Promosi	Juta	360	750	0	0	650
8	Jumlah Usaha Kecil yang mampu mengakses Pasar Modern	Unit	20	25	20	20	25
9	Jumlah Jenis Produk Unggulan Koperasi dan UK yang mampu masuk ke Pasar Luar Daerah	Item	3	3	5	3	3

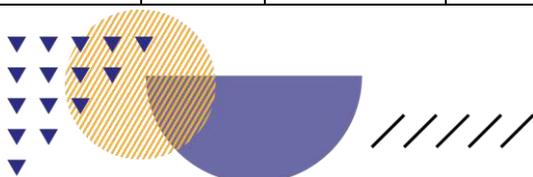
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2023

### 2.3.2.11 Penanaman Modal

Investasi dalam pengembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan masih sangat dibutuhkan dalam memberdayakan setiap sumber daya baik manusia maupun alam. Investasi berupa penanaman modal usaha di Provinsi Kalimantan Selatan sudah mulai merata di setiap kabupaten/kota meskipun masih terdapat beberapa kabupaten yang belum diminati investor secara umum. Berikut ini adalah data investasi daerah menurut kabupaten dan kota tahun 2022.

**Tabel 2.111** Jumlah Proyek, Rencana, dan Realisasi Investasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2022 PMA dan PMDN

Kab/Kota	PMA			PMDN		Total	
	Proyek	S\$ Ribu	Juta	Proyek	Juta	Proyek	Juta
Kab. Tabalong	57	551 446,16	38428,3	153	149686,7	210	188115,00
Kab. Balangan	38	553 228,10	38587,3	180	1683025,6	218	1721612,90
Kab. Barito Kuala	23	132 228,10	17694,4	428	306682,2	451	324376,60
Kab. Banjar	30	142 393,64	9922,9	78	457921,4	108	467844,30



Kab/Kota	PMA			PMDN		Total	
	Proyek	S\$ Ribu	Juta	Proyek	Juta	Proyek	Juta
Kab.Tanah Laut	10	87 005,50	6063,1	108	692282,4	118	698345,50
Kab.Hulu Sungai Selatan	-	-	-	28	198101,8	28	198101,80
Kota Banjarmasin	4	232,48	16,2	112	48873,9	116	48890,10
Kab.Tanah Bumbu	-	-	-	57	3666,5	57	3666,50
Kab. Tapin	22	207 086,31	14431,1	291	2997098,5	313	3011529,60
Kota Banjarbaru	51	808 487,68	56340,6	301	2222906,4	352	2279247,00
Kab.Kotabaru	17	253 914,66	17694,4	163	149686,7	180	167381,10
Kab.Hulu Sungai Tengah	35	70 530,28	4915	577	2040513,1	612	2045428,10
Kab. Hulu Sungai Utara	42	178 667,58	12450,7	301	467263	343	479713,70
TOTAL	329	2 985 720,20	208064,1	2777	12310392	3106	12518456,10

Sumber: BPS. Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka. 2023

### 2.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Kalimantan Selatan Terus Mantapkan Persiapan Atlet Menuju PON Papua Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat terus memantapkan persiapan para atlet yang akan dikirim untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua.

Selain terus menggenjot latihan para atlet dari berbagai cabang olahraga. Pemprov Kalimantan Selatan juga tengah menyiapkan alat-alat pertandingan yang akan digunakan atlet saat melakoni ajang olahraga bergengsi nasional tersebut. dan diharapkan agar Kalimantan Selatan Bisa meraih banyak gelar untuk mengharumkan nama baik Kalimantan Selatan di kanca level Nasional nantinya.

### 2.3.2.13 Statistik

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. menggambarkan bahwa peran statistik sangat penting dalam perencanaan. pelaksanaan. pemantauan dan evaluasi pembangunan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Data yang tepat akan sangat membantu dalam proses perencanaan pembangunan. Pada undang-undang ini juga dijelaskan bahwa tugas penyelenggaraan statistic dilakukan oleh Badan Pusat Statistik khususnya terkait dengan data dasar pembangunan.



Sementara dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 mendelegasikan data statistik kepada Pemerintah daerah. khususnya data Sektoral. Yang dimaksud dengan data sektoral adalah data yang diproduksi oleh pengampu urusan dan akan dimanfaatkan secara sektoral pula. sedangkan data dasar selain bersifat sektoral juga bersifat non sektoral. sehingga dengan demikian pemerintah daerah berkewajiban membangun data sectoral sesuai dengan kewenangan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014.

#### **2.3.2.14 Persandian**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. urusan persandian merupakan urusan pemerintah daerah wajib non pelayanan dasar. Artinya pemerintah provinsi memiliki kewajiban menyelenggarakan urusan ini sesuai dengan kewenangan. Salah satu kewenangan adalah pengamanan informasi pemerintah daerah. terlebih pada saat ini sistem informasi pemerintah daerah sudah bersifat paperless atau digital dan online yang dengan mudah diakses oleh siapa saja yang menguasai teknologi informasi.

Berdasarkan arahan Kepala Lembaga Sandi Negara (LSN) yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017. bahwa penyelenggaraan persandian merupakan penjabaran atas pelaksanaan kebijakan. program dan kegiatan di bidang persandian yang meliputi perencanaan. pelaksanaan. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. pembiayaan dan pembinaan serta pengawasan. Kalimantan Selatan dalam melaksanakan urusan persandian dikaitkan dengan penyelenggaraan komunikasi dan informasi daerah yang berkaitan dengan aplikasi informasi yang dikembangkan.

#### **2.3.2.15 Kebudayaan**

Dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kebudayaan harus dikembangkan kelembagaan kebudayaan sebagai pilar kebudayaan. Kelembagaan ini terkait dengan keberadaan unsur budaya yang ingin dikembangkan di Kalimantan Selatan melalui pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan kebudayaan lokal. Tujuan dari pembinaan ini adalah dalam rangka mengawal kebudayaan lokal dalam konstelasi kebudayaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah. Seni dan budaya turut menghiasi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Dari seni dan budaya tersebut berkembang nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat menangkal pengaruh buruk dari kebebasan yang pesat arus informasi yang global. Oleh karena itu pelestarian budaya serta nilai-



nilai luhur yang tercantum di dalamnya dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia Kalimantan Selatan.

### 2.3.2.16 Perpustakaan dan Kearsipan

#### A. Perpustakaan

Masih rendahnya minat baca masyarakat Kalimantan Selatan memerlukan upaya keras agar masyarakat memiliki daya saing sebagai tenaga kerja. Untuk mendorong minat baca diperlukan berbagai fasilitasi baik secara persuasif maupun atraktif kepada semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menginisiasi pembuatan aplikasi iKalsel pada tahun 2018 yang bertujuan untuk mendukung transformasi digital perpustakaan.

**Tabel 2.112** Berikut disajikan data terkait Indeks pembangunan literasi masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022	
	KALSEL	NASIONAL	KALSEL	NASIONAL
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	60,85	59,52	64,95	63,9

#### B. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di Kalimantan Selatan dikembangkan berdasarkan klasifikasi arsip. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan pengelolaan kearsipan, baik dari segi tenaga maupun teknologi peralatannya. Cakupan pelayanan kearsipan di lingkup instansi pemerintah dari tahun 2018 ke 2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Berikut merupakan capaian cakupan pelayanan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2016-2020.

**Tabel 2.113** Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Peningkatan Buku yang dipinjam	%	50,10	51,49	48,04	60.85	64.95
2	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan	%	24,81	29,51	10,25	58.13	75.71
3	Persentase SKPD yang mengelola Arsip berbasisi TIK	%	50	63,46	80,77	74,40	75.65
4	Jumlah Inovasi yang dicanangkan					1	1

Sumber: Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan. 2023



### 2.3.3 Layanan Urusan Pilihan

#### 2.3.3.1 Pertanian

- A. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi pertanian yang sangat besar sebagai modal dasar pergerakan roda perekonomian daerah. Potensi inilah yang menjadikan pertanian menjadi salah satu sektor dominan dalam pembentukan struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan dengan kontribusi PDRB 13,93% terhadap perekonomian daerah.
- B. Perlu digaris bawahi bahwa sektor pertanian memiliki keunggulan dalam mewujudkan sustainability development karena sektor tersebut merupakan sektor yang menggali potensi sumber daya alam terbarukan. Meskipun sekarang pertambangan dan penggalian mendominasi struktur perekonomian, namun sektor pertanian juga memiliki kekuatan yang tidak kalah besarnya dengan sektor pertambangan dan penggalian sehingga pergeseran sektor ekonomi dapat dilaksanakan dengan berkelanjutan.
- C. Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi terus meningkat seiring waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bidang pertanian mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor Pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar kedua yaitu 11,40% untuk Tahun 2022 setelah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 32,05% dan penyumbangan ketiga yaitu industri pengolahan yaitu 11,39% terhadap PDRB Kalimantan Selatan. Namun kondisi ini bebanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan petani.
- D. Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Luas Baku Sawah untuk Tahun 2019 seluas 291.145 hektar. Namun dalam pengelolaannya, petani memiliki tantangan dan hambatan tersendiri. Hal ini menjadi fokus utama dan terminologi melalui bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan kelembagaan ekonomi petani, efesensi usaha dan meningkatkan posisi tawar petani dari sub sektor hulu ke hilir.
- E. Salah satu konsep dan model pengembangan sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pengembangan *Food Estate* berbasis korporasi petani yang merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi melalui kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum baik itu berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. *Food Estate* sendiri menjadi salah satu program strategis pembangunan



pertanian nasional yang merupakan solusi atau upaya menuju kedaulatan dan kemandirian pangan, hal tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan impor sehingga ekonomi dapat tumbuh berkualitas dan masyarakat pertanian meningkat kesejahteraannya. Sejalan hal tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai provinsi penyangga pangan dan pertanian Ibu Kota Negara baru melalui pengembangan *food estate* berbasis korporasi petani sesuai model karakteristik daerahnya dengan mengangkat potensi sumber daya lokal dan unggul dalam rangka transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor pertanian.

## A. Sektor Pertanian

### i. Sub sektor Tanaman Pangan

Pertanian tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh tanaman padi baik ladang maupun sawah yang memiliki produksi mencapai 873.130 ton dengan produktivitas 38,72 kuintal/ha namun jika dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah produktivitasnya menurun sebesar 1,25 kuintal/ha. Rata-rata pertanian tanaman pangan ditahun 2022 mengalami jumlah penurunan produktivitasnya. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Tabel di bawah:

**Tabel 2.114** Luas Panen, Produksi, serta Produktivitas Padi dan Palawija Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2020-2022

Jenis Tanaman	2020			2021			2022		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)
Padi (sawah & ladang)	289.836	1.150.307	39,69	254.264	1.016.314	39,97	216.022	833.931	38,60
Jagung	61.474	337.493	54,90	44.868	264.168	58,88	25.123	149.432	58,88
Kedelai	1.763	2.285	13,02	487	852	17,5	6.963	11.902	17,50
Kacang Tanah	3.006	3.512	11,68	2.556	3.258	12,74	1.570	1.974	12,74
Kacang hijau	303	324	10,69	125	147	11,77	65	80	11,77
Ubi kayu	1.686	53.642	318,20	1.351	45.506	336,96	1.102	37.010	336,96
Ubi jalar	575	8.987	156,22	608	12.532	206,16	354	6.035	206,16

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalimantan Selatan. 2022



**Tabel 2.115** Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan

No	Uraian	Target (Jlh)	Capaian Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	PPH Tingkat Ketersediaan (Skor)	84,5	81,28	86,03	77,54	72,19	79,68	67,56

**Tabel 2.116** Skor Minimal Cadangan Pangan Pemerintah CPP Provinsi

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Stok CPP Provinsi						
	Beras (ton)	89,54	206,54	220,76	435,3	386,8	667,12

**Tabel 2.117** Skor Pola Pangan Tingkat Konsumsi

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	PPH Konsumsi	82,6	86,5	85,1	86,3	85,9	87,8

## ii. Sub Sektor Hortikultura

Pada sub sektor hortikultura, terdapat dua komoditas besar yakni komoditas buah-buahan dan sayuran. Pada komoditas buah-buahan prioritas adalah tanaman jeruk siam dengan produksi 177.716 ton; pisang dengan produksi sebanyak 109.558 ton; durian dengan produksi sebanyak 18.708 ton; dan nanas sebanyak 14.914 ton untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Tabel di bawah:

**Tabel 2.118** Produksi Delapan Komoditas Buah-buahan Utama di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2021 – 2022

Jenis Tanaman	2021			2022		
	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Jeruk siam	3.688	113.194	30,69	10.616	177.716	16,74
Pisang	1.198	65.500	13,58	3.909	109.558	28,03
Durian	2.122	28.825	13,58	2.937	18.708	6,37
Nanas	119,87	14.307	119,36	218,00	14.914	68,41

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalimantan Selatan 2022



Pada komoditas sayuran utama pada tahun 2022 yaitu bawang merah dengan produksi sebanyak 194 ton; Cabe Besar tahun 2022 dengan produksi 8.021 ton dan Cabe Rawit dengan Produksi 10.203 ton. dan petai dengan produksi 3.529 ton, untuk 4 (empat) komoditas tersebut diatas ada 3 (tiga) komoditas yang mengalami penurunan produksi jika dibandingkan dengan hasil produksi ditahun 2021 yakni komoditas bawang merah, cabe besar, dan cabe rawit. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut;

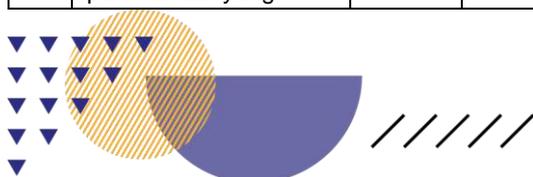
**Tabel 2.119** Produksi Komoditas Sayuran Utama di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2021 - 2022

Jenis Tanaman	2021			2022		
	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Bawang Merah	73	389	5,33	38	194	5,13
Cabe Besar	1.199	8.977	7,49	1.155	8.021	6,94
Cabe Rawit	2.070	11.758	5,68	2.219	10.203	4,60
Petai	592,94	3.294	5,56	921,62	3.529	3,83

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan 2022

**Tabel 2.120** Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018 - 2022 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022 (data Tw. III)
1	Beras (SIMTP)	Ton	1.597.646	1.454.026	1.372.639	1.224.454	1.081.885
2	Beras (KSA)	Ton	781358	790555	677105	601.330	516.612
3	LPE Pertanian Tanaman Pangan		2.08	5.99	3.25	-2,56	-2,11
4	Persentase Peningkatan Produksi Produktivitas Tanaman Pangan					0,68	5,13
5	Padi		-4.96	-6.39	-0.32	0,88	0,86
6	Jagung		-11.44	27.88	-14.49	0,78	0,57
7	Kedelai		-2.86	-5.09	-1.29	0,93	0,61
8	Persentase Peningkatan Produksi Produktivitas Hortikultura					0,37	13,97
9	Bawang Merah		-22.18	17.12	-14.65	-6,58	-19,10
10	Cabe		6.67	10.18	42.54	2,24	-3,75
11	Jeruk		12.07	-3.98	6.69	-14,63	-14,86
12	Persentase luasan pertanaman yang	%	N/A	N/A	N/A	2,5	2,17



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022 (data Tw. III)
	dapat dikendalikan akibat bencana alam						
13	Persentase Kelembagaan Penyuluhan yang Naik Kelas	%	N/A	N/A	N/A	3,48	3,6
14	Persentase SDM Pertanian yang berkualitas	%	N/A	N/A	N/A	1,36	1,38
15	Persentase Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian yang Diterapkan Oleh Petani	%	N/A	N/A	N/A	18,92	20,02

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Prov. Kalimantan Selatan 2022

### 2.3.3.2 Perkebunan

Perkebunan di Kalimantan Selatan meliputi perkebunan rakyat, perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta dengan luas seluruhnya meningkat dari 757.081 pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2022 dengan luas 756.827 hektar dengan rincian sebagaimana Tabel 2.121.

**Tabel 2.121** Luas Perkebunan dan Produksi Perkebunan berdasarkan Jenis Perkebunan di Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022

Jenis Perkebunan	Luas Tanaman Perkebunan		Produksi Tanaman Perkebunan Ton	
	2021	2022	2021	2022
Perkebunan Rakyat	410.423	410.169	478.918	476.366
Perkebunan Besar Negara (PTP)	19.270	19.270	26.670	26.670
Perkebunan Besar Swasta (PBS)	327.388	327.388	886.857	886.857
<b>JUMLAH</b>	<b>757.081</b>	<b>756.827</b>	<b>1.392.445</b>	<b>1.389.893</b>

Sumber: Dinas Perkebunan Dan Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2022

Pada sub sektor perkebunan dominasi tanaman kelapa sawit pada tahun 2022 masih tinggi yakni sebesar 1.148.790 ton mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2021 sebesar 1.145.590 ton; tanaman karet untuk tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 4.978 ton jika dibandingkan dengan tahun 2021; tanaman kelapa untuk tahun 2022 mengalami penurunan produksi sebanyak 631 ton jika dibandingkan dengan tahun 2021, dapat dilihat lebih jelasnya pada Tabel berikut.



**Tabel 2.122** Produksi Lima Komoditas Tertinggi Komoditas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2021 - 2022

Jenis Tanaman	2021			2022		
	Luas Tanam	Produksi	Produktivitas	Luas Tanam	Produksi	Produktivitas
	Ha	Ton	Ton/Ha	Ha	Ton	Ton/Ha
Kelapa Sawit	427.616	1.145.590	3.04	429.183	1.148.790	3.03
Karet	271.969	212.956	1.05	270.897	207.978	1.07
Kelapa	38.234	23.448	0.84	37.862	22.817	0.82
Kopi	2.685	1.021	0.58	2.521	1.043	0.62
Lada	487	147	0.49	436	137	0.50
Kemiri	3.430	1.607	0.54	3.448	1.653	0.56
Kayu Manis	2.802	2.804	1.44	2.816	2.856	1.45
Aren	2.333	1.678	1.18	2.301	1.613	1.14
Sagu/Rumbia	4.607	2.548	1.33	4.506	2.339	1.25
Purun	1.599	382	0.55	1.599	382	0.55
Kakao	422	58	0.45	363	65	0.49
Cengkeh	363	86	0.34	362	101	0.40

Sumber: Dinas Perkebunan Dan Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2022

Kebijakan nasional pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tanggal 22 Nopember 2019 berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2019-2024. Peraturan itu dimandatkan kepada 14 kementerian/lembaga (K/L) dan 26 provinsi penghasil sawit di seluruh Indonesia. Lima sasaran RAN KSB yakni: 1) peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, 2) penyelesaian status dan legalisasi lahan, 3) pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, 4) meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, dan 5) mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Inpres ini menjadi momentum penting untuk perbaikan tata kelola sawit oleh semua pihak. Inpres ini memberikan mandat di antaranya: penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa, serta percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Pemprov Kalsel telah menyusun RAD-KSB dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang RAD-KSB Provinsi Kalimantan Selatan 2022-2024 pada tahun ini sebagai upaya mewujudkan visi dan misi menjadikan Kalsel MAJU (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan misi nomor



dua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. penyusunan RAD-KSB Provinsi Kalsel menjadi prioritas Pemprov Kalsel sebagai salah satu provinsi penghasil sawit dengan luasan sebesar 497.261 hektare.

“Dengan luas tersebut, saat ini diusahakan oleh 89 perusahaan perkebunan besar swasta/negara serta perkebunan rakyat dengan luasan mencapai 106.000 hektare, di Kalsel terdapat 45 pabrik kelapa sawit dengan produksi CPO mencapai 1.561.147 ton per tahun, industri hilir berupa dua pabrik minyak goreng dengan kapasitas produksi 5.500 ton per hari dan dua pabrik biodisel dengan kapasitas produksi 2.500 ton per hari,” Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalsel dilakukan dengan mengimplementasikan regulasi serta menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan melakukan peningkatan industri hilir kelapa sawit agar tidak terbatas pada produk CPO.

Salah satunya memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha disektor perkelapa sawitan dengan meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan, dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan badan usaha dan meningkatkan kemitraan lainnya melalui integrasi ternak sapi potong dengan kelapa sawit guna mendukung swasembada sapi potong melalui SISKA dan SISKA KU INTIP

Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini telah menjadi penyokong PDRB utama dan diharapkan berkelanjutan. Aspek ekonomi yang telah dibangun perlu diarahkan untuk ikut serta dalam membangun perekonomian di Kalimantan Selatan. Sesuai amanat Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2019-2024 dan diturunkan melalui Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan atas Perda No.2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan akan menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Tahun 2022-2024.

### 2.3.3.3 **Peternakan**

Sub sektor peternakan masih menjadi sektor penting dalam peningkatan perekonomian daerah. Peran strategis sub sektor peternakan baik secara ekonomis maupun ekologis ini digambarkan melalui kontribusinya dalam



penyumbang PDRB yang termasuk dalam rumpun pertanian. Untuk sub sektor peternakan berdasarkan undang-undang No 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang semua undang-undang tersebut juga berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat peternak yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak. Pelaksanaan Program peternakan dilakukan dengan pendekatan ekonomis, pendekatan agribisnis dan pendekatan teknis. Dengan pendekatan ekonomis yaitu perbaikan tataniaga ternak dan produk ternak, mendorong insentif peternakan dan pemberdayaan peternak.

Belum optimalnya peningkatan produksi dan pengembangan hilirisasi potensi unggulan sub sektor Peternakan, yang memiliki potensi yang begitu besar sebagai salah satu leading sektor yang menjadi penggerak utama perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, perlunya upaya sejalan dengan arahan daerah yakni menitikberatkan pembangunan industri berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas (termasuk sub sektor peternakan).

Dalam rangka mewujudkan agenda besar tersebut, maka Provinsi Kalimantan Selatan perlu menyusun pola/rancang bangun sebagai haluan dalam pembangunan sub sektor peternakan dari hulu sampai hilir dengan komoditas ternak yang diunggulkan adalah kerbau, itik alabio dan sapi. Dalam hal ini dikembangkan Food Estate untuk komoditas ternak berbasis korporasi peternak yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam rangka sebagai daerah penyangga pangan untuk ibu kota negara yang baru melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Jenis ternak yang dominan, baik yang dipelihara, dipotong, maupun diproduksi daging adalah sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, dan itik. Informasi perkembangan jumlah populasi ternak besar dan kecil di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.123** Jumlah Ternak Besar, Ternak Kecil, dan Unggas (Ekor) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Ternak Besar	Jumlah Ternak Kecil	Jumlah Unggas
2018	197.456	89.170	119.247.723
2019	206.732	85.555	126.334.793
2020	167.801	85.796	127.703.306



Tahun	Jumlah Ternak Besar	Jumlah Ternak Kecil	Jumlah Unggas
2021	185.480	87.710	102.931.355
2022	187.181	75.024	126.515.989

Sumber: Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2022

**Tabel 2.124** Jumlah Produksi Telur (Kg) di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2018-2022

Tahun	Telur Itik	Telur Ayam Buras	Telur Ayam Ras
2018	29.245.681	7.924.743	85.061.393
2019	33.128.070	8.230.455	60.910.991
2020	34.941.465	9.257.095	69.719.607
2021	32.772.575	9.782.952	81.556.413
2022	31.581.744	7.969.190	26.850.963

Sumber: Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2022

**Tabel 2.125** Capaian Kinerja Urusan Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
1	Nilai Tukar Pekebun	%	135.82	109.14
2	Angka Produksi Karet	%	101.29	101.2
3	Angka Produksi Karet	Ton Sheet	204,263.61	198.338,40 (**)
4	Angka Produksi Kelapa Sawit	Ton CPO	1,119,408.52	1.117.675,35 (**)
5	Angka Produksi Daging	Ton	124,466.22	127.958,48 (**)
6	Produktivitas Tanaman Perkebunan per Hektar Per Tahun (Karet)	Kg/Ha	65.48	72.86
7	Luas Areal Pengendalian Penanggulangan Bencana	Ha	0	224
8	Prosentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan	%	100	100
9	Prosentase Peningkatan Produksi Daging	%	7	2.8
10	Prosentase Penurunan Kejadian Jumlah KAsus Penyakit Hewan Menular	%	70	80
11	Prosentase Unit Usaha yang Menghasilkan Produk ASUH	%	100	100
12	Prosentase Peningkatan Penguatan Kelembagaan Perkebunan dan Peternakan	%	8	10.83



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
13	Prosentase Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perkebunan dan Peternakan	%	90.85	100
14	Prosentase Penambahan Kemitraan Pemasaran Tanaman Perkebunan (Kelompok)	%	17.76	27.93
15	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	%	0	15
16	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan	%	0	49.42

Sumber : Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2022

### 2.3.3.4 Kelautan dan Perikanan

Secara umum sumber perikanan bisa dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat bisa dibedakan menjadi dua yaitu budidaya perikanan dan perairan umum. Perikanan darat tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan selatan. Untuk volume produksi perairan umum daratan di Kalimantan selatan tahun 2022 sebanyak 61,87 ribu ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 2,08 triliun. Pada tahun 2022, perikanan laut di Kalimantan selatan hanya terdapat 6 kabupaten/kota yaitu daerah yang berada di sepanjang pesisir pantai kabupaten/kota tersebut adalah Tanah Laut, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Banjarmasin. Tahun 2022 produksi perikanan laut tercatat sebanyak 140,72 ribu ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 4,68 Triliun.

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) tahun 2022 mengalami defisit, yaitu berada pada angka 98,27. Nilai ekspor perikanan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 25,90% dibanding capaian tahun 2019. Jika dilihat dari produksinya. baik jumlah rumah tangga perikanan. produksi maupun nilainya juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Capaian tertinggi berada pada tahun 2022 dimana jumlah rumah tangga perikanan mencapai 163.316 rumah tangga dengan produksi sebesar 358.261,39\*) ton dan nilai produksinya mencapai Rp 5.319.832.257.750



**Tabel 2.126** Perkembangan Jumlah Rumah Tangga. Produksi. dan Nilai Produksi Sub Sektor Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2010-2022

Tahun	Jumlah Ruta Unit	Produksi (Ton)	Nilai produksi (Rp)
2010	56.744	242.126,30	4.038.067.330
2011	60.919	247.741,10	4.581.337.731
2012	67.095	284.300,70	5.578.497.765
2013	67.191	339.437,28	6.376.406.906
2014	67.487	364.794,07	6.972.197.094
2015	67.980	368.451,70	7.954.889.861
2016	60.273	408.444,50	5.544.738.736
2017	66.435	412.326,10	5.571.503.232
2018	66.318	437.278,10	5.719.062.120
2019	66.532	434.765,00	5.870.300.000
2020 *)	127,799	451.598,51	6.856.223.371
2021	78,769	344.522,82	6.538.189.173
2022	163.316	358.261,39*)	5.319.832.257.750

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kalimantan Selatan 2022

**Tabel 2.127** Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Indek	7.93	5.01	4.30	3,48	5,59**)
2	Ikan (ton)	Ton	428.618.00	434.765.48	451.598.51	344522,82	358261,39*)
3	LPE Perikanan	Indek	7.93	5.01	4.30	2,04	0,11**)
4	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Ton	177852.20	178277.36	185179.81	148814,63	157009,39*)



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
5	Angka konsumsi Ikan masyarakat	Kg/Kapita/Thn	51.65	57.99	60.24	63,74	64,11*)
6	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Ton	250765.80	256488.12	266418.70	195708,19	201252*)
7	Persentase Pelaku Usaha yang Patuh		95.00	96.00	100.00	100	100
8	Jumlah Kasus Ilegal Fishing yang terjadi (usulan JFP tertangani)	Kasus	11.00	10.00	9.00	18	9

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kalimantan Selatan 2022

### 2.3.3.5 Kehutanan

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dimulai pada tahun 1967 yang didorong dengan diterbitkannya undang-undang tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), telah menempatkan sektor kehutanan di Kalimantan Selatan sebagai penggerak ekonomi nasional dan daerah. Pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut lebih banyak melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti IUPHHK HA atau lebih familiar dengan istilah HPH dan IUPHHK HT atau lebih familiar dengan HTI, hal ini sudah berlangsung sejak lama dimana masyarakat sekitar hutan hanya menjadi penonton saja. Sampai Tahun 2021 pengelolaan hutan oleh masyarakat sebagai salah satu potensi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, hanya seluas 58,021 ha melalui 144 pengelolaan/izin Perhutanan Sosial (PS) dari luas kawasan hutan Kalimantan Selatan 1.714.944,40 Ha Pemanfaatan hutan yang kurang mengikutsertakan peran serta masyarakat sekitar hutan sebagai pengelola berdampak pada banyaknya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan para pengusaha dan antara masyarakat dengan pemerintah yang bertanggung jawab mengelola kawasan hutan yakni instansi kehutanan baik pusat maupun daerah yang disebabkan oleh kecemburuan sosial. Kedepannya hal ini dapat diperbaiki dengan melalui pola Perhutanan Sosial baik itu dalam bentuk HKM, HR, HTR dan HD, dimana masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan pemanfaatan kawasan hutan untuk kesejahteraan mereka namun fungsi kawasan hutan masih



tetap terjaga dengan menghindari kerusakan yang dapat berdampak pada turunnya kualitas lingkungan kawasan hutan. Akar masalah yang menyebabkan masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, antara lain karena terbatasnya sumber daya manusia dan modal masyarakat dalam memanfaatkan dan mengembangkan usaha di sektor kehutanan secara lestari dan berkelanjutan.

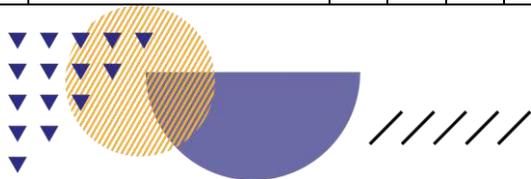


**Tabel 2.128** Rekapitulasi Produksi Kayu Bulat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

NO.	NAMA PERUSAHAAN	BULAN												TOTAL		Σ										
		JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL			AGUS		SEPT		OKT		NOP		DES	
		Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam		Tanaman	Alam								
(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	
I	IUPHHK-HA (HPH)																									
A.	Kabupaten Tabalong																									
1	PT. Aya Yayang Indonesia	-	5.511,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT. Hasnur Jaya Utama	-	238,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Kabupaten Kotabaru																									
1	PT. Inhutani II - HA (Pulau Laut)	-	-	-	-	-	-	-	20,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Kabupaten Tanah Bumbu																									
1	PT. Hutan Rindang Banua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	IUPHHK-TANAMAN (HTI/HTR)																									



NO.	NAMA PERUSAHAAN	BULAN																								TOTAL			K U M U L A T I V
		JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGUS		SEPT		OKT		NOP		DES		Tanaman	Alam	Jumlah	
		Tanaman	Alam	(m3)	(m3)																								
<b>A.</b>	<b>Kabupaten Tabalong</b>																												
1	PT. Aya Yayang Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT. Elbana Abadi Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PT. Hasnur Jaya Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Kabupaten Kotabaru</b>																												
1	PT. Inhutani II (Pulau Laut)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403,26	-	403,26	-	403,26	-
2	PT. Inhutani II Unit Senakin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C.</b>	<b>Kabupaten Tanah Bumbu</b>																												
1	PT. Inni Joa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT. Kirana Chatulistiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PT. Batulicin Bumi Bersujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PT. Jhonlin Agro Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PT. Hutan Rindang Banua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kelompok Tani Kepayang Karya Yaqin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Koperasi Produsen Kusan Raya Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D.</b>	<b>Kabupaten Tanah Laut</b>																												
1	PT. Inhutani III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>E.</b>	<b>Kabupaten Tapin</b>																												
1	PT. Dwima Intiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F.</b>	<b>Kabupaten Banjar</b>																												
1	PT. Prima Multibuana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



NO.	NAMA PERUSAHAAN	BULAN																				TOTAL		K U M U L A S I						
		JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGUS		SEPT		OKT		NOP			DES		Tanaman	Alam	Jumlah	
		Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam		(m3)	(m3)				
2	Koperasi Hutan Masyarakat Sejahtera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>III</b>	<b>IPK/IPPKH/HGU/PERORANGAN</b>																													
<b>A.</b>	<b>Kabupaten Tabalong</b>																													
1	PT. Adaro Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	PT. Adaro SK.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	PT. Eternal Ricwhay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B.</b>	<b>Kabupaten Kotabaru</b>																													
1	PT. Kalimantan Energi Lestari	-	-	-	-	-	111,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,02	111,02	-	
2	PT. Banjar Asri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	UD. Sarah Mulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	PHAT Abdul Basid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	PHAT BAIHAQI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	PT. Perkasa Bumi Sakti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	PT. Perkasa Bumi Sakti (HGU 242)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,99	172,99	-



NO.	NAMA PERUSAHAAN	BULAN																TOTAL		K U R .									
		JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGUS		SEPT			OKT		NOP		DES				
		Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam		Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam			
(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)				
8	PT. SILO (SK.652/2013)															183,78	.	.	.	.	.	.	.	.	.	183,78	183,78		
9	PT. SILO (SK.626/2018)															404,43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	404,43	404,43	
10	PT. Sumber Daya Energi	-	-	-	261,52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	265,55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	527,07	527,07	
11	PT. Pelsart Tambang Kencana (Eksplorasi SK. 146/21)																	98,19	.	.	.	.	.	.	.	.	98,19	98,19	
<b>C.</b>	<b>Kabupaten Tanah Bumbu</b>																												
1	CV. Hidup Hidayah Ilahi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	PT. Tunas Inti Abadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	PT. Borneo Indobara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	PT. Mitra Setia Tanah Bumbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	IPPKH PT. Borneo Indobara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	IPPKH PT. Borneo Indobara (SK No. 38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	IPPKH PT. Borneo Indobara (SK No. 64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



NO.	NAMA PERUSAHAAN	BULAN																TOTAL		K U M U L A T I V							
		JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGUS		SEPT			OKT		NOP		DES		
		Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam		Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Jumlah
(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)			
8	PPKH PT. Borneo Indobara (SK No. 346)						516,87							1.069,90												2.869,14	2.869,14
9	PPKH PT. Borneo Indobara (SK No. 345)																113,10		156,89		159,92				186,51	616,42	616,42
<b>D.</b>	<b>Kabupaten Tanah Laut</b>																										
1	CV. Faris Motor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT. Anugerah Lumbang Energi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PT. Wira Bara Sakti (SK.573-2018)																									135,79	135,79
<b>E.</b>	<b>Kabupaten Tapin</b>																										
1	PT. Binuang Mitra Bersama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT. Bhumi Rantau Energi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,74	-	-	-	-	-	-	11,74	11,74
3	IPPKH PT. Bhumi Rantau Energi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,91	304,91	





NO.	NAMA PERUSAHAAN	BULAN												TOTAL		K U M U L A S I													
		JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL			AGUS		SEPT		OKT		NOP		DES		Tanaman	Alam	Jumlah
		Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam		Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam	Tanaman	Alam					
4	IPPKH SK808 PT. Bhumi Rantau Energi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6,49	19.996,29
	<b>JUMLAH</b>	.	5.749,23	.	261,52	.	627,89	.	20,05	.	1.069,90	.	1.979,65	.	1.349,77	.	600,33	.	.	.	975,32	.	3.005,81	403	3.953,56	403,26	19.593,03	6,49	19.996,29



**Tabel 2.129** Daftar Rekapitulasi Laporan Bulanan Produksi IPHHK-IPHHK Di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

No	Jenis Produksi Kayu Olahan	Industri dengan Kapasitas Produksi > 6.000 m3/thn	Industri dengan Kapasitas Produksi < 6.000 m3/thn	Jumlah
1	Kayu Lapis dan atau Laminated Veneer Lumber	317.124,78	2.485,00	319.609,78
2	Veneer	50.171,31	139,63	50.310,94
3	Kayu Gergajian	1.461,96	66.169,12	67.631,08
4	Serpih Kayu	0,00	0,00	0,00
5	Pulp	0,00	0,00	0,00
6	Bare Core /Board	301,17	0,00	301,17
7	Lumber Core	0,00	0,00	0,00
8	Block Board	0,00	0,00	0,00
9	MDF	0,00	0,00	0,00
10	Moulding	1.674,29	0,00	1.674,29
11	Wood Working	0,00	0,00	0,00
12	Flooring / Parquet Flooring	0,00	0,00	0,00
13	Mebel	0,00	0,00	0,00
14	Particle Board	25.091,45	0,00	25.091,45
15	Secondary Process Plywood (Kayu Lapis)	3.940,87	0,00	3.940,87
16	Produk Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>399.765,83</b>	<b>68.793,75</b>	<b>468.559,58</b>

Sumber: Dinas Kehutanan Prov Kalsel, 2023

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

### 2.3.3.6 Energi dan Sumber Daya Alam

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi pertambangan yang didominasi oleh komoditas batubara, dimana sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi PDRB yang signifikan. Perkembangan produksi batubara PKP2B pada tahun 2020 sebesar 84,688,476.23 ton, sedangkan produksi batubara untuk IUP 63,186,892.03 ton.





**Tabel 2.130** Jumlah IUP di Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

No.	Kabupaten	IZIN USAHA PERTAMBANGAN						
		Batubara	Logam	Mineral Bukan Logam	Batuan	IUP PMA/Terbitan Pusat	Jumlah IUP PMDN	Total IUP/Kabupaten
1	Tabalong	17	0	1	9	2	27	29
2	Balangan	10	2	1	4	3	17	20
3	Hulu Sungai Selatan	2	0	0	3	0	5	5
4	Hulu Sungai Tengah	0	0	0	3	0	3	3
5	Tapin	14	1	0	6	0	21	21
6	Banjar	29	0	4	37	1	70	71
7	Barito Kuala	0	0	0	1	0	1	1
8	Tanah Laut	46	6	0	31	0	83	83
9	Tanah Bumbu	57	3	0	9	3	69	72
10	Kotabaru	25	4	9	16	3	54	57
JUMLAH			200	16	15	119	12	350

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2023

Perkembangan fasilitas listrik di Provinsi Kalimantan Selatan cukup signifikan dimana terlihat pada banyaknya pelanggan listrik yang terus mengalami peningkatan. Baik pelanggan rumah tangga, usaha, dan industri, maupun umum terjadi kenaikan yang cukup menjanjikan dimana jumlah pelanggan tahun 2018 sebanyak 1.183.771 pelanggan, dimana pada tahun 2022 jumlah pelanggan menjadi sebanyak 1.337.541 pelanggan. Perkembangan Jumlah Pelanggan listrik Kalimantan Selatan tahun 2018 - 2022 bisa dilihat di tabel di bawah.

**Tabel 2.131** Jumlah Peningkatan Pelanggan Listrik di Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2022

Jenis Pelanggan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Tangga [R]	1.086.302	1.142.557	1.192.400	-	1.294.105
Industri [I]	632	651	679	-	779
Bisnis [B]	55.840	57.433	59.733	-	68.688
Umum	-	-	47.298	-	52.940
Sosial [S]	32.617	35.520	-	-	-
Gedung dan kantor	5.439	5.696	-	-	-
Jalan umum	2.941	3.310	-	-	-
Jumlah	1.183.771	1.245.167	1.300.110	-	1.416.062

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2023





Listrik telah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap rumah tangga. Sampai saat ini pasokan listrik didapat dari perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan PLN terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah pelanggan PLN sebanyak 1.416.063 atau naik 3,26 persen dibanding tahun 2021.

**Tabel 2.132** Jumlah Pelanggan Listrik menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2018 - 2022

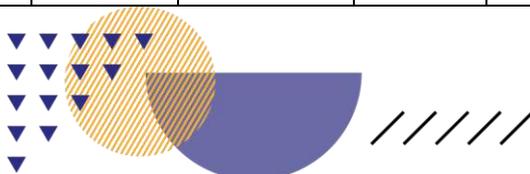
Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	73.478	77.326	80.788	85.016	88.727
Kotabaru	50.737	54.867	59.373	63.873	67.521
Banjar	119.522	129.321	132.370	147.198	144.500
Barito Kuala	91.570	97.060	101.210	106.879	110.715
Tapin	69.696	73.146	76.381	80.546	83.893
Hulu Sungai Selatan	65.731	69.145	72.022	74.714	77.124
Hulu Sungai Utara	80.949	84.504	87.482	91.459	93.915
Hulu Sungai Tengah	78.301	82.090	84.467	89.018	91.317
Tabalong	64.938	67.999	71.043	74.115	76.407
Tanah Bumbu	123.173	131.817	139.463	147.271	155.706
Balangan	30.485	32.138	33.995	35.739	37.095
Banjarmasin	208.444	215.125	221.301	228.792	235.527
Banjarbaru	126.747	133.762	140.215	146.710	153.615
Kalimantan Selatan	1.183.771	1.248.336	1.300.110	1.371.330	1.416.062

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan dalam Angka 2023

RKPD TAHUN 2024

**Tabel 2.133** Rasio Elektrifikasi (RE) Kalimantan Selatan s.d Desember 2022

No	Kab/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah RT	RT Berlistrik PLN	RT Berlistrik Non PLN	Jumlah RT Berlistrik
1	Kotabaru	21	202	90.720	89.522	3.480	93.002
2	Tanah Laut	11	135	102.672	102.672	1.253	103.925
3	Banjar	20	290	170.126	170.126	1.438	171.564
4	Barito Kuala	17	201	103.954	103.954	309	104.263
5	Tapin	12	135	60.138	60.138	454	60.138
6	HSS	11	148	68.224	68.224	154	68.378
7	HST	11	169	85.058	85.058	973	86.031
8	HSU	10	219	79.371	65.488	610	66.098
9	Tabalong	12	131	86.926	86.926	493	87.419
10	Tanah Bumbu	10	149	96.777	96.777	699	97.476
11	Balangan	8	157	36.710	34.618	501	35.119
12	Banjarmasin	5	52	200.413	200.413	-	200.413





No	Kab/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah RT	RT Berlistrik PLN	RT Berlistrik Non PLN	Jumlah RT Berlistrik
13	Banjarbaru	5	20	130.742	130.742	-	130.742
	JUMLAH			1.311.831	1.294.658	10.364	1.304.568
	RE						99.45%

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan 2023

**Tabel 2.134** Capaian Kinerja Urusan ESDM Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

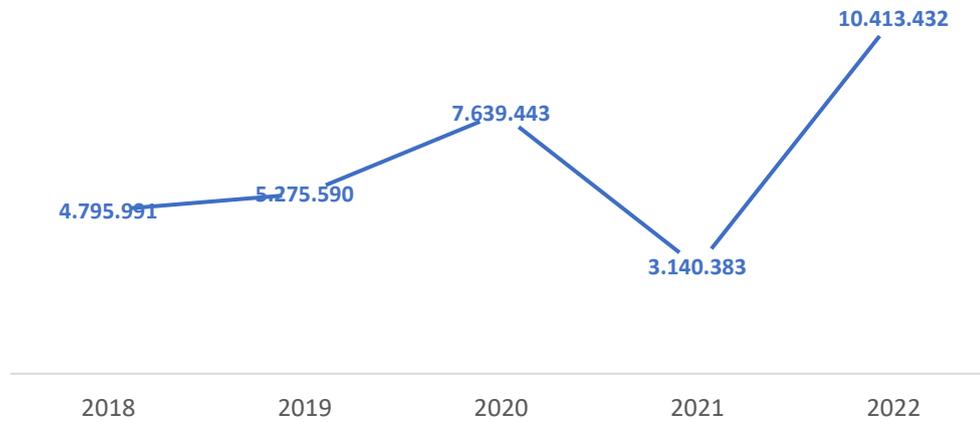
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Elektrifikasi	%	97.36	99.27	99.25	99,35	99,45
2	Rasio Desa Berlistrik	%	97.61	97.4	98.31	98,5	99,00
3	Persentase penurunan muka air tanah dan kualitas air tanah	%	3.32	7.74	16.48	0	0
4	Persentase potensi energi baru terbarukan yang dapat dimanfaatkan	%	83.33	71.4	71.4	0,97	0,97
5	Persentase luas lahan terganggu yang telah direklamasi (IUP)	%	100	44.21	77.11	0,96	0,96
6	Persentase luas lahan terganggu yang telah direvegetasi (IUP)	%	0	20.2	26.76	0	0

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan 2023

### 2.3.3.7 Pariwisata

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi obyek wisata yang layak untuk diperhitungkan sebagai daya tarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Kalimantan Selatan baik domestik maupun mancanegara mencapai 4.795.991 wisatawan dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 10.413.432.





**Gambar 2.40** Kunjungan Wisata di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. Kalimantan Selatan. 2022

**Tabel 2.135** Data Kunjungan Wisnus Wisman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	WISATAWAN NUSANTARA			WISATAWAN MANCANEGARA		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	KOTA BANJARMASIN	299.946	347.222	1.178.056	971	683	2.487
2	KOTA BANJARBARU	32.683	601.727	2.217.478	5.513	2.618	1.666
3	KABUPATEN BANJAR	5.494.048	559.071	2.104.383	260	-	1.063
4	KABUPATEN TAPIN	595.478	508.836	1.727.420	-	-	19
5	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	253.753	69.697	293.234	5	-	613
6	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	76.629	28.451	219.597	4	1	33
7	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	43.821	158.037	103.400	-	-	-
8	KABUPATEN BALANGAN	21.466	64.814	40.127	8	-	20
9	KABUPATEN TABALONG	60.765	-	3.092.902	131	-	44.754
10	KABUPATEN TANAH LAUT	330.241	23.752	567.506	4	-	8
11	KABUPATEN TANAH BUMBU	77.086	157.647	857.429	2	-	289
12	KABUPATEN KOTABARU	421.971	600.708	763.385	83	41	67
13	KABUPATEN BARITO KUALA	5.355	17.079	178.004	21	-	78
	<b>TOTAL</b>	<b>7.713.242</b>	<b>3.137.041</b>	<b>13.342.921</b>	<b>7.002</b>	<b>3.343</b>	<b>51.097</b>

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. Kalimantan Selatan. 2022





**Tabel 2.136** Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan Kunjungan Wisatawan (orang)	Orang	4.795.991	5.275.590	7.639.443	3140.383	10.413.432
2	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	Hari	4	4	3	3	3

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. Kalimantan Selatan, 2023



**Gambar 2.41** Perkembangan Rata-Rata Lama Menginap Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan

### 2.3.3.8 Perdagangan

Nilai ekspor menjadi salah satu pilihan menarik dalam menumbuhkan kembangkan perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus perekonomian nasional. Pada perkembangannya, komoditas produk tambang mendominasi ekspor di Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada tahun 2022 sebesar 11.792.755.235 ton dimana angka tersebut memiliki nilai ekspor sebesar US\$ 1.173.694.168. dan di sektor Kelapa Sawit juga berkontribusi sebesar 170.195.602 ton dimana angka tersebut memiliki nilai US\$ 126.301.388 untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel dibawah;





**Tabel 2.137** Volume dan Nilai Realisasi Ekspor Menurut Komoditas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Komoditas	Volume (Ton)	Nilai (000 US\$)
PRODUK TAMBANG	11.792.755.235	1.173.694.168
PRODUK KELAPA SAWIT	170.195.602	126.301.388
PRODUK KAYU	13.654.408	12.816.388
PRODUK LAINNYA	21.361.116	30.730.106
PRODUK KARET ALAM	6.400.738	8.793.605
PRODUK PERIKANAN	112.130	838.823
PRODUK ROTAN	233	5.604
<b>JUMLAH</b>	<b>12.004.479.462</b>	<b>1.353.180.082</b>

Sumber: BPS. Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka. 2022

**Tabel 2.138** Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	LPE Perdagangan	%	8,26	7,48	7,33	-3,38	7,15
2	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	10,21	10,01	10,60	10,52	9,06
3	Laju Inflasi Harga	%				2,55	6,99
4	Persentase Barang Beredar Yang Sesuai Dengan Ketentuan	%	80	65	81,01	106,00	100,00
5	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%				54,38	81,37

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan 2023

### 2.3.3.9 Industri

Perindustrian di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami perkembangan yang menunjukkan sisi positif dalam membentuk struktur perekonomian wilayah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian makro di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 cukup dominan dimana besarnya mencapai 6,23. Perkembangan sektor dikarenakan sejumlah potensi ekonomi yang berada di wilayah Kalimantan Selatan seperti sumber daya alam yang melimpah. sumber daya manusia. hingga investor yang menanamkan modalnya untuk kepentingan bersama.

Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan di dalam PDRB Kalimantan Selatan dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami fase naik turun dari





4.23 (2018) menjadi 6.23 (2021) dan menurun menjadi 2.56 (2022). untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.139** Perkembangan Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan	4,34	1,45	-3,63	6,23	3,31
Kontribusi terhadap PDRB (ADHB)	14.00	13.64	13.52	13.95	11.39

Sumber: BPS Kalimantan Selatan. 2022

**Tabel 2.140** Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5.12	4.08	-1.81	3.48	5.59
2	LPE Industri	%	4.34	1.45	-3.38	6.23	2,31
3	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	5.71	5.05	5.30	5.30	4.07
4	Persentase Pertumbuhan Sentra-Sentra industri	%	5	5	5	5	5
5	Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri	%	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Perindustrian Prov. Kalimantan Selatan 2023

### 2.3.3.10 Transmigrasi

Melalui program transmigrasi dapat mendukung tujuan pembangunan nasional dan daerah yakni pemerataan jumlah penduduk, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, program transmigrasi berperan dalam mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka melalui pembukaan lapangan kerja baru, yang umumnya pada sektor informal. Kalimantan Selatan memiliki lokasi transmigrasi yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten, yaitu Barito Kuala, Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Tapin, Balangan, dan Tabalong. Sedangkan lokus Prioritas Kawasan Transmigrasi Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan adalah di Kabupaten Barito Kuala, (Nama Kawasan: Cahaya Baru), dan Lokus Kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian, yaitu Kawasan Transmigrasi Gula Habang





(Kabupaten Balangan) dan Kawasan Transmigrasi Sebamban (Kabupaten Tanah Bumbu).

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1 Daya Saing Berdasarkan Pilar IDSD (BRIN)

Setiap wilayah di Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya yang menjadikan setiap daerah dapat berbeda dalam merencanakan pembangunannya. Terlebih lagi dalam hal daya saing daerah, dimana daya saing tersebut merupakan optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah terutama sumber daya baik alam maupun manusianya. Hal tersebut akan menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan tujuan pembangunan daerah sehingga akan tercapai tujuan pembangunan daerah yang hakiki. Terkait dengan aspek daya saing daerah diuraikan tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

Kerangka pengukuran IDSD 2022 mengacu kepada global Competitiveness index (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing seperti pada gambar di bawah ini. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasifikasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai kerangka konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Perincian dimensi dan indikator pembentuk daya saing diuraikan pada penjelasan pilar.

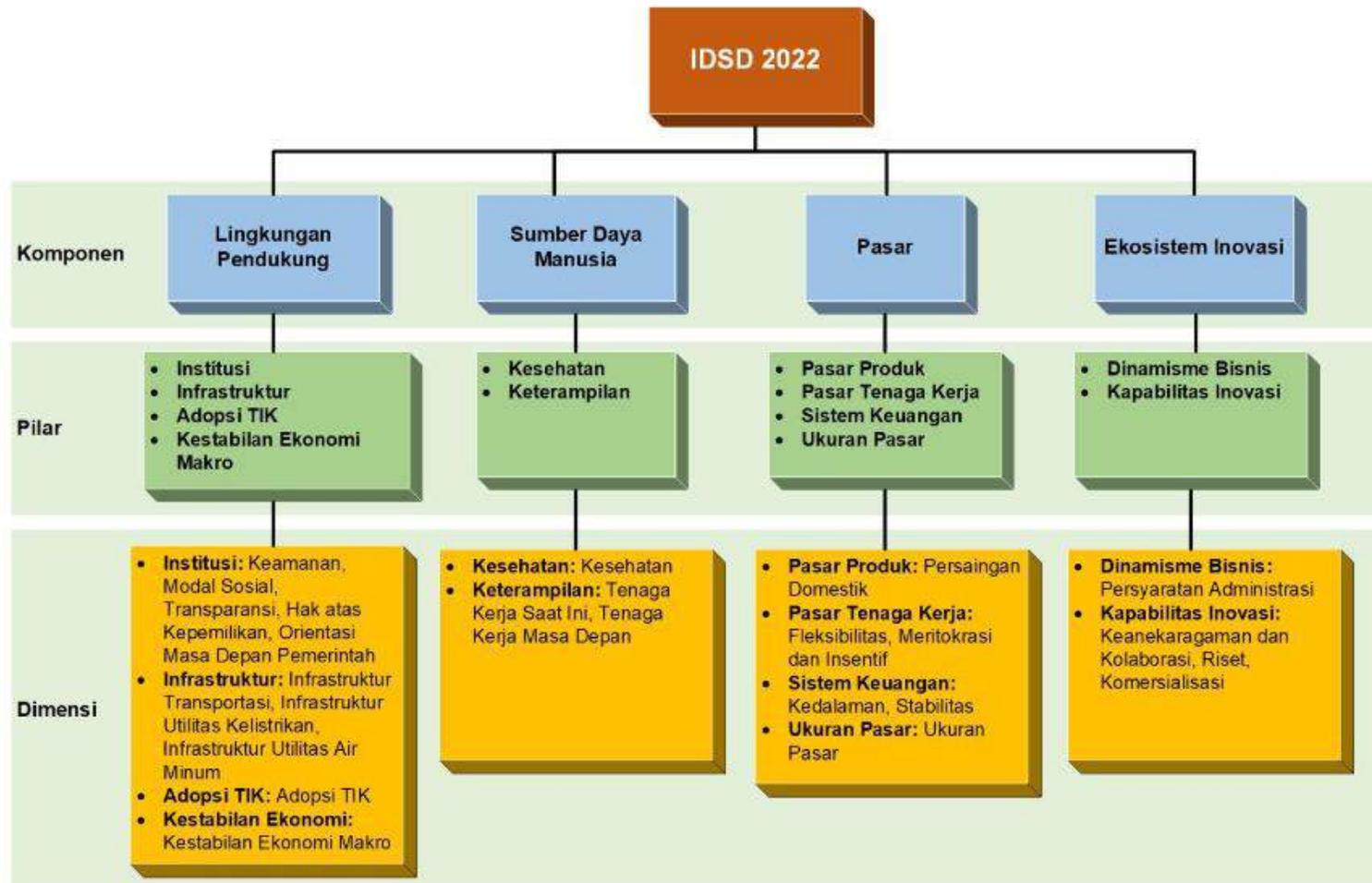
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD 2022 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran global competitiveness index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF), yang disesuaikan dengan





konteks daerah di Indonesia. Dengan kerangka ini, IDSD 2022 selaras dengan GCI sehingga bisa digunakan stakeholder global untuk mengukur GCI bagi Indonesia. Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2022 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.





Sumber: diadopsi dari *Global Competitiveness Index* (WEF, 2019)

Keterangan: Komponen dan dimensi tidak masuk dalam penghitungan indeks dan hanya merupakan pengelompokan yang digunakan untuk tujuan analisis.

**Gambar 2.42** Kerangka pengukuran IDSD 2022





Skor IDSD > 3,51 masih terpusat di Pulau Jawa. Beberapa provinsi dengan skor 3,00–3,51 tersebar di berbagai pulau.

### SKOR IDSD 2022-PROVINSI



SKOR IDSD 2022  
NASIONAL\*

3,26

14

PROVINSI

≥ skor nasional

\* Skor nasional adalah rata-rata skor IDSD provinsi

Gambar 2.43 Skor IDSD Nasional Tahun 2022





Sampai dengan tahun 2022 Skor IDSD Nasional adalah sebesar 3,26 dengan posisi skor Provinsi Kalimantan selatan berada dibawah capaian Rata-rata nasional yaitu sebesar 3,14

**Tabel 2.141** Capaian Indikator Pilar IDSD untuk Tahun 2022

NO	PILAR	KALIMANTAN SELATAN	NASIONAL	CAPAIAN
1	Institusi	4,40	4,14	Diatas Nasional
2	Infrastruktur	2,47	2,91	Dibawah Nasional
3	Adopsi TIK	3,97	3,57	Diatas Nasional
4	Stabilitas Ekonomi Makro	3,09	3,05	Diatas Nasional
5	Kesehatan	3,67	3,76	Dibawah Nasional
6	Keterampilan	3,66	3,73	Dibawah Nasional
7	Pasar Produk	2,68	2,68	Sama Dengan Nasional
8	Pasar Tenaga k Kerja	3,38	3,73	Dibawah Nasional
9	Sistem Keuangan	2,44	2,66	Dibawah Nasional
10	Ukuran Pasar	0,73	1,31	Dibawah Nasional
11	Dinamisme Bisnis	5,00	5,00	Sama Dengan Nasional
12	Kapabilitas Inovasi	2,19	2,62	Dibawah Nasional

Sumber: BRIN, 2022



**Gambar 2.44** Capaian Indikator Pilar IDSD untuk Tahun 2022





Berdasarkan data table dan grafik di atas terdapat beberapa komponen atau pilar IDSD yang capaiannya belum berada di atas rata-rata nasional, komponen itu antarlain:

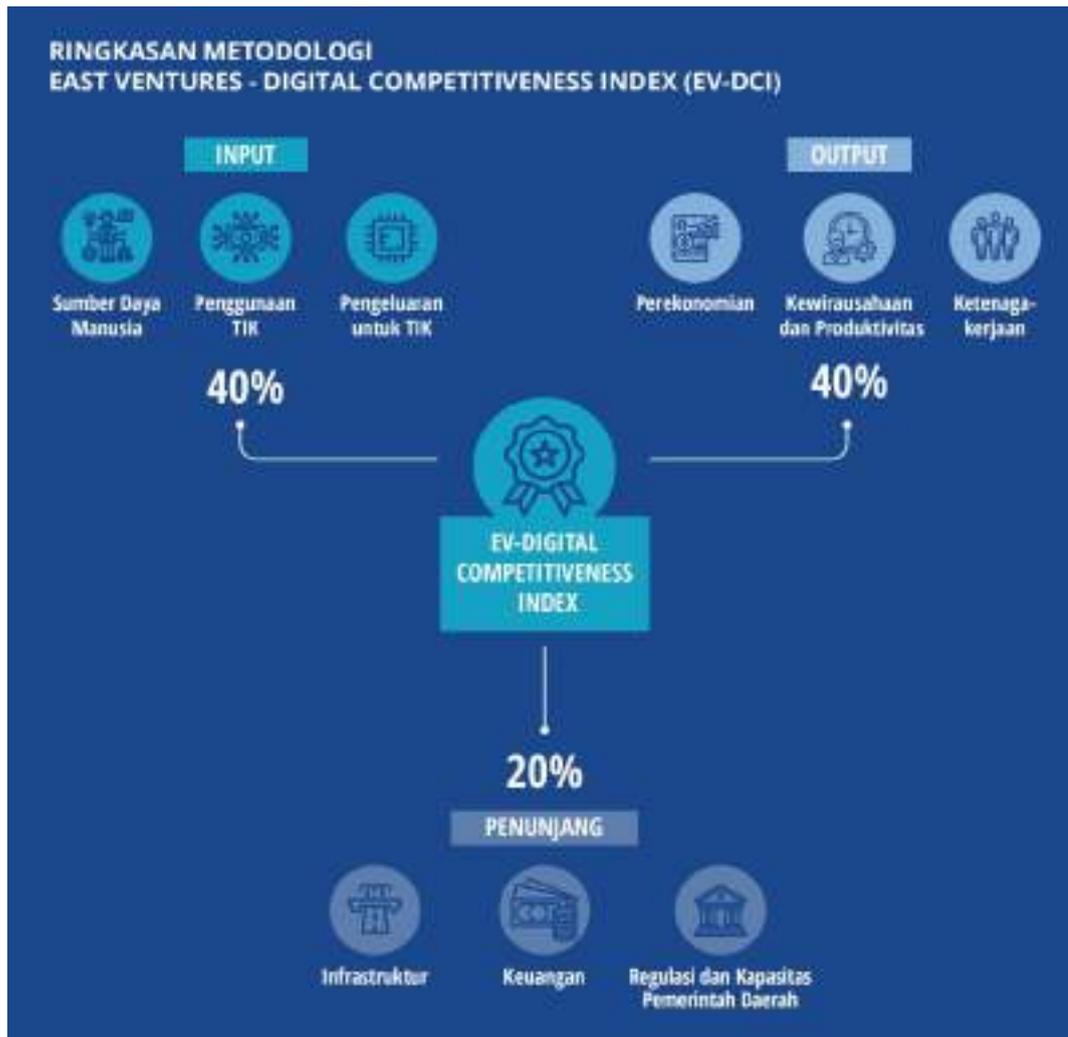
1. Infrastruktur
2. Kesehatan
3. Keterampilan
4. Pasar Tenaga Kerja
5. Sistem Keuangan
6. Ukuran Pasar
7. Kapabilitas Inovasi

Daya saing digital provinsi Indonesia dapat dilihat secara lebih detail melalui sub-indeks Input, Output, dan Penunjang. Secara umum sebaran skor lebih landai dan merata dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat dari nilai tengahnya, nilai tengah skor Input tidak mengalami perubahan (36,9), namun sebaran skor lebih merata akibat kesenjangan antar daerah semakin berkurang. Sementara nilai tengah skor Output dan Penunjang mengalami peningkatan masing-masing menjadi dari 26,9 menjadi 30,9 dan 39,1 menjadi 46,1.

Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat ke 15 pada tahun 2021 dan 2022 dengan nilai sub-indeks Input, Output, dan Penunjang sebagai berikut:

1. Input dengan komponen:
  - a. Sumber Daya Manusia
  - b. Penggunaan TIK
  - c. Pengeluaran untuk TIK
2. Output dengan komponen:
  - a. Perekonomian
  - b. Kewirausahaan dan Produktivitas
  - c. Ketenagakerjaan
3. Output dengan komponen:
  - a. Infrastruktur
  - b. Keuangan
  - c. Regulasi dan Kapasitas Pemda

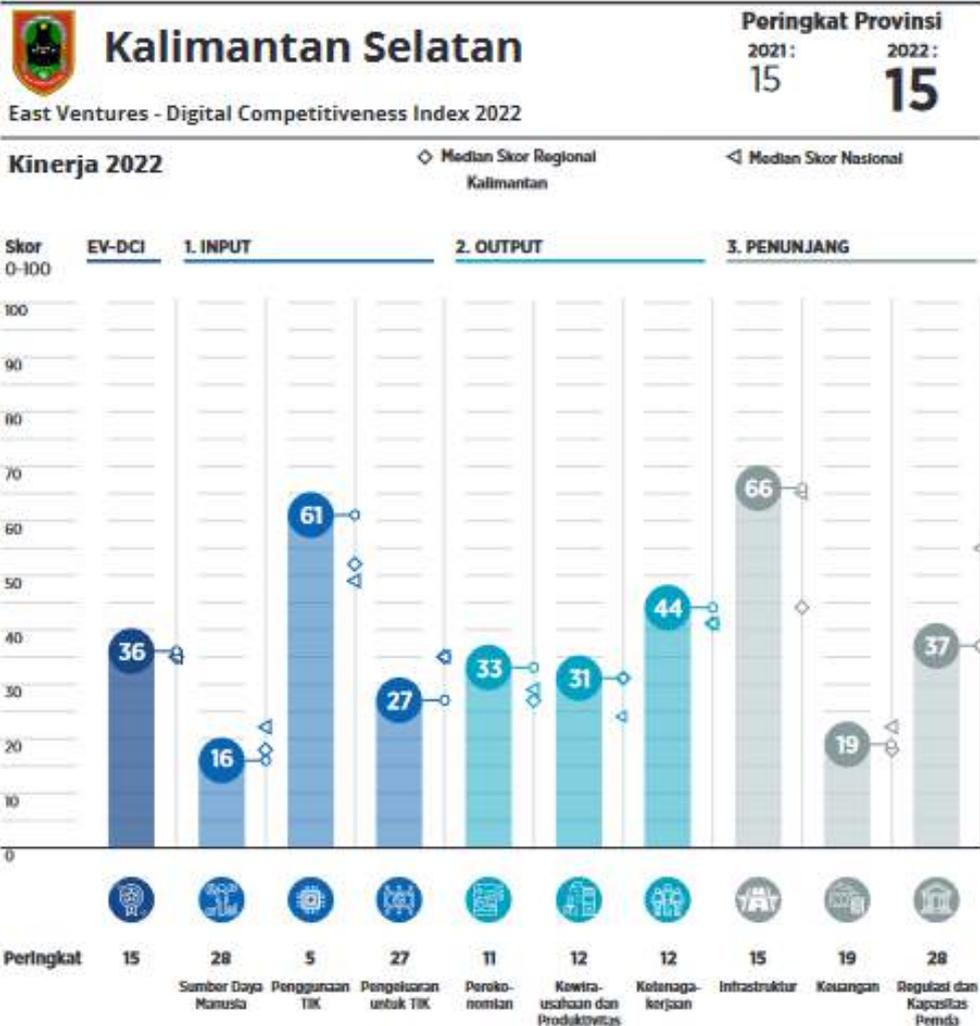




**RKPD TAHUN 2024**

**Gambar 2.45** Ringkasan Komponan EV-Digital Competitiveness Index 2022  
Sumber: East Ventures - Digital Competitiveness Index 2022





**Gambar 2.46** Ringkasan Komponen EV-Digital Competitiveness Index Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Sumber: East Ventures - Digital Competitiveness Index 2022

## 2.4.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah terkait dengan kapasitas ekonomi daerah dimana daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya tinjauan terhadap kemampuan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengetahui kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dimana semakin baik kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi pula daya saing daerah tersebut dengan daerah lain.





#### 2.4.2.1 Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

Di Provinsi Kalimantan Selatan pasca pandemi, pengeluaran konsumsi rumah tangga secara kontribusi tetap memberikan pengaruh yang besar dalam permintaan akhir di Kabupaten/Kota. Jika dilihat dari sisi nominal, nilai permintaan paling besar ada di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin merupakan wilayah administrasi tingkat II dengan jumlah penduduk terbanyak se-Kalimantan Selatan. Dari 4,18 juta jiwa penduduk Kalimantan Selatan, sekitar 15,96 persen atau 667 ribu lebih ada di Kota Banjarmasin. Pada tahun 2022 dengan penduduk berjumlah 667 ribu orang lebih tersebut, Kota Banjarmasin memerlukan barang dan jasa yang dikonsumsi untuk rumah tangga senilai hampir 23,37 triliun rupiah. Besaran konsumsi Kota Banjarmasin mengambil porsi sekitar 22 persen dari seluruh konsumsi Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Hal ini sangat beralasan karena hampir 16 persen penduduk Kalimantan Selatan berada di Kota Banjarmasin. Selanjutnya, nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga terbesar kedua adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Banjar yang mencapai 13,32 triliun rupiah. Seperti halnya di Banjarmasin, penduduk di Kabupaten Banjar juga sangat besar dan merupakan terbesar kedua di Kalimantan Selatan (13,87% penduduk Kalimantan Selatan ada di Kabupaten Banjar). Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga terkecil ada di Kabupaten Balangan yaitu sekitar 2,95 triliun rupiah. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga di kabupaten Balangan yang terkecil ini sejalan dengan jumlah penduduk Balangan yang juga terkecil se-Kalimantan Selatan.

Secara rata-rata pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,79 persen. Kabupaten Tabalong mengalami pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi se-Kalimantan Selatan. Dengan kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 21,1 persen terhadap PDRB Kabupaten Tabalong, komponen ini tumbuh sekitar 5,91 persen pada tahun 2022. Adapun pertumbuhan terendah adalah pada kabupaten Barito Kuala sebesar 3,76 persen dengan kontribusinya pada PDRB sebesar 68,5 persen.





#### 2.4.2.2 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Pada aspek kemampuan ekonomi daerah, salah satu indikator adalah pengeluaran rata-rata per kapita selama sebulan. Pengeluaran penduduk akan merepresentasikan pendapatan yang diterima dalam sebulan sehingga akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Pengeluaran rata-rata per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum mengalami kenaikan di setiap periodenya yang dikarenakan adanya berbagai hal seperti laju inflasi, peningkatan arus komoditas barang, hingga perubahan gaya hidup masyarakat.

#### 2.4.2.3 Nilai Tukar Petani

Nilai NTP gabungan di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 NTP gabungan adalah sebesar 107,27%, yang berarti bahwa petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi dan biaya produksi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Nilai ini lebih besar dari target nilai NTP RPJMD sebesar 102,23%. Hal tersebut karena nilai NTP tanaman perkebunan rakyat yang memberikan peningkatan nilai yang tinggi.

Peningkatan nilai NTP perkebunan ini disebabkan tingginya harga komoditas perkebunan terutama komoditas yang bernilai ekspor. Namun yang





menjadi permasalahan adalah NTP tanaman pangan yang semakin mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Susenas tahun 2013, hampir 72% rumah tangga tani Kalimantan Selatan, merupakan petani padi. Sementara sisanya, tersebar pada usaha perkebunan (45,4%), peternakan (28,52%), dan hortikultura (24,75%). Sehingga sub sektor tanaman pangan perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan NTP ini.



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan, 2023

**Gambar 2.47** Perkembangan Nilai Tukar Petani Kalimantan Selatan s.d Mei Tahun 2023

**Tabel 2.142** Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi di Pulau Kalimantan dan Indonesia Tahun 2021-2022

No.	Provinsi	NTP (%)	
		2021	2022
1.	Kalimantan Barat	128,68	141,34
2.	Kalimantan Tengah	118,53	121,60
3.	Kalimantan Selatan	107,59	107,33
4.	Kalimantan Timur	120,94	126,03
5.	Kalimantan Utara	105,85	109,00
	Indonesia	104,64	107,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023





Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) digunakan untuk melihat tingkat keekonomian usaha pertanian di perdesaan pada bulan dan tahun tertentu dibandingkan dengan tahun dasarnya. NTUP adalah perbandingan atau rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), yang dinyatakan dalam persentase, dimana pada penghitungan NTUP hanya menggunakan Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebagai komponen Ib.

Secara konseptual NTUP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. NTUP diharapkan lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksi dan penambahan barang modalnya. Nilai NTUP gabungan di Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Pada bulan April 2023 NTUP subsector Kalimantan Selatan adalah sebesar 108,28 sedangkan pada bulan Mei 2023 NTUP subsector Kalimantan Selatan adalah sebesar 107,35 .



**Gambar 2.48** Grafik Perkembangan NTUP Provinsi Kalimantan Selatan s.d Mei Tahun 2023

NTP Kalimantan Selatan sampai dengan Bulan Mei 2023 sebesar 107,27, angka ini menunjukkan petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika tingkat rata-rata harga yang diterima mengalami kenaikan





yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayar untuk konsumsi rumahtangga dan biaya produksi terhadap tahun dasar atau NTP di atas 100.

Pada Mei 2023, nilai Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan sebesar 0,85 persen yang disebabkan oleh kenaikan indeks pada beberapa kelompok pengeluaran khususnya kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Kalimantan Selatan Mei 2023 sebesar 107,35. Nilai ini dapat diartikan bahwa untuk kegiatan usaha pertanian yang dilakukan petani mengalami kenaikan ketika rata-rata harga yang diterima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayar untuk biaya produksi, berarti kegiatan usaha yang dilakukan petani memberikan keuntungan.

#### 2.4.2.4 Perkembangan Impor

Komoditi impor dengan volume dan nilai tertinggi pada tahun 2022 adalah bahan bakar mineral dalam hal ini bahan bakar minyak (BBM), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 46,81%. Peningkatan volume impor yang tinggi juga pada komoditi pupuk sebesar 316,66%.

**Tabel 2.143** Perkembangan impor 10 komoditi dengan volume tertinggi di Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022

No	Komoditi	Volume (Ton)	
		2021	2022
1.	Bahan bakar mineral	723.789.958	1.360.973.391
2.	Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya	4.384.624	12.847.388
3.	Pupuk	7.920.000	33.000.000
4.	Mesin dan peralatan elektris serta bagiannya	471.392	3.686.163
5.	Kapal, perahu dan struktur terapung	1.354.000	2.812.490
6.	Bahan kimia organik	17.116.625	10.200.689
7.	Plastik dan barang dari plastik	205.995	496.479
8.	Berbagai produk kimia	4.839.434	4.581.950
9.	Garam, belerang, batu dan semen	79.680.000	57.547.668
10.	Kendaraan dan bagiannya	906.420	1.228.526

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023





#### 2.4.2.5 Perkembangan Sektor Energi

Sampai dengan Tahun 2022 Rasio elektrifikasi wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mencapai 85,95 persen dengan rasio desa berlistrik yang mencapai 100 persen. Pencapaian elektrifikasi di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah cukup tinggi, tetapi kami terus berupaya persentasenya semakin meningkat dan masyarakat terlayani listrik.

Rasio elektrifikasi di Kalimantan Selatan mencapai 93,86 persen dengan rasio desa berlistrik telah mencapai 96,67 persen dan sebanyak 1.942 desa sudah berlistrik PLN dari 2.009 desa di Kalimantan Selatan. Sementara itu, rasio elektrifikasi di provinsi Kalimantan Tengah mencapai 83,11 persen dengan rasio desa berlistrik sebesar 60,69 persen dan sebanyak 953 desa sudah berlistrik PLN.

Jumlah desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.572 desa dan 953 desa sudah berlistrik PLN, sedangkan 619 desa lain berlistrik Non-PLN. Perlu terus diupayakan mewujudkan ketersediaan listrik untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

#### 2.4.2.6 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang bulan Maret 2023 terjadi penurunan dari bulan sebelumnya. TPK bulan Maret 2023 sebesar 51,43 persen atau turun 0,43 poin dibanding TPK bulan Februari 2023 yang sebesar 51,86 persen. Apabila dibandingkan dengan TPK pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Maret 2022 yang sebesar 46,85 persen, terjadi kenaikan sebesar 4,58 poin. Berdasarkan klasifikasi hotel bintang, pada bulan Maret 2023, TPK tertinggi dicapai oleh kelompok hotel bintang 4, yaitu sebesar 60,32 persen, sedangkan TPK terendah terjadi pada hotel bintang 1 sebesar 23,54 persen. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, klasifikasi hotel bintang 4 naik sebesar 6,41 poin, klasifikasi hotel bintang 3 naik sebesar 3,31 poin, klasifikasi hotel bintang 2 naik sebesar 15,13 poin, dan klasifikasi bintang 1 turun sebesar 5,30 poin.

TPK hotel non bintang pada bulan Maret 2023 juga turun jika dibandingkan dengan bulan Februari 2023. TPK hotel non bintang pada bulan Maret 2023 sebesar 22,92 persen atau turun 1,64 poin dibandingkan TPK bulan Februari 2023 yang sebesar 24,56 persen. Dibandingkan dengan TPK pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu bulan Maret 2022 yang sebesar 22,59





persen, TPK bulan Maret 2023 naik sebesar 0,33 poin (lihat Tabel 2). TPK tertinggi pada hotel non bintang bulan Maret 2023 dicapai oleh kelompok hotel dengan jumlah kamar 25 - 40 yaitu sebesar 26,19 persen, sedangkan TPK terendah terjadi pada kelompok jumlah kamar < 10 sebesar 19,90 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya pada bulan yang sama, TPK kelompok hotel dengan jumlah kamar 41 - 100 turun 11,96 poin, kelompok dengan jumlah kamar 25 - 40 naik 4,12 poin, kelompok dengan jumlah kamar 10 - 24 naik 0,25 poin, dan kelompok dengan jumlah kamar < 10 turun sebesar 3,06 poin.

Rata-Rata Lama Menginap (RLM) tamu asing dan dalam negeri hotel berbintang di Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2023 adalah sebesar 1,61 malam, yang mengalami kenaikan sebesar 0,08 poin jika dibandingkan bulan Februari 2023 yang sebesar 1,53 malam. Dilihat dari klasifikasi hotel, RLM tertinggi terjadi pada hotel berbintang 4 selama 1,83 malam, dan terendah terjadi pada hotel berbintang 1 selama 1,06 malam. Dilihat dari jenis tamu yang menginap, rata-rata lama menginap tamu asing di hotel berbintang pada bulan Maret 2023 lebih tinggi dibanding tamu dalam negeri, masing-masing selama 2,08 malam untuk tamu asing dan 1,61 malam untuk tamu dalam negeri (domestik).

Rata-Rata Lama Menginap (RLM) tamu asing dan dalam negeri pada hotel non bintang untuk bulan Maret 2023 adalah 1,15 malam, atau naik 0,01 poin dibandingkan keadaan bulan Februari 2023 yang sebesar 1,14 malam. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu (Maret 2022) RLM bulan Maret 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin, dimana pada periode tersebut RLM sebesar 1,10 malam. Dilihat dari kelompok kamar, RLM tertinggi pada hotel non bintang terjadi pada kelompok hotel dengan jumlah kamar 25 - 40 selama 1,26 malam dan yang terendah terjadi pada kelompok jumlah kamar < 10 selama 1,02 malam. Berdasarkan jenis tamu yang menginap, pada bulan Maret 2023, rata-rata lama menginap tamu dalam negeri sebesar 1,15 malam dan rata-rata lama menginap tamu asing sebesar 1,00 malam.

## 2.4.3 Fokus Iklim Investasi dan Pelayanan Publik

### 2.4.3.1 Investasi

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi suatu wilayah. Dalam kaitan ini, investasi yang dimaksud terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam





konteks PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada besaran nilai komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

Komponen pembentukan modal tetap bruto terdiri dari PMTB bangunan dan nonbangunan. Subkomponen bangunan mendominasi PMTB pada tiap Kabupaten/ Kota. Komponen penyumbang pembentukan modal tetap bruto bangunan adalah output kategori konstruksi pada PDRB Lapangan usaha. Sekitar 80 persen nilai PMTB berupa output dari konstruksi. Output kategori konstruksi bisa dihasilkan oleh pemerintah, rumah tangga maupun swasta. Output yang berasal dari pemerintah dapat dilihat pada pos belanja modal di APBD maupun APBN.

Dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin merupakan wilayah yang memiliki nilai PMTB terbesar dengan nominal 11,21 triliun rupiah. Hal ini wajar, jika dihubungkan dengan status Banjarmasin sebagai ibukota. Kegiatan pembangunan yang ada tidak hanya bersumber dari pemerintah, namun termasuk pula dari swasta. Di sisi lain, Banjarmasin juga memiliki jumlah penduduk paling besar, pastinya juga memerlukan bangunan perumahan yang paling banyak (rumah tinggal). Rumah tinggal merupakan komponen pembentuk PMTB bangunan dari sektor rumah tangga. Pertumbuhan Komponen di Banjarmasin ini mencapai 4,84 persen.

Selain berupa bangunan, PMTB juga memuat barang-barang modal yang bukan bangunan. Beberapa yang tercakup dalam barang modal non bangunan yaitu mesin perlengkapan, kendaraan, hewan dan tanaman yang menghasilkan berulang. Serupa dengan subkomponen bangunan, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan juga mengalami peningkatan pada tahun 2022 untuk subkomponen non bangunan.

#### 2.4.3.2 Kriminalitas

Data kriminal akan menjadi tolok ukur dan acuan publik dalam menilai tingkat keamanan suatu wilayah. Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan





papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

#### 2.4.3.3 Pelayanan Publik

hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 ada Lima pemerintah daerah di Kalsel yang masuk zona hijau dengan kategori kualitas tinggi (nilai 78,00 sampai 87,99), yaitu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (86,61), Pemerintah Kota Banjarbaru (84,74), Pemkab Tanah Bumbu (84,57), Pemkab Balangan (80,78), dan Pemkab Tabalong (79,36).

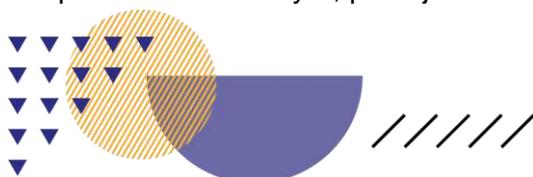
Adapun kategori pelayanan publik berkualitas sedang (54,00-77,99) atau berzona kuning, yakni Pemprov Kalsel, Pemkot Banjarmasin, Pemkab Banjar, Pemkab Barito Kuala, Pemkab Tapin, Pemkab Hulu Sungai Selatan, Pemkab Hulu Sungai Tengah, Pemkab Hulu Sungai Utara, dan Pemkab Kotabaru.

#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

##### 2.4.4.1 Ketenagakerjaan

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian (30,13 persen); Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi (27,52 persen); dan Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan (17,37 persen). Pola distribusi lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Februari 2022. Ada tiga lapangan pekerjaan utama yang mengalami peningkatan terbesar yaitu Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi (1,72 persen poin), Sektor Pertambangan (0,53 persen poin), dan Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan (0,31 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar adalah Sektor Industri (-1,77 persen poin); Konstruksi (-0,93 persen poin) serta sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (-0,23 persen poin).

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada





Februari 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,18 juta orang (56,80 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 0,90 juta orang (43,20 persen). Dibandingkan Februari 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,45 persen poin.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 43,99 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 12,42 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Februari 2021 dan Februari 2022. Dibandingkan dengan Februari 2022, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah mengalami peningkatan sebesar 2,53 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMA sederajat, SMP sederajat dan Diploma/Universitas mengalami penurunan persentase yakni masing-masing sebesar 1,59 persen poin, 0,59 persen poin dan 0,36 persen poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2023 sebesar 3,95 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada Februari 2023 TPT mengalami penurunan sebesar 0,25 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022. Pada Februari 2023, TPT laki-laki sebesar 4,16 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,62 persen. TPT laki-laki dan TPT perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,31 persen poin dan 0,16 persen poin jika dibandingkan Februari 2022. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (4,35 persen) lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (3,60 persen). TPT menurut daerah tempat tinggal dibandingkan kondisi Februari 2022, untuk perkotaan turun 0,27 persen poin dan perdesaan turun 0,23 persen poin.

#### 2.4.5 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Salah satu fokus yang juga memiliki peran besar terhadap aspek daya saing Provinsi Kalimantan Selatan selain dilihat dari beberapa komponen di atas,





yang terakhir adalah mengenai Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur. Data-data yang tersedia terkait focus fasilitas wilayah/infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu antara lain adalah panjang jalan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022, jalan nasional di Kalimantan Selatan memiliki total sepanjang 1.204,18 Km dengan kondisi mantap sebesar 95,63% berdasarkan data terakhir pada tahun 2021, Adapun panjang jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0150/KUM/2023 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan yang semula 756,12 km menjadi 927,41 km dengan kondisi mantap 64,3% pada Tahun 2022. Adapun capaian ini masih berada di bawah kondisi mantap jalan nasional. Rasio konektivitas Provinsi untuk tahun 2022 adalah sebesar 0,603%.

Komponen pendukung lainnya adalah ketersediaan bandara, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki jumlah total 5 bandara yang tersebar pada 5 Kab/Kota, antaralain:

1. Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor – Banjarbaru
2. Bandar Udara Bersujud – Batulicin
3. Bandar Udara Warukin – Warukin
4. Bandar Udara Gusti Syamsir Alam – Kotabaru
5. Bandar Udara Mekar Putih – Kota Baru

Salah Satu Dari Semua Bandar Udara Tersebut Bahkan Merupakan Bandara Internasional Yang Menjadi Gerbang Bagi Penumpang Penerbangan Luar Negeri. Hal Tersebut Memang Diperlukan, Untuk Dapat Membuat Roda Ekonomi Dan Pariwisata Kalimantan Selatan Tetap Berputar.

Terkait dengan angkutan sungai dan laut Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 7 pelabuhan yang beroperasi dengan 2 jenis pelabuhan yaitu pelabuhan sungai dan danau serta pelabuhan penyeberangan yang memiliki hirarki pelabuhan yaitu pengumpan. Lokasi pelabuhan tersebar di beberapa kabupaten/kota diantaranya Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Seluruhnya memiliki status kepemilikan dan pengelolannya dibawah kewenangan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam rangka menunjang perekonomian sektor pertanian dan pangan, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Upaya dalam pengelolaan sumber daya air





terkait dengan pengelolaan irigasi dan daerah irigasi. Adapun luas Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa (DI/DIR) di Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah 995 DI/DIR dan luas total  $\pm$  359.595 Ha, dengan persentase 18,53% merupakan kewenangan pusat, 15,85% kewenangan provinsi, dan 55,62% merupakan kewenangan kabupaten/kota. Untuk melihat kinerja sistem irigasi masing-masing DI/DIR pada setiap kewenangan maka dilakukan penilaian kinerja jaringan irigasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan irigasi yang diterjemahkan kedalam Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). Berdasarkan IKSI dapat disimpulkan bahwa kondisi irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan rata-rata masih berada di bawah 50% yang menunjukkan bahwa kinerja sistem irigasi masih di bawah potensi yang dimilikinya karena adanya kerusakan

Komponen pendukung aspek daya saing Provinsi Kalimantan Selatan lainnya adalah pembangunan aspek kesejahteraan masyarakat. Upaya dalam meningkatkan pembangunan manusia adalah melalui pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar salah satunya melalui penyediaan air minum, sanitasi dan persampahan. Capaian air minum akses layak Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 sebesar 83,02% dan tahun 2022 sebesar 88,68% , hal ini menunjukkan bahwa trend pencapaian air minum akses layak di Kalimantan Selatan mengalami perbaikan setiap tahunnya. Sebagian besar Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki capaian air minum dengan status akses layak di atas rata-rata Provinsi, dan hanya ada beberapa yang perlu masih mendapat perhatian antarlain Kab Tanah Laut, Kab Barito Kuala dan Kabupaten Kotabaru dengan capaian ketiga Kabupaten ini yang masih berada di bawah angka rata-rata Provinsi. Capaian akses air limbah Akses layak domestik Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sebesar 88,28% naik sebesar 1,63% dari capaian tahun 2021 sebesar 86,85%. Sistem pengelolaan sampah yang dominan masih tradisional, antara lain adanya praktek pembuangan sampah secara sembarangan. Sehingga untuk melakukan pengelolaannya Provinsi Kalimantan Selatan masih terus berupaya untuk menambah dan memaksimalkan penyediaan sarana prasarana yang memadai, seperti penyediaan TPA, TPS, TPST, atau TPS3R.

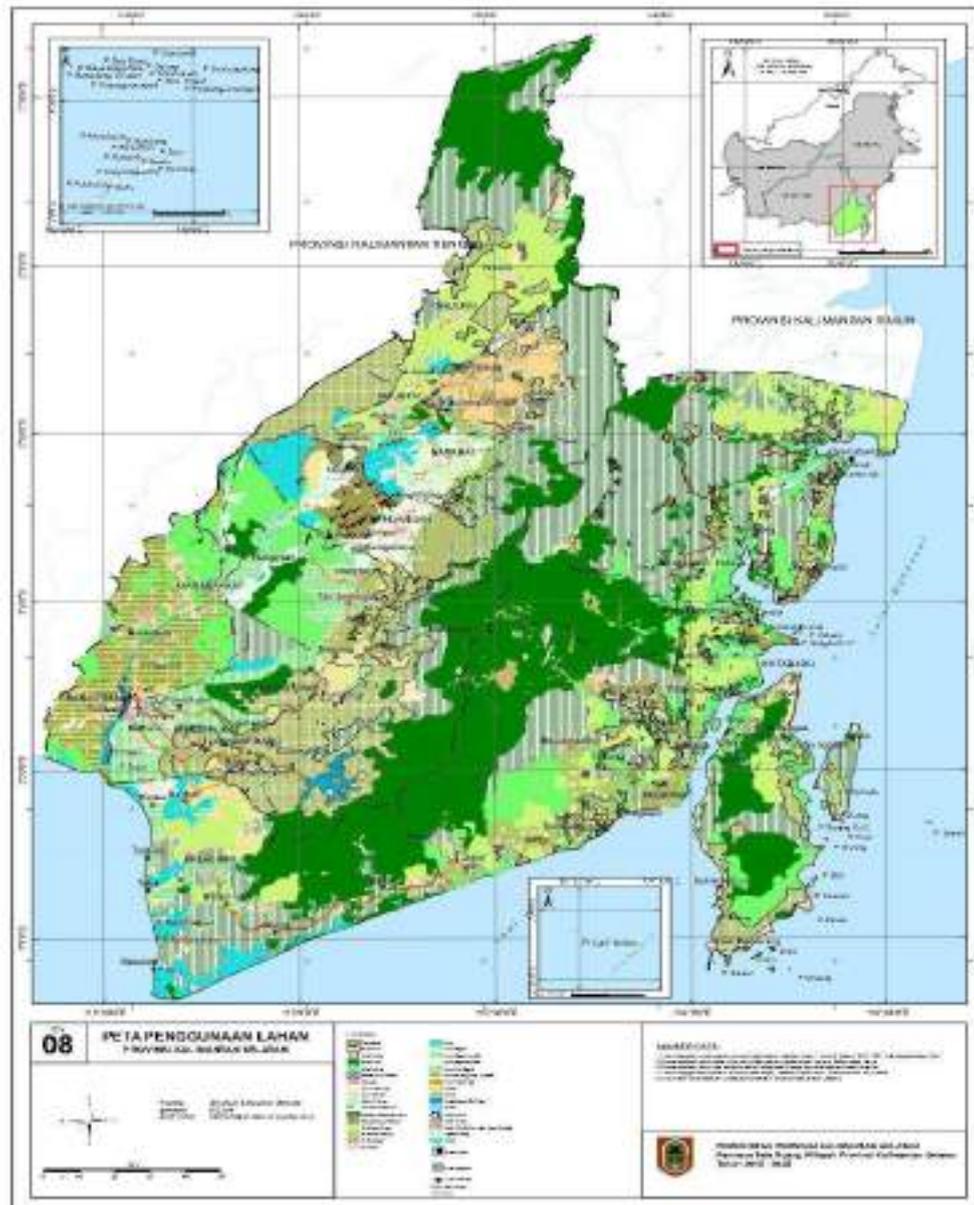
Terkait ketersediaan listrik, sampai saat ini pasokan listrik didapat dari perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan PLN terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah pelanggan PLN sebanyak 1.416.063 atau naik 3,26 persen dibanding tahun 2021 dengan angka rasio Elektrifikasi (RE)





Kalimantan Selatan s.d Desember 2022 baik Jumlah RT Berlistrik bersumber dari PLN dan Non PLN adalah sebesar 99.45%

#### 2.4.6 Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup



Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018

**Gambar 2.49** Peta Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan s.d Data Terakhir Tahun 2018





Berdasarkan data tutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022, diketahui bahwa tutupan lahan pada Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh Perkebunan (830,367.064 Ha), disusul dengan Hutan Lahan Kering Sekunder (685,295.77Ha), Pertanian Lahan Kering Campur (557,113.17 Ha). Berdasarkan data tersebut terjadi perubahan jika dibandingkan dengan data tutupan lahan pada tahun 2020 dimana tutupan lahan Prov. Kalsel di dominasi oleh Hutan Lahan Kering Sekunder (700,718.60 Ha), Pertanian Lahan Kering Campuran (586,262.71 Ha), Perkebunan (791,118.57 Ha) dan Sawah (381,030.06 Ha). Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan lahan yang awalnya berpotensi besar terhadap pengembangan produktivitas pertanian dan perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan sedikit bergeser menjadi perkebunan

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Terdapat banyak pendekatan dalam menentukan daya dukung suatu wilayah. Beberapa konsep dalam pengukuran daya dukung lingkungan diantaranya adalah pendekatan Carrying Capacity Ratio (CCR), konsep daya dukung wilayah untuk permukiman (DDPm), daya dukung lingkungan untuk lahan pertanian, konsep daya dukung lingkungan untuk fungsi lindung, daya dukung sumber daya lahan, daya dukung sumber daya air, dan sebagainya (Muta'ali, 2012).

Kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dilakukan berdasarkan pendekatan yang telah disebutkan di atas. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan.

Konsep daya tampung lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau





komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam menetapkan status pencemaran diperlukan baku mutu lingkungan hidup (KLHK, 2014). Baku mutu lingkungan hidup digunakan sebagai batas/kadar zat, energi atau komponen sebagai unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Dengan kata lain baku mutu lingkungan hidup sebagai ambang batas (threshold) terjadinya indikasi pencemaran lingkungan. Dalam UU PPLH diatur mengenai baku mutu lingkungan hidup yang terdiri atas baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### 2.4.6.1 Daya Dukung Permukiman

Daya dukung lahan bangunan (pendekatan permukiman) dihitung untuk mengetahui daya dukung lahan untuk kawasan permukiman agar pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak huni dapat tercapai. Daya dukung lahan permukiman dihitung dengan formula yang menggunakan data luas lahan bangunan (permukiman), luas lahan infrastruktur (jalan, drainase, dll), koefisien lahan terbangun (terbagi menjadi perkotaan dan pedesaan), serta jumlah penduduk. Berdasarkan Pedoman Penentuan DDDTLH (KLHK, 2014), penentuan daya dukung permukiman berdasarkan luas lahan permukiman terhadap jumlah penduduk dan koefisien luas kebutuhan ruang. Jika  $DDP > 1$ , mampu menampung penduduk untuk bermukim,  $DDP = 1$ , terjadikeseimbangan antara penduduk yang bermukim dengan luas wilayah yang ada dan  $DDP < 1$ , tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim dalam wilayah tersebut.

Dari hasil analisis berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan daya dukung permukiman sebesar 1,6 atau dalam kategori mampu menampung penduduk untuk bermukim. Akan tetapi jika dilihat dari wilayah administrasi menunjukkan bahwa Kota Banjarmasin statusnya tidakseimbang/tidak mampu menampung karena nilai DDP sebesar 0,7. Hasil analisis ini memperlihatkan persebaran konsentrasi permukiman yang belum merata di Kalimantan Selatan atau masih terpusat di perkotaan Banjarmasin, sehingga perlu adanya pusat-pusat konsentrasi penduduk di wilayah lain agar pemenuhan tempat tinggal yang layak di Banjarmasin masih dapat terjaga. (Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 – 2026)





#### 2.4.6.2 Daya Dukung Lahan Pertanian

Daya dukung lahan pertanian dihitung dengan maksud untuk mengetahui ketersediaan lahan yang ada pada saat ini dan kebutuhan akan lahan pertanian pada akhir tahun perencanaan di suatu wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang. Hasil dari perhitungan analisis daya dukung lahan pertanian adalah untuk mengetahui apakah daya dukung lahan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Kondisi daya dukung lahan yang defisit menunjukkan bahwa ketersediaan lahan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan produksi pangan di wilayah tersebut sedangkan kondisi daya dukung lahan pertanian surplus menunjukkan bahwa ketersediaan lahan di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi pangan.

Jumlah produksi padi dan jumlah penduduk dengan mengacu data dari BPS Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota dalam Angka 2020), untuk konversi gabah kering giling ke beras sebesar 58,86% (Kalimantan Selatan dalam angka 2020). Konsumsi beras mulai tahun 2017 berdasarkan hasil prognosa terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 124 kg/orang/tahun. Asumsi konsumsi beras ini akan dipergunakan untuk perhitungan indeks daya dukung lahan pertanian yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019.

Daya dukung lahan pertanian secara keseluruhan di provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 adalah 2,86 atau surplus sebesar 936.428 ton. Dari surplus beras ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar mampu bertahan atau memiliki stok selama 1,85 tahun. Akan tetapi berdasarkan administrasi terdapat dua wilayah yang telah mengalami defisit yakni Kota Banjarmasin (-78.992 ton) dan Kota Banjarbaru (-25.954 ton). Rendahnya stok pangan di wilayah ini karena secara eksisting wilayah ini merupakan daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang cukup besar dibandingkan dengan luas pertaniannya (lahan sawah). Selain itu untuk Kabupaten Kotabaru juga menunjukkan surplus pangan hanya 6.558 ton.

Beberapa Kabupaten yang memiliki produksi/surplus pangan terbesar seperti Barito Kuala (150.762 ton), Hulu Sungai Tengah (131.098 ton) dan Hulu Sungai Selatan (116.477 ton).





**Tabel 2.144** Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan sd Tahun 2022

Kabupaten	Jumlah Produksi Padi (ton)	Konversi Gabah Kering Giling/GKG ke Beras	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Konsumsi Beras(kg/ perkapita /pertahun)	Jumlah Beras Di Konsumsi (ton)	DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	Surplus Beras (ton)
Balangan	170.233	100.204	131.234	124	16.273	6,16	83.931
Banjar	218.266	128.478	550.264	124	68.233	1,88	60.245
Banjarmasin	5.927	3.489	237.445	124	29.443	0,12	-25.954
Banjarmasin	6.949	4.090	670.015	124	83.082	0,05	-78.992
Barito Kuala	322.185	189.648	313.595	124	38.886	4,88	150.762
HSS	247.952	145.952	237.702	124	29.475	4,95	116.477
HST	280.104	164.878	272.419	124	33.780	4,88	131.098
HSU	143.403	84.411	230.410	124	28.571	2,95	55.841
Kotabaru	79.395	46.734	323.999	124	40.176	1,16	6.558
Tabalong	180.836	106.446	243.763	124	30.227	3,52	76.219
Tanah Bumbu	101.130	59.528	320.452	124	39.736	1,5	19.792
Tanah Laut	271.943	160.074	350.007	124	43.401	3,69	116.673
Tapin	419.823	247.121	188.262	124	23.344	10,59	223.776
Provinsi Kalimantan Selatan	2.448.146	1.441.054	4.069.567	124	504.626	2,86	936.428

Sumber: Hasil Analisis (2022)

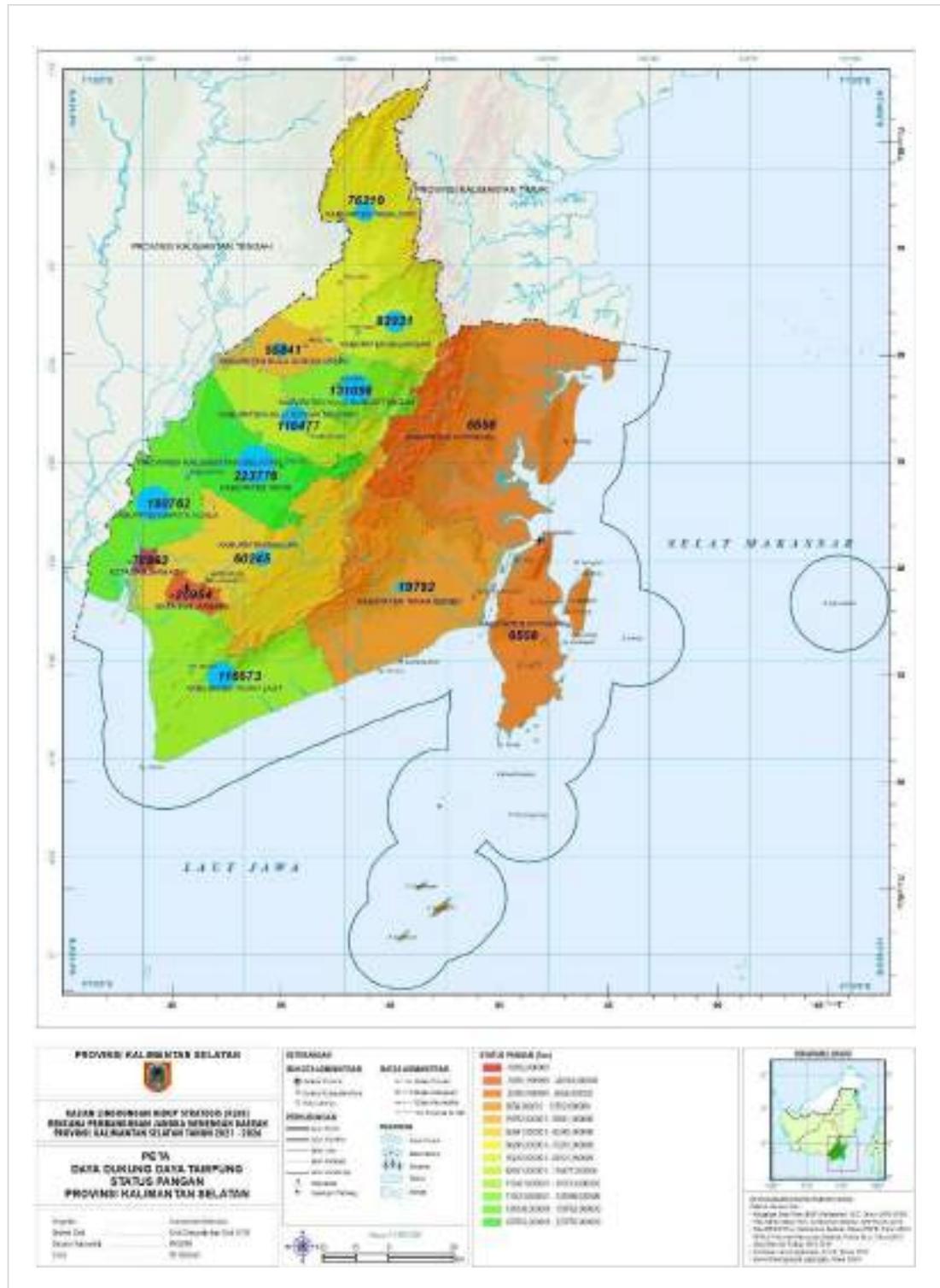
Dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal ini OPD terkait harus menyediakan dan meningkatkan melalui pencetakan sawah baru, serta mengurangi konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Ini juga bisa menjadi konsentrasi perencanaan dalam perencanaan tata ruang maupun penyusunan RKPD untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan, dengan cara membuat lahan sawah baru serta meningkatkan produktivitas sawah yang sudah ada berdasarkan hasil daya dukung ini.

Ini juga bisa menjadi konsentrasi perencanaan dalam perencanaan tata ruang maupun penyusunan RKPD untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan, dengan cara membuat lahan sawah baru





serta meningkatkan produktivitas sawah yang sudah ada. (Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 – 2026)



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026

**Gambar 2.50**    Peta Status Pangan Provinsi Kalimantan Selatan s.d Data Terakhir Tahun 2021





### 2.4.6.3 Daya Dukung Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang, perhitungan daya dukung air bertujuan untuk mengetahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Hasil perhitungan daya dukung air dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan RKPD atau revisi rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (water supply) dan kebutuhan air (water demand) terdapat perhitungan melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestik.

Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA) (Permen LH No. 17/2009).

Bila  $SA > DA$ , daya dukung air dinyatakan surplus.

Bila  $SA < DA$ , daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui.

Sedangkan menurut Dr. Ing. Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc (2016), membagi menjadi:

DDA  $< 1$  : Daya dukung air terlampaui atau buruk

DDA 1-3 : Daya dukung air bersyarat atau sedang

DDA  $> 3$  : Daya dukung air aman atau baik

Jika mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan masih dominan belum terlampaui yakni sebesar 3.316.423,81 Ha atau 88,73% dibandingkan yang terlampaui hanya sebesar 421.277,86 Ha atau 11,27%, sebagaimana disajikan pada di bawah:

**Tabel 2.145** Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Kepmen LHK

Kabupaten/Kota	Status Air (Ha)	
	Belum Melampaui	Melampaui
Balangan	170.402,98	19.768,37
Banjar	387.831,60	81.757,61



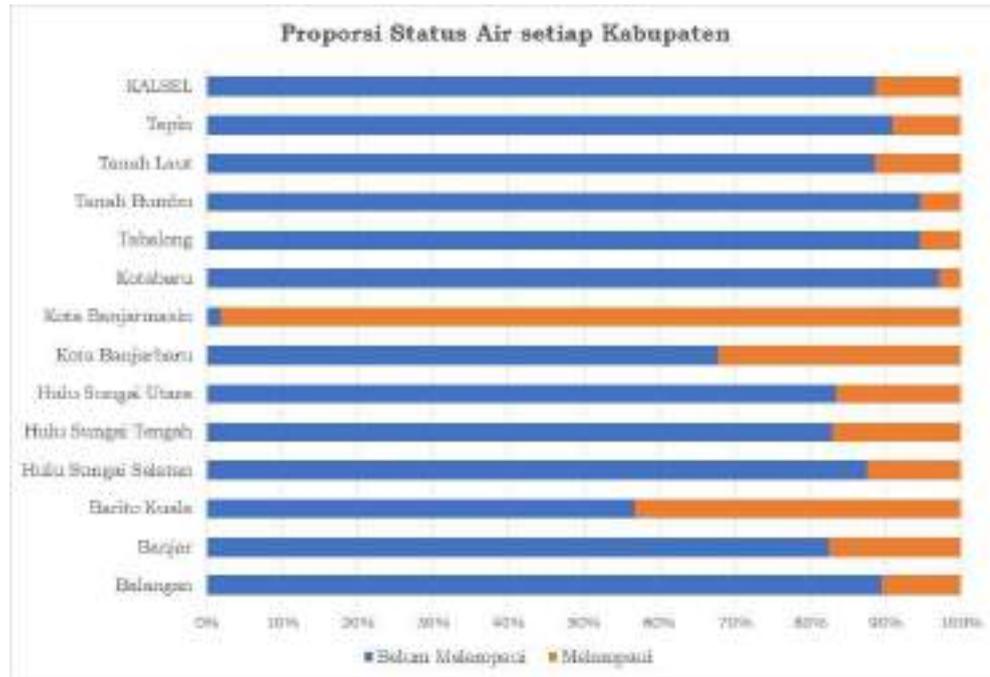


Kabupaten/Kota	Status Air (Ha)	
	Belum Melampaui	Melampaui
Barito Kuala	131.316,56	99.944,77
Hulu Sungai Selatan	148.814,78	21.047,17
Hulu Sungai Tengah	138.878,15	28.592,42
Hulu Sungai Utara	77.445,08	15.320,22
Kota Banjarbaru	22.004,96	10.449,64
Kota Banjarmasin	171,93	9.270,02
Kotabaru	896.465,56	26.324,66
Tabalong	350.399,74	19.762,32
Tanah Bumbu	450.442,59	25.546,36
Tanah Laut	342.468,64	43.630,44
Tapin	199.781,25	19.863,86
KALSEL	3.316.423,81	421.277,86
<b>Persentase (%)</b>	<b>88,73</b>	<b>11,27</b>

Jika melihat distribusi secara administrasi menunjukkan bahwa terdapat dua wilayah yang melampaui cukup besar yakni Kota Banjarmasin (98,18%), selanjutnya Kabupaten Barito Kuala (43,22%) dan Kota Banjarbaru (32,20%). Untuk wilayah yang memiliki persentase terbesar yang belum melampaui adalah Kabupaten Kotabaru (97,15%), selanjutnya Kabupaten Tabalong (94,66%) dan Kabupaten Tanah Bumbu (94,63%), sebagaimana disajikan pada Gambar di Bawah.

Selain berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 juga dilakukan analisis berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan air dari data curah hujan Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) tahun 1998-2017 dan koefisien limpasan masing-masing tutupan lahan di Kalimantan Selatan mengacu peta RBI 2018-2019. Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa yang melampaui sebesar 26,37% dan yang Belum Melampaui sebesar 73,67%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.146 dan Gambar 2.51.





(Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 – 2026)

**Gambar 2.51** Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Kepmen LHK 2019 Secara Administrasi

**Tabel 2.146** Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Analisis

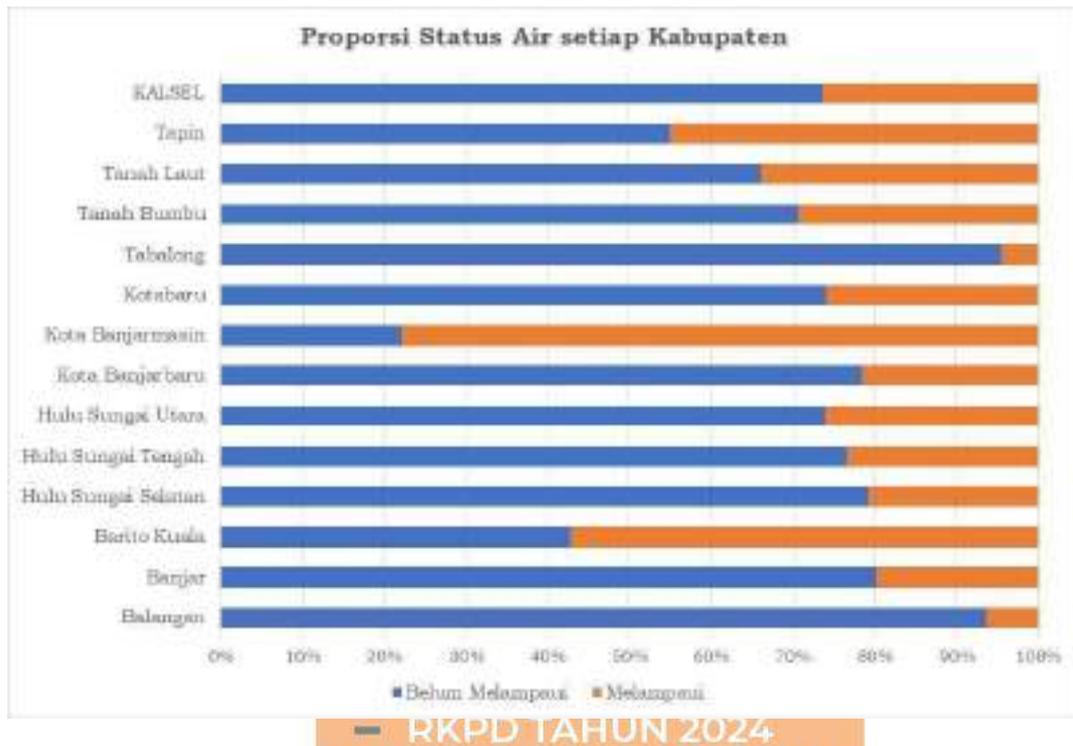
Kabupaten/Kota	Status Air (Ha)	
	Belum Melampaui	Melampaui
Balangan	171.132,47	11.706,31
Banjari	367.262,34	90.692,07
Barito Kuala	108.218,73	144.510,57
Hulu Sungai Selatan	136.706,67	35.634,33
Hulu Sungai Tengah	111.604,87	34.027,10
Hulu Sungai Utara	68.305,81	24.045,24
Kota Banjarbaru	25.828,65	7.095,60
Kota Banjarmasin	2.176,57	7.671,06
Kotabaru	703.900,93	246.401,37
Tabalong	331.881,88	15.852,60
Tanah Bumbu	343.142,10	142.368,38
Tanah Laut	251.420,34	129.175,79
Tapin	118.979,71	97.637,31
<b>KALSEL</b>	<b>2.744.452,71</b>	<b>982.926,09</b>
Percentase (%)	73,67	26,37

Sumber: Hasil Analisis 2020.





Jika melihat distribusi secara administrasi menunjukkan bahwa terdapat dua wilayah yang melampaui cukup besar yakni Kota Banjarmasin (77,90%), selanjutnya Kabupaten Barito Kuala (57,18%) dan Kabupaten Tapin (45,07%). Untuk wilayah yang memiliki persentase terbesar yang belum melampaui adalah Kabupaten Tabalong (95,44%), selanjutnya Kabupaten Balangan (93,60%) dan Kabupaten Banjar (80,20%), sebagaimana disajikan pada Gambar 2.52.



**Gambar 2.52** Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Hasil Analisis Secara Batas Administrasi Kabupaten

Untuk mengetahui tingkat ketersediaan dan kebutuhan berdasarkan volume air, maka hasil tersebut disajikan dalam bentuk tabulasi dan grafik. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan air di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 57.054.478.190 m<sup>3</sup>/tahun. Kebutuhan air total sebesar 21.850.342.888 m<sup>3</sup>/tahun yang terdiri atas domestik sebesar 118.831.356 m<sup>3</sup>/tahun dan 21.731.511.531 m<sup>3</sup>/tahun, sehingga diperoleh selisih 35.204.135.302 m<sup>3</sup>/tahun.

Dengan membandingkan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA) menunjukkan bahwa masih dalam posisi surplus, akan tetapi jika mengacu pendapat Dr. Ing. Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc (2016), menunjukkan bahwa





status air di Kalimantan Selatan hanya sebesar 2,61 atau berada pada interval DDA 1-3 atau termasuk daya dukung air bersyarat atau sedang.

Secara administrasi 3 wilayah yang telah melewati daya dukung atau status defisit Kabupaten Barito Kuala (-2.032.973.657 m<sup>3</sup>/tahun), Kabupaten Tapin (- 452.872.271 m<sup>3</sup>/tahun) dan Kota Banjarmasin (-16.497.858 m<sup>3</sup>/tahun), sebagaimana disajikan pada Tabel 3.37. Dari tabel tersebut juga, menunjukkan bahwa terdapat 6 kabupaten/kota dalam kategori bersyarat atau sedang dan 4 kabupaten dalam kategori aman atau baik. Jika dikaitkan dengan kejadian bencana banjir tahun 2021 di DAS Barito dimana limpasan air sangat tinggi dan tidak dapat dimanfaatkan, maka kedepan perlu penambahan area resapan untuk me-recharge (mengisi kembali) air tanah dangkal dan penyediaan infrastuktur air untuk menampung limpasan air dan dimanfaatkan sebagai sumber air baku baru sekaligus mengurangi risiko bencana banjir. Hal tersebut dapat dilihat terutama pada beberapa kabupaten (tujuh kabupaten/kota) yang berada di bagian tengah dan hilir DAS Barito yang memiliki status daya dukung air bersyarat dan terlampaui.



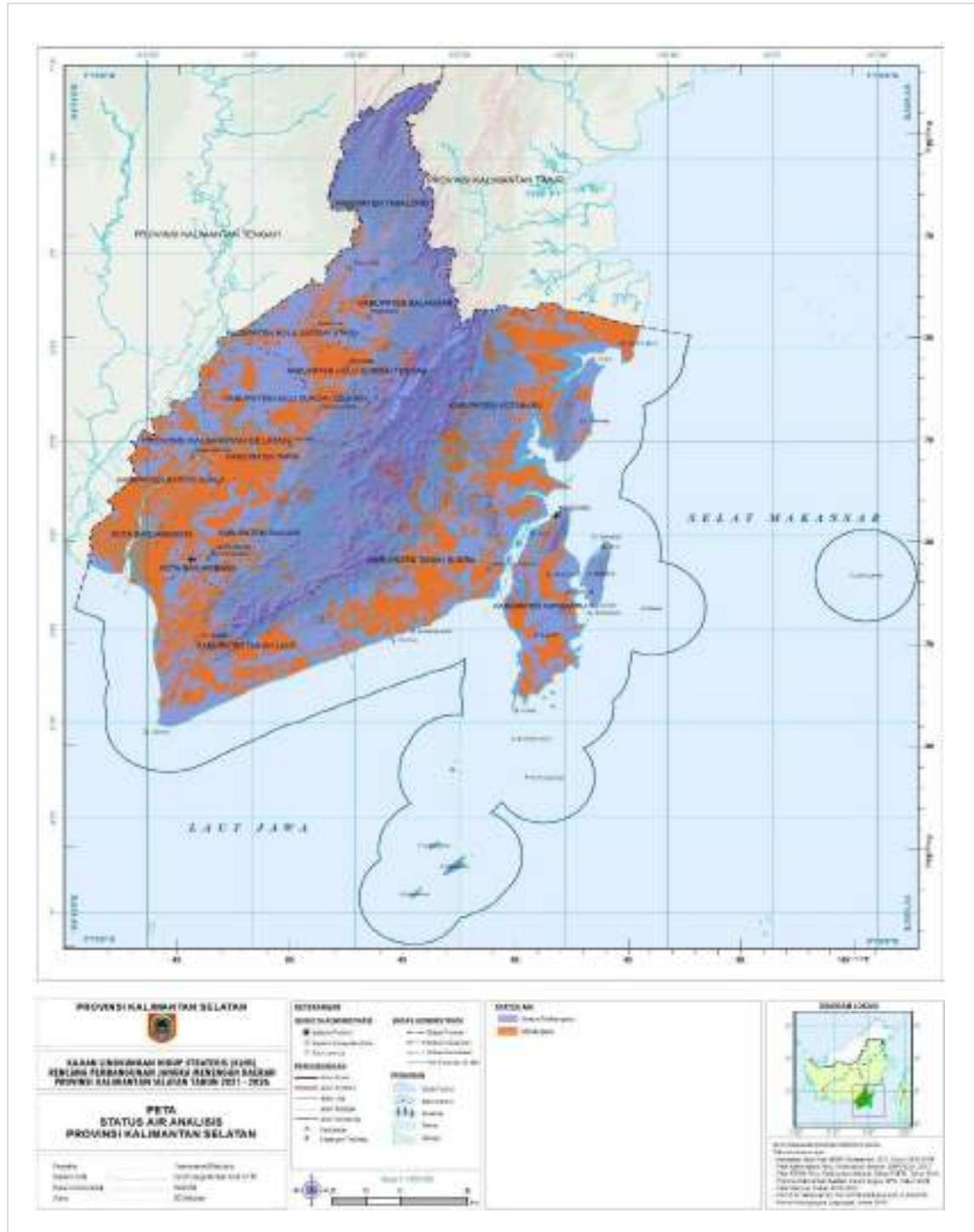
**Tabel 2.147** Perhitungan Daya Dukung Air Berdasarkan Batas Administrasi Kabupaten s.d Analisis Terakhir Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Ketersediaan Air (m <sup>3</sup> /tahun)	Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> /tahun)		Total	Selisih (m <sup>3</sup> /tahun)	DDA	Status
		Domestik	Non Domestik				
Balangan	2.488.622.632	3.832.033	201.110.663	204.942.696	2.283.679.936	12,14	Aman atau Baik
Banjar	6.403.353.583	16.067.709	2.618.607.329	2.634.675.038	3.768.678.545	2,43	Bersyarat atau Sedang
Banjarbaru	267.034.708	6.933.394	122.034.057	128.967.451	138.067.257	2,07	Bersyarat atau Sedang
Banjarmasin	62.984.689	19.564.438	59.918.108	79.482.546	-16.497.858	0,79	Terlampau atau Buruk
Barito Kuala	2.254.090.692	9.156.974	4.277.907.375	4.287.064.349	-2.032.973.657	0,53	Terlampau atau Buruk
Hulu Sungai Selatan	1.838.948.146	6.940.898	812.337.904	819.278.803	1.019.669.343	2,24	Bersyarat atau Sedang
Hulu Sungai Tengah	2.321.514.402	7.954.635	408.652.369	416.607.004	1.904.907.398	5,57	Aman atau Baik
Hulu Sungai Utara	781.135.157	6.727.972	443.209.116	449.937.088	331.198.069	1,74	Bersyarat atau Sedang
Kotabaru	24.281.980.291	9.460.771	4.793.274.889	4.802.735.660	19.479.244.631	5,06	Aman atau Baik
Tabalong	4.608.696.906	7.117.880	440.811.834	447.929.713	4.160.767.192	10,29	Aman atau Baik
Tanah Bumbu	6.118.251.680	9.357.198	2.671.111.647	2.680.468.845	3.437.782.835	2,28	Bersyarat atau Sedang
Tanah Laut	3.904.895.902	10.220.204	2.712.191.816	2.722.412.020	1.182.483.882	1,43	Bersyarat atau Sedang
Tapin	1.722.969.404	5.497.250	2.170.344.425	2.175.841.675	-452.872.271	0,79	Terlampau atau Buruk
KALSEL	57.054.478.190	118.831.356	21.731.511.531	21.850.342.888	35.204.135.302	2,61	Bersyarat atau Sedang

Sumber: Hasil Analisis 2020 KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 – 2026.







Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 – 2026

**Gambar 2.54** Status Air Analisis Provinsi Kalimantan Selatan





## 2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

### 2.5.1 Evaluasi Realisasi RKPD Tahun 2022

Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. mengamanatkan bahwa Evaluasi dan pengendalian RKPD perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi RKPD dengan RPJMD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen pendukung dalam pengambilan kebijakan bagi semua stakeholder.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai OPD yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, Dokumen ini akan memberi gambaran mengenai efektifitas pelaksanaan perencanaan hingga tahap pelaksanaan yang pada akhirnya memberi nilai strategis bagi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan usulan kegiatan dari masyarakat.

Hasil evaluasi dan pengendalian RKPD untuk Semester II Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan diperoleh bahwa total 49 SKPD eselon II lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selaku pengelola anggaran berkewajiban untuk memasukkan laporan capaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2022 per triwulan dan menyampaikan pelaporan pelaksanaan DPA SKPD masing-masing sebagai bahan evaluasi.

Total anggaran Belanja Seluruh SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 adalah sebesar Rp 8.724.879.726.514 sedangkan realisasi anggaran sampai dengan Semester II Tahun 2022 sebesar 89.46% atau Rp 7.797.145.468.521 dan untuk realisasi fisik sebesar 98.08%.

Dalam mengukur pencapaian hasil rencana kerja SKPD. dilakukan evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan 4 Tahun 2021 mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selengkapnya jumlah SKPD dengan kriteria kinerja dan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.





**Tabel 2.148** Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Semester II Tahun 2022

No	SKPD / Program	Realisasi Keuangan dan Fisik				Evaluasi Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tw 4 Tahun 2021) (%)	
		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d Triwulan 4	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Kinerja (K)	Anggaran (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.465.641.779.367	1.403.540.025.211	95,76	99,93	1387,85	95,76
2	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	15.886.277.752	14.383.718.124	90,54	100	90,54	90,54
3	TAMAN BUDAYA	5.446.225.100	4.472.219.800	82,12	100	100	82,12
4	MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT	4.289.831.601	4.190.614.361	97,69	98,64	97,69	97,69
5	PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI	4.356.774.577	3.780.426.742	86,77	80,78	100	86,77
6	DINAS KESEHATAN	101.081.607.065	95.891.230.311	94,87	99,92	219,72	94,87
7	BALAI PELATIHAN KESEHATAN	8.778.395.528	7.617.727.084	86,78	98,81	122,99	8.778.395.528
8	LABORATORIUM KESEHATAN	22.940.877.813	15.242.745.191	66,44	68,98	118,16	22.940.877.813
9	BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT	3.164.153.405	2.980.082.210	94,18	97,7	110,42	3.164.153.405
10	INSTALASI FARMASI	4.858.412.800	4.219.554.998	86,85	100	177,88	4.858.412.800
11	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN	699.550.625.818	584.660.489.112	83,58	99,53	142,99	699.550.625.818
12	BLUD RSUD ULIN	536.736.634.499	432.100.754.088	80,51	100	90	536.736.634.499
13	RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM	56.304.752.276	51.505.679.879	91,48	100	106,39	56.304.752.276
14	BLUD RSJ SAMBANG LIHUM	36.467.739.083	31.961.943.327	87,64	100	90,55	36.467.739.083
15	RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH	79.107.573.118	77.160.227.867	97,54	99,53	137,24	79.107.573.118
16	BLUD RS ANSARI SALEH	261.711.519.887	160.295.585.782	61,25	100	92	261.711.519.887
17	RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN	19.950.311.403	17.140.375.078	85,92	99,45	103,16	19.950.311.403
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	973.701.669.371	770.807.755.244	79,16	92,27	105,65	973.701.669.371
19	LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	2.800.000.000	1.999.615.677	71,41	76,79	71,4	2.800.000.000
20	BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA	20.938.119.489	17.011.383.534	81,25	100	100	20.938.119.489
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	43.314.705.785	41.807.963.769	96,52	100	100,32	43.314.705.785
22	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH	16.628.507.755	13.356.367.347	80,32	92,67	250	16.628.507.755
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	31.204.862.543	28.905.658.702	92,63	99,14	99,49	31.204.862.543
24	DINAS SOSIAL	47.375.735.383	44.532.319.555	94,00	98,74	206,48	47.375.735.383
25	PANTI SOSIAL BINA NETRA FAJAR HARAPAN	5.267.089.604	4.787.091.289	90,89	100	0	5.267.089.604
26	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BUDI MULIA	1.701.851.547	1.498.803.511	88,07	100	33,37	1.701.851.547



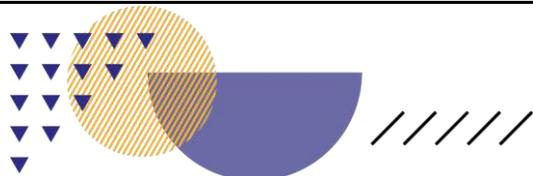


No	SKPD / Program	Realisasi Keuangan dan Fisik				Evaluasi Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tw 4 Tahun 2021) (%)	
		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d Triwulan 4	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Kinerja (K)	Anggaran (Rp)
27	PANTI SOSIAL BINA REMAJA BUDI SATRIA	15.654.354.285	13.756.598.854	87,88	100	316.1	15.654.354.285
28	PANTI SOSIAL BINA WANITA MELATI	8.144.871.876	7.072.578.090	86,83	98.69	112.8	8.144.871.876
29	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI SEJAHTERA	8.350.181.643	8.003.335.123	95,85	100	91.28	8.350.181.643
30	DINAS TENAGA KERJA DAN a	37.555.215.425	33.616.756.328	89,51	100	106.29	37.555.215.425
31	LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	5.147.334.700	4.793.541.115	93,13	94.32	63.93	5.147.334.700
32	BALAI LATIHAN KERJA	5.159.549.000	4.558.538.868	88,35	100	98.89	5.159.549.000
33	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I	908.774.600	807.968.572	88,91	98.04	93.96	908.774.600
34	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II	975.190.700	899.328.843	92,22	100	62.5	975.190.700
35	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III	845.840.300	738.204.992	87,27	96.47	100	845.840.300
36	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH IV	951.671.286	928.144.005	97,53	100	100	951.671.286
37	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.378.516.646	13.448.804.980	87,45	95.94	256.53	15.378.516.646
38	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	864.005.200	611.064.929	70,72	96.36	267.23	864.005.200
39	DINAS KETAHANAN PANGAN	12.601.243.629	11.536.456.992	91,55	100	148.07	12.601.243.629
40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.088.176.810	23.050.645.540	82,07	99.96	229.55	28.088.176.810
41	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN	2.424.364.800	2.419.342.523	99,79	99.99	437.8	2.424.364.800
42	UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA	7.680.590.800	6.994.595.658	91,07	95.3	123.57	7.680.590.800
43	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	9.689.762.954	8.631.418.877	89,08	100	291.14	9.689.762.954
44	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	55.899.050.892	52.946.409.791	94,72	100	177.61	55.899.050.892
45	DINAS PERHUBUNGAN	45.170.966.118	42.435.664.898	93,94	100	100	45.170.966.118
46	UPTD TERMINAL TYPE B	4.284.679.510	3.846.682.527	89,78	99.13	100	4.284.679.510
47	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27.920.515.768	25.533.891.922	91,45	99.44	99.69	27.920.515.768
48	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	19.970.741.408	16.636.683.942	83,31	100	100	19.970.741.408
49	BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL	6.293.244.700	5.354.052.409	85,08	100	133.33	6.293.244.700
50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.552.201.092	12.527.647.309	80,55	100	133.67	15.552.201.092





No	SKPD / Program	Realisasi Keuangan dan Fisik				Evaluasi Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tw 4 Tahun 2021) (%)	
		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d Triwulan 4	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Kinerja (K)	Anggaran (Rp)
51	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	191.597.759.939	180.862.842.816	94,40	96.92	123.33	191.597.759.939
52	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	34.191.971.583	29.381.756.411	85,93	99.04	100	34.191.971.583
53	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	31.797.255.507	27.424.897.931	86,25	99.72	96.02	31.797.255.507
54	BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	1.919.150.400	1.831.867.554	95,45	100	100	1.919.150.400
55	PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KARANG INTAN	5.580.390.008	5.099.778.924	91,39	100	100	5.580.390.008
56	PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN	4.977.190.168	4.898.731.084	98,42	100	76.09	4.977.190.168
57	PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP	11.331.211.269	9.655.169.730	85,21	100	90.26	11.331.211.269
58	PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU	2.172.963.000	2.143.292.636	98,63	100	100	2.172.963.000
59	PELABUHAN PERIKANAN KOTABARU	1.308.584.450	1.280.082.954	97,82	100	88.05	1.308.584.450
60	PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN	1.965.074.690	1.928.862.180	98,16	99.93	88.05	1.965.074.690
61	DINAS PARIWISATA	26.086.478.400	22.350.820.075	85,68	94.42	4816.26	26.086.478.400
62	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	99.517.243.957	87.531.971.357	87,96	99.9	695.14	99.517.243.957
63	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	3.399.111.005	3.163.434.271	93,07	100	99.6	3.399.111.005
64	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	3.006.427.888	2.878.707.586	95,75	98.54	83.01	3.006.427.888
65	BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	4.994.331.850	4.138.144.420	82,86	93.53	7916.75	4.994.331.850
66	BALAI PELATIHAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN	3.262.230.350	3.022.927.947	92,66	94.66	66.67	3.262.230.350
67	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	34.487.438.801	27.983.979.913	81,14	96.48	101.76	34.487.438.801
68	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	2.304.995.700	1.775.306.906	77,02	100	100	2.304.995.700
69	BALAI INSEMINASI BUATAN	3.101.538.689	2.788.586.618	89,91	98.99	100	3.101.538.689
70	DINAS KEHUTANAN	75.754.918.006	63.125.550.398	83,33	99.49	488.3	75.754.918.006
71	TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM	9.147.607.100	8.859.900.205	96,85	100	100	9.147.607.100
72	BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	4.331.893.930	4.135.069.419	95,46	99.65	192.8	4.331.893.930
73	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI	2.921.068.900	2.552.635.925	87,39	100	225	2.921.068.900
74	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN CANTUNG	2.126.784.000	2.070.350.768	97,35	100	100	2.126.784.000
75	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU	2.122.413.950	1.911.056.605	90,04	100	100	2.122.413.950
76	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG	2.128.764.770	2.001.673.224	94,03	100	100	2.128.764.770
77	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN	2.103.986.100	2.061.932.295	98,00	100	100	2.103.986.100
78	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT	2.158.354.750	2.031.767.054	94,13	100	100	2.158.354.750





No	SKPD / Program	Realisasi Keuangan dan Fisik				Evaluasi Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tw 4 Tahun 2021) (%)	
		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d Triwulan 4	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Kinerja (K)	Anggaran (Rp)
79	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN	1.702.640.200	1.624.125.719	95,39	100	100	1.702.640.200
80	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI	2.781.665.650	2.699.898.785	97,06	100	100	2.781.665.650
81	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM	2.106.528.500	2.009.506.259	95,39	100	100	2.106.528.500
82	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	22.951.357.392	18.651.792.251	81,27	100	83.78	22.951.357.392
83	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	22.951.357.392	18.651.792.251	81,27	100	83.78	22.951.357.392
84	LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.744.337.300	1.616.586.663	92,68	100	83.24	1.744.337.300
85	LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.744.337.300	1.616.586.663	92,68	100	83.24	1.744.337.300
86	DINAS PERDAGANGAN	13.956.682.731	12.830.779.535	91,93	99,35	238.04	13.956.682.731
87	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	2.203.424.300	2.115.177.432	96,00	99,54	100	2.203.424.300
88	DINAS PERINDUSTRIAN	17.754.351.158	14.872.372.380	83,77	100	252.33	17.754.351.158
89	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM	1.918.584.595	1.735.414.045	90,45	100	100	1.918.584.595
90	SEKRETARIAT DAERAH	128.733.829.411	120.140.244.042	93,32	98,61	59,33	128.733.829.411
91	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.299.030.430	2.020.325.210	87,88	100	75	2.299.030.430
92	BIRO HUKUM	4.794.585.500	3.844.935.006	80,19	99,42	37,5	4.794.585.500
93	BIRO ORGANISASI	3.392.627.500	3.182.268.329	93,80	100	100	3.392.627.500
94	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	3.387.243.100	3.181.408.430	93,92	100	100	3.387.243.100
95	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	134.709.893.700	122.537.167.048	90,96	97,02	198,34	134.709.893.700
96	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	13.490.224.900	13.029.614.912	96,59	99,82	0	13.490.224.900
97	BIRO UMUM	27.134.704.300	24.078.151.547	88,74	99,88	97,83	27.134.704.300
98	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.483.467.500	3.941.239.796	87,91	100	222,96	4.483.467.500
99	BIRO PEREKONOMIAN	2.235.996.400	1.998.679.472	89,39	100	481,5	2.235.996.400
100	SEKRETARIAT DPRD	234.309.474.791	182.121.335.837	77,73	91,15	151,04	234.309.474.791
101	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	30.285.668.372	26.346.643.879	86,99	100	100	30.285.668.372
102	BADAN KEUANGAN DAERAH	2.434.614.445.782	2.386.189.302.243	98,01	99,99	17120,71	2.434.614.445.782
103	UPPD BANJARBARU	3.200.830.065	3.027.658.027	94,59	99,99	2352,24	3.200.830.065
104	UPPD PELAIHARI	2.943.683.950	2.590.881.890	88,01	100	564,79	2.943.683.950
105	UPPD KOTABARU	2.183.709.433	2.037.621.426	93,31	100	1973,08	2.183.709.433
106	UPPD MARTAPURA	2.789.506.500	2.523.654.413	90,47	99,95	0	2.789.506.500





No	SKPD / Program	Realisasi Keuangan dan Fisik				Evaluasi Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tw 4 Tahun 2021) (%)	
		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d Triwulan 4	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Kinerja (K)	Anggaran (Rp)
107	UPPD MARABAHAN	2.285.602.860	2.217.442.096	97,02	97.02	0	2.285.602.860
108	UPPD RANTAU	2.071.662.044	2.002.042.932	96,64	100	364.5	2.071.662.044
109	UPPD KANDANGAN	2.253.955.311	2.178.380.807	96,65	96.65	97.53	2.253.955.311
110	UPPD BARABAI	2.078.683.600	2.032.242.396	97,77	97.77	2999.39	2.078.683.600
111	UPPD AMUNTAI	2.000.558.167	1.904.484.709	95,20	99.32	603.41	2.000.558.167
112	UPPD TANJUNG	1.806.668.800	1.764.951.164	97,69	100	518.64	1.806.668.800
113	UPPD BATULICIN	2.727.203.000	2.542.924.418	93,24	99.16	76.09	2.727.203.000
114	UPPD PARINGIN	1.807.563.104	1.721.541.173	95,24	98.08	100	1.807.563.104
115	UPPD BANJARMASIN I	4.254.908.354	4.067.456.964	95,59	100	25	4.254.908.354
116	UPPD BANJARMASIN II	4.374.393.100	4.225.109.042	96,59	100	2978.15	4.374.393.100
117	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	24.957.963.055	20.948.191.421	83,93	98.95	182.4	24.957.963.055
118	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	39.780.447.596	34.025.079.399	85,53	97.94	143.17	39.780.447.596
119	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	12.742.987.000	11.509.694.075	90,32	91.32	97.67	12.742.987.000
120	KEBUN RAYA BANUA	3.882.460.300	3.345.598.703	86,17	86.17	150	3.882.460.300
121	BADAN PENGHUBUNG	9.868.128.669	9.239.292.661	93,63	100	100	9.868.128.669
122	INSPEKTORAT DAERAH	26.477.972.684	21.852.930.057	82,53	99.92	102.07	26.477.972.684
123	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	34.710.825.498	33.008.717.392	95,10	99.99	47.85	34.710.825.498

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sumber : Emonev Bappeda Kalsel, Tahun 2022





**Tabel 2.149** Evaluasi Capaian Kinerja Program - Kegiatan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKENAAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SM sederajat dan Pendidikan Khusus	persen	94.24	93.92 persen	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas	persen	33.98	28.05 persen	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah kejuruan	persen	33.98	26.65 persen	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	persen	85.79	29.47 persen	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Guru Pendidikan SMA/SMK/Dikus yang profesional	persen	75.64	78.31	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi	persen	55.7	42.22	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Pendidikan SMA/SMK/Dikus yang profesional	persen	75.64	0	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



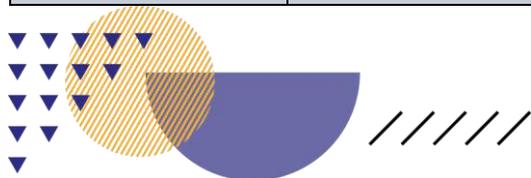


Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Ratio Pemerataan Guru	persen	15.01	12	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	112	137	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi	per 1000 Kelahiran Hidup	9	10	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting	%	29	9.60%	Tercapai	Dinas Kesehatan
	Angka Kesakitan	%	13	11.67%	Tercapai	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasyankes dengan Pemenuhan SDM Sesuai Standar	%	58	69%	Tercapai	Dinas Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Puskesmas dengan sembilan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	63	75%	Tercapai	Dinas Kesehatan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat registrasi	Nakes	6200	7331 Nakes	Tercapai	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	%	77	100%	Tercapai	Dinas Kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Posyandu Aktif	%	60	65.10%	Tercapai	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten Kota yang memiliki kebijakan PHBS	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kesehatan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten kota melaksanakan pembinaan dana desa untuk kesehatan dan UKBM	%	62	100%	Tercapai	Dinas Kesehatan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	%	64.9	54.00%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
SUMBER DAYA AIR (SDA)						
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendali daya rusak air dalam kondisi baik	%	28.77	31.58%	Tercapai	Dinas PUPR
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	%	64.9	18.10%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Pelayanan Air Minum	%	88.68	89%	Tercapai	Dinas PUPR
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Air Minum	%	88.68	89%	Tercapai	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Pelayanan Air Limbah	%	84.97	88%	Tercapai	Dinas PUPR
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Cakupan Pelayanan Air Limbah	%	84.97	88%	Tercapai	Dinas PUPR





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	%	100	100%	Tercapai	Dinas PUPR
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	%	100	100%	Tercapai	Dinas PUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	%	100	100%	Tercapai	Dinas PUPR
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	%	100	100%	Tercapai	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	%	81	82%	Tercapai	Dinas PUPR
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Tingkat Kemantapan Jalan	%	81	82%	Tercapai	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan bersertifikat	%	18	21%	Tercapai	Dinas PUPR
	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang terintegrasi melalui 3 layanan dasar (SIPJAKI)	%	100	65%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
	Persentase Meningkatnya Tertib Jasa Konstruksi	%	23	15%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	86	86%	Tercapai	Dinas PUPR
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	86	86%	Tercapai	Dinas PUPR
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	86	86%	Tercapai	Dinas PUPR
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	86	86%	Tercapai	Dinas PUPR
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	86	86%	Tercapai	Dinas PUPR
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	43.35	43.35%	Tercapai	Dinas Perkim
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	43.35	43.35%	Tercapai	Dinas Perkim





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	39.47	43.35%	Tercapai	Dinas Perkim
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	43.35	43.35%	Tercapai	Dinas Perkim
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	30.93	30.93%	Tercapai	Dinas Perkim
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	30.93	30.93%	Tercapai	Dinas Perkim
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	30.93	30.93%	Tercapai	Dinas Perkim
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase meningkatnya kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum	%	45.16	45.73%	Tercapai	Dinas Perkim





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase meningkatnya kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum Permukiman	%	45.16	45.73%	Tercapai	Dinas Perkim
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	%	100	100%	Tercapai	BPBD
	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100%	Tercapai	BPBD
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100%	Tercapai	BPBD
	Persentase peningkatan upaya penanganan darurat bencana	%	100	100%	Tercapai	BPBD
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	%	100	98.47%	Tidak Tercapai	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Permasalahan Trantibum yang berhasil ditindak lanjuti	%	100	98.66%	Tidak Tercapai	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Masyarakat dan Aparatur yang Memahami dan Mematuhi Tentang Produk Hukum Daerah	%	100	100%	Tercapai	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Petugas PPNS/Sekr Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Pertahun	%	100	73.33%	Tidak Tercapai	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatkan Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	%	100	100%	Tercapai	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Tingkat Responsibilitas Aparatur Satlinmas dan Damkar Kab/Kota yang Sigap dan Terampil	%	100	100%	Tercapai	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>						
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	10.6	10.75%	Tercapai	Dinas Sosial
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase dokumen izin pengumpulan sumbangan lintas kabupaten/kota yang diterbitkan	%	75	34.71%	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase PSKS Yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	10.6	10.75%	Tercapai	Dinas Sosial





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mandiri	%	18.79	14.62%	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	2.27	0%	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	2.26	0%	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase anak terlantar/jalanan yang terampil dan lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	0.27	0%	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase peningkatan pendapatan penduduk miskin	%	6.48	8.27%	Tercapai	Dinas Sosial
	Persentase PPKS yang mandiri	%	18.79	14.62%	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	729.25%	Tercapai	Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase peningkatan pendapatan miskin	%	6.48	8.27%	Tercapai	Dinas Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100	100%	Tercapai	Dinas Sosial



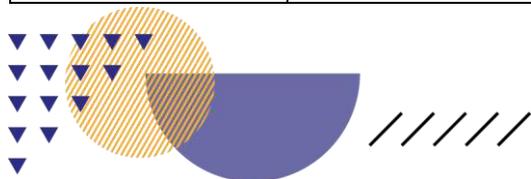


Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah makam yang dipelihara	Makam	6	6 Makam	Tercapai	Dinas Sosial
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKENAAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>						
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	100	100%	Tercapai	Disnakertrans
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah data yang disusun	Data	4	4 Data	Tercapai	Disnakertrans
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0.17	0.06%	Tidak Tercapai	Disnakertrans
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	%	100	83%	Tidak Tercapai	Disnakertrans
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penganggur yang dilatih	%	0.03	4.51%	Tercapai	Disnakertrans
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga Kerja yang ditempatkan	%	30	25.93%	Tidak Tercapai	Disnakertrans
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wirausaha baru yang dilatih	%	100	100%	Tercapai	Disnakertrans
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase angkatan kerja yang bekerja	%	95.26	95.26%	Tercapai	Disnakertrans





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang terlayani	%	100	100%	Tercapai	Disnakertrans
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	10	10.30%	Tercapai	Disnakertrans
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Yang Memiliki PP dan PKB	%	30	16.07%	Tidak Tercapai	Disnakertrans
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%	60	100%	Tercapai	Disnakertrans
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah	Persentase Kenaikan UMP dan UMK	%	8	8%	Tercapai	Disnakertrans





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)						
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	100	27.85%	Tidak Tercapai	Disnakertrans
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase peningkatan perusahaan yang taat aturan ketenagakerjaan	%	10	93%	Tercapai	Disnakertrans
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	20	30.85%	Tercapai	DPPPA
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah tingkat daerah Provinsi yang telah dilatih PUG	Lembaga	50	48 Lembaga	Tidak Tercapai	DPPPA





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	umlah Kelompok usaha Perempuan binaan DP3A Provinsi Kalimantan Selatan yang berhasil mandiri	Kelompok	1	1 Kelompok	Tercapai	DPPPA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	Lembaga	50	48 Lembaga	Tidak Tercapai	DPPPA
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Kebijakan	1	1 Kebijakan	Tercapai	DPPPA
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komperhensif	%	100	100%	Tercapai	DPPPA
	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPPo (per 100.000)penduduk perempuan	%	9.5	23.32%	Tercapai	DPPPA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun	%	15	15.30%	Tercapai	DPPPA
	Indeks Ketahanan Keluarga	%	82	82%	Tercapai	DPPPA





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Anggaran Responsif Gender	%	20	30.85%	Tercapai	DPPPA
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender	Dokumen	1	1 Dokumen	Tercapai	DPPPA
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	75	92.30%	Tercapai	DPPPA
	Rasio Anak korban Kekerasan	%	1.2	2.50%	Tercapai	DPPPA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Anak korban Kekerasan	%	1.2	2.50%	Tercapai	DPPPA
	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100%	Tercapai	DPPPA
	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	100%	Tercapai	DPPPA
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Yang Memenuhi Stok Pangan Minimal (%)	%	74.18	75.82%	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya Stok Penyimpanan Cadangan Pangan dan Tersedianya Infrastruktur dan Sarana Pendukung Lainnya	Ton	4.5	4.5 Ton	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koefisien Variasi (CV) harga beras di tingkat konsumen (%)	%	7.2	6.84%	Tidak Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
	Konsumsi beras per kapita per tahun (Kg/Kap/Th)	Kg/Kap/Th	93.6	93.6 Kg/Kap/Th	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
	Konsumsi pangan lokal per kapita per tahun (Kg/Kap/Th)	Kg/Kap/Th	20.94	23.35 Kg/Kap/Th	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Desa Rawan Pangan (%)	%	16.09	13.39%	Tidak Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Tersediannya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi	Peta	1	1 Peta	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Informasi Situasi Kerentanan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen	1	1 Dokumen	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Komoditas Pangan Yang Aman Dikonsumsi (%)	%	80	91.18%	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Teregistrasi dan Tersertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sertifikat	5	13 Sertifikat	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>						
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	108%	Tercapai	Dinas PUPR
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	108%	Tercapai	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	20%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	20%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	40%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	40%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	93%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	100	93%	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Jasa Lingkungan yang ditingkatkan/dipertahankan	%	35.94	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase luasan yang dijamin pengamanannya lingkungannya	%	62	62%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Presentase Luasan lahan terganggu yang terkendali	%	58	58%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter Indeks Kualitas Air	%	13.46	14.84%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase kualitas udara dengan kategori baik dan sangat baik	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase air laut dengan kualitas kategori baik	%	21.74	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Angka Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Gg CO2-eq	7406	16002 Gg CO2-eq	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Ekosistem Lahan Gambut	indeks	54.15	49.63 indeks	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan keanekaragaman hayati	%	7.2	12.97%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penambahan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	0.031	0.04%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan/kegiatan yang menerapkan pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan komitmen aturan pengumpulan Limbah B3	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase ketaatan penghasil, pengangkut, pemanfaat dan pengolah limbah B3	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase dunia usaha yang taat terhadap pengelolaan lingkungan	%	100	98%	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase dunia usaha yang menerapkan dokumen lingkungan	%	100	98%	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	%	50	33%	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase luas kawasan MHA yang diusulkan untuk mendapatkan pengakuan	%	18	17%	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang berbudaya lingkungan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase kampung atau desa yang melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase partisipasi komunitas yang melakukan kegiatan pelestarian lingkungan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase peningkatan pelestari lingkungan sesuai kriteria	%	64.71	64.71%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapat penghargaan di bidang Lingkungan Hidup sesuai kriteria	%	100	0%	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase dunia usaha yang mendapat kategori taat dibidang lingkungan hidup	%	100	0%	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus LH yang diselesaikan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase penyelesaian kasus LH yang dilimpahkan pada pihak berwenang	%	100	100%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di Kalsel	%	99	79.24%	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Pengurangan emisi dari Limbah Padat domestik di TPA (Pembuangan akhir sampah padat)	%	30.05	0%	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan	%	40	52.49%	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kalimantan Selatan	%	99.2	97.99%	Tidak Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran di Kalimantan Selatan	%	95	94.54%	Tidak Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
	Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pasangan dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan	%	92.30	92.30%	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
	Tingkat Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) Tahun	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan	%	92.30	92.30%	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
Penyediaan Profil Kependudukan	Tersedianya data profil kependudukan skala provinsi per tahun	Dokumen	1	1 Dokumen	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	%	14	0%	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Indeks Ketahanan Sosial	Poin	0.76	0 Poin	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	%	14	0%	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
	Indeks Ketahanan Lingkungan	Poin	0.69	0 Poin	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	%	14	0%	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Poin	0.6	0 Poin	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Indeks Ketahanan Sosial	Poin	0.76	0 Poin	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Indeks Ketahanan Sosial	Poin	0.76	0 Poin	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Poin	0.6	0 Poin	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Indeks Ketahanan Lingkungan	Poin	0.69	0 Poin	Tidak Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan	%	7.96	92.30%	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.5	0.71%	Tercapai	Dinas Kependudkan, Pencatatan Sipil dan KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penurunan Unmidneed	%	9	0%	Tidak Tercapai	Dinas Kependudkan, Pencatatan Sipil dan KB
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terwujudnya Penguatan Kerjasama dengan Stakeholders dan Mitrakerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kependudkan, Pencatatan Sipil dan KB
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	%	81.3	78.9 %	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan
	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicadangkan	Buah	4	4 Buah	Tercapai	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	One Time Performance Layanan Transportasi (Darat)	%	29.25	75.5 %	Tercapai	Dinas Perhubungan
	Rasio Konektivitas Provinsi	%	0.59	0.603 %	Tercapai	Dinas Perhubungan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian Per 100.000 Keberangkatan	kejadian	0	3.075 kejadian	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian Per 100.000 Keberangkatan	kejadian	0	0.603 kejadian	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan
	One Time Performance Layanan Transportasi (Air)	%	29.25	75.5 %	Tercapai	Dinas Perhubungan
	Rasio Konektivitas Provinsi	%	0.59	0.603 %	Tercapai	Dinas Perhubungan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	% Peningkatan Visitor Website dan Sosmed (Akses) Informasi Publik Yang Valid	%	11	11%	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indek domain pelayanan publik	Indeks	2.9	3.75 Indeks	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase SKPD yang menerapkan e-Government	%	100	84%	Tidak Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase SKPD Esselon II dengan Sub Domain Resmi	%	100	93%	Tidak Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase SKPD Menerapkan Indikator SPBE	%	100	84%	Tidak Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM</b>						
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	35	35%	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentasi Koperasi yang Patuh pada Peraturan Perundang-undangan	%	35	37%	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase KSP/USP yang patuh pada peraturan perundang-undangan	%	30	32%	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM



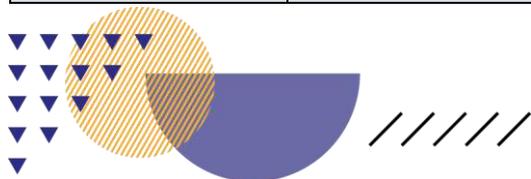


Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	33	33%	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase KSP/USP yang sehat	%	33	35%	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	25	25%	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	16	0%	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	%	1.8	1.8 %	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Peningkatan Permodalan UMKM	%	0.52	0%	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	1.8	1.8 %	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Presentase peningkatan omzet UMKM	%	5	0%	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>						
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kemitraan	Persen	100	100 Persen	Tercapai	DPMPSTP
	Persentase Potensi Investasi Berbasis Lingkungan	Persen	20	20 Persen	Tercapai	DPMPSTP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Calon Investor yang Berminat Investasi	Persen	30	30 Persen	Tercapai	DPMPSTP





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan promosi investasi	Kali	5	5 Kali	Tercapai	DPMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM Penanganan (Pelayanan) pengaduan	Nilai	88.25	88.25 Nilai	Tercapai	DPMPTSP
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai IKM Penanganan (Pelayanan) pengaduan	Nilai	88.25	88.25 Nilai	Tercapai	DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang aktif Dalam Investasinya	Persen	35	35.7 Persen	Tercapai	DPMPTSP
	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	Persen	100	100 Persen	Tercapai	DPMPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi	Persen	100	100 Persen	Tercapai	DPMPTSP
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi	Persen	100	100 Persen	Tercapai	DPMPTSP





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>						
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	%	78	78%	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	orang	1193	1193 orang	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	OKP	25	25 OKP	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet Binaan PPLP Yang Berprestasi	%	25	25%	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Atlet Olahraga Berprestasi	%	20	20%	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Tenaga Keolahragaan Berprestasi	%	15	14%	Tidak Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepramukaan	%	30	30%	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	organisasi	1	1 organisasi	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>						
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Lengkap Dan Valid	%	85	85%	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Peningkatan Jenis Data Statistik Sektoral Yang Lengkap dan Valid	Jenis	30	30 Jenis	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Prov. Kalsel	Poin	325	346 Poin	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Nilai Indeks KAMI	%	12	18.75 %	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>						
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	persen	3.76	70.57 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase ragam seni budaya daerah yang diaktualisasikan	persen	1.88	75 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	persen	3.76	4.39 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	persen	3.76	4.39 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ragam seni budaya daerah yang diaktualisasikan	persen	1.88	75 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	persen	3.76	4.39 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase Nilai sejarah yang dilestarikan	persen	0.94	14 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	persen	3.76	4.39 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	2.8	32 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	2.8	14 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Berkembangnya Kebudayaan Daerah	persen	3.76	4.39 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD Penanggungjawab
Pengelolaan Museum Provinsi	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	2.8	32 persen	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>						
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	45	45%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Buku yang Dipinjam, Persentase Peningkatan Perpustakaan Sekolah yang Pengelolaannya Sesuai Standar, Persentase Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka sesuai Kebutuhan Pemustaka, Persentase Koleksi Bahan Pustaka yang diolah dan diotomasi	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Buku yang Dipinjam, Jumlah Pengunjung Perpustakaan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Koleksi Deposit yang di Olah, dialih mediakan dan dilestarikan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Persentase Peningkatan Koleksi Deposit yang di Olah, dialih mediakan dan dilestarikan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>						





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase SKPD yang Mengelola Arsip Sesuai NSPK	%	36	36%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pada pasal 40 dan pasal 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pada pasal 40 dan pasal 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan negara,pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase SKPD yang Mengelola Arsip Sesuai NSPK	%	36	36%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pada pasal 40 dan pasal 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pada pasal 40 dan pasal 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pada pasal 40 dan pasal 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase SKPD yang Mengelola Arsip Sesuai NSPK	%	36	36%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan negara,pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentasi Berkurangnya Luas Kawasan Kritis Ekosistem Pesisir	%	0.72	0.86 %	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentasi Berkurangnya Luas Kawasan Kritis Ekosistem Pesisir	%	0.72	0.86 %	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kritis Ekosistem Pesisir	%	0.72	0.86 %	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi	Ton	264476.48	201252 Ton	Tidak Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Laut dan PUD	%	100	76.09 %	Tidak Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Laut dan PUD	%	100	76.09 %	Tidak Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Laut dan PUD	%	100	76.09 %	Tidak Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	Ton	157000	157009.39 Ton	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut yang dapat dibina	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut yang dapat dibina	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaat ruang laut, pelaku usaha di bidang perikanan tangkap dan pelaku usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan dilaut sampai dengan 12 mil	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap, bidang pembudidayaan ikan dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya dilintas kabupaten	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi Ikan masyarakat	Kg/Kapita/Tahun	62.06	62.06 Kg/Kapita/Tahun	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Padi	%	1	1%	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Jagung	%	1	1%	Tercapai	Dinas TPH





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kacang Tanah	%	0.5	0.5 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kedelai	%	0.18	0.18 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Kacang Hijau	%	0.25	0.25 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Ubi Kayu	%	0.15	0.15 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Ubi Jalar	%	0.15	0.15 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Porang	%	3	3%	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Bawang merah	%	1	1.2 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Cabai Besar	%	2.5	3.5 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Cabai Rawit	%	2.5	2.5 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Jeruk	%	1	2.91 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Pisang	%	2	2.6 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Produktivitas Durian	%	2	2.29 %	Tercapai	Dinas TPH
	Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet)	Kg/Ha	75.33	72 Kg/Ha	Tidak Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	5	5%	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Luas Tanam Padi	%	2	1.75 %	Tidak Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Luas Tanam Jagung	%	3	2.25 %	Tidak Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Luas Tanam Bawang Merah	%	2	3.7 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Luas Tanam Cabe Besar	%	2	13.07 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Luas Tanam Cabe Rawit	%	2	5.6 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase ketersediaan prasarana perkebunan dan peternakan yang sesuai untuk peningkatan produksi	%	15	15%	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Perkebunan dan Peternakan	%	13.7	13.7 %	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Bibit Ternak Sapi Sesuai SNI pada wilayah sumber bibit	%	20	20%	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian jumlah kasus penyakit hewan menular	%	80	85%	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	8	8%	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Prosentase unit usaha yang diaudit NKV	%	3	3%	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luasan pertanaman yang dapat dikendalikan akibat bencana alam	%	2.5	2.16 %	Tidak Tercapai	Dinas TPH
	Luas areal pengendalian penanggulangan bencana	Ha	6300	659 Ha	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Peningkatan Tanaman Pangan yang Aman dari DPI, Kebakaran Lahan dan Bencana Alam	%	97.5	99.41 %	Tercapai	Dinas TPH





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
	Persentase Peningkatan Tanaman Hortikultura yang Aman dari DPI, Kebakaran Lahan dan Bencana Alam	%	97.5	91.07 %	Tidak Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Tanaman Pangan yang Aman dari OPT	%	97.5	99.98 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Tanaman Hortikultura yang Aman dari OPT	%	97.5	94.41 %	Tidak Tercapai	Dinas TPH
	Persentase luas areal pengendalian bencana perkebunan dan peternakan	%	15	15%	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi teknis usaha perkebunan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pekebun rakyat yang memiliki STDB	%	16	16%	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Naik Kelas	%	3.6	3.6 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase SDM Pertanian yang berkualitas	%	1.38	1.38 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan metode dan informasi penyuluhan pertanian	%	20.02	20.02 %	Tercapai	Dinas TPH
	Persentase Peningkatan Penguatan Kelembagaan Perkebunan dan Peternakan	%	10.83	10.83 %	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan SDM Perkebunan dan Peternakan	%	1.2	1.2 %	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi pekebun dan peternak	Korporasi	1	1 Korporasi	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>						
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggulan yang Sesuai Sapta Pesona	%	20	19.38 %	Tidak Tercapai	Dinas Pariwisata
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Perancangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	%	100	100%	Tercapai	Dinas Pariwisata
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Peningkatan Objek Wisata Sesuai Sapta Pesona dan Pokdarwis yang aktif	%	100	100%	Tercapai	Dinas Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	10	227%	Tercapai	Dinas Pariwisata
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	5	1069%	Tercapai	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK	Persentase Kenaikan Hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif	%	20	19.38 %	Tidak Tercapai	Dinas Pariwisata





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
KEKAYAAN INTELEKTUAL						
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Peningkatan Kelengkapan Fasilitas dan Keterampilan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	100	100%	Tercapai	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tingkat hunian akomodasi	%	40	59%	Tercapai	Dinas Pariwisata
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Pariwisata
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha bidang kehutanan terhadap pemenuhan pembayaran PNBPN dan Retribusi Daerah	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kehutanan
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan Retribusi dan PNBPN	%	25	100%	Tercapai	Dinas Kehutanan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pelayanan pemberian dokumen Pertek RKT bagi IUPHHK HA dan IUPHHK HT	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kehutanan
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kehutanan
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase penanganan gangguan kemanan hutan dan hasil hutan serta kebakaran hutan dan lahan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kehutanan
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persentase peningkatan pendapatan Kelompok Tani Hutan (KTH) pada Izin Perhutanan Sosia	%	5	27.83 %	Tidak Tercapai	Dinas Kehutanan
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Persentase industri hasil hutan yang patuh dalam menerapkan SI RPBBI	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kehutanan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esesial yang aman dari ancaman kepunahan	%	100	119%	Tercapai	Dinas Kehutanan
	Tutupan Hutan dan Lahan	%	36.91	35.36 %	Tercapai	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional	%	25	23.53 %	Tercapai	Dinas Kehutanan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pemenuhan pelayanan perhutanan sosial dan penyuluhan kehutanan	%	100	100%	Tercapai	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Rehabilitasi DAS	%	5	86.13 %	Tercapai	Dinas Kehutanan
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penanaman Rehab DAS oleh IPPKH	%	100	72.86 %	Tidak Tercapai	Dinas Kehutanan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMEBR DAYA MINERAL</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase zona pemanfaatan air tanah yang dikonservasi	%	34.33	34.33 %	Tercapai	Dinas ESDM
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase luas wilayah air tanah yang dikonservasi	%	4.29	4.29 %	Tercapai	Dinas ESDM
Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air	Persentase rekomendasi teknis perizinan air tanah yang diterbitkan	%	20	20%	Tercapai	Dinas ESDM





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Tanah dalam Daerah Provinsi						
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan kewajiban terkait NPA	%	84.61	100%	Tercapai	Dinas ESDM
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase luas lahan terganggu akibat usaha pertambangan yang direklamasi (IUP)	%	5	4.78 %	Tidak Tercapai	Dinas ESDM
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase perusahaan yang memenuhi kaidah pertambangan yang baik	%	20	15.45 %	Tidak Tercapai	Dinas ESDM
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase perusahaan yang mempunyai IUJP	%	100	100%	Tercapai	Dinas ESDM





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Persentase peraturan yang diterbitkan terkait harga patokan mineral bukan logam dan batuan	%	20	20%	Tercapai	Dinas ESDM
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase penghematan pemakaian energi	%	20	12.66 %	Tidak Tercapai	Dinas ESDM
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Persentase institusi pemerintah daerah yang melaksanakan penghematan energi	%	57.14	100%	Tercapai	Dinas ESDM
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase rumah tangga tidak mampu berlistrik	%	3.54	0%	Tidak Tercapai	Dinas ESDM
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase perusahaan yang memiliki izin operasi yang taat aturan	%	30	100%	Tercapai	Dinas ESDM
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase perusahaan yang memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang taat aturan	%	80	100%	Tercapai	Dinas ESDM
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah	Persentase rumah tangga yang menerima bantuan listrik gratis	%	24	0%	Tidak Tercapai	Dinas ESDM





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Terpencil dan Perdesaan						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tertib Usaha	Persen	5.08	5.08 Persen	Tercapai	Dinas Perdagangan
Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Tertib Usaha	Persen	5.8	5.8 Persen	Tercapai	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	10.5	9.37 Persen	Tidak Tercapai	Dinas Perdagangan
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	10.5	9.37 Persen	Tidak Tercapai	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	0.1	0.0015 Persen	Tidak Tercapai	Dinas Perdagangan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Stabilitas dan Jumlah ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	0.1	0.0015 Persen	Tidak Tercapai	Dinas Perdagangan
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi	Persen	90	90 Persen	Tercapai	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Persen	5.96	65.94 Persen	Tercapai	Dinas Perdagangan
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Persen	5.96	65.94 Persen	Tercapai	Dinas Perdagangan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	Persen	65	65 Persen	Tercapai	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa konsumen yang ditindak lanjuti	Persen	100	105 Persen	Tercapai	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Beredar Yang Sesuai Standar	Persen	100	143 Persen	Tercapai	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	10.5	9.37 Persen	Tidak Tercapai	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	10.5	9.37 Persen	Tidak Tercapai	Dinas Perdagangan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri	%	5.75	5.75 %	Tercapai	Dinas Perindustrian
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Kenaikan Nilai Produksi Industri	%	4.9	68.3 %	Tercapai	Dinas Perindustrian





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	18.75	133%	Tercapai	Dinas Perindustrian
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	61.53	53.33 %	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	%	100	100%	Tercapai	Dinas Perindustrian
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Mampu Mengakses SIINas	%	82.71	59%	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>						
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Luas Sisa Areal HPL yang dapat dikembangkan oleh Pemda	%	100	193%	Tercapai	Disnakertrans
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Luas Sisa Lahan Pencadangan di Dalam HPL	Hektar	2000	3850 Hektar	Tercapai	Disnakertrans





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang Mandiri	%	100	100%	Tercapai	Disnakertrans
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan pembinaannya	Satuan Permukiman	3	3 Satuan Permukiman	Tercapai	Disnakertrans
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH</b>						
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan tingkat capaian hasil (Outcome) 100%	%	100	100	Tercapai	Biro Pemerintahan
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Rekomendasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	%	100	100	Tercapai	Biro Pemerintahan
Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	%	100	100	Tercapai	Biro Pemerintahan





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Kerjasama di Kalimantan Selatan yang ditindaklanjuti	%	100	100	Tercapai	Biro Pemerintahan
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum Daerah Berkualitas Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Dimanfaatkan Oleh Pemerintah Daerah (Pemda)	%	100	25%	Tidak Tercapai	Biro Hukum
	Persentase Bantuan Hukum, Layanan Hukum, Dan Layanan Informasi Produk Hukum Daerah Yang Baik	%	100	25%	Tidak Tercapai	Biro Hukum
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase perangkat daerah prov kalsel dengan kelembagaan yang ideal	%	100	100%	Tercapai	Biro Organisasi
	Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan reformasi birokrasi dengan baik	%	100	100%	Tercapai	Biro Organisasi
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Permasalahan Pembangunan Daerah yang dapat Diselesaikan	%	100	100%	Tercapai	Biro Administrasi Pembangunan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi masalah pelaksanaan pembangunan daerah sumber dana APBD, APBN dan Wilayah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	%	100	100%	Tercapai	Biro Administrasi Pembangunan



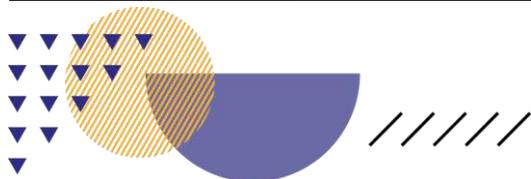


Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Permasalahan Pembangunan daerah yang dianalisa dan dirumuskan sebagai bahan kebijakan pembangunan daerah	%	100	100%	Tercapai	Biro Administrasi Pembangunan
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan	%	100	96.67 %	Tidak Tercapai	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Persentase Implementasi Regulasi Bidang Kesra Non Pelayanan Dasar	%	100	100%	Tercapai	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Persentase Koordinas dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Pelayanan Dasar Yang Difasilitasi	%	100	100%	Tercapai	Biro Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Pengadaan Barang dan Jasa	Inovasi Pelayanan	7	9 Inovasi Pelayanan	Tercapai	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Level	3	3 Level	Tercapai	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Point	85	99.7 Point	Tercapai	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BLUD yang Baik	%	100	100%	Tercapai	Biro Perekonomian
	Persentase BUMD yang Sehat	%	100	100%	Tercapai	Biro Perekonomian





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
	Prosentase Regulasi Lingkup Perekonomian yang Diimplementasikan	%	100	100%	Tercapai	Biro Perekonomian
	Tingkat Inflasi yang Stabil	%	3	6.9 %	Tercapai	Biro Perekonomian
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	IKM DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pelayanan Set. DPRD	%	82.5	84.21 %	Tercapai	Sekretariat DPRD
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Raperda Yang Diusulkan Tepat Waktu Ke Kemendagri	%	100	41.18 %	Tidak Tercapai	Sekretariat DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD	Nilai Komponen IKM Layanan Layanan Persidangan	Poin	40	84.67 Poin	Tercapai	Sekretariat DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir	%	100	133%	Tercapai	Sekretariat DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Jadwal Rapat Yang Tepat Waktu	%	100	80.2 %	Tidak Tercapai	Sekretariat DPRD
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>						
<b>PERENCANAAN</b>						
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Prov / Kab / Kota dengan nilai baik	%	100	100%	Tercapai	Bappeda





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen RPJMD / RKPd Yang Tepat Waktu dan Tepat Aturan	%	100	100%	Tercapai	Bappeda
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Data dan informasi pembangunan daerah yang update, relevan, dan time series	%	100	100%	Tercapai	Bappeda
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rekomendasi hasil pengendalian evaluasi daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100%	Tercapai	Bappeda
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) SKPD Provinsi dengan nilai baik	%	100	100%	Tercapai	Bappeda
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan (Renstra/Renja) SKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia dengan nilai baik	%	100	100%	Tercapai	Bappeda
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan (Renstra/Renja) SKPD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan nilai baik	%	100	100%	Tercapai	Bappeda
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase dokumen perencanaan (Renstra/Renja) SKPD bidang Infrastruktur dan Wilayah dengan nilai baik	%	100	100%	Tercapai	Bappeda





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD Penanggungjawab
<b>KEUANGAN</b>						
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	%	100	100%	Tercapai	Bakueda
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terwujudnya perencanaan dan dokumen keuangan daerah yang berkualitas dan tepat waktu	%	100	100%	Tercapai	Bakueda
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan keuangan daerah kab/kota	%	100	100%	Tercapai	Bakueda
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tertib penatausahaan perbendaharaan keuangan daerah	%	100	100%	Tercapai	Bakueda
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terwujudnya tata kelola pelaksanaan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tepat waktu dan akuntabel	%	100	100%	Tercapai	Bakueda
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan keuangan kab/kota	%	100	100%	Tercapai	Bakueda
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terwujudnya perencanaan dan dokumen keuangan daerah yang berkualitas dan tepat waktu	%	100	100%	Tercapai	Bakueda
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	%	100	100%	Tercapai	Bakueda





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	%	100	100%	Tercapai	Bakueda
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pendapatan daerah	%	1.69	1126.75 %	Tercapai	Bakueda
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	%	100	82.41 %	Tidak Tercapai	Bakueda
<b>KEPEGAWAIAN</b>						
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase SKPD dengan IP ASN Kategori Sedang	%	75	51.02 %	Tidak Tercapai	BKD
	Persentase SKPD melaksanakan pemetaan talenta sumber daya manusia aparatur	%	85	95.92 %	Tercapai	BKD
	Indeks Kepuasan PNS Terhadap Pelayanan Bidang Kepegawaian	Indek	85	85.07 Indek	Tercapai	BKD
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>						
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Alumni Pelatihan yang Menerapkan Kompetensi Teknis, Manajerial, Latihan Dasar, Fungsional dan Pemerintahan Sesuai Tujuan Diklat	Persen	70	72.22 Persen	Tercapai	BPSDM
	Indeks Kepuasan Pelayanan BPSDM	persen	100	83.17 persen	Tidak Tercapai	BPSDM
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan	%	90	95.54 %	Tercapai	BALITBANGDA
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti oleh stake holder bidang sosial dan pemerintahan yang sesuai standar dan dikembangkan	%	100	94.68 %	Tidak Tercapai	BALITBANGDA
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti oleh stake holder bidang sosial dan pemerintahan yang sesuai standar dan dikembangkan	%	100	99.59 %	Tidak Tercapai	BALITBANGDA
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti oleh stake holder bidang ekonomi dan pembangunan yang sesuai standar dan dikembangkan	%	100	86.24 %	Tidak Tercapai	BALITBANGDA
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti oleh stake holder bidang inovasi dan teknologi yang sesuai standar dan dikembangkan	%	100	98.36 %	Tidak Tercapai	BALITBANGDA
<b>PENGELOLAAN PENGHUBUNG</b>						
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Badan Penghubung	persen	82	82 persen	Tercapai	BADANG PENGHUBUNG





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Pejabat Daerah/SKPD/Komunitas/Masyarakat yang terfasilitasi oleh Badan Penghubung	kegiatan	18	100 kegiatan	Tercapai	BADANG PENGHBUNG
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH</b>						
<b>INSPEKTUR</b>						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OBRİK Tanpa Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah	%	100	100%	Tercapai	INSPEKTORAT DAERAH
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Menurunnya Perangkat daerah dengan temuan Material	%	100	100%	Tercapai	INSPEKTORAT DAERAH
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Presentase Kasus Pengaduan /Pemeriksaan Khusus yang di tindaklanjuti	%	100	100%	Tercapai	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	%	3.7	3.93 %	Tercapai	INSPEKTORAT DAERAH
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan	Dokumen	1	1 Dokumen	Tercapai	INSPEKTORAT DAERAH
Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Jumlah Unit Pelayanan Publik Yang lulus administrasi WBK	Unit	20	20 Unit	Tercapai	INSPEKTORAT DAERAH
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>						
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Capaian Revolusi Mental	point	69.28	70.47 point	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental aktif	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	%	70	70%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada dan Persentase Penurunan Jumlah Konflik Berlatar Belakang Politik	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	point	80	0 point	Tidak Tercapai	BADAN KESBANGPOL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang terbina dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Ketahanan Nasional	point	80	0 point	Tidak Tercapai	BADAN KESBANGPOL





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Ormas/LSM yang terbina dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks Kewaspadaan Nasional	point	70	0 point	Tidak Tercapai	BADAN KESBANGPOL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan potensi konflik dan Persentase penyelesaian konflik sosial	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Capaian Revolusi Mental	point	69.28	70.47 point	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental aktif	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	%	70	70%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada dan Persentase Penurunan Jumlah Konflik Berlatar Belakang Politik	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	point	80	0 point	Tidak Tercapai	BADAN KESBANGPOL





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Ormas/LSM yang terbina dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Ketahanan Nasional	point	80	0 point	Tidak Tercapai	BADAN KESBANGPOL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Ormas/LSM yang terbina dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks Kewaspadaan Nasional	point	70	0 point	Tidak Tercapai	BADAN KESBANGPOL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan	Persentase penurunan potensi konflik dan Persentase penyelesaian konflik sosial	%	100	100%	Tercapai	BADAN KESBANGPOL





Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Indikator	Capaian Tahun 2022	Kriteria	SKPD PenanggungJawab
Penanganan Konflik Sosial						

Sumber : Emonev Bappeda Provinsi Kalsel 2022 dan RPJMD 2021-2026 prov kalsel





**Tabel 2.150** Rekapitulasi Hasil Evaluasi Program - Kegiatan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

URAIAN	JUMLAH YANG DIEVALUASI	JUMLAH INDIKATOR YANG DIEVALUASI	KRETERIA			
			TERCAPAI	%	TIDAK TERCAPAI	%
PROGRAM	152	235	171	72.8	64	27.2
KEGIATAN	185	202	148	73.3	54	26.7

## 2.5.2 Evaluasi Realisasi RPJMD Tahun 2021-2026

Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, mengamanatkan bahwa Evaluasi dan pengendalian RKPD perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi RKPD dengan RPJMD.

Indikator kinerja makro merupakan tolok ukur kemajuan yang akan dicapai oleh perangkat pemerintah daerah dan seluruh masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mewujudkan visi dan prioritas dalam RPJMD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan. Penetapan indikator kinerja makro pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.

RKPD TAHUN 2024  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**Tabel 2.151** Realisasi Capaian Indikator Kinerja Makro Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2021	Target RPJMD 2022	Target P-RKPD 2022	Realisasi Tahun 2022	Keterangan Capaian Tahun 2022		
						Capaian Dari Target RPJMD	Capaian Dari Target P-RKPD 2022	Capaian Dari Tahun Sebelumnya
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,28	71.7	73,44 - 73,48	71,84	Tercapai	Belum Tercapai	Naik
2	Usia Harapan Hidup	68,83	70.64	70,64	69.13	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Naik
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,81	12.94	12,94	12,82	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Naik





No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2021	Target RPJMD 2022	Target P-RKPD 2022	Realisasi Tahun 2022	Keterangan Capaian Tahun 2022		
						Capaian Dari Target RPJMD	Capaian Dari Target P-RKPD 2022	Capaian Dari Tahun Sebelumnya
4	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,34	8.47	8,7	8.46	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Naik
6	Angka Pengangguran	4,95	4.39	5,5 - 6,2	4,74	Belum Tercapai	Tercapai	Turun
5	Pertumbuhan Ekonomi	3,48	4,0 - 4,5	5,4 - 6,0	5,11	Tercapai	Tercapai	Naik
6	Angka Kemiskinan	4,56	4,8 - 4,6	8,5 - 9,0	4,61	Tercapai	Tercapai	Naik
7	Indeks Gini	0,33	0.328	0,376 - 0,378	0,309	Tercapai	Tercapai	Turun
8	IKLH	61,94	70.58	62,63	71,97	Tercapai	Tercapai	Naik

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel 2021-2026. P-RKPD 2020. BPS Kalsel 2023

Tabel 2.152 Evaluasi Kinerja RPJMD 2021 - 2026 s.d Tahun 2022

MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ RPJMD	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022			
					Target	Capaian	Status	
<b>KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA</b>								
Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur								
Meningkatnya Toleransi dan Nilai-nilai Keagamaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	-	69.1	72.71	69,68 *	Tidak Tercapai	
Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama	Jumlah Konflik antar dan inter umat beragama	Kasus	0	0	0	0	Tercapai	
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Angka	70.91	71.28	72.46	71.84	Tidak Tercapai	
Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.29	8.34	8.47	8.46	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.68	12.81	12.94	12.82	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68.66	68.83	70.64	69.13	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan





MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ RPJMD	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022			
					Target	Capaian	Status	
Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88.86	88.91	88.97	88.86*	Tidak Tercapai	Dinas P3A
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74.48	74.44	75.39	74,58*	Tidak Tercapai	Dinas P3A
Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	50.67	51.08	52	50.67*	Tidak Tercapai	Dispora
Menurunnya Pernikahan Anak	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	%	16.24	16.26	15.01	17*	Tidak Tercapai	Discapil & KB
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65,11	69,87	69,89	61,23*	Tidak Tercapai	Dinas P3A
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	0	58,64*	60.15	61*	Tercapai	Dinas P3A
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga	%	0	0	35	35*	Tercapai	Dispora
	Jumlah Medali Emas	Buah	0	45	30	35*	Tercapai	Dispora
<b>Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata</b>								
Meningkatnya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-1.81	3.48	4,0 - 4,5	5.11	Tercapai	
Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	-0.96	1.16	0,65 - 2,5	0.74*	Tercapai	Dinas TPH, Disbunak, DisK&P, Dishut
	LPE Sektor Industri Pengolahan	%	-3.38	6.23	1,9 - 2,57	5.4*	Tercapai	Dinas Perindustrian
	LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	%	-3.38	2.2	6,95 - 7,2	7.15	Tercapai	Dinas Perdagangan
	LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	%	-2.02	2.3	6,18 - 6,61	9.63	Tercapai	Dinas Pariwisata





MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ RPJMD	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022			
					Target	Capaian	Status	
Meningkatkan Investasi yang berdampak ke daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun Rupiah	7.76	12.72	11.66	6,66 T	Tidak Tercapai	Dinas PMPTSP
Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan	Persentase Penduduk Miskin	%	4.38	4.83	4,80 - 4,60	4.61	Tercapai	Dinas Sosial
	Indeks Gini	Indeks	0.332	0.33	0.328	0.309	Tercapai	
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Mandiri	%	18.79	19,00*	19.29	23.60	Tercapai	Dinas Sosial
Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Rupiah per Orang per Tahun	12,032,000	12,143,000	12,146,875	12,469	Tercapai	
	Nilai Tukar Petani	%	99.18	101,58*	102.23	105.88	Tercapai	
Menurunnya tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.74	4.95	4.39	4.74	Tidak Tercapai	Disnakertrans
Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69.33	69.26	69.74	67.55	Tidak Tercapai	Disnakertrans
Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian								
Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan	Indeks Williamson	Indeks	0.391	0,383*	0.375	0,383*	Tidak Tercapai	
Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	Indeks	67.56	76.57	79.33	81.75	Tercapai	Dinas PUPR, Dinas Perkim
Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Rasio Konektivitas	Rasio	0.55	0.57	0.59	0.60	Tercapai	Dishub
Terwujudnya pembangunan kawasan-kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	%	85	83.5	84	84.00	Tercapai	Dinas PUPR





MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ RPJMD	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022			
					Target	Capaian	Status	
Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik								
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68.47	70,85*	72.05	68.47*	Tidak Tercapai	
Terwujudnya Pemerintahan yg Bebas KKN	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks	3.7	3,8*	3.85		Tercapai	Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	WTP	WTP	Tercapai	Bakeuda
	Predikat Sakip	Predikat	BB	A*	A	A	Tercapai	Biro Organisasi
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.03	2.6	3.1		Tidak Tercapai	Diskominfo
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	71.17*	72	63.88	Tercapai	BKD
Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Sangat Baik (4,41)	Sangat Baik (4,42)*	Sangat Baik (4,44)	Sangat Baik (4,25)	Tercapai	BPSDM
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	74.05	79,48*	79.49	N/A		Kesbangpol
Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana								
Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68.43	70,26*	70.58	71,92*	Tercapai	
Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	48.48	49,84*	51.24	50.52	Tidak Tercapai	Dinas LH, Dinas ESDM, Dishut
	Indeks Kualitas Air	Indeks	51.67	55,90*	55.97	54.63	Tidak Tercapai	Dinas LH
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88.93	88,38*	88.5	89.52	Tercapai	Dinas LH
	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	64.19	68,69*	69.27	84.42	Tercapai	Dinas LH
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	16.5	18	21	51.12%	Tercapai	Dinas LH, Dinas ESDM, Dishut





MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ RPJMD	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN			PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022			
					Target	Capaian	Status	
Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	144.81	138*	138	128,81*	Tercapai	
Meningkatnya Kapasitas Penanggulan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.47	0,51*	0.54	0.44	Tidak Tercapai	BPBD





**Tabel 2.153** Evaluasi Pelaksanaan Dan Realisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan s.d Tahun Berjalan

PERIODE SASI: 2020-2025 (RPJMD Tahun 2021-2026)		
Tujuan/Sasaran	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target
Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbaginya kewenangan urusan pemerintah khususnya pembinaan PAUD, SD dan SMP yang berada di level Pemerintah Kab/Kota, sehingga Pemerintah Provinsi tidak dapat melakukan intervensi secara langsung;</li> <li>2. Angka pernikahan dini masih tinggi di beberapa daerah;</li> <li>3. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dataran rawa, perbukitan / pegunungan, dan laut (kepulauan);</li> <li>4. Kurang pedulinya masyarakat akan pendidikan, sehingga masih ada anak usia sekolah (lulusan SMP) bekerja membantu orang tua;</li> <li>5. Masih banyak Penduduk Usia Sekolah yang mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Salafiah, Dimana keberadaan mereka tidak ikut pendidikan kesetaraan sehingga ijazahnya tidak diakui;</li> <li>6. Kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya nilai budaya daerah, baik tentang pelestarian maupun makna dari budaya tersebut;</li> <li>7. Tidak adanya data dukung akademis di daerah untuk memperkuat budaya yang ada di daerah;</li> <li>8. Masih kurangnya perhatian pemerintah daerah kabupaten / kota dalam memajukan budaya</li> </ol>	Keberhasilan dalam menurunkan proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun mengalami realisasi penurunan yang baik dari realisasi tahun 2019 sebesar 21.18 menjadi 15.3 pada tahun 2022, hal ini tidak terlepas dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Komitmen dan kerja sama dengan pihak lain sangat membantu untuk mencapai kinerja tersebut. Beberapa MOU dan kesepakatan telah dilaksanakan dengan Lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan instansi pemerintah dan nonpemerintah. Kerja sama tersebut dimulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan desa.
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbaginya kewenangan urusan pemerintah khususnya pembinaan PAUD, SD dan SMP yang berada di level Pemerintah Kab/Kota, sehingga Pemerintah Provinsi tidak dapat melakukan intervensi secara langsung;</li> </ol>	





2. Angka pernikahan dini masih tinggi di beberapa daerah;
3. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dataran rawa, perbukitan / pegunungan, dan laut (kepulauan);
4. Kurang pedulinya masyarakat akan pendidikan, sehingga masih ada anak usia sekolah (lulusan SMP) bekerja membantu orang tua;
5. Masih banyak Penduduk Usia Sekolah yang mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Salafiah, Dimana keberadaan mereka tidak ikut pendidikan kesetaraan sehingga ijazahnya tidak diakui;
6. Kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya nilai budaya daerah, baik tentang pelestarian maupun makna dari budaya tersebut;
7. Tidak adanya data dukung akademis di daerah untuk memperkuat budaya yang ada di daerah;
8. Masih kurangnya perhatian pemerintah daerah kabupaten / kota dalam memajukan budaya

1. Kurangnya kualitas tenaga kesehatan dan distribusi sumber daya manusia kesehatan yang kurang merata, meskipun telah ditempatkan Tenaga Kesehatan melalui Program Nakes Strategis. Hal ini disebabkan beberapa tenaga mengalami pemindahan lokasi kerja;
2. Kualitas Sarana dan prasarana kesehatan yang kurang baik di fasilitas pelayanan Kesehatan;
3. Beban penyakit menular dan tidak menular yang timbul dan meresahkan masyarakat dan dunia.

1. Kurangnya inovasi dan kreatifitas pemuda dalam menciptakan jenis usaha baru;
2. Modal usaha yang terbatas bagi kelompok usaha pemuda produktif yang baru merintis usaha;





3. Kurangnya pengalaman dalam berwirausaha dan juga kesiapan mental dalam menghadapi kemungkinan terburuk dalam berwirausaha khususnya bagi kelompok usaha baru;
4. Fasilitasi pemberdayaan pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan masih kurang;
5. Belum maksimalnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan khususnya perihal pengkaderan pemuda dalam berorganisasi;
6. Pengembangan karakteristik kepemimpinan pemuda belum maksimal. Pelaksanaan crosscutting belum dapat berjalan dengan baik;
7. Tidak adanya pendataan secara mandiri, sehingga penilaian hanya bergantung terhadap hasil dari penilaian IPP oleh Pemerintah Pusat;
8. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memiliki standar yang dapat menunjang program Latihan atlet, terlebih sarana dan prasarana olahraga yang ramah bagi atlet penyandang disabilitas.

1. Terbaginya kewenangan urusan pemerintah khususnya pembinaan PAUD, SD dan SMP yang berada di level Pemerintah Kab/Kota, sehingga Pemerintah Provinsi tidak dapat melakukan intervensi secara langsung (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1);
2. Angka pernikahan dini masih tinggi di beberapa daerah (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1);
3. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dataran rawa, perbukitan / pegunungan, dan laut (kepulauan) (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1);
4. Kurang pedulinya masyarakat akan pendidikan, sehingga masih ada anak usia sekolah (lulusan SMP) bekerja membantu orang tua (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1);
5. Kesejahteraan Keluarga/faktor ekonomi masyarakat masih relatif rendah (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1);
6. Masih banyak Penduduk Usia Sekolah yang mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Salafiah, Dimana keberadaan mereka tidak ikut pendidikan kesetaraan



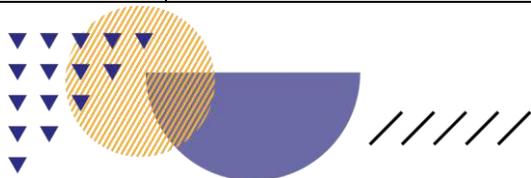


	<p>sehingga ijazahnya tidak diakui (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1).</p>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemampuan pendanaan bagi pemerintah kab/kota dalam penyediaan sarpras olahraga masyarakat berbeda – beda dan bergantung terhadap program prioritas masing – masing kepala daerah;</li><li>2. Kurangnya fasilitasi kegiatan olahraga yang dilaksanakan diwilayah perdesaan;</li><li>3. Pelaksanaan crosscutting belum dapat berjalan dengan baik;</li><li>4. Tidak adanya pendataan secara mandiri, sehingga penilaian hanya bergantung terhadap hasil dari penilaian oleh Pemerintah Pusat dan data BPS.</li></ol>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih kurangnya maksimalnya pembinaan terhadap atlet;</li><li>2. Kurang optimalnya pelaksanaan seleksi atlet pada Kejurnas Olahraga;</li><li>3. Kurang optimalnya pelaksanaan seleksi yang profesional terhadap pembinaan atlet usia dini melalui PPLP dan PPLPD.</li></ol>	
<p>Misi 2: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum tercapainya target pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB), sehingga harga ditingkat petani masih rendah. Solusi yang dilakukan dengan meningkatkan fasilitasi pembentukan UPPB yang teregister. Belum optimalnya kemitraan pekebun swadaya dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), sehingga pemasaran masih melalui pengumpul. Solusi yang dilakukan dengan mendorong pekebun swadaya agar bermitra dengan PKS;</li><li>2. Belum terjangkaunya pembeku lateks yang direkomendasi pemerintah di tingkat petani pekebun, sehingga mutu karet yang dihasilkan masih rendah. Solusi yang dilakukan dengan memberikan bantuan pembeku lateks melalui UPPB;</li><li>3. Petani pekebun dalam melakukan pasca panen karet masih belum sesuai dengan teknis penyadapan, sehingga produktivitasnya rendah. Solusi yang dilakukan salah satunya dengan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengolahan hasil perkebunan;</li></ol>	<p>Pemerintah daerah mampu dalam mendorong peningkatan jenjang pendidikan dan kualitas calon tenaga kerja</p>





4. Belum adanya jaminan harga yang wajar, ketika dipasarkan langsung ke pabrik (crumb rubber). Solusi yang dilakukan dengan mendorong UPPB untuk mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR);
5. Terbatasnya petugas/fasilitator yang mensosialisasi sertifikat ISPO dan STDB di Kabupaten dan Provinsi;
6. Terbatasnya biaya untuk melakukan sosialisai Pendaftaran Usaha Perkebunan Rakyat untuk Budidaya (STD-B);
7. Pekebun pada umumnya belum mengetahui pentingnya STD-B bagi keberlanjutan usaha dibidang perkebunan;
8. Terbatasnya lahan yang dimiliki pekebun dengan luas lebih dari 4 (empat) ha dalam 1 (satu) hamparan apabila menggunakan Perda Nomor 2 Tahun 2013;
9. Belum tertibnya perusahaan besar swasta/Negara mengirimkan LKUP secara rutin dan tepat waktu;
10. Belum tertibnya Koperasi yang mendapatkn IUP melaporkan hasil kegiatannya per semester;
11. Tingkat penyerapan benih tanaman perkebunan khususnya tanaman karet sangat kecil, sementara ketersediaan benih karet sangat banyak (mencapai 2.100.000 ) batang yang siap tanam, sementara yang dimanfaatkan masyarakat sangat kecil;
12. Untuk tanaman kelapa sawit ketersediaan benih cukup untuk mendukung kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PRS), namun lambat proses rekomtek proposal kelompok tani yang diusulkan sangat mempengaruhi kepastian penangkar dalam hal penyediaan benih;
13. Kualitas benih masih cukup diragukan, hal ini disebabkan integritas dari para penangkar masih kurang, serta asal benih tanaman yang cukup jauh, terutama untuk jenis tanaman tertentu;
14. Disamping itu kualitas dan keterbatasan SDM yang terkait dengan legalitas benih masih belum cukup;
15. Jarak dan prasarana angkutan cukup mempengaruhi kualitas benih yang diterima oleh petani;





16. Dalam pengembangan ternak sapi khususnya peningkatan kelahiran salah satu kendala adalah masalah gangguan reproduksi dan masih banyaknya sapi yang dipelihara secara ekstensif dilepas di kebun tanpa dikelola dengan baik, sehingga pelaksanaan Inseminasi Buatan kurang optimal. Adapun peningkatan populasi yang tidak seiring dengan tingkat kelahiran disebabkan antara lain banyak penjualan anak sapi dan penjualan sapi betina bunting keluar provinsi dan data populasi masih merupakan angka sementara sedangkan angka kelahiran merupakan dari laporan kabupaten setiap hari;
17. Kegiatan Pengendalian pemotongan ternak betina produktif telah dilaksanakan secara fisik sebanyak 100 %, dengan efisiensi penggunaan anggaran sebanyak 12 % sehingga serapan anggaran sebanyak 88%;
18. Terdapat penurunan pemotongan ternak betina produktif dari tahun 2020 ke 2021. Walaupun sudah mengalami penurunan pemotongan ternak betina produktif namun masih terdapat adanya pemotongan ternak ruminansia betina produktif hal ini disebabkan karena adanya terbatasnya sarana dan prasarana dan SDM di Rumah Potong Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan oleh karena itu kami mengusulkan ada penambahan SDM /tenaga kontrak/THL yang akan di tempatkan di RPH/TPH yang bertugas dalam pengawasan pemotongan ternak betina produktif

1. Masih belum sepenuhnya pelaku usaha industri (terutama industri kecil) mampu menghadapi kondisi pandemi yang terjadi;
2. Masih kurangnya fleksibilitas pola penganggaran terutama dalam melakukan revisi kegiatan.

1. Masih terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina serta perang dagang antara Amerika dan Cina, ini masih menjadi ancaman bagi ekspor Indonesia pada umumnya dan ekspor Kalimantan Selatan pada khususnya;
2. Adanya pemotongan anggaran (Refocusing) anggaran, sehingga menyebabkan capaian kinerja yang telah ditetapkan tidak dapat terealisasi secara maksimal.





1. Kondisi pandemi yang membatasi kunjungan wisatawan dan wadah pelaku ekonomi kreatif;
  2. Masih lemahnya sinkronisasi data-data kepariwisataan sebagai bahan pengambil kebijakan;
  3. Keterlambatan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota dalam menyampaikan data-data kunjungan wisatawan;
  4. Konten-konten terkait pelaksanaan kegiatan atau program belum maksimal dalam pemasaran ke masyarakat atau publik;
  5. Belum ada penerbangan secara langsung dari daerah wisata seperti Bali, Lombok, dll ke Banjarmasin;
  6. Masih banyak sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum bersertifikasi CHSE;
  7. Masih kurang rendahnya partisipasi pemilik usaha pariwisata;
  8. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memajukan sektor pariwisata
  9. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM kreatif;
  10. Kurangnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
  11. Infrastruktur teknologi informasi yang belum kompetitif;
  12. Kurangnya apresiasi terhadap sebuah karya.
1. Belum maksimalnya penggunaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga penanganan PPKS masih belum merata;
  2. Dalam pemenuhan SPM Bidang Sosial, masih memerlukan Panti Multi Layanan untuk dapat meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental (ODGJ);
  3. Kelembagaan Sosial di Kabupaten/Kota masih bergabung dengan urusan lainnya sehingga penanganan masalah- masalah kesejahteraan sosial belum berjalan secara maksimal





	<p>Pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari sektor komoditas memberikan dampak terhadap peningkatan pengeluaran perkapita</p>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Banjir yang melanda hampir di seluruh kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Selatan memberikan dampak dan kerugian lanjutan yang besar;</li><li>2. Dampak perubahan iklim;</li><li>3. Refocusing anggaran;</li><li>4. Fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak;</li><li>5. Perbedaan Luas Lahan Baku Sawah.</li></ol>	
Misi 3: Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Percepatan Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Updating Data dan Informasi yang Memiliki relevansi dengan kondisi eksisting pemanfaatan ruang;</li><li>2. Sinkronisasi Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan dengan RZWP3K Updating Data dan Informasi kondisi garis pantai;</li><li>3. Sosialisasi NSPK Penataan Ruang Dinamika perubahan kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat;</li><li>4. Pendampingan Penyusunan RDTR dan RTRW di Kabupaten dan Kota Proses penyusunan dan persetujuan substansi dengan Pemerintah Pusat yang menyita waktu yang relative lebih lama.</li></ol>	
	<p>Jumlah daerah yang di layani oleh sarana transportasi. terdapat 35 Trayek, sedangkan trayek yang dilayani sebanyak 21 Trayek. Jumlah tratek Bus Rapid Transit sebanyak 6 Koridor (Trayek) sedangkan yang terlayani yaitu 1 Koridor (trayek)</p>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingginya ego sektoral dan konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan tata ruang dan pembangunan;</li></ol>	





	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Keterbatasan Alokasi anggaran daerah yang berimplikasi terhadap pengurangan jumlah program kegiatan RTRW yang dapat dilaksanakan. Sehingga pelaksanaan program Kegiatan RTRW kadang tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan RPJMD</li></ol>	
Misi 4: Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum tersusunnya strategi untuk pemenuhan indikator baru terutama pada Domain Manajemen SPBE;</li><li>2. Belum tersedianya seluruh dokumen Perencanaan Strategis (Probis terintegrasi, Arsitektur dan Peta Rencana SPBE);</li><li>3. Masih perlunya harmonisasi dengan seluruh Tim Koordinasi SPBE Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;</li><li>4. Masih perlunya kerjasama dengan K/L/D dan Tim Koordinasi SPBE Nasional.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks persepsi ini turun 0,03 poin menjadi 3,8 pada 2022, di banding tahun sebelumnya yang sebesar 3,83</li><li>2. Indeks pengalaman ini naik 0,09 menjadi 3,99 pada 2022, dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 3,9.</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumber data dalam pengukuran IP ASN yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) belum sepenuhnya mutakhir sehingga diperlukan pemutakhiran data sebelum dilakukan pengambilan data sebagai dasar penghitungan IP ASN;</li><li>2. Data yang di Unggah dalam SIMPEG BKD tidak disertai dengan data dukung yang sesuai dengan ketentuan, sehingga data tersebut tidak bisa di verifikasi sebagai komponen penghitungan pengukuran IP ASN;</li><li>3. Dalam rangka pencapaian nilai dimensi kompetensi ASN pada peningkatan kompetensi pejabat fungsional terkendala terhadap keterbatasan pelaksanaan diklat fungsional bagi pejabat fungsional utamanya bagi tenaga kesehatan;</li><li>4. Penilaian kompetensi Pejabat Struktural masih relatif rendah dikarenakan banyak pejabat struktural yang belum mengikuti Diklatpim sesuai dengan jenjang jabatannya;</li><li>5. Kesadaran dan Motivasi Individu ASN dalam peningkatan IP ASN secara individu masih dirasa rendah.</li></ol>	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah 8 (delapan) kali berturut-turut mendapat opini WTP dari BPK, yaitu sejak tahun 2014 s.d 2022.
	Dari faktor leadership (Kepemimpinan) yang tidak berkomitmen dalam melaksanakan Perundang-undangan tentang Pelayanan Publik . Sebagian SDM yang masih kurang bermutu	Tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan





Misi 5: Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana	<p>dan berkualitas sehingga mempengaruhi terhadap proses pelayanan public 3. Sarana Prasarana yang masih belum memenuhi standar</p>	<p>orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Provinsi Kalimantan Selatan sudah sangat baik, namun masih memerlukan penyempurnaan</p>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah sasaran masih banyak yang tidak terakomodir;</li><li>2. Tim belum maksimal bekerja dengan baik, dan perlu lebih banyak melibatkan mahasiswa dan akademisi agar bisa mengawasi IDI.</li></ol>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya alih fungsi lahan akibat kegiatan permukiman, perkebunan, pertanian, industri, pertambangan dan lain-lain menyumbang penurunan luas tutupan lahan;</li><li>2. Adanya illegal logging dan pertambangan ilegal di beberapa kabupaten/kota.</li></ol>	<p>Tingginya capaian persentase kualitas air laut (IKL) kategori baik dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang menyebabkan berkurangnya aktivitas pariwisata di pesisir dan laut yang berkorelasi dengan berkurangnya sumber pencemar air laut.</p>
	<p>Tahun 2018 terdapat perubahan perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA). Jumlah parameter yang digunakan bertambah menjadi 10 parameter, yaitu DO, Fecal coliform, COD,pH,BOD, NH3-N, TP, TSS, NO3-N, dan TDS dengan metode Indeks Nasional Sanitation Foundation Water Quality Index (NSF-WQI). Hal ini menyebabkan perubahan range nilai IKA yaitu 0-100.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Beberapa indikator tahun sebelumnya tetap dapat dilaksanakan dan dipertahankan, beberapa program kegiatan yang dilaksanakan BPBD menambah poin di beberapa indikator terutama dengan bobot yang cukup tinggi contohnya penyusunan Rencana Kontingensi Banjir dan Kebakaran Hutan Lahan serta Pemasangan Alat EWS. Termasuk penambahan poin dari kegiatan Dinas Instansi terkait kebencanaan yang tahun sebelumnya</li></ol>





		<p>belum dikumpulkan dan direkapitulasi laporannya melalui kegiatan FGD perhitungan mandiri Indeks Ketahanan Daerah yang berpengaruh terhadap penurunan Indek Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Selatan;</p> <p>2. Fasilitasi dan dukungan pemerintah pusat dalam hal ini BNPB dalam penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana yang memberi poin cukup signifikan dalam perhitungan IKD.</p>
	<p>Penyediaan baseline data dan informasi yang sama belum terjadi sehingga tujuan untuk mencapai integrasi data, kebijakan, dan perencanaan belum tercapai secara optimal. Di samping itu perlu ada upaya bagaimana menjadikan perencanaan tingkat makro tersambung ke tingkat mikro</p>	





## 2.5.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Di Kalimantan Selatan Tahun 2022

### 2.5.3.1 Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Masih Rendah

Sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, kualitas sumber daya manusia harus diperhatikan semenjak perencanaan pembangunan hingga realisasi perencanaan yang telah dirumuskan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus memberikan perhatian khusus dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga akselerasi pembangunan dapat terlaksana.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga secara otomatis akan memberikan dampak positif kepada pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga kehidupan setiap penduduk Kalimantan Selatan menjadi lebih baik. Selain itu, sumber daya manusia yang berdaya saing akan menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan siap dalam menghadapi segala permasalahan yang akan muncul selama pelaksanaan pembangunan dan mampu memanfaatkan peluang maupun potensi yang ada untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Saat ini, sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Selatan masih butuh pembenahan terutama terkait kualitasnya.

Kualitas sumberdaya manusia Kalimantan Selatan jika di ukur dengan IPM, masih peringkat 4 di regional pulau Kalimantan. kondisi ini menunjukkan bahwa daya saing SDM Kalimantan selatan rendah, belum Link dan matchnya pendidikan dengan dunia kerja, pengembangan sekolah vokasi melalui kurikulum berbasis potensi local, pengembangan system pelayanan kesehatan yang berorientasi pad penyakit regenaratif dan mendorong investasi padat karya pada sector pengolahan bahan-bahan primer perlu terus di kembangkan.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam rangka melaksanakan perbaikan kualitas dan daya saing SDM Kalimantan selatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan yang kompeten dan sesuai potensi yang dimiliki daerah belum maksimal.
- b. Peran Kabupaten/kota dalam meningkatkan partipasi sekolah pada pendidikan dasar guna meningkatkan ARLS belum optimal.
- c. Aksesibilitas pelayanan pendidikan yang dapat diakses anak usia sekolah guna meningkatkan Rata-rata harapan lama sekolah masih kurang.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai gejala umum penyakit tidak menular masih kurang.





- e. Sistem pelayanan kesehatan pada layanan kesehatan tingkat pertama belum baik.
- f. Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan melalui berbagai gerakan bersama lintas sektor dan pemangku kepentingan non pemerintah lainnya masih rendah.
- g. Fasilitasi literasi digital dan talenta digital dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang berdaya saing pada industri 4.0. belum optimal.

### 2.5.3.2 Struktur Perekonomian Daerah masih belum kuat dan berkelanjutan

**Dominannya sektor pertambangan dan penggalian** dalam struktur perekonomian daerah menjadi salah satu yang membuat struktur ekonomi berkelanjutan masih belum kuat. Pada struktur perekonomian wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB atas dasar harga berlaku naik dari 18.71% di tahun 2019 menjadi 18.29%. Masih tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian harus menjadi perhatian mengingat sektor tersebut merupakan sektor yang tidak dapat diperbaharui sumber dayanya. sehingga perlu kebijakan riil terkait transformasi struktur ekonomi ke sektor lain seperti Industri, Pertanian dan Pariwisata dalam rangka mempertahankan kinerja perekonomian daerah untuk kedepannya. berdasarkan PDRB Provinsi Kalsel Tahun 2020. kontribusi sektor pertanian sebesar 14.39%. Industri 13.52% dan Perdagangan sebesar 10.46%.

**Pengeluaran konsumsi masyarakat yang cukup rendah** juga membuat perkembangan perekonomian mikro tidak tumbuh signifikan. Pengeluaran konsumsi masyarakat menunjukkan daya beli masyarakat di suatu wilayah yang mengindikasikan tinggi rendahnya perekonomian mikro dalam pembangunan daerah. Dalam kajian analisisnya. pengeluaran penduduk akan merepresentasikan pendapatan yang diterima dalam sebulan sehingga akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan secara menyeluruh.

**Pengeluaran rata-rata per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan** secara umum mengalami kenaikan di setiap periodenya yang dikarenakan adanya berbagai hal seperti laju inflasi. peningkatan arus komoditas barang. hingga perubahan gaya hidup masyarakat. Pada tahun 2020. pengeluaran per kapita masyarakat Kalimantan Selatan mencapai Rp.12.032 juta per tahun. Dalam sepuluh tahun terakhir. pengeluaran per kapita masyarakat rata-rata meningkat sebesar 1.68% per tahun. Covid-19 selama tahun 2020 memberikan dampak terhadap turunnya pengeluaran perkapita masyarakat Kalimantan Selatan dibandingkan tahun sebelumnya.





Selain itu, upaya transformasi ekonomi dengan menggeser kontribusi sektor pertambangan ke arah sektor-sektor antara lain: sektor Pertanian (dalam arti luas), Industri pengolahan, dan Perdagangan, sudah mulai terlihat meskipun belum optimal.

Sektor-sektor di bidang perekonomian seperti pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan, yang sampai saat ini masih memiliki potensi dan berperan penting dalam perekonomian Kalimantan Selatan. Sektor pertanian dan industri pengolahan tersebut cukup memiliki kontribusi dominan terhadap struktur perekonomian Kalimantan Selatan selain sektor pertambangan. Diharapkan, prospek sektor pertanian dan industri pengolahan akan memberikan *multiplayer effect* terhadap sektor dominan lainnya seperti perdagangan dan transportasi. Masih ketergantungan dengan komoditas bahan mentah/setengah jadi. Komoditas utama Kalimantan Selatan seperti batubara, sawit, karet dan kayu lapis kebanyakan langsung dijual tanpa pengolahan sehingga Ketika harga menurun sangat berpengaruh terhadap perekonomian Kalimantan Selatan. Dalam mendongkrak perekonomian tentunya diperlukan pemanfaatan adopsi teknologi digital dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian khususnya di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif yang mengarah pada hilirisasi produk-produk nya.

Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh adanya tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih mengalami perlambatan.

**Peningkatan investasi** pasca implementasi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan diproyeksikan akan tumbuh semakin efektif dan efisien dalam rangka menggerakkan semua sektor perekonomian. Dari sisi lapangan usaha, perlu perbaikan dari sisi industri manufaktur. Industri manufaktur harus didorong, salah satunya melalui strategi hilirisasi sumber daya alam. Selain industri manufaktur, peluang lain berasal dari sektor pariwisata.

### 2.5.3.3 Pembangunan Infrastruktur belum optimal dan merata

Pembangunan infrastruktur berkualitas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Keuntungan dalam peningkatan aksesibilitas wilayah tersebut adalah terbentuknya jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Hingga





saat ini, di Provinsi Kalimantan Selatan belum terpenuhi pemerataan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan di setiap lapisan masyarakat sehingga hasil pembangunan belum dinikmati secara maksimal.

Konsep membangun sejatinya perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang merupakan konsep pembangunan atas dasar penambahan nilai sumber daya. Energi alternatif merupakan sumber energi pengganti dari sumber energi yang pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. Saat ini peningkatan kebutuhan energi didominasi oleh energi fosil yang tak terbarukan tentunya tak ramah lingkungan. Energi terbarukan pada dasawarsa sekarang lebih dikenal dengan energi alternatif, seperti; tenaga air, panas bumi, mini/mikro hidro, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, bahan bakar nabati, biogas, dan sampah kota.

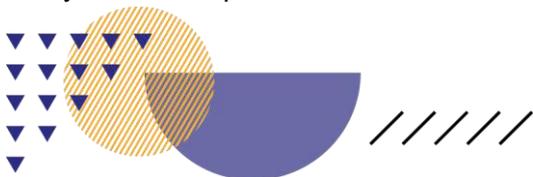
#### **2.5.3.4 Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Berbasis Digital belum Optimal**

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan tentunya juga berkaitan dengan upaya membangun daya saing daerah. Salah satu indikator pada daya saing adalah permasalahan konflik, salah satunya diukur dengan Indeks kerukunan umat beragama dimana keadaan ini dipengaruhi oleh pendidikan keluarga, peran pemerintah dan implementasi kebijakan lokal yang adil pada berbagai tatanan masyarakat.

Pembangunan daerah yang optimal akan terealisasi jika tiga unsur pembangunan daerah yakni pemerintah (government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan. Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berlandaskan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan asas transparansi, profesionalitas, dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur, merata, dan berkesinambungan.

Good governance merupakan tata laksana pemerintahan yang baik dalam artian seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi pemerintahan untuk menuju suatu tujuan yang baik. Good governance juga didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik secara umum. Dalam good governance mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas dalam melayani masyarakat maupun swasta untuk berkembang dari sisi kuantitas maupun kualitasnya di





segala bidang. Oleh karenanya, peran ini harus dijalankan dengan rasa amanah dan tanggungjawab yang tinggi agar tugas, pokok, dan fungsi pemerintah daerah berjalan sesuai dengan amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tantangan dalam perbaikan kinerja pemerintah daerah yaitu peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Pemda dalam mendukung akselerasi transformasi digital di Pemerintah Daerah.

### **2.5.3.5 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Masih Belum Optimal**

Proses pemanfaatan Sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat serta makhluk hidup lain.

\Namun Tidak dapat dipungkiri, penambahan penduduk, peningkatan urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi berdampak pada kualitas lingkungan. Permasalahan utama lingkungan di Kalimantan Selatan adalah masih belum optimalnya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)s. IKLH terdiri dari beberapa unsur yang menyumbang, antara lain Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Oleh karena itu, pencapaian target IKLH perlu didukung oleh peningkatan 4 (empat) unsur tersebut. Permasalahan lingkungan yang juga terkait dengan IKLH adalah meningkatnya potensi bencana daerah di Kalimantan Selatan yaitu banjir dan kabut asap yang harus mendapatkan penanganan yang lebih baik di masa depan karena berdampak pada kesehatan masyarakat.

Permasalahan lingkungan lain yaitu terkait penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Gas rumah kaca merupakan penyumbang terbesar pada perubahan iklim dunia. Gas rumah kaca terjadi karena adanya aktivitas yang menghasilkan karbon dengan sumber utama yang berasal dari aktivitas ekonomi. Kebijakan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon penting untuk diadaptasi dan diterapkan pada rencana pembangunan daerah.

### **2.5.4 Permasalahan Pembangunan Yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah :**

#### **1. Pertumbuhan Ekonomi Yang Fluktuatif**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat dengan





indikator seperti Pertumbuhan PDRB Riil Perkapita, Share Manufaktur (Industri Pengolahan) terhadap PDRB dan Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal

## 2. Kesempatan Kerja belum merata

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi dengan indikator Tingkat Kesempatan Kerja, Persentase penduduk bekerja penuh, Persentase tenaga kerja dengan tingkat Pendidikan Menengah Keatas.

## 3. Infrastruktur ekonomi belum kuat

Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi, dengan indikator Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik/PLN, Persentase Penduduk yang Memiliki Telepon Genggam, Persentase Jalan dengan Kondisi Baik dan Sedang

## 4. Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan dengan indikator Rasio Pendapatan, Sumbangan Pendapatan Perempuan, Rasio rata2 pengeluaran Rumah Tangga. Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan, dengan indikator Persentase Penduduk Miskin, Rata2 konsumsi protein perkapita perhari

## 5. Perluasan Akses dan Kesempatan

Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif, dengan indikator seperti Angka





Harapan Lama Sekolah, Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap, Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan

**Infrastruktur Dasar** yaitu akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan, dengan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak, Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Sendiri

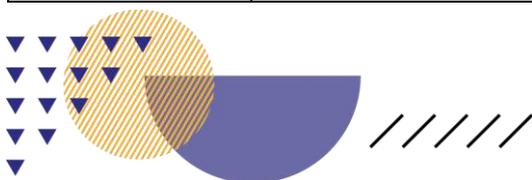
**Institusi keuangan** memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan ukuran Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap Penduduk Usia Produktif, Rasio Kredit Perbankan UMKM

### 2.5.5 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan pada urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel sebagai berikut :

**Tabel 2.154** Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan di SKPD Lingkup Pemprov Kalsel

URUSAN	PERMASALAHAN
<b>Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Capaian APK terendah di Kalimantan dan di bawah rata-rata Nasional;</li><li>▪ Capaian APM dan APS berada di peringkat 3 Kalimantan, namun masih di bawah rata-rata Kalimantan dan Nasional.</li><li>▪ Belum optimalnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;</li><li>▪ Belum adanya pemetaan link and match antara sekolah dengan dunia usaha dan industri;</li><li>▪ Belum meratanya penyebaran sekolah sesuai dengan penyebaran penduduk.</li></ul>
<b>Kesehatan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Capaian Angka Harapan Hidup masih di bawah rata-rata nasional.</li><li>▪ Angka Kematian Ibu masih relatif tinggi</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih terjadinya kematian bayi dan balita.</li><li>▪ Masih tingginya prevalensi penyakit menular</li><li>▪ Masih tingginya kasus penyakit tidak menular</li><li>▪ Angka Gizi buruk dan prevalensi stunting masih di atas rata-rata nasional.</li><li>▪ Pemenuhan SPM pada pelayanan krisis kesehatan dan penanganan KLB belum berjalan optimal</li><li>▪ Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap dan vaksinasi covid 19 belum optimal.</li><li>▪ Sumber daya manusia kesehatan yang sesuai standar masih rendah.</li></ul>
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih adanya jalan dan jembatan kewenangan Provinsi yang belum dalam kondisi mantap dan memenuhi standar (lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton)</li><li>▪ Jaringan jalan belum merata, konektivitas antar kawasan terutama daerah-daerah yang terisolir belum terhubung dengan baik, selain itu aksesibilitas pada kawasan-kawasan yang dianggap strategis daerah belum layak dan terhubung. Sehingga hal ini mengakibatkan tingkat mobilitas antar wilayah terbatas</li><li>▪ Masih rendahnya penyediaan air baku di Kabupaten/Kota karena adanya ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan air bersih.</li><li>▪ Belum optimalnya pembangunan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi sehingga berpengaruh terhadap belum terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi</li><li>▪ Masih rendahnya pembangunan infrastruktur dalam penanganan potensi abrasi pantai dan bencana banjir yang disebabkan daerah pengaliran sungai yang cukup luas dengan debit yang cukup besar</li><li>▪ Belum terpenuhinya akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman ke seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan</li><li>▪ Belum optimalnya pelayanan sistem air minum dan persampahan regional di Kalimantan Selatan sebagai pendukung akses pelayanan infrastruktur daerah secara regional.</li><li>▪ Masih kurangnya penataan bangunan gedung dan lingkungan di kawasan perkotaan dan kawasan strategis daerah Provinsi Kalimantan Selatan</li></ul>



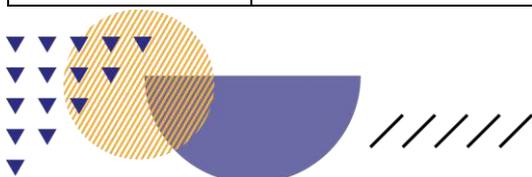


URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi yang ditandai masih rendahnya SDM bersertifikat secara professional.</li><li>▪ Belum optimalnya keselarasan perencanaan penataan ruang antar stakeholder yang diakibatkan kurangnya koordinasi, sinkronisasi serta system pendataan dan informasi.</li><li>▪ Masih diperlukan penyusunan rencana kawasan strategis provinsi yang aplikatif didukung dengan pemanfaatan dan pengendalian untuk mendukung kesesuaian dan keselarasan penataan ruang.</li></ul>
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah (Backlog Rumah) yang masih tinggi</li><li>▪ Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penanganan rumah di daerah rawan bencana dan program pemerintah yang belum optimal</li><li>▪ Masih luasnya kawasan permukiman kumuh di Kalimantan Selatan sehingga perlunya penanganan kawasan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru.</li><li>▪ Pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang tidak memenuhi standar, berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman</li><li>▪ Kurangnya kolaborasi antar SKPD terkait dalam penanganan masalah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan di permukiman yang layak</li><li>▪ Rendahnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak.</li></ul>
<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih tingginya pelanggaran K3;</li><li>▪ Lambatnya pelayanan tindak lanjut (respon time rate) dari pengaduan masyarakat;</li><li>▪ Masih tingginya indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) di Kalimantan Selatan;</li><li>▪ Masih rendahnya kapasitas penanganan risiko bencana;</li><li>▪ Rendahnya literasi masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;</li></ul>
<b>Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kurangnya sinergitas dan koordinasi dari berbagai pihak untuk menangani kompleksitas permasalahan PPKS.</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana baik dalam penampungan maupun perawatan dan rehabilitasi medik, untuk SPM pelayanan PPKS dalam panti.</li><li>▪ Penanganan rehabilitasi sosial belum maksimal;</li><li>▪ Peningkatan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum maksimal.</li><li>▪ Penanganan bencana masih belum optimal</li><li>▪ Updating Data Kemiskinan belum optimal</li></ul>
<b>Tenaga Kerja</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ketidakseimbangan antara penyediaan lapangan pekerjaan dengan kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja sehingga jumlah penganggur relatif besar;</li><li>▪ Lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keahlian sumber daya manusia yang ada;</li><li>▪ Wirausaha baru kurang berkembang dan belum adanya tempat atau wadah sebagai sarana penampung hasil produk kewirausahaan;</li><li>▪ Rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai oleh tingkat pendidikan formal angkatan kerja provinsi kalimantan selatan didominasi oleh tamatan (maksimal) sekolah dasar, termasuk di dalamnya mereka yang belum tamat dan tidak pernah sekolah;</li><li>▪ Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang hingga saat ini pada umumnya dirasakan masih jauh dari memadai;</li><li>▪ Sarana dan prasarana belum mendukung untuk melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan jaman maupun teknologi;</li><li>▪ Dengan adanya revolusi industri 4.0 maka dapat tercipta pengangguran yang dipengaruhi oleh melebarnya ketimpangan ekonomi karena peran digitalisasi dapat menggeser peran konvensional dalam pasar;</li></ul>
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengarusutamaan Gender belum berjalan optimal;</li><li>▪ Belum optimalnya pelayanan perlindungan perempuan;</li><li>▪ Belum optimalnya upaya perlindungan anak;</li><li>▪ Masih tingginya kasus perkawinan anak;</li></ul>
<b>Pangan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan dengan laju kemampuan produksinya;</li><li>▪ Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan. khususnya di wilayah-wilayah terpencil;</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Terbatasnya kemampuan dalam mengantisipasi dinamika permasalahan ketahanan pangan;</li></ul>
<b>Pertanahan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih rendahnya jumlah lahan bersertifikat, sehingga penanganan masalah pertanahan membutuhkan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).</li><li>▪ Masih minimnya data layanan untuk urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi</li><li>▪ Masih lambatnya proses penyelesaian pembebasan dan kasus pertanahan;</li></ul>
<b>Lingkungan Hidup</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kualitas Air Sungai yang Rendah</li><li>▪ Pengelolaan persampahan dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3);</li><li>▪ Luas Lahan Kritis yang berpotensi terus meningkat</li><li>▪ Potensi keanekaragaman hayati belum terkelola secara optimal</li><li>▪ Potensi kerusakan ekosistem gambut, mangrove dan terumbu karang di wilayah pesisir</li><li>▪ Perubahan Iklim</li></ul>
<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ belum maksimalnya cakupan akta kematian;</li><li>▪ belum maksimalnya cakupan akta perkawinan.</li><li>▪ belum maksimalnya cakupan akta kelahiran;</li><li>▪ Masih terdapat penduduk usia dewasa yang belum memiliki KTP;</li><li>▪ Masih tingginya pasangan pernikahan yang tidak memiliki akte nikah;</li></ul>
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum optimalnya pengelolaan lembaga ekonomi pedesaan (Manajemen Usaha);</li><li>▪ Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan;</li><li>▪ Masih terdapat desa dengan status desa tertinggal dan sangat tertinggal;</li><li>▪ Rendahnya indeks desa membangun.</li><li>▪ Masih lemahnya kualitas SDM masyarakat di pedesaan dalam pengelolaan Bumdes</li><li>▪ Masih kurangnya pembinaan terhadap Bumdes yang ada terutama untuk pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha di pedesaan</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
<b>Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum maksimalnya Penerapan Grand Desain Pembangunan Kependudukan;</li><li>▪ Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang belum ber KB;</li><li>▪ Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang putus ber KB;</li><li>▪ Masih banyak ditemukan usia kawin pertama di bawah rata-rata usia ideal (usia <math>\leq 21</math> tahun) pada Pasangan Usia Subur (PUS), sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.</li><li>▪ Kurangnya pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program kependudukan keluarga berencana yang ditujukan pada program pembangunan keluarga (KKBPK) untuk disesuaikan dengan program lini bawah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.</li></ul>
<b>Perhubungan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan jalan; belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antar kota, perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut juga dikarenakan masih kurang optimalnya penerapan peraturan sistem transportasi dan manajemen lalu lintas.</li><li>▪ Belum optimalnya sarana dan prasarana angkutan masal (bus rapat transit) untuk mengurangi kepadatan lalu lintas angkutan jalan dan pelayanan jasa transportasi daerah perkotaan.</li><li>▪ Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi.</li><li>▪ Masih tingginya jumlah fatalitas kecelakaan akibat dari kurangnya disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelayakan armada, ketiadaan rambu dan fasilitas keselamatan di jalan, serta rendahnya law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.</li><li>▪ Belum berkembangnya transportasi laut dan sungai yang representatif yang digunakan untuk perlintasan regional, nasional maupun internasional yang dapat digunakan untuk pengembangan transportasi orang maupun barang. Diperlukan dukungan investasi baik dari pemerintah maupun swasta untuk pengembangan serta sarana dan prasarana transportasi laut dan sungai baik regional maupun internasional</li><li>▪ Belum adanya Pembangunan transportasi perkeretaapian di Kalimantan Selatan sebagai pendukung perekonomian sebagai Pintu gerbang Ibu Kota Negara</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum optimalnya pelayanan jaringan penerbangan Bandar Udara Syamsudin Noor dan bandara lainnya di Kalimantan Selatan dalam melayani penerbangan komersial dari dan ke Kalimantan Selatan.</li><li>▪ Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan kebisingan) akibat dominannya pengguna lalu lintas kendaraan pribadi di jalan</li></ul>
<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi;</li><li>▪ Belum maksimalnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).</li><li>▪ Belum maksimalnya penyediaan informasi dan komunikasi public oleh pemerintah daerah.</li><li>▪ Terbatasnya infrastruktur akses internet dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar SKPD.</li><li>▪ Penerapan berbagi pakai data di SKPD belum maksimal</li><li>▪ Masih terdapat area blankspot di Kalimantan Selatan</li></ul>
<b>Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih rendah kualitas kinerja kelembagaan Koperasi;</li><li>▪ Masih banyaknya koperasi tidak aktif;</li><li>▪ Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat dari aparatur Koperasi;</li><li>▪ Lemahnya akses bagi KUKM pada sumber daya produktif (pembiayaan dan penjaminan);</li><li>▪ Lemahnya daya saing sumber daya manusia pada KUKM;</li><li>▪ Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi pasar domestik dan global;</li><li>▪ UMKM menurun dikarena dampak pandemi covid-19 yang melanda dunia, terkhusus di Indonesia;</li></ul>
<b>Penanaman Modal</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kinerja realisasi investasi PMA/PMDN tidak tercapai terkendala akibat covid 19 sehingga banyak perusahaan yang menunda realisasi investasinya</li><li>▪ Kurangnya Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA &amp; PMDN;</li><li>▪ Belum optimalnya Promosi Investasi yang berkelanjutan;</li><li>▪ Belum adanya Matchmaking dalam rangka kemitraan dunia usaha;</li></ul>
<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki masih jauh dari ketentuan yang seharusnya;</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi masih belum bisa dilakukan secara maksimal;</li><li>▪ SDM dengan kompetensi dan pengalaman profesional bidang kepemudaan masih sangat terbatas;</li><li>▪ Masih banyak organisasi pemuda yang pasif;</li><li>▪ Masih sedikitnya Wirausaha muda;</li><li>▪ Masih kurangnya kegiatan – kegiatan olahraga yang melibatkan peran serta masyarakat secara massal guna membudayakan olahraga di Kalimantan selatan.</li><li>▪ Masih kurangnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.</li></ul>
<b>Statistik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih rendahnya SDM Perstatistikan;</li><li>▪ Masih kurangnya sarana dan prasarana urusan statistik;</li><li>▪ Belum Optimalnya pengelolaan statistik sectoral;</li></ul>
<b>Persandian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih rendahnya SDM Perstatistikan;</li><li>▪ Masih kurangnya sarana dan prasarana urusan statistik;</li><li>▪ Belum Optimalnya pengelolaan statistik sectoral;</li></ul>
<b>Kebudayaan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum optimalnya penggalian potensi unsur budaya;</li><li>▪ Belum optimalnya pengembangan unsur budaya;</li><li>▪ Belum optimalnya aktualisasi unsur budaya;</li><li>▪ Sarana dan prasarana seni budaya masih kurang;</li><li>▪ Kurang produktifnya pelaku seni budaya daerah dalam berkarya</li><li>▪ Belum maksimalnya publikasi dan promosi Kebudayaan;</li><li>▪ Kurang optimalnya pembinaan terhadap lembaga budaya daerah</li></ul>
<b>Perpustakaan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum optimalnya perpustakaan digital;</li><li>▪ Rendahnya minat masyarakat Kalimantan Selatan untuk melakukan aktivitas membaca</li><li>▪ Masih Kurangnya Koleksi Bahan Pustaka yang terbaru untuk Layanan Umum, Referensi, Deposit, Layanan Anak, Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS).</li><li>▪ Belum optimalnya kegiatan pembinaan perpustakaan dan promosi perpustakaan.</li><li>▪ Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Perpustakaan</li></ul>
<b>Kearsipan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Depo arsip belum berjalan optimal;</li><li>▪ Kurangnya pemahaman ASN terhadap kearsipan;</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum lengkapnya regulasi daerah tentang pengelolaan arsip.</li><li>▪ Belum terlaksananya pengelolaan kearsipan secara handal dan komprehensif berbasis TIK</li><li>▪ Rendahnya komitmen pencipta Kearsipan skala Provinsi dalam menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Ke Kearsipan.</li></ul>
<b>Pariwisata</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mapping destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana prasarana dimiliki) yang hasil akhirnya adalah penyusunan pola perjalanan dengan berbagai pilihan: wisata budaya. wisata belanja, wisata alam. wisata minat khusus. wisata edukasi. agro dan ekowisata</li><li>▪ Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum menyatu Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait.</li><li>▪ Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dunia pariwisata dan dibandingkan kecepatan pemilik modal menginvestasikan modal dalam industri pariwisata</li><li>▪ Keterbatasan dana dan fokus kabupaten/kota dalam mengembangkan objek-objek wisatanya menjadi objek.</li><li>▪ Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata yang berkualitas masih belum memadai</li></ul>
<b>Kelautan Dan Perikanan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum optimalnya Pengembangan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya</li><li>▪ Belum dimanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya ikan di laut di wilayah &gt; 5 mil laut.</li><li>▪ Terbatasnya pembangunan dan pengembangan prasarana perikanan tangkap di titik sentra penangkapan ikan nelayan. khususnya dalam rangka mendukung penerapan sistem rantai dingin terhadap hasil tangkapan nelayan</li><li>▪ Belum berkembangnya kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan yang mandiri dan berbadan hukum</li><li>▪ Masih terbatasnya upaya pelestarian terhadap stock sumber daya ikan lokal. sehingga perlu adanya upaya pelepasliaran (restocking) di perairan umum</li><li>▪ Pada umumnya usaha pembudidaya ikan masih menerapkan sistem tradisional dan/atau sistem semi-intensif</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih besarnya ketergantungan pembudidaya ikan terhadap pakan ikan pabrikan yang menyebabkan tingginya biaya produksi budidaya ikan hingga 60 % khusus untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan</li><li>▪ Belum berkembangnya pengembangan usaha budidaya ikan lokal sebagai komoditas perikanan khas daerah</li><li>▪ Pada umumnya para pembudidaya ikan masih belum memahami tentang ketentuan dan penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)</li><li>▪ Masih terjadinya serangan hama dan penyakit ikan/udang di kawasan sentra pembudidayaan ikan</li><li>▪ Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</li><li>▪ Kesulitan pada akses permodalan usaha merupakan salah satu faktor yang membuat UMKM sektor kelautan dan perikanan terbatas pengembangannya dalam upaya peningkatan produktifitas dan kesejahteraannya</li><li>▪ Masih terbatasnya penyebarluasan informasi tentang potensi, peluang usaha, dan pengembangan investasi sektor kelautan dan perikanan.</li><li>▪ Masih terbatasnya penyebarluasan informasi dan penguatan edukasi kepada masyarakat tentang ikan dan manfaatnya bagi kesehatan, kekuatan, dan kecerdasan</li><li>▪ Masih terjadinya kegiatan illegal fishing di perairan umum maupun perairan laut di Kalimantan Selatan</li><li>▪ Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki POKMASWAS dan aparat pengawas dalam mendukung pelaksanaan operasional pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan di lapangan</li></ul>
<b>Pertanian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum optimalnya produksi tanaman pangan dan hortikultura</li><li>▪ Belum optimalnya kelembagaan penyuluhan dan petani</li><li>▪ Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air, serta Dampak Perubahan Iklim</li><li>▪ Belum optimalnya prasarana dan sarana pertanian</li><li>▪ Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian</li><li>▪ Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi pasar</li><li>▪ Masih rendahnya perlindungan terhadap petani dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani yang berbasis korporasi petani</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura masih belum tertata dengan baik</li><li>▪ Pembangunan Perkebunan Ramah Lingkungan masih kurang efektif</li><li>▪ Belum optimalnya Integrasi Sawit – Sapi</li><li>▪ Belum optimalnya pengembangan Kawasan perkebunan/peternakan berbasis korporasi pekebun/peternak</li><li>▪ Pemotongan ternak sapi betina produktif cukup tinggi</li><li>▪ Pengeluaran Ternak dan Hasil Ternak Keluar Kalimantan Selatan Cukup Banyak namun belum memberikan kontribusi yang memadai terhadap PAD.</li><li>▪ Penyakit Hewan yang mempengaruhi pembangunan peternakan</li><li>▪ Harga Pakan dan Bahan Pakan Ternak Unggas Cenderung Meningkat</li><li>▪ Jaminan Keamanan Pangan yang ASUH masih rendah</li><li>▪</li></ul>
<b>Kehutanan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih luasnya lahan kritis</li><li>▪ Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan berbasis Perhutanan Sosial;</li><li>▪ Masih rendahnya produksi dan pemasaran hasil KUPS yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kelola Perhutanan Sosial;</li><li>▪ Belum maksimalnya penerimaan Retribusi dan PNBK sektor kehutanan karena sedikitnya izin usaha pemanfaatan dan belum digalinya sumber-sumber pendapatan baru</li></ul>
<b>Energi Dan Sumber Daya Mineral</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menurunnya cadangan air tanah akibat pengembalian air tanah yang berlebihan atau tidak sesuai kemampuan daya dukung air tanah serta pemanfaatan tata ruang pada zona imbuhan air tanah.</li><li>▪ Kurangnya pengelolaan terhadap bukaan lahan tambang sehingga meninggalkan lubang bekas tambang (void) yang tidak/belum direklamasi. Salah satunya akibat pertimbangan tanpa izin yang masih marak sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan.</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam hal peningkatan bauran energi untuk pemenuhan kebutuhan energi.</li><li>▪ Kurangnya pembangunan infrastruktur ketegalistrikan di daerah terpencil yang lokasinya sulit terjangkau dan masih banyaknya rumah tangga miskin yang belum mendapatkan sambungan listrik.</li></ul>
<b>Perdagangan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Berlaku peraturan tentang larangan ekspor produk tambang menuntut adanya pergerakan investasi secara cepat dalam rangka hilirisasi produk – produk hasil tambang ;</li><li>▪ Maraknya barang beredar di pasaran yang belum memenuhi ketentuan standar dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen terutama produk elektronik dan mainan anak;</li><li>▪ Peningkatan penggunaan dan cinta produk dalam negeri dalam rangka memanfaatkan jumlah penduduk Indonesia sebagai potensi pasar yang besar ;</li><li>▪ Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia khususnya Kalimantan Selatan yang berdampak signifikan terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi yang belum ada kepastian kapan akan berakhirnya ;</li><li>▪ Masih terjadinya perang dagang antara Amerika dan Cina yang mengakibatkan penurunan produk ekspor Indonesia dan ini sudah barang tentu pasti berimbas kepada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan ;</li><li>▪ Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai 31 Desember 2015 menyebabkan terjadinya beberapa deregulasi perdagangan luar negeri terutama menyangkut pembebasan bea masuk untuk barang – barang dari ASEAN selain itu di dalam 2015 terjadi deregulasi beberapa barang ekspor yang merupakan produk unggulan ekspor Kalimantan Selatan seperti batu bara, produk hasil hutan dan produk minyak sawit (CPO);</li></ul>
<b>Perindustrian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pemasaran yang terbatas.</li><li>▪ Lemahnya struktur industri.</li><li>▪ Terbatasnya IKM yang memiliki izin usaha industri.</li><li>▪ Masih rendahnya kualitas SDM industri.</li><li>▪ Belum tersedianya lahan clear dan clean untuk sentra IKM dan kawasan industri yang mendukung penumbuhan dan pengembangan industri.</li></ul>





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum tersedianya data dan informasi industri yang memadai (valid dan up to date) untuk menarik investasi dan pengembangan industri.</li><li>▪ Lambatnya investasi di sektor hilir industri.</li><li>▪ Belum optimalnya pemanfaatan SDA lokal menjadi produk unggulan.</li><li>▪ Masih rendahnya produktivitas industri.</li><li>▪ Kurangnya jumlah wirausaha industri.</li></ul>
<b>Transmigrasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Terbatasnya lahan yang memenuhi kriteria 2 C dan 3</li><li>▪ Terbatasnya lahan yang memenuhi kriteria clean dan clear</li><li>▪ Rendahnya aspek legalitas dalam status kepemilikan lahan transmigrasi</li><li>▪ Kurang optimalnya kerjasama dengan daerah penerima peserta transmigrasi</li><li>▪ Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi Kurangnya koordinasi dengan skpd lain dalam hal peningkatan pemberdayaan transmigrasi.</li></ul>



# **BAB III**

# **KERANGKA**

# **EKONOMI**

# **DAN**

# **KEUANGAN**

# **DAERAH**





## BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah menjelaskan tentang kondisi perekonomian dan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kerangka Ekonomi Daerah memuat tentang kondisi ekonomi tahun lalu, serta perkiraan/proyeksi tahun berjalan dan yang akan datang yaitu tahun 2023 dan 2024. Kerangka ekonomi ini, antara lain mencakup indikator – indikator yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah beserta arah kebijakan pemerintah daerah untuk pembangunan perekonomiannya.

Kerangka Keuangan Daerah memuat kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian meliputi sumber – sumber pendapatan, belanja, dan pembiayaan.



RKPD TAHUN 2024  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 dirumuskan tidak lepas dari melihat pencapaian pembangunan ekonomi dan evaluasi capaian target tahun-tahun sebelumnya serta prospek dan tantangan perekonomian di masa yang akan datang. Pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 membuat kondisi ekonomi di seluruh belahan dunia memburuk yang memberikan dampak juga terhadap perekonomian Nasional dan Kalimantan Selatan. Hal ini karena setiap negara terhubung untuk melakukan perdagangan global di mana antara satu negara dan negara lain saling terhubung yang biasa disebut merupakan rantai pasok. Rantai pasok ini dimana satu negara mendapat pasokan perekonomian dari negara lain dan negara tersebut memberikan pasokan





ke negara lain. Ketika ada satu negara bermasalah, maka jaringan pasokan tersebut terganggu dan membuat dampak ke negara lain yang saling terhubung.

Pada tahun 2024 efek Covid-19 terus berangsur berkurang di mana pembatasan sosial terus dilonggarkan sehingga aktivitas masyarakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan untuk pemulihan perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2024. Perbaikan ekonomi ini tidak begitu saja berjalan dengan mudah karena di tengah perbaikan ekonomi pasca pandemi, perekonomian di seluruh dunia dihadapkan pada tantangan akibat dampak perang Rusia – Ukraina, inflasi yang tinggi, perubahan iklim yang ekstrem, krisis pangan, serta tuntutan era digitalisasi yang tumbuh sangat cepat. Hal – hal tersebut menjadi dasar arah kebijakan pertimbangan dalam merumuskan prioritas pembangunan perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2024.

### **3.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2022**

Kondisi pembangunan ekonomi daerah Kalimantan Selatan membahas gambaran mengenai capaian kerangka ekonomi makro daerah tahun – tahun sebelumnya beserta proyeksinya untuk tahun 2023 dan 2024. Gambaran kerangka ekonomi makro daerah ini terdiri atas Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Kemiskinan diuraikan sebagai berikut.

#### **3.1.1.1 Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pada Sub Bab ini disampaikan PDRB pada Tahun 2022 selama tiga tahun yaitu Tahun 2020, 2021, dan 2022. PDRB tersebut antara lain berdasarkan harga konstan, harga berlaku, lapangan usaha, dan pengeluaran.

Secara umum, PDRB Kalimantan Selatan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp. 142,33 Triliun atas dasar harga konstan (ADHK) dan senilai Rp. 251,25 Triliun atas dasar harga berlaku (ADHK). Pada PDRB ini, ada beberapa hal yang dapat disoroti sebagai berikut.

1. Berdasarkan harga berlaku, maka tiga lapangan usaha dengan share terbesar dari PDRB Kalimantan Selatan secara berurutan adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta sektor Industri Pengolahan.





2. Berdasarkan harga berlaku tersebut, dapat juga disoroti bahwa nilai produk sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh sangat signifikan, demikian juga dengan share-nya.
3. Berdasarkan harga berlaku, maka tiga jenis komponen pengeluaran dengan share terbesar dari PDRB Kalimantan Selatan secara berurutan adalah sektor Ekspor, sektor Konsumsi Rumah Tangga, dan sektor Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto).
4. Tingginya nilai share ekspor sangat berkaitan dengan lapangan usaha sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Rincian PDRB menurut lapangan usaha disampaikan pada Tabel 3.1, dan Tabel 3.2, berikut.

**Tabel 3.1** PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)

Keterangan Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.786,22	26.827,76	28.635,33	18.390,80	18.606,67	18.884,18
Pertambangan dan Penggalian	32.759,69	37.308,54	80.520,10	31.920,34	33.295,01	35.088,49
Industri Pengolahan	24.215,50	26.862,85	28.615,17	16.298,97	17.314,00	17.850,03
Pengadaan Listrik dan Gas	274,73	294,97	320,96	163,76	171,4	184,86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	805,8	855,21	912,80	572,86	601,69	630,96
Konstruksi	14.803,23	15.742,37	17.267,78	10.075,35	10.364,04	10.812,57
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.731,97	19.798,25	22.758,70	11.972,12	12.235,52	13.202,32
Transportasi dan Pergudangan	11.796,54	12.116,84	15.764,97	7.773,29	7.913,71	9.298,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.846,30	4.006,24	4.506,71	2.628,49	2.688,92	2.966,30
Informasi dan Komunikasi	7.032,16	7.586,35	8.298,94	5.510,90	5.908,86	6.319,21
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.569,43	6.933,86	7.461,55	4.316,33	4.367,68	4.384,93
Real Estate	4.352,93	4.676,17	5.072,21	3.144,11	3.310,58	3.513,45
Jasa Perusahaan	1.309,54	1.379,20	1.543,08	806,23	835,41	898,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.416,99	11.722,82	12.024,99	7.045,53	7.138,27	7.182,47
Jasa Pendidikan	9.093,59	9.464,28	9.932,27	6.117,21	6.211,32	6.429,09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.959,50	4.543,25	4.864,99	2.613,23	2.916,03	3.047,17
Jasa Lainnya	2.396,99	2.457,61	2.755,99	1.516,07	1.533,73	1.646,94
<b>Total</b>	<b>179.151,11</b>	<b>192.576,58</b>	<b>251.256,54</b>	<b>130.865,59</b>	<b>135.412,85</b>	<b>142.339,28</b>

Sumber: BPS Kalsel (2023)

**Tabel 3.2** PDRB Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)





Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	87.613,07	90.009,58	103.373,70	61.910,60	62.402,19	65.961,81
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.938,95	2.007,59	2.193,86	1.247,68	1.261,41	1.324,75
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21.958,26	23.142,89	24.626,55	13.390,26	13.867,35	13.819,54
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	44.894,25	46.338,64	51.624,13	30.050,30	30.299,67	31.912,83
Perubahan Inventori	70,57	95,34	-859,82	52,35	68,14	-550,67
Ekspor Barang dan Jasa	100.277,35	147.958,03	225.887,72	89.258,23	106.230,89	119.484,26
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	77.658,35	116.975,49	155.589,61	65.052,06	78.716,79	89.613,25
<b>Total</b>	<b>179.151,11</b>	<b>192.576,58</b>	<b>251.256,54</b>	<b>130.865,59</b>	<b>135.412,85</b>	<b>142.339,28</b>

Sumber: BPS Kalsel (2023)

Sama halnya dengan PDRB, selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2022, PDRB ADHK Perkapita terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 ke 2022, PDRB ADHK Perkapita yakni dari Rp. 32,85 juta menjadi Rp. 34,03 juta. Hal ini memperlihatkan bahwa tahun 2022 terjadi peningkatan Rp. 1,18 Juta dari tahun sebelumnya.

**Tabel 3.3** PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2017 – 2022

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHB (Rp. milyar)	159.104,55	171.684,06	180.560,65	179.151,11	192.576,58	251.256,54
PDRB ADHK (Rp. milyar)	121.858,52	128.052,58	133.271,55	130.865,59	135.412,85	142.339,28
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28	5,08	4,08	-1,81	3,47	5,11
Jumlah Penduduk (orang)	4.119.794	4.182.695	4.244.096	4.073.584	4.122.576	4.182.080
PDRB ADHK Perkapita (Rp. juta)	29,58	30,61	31,4	32,13	32,85	34,03
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Perkapita (%)	3,64	3,48	2,58	2,32	2,24	3,59

### 3.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian daerah juga dapat dijelaskan melalui Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. LPE dapat digunakan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik untuk mengukur





pertumbuhan ekonomi secara tahunan maupun secara rinci dengan melihat kondisi per sektor maupun spasial. Indikator ini dapat menggambarkan sektor-sektor potensial di suatu daerah.

Pada kondisi perekonomian terbaru tahun 2022, perekonomian Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berasal dari berbagai sumber. Ada yang berasal dari internal yang terjadi secara lokal di Kalimantan Selatan, maupun dari sumber eksternal yaitu nasional dan global. Dinamika perekonomian Kalimantan Selatan ini biasanya dideskripsikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan melalui Perkembangan Perekonomian Kalimantan Selatan yang dipublikasikan setiap triwulan. Adapun deskripsi singkat perkembangan setiap triwulan tersebut disampaikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

#### A. Triwulan I pada Tahun 2022

Fenomena perekonomian global secara tidak langsung memiliki peran pada perkembangan perekonomian Kalimantan Selatan. Awal tahun 2022, pemulihan ekonomi global diproyeksikan menguat karena dampak kemunculan varian Omicron pada Covid-19 hanya bersifat pendek. Namun, konflik Rusia-Ukraina pada Februari 2022 menghambat pemulihan tersebut. Konflik tersebut antara lain mempengaruhi harga bahan bakar sehingga berdampak juga dengan tidak stabilnya harga komoditas lain, termasuk komoditas ekspor Kalimantan Selatan.

Sedangkan secara lokal catatan peristiwa yang terjadi di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

- Realisasi pengadaan semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mengalami peningkatan sebesar 10,23 persen secara y-on-y.
- Penumpang angkutan udara yang berangkat mengalami peningkatan sebesar 10,10 persen secara q-to-q dan 40,20 persen secara y-on-y. Sementara penumpang angkutan laut sebesar 309,33 persen secara q-to-q dan 94,02 persen secara y-on-y.
- Impor barang modal Kalimantan Selatan mengalami kenaikan dibanding Triwulan I-2021.





- Tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk pegawai pemerintah daerah kabupaten/kota belum dibayarkan di Triwulan I tahun 2022 sehingga belanja pegawai tumbuh negatif dibandingkan Triwulan I tahun 2021.
- Pelaksanaan kegiatan Isra Mi'raj di berbagai tempat membuat kegiatan pada lembaga keagamaan meningkat menjadi faktor peningkatan pengeluaran konsumsi LPNRT.

## B. Triwulan II pada Tahun 2022

Kondisi perekonomian global sangat bergejolak pada Triwulan II tahun 2022 akibat terjadinya konflik Rusia-Ukraina sejak akhir Februari 2022. Hal ini memperburuk rantai pasokan global dengan menyebabkan kenaikan harga beberapa komoditas energi secara signifikan, serta mempercepat kenaikan inflasi di seluruh dunia. Akibatnya pemulihan ekonomi global melambat sempat terhambat.

Adapun secara lokal catatan peristiwa yang terjadi di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

- Memasuki periode puncak panen padi di Kalsel pada *subround 2* (Mei - Agustus).
- Penumpang berangkat angkutan udara Triwulan II tahun 2022 meningkat 31,16 persen (q-to-q) dan 34,83 persen (y-on-y). Sementara penumpang berangkat angkutan laut meningkat 43,90 persen (q-to-q) dan 88,91 persen (y-on-y).
- Rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang Bulan April-Juni 2022 sebesar 34,85, 52,72, dan 53,05 persen. Sementara hotel non-bintang sebesar 19,11, 23,95, dan 23,35 persen. Meningkat dari April-Juni 2021 sebesar 34,20, 31,78, dan 41,45 persen untuk hotel berbintang dan 17,91, 17,71, dan 22,73 persen untuk hotel non-bintang.
- Momen Idul Fitri tahun 2022 dan libur tahun ajaran sekolah meningkatkan pergerakan penumpang transportasi umum dan aktivitas wisata di tempat rekreasi.





- Peningkatan pendapatan agen dan biro perjalanan wisata seiring dengan meningkatnya animo masyarakat untuk beribadah umroh selama bulan Ramadhan. Relaksasi kebijakan terkait perjalanan domestik dan internasional juga turut berperan positif dalam peningkatan pendapatan ini
- Peningkatan permintaan dan konsumsi masyarakat selama Bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2022 yang didorong oleh pembayaran THR.
- Realisasi belanja pemerintah mengalami kontraksi dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2021, salah satunya karena pergeseran jadwal pencairan Gaji ke-13 yang pada Tahun 2021 dibayarkan di Triwulan II, sementara Tahun 2022 dibayarkan pada Triwulan III. Meskipun demikian, kebijakan belanja pemerintah untuk menyerap barang/jasa dengan Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) 40 persen sudah efektif.

### C. Triwulan III pada Tahun 2022

Tercatat ada beberapa peristiwa lokal yang terjadi di Kalimantan Selatan yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian. Peristiwa-peristiwa yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- Siklus panen padi di Kalimantan Selatan berada dalam periode puncak panen pada *subround 2* (Mei-Agustus).
- Penumpang berangkat dengan angkutan udara dan angkutan laut dari Kalimantan Selatan meningkat signifikan secara y-on-y.
- Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang Bulan Juli-September 2022 sebesar 52,54, 49,75, dan 53,14 persen, lebih tinggi dibanding periode Juli-September 2021 sebesar 34,28, 32,88, dan 41,88 persen. Sementara hotel non-bintang Bulan Juli-September 2022 sebesar 26,98, 20,74, dan 23,37 persen, lebih tinggi dari Juli-September 2021 sebesar 16,35, 19,54, dan 21,18 persen.
- Antusiasme masyarakat untuk beribadah umroh masih tinggi meskipun harga tiket penerbangan meningkat.





- Pencairan Gaji ke-13 bagi ASN, TNI, dan Polri pada awal Triwulan III tahun 2022.
- Realisasi belanja APBN dan APBD Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan positif dibanding Triwulan II tahun 2022.
- Inflasi Kalimantan Selatan tahun ke tahun pada bulan September 2022 sebesar 7,35 persen.
- Ekspor Kalimantan Selatan di Triwulan III tahun 2022 mengalami peningkatan, baik secara q-to-q maupun secara y-on-y.

#### D. Triwulan IV pada Tahun 2022

Tercatat ada beberapa peristiwa yang terjadi di Kalimantan Selatan yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian. Peristiwa adalah sebagai berikut:

- Jumlah penumpang di moda transportasi udara dan laut hampir seluruhnya mengalami peningkatan pada Triwulan IV tahun 2022:
  - Penumpang berangkat melalui angkutan udara tumbuh 13,17 persen (q-to-q) dan 53,43 persen (yon-y).
  - Penumpang berangkat melalui angkutan laut tumbuh -1,26 persen (q-to-q) dan 346,74 persen (y-on-y).
- Selama periode Pandemi Covid-19, mobilitas masyarakat di Kalimantan Selatan mencapai puncaknya pada Triwulan IV tahun 2022 (dibandingkan dengan *baseline date*, 3 Januari s.d. 6 Februari 2020).
- Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang Bulan Oktober-Desember 2022 sebesar 60,51, 56,77, dan 63,68 persen, lebih tinggi dibandingkan Bulan Oktober-Desember 2021 sebesar 50,67, 53,44, dan 57,63 persen. Sementara hotel non-bintang Bulan Oktober-Desember 2022 sebesar 25,32, 24,19, dan 28,92 persen, lebih tinggi dibandingkan Bulan Oktober-Desember 2021 sebesar 23,34, 24,34, dan 26,68 persen





- Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional XXIX Tahun 2022 di Kalimantan Selatan diselenggarakan pada tanggal 10-19 Oktober 2022.
- Inflasi Kalimantan Selatan tahun ke tahun Bulan Desember 2022 sebesar 6,99 persen.
- Nilai ekspor luar negeri Kalimantan Selatan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 55,14 persen. Sementara impor luar negeri mengalami kenaikan sebesar 67,64 persen dibandingkan dengan tahun 2021.
- Realisasi Belanja Pemerintah APBD Tahun 2022 mengalami kenaikan untuk jenis belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Sebaliknya, realisasi Belanja Pemerintah APBN turun untuk jenis belanja tersebut dibandingkan dengan tahun 2021.
- Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tercatat di BKPM Tahun 2022 sebesar Rp. 12,31 Triliun meningkat 11,87 persen dibandingkan dengan Tahun 2021. Demikian pula dengan Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2022 sebesar US\$ 208,1 Juta, meningkat 77,56 persen dibandingkan dengan Tahun 2021.

Bila diambil kesimpulan, terdapat 5 sektor lapangan usaha yang pertumbuhannya dapat disorot. Sektor lapangan usaha tersebut adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh di tingkat 7,15 persen, Pertambangan dan Penggalan (5,60 persen), Konstruksi (4,33 persen), Industri Pengolahan (3,31 persen), dan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (1,45 persen). Sementara itu, laju pertumbuhan per komponen pada sisi pengeluaran tertinggi dicatatkan oleh ekspor sebesar 13,32 persen pada tahun 2022. Adapun uraian singkat mengenai laju pertumbuhan menurut lapangan usaha dan sisi pengeluarannya tahun 2022 disajikan pada Gambar III.2 berikut.





Sumber: BPS Kalsel (2023)

**Gambar 3.1** LPE Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha dan Komponen Pengeluaran pada Tahun 2022

Pada jangka panjang, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan terus tumbuh positif. Pertumbuhan positif ini juga warnai adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi ketika terjadi pandemi Covid-19, Laju Pertumbuhan Ekonomi ini sempat berkontraksi hingga minus bila dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan juga mengalami fluktuasi meskipun cenderung mengalami perlambatan selama periode tahun 2013 – 2022. Pada Tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 5,33 persen. Laju pertumbuhan tersebut terus melambat hingga pada Tahun 2015 dengan catatan yang hanya sebesar 3,82 persen.

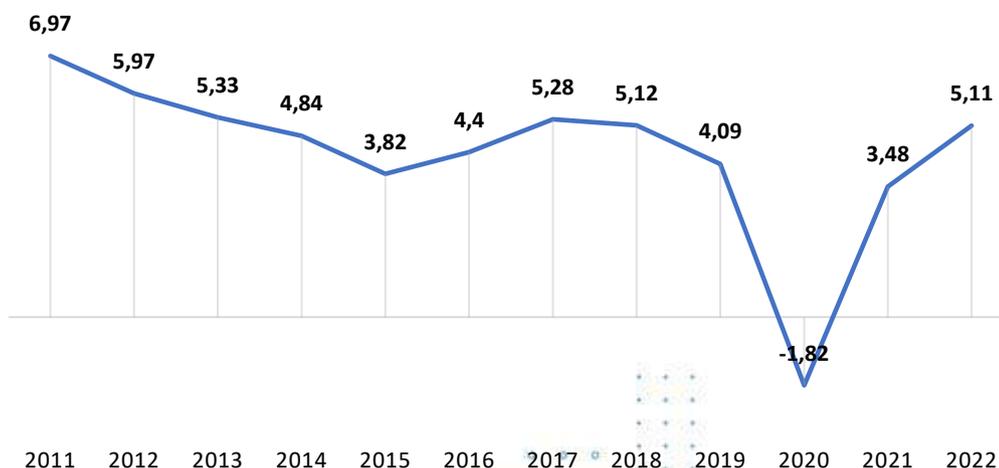
Pada Tahun 2016 dan 2017 LPE Kalimantan Selatan mulai menunjukkan angka yang membaik. Di Tahun 2016 LPE tercatat tumbuh lebih cepat di angka 4,40 persen. Kemudian terus mengalami kenaikan di Tahun 2017 sebesar 5,28 persen. Salah satu faktor utama membaiknya indikator LPE adalah fenomena commodities boom. Akan tetapi, perlambatan kembali tercatat pada Tahun 2018 dan 2019. Pada periode tersebut LPE tercatat tumbuh melambat di angka 5,13 persen dan 4,01 persen. Pada Tahun 2020 perekonomian Kalimantan Selatan tercatat mengalami pertumbuhan negatif di angka -1,81 persen. Kontraksi pada LPE ini terjadi akibat imbas Pandemi Covid-19 yang menghantam sisi permintaan maupun sisi pasokan, baik secara nasional, global, maupun di tingkat lokal daerah. Kebangkitan ekonomi terlihat pada Tahun 2021 di saat LPE Kalimantan Selatan tercatat tumbuh sebesar 3,48 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perekonomian di Kalimantan Selatan sudah mulai bangkit pasca Pandemi Covid-





19. Hal ini pun tergambar pada Tahun 2022 saat LPE mampu menyentuh angka 5,11 persen.

Adapun fluktuasi LPE di Kalimantan Selatan pada periode 2011 – 2022 dijelaskan pada Gambar 3.2 berikut.



**Gambar 3.2** Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2022

Berdasarkan rilis data BPS Kalimantan Selatan, Perekonomian Kalimantan Selatan 2022 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 142,34 Triliun.

Ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2022 tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,48 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha sektor Transportasi dan Pergudangan 17,43 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen sektor Ekspor Barang dan Jasa sebesar 13,32 persen.

LPE Kalimantan Selatan Tahun 2022 pada sisi pengeluaran dan lapangan usaha bersumber dari sektor-sektor utama. Tabel III.4 menjelaskan bahwa sumber pertumbuhan tertinggi di sisi pengeluaran adalah pada komponen sektor ekspor, konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto. Fenomena pertumbuhan sektor konsumsi rumah tangga pada Tahun 2022 ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat sudah menunjukkan perbaikan setelah sempat





menurun selama pandemi Covid-19. Tabel 3.4. Pada Tabel 3.5 menunjukkan bahwa sumber pertumbuhan terbesar di sisi lapangan usaha adalah pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

**Tabel 3.4** LPE Kalimantan Selatan Tahun 2017–2022 Menurut Pengeluaran Beserta Sumber Pertumbuhan

Komponen pengeluaran	LPE (%)						Sumber Pertumbuhan (%)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah tangga	4,82	5,03	4,01	-0,26	0,79	5,37	2,26	2,35	1,87	-0,12	0,38	2,48
Konsumsi LNPRT	5,58	8,74	7,97	-2,4	1,1	5,02	0,05	0,07	0,08	-0,02	0,01	0,05
Konsumsi Pemerintah	1,02	2,53	2,91	-2,57	3,56	-0,56	0,11	0,27	0,3	-0,27	0,37	-0,06
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4,3	8,01	6,37	-1,49	0,83	5,16	0,95	1,75	1,42	-0,32	0,18	1,16
Perubahan Inventori	-145,4	215	-47	-89,3	-	-908,12	0,81	0,52	-0,34	-0,33	0,01	-0,46
Ekspor Barang dan Jasa	8,96	5,97	2,12	-10,83	19,02	13,32	6,57	4,53	1,63	-8,16	12,98	10,37
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	10,18	7,84	1,52	-13,15	21,01	14,60	5,46	4,41	0,88	-7,41	10,45	8,43
<b>Laju Pertumbuhan</b>	<b>5,28</b>	<b>5,08</b>	<b>4,08</b>	<b>-1,82</b>	<b>3,48</b>	<b>5,11</b>	<b>5,28</b>	<b>5,08</b>	<b>4,08</b>	<b>-1,81</b>	<b>3,48</b>	<b>5,11</b>

Sumber: BPS (2023) diolah

**Tabel 3.5** LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2017–2022 Menurut Lapangan Usaha Beserta Sumber Pertumbuhan

Komponen Lapangan Usaha	LPE (%)						Sumber Pertumbuhan (%)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,09	3,73	3,59	-0,95	1,16	1,45	0,59	0,53	0,5	-0,13	0,16	0,20
Pertambangan dan Penggalian	4,09	4,11	1,43	-4,44	4,35	5,6	1,08	1,07	0,37	-1,12	1,05	1,38
Industri Pengolahan	5,69	4,34	1,45	-3,63	6,23	3,31	0,74	0,57	0,19	-0,43	0,78	0,42
Pengadaan Listrik, Gas	3,6	7,58	4,72	4,74	4,66	7,85	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,74	6,83	5,59	5,83	5,03	4,87	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	5,78	5,89	6,08	-1,29	2,87	4,33	0,43	0,44	0,46	-0,1	0,22	0,33
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi	7,8	7,54	7,42	-3,38	2,2	7,15	0,67	0,66	0,67	-0,32	0,2	0,65





Komponen Lapangan Usaha	LPE (%)						Sumber Pertumbuhan (%)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mobil dan Sepeda Motor												
Transportasi dan Pergudangan	6,86	6,97	5,92	-5,32	1,81	17,43	0,4	0,41	0,36	-0,33	0,11	1,02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,84	7,01	7,41	-2,02	2,3	9,63	0,13	0,13	0,14	-0,04	0,05	0,19
Informasi dan Komunikasi	7,94	6,89	7,33	7,36	7,22	6,94	0,28	0,25	0,27	0,28	0,3	0,30
Jasa Keuangan	6	4,24	1,66	1,37	1,19	0,39	0,2	0,14	0,05	0,04	0,04	0,01
Real Estate	5,14	5,01	5,95	3,88	5,29	5,87	0,11	0,11	0,13	0,09	0,13	0,14
Jasa Perusahaan	7,14	7,67	7,29	-1,99	3,62	7,53	0,04	0,04	0,04	-0,01	0,02	0,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,39	3,77	6,65	0,73	1,49	0,53	0,13	0,2	0,34	0,04	0,07	0,03
Jasa Pendidikan	6,61	7,02	7,54	1,62	1,54	3,51	0,28	0,3	0,33	0,07	0,07	0,16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,56	5,94	5,89	7,51	10,89	5,31	0,1	0,11	0,11	0,13	0,23	0,11
Jasa lainnya	6,59	7,38	7,08	-1,46	1,16	6,78	0,07	0,08	0,08	-0,02	0,01	0,08
<b>Laju Pertumbuhan</b>	<b>5,3</b>	<b>5,1</b>	<b>4,1</b>	<b>-1,82</b>	<b>3,48</b>	<b>5,11</b>	<b>5,3</b>	<b>5,08</b>	<b>4,08</b>	<b>-1,81</b>	<b>3,48</b>	<b>5,11</b>

Sumber: BPS (2022) diolah

### 3.1.1.3 Kontribusi PDRB Antar Wilayah

Secara Regional Kalimantan, LPE Kalimantan Selatan untuk Tahun 2022 berada di posisi ke tiga di antara lima provinsi yang berada di Pulau Kalimantan. LPE Kalimantan Selatan di angka 5,11 persen lebih tinggi jika dibandingkan Kalimantan Timur (4,48 persen) dan Kalimantan Barat (5,07 persen). Namun, LPE Kalimantan Selatan ini lebih rendah jika dibandingkan Kalimantan Utara (5,34 persen) dan Kalimantan Tengah (6,45 persen). Perbandingan LPE secara regional Kalimantan diuraikan pada Gambar 3.3 berikut.



Sumber: BPS Kalsel (2023)

**Gambar 3.3** Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Regional Kalimantan Tahun 2022

Berdasarkan kewilayahan kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Selatan. Maka ada tiga wilayah dengan share PDRB terbesar di Kalimantan Selatan. Wilayah tersebut secara berurutan adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu.





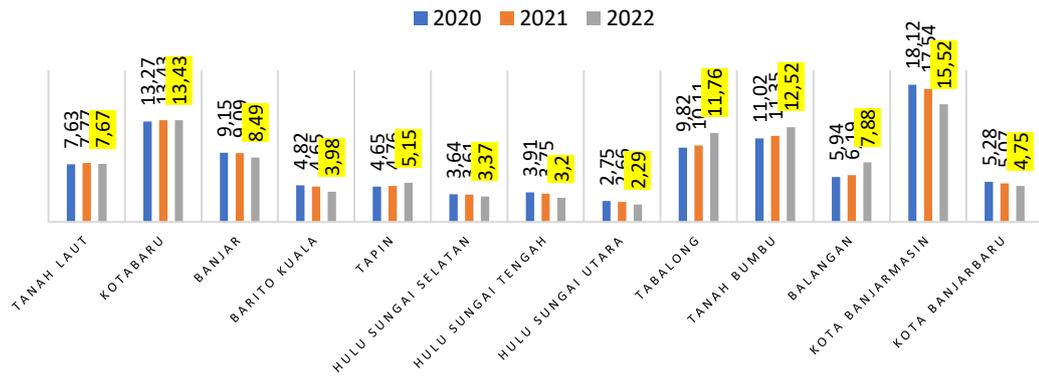
**Tabel 3.6** PDRB Kalimantan Selatan Menurut Wilayah (Milyar Rupiah)

Keterangan Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Tanah laut	13.902,30	13.786,69	19.019,18	10.366,65	10.164,06	11.053,37
Kotabaru	24.113,35	23.959,56	33.313,30	17.637,05	17.306,37	18.703,45
Banjar	16.626,08	16.528,58	21.071,72	11.967,13	11.732,65	12.651,28
Barito Kuala	8.696,33	8.710,47	9.871,87	5.822,27	5.760,37	6.155,85
Tapin	8.438,25	8.393,89	12.770,26	6.454,99	6.358,49	6.898,88
Hulu Sungai Selatan	6.555,48	6.564,02	8.349,10	4.706,46	4.650,22	5.039,67
Hulu Sungai Tengah	7.039,39	7.052,35	7.947,82	4.882,21	4.832,75	5.174,08
Hulu Sungai Utara	4.940,27	4.968,42	5.671,78	3.325,25	3.303,08	3.549,11
Tabalong	18.175,41	17.744,39	29.172,84	14.853,25	14.482,84	15.746,27
Tanah bumbu	20.036,05	19.899,65	31.058,59	15.613,39	15.395,66	16.920,76
Balangan	11.027,66	10.722,30	19.540,39	9.409,83	9.177,87	9.974,65
Kota Banjarmasin	33.012,59	32.720,17	38.498,36	22.348,71	21.925,24	23.966,97
Kota Banjarbaru	9.701,10	9.539,05	11.788,18	6.232,67	6.118,39	6.823,28
<b>Total</b>	<b>179.151,11</b>	<b>192.576,58</b>	<b>248.073,39</b>	<b>130.865,59</b>	<b>135.412,85</b>	<b>142.339,28</b>

Sumber: BPS Kalimantan (2023)

Secara kewilayahan kabupaten dan kota, lima kabupaten/kota yang memiliki share PDRB terbesar di Kalimantan Selatan pada Tahun 2022. Wilayah tersebut adalah Kota Banjarmasin (15,52 persen), Kabupaten Kotabaru (13,43 persen), Kabupaten Tanah Bumbu (12,52 persen), Kabupaten Tabalong (11,76 persen), dan Kabupaten Banjar (8,49 persen). Apabila dilihat dari kontribusi per lapangan usaha untuk ke-lima kabupaten/kota tersebut, maka lapangan usaha sektor pertambangan dan penggalian masih merupakan lapangan usaha yang paling besar kontribusinya, disusul lapangan usaha sektor industri pengolahan, dan lapangan usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Share PDRB yang dimaksud diuraikan pada Gambar 3.4 berikut.





Sumber: BPS (2023) diolah

**Gambar 3.4** Share Perekonomian (%) Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2022

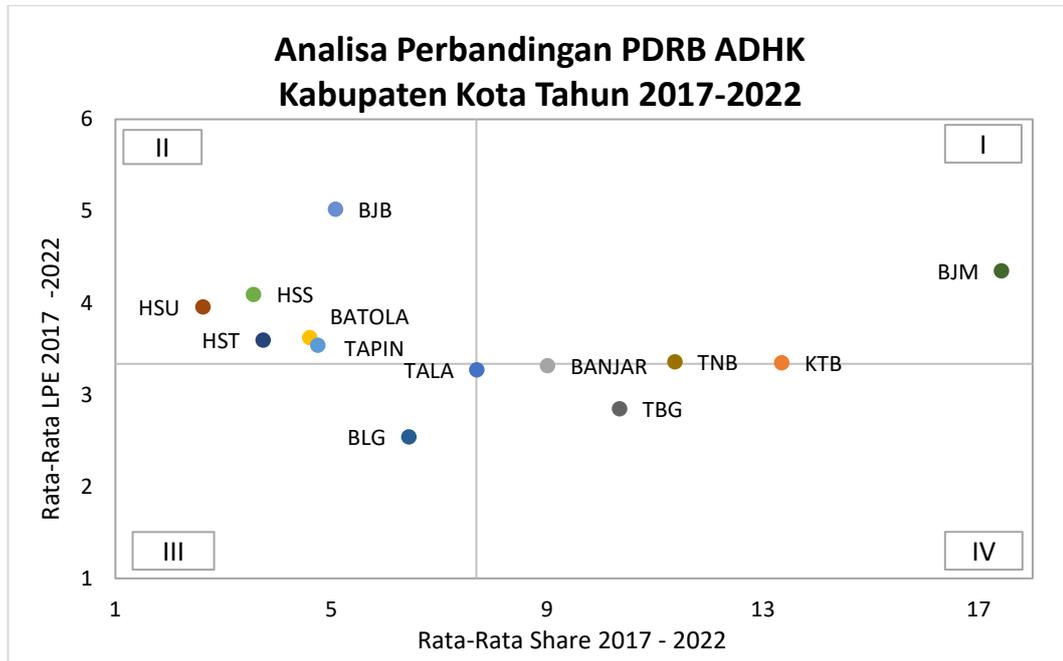
Secara spasial, Bab Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah ini mengidentifikasi kabupaten/kota yang menjadi wilayah pertumbuhan di Kalimantan Selatan dengan menggunakan Analisis Tipologi Klassen. Berdasarkan analisis tipologi tersebut terdapat empat kuadran wilayah yang disajikan pada Gambar 3.5 dan dideskripsikan sebagai berikut.

- Kuadran I merupakan wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan kontribusi yang besar selama lima tahun terakhir (2017-2022). Daerah yang berada di Kuadran I adalah Banjarmasin, yang ditopang oleh kegiatan-kegiatan ekonomi sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan, dan jasa);
- Kuadran II merupakan wilayah daerah berkembang, yang memiliki rata-rata pertumbuhan relatif tinggi namun rata-rata kontribusi PDRB-nya masih relatif rendah. Daerah yang berada pada wilayah ini yakni Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tapin, dan Banjarbaru;
- Kuadran III merupakan daerah yang relatif tertinggal di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB yang relatif rendah. Daerah yang berada di wilayah ini adalah Tapin, Tanah Laut dan Balangan;
- Kuadran IV merupakan daerah maju namun tertekan, di mana kontribusi PDRB yang relatif tinggi namun pertumbuhannya relatif rendah.





Adapun daerah yang masuk pada klasifikasi ini adalah Kotabaru, Banjar, Tabalong, dan Tanah Bumbu.



**Gambar 3.5** Tipologi Klassen PDRB ADHK Kabupaten/Kota pada tahun 2017-2022 di Kalimantan Selatan

#### 3.1.1.4 Kesenjangan Wilayah

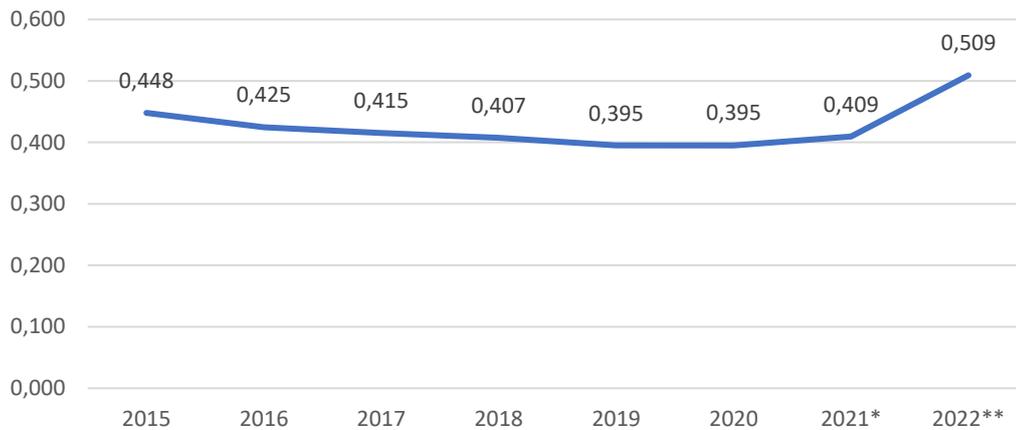
Pada periode 2015-2022, Kalimantan Selatan menunjukkan kesenjangan wilayah yang mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari hasil analisis kesenjangan wilayah menggunakan Indeks Williamson yang menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pada tahun terakhir indeks tersebut. Indeks Williamson menganalisis kesenjangan menggunakan koefisien variasi dari PDRB per kapita kabupaten/kota.

Pada Tahun 2022, Indeks Williamson tercatat pada nilai 0,509. Nilai ini naik sebanyak 0,061 poin dari nilai indeks pada Tahun 2015. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa daerah yang sangat bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi dan beberapa daerah yang bergantung pada sektor pertanian tumbuh lebih lambat. Perubahan nilai Indeks Williamson pada periode 2015-2022 ini tergambar pada Gambar 3.6 berikut.





### Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2022



Sumber: BPS Kalsel 2023

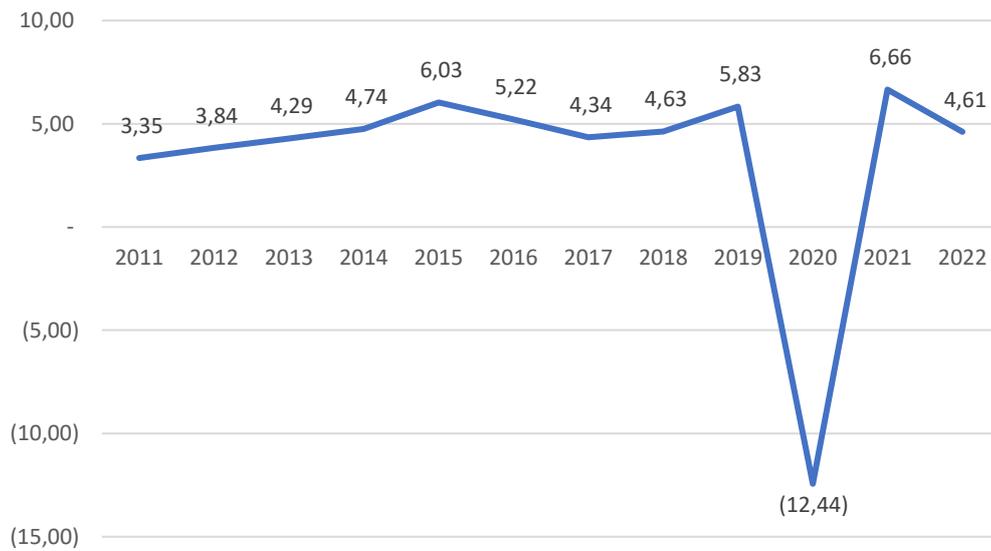
Ket: \* Angka Sementara dan \*\*Angka Sangat Sementara

**Gambar 3.6** Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2024

#### 3.1.1.5 Increment Capital Output Ration (ICOR)

Nilai ICOR didapat dengan membandingkan nilai investasi yang ditanamkan terhadap tambahan output yang terjadi sepanjang periode investasi. Besaran ICOR adalah proxy efisiensi sebuah perekonomian dimana semakin rendah nilai ICOR berarti menunjukkan efisiensi relatif suatu perekonomian. Nilai *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan dengan tren yang fluktuatif pada periode 2011 - 2019. Pada Tahun 2020 ICOR Kalimantan Selatan turun sampai minus 12,44. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga minus atau pertumbuhan ekonomi yang negatif akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, ICOR kembali meningkat menjadi 6,66 dan semakin membaik pada 2022 dengan angka 4,61 dampak dari mulai pulihnya perekonomian Kalimantan Selatan pasca Pandemi Covid-19.





Sumber: KEMD Kalsel, diolah (2023)

**Gambar 3.7** ICOR Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2022

Dengan melihat terus membaiknya pertumbuhan ekonomi serta realisasi investasi di Kalimantan Selatan tetapi masih adanya dinamika pada perekonomian global sehingga banyak investor yang sangat selektif dalam menempatkan dananya untuk berinvestasi serta belum adanya gambaran proyeksi investasi besar yang masuk di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 maka proyeksi atau target ICOR Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.7** Proyeksi /Target Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Tahun 2023 - 2024

Proyeksi/Target	2023	2024
Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	4,78	4,97 - 4,59

Sumber: KEMD Kalsel (2023)

### 3.1.1.6 Inflasi

Laju inflasi dalam kegiatan perekonomian daerah di Provinsi Kalimantan Selatan cukup fluktuatif. Pada periode 2015 – 2018, tingkat inflasi di Kalimantan Selatan dilaporkan menurun, dari 5,14 persen di Tahun 2015 turun sampai hanya sebesar 2,63 persen di Tahun 2018. Namun demikian, inflasi di Tahun 2019 tercatat meningkat di angka 4,01 persen yang antara lain disebabkan oleh lonjakan



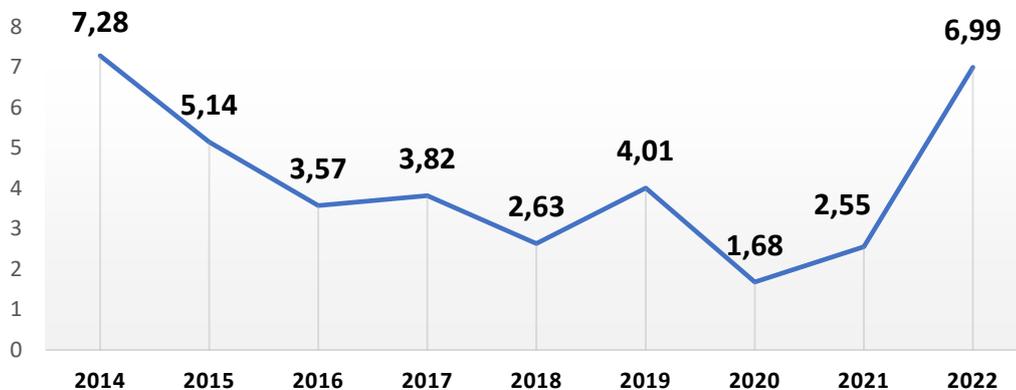


permintaan Ikan Gabus yang tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan pasokan serta lonjakan harga tiket pesawat.

Pada Tahun 2021, tingkat inflasi cukup rendah di tingkat 2,55 persen dengan dorongan inflasi yang hanya berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, serta kelompok pakaian dan alas kaki.

Pada Tahun 2022, tingkat inflasi kembali meningkat di angka 6,99 persen. Salah satu sebab utama meningkatnya inflasi adalah naiknya harga bahan bakar subsidi sebagai dampak krisis energi dunia akibat konflik Rusia – Ukraina. Kenaikan harga bahan bakar subsidi tersebut juga berpengaruh terhadap biaya angkut dan transportasi. Faktor perubahan iklim yang menyebabkan seringnya terjadi cuaca buruk juga berperan dalam tingginya inflasi di Tahun 2022. Cuaca buruk ini membuat menurunnya tingkat produksi bahan pangan yang berpengaruh terhadap kelangkaan pasokan dan kemudian berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan pangan.

Fluktuasi angka inflasi di Kalimantan Selatan periode Tahun 2014 sampai 2022 dijelaskan pada gambar 3.8 berikut.



Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

**Gambar 3.8** Laju Inflasi (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2022

Untuk mengendalikan masalah inflasi ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Selatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Langkah strategis pengendalian inflasi daerah dijalankan melalui kerangka 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Adapun langkah konkret





yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan antara lain dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan beberapa program lapangan seperti pasar murah, kampanye penanaman komoditas penyumbang inflasi, peningkatan produksi, dan Turun Desa oleh Kepala Daerah dalam rangka Pengendalian Inflasi.

Melihat kondisi yang ada, pemerintah terus berusaha dan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk menjaga inflasi yang ada terjaga sesuai dengan yang diharapkan. Mempertimbangkan kondisi yang ada maka proyeksi atau target Inflasi Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.8** Proyeksi/Target Inflasi Tahun 2023 - 2024

Proyeksi/Target	2023	2024
Inflasi	3,75	2,00 - 4,00

### 3.1.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kondisi Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan tahun 2018 – 2021 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja menurun di tahun 2022. Jumlah pengangguran terbuka menunjukkan tren meningkat selama tahun 2018 – 2021 namun sempat pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali.

**Tabel 3.9** Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2018 - 2022

Tahun	2018		2019		2020		2021		2022	
	Februari	Agustus								
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	3,72	4,35	3,5	4,18	3,67	4,74	4,33	4,95	4,20	4,74
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	2.216.043	2.131.858	2.268.874	2.135.100	2.269.344	2.186.967	2.195.818	2.219.395	2.129.301	2.196.250
Jumlah Penduduk Pengangguran/ Mencari Kerja (Jiwa)	82.405	92.810	77.289	89.269	83.336	103.648	95.001	109.968	89.470	104.025

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

Angkatan kerja di tahun 2022 berjumlah 2.129.301 pada bulan februari dan 2.196.250 pada bulan agustus. Penurunan jumlah angkatan kerja ini diiringan juga





dengan penurunan jumlah penduduk pengangguran/mencari kerja dan tingkat pengangguran terbuka.

Melihat kondisi kedepan, diharapkan pemulihan ekonomi memberikan dampak positif kepada seluruh sektor termasuk peningkatan perekonomian sehingga kebutuhan tenaga kerja meningkat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menurunkan pengangguran di Kalimantan Selatan. Mempertimbangkan hal tersebut maka proyeksi atau target Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.10** Proyeksi/Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023 - 2024

Proyeksi/Target	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	4,22	4,05 – 4,59

Sumber: KEMD Kalsel (2023)

### 3.1.1.8 Tingkat Kemiskinan

Periode tahun 2018 – 2021 jumlah penduduk miskin Kalimantan Selatan menunjukkan tren menurun lalu di 2021 mengalami peningkatan pada 2021 akibat pandemi covid-19 menjadi 208.118 jiwa. Sementara pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin Kalimantan Selatan mengalami penurunan lagi menjadi 195.702.

**Tabel 3.11** Kondisi Kemiskinan Tahun 2018 - 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Miskin (PO)	4,54	4,55	4,38	4,83	4,49
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	189.033	192.480	187.874	208.118	195.702

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

Persentase penduduk miskin mengalami tren menurun dari tahun 2018 – 2020. Efek pandemi covid-19 mendorong peningkatan persentase penduduk miskin dari 4,38 persen pada tahun 2020 menjadi 4,83 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin Kalimantan Selatan mengalami penurunan menjadi 4,49 persen, hal ini beriringan dengan mulai terjadinya pemulihan ekonomi Kalimantan Selatan pasca pandemi. Dengan semakin dilonggarkannya pembatasan sosial, pergerakan masyarakat semakin meningkat





dan mendorong geliat ekonomi di masyarakat. Kondisi ini memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang secara tidak langsung menurunkan kemiskinan. Mempertimbangkan hal tersebut maka proyeksi atau target Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.12** Proyeksi/ Target Tingkat Persentase Penduduk Miskin (P0) Tahun 2023 - 2024

Proyeksi/Target	2023	2024
Persentase Penduduk Miskin (P0)	4,40	4,40

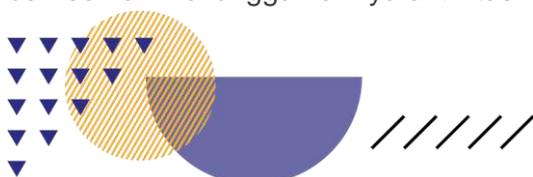
Sumber: Bappeda Kalsel (2023)

### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pada Tahun 2022, perbaikan ekonomi pasca pandemi di tingkat domestik, nasional dan global berdampak positif terhadap perekonomian Kalimantan Selatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di level 5,11 persen menjadi bukti nyata dampak positif tersebut.

Jika dirinci, perbaikan ekonomi di tingkat global menjadi faktor pendorong utama membaiknya perekonomian Kalimantan Selatan. Hal tersebut terlihat dari tingginya tingkat pertumbuhan komponen ekspor pada PDRB yang mencapai 13,32 persen. Perbaikan ekonomi di tingkat global juga dapat dilihat dari tingginya kontribusi komponen ekspor yang mencapai. Hal ini dikonfirmasi dengan tingginya pertumbuhan dan share lapangan usaha utama Kalimantan Selatan yang berorientasi ekspor seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan komoditas utama ekspor batubara, dan lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan komoditas utama ekspor kelapa sawit dan karet.

Di tingkat domestik, perbaikan ekonomi Kalimantan Selatan ditandai dengan membaiknya konsumsi rumah tangga. Setelah pada Tahun 2021 hanya mampu tumbuh di tingkat 0,79 persen, komponen konsumsi rumah tangga pada PDRB mampu tumbuh sebesar 5,37 persen di Tahun 2022. salah satu faktor peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah cakupan vaksinasi yang meningkat dan semakin dilonggarkannya aktivitas masyarakat pasca pandemi.





Perbaikan konsumsi rumah tangga disinyalir juga meningkatkan permintaan perjalanan umroh yang menjadi salah satu sumber dari pertumbuhan luar biasa pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Sebelum pandemi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan hanya mampu tumbuh di bawah 7 persen. Namun di Tahun 2022, pertumbuhan lapangan usaha ini meningkat di level 17,43 persen, paling tinggi dibanding 16 lapangan usaha lainnya. Secara nominal, pertumbuhan lapangan usaha ini mencapai Rp. 1,4 Triliun.

Perbaikan konsumsi rumah tangga juga terlihat dari bertumbuhnya 2 sektor lain. 2 sektor yang dimaksud adalah sektor perdagangan serta sektor akomodasi.

Fenomena lain yang perlu menjadi sorotan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai berikut.

- Selarasnya pertumbuhan investasi dengan pelaksanaan Perppu Ciptaker serta berakhirnya pembatasan proyek-proyek konstruksi pemerintah.
- Selarasnya pertumbuhan LPNRT dengan masa kampanye untuk pemilihan legislatif, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah.
- Selarasnya kontraksi pengeluaran pemerintah dengan perubahan pola belanja pemerintah yang sebelumnya fokus terhadap pengeluaran di bidang kesehatan.

Di tingkat global, bayangan resesi ekonomi di Tahun 2024 semakin jelas dengan kemungkinan belum berakhirnya konflik Rusia – Ukraina. Konflik tersebut berpengaruh terhadap beberapa hal sebagai berikut.

- Kenaikan harga minyak dan komoditas energi pada umumnya.
- Merosotnya beberapa pasokan komoditas pangan asal Ukraina
- Lonjakan inflasi global akibat 2 hal di atas.
- Krisis energi di Eropa yang disusul dengan memburuknya perekonomian. Data menyebutkan bahwa inflasi telah mencapai 10 persen yang membuat Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris menaikkan suku bunga sampai pada level 2,5 persen dan 3,5 persen secara berturut-turut. Bayang-bayang resesi ekonomi di Eropa tercermin dari memburuknya perekonomian Jerman dan Inggris.





- Keadaan di Eropa tersebut kemudian berpengaruh terhadap pasar ekspor Amerika Serikat dan Tiongkok yang juga berpotensi buruk terhadap perekonomian mereka.

Selain karena konflik Rusia – Ukraina, bayangan resesi ekonomi di Tahun 2024 juga disinyalir akan terjadi karena adanya pengetatan likuiditas di Amerika Serikat. Selain itu, ada fenomena transformasi ekonomi di Tiongkok yaitu transformasi menuju ekonomi berbasis digital dan ekonomi hijau yang ramah lingkungan serta transformasi menuju produksi yang berorientasi pasar domestik.

Di tingkat nasional beberapa fenomena yang diproyeksikan terjadi adalah sebagai berikut.

- Implementasi peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Cipta Kerja, Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Transformasi ekonomi dalam bentuk hilirisasi komoditas sumber daya alam, transisi energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
- Pelonggaran pandemi akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang akan berdampak positif pada tingkat konsumsi rumah tangga.
- Insentif kendaraan listrik
- Kebijakan B35
- Pemerintah Pusat akan menjaga tingkat konsumsi

Fenomena-fenomena penting yang disampaikan di atas diproyeksikan akan berpengaruh terhadap perekonomian Kalimantan Selatan dan kapasitas keuangan daerah. Pengaruh tersebut terjadi dalam dua sisi, yaitu sisi positif sebagai prospek dan sisi negatif sebagai tantangan.

Prospek yang nyata yang dapat berpengaruh positif pada perekonomian Kalimantan Selatan adalah pelonggaran aktivitas masyarakat pasca pandemi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pelonggaran ini diproyeksikan akan





meningkatkan tingkat konsumsi dan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan di Kalimantan Selatan secara keseluruhan.

Peningkatan aktivitas masyarakat secara global, akan meningkatkan tingkat produksi di negara-negara produsen. sejalan dengan peningkatan tingkat produksi tersebut, maka kebutuhan energi juga akan meningkat sehingga akan berpengaruh positif terhadap permintaan batubara Kalimantan Selatan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian secara umum.

Peningkatan aktivitas masyarakat secara global, juga diproyeksikan akan berpengaruh positif terhadap ekspor komoditas pertanian seperti kelapa sawit dan karet. Hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif secara umum pada lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Namun, peningkatan aktivitas ini akan terkoreksi dengan bayangan resesi dunia beserta fenomena-fenomena dampaknya. Oleh karena hal tersebut, peningkatan permintaan produk di lapangan usaha tersebut di Tahun 2024 diproyeksikan tidak akan setinggi peningkatan di Tahun 2022. Sehingga potensi perlambatan pada pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Selatan cukup besar.

Beberapa hal yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian Kalimantan Selatan dapat disimpulkan menjadi asumsi – asumsi perekonomian sebagai berikut.

**Tabel 3.13** Asumsi Asumsi Perekonomian Kalimantan Selatan Tahun 2023 - 2024

KETERANGAN	ASUMSI - ASUMSI	
	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Pertanian	Pertumbuhan produksi TBS lebih rendah sejalan dengan pemupukan tidak optimal pada tahun 2022 dan replanting kebun sawit.	Produksi padi diperkirakan lebih baik pascaserangan hama tungro. Panen TBS yang meningkat, didorong pemupukan yang lebih baik di tahun 2023.
Pertambangan	Perlambatan produksi batubara seiring dengan perkiraan pertumbuhan produksi yang melambat dan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama yang termoderasi.	Produksi batubara diperkirakan meningkat sejalan dengan membaiknya permintaan negara mitra dagang utama dan penyerapan domestik yang lebih tinggi pascapendirian BLU Batubara.





KETERANGAN	ASUMSI - ASUMSI	
	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Industri Pengolahan	Pasokan TBS diperkirakan lebih rendah berdampak pada produksi CPO dan Biodiesel, meski terdapat potensi peningkatan penyerapan domestik.	Produksi CPO dan turunannya seperti minyak goreng dan B35 lebih tinggi sejalan dengan pasokan TBS yang meningkat serta produksi nilai dari pabrik di Kab. Tanah Bumbu yang akan beroperasi pada awal tahun 2024.
Konstruksi	erlanjutnya proyek konstruksi pemerintah untuk mendukung Kalsel sebagai gerbang menuju IKN dan proyek smelter nikel di Tanah Bumbu.	Berlanjutnya proyek konstruksi Pemerintah seperti jalan dan bendungan serta fasilitas umum.
Hotel dan Reklame	Dampak kenaikan BBM, tekanan inflasi, dan motif berjaga-jaga di tengah ketidakpastian global	Aktivitas perdagangan lebih kuat seiring dengan perkiraan membaiknya perekonomian global dan domestik setelah ketidakpastian global di tahun 2023.
Konsumsi Rumah Tangga	Daya beli masyarakat berpotensi tertahan di tengah potensi peningkatan harga barang dan jasa.	Peningkatan daya beli masyarakat sejalan dengan membaiknya perekonomian global dan domestik serta penurunan risiko dari ketidakpastian global
Konsumsi Pemerintah	Peningkatan pagu APBN dan APBD terutama anggaran perlintas untuk menopang daya beli masyarakat	Peningkatan belanja operasional Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Investasi	Proyek baru seperti smelter nikel, pembangunan jalan alternatif ke makam Syech M. Arsyad AlBanjari, pembangunan Jalan Gunung Batu – Sungai Luar, dan infrastruktur irigasi.	Alokasi belanja modal yang meningkat untuk mendukung proyek konstruksi Pemerintah. Selain itu, investasi swasta diperkirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya kinerja LU Utama dan membaiknya risiko investasi.
Ekspor	Penurunan disebabkan melemahnya permintaan global akibat moderasi pertumbuhan ekonomiglobal.	Kinerja ekspor diperkirakan membaik sejalan dengan perekonomian global yang diperkirakan kembali pulih serta meingkatnya kinerja ekspor batubara dan CPO
Impor	Melambatnya kinerja konsumsi RT dan LU Tambang pada 2023 diperkirakan berdampak pada menurunnya impor barang konsumsi & modal serta bahan baku industri untuk mendorong LU Utama.	Kinerja impor diperkirakan lebih kuat sejalan dengan membaiknya konsumsi RT dan dan kinerja LU Utama yang berpotensi mendorong impor barang konsumsi, bahan baku industri, dan barang modal.





Sumber: Bank Indonesia KPw Kalsel dan Bappeda Kalsel

Berdasarkan asumsi – asumsi tersebut maka proyeksi untuk perekonomian Kalimantan Selatan adalah sebesar 4,85 % tahun 2023 dan 4,61 – 5,01 % Tahun 2024. Hal ini dapat terlihat dari tabel – tabel berikutnya untuk penjabaran proyeksi Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara detail beserta angka per sektor – sektor untuk mendukung pertumbuhan Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) tersebut.

**Tabel 3.14** LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 Menurut Pengeluaran Beserta Sumber Pertumbuhan

Komponen pengeluaran	LPE (%) / Growth (%)							Sumber Pertumbuhan (%) / Source of Growth (SOG) (%)						
	2021	2022	2023				2024		2021	2022	2023			
			Out-look	Base-line	Mode-rate	High	Out-look	Base-line			Mode-rate	High		
													2023	2024
1 Konsumsi Rumah tangga	0,79	5,37	6,75	2,71	2,91	3,11	1,61	2,37	2,29	2,13	2,23	2,32		
2 Konsumsi LNPRT	1,10	5,02	6,54	2,63	2,83	3,03	0,03	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05		
3 Konsumsi Pemerintah	3,56	(0,56)	3,37	2,93	3,13	3,33	0,36	0,50	0,46	0,43	0,45	0,47		
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	0,83	5,16	3,30	3,67	3,87	4,07	0,78	1,15	1,07	1,01	1,05	1,10		
5 Perubahan Inventori	30,16	(908,12)	1,12	1,25	1,45	1,65	0,00	0,02	0,02	-0,02	-0,02	0,02		
6 Ekspor Barang dan Jasa	19,02	13,32	37,02	9,47	9,67	9,87	2,71	4,29	5,32	5,29	5,52	5,75		
6 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	21,01	14,60	48,41	9,17	9,37	9,57	2,01	3,22	4,32	4,28	4,47	4,66		
<b>PDRB ADHK 2010</b>	<b>3,48</b>	<b>5,11</b>	<b>4,85</b>	<b>4,61</b>	<b>4,81</b>	<b>5,01</b>	<b>3,48</b>	<b>5,11</b>	<b>4,85</b>	<b>4,61</b>	<b>4,81</b>	<b>5,01</b>		

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah, KEMD 2023

**Tabel 3.15** Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 Menurut Pengeluaran

Komponen pengeluaran	Share (%)						
	2021	2022	2023				
			Out-look	Base-line	Mode-rate	High	
1 Konsumsi Rumah tangga	46,74	41,14	39,41	45,89	46,26	47,05	
2 Konsumsi LNPRT	1,04	0,87	0,83	1,14	1,18	1,21	
3 Konsumsi Pemerintah	12,02	9,80	8,66	11,23	11,72	12,21	
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	24,06	20,55	18,68	24,60	25,04	25,34	
5 Perubahan Inventori	0,05	-0,34	0,05	0,05	0,12	0,12	
6 Ekspor Barang dan Jasa	76,83	89,90	105,28	74,70	75,94	85,94	





7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	60,74	61,92	72,90	57,61	60,26	71,87
<b>PDRB ADHB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah, KEMD 2023

**Tabel 3.16** LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 -2024 Menurut Lapangan Usaha Beserta Sumber Pertumbuhan

Komponen Lapangan Usaha	LPE (%)						Sumber Pertumbuhan (%)					
	Growth (%)						Source of Growth (SOG) (%)					
	2021	2022	2023	2024	2024	2024	2021	2022	2023	2024	2024	2024
			Out-look	Base-line	Mode-rate	High			Out-look	Base-line	Mode-rate	High
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,17	1,45	3,55	1,32	1,52	1,72	0,48	0,68	0,64	0,58	0,61	0,64
2. Pertambangan dan penggalian	4,31	5,60	5,22	4,31	4,51	4,71	0,85	1,26	1,20	1,14	1,19	1,23
3. Industri pengolahan	6,23	3,31	4,01	5,03	5,23	5,43	0,44	0,64	0,60	0,58	0,60	0,63
4. Pengadaan listrik, gas	6,66	7,85	11,21	6,53	6,73	6,93	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,03	4,87	4,39	4,36	4,56	4,76	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6. Konstruksi	2,87	4,33	3,14	4,04	4,24	4,44	0,27	0,39	0,36	0,34	0,36	0,37
7. Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	2,20	7,15	4,03	7,13	7,33	7,53	0,32	0,47	0,45	0,43	0,45	0,47
8. Transportasi dan pergudangan	1,81	17,43	13,36	9,68	9,88	10,08	0,20	0,33	0,34	0,34	0,36	0,37
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum	2,30	9,63	10,33	8,33	8,53	8,73	0,07	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11
10. Informasi dan komunikasi	7,22	6,94	6,07	6,59	6,79	6,99	0,15	0,23	0,22	0,21	0,22	0,23
11. Jasa keuangan	1,19	0,39	3,46	1,45	1,65	1,85	0,11	0,16	0,15	0,14	0,14	0,15
12. Real estate	5,29	5,87	5,88	5,36	5,56	5,76	0,09	0,13	0,12	0,12	0,12	0,13
13. Jasa perusahaan	3,62	7,53	6,89	6,65	6,85	7,05	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,32	0,53	1,81	1,85	2,05	2,25	0,18	0,26	0,24	0,22	0,23	0,24
15. Jasa pendidikan	1,54	3,51	0,58	3,18	3,38	3,58	0,16	0,23	0,21	0,20	0,21	0,21
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	11,59	5,31	4,59	4,33	4,53	4,73	0,07	0,11	0,10	0,10	0,10	0,11
17. Jasa lainnya	1,16	6,78	6,82	4,31	4,51	4,71	0,04	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
<b>PDRB ADHK 2010</b>	<b>3,48</b>	<b>5,11</b>	<b>4,85</b>	<b>4,61</b>	<b>4,81</b>	<b>5,01</b>	<b>3,48</b>	<b>5,11</b>	<b>4,85</b>	<b>4,61</b>	<b>4,81</b>	<b>5,01</b>

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah, KEMD 2023





**Tabel 3.17** Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 menurut Lapangan Usaha

Komponen Lapangan Usaha		Share (%)					
		2021	2022	2023	2024	2024	2024
				Out-look	Base-line	Mode-rate	High
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,93	11,40	9,91	9,96	10,06	10,17
2	Pertambangan dan Penggalian	19,37	32,05	31,87	30,38	29,65	28,88
3	Industri Pengolahan	13,95	11,39	11,19	11,27	11,35	11,49
4	Pengadaan Listrik. Gas	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,44	0,36	0,37	0,36	0,38	0,38
6	Konstruksi	8,17	6,87	6,71	6,58	6,71	6,80
7	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,28	9,06	9,72	10,11	10,20	10,31
8	Transportasi dan Pergudangan	6,29	6,27	6,85	8,13	8,22	8,26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,08	1,79	1,91	2,01	2,03	2,12
10	Informasi dan Komunikasi	3,94	3,30	3,42	3,35	3,37	3,43
11	Jasa Keuangan	3,60	2,97	3,29	3,30	3,35	3,37
12	Real Estate	2,43	2,02	2,08	2,06	2,10	2,14
13	Jasa Perusahaan	0,72	0,61	0,64	0,67	0,69	0,70
14	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,09	4,79	4,83	4,71	4,76	4,77
15	Jasa Pendidikan	4,91	3,95	3,98	3,87	3,86	3,86
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,36	1,94	1,95	1,94	1,96	1,99
17	Jasa lainnya	1,28	1,10	1,15	1,17	1,19	1,20
<b>PDRB ADHB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah, KEMD 2023

### 3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2024

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (RKP Tahun 2024). Adapun RKP Tahun 2024 mengusung tema **“MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”** dengan didukung 8 arah kebijakan. Adapun arah kebijakan yang dimaksud dijelaskan pada Gambar III.9. berikut.





### ARAH KEBIJAKAN RKP Tahun 2024

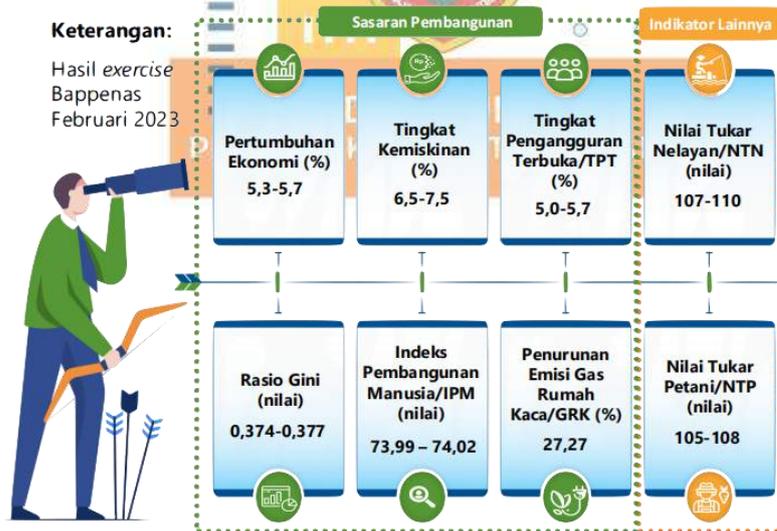


Sumber: Rancangan RKP 2024, Bappenas

**Gambar 3.9** Arah Kebijakan RKP Tahun 2024

RKP Tahun 2024 juga dilengkapi dengan sasaran pembangunan. Adapun sasaran pembangunan yang dimaksud diuraikan pada Gambar III.10. berikut.

### SASARAN PEMBANGUNAN RKP Tahun 2024



Sumber: Rancangan RKP 2024, Bappenas

**Gambar 3.10** Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Berdasarkan Outlook, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Tahun 2023 diperkirakan senilai 5,3 – 5,5 persen. Beberapa kebijakan dan fenomena yang





terjadi di Tahun 2024 dan dimulai di Tahun 2023 dapat mendukung pencapaian pertumbuhan tersebut.

Pada Tahun 2023, Pemerintah meneruskan kebijakan hilirisasi industri pengolahan komoditas untuk meningkatkan nilai tambah produk. Salah satunya adalah restriksi pada ekspor bauksit mentah untuk mendorong industri turunan dari komoditas tersebut. Kebijakan ini diharapkan didukung oleh dunia usaha dan asosiasi dan memiliki dampak berkelanjutan sampai Tahun 2024. Selain itu, Pemerintah juga mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui berbagai insentif dan kebijakan salah satunya subsidi dan insentif pendukung Kendaran Bermotor Listrik.

Kebijakan lain yang dikeluarkan Pemerintah adalah yang terkait peningkatan iklim investasi. Kebijakan yang dimaksud adalah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Perppu 2/2022) tentang Cipta Kerja. Perppu tersebut diberlakukan untuk menggantikan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang harus diperbaiki menurut putusan Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, salah satu fenomena yang perlu disorot adalah peningkatan pengeluaran Lembaga Non Pemerintah dan Rumah Tangga (LNPR) di Tahun 2024. Pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran oleh Partai Politik serta tim sukses pada masa kampanye dan masa Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2024.

Di sisi lain, keberlanjutan kebijakan moneter dan kebijakan pengendalian inflasi diharapkan semakin memudahkan pengendalian inflasi domestik. Pada Tahun 2022, rata-rata inflasi tercatat pada tingkat 4,2 persen. Berdasarkan data tersebut dengan ditambah usaha pengendalian yang semakin intensif, maka diharapkan laju inflasi akan berkurang di tingkat 3,1 persen. Kebijakan-kebijakan lain di bidang moneter juga diharapkan dapat berdampak pada pengurangan *imported inflation*.

Sementara itu, ada tiga faktor penopang pertumbuhan ekonomi secara nasional. Faktor tersebut adalah berlanjutnya program hilirisasi industri, pemulihan sektor pariwisata serta dukungan infrastruktur untuk Kawasan Prioritas. Uraian faktor penopang tersebut disampaikan pada Tabel 3.18 berikut.





**Tabel 3.18** Uraian Faktor Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional

No.	Faktor Penopang	Rincian
1.	Berlanjutnya Program-program hilirisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>37 smelter nikel sedang beroperasi, 39 smelter saat ini sedang dalam tahap pembangunan, dan 35 smelter dalam tahap perencanaan</li> <li>2 Perusahaan Smelter tembaga mulai berproduksi pada tahun 2024 (PT Amman dan PT Freeport), dan 2 Perusahaan sudah berproduksi pada tahun 2023.</li> <li>Peningkatan kapasitas input Smelter Bauksit sebesar 1 juta ton pada tahun 2024</li> </ul>
2.	Pemulihan Sektor Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Target kunjungan wisatawan mancanegara pada Tahun 2023 sebesar 8,9 juta</li> <li>Target kunjungan wisatawan mancanegara pada Tahun 2024 sebesar 9,5 – 14,3 juta</li> <li>Tumbuh pada kisaran 6,74 – 60,67 persen.</li> </ul>
3.	Dukungan infrastruktur untuk 21 Kawasan Prioritas pada tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>DPP Danau Toba (2 Kegiatan)</li> <li>Pulau Nias (5 Kegiatan)</li> <li>Kepulauan Mentawai (1 Kegiatan)</li> <li>Pulau Enggano (4 Kegiatan)</li> <li>PKN Bengkulu (2 Kegiatan)</li> <li>Wilayah Batam-Bintan (4 Kegiatan)</li> <li>Rebana (3 Kegiatan)</li> <li>Kedungsepur (2 Kegiatan)</li> <li>KSPN Dieng (5 Kegiatan)</li> <li>Food Estate Keeram (4 Kegiatan)</li> <li>Gerbangkertosusila Plus (5 Kegiatan)</li> <li>KSPN Ijen-Baluran (5 Kegiatan)</li> <li>Selingkar Wilis (5 Kegiatan)</li> <li>KSPN Nusa Penida (3 Kegiatan)</li> <li>KSPN Ubud/Ulapan (2 Kegiatan)</li> <li>DPP Sambas-Singkawang (1 Kegiatan)</li> <li>Food Estate Sumba Tengah (4 Kegiatan)</li> <li>KI Morowali (1 Kegiatan)</li> <li>KI Konawe (2 Program, 2 Kegiatan)</li> <li>KI Pulau Obi (2 Kegiatan)</li> <li>KI Teluk Weda (5 Kegiatan)</li> </ul>

Sumber: Rancangan Kerangka Ekonomi Makro RKP Tahun 2024, Bappenas

### 3.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Kalimantan Selatan perekonomiannya masih didominasi oleh sektor pertambangan atau komoditas bahan mentah serta setengah jadi. Komoditas tersebut antara lain Batubara, Kelapa Sawit (CPO), Karet, dan Kayu. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan yang sudah ada serta mendorong sektor – sektor lain yang lebih berkelanjutan untuk tumbuh lebih tinggi mengurangi kontribusi sektor yang ada melalui hilirisasi industrialisasi agar nilai tambah sektor – sektor yang





ada meningkat lebih tinggi bila dibandingkan diperdagangkan hanya berupa bahan mentah atau setengah jadi.

Arah Kebijakan ini sudah tercantum pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD setiap tahunnya yang merupakan tema besar pembangunan perekonomian Kalimantan Selatan yaitu transformasi perekonomian Kalimantan Selatan ke arah perekonomian yang lebih memberikan nilai tambah dan berkelanjutan pada sektor Pertanian, Pariwisata, Hilirisasi, serta Industrialisasi. Adapun beberapa langkah – langkah yang dirumuskan untuk mencapai hal tersebut antara lain:

- a. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan
- b. berkelanjutan
- c. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
- d. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark
- e. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
- f. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah
- g. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN

Pembangunan yang dipilih untuk menjadi Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 adalah **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**. Tema ini dibangun berdasarkan dengan kebijakan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 sebagai tahapan mencapai Visi Kalimantan Selatan yang MAJU (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara serta untuk membangun Kalimantan Selatan yang berdaya saing melalui upaya transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi yang dimaksud adalah dengan upaya menggeser kontribusi sektor pertambangan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui untuk meningkatkan kontribusi sektor dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain sektor pertanian, pariwisata, perdagangan serta meningkatkan peran UMKM dan hilirisasi industri. Kebijakan perekonomian daerah di tahun 2024 ini tetap diambil dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Tema pembangunan pada tahun 2024 adalah **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”** memiliki





empat fokus pembangunan dan tiga prioritas daerah. Fokus pembangunan dan prioritas daerah yang dimaksud diuraikan pada Tabel 3.19 berikut.

**Tabel 3.19** Fokus Pembangunan dan Prioritas Daerah pada RKPD 2024

Fokus Pembangunan	Prioritas Daerah
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sektor Pendidikan, Kesehatan Dasar, Kemiskinan dan Kesempatan Kerja</li> <li>Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas</li> <li>Struktur Perekonomian untuk Mendukung Pengembangan Digitalisasi UMKM</li> <li>Hilirisasi Industri, Pertanian, Pariwisata menuju Investasi Ekonomi Hijau</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian, dan Pariwisata</li> <li>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing</li> <li>Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah.</li> </ol>

Sumber: Rancangan RKPD Tahun 2024 Kalimantan Selatan



### 3.1.5 Sasaran Indikator Ekonomi Makro Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2024

Secara ringkas, sasaran Indikator Ekonomi Makro Daerah Kalimantan Selatan tahun 2024 disajikan sebagaimana pada tabel III.20.

**Tabel 3.20** Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2024

Indikator		Kalsel 2022	Outlook 2023	Sasaran Kalsel 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11	4,85	4,61 - 5,01
2	PDRB ADHK 2010 Perkapita (Juta rupiah/orang)	34,04	35,35	36,53 - 36,67
	PDRB ADHB Perkapita (Juta rupiah/orang)	60,08	71,27	75,47 – 76,50
3	Asumsi:			
	- Jumlah Penduduk (orang) (Sumber Proyeksi Proyeksi Penduduk Indonesia 2020 – 2050 Hasil Sensus Penduduk 2020)	4.182.080	4.222.330	4.273.400
	- Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,44	1,22	1,19
4	Angka Inflasi (%)	6,99	3,75	2,00 - 4,00
5	Share Sektor Pertambangan terhadap PDRB ADHB (%)	32,05	31,87	30,38 – 28,88





	Indikator	Kalsel 2022	Outlook 2023	Sasaran Kalsel 2024
8	Share Sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB ADHB (%)	11,40	9,91	9,96 - 10,17
7	Share Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB (%)	11,39	11,19	11,27 - 11,49
8	ICOR (Rasio PMTB terhadap Perubahan PDRB ADHK 2010)	4,61	4,78	4,97 - 4,59
9	Indeks Williamson	0,434	0,421	0,417
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,20 - 4,74	4,22	4,05 - 4,59
11	Persentase Penduduk Miskin (P0) (%)	4,49	4,40	4,40

Sumber: KEMD Bappeda 2023

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan daerah; dan
  - b. Penerimaan pembiayaan daerah.
2. Pengeluaran daerah pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas:
  - a. Belanja daerah; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan daerah.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan





pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Selanjutnya, APBD sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- 1) Pendapatan daerah;
- 2) Belanja daerah; dan
- 3) Pembiayaan daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dimaksud, sebagai berikut:

#### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

#### **2. Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan





pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.

Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya.

Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya paling sedikit meliputi:

- a. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
- b. Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. Dukungan pelaksanaan program vaksinasi Corona Virus Disease 2019;
- d. Dukungan kelurahan dalam penanganan dan pengendalian pandemi Corona Virus Disease 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;
- e. Insentif tenaga kesehatan untuk penanganan dan pengendalian pandemi Corona Virus Disease 2019;
- f. Dukungan penanganan dan pengendalian pandemi Corona Virus Disease 2019 skala desa; dan
- g. Belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.





Belanja Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf g difokuskan penggunaannya paling sedikit meliputi:

- a. Optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test, tracing, dan tracking, system surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
- b. Optimalisasi fasilitas kesehatan dan Farmasi dan Alat Kesehatan (farmalkes) dengan memenuhi alat pelindung diri, ruang isolasi dan alat tes, ruang rawat, ruang intensive care unit, ruang isolasi mandiri dan manajemen kasus/tatalaksana yang jelas;
- c. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
- d. Efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan;
- e. Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional untuk memastikan tercapainya cakupan semesta/universal health coverage di setiap Pemerintah Daerah, provinsi dan kabupaten/kota; dan
- f. Penganggaran dan pembayaran iuran jaminan Kesehatan nasional sesuai dengan peraturan perundangan secara tepat waktu dan tepat jumlah.

### 3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya.

Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

#### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Asumsi kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada RKPD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah secara terukur, rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum.
  - a. Optimalisasi pendapatan pajak daerah melalui program kegiatan intensifikasi seperti penyesuaian tarif pajak daerah, pemutakhiran





- database* potensi, serta upaya penagihan, kemudian mengintensifkan kerja sama kemitraan dengan pemerintah Kabupaten/Kota juga *stakeholder*.
- b. Optimalisasi pendapatan retribusi daerah melalui pengembangan pengelolaan pungutan berbasis elektronifikasi/digitalisasi.
2. Identifikasi dan ekstensifikasi pendapatan di luar pajak daerah.
    - a. Mendorong upaya optimalisasi pendapatan pada sektor Sumbangan Pihak Ketiga (SP 3) kepada pemerintah daerah yang terdiri dari dealer, Jasa Raharja, kelapa sawit, dan karet melalui sosialisasi, FGD dan penyesuaian *updating* regulasi (UU Ciptaker) bersama instansi terkait.
    - b. Rasionalisasi estimasi target penerimaan pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Penghasil berdasarkan potensi.
  3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan.
    - a. Mendorong pengembangan kualitas produk pelayanan pengelolaan pendapatan daerah pada semua Unit Kerja Penghasil secara bertahap dan berkesinambungan.
    - b. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Zona Integritas (ZI) pelayanan dengan melengkapi dan atau penyesuaian terhadap Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang konvensional maupun berbasis digitalisasi, serta melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), khususnya pada Kantor Bersama SAMSAT se Kalimantan Selatan.
  4. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah
    - a. Percepatan penyampaian dan ketepatan penyajian pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi tepat guna dan berhasil guna.
    - b. Peningkatan kapasitas pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah berbasis teknologi informatika.





- c. Pengukuran kinerja capaian pendapatan berdasarkan anggaran kas pendapatan berdasarkan cashflow (aliran kas) pada APBD tahun berjalan.

Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 8.154.985.573.922,29 melampaui dari target 2023 murni sebesar Rp. 6.278.838.931.960,00, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan batu bara yang diuntungkan oleh situasi geopolitik (perang Rusia dan Ukraina) yang mendorong tingginya permintaan komoditas ini. Pertumbuhan ekonomi yang positif telah mendorong penerimaan daerah dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan menjadi meningkat.

Rencana pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 7.826.314.817.323,00, sedangkan komposisi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 diproyeksikan menjadi Rp 10.083.514.068.796,00 atau meningkat sebesar 28,84% dari tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa semakin meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat pasca pemulihan ekonomi akibat pandemi covid 19 yang membuat pemasukkan pajak meningkat. Peningkatan ini nilainya lebih tinggi bila dibandingkan kepada RPJMD tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 bahwa pertumbuhan pendapatan untuk tahun 2023 ke tahun 2024 diperkirakan sebesar 1,69%.

Proyeksi pertumbuhan target Pendapatan tahun 2024 juga dengan asumsi optimisme pergerakan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan batu bara, perkebunan (CPO), serta melalui optimalisasi program kegiatan pemerintah beserta stakeholder yang dapat mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sektor Kepariwisata Kalimantan Selatan tahun 2024 juga diperkirakan akan tumbuh, hal ini terlihat di tahun 2022 Penumpang berangkat dengan angkutan udara dan angkutan laut dari Kalimantan Selatan kembali meningkat, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang bulan Juli-September 2022 sebesar 52,54; 49,75; dan 53,14 persen, lebih tinggi dibanding periode Juli-September 2021 sebesar 34,28; 32,88; dan 41,88 persen. Sementara hotel non-bintang bulan Juli-September 2022 sebesar 26,98; 20,74; dan 23,37 persen, lebih tinggi dari Juli-September 2021 sebesar 16,35; 19,54; dan 21,18 persen.





Antusiasme masyarakat untuk beribadah umrah pun kembali tinggi meskipun harga tiket penerbangan meningkat.

Hal-hal tersebut di atas diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin menguat dengan tumbuh positif berdampak kepada peningkatan pendapatan daerah dalam tahun berkenaan





**Tabel 3.21** Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Tahun 2022 - 2024 (Rp)

wNo	Uraian	2022		Murni 2023	Proyeksi 2024	Selisih Murni 2023 – Proyeksi 2024	
		Realisasi	Murni				Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01.01</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>4.557.431.377.166,29</b>	<b>3.712.293.569.960,00</b>	<b>4.283.778.245.861,00</b>	<b>4.045.819.428.033,00</b>	<b>4.569.492.933.228,00</b>	<b>523.673.505.195,00</b>
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	3.821.005.641.027,15	2.935.210.000.000,00	3.543.611.876.638,00	3.183.010.336.573,00	3.625.000.000.000,00	441.989.663.427,00
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	25.277.127.946,00	29.061.817.000,00	27.401.487.360,00	19.857.233.256,00	34.021.447.400,00	14.164.214.144,00
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah yang Dipisahkan	44.068.503.537,00	42.854.009.600,00	46.234.712.203,00	66.598.836.058,00	102.300.000.000,00	35.701.163.942,00
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	667.080.104.656,14	705.167.743.360,00	666.530.169.660,00	776.353.022.146,00	808.171.485.828,00	31.818.463.682,00
<b>01.02</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.526.413.444.092,00</b>	<b>2.502.089.562.000,00</b>	<b>3.514.059.682.172,00</b>	<b>3.762.727.405.290,00</b>	<b>5.495.927.436.068,00</b>	<b>1.733.200.030.778,00</b>
<b>01.02.01</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - DTU</b>	<b>2.890.807.314.149,00</b>	<b>1.996.305.451.000,00</b>	<b>2.849.473.365.121,00</b>	<b>3.315.577.985.290,00</b>	<b>5.038.698.346.068,00</b>	<b>930.111.988.539,00</b>
1	Bagi Hasil Pajak	1.802.476.519.411,00	171.614.157.000,00	198.371.453.253,00	221.890.678.000,00	211.890.678.000,00	0,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	-	731.335.680.000,00	1.557.754.482.868,00	1.972.062.611.290,00	3.695.182.972.068,00	1.723.120.360.778,00
3	Cukai Hasil Tembakau	-	11.871.000,00	3.686.000,00	13.922.000,00	13.922.000,00	0,00
4	Dana Alokasi Umum	1.088.330.794.738,00	1.093.343.743.000,00	1.093.343.743.000,00	1.131.610.774.000,00	1.131.610.774.000,00	0,00
<b>01.02.02</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - DTK</b>	<b>609.621.122.943,00</b>	<b>500.949.763.000,00</b>	<b>650.469.619.051,00</b>	<b>407.229.090.000,00</b>	<b>407.229.090.000,00</b>	<b>0</b>
1	Dana Alokasi Khusus	609.621.122.943,00	500.949.763.000,00	650.469.619.051,00	407.229.090.000,00	407.229.090.000,00	11
<b>01.02.03</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian</b>	<b>25.985.007.000,00</b>	<b>4.834.348.000,00</b>	<b>14.116.698.000,00</b>	<b>39.920.330.000,00</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>10.079.670.000,00</b>
1	Dana Insentif Daerah (DID)	25.985.007.000,00	4.834.348.000,00	14.116.698.000,00	39.920.330.000,00	50.000.000.000,00	10.079.670.000,00
<b>01.03</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>71.140.752.664,00</b>	<b>64.455.800.000,00</b>	<b>57.149.663.248,00</b>	<b>17.767.984.000,00</b>	<b>18.093.699.500,00</b>	<b>325.715.500,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>8.154.985.573.922,29</b>	<b>6.278.838.931.960,00</b>	<b>7.854.987.591.281,00</b>	<b>7.826.314.817.323,00</b>	<b>10.083.514.068.796,00</b>	<b>2.257.199.251.473,00</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2023





### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan terkait pemenuhan belanja prioritas:
  - a. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
  - b. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana diamanatkan pada RPJMN serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan;
  - c. Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat;
  - d. Mengakomodir program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
  - e. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD;
2. Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)
3. Kebijakan terkait belanja hibah, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri





Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011). Selain untuk pemberian uang/barang atau jasa, belanja hibah dialokasikan untuk Belanja Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta dan SMA Swasta. Untuk BOS SMA Negeri dan Pendidikan Khusus dialokasikan pada belanja langsung dalam bentuk program kegiatan pada SOPD Dinas Pendidikan. BOS ini pengalokasiannya merupakan yang terbesar dalam belanja hibah.

**Tabel 3.22** Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016 s.d 2022 (Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Bertambah (kurang)	Pertumbuhan (%)
Belanja daerah	6.083	7.006	6.631	6,727	7,854	1,127	16,75

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

**Tabel 3.23** Proyeksi Anggaran Belanja Daerah TA 2023 dan TA 2024 (Rp)

NO	URAIAN	APBD 2023 PENETAPAN	PROYEKSI 2024	BERTAMBAH / BERKURANG
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.727.797.817.323,00</b>	<b>10.334.937.034.226,00</b>	<b>2.607.139.216.903,00</b>
<b>02.01</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.718.350.085.624,00</b>	<b>5.178.019.158.572,00</b>	<b>459.669.072.948,00</b>
02.01.01	Belanja Pegawai	2.294.874.332.960,00	2.413.661.171.584	118.786.838.624,00
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.221.609.660.164,00	2.444.098.160.164	222.488.500.000,00
02.01.03	Belanja Hibah	189.286.092.500,00	307.679.826.824	118.393.734.324,00
02.01.04	Belanja Bantuan Sosial	12.580.000.000,00	12.580.000.000	0,00
<b>02.02</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.391.673.864.415,00</b>	<b>3.102.417.875.654,00</b>	<b>1.710.744.011.239,00</b>
02.02.01	Belanja Tanah	183.464.305.327,00	308.464.305.327	125.000.000.000,00
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	241.243.916.976,00	291.266.916.976	50.023.000.000,00
02.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung	384.011.662.390,00	785.035.343.735	401.023.681.345,00
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	516.813.066.822,00	1.651.510.396.716	1.134.697.329.894,00
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	66.140.912.900,00	66.140.912.900	0,00
<b>02.03</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	Belanja Tak Terduga	100.000.000.000,00	100.000.000.000	0,00
<b>02.04</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.517.773.867.284,00</b>	<b>1.954.500.000.000,00</b>	<b>436.726.132.716,00</b>
02.04.01	Belanja Bagi Hasil	1.517.773.867.284,00	1.954.500.000.000	436.726.132.716,00
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan			





NO	URAIAN	APBD 2023 PENETAPAN	PROYEKSI 2024	BERTAMBAH / BERKURANG
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>7.727.797.817.323,00</b>	<b>10.334.937.034.226,00</b>	<b>2.607.139.216.903,00</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, terdapat juga pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, yang mana penerimaan pembiayaan daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.

**Tabel 3.24** Anggaran Pembiayaan Daerah TA 2016-2022 (Dalam Juta Rupiah)

No.	Uraian	APBD TA.2016	APBD TA.2017	APBD TA.2018	APBD TA.2019	APBD TA.2020	APBD TA.2021	APBD TA.2022
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>357.370</b>	<b>366.088</b>	<b>130.244</b>	<b>490.020</b>	<b>391.307</b>	<b>260.339</b>	<b>269.251</b>
03.01	Penerimaan Pembiayaan Daerah	382.370	397.588	130.244	640.300	241.043	248.339	424.812
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	382.370	397.257	129.951	640.300	150.000	248.339	424.812
03.01.02	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	Penerimaan kembali dana talangan	-	331	293	21	26	-	-
03.01.04	Penerimaan kembali investasi daerah	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>382.370</b>	<b>397.588</b>	<b>130.244</b>	<b>640.300</b>	<b>391.307</b>	<b>-</b>	<b>424.812</b>
<b>03.02</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>25.000</b>	<b>31.500</b>	<b>-</b>	<b>150.300</b>	<b>-</b>	<b>12.000</b>	<b>155.561</b>
03.02.01	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000	31.500	-	300	-	12.000	55.561
03.02.02	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	150.000	-	-	100.000
03.02.02	Dana Talangan	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>25.000</b>	<b>31.500</b>	<b>-</b>	<b>150.300</b>	<b>-</b>	<b>12.000</b>	<b>155.561</b>





No.	Uraian	APBD TA.2016	APBD TA.2017	APBD TA.2018	APBD TA.2019	APBD TA.2020	APBD TA.2021	APBD TA.2022
	Pembiayaan netto	357.370	366.088	130.244	490.020	391.307	236.339	269.251
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>382.370</b>	<b>397.257</b>	<b>129.951</b>	<b>640.300</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>269.251</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

**Tabel 3.25** Proyeksi Pembiayaan Daerah TA 2022 dan 2023 (Dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi APBD Murni 2023	Proyeksi APBD Murni 2024	Tambah (Kurang)
1	2	3	4	5
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>-98.517.000.000</b>	<b>251.422.965.430</b>	<b>349.939.965.430</b>
<b>03.01</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>64.320.000.000</b>	<b>308.911.465.430</b>	<b>244.591.465.430</b>
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	64.320.000.000	108.911.465.430,00	44.591.465.430
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan		200.000.000.000	200.000.000.000
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>64.320.000.000</b>	<b>308.911.465.430</b>	<b>244.591.465.430</b>
<b>03.02</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>162.837.000.000</b>	<b>57.488.500.000</b>	<b>-105.348.500.000</b>
03.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000		-100.000.000.000
03.02.02	Penyertaan Modal	62.837.000.000	57.488.500.000	-5.348.500.000
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>162.837.000.000</b>	<b>57.488.500.000</b>	<b>-105.348.500.000</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>-98.517.000.000</b>	<b>251.422.965.430</b>	<b>349.939.965.430</b>
06.03	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)			

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, pembiayaan daerah memegang peranan penting dalam penyusunan APBD di Kalimantan Selatan salah satunya untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus dari selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka untuk menutupinya digunakan dana yang bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah dan jumlah pembiayaan netto

Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan yang komprehensif dengan memperhatikan potensi pendapatan dan alokasi belanja. Terdapat beberapa komponen yang merupakan sumber dari penerimaan pembiayaan. Beberapa komponen dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA);





2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan pinjaman daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
6. Penerimaan piutang daerah;
7. Penerimaan kembali dana talangan;
8. Penerimaan kembali penyertaan modal.

Pada APBD TA 2024 direncanakan sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Pencairan dana cadangan untuk Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Pengeluaran pembiayaan dilokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja, seperti pembayaran utang pokok, pembentukan dana cadangan, dan lain-lain.

1. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
  2. Pembentukan dana cadangan;
  3. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
  4. Pembayaran utang pokok;
  5. Pemberian pinjaman daerah;
  6. Dana talangan.

Kebijakan untuk tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 dikarenakan Pemerintah Provinsi Kalimantan fokus kepada pemenuhan kepada belanja/urusan wajib.

**Tabel 3.26** Proyeksi Target RAPBD TA 2023 dan 2024 (Rp)

NO	URAIAN	APBD 2023 PENETAPAN	PROYEKSI 2024	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	7.826.314.817.323,00	10.083.514.068.796,00	2.257.199.251.473,00	28,84
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.045.819.428.033,00	4.569.492.933.228,00	523.673.505.195,00	12,94
01.01.01	Pajak Daerah	3.183.010.336.573,00	3.625.000.000.000,00	441.989.663.427,00	13,89
01.01.02	Retribusi Daerah	19.857.233.256	34.021.447.400,00	14.164.214.144,00	71,33
01.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah yang Dipisahkan	66.598.836.058	102.300.000.000,00	35.701.163.942,00	53,61
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	776.353.022.146	808.171.485.828,00	31.818.463.682,00	4,10





NO	URAIAN	APBD 2023 PENETAPAN	PROYEKSI 2024	Tambah/Kurang	%
01.02	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.762.727.405.290,00</b>	<b>5.495.927.436.068,00</b>	<b>1.733.200.030.778,00</b>	<b>46,06</b>
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - DTU	3.315.577.985.290,00	5.038.698.346.068,00	1.723.120.360.778,00	51,97
01.02.02	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - DTK	407.229.090.000	407.229.090.000,00	0,00	-
01.02.03	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian	39.920.330.000	50.000.000.000,00	10.079.670.000,00	25,25
01.02	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>17.767.984.000,00</b>	<b>18.093.699.500,00</b>	<b>325.715.500,00</b>	<b>1,83</b>
04.03.01	Pendapatan Hibah	17.767.984.000	18.093.699.500	325.715.500,00	1,83
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>7.826.314.817.323,00</b>	<b>10.083.514.068.796,00</b>	<b>2.257.199.251.473,00</b>	<b>28,84</b>
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.727.797.817.323,00</b>	<b>10.334.937.034.226,00</b>	<b>2.607.139.216.903,00</b>	<b>5,52</b>
02.01	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.718.350.085.624,00</b>	<b>5.178.019.158.572,00</b>	<b>459.669.072.948,00</b>	<b>9,74</b>
02.01.01	Belanja Pegawai	2.294.874.332.960	2.413.661.171.584,00	118.786.838.624,00	5,18
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.221.609.660.164	2.444.098.160.164,00	222.488.500.000,00	10,01
02.01.03	Belanja Hibah	189.286.092.500	307.679.826.824,00	118.393.734.324,00	62,55
02.01.04	Belanja Bantuan Sosial	12.580.000.000	12.580.000.000,00	0,00	-
02.02	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.391.673.864.415,00</b>	<b>3.102.417.875.654,00</b>	<b>1.710.744.011.239,00</b>	<b>122,93</b>
02.02.01	Belanja Modal Tanah	183.464.305.327,00	308.464.305.327,00	125.000.000.000,00	68,13
02.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	241.243.916.976,00	291.266.916.976,00	50.023.000.000,00	20,74
02.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	384.011.662.390,00	785.035.343.735,00	401.023.681.345,00	104,43
02.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	516.813.066.822,00	1.651.510.396.716,00	1.134.697.329.894,00	219,56
02.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	66.140.912.900,00	66.140.912.900,00	0,00	-
02.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya				
02.03	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
02.03.01	Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000,00	100.000.000.000	0,00	-
02.04	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.517.773.867.284,00</b>	<b>1.954.500.000.000,00</b>	<b>436.726.132.716,00</b>	<b>28,77</b>
02.04.01	Belanja Bagi Hasil	1.517.773.867.284,00	1.954.500.000.000,00	436.726.132.716,00	28,77
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan				
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.727.797.817.323,00</b>	<b>10.334.937.034.226,00</b>	<b>2.607.139.216.903,00</b>	<b>33,74</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>98.517.000.000,00</b>	<b>-251.422.965.430,00</b>	<b>-349.939.965.430,00</b>	<b>(355,21)</b>
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>-98.517.000.000</b>	<b>251.422.965.430</b>	<b>349.939.965.430,00</b>	<b>(355,21)</b>
03.01	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>64.320.000.000</b>	<b>308.911.465.430</b>	<b>244.591.465.430,00</b>	<b>380,27</b>
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	64.320.000.000	108.911.465.430	44.591.465.430,00	69,33
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan		200.000.000.000	200.000.000.000,00	100,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>64.320.000.000</b>	<b>308.911.465.430</b>	<b>244.591.465.430,00</b>	<b>380,27</b>
03.02	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>162.837.000.000</b>	<b>57.488.500.000</b>	<b>-105.348.500.000,00</b>	<b>(64,70)</b>
03.02.02	Penyertaan Modal	62.837.000.000	57.488.500.000	-5.348.500.000,00	(8,51)





NO	URAIAN	APBD 2023 PENETAPAN	PROYEKSI 2024	Tambah/Kurang	%
.02.03	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000		-100.000.000.000,00	(100,00)
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>162.837.000.000</b>	<b>57.488.500.000</b>	<b>-105.348.500.000,00</b>	<b>(64,70)</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>-98.517.000.000</b>	<b>251.422.965.430</b>	<b>349.939.965.430,00</b>	<b>(355,21)</b>
06.03	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

### 3.2.4 Arah Kebijakan Alternatif Pembiayaan Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan dana yang besar untuk pembangunan daerah. Terbatasnya APBD Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya bersumber pada sumber-sumber penerimaan konvensional, mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kalimantan Selatan. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain:

#### 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan selain bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

#### 2. APBD Kabupaten/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama





didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

### 3. Dana Masyarakat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah melalui dana masyarakat, mengingat jumlah penduduk Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi jumlah penduduk terbanyak kedua di pulau Kalimantan, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana masyarakat cukup besar. Potensi ini pun belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana masyarakat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat. Dari berbagai jenis dana masyarakat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

### 4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR)

Dinamika lingkungan bisnis dan liberalisasi menuntut Perubahan pola usaha yang berorientasi lebih holistik, berbasis nilai-nilai Good Corporate Governance karena Perusahaan dalam eksistensinya ditengah-tengah masyarakat memerlukan citra yang positif. Untuk itu diperlukan adanya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang baik didalam Perusahaan. Dari Segi Pemerintah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) bisa jadi merupakan salah satu solusi yang menguntungkan dan tidak terlalu berisiko sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan dibandingkan alternatif sumber pembiayaan lain sebab tidak dapat dipungkiri bahwa Pembiayaan pembangunan semakin lama menjadi kebutuhan yang mendesak dan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang terbatas serta masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan suatu tanggung jawab





perusahaan untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan (sustainability), mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Perusahaan yang telah mengalami keuntungan atas bisnisnya, sudah pada tempatnya jika sebagian keuntungannya digunakan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## 5. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”. Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

## 6. Hibah

Hibah dimaksud adalah Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mendukung





pembangunan diberbagai sektor. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) diperlukan karena adanya kebutuhan investasi untuk membangun ekonomi dan adanya keterbatasan sumber dana pemerintah untuk investasi. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Peraturan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), diantaranya Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengusulan kegiatan yang dibiayai dengan PHLN dapat dilakukan oleh Kementerian Negara (departemen dan non-departemen), lembaga pemerintahan non-departemen (selanjutnya disebut lembaga), Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

## 7. Pinjaman Daerah

Konsep dasar pinjaman daerah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

## 8. Obligasi Pemerintah Daerah

Obligasi daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat, penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestic dan dalam mata uang Rupiah, namun efek yang diterbitkan tidak dijamin oleh Pemerintah. Revenue Bond adalah salah satu jenis obligasi pendapatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan digunakan hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.





## 9. Kemitraan dengan Lembaga Internasional/NGO

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri. Kerja sama daerah ini merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, dan promosi potensi daerah, serta objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Internasional disebut juga dengan 'NGO' (Non Governmental Organization) merupakan organisasi/lembaga internasional kegiatannya bertujuan memberikan bantuan atau pelayanan pada masyarakat secara sukarela. Keterlibatan Lembaga Internasional dalam proses pembangunan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah, yaitu ketersediaan anggaran dalam menyediakan layanan publik serta bentuk partisipasi mitra pembangunan dalam kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan manfaat dari mitra kerja sama ini diantaranya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daerah yang sulit dan belum terjangkau oleh program pemerintah daerah, Transfer of knowledge, inovasi pemberdayaan masyarakat, dan hasil baik dapat direplikasikan ke daerah lain.

## 10. PINA

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) adalah skema pembiayaan proyek infrastruktur tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penggalangan sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek – proyek strategis yang membutuhkan modal besar, tetapi dinilai baik secara ekonomi dan menguntungkan secara finansial. PINA merupakan alternatif pendanaan yang difasilitasi oleh Pemerintah guna mengatasi kendala pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur. Pengembangan skema investasi ini, murni tidak melibatkan Dana dari Pemerintah melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), namun dapat berkolaborasi dengan proyek KPBU dalam pembangunan infrastruktur.



**BAB IV**  
**SASARAN**  
**DAN**  
**PRIORITAS**  
**PEMBANGUNAN**  
**DAERAH**  
**TAHUN 2024**

  
= RKPD TAHUN 2024  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang pelaksanaannya disusun melalui penetapan program-program prioritas. Program prioritas ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi permasalahan pembangunan daerah yang kemudian disinkronisasikan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah pada tahun rencana. Dalam hal ini tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah karena adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Untuk itu, perumusan prioritas pembangunan daerah sebagai kerangka dalam menyusun strategi pembangunan harus dilakukan secara cermat.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan sebagai tahapan perencanaan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun RPJMD 2021 – 2026. Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023 akan diarahkan dalam upaya pencapaian sasaran yang tertuang dalam misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026. Dimana upaya pencapaian target sasaran pembangunan ini diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja sasaran pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara rutin dan berkesinambungan melakukan kegiatan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan pembangunan beserta isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan arah dan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.





#### 4.1 Isu Strategis Pembangunan

Berdasarkan data hasil capaian dan target pada Tahun 2022 maka dilakukan inventarisasi permasalahan per urusan sebagai upaya identifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Dari hasil identifikasi tersebut, secara garis besar dapat diangkat beberapa isu-isu strategis daerah sebagai berikut.

##### 1. Struktur Perekonomian Daerah Berkelanjutan yang masih belum kuat

Ada beberapa hal utama yang menjadi tantangan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

- 1) Perkuatan hilirisasi industri untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas bahan mentah/setengah (batubara, sawit, karet dan kayu lapis) yang masih tinggi.
- 2) Upaya meningkatkan struktur perekonomian daerah dari sektor-sektor yang berkelanjutan seperti pertanian dalam arti umum, perdagangan dan jasa, serta pengembangan pariwisata.
- 3) Belum maksimalnya potensi investasi yang masuk ke Kalimantan Selatan.
- 4) Pengembangan UMKM pada berbagai sektor perekonomian.

##### 2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Rendah

Salah satu isu strategis yang menjadi fokus pemerintah daerah adalah terkait dengan penyediaan sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kalimantan Selatan masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada capaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih dibawah rata-rata nasional. Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain:

- 1) Belum optimalnya kualitas pendidikan
- 2) Belum optimalnya kualitas kesehatan
- 3) Belum optimalnya keterampilan dan kompetensi yang dimiliki SDM serta produktivitasnya yang masih rendah.
- 4) Masih adanya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial

Di samping itu, dengan berkembangnya Ibukota Nusantara dan bonus demografi yang diperkirakan pada Tahun 2025 – 2035 akan menjadi tantangan pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas SDM di Kalimantan Selatan agar dapat berdaya saing dan memiliki kompetensi.





### 3. Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan yang Belum Merata

Pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu isu strategis Kalimantan Selatan. Saat ini pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian masih belum merata. Hal ini cenderung disebabkan karena pembangunan masih berfokus pada daerah perkotaannya dan menyebabkan ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Selain hal tersebut di atas, ada beberapa faktor yang menjadi kendala utama dalam pemenuhan infrastruktur yakni :

- 1) Adanya pembatasan kewenangan, sehingga ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah provinsi dan memerlukan kolaborasi yang intens antara pemerintah pusat dan daerah.
- 2) Keterbatasan penganggaran oleh pemerintah daerah, sehingga perlu dilakukan alternatif pembiayaan lainnya.

### 4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Kebencanaan yang belum optimal.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian IKLH Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2022 meningkat, namun terdapat penurunan capaian pada beberapa komponen IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dari sisi kebencanaan, indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) di Kalimantan Selatan cenderung masih tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk fokus penanganan terhadap beberapa hal sebagai berikut.

- Faktor pencemaran sungai yang mempengaruhi penurunan indeks kualitas air (IKA);
- Peningkatan luas lahan kritis pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan;
- Masih terjadinya banjir serta kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan;
- Konsep mitigasi bencana yang belum optimal.
- Peningkatan pelayanan SPM Bencana secara lintas sektor





## 5. Belum Efektifnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai personil yang memeberikan layanan publik, khususnya di daerah dari sisi kualitas dan kuantitas masih terbilang minim. Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 berdasarkan hasil pencatatan BKD sebesar 63,68 dapat dikategorikan rendah. Sehingga perlu dilaksanakan peningkatan kompetensi ASN agar tata Kelola pemerintahan dapat meningkat.

Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan Pemerintahan menjadi poin utama agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selalu berbenah dalam upaya menjadikan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel disertai dengan modernisasi pemerintahan melalui perkuatan digitalisasi. Maka diperlukan peningkatan pengelolaan informasi publik serta pemanfaatan dan pengembangan media publik.

Di samping itu, kebutuhan akan penyediaan data-data yang berkualitas juga menjadikan hal ini sebagai sebuah isu yang penting. Ketersediaan data yang berkualitas akan menentukan kualitas sebuah perencanaan pembangunan. Untuk itu, kinerja Satu Data di Kalimantan Selatan juga harus ditingkatkan.

### 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD ini mengacu pada dokumen RPJMD 2021-2026 yang tertuang pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RKPD ini juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan RKP 2024

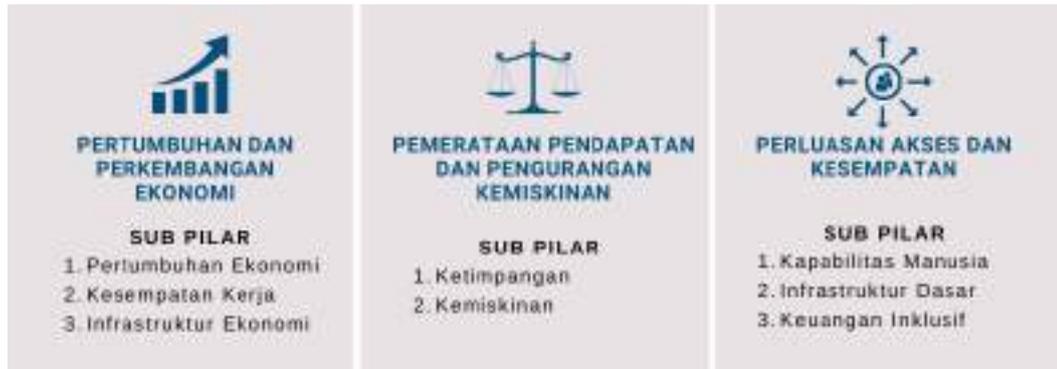
#### 4.2.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional terhadap RKPD 2024

Untuk memastikan tujuan pada RPJMN 2020 – 2024 dan TPB/SDGs dapat berjalan secara efektif, maka perlu dilakukan upaya pendekatan pembangunan yang memuat perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan, perkuatan integrasi sumber pendanaan, dan pengembangan bersifat inklusif dan dengan pendekatan pengarusutamaan gender melalui Pendekatan Perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integrated dan Spasial (THIS). Selain itu untuk menjamin pemerataan,





maka pendekatan pembangunan ekonomi secara inklusif dinilai mampu meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat secara terintegrasi dan komprehensif. Pembangunan ekonomi inklusif dinilai berdasarkan beberapa pengukuran indeks pembangunan ekonomi inklusif untuk mengukur dan memantau inklusivitas pembangunan di Kalimantan Selatan. Aspek untuk mengukur inklusivitas pembangunan ini mencakup 3 pilar, yaitu:



**Gambar 4.1** Tiga Pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (Bappenas, 2018)

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
  - b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, , yang ditandai dengan pencapaian :





- a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
- b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
- c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
- d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
- e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian :

- a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
- b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

4. Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
- b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
- b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
- MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian :





- a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
  - b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
  - c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
  - d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
  - e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
  - f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara , yang ditandai dengan pencapaian luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP
8. Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

Dukungan terhadap *Major Project (MP)*, antara lain:

- Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% - 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.
7. Serta indikator lainnya yaitu terkait Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110 dan Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

#### 4.2.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran SDGs Terhadap RKP 2024

Pengintegrasian SDGs/TPB dengan Dokumen RKP 2024 Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 juga telah dilakukan melalui pengintegrasian 17 goal SDGs kedalam 5 Prioritas Daerah RKP 2024 Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Selain pengintegrasian 17 Goal SDGs kedalam prioritas daerah, menjadikan isu SDGs/TPB sebagai isu





pembangunan Bersama juga menjadi salah satu bentuk tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi capaian TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dilakukan. Seperti pada data pada tahun 2018 – 2020, di dalam isu SDGs/TPB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 yang menjadi focus perhatian ada pada 2 pilar, tujuan TPB dengan status capaian tidak tercapai terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan masih terus ada pada tujuan 4 Pendidikan yang berkualitas serta pada tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dua isu tersebut akan coba dijawab dengan penyusunan RKPD Tahun 2024 yang memiliki tema Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, melalui beberapa prioritas daerah antarlain:

- A. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata
- B. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing
- C. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah
- D. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana
- E. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik

#### **4.2.3 Telaahan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis terhadap RKPD Tahun 2024**

Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen yang mengandung unsur kebijakan, rencana, dan program wajib. KLHS merupakan salah satu instrumen yang memiliki rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan dan salah satu syarat penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD

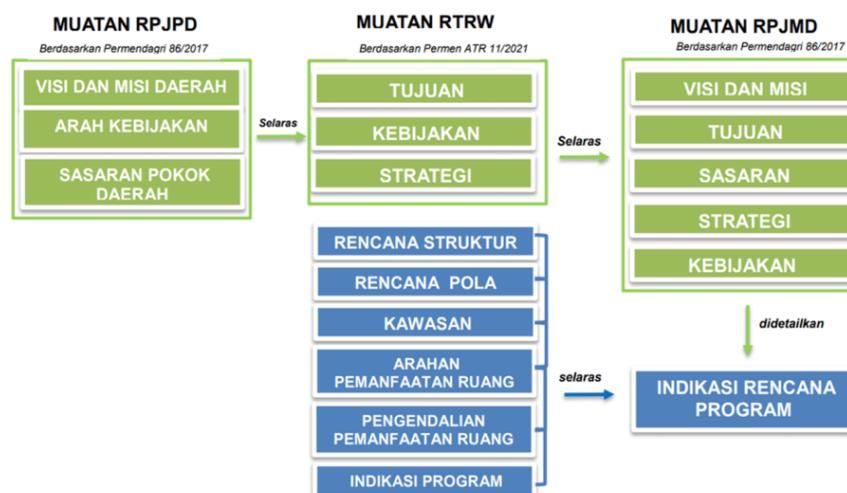




Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026 sebagai salah satu instrumen yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. Penyusunan KLHS dalam setiap penyusunan RPJMD baik baru maupun perubahan menggunakan pendekatan penilaian pencapaian TPB daerah untuk mendukung capaian TPB nasional. KLHS yang bertujuan untuk memastikan bahwa aspek pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana, dan Program dalam RPJMD, menggunakan pendekatan capaian TPB daerah yang dibandingkan dengan target TPB nasional. Dengan pendekatan tersebut maka diharapkan pencapaian TPB yang belum mencapai target dapat dilakukan percepatan melalui upaya tambahan dalam RPJMD. Arah kebijakan dan program yang ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

#### 4.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap RKPD Tahun 2024

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang bersifat spasial dan berimplikasi pada konsep keruangan. Dokumen RTRWP dapat menunjukkan dan memberikan arahan mengenai lokasi dari kegiatan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD yang tertuang pada indikasi program pemanfaatan ruang wilayah dengan pendetailan terkait program, arahan pembiayaan, serta lokasi program.

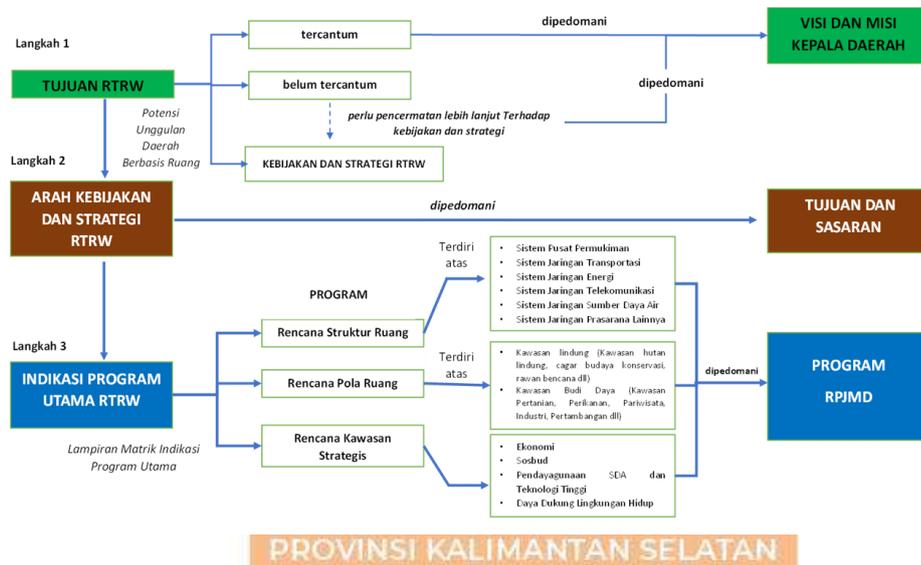




**Gambar 4.2** Penyelarasan Muatan RTRW dengan Muatan RPJPD dan RPJMD

(Direktorat PEIPD Ditjen Bina Bangda, 2022)

Pelaksanaan RTRWP dan RPJPD sama-sama memiliki periode selama 20 tahun, sedangkan RPJMD memiliki periode selama 5 tahun. Pada tahap penyusunan RPJPD maupun RPJMD telah dilakukan penyalarsan muatan dengan RTRWP seperti yang disajikan pada Gambar IV.4. Strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RTRWP menjadi acuan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD. Dimana pelaksanaan RPJMD kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan diterjemahkan ke dalam dokumen RKPD.



**Gambar 4.3** Alur Langkah-Langkah Penyalarsan RTRW dengan RPJMD

(Direktorat PEIPD Ditjen Bina Bangda, 2022)

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 yang mempedomani RTRWP Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 melalui pencermatan dan sinkronisasi terhadap indikasi program utama RTRWP yang terbagi menjadi program pelaksanaan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis. Sinkronisasi ini dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya dan sesuai dengan tujuan penataan ruang dalam RTRWP.





#### 4.2.5 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Visi yang diusung dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 yaitu :

**“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”.**

Makna mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu lima tahun ke depan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, aman dan sentosa dengan upaya untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan ekonomi yang merata dengan memperhatikan keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan, memperkuat sarana prasarana dasar perekonomian untuk kemakmuran masyarakat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, penguatan terhadap ketahanan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup

Dalam rangka perwujudan visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.

Misi 1 dalam penjabaran visi Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pada peningkatan nilai-nilai masyarakat melalui keagamaan, pendidikan dan sosial budaya, kesehatan, keterampilan, kepemudaan dan olah raga.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.

Misi 2 mengarahkan pembangunan yang merata melalui peningkatan nilai-nilai ekonomi melalui transformasi struktur ekonomi dari komoditas bahan mentah industri turunannya (hilirisasi).

3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.

Misi 3 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan aksesibilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan melalui pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar dan ekonomi dengan berbasiskan kewilayahan yang mengintegrasikan wilayah daratan dan lautan Kalimantan Selatan.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.





Misi 4 dimaksudkan untuk menjamin kinerja birokrasi dapat berjalan secara transparan, efisien dan handal. Reformasi birokrasi pelayanan publik perlu ditingkatkan kualitasnya karena akan berpengaruh besar terhadap iklim investasi. Untuk itu, tata kelola pemerintah yang baik harus diimplementasikan pada berbagai skala ruang maupun fungsi.

5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

Dalam upaya menciptakan lingkungan dan hunian masyarakat yang nyaman dan aman dari bencana, maka diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi persoalan terkait sektor kebencanaan melalui bentuk-bentuk pengendalian untuk bencana banjir, pencemaran, maupun perusakan lingkungan, serta memperkuat ketahanan iklim dan pembangunan rendah karbon dan penanganan kebakaran hutan lahan berbasis teknologi.

Sesuai dengan rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021-2026, adapun tahapan pembangunan pada Tahun 2024 memiliki arah kebijakan dengan fokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan prasarana wilayah untuk mendukung sektor-sektor unggulan. Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target sebagaimana dalam dokumen RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

**Tabel 4.1** Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 - 2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Baseline	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>VISI</b>									
<b>KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA</b>									
<b>MISI 1</b>									
<b>Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur</b>									
Meningkatnya Toleransi dan Nilai-nilai Keagamaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	N/A	69,1	72,71	73,32	73,85	74,3	74,7	74,7
Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama	Jumlah Konflik antar dan inter umat beragama (Kasus)	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	70,91	71,28	72,46 71,70	72,95 72,20	73,44 72,65	73,98 73,05	74,41 73,50	74,41 73,50
Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,29	8,34	8,47	8,56	8,65	8,74	8,83	8,83
	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,68	12,81	12,94	13,07	13,2	13,33	13,46	13,46





Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Baseline	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	68,66	68,83	70,64	71,05	71,46	71,99	72,3	72,3
Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,86	88,91	88,97	89,04	89,1	89,16	89,23	89,23
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,48	74,44	75,39	76,33	77,27	78,21	79,15	79,15
Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	50,67	51,08	52	52,665	53,33	53,995	54,66	54,66
Menurunnya Pernikahan Anak	Angka Perkawinan Anak (%)	16,24	16,26	15,01	13,77	12,53	11,29	10,04	10,04
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,11	69,87	69,89	69,91	69,93	69,95	69,97	69,97
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	N/A	58,64*	60,15	61,67	63,2	64,74	66,29	66,29
Meningkatnya Prestasi dan Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga (%)	N/A	N/A	35	37	39	41	43	43
	Jumlah Medali Emas (Buah)	N/A	45	30	40	50	35	45	200
<b>MISI 2</b>	<b>Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata</b>								
Meningkatnya perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-1,81	2,1 - 2,6*	4,0 - 4,5	4,5 - 5,2	5,2 - 6,0	6,0 - 6,24	6,24 - 6,5	6,24 - 6,5
Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Perikanan dan Pariwisata	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	-0,96	(-0,05) - 0,65*	0,65 - 2,5	1,5 - 3,45	3,15 - 3,95	3,5 - 4,2	3,75 - 4,75	3,75 - 4,75
	LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	-3,38	1,81 - 2,15*	1,9 - 2,57	2,5 - 3,65	3,65 - 4,65	4,5 - 5,25	5,25 - 6,5	5,25 - 6,5
	LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor (%)	-3,38	0,76 - 0,9*	6,95 - 7,2	7,2 - 7,85	7,85 - 8,2	8,2 - 9,1	9,1 - 10	9,1 - 10
	LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum (%)	-2,02	3,1 - 3,68*	6,18 - 6,61	6,61 - 7,1	7,1 - 7,8	7,8 - 8,25	8,25 - 9,1	8,25 - 9,1
Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	7,76	10,83*	11,66	12,55	13,52	14,55	15,67	15,67





Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Baseline	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan	Persentase penduduk miskin (%)	4,38	4,83	4,80 - 4,60	4,60 - 4,40	4,40 - 4,22	4,22 - 4,05	4,05 - 3,77	4,05 - 3,77
	Indeks Gini	0,332	0,33	0,328	0,326	0,324	0,322	0,31	0,31
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Mandiri (%)	18,79	19,00*	19,29	19,79	20,29	20,79	21,29	21,29
Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rupiah per Orang per Tahun)	12.032	12.143	12.146,875	12.208,904	12.266,652	12.320,671	12.371,414	12.371,414
	Nilai Tukar Petani (%)	99,18	101,58*	102,23	102,7	103,18	103,69	103,8	103,8
Menurunnya tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,74	4,95	4,39	4,22	4,05	3,88	3,71	3,71
Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,33	69,26	69,74	69,94	70,16	70,38	70,6	70,6
<b>MISI 3</b>	<b>Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian</b>								
Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan	Indeks Williamson	0,391	0,383*	0,375	0,367	0,359	0,351	0,343	0,343
Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	67,56	76,57	79,33	81,21	85,21	87,04	88,26	88,26
Meningkatnya Konektivitas antar kawasan	Rasio Konektivitas	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,67
Terwujudnya pembangunan kawasan-kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan	Persentase kesesuaian tata ruang (%)	85	86	87	88	89	90	91	91
<b>MISI 4</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik</b>								
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	68,47	70,85*	72,05	73,24	74,44	75,64	76,84	76,84





Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Baseline	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,7	3,8*	3,85	3,95	4,05	4,15	4,2	4,2
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP*	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Predikat SAKIP	BB	A*	A	A	A	A	A	A
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,03	2,85	3,1	3,25	3,4	3,55	3,65	3,65
	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	71,17	72	75	78	80	82	82
Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Sangat Baik (4,41)	Sangat Baik (4,42)*	Sangat Baik (4,44)	Prima (4,51)	Prima (4,52)	Prima (4,53)	Prima (4,54)	Prima (4,54)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	74,05	79,48*	79,49	79,5	79,51	79,52	79,53	79,53
<b>MISI 5</b>	<b>Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana</b>								
<b>Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>68,43</b>	<b>70,26*</b>	<b>70,58</b>	<b>70,9</b>	<b>71,22</b>	<b>71,54</b>	<b>71,86</b>	<b>71,86</b>
Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Indeks Tutupan Lahan	48,48	49,84*	51,24	52,64	54,04	55,44	56,84	56,84
	Indeks Kualitas Air	51,67	55,90*	55,97	56,04	56,12	56,19	56,26	56,26
	Indeks Kualitas Udara	88,93	88,38*	88,5	88,63	88,73	88,85	88,97	88,97
	Indeks Kualitas Air Laut	64,19	68,69*	69,27	69,86	70,44	71,02	71,6	71,6
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	16,5	18	21	22,2	24,6	26,6	28,9	28,9
<b>Meningkatnya Ketahanan Bencana</b>	<b>Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)</b>	<b>144,81</b>	<b>138*</b>	<b>138</b>	<b>135</b>	<b>132</b>	<b>129</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,47	0,51*	0,54	0,57	0,6	0,63	0,66	0,66

### 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalsel Tahun 2024





Sesuai dengan rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021-2026 sebagaimana disampaikan pada bahasan sebelumnya yaitu “**KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA**” dimana tema pembangunan yang diusung adalah “**Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendukung Sektor-Sektor Utama yang Sinergi dengan Kebijakan Nasional**” dengan beberapa pertimbangan yang dihasilkan dari analisis dokumen-dokumen perencanaan serta isu-isu strategis yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya. Untuk menjamin terlenggaranya pembangunan periode tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan arah kebijakan “**Peningkatan Kualitas SDM dan Prasarana wilayah mendukung sektor-sektor unggulan Daerah dan Kebijakan Nasional yang dilaksanakan di Kalsel**”. Pada Tahun 2024 telah dilakukan penyesuaian tema pembangunan pada penyusunan RKPD Tahun 2024 ini menjadi:

**“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong  
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**

Tema Pembangunan tahun 2024 terdapat 2 kata kunci (*key words*). Dari kedua kata kunci tersebut mengandung makna sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah**. Secara pengertian Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Maka diharapkan dengan mengusung tema tahun 2024 akan diupayakan fokus pembangunan yang akan diarahkan pada komponen-komponen. Daya Saing Daerah dengan target tumbuhnya ekonomi inklusif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. **Pertumbuhan Ekonomi Inklusif** merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.





Berdasarkan empat poin tersebut maka tema Tahun 2024 tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan aspek lokal Provinsi Kalimantan Selatan dengan target pembangunan ekonomi yang mengalami pertumbuhan secara inklusif. Begitu juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi inklusif juga tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, infrastruktur dan kualitas lingkungan) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Kalsel MAJU” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat keseluruhan.



**Gambar 4.4** Keterkaitan Aspek Daya Saing Daerah dengan Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif

### 4.3.1 Prioritas dan Sasaran RKPD Tahun 2024

Berdasarkan hal tersebut, maka dibuat Prioritas Pembangunan pada Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2** Prioritas dan Sub-Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No.	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas
1.	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja</li> <li>3. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Geopark</li> </ol>





No.	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas
		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Peningkatan Jumlah dan Kelas Wirausaha Baru Berbasis Digital</li><li>5. Peningkatan Realisasi Investasi yang Berdampak ke Daerah</li><li>6. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN</li></ol>
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah</li><li>2. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda</li><li>3. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif</li><li>4. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS</li><li>5. Pengendalian Prevalensi Stunting</li><li>6. Penurunan Angka Pernikahan Anak</li><li>7. Peningkatan Prestasi Olahraga</li><li>8. Pengembangan Budaya Daerah</li></ol>
3.	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar</li><li>2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Menunjang Konektivitas antar Wilayah</li><li>3. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan yang Terintegrasi dengan Infrastruktur sebagai Pendukung Pintu Gerbang IKN</li></ol>
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan Reformasi Birokrasi</li><li>2. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)</li><li>3. Pelaksanaan Pilkada Serentak</li><li>4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</li><li>5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik</li><li>6. Pengembangan Satu Data Kalsel</li></ol>
5.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup</li><li>2. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana</li></ol>

Berbagai macam metode dan pendekatan perencanaan dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Capaian pembangunan harus berkontribusi terhadap indikator makro daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah.





Oleh karena itu, pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkembang dan fokus terhadap sasaran prioritas. Kelima rumusan prioritas pembangunan Kalimantan Selatan sebagaimana Tabel IV.2 kemudian diselaraskan dengan sasaran pembangunan pada Tahun 2024 sebagaimana ditampilkan pada Tabel IV.3.

**Tabel 4.3** Sasaran Prioritas dan Sub Prioritas RKPD tahun 2024

No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
1	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3,15 - 3,95	%
			LPE Sektor Industri Pengolahan	3,65 - 4,65	%
			LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	7,85 - 8,2	%
		Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,16	%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,05	%
		Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Geopark	LPE Sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,10 - 7,80	%
			Kenaikan Jumlah Wisnus	10	%
			Kenaikan Jumlah Wisman	5	%
			Tingkat Hunian Akomodasi	48	%
		Peningkatan Jumlah dan Kelas Wirausaha Baru Berbasis Digital	Pengeluaran perkapita	12.266,652	Ribu Rupiah per Orang
			Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru	19,67	%
			Persentase pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan	27,21	%
		Peningkatan Realisasi Investasi yang Berdampak ke Daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	13,52	Triliun Rupiah
		Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:	1,39	%
			Padi	1.256.971	Ton
			Bawang	525	Ton
			Cabe Rawit	18.077	Ton
Cabe Besar	14.649		Ton		
Jeruk	121.265		Ton		
Produksi Daging	132.895	Ton			



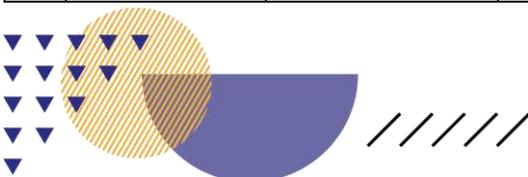


No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
			Produksi Ikan Tangkap	212.500	Ton
			Produksi Ikan Budidaya	177.272	Ton
			Skor Pola Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	82	Skor
			Stok Minimal Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi	399	Ton
			Persentase Peningkatan Lumbung Pangan yang Memenuhi Stok Pangan Minimal	78,57	%
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,65	Tahun
		Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	53,33	Indeks
		Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,1	Indeks
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,27	Indeks
		Penurunan Penyakit Melalui GERMAS	Usia Harapan Hidup	71,46	Tahun
		Pengendalian Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	14	%
		Penurunan Angka Pernikahan Anak	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 19 tahun	10,53	%
		Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga	39	%
			Jumlah Medali Emas	50	Buah
Pengembangan Budaya Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	63,2	Indeks		
3	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah	Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	85,21	%
			Cakupan Pelayanan Air Minum yang layak	100	%
			Cakupan Pelayanan Air Limbah yang Layak	97	%
			Cakupan Pelayanan Persampahan	52,27	%
			Luas Genangan yang Tertangani	15,9	%
			RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni	48,02	%





No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024			
				Target	Satuan		
			Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	39,19	%		
			Kapasitas Penyediaan Air Baku	28,84	%		
			Meningkatnya cakupan masyarakat yang dapat menikmati listrik	99,61	%		
			Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Tidak Mampu	89,04	%		
			Wilayah Bebas Blankspot	92	%		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan	0,63			
			Tingkat Kemantapan Jalan	82	%		
			Tingkat Aksesibilitas Jalan	51,78	%		
			Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	100	%		
			Sarana dan Prasarana Bangunan dan Lingkungannya dalam kondisi baik	100	%		
			Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa	60	%		
			Terangkutnya Penumpang dan Barang	77,5	%		
			Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalsel	2	%		
			Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	54,83	%		
			Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN	Terwujudnya Pembangunan Kawasan - Kawasan Strategis Berdasarkan Keseimbangan Keuangan	85	%	
		Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu		60	%		
		Persentase Luas Sisa Areal HPL yang Dapat Dikembangkan oleh Pemda		60	%		
		4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada	Penguatan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	74,44	Indeks
					Opini BPK	WTP	
					SAKIP	A	
Indeks Profesionalitas ASN	78				Indeks		





No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
	Pelayanan Publik	Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	Minimal 25	%
		Pelaksanaan Pilkada Serentak	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	78,82	%
		Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	100	%
		Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,4	Indeks
		Pengembangan Satu Data Kalsel	Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang Akurat	245	
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	93	%
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	93	%
5	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,9	Indeks
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,04	Indeks
			Indeks Kualitas Air	56,12	Indeks
			Indeks Kualitas Udara	88,73	Indeks
			Indeks Kualitas Air Laut	70,44	Indeks
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	24,6	
		Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,6	
			Peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	100	%
			penanganan pra bencana dan penanganan tanggap darurat bencana	100	%
			Pengendali Daya Rusak Air dalam Kondisi Baik	37,58	%





No	Prioritas Daerah	Sub Prioritas	Indikator	Tahun 2024	
				Target	Satuan
			Kawasan hutan yang bebas kebakaran hutan	99,2	%

#### 4.3.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan RKPD 2024 dan RKP 2024

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Sebagai arahan bagi pembangunan nasional pada Tahun 2024, maka pemerintah pusat telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Tema tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional (PN) sebagai berikut:

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
  - peningkatan pasokan bahan bakar nabati;





- 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
  - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
  - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
  - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
  - 3) penyediaan air untuk pertanian;
  - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
  - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
  - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
  - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
  - 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
  - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
  - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
  - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
  - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
  - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan





- 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
  - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
  - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
  - 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
  - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
  - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
  - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
  - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
  - 6) pengembangan industri halal.
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
  - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
  - 3) pengelolaan impor;
  - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
  - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
  - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan





- 7) peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
  - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
  - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
  - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
  - 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. PN 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, maka telah dirumuskan program/kegiatan prioritas tahun 2024. Program prioritas tersebut dilandaskan pada permasalahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yang berusaha untuk diselesaikan.

Program Prioritas tersebut juga tidak lepas dari program prioritas Nasional yang pada Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari 5 Prioritas Daerah. Penjabaran Program prioritas disusun dengan harapan dapat menunjukkan kesungguhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung prioritas





pembangunan Nasional Tahun 2024. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalsel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4** Sandingan Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah /Program Prioritas Provinsi Tahun 2024

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
1	<b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>	1	<b>Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata</b>
		2	<b>Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah</b>
1.1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)		- Program Pengelolaan Energi Terbarukan
1.2	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi		- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.3	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan		- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan. - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Pengawasan Keamanan Pangan
1.4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan		- Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan





No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
1.5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).</li><li>- Pengembangan UMKM.</li><li>- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.</li><li>- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</li><li>- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</li><li>- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</li><li>- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.</li><li>- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</li></ul>
1.6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrilisasi		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.</li><li>- Program Pengendalian Izin Usaha Industri.</li><li>- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</li><li>- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</li><li>- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.</li><li>- Program Promosi Penanaman Modal.</li><li>- Program Pelayanan Penanaman Modal.</li><li>- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.</li><li>- Program Pemasaran Pariwisata.</li><li>- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li></ul>
1.7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengembangan Ekspor.</li><li>- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</li></ul>
1.8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Perekonomian dan Pembangunan</li></ul>
<b>2</b>	<b>Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</b>	<b>2</b>	<b>Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah</b>





No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
2.1	Pembangunan Wilayah Kalimantan		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.</li><li>- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya.</li><li>- Program Penataan Bangunan Gedung.</li><li>- Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.</li><li>- Program Penataan Desa.</li><li>- Program Peningkatan Kerjasama Desa.</li><li>- Pengembangan Kalsel Sebagai Gerbang Food Estate Dan Ibukota Negara Baru</li><li>- Program Penyelenggaraan Jalan</li><li>- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</li><li>- Program Pengelolaan Pelayaran</li><li>- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li><li>- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li></ul>
2.2	Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter)		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengelolaan Pendidikan</li><li>- Program Pengembangan Kurikulum</li><li>- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li><li>- Program Pengendalian Perizinan Pendidikan</li><li>- Program Pengembangan Bahasa dan Sastra</li><li>- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li><li>- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</li></ul>
<b>3</b>		<b>3</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing</b>
3.1	Pengendalian Penduduk dan Penguatan tata Kelola Kependudukan		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pendaftaran Penduduk.</li><li>- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li></ul>
3.2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pemberdayaan Sosial.</li><li>- Program Rehabilitasi Sosial.</li><li>- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li></ul>





No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
3.3	peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.</li><li>- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.</li><li>- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.</li><li>- Program Peningkatan Kualitas Keluarga.</li><li>- Program Perlindungan Khusus Anak.</li><li>- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.</li><li>- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.</li><li>- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.</li><li>- Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.</li><li>- Program Pengelolaan Persampahan</li></ul>
3.4	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengelolaan Pendidikan</li><li>- Program Pembinaan Perpustakaan</li><li>- Program Pengembangan Kurikulum</li></ul>
3.5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li><li>- Program pengelolaan Pendidikan.</li><li>- Program Peningkatan Kualitas Keluarga.</li><li>- Program Perlindungan Khusus Anak.</li><li>- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.</li><li>- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</li></ul>
3.6	Pengentasan Kemiskinan		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pemberdayaan Sosial.</li><li>- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</li><li>- Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan</li></ul>
3.7	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.</li><li>- Program Perencanaan Tenaga Kerja.</li><li>- Program Pengelolaan Pendidikan.</li><li>- Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan</li></ul>
<b>4</b>	<b>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>	<b>4</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing</b>
4.1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila	4.1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</li><li>- Program Pengembangan Kurikulum</li></ul>





No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
4.2	Meningkatkan Kemajuan dan Pelestarian Kebudayaan		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengembangan Kebudayaan</li><li>- Program Pembinaan Sejarah</li><li>- Program Pengembangan Kesenian Tradisional.</li><li>- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.</li><li>- Program Pengelolaan Permuseuman</li></ul>
4.3	Memperkuat Moderasi Beragama		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.</li><li>- Program Kesejahteraan Rakyat</li></ul>
4.4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pembinaan Perpustakaan.</li></ul>
<b>5</b>	<b>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>	<b>5</b>	<b>Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah</b>
		<b>6</b>	<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik</b>
5.1	Infrastruktur Pelayanan Dasar		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.</li><li>- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.</li><li>- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</li><li>- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li><li>- Program Kawasan Permukiman.</li><li>- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).</li><li>- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</li><li>- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).</li></ul>
5.2	Infrastruktur Ekonomi		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Penyelenggaraan Jalan.</li><li>- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).</li><li>- Program Pengelolaan Pelayaran.</li><li>- Program Pengelolaan Perkeretaapian.</li><li>- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.</li></ul>
5.3	Infrastruktur Perkotaan		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li></ul>
5.4	Energi dan Ketenagalistrikan		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.</li></ul>
5.5	Transformasi Digital		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li><li>- Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik.</li></ul>





No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana
6.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li><li>- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</li><li>- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li><li>- Program Pengelolaan Aspek Kegeologian</li><li>- Program Pengelolaan Hutan</li><li>- Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</li><li>- Program Pengelolan Persampahan</li><li>- Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.</li><li>- Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li><li>- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</li><li>- Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li></ul>
6.2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Penggulangan Bencana</li><li>- Program Penanganan Bencana</li><li>- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.</li><li>- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li><li>- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li></ul>
6.3	Pembangunan Rendah Karbon		<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li><li>- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li></ul>
7	Memperkuat Stabilitas Polkhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik
7.1	Konsolidasi Demokrasi	7.1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.</li></ul>





No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Daerah / Program Prioritas Provinsi
			- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
7.2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri		- Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
7.3	Reformasi Birokrasi dan tata Kelola		- Program Kepegawaian Daerah. - Program Penyelenggaraan Pengawasan. - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Penataan Organisasi. - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. - Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. - Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
7.5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional		- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

#### 4.3.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 Berbasis Kewilayahan

Kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 yang melingkupi kebijakan pengembangan wilayah, struktur dan pola ruang. Penyusunan RKPD Tahun 2024 ini terintegrasi dengan pelaksanaan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan periode kedua (Tahun 2020 – 2024). Pada periode kedua ini, berdasarkan hasil peninjauan kembali pada Tahun 2020 dan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dilakukan proses revisi dan integrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Selatan.

Agar pembangunan dengan basis kewilayahan berjalan efektif maka diperlukan kebijakan perencanaan pengembangan wilayah yang memiliki sistem yang saling terintegrasi antar wilayah kabupaten/kota. Melalui konsep ini, dapat



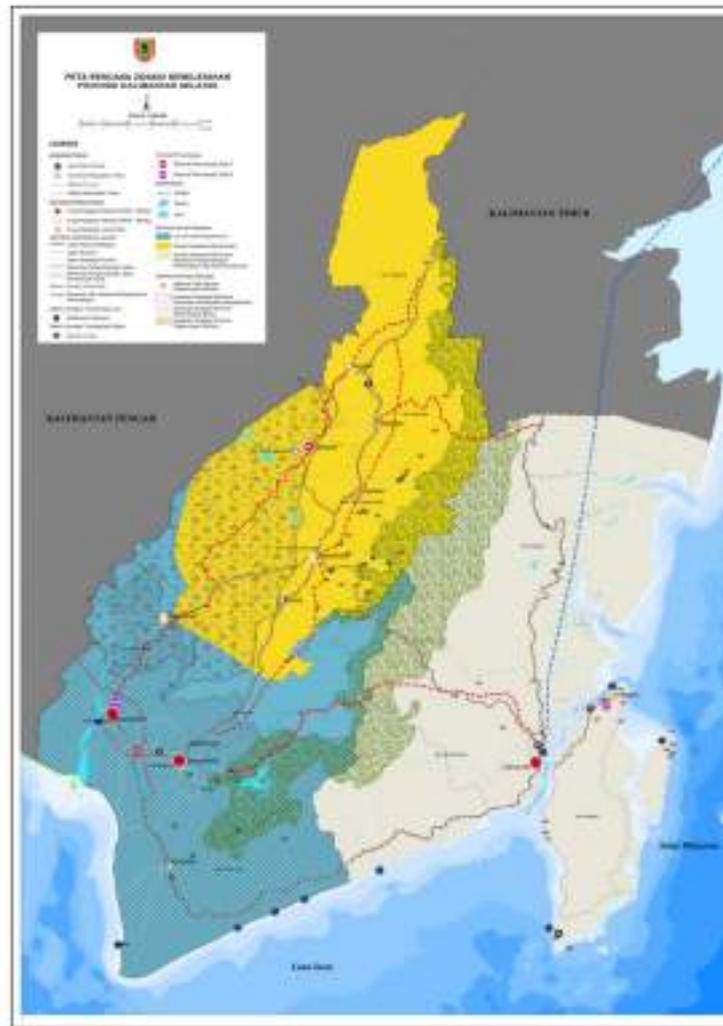


dilakukan pembagian 3 (tiga) zona pengembangan wilayah. Pembagian zona tersebut didasarkan pada beberapa hal yaitu adanya aglomerasi pusat-pusat kegiatan, keterkaitan fungsional dan potensi pengembangan wilayah antar kabupaten/kota yang didelineasi berdasarkan batas administrasi wilayah serta sinkronisasi arah pengembangannya dengan konsep pengembangan kawasan-kawasan strategis di Provinsi Kalimantan Selatan. Pembagian wilayah pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan terintegrasi antar wilayah kabupaten/kota yang disesuaikan dengan sektor-sektor unggulan maupun potensi daerah masing-masing.

Adapun 3 (tiga) wilayah pengembangan tersebut seperti yang ditampilkan pada di bawah terbagi menjadi:

1. Wilayah Pengembangan Zona Perkotaan Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya.
2. Wilayah Pengembangan Zona Benua Anam.
3. Wilayah Pengembangan Zona Pengembangan Kawasan Pesisir, Kawasan Industri, dan Kawasan Ekonomi Khusus.





**Gambar 4.5** Konsep Pembagian Tiga Zona Kewilayahan Kalimantan Selatan Berdasarkan Administrasi dan Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis

#### 4.3.4 Penelaan Terhadap Pokok - Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan dimaksud diperoleh dari hasil pelaksanaan proses perencanaan yaitu pada tahapan Pembukaan dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Forum SKPD, Musrenbang Provinsi dan Dialog Interaktif Rancangan Akhir RKPD serta hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Kalimantan





Selatan Tahun 2024, masukan yang telah masuk dalam SIPD kemudian di seleksi berdasarkan kewenangan Provinsi yang kemudian akan dipilah berdasarkan prioritas.

Pada tahap Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 ini, usulan pikir yang diusulkan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui aplikasi SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri mencapai 1.345 usulan. Usulan pikir tersebut dipilah berdasarkan prioritas dan kesesuaian kewenangan pemerintah provinsi. Adapun rekapitulasi daftar pikir yang diusulkan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.5** Pokok Pikiran DPRD Kalimantan Selatan

No	Urusan	Jumlah Usulan	Penjabaran Usulan
1	Pendidikan Dan Kebudayaan	57	Peningkatan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan seperti pembangunan ruang kelas, renovasi bangunan sekolah, dan halaman sekolah. Selain itu usulan juga diarahkan pada upaya pembangunan SMA dan Sekolah Kejuruan pada daerah – daerah tertentu seperti di Desa Mulyoharjo, Desa Salino, Desa Mayangsari, Kelurahan Palambuan. Digitalisasi sistem pengajaran menjadi salah satu usulan yang disampaikan.
2	Kesehatan	30	Usulan berupa hibah provinsi dalam bentuk mobil ambulans, penyediaan dan distribusi alat kesehatan, peningkatan pelayanan rumah sakit untuk penyandang disabilitas fisik sedang dan berat, serta usulan pembangunan posyandu di Sungai Andai





No	Urusan	Jumlah Usulan	Penjabaran Usulan
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	300	Pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan serta perbaikan drainase jalan. Pada sektor sumber daya air usulan berfokus pada normalisasi sungai, rehabilitasi jaringan irigasi, perkuatan tebing/tanggul, pembangunan embung, dan pengaman pantai. Untuk mendorong pemenuhan infrastruktur dasar maka diusulkan pembangunan sarpras air bersih dan pemasangan pipa PDAM, bantuan pengelolaan persampahan dan pengadaan bank sampah,
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	90	Usulan didominasi dalam rangka penanganan rumah tidak layak huni berupa kegiatan perbaikan/bedah rumah tidak layak huni. Untuk mendukung peningkatan kawasan kumuh dan pengembangan permukiman maka usulan berfokus pada perbaikan dan peningkatan jalan permukiman, rehabilitasi kantor desa, dan pemasangan pavingisasi halaman kantor desa. Selain itu terdapat beberapa usulan untuk pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni korban bencana
5	Perhubungan	90	Usulan didominasi dalam upaya penerangan jalan yang disesuaikan dengan kewenangan Provinsi. Selain itu usulan juga berupa rehabilitasi fasilitas keselamatan jalan, bantuan jukung pengawasan dan mesin penggerak, serta pembangunan dan perbaikan dermaga
6	Kehutanan	7	Usulan berupa pengadaan bibit tanaman. Selain itu terdapat usulan izin pemanfaatan hutan bagi masyarakat adat





No	Urusan	Jumlah Usulan	Penjabaran Usulan
7	Energi Dan Sumber Daya Mineral	30	Usulan berupa pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bantuan tiang listrik untuk penerangan jalan. Dari sisi kegiatan pertambangan, terdapat usulan untuk monitoring dan pengawasan terhadap limbah kegiatan,
8	Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan dan Peternakan) dan Ketahanan Pangan	237	Pengusulan berupa pembangunan lumbung padi dan pengadaan sarana prasarana pertanian (hand tractor, traktor boat, pupuk, benih padi, bibit sawit, rondup) . Selain itu terdapat usulan perbaikan jalan usaha tani, jalan tani poros, dan jalan kebun. Untuk mendukung kegiatan peternakan diperlukan bantuan ternak sapi dan itik jawa
10	Kelautan Dan Perikanan	84	Usulan berupa bantuan alat tangkap ikan, mesin perahu dompeng, dan bibit ikan
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Pelatihan untuk anak remaja di Kota Banjarmasin
12	Kepemudaan dan Olahraga	21	Berupa Bantuan peralatan olahraga dan bantuan pengadaan sarana prasarana olahraga seperti seragam, net, bola pada cabang-cabang olah raga (Bola voli, Futsal, Sepak bola). Selain itu terdapat usulan pembangunan stadion dan gedung olahraga
13	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	Berupa hibah kepada LSM, yayasan, dan DPD Persatuan Alumni Gerakan mahasiswa Nasional Indonesia Kalimantan Selatan
14	Kebencanaan	4	Usulan bantuan pengadaan sarana prasarana kebencanaan berupa perahu karet
15	Perdagangan	2	Kebutuhan operasi pasar untuk kebutuhan pangan di kawasan terpencil dan





No	Urusan	Jumlah Usulan	Penjabaran Usulan
16	Tenaga Kerja	9	Bantuan yang diusulkan berupa program pelatihan kerja untuk pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi serta pelatihan bagi para pemuda putus sekolah dan masyarakat UMKM
17	Sekretariat Daerah	277	Bantuan pembangunan/rehabilitasi mesjid, mushola, TPA/TPQ dan panti asuhan. Untuk mendukung kegiatan ibadah masyarakat, maka terdapat usulan hibah untuk tempat ibadah
18	Komunikasi dan Informatika	3	Usulan penguatan tata kelola komisi informasi publik
19	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10	Usulan pengadaan pasar murah di Wilayah Kemiri Sungai Andai serta pembinaan UMKM di desa, dan bantuan pengadaan bahan produksi kain sasirangan. Diperlukan juga diklat/pelatihan keterampilan wirausaha khususnya untuk remaja dan wanita untuk mendukung UMKM
20	Lingkungan Hidup	5	Usulan yang disampaikan sebagai upaya penanganan sampah berupa pengadaan TPA/TPS. Selain itu, diusulkan pembuatan saluran pembuangan limbah batubara di Desa Jelatang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
21	Pariwisata	13	Perlu penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan usaha untuk para ibu rumah tangga, remaja, kelompok desa. Serta dibutuhkan bantuan berupa mesin jahit dan dinamo. Untuk meningkatkan pemberdayaan kesenian masyarakat, maka dibutuhkan fasilitas kesenian kuda lumping
22	PMD	5	Usulan penyusunan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tanah Laut
23	Pertanahan	2	Dukungan legalitas tanah di pedesaan dan sertifikasi lahan transmigrasi Angkatan Laut di Desa Abumbun Jaya





No	Urusan	Jumlah Usulan	Penjabaran Usulan
24	Sosial	47	Usulan bantuan usaha ekonomi produktif
25	Perindustrian	3	Usulan berupa hibah alat produksi (mesin pencetak bakso, mesin pemisah tulang, mesin pencetak sosis, mesin pengemasan plastik, mesin vakum, dan freezer box)
26	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	12	Usulan berupa bantuan sarpras pemadam kebakaran (mobil pemadam, mobil unit pick-up, mesin pompa air, alat pemadam kebakaran, baju pemadam kebakaran) dan rehabilitasi posko BPK

#### 4.4 Inovasi Pembangunan Daerah

Selain program/kegiatan yang diuraikan pada subbab sebelumnya, dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan prioritas yang telah diuraikan, dikembangkan pula program-program inovasi. Beberapa program inovasi yang dikembangkan di Kalimantan Selatan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.6 Tabel Inovasi Daerah

No	Urusan/Unit Kerja	Bentuk Inovasi dan Penjabaran Inovasi
1.	Dinas Perkebunan dan Perternakan Provinsi Kalimantan Selatan	<p><b>Bentuk Inovasi</b></p> <p><b>Integrasi Sawit - Sapi berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (SISKA KU INTIP)</b></p> <p>Merupakan Program Integrasi Sawit - Sapi berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (SISKA KU INTIP). Adapun penjabaran dari inovasi ini sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam upaya percepatan swasembada pangan khususnya sapi potong. Dinas Perkebunan dan Perternakan Kalimantan Selatan melakukan program Integrasi Sawit-Sapi berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (SISKA KU INTIP), telah mampu meningkatkan produksi anak sapi (padet) di Kalsel.</li><li>• Dari populasi sapi di Kalsel sekitar 148 ribu ekor, selama ini menghasilkan anak sapi setiap tahun 22 ribu ekor. Tetapi setelah program SISKA KU INTIP tahun 2020 meningkat menjadi 27 ribu ekor, dan tahun 2021 naik lagi menjadi 30.500 ekor.</li><li>• Program SISKA KU INTIP telah melakukan kajian sejak tahun 2016, dan hingga tahun 2024 mendapat support dari Australia serta mendorong peternak dan</li></ul>

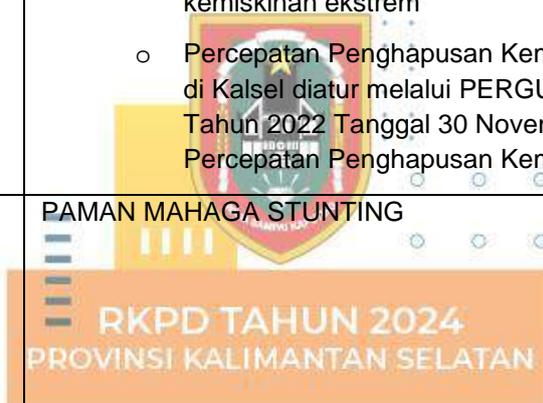




No	Urusan/Unit Kerja	Bentuk Inovasi dan Penjabaran Inovasi
		<p>pekebun di Kalsel untuk melakukan integrasi sawit-sapi tersebut, karena terbukti mampu meningkatkan produksi anak sapi. Agar dapat mempercepat swasembada sapi potong 2026, dan menjadi pemasok sapi di wilayah Kalimantan, Program SISKU INTIP, dapat mendorong perkebunan kelapa sawit di Kalsel. Karena sektor perkebunan telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meraih devisa nomor dua di Kalsel setelah batubara.</p>
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Bentuk Inovasi</p> <p>Pemberian Penghargaan Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan - Geospasial Banua Award</p> <p>Penjabaran Inovasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Merupakan program pemberian penghargaan pertama pada tingkat provinsi di Indonesia untuk pengembangan simpul jaringan informasi geospasial pada tingkat SKPD provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan</li><li>• Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya SKPD provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dalam mengembangkan simpul jaringan informasi geospasial daerah dan mendukung percepatan satu data di Kalimantan Selatan</li><li>• Ajang pemberian penghargaan ini dilaksanakan perdana pada Tahun 2022 dengan mengadopsi sistem penilaian Bhumandala Award.</li><li>• Dengan adanya penghargaan ini, kinerja maupun komitmen SKPD provinsi sebagai unit produksi dan simpul jaringan kabupaten/kota meningkat secara drastis.</li></ul>
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	<p>Bentuk Inovasi</p> <p>Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Melalui Sistem Informasi Bebrbasis Geospasial Terintegrasi (Sinbastertaskrim) Provinsi Kalimantan Selatan – SI PALUI EKSIS</p> <p>Penjabaran Inovasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Merupakan program tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dimana Provinsi Kalimantan Selatan</li></ul>





No	Urusan/Unit Kerja	Bentuk Inovasi dan Penjabaran Inovasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan pencapaian Kinerja Pengentasan Kemiskinan Ekstrem agar lebih efektif dan efisien diperlukan Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang Terpadu dan Berkelanjutan melalui Sistem Informasi berbasis Geospasial Terintegrasi secara Vertikal dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota seta secara horizontal antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Stakeholder lainnya. (Perbankan, Perusahaan Baznas, dan BPJS)</li><li>• Dengan adanya program ini mampu mengintegrasikan (link) data geospasial dan program/kegiatan baik secara<ul style="list-style-type: none"><li>○ Vertikal: pusat, provinsi, kabupaten/kota,</li><li>○ Horizontal: SKPD dan Stakeholders lain (Perbankan, Perusahaan, Baznas, dan BPJS)</li><li>○ Data program/kegiatan dan data kelompok sasaran dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem</li><li>○ Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kalsel diatur melalui PERGUB No 076 Tahun 2022 Tanggal 30 November Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem</li></ul></li></ul>
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan	<b>PAMAN MAHAGA STUNTING</b> 
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan	<b>Bentuk Inovasi</b> SIAP TPB (Sistem Aplikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs) <ul style="list-style-type: none"><li>• Penjabaran Inovasi</li><li>• Sistem pelaporan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tepat</li><li>• Menyediakan baseline data sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah</li><li>• Menyediakan data perkembangan tujuan pembangunan berkelanjutan daerah dengan Kemudahan updating secara timeseries dan terstruktur</li></ul>





No	Urusan/Unit Kerja	Bentuk Inovasi dan Penjabaran Inovasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penandingan data numerik dengan data geospasial untuk kemudahan analisa</li><li>• Mendukung program ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas untuk pelaporan</li></ul>
6.	Rumah Sakit Gigi dan Mulut Hasan Aman	SI KEPO (Aplikasi Kepuasan Pasien Online)
7.	Rumah Sakit Gigi dan Mulut Hasan Aman	KTP SI BOS (Kendali dan Tatalaksana Pencegahan Karies dengan Boneka Sappy)
8.	Dinas Kesehatan	Monalisa (Mobil Analisa dan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat)
9.	Dinas Lingkungan Hidup	<p>Bentuk Inovasi</p> <p>Program Sungai Martapura Asri (Aman, berSih, Ramah, Indah)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aman: memberikan rasa aman sebagai tempat berkehidupan (pengembangan transportasi dan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan serta mampu untuk mereduksi banjir yang terjadi di kawasan sub DAS Martapura)</li><li>• Bersih: bersih dari sampah dan sumber pencemar lainnya</li></ul> <p>Penjabaran Inovasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Merupakan program yang dimaksudkan untuk mengembalikan kejayaan Sungai Martapura sebagai pusaka peradaban Banua dan bertujuan menjadikan Sungai Martapura yang aman, bersih, rapi, dan indah.</li></ul>
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PAMAN MUDIK (Pembangunan Manunggal Menuju Desa Mandiri Berkelanjutan)
11.	RSUD ULIN	SI PARAS (Sistem Pelayanan Apik, Ramah, Aman, dan Salam/Senyum)
12.	RSUD ULIN	SI SUSAN RAKAT (Sistem Survei Kepuasan Masyarakat)
13.	RSUD ULIN	SI LURAH MANDAM (Sistem Kelistrikan Rumah Sakit Yang Handal Tanpa Padam)
14.	RSUD ULIN	SI ICU (Sistem Informasi Intensive Care Unit)
15.	RSUD ULIN	WASEMO (Drainase Pleura dengan Water Sealed Drainage Modification)





No	Urusan/Unit Kerja	Bentuk Inovasi dan Penjabaran Inovasi
16.	RSUD Ulin	SI WALUD (Sistem Informasi Kepegawaian Non ASN/BLUD)
17.	RSUD Ulin	SICAKEB (Sistem Catatan Asuhan Kebidanan)
18.	RSUD Ulin	APOTEKER PIAN (Aplikasi Penggunaan Obat bagi Tenaga Kefarmasian dan Pasien yang Informatif, Akuntabel dan Nyaman)
19.	RSUD Ulin	SI KAKA (Sistem Pelayanan Kecelakaan Kerja)
20.	Dinas Kehutanan	Bentuk Inovasi Gerakan Revolusi Hijau Penjabaran Inovasi <ul style="list-style-type: none"><li>Merupakan kegiatan penanaman dengan target 30.000 hektar per tahun yang dilaksanakan dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan tutupan lahan bervegetasi, menurunkan tingkat kekritisian lahan, meningkatkan produktivitas lahan</li></ul>
21.	Dinas Kehutanan	Bentuk Inovasi Siforestka (Sistem Informasi Kehutanan Kalimantan Selatan) Penjabaran Inovasi <ul style="list-style-type: none"><li>Merupakan aplikasi yang menyajikan informasi dan data potensi sumber daya hutan dalam satu kesatuan sistem yang mampu memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kehutanan secara akurat baik data potensi sumber data hutan, peluang bisnis, perizinan, dan informasi kehutanan lainnya.</li></ul>
22.	RSJ Sambang Lihum	Bentuk Inovasi SI PAMAN JUARA (Strategi Peningkatan Kemandirian Orang Dengan Gangguan Jiwa Melalui Usaha dan Kerja Nyata)
23.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sistem Informasi Air Tanah Kalimantan Selatan SIATA KALSEL
24.	UPT Kebun Raya Banua	Interest Kebun Raya Banua (Integrated Ticketing and Reservation Sistem)



**BAB V**  
**ARAH**  
**KEBIJAKAN**  
**PEMBANGUNAN**  
**KABUPATEN /**  
**KOTA**





# BAB V

## ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se- Kalimantan Selatan. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi panduan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota di Tahun 2024. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota berdasarkan pada arah kebijakan pembangunan daerah Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 yang tercantum dalam Bab IV.

### 5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota pada dasarnya merupakan fokus kebijakan pembangunan yang memberi panduan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan provinsi. Dalam kerangka rencana pembangunan tahunan, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada pencapaian target sasaran prioritas pembangunan Tahun 2024. Indikator makro pembangunan terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Arah kebijakan pembangunan seluruh kabupaten dan kota di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat mendukung pencapaian 6 (enam) indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.





### 5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian IPM kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.1. Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM <b>LEBIH RENDAH</b> dan Laju Pertumbuhan IPM <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
II	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
III	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi
IV	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM <b>LEBIH TINGGI</b> dan Laju Pertumbuhan IPM <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi

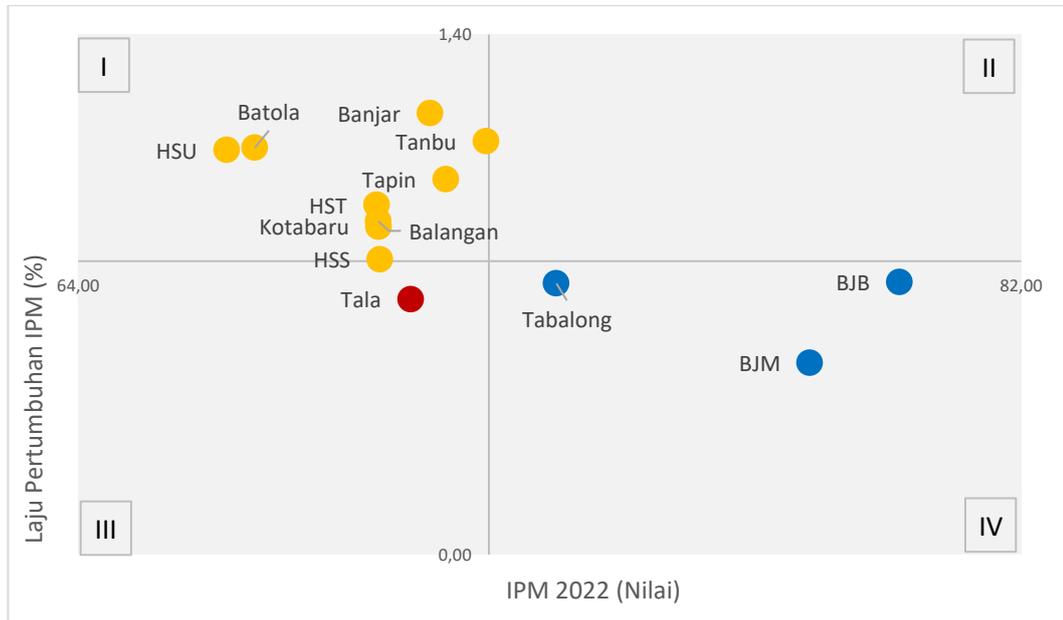
Sumber: Ditjah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

1. **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih rendah dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, dan Hulu Sungai Selatan.
2. **Kuadran II.** Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi.
3. **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Tanah Laut.
4. **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding





capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru.



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 5.1** Analis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/ Kota Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Capaian IPM kabupaten/kota berkisar antara 66,84 (Kabupaten Hulu Sungai Utara) hingga 79,68 (Kota Banjarbaru). Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan status capaian pembangunan manusia kabupaten/kota satu dan lainnya. Berdasarkan statusnya, terdapat 7 (tujuh) kabupaen/kota dengan status IPM “Tinggi”, dan 6 (enam) kabupaten dengan status IPM “Rendah”.

**Tabel 5.2.** Capaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022

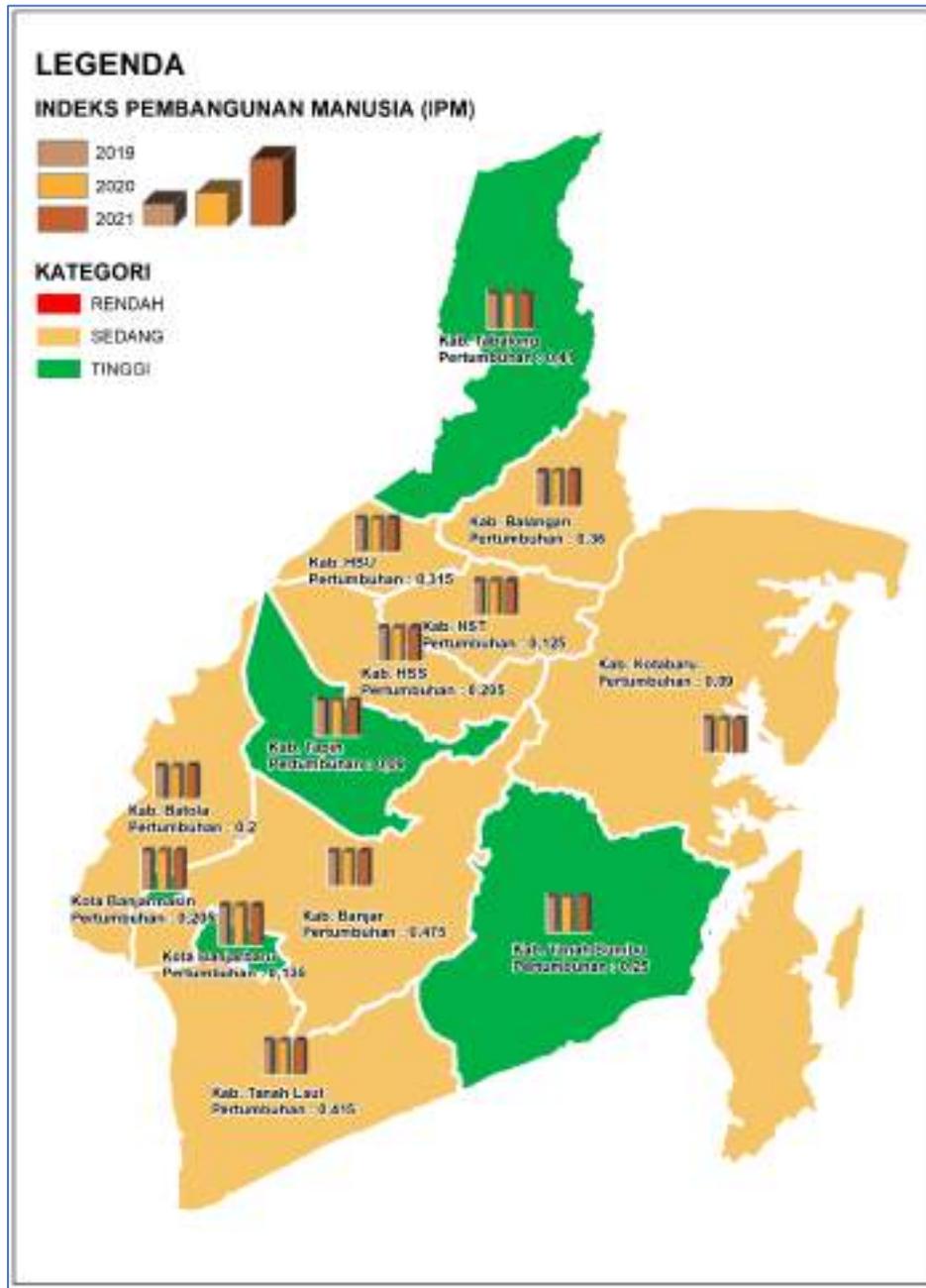
NO.	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)			
		2021	2022	PERTUMBUHAN (%)	KATEGORI
1	KALIMANTAN SELATAN	71,28	71,84	0,79	Tinggi
2	KAB. TANAH LAUT	69,87	70,35	0,69	Tinggi
3	KAB. KOTABARU	69,13	69,74	0,88	Sedang
4	KAB. BANJAR	69,89	70,72	1,19	Tinggi
5	KAB. BARITO KUALA	66,64	67,37	1,10	Sedang
6	KAB. TAPIN	70,31	71,02	1,01	Tinggi
7	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	69,21	69,76	0,79	Sedang
8	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	69,05	69,70	0,94	Sedang
9	KAB. HULU SUNGAI UTARA	66,12	66,84	1,09	Sedang





NO.	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)			
		2021	2022	PERTUMBUHAN (%)	KATEGORI
10	KAB. TABALONG	72,6	73,13	0,73	Tinggi
11	KAB. TANAH BUMBU	71	71,79	1,11	Tinggi
12	KAB. BALANGAN	69,11	69,73	0,90	Sedang
13	KOTA BANJARMASIN	77,10	77,97	0,52	Tinggi
14	KOTA BANJARBARU	79,22	<b>79,68</b>	<b>0,73</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023



Gambar 5.2   Peta Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota





Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, upaya akselerasi dilaksanakan pada daerah dengan IPM Status “Sedang”, antara lain melalui kejar paket guna mengejar mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah.

### 5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE dan Share Perekonomian kabupaten/kota tahun 2021, maka capaian LPE kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.3. Kategori Capaian LPE Kabupaten/ Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE <b>LEBIH RENDAH</b> dan Share Perekonomian <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
II	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
III	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi
IV	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE <b>LEBIH TINGGI</b> dan Share Perekonomian <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

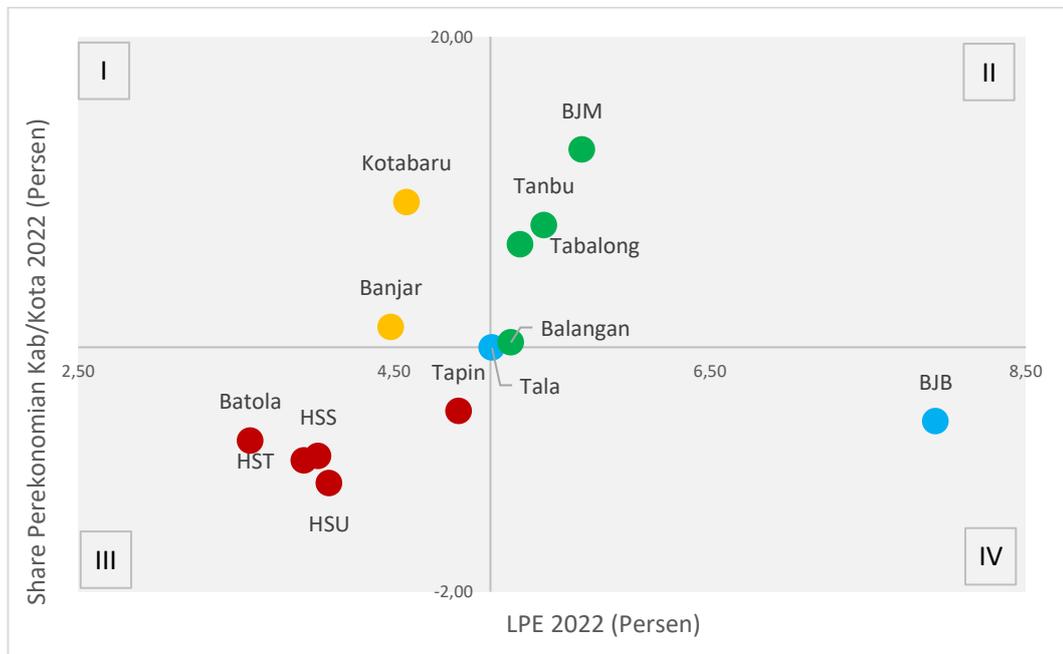
1. **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih rendah dan Share Perekonomian lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Banjar.
2. **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian lebih tinggi dibanding capaian provinsi,





yaitu Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kota Banjarmasin.

3. **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tanah Laut, dan Kota Banjarbaru.
4. **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian capaian LPE lebih tinggi dan Share Perekonomian lebih rendah dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tapin.



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 5.3** Analis Kuadran Capaian LPE dan Share Perekonomian Kabupaten/Kota

Perkembangan perekonomian Kalimantan Selatan secara regional dilihat dengan menganalisis share dan pertumbuhan PDRB dari 13 kabupaten/kota dengan membagi daerah ke dalam empat kuadran berdasarkan nilai share dan pertumbuhan PDRB masing-masing. Perpotongan sumbu vertikal dan sumbu horizontal merupakan nilai share dan pertumbuhan rata-rata. Artinya kabupaten/kota yang berada di sebelah kanan sumbu vertikal (Kuadran II dan IV) merupakan kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas capaian Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan kabupaten/kota yang berada di sebelah





atas sumbu horizontal adalah kabupaten/kota yang memiliki share perekonomian terhadap Provinsi di atas share rata-rata seluruh kabupaten/kota (kuadran I dan II).

Kabupaten/kota yang berada pada kuadran 1 dan 2 merupakan daerah penting bagi Provinsi Kalimantan Selatan, sharenya bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan cukup besar. Oleh karena itu, pertumbuhannya harus tetap dijaga karena wilayah-wilayah ini menjadi tulang punggung perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Daerah-daerah yang harus menjadi prioritas untuk didorong adalah wilayah yang berada pada kuadran 1. Pada kuadran 1 tingkat pertumbuhan dan share belum optimal namun masih memiliki potensi untuk dapat dikembangkan.

### 5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.** Kategori Capaian TPT Kabupaten/ Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT dan Besar Perubahan <b>LEBIH BAIK</b> dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT <b>DI ATAS</b> capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT <b>LEBIH BAIK DARI</b> dari capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT <b>LEBIH BAIK</b> dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT <b>DI BAWAH</b> capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT <b>DI ATAS</b> dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT <b>LEBIH BAIK</b> dari capaian provinsi

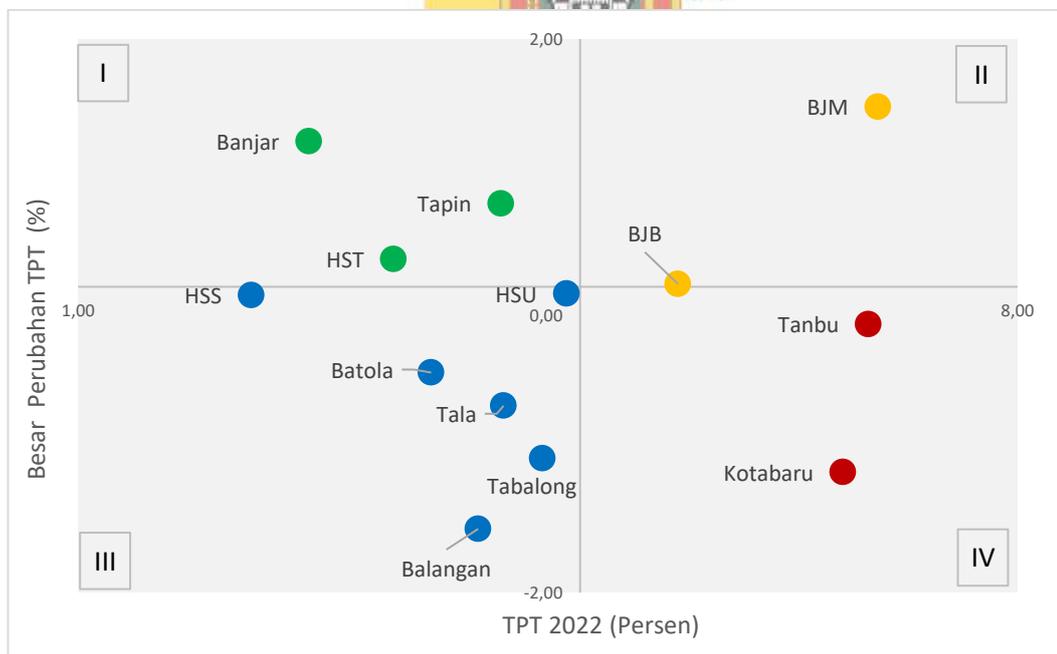
Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

1. **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan





- TPT diatas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tapin
2. **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT diatas capaian provinsi. Kelompok Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.
  3. **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT dibawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan.
  4. **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT di bawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 5.4** Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan TPT Kabupaten/Kota

Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan menunjukkan perbedaan di setiap kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan





Kerja (TPAK) di 13 kabupaten/kota yang berada pada kisaran 62,56 persen hingga 72,54 persen. Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada.

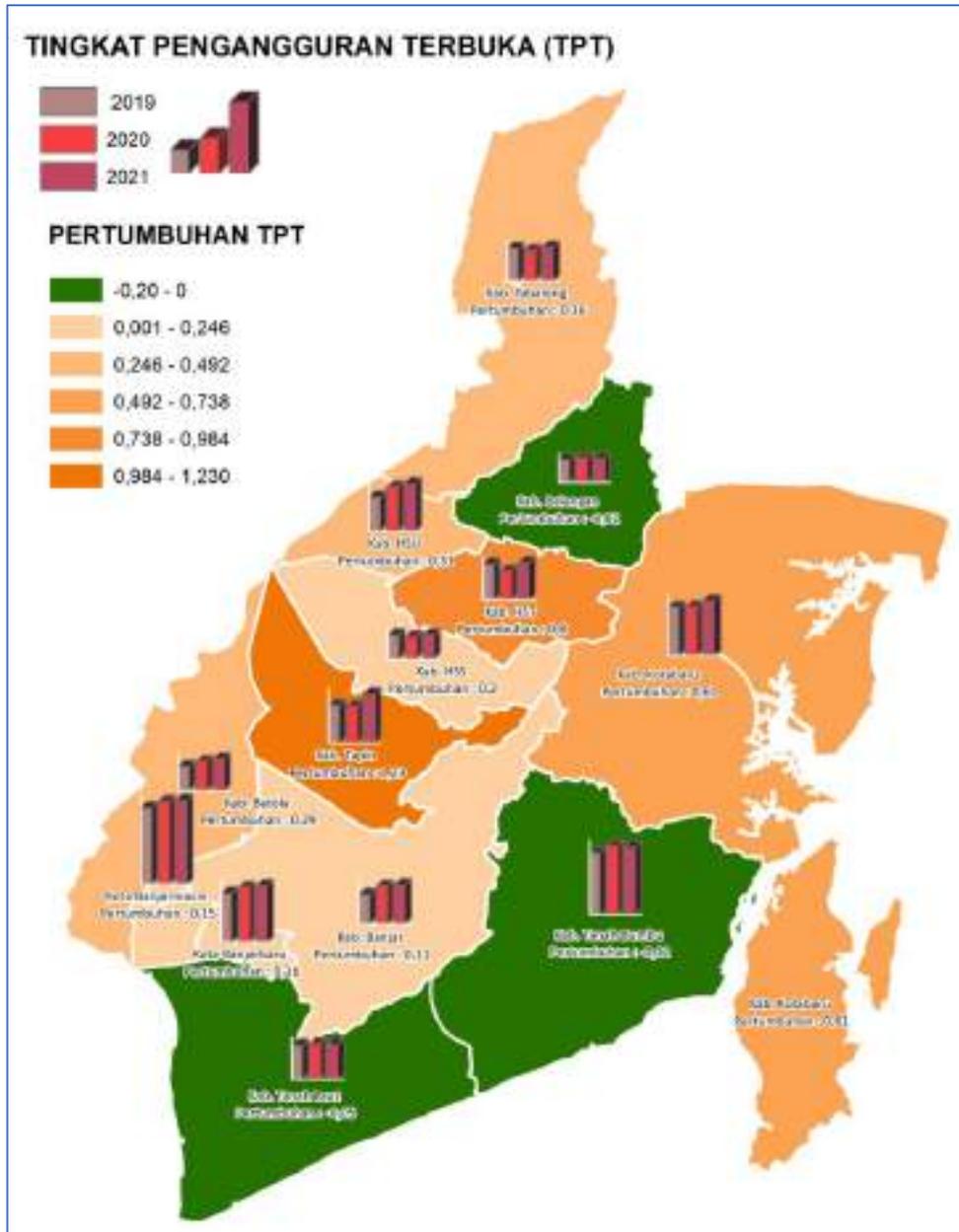
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi.

**Tabel 5.5.** TPT Kabupaten/ Kota Tahun 2020 - 2022

NO.	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)			BESAR PERUBAHAN
		2020	2021	2022	
1	KALIMANTAN SELATAN	4,74	4,95	4,74	0,21
2	KAB. TANAH LAUT	3,57	3,52	4,17	-0,65
3	KAB. KOTABARU	4,96	5,57	6,70	-1,13
4	KAB. BANJAR	3,87	3,98	2,72	1,26
5	KAB. BARITO KUALA	2,93	3,22	3,63	-0,41
6	KAB. TAPIN	3,73	4,96	4,15	0,81
7	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	2,24	2,44	2,29	0,15
8	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	2,96	3,76	3,35	0,41
9	KAB. HULU SUNGAI UTARA	4,49	4,8	4,64	0,16
10	KAB. TABALONG	3,07	3,43	4,46	-1,03
11	KAB. TANAH BUMBU	6,95	6,83	6,89	-0,06
12	KAB. BALANGAN	2,46	2,44	3,98	-1,54
13	KOTA BANJARMASIN	8,32	8,47	6,96	1,51
14	KOTA BANJARBARU	5,54	5,7	5,47	0,23

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023





Gambar 5.5 Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota

#### 5.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.





Tabel 5.6. Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Besar Perubahan <b>LEBIH BAIK</b> dibanding capaian provinsi
II	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin <b>DI ATAS</b> capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin <b>LEBIH BAIK DARI</b> dari capaian provinsi
III	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin <b>LEBIH BAIK</b> dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin <b>DI BAWAH</b> capaian provinsi
IV	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin <b>DI ATAS</b> dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin <b>LEBIH BAIK</b> dari capaian provinsi

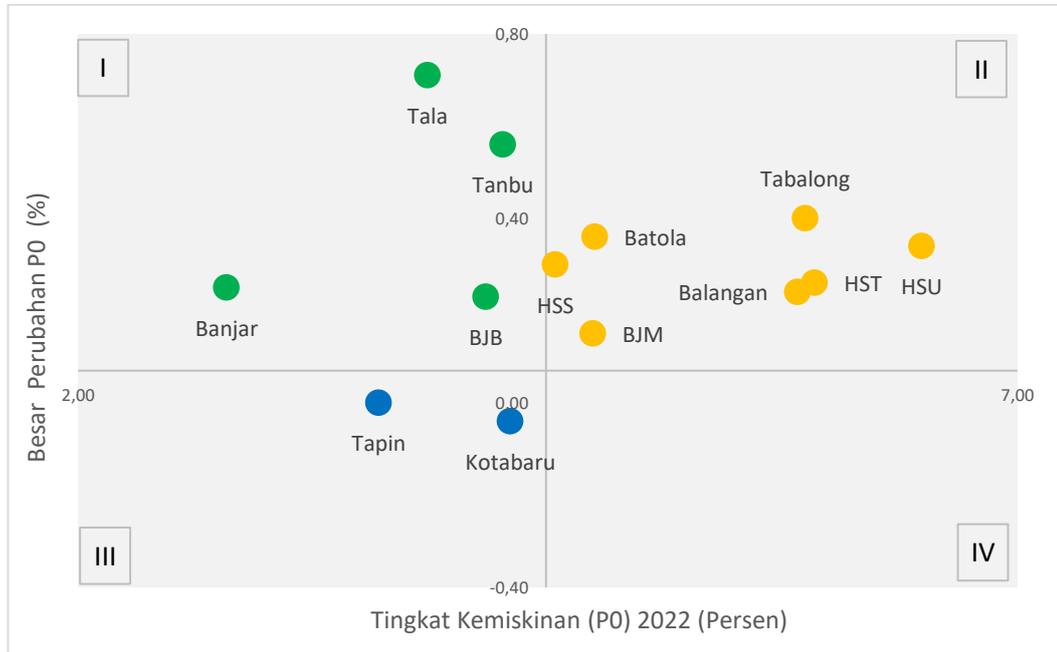
Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

1. **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di atas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru.
2. **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di atas capaian provinsi. Kelompok Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kota Banjarmasin.
3. **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di bawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tapin dan Kabupaten Kotabaru.





4. **Kuadran IV.** Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di bawah capaian provinsi.



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 5.6** Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren konsisten menurun. Namun demikian permasalahan kemiskinan masih dialami oleh sejumlah kabupaten/kota dimana tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dan laju penurunan kemiskinan yang lebih rendah dibanding provinsi.

Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan dan wilayah yang padat penduduknya. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengoptimalkan pemutakhiran kualitas data yang digunakan sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

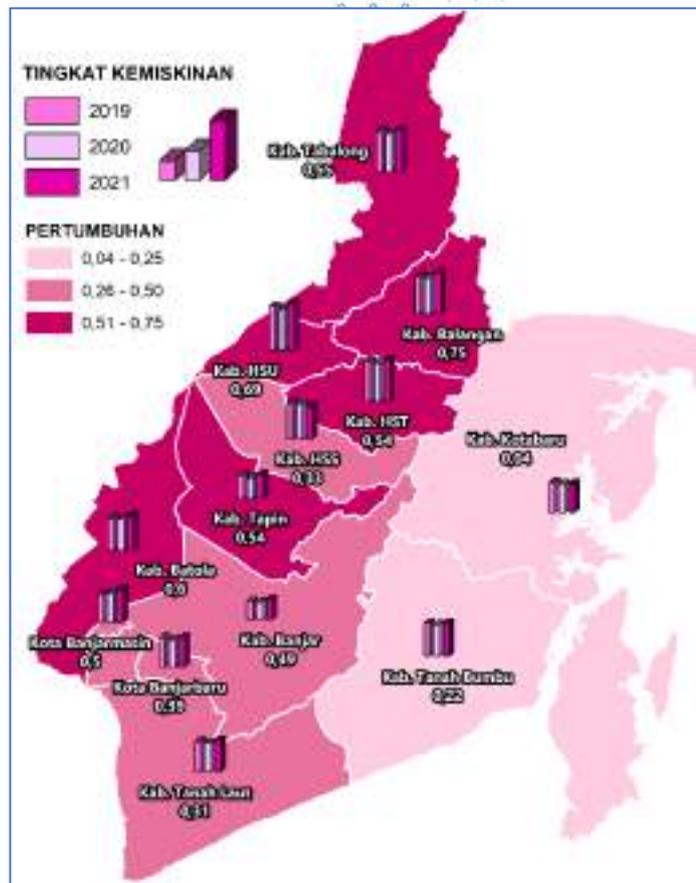




Tabel 5.7. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota Tahun 2020 - 2022

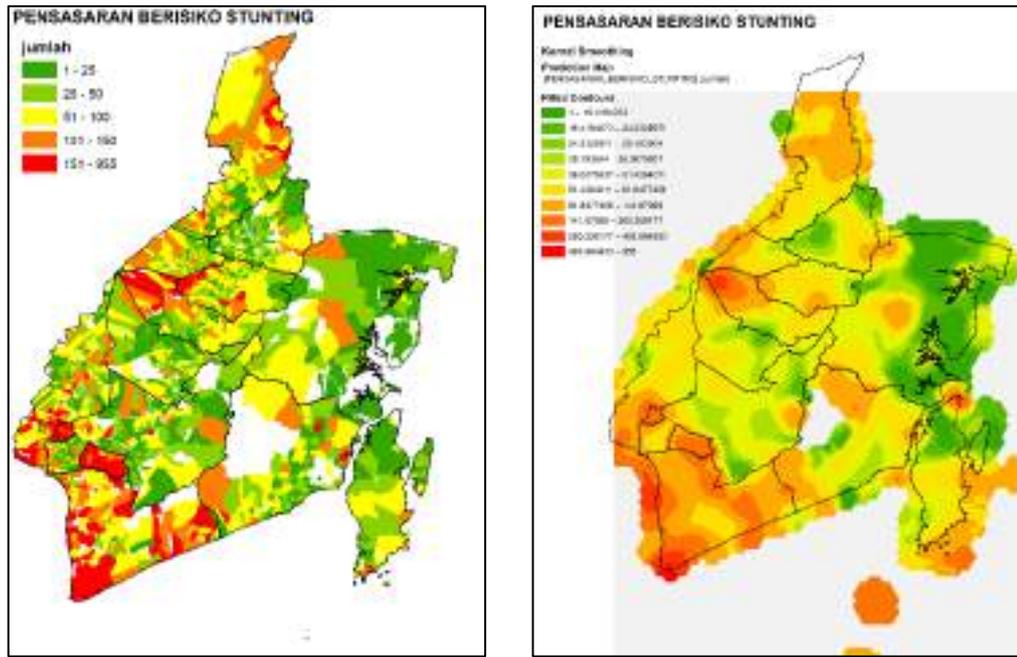
NO.	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	% PENDDUDUK MISKIN			BESAR PERUBAHAN
		2020	2021	2022	
1	KALIMANTAN SELATAN	4,83	4,56	4,49	0,07
2	KAB. BANJAR	4,26	4,57	3,86	0,71
3	KAB. TAPIN	4,22	4,26	4,30	-0,04
4	KAB. KOTABARU	2,55	3,04	2,79	0,25
5	KOTA BANJARBARU	4,51	5,11	4,75	0,36
6	KAB. TANAH LAUT	3,06	3,60	3,60	0,00
7	KAB. TANAH BUMBU	5,17	4,84	4,54	0,30
8	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	5,64	6,18	5,92	0,26
9	KOTA BANGKALAN	6,14	6,83	6,49	0,34
10	KAB. BARITO KUALA	5,72	6,27	5,87	0,40
11	KAB. BALANGAN	4,6	4,82	4,26	0,56
12	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	5,32	6,07	5,83	0,24
13	KAB. TABALONG	4,39	4,89	4,74	0,15
14	KAB. HULU SUNGAI UTARA	4,01	4,4	4,17	0,23

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023



Gambar 5.7. Peta Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota





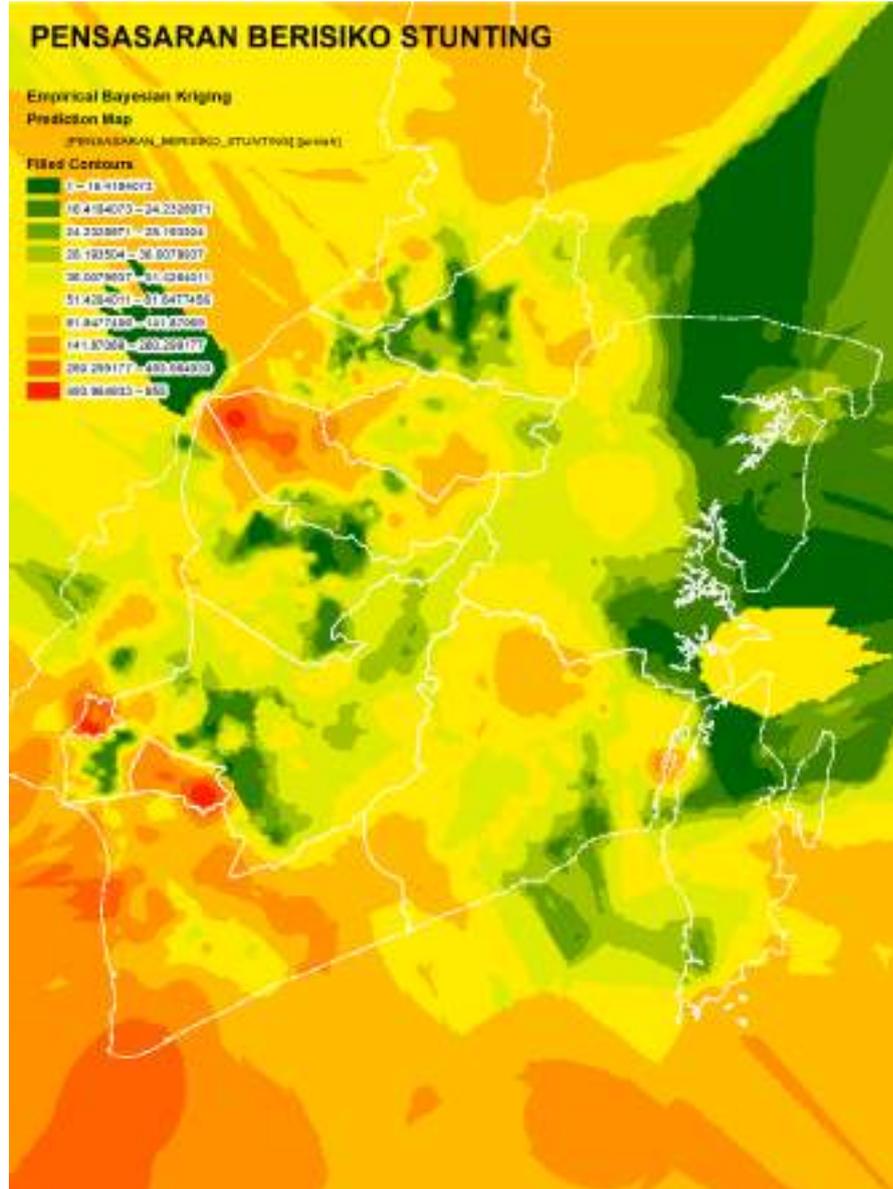
(a). Analisa Jumlah KK (P3KE) Berisko Stunting

(b). Geostatistikan Kernal Smoothing Jumlah KK (P3KE) Berisko Stunting

**Gambar 5.8** Peta Analisa Geostatistik Resiko Stunting dari Analisa Data Pensasaran P3KE-Kemenko PMK

Berdasarkan analisa Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dapat dilihat bahwa sebaran berada pada wilayah pedalaman, pesisir dan wilayah pinggiran kota seperti wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru yang memiliki potensi stunting tinggi dikarenakan jumlah penduduk di wilayah tersebut lebih banyak. Sehingga dapat diprioritaskan penanganan kemiskinan ekstrim pada wilayah berwarna merah pada peta yang mencirikan dampak ganda antara kemiskinan ekstrem dan keluarga berisiko stunting.





Gambar 5.9 Analisa Geostatistik Bayesian Jumlah KK Pensasaran Berisiko Stunting

### 5.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Secara umum, ketimpangan pengeluaran penduduk kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 dalam kategori rendah sampai moderat. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian indeks gini kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian





tahun 2021, maka capaian Persentase indeks gini kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 5.8.** Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian indeks gini dan Besar Perubahan <b>LEBIH BAIK</b> dibanding capaian provinsi
II	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian indeks gini <b>DI ATAS</b> capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini <b>LEBIH BAIK DARI</b> dari capaian provinsi
III	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian indeks gini <b>LEBIH BAIK</b> dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini <b>DI BAWAH</b> capaian provinsi
IV	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian indeks gini <b>DI ATAS</b> dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini <b>LEBIH BAIK</b> dari capaian provinsi

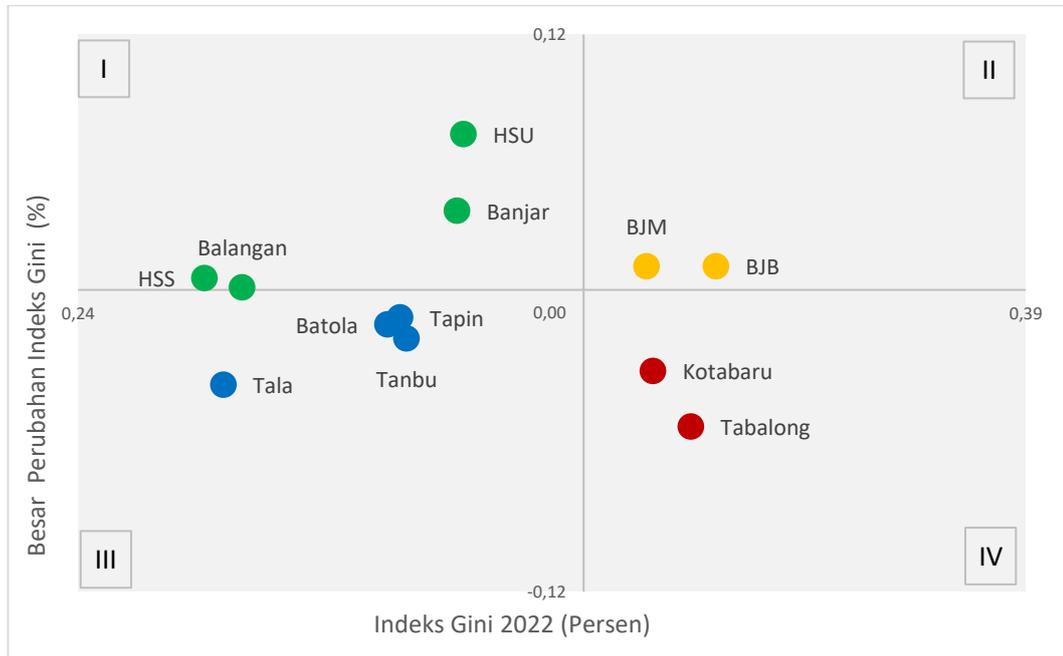
Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

- Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini diatas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Banjar.
- Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini diatas capaian provinsi. Kelompok Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.
- Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini dibawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Tapin.
- Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar





Perubahan indeks gini di bawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tabalong.



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

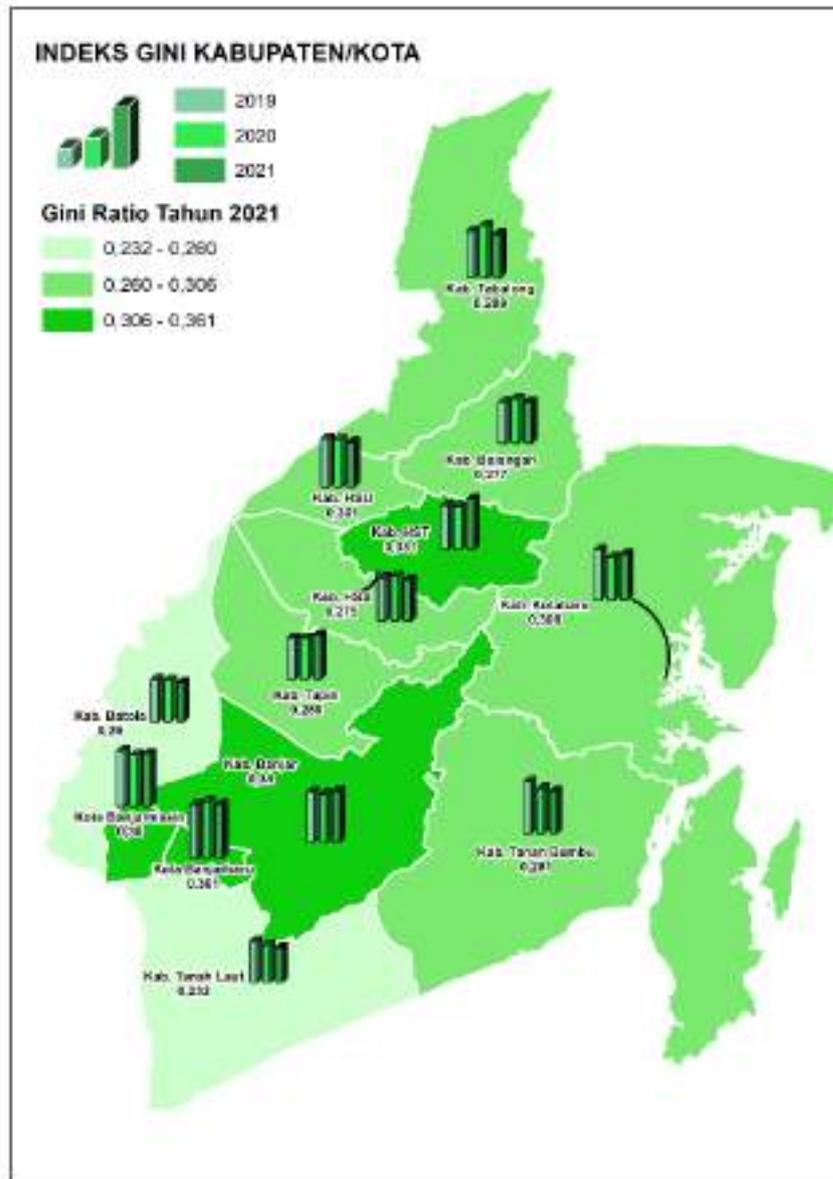
**Gambar 5.10** Analisis Kuadran Capaian Indeks Gini dan Laju Perubahan Indeks Gini Kabupaten/Kota

**Tabel 5.9.** Indeks Gini Kabupaten/ Kota Tahun 2020 - 2022

NO.	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	INDEKS GINI			BESAR PERUBAHAN
		2020	2021	2022	
1	KALIMANTAN SELATAN	0,332	0,330	0,317	0,01
2	KAB. BANJAR	0,250	0,232	0,263	-0,03
3	KAB. TAPIN	0,287	0,306	0,331	-0,03
4	KAB. KOTABARU	0,322	0,344	0,300	0,04
5	KOTA BANJARBARU	0,277	0,284	0,289	-0,01
6	KAB. TANAH LAUT	0,274	0,289	0,291	0,00
7	KAB. TANAH BUMBU	0,300	0,275	0,260	0,02
8	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	0,285	0,331	0,228	0,10
9	KOTA BANJARMASIN	0,319	0,378	0,301	0,08
10	KAB. BARITO KUALA	0,346	0,288	0,337	-0,05
11	KAB. BALANGAN	0,300	0,281	0,292	-0,01
12	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	0,298	0,277	0,266	0,01
13	KAB. TABALONG	0,342	0,350	0,330	0,02
14	KAB. HULU SUNGAI UTARA	0,381	0,361	0,341	0,02

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023





Gambar 5.11 Peta Indeks Gini Kabupaten/Kota

### 5.1.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten/kota tahun 2021 dibandingkan capaian tahun 2020, maka capaian IPM kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.





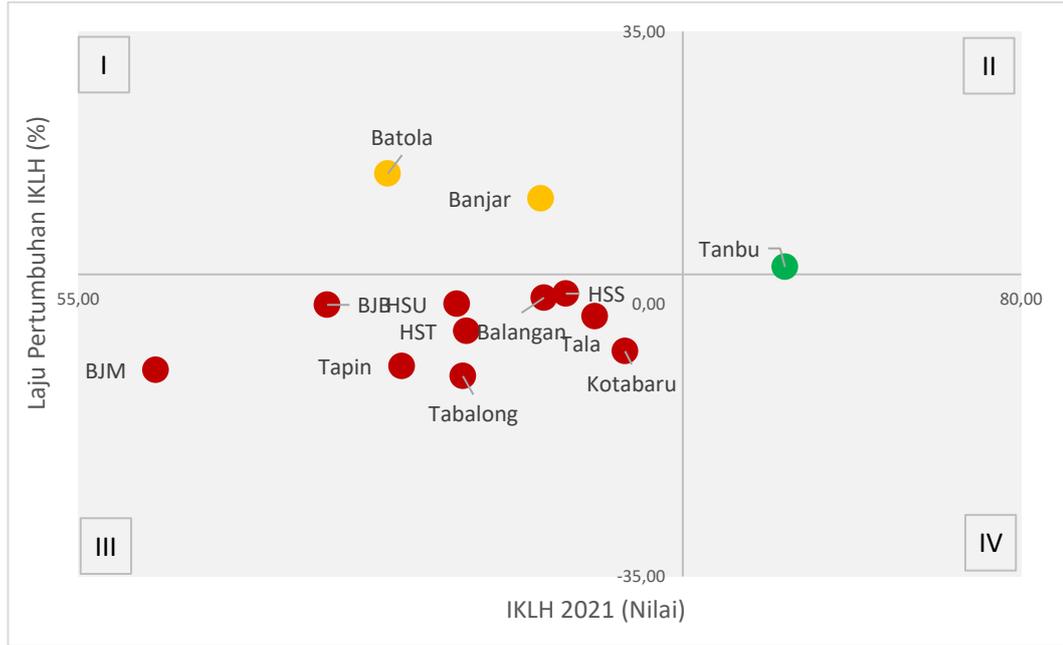
Tabel 5.10. Kategori Capaian IKLH Kabupaten/ Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IKLH <b>LEBIH RENDAH</b> dan Laju Pertumbuhan IKLH <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
II	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IKLH dan Laju Pertumbuhan IKLH <b>LEBIH TINGGI</b> dibanding capaian provinsi
III	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IKLH dan Laju Pertumbuhan IKLH <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi
IV	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IKLH <b>LEBIH TINGGI</b> dan Laju Pertumbuhan IKLH <b>LEBIH RENDAH</b> dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

1. **Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian IKLH lebih rendah dan laju pertumbuhan IKLH lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar.
2. **Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian IKLH dan laju pertumbuhan IKLH lebih tinggi dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu
3. **Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan capaian IKLH dan laju pertumbuhan IKLH lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Kotabaru.
4. **Kuadran IV.** Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian IKLH lebih tinggi dan laju pertumbuhan IKLH lebih rendah dibanding capaian provinsi.





Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan, Selatan 2023

**Gambar 5.12** Analis Kuadran Capaian IKLH dan Laju Pertumbuhan IKLH Kabupaten/ Kota Tahun 2021-2022

**Tabel 5.11.** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Tahun 2019 - 2021

NO.	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	IKLH			PERTUMBUHAN
		2019	2020	2021	
1	KALIMANTAN SELATAN	61,94	68,43	71,03	3,80
2	KAB. BANJAR	58,06	69,82	68,7	-1,60
3	KAB. TAPIN	80,93	73,99	69,5	-6,07
4	KAB. KOTABARU	72,36	59,25	67,27	13,54
5	KOTA BANJARBARU	57,98	54,14	63,21	16,75
6	KAB. TANAH LAUT	63	69,09	63,58	-7,98
7	KAB. TANAH BUMBU	56,23	67,04	67,93	1,33
8	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	61,46	67,65	65,3	-3,47
9	KOTA BANJARMASIN	n/a	n/a	65,04	n/a
10	KAB. BARITO KUALA	71,1	71,86	65,2	-9,27
11	KAB. BALANGAN	71,79	70,39	73,74	4,76
12	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	61,35	66,81	67,35	0,81
13	KAB. TABALONG	62,87	62,34	57,06	-8,47
14	KAB. HULU SUNGAI UTARA	53,39	61,67	61,6	-0,11

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

### 5.1.7 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada daerah yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).





Pengukuran IDSD Ini bertujuan untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran mengacu kepada *global competitiveness index (GCI) 2019* (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing.

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan keamanan; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian; adopsi TIK yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan Industri 4.0; dan stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, serta tingkat biaya hidup.

Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; pasar tenaga kerja yang mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya iptek.

Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Indeks Daya Saing Daerah diarahkan menjadi data dasar yang dapat digunakan dalam menyusun kebijakan peningkatan daya saing daerah. Tabel berikut merupakan kondisi daya saing daerah berdasarkan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

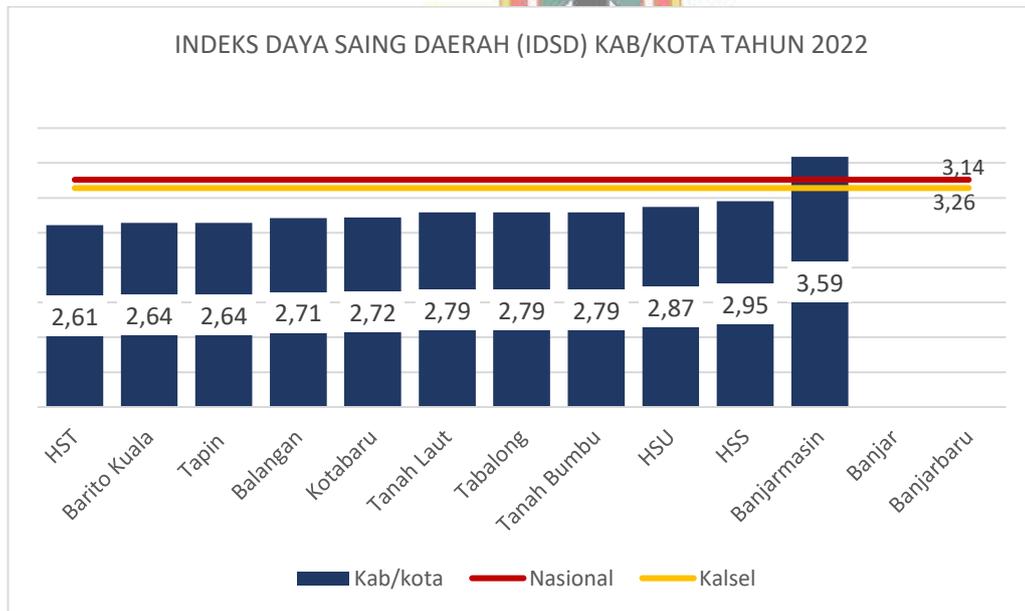




**Tabel 5.12.** Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/ Kota Tahun 2022

KAB/KOTA	Lingkungan Pendukung				Sumber Daya Manusia		Pasar				Ekosistem Inovasi		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
	Institusi	Infrastruktur	Adopsi TIK	Stabilitas Ekonomi Makro	Kesehatan	Keterampilan TK	Pasar Produk	Pasar TK	Sistem Keuangan	Ukuran Pasar	Dinamisme Bisnis	Kapabilitas Inovasi	
Nasional	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,37	2,66	1,31	5,00	2,62	3,26
Kalsel	4,40	2,47	3,09	3,09	3,67	3,66	2,68	3,38	2,44	0,73	5,00	2,19	3,14
Tanah Laut	4,37	1,95	2,83	2,83	3,85	2,98	2,29	2,65	2,65	0,69	5,00	0,97	2,79
Kotabaru	4,10	2,80	2,96	2,96	3,77	2,75	1,37	2,41	2,41	1,17	5,00	0,72	2,72
Banjar		1,70	2,66	2,66	3,62	2,95	3,12			0,79	5,00	1,23	
Barito Kuala	4,49	1,73	3,19	2,51	3,54	2,85	2,78	1,84	1,84	0,39	5,00	0,70	2,64
Tapin	4,20	1,70	3,05	2,67	3,92	2,98	2,27	2,51	2,51	0,43	5,00	0,62	2,64
HSS	4,75	1,82	3,14	2,89	3,54	2,96	5,00	2,04	2,04	0,32	5,00	0,64	2,95
HST	4,14	1,84	2,54	2,36	3,54	3,16	3,32	1,90	1,90	0,33	5,00	0,62	2,61
HSU	4,03	1,54	3,02	2,38	3,38	3,32	4,07	2,25	2,25	0,22	5,00	1,43	2,87
Tabalong	4,52	2,46	2,66	3,18	3,92	3,32	1,78	2,68	2,68	0,98	5,00	0,53	2,79
Tanah Bumbu	4,43	2,47	3,12	3,09	3,85	2,81	1,91	3,11	3,11	1,05	5,00	0,54	2,79
Balangan	4,31	1,82	2,94	3,07	3,69	3,20	1,06	3,22	3,22	0,62	5,00	0,74	2,71
Banjarmasin	4,37	2,25	5,00	2,86	3,92	3,64	4,46	2,38	2,38	1,49	5,00	4,22	3,59
Banjarbaru		2,78	3,76	2,63	4,00	3,85	5,00	2,33	2,33	0,41	5,00	1,65	

Sumber: BRIN. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023



Sumber: BRIN. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

**Gambar 5.13** Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di atas ditunjukkan bahwa Kota Banjarmasin memiliki daya saing daerah tertinggi dari kabupaten lainnya dan lebih baik dari rata-rata Provinsi dan Nasional. Kondisi ini merefleksikan bahwa Pembangunan di perkotaan masih lebih unggul dari daerah



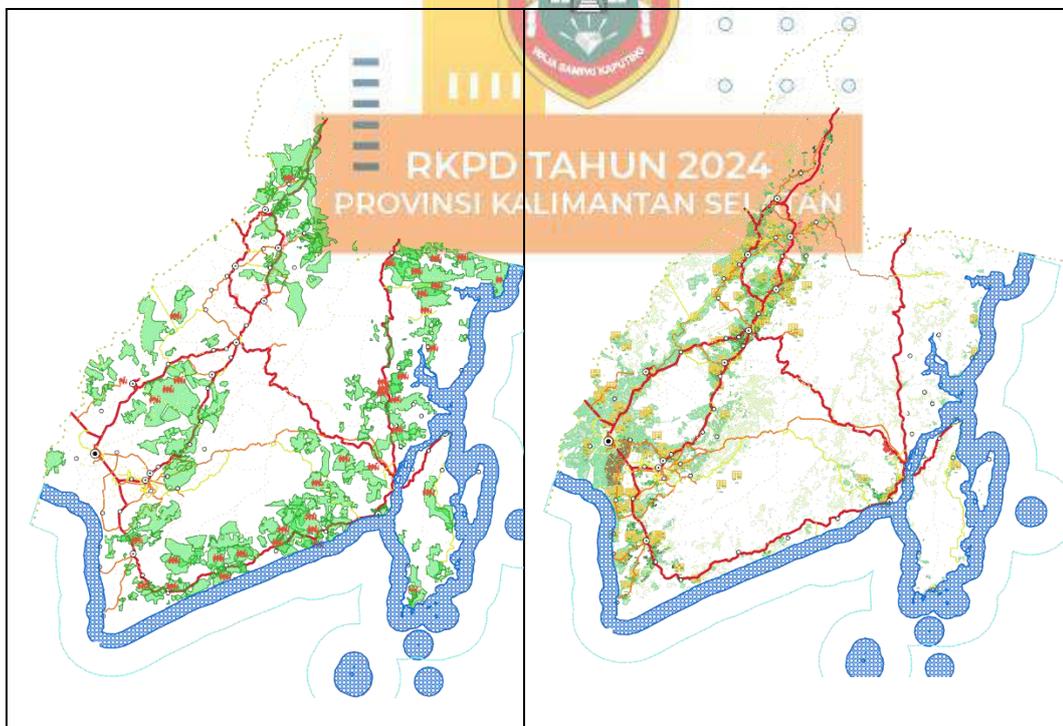


kabupaten, sehingga perlu percepatan pembangunan di kabupaten untuk mewujudkan kesetaraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

## 5.2 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Posisi Kalimantan Selatan yang dilewati oleh jalur ALKI II, serta ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kalimantan Tengah sebagai kawasan *food estate*, sehingga memberikan peluang dan potensi untuk mewujudkan ruang wilayah yang efisien dan berkelanjutan guna mendukung visi Kalimantan Selatan sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN).

Meskipun terbatas, lahan di wilayah Kalimantan Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai areal pertanian, khususnya tanaman pangan dan perkebunan. Wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tabalong merupakan wilayah yang memiliki potensi besar bagi pengembangan pertanian tanaman pangan. Kedepannya Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengembangan sektor pertanian memfokuskan kepada lembaga pengelola, peningkatan kualitas SDM, progres Kawasan, perkuatan teknologi, regulasi dan perijinan serta konektivitas Kawasan.



(a). Peta Perkebunan Sawit & Kayu

(b). Peta Pertanian dan Lumbung Padi

**Gambar 5.14** Peta Potensi Pertanian dan Perkebunan Kalsel

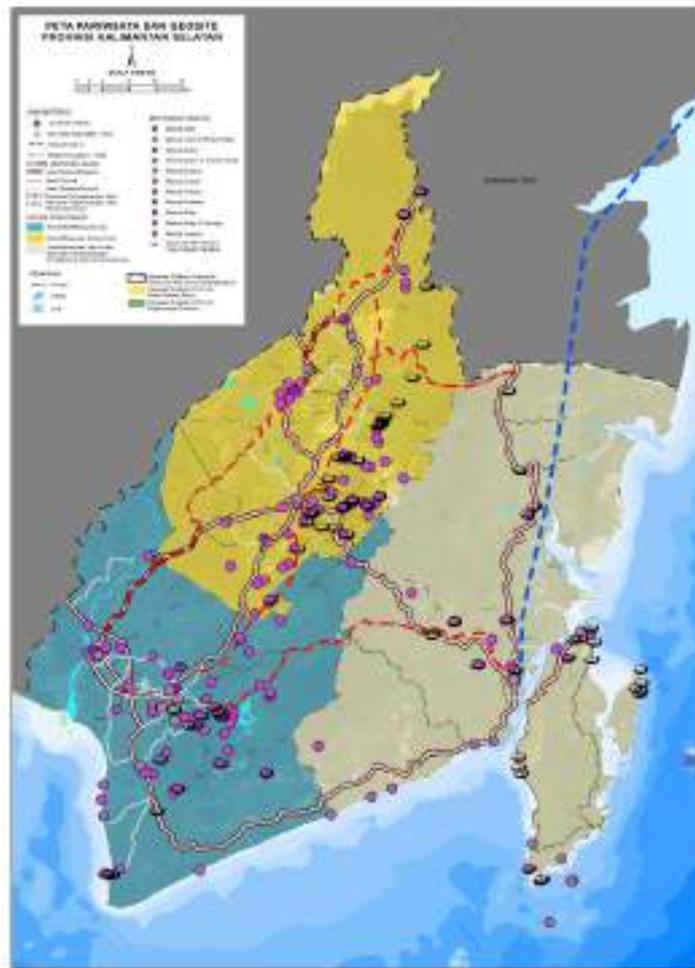




Di sektor industri, Kalimantan Selatan memiliki potensi industri baik yang berbasis sumber daya alam, khususnya industri pengolahan hasil hutan dan hasil pertanian, maupun yang memanfaatkan dan mengandalkan teknologi seperti industri mesin serta industri kimia dasar yang potensial untuk dikembangkan. Pembangunan industri diarahkan terutama untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehubungan dengan itu, pembangunan industri dikembangkan secara bertahap melalui peningkatan keterkaitan industri dengan pertanian dan jasa, sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

Pariwisata juga merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Kalimantan Selatan memiliki potensi wisata yang beragam, baik wisata alam maupun budaya yang dapat dikembangkan secara lebih optimal dengan mempertimbangkan kekayaan alam provinsi yang terdiri atas sungai, hutan, serta latar belakang sejarah dan keanekaragaman seni dan budaya. Pengembangan sektor pariwisata akan mendorong industri ekonomi kreatif dan menarik sektor-sektor lainnya seperti transportasi, akomodasi, dan rumah makan. Pengembangan sektor ini juga dapat mengungkit ekonomi rakyat.





**Gambar 5.15** — Peta Sebaran Destinasi Wisata dan Geosite

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Arah pengembangan infrastruktur Kalimantan Selatan difokuskan kepada optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia, pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota, pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai primer over seperti Bandar Udara, Pelabuhan, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer dan pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri baja dan industri semen.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sangat penting untuk menyelaraskan pembangunan di daerah. Kualitas sumber daya





manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin, sehingga rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Arah pengembangan SDM Kalimantan Selatan difokuskan kepada SDM yang mendukung dalam sektor prioritas dalam pengembangan ekonomi daerah Kalimantan Selatan yaitu industri, pertanian dan pangan, pariwisata, dan digital.

### 5.2.1 Arah Kebijakan Kewilayahan

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, pemerintah daerah mengembangkan dan memperkuat infrastruktur ekonomi pada enam Kawasan pusat pertumbuhan ekonomi provinsi. Keenam kawasan tersebut terbagi menjadi:

Tabel 5.13. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Tema Kawasan	Kab/ Kota (Lokasi)	Arah Kebijakan Kewilayahan	Arah Pengembangan
1	Kawasan pendukung sekitar Ibu Kota Nusantara	Kawasan Anam (Kab. Tabalong, Kab. Balangan, Kab. HSU, Kab. HST, Kab. HSS, Kab. Tapin), dan Sebagian Kab. Kotabaru (Cantung Sengayam)  Kawasan Industri Batulicin dan  Kawasan Industri Jorong		1. Melengkapi fasilitas pendukung 2. Mengembangkan infrastruktur strategis 3. Mengembangkan perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata 4. Investasi pada modal
2	Kawasan pusat perdagangan	Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Tanah Laut (Banjarbakula)	<b>Kota Banjarmasin</b> sbg kawasan pusat perdagangan dan jasa;  <b>Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar</b> sebagai kawasan unggulan pangan.	



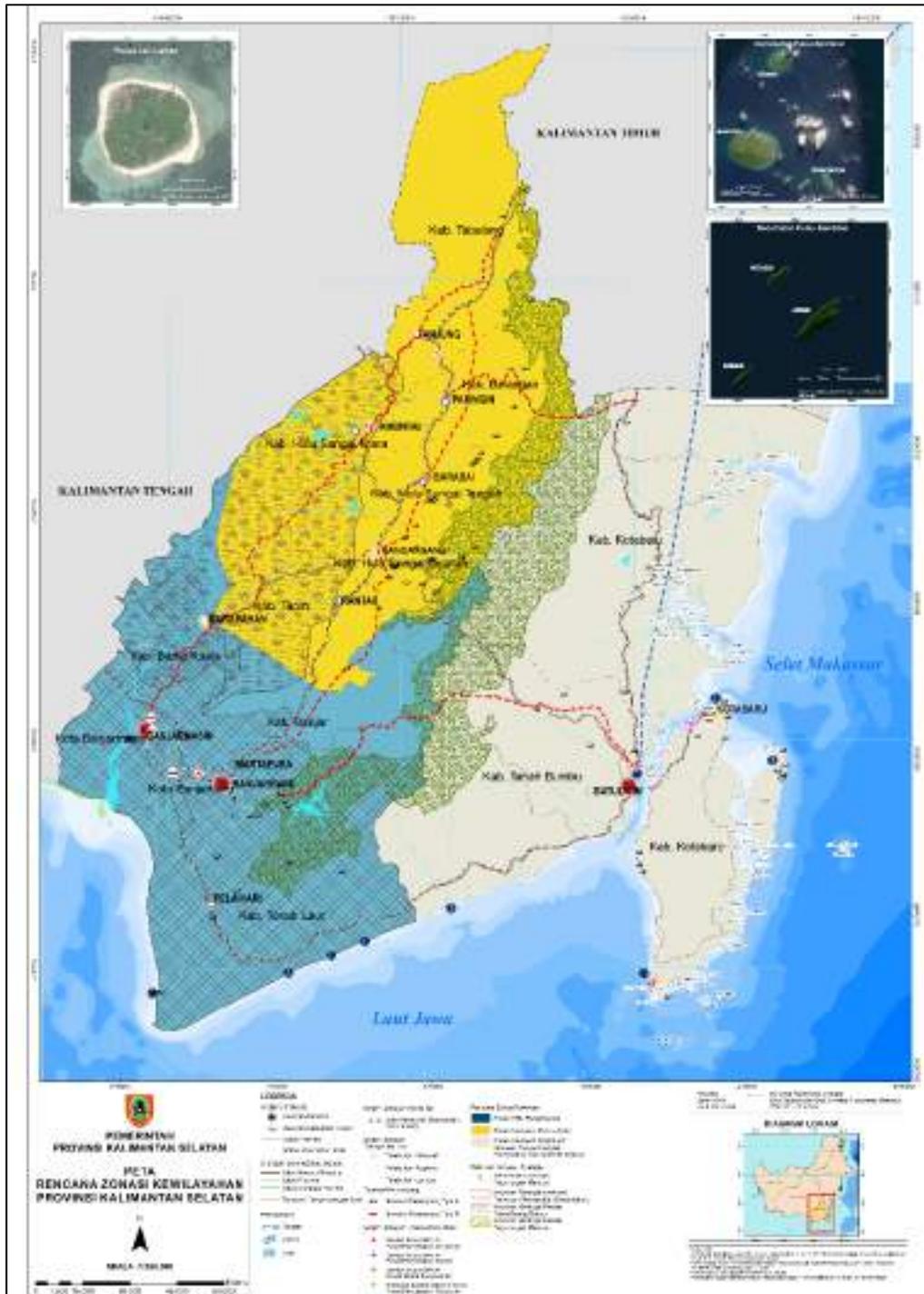


No	Tema Kawasan	Kab/ Kota (Lokasi)	Arah Kebijakan Kewilayah	Arah Pengembangan
3	Kawasan penyangga pangan (Kawasan Rawa Batang Banyu)	Kabupaten Barito Kuala, sebagian Kab. Banjar, sebagian Kab. Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagian Kabupaten Tabalong	Peningkatan produksi pangan daerah dimana daerah	
4	Kawasan strategis lingkungan dan pariwisata	Geopark Meratus dan Loksado		
5	Kawasan ekonomi khusus (KEK) Mekar Putih	Kabupaten Kotabaru	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, terutama dalam menunjang percepatan pembangunan ekonomi Ibukota Nusantara	
6	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Wilayah pesisir Kalsel	mendorong Kalimantan Selatan menjadi sentra kelautan dan perikanan terpadu.	

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

RKPD TAHUN 2024  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





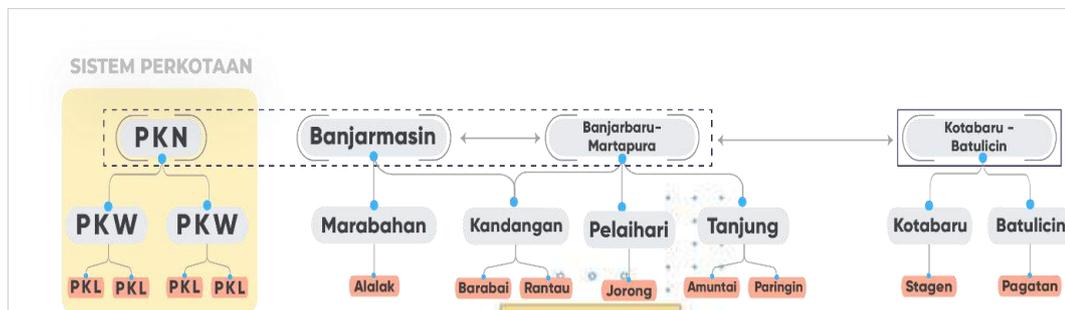
Gambar 5.16 Peta Zona Kewilayahan Kalimantan Selatan

Dengan memperhatikan distribusi penduduk pada masing-masing wilayah kabupaten/kota, peran kawasan perkotaan yang terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) dibagi menjadi :





1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah provinsi merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah provinsi merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

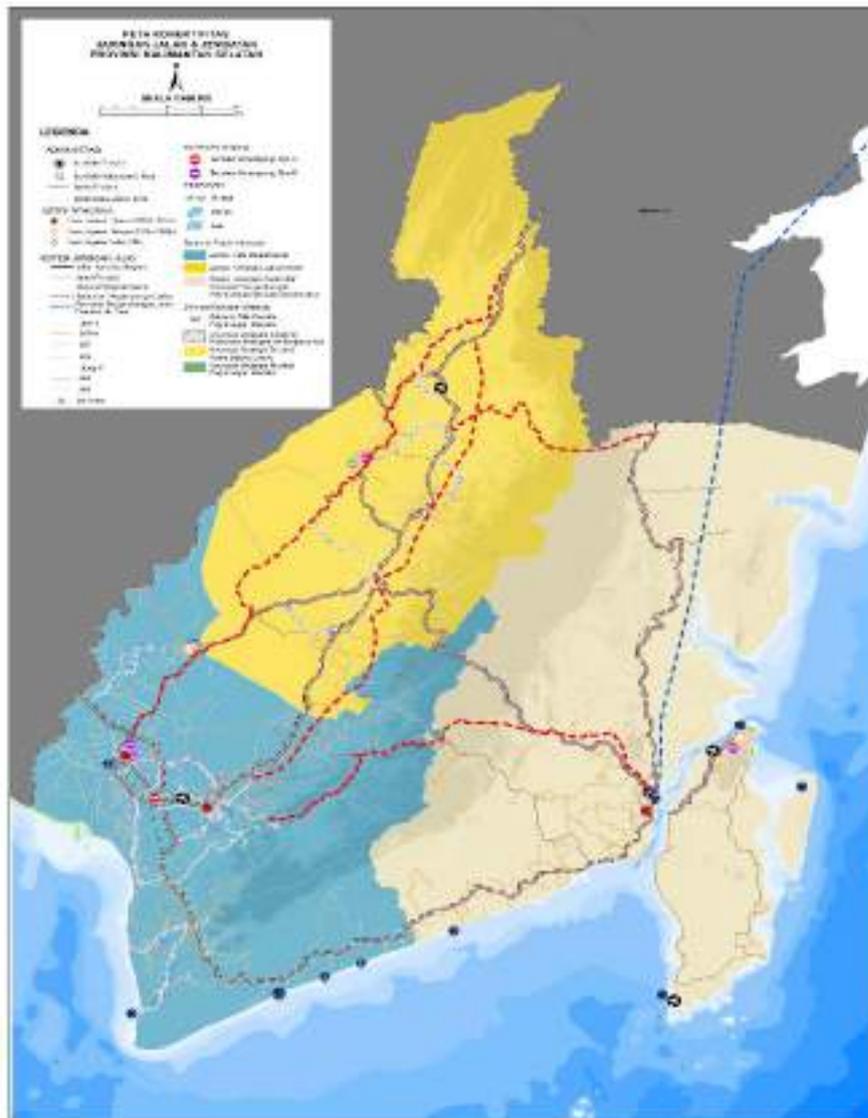


**Gambar 5.17** Diagram Pohon Sistem Perkotaan di Kalimantan Selatan

Kawasan Metropolitan Banjarmasin (Banjarbakula) berperan sebagai pusat di barat daya Kalimantan Selatan, yang fungsinya lebih menjadi gerbang dari aktifitas nasional. Lalu, akan ada jaringan jalan yang ditingkatkan dan juga dibangun sebagai koneksi antar pusat baru antara Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Masing-masing jalur ini dibentuk agar ada konektifitas untuk distribusi barang logistik bagi IKN dan Food Estate. Dengan koneksi antara Banjarbakula, Kandangan dan Batulicin, maka jaringan jalannya akan berbentuk seperti kupu-kupu yang akan menyatukan semua wilayah di Kalimantan Selatan.

Kandangan yang berdekatan dengan Tanjung, Amuntai, Rantau dan Marabahan fungsinya akan ditingkatkan lagi menjadi titik pusat bergerak jaringan jalan yang nantinya akan terkoneksi menuju Food Estate dan IKN. Wilayah ini nantinya akan menjadi pusat baru yang lebih berkonsep pada alam karena posisinya yang berada pada jalur sungai dan rawa sehingga tidak memungkinkan untuk direncanakan sebagai kawasan yang padat bangunan dan penduduk dan berperan sebagai pusat di utara Kalimantan Selatan bergabung dengan Tanjung.



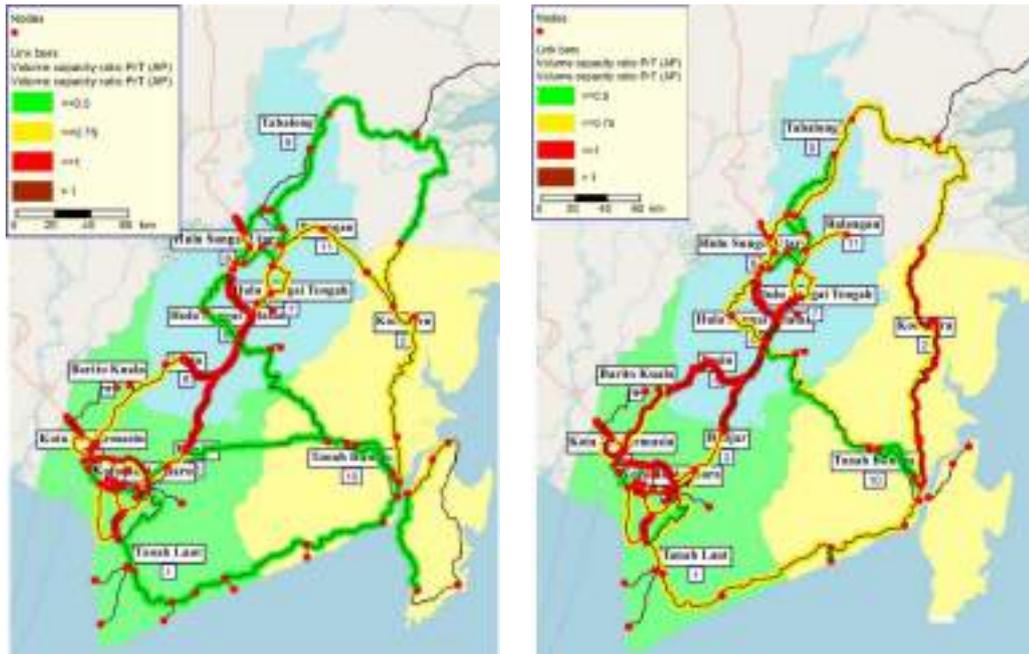


**Gambar 5.18** Peta Konektifitas Kalimantan Selatan

Pelabuhan di Kotabaru akan difungsikan untuk menangkap arus barang masuk maupun keluar Kalsel berupa barangbarang dari pasar global sedangkan yang di Banjarmasin hanya akan difokuskan sebagai tempat menangkap arus barang nasional. Lalu dengan adanya KEK Mekar Putih, maka wilayah ini berpotensi untuk menjadi kawasan baru yang difungsikan menjadi maritime center dan gerbang masuk menuju Pulau Kalimantan maupun yang ingin ke IKN. Mekar Putih, Kotabaru dan Batulicin akan dikonsepskan menjadi Kota Sedang karena dari sistem perkotaan dan jumlah penduduknya sudah memenuhi kriteria. Kedua wilayah ini jika di gabungkan akan lebih fokus pada fungsinya sebagai pusat aktifitas ekonomi dan logistik karena posisi geografisnya yang berada di dekat ALKI II yang berbasis kemaritiman. Selain itu kawasan ini juga bisa menangkap







(a). V/C Ratio Jalan Tahun 2024

(b) V/C Ratio Jalan Tahun 2029

**Gambar 5.20** Peta Proyeksi Jalan Nasional dan Provinsi Tahun 2024

Peningkatan jumlah kendaraan yang tentu berdampak dapat mengurangi waktu tempuh dikarenakan perbandingan volume dengan kapasitas meningkat terutama jaringan jalan di Kawasan Strategis Metropolitan Banjarbakula dan lintas penghubung Banjarmasin-Martapura-Rantau-Kandangan-Barabai-Amuntai. Berdasarkan hasil kajian pengembangan jaringan jalan provinsi Kalimantan Selatan, di estimasikan perbandingan volume dengan kapasitas jaringan jalan nasional A.Yani akan meningkat, sehingga arus lalu lintas Jaringan Jalan Lintas Barat menjadi meningkat, dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara akan memicu peningkatan perbandingan volume dengan kapasitas di zona Kawasan Industri dan Pesisir.

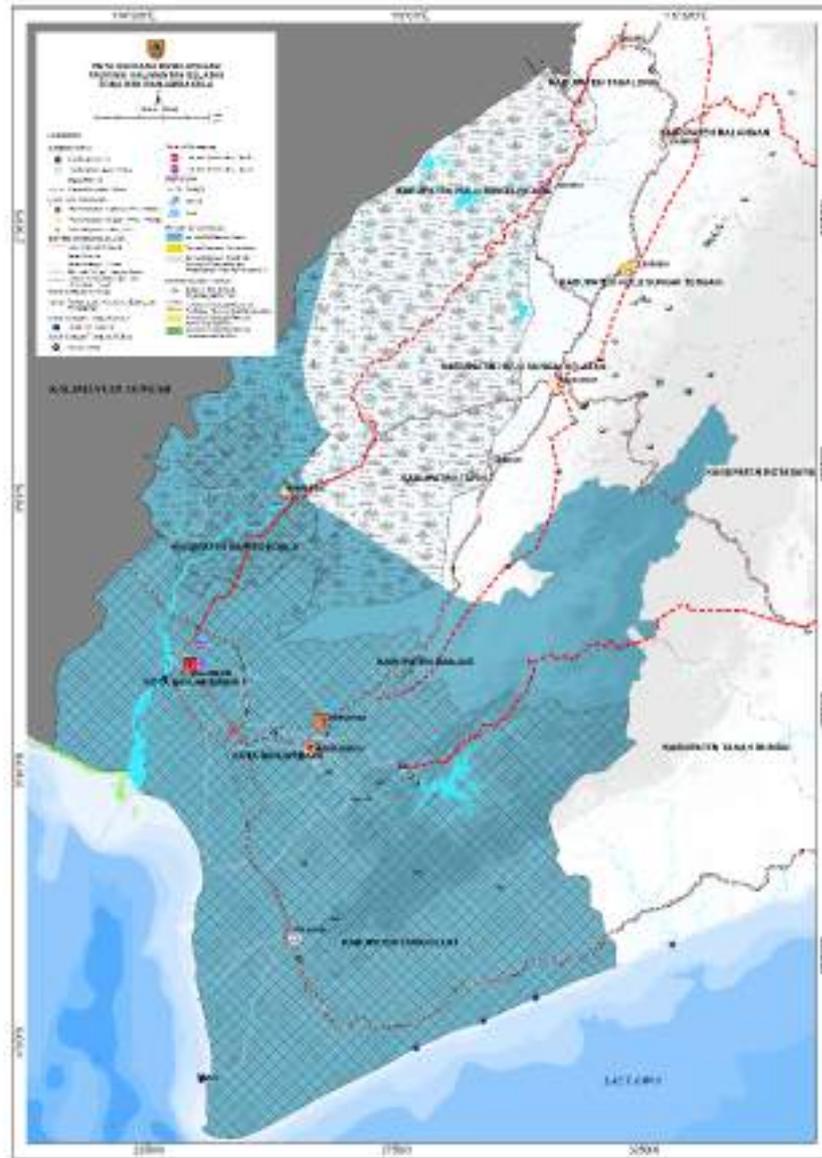
Hasil analisa proyeksi pengembangan ruas jalan nasional dan provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan (2024 : Do-Something). Pengembangan jaringan jalan baru dan pelebaran jalan serta perubahan status jalan di tahun 2024 akan berdampak menurunkan perbandingan volume dengan kapasitas VCR = 17,92% (tidak melakukan apapun) menjadi VCR = 5,66% (melakukan sesuai), mengalami penurunan sangat signifikan (-68,42%). Pengembangan jaringan jalan baru dan pelebaran jalan serta perubahan status yang di kerjakan sampai tahun 2029 akan berdampak menurunkan VCR = 22,64% (do-nothing) menjadi VCR = 3,77% (do-something), mengalami penurunan sangat signifikan (-83,34%).





### 5.2.2 Arah Kebijakan Wilayah Banjarbakula

Zona Banjarbakula yang merupakan pusat perdagangan dan jasa, dimana wilayah inti adalah Banjarbaru dan Banjarmasin, sedangkan Kawasan penyangga terdiri dari Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 5.21 Peta Zona 1- Banjarbakula

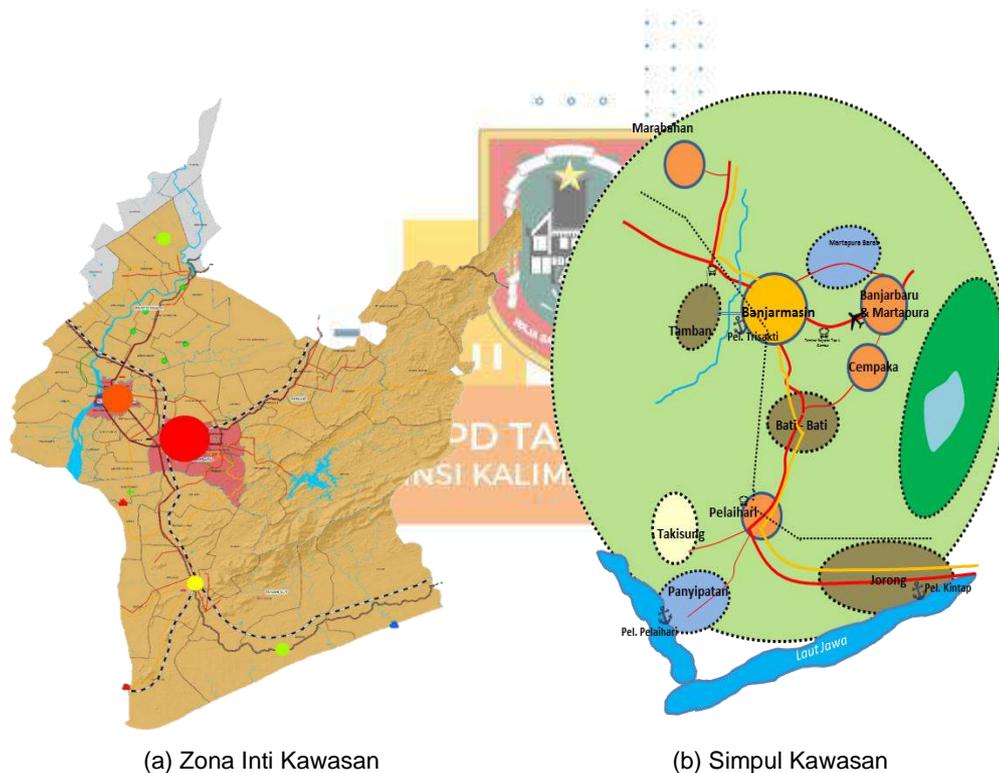
Kota Banjarmasin yang dijadikan sebagai pusat perbankan, perdagangan dan jasa, pusat pendidikan tinggi, pusat kesehatan, wisata budaya (pasar terapung) dan Kawasan Industri Mantuil yang simpul konektivitasnya pelabuhan Trisakti. Kota Banjarbaru yang merupakan ibu kota provinsi merupakan wilayah pusat pemerintahan, pusat perdagangandan jasa, perhotelan, persampahan,





Ekowisata & Wisata Geopark, Aero City, Sport City, dan sebagai pintu gerbang Kalimantan Selatan melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Kawasan penyangga banjarkakula Kabupaten Barito Kuala diperuntukan sebagai pusat kegiatan pertanian dan perkebunan, kawasan pendukung ketahanan pangan kabupaten ini merupakan kawasan produksi beras terbesar di Kalimantan Selatan, dan juga pusat pendidikan tinggi untuk wilayah (hinterland) wilayah Barito Kuala di sekitar kawasan inti. Kabupaten Banjar dengan potensi kawasan produksi beras terbesar kedua di Kalimantan Selatan yang pusat kegiatan pertanian dan perikanan dan juga Ekowisata & Wisata Geopark. Kabupaten Tanah Laut sebagai pusat pertanian, perikanan, peternakan, agribisnis, dan kawasan industri jorong yang didukung simpul konektifitas pelabuhan Swarangan.



**Gambar 5.22** Peta Pengebangan Kewilayahan Zona Banjarbakula

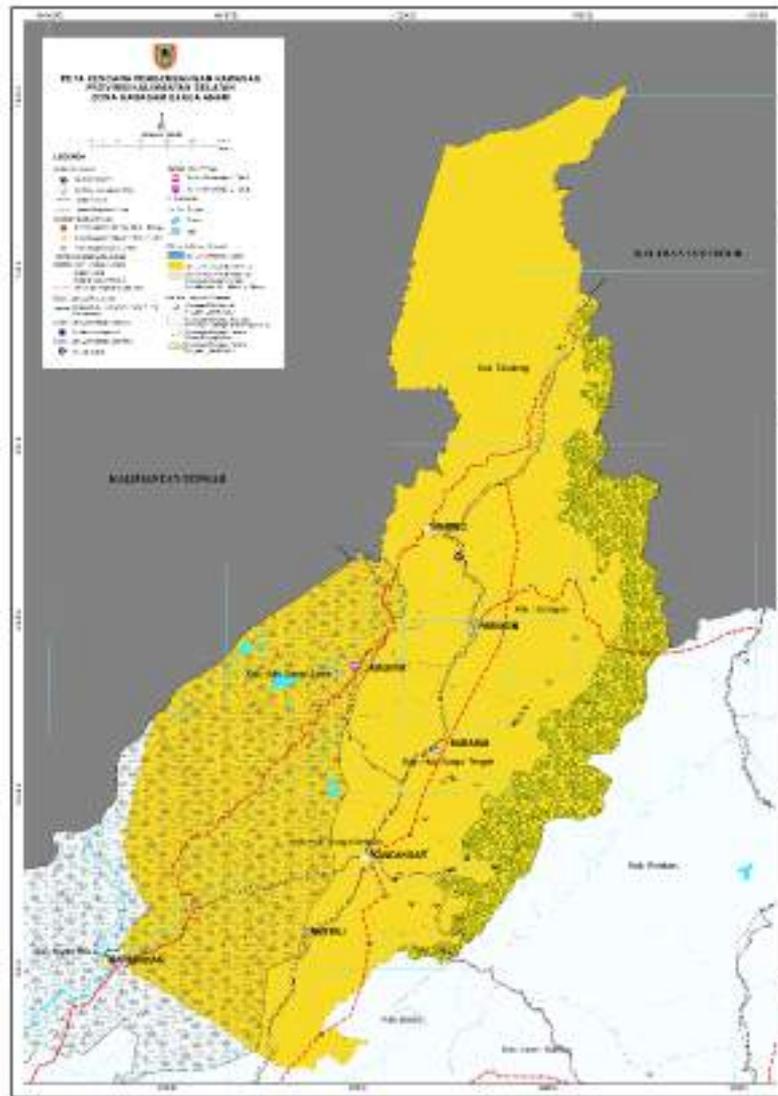
### 5.2.3 Arah Kebijakan Banua Anam

Wilayah Banua Anam merupakan wilayah ketahanan pangan dan kerajinan dengan potensi perkebunan terutama sayuran dan buah - buahan yang dapat menopang wilayah banjarkakula dan ibukota nusantara, potensi perikanan air tawar yang besar yang perlu dikembangkan kedalam ikan kemasan dan albumin





ikan gabus agar mampu bersaing masuk ke pasar Ibu Kota Nusantara dan masuk ke pasar Internasional. Industri Perkebunan Karet yang dihasilkan wilayah ini diharapkan mampu menyediakan kebutuhan di zona industri Batulicin dan Kotabaru, intuk itu perlu adanya jalur konektifitas yang menghubungkan wilayah gerbang ibukota seperti Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balanga memiliki jalur distribusi ke wilayah Industri dan Pesisir.



**Gambar 5.23** Peta Zona 2 - Wilayah Banua Anam





#### 5.2.4 Arah Kebijakan Wilayah Pesisir dan Industri

Wilayah industry dan pesisir merupakan Kawasan hilirisasi hasil tambang dan perkebunan, pusat pengembangan perikanan air laut, geosite dan wisata pantai dan laut. Wilayah ini dengan potensi pelabuhan internasional dan laut dalam setar berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) potnesi ini , diharapkan menjadikan wilayah ini penyedia bahan baku industry besar dan menengah,



**Gambar 5.24** Peta Zona 3 - Wilayah Pesisir dan Industri

Dengan potensi mangrove dan terumbu karang serta ikan laut yang kaya diharapkan menjadi wilayah perikanan terpadu yang terkoneksi dengan wisata pesisir dan pulau-pulau kecil. Agar dapat menjadikan potensi alam berkelanjutan dan ramah lingkungan. Peningkatan dan pelestarian mangrove merupakan kegiatan strategis dalam pencegahan erosi dan kerusakan pantai agar dapat menjaga ekosistem air dan perikanan di pesisir.





### 5.3 Arah Kebijakan Kabupaten/Kota

#### 5.3.1 Kota Banjarmasin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kota Banjarmasin tahun 2023, antara lain:

- A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia
  1. Program-program penanggulangan kemiskinan
  2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
- B. Aspek Pembangunan Ekonomi
  1. Sebagai Kota yang berfokus pada kegiatan penduduknya (Program kegiatan diarahkan ke penataan permukiman, sarana dan prasarana transportasi, perdagangan dan jasa dan pusat ekonomi).
  2. Pengembangan industri pengolahan.
  3. Pengembangan dan pembinaan destinasi wisata;
  4. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi UKM dan pembinaan wirausaha baru;
  5. Dukungan terhadap pembangunan pusat distribusi regional dan pasar rakyat.
- C. Aspek Pengembangan Infrastruktur
  1. Pengembangan pasar induk dan pusat-pusat distribusi regional;
  2. Pengembangan kawasan industri dan pelabuhan utama;
- D. Aspek Pengembangan Investasi

Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada

#### 5.3.2 Kota Banjarbaru

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kota Banjarbaru tahun 2024, antara lain:

- A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia
  1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pembangunan dan rehabilitasi SMK pendukung pariwisata dan penerbangan
  2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.





B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pengembangan wisata budaya Banjar, pendulangan intan, wisata buatan dan pelaksanaan festival budaya.
2. Pada bidang koperasi, UMKM dengan pembinaan dan pelatihan menjadi wirausaha baru.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Sebagai bagian dari Metropolitan Banjarbakula dan ibukota provinsi, fungsi dari kota berfokus pada kegiatan permukiman, sarana dan prasarana, transportasi, perdagangan dan jasa dan perkantoran pemerintah.
2. Untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan melanjutkan program/kegiatan SPAM regional dan TPA regional Banjarbakula

D. Aspek Pengembangan Investasi

Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.

### 5.3.3 Kabupaten Banjar

Arah kebijakan provinsi untuk perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Banjar tahun 2024, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pariwisata; dan program kejar paket B-C.
2. Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan program/kegiatan pembangunan masyarakat desa; dan pemberdayaan kelompok tani.
3. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang koperasi UMKM dan perindustrian dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil hasil hutan.
2. Pada bidang pertanian dengan pengembangan kawasan lahan basah komoditas unggulan padi dan hortikultura, pengembangan kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tadah hujan, sentra produksi pangan dan sentra agribisnis hortikultura.





3. Pada bidang kehutanan dengan program/kegiatan penyediaan bibit pohon, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya hutan; dan pelaksanaan perhutanan sosial.
  4. Pengembangan sentra industri dan perdagangan batu permata
- C. Aspek Pengembangan Infrastruktur
1. Pada bidang pekerjaan umum dan pertanahan dengan program/kegiatan penyelesaian TORA; dan sertifikasi lahan hutan.
  2. Pengembangan daerah irigasi untuk mendukung ketahanan pangan Provinsi dan Nasional dan peningkatan produksi beras lokal berkualitas
- D. Aspek Pengembangan Investasi
- Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.

#### 5.3.4 Kabupaten Tanah Laut

Arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kab. Tanah Laut Tahun 2024, sebagai berikut :

- A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia
1. Bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian.
  2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
- B. Aspek Pembangunan Ekonomi
1. Industri pengolahan, dengan dukungan pada KI Jorong yang telah ditetapkan sebagai proyek prioritas pemerintah;
  2. Pengadaan listrik dan gas, dengan dukungan pembangunan PLTU asam-asam unit 5, 6 dan 7; dan dukungan pembangunan PLT Bayu.
  3. Bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
  4. Bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan jumlah ternak bibit; pemantapan pelaksanaan IB; dan pengendalian pemotongan ternak produktif.
  5. Bidang kelautan dan perikanan dengan program/kegiatan peningkatan perikanan tangkap; dan pembangunan unit pengolahan ikan.





- C. Aspek Pengembangan Infrastruktur
  - 1. Pengembangan Infrastruktur Energi Terbarukan/Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
  - 2. Pengembangan Destinasi wisata pesisir dan Mengrove, serta infrastruktur pengaman pantai;
- D. Aspek Pengembangan Investasi
  - Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada

### 5.3.5 Kabupaten Tanah Bumbu

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kab. Tanah Bumbu tahun 2024, antara lain:

- A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia
  - 1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi (SMK dan politeknik).
  - 2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
- B. Aspek Pembangunan Ekonomi
  - 1. Pada bidang perindustrian dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri batulicin.
  - 2. Pengembangan kawasan budidaya pertanian dan perkebunan.
  - 3. Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan kelautan.
- C. Aspek Pengembangan Infrastruktur
  - 1. Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan program/kegiatan pembangunan jalan bebas hambatan Batulicin – Banjarbaru;
  - 2. Pembangunan jembatan penghubung pulau Kalimantan dengan pulau laut; dan pembangunan bendungan kusan;
  - 3. Untuk bidang perhubungan dengan dukungan pengembangan bandara bersujud; dan dukungan pengembangan pelabuhan
  - 4. Pengembangan Destinasi wisata pesisir dan Mengrove, serta infrastruktur pengaman pantai.
- D. Aspek Pengembangan Investasi
  - Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.





### 5.3.6 Kabupaten Kotabaru

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kab. Kotabaru Tahun 2024 sebagai berikut:

- A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia
  - Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
- B. Aspek Pembangunan Ekonomi
  1. Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan mengembangkan Sentra Kelautan Terpadu sebagai upaya peningkatan pendapatan nelayan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian secara luas;
  2. Bidang industri pengolahan, dengan mendukung pengembangan KEK Mekar Putih;
- C. Aspek Pengembangan Infrastruktur
  1. Pengembangan Industri di dalam Kawasan Ekonomi khusus dan Pelabuhan Utama untuk mendukung distribusi hasil industry;
  2. Peningkatan Jalan akses menuju KEK Mekarputih, Destiniasi Wisata Teluk Tamiang dan Pusat Perikanan Terpadu serta infrastruktur pengaman pantai.
- D. Aspek Pengembangan Investasi
  - Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.

### 5.3.7 Kabupaten Tapin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Tapin tahun 2024, antara lain:

- A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia
  1. Pendidikan vokasi/SMK pertanian
  2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
- B. Aspek Pembangunan Ekonomi
  1. Pada bidang kelautan dan perikanan dengan penyediaan paket budidaya, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya; dan pengembangan budidaya ikan lokal.
  2. Pengembangan kawasan industri kecil pengolahan pertanian untuk bidang koperasi UKM dan perindustrian.





3. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
  4. Pengembangan pada kawasan budidaya perkebunan kelapa sawit, kopi, lada dan karet serta mengembangkan kawasan budidaya peternakan unggas, kambing dan sapi.
- C. Aspek Pengembangan Infrastruktur
- Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan dukungan Pengembangan daerah irigasi bendungan tapin; dan pembangunan jalan lingkaran barat Kalsel.
- D. Aspek Pengembangan Investasi
- Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.

### 5.3.8 Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024, antara lain:

- A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia
- Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
- B. Aspek Pembangunan Ekonomi
1. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pelaksanaan festival bamboo rafting; pengembangan akomodasi pendukung pariwisata; penyiapan daya Tarik wisata; dan pengusulan taman nasional loksado.
  2. Pada bidang koperasi UKM dan perdagangan dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pendukung pariwisata.
  3. Pada bidang kehutanan dengan pengembangan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, sentra penghasil hutan kayu, sentra penghasil hutan non kayu dan kawasan hutan penunjang industri pariwisata.
- C. Aspek Pengembangan Infrastruktur
- Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan jalan lingkaran barat; dan peningkatan jalan kandangan-lumpang-batulicin.
- D. Aspek Pengembangan Investasi
- Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.





### 5.3.9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tahun 2024, antara lain:

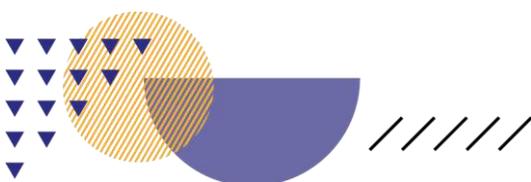
- A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia
  1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian.
  2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
- B. Aspek Pembangunan Ekonomi
  1. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
  2. Pada bidang koperasi UKM dan perindustrian yaitu dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pengolahan pertanian.
  3. Pada bidang kehutanan dengan pengembangan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, sentra penghasil hutan kayu dan kawasan hutan penunjang industri pariwisata
- C. Aspek Pengembangan Infrastruktur
  1. Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan bendungan batang alai; dan pembangunan pengendali banjir.
  2. Pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan program/kegiatan perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan konservasi cadangan SDA dan LH.
- D. Aspek Pengembangan Investasi

Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.

### 5.3.10 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Arah Kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun 2024, antara lain:

- A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia
  1. Pada bidang kesehatan dengan program/kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; penyuluhan masyarakat pola hidup sehat; pelayanan





kesehatan inklusi, peningkatan fasilitas kesehatan dasar, penurunan angka stunting dan pencegahan pernikahan usia dini.

2. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian; dan program kejar paket b-c.
3. Pada bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program/kegiatan pengentasan kemiskinan dan darah tertinggal.
4. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

#### B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan jumlah ternak bibit; peningkatan produksi daging unggas dan petelur; serta pengendalian pemotongan ternak produktif.
2. Pada bidang kelautan dan perikanan dengan program/kegiatan penyediaan paket budidaya, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya; pengembangan budidaya ikan lokal papuyu dan haruan.
3. Pada bidang koperasi UKM dan perindustrian yaitu dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pengolahan peternakan dan perikanan.
4. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
5. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pengembangan ecotourism swimming buffalo dan orang utan.

#### C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

Pada bidang Pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan jalan lingkar barat Kalsel.

#### D. Aspek Pengembangan Investasi

Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.

### 5.3.11 Kabupaten Balangan

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi di Kabupaten Balangan pada tahun 2024, antara lain:

#### A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia





1. Bidang pendidikan dan tenaga kerja dengan pendidikan vokasi/SMK pertanian dan program kejar paket B-C.
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.
2. Pada bidang pertanian dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan rehabilitasi jalan dan jembatan Pada bidang Pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan jalan lingkar barat Kalsel.

D. Aspek Pengembangan Investasi

Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.

### 5.3.12 Kabupaten Tabalong

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Tabalong pada tahun 2024, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Bidang pendidikan dan kebudayaan melalui peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi (SMK dan politeknik).
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada Bidang perindustrian dengan mengembangkan kawasan industri Tabalong.
2. Pengembangan kawasan budidaya perkebunan, pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.
3. Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan peternakan.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur





1. Bidang perhubungan dengan dukungan pembangunan jalur kereta api dan dukungan pengembangan bandara Warukin;
2. Bidang Pekerjaan Umum dengan pembangunan jalan lingkaran barat, jalan akses Kalsel - Kalteng dan jalur distribusi pusat perikanan ke IKN;
3. Pengembangan industri pengolahan hasil tambangan dan perkebunan.

D. Aspek Pengembangan Investasi

Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.

**5.3.13 Kabupaten Barito Kuala**

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kab. Barito Kuala tahun 2024, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian/perkebunan.
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman; dan pembinaan pengembangan mekanisasi pertanian.
2. Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, industri pengolahan hasil hutan, perabot dan kayu.
3. Pada bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan program/kegiatan dukungan pengembangan jalan lingkaran barat kalsel; dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
2. Peningkatan Infrastruktur Daerah Irigasi Rawa dan Irigasi Permukaan;
3. Peningkatan industri pengolahan hasil pertanian;

D. Aspek Pengembangan Investasi

Stabilitas keamanan dan ketentraman pada masa pemilu dan pilkada.





Tabel 5.14. Kinerja Makro Kabupaten/Kota Tahun 2021 Dan Target Kinerja Tahun 2022-2024

NO.	PROVINSI / KAB/ KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)				TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)					PERTUMBUHAN EKONOMI				
		CAP. 2021	CAP. 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	CAP. 2021	CAP. 2022	TARGET 2023	TARGET 2024 (LOW)	TARGET 2024 (HIGH)	CAP. 2021	CAP. 2022	TARGET 2023	TARGET 2024 (LOW)	TARGET 2024 (HIGH)
1	KALIMANTAN SELATAN	71,28	71,84	72,95	72,65	4,95	4,74	4,22		4,59	3,48	5,11	4,50-5,20	4,61	5,01
2	KAB. TANAH LAUT	69,87	70,35	70,4 - 70,72	70,80	3,52	4,17	3,55	3,25	3,45	3,47	5,12	4,50 - 5,00	4,60	5,00
3	KAB. KOTABARU	69,13	69,74	69,82	71,14	5,57	6,70	4,84	4,45	4,65	3,36	4,58	4,70-5,10	4,80	5,20
4	KAB. BANJAR	69,89	70,72	71,18	71,63	3,98	2,72	2,69	2,46	2,66	3,21	4,48	4,29 - 5,73	4,92	6,05
5	KAB. BARITO KUALA	66,64	67,37	71,34	72,42	3,22	3,63	3,26 - 3,51	3,01	3,26	1,79	3,59	5,00 - 5,50	5,25	5,75
6	KAB. TAPIN	70,31	71,02	71,2 - 72,53	71,40	4,96	4,15	4,00 - 3,35	3,94	4,05	3,41	4,91	4,50	4,76	4,96
7	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	69,21	69,76	69,90-70,10	70,96	2,44	2,29	2,15-2,10	2,00	2,10	4,19	4,02	4,75-5,50	4,75	5,50
8	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	69,05	69,70	70,60-70,93	71,20	3,76	3,35	3,60	3,10	3,30	3,01	5,30*	4,50 - 5,00	4,50	5,00
9	KAB. HULU SUNGAI UTARA	66,12	66,84	67,56	68,20	4,80	4,64	4,50	4,00	4,20	3,23	4,09	4,05	4,90	5,05
10	KAB. TABALONG	72,60	73,13	74,33	75,07	3,43	4,46	3,0-3,4	2,85	3,05	3,28	5,30	4,00	4,00	4,50
11	KAB. TANAH BUMBU	71,00	71,79	72,21-72,57	72,58	6,83	6,89	5,87-5,66	5,54	5,68	4,23	5,45	4,51-5,00	5,86	6,32
12	KAB. BALANGAN	69,11	69,73	70,16	70,61	2,44	3,98	2,40	2,17	2,37	3,26	5,24	3,30	5,40	6,00
13	KOTA BANJARMASIN	77,57	77,97	78,10-78,70	78,40	8,47	6,96	6,21-8,44	5,64	7,36	3,41	5,69	4,50-5,00	5,00	5,75
14	KOTA BANJARBARU	79,10	79,68	79,50	79,79 - 80,05	5,70	5,47	5,09	5,20	5,40	3,32	7,93	4,50	5,35	6,20





Lanjutan Tabel 5.14 Kinerja Makro Kabupaten/Kota Tahun 2021 Dan Target Kinerja Tahun 2022-2024

NO.	PROVINSI / KAB/ KOTA	TINGKAT KEMISKINAN				INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				GINI RASIO			
		CAP. 2021	CAP. 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	CAP. 2021	CAP. 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	CAP. 2021	CAP. 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
1	KALIMANTAN SELATAN	4,56	4,61	4,60 -4,40	4,40	71,03	71,92	70,90	71,22	0,325	0,310	0,320	0,320
2	KAB. TANAH LAUT	4,57	3,86	3,55	3,45	68,70	67,78	68,47	68,57	0,232	0,263	0,230	0,229
3	KAB. KOTABARU	4,26	4,30	4,15	4,09	69,50	72,20	74,00	67,60	0,306	0,330	0,290	0,281
4	KAB. BANJAR	3,04	2,79	2,72	2,70	67,27	66,03	66,50	62,58	0,340	0,300	0,299	0,298
5	KAB. BARITO KUALA	5,11	4,75	4,68	4,45	63,21	63,41	62,66	63,05	0,260	0,289	0,270	0,220-0,250
6	KAB. TAPIN	3,60	3,60	3,0 - 3,20	3,60	63,58	65,25	64,92	65,04	0,289	0,291	0,280	0,287
7	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	4,84	4,54	4,50-4,25	3,96	67,93	69,23	69,50-70,50	71,49	0,275	0,260	0,258-0,256	0,257-0,255
8	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	6,18	5,92	5,60 - 6,00	5,30	65,30	67,33	64,78	65,16	0,331	0,228	0,298	0,228
9	KAB. HULU SUNGAI UTARA	6,83	6,49	6,15	5,90	65,04	63,12	65,46	63,54	0,378	0,301	0,301	0,300
10	KAB. TABALONG	6,27	5,87	5,4-5,6	5,55	65,20	70,07	71,98	72,00	0,288	0,340	0,288-0,280	0,300
11	KAB. TANAH BUMBU	4,82	4,26	4,18-4,04	4,01-3,86	73,74	70,39	71,46-71,54	72,03	0,281	0,292	0,280	0,280
12	KAB. BALANGAN	6,07	5,83	5,30 - 5,00	5,10	67,35	67,83	68,02	68,48	0,277	0,266	0,287	0,266
13	KOTA BANJARMASIN	4,89	4,74	4,35	4,32	57,06	56,38	58,22	58,46	0,350	0,330	0,310	0,310
14	KOTA BANJARBARU	4,40	4,17	4,20	4,10	61,60	61,83	63,17	59,87	0,361	0,341	0,321	0,301



# **BAB VI**

# **RENCANA**

# **KERJA**

# **DAN**

# **PENDANAAN**

# **DAERAH**





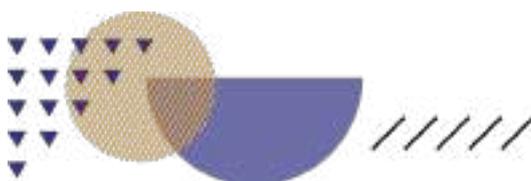
## BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah berpedoman pada RPJPD Provinsi 2005-2025, memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2024 serta RPJMD 2021-2026. Selain hal tersebut Penyusunan RKPD 2024 memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang saat ini dan mempertimbangkan aspek-aspek teknokratik (Holistik, Tematik, Integrasi dan Spasial) dan politis yang antara lain memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, hasil masukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Pemerintah Pusat, masyarakat, dan masukan dari hasil proses perencanaan secara keseluruhan maka direncanakan program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut.

### 6.1 Prioritas Dan Sub Prioritas RKPD Tahun 2024

Bab Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah ini mencakup program prioritas dan kegiatan prioritas, indikator kinerja serta pagu pendanaan indikatif Tahun 2024. Sesuai tema RKPD Tahun 2024 **“PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING DAERAH UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF”** maka pada Tahun 2024 ditetapkan 5 Prioritas RKPD 2024 dibagi menjadi 25 sub prioritas. Prioritas dan sub prioritas tersebut antara lain:

1. **PENGUATAN SEKTOR INDUSTRI, UMKM, PERTANIAN DAN PARIWISATA**  
Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2024 yaitu:
  - a. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan
  - b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
  - c. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark
  - d. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
  - e. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah
  - f. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN
2. **MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING**





Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2024 yaitu:

- a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
  - b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
  - c. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
  - d. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
  - e. Pengendalian Prevalensi Stunting
  - f. Penurunan Angka Pernikahan Anak
  - g. Peningkatan Prestasi Olahraga
  - h. Pengembangan Budaya Daerah
3. MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2024 yaitu:

- a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
  - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
  - c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN
4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG FOKUS PADA PELAYANAN PUBLIK

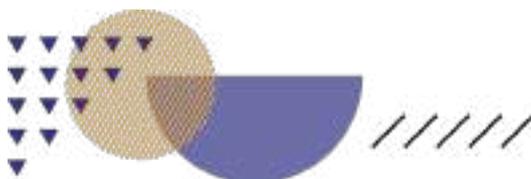
Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2024 yaitu:

- a. Penguatan Reformasi Birokrasi
  - b. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
  - c. Pelaksanaan Pilkada Serentak
  - d. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
  - e. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
  - f. Pengembangan Satu Data Kalsel
5. MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN BENCANA

Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2024 yaitu:

- a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- b. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

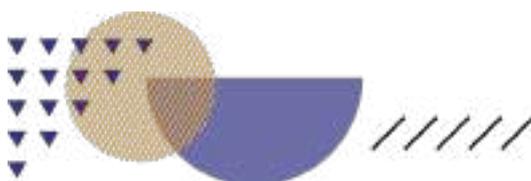
Berdasarkan tema, sub tema, prioritas, dan sub prioritas di atas maka ditetapkan program-program prioritas sebagai berikut:





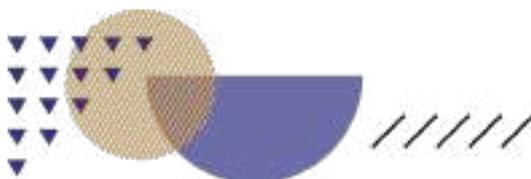
## **PRIORITAS #1 Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata**

1. Sub Prioritas Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan dengan program prioritas sebagai berikut:
  - a. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
  - b. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
  - c. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
  - d. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
  - e. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
  - f. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
  - g. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
  - h. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
  - i. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
  - j. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
  - k. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKAMAN TANGKAP
  - l. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKAMAN BUDIDAYA
  - m. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKAMAN
  - n. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
  - o. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
  - p. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
  - q. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
  - r. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
  - s. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
  - t. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
  - u. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
  - v. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
  - w. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI



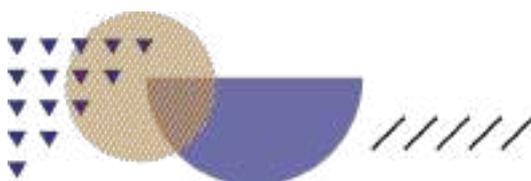


- x. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
  - y. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
  - z. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
  - aa. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
2. Sub Prioritas Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
  - b. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
  - c. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
  - d. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
  - e. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
  - f. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
  - g. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
3. Sub Prioritas Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
  - b. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
  - c. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
  - d. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
  - e. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
  - f. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
  - g. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
  - h. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
  - i. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH
4. Sub Prioritas Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI





- b. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
  - c. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
  - d. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
  - e. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
  - f. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
  - g. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
  - h. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
  - i. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
5. Sub Prioritas Peningkatan Realisasi Investasi Yang Berdampak Ke Daerah dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
  - b. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
  - c. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
  - d. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
  - e. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
  - f. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
  - g. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
  - h. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
  - i. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
6. Sub Prioritas Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
  - b. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
  - c. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
  - d. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

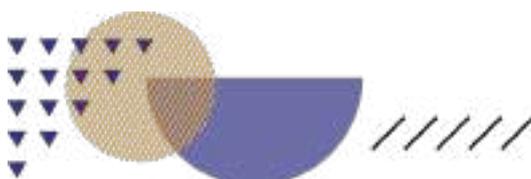




- e. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
- f. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
- g. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
- h. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

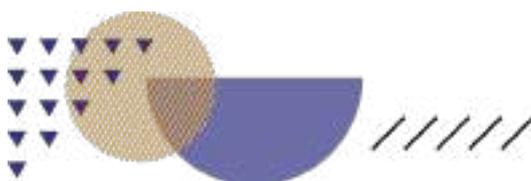
**PRIORITAS #2 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING**

1. Sub Prioritas Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah dengan program prioritas sebagai berikut:
  - a. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
  - b. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
  - c. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2. Sub Prioritas Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda dengan program prioritas sebagai berikut:
  - a. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
  - b. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
  - c. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
  - d. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
3. Sub Prioritas Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif dengan program prioritas sebagai berikut:
  - a. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
4. Sub Prioritas Penurunan Penyakit Melalui GERMAS dengan program prioritas sebagai berikut:
  - a. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
  - b. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
  - c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
5. Sub Prioritas Pengendalian Prevalensi Stunting dengan program prioritas sebagai berikut:





- a. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
  - b. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
  - c. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
  - d. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
  - e. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
  - f. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
  - g. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
  - h. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
  - i. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
  - j. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
  - k. PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
  - l. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
  - m. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
  - n. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
  - o. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
  - p. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
  - q. PROGRAM PENCATATAN SIPIL
6. Sub Prioritas Penurunan Angka Pernikahan Anak dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
  - b. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
  - c. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
  - d. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
  - e. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
7. Sub Prioritas Peningkatan Prestasi Olahraga dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

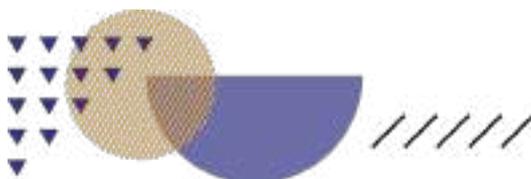




8. Sub Prioritas Pengembangan Budaya Daerah dengan program prioritas sebagai berikut:
- PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
  - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
  - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
  - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
  - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
  - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
  - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
  - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
  - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
  - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
  - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
  - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

**PRIORITAS #3 MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH**

1. Sub Prioritas Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar dengan program prioritas sebagai berikut:
- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
  - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
  - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
  - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
  - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
  - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
  - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)
  - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
  - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

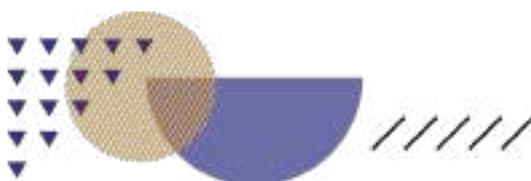




2. Sub Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah dengan program prioritas sebagai berikut:
  - a. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
  - b. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
  - c. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
  - d. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
  - e. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
  - f. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
3. Sub Prioritas Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu gerbang IKN dengan program prioritas sebagai berikut:
  - a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
  - b. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
  - c. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
  - d. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
  - e. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  - f. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
  - g. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
  - h. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
  - i. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
  - j. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
  - k. PROGRAM PENATAAN DESA
  - l. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
  - m. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
  - n. PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
  - o. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

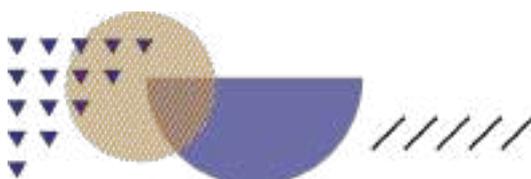
**PRIORITAS #4 MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG FOKUS PADA PELAYANAN PUBLIK**

1. Sub Prioritas Penguatan Reformasi Birokrasi dengan program prioritas sebagai berikut:
  - a. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
  - b. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI



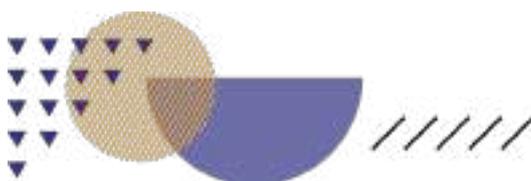


- c. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
  - d. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
  - e. PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
  - f. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
  - g. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
  - h. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
  - i. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
  - j. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
  - k. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
  - l. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
  - m. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
  - n. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
  - o. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
  - p. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
  - q. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
  - r. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BLUD)
  - s. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
2. Sub Prioritas Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
  - b. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
  - c. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
  - d. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
  - e. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3. Sub Prioritas Pelaksanaan Pilkada Serentak dengan program prioritas sebagai berikut:





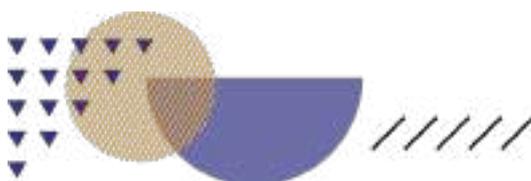
- a. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
  - b. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
  - c. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
  - d. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4. Sub Prioritas Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  - b. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
5. Sub Prioritas Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
  - b. PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
  - c. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
  - d. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
  - e. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
  - f. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
  - g. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
  - h. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
6. Sub Prioritas Pengembangan Satu Data Kalsel dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
  - b. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH





**PRIORITAS #5 MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN BENCANA**

1. Sub Prioritas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dengan program prioritas sebagai berikut:
  - a. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
  - b. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
  - c. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
  - d. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
  - e. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
  - f. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
  - g. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
  - h. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
  - i. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
  - j. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
  - k. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
  - l. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
  - m. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
  - n. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
  - o. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
  - p. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
  - q. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)



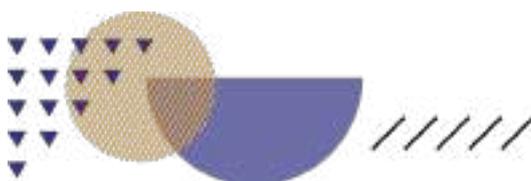


- r. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
  - s. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
2. Sub Prioritas Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
  - b. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
  - c. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
  - d. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
  - e. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
  - f. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
  - g. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
  - h. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT



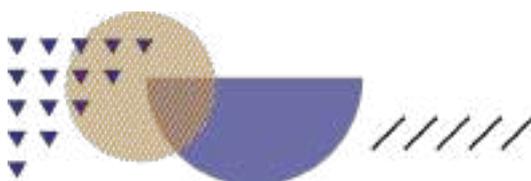


TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
TEMA : Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif				
#01	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata			2.739.413.814.439
01.01	Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	3.380.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	8.268.560.004	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.800.000.000	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3.000.000.000	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	81.690.251.487	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	34.206.120.008	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	4.615.310.625	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	9.205.032.900	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	997.252.900	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	135.349.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.622.906.200	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6.759.728.800	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.712.028.100	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.265.417.800	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	836.765.600	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	680.000.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3.685.078.400	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.712.139.500	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.608.022.700	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	637.728.080	



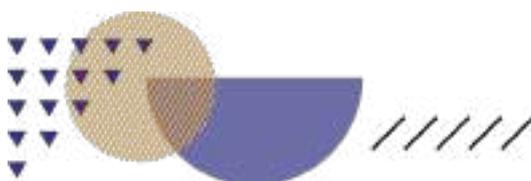


TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	375.000.000
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	216.351.900
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	9.811.633.370
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	148.218.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	670.119.600
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.153.471.600
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	603.761.000
	01.02	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	354.315.000
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.521.122.700
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.492.854.500
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.555.220.200
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	5.148.898.926
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	685.361.060.035
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2.100.000.000
	01.03	Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	10.283.078.400
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.424.616.400
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.920.371.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.282.295.700
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.024.458.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28.202.355.699
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.522.720.044.733
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			53.357.613.206	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			1.090.000.000	



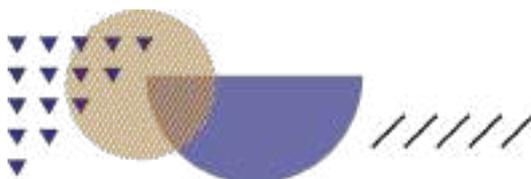


TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
01.04	Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3.685.078.400	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.712.139.500	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.608.022.700	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	680.000.000	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	887.585.300	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.492.854.500	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.712.028.100	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	5.780.337.792	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	19.655.225.475	
		01.05	Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.712.139.500			
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.608.022.700			
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	680.000.000			
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	887.585.300			
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.163.635.100			
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	763.166.600			
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	456.375.900			
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	184.980.700			
01.06	Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	8.268.560.004	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	81.690.251.487	



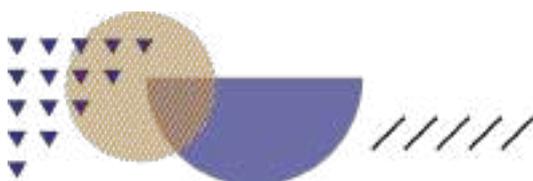


TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	34.206.120.008
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	9.205.032.900
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.622.906.200
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6.759.728.800
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.292.407.000
<b>#02</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing</b>			<b>2.181.886.339.255</b>
	02.01	Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	685.361.060.035
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.169.962.340
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	752.950.400
	02.02	Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	685.361.060.035
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	19.655.225.475
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	6.262.841.200
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	560.210.000
	02.03	Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	522.978.800
	02.04	Penurunan Penyakit Melalui GERMAS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	129.612.843.577
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	34.083.291.062
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.261.513.200
	02.05	Pengendalian Prevalensi Stunting	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	8.268.560.004



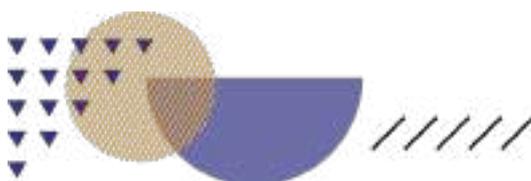


TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU		
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3.000.000.000		
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.712.028.100		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	12.078.522.800		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	35.082.008.801		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.828.127.660		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.928.445.600		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.349.861.246		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	67.635.173.004		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.525.444.800		
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	77.030.000.000		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.169.962.340		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	129.612.843.577		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	34.083.291.062		
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	789.813.300		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.202.409.300		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	669.837.400		
			02.06	Penurunan Angka Pernikahan Anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	611.271.800
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.169.962.340
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	772.760.900
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	773.464.200
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	71.814.000					
02.07	Peningkatan Prestasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	177.533.418.525			



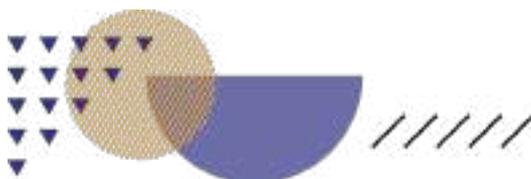


TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
	02.08	Pengembangan Budaya Daerah	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.803.765.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	9.385.114.800
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	833.948.000
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	5.757.505.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	6.321.310.380
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	8.163.777.092
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	3.050.631.300
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	775.744.900
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	617.223.800
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.547.012.900
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.627.349.200
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	3.500.000.000
#03	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah			2.468.894.413.439
	03.01	Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	67.635.173.004
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	7.852.540.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.349.861.246
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.739.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.928.445.600
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	22.892.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	19.275.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.355.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	5.616.139.000
			03.02	Pembangunan Sarana dan



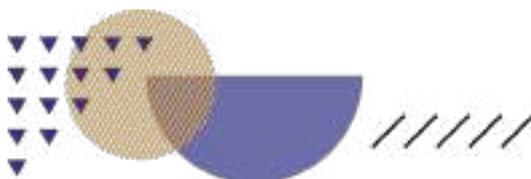


TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
		Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.522.720.044.733
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	6.155.089.200
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28.202.355.699
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.498.515.700
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	350.000.000
	03.03	Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	10.700.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	100.000.000.000
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	397.374.828.430
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	53.357.613.206
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1.274.929.300
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	3.069.191.300
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	174.861.721.600
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	992.149.500
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.951.418.929
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	5.780.337.792
			PROGRAM PENATAAN DESA	168.655.600
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.525.444.800
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	802.819.800
			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	350.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	3.500.000.000
#04	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada pelayanan publik			6.520.644.845.573
	04.01	Penguatan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	28.614.608.050
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	3.453.323.500
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.322.277.200



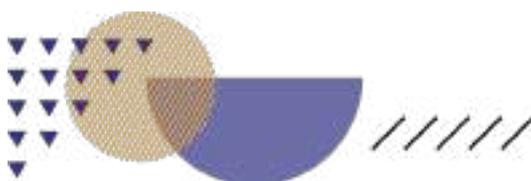


TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	6.612.868.800
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.529.886.700
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.522.493.200
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	15.611.867.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	13.362.125.966
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.855.621.000
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.089.706.692
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.626.231.622
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.996.904.322.236
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	32.000.191.450
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.419.821.900
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	106.959.795.200
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	582.282.800
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.532.660.600
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.796.633.274.256
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	129.612.843.577		
	04.02	Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.157.585.119
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	9.811.633.370
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.712.139.500
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.608.022.700
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			603.761.000	
04.03	Pelaksanaan Pilkada Serentak	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	147.412.264.324	



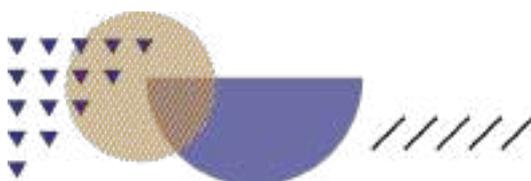


TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	11.206.721.700
			PROGRAM Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.522.493.200
			PROGRAM Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70.909.986.650
	04.04	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70.909.986.650
			PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.173.535.700
	04.05	Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	10.269.250.000
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.157.585.119
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	384.473.100
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	212.545.800
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	758.348.150
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	136.095.450
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	162.509.600
	04.06	Pengembangan Satu Data Kalsel	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.600.000.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	600.000.000
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.089.706.692
#05	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana			379.370.977.377
05.01	Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	4.951.967.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	3.024.458.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.477.901.000	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.309.826.200	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.660.657.000	





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.787.407.750
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	181.987.000
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	221.197.600
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	961.043.000
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.233.473.500
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.928.445.600
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	278.480.500
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	957.762.100
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.525.444.800
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	27.523.590.725
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	8.016.837.200
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	500.000.000
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.572.074.200
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	390.000.000
			05.02	Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	22.275.000.000			
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	27.523.590.725			
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	13.390.720.100			





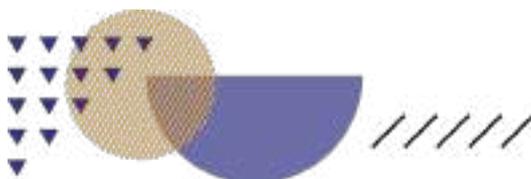
TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / URUSAN / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	129.612.843.577
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	7.033.689.200
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.507.135.800
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.525.444.800

## 6.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah Dan Pendanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2024 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang berdampak pada perubahan susunan organisasi, tupoksi dan anggaran menjadi beberapa SKPD. Hal ini berakibat pada Perubahan Rencana Strategis Daerah (Renstra) pada Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada Perangkat Daerah. Adapun Perangkat Daerah yang terjadi Perubahan yaitu:

1. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. BIRO HUKUM
3. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4. BIRO ORGANISASI
5. BIRO UMUM
6. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
7. SEKRETARIAT DEWAN
8. INSPEKTORAT DAERAH
9. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10. DINAS KESEHATAN





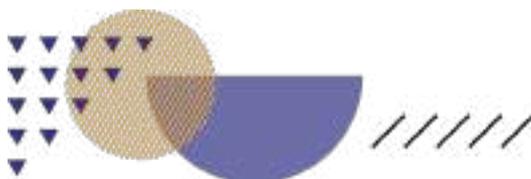
11. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
12. DINAS SOSIAL
13. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
14. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
15. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
16. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
17. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
18. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
19. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20. DINAS PARIWISATA
21. DINAS KEHUTANAN
22. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
23. BADAN PENDAPATAN DAERAH
24. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
25. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
26. BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selain itu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0124 tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2022 adanya perubahan nama dan penambahan pada Unit pelayanan teknis perangkat daerah yaitu:

1. UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN
2. PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

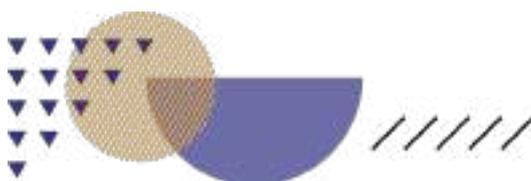
Sehingga dari hal – hal diatas, terjadinya perubahan dan penambahan pada perangkat daerah yang menyebabkan adanya perbedaan antara rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana pada tabel Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan pada Buku II RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Untuk pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan direncanakan pada tahun 2024 selain bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan dapat juga dibiayai dari CSR, KPBU, dan sumber pendanaan lainnya yang





sah. Sesuai Pemutakhiran Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 bahwa jumlah ada 159 Program, 342 Kegiatan dan 1149 Sub Kegiatan yang tertuang di dalam RKPD tahun 2024. Secara terinci dapat dilihat pada buku II RKPD tahun 2024.



# **BAB VII**

# **KINERJA**

# **PENYELENGGARAAN**

# **PEMERINTAHAN**

# **DAERAH**





## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Dalam dokumen tersebut, termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan ke dalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah ke dalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) di mana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena





“hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah direncanakan. Berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

### 7.1. Indikator Makro Kabupaten/ Kota

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Memperhatikan dampak Pandemi COVID 19

Secara rinci, penetapan indikator kinerja makro pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 - 2024 dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.





**Tabel 7.1.** Indikator Kinerja Makro Daerah

No	Indikator Kinerja Makro Daerah	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Thn 2022)	Target Thn 2023 (RPJMD 2021-2026)	RKPD Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2024
<b>1</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>				
	Kalimantan Selatan	71,84	72,20	72,95	72,65
	Nasional (RKP)				73,99 – 74,02
<b>2</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>				
	Kalimantan Selatan	4,74	4,22	4,22	4,05
	Nasional (RKP)				5,00 – 5,7
<b>3</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>				
	Kalimantan Selatan	5,11	4,5 – 5,2	4,5– 5,2	4,6 – 5,0
	Nasional (RKP)				5,3 – 5,7
<b>4</b>	<b>Tingkat Kemiskinan (%)</b>				
	Kalimantan Selatan	4,49	4,60 -4,40	4,60 -4,40	4,40 -4,22
	Nasional (RKP)				6,50 -7,50
<b>5</b>	<b>Indeks Gini</b>				
	Kalimantan Selatan	0,309	0,326	0,324	0,324
	Nasional (RKP)				0,374 - 0,377
<b>6</b>	<b>Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)</b>				
	Kalimantan Selatan	N/A	22,20	22,20	24,6
	Nasional (RKP)				27,02
<b>7</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>				
	Kalimantan Selatan	71,92	70,9	70,9	71,22
	Nasional (RKP)				69,48

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2021 – 2026

## 7.2. Indikator Kinerja Utama

Selanjutnya disajikan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 35 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026. Target IKU dan IKD pada tahun 2023 menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada tahun 2024. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) RKPD 2023 sebagai berikut:





Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.2.** Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Thn 2022)	Target Capaian Thn 2024	SKPD
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	69,68	73,85	Biro Kesra, Bakesbangpol
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,84	72,65	Disdikbud, Dinkes, RSUD Ulin, RSUD MAS, RSJ Sambang Lihum, RSGM GHA
3	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	51,33*	53,96	DP3A, Dispora, Disdikbud, Dinkes, Disdukcapil KB, Disnakertrans, Diskop & UMKM
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,11	4,6-5,0	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas TPH, Disbunnak, Dislutkan, Dinas Perindustrian, Disdag, Dispar, Dishut, DPMPTSP, Biro Perekonomian
5	Tingkat Kemiskinan	%	4,49	4,40 -4,22	Dinas Sosial, Dinkop & UKM, DPMD, Biro Kesra, Biro Perekonomian, Disdag, Dinas TPH, Disbunnak, Dislutkan, Dishut





No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Thn 2022)	Target Capaian Thn 2024	SKPD
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,74	4,05	Disnakertrans, Dinas PUPR
7	Indeks Williamson	Indeks	0,383*	0,359	Dinas PUPR, Disperkim, Diskominfo, Disnakertrans, DESDM, DLH, Dishub
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,45	74,44	Biro Organisasi, Inspektorat, BPSDM, Diskominfo, Bappeda, Bakeuda, BKD, Satpol PP Damkar, Disdukcapil KB, DPMD, Dispersip, Biro Pem & Otda, Biro Kesra, Biro Hukum, Biro PBJ, Biro Adpem, Sekrt DPRD, Balitbang, Badan Penghubung, Bakesbangpol.
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,92	71,22	DLH, Dishut, Dinas ESDM, Dislutkan
10	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	128,81	132	Dinkes, DPUPR, Disperkim, BPBD, Dinsos, Dishut
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	51,12	24,6	DLH, DPMD, Dinas ESDM, Dislutkan

### 7.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penyajian indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolak ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan





gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk indikator kinerja tahun 2023 menyesuaikan dengan indikator kinerja nasional akibat dampak Pandemi COVID 19, indikator makro ditetapkan berdasarkan hasil analisis Kebijakan Ekonomi Makro Daerah (KEMD) Tahun 2022. Selain itu indikator kinerja daerah yang ditetapkan disusun berdasarkan rencana prioritas pembangunan di mana 6 (enam) prioritas tersebut dilaksanakan secara terintegrasi.

**PRIORITAS I** – Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata. Sub prioritas terdiri atas : Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Hasil Industri, UMKM, Pertanian dan Kelautan, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Geopark, Peningkatan Jumlah dan Kelas Wirausaha Baru Berbasis Digital, Peningkatan Realisasi Investasi yang Berdampak ke Daerah, Peningkatan Produktivitas Pertanian Sebagai Lumbung Pangan IKN. Program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada.

1. Seluruh Aspek kesejahteraan masyarakat
2. Aspek Pelayanan Umum
  - a. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
    - i. Tenaga Kerja
    - ii. Pangan
    - iii. Koperasi dan UKM
    - iv. Penanaman Modal
  - b. Pelayanan Urusan Pilihan
    - i. Kelautan dan Perikanan
    - ii. Pertanian
    - iii. Pariwisata
    - iv. Perdagangan
    - v. Perindustrian
    - vi. Energi dan Sumber Daya Mineral

**PRIORITAS II** – Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing. Sub prioritas terdiri atas : Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda, Perencanaan





Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif, Penurunan Penyakit Melalui GERMAS, Pengendalian Prevalensi Stunting, Penurunan Angka Pernikahan Anak, Peningkatan Prestasi Olahraga, Pengembangan Budaya Daerah. Program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - a. Indeks Pembangunan Manusia
  - b. Indeks Gini
  - c. Tingkat Kemiskinan
2. Aspek Pelayanan Umum
  - a. Pelayanan Urusan Wajib Dasar
    - i. Pendidikan
    - ii. Kesehatan
    - iii. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - iv. Sosial
    - v. Ketentraman Umum, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat
  - b. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
    - i. Tenaga Kerja
    - ii. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    - iii. Pangan
    - iv. Lingkungan Hidup
    - v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - vi. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    - vii. Kebudayaan
    - viii. Perpustakaan
    - ix. Kepemudaan dan Olahraga
  - c. Pelayanan Urusan Pilihan
    - i. Kelautan dan Perikanan
    - ii. Pertanian

**PRIORITAS III** - Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah. Sub prioritas terdiri atas : Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar, Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah, Pengembangan Kawasan Prioritas dan Perdesaan yang Terintegrasikan dengan Infrastruktur sebagai





pendukung pintu Gerbang IKN, dengan program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - a. Pertumbuhan Ekonomi
  - b. Indeks Gini
  - c. Tingkat Kemiskinan
  - d. Inflasi
2. Aspek Pelayanan Umum
  - a. Pelayanan Urusan Wajib Dasar
    - i. Kesehatan
    - ii. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - iii. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
    - iv. Sosial
  - b. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
    - i. Lingkungan Hidup
    - ii. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - iii. Perhubungan
    - iv. Komunikasi dan Informatika
  - c. Pelayanan Urusan Pilihan
    - i. Perindustrian
    - ii. Energi dan Sumber Daya Mineral

**PRIORITAS IV** - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik. Sub prioritas terdiri atas : Penguatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN), Pelaksanaan Pilkada Serentak, Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - a. Pertumbuhan Ekonomi
  - b. Indeks Gini
2. Aspek Pelayanan Umum
  - a. Pelayanan Urusan Wajib Dasar
    - i. Ketentraman Umum, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat





- b. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
  - i. Komunikasi dan Informatika
  - ii. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  - iii. Statistik
  - iv. Persandian

**PRIORITAS V** - Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana. Sub prioritas terdiri atas : Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana, dengan program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada:

1. Aspek Pelayanan Umum

- a. Pelayanan Urusan Wajib Dasar
  - i. Kesehatan
  - ii. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - iii. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - iv. Ketentraman Umum, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat
  - v. Sosial
- b. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
  - i. Lingkungan Hidup
- c. Pelayanan Urusan Pilihan
  - i. Kelautan dan Perikanan
  - ii. Kehutanan
  - iii. Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada Tabel di bawah ini





**Tabel 7.3.** Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
<b>1</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>					
<b>01.01</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>					
01.01.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3 – 5,7	5,11	4,5-5,2	4,6, – 5,0
01.01.02	Laju Inflasi	%	2,7	6,99	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0
01.01.03	PDRB Perkapita (ADHB)	(Juta rupiah/org)	N/A*	60,08	49,61 - 51,60	51,60 - 53,66
01.01.04	PDRB Perkapita ADHK	(Juta rupiah/org)	N/A*	34,04	34,16 - 35,70	35,70 - 37,56
01.01.05	Indeks gini	Indeks	0,374 - 0,377	0,309	0,326	0,324
01.01.06	Tingkat Kemiskinan	%	6,50 -7,50	4,49	4,60-4,40	4,40-4,22
01.01.07	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	18,34 juta-19,75 juta	201.950	195.068*	194.437*
01.01.08	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah/Orang/Tahun	N/A*	12.469.000	12.208.904	12.266.652
<b>01.02</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>					
01.02.01	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,99-74,02	71,84	72,95	72,65
01.02.02	Harapan Lama Sekolah	Tahun	9,16	13,1	13,07	13,2
01.02.03	Rata-Rata lama sekolah	Tahun	14,16	8,46	8,56	8,65
01.02.04	Angka Harapan Hidup	Tahun	N/A*	69,13	71,05	71,46
01.02.05	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	7	eppbgm : 6,6 SSGI : 9,8	8	7
01.02.06	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,00-5,7	4,74	4,22	4,05
01.02.07	Jumlah Pengangguran	Orang	NA*	89.470 - 104.025	89.896 - 104.464	86.275 - 100.733

\* Keterangan : 01.02.04 (Angka Harapan Hidup) N/A\* pada Target Nasional Tahun 2024 : Target tidak ditemukan pada dokumen perencanaan nasional

▼ Keterangan : N/A\* pada Target Nasional Tahun 2024 : Target tidak ditemukan pada dokumen perencanaan nasional





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
<b>2</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
	<b>Pelayanan Urusan Wajib Dasar</b>					
<b>02.01</b>	<b>Pendidikan</b>					
02.01.01	Jumlah Warga Negara Usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	%	100	69,87	69,43	100
02.01.02	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	%	100	33,53	35,02	100
02.01.03	Rata – rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64,83	65,88	2	71,99
02.01.04	Rata – rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	54,56	54,06	1,9	57,97
02.01.05	Rata – rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64,18	62,72	2	68,49
02.01.06	Rata – rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	54	52,60	1,9	56,43
02.01.07	Rata – rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69,70	62,09	1,9	68,25
02.01.08	Rata – rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61,79	58,65	1,8	68,25
02.01.09	Rata – rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,84	55,69	2	61,28





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.01.10	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	56,31	52,48	1,9	56,37
02.01.11	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65,96	57,61	1,9	63,52
02.01.12	Rata – rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53,61	44,98	1,8	48,71
02.01.13	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK *(Persentas Lulusan SMK yang bekerja)	%	90	80,14	50,38	84,1
02.01.14	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79	N/A*	70	68,5
02.01.15	Iklm keamanan SMA	Nilai	84,78	81,29	2,47	88,07
02.01.16	Iklm keamanan SMK	Nilai	85,31	79,58	2,54	86,4
02.01.17	Iklm keamanan SDLB	Nilai	87,88	80,22	83,73	87,24
02.01.18	Iklm keamanan SMPLB	Nilai	85,73	78,5	81,93	85,36
02.01.19	Iklm keamanan SMALB	Nilai	84,25	75,8	79,17	82,54
02.01.20	Iklm kebinekaan SMA	Nilai	85,33	91,68	2,37	96,42
02.01.21	Iklm kebinekaan SMK	Nilai	86,67	90,29	2,42	95,09
02.01.22	Iklm kebinekaan SDLB	Nilai	92,39	85,96	88,52	91,08
02.01.23	Iklm kebinekaan SMPLB	Nilai	80,36	69,85	72,08	74,31
02.01.24	Iklm kebinekaan SMALB	Nilai	78,51	73,95	79,17	78,31
02.01.25	Iklm Inklusivitas SMA	Nilai	81,55	78,05	1,97	84,41
02.01.26	Iklm Inklusivitas SMK	Nilai	80,82	76,06	26,06	82,38
02.01.27	Iklm Inklusivitas SDLB	Nilai	83,58	77,2	80,46	83,72
02.01.28	Iklm inklusivitas SMPLB	Nilai	86,48	74,35	77,73	81,11

\* Keterangan : 02.01.14 (Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK) N/A\* pada Capaian Tahun 2022 : Tidak terdapat capaian karena hasil unduh rapor pendidikan belum menyertakan capaian pada indikator tersebut (terdapat kesepakatan bersama kementerian bahwa capaian-capaian indikator diprioritaskan mengambil di rapor pendidikan)





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.01.29	Iklim inklusivitas SMALB	Nilai	85.98	69,6	72,96	76.32
<b>02.02</b>	<b>Kesehatan</b>					
02.02.01	Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	%	100	100	100	100
02.02.02	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	%	90	47,5	90	90
02.02.03	Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu	%	27,5	15,4	16,5	22
02.02.04	Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	95	80	76	79
02.02.05	Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita (persen)	%	7	7,22	8	7
02.02.06	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan KTR	Kab/Kota *Angka	474	6	6	7
	Persentase FKTP terakreditasi	%	100	14,76	14,76	15,18
02.02.07	Jumlah Kab/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Kab/Kota *Angka	405	10	11	11
02.02.8	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%	100	100	100	100
02.02.9	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	96	98,8	98,6	98,7
02.02.10	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak dan	%	100	100	100	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
	Beresiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)					
02.02.11	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	%	14	24,6	20	16
02.02.12	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	83	75	73	85
02.02.13	Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	90	85,7	94	94,5
02.02.14	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Kab/kota *Angka	405	10	11	11
02.02.15	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 penduduk *Angka	183	137	111	110
02.02.16	Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu	%	27,5	15,4	16,5	22
02.02.17	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	Per 1.000	16	88,89% (10)	8	8
02.02.18	Kab/Kota yang mencapai eliminasi kusta	Kab/Kota *Angka	514	13	13	13
02.02.19	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	%	21,8	14,5	14	13
02.02.20	Persentase Kab/Kota yang mencapai target Imunisasi rutin	%	75	92	69,2	76,9
02.02.21	Persentase Puskesmas tersedia obat esensial	%	96	98,8	98,6	98,7
02.02.22	Persentase FKTP terakreditasi	%	100	14,76	14,76	15,18
02.02.23	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	100	100	100	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
<b>02.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
02.03.01	Panjang infrastruktur pengendalian banjir/abrasi di wilayah sungai (WS) kewenangan provinsi	Km	35	6,6	1,295	1,7
02.03.02	Jumlah tenaga kerja konstruksi ahli bersertifikat di wilayah provinsi	Orang	50	133	255	335
02.03.03	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persentase	90	88,28	95.66	87
02.03.04	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	Ha	34125	78,43	104,77	136,84
02.03.05	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	Ha	143826	104,77	425	801,38
02.03.06	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	Persentase	100	83,34	94.26	80
02.03.07	Pelaksanaan Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kasus	9	1	2	2
02.03.08	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	%	75	82	81	82
02.03.09	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Persentase	100	88,68	94,34	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.03.10	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	Persentase	15	50,00	63,81	56,5
02.03.11	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase	30,45	65,3	67,77	69,97
02.03.12	Tambahan Debit Air Baku	Liter/Detik	11,43	0,9	0,9	0,9
02.03.13	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	102	N/A	N/A	N/A
02.03.14	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	96	N/A	N/A	N/A
02.03.15	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	60	1	1	NA
02.03.16	Penetapan RTRW	Perda/Perkada	58	N/A	1	2
02.03.17	Tersedianya data dan informasi jasa konstruksi cakupan wilayah provinsi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan	1	1	6	6
02.03.18	Persentase Kabupaten/Kota dengan bangunan gedung yang sudah memenuhi PBG dan SLF	Persentase	100	N/A	N/A	N/A
02.03.19	Tambahan Debit Air Baku	Liter/Detik	11,43	0,9	0,9	0,9
<b>02.04</b>	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>					
02.04.01	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100	45,73	46,41	47,66
02.04.02	Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas	Rumah Tangga	220.000	N/A	13.750	N/A





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
	Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)					
02.04.03	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan	Rumah Tangga	161.540	26.118	20.770	30.000
02.04.04	Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS)	Persil	10.000	N/A	N/A	N/A
02.04.05	Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Peran Masyarakat dan Dunia Usaha	Unit	355.387	N/A	N/A	N/A
02.04.06	Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitas Pemerintah	Unit	261.566	N/A	N/A	N/A
02.04.07	Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar	Unit	75.000	1.100	850	850
02.04.08	Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota	Kawasan	10	N/A	N/A	33,40
02.04.09	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	Ha	1.520,70	122,17	183,72	176,18
02.04.10	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas	Unit	250.910	21.475	28.808	28.808
02.04.11	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100
02.04.12	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang	%	100	100	100	100





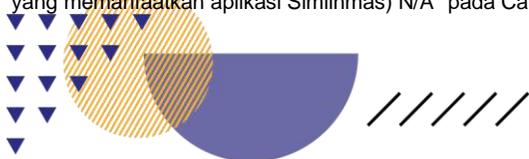
No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
	memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni					
02.04.13	Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	%	70	N/A	43.75	N/A
02.04.14	Luas kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Ha	1.000	30,93	32	33,40
<b>02.05</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>					
02.05.01	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	Perda/Perkada	10	8	2	10
02.05.02	Jumlah daerah yang dilakukan pendampingan penyusunan dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah	%	100	100	100	100
02.05.03	Persentase pendampingan pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kabupaten/kota	%	100	100	100	100
02.05.04	Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur	Satgas Linmas	1	1	1	1
02.05.05	Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.05.06	Persentase daerah yang telah menyusun dokumen pemetaan rawan gangguan linmas tingkat kabupaten/kota	%	20	N/A*	20	20
02.05.07	Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	%	50	80	85	90
02.05.08	Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	%	100	100	100	100
02.05.09	Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota	%	20	14	14	14
02.05.10	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	Orang	5	7	8	9
02.05.11	Persentase pemberkasan penyidikan oleh PPNS terhadap pelanggaran Perda yang bersanksi pidana	%	30	100	100	100
02.05.12	Persentase daerah yang memanfaatkan aplikasi Simlinmas (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat)	%	50	N/A*	50	50
02.05.13	Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	%	100	100	100	100
02.05.14	Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	100	100	100	100
02.05.15	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	25	0	25	25
02.05.16	Persentase pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional	%	40	0	7 orang	2 orang

\* Keterangan : 02.05.06 dan 02.05.12 (Persentase Daerah yang telah menyusun dokumen pemetaan rawan gangguan linmas tingkat kabupaten/kota dan Persentase daerah yang memanfaatkan aplikasi Simlinmas) N/A\* pada Capaian Tahun 2022 : Merupakan indikator baru sehingga belum ada capaian di Tahun 2022





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.05.17	Persentase daerah yang telah memanfaatkan aplikasi pemetaan SDM Satpol PP	%	30	50	50	40
02.05.18	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	100	100	100	100
02.05.19	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani	%	100	91,07	100	100
02.05.20	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100
02.05.21	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100
02.05.22	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100
02.05.23	Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	%	100	100	100	100
02.05.24	Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	100	100	100	100
02.05.25	Jumlah aparatur terkait kebencanaan di prov/kab/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan	%	25	100	100	100
02.05.26	Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial	%	25	100	100	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.05.27	Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota	orang	30	50	50	40
02.05.28	Jumlah daerah yang telah membentuk struktur organisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat	Jumlah Daerah	50	50	50	50
<b>02.06</b>	<b>Sosial</b>					
02.06.01	Jumlah lembaga di bidang Kesos yang mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan	Lembaga	850	60	65	65
02.06.02	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100
02.06.03	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100
02.06.04	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100
02.06.05	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100
02.06.06	Persentase SDM PKH yang melaksanakan P2K2	%	100	445 keluarga	445 keluarga	445 keluarga
02.06.07	Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Provinsi	38	6	6	6
02.06.08	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan pendampingan kewirausahaan sosial	KPM	7500	52	60	60





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.09	Jumlah KPM yang dirujuk untuk mendapatkan pendampingan usaha	KPM	7500	39	55	60
02.06.10	Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	Provinsi	38	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota
02.06.11	Jumlah TJSLBU (tanggungjawab sosial dan lingkungan badan usaha) yang mendapatkan penguatan	Badan Usaha	200	30	30	30
02.06.12	Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB)	Provinsi	38	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota
02.06.13	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan tempat penampungan	Orang	135000	140444	14000	15000
02.06.14	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Paket	135000	200	250	250
02.06.15	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket permakanan	Orang	135000	142070	14000	15000
02.06.16	Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar	Orang	10230	141	200	200
02.06.17	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	orang	5000	133461	15000	15000
02.06.18	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	70	100	100	100
02.06.19	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Orang	7230	154	154	154



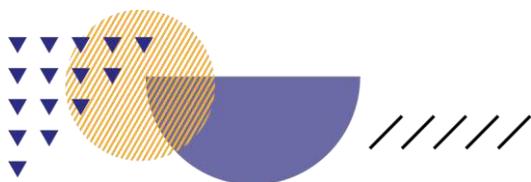


No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.20	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Unit	514	2	2	2
02.06.21	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat	KPM	10000000	1350	13000	2000
02.06.22	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (PKH)	KPM	10000000	1350	13000	2000
02.06.23	Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan	Lembaga	850	60	65	65
02.06.24	Jumlah sdm kesos yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan professional	Orang	2000	406	406	406
02.06.25	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	Jiwa	204330	140444	14000	14000
02.06.26	Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan terorisme	Kelompok Masyarakat	250	200	200	550
02.06.27	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan	Orang	1000	100	100	100
02.06.28	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Unit	136	23	23	23
02.06.29	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi command center	Kabupaten/Kota	514	13	13	13





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.30	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi command center	Kabupaten/Kota	864	637	650	655
02.06.31	Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako	KPM	18800000	5000	5500	5500
02.06.32	Jumlah lanjut usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	31	20	30
02.06.33	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam pant	Orang	100	180	180	180
02.06.34	Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100	210	210	220
02.06.35	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	100	100	100	100
02.06.36	Jumlah lanjut usia terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	Orang	3400	47	180	180
02.06.37	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di dalam panti	Orang	50	17	20	20
02.06.38	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	Orang	100	50	10	20





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.39	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1360	54	54	60
02.06.40	Jumlah pekerja social profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	2	11	5	11
02.06.41	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial	Orang	50000	1626	600	500
02.06.42	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100	333	511	511
02.06.43	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2720	9	10	10
02.06.44	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	25	0	40	40
02.06.45	Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	680	330	511	511
02.06.46	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100	100	100	100
02.06.47	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	100	40	40	40





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.48	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	3400	180	180	180
02.06.49	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	Orang	2	39	50	40
02.06.50	Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100	40	100	40
02.06.51	Jumlah gelandangan dan pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	25	0	40	40
02.06.52	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	Orang	100	40	40	40
02.06.53	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Paket	1	61	62	62
02.06.54	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	3400	333	511	511
02.06.55	Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100	110	120	120
02.06.56	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	Paket	68	70	60	70
02.06.57	Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di dalam panti	Orang	50	31	47	47





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.58	Jumlah anak terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1700	114	160	160
02.06.59	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	Jiwa	204330	140444	14000	14000
02.06.60	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	Paket	136	445	450	450
02.06.61	Jumlah anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	340	239	511	511
02.06.62	Jumlah anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulsuran keluarga	Orang	680	330	511	511
02.06.63	Jumlah lanjut usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulsuran keluarga	Orang	25	32	20	32
02.06.64	Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100	50	100	100
02.06.65	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, KTP, akta kelahiran, surat nikah dan/atau KIA di dalam panti	Orang	100	0	40	40
02.06.66	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	N/A	136	50	50	50
02.06.67	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100	40	40	40





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.06.68	Jumlah gelandangan dan pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	340	0	40	40
02.06.69	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100	100	100	100
02.06.70	Jumlah Tagana yang meningkat kompetensinya	Orang	26188	400	350	350
02.06.71	Jumlah korban bencana kelompok rentan	Orang	6750	550	550	550
	<b>Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar</b>					
<b>02.07</b>	<b>Tenaga Kerja</b>					
02.07.01	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	50000	5990	107.968	5700
02.07.02	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	75	33.33	23,73	75
02.07.03	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	Orang	325000	351	576	532
02.07.04	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	11.289.510	172.086	283.714	111.000





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.07.05	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	11.289.510	172.086	283.714	223.944
02.07.06	Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Orang	2.164.920	10	10	40
<b>02.08</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
02.08.01	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD	%	8,76	31,23	30	40
02.08.02	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100
02.08.03	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	79,16	74,58	76,33	77,27
02.08.04	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	64,34	61,23	68	65
02.08.05	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100
02.08.06	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	91,30	88,86	89,04	89,1
<b>02.09</b>	<b>Pangan</b>					
02.09.01	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90	91,18	82	84
02.09.02	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	30971	667,12	394	399





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.09.03	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	12	13.39	15.99	15.89
02.09.04	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	95.2	87.8	88.15	88.26
<b>02.10</b>	<b>Pertanahan</b>					
02.10.01	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah	300614	6.164	6600	6600
02.10.02	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	130700	3000	4.400	4.500
<b>02.11</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>					
02.11.01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	69.74	71.97	70.90	71.22
02.11.02	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	70	98	100	100
02.11.03	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	75	100	100	100
02.11.04	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen	76	N/A	1	1
<b>02.12</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>					
02.12.01	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	%	100	100	100	100
02.12.02	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	99	94,54	98	99



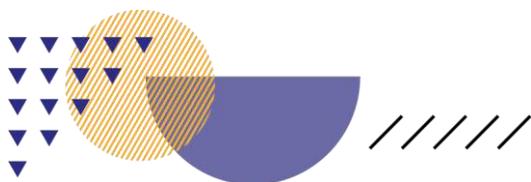


No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.12.03	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100	100
02.12.04	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100	100
02.12.05	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	%	100	100	100	100
02.12.06	Pemanfaatan data kependudukan	%	100	19	30	80
<b>02.13</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
02.13.01	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	Orang	13.494	1723	1829	1863
02.13.02	Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	Desa	7.500	115	133	352
02.13.03	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Desa	7.500	115	133	352
02.13.04	Jumlah Desa Mandiri.	Desa	6.444	100	130	180
02.13.05	Jumlah Desa Berkembang	Desa	59.291	892	655	562
02.13.06	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	9.152	34	9	0
02.13.07	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Bumdes	10.000	107	20	450
02.13.08	Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) berkembang	Bumdes Bersama	300	0	10	28
02.13.09	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju	Bumdes	1.800	20	5	41





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.13.10	Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) Maju	Bumdes bersama	200	0	1	3
02.13.11	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Nilai	58,7	67,51	68,84	70,71
<b>02.14</b>	<b>Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana</b>					
02.14.01	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61	54,19	61	64,55
02.14.02	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	18	33,97	36	24
02.14.03	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,1	2,45	2,40	2,3
02.14.04	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	63,41	71,65	72	74
02.14.05	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,4	8,79	7,4	8,28
<b>02.15</b>	<b>Perhubungan</b>					
02.15.01	On Time Performance Layanan Transportasi	%	82,08	75,5	58,5	59
02.15.02	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	88,5	78,9	81,5	81,7
02.15.03	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio	0,763	0,59	0,61	0,63





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.15.04	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Rasio	23.71	3,075	2,6	1,6
<b>02.16</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>					
02.16.03	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	2	N/A	3	N/A
02.16.04	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional,(tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	%	85	80	85	85
02.16.05	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	%	74	70	74	74
02.16.06	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	100	100	100	100
02.16.07	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	%	85	97	97	97





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.16.08	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	%	100	14	100	100
02.16.09	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	%	85	75	76	77
02.16.10	Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda termasuk ASN di Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Orang	100	72	140	160
02.16.11	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase	90	22	40	57
02.16.12	Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase	50	N/A	3	5
02.16.13	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Persentase	100	22	40	57
02.16.14	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Persentase	60	25	33	35
02.16.15	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	Persentase	100	14	100	100
<b>02.17</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>					
02.17.01	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	10	26.87	30	7





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.17.02	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	20	11.57	15	7
02.17.03	Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	4	0.46	0.65	4
02.17.04	Terfasilitasinya UKM yang Berpotensi Masuk ke dalam Rantai Pasok dan Ekspor	%	75	15.32	16.22	18.02
02.17.05	Pertumbuhan Wirausaha	%	4	17,78	18,17	4
02.17.06	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	75	15,32	16,22	4
<b>02.18</b>	<b>Penanaman Modal</b>					
02.18.01	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp	1.293 T	15.295.807.78 0.000	12,550,000,0 00,000	16,210,000,00 0,000
<b>02.19</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>					
02.19.01	Persentase penduduk 10 tahun ke atas di provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir	%	40	23,33	37	36,93
02.19.02	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan di tingkat Provinsi	Dokumen	1	0	1	1
02.19.03	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	57,67	51,33	52,66	53,96
02.19.04	Tersusunnya DOD Tingkat Provinsi	Dokumen	1	N/A*	N/A*	1
02.19.05	Terbentuknya Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Tingkat Provinsi	Dokumen	1	N/A*	N/A*	1
<b>02.20</b>	<b>Statistik</b>					
02.20.01	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan	%	100	87.50	92	92

\*Keterangan : 02.19.04 dan 02.19.05 (Tersusunnya DOD Tingkat Provinsi dan Terbentuknya Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Tingkat Provinsi) N/A\* pada Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 : Merupakan indikator baru sehingga belum ada capaian di Tahun 2022 dan Target Tahun 2023



No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
	data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
02.20.02	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	%	100	16.67	15	15
02.20.03	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	%	100	16.67	50	50
02.20.04	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	87.50	92	92
<b>02.21</b>	<b>Persandian</b>					
02.21.01	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	Daerah	32	N/A	N/A	1
02.21.02	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang	80	N/A	4	4
02.21.03	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Orang	50	N/A	4	4
02.21.04	Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	%	100	N/A	64	65
02.21.05	Jumlah Lulusan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIV	Orang	500	N/A	N/A	15





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
<b>02.22</b>	<b>Kebudayaan</b>					
02.22.01	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	2,04	1,80	1,90	2,98
02.22.02	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	61,62	21,06	24,00	30,7
02.22.03	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	50,00	39,00	40,00	42,00
02.22.04	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	15,00	8,35	6,93	11,99
02.22.05	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	23,06	21,68	15,63	21,83
02.22.06	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,50	1,00	2,00	0,5
02.22.07	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	0,56	11,06	12,36	30
<b>02.23</b>	<b>Perpustakaan</b>					
02.23.01	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	71	64,95	46	68,00
02.23.02	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Index	15	75,71	61	77,00
<b>02.24</b>	<b>Kearsipan</b>					
02.24.01	Jumlah Pemerintah Daerah Povinsi yang menerapkan e-arsip terintegrasi	Provinsi/Kab/Kota	158	62	62	70





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.24.02	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas	Provinsi/Kab/Kota	32	8	5	5
02.24.03	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Provinsi	Rekomendasi	32	23	25	20
02.24.04	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Pengguna	452.194	400	4050	4100
02.24.05	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	738.836	1.350	1.501	1.651
<b>Pelayanan Urusan Pilihan</b>						
<b>02.25 Kelautan dan Perikanan</b>						
02.25.01	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota diwilayah provinsi	ton	21.430.000	130.355,18	167419	250.000
02.25.03	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Ha	17.800.000	179.659,89	179.659,89	179.659,89
02.25.04	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8.350.000	201.252	211.000	220.000
02.25.05	Konsumsi ikan	Kg/KAP/TH	58.76	64,11	63.00	68.31
02.25.07	POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan	Kelompok	1110	179	200	207
02.25.08	Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	2870	130	130	130
02.25.09	Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Provinsi	Forum	1	1	1	1





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
<b>02.26</b>	<b>Pariwisata</b>					
02.26.01	Kontribusi PDB Pariwisata	%	4,5	2,1	2,27	2,29
02.26.02	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	300.000.000-3 15.000.000	2.924.434	3.300.000	3.630.000
02.26.03	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	1500000000	13.342.961	10.000.000	11.000.000
<b>02.27</b>	<b>Pertanian</b>					
02.27.01	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura	%	1.96	0.86	1.0	1.0
02.27.02	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan jenis jagung	%	1,64	0,99	1,0	1,0
02.27.03	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura jenis bawang merah	%	1.82	1.02	1.0	1.0
02.27.04	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura jenis cabai	%	3,89	2,50	2,50	2,50
02.27.05	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan jenis kedelai	%	0.87	0.53	0.18	0.18
02.27.06	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis Cengkeh	%	1,77	18,66	3,75	4,0
02.27.07	persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis lada	%	0,62	0,80	1,6	1,6





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.27.08	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis karet	%	1,62	-2,78	1,0	1,0
02.27.09	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kakao	%	0,29	10,22	3,75	3,75
02.27.10	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kelapa	%	5,51	-2,73	1,0	1,0
02.27.11	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kopi	%	0,24	6,74	3,90	3,90
02.27.12	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	4.710.620	83.223,07	128.749	132.895
02.27.13	Jumlah Produksi Susu	Ton	815.390	130	89	89
02.27.14	Jumlah Produksi Telur	Ton	6.465.230	58.952	61.945	62.118
02.27.15	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	45	0,55	2,46	2,46
02.27.16	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	75,80	99,98	97,50	97,50
02.27.17	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	95	94,41	97,50	97,50
02.27.18	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan	%	40	22,4	97,5	97,5





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.27.19	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	%	60,80	99,41	97,50	97,50
02.27.20	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	%	50	91.07	97.50	97.50
02.27.21	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80.5	83.90	80.5	80.5
<b>02.28</b>	<b>Kehutanan</b>					
02.28.01	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	30000	15186.46	20000	20000
02.28.02	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Ha	1500670.98	10275	3000	5000
<b>02.29</b>	<b>Energi Sumber Daya Mineral</b>					
02.29.01	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	%	100	99	98.46	98.51
02.29.02	Rasio elektrifikasi	%	100	99.45	99.52	99.61
02.29.03	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	%	19.5	15.79	19.56	19.58
<b>02.30</b>	<b>Perdagangan</b>					
02.30.01	Tertib Usaha	%	90	100	100	100
02.30.02	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90	99.20	100	100
02.30.03	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	7.86	65.94	6.2	10
02.30.04	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	75	102.12	100	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
02.30.05	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	55	142.25	100	100
02.30.06	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	5.9	0.015	0.10	0.11
02.30.07	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	92	105	100	100
<b>02.31</b>	<b>Perindustrian</b>					
02.31.01	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	8.40	3.31	5.21	5.67
02.31.02	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	18.90	11.39	13.45	13.62
02.31.03	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	181.59	15.90	10.78	11.24
02.31.04	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	21.94	199,118	307,496	320,820
02.31.05	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	613.85	2.58	1.19	1.28
<b>02.32</b>	<b>Transmigrasi</b>					
02.32.01	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Index	46.10	73,15	54,27	55,48
02.32.02	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisas	Index	57.50	75,66	71,54	75,03
<b>3</b>	<b>ASPEK DAYA SAING</b>					





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2024	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
03.01.01	Nilai Tukar Petani	%	108	104,58	102.7	103.18
03.01.02	Nilai Tukar Nelayan	%	107-110	83,74	102,03	102,95
03.01.03	Keterbukaan Ekonomi (Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB ADHK)	Rasio	N/A*	0.194	0.195	0.196
03.01.04	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	N/A*	48,29	50.28	50.55
03.01.05	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR	Rasio	N/A*	1,21	1.24	1.27
03.01.06	Rasio Elektrifikasi	%	100	99.45	99.52	99.61
03.01.07	Rasio Konektivitas	Rasio	N/A	N/A	0.61	0.63
03.01.08	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	Indeks	N/A	N/A	81.21	85.21
03.01.09	Konflik antar dan inter umat beragama yg ditangani	Kasus	0	0	0	0

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2021 – 2026, Rakortekrenbang Prov. Kalsel thn 2022 dan Permendagri No. 59 thn 2021

\* Keterangan : N/A\* pada Target Nasional Tahun 2024 : Target tidak ditemukan pada dokumen perencanaan nasional

RKPD TAHUN 2024  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



# BAB VIII

# PENUTUP





## BAB VIII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlaku dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember 2024. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya. RKPD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Untuk pelaksanaan dokumen RKPD 2024, baik berupa prioritas maupun sasaran-sasaran pembangunan yang wajib dilaksanakan secara professional dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Sehingga diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Selanjutnya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wujud pelaksanaan Tahun Keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005- 2025 Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen ini sebagai instrumen dalam mengejawantahkan muatan-muatan yang terkandung pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, selain itu untuk dapat menjamin konsistensi dan menjaga kesinambungan perencanaan yang termuat dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 telah dipadukan juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, penelaahan terhadap prioritas RPJPD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah dan program strategis nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, maka dalam rangka mencapai target kinerja pada





Tahap ke-5 RPJPD sebagai tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, mengusung tema pembangunan Tahun 2024 berupa **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 diarahkan pada: **Penguatan sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata; Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing; Memperkuat infra struktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah; Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik; Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.**

Prioritas pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas untuk Tahun 2024 dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kebijakan money follow program yang dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi **Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)**. Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 ini menjadi bahan penyempurnaan perangkat daerah dalam perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dirumuskan dengan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan memperhatikan waktu yang ada. Sementara itu dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup daerah provinsi dan antar daerah kabupaten/kota, rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2024 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat menyelaraskan dengan sasaran, prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan provinsi pada Tahun 2024.

Dalam pelaksanaannya, RKPD 2024 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di provinsi Kalimantan Selatan. Kaidah dan prinsip tersebut adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan





- (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
  3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
  4. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD untuk itu RKPD perlu dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Provinsi Kalimantan Selatan.
  5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
  6. Seluruh perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dengan demikian diharapkan juga tujuan inti pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud secara efisien dan efektif.

Akhir kata, implementasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan pelaksanaan arah kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen ini agar dapat mencapai visi **"Kalimantan Selatan**





**MAJU (Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara”.**

**GUBERNUR KALIMANTAN  
SELATAN,**

ttd.

**SAHBIRIN NOOR**





---

**RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
2024**